Republik Indonesia

LKPP

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2019

(*Audited*)

Juni 2020



Republik Indonesia

LKPP

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2019

(*Audited*)

Juni 2020

Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.

LKPP Tahun 2019 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2019 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2019 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang belum mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian".
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Menyebarluaskan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
5. Memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan/atau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya.
6. Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
7. Mendorong dan melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK terutama kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meningkatkan pengendalian subsidi dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai/tepat sasaran.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik.

Jakarta, Juni 2020
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

Republik Indonesia

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2019 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2019 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, Juni 2020

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Republik Indonesia

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496,31 triliun atau 91,55 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 812,97 triliun atau 98,33 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp348,65 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,39 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(Rp Triliun)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2019 (*Audited*)			Realisasi TA 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	**2.165,11**	**1.960,63**	**90,56**	**1.943,67**
Belanja Negara:	**2.461,11**	**2.309,28**	**93,83**	**2.213,11**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,33	1.496,31	91,55	1.455,32
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,77	812,97	98,33	757,79
Surplus (Defisit) Anggaran	**(296,00)**	**(348,65)**	**117,79**	**(269,44)**
Pembiayaan Neto	**296,00**	**402,05**	**135,83**	**305,69**
SiLPA (SiKPA)		**53,39**		**36,24**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53,27 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp931,27 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp212,582 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun 2019 (*Audited*)	Tahun 2018 (*Audited*)
A	**SAL awal**	**175,24**	**138.35**
B	**Penggunaan SAL**	**(15,00)**	-
C	**SiLPA/SiKPA**	**53,39**	**36.24**
D	**Penyesuaian SAL**	**0,94**	**0,63**
E	**SAL akhir (A + B + C + D)**	**212,69**	**175.24**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.467,53 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,22 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp704,68 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.635,53 triliun. Dengan Demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.127,31 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
Aset		
Aset Lancar	**491,86**	437,87
Investasi Jangka Panjang	3.001,20	2.877,28
Aset Tetap	5.949,59	1.931,05
Piutang Jangka Panjang	56,88	57,18
Aset Lainnya	967,98	1.021,88
Total Aset	**10.467,53**	**6.325,28**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	704,68	750,50
Kewajiban Jangka Panjang	4.635,53	4.166,97
Total Kewajiban	**5.340,22**	**4.917,47**
Ekuitas	**5.127,31**	**1.407,80**
Total Kewajiban dan Ekuitas	**10.467,53**	**6.325,28**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.168,93 triliun, Beban sebesar Rp2.422,81 triliun, sedangkan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4,65 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp 249,22 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
1	Pendapatan-LO	2.168,93	2.169,15
2	Beban	(2.422,81)	(2.249,59)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(253,88)	(80,43)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4,65	(145,29)
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus/(Defisit) LO**	**(249,22)**	**(225,73)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp240,15 triliun. Selama TA 2019 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp171,15 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp225,92 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp41,42 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,64 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp235,47 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp234,18 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp166,17 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3,95 triliun, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp10,81 triliun, Kas dan Bank BLU yang belum disahkan sebesar Rp3,93 juta, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp20,05 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp52,49 juta sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp208,96 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp triliun)

Uraian	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
Saldo Awal Kas	**240,15**	**208,50**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(171,15)	(85,60)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(225,92)	(245,13)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450,48	366,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(41,42)	(5,37)
Pengunaan SAL	(15,00)	-
Penyesuaian Pembukuan	(1,64)	0,77
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	**(4,67)**	**31,64**
Saldo Akhir Kas	**235,47**	**240,15**
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,23	0,28
Kas di Bendahara Penerimaan	0,16	0,09
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	3,95	2,91
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(10,81)	(6,21)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,00	-
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(20,05)	(58,60)
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**208,96**	**178,62**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.407,80 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp249,22 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.968,33 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,4 Triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp5.127,31 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(Rp triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
1	**Ekuitas Awal**	**1.407,80**	**1.540,78**
2	Surplus/Defisit LO	(249,22)	(225,73)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	3.968,33	91,24
4	Transaksi Antar Entitas	0,4	0,51
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	-
6	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**3.719,50**	**(132,97)**
7	**Ekuitas Akhir**	**5.127,31**	**1.407,80**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

Republik Indonesia

PERNYATAAN OPINI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19b/LHP/XV/06/2020 dan Nomor 19c/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 15 Juni 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.
Anggota
Register Negara Akuntan No. RNA 21943

Republik Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iv
RINGKASAN v
PERNYATAAN OPINI x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GRAFIK xiv
I. LAPORAN REALISASI APBN 1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 4
III. NERACA 5
IV. LAPORAN OPERASIONAL 8
V. LAPORAN ARUS KAS 11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 14
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 15
A. PENJELASAN UMUM 15
A.1. DASAR HUKUM 15
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 15
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 58
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 63
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 86
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 86
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 87
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 118
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 128
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 135
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 135
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA 136
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA 224
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 288
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL 288
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 288
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 322
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 322
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 325
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 347
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 360
INDEKS SINGKATAN 366

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2017-2019	23
2	Ikhtisar Realisasi Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018	33
3	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018	33
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dan 2018	33
5	Ringkasan APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2018	43
6	Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018	44
7	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018	46
8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Menurut Fungsi .	52
9	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2019.....	55
10	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2019	56
11	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2019 dan TA 2018	96
12	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 2018.....	131
13	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2019 dan 2018.....	227

DAFTAR GRAFIK

1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2019 16

2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global dan ASEAN-5 18

3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019 (c-to-c) 19

4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 20

5 Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2019 21

6 Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2018-Desember 2019 22

7 Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2019 24

8 Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Januari-Desember 2019 24

9 Perkembangan Cadangan Devisa Januari 2018-Desember 2019 25

10 Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2017-2019 25

11 Tren Laju IHSG *(End of Period)* Januari 2018-Desember 2019 27

12 Perkembangan *Lifting* Migas Indonesia Januari-Desember 2019 28

13 Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2018-Desember 2019 29

14 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2015-2019 30

15 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999-2019 31

16 Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2010–2019 31

17 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010–2019 32

18 Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah Tahun 2014-2019 86

19 Perkembangan Realisasi Belanja TA 2014-209 87

20 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2019 88

21 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 95

22 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2019 96

23 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2019 97

24 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 104

25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2015 – 2019 135

26 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2019 288

27 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018. 289

28 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2019 290

29 Komposisi Beban Operasional Tahun 2019 301

30 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 310

31 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas 322

Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 *(Audited)*			TA 2018 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**1.786.378.650.376.000**	**1.546.141.893.392.193**	86,55%	**1.518.789.777.151.030**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.743.056.850.376.000	1.505.088.202.287.697	86,35%	1.472.907.964.370.352
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	43.321.800.000.000	41.053.691.104.496	94,76%	45.881.812.780.678
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**378.297.855.438.000**	**408.994.346.200.875**	108,11%	**409.320.239.488.446**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	190.754.771.994.000	154.895.286.766.287	81,20%	180.592.649.823.641
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	45.589.300.000.000	80.726.119.206.790	177,07%	45.060.521.375.969
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	94.069.331.600.000	124.503.627.232.432	132,35%	128.574.010.038.218
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	47.884.451.844.000	48.869.312.995.366	102,06%	55.093.058.250.618
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**435.310.000.000**	**5.497.343.992.921**	**1262,86%**	**15.564.860.239.320**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III+A.IV)		**2.165.111.815.814.000**	**1.960.633.583.585.989**	**90,56%**	**1.943.674.876.878.796**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.634.339.518.949.000**	**1.496.313.886.364.770**	**91,55%**	**1.455.324.879.227.617**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	381.561.093.432.000	376.074.259.852.619	98,56%	346.890.764.906.966
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	345.230.681.636.000	334.418.207.630.784	96,87%	347.468.335.110.569
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	189.343.197.146.000	177.841.479.636.714	93,93%	184.127.627.500.274
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	275.885.267.880.000	275.521.165.410.219	99,87%	257.952.028.141.279
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	224.320.857.116.000	201.802.566.846.111	89,96%	216.883.304.115.301
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.940.650.000.000	6.476.205.662.045	333,71%	1.520.560.988.285
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	102.055.516.233.000	112.480.254.777.629	110,21%	84.318.412.919.513
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	114.002.255.506.000	11.699.746.548.649	10,26%	16.163.845.545.430
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**B.2.2.2**	**826.772.533.532.000**	**812.973.423.142.613**	**98,33%**	**757.792.938.057.379**
Transfer ke Daerah	**B.2.2.2.1**	**756.772.533.532.000**	**743.159.274.663.614**	**98,20%**	**697.933.529.448.104**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1.1**	**724.592.590.224.000**	**711.284.883.866.614**	**98,16%**	**668.643.196.262.104**
Dana Transfer Umum	**B.2.2.2.1.1.1**	**524.223.746.621.000**	**524.890.210.970.419**	**100,13%**	**495.193.618.043.420**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 *(Audited)*			TA 2018 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	106.350.163.929.000	103.979.972.414.419	97,77%	93.704.038.394.420
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	417.873.582.692.000	420.910.238.556.000	100,73%	401.489.579.649.000
Dana Transfer Khusus	**B.2.2.2.1.1.2**	**200.368.843.603.000**	**186.394.672.896.195**	**93,03%**	**173.449.578.218.684**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	69.326.700.000.000	64.165.654.543.270	92,56%	58.149.298.269.245
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	131.042.143.603.000	122.229.018.352.925	93,27%	115.300.279.949.439
2. Dana Insentif Daerah	**B.2.2.2.1.2**	**10.000.000.000.000**	**9.694.447.489.000**	**96,94%**	**8.230.750.000.000**
3. Dana Keistimewaan DIY	**B.2.2.2.1.3**	**1.200.000.000.000**	**1.200.000.000.000**	**100,00%**	**1.000.000.000.000**
4. Dana Otonomi Khusus	**B.2.2.2.1.4**	**20.979.943.308.000**	**20.979.943.308.000**	**100,00%**	**20.059.583.186.000**
Dana Desa	**B.2.2.2.2**	**70.000.000.000.000**	**69.814.148.478.999**	**99,73%**	**59.859.408.609.275**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**2.461.112.052.481.000**	**2.309.287.309.507.383**	**93,83%**	**2.213.117.817.284.996**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(296.000.236.667.000)**	**(348.653.725.921.394)**	**117,79%**	**(269.442.940.406.200)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**332.769.652.580.000**	**419.550.747.504.799**	**126,08%**	**302.515.788.492.391**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00%	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	4.229.683.534.000	4.438.174.482.674	104,93%	4.829.999.737.177
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3		179.982.155.162		163.619.880.616
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	388.957.891.000.000	446.288.601.121.614	114,74%	358.398.491.544.783
Penerimaan Surat Berharga Negara			921.482.794.531.714		782.313.242.271.401
Pengeluaran Surat Berharga Negara			475.194.193.410.100		423.914.750.726.618
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	482.419.505.000	3.032.970.134.099	628,70%	1.353.818.791.215
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		1.956.367.535.000	4.242.231.101.525	216,84%	2.429.387.504.746
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.473.948.030.000	1.209.260.967.426	82,04%	1.075.568.713.531
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(55.900.341.459.000)	(44.388.980.388.750)	79,41%	(46.113.826.461.400)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 *(Audited)*			TA 2018 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7				(1.121.315.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(20.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	25,00%	(15.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9				5.000.000.000
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(36.769.415.913.000)**	**(17.499.237.319.548)**	**47,59%**	**3.176.809.376.629**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	60.280.479.702.000	74.210.001.746.454	123,11%	88.609.746.474.180
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	30.000.000.000.000	36.717.630.284.048	122,39%	50.625.053.600.000
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	30.280.479.702.000	37.492.371.462.406	123,82%	37.984.692.874.180
2. Pemberian Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(6.579.688.511.000)	(5.716.481.102.380)	86,88%	(9.099.739.735.235)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(90.470.207.104.000)	(85.992.757.963.622)	95,05%	(76.333.197.362.316)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**296.000.236.667.000**	**402.051.510.185.251**	**135,83%**	**305.692.597.869.020**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	**B.2.5**		**53.397.784.263.857**		**36.249.657.462.820**

Republik Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	**(15.000.000.000.000)**	-
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	**53.397.784.263.857**	**36.249.657.462.820**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**213.639.499.948.503**	**174.602.673.316.418**
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(1.666.230.746.416)	819.451.289.822
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	725.105.589.691	(180.408.921.594)
Total Penyesuaian SAL		**(941.125.156.725)**	**639.042.368.228**
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**

Republik Indonesia

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
ASET	**D.2.1**		
Aset Lancar	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	52.495.330	465
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	234.188.766.627	285.150.273.469
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	166.170.010.917	92.280.796.378
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	5.591.063.945.100	3.638.728.687.898
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	45.736.358.514.505	48.795.152.993.771
Jumlah Kas dan Setara Kas		208.962.960.718.114	178.625.211.629.388
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	5.455.736.715	106.939.618.970
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	34.972.003.392.136	31.026.237.178.411
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	3.028.979.606.205	637.147.289.481
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	94.699.061.189.535	81.477.055.227.031
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	166.256.763.245.523	176.243.261.284.193
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	9.717.488.844	10.541.206.650
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	135.727.647.729	132.923.950.960
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	23.110.067.194.249	23.609.406.852.881
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.197.466.897.279	6.295.339.227.189
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	7.496.739.323.375	7.520.013.178.234
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	912.908.715	230.659.224
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.1.1.6.9	-	775.312.000.000
Jumlah Piutang (Bruto)		297.906.455.895.249	296.064.083.586.362
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.10	(187.276.271.979.301)	(187.387.119.210.777)
Jumlah Piutang (Bersih)		110.630.183.915.948	108.676.964.375.585
Persediaan	D.2.1.1.7	123.450.089.924.835	112.590.656.928.185
Jumlah Aset Lancar		**491.867.510.128.337**	**437.878.646.078.602**
Investasi Jangka Panjang	**D.2.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	47.117.342.143.810	38.751.152.041.474
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.120.492.707.453)	(1.015.195.857.543)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		45.996.849.436.357	37.735.956.183.931
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	51.422.761.195.268	46.347.382.486.948
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(256.632.185.268)	(303.374.618.948)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		51.166.129.010.000	46.044.007.868.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		97.162.978.446.357	83.779.964.051.931
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.397.253.380.483.284	2.286.384.989.214.962
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.913.486.508	8.743.190.882
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	506.775.859.457.526	507.109.135.609.757
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.904.038.153.427.318	2.793.502.868.015.601
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**3.001.201.131.873.675**	**2.877.282.832.067.532**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
Aset Tetap	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	4.565.754.448.540.161	1.018.648.023.083.736
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	643.684.366.617.610	590.286.694.016.479
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	365.443.028.479.378	287.028.466.749.583
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	852.163.469.354.018	593.241.196.851.828
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	50.631.130.262.102	55.538.219.173.610
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	137.288.502.462.037	130.585.126.268.737
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		**6.614.964.945.715.306**	**2.675.327.726.143.973**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(665.369.543.223.892)	(744.276.685.956.335)
Jumlah Aset Tetap		**5.949.595.402.491.414**	**1.931.051.040.187.638**
Piutang Jangka Panjang	**D.2.1.4**		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	85.835.295.500	95.661.712.269
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	179.183.980.687	163.209.394.539
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.3	57.465.257.010.430	57.777.575.276.481
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.4	2.837.258.148.580	2.566.599.689.666
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		**60.567.534.435.197**	**60.603.046.072.955**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.5	(3.678.558.906.969)	(3.414.291.568.549)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**56.888.975.528.228**	**57.188.754.504.406**
Aset Lainnya	**D.2.1.5**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	290.379.621.425.039	142.696.848.159.921
Aset Tak Berwujud	D.2.1.5.2	39.697.831.857.235	35.776.524.869.463
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	192.908.799.354.854	212.155.787.167.225
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	4.449.053.184.785	4.449.043.145.097
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	53.731.897.004.834	57.173.480.419.942
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	671.202.165.882.987	843.100.479.849.556
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	11.808.679.526.194	10.482.359.272.377
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		**1.264.178.048.235.928**	**1.305.834.522.883.581**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.8	(281.071.678.085.183)	(271.738.387.743.944)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(15.124.922.825.166)	(12.211.622.116.245)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**967.981.447.325.579**	**1.021.884.513.023.392**
JUMLAH ASET		**10.467.534.467.347.233**	**6.325.285.785.861.570**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	130.742.404.048.899	99.881.440.679.615
Utang Bunga	D.2.2.1.3	67.847.210.447.268	63.568.707.486.877
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	11.234.735.172.695	30.130.298.770.683
Utang Transfer	D.2.2.1.5	48.735.153.480.379	42.508.894.037.204
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	316.317.377.496.950	368.352.663.805.325
Unamortized Discount		(127.084.431.000)	(101.251.794.000)
Unamortized Premium		215.059.457.000	78.266.476.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000
Unamortized Discount		(1.134.143.215.000)	(1.664.040.194.000)
Unamortized Premium		-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	28.578.908.772.939	24.856.986.958.911
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	16.963.437.058.895	15.685.573.384.005
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	197.917.075.973	280.090.169.168
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	291.951.872.644	32.878.446.202
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**704.682.072.672.981**	**750.502.434.401.484**
Kewajiban Jangka Panjang	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	8.663.939.872.341	5.724.587.516.213
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	3.714.851.256.058.415	3.231.655.441.684.556
Unamortized Discount		(37.092.489.249.000)	(34.929.436.432.000)
Unamortized Premium		38.946.454.751.000	35.276.299.121.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	-	43.314.553.530.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	669.808.470.045	5.326.890.009.308
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	224.737.743.429.342	154.619.584.439.818
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	16.988.193.854.354	11.627.039.378.875
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.967.764.907.186.497	3.452.614.959.247.770
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	667.750.107.263.114	714.334.793.186.942
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	24.499.064.239	25.374.379.633
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		667.774.606.327.353	714.360.167.566.575
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**4.635.539.513.513.850**	**4.166.975.126.814.345**
JUMLAH KEWAJIBAN		**5.340.221.586.186.831**	**4.917.477.561.215.829**
EKUITAS	**D.2.3**	**5.127.312.881.160.402**	**1.407.808.224.645.741**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**10.467.534.467.347.233**	**6.325.285.785.861.570**

Republik Indonesia

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2019 (*Audited*)	2018 (*Audited*)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	**E.2.1**				
PENDAPATAN OPERASIONAL	**E.2.1.1**				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	**E.2.1.1.1**				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	790.341.321.171.014	731.838.117.941.363	58.503.203.229.651	7,99%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	534.938.702.155.774	526.856.640.020.385	8.082.062.135.389	1,53%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	21.627.658.921.437	20.136.546.791.758	1.491.112.129.679	7,41%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	181.009.918.441.271	168.411.747.414.517	12.598.171.026.754	7,48%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	8.600.854.484.661	6.796.688.674.946	1.804.165.809.715	26,54%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	37.560.846.208.126	39.464.702.540.677	(1.903.856.332.551)	(4,82%)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	3.432.159.153.269	6.665.716.676.905	(3.233.557.523.636)	(48,51%)
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	22.422.050.495	(27.142.816.314)	49.564.866.809	182,61%
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.577.533.882.586.047**	**1.500.143.017.244.237**	**77.390.865.341.810**	**5,16%**
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**E.2.1.1.2**				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	172.627.170.700.849	211.849.605.126.532	(39.222.434.425.683)	(18,51%)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	237.410.883.862.102	239.499.611.090.293	(2.088.727.228.191)	(0,87%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	116.779.973.933.458	136.947.279.857.210	(20.167.305.923.752)	(14,73%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	50.274.215.346.364	56.528.281.085.047	(6.254.065.738.683)	(11,06%)
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		**577.092.243.842.773**	**644.824.777.159.082**	**(67.732.533.316.309)**	**(10,50%)**
PENDAPATAN HIBAH	**E.2.1.1.3**				
Pendapatan Hibah		14.304.684.937.017	24.183.418.585.460	(9.878.733.648.443)	(40,85%)
Jumlah Pendapatan Hibah		**14.304.684.937.017**	**24.183.418.585.460**	**(9.878.733.648.443)**	**(40,85%)**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**2.168.930.811.365.837**	**2.169.151.212.988.779**	**(220.401.622.942)**	**(0,01%)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2019 (*Audited*)	2018 (*Audited*)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL	**E.2.1.2**				
Beban Pegawai	**E.2.1.2.1**	382.251.096.849.470	351.169.184.831.245	31.081.912.018.225	8,85%
Beban Persediaan	**E.2.1.2.2**	33.410.271.463.784	29.932.790.690.126	3.477.480.773.658	11,62%
Beban Barang dan Jasa	**E.2.1.2.3**	171.429.131.951.638	175.351.118.265.689	(3.921.986.314.051)	(2,24%)
Beban Pemeliharaan	**E.2.1.2.4**	29.105.984.972.258	37.434.658.112.329	(8.328.673.140.071)	(22,25%)
Beban Perjalanan Dinas	**E.2.1.2.5**	46.036.396.023.330	43.791.723.031.484	2.244.672.991.846	5,13%
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	**E.2.1.2.6**	57.402.680.361.704	40.361.271.228.799	17.041.409.132.905	42,22%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	**E.2.1.2.7**	277.233.309.943.610	244.805.005.384.622	32.428.304.558.988	13,25%
Beban Subsidi	**E.2.1.2.8**	189.329.386.425.202	196.719.559.440.096	(7.390.173.014.894)	(3,76%)
Beban Hibah	**E.2.1.2.9**	6.476.207.286.209	1.520.560.988.285	4.955.646.297.924	325,91%
Beban Bantuan Sosial	**E.2.1.2.10**	107.813.615.472.422	82.465.242.445.242	25.348.373.027.180	30,74%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**E.2.1.2.11**	812.767.334.158.535	769.694.450.184.060	43.072.883.974.475	5,60%
Beban Lain-lain	**E.2.1.2.12**	59.257.426.487.116	79.829.317.279.532	(20.571.890.792.416)	(25,77%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**E.2.1.2.13**	239.427.708.843.197	172.046.636.562.132	67.381.072.281.065	39,16%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**E.2.1.2.14**	10.875.248.501.843	24.468.561.489.547	(13.593.312.987.704)	(55,55%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**2.422.815.798.740.318**	**2.249.590.079.933.188**	**173.225.718.807.130**	**7,70%**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(253.884.987.374.481)**	**(80.438.866.944.409)**	**(173.446.120.430.07**	**215,62%**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**E.2.2**				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	**E.2.2.1**				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**E.2.2.1.1**	480.763.876.297	392.274.523.533	88.489.352.764	22,56%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	**E.2.2.1.2**	6.376.631.896.948	4.922.299.920.406	1.454.331.976.542	29,55%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(5.895.868.020.651)**	**(4.530.025.396.873)**	**(1.365.842.623.778)**	**30,15%**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2019 (*Audited*)	2018 (*Audited*)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**E.2.2.2**				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**E.2.2.2.1**	5.807.000.000	-	5.807.000.000	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**E.2.2.2.2**	383.890.000.000	2.787.500.000	381.102.500.000	13.671,84%
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		**(378.083.000.000)**	**(2.787.500.000)**	**(375.295.500.000)**	**13.463,52%**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**E.2.2.3**				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**E.2.2.3.1**	125.751.731.865.679	59.843.747.196.323	65.907.984.669.356	110,13%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**E.2.2.3.2**	114.819.433.041.760	200.602.170.591.376	(85.782.737.549.616)	(42,76%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**10.932.298.823.919**	**(140.758.423.395.053)**	**151.690.722.218.972**	**(107,77%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**4.658.347.803.268**	**(145.291.236.291.926)**	**149.949.584.095.194**	**(103,21%)**
POS LUAR BIASA	**E.2.3**				
Pendapatan Luar Biasa	**E.2.3.1**	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	**E.2.3.2**	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**-**	**-**		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(249.226.639.571.213)**	**(225.730.103.236.335)**	**23.496.536.334.878**	**10,41%**



Republik Indonesia

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.1.1**		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	772.265.718.286.668	749.977.029.683.808
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	-	32.748.454
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	7.677.349.834.950	6.629.526.207.843
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	41.053.691.104.496	45.881.812.780.678
Total Penerimaan Perpajakan		1.546.141.893.392.193	1.518.789.777.151.030
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	80.726.119.206.790	45.060.521.375.969
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	124.157.596.399.650	128.282.486.329.481
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	48.869.312.995.366	55.093.058.250.618
Total PNBP		408.648.315.368.093	409.028.715.779.709
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	5.497.343.992.921	15.564.860.239.320
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.960.287.552.753.207**	**1.943.383.353.170.059**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.1.2**		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	376.074.259.852.619	346.890.764.906.966
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	334.418.207.630.784	347.468.335.110.569
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	275.521.165.410.219	257.952.028.141.279
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	201.802.566.846.111	216.883.304.115.301
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	6.476.205.662.045	1.520.560.988.285
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	112.480.254.777.629	84.318.412.919.513
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	11.699.746.548.649	16.163.845.545.430
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	39.158.751.141.991	45.695.178.904.793
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	61.684.868.346.770	45.086.668.324.382
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	3.136.352.925.658	2.922.191.165.245
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	420.910.238.556.000	401.489.579.649.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	64.165.654.543.270	58.149.298.269.245
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	31.874.390.797.000	29.290.333.186.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	122.229.018.352.925	115.300.279.949.439
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	69.814.148.478.999	59.859.408.609.275
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**2.131.445.829.870.669**	**2.028.990.189.784.722**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**(171.158.277.117.462)**	**(85.606.836.614.663)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	346.030.832.782	291.523.708.737
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	179.982.155.162	163.619.880.616
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	1.376.096.205.074	-
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	775.311.999.999	775.312.000.001
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**2.677.421.193.017**	**1.230.455.589.354**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.2.2**		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	177.841.479.636.714	184.127.627.500.274
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	5.000.000.000.000	15.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	8.200.000.000.000	5.530.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	23.565.076.593.824	9.431.096.461.400
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	14.000.000.000.000	32.274.045.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**228.606.556.230.538**	**246.362.768.961.674**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		**(225.929.135.037.521)**	**(245.132.313.372.320)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.3.1**		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	940.725.025.633.239	784.742.629.776.147
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	74.210.001.746.454	88.609.746.474.180
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	3.662.862.482.675	4.054.687.737.176
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	-	5.000.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.018.597.889.862.368**	**877.412.063.987.503**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.3.2**		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	476.403.454.377.526	424.990.319.440.149
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	85.992.757.963.622	76.333.197.362.316
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*	F.2.3.2.3	5.716.481.102.380	9.099.739.735.235
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**568.112.693.443.528**	**510.423.256.537.700**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		**450.485.196.418.840**	**366.988.807.449.803**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	2.817.768.874.869	3.498.307.513.555
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(45.959.771.656.851)	(8.693.890.485.382)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	(52.495.332)	330.588.756.176
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(41.425.640.178.382)**	**(5.378.953.624.562)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		**11.972.144.085.475**	**30.870.703.838.258**
Penggunaan SAL		(15.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan		(1.647.087.428.577)	775.775.692.984
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	**(4.674.943.343.102)**	**31.646.479.531.242**
SALDO AWAL KAS	F.1.1	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**
SALDO AKHIR KAS		**235.477.658.828.423**	**240.152.602.171.525**
Kas di Bendahara Pengeluaran		**234.188.766.627**	**285.150.273.469**
Kas di Bendahara Penerimaan		**166.170.010.917**	**92.280.796.378**
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		**3.956.502.008.861**	**2.911.840.057.154**
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		**(10.817.836.834.384)**	**(6.215.489.058.582)**
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		**(3.932.640)**	**-**
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		**(20.053.770.625.020)**	**(58.601.172.611.021)**
Kas Transito (Kiriman Uang)		**52.495.330**	**465**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	**208.962.960.718.114**	**178.625.211.629.388**



Republik Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
EKUITAS AWAL	G.1	**1.407.808.224.645.741**	**1.540.783.656.928.940**
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	**(249.226.639.571.213)**	**(225.730.103.236.335)**
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	-	273.314.147.911
Penyesuaian SiLPA	G.3.2	(1.304.223.887.208)	1.501.069.710.656
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.3	4.175.849.408.082	6.005.920.659.013
Revaluasi Aset Tetap	G.3.4	4.113.213.336.254.225	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.5	(82.075.076.826.694)	(6.758.324.262.623)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.6	(7.901.610.374.191)	-
Koreksi Lainnya	G.3.7	(57.777.054.738.064)	91.219.517.945.695
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		**3.968.331.219.836.150**	**92.241.498.200.652**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	**400.076.249.724**	**513.172.752.484**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	**3.719.504.656.514.661**	**(132.975.432.283.199)**
EKUITAS AKHIR	G.6	**5.127.312.881.160.402**	**1.407.808.224.645.741**

Republik Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

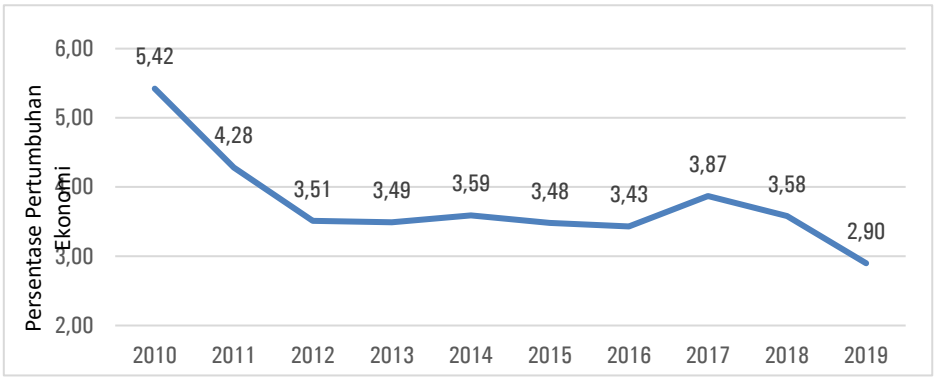
A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian global tahun 2019 cenderung mengalami pelemahan akibat tekanan perang dagang AS dan Tiongkok serta isu geopolitik dan isu lainnya sehingga berada pada kisaran 2,90 persen.

Laju perekonomian global cenderung mengalami tekanan sejak berlangsungnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Perang dagang kedua negara raksasa ekonomi dunia tersebut mendorong timbulnya kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian masa depan perekonomian global sehingga menekan pertumbuhan ekonomi global. Sentimen negatif pada perekonomian global dirasakan sepanjang tahun 2019. Isu pengenaan tarif impor baru dari kedua belah pihak, dugaan *currency manipulation* yang dituduhkan oleh AS kepada Tiongkok untuk melemahkan nilai mata uang yuan terhadap dolar AS, serta langkah intervensi AS terhadap isu kebijakan ekstradisi di Hong Kong mendorong dinamika hubungan antara AS dan Tiongkok yang akhirnya mendorong perekonomian global semakin tertekan. Selain isu ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok, beberapa faktor lain turut menekan laju perekonomian global antara lain isu ketegangan geopolitik di beberapa wilayah seperti Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian pada harga minyak dunia, kekhawatiran atas dampak keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (*British Exit/Brexit*) bagi ekonomi kawasan, serta penurunan produktivitas ekonomi di beberapa negara maju akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk usia lanjut (*aging population demography*).

Rilis data *World Economic Outlook* (WEO) *update* Januari 2019 memberi sinyal pelemahan atas laju perekonomian global dimana pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diproyeksikan berada pada 3,50 persen, setelah pada tahun 2018 berada pada kisaran 3,60 persen. Selanjutnya, pada rilis data WEO *update* April 2019, pertumbuhan ekonomi global kembali terkoreksi menjadi kisaran 3,30 persen. Pelemahan tersebut terus berlanjut hingga Semester II 2019 yang merespon kondisi ketidakpastian global terhadap ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok yang tensinya kembali meningkat. Rilis data WEO Oktober 2019 mencatat pelemahan ekonomi global yang semakin dalam dengan nilai pertumbuhan berada di kisaran 3,00 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi global terendah sejak krisis keuangan global di tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi global hingga akhir tahun 2019 terus mencatatkan pelemahan. Berdasarkan rilis data WEO *Update* April 2020 nilai pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 kembali terkoreksi hingga berada pada kisaran 2,90 persen, walaupun di penghujung tahun 2019 beberapa isu berhasil mendorong peningkatan sentimen positif pasar, antara lain sinyal peningkatan aktivitas perdagangan global, upaya perbaikan perundingan dagang AS dan Tiongkok, serta penurunan kekhawatiran pasar terhadap isu *Brexit*.

Grafik 1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2019
(dalam persen, *yoy*)



Sumber: International Monetary Fund

Pasar global memberikan sinyal kekhawatiran atas pelemahan ekonomi AS sebagai dampak dari tensi perang dagang dengan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS tahun 2019 tercatat berada pada kisaran 2,30 persen yang mengalami penurunan dari pertumbuhan tahun 2018 sebesar 2,90 persen. Kondisi ketidakpastian perekonomian global juga mendorong penurunan investasi. Indikasi penurunan investasi tersebut diperkuat dengan kurva imbal hasil terbalik (*inverted yield curve*) atas surat berharga Pemerintah AS bertenor pendek yang lebih tinggi daripada tenor jangka panjangnya. Sebagai langkah antisipasi untuk merespon pelemahan ekonomi yang semakin dalam, AS melakukan pelonggaran moneter melalui keputusan The Fed menurunkan suku bunga acuan pada bulan Juli, September, dan Oktober 2019 secara kumulatif sebesar 75 bps menjadi rentang 1,50 hingga 1,75 persen.

Perlambatan ekonomi AS sebagai salah satu mitra dagang yang penting bagi Eropa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya penurunan aktivitas produksi yang disertai dengan turunnya nilai perdagangan antar US dan Eropa yang menyebabkan turunnya permintaan global. Pada WEO *Update* April 2020, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa sebesar 1,20 persen, yang menurun dari tahun 2018 sebesar 1,90 persen. Selain dampak perang dagang, perlambatan ekonomi Eropa juga dipicu oleh kondisi tarik ulur penyelesaian status Inggris keluar dari Zona Uni Eropa (*Brexit*) setelah Inggris dan Uni Eropa menyepakati perpanjangan waktu penyelesaian *Brexit*.

Selain isu Brexit, empat negara dengan perekonomian terbesar di Kawasan Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agregat pada Kawasan Eropa. Dari empat negara tersebut, Spanyol memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif baik yaitu sebesar 2,00 persen, walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2018 sebesar 2,40 persen. Pertumbuhan ekonomi Spanyol antara lain didorong oleh aktivitas pariwisata yang relatif stabil.

Selanjutnya, Jerman sebagai salah satu negara manufaktur Eropa mengalami pelemahan ekonomi yang cukup dalam, dimana pada tahun 2019 berada pada kisaran 0,60 persen, setelah pada tahun 2018 berada pada kisaran 1,50 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Jerman tersebut antara lain sebagai dampak dari implementasi kebijakan standar emisi baru yang menekan permintaan dari industri otomotif. Perancis juga mengalami kondisi yang relatif sama dengan Jerman di mana tingkat permintaan eksternal mengalami penurunan karena dampak pelemahan global sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Perancis berada pada kisaran 1,30 persen, atau turun sebesar 0,40 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 1,70 persen.

Kemudian, Italia juga belum mampu bangkit dari keterpurukan. Nilai utang negara Italia yang meningkat memberikan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal tersebut telah digarisbawahi oleh IMF di mana pertumbuhan ekonomi Italia menurun dari 0,80 persen pada tahun 2018 hingga menjadi 0,30 persen di tahun 2019. Tingkat konsumsi dalam negeri yang menurun juga turut mendorong pelemahan ekonomi Italia.

Selanjutnya, di kawasan Asia, pelemahan ekonomi global juga turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah Asia, termasuk beberapa negara besarnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menghadapi langsung ketegangan perang dagang dengan AS berada pada kisaran 6,10 persen, yang menurun dari tahun 2018 sebesar 6,75 persen. Peningkatan tarif impor serta penurunan tingkat permintaan komoditas turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Tiongkok.

Selanjutnya, negara India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia juga menghadapi perlambatan ekonomi domestik tahun 2019. WEO *Update* April 2020 mencatat pertumbuhan ekonomi India berada pada kisaran 4,20 persen, menurun dari tahun 2018 sebesar 6,12 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi India antara lain dipicu oleh industri manufaktur yang cenderung stagnan karena turunnya permintaan global, serta penurunan tingkat konsumsi dalam negeri. Hasil pemilihan umum India juga belum menunjukkan dampak berarti yang mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik.

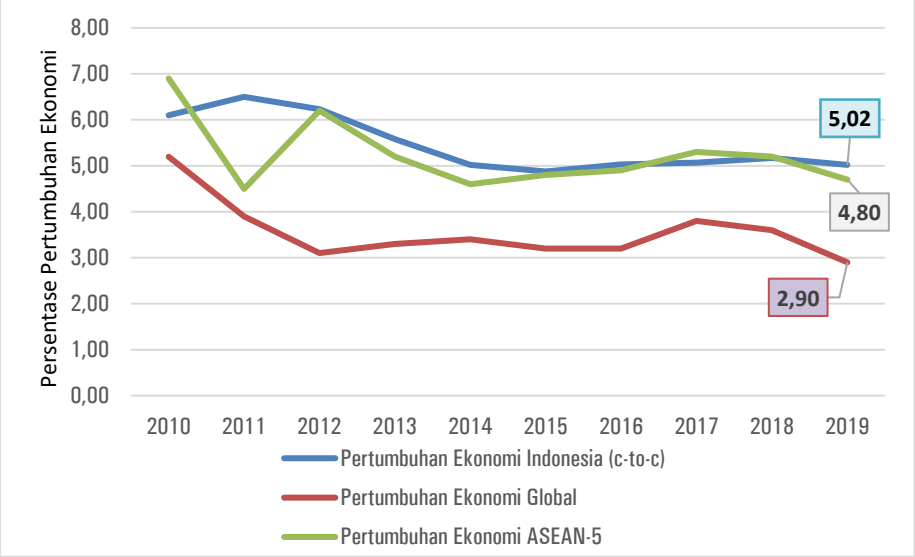
Secara umum, dampak perang dagang yang berkepanjangan semakin meningkatkan risiko ketidakpastian global yang pada akhirnya akan semakin memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi global. Melemahnya pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok sebagai dampak langsung perang dagang akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara lain, sehingga risiko pelemahan ekonomi akan semakin tinggi, khususnya negara-negara yang memiliki nilai perdagangan yang relatif besar dengan kedua negara tersebut.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia relatif stabil tumbuh 5,02 persen pada tahun 2019 di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mampu bertahan di tengah kondisi ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global yang turun semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih mampu tumbuh sebesar 5,02 persen di tengah tekanan perekonomian global, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen. Penurunan tersebut juga dialami oleh seluruh negara ASEAN-5 bersama Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Pencapaian nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 secara umum relatif lebih baik dibandingkan rata-rata perumbuhan ekonomi kawasan ASEAN-5 yang berada pada angka 4,80 persen, sebagaimana rilis data *World Economic Outlook update* April 2020. Begitu pula dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40 persen, sebagaimana rilis data *Asian Development Outlook* (ADO) April 2020. Oleh karena itu, walaupun mengalami pelemahan akibat dampak perekonomian global, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih menunjukan sinyal positif akan stabilitas perekonomian nasional.

Grafik 2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global dan ASEAN-5
(dalam persen, *yoy*)

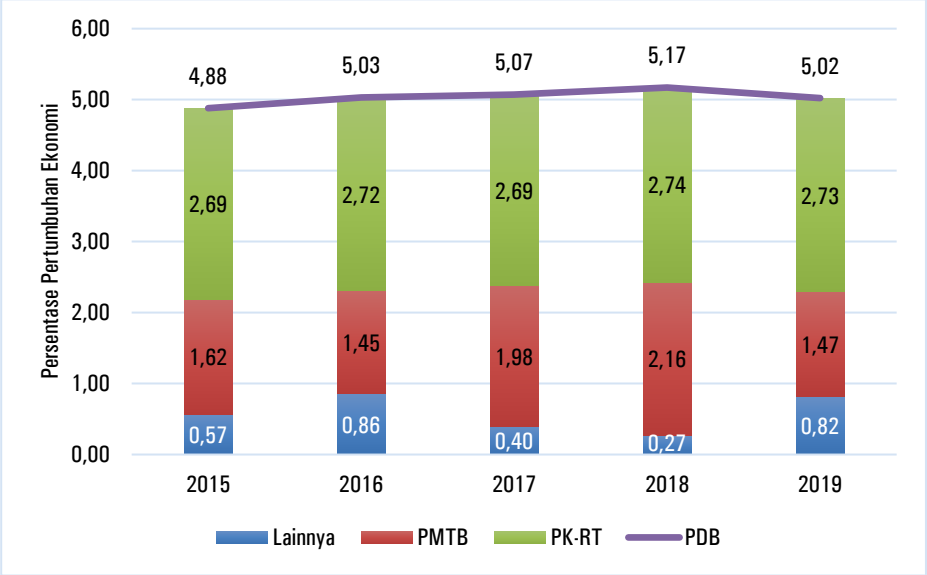


Sumber: Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 apabila dilihat dari sisi pengeluaran, menunjukkan pertumbuhan yang positif pada sejumlah komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P). Komponen pengeluaran yang memiliki sumber pertumbuhan tertinggi tahun 2019 berasal dari komponen PK-RT sebesar 2,73 persen. Kondisi tersebut relatif sama dengan periode sebelumnya dimana komponen PK-RT selama lima tahun terakhir menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi. Demikian pula dengan proporsi distribusi komponen terhadap PDB, komponen PK-RT masih mendominasi perekonomian Indonesia sebesar 56,62 persen. Hal tersebut menjadi indikasi terjaganya stabilitas konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten. Kebijakan pemerintah dalam merealisasikan sejumlah program bantuan sosial antara lain berupa Bantuan Siswa Miskin dan Program Keluarga Harapan juga dapat menyokong masyarakat khususnya untuk masyarakat

berpenghasilan rendah sehingga dapat mendukung kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik 3 di bawah.

Grafik 3.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019
(dalam persen, *yoy*)

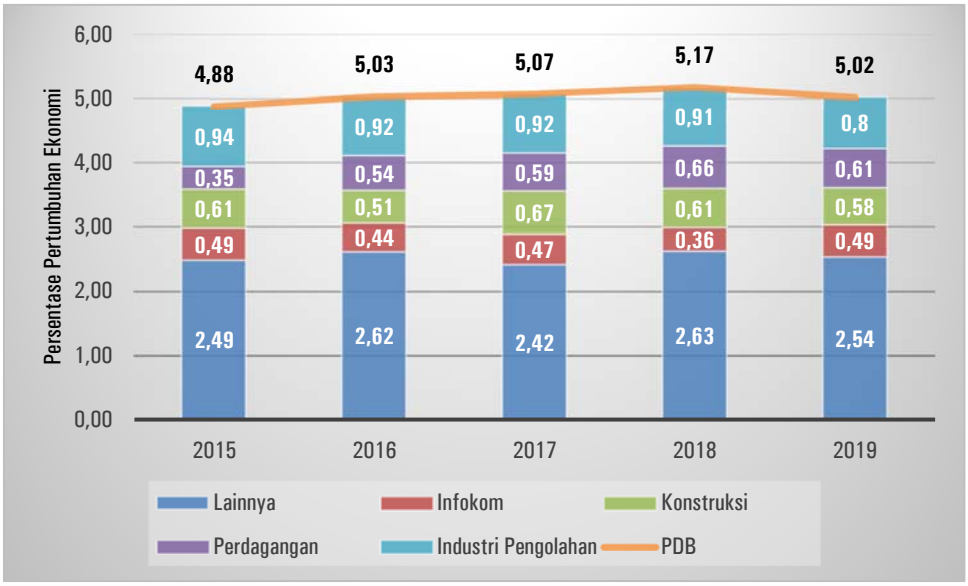


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, apabila dilihat menurut lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 yang tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 0,80 persen. Sumber pertumbuhan dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan berasal dari industri non migas seperti industri makanan dan minuman yang menyediakan barang kebutuhan bagi masyarakat. Sedangkan, industri migas masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi global. Sumber pertumbuhan dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61 persen yang mengindikasikan terjaganya jumlah permintaan terhadap barang-barang hasil pertanian dan industri pengolahan seperti makanan dan minuman, termasuk permintaan terhadap otomotif baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, sumber pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,58 persen, dan diikuti oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sedangkan, sumber pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen. Gambaran komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha adalah sebagaimana grafik 4.

Berdasarkan grafik 4, terlihat bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan selalu menjadi yang tertinggi dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang juga mendominasi sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 3. Dengan demikian, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha, perekonomian nasional ditopang secara signifikan dari aktivitas konsumsi rumah tangga sebagai pengguna akhir barang dan jasa hasil produksi. Hal tersebut sejalan dengan program-program yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat secara berkesinambungan.

Grafik 4.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi kewilayahan, komposisi dan kontribusi enam wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua relatif tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing sebesar 59,00 persen dan 21,32 persen. Hal tersebut didorong oleh stabilnya aktivitas produksi dan perdagangan di wilayah Jawa dan Sumatera.

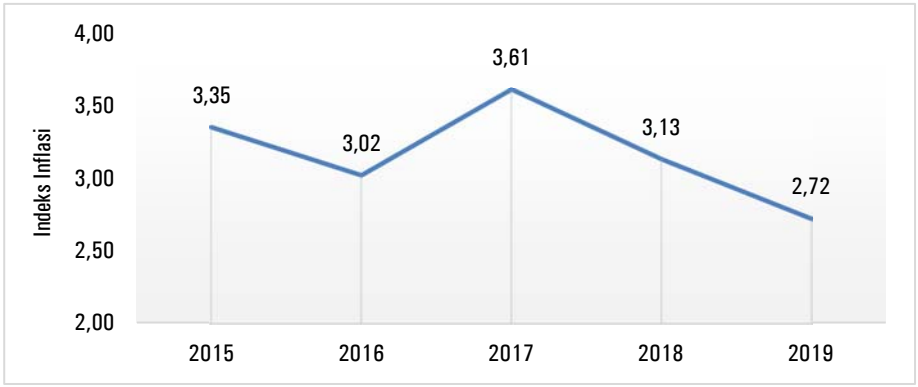
Tingkat Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,72 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 3,13 persen.

Tingkat inflasi nasional tahun 2019 dapat terjaga dengan baik dan berada pada nilai 2,72 persen. Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 3,13 persen, serta berada pada level yang terkendali di bawah target asumsi inflasi pada APBN 2019 sebesar 3,50 persen. Tingkat inflasi yang terkendali mampu menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di antaranya berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Secara umum, terkendalinya tingkat inflasi tahun 2019 didukung oleh stabilitas tingkat inflasi di seluruh komponen pembentuknya: inflasi komponen inti (*inflation core*) sebesar 3,02 persen; inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 0,51 persen; dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 4,30 persen. Pengendalian tingkat inflasi tahun 2019 juga tidak lepas dari terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran, walaupun pada beberapa periode tertentu mengalami lonjakan permintaan.

Terkendalinya tingkat inflasi sepanjang tahun 2019 tersebut diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia. Sinergi dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dilakukan untuk melaksanakan strategi yang telah tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Berdasarkan data lima tahunan, tingkat inflasi relatif terjaga dengan baik dan untuk tahun 2019 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2019
(indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi komponen inti (*inflation core*) tahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 yang memiliki nilai sebesar 3,07 persen. Kondisi inflasi inti yang relatif stabil tersebut didorong adanya apresiasi nilai tukar rupiah dan harga komoditas global yang melambat. Selain itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang relatif berjalan dengan baik selama tahun 2019 juga turut membantu terjaganya stabilitas harga dan permintaan domestik.

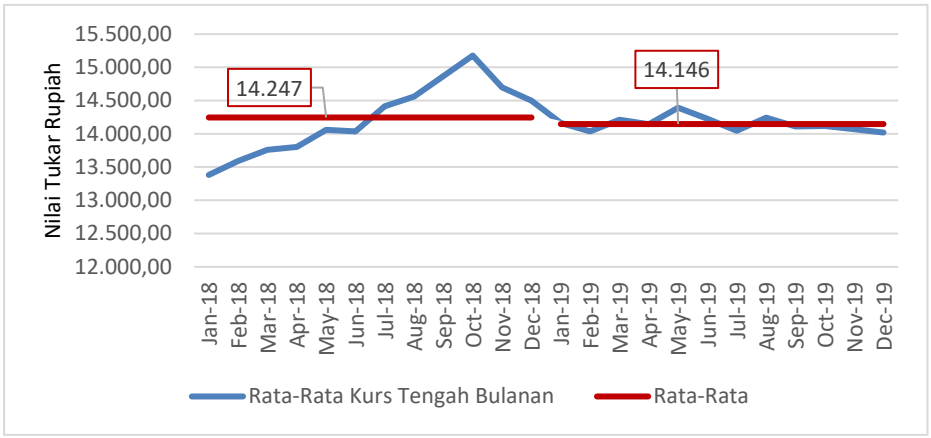
Selanjutnya, dari sisi harga diatur pemerintah, komponen inflasi tersebut juga relatif mampu dikendalikan dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjaga harga energi dalam negeri seperti harga tarif dasar listrik (TDL) dan harga bahan bakar. Tingkat inflasi komponen harga diatur pemerintah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai sebesar 3,36 persen. Sepanjang tahun 2019, inflasi komponen harga diatur pemerintah tercatat beberapa kali mengalami deflasi. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif transportasi, khususnya penurunan tarif penerbangan berbiaya rendah (*low cost carrier*/LCC) yang sempat melambung di tahun 2018. Tingkat permintaan masyarakat terhadap transportasi yang cenderung mengalami kondisi normal pasca Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah (*low season*) juga mendorong perbaikan komponen inflasi tersebut pada paruh kedua tahun 2019.

Inflasi dari komponen bergejolak (*volatile food*) tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang memiliki nilai sebesar 3,39 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh penurunan produksi beberapa komoditas akibat musim kemarau yang memiliki rentang waktu lebih panjang dibandingkan tahun 2018, seperti penurunan produksi cabai saat memasuki periode Triwulan III 2019. Selain itu, adanya gangguan distribusi akibat bencana banjir di beberapa wilayah dan meningkatnya biaya distribusi juga mendorong inflasi pada komponen bergejolak. Selanjutnya, kenaikan permintaan masyarakat secara temporer di beberapa periode hari besar keagamaan juga turut mendorong meningkatnya inflasi komponen bergejolak. Namun demikian, mitigasi untuk mengendalikan tingkat inflasi komponen bergejolak telah dilakukan sejak awal tahun, antara lain dengan menjaga pasokan beras melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang dilakukan oleh Bulog untuk menstabilisasi harga sumber makanan pokok masyarakat. Selain itu, periode panen untuk beberapa komoditas seperti bawang merah di bulan Mei, telah mendukung pengendalian tingkat inflasi. Secara umum, walaupun terjadi kenaikan pada inflasi komponen bergejolak, realisasinya masih relatif terkendali dan berada di bawah target yang ditetapkan oleh *High Level Meeting* Tim Pengendali Inflasi Pusat sebesar maksimum 5,00 persen.

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2019 sebesar Rp14.146 per dolar AS.

Sepanjang tahun 2019, rupiah cenderung mengalami penguatan sampai dengan akhir tahun. Pada pembukaan awal tahun 2019, rupiah berada pada posisi Rp14.465 per dolar AS. Sedangkan, pada penutupan akhir Desember 2019, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp13.901 per dolar AS. Selama rentang Januari-Desember 2019, posisi rupiah terendah berada pada nilai Rp14.513 per dolar AS pada penutupan 23 Mei 2019. Sedangkan, posisi tertinggi berada pada nilai Rp13.901 per dolar AS yaitu pada penutupan 31 Desember 2019. Dengan demikian, apabila dilihat secara tahunan, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 tercatat sebesar Rp14.146 per dolar AS.

Grafik 6.
Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2018–Desember 2019
(rupiah per dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Penguatan rupiah sepanjang tahun 2019 antara lain didorong oleh terjaganya pasokan valas dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, dan daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, termasuk ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda jelang akhir tahun 2019. Struktur pasar valas juga cenderung menguat antara lain ditandai dengan meningkatnya volume transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi fundamental yang tetap terjaga, serta mekanisme pasar yang semakin membaik dan keyakinan para pelaku pasar terhadap implementasi bauran kebijakan moneter dan fiskal yang dijalankan secara sinergi.

Penguatan nilai tukar rupiah mendorong dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Penguatan rupiah pada tahun 2019 juga diiringi dengan tren volatilitas yang menurun. Volatilitas rupiah pada tahun 2019 tercatat sebesar 7,00 persen atau relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 8,50 persen.

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat dan mengalami perbaikan dari tahun 2018.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat. Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar 4,68 miliar dolar AS. Nilai tersebut mengalami perbaikan dari tahun 2018 yang tercatat defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Membaiknya Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2019 tersebut tidak lepas dari berkurangnya defisit neraca transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial-dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 tercatat sebesar 30,42 miliar dolar AS atau 2,72% dari PDB, sedikit membaik jika dibandingkan tahun 2018 yang mencatat defisit sebesar 30,63 miliar dolar AS atau 2,94% dari PDB. Perbaikan defisit neraca transaksi berjalan tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 3,50 miliar dolar AS, yang sebelumnya sempat mengalami defisit di tahun 2018. Surplus neraca perdagangan barang tersebut antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah dalam melakukan pengendalian impor serta masih lemahnya permintaan domestik sebagai dampak dari moderasi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, surplus neraca perdagangan barang didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar 2,65 miliar dolar AS dan perbaikan defisit neraca perdagangan migas sebesar 1,09 miliar dolar AS. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan impor migas antara lain dilaksanakan melalui kelanjutan implementasi Program Biodiesel 20 (B20) serta kewajiban penjualan minyak mentah di dalam negeri bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Selanjutnya, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global, nilai neraca transaksi modal dan finansial tahun 2019 tercatat sebesar 36,37 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 25,22 miliar dolar AS. Prospek ekonomi Indonesia yang masih dinilai positif oleh para investor global serta aset keuangan domestik yang relatif masih memberikan imbal hasil yang menarik, telah mendorong perbaikan neraca transaksi modal dan finansial tahun 2019.

Tabel 1.
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2017-2019
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	2017*	2018*	2019
Transaksi Berjalan (*Current Account*)	(16,20)	(30,63)	(30,42)
Transaksi Modal dan Finansial (*Capital & Financial Account*)	28,73	25,22	36,37
Selisih Perhitungan Bersih (*Net Errors & Omission*)	(0,95)	(1,72)	(1,28)
Neraca Keseluruhan (*Overall Balance*)	**11,59**	**(7,13)**	**4,68**

Sumber: Bank Indonesia

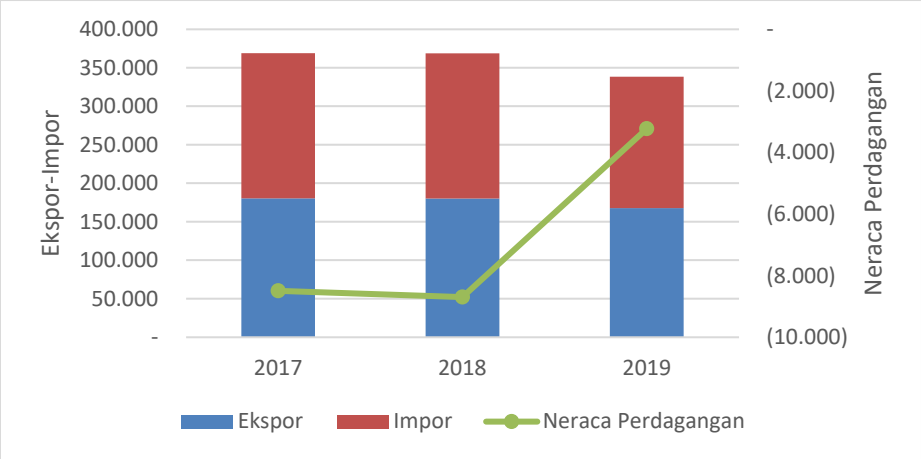
**) Keterangan: Pembaruan data berdasarkan Publikasi Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2019, tanggal 10 Februari 2020*

Akumulasi nilai ekspor sebesar 167,50 miliar dolar AS dan impor sebesar 170,73 miliar dolar AS sepanjang Januari-Desember 2019.

Perlambatan ekonomi global sepanjang tahun 2019 berdampak terhadap nilai ekspor dan impor Indonesia. Sejak awal tahun 2019, pertumbuhan ekspor dan impor telah mengalami kontraksi. Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada impor. Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2019 mencapai 167,50 miliar dolar AS yang mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi tahun 2018 sebesar 180,01 miliar dolar AS. Namun demikian, walaupun mengalami penurunan nilai, volume ekspor Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 608,91 juta ton menjadi 655,40 juta ton. Selanjutnya, dari sisi impor, nilai kumulatif sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 170,73 miliar dolar AS atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 188,71 miliar dolar AS. Dari sisi volume, jumlah volume impor Indonesia tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 162,59 juta ton dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 171,72 juta ton.

Pelemahan nilai ekspor dan impor tahun 2019 juga turut dipengaruhi oleh pelemahan perekonomian global dimana terjadi penurunan permintaan terutama beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Jepang, AS, dan India. Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya perang tarif antara AS dengan Tiongkok yang berimbas pada berkurangnya permintaan akan barang impor dari kedua negara tersebut. Selain itu, harga komoditas di pasar global juga mengalami kontraksi akibat pelemahan global sehingga turut mendorong penurunan nilai kumulatif ekspor dan impor Indonesia.

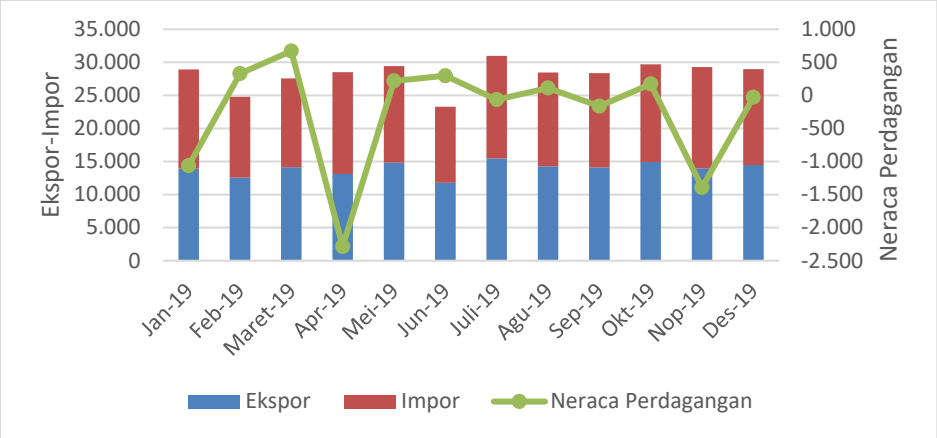
Grafik 7.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2019
(dalam juta dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Faktor penurunan harga relatif mempengaruhi kinerja ekspor dan impor di tahun 2019. Di sisi ekspor, walaupun tercatat mengalami kontraksi, nilai pertumbuhan pada total ekspor dan ekspor non migas, secara volume (riil) masih positif. Dalam hal ini, kontraksi pertumbuhan nilai ekspor lebih dipengaruhi penurunan harga komoditas ekspor. Namun demikian, pada komponen ekspor migas terjadi penurunan volume yang cukup signifikan. Neraca migas telah memberikan tekanan bagi neraca perdagangan Indonesia, dimana kondisi tersebut telah terjadi setidaknya sejak tahun 2012. Sebagai langkah mitigasi terhadap peningkatan permintaan sumber energi, pemerintah telah menempuh strategi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penurunan ekspor minyak mentah antara lain dengan mewajibkan para Kontraktor yang masuk dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual minyak mentah di dalam negeri.

Grafik 8.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Januari – Desember 2019
(dalam juta dolar AS)

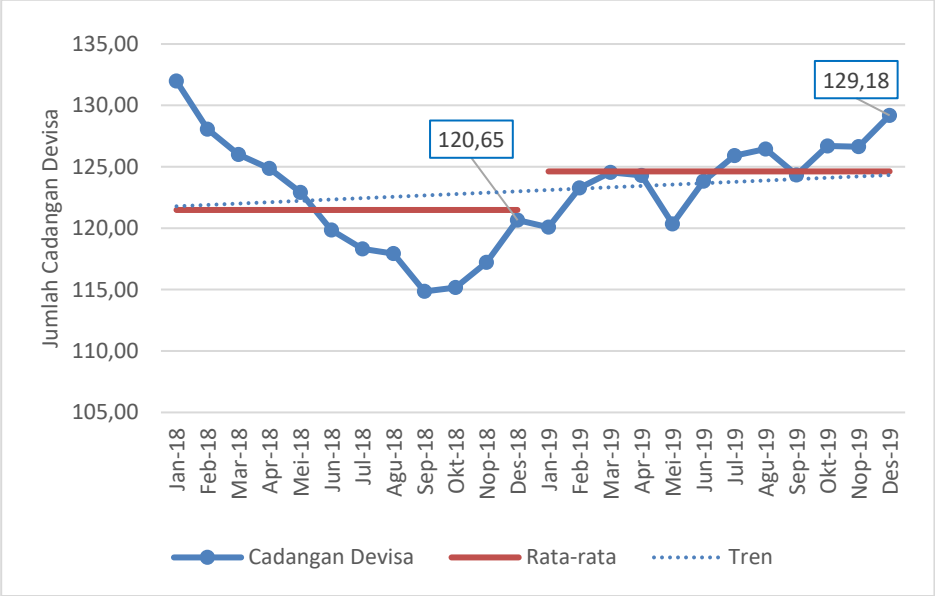


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan devisa pada Desember 2019 berada pada posisi yang stabil untuk mendukung ketahanan sektor eksternal yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada Desember 2019 mencapai 129,18 miliar dolar AS. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 120,65 miliar dolar AS. Nilai cadangan devisa tersebut relatif tinggi yang setara dengan pembiayaan 7,60 bulan impor atau 7,30 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

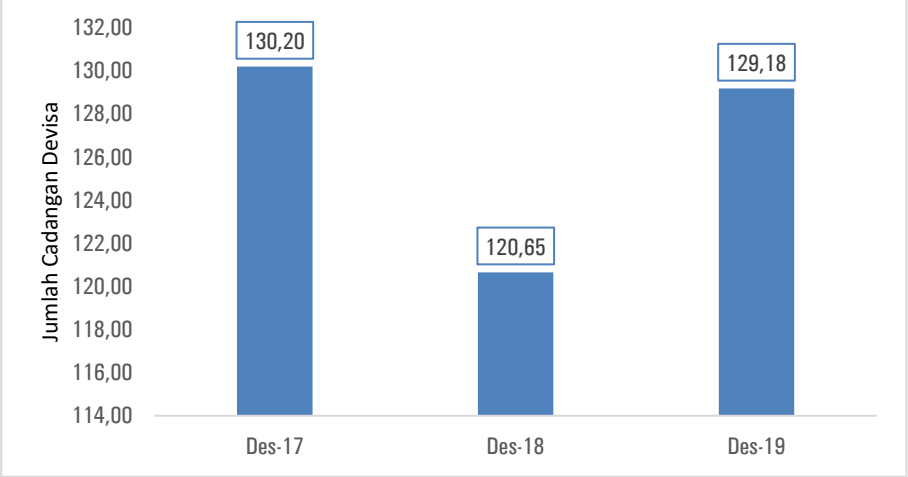
Grafik 9.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari 2018–Desember 2019
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, posisi cadangan devisa tersebut hingga Desember 2019 secara umum relatif memadai dan dinilai mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung ketahanan sektor eksternal. Perkembangan posisi cadangan devisa sampai dengan Desember 2019 merupakan penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya. Perkembangan posisi cadangan devisa per akhir Desember 2017-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 10.
Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2017–2019
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

BI 7-day Reverse Repo Rate pada akhir tahun 2019 dipertahankan sebesar 5,00 persen.

Selama kurun waktu Januari–Desember 2019, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan penyelarasan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI 7DRR) dari 6,00 persen menjadi 5,00 persen, atau penurunan secara kumulatif sebesar 100 bps. Keputusan untuk menurunkan BI 7DRR pertama kali digulirkan pada bulan Juli 2019 (tanggal 18 Juli 2019) menjadi 5,75 persen atau turun sebesar 25 bps. Selanjutnya, penurunan terhadap BI 7DRR kembali dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Agustus 2019 (22 Agustus 2019) menjadi 5,50 persen atau turun kembali sebesar 25 bps. Begitu pula pada bulan September (19 September 2019), Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, hingga akhirnya diturunkan kembali sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen pada bulan Oktober (24 Oktober 2019) dan tetap dipertahankan sebesar 5,00 persen hingga akhir tahun 2019 (19 Desember 2019). Langkah tersebut ditempuh oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan perkembangan proyeksi inflasi yang tetap terjaga secara stabil dan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan.

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan Januari–Desember 2019 di atas target APBN menjadi sebesar 5,62 persen.

Tingkat suku bunga SPN dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Sepanjang Januari–Desember 2019, rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tercatat sebesar 5,62 persen, atau lebih tinggi dari target APBN 2019 sebesar 5,30 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut mengalami tekanan akibat sentimen negatif dari perlambatan ekonomi global.

Imbal Hasil Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada level 7,08 persen.

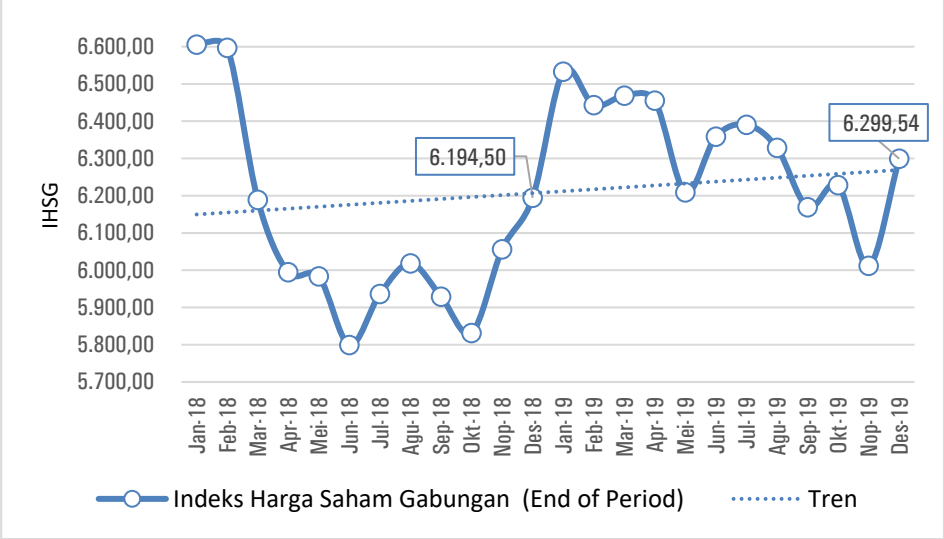
Sepanjang tahun 2019, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan ekonomi global. Kinerja SBN hingga bulan Desember 2019 mengalami perbaikan yang diindikasikan dari penurunan imbal hasil SBN di semua tenor. Untuk tenor seri *benchmark* 10 tahun yang turun ke level 7,08 persen. Penurunan imbal hasil SBN menjadi indikasi positif terjadinya aliran modal masuk dari terjaganya persepsi risiko dan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai dengan akhir Desember 2019 berada pada level 6.299,54 poin mengalami kenaikan 105,04 poin (1,70 persen).

Sampai dengan akhir tahun 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh sentimen positif global seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. IHSG pada bulan Desember 2019 ditutup pada level 6.299,54 poin.

Perkembangan pasar saham domestik yang menguat ditandai dengan penguatan signifikan seluruh sektor yang didorong antara lain dari perbaikan kinerja sektor pertambangan, pertanian, industri dasar, aneka industri, dan sejalan dengan optimisme perbaikan perdagangan global menjelang akhir tahun 2019. Tren positif pasar saham global mendukung bursa saham domestik. Kinerja IHSG secara sektoral disumbang oleh positifnya kinerja saham sektor keuangan, industri dasar, properti, dan infrastruktur. Selain itu, aliran modal dari investor asing menyumbang perbaikan kinerja saham sepanjang tahun 2019. Perkembangan laju IHSG *(end of period)* dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 11.
Tren Laju IHSG (*End of Period*) Januari 2018–Desember 2019
(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Fungsi Intermediasi Perbankan menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan disertai likuiditas perbankan yang memadai dan risiko kredit yang membaik.

Sampai dengan bulan Desember 2019, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta risiko kredit yang membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) bulan Desember 2019 yang cukup tinggi yaitu 23,40 persen, di atas standar minimum yaitu minimum 8,00 persen.

Indikator lainnya ditunjukkan dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap terjaga pada nilai 2,53 persen (*gross*) atau 1,18 persen (*net*) di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga didukung dengan kinerja korporasi *go public* yang relatif baik selaras dengan tingkat kemampuan membayar yang baik.

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, pertumbuhan kredit pada bulan Desember 2019 berada pada angka 5,25 persen karena masih terbatasnya permintaan kredit korporasi terutama pada kredit modal kerja dan pola musiman permintaan kredit akhir tahun. Kemudian, nilai pertumbuhan DPK pada periode yang sama berada pada level 6,54 persen.

Indikator-indikator yang tetap terjaga secara memadai di tengah pelemahan ekonomi global mengindikasikan terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Selain itu, bauran kebijakan moneter Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif yang didukung dengan kebijakan fiskal Pemerintah juga dinilai mampu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan baik.

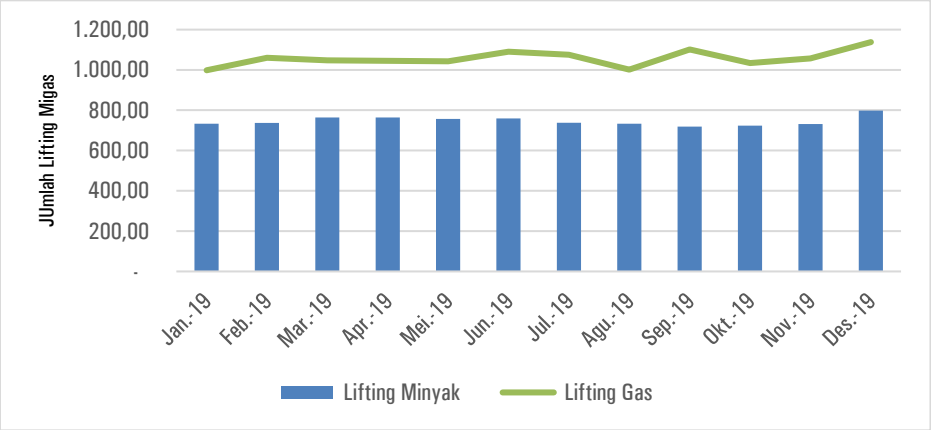
Rata-rata lifting minyak dan lifting gas bumi Januari–Desember 2019 masing-masing sebesar 746 ribu barel per hari dan 1.057 ribu barel setara minyak per hari.

Pada tahun 2019, *lifting* minyak bumi diasumsikan sebesar 775 ribu barel per hari (mbopd) dan gas bumi diasumsikan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), atau naik sebesar 1,25 persen dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 800 mbopd untuk minyak bumi dan 1.200 mboepd untuk gas bumi.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari–Desember tahun 2019 mencapai 746 mbopd. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 778 mbopd. Rata-rata realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.057 mboepd menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.145 mboepd.

Secara keseluruhan *lifting* migas masih dibawah target APBN 2019 sebesar 89 persen. Faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok *Offshore North West Java* (ONWJ), kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena *curtailment gas*, dan revisi Amdal EMCL juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan *lifting* migas di Januari–Desember tahun 2019.

Grafik 12.
Perkembangan *Lifting* Migas Indonesia Januari–Desember 2019
(ribu barel setara minyak per hari (mboepd))



Sumber: Kementerian Keuangan

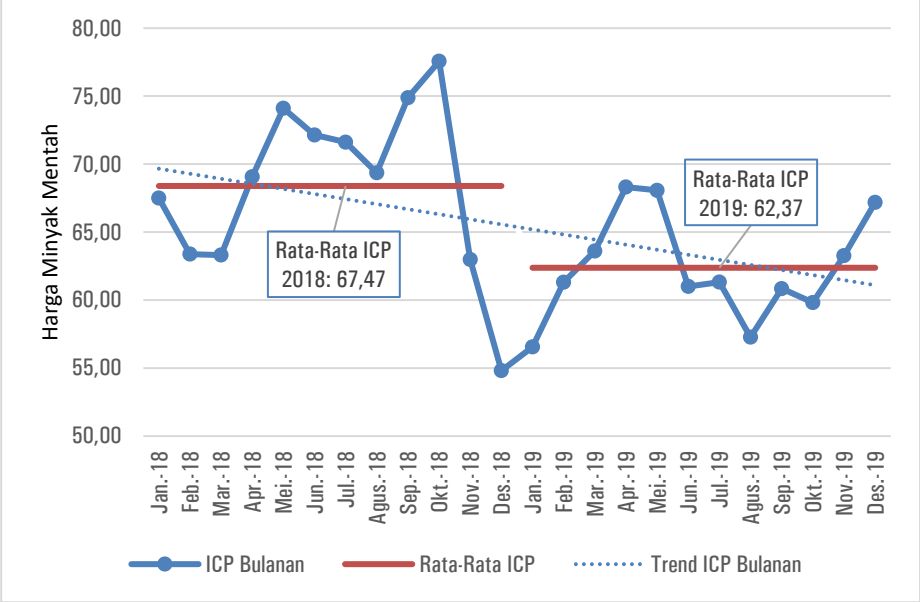
Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari–Desember tahun 2019 tercatat sebesar 62,37 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Rata-rata ICP Januari–Desember tahun 2019 mencapai 62,37 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP tahun 2018 yang sebesar 67,47 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 70,00 dolar AS per barel. Tren minyak mentah dunia maupun ICP mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2019. Harga ICP mengalami perbaikan pada tiga bulan terakhir di tahun 2019, meskipun sebelumnya sempat mengalami penurunan sejak Juni hingga kuartal ketiga 2019.

Fluktuasi nilai rata-rata harga minyak mentah Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2019 dipengaruhi oleh respon pasar atas tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan dagang AS dengan Tiongkok tahap pertama yang meningkatkan harapan pasar pada perbaikan pertumbuhan ekonomi global serta permintaan minyak mentah global. Selain itu, kebijakan Federal Reserve AS untuk tidak mengubah tingkat suku bunga sehubungan dengan prospek ekonomi yang dinilai menguntungkan, kesepakatan negara-negara OPEC pada bulan Desember 2019 untuk memperpanjang periode pemotongan produksi dan menambah besaran pemotongan produksi sebesar 500.000 barel per hari menjadi 1,7 juta barel per hari, serta meningkatnya kebutuhan minyak mentah saat musim dingin dan akhir tahun ikut mendorong peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional selama bulan Desember 2019.

Faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan volatilitas harga minyak pada tiga bulan terakhir adalah kenaikan permintaan dan risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah terutama ketika militer AS melakukan penyerangan terhadap petinggi militer Iran.

Grafik 13.
Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2018–Desember 2019
(dolar AS per barel)



Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

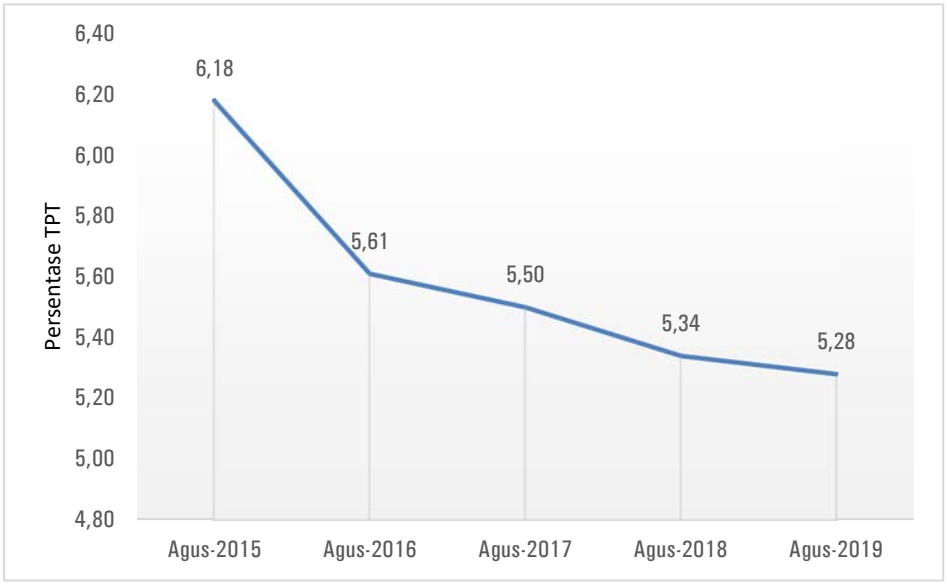
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi sebesar 5,28 persen pada bulan Agustus 2019.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 diharapkan berada pada rentang 4,80 hingga 5,20 persen. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja dalam kurun waktu tertentu. Secara jangka pendek, penurunan TPT antara lain didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi dalam negeri yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2019. TPT pada Agustus 2019 Indonesia tercatat sebesar 5,28 persen. Nilai TPT tersebut mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,34 persen. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan yaitu 67,49 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 67,26 persen. Penurunan TPT serta peningkatan TPAK tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari peningkatan *supply* tenaga kerja.

Pada bulan Agustus 2019, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 133,56 juta orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 131,01 juta orang. Dalam kurun waktu Agustus 2018 ke Agustus 2019, jumlah penduduk bekerja mengalami penambahan akumulatif sebanyak 2,50 juta orang. Dengan kondisi tersebut, jumlah pengangguran masih tetap menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari periode sebelumnya. Hal tersebut menjadi indikasi adanya keselarasan dengan upaya pemerintah mengimplementasikan sejumlah program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tersebut sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 14.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia
Tahun 2015–2019
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: Data perkembangan TPT diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun oleh Badan Pusat Statistik, yaitu bulan Mei untuk data per Februari, serta bulan November untuk data per Agustus.

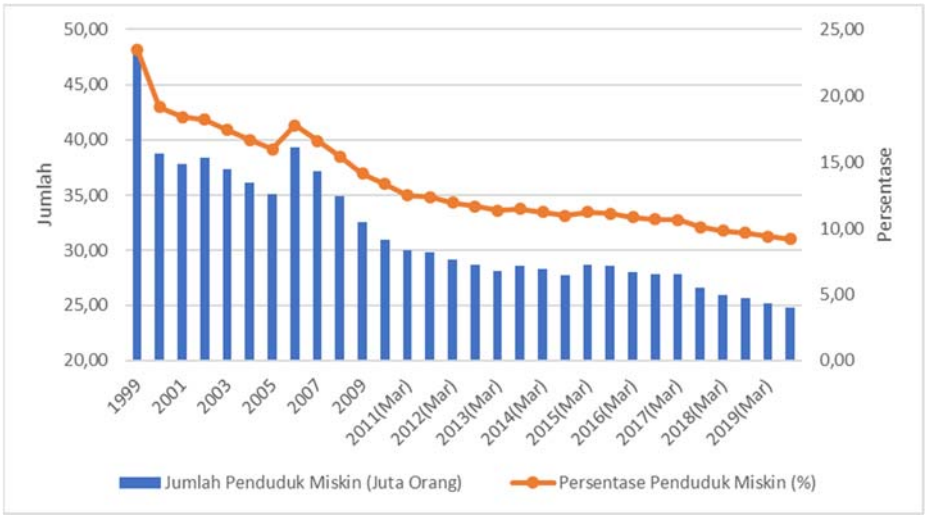
Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,22 persen atau sebesar 24,79 juta orang dan rasio gini turun dari 0,384 menjadi 0,380.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, pemerintah telah menetapkan tema yaitu **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".** Berdasarkan tema tersebut, arah kebijakan pembangunan akan difokuskan terhadap upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Strategi yang ditempuh untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Pada tahun 2019, sasaran angka kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 8,50 hingga 9,50 persen. Untuk mendukung realisasi tersebut, pemerintah terus mengupayakan efektivitas pelaksanaan program-program seperti Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Efektivitas pelaksanaan program-program tersebut juga diikuti peningkatan penyelesaian permasalahan teknis di lapangan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau 9,22 persen, yang mengalami penurunan dari periode yang sama tahun 2018 sebesar sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 persen. Jumlah penurunan penduduk miskin tersebut tercatat sebesar 0,88 juta orang.

Berdasarkan kewilayahan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 9,86 juta orang yang turun sebanyak 273,50 ribu orang atau sebesar 0,33 persen dari 6,89 persen menjadi 6,56 persen dari September 2018. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan adalah sebesar 14,93 juta orang yang turun sebanyak 615,20 ribu orang atau sebesar 0,5 persen dari 13,10 persen menjadi 12,60 persen. Apabila diukur berdasarkan target kemiskinan tahun 2019, realisasi September 2019 tersebut masih berada di bawah batas atas. Dengan demikian, tingkat kemiskinan nasional masih relatif terkendali sesuai dengan target tahun 2019. Tren perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebagaimana pada grafik berikut ini.

Grafik 15.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia
Tahun 1999–2019

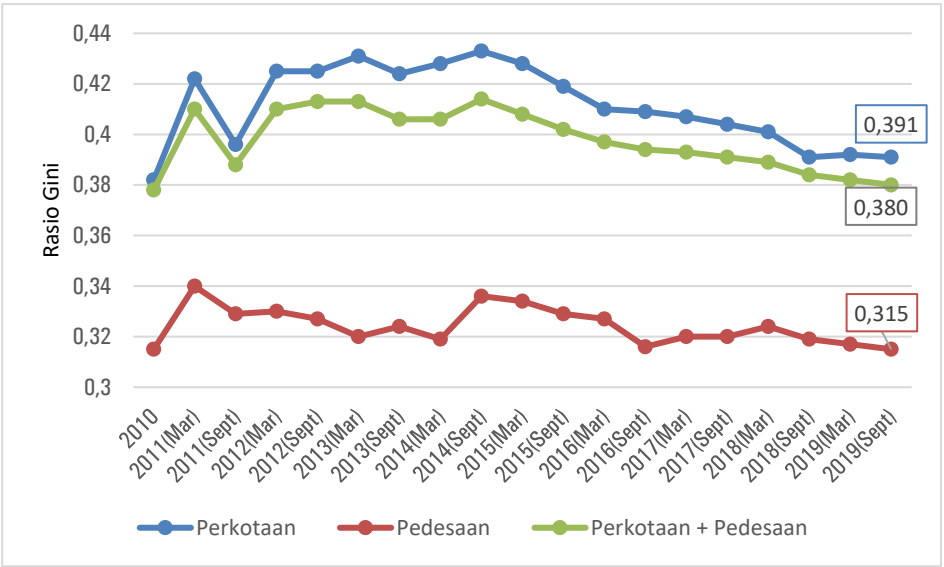


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010–September 2014 terus mengalami fluktuasi. Mulai September 2015 hingga September 2019, nilainya mulai mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015–September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang dicerminkan melalui Rasio Gini adalah sebesar 0,380 (ketimpangan rendah). Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, Rasio Gini pada September 2019 menurun 0,004 poin dari September 2018 sebesar 0,384. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,391 dan Rasio Gini di daerah perdesaaan tercatat sebesar 0,315.

Grafik 16.
Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2010–2019
(dalam indeks)



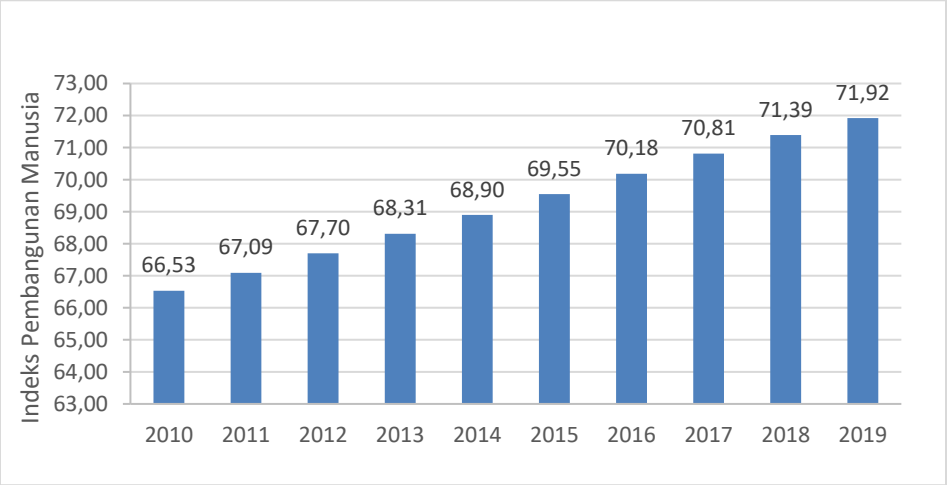
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2019 meningkat 0,74 persen dari tahun 2018 sebesar 71,39 menjadi 71,92 dengan kategori "tinggi".

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2019, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai 71,92.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,74 persen dari nilai sebesar 71,39. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori "tinggi". Status pembangunan pada kategori "tinggi" tersebut pertama kali diraih tahun 2016, dimana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori "sedang".

Grafik 17.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2019
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, di bawah ini disajikan tabel ikhtisar realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta ikhtisar realisasi indikator kesejahteraan masyarakat. Ikhtisar tersebut menyajikan realisasi pada tahun 2019, serta realisasi tahun 2018 sebagai pembanding.

Tabel 2.

Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018

Indikator	2019		2018
	APBN	Realisasi	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	5,02	5,17
Inflasi (%)	3,50	2,72	3,13
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,30	5,62	5,00
Nilai tukar (Rp/US$)	15.000	14.146	14.247
Harga Minyak Mentah Indonesia(US$/barel)	70,00	62,37	67,47
Rata-Rata *Lifting* Minyak (mbopd)	775	746	778
Rata-Rata *Lifting* Gas (mboepd)	1.250	1.057	1.145

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Tabel 3.

Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018

Indikator	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
Ekspor (miliar dolar AS)	167,50	180,01
Impor (miliar dolar AS)	170,73	188,71
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	129,18	120,65
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) surplus/(defisit)	4,68	(7,13)
BI 7-*day RR Rate* (%)	5,00	6,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	7,08	8,00
IHSG *(end of period)*	6.299,54	6.194,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 4.

Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dan 2018

Indikator	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) –Agustus	5,28	5,34
Persentase Penduduk Miskin (%) –September	9,22	9,66
Rasio Gini-September	0,380	0,384
Indeks Pembangunan Manusia	71,92	71,39

Sumber : Badan Pusat Statistik

Boks 1. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, awal tahun 2020 diwarnai optimisme dan diperkirakan akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia dibandingkan dengan tahun 2019. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mulai mereda dan beberapa indikator ekonomi global yang menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2020. Dalam UU APBN 2020 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, asumsi-asumsi makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBN 2020 juga menunjukkan nuansa optimisme. Namun, pandemi COVID-19 mengubah secara drastis *outlook* perekonomian Indonesia. Boks ini menguraikan bagaimana dampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada ekonomi Indonesia dan secara fundamental mengubah *baseline* perekonomian nasional.

Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (*SARS CoV-2). Virus SARS CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan jenis terbaru dari tujuh virus corona yang pernah ditemukan yaitu HCoV-OC43, HCoV-229E, HCOv-NL63, HCov-HKU1, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan dengan banyak kasus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus corona juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus SARS CoV-2 menular melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk, bersin maupun pernapasan normal. Selain itu, virus SARS CoV-2 dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin. COVID-19 menjadi ancaman serius pada kesehatan publik yang dapat menimbulkan kematian.

Virus ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Kasus COVID-19 sejak bulan Januari 2020 mulai menunjukkan kenaikan dan penyebarannya mulai meluas tidak hanya di Wuhan, Hubei, tetapi juga di 25 provinsi di Tiongkok dan 4 negara lain (Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat). Pada bulan Maret, penyebaran COVID-19 menjadi sangat eskalatif di level global. World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 saat jumlah infeksi COVID-19 mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara. Hingga 30 April 2020, lebih dari 3,2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 213 negara atau teritori yang mengakibatkan kematian mencapai 228 ribu orang atau *fatality rate* sekitar 7,1 persen.

Di kawasan Asia Tenggara, jumlah kasus positif COVID-19 hingga akhir April 2020 mencapai lebih dari 30 ribu kasus dengan kasus terbanyak terjadi di Singapura (16.169 kasus). Indonesia dan Filipina menjadi negara ASEAN dengan penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup besar sepanjang April. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat kasus positif COVID-19, sementara Vietnam menjadi negara ASEAN pertama dengan pertumbuhan kasus *flat*.

Meningkatnya jumlah kasus akibat COVID-19 mendorong negara-negara mengambil langkah pencegahan. Upaya-upaya tersebut adalah dengan pembatasan perjalanan *(travel ban/restriction)* penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar wilayah/negara. Di dalam skala domestik, beberapa negara memberlakukan *lockdown* yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, dan India. *Physical distancing* serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas

kantor, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global. Mengganggu kehidupan orang dan mengganggu bisnis serta kegiatan ekonomi dunia. Negara-negara berkembang di Asia akan sangat melemah karena pandemi, mengingat integrasi mendalam kawasan dengan ekonomi global melalui pariwisata, perdagangan, dan *remittance*. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor, pasar keuangan, sektor pariwisata/travel, dan *supply chain*. Secara umum, kondisi pasar keuangan global menurun terlihat dari MSCI Index global dan MSCI Emerging Market Index bergerak menurun di akhir Februari.

Setelah meredanya isu perang dagang, ketidakpastian perekonomian global berlanjut dan sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara. Kondisi ini selanjutnya berpengaruh terhadap sentimen ekonomi dan pasar keuangan yang berakibat pada penurunan prospek ekonomi global. Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global dan beberapa lembaga internasional memproyeksikan ekonomi global 2020 mengalami resesi. Menurut WEO *Update* April 2020, pertumbuhan global diproyeksikan pada -3,0 persen pada tahun 2020, pertumbuhan yang lebih rendah dari krisis keuangan global pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dikawasan *advance economies* diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,1 persen dan terjadi di seluruh negara pada kawasan ini termasuk Amerika yang diproyeksikan pada kisaran -5,9 persen. Proyeksi pertumbuhan terendah di Italia pada kisaran -9,1 persen disusul dengan Spanyol pada kisaran -8,0 persen. Sementara di kawasan *emerging market* dan *developing economies* diproyeksikan pada kisaran -1,0 persen. Tiongkok dan India merupakan kawasan yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 1,2 persen dan 1,9 persen. Pertumbuhan di Tiongkok diproyeksikan dari indikator seperti produksi, industri, penjualan ritel, dan aset tetap investasi yang menunjukkan kontraksi aktivitas ekonomi di kuartal pertama sekitar 8 persen *yoy*. Selain itu juga dengan adanya *rebound* tajam dan dukungan fiskal yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada kawasan ASEAN-5 diproyeksikan pada kisaran -0,6 persen.

Perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami resesi berdampak terhadap perekonomian nasional. Kebijakan *lockdown* yang diambil oleh berbagai negara mempengaruhi kegiatan pekonomian sehingga terhambat dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut WEO *Update* April 2020, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di Indonesia diproyeksikan masih tumbuh positif pada kisaran 0,5 persen, pertumbuhan yang sangat kontradiksi pada kawasan ASEAN-5 yaitu Thailand yang diproyeksi pada kisaran -6,7 persen. Sedangkan proyeksi yang dilakukan beberapa lembaga internasional terhadap pertumbuhan Indonesia adalah proyeksi oleh World Bank sebesar -3,5 persen sampai dengan 2,0 persen, proyeksi oleh *Asian Development Bank* sebesar 2,5 persen, dan proyeksi oleh Moody's sebesar 3,0 persen.

Dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19 melimpas ke Indonesia melalui transmisi ekonomi internasional meliputi penurunan konsumsi dengan adanya *self-isolation*, terpengaruhnya kinerja ekspor Indonesia, perekonomian pada sektor akomodasi, retail, dan manufaktur terdampak, penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman berpotensi mendorong peningkatan CAD, penurunan *risk appetite* investor mendorong peralihan investasi pada instrumen *safe haven* dan potensi penurunan penerimaan perpajakan dan PNBP. Pemerintah mendorong kementerian negara dan lembaga serta pemerintah daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19, serta penurunan harga-harga komoditas.

Pandemi COVID-19 yang menimbulkan masalah bagi keselamatan masyarakat, serta implikasi ekonomi dan keuangan yang sangat luas. Untuk mencegah dampak negatif dari implikasi tersebut diperlukan langkah penanganan yang terkoordinasi dengan baik dari sisi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini merupakan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Penerbitan Perppu juga diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54/2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta peraturan perundangan lainnya.

Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan untuk menanggulangi dampak COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.
2. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga Kesehatan, insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, santunan kematian tenaga medis, dan penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
3. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk penambahan keluarga penerima manfaat PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.
4. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memperluas insentif pajak bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Insentif pajak tersebut diantaranya PPh 21 ditanggung pemerintah untuk para pekerja di beberapa sektor terdampak termasuk industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, pembebasan PPh 22 impor serta pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%. Selain itu, PPN tidak dipungut atas impor barang keperluan penanganan COVID-19, PPN tidak dipungut atas impor yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dan percepatan restitusi PPN pada beberapa sektor terdampak untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan juga menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

5. Di bidang non-fiskal guna menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.

Kebijakan moneter dan keuangan yang dioptimalisasi oleh pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19 antara lain dengan menurunkan suku Bunga Bank Indonesia 7-*day Repo Rate*, meningkatkan intensitas *triple intervention*, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas, memperpanjang tenor SBN, memperluas jenis *underlying* transaksi, melonggarkan ketentuan RIM, menyediakan uang higienis. Sementara dari sisi perbankan, dilakukan relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM, dan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM.

Selain itu, pemerintah daerah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran belanja APBD pada kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap usaha khususnya UMKM. Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah diberikan diskresi bagi Kepala Daerah untuk melakukan realokasi dan *refocussing* anggaran. Pemerintah Pusat juga telah melakukan penyesuaian atas TKDD untuk anggaran DAU, DAK fisik dan non fisik, DBH, DID, serta BLT Dana Desa, dengan total estimasi yang direalokasi untuk penanganan COVID-19 mencapai sebesar Rp50 triliun.

Tidak ada dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Dampak pandemi COVID-19 akan disajikan pada LKKL, LK BUN dan LKPP Tahun 2020, antara lain berupa realokasi dan *refocussing* anggaran untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, serta potensi penurunan PNBP, penurunan kualitas piutang dan penundaan kegiatan/Konstruksi Dalam Pengerjaan.

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2019

Tema RKP Tahun 2019 adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"

APBN 2019 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019 melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Tahun 2019 merupakan tahun kelima dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3. RPJMN tahap ke-3 merupakan lanjutan dari pelaksanaan dan pencapaian RPJMN tahap ke-1 (2005-2009) dan tahap ke-2 (2010-2014) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan yang dilaksanakan berfokus pada keunggulan kompetitif perekonomian dengan basis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dengan dilengkapi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

Tema RKP tahun 2019 adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tema tersebut dijabarkan ke dalam tiga dimensi pembangunan, disertai dengan strategi dan prioritas nasionalnya yang tercantum dalam Nawacita sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran agenda pembangunan nasional meliputi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
   Prioritas dimensi ini terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, program rumah rakyat, revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, memperkuat restorasi sosial Indonesia serta pelaksanaan revolusi mental.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan untuk menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

   Prioritas dimensi ini terhadap sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.
   Prioritas dimensi ini berfokus pada pemerataan antar kelompok pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program dalam dimensi ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Sesuai dengan tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", arah kebijakan fiskal pada tahun 2019 bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebijakan fiskal yang ekspansif bertujuan untuk: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (2) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, (3) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2019 berupa "APBN untuk Mendorong Investasi dan

Sebagai tindak lanjut RKP 2019, pemerintah menetapkan "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia" sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2019. Pada tahun 2019 pemerintah melakukan berbagai kebijakan, utamanya di bidang fiskal untuk memperkuat fondasi perekonomian. Reformasi terhadap berbagai kebijakan publik dilakukan secara paralel dengan langkah-langkah penguatan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan APBN untuk mendorong investasi dan ekspor. Kebijakan fiskal diarahkan untuk

Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia"

menstimulasi perekonomian sehingga dapat tumbuh pada level yang cukup tinggi. Pada saat yang sama kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah, ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas. APBN juga didorong agar makin sehat, ditunjukkan dengan level pendapatan yang semakin optimal, belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal yang bertujuan memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing bangsa ditempuh melalui tiga strategi utama: (1) penguatan kualitas belanja yang difokuskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong investasi dan ekspor, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, mengakselerasi pembangunan infrastruktur serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal, (2) pelebaran ruang fiskal yang ditempuh melalui perbaikan administrasi dan pelayanan, pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, industrialisasi dan ekspor, optimalisasi pengelolaan aset negara, efisiensi belanja non prioritas, efektivitas subsidi dan bantuan sosial serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif, (3) penguatan daya tahan fiskal dan pengendalian risiko yang ditempuh dengan penguatan bantalan fiskal (*fiscal buffer*), peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal, menjaga defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun tanpa mengurangi daya dorong terhadap stimulasi perekonomian, serta mendorong agar keseimbangan primer menuju positif.

Peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidapastian kondisi perekonomian global. Tantangan APBN dalam menjalankan fungsi-fungsinya saat ini menjadi sangat berat mengingat kondisi perekonomian global yang belum stabil sehingga memengaruhi capaian penerimaan negara. Sedangkan di sisi lain kebutuhan belanja pemerintah semakin meningkat dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Prospek perekonomian ke depan akan diiringi kompleksitas tantangan yang harus dihadapi dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam jangka menengah arah kebijakan fiskal yang ditempuh adalah memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing bangsa.

Optimalisasi penerimaan negara pada sektor perpajakan maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerapan mobilisasi pendapatan negara. Reformasi perpajakan juga terus merespon perkembangan ekonomi, serta mendorong daya saing investasi dan ekspor. Hal tersebut dilakukan melalui (1) penguatan fungsi pelayanan pajak (*tax service*) untuk mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*), (2) peningkatan efektivitas pengawasan melalui implementasi *Automatic Exchange of Information (AEoI)* dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, (3) ekstensifikasi dan pengawasan tindak lanjut pasca *tax amnesty*, (4) peningkatan fungsi ekstensifikasi untuk penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan *Business Development Services*, serta (5) melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif. Selain itu, reformasi PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Dari sisi belanja negara, upaya dilakukan dengan peningkatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif, dilakukan melalui: (i) efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan *value for money*; (ii) berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) dan produktivitas antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan dengan penguatan program seperti vokasional; (iii) mendorong iklim investasi dan peningkatan ekspor; (iv) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, antara lain melalui penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (v) melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk peningkatan kapasitas produksi, distribusi dan daya saing antara lain melalui pembangunan bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan dan bendungan, serta irigasi; (vi) mendorong reformasi birokrasi institusi untuk peningkatan layanan dan efisiensi; (vii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong peningkatan efektivitas formula DAU, DID dan DAK yang berbasis kinerja serta mendorong Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat; (viii) mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan *stunting*, perubahan iklim serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana.

Pembiayaan APBN 2019 Dikelola Lebih Efisien, Produktif dan Berkelanjutan

Sisi pembiayaan didorong menjadi semakin efisien dan kreatif. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*) dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Peningkatan produktivitas dan efektivitas pembiayaan melalui peningkatan akses pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha ultra mikro, serta mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account (NIA)*.

Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini akan terefleksi melalui upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan defisit, keseimbangan primer, serta rasio utang yang terjaga dalam batas aman. Pembiayaan anggaran secara nominal meningkat seiring dengan kebijakan fiskal yang ekspansif terarah dan terukur. Peningkatan pembiayaan tersebut juga merupakan dampak dari perluasan fungsi pembiayaan yang tidak hanya semata-mata untuk menutup defisit tetapi juga digunakan sebagai instrumen investasi untuk mendorong kinerja BUMN/BLU/Badan Lainnya, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pembiayaan KUMKM, kepemilikan perumahan bagi MBR yang layak huni, serta mendorong peningkatan ekspor.

Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pembiayaan nonutang terutama pembiayaan investasi. Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk mendukung program prioritas melalui investasi kepada BUMN dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi kepada BLU yang bertujuan membiayai pembebasan lahan proyek strategis nasional dan *endowment fund* pendidikan. Pembiayaan utang menjadi sumber pendanaan untuk menutup defisit dan mendukung pembiayaan investasi, dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian (*prudent*), antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang dalam batas yang *manageable*, serta mendorong efisiensi *cost of borrowing*. Pada sisi lain, utang Pemerintah dikelola dengan menjaga keseimbangan makro, dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga dapat mendorong produktivitas dan minimalisasi risiko.

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2019 diwujudkan melalui UU Nomor 12 tahun 2018 tentang

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah menempuh beberapa upaya antara lain: (i) memobilisasi pendapatan yang realistis; (ii) merumuskan strategi belanja agar lebih efektif dan produktif; serta (iii) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Pengelolaan fiskal yang semakin *prudent* selalu dijaga oleh Pemerintah secara konsisten dan terukur.

Pendapatan negara tahun 2019 direncanakan secara realistis dan dimobilisasi dengan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) Optimalisasi penggalian potensi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up-to-date* dan terintegrasi; (2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dan membangun kesadaran wajib pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable compliance*); (3) Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri; (4) Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif; (5) Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEoI);* (6) Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan *inequality;* (7) Optimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, serta mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha; (8) Peningkatan dividen BUMN dengan mempertimbangkan *cashflow* BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah; (9) Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan (10) Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP didukung maksimalisasi pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam sistem pembayaran PNBP.

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 13,40 persen terhadap PDB untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan Belanja Negara. Target pendapatan negara yang ditetapkan pada APBN 2019 sebesar Rp2.165,11 triliun atau meningkat 14,27 persen dari target pendapatan negara pada APBN tahun 2018. Sumber pendapatan negara pada tahun 2019 secara nominal direncanakan didominasi oleh penerimaan perpajakan, dengan target penerimaan yang mencapai 82,51 persen dari total target pendapatan negara, sejalan dengan semangat pemerintah menjadikan pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong daya saing ekonomi nasional.

Pendapatan negara dari perpajakan pada tahun 2019 diharapkan mencapai Rp1.786,38 triliun, meningkat 10,40 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Dalam menutupi kebutuhan belanja negara, Penerimaan Perpajakan ditargetkan mendapat dukungan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp378,30 triliun atau naik 37,35 persen dari target PNBP dalam APBN tahun 2018, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,44 triliun atau turun 63,03 persen dari target APBN tahun 2018. Meskipun secara nominal ditargetkan lebih kecil dibandingkan Penerimaan Perpajakan, target PNBP mengalami peningkatan relatif besar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yaitu 37,35 persen. Kenaikan ini diharapkan diperoleh dari kenaikan pendapatan negara dari bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, penerimaan dari hibah pada tahun 2019 utamanya diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur seperti transportasi, jalan, irigasi sarana air minum, pengelolaan air limbah dan sanitasi. Penerimaan hibah tersebut direncanakan untuk membiayai program-program penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan.

Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, tunjangan hari raya (THR), serta kenaikan gaji dan pensiun pokok sebesar rata-rata lima persen; (2) melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif; (3) mendorong efektivitas program perlindungan sosial dengan melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, serta sinergi antarprogram yang relevan; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas; (5) penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional; (6) mendorong penguatan investasi dan ekspor antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur; dan (7) mengantisipasi

ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis antara lain mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, percepatan penanganan *stunting*, dan kesetaraan *gender*.

Besaran belanja negara yang direncanakan untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.461,11 triliun, naik 10,83 persen dari pagu belanja negara pada APBN tahun 2018 dengan memperhatikan porsi belanja negara terhadap PDB yang berada pada kisaran 15 persen dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan anggaran belanja tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan berbagai agenda nasional. Anggaran belanja negara di tahun 2019 tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,34 triliun, ditambah dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,77 triliun. Dengan target pendapatan dan besaran belanja negara tersebut, defisit APBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp296,00 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB, lebih rendah dari defisit anggaran pada APBN tahun 2018 yang sebesar Rp325,93 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB. Defisit APBN tahun 2019 direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp296,00 triliun.

Kebijakan umum TKDD pada tahun 2019 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan harmonisasi dengan anggaran belanja kementerian negara/lembaga (K/L).
2. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) melalui: (a) pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai persentase/formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (b) percepatan penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH; (c) percepatan penyaluran DBH per triwulan yang didistribusikan pada setiap bulannya; (d) pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (e) pemberian afirmasi kebijakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah sebesar 100 persen; dan (f) pengaturan penggunaan minimal 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur.
3. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui: (a) pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah, (b) upaya pada poin a difokuskan pada SDM dan daya saing melalui pendidikan, pengentasan *stunting*, dan infrastruktur daerah, (c) peningkatan akurasi data dan biaya satuan DAK Nonfisik, dan (d) penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian output kegiatan.
4. Penguatan pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta melalui: (a) penajaman kriteria penilaian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, dan (b) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.
5. Penguatan pengelolaan Dana Desa melalui: (a) distribusi Dana Desa yang adil dan merata, (b) prioritas pemanfaatan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk lebih mendorong pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja, (c) penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Tabel 5. Ringkasan APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2018
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2019	APBN 2018	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**2.165,11**	**1.894,72**	**14,27**
I. Pendapatan Negara	2.164,68	1.893,51	14,32
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,38	1.618,09	10,40
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,30	275,42	37,35
II. Penerimaan Hibah	0,44	1,19	(63,03)
B. Belanja Negara	**2.461,11**	**2.220,65**	**10,83**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,34	1.454,49	12,37
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,77	766,16	7,91
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(20,11)**	**(87,33)**	**(76,97)**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(296,00)**	**(325,93)**	**(9,18)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(1,84)	(2,19)	(15,98)
E. Pembiayaan Anggaran	**296,00**	**325,93**	**(9,18)**
I. Pembiayaan Utang	359,25	399,22	(10,01)
II. Pembiayaan Investasi	(75,90)	(65,65)	15,61
III. Pemberian Pinjaman	(2,35)	(6,69)	(64,87)
IV. Kewajiban Penjaminan	0,00	(1,12)	(100,00)
V. Pembiayaan Lainnya	15,00	0,18	8.233,33

Sumber: Kementerian Keuangan

**) Apabila terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh persentase dihasilkan dari perhitungan angka dalam satuan triliun dan atau pembulatan.*

PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara tahun 2019 masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan di tengah-tengah tekanan global

Kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir tahun 2019 masih cukup baik karena tumbuh positif, meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain diupayakan untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP, kebijakan pendapatan negara juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi melalui pemberian insentif perpajakan. Kebijakan pemerintah yang konsisten dalam mendorong investasi dan produktivitas memberikan dampak positif bagi perekonomian yang pada akhirnya mampu mendukung peningkatan kinerja pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara juga diimbangi oleh upaya pemerintah dalam mendorong daya beli dan produktivitas masyarakat melalui program-program seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta percepatan penyaluran subsidi pupuk dan subsidi kredit program. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Penerimaan perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri mengalami kenaikan, namun pertumbuhannya pada 2019 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi tetap bertumbuhnya penerimaan perpajakan meskipun melambat adalah perekonomian domestik yang relatif stabil, program reformasi administrasi perpajakan dan reformasi pelayanan yang masih terus berlanjut, perbaikan dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi (IT) perpajakan, program

reinventing policy, ekstensifikasi dan pengawasan tindak lanjut pasca *Tax Amnesty*, *joint program* antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta penyempurnaan peraturan perpajakan.

Keberlanjutan fiskal di sepanjang tahun 2019 tetap dijaga melalui koordinasi berbagai pihak perumus kebijakan. Hal ini terlihat dari defisit anggaran yang terkendali dan rasio utang dalam batas aman. Di tengah perlambatan global, realisasi pendapatan negara mampu tumbuh positif terutama dipengaruhi oleh masih positifnya kinerja ekonomi domestik. Sedangkan, sektor PNBP tumbuh negatif karena dibayangi penurunan harga komoditas di pasar global.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Tahun 2019 mencapai Rp1.960,63 triliun

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 mencapai 90,56 persen dari target pendapatan negara pada APBN tahun 2019. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 0,87 persen dari pendapatan negara pada periode yang sama tahun 2018. Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,14 triliun atau sebesar 86,55 persen dari target APBN tahun 2019, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp408,99 triliun atau mencapai 108,11 persen dari target APBN tahun 2019, serta Hibah sebesar Rp5,50 triliun atau persentase capaian sebesar 1.262,86 persen dibandingkan dengan target APBN tahun 2019. Realisasi pendapatan negara masih tumbuh positif meski masih tertahan sebagai imbas dari perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini dapat dicapai sebagai hasil dari tren pertumbuhan ekonomi yang dijaga dengan intensif, didukung oleh konsumsi domestik yang tumbuh stabil serta pertumbuhan investasi sebagai dampak kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, realisasi penerimaan perpajakan yang masih tumbuh positif secara nominal utamanya karena didorong oleh pertumbuhan PPh Non-Migas, Pendapatan Cukai, Pendapatan PPN Dalam Negeri, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Pajak Lainnya. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21 hingga akhir tahun 2019 masih tumbuh *double digits* berturut-turut 19,06 persen dan 10,07 persen (yoy) dengan tingkat realisasi melebihi target yaitu 102,53 persen dan 101,89 persen antara lain didorong oleh pembayaran bonus/THR Idul Fitri 1440H terhadap pegawai/karyawan dan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Selain itu, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi juga mengalami perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan *baseline* setoran sebagai hasil dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga mendorong pertumbuhan pendapatan pajak penghasilan (PPh).

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2019 dan 2018
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2019	2018	% Kenaikan (Penurunan)
I. Penerimaan Perpajakan	**1.546,14**	**1.518,79**	**1,80%**
1. Pajak Dalam Negeri	1.505,09	1.472,91	2,18%
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,05	45,88	(10,52%)
II. PNBP	**408,99**	**409,32**	**(0,08%)**
1. Penerimaan SDA	154,90	180,59	(14,23%)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80,73	45,06	79,15%
3. PNBP lainnya	124,50	128,57	(3,17%)
4. Pendapatan BLU	48,87	55,09	(11,30%)
III. Penerimaan Hibah	**5,50**	**15,56**	**(64,68%)**
Jumlah Pendapatan Negara	**1.960,63**	**1.943,67**	**0,87%**

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2019 Rp1.546,14 triliun

Realisasi pendapatan perpajakan tumbuh positif 1,80 persen terhadap pendapatan perpajakan pada periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp1.518,79 triliun. Pendapatan perpajakan utamanya didominasi oleh Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Non-Migas utamanya berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Final. Sedangkan, PPN didominasi oleh PPN Dalam Negeri dan PPN Impor. Sektor yang mendukung Pendapatan Perpajakan adalah sektor pengolahan (seperti makanan dan minuman), sektor jasa keuangan serta sektor transportasi dan pergudangan yang masih tumbuh impresif hingga *double digits*. Kinerja konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang terjaga ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan dari PPh 21 dan PPN Dalam Negeri di tengah perekonomian global yang melemah menjadi penopang Pendapatan Perpajakan.

PPh Migas secara keseluruhan tumbuh negatif pada tahun 2019. Penurunan PPh Migas antara lain didorong oleh penurunan harga minyak mentah dunia akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok yang berimbas pada harga komoditas dunia. Pertumbuhan negatif tersebut terutama disebabkan oleh imbas perlemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan impor, dirasakan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor perdagangan, dan terkonfirmasi oleh penurunan PPh Pasal 22 Impor. PPN/PPnBM juga merupakan pajak yang tumbuh negatif, namun tidak terjadi pada keseluruhan komponen. Pendapatan PPN Dalam Negeri yang masih tumbuh positif merupakan salah satu sinyal masih terjaganya konsumsi dalam negeri. Pendapatan PPN/PPnBM yang menurun bersumber dari Pertumbuhan negatif penerimaan PPN Impor dan PPnBM Dalam Negeri.

Meski tidak tumbuh double digits, pendapatan cukai dengan realisasi yang melebihi target memberikan kontribusi kuat terhadap pendapatan negara, terutama bersumber dari pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai MMEA yang juga melebihi nilai yang ditargetkan. Kenaikan tarif cukai di tahun 2019 dan keberhasilan pengendalian peredaran tembakau dan MMEA ilegal menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan cukai.

Realisasi PNBP sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp408,99 triliun

Realisasi pendapatan PNBP 2019 tumbuh negatif 0,08 persen terhadap realisasi tahun 2018 pada periode yang sama. Kontribusi terbesar realisasi pendapatan dari PNBP berasal dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang mencapai Rp154,90 triliun atau 37,87 persen dari total realisasi PNBP pada tahun 2019. Selanjutnya, PNBP Lainnya mencapai Rp124,50 triliun berkontribusi 30,44 persen terhadap total realisasi PNBP. Realisasi PNBP SDA adalah 81,20 persen dibandingkan target dan secara nominal lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya karena pelemahan harga komoditas SDA seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan *lifting* minyak bumi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Persentase realisasi pendapatan dari KND yang mencapai 177,07 persen terhadap target APBN. Realisasi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (termasuk bagian laba BUMN) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni meningkat sebesar 79,15 persen terutama berasal dari pendapatan yang merupakan bagian pemerintah atas Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30,09 triliun yang tidak masuk ke dalam target APBN 2019. Bagian Laba Pemerintah pada BUMN pada tahun 2019 senilai Rp50,63 triliun, bertumbuh 12,37 persen dari tahun sebelumnya, memiliki porsi terbesar dalam Pendapatan dari KND tahun 2019. Bagian Laba Pemerintah dari BUMN terbesar tahun ini merupakan kontribusi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp9,25 triliun, PT. Telkom senilai Rp8,45 triliun, PT. Pertamina senilai Rp7,95 triliun, PT. Bank Mandiri senilai Rp6,75 triliun dan PT. PLN senilai Rp4,00 triliun.

Realisasi pendapatan BLU sebesar Rp48,87 triliun atau sebesar 102,06 persen dari target APBN tahun 2019 mengalami penurunan secara nominal dari tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak kebijakan tidak mengenakan tarif pungutan atas komoditas dan industri pengolahan sawit hingga 31 Desember 2019 sebagai salah satu strategi pemerintah menghadapi penurunan harga komoditas, sehingga berimbas pada turunnya pendapatan dana kelola perkebunan sawit.

Realisasi pendapatan PNBP Lainnya 2019 sebesar Rp124,50 triliun mencapai realisasi 132,35 persen dari target APBN tahun 2019 namun tumbuh negatif 3,17 persen dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, realisasi PNBP tahun 2019 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya merupakan dampak dari bauran kondisi penurunan tingkat permintaan global atas beberapa komoditas sumber daya alam, penurunan harga komoditas SDA, penurunan realisasi ICP (harga minyak mentah Indonesia) serta penurunan Harga Batubara Acuan.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2019 sebesar Rp5,50 triliun

Realisasi penerimaan hibah tahun 2019 memiliki capaian yang sangat tinggi, namun tumbuh negatif 64,68 persen disebabkan oleh angka nominal Penerimaan Hibah pada tahun 2018 bernilai signifikan. Realisasi penerimaan hibah tahun 2019 didominasi oleh hibah dari pemerintah daerah sebesar Rp3,31 triliun, atau 60,26 persen dari total realisasi penerimaan hibah tahun 2019.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara Tahun 2019 sebesar Rp2.309,29 triliun.

Realisasi belanja negara Tahun 2019 meningkat 4,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau terealisasi 93,83 persen dari pagu APBN tahun 2019. Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat ditambah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tahun 2019 kinerja belanja pemerintah pusat menunjukkan peningkatan secara nominal, namun mengalami penurunan secara persentase penyerapan. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat tidak terlepas dari berbagai program strategis yang telah dilakukan pada paruh pertama tahun 2019 seperti penyelenggaraan Pemilu dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial.

Tabel 7. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Belanja Pemerintah Pusat	**1.496,31**	**1.455,32**	**2,82%**
1. Belanja Pegawai	376,07	346,89	8,41%
2. Belanja Barang Jasa	334,42	347,47	(3,76%)
3. Belanja Modal	177,84	184,13	(3,41%)
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	275,52	257,95	6,81%
a. Utang Dalam Negeri	254,08	238,43	6,56%
b. Utang Luar Negeri	21,45	19,52	9,86%
5. Subsidi	201,80	216,88	(6,95%)
a. Subsidi Energi	136,88	153,52	(10,84%)
b. Subsidi Non Energi	64,93	63,36	2,47%
6. Belanja Hibah	6,48	1,52	325,91%*
7. Bantuan Sosial	112,48	84,32	33,40%
8. Belanja Lain-lain	11,70	16,16	(27,62%)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**812,97**	**757,79**	**7,28%**
1. Transfer ke Daerah	743,16	697,93	6,48%
a. Dana Perimbangan	711,28	668,64	6,38%
b. Dana Insentif Daerah	9,69	8,23	17,78%
c. Dana Otsus dan Keistimewaan	22,18	21,06	5,32%
2. Dana Desa	69,81	59,86	16,63%
Jumlah Belanja Negara	**2.309,29**	**2.213,12**	**4,35%**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Apabila terdapat perbedaan angka pada satuan dan di belakang koma, disebabkan oleh persentase dihasilkan dari perhitungan angka dalam satuan triliun atau pembulatan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2019 Rp1.496,31 triliun

Belanja Pemerintah Pusat yang direalisasikan selama Tahun 2019 sebesar 91,55 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh implementasi program-program yang dilaksanakan Kementerian Negara dan Lembaga yang terus didorong percepatan pelaksanaannya sejak awal tahun, seperti kegiatan lelang dini, kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, serta penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN). Selain itu, realisasi belanja pada PIP, Beasiswa Bidik Misi, bantuan rehabilitasi rumah keluarga miskin, bantuan rekonstruksi rumah pasca bencana, juga turut berkontribusi pada meningkatnya belanja negara di 2019.

Pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya progres seperti pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jembatan. Progres tersebut merupakan bagian dari beberapa *output* yang menunjukkan capaian positif sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, termasuk program preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan, pembangunan prasarana perkeretaapian, dan pembangunan fasilitas pelabuhan sebagai program prioritas nasional.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat naik 2,82 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, tanpa adanya kebijakan pemotongan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini ditempuh dalam rangka optimalisasi belanja negara sebagai stimulus fiskal pada penerapan *countercyclical* di masa penurunan ekonomi eksternal. Akselerasi penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah didorong sejak awal tahun secara berkesinambungan hingga akhir tahun 2019 mampu mendorong sektor konsumsi melalui kombinasi penyerapan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Bantuan Sosial. Optimalisasi penyerapan Belanja Modal juga menjadi daya pengungkit pada sektor investasi.

Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp873,43 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp622,89 triliun. Realisasi terbesar belanja K/L tersebut antara lain dikontribusikan dari 13 K/L yaitu Kementerian Pertahanan 13,21 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11,51 persen, Kepolisian Negara RI 11,24 persen, Kementerian Kesehatan 7,70 persen, Kementerian Agama 7,32 persen, Kementerian Sosial 6,61 persen, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5,21 persen, Kementerian Perhubungan 4,54 persen, Kementerian Keuangan 4,53 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,18 persen, Kementerian Pertanian 2,22 persen, Komisi Pemilihan Umum 2,00 persen dan Kementerian Hukum dan HAM 1,58 persen masing-masing terhadap total belanja pemerintah pusat. Kinerja positif realisasi belanja K/L antara lain dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan atas APBN tahun 2019 sehingga K/L dapat lebih fokus dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, realisasi Belanja Non K/L terdiri dari Belanja Pegawai untuk pembayaran pensiun, uang tunggu dan jaminan kesehatan PNS (didominasi PNS Daerah) dan TNI/POLRI sebesar Rp126,88 triliun, Belanja Barang dan untuk dana dukungan kelayakan proyek dan dana fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp0,51 triliun, pembayaran bunga utang, pembayaran kontribusi ke lembaga internasional, subsidi energi dan nonenergi, hibah yang antara lain untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta Belanja Lain-lain.

Realisasi terbesar per jenis belanja merupakan realisasi pada Belanja Pegawai sebesar Rp376,07 triliun. Secara nominal, realisasi belanja pegawai tersebut mengalami pertumbuhan 8,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan Belanja Pegawai antara lain dipengaruhi oleh kenaikan gaji pegawai sebesar 5 persen, kenaikan tunjangan kinerja di beberapa K/L dalam kerangka penerapan reformasi birokrasi dan kenaikan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja pegawai didominasi oleh Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Veteran, Kontribusi Pendanaan Pensiun eks PNS Kemenhub, jaminan kesehatan

serta Tunjangan Hari Tua sebesar 33,74 persen. Pada pertengahan tahun 2019, kinerja penyerapan Belanja Pegawai telah optimal karena adanya kenaikan tunjangan kinerja beberapa K/L, kenaikan gaji pokok, pencairan THR dan gaji ke-13. Belanja Pegawai merupakan salah satu dari tiga jenis belanja yang penting untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah secara bersamaan hingga akhirnya berdampak positif dan berkaitan sangat erat dengan peningkatan perekonomian nasional.

Realisasi Belanja Barang tahun 2019 mencapai Rp334,42 triliun mengalami penurunan 3,76 persen terhadap realisasi periode yang sama tahun 2018. Realisasi tersebut mencapai 96,87 persen target anggarannya. Penurunan realisasi Belanja Barang merupakan efisiensi atas belanja yang antara lain terdiri dari honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*. Realisasi Belanja Barang terbesar adalah untuk penyediaan layanan operasional fasilitas kesehatan, peningkatan penyediaan fasilitas rumah swadaya, pemeliharaan rutin jalan nasional, dukungan pengadaan Alutsista dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Selain itu, porsi Belanja Barang juga terealisasi untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang kepada siswa-siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar Rp177,84 triliun atau mencapai 93,93 persen dari target APBN 2019 yang mengalami pertumbuhan negatif 3,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan realisasi tersebut disebabkan permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, payung hukum penugasan baru yang baru terbit di pertengahan tahun dan isu keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. Proporsi Belanja Modal terbesar digunakan untuk: (1) pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan faktor pendorong investasi, (2) pembangunan jalan, irigasi dan jaringan dipergunakan untuk preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan jembatan terutama untuk menunjang kelancaran arus barang dan penumpang hari Raya Idul Fitri pada 2019, termasuk prasarana perkeretaapian, serta (3) pembelian peralatan dan mesin pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama dan Basarnas.

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp275,52 triliun, tumbuh 6,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar 99,87 persen terhadap anggarannya. Realisasi tersebut terutama bersumber dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp254,08 triliun atau 92,22 persen terhadap total Belanja Pembayaran Bunga Utang. Belanja Pembayaran Bunga Utang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena peningkatan stok utang Pemerintah memasuki awal tahun 2019 ditambah adanya tambahan pembiayaan utang selama tahun 2019 yang berasal dari kebutuhan pembiayaan defisit, pembiayaan non utang (terutama pembiayaan investasi) dan utang jatuh tempo. Meskipun demikian, pengadaan tambahan utang 2019 tersebut dibiayai dengan tingkat bunga yang lebih rendah, terutama *yield* SBN yang relatif lebih rendah karena kondisi pasar keuangan yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2018.

Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2019 mencapai Rp201,80 triliun atau 89,96 persen terhadap pagu 2019. Belanja Subsidi terbesar terealisasi untuk subsidi energi yaitu sebesar Rp136,88 triliun atau 67,83 persen terhadap total subsidi pada tahun 2019. Realisasi subsidi yang lebih rendah dari target antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi ICP dibandingkan asumsi APBN dan apresiasi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2019, yang berdampak pada lebih rendahnya realisasi subsidi energi dibanding target yang diperkirakan. Belanja subsidi energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga

terjangkau, antara lain LPG tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik, disertai dengan upaya paralel mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, realisasi subsidi non energi sebesar Rp64,93 triliun antara lain dilaksanakan dalam rangka pembayaran Subsidi Pupuk, Subsidi PSO Kereta Api maupun Angkutan Laut, serta Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan tertinggi dengan realisasi Rp6,48 triliun, tingkat penyerapan 333,71 persen terhadap target atau meningkat 325,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini berasal dari tambahan Belanja Hibah nonprogram terealisasi tahun 2019, berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan noninfrastruktur pasca bencana alam melalui Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Kinerja realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 mencapai 110,21 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp112,48 triliun mengalami peningkatan sebesar 33,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nominal realisasi yang melebihi pagu dan peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut menunjukkan wujud keberpihakan Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk: (i) kenaikan indeks manfaat bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH), (ii) penyaluran bantuan sosial pangan, (iii) pembayaran selisih iuran PBI program JKN, (iv) penyaluran realisasi bantuan Pangan pada Kementerian Sosial, (v) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar/PIP dan Bidikmisi), dan (vi) pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana.

Boks 2

Mendorong Kualitas Belanja Melalui Penguatan Monitoring Evaluasi (Monev) dan Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan belanja negara yang berkualitas, maka pelaksanaan anggaran harus mampu dikawal agar dapat berjalan dengan baik dalam rangka memastikan dan menjamin ketercapaian keluaran (*output*) yang menjadi tanggung jawab pengguna anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam konteks pelaksanaan anggaran, hal tersebut tidak akan terlepas dari pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh K/L. Monev tersebut salah satunya bertujuan untuk memantau capaian kinerja pelaksanaan K/L setiap periode agar dapat mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran pada K/L yang berimplikasi pada kurang optimalnya penyerapan anggaran.

Lebih lanjut, APBN sebagai instrumen fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. APBN sebagai amanat rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/*output* yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketercapaian *output* tersebut, tentunya harus didukung oleh regulasi, proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara terkendali, terarah, dan terukur. Oleh sebab itu, untuk menakar belanja yang berkualitas diperlukan suatu ukuran-ukuran kinerja yang menggambarkan bagaimana K/L mengelola anggarannya.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan

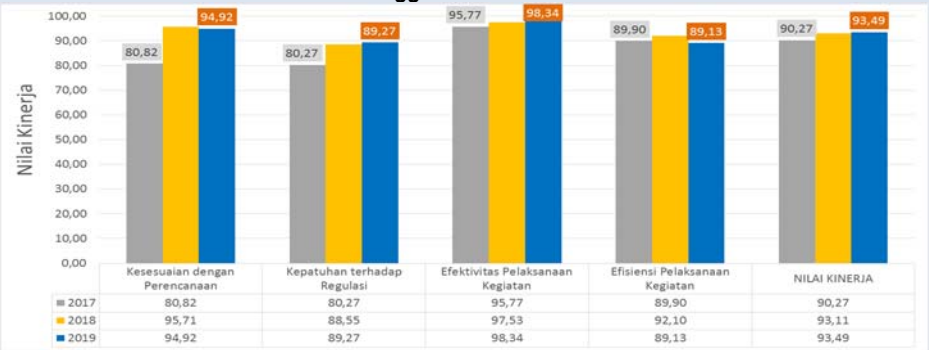
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga salah satunya mengatur implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Keempat aspek tersebut kemudian diuraikan ke dalam 12 indikator kinerja yang didasarkan pada berbagai data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran belanja pemerintah. Kedua belas indikator tersebut, terdiri atas:

1) Indikator kinerja Revisi DIPA menunjukkan rasio antara jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulanan;
2) Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan rata-rata penyimpangan atau deviasi antara perencanaan penarikan dana terhadap realisasi anggaran bulanan;
3) Indikator kinerja Pagu Minus menunjukkan persentase pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu anggarannya;
4) Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
5) Indikator kinerja Pengelolaan UP menunjukkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP;
6) Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaraan terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ;
7) Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM menunjukkan tingkatan jumlah/volume SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu penyampaian pada akhir tahun anggaran;
8) Indikator kinerja Penyerapan Anggaran menunjukkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggarannya;
9) Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan menunjukkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual (SPM-LS Kontraktual) terhadap seluruh kewajiban penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN;
10) Indikator kinerja Retur SP2D menunjukkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan;
11) Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM menunjukkan tingkatan rasio pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan ke KPPN; serta
12) Indikator kinerja Renkas menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas yang diajukan ke KPPN.

Di tahun 2019, formulasi IKPA disesuaikan dengan arah kebijakan yang berfokus pada pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin ideal, menantang, namun tetap achievable. Oleh karena itu, formula beberapa indikator dalam IKPA dimodifikasi dengan tujuan dapat terus mendorong perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran K/L. Faktanya, reformulasi indikator tersebut dapat direspon dengan positif seiring dengan tetap terjaganya nilai IKPA untuk Tahun Anggaran 2019. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, capaian kinerja IKPA Tahun Anggaran 2019 masih mampu berada dalam tren kenaikan dari angka 93,11 di tahun 2018 menjadi 93,49 di tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan IKPA sebagai alat monev pelaksanaan anggaran dirasa mampu meningkatkan kinerja tata kelola keuangan pada Satker. Sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah, capaian nilai kinerja IKPA K/L secara konsisten meningkat hingga TA 2019. Adanya peningkatan capaian kinerja dari berbagai aspek dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel: Grafik Peningkatan Nilai IKPA
Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019



	Kesesuaian dengan Perencanaan	Kepatuhan terhadap Regulasi	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	NILAI KINERJA
2017	80,82	80,27	95,77	89,90	90,27
2018	95,71	88,55	97,53	92,10	93,11
2019	94,92	89,27	98,34	89,13	93,49

Sumber: Kementerian Keuangan

1. **Kinerja pada Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan mengalami sedikit penurunan dari angka 95.71 di 2018 menjadi 94.92 di tahun 2019.** Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh reformulasi indikator Deviasi Hal III DIPA berupa pengetatan ketentuan penyesuaian rencana penarikan dana bulanan. Hal tersebut menyebabkan angka rata-rata Deviasi Halaman III DIPA bulanan K/L naik menjadi 15,03%. Sementara itu, capaian positif terdapat pada indikator Revisi DIPA yang ditunjukkan dengan berkurangnya frekuensi revisi DIPA secara signifikan.
2. **Kinerja pada Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi mengalami peningkatan dari angka 88,55 (2018) menjadi 89,27 (2019).** Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja pada: (1) ketepatan waktu penyampaian Ganti Uang Persediaan (GUP), (2) ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggunjawaban (LPJ) Bendahara, dan (3) ketepatan waktu penyampaian data kontrak.
3. **Kinerja pada Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan mengalami peningkatan dari angka 97,53 (2018) menjadi 98,34 (2019).** Indikator yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan nilai aspek ini adalah indikator Penyelesaian Tagihan yang tingkat ketepatan waktunya naik sebesar 2,43 poin pada tahun 2019. Sementara itu, pada indikator Retur SP2D, terdapat penambahan jumlah retur sebanyak 1.473 SP2D dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4. **Kinerja pada Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan sedikit mengalami penurunan dari angka 92,10 (2018) menjadi 89,13 (2019).** Pada kategori ini, terjadi peningkatan nilai yang signifikan pada indikator Renkas. Sedangkan pada nilai indikator kinerja Kesalahan SPM terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat reformulasi dengan penerapan batas toleransi maksimal SPM Salah/Dikembalikan sebesar 2,5% dari total SPM, namun kesalahan SPM masih terealisasi sebesar 4,0%.

Pada praktiknya, data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Aplikasi tersebut mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker K/L di Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, seluruh K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan level Satker K/L secara *real time*, sehingga K/L dapat dengan cepat dan tepat melakukan perbaikan atas kinerja pelaksanaan anggarannya. Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, maka dapat dilihat perkembangan IKPA agregat dari seluruh K/L terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan, serta sinergi dan upaya dari seluruh K/L dalam meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggarannya guna mewujudkan belanja yang semakin berkualitas.

Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2019 terbesar pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 26,74 persen dan Fungsi Ekonomi 23,95 persen

Struktur APBN tahun anggaran 2019 juga mengelompokkan belanja pemerintah pusat berdasarkan 11 kategori klasifikasi fungsi. Pada APBN tahun 2019, fungsi yang memiliki porsi terbesar secara anggaran maupun realisasi adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, dianggarkan masing-masing sebesar 31,65 persen dan 23,84 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Sedangkan sisanya sebesar 44,51 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Alokasi fungsi pelayanan umum yang dialokasikan demikian besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah secara umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi layanan publik agar lebih efektif, profesional dan efisien. Demikian juga dengan alokasi fungsi ekonomi yang berada pada urutan terbesar kedua merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Menurut Fungsi (dalam triliun rupiah)

No	Fungsi	APBN 2019	Realisasi 2019	% Realisasi	Realisasi 2018
1	Pelayanan Umum	517,34	400,09	77,34%	375,19
2	Pertahanan	108,43	115,42	106,45%	106,83
3	Ketertiban dan Keamanan	142,97	147,96	103,49%	143,30
4	Ekonomi	389,60	358,43	92,00%	382,42
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	17,76	16,09	90,60%	13,70
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	26,52	26,62	100,40%	32,19
7	Kesehatan	62,76	71,01	113,14%	61,86
8	Pariwisata dan Budaya	5,32	4,23	79,44%	10,69
9	Agama	10,14	11,22	110,61%	9,37
10	Pendidikan	152,69	155,16	101,62%	145,94
11	Perlindungan Sosial	200,80	190,08	94,66%	173,77
	TOTAL	**1.634,34**	**1.496,31**	**91,55%**	**1.455,26**

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan tahun 2019 secara nominal didominasi fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi dan perlindungan sosial. Sedangkan persentase realisasi tertinggi dan melebihi target hingga *double digits* terlaksana pada fungsi kesehatan 113,14 persen dan fungsi agama 110,61 persen. Selain mencapai persentase realisasi tertinggi, realisasi belanja fungsi agama dan fungsi kesehatan mengalami peningkatan signifikan bersama dengan fungsi perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai fungsi dengan alokasi terbesar, realisasi fungsi pelayanan umum yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2019 karena pelaksanaan pemilu pada tahun 2019. Perhatian pemerintah untuk meningkatkan fungsi layanan umum dengan cara memperbaiki tata kelola dan manajemen birokrasi tercermin dari besarnya proporsi realisasi fungsi pelayanan umum, sekaligus telah membuahkan hasil peningkatan kategori 'kemudahan berusaha' di Indonesia menjadi peringkat 73 (naik 41 peringkat dari 114) berdasarkan laporan *Doing Business* 2019 yang dirilis Bank Dunia.

Realisasi fungsi ekonomi bersumber dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan serta pengembangan UMKM dan koperasi. Belanja fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat infrastruktur dasar, konektivitas dan ketahanan pangan. Keberhasilan pencapaian pembangunan hingga 2019 secara umum dapat terlihat pada hasil pembangunan perkeretaapian, jalan baru, bendungan baru, jembatan baru, bandara baru, fasilitas pelabuhan laut dan fasilitas kelengkapan jalan.

Peningkatan realisasi yang signifikan pada fungsi agama menghasilkan: (1) peningkatan pembinaan haji sehingga menghasilkan petugas haji yang profesional, (2) peningkatan bimbingan masyarakat Islam melalui pemberian tunjungan bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan (3) peningkatan bimbingan masyarakat Kristen melalui program pembersihan rumah ibadah.

Peningkatan realisasi fungsi kesehatan diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, (2) peningkatan akses mutu terhadap pelayanan gizi masyarat, termasuk program konvergensi percepatan penurunan *stunting* melalui belanja K/L di bidang kesehatan (3) peningkatan pengedalian penyakit dan penyehatan lingkungan, (4) pengendalian jumlah penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas KB, dan (5) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Tahun 2019 mencapai Rp812,97 triliun

APBN merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi positif dalam rangka mendorong perekonomian yang stabil melalui kebijakan *countercyclical*. Hal tersebut juga dilaksanakan melalui kebijakan TKDD. Pada tahun 2019, realisasi TKDD mencapai 98,33 persen terhadap pagu. Realisasi ini meningkat 7,28 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp757,79 triliun. Secara umum, kinerja penyaluran TKDD pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan kinerja penyaluran tahun sebelumnya. Realisasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp743,16 triliun atau 98,20 terhadap pagu serta Dana Desa sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. TKDD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai salah satu strategi kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Peningkatan TKDD tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam upaya menyediakan layanan dasar publik yang layak dan memadai serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Peningkatan Dana Transfer ke Daerah bersumber dari kenaikan keseluruhan komponen Dana Perimbangan, baik dari Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus. Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp711,28 triliun atau 98,16 persen dari target APBN 2019 meningkat 6,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara persentase, kenaikan ini terutama berasal dari kontribusi Dana Bagi Hasil (pada Dana Transfer Umum) yang meningkat 10,97 persen dan Dana Alokasi Khusus Fisik (pada Dana Transfer Khusus) yang meningkat 10,35 persen. Namun secara nominal, kenaikan terbesar bersumber dari peningkatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Pencapaian realisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penyelesaian sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) hingga tahun 2018 dan kebijakan DAU tambahan untuk membayar kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan penduduk (PBI BPJS) yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran dana TKDD. Realisasi DAU pada tahun 2019 melebihi target dengan capaian 100,73 persen juga bersumber dari kebijakan DAU tambahan yang disalurkan sebagai bantuan pendanaan kelurahan kepada 403 Pemerintah Daerah di tahap I dan kepada 324 Pemerintah Daerah di tahap II.

Penyempurnaan pengelolaan TKDD untuk penguatan desentralisasi fiskal juga telah dilaksanakan melalui langkah kebijakan: (1) menambah persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa laporan realisasi capaian *output* yang sudah direviu oleh Inspektorat Daerah; (2) Penyempurnaan proses penyusunan dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang digunakan bersama oleh Pemda, K/L teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan; dan (3) Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja dan kebijakan percepatan penyaluran dana bagi desa yang berkinerja baik. Persyaratan ini diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai target penyaluran transfer yang berkualitas. Pada semester awal tahun 2019, penundaan penyaluran DAU

reguler diberlakukan terhadap beberapa pemerintah daerah yang belum memenuhi Alokasi Dana Desa, belum menyampaikan laporan informasi keuangan daerah atau belum menyampaikan laporan realisasi APBD Semester I tahun 2019. Kebijakan ini dapat diterapkan secara baik hingga peningkatan TKDD yang efektif dapat dicapai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Transfer Khusus (DTK) secara keseluruhan mengalami peningkatan. Penggunaan DTK diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mencapai daya saing daerah melalui pendidikan dan kesehatan (termasuk penanganan dan pencegahan *stunting*), peningkatan infrastruktur daerah, pelayanan publik dan kepariwisataan. DTK pada tingkat yang lebih detail yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, mengalami kenaikan *double digits*, namun nilainya lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, syarat tambahan berupa reviu atas laporan capaian *output* oleh Inspektorat Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan DAK Fisik. Penyaluran DAK Nonfisik pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang dipengaruhi oleh membaiknya tingkat kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru (TKG), serta peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Koordinasi yang dilakukan dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga teknis secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan kegiatan lainnya kepada Pemerintah Daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan realisasi penyaluran DAK Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan telah diterima oleh 336 Pemerintah Daerah pada tahap I yang antara lain terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Pada tahap II DID disalurkan kepada 301 Pemerintah Daerah dengan total realisasi tahun 2019 Rp9,69 triliun atau 96,94 persen dari target. Dana Keistimewaan DIY dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mengalami peningkatan realisasi menjadi Rp22,18 triliun dari Rp21,06 triliun di tahun 2018, atau sebesar 100,00 persen dari target APBN 2019 meningkat 5,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana Desa yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73 persen terhadap anggaran. Seiring dengan peningkatan anggaran Dana Desa di tahun 2019, nominal realisasi ini meningkat 16,63 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran telah diiringi dengan peningkatan kinerja realisasinya. Hal ini dapat tercapai atas usaha yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong daerah untuk memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Defisit Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp348,65 triliun

Defisit anggaran Tahun 2019 sebesar Rp348,65 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB nominal tahun 2019, dengan nilai keseimbangan primer sebesar negatif Rp73,13 triliun. Defisit dalam APBN 2019 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Defisit pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 1,84 persen terhadap PDB. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mempertahankan

stimulus fiskal melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa agar tetap tinggi dan efektif di tengah kondisi ketidakpastian global. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. Secara paralel, selain menerapkan kebijakan defisit anggaran dalam menjalankan fungsi APBN sebagai *countercyclical* di tengah penurunan ekonomi global, komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal ditandai dengan tingkat defisit yang relatif terkendali dan rasio utang berada di bawah ambang batas maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 9. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2019
(dalam triliun rupiah)

Indikator	UU APBN 2019	Realisasi 2019
Surplus/ (Defisit) Anggaran	(296,00)	**(348,65)**
PDB Nominal	**16.087***	**15.834**
Defisit thd PDB	(1,84%)	**(2,20%)**

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik
**) Asumsi APBN 2019*

Realisasi Pembiayaan pada APBN Tahun 2019 sebesar Rp402,05 triliun

Pelebaran defisit pada tahun 2019 merupakan dampak dari komitmen pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi domestik sebagai upaya preventif terhadap kondisi pelemahan ekonomi global. Pelebaran defisit diantisipasi dengan pemanfaatan pembiayaan oleh pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN. Pembiayaan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2019, pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian bangsa melalui fungsinya dalam menutup defisit APBN, membiayai penyertaan modal negara pada BUMN, serta komitmennya dalam melaksanakan pendalaman pasar dalam negeri.

Secara umum, kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, (2) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional, (3) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. (4) menggunakan SAL untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, (5) mengembangkan pembiayan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, kewajiban penjaminan (antara lain: untuk pinjaman langsung (*direct lending*), dan peningkatan akses pembiayaan KUMKM, (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional, (7) mendukung peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account (NIA)*, (8) meningkatkan efektivitas peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian PMN kepada BUMN, (9) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, (10) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, (11) mendukung program penyediaan kebutuhan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR, serta (12) Penguatan peran LPDP sebagai *sovereign wealth fund (SWF)* pendidikan dengan mendorong penajaman dan perluasan program layanan serta penguatan manajemen investasi.

Pada tahun 2019, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari APBN. Realisasi pembiayaan anggaran terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp437,54 triliun. Pembiayaan investasi sebesar negatif Rp49,39 triliun utamanya berasal dari pengeluaran pembiayaan PMN untuk BUMN, pengadaan tanah proyek strategis nasional dan dana bergulir. Pemberian/penerusan pinjaman sejumlah negatif Rp1,28 triliun bersumber dari penarikan pembiayaan yang dipersiapkan untuk mendanai program dan proyek.

Pembiayaan utang menjadi alternatif kebijakan dalam menutup defisit anggaran, dimana Pemerintah secara konsisten berupaya mendorong pengelolaan utang secara *prudent* dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, serta mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Tabel 10. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2019
(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2019	Realisasi 2019	% Thd APBN
Pembiayaan Utang	359,25	437,54	121,79%
Pembiayaan Investasi	(75,90)	(49,39)	65,07%
Pemberian/Penerusan Pinjaman	(2,35)	(1,28)	54,40%
Pembiayaan Lainnya	15,00	15,18	101,20%
Total Pembiayaan	**296,00**	**402,05**	**135,83%**

Sumber: Kementerian Keuangan

Boks 3

Perkembangan Green Global Sukuk Indonesia
Terobosan Pembiayaan Ramah Lingkungan Indonesia
merupakan negara pertama penerbit *Green Global* Sukuk

Indonesia membuktikan komitmennya terhadap Kesepakatan Iklim Paris 2016 dan telah menunjukan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan sehingga menarik investor asing semakin beralih ke praktik *Sustainable Corporate Governance* khususnya dalam pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah. Pemerintah mengembangkan *Green Bond and Green Sukuk framework* sebagai kerangka kerja untuk membiayai proyek ramah lingkungan di sembilan sektor, yakni energi terbarukan, penggunaan teknologi bersih untuk pembangkit listrik, pertahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, wisata hijau, bangunan hijau dan pertanian berkelanjutan. Transaksi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pasar keuangan Islam global dan berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan yang ramah lingkungan. Adapun proyek-proyek green yang telah disiapkan Pemerintah untuk *Green Global* Sukuk yang kedua ini adalah Proyek-proyek *green* APBN TA 2018 sebesar Rp8,207 triliun; dan serta Proyek-proyek *green* APBN TA 2016 (sudah selesai dilaksanakan) sebesar Rp8,547 triliun. Proyek-proyek dimaksud tersebar di empat Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia Menghasilkan Penghargaan Internasional untuk *Green Global* Sukuk Indonesia.

Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan dan membuahkan hasil berbagai prestasi dan pengakuan dunia internasional yaitu:

1. *Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year dari Global Capital, Euromoney*
2. SRI *Bond, Islamic Issue* dari IFR Asia
3. SRI *Capital Market Issue of The Year* dari IFR Asia
4. *Sovereign Deal of the Year dari Islamic Finance News*
5. *Deals of the Year dari Islamic Finance News*
6. *Green Bond Pioneer Award* dari *Climate Bond Initiative*

Penghargaan *International Islamic Issue of the Year dan SRI Capital Market Issue of the Year dari International Financing Review Asia* baru saja diterima Pemerintah Indonesia di Hong Kong pada tanggal 26 Februari 2019. Kemudian disusul pada tanggal 5 Maret 2019 memperoleh *Annual Green Bond Pioneer Awards* dari *Climate Bonds Initiative* di London. Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional senilai USD3 miliar dan sekaligus termasuk keberhasilan menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (*Global Green Sukuk*) senilai USD1,25 miliar pada tanggal 1 Maret 2018. Penerbitan ini berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat dan peningkatan suku bunga *The Fed*. Indonesia Global Green Sukuk berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar USD3 miliar (*oversubscribed* 2,5 kali) dengan diversifikasi investor yang luas, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29 persen didistribusikan untuk investor *green* yaitu investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan.

Secara finansial, struktur *green bonds*/sukuk tidak berbeda dengan obligasi/sukuk pada umumnya

Indonesia *Global Green Bond* memberikan imbalan (*return*) secara periodik berupa kupon yang dapat bersifat tetap (*fixed*) maupun mengambang (*variable/float*) dan pelunasan nominal obligasi/sukuk pada saat jatuh tempo. *Green bonds*/sukuk dapat diterbitkan sebagai suatu *asset-backed securities* di mana penerbitannya serta dana hasil penerbitannya (*use of proceeds*) dikaitkan secara langsung untuk mendanai portofolio proyek-proyek dan proyek infrastruktur tertentu yang dikategorikan "*hijau*". Komitmen, kontribusi dan keseriusan pemerintah merupakan bukti nyata dalam usaha mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan pada akhirnya menarik dunia internasional untuk memberi penghargaan terhadap Indonesia.

Sumber: Kementerian Keuangan.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2019	2018
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	3	3
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	3
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	42	42
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.827	1.657
5	BA 006	Kejaksaan Agung	535	533
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	77	1.253
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	145	146
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	514	500
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.138	1.181
11	BA 015	Kementerian Keuangan	900	1.104
12	BA 018	Kementerian Pertanian	636	823
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	100	106
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	44	46
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	581	607
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	319	420
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	419	1.681
18	BA 025	Kementerian Agama	5.565	6.208
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	300	315
20	BA 027	Kementerian Sosial	318	276
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	331	333
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	411	408
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.272	1.177
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	3
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	4
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	49	57
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	2
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	290	241
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	129	281
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	42

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2019	2018
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	2
34	BA 051	Badan Siber dan Sandi Negara	1	2
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	517	515
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	36	38
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	504	502
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	37	38
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	65
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.380	1.290
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	43	44
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	41
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	224
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	205	393
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	41	43
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	2
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	194	192
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	550
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	2
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	3
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	39	47
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	18	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	22	22
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	2
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	4
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	9
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	37	38
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	41
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	444	502
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	43
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	2
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	3
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	2
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	2
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	28	29
71	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	2
72	BA 107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	40	41
73	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
74	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	2
75	BA 110	Ombudsman RI	1	2
76	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	38	32
77	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	2
78	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2	2
79	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
80	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
81	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	71
82	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	31
83	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2	2
84	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	2
85	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
86	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1
87	BA 122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	-

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2019	2018
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	182	182
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	12	12
	BA 999.04	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	177	177
	BA 999.07	Belanja Subsidi	16	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	11	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	28	19
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	77	72
		Jumlah Entitas Akuntansi	**23.326**	**26.960**

Catatan:

- Jumlah entitas akuntansi berdasarkan jumlah satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan baik aktif atau inaktif (tidak mempunyai DIPA), termasuk satuan kerja konsolidasi (satkons)
- Terdapat penambahan satu Unit Akuntansi Pengguna Anggaran pada tahun 2019 yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA 122).
- Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014 maka Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Terdapat perubahan nomenklatur pada:
  BA 051: Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara.
  BA 107: Badan SAR Nasional menjadi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional.
  BA 999.04: Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

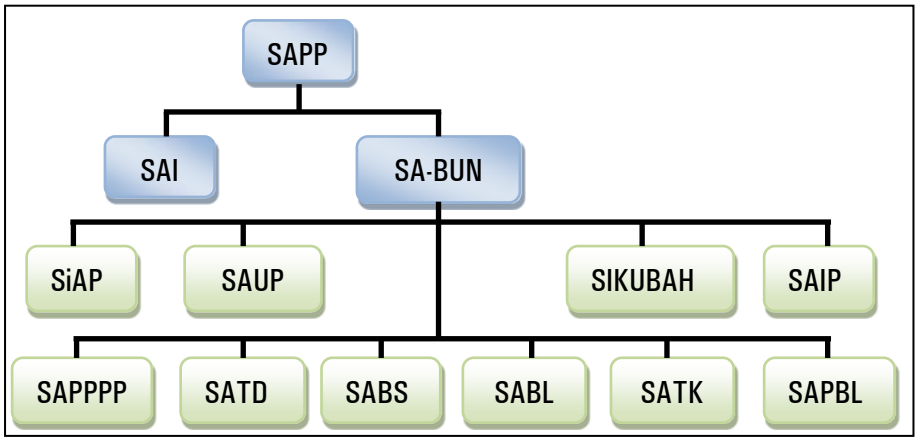
Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
   - Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

   Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment,* serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

- **Pendapatan**

  Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

  a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah

Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

- **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah(SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

- **Pembiayaan**

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau

pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

- **Aset**

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

- **Aset Lancar**

  Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

  Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

  Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

  - Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
  - Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
  - Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
  - Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar

Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemeritah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- **Investasi Jangka Panjang**

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

   Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- **Aset Tetap**

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian

kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
    1. peralatan dan mesin; atau
    2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
    1. gedung dan bangunan; atau
    2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
   a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
   b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penmberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Aset Lainnya**

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya. Termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi Jasa.

Sejak tahun 2019, penyajian mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Namun demikian, melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-379/KM.05/2020 tentang Penundaan Penyajian Aset dan Kewaijban Konsesi Jasa Pada *Face* Laporan Keuangan Tahun 2019, disampaikan bahwa Konsesi Jasa di Tahun 2019 ditunda untuk disajikan pada *face* laporan keuangan dan cukup diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan

atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.

e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

- **Kewajiban**

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

  Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain..

  Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

  Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

  Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

  Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

  Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

  Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

  Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

  Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

  Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2019 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

  - ***Fixed Rate (FR) Bonds*** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
  - **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
  - ***Saving Bond Ritel*** **(SBR)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

- ***Variable Rate (VR) Bonds*** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Zero Coupon (ZC) Bond*** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0.1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- ***International Bonds*** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontijensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

- **Ekuitas**

  Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Kurs Mata Uang Asing**

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	13.901,01	14.481,00
Dolar Australia [AUD]	1	9.739,06	10.211,29
Dolar Canada [CAD]	1	10.654,16	10.624,37
Franc Swiss [CHF]	1	14.365,75	14.709,75
Yuan China [CNY]	1	1.990,84	2.109,95
Kroner Denmark [DKK]	1	2.086,27	2.217,87
Euro [EUR]	1	15.588,60	16.559,75
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.249,94	18.372,78
Yen Jepang [JPY]	100	12.796,66	13.111,51
Korean Won [KRW]	1	12,01	13,03

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
   Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
   a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
   b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Oustanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

- **Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi

berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

- **Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Enititas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;

- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

- **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP barbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasls Akrual pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

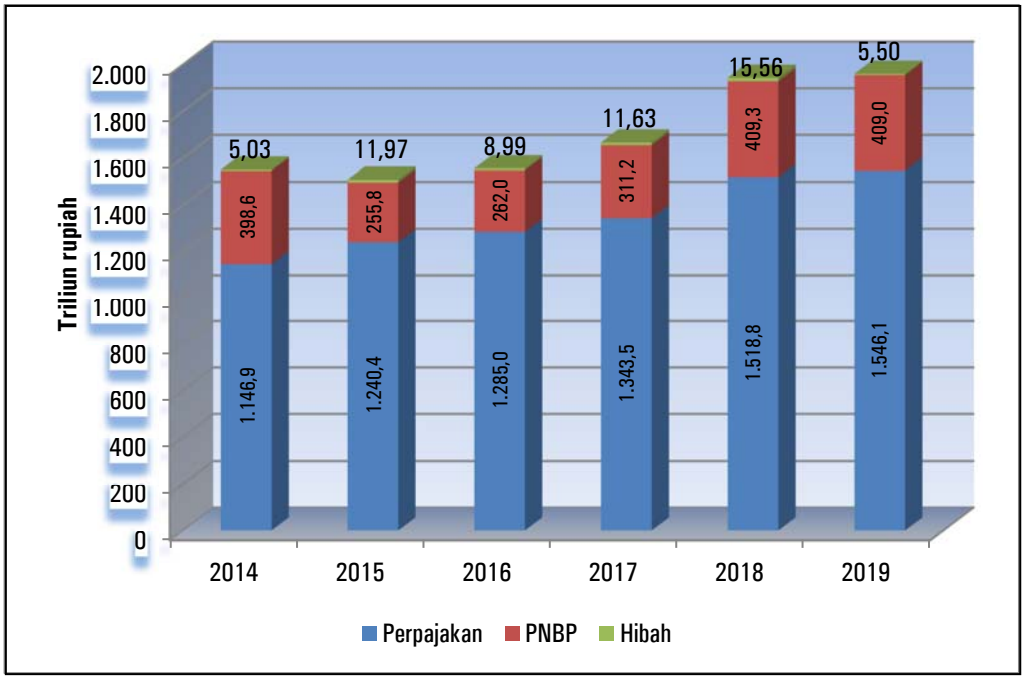
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp1.960.633.583.585.989 atau mencapai 90,56 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sebesar Rp2.165.111.815.814.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.141.893.392.193, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp408.994.346.200.875, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.497.343.992.921. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp11.153.510.635.628 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp354.326.302.000.

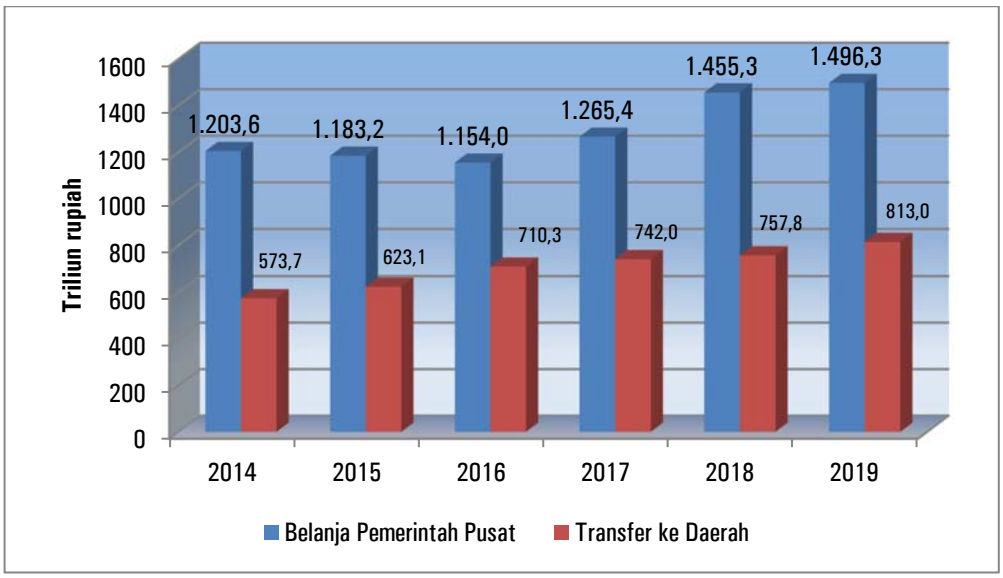
Pendapatan Negara TA 2019 mengalami kenaikan Rp16.958.706.707.188 atau lebih besar 0,87 persen jika dibandingkan dengan TA 2018..

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2014 2019

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.287.309.507.383 atau 93,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461.112.052.481.000. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496.313.886.364.770, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp812.973.423.142.613. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2014- 2019

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.960.633.583.585.989 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.309.287.309.507.383, maka Defisit Anggaran pada TA 2019 adalah sebesar Rp348.653.725.921.394.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2019 adalah sebesar Rp402.051.510.185.251 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp419.550.747.504.799 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.499.237.319.548.

Pembiayaan (Neto) sebesar Rp402.051.510.185.251 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp348.653.725.921.394 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

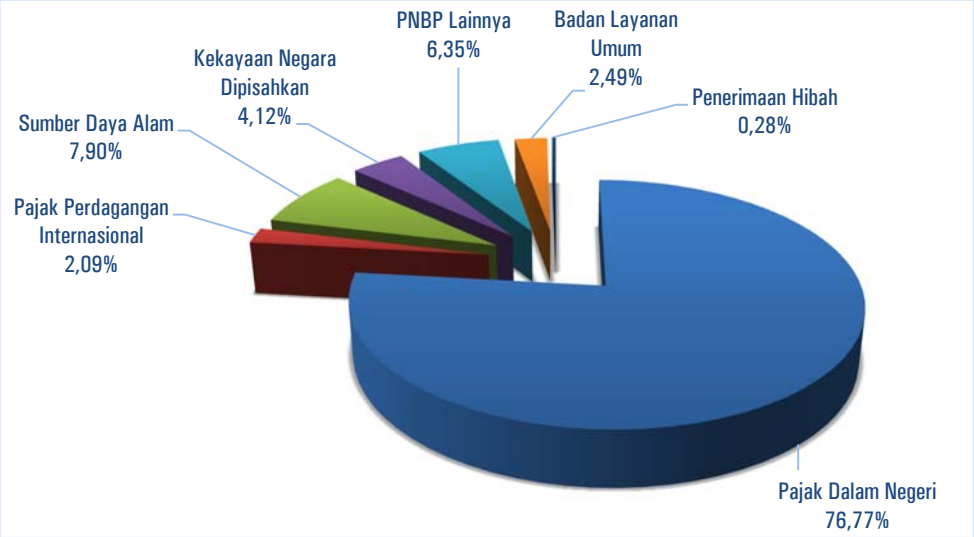
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara Rp1.960,63 triliun

Realisasi Pendapatan Negara TA 2019 adalah sebesar Rp1.960.633.583.585.989 atau 90,56 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.165.111.815.814.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2019 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik 20. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2019

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 1A**.

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto adalah sebesar minus Rp7.141.889.589. Perbedaan pencatatan ini terjadi karena disebabkan adanya selisih kurs. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar minus Rp7.141.528.469 dan PNBP minus Rp361.120.

B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp1.546,14 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2019 adalah sebesar Rp1.546.141.893.392.193 atau 86,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.786.378.650.376.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2019 lebih besar Rp27.352.116.241.158 atau naik 1,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.518.789.777.151.030. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp11.153.510.635.628 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp354.326.302.000

B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Pajak Dalam Negeri Rp1.505,08 triliun

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp1.505.088.202.287.697 atau 86,35 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.743.056.850.376.000. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 lebih besar Rp32.180.237.917.340 atau naik 2,18 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Pendapatan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas)	59.150.314.819.928	64.699.145.451.922
Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas	701.961.892.831.112	675.165.778.735.455
Pendapatan Pajak Penghasilan Fiskal	-	349.905.982
Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah	11.153.510.635.628	10.111.755.590.449
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758
Pendapatan BPHTB	-	32.748.454
Pendapatan Cukai	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225
Pendapatan Pajak Lainnya	6.212.194.737.201	6.629.526.207.843
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.465.155.097.749	-
Jumlah	**1.505.088.202.287.697**	**1.472.907.964.370.352**

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 2,18 persen ditopang oleh Pajak Penghasilan Nonmigas dan Pendapatan Cukai. PPh Nonmigas terutama penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final yang dipengaruhi oleh masih terjaganya pasar tenaga kerja dan konsumsi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global, sektor usaha penyokong penerimaan pajak di tahun 2019 seperti sektor jasa keuangan, asuransi dan sektor Transportasi dan Pergudangan masih tumbuh dengan cukup baik. Untuk pertumbuhan Pendapatan Cukai ditopang oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang dipengaruhi faktor kebijakan pelunasan pita cukai dan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri sebagai akibat semakin kondusifnya daerah pasar utama, kebijakan pembatasan impor MMEA dari Eropa, serta menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata di tahun 2019.
Terdapat penurunan pada Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang disebabkan oleh penurunan penjualan jenis mobil, termasuk di dalamnya penjualan mobil yang dikenakan PPnBM.

B.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Rp41,05 triliun

Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 adalah sebesar Rp41.053.691.104.496 atau 94,76 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp43.321.800.000.000. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 lebih kecil Rp4.828.121.676.182 atau turun 10,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk	37.526.981.312.119	39.116.746.986.751
Pendapatan Bea Keluar	3.526.709.792.377	6.765.065.793.927
Jumlah	**41.053.691.104.496**	**45.881.812.780.678**

Penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2019 antara lain disebabkan karena perlambatan yang terjadi pada perekonomian global sehingga menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia, dan penurunan volume impor yang didorong oleh penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC) dibandingkan tahun lalu. Penurunan Pendapatan Bea Keluar TA 2019 terutama disebabkan karena penurunan ekspor komoditas mineral yang memiliki *share* terbesar, dan ekspor tembaga sebagai penopang penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan akibat perubahan pola produksi perusahaan pertambangan besar di Indonesia.

B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp408,99 triliun

Realisasi PNBP TA 2019 adalah sebesar Rp408.994.346.200.875 atau 108,11 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp378.297.855.438.000. Realisasi PNBP TA 2019 lebih rendah Rp325.893.287.571 atau turun 0.08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp409.320.239.488.446. Realisasi PNBP berasal dari (i). Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (iii) Pendapatan PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp154,89 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2019 adalah sebesar Rp154.895.286.766.287 atau 81,20 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp190.754.771.994.000. Penerimaan SDA TA 2019 lebih kecil Rp25.697.363.057.354 atau turun 14,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	83.622.340.876.020	101.486.695.315.900
Pendapatan Gas Bumi	37.467.520.404.392	41.302.551.779.459
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	26.343.691.801.600	30.313.666.621.680
Pendapatan Kehutanan	5.007.257.006.149	4.760.407.698.602
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Panas Bumi	1.932.540.462.691	2.280.576.522.397
Jumlah	**154.895.286.766.287**	**180.592.649.823.641**

Penurunan penerimaan SDA Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama pada penerimaan SDA Migas dan Minerba. Penurunan Pendapatan SDA Migas terutama disebabkan karena lebih rendahnya rata-rata ICP (*Indonesian Crude Price*) periode Januari sampai dengan Desember 2019 yaitu USD62,3 per barel, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2018 USD67,5 per barel. Penurunan Pendapatan Mineral dan Batu Bara terutama dipengaruhi oleh rata-rata HBA (Harga Batubara Acuan) pada Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar USD77,9 per ton, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 sebesar USD99 per ton.

B.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp80,72 triliun

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp80.726.119.206.790 atau 177,07 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp45.589.300.000.000. Realisasi Pendapatan dari KND ini lebih besar Rp35.665.597.830.821 atau naik 79,15 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun 2019 berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2019 sebesar Rp50.634.211.382.087 dan Pendapatan dari KND lainnya sebesar Rp30.091.907.824.703.

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	18.595.470.253.531	16.267.751.186.649
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	32.038.741.128.556	28.792.770.189.320
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	30.091.907.824.703	-
Jumlah	**80.726.119.206.790**	**45.060.521.375.969**

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp18.595.470.253.531, seluruhnya adalah berasal dari BUMN di Bawah Kementerian BUMN. Untuk Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan berasal dari BUMN di Bawah Kementerian BUMN sebesar Rp31.178.225.498.951, dan BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp860.515.629.605.

Peningkatan Pendapatan KND ini disebabkan adanya setoran Sisa Surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah sebesar Rp30.091.907.824.703 yang disetorkan setelah selesainya audit Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun Buku 2018.

Terdapat Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp5.573.690.006.118 terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan dan non perbankan yang mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2019 tersebut, sebesar 53,36 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.252.196.310.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.453.626.566.083
3	PT Pertamina (Persero)	7.950.000.000.000
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.754.055.616.000
5	PT PLN (Persero)	4.000.000.000.000
6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.252.267.799.962
7	PT Pegadaian (Persero)	1.387.539.948.879
8	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.087.496.000.000
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.045.119.000.000
10	PT Jasa Raharja (Persero)	891.129.074.575
Total 10 BUMN		**43.073.430.315.499**

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 1B**.

B.2.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya Rp124,50 triliun

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2019 adalah sebesar Rp124.503.627.232.432 atau 132,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 yaitu sebesar Rp94.069.331.600.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2019 lebih kecil Rp4.070.382.805.786 atau turun 3,17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	19.006.470.818.652	22.768.752.720.908
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	341.531.328.482	250.827.244.737
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	522.960.362.436	1.575.471.215.636
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	626.866.552.049	573.611.868.078
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	81.725.622.928	62.256.481.499
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	10.530.277.359.314	20.655.579.279.504
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.319.299.142.276	1.351.576.937.661
Sub Total	**32.429.131.186.137**	**47.238.075.748.023**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	4.303.327.782.245	3.508.128.693.239
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	737.756.064.394	801.858.988.566
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	738.384.144.329	710.472.768.619
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	1.150.028.180.079	1.253.573.712.907
Pendapatan Perizinan	1.705.887.057.430	1.566.453.310.352
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.165.177.999.000	8.491.555.385.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	959.273.623.322	876.003.488.818
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	606.540.203.948	560.109.228.431
Sub Total	**18.366.375.054.747**	**17.768.155.575.932**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.007.631.953.650	3.849.996.353.287
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	196.358.994.030	179.606.380.001
Pendapatan Jasa Karantina	361.295.658.526	344.312.823.136
Pendapatan Jasa Agraria	2.255.101.568.584	2.177.144.211.554

Pendapatan Jasa Keagamaan	907.998.471.631	869.992.567.168
Sub Total	**6.728.386.646.421**	**7.421.052.335.146**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.234.651.512.314	4.091.137.740.960
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	471.750.913.878	283.378.471.210
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	515.980.531.081	383.125.471.424
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	6.646.684.597	6.252.526.140
Sub Total	**5.229.029.641.870**	**4.763.894.209.734**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.965.694.762.838	6.319.589.621.391
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	18.767.984.812.439	17.446.455.866.510
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	169.538.431.335	184.441.567.495
Sub Total	**25.903.218.006.612**	**23.950.487.055.396**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.710.655.162	204.088.090.073
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	30.821.873.691	21.799.455.591
Pendapatan Jasa Lainnya	198.369.688.037	684.168.810.068
Sub Total	**429.902.216.890**	**910.056.355.732**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.825.320.700.269	1.656.180.667.138
Pendapatan *Gain On Bond Redemption*	5.807.000.000	
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	8.713.038.583.942	2.282.759.533.200
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan *Fee* Lainnya Atas Transaksi SBN	118.681.119.410	94.901.097.815
Pendapatan dari Selisih Kurs	12.607.030.733	242.930.299.187
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	232.120.267.593	287.720.782.980
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	7.736.672.109.435	6.054.091.902.483
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	660.546.658.421	481.447.093.712
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	29.088.869.541	53.238.480.276
Sub Total	**19.333.882.339.344**	**11.153.269.856.791**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	417.029.576.247	540.373.238.968
Pendapatan Denda II	189.899.072.757	65.693.449.290
Pendapatan Denda III	7.461.242.171	5.657.999.395
Sub Total	**614.389.891.175**	**611.724.687.653**
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	14.879.041.347.105	6.467.615.893.218
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	308.842.085.674	261.161.535.102
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	24.230.256.247	33.306.961.074
Pendapatan Lain-Lain I	476.204.460	7.704.637.733.401
Pendapatan Lain-Lain II	256.722.355.750	290.572.091.016
Sub Total	**15.469.312.249.236**	**14.757.294.213.811**
Jumlah PNBP Lainnya	**124.503.627.232.432**	**128.574.010.038.218**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2019 melampaui target APBN TA 2019 terutama disebabkan meningkatnya Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum yang dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), pelayanan Jasa Komunikasi Dan Informatika, Jasa Transportasi, serta semakin membaiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

B.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU Rp48,86 triliun

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 adalah sebesar Rp48.869.312.995.366 atau 102,06 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 yaitu sebesar Rp47.884.451.844.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2019 lebih kecil Rp6.223.745.255.252 atau turun 11,30 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	33.307.807.529.959	28.739.609.164.736
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.615.780.715.595	1.507.220.557.604
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	5.003.672.214.239	17.622.794.124.394
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	770.883.894.730	944.213.288.248
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	40.698.144.354.523	48.813.837.134.982
Pendapatan Hibah BLU	154.843.013.918	90.948.165.044
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	855.074.995.219	1.556.582.772.589
Pendapatan dari Alokasi APBN	328.485.663.104	235.873.713.666
Pendapatan BLU Lainnya	6.832.764.968.602	4.395.816.464.337
Jumlah	**48.869.312.995.366**	**55.093.058.250.618**

Pendapatan BLU melebihi target APBN TA 2019 terutama karena kinerja BLU yang baik yaitu berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, dan pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik.

Pendapatan BLU Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 menurun sebesar Rp6.223.745.255.252 atau turun 11,30 persen. Penurunan ini terutama pada pendapatan dari Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, karena pada tahun 2019 tidak terdapat setoran Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit seperti pada tahun 2018 sebesar Rp14.413.921.271.119.

B.2.1.3 Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp5,49 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp5.497.343.992.921 atau 1.262,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp435.310.000.000. Penerimaan Hibah TA 2019 lebih kecil Rp10.067.516.246.399 atau turun 64,68 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Penerimaan Hibah merupakan penerimaan hibah dalam bentuk uang. Realisasi penerimaan hibah pada TA 2019 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	3.673.078.332.679	13.178.185.591.822
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**3.673.078.332.679**	**13.178.185.591.822**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	591.671.964.284	418.374.595.589
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.232.593.695.958	1.968.300.051.909
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	**1.824.265.660.242**	**2.386.674.647.498**
Jumlah Penerimaan Hibah	**5.497.343.992.921**	**15.564.860.239.320**

Realisasi Penerimaan Hibah mencapai 1.262,86 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN TA 2019, yaitu Hibah Langsung Dalam Negeri terutama dipengaruhi oleh adanya hibah langsung di beberapa K/L antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, dan KPU. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik. Apabila dibandingkan dengan dengan tahun 2018, Penerimaan Hibah menurun terutama karena pada tahun 2018 terdapat Penerimaan Hibah Langsung terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Belanja Negara Rp2.309,28 triliun

B.2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.287.309.507.383 atau 93,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461.112.052.481.000. Belanja Negara TA 2019 lebih besar Rp96.169.492.222.387 atau naik 4,35 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.213.117.817.284.996. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.496,31 triliun

B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 adalah sebesar Rp1.496.313.886.364.770 atau 91,55 persen dari APBN TA 2019 sebesar Rp1.634.339.518.949.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 lebih besar Rp40.989.007.137.153 atau naik 2,82 persen dari Realisasi TA 2018 sebesar Rp1.455.324.879.227.617.

Pada pelaksanaan APBN TA 2019 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2019 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN 2019 yaitu dalam Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 36. Ketentuan lebih lanjut mengenai Revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2019 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan realisasi berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar Rupiah dan/atau pembayaran kekurangan tahun-tahun sebelumnya;
2. Pagu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan Saldo BLU dari tahun sebelumnya;
3. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh K/L;
4. Perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam;
5. Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri/Hibah Dalam Negeri;
6. Penambahan/perubahan pagu DIPA karena adanya Hibah Luar Negeri Langsung maupun Hibah Dalam Negeri Langsung yang diterima setelah UU APBN TA 2019 ditetapkan;
7. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN;
8. Pergeseran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 yang menambah Pagu DIPA K/L dan BA BUN (pergeseran dari BA BUN 999.08 juga menambah Pagu per Jenis Belanja di K/L dan BA BUN sesuai karakteristik Belanja); dan
9. Penambahan pagu dalam rangka pembayaran bunga utang.

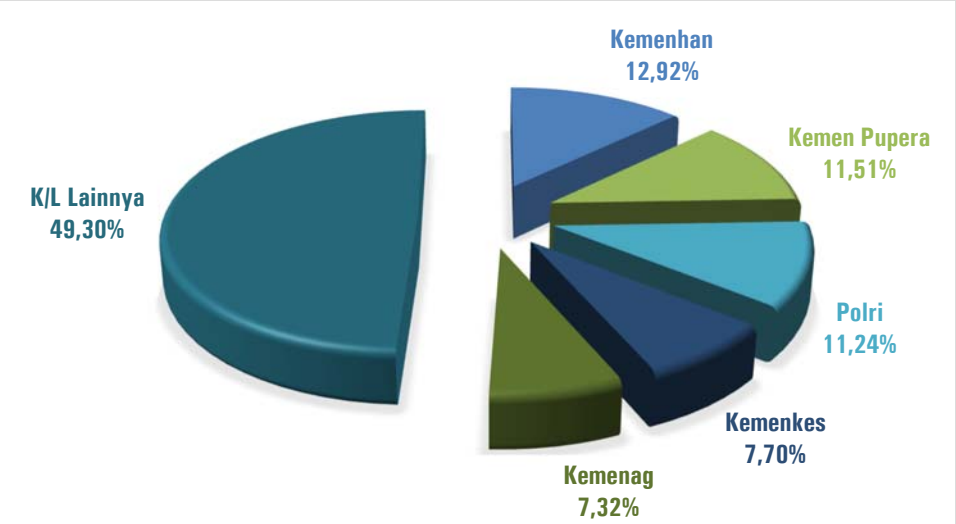
Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 terdiri atas Belanja pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp873.427.228.520.095 dan Belanja pada pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp622.886.657.892.672. Sedangkan perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp47.997.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2019 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2019

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat di **Lampiran 2A**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat perfungsi pada TA 2019 dan 2018 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

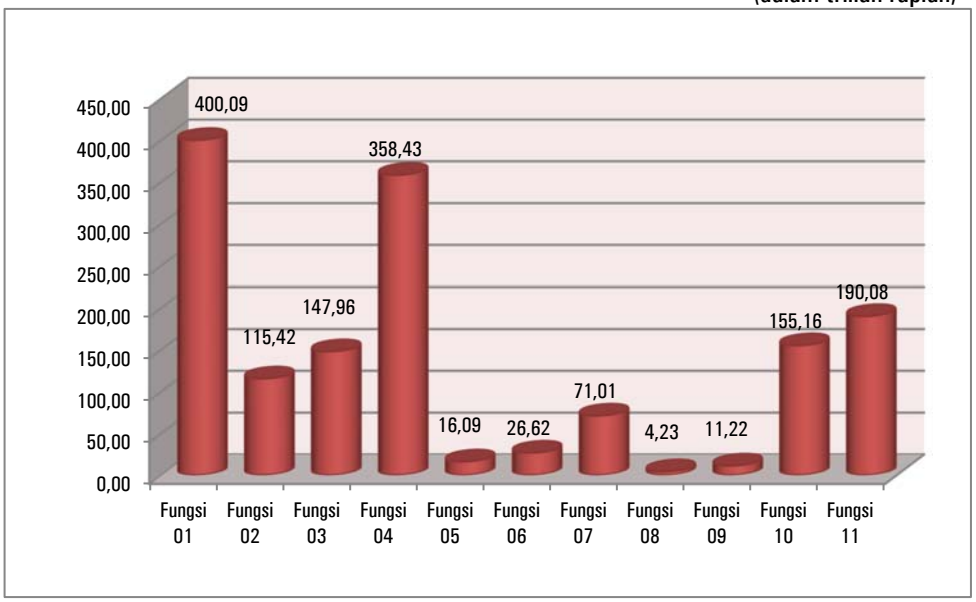
Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2019 dan TA 2018

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
01	Pelayanan Umum	517.341.733.100.000	400.090.671.402.068	375.196.058.527.405
02	Pertahanan	108.428.723.215.000	115.424.549.199.337	106.832.343.039.117
03	Ketertiban dan Keamanan	142.972.399.992.000	147.956.030.411.534	143.305.834.551.443
04	Ekonomi	389.600.014.317.000	358.426.613.159.901	382.420.938.264.524
05	Lingkungan Hidup	17.764.054.362.000	16.093.970.382.316	13.709.647.546.748
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	26.516.160.539.000	26.622.533.058.944	32.198.021.305.359
07	Kesehatan	62.758.348.019.000	71.006.919.734.410	61.869.740.305.698
08	Pariwisata dan Budaya	5.324.618.127.000	4.229.890.801.512	10.699.961.811.579
09	Agama	10.142.956.937.000	11.218.789.167.569	9.379.001.902.213
10	Pendidikan*	152.690.047.642.000	155.160.209.460.571	145.941.716.362.457
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	200.800.462.699.000	190.083.709.634.605	173.771.615.611.074
	Perbedaan pencatatan	-	(47.997)	-
	Total	**1.634.339.518.949.000**	**1.496.313.886.364.770**	**1.455.324.879.227.617**

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah ataupun . Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp492.455.088.152.000.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2019 terlihat pada Grafik 22.

(dalam triliun rupiah)



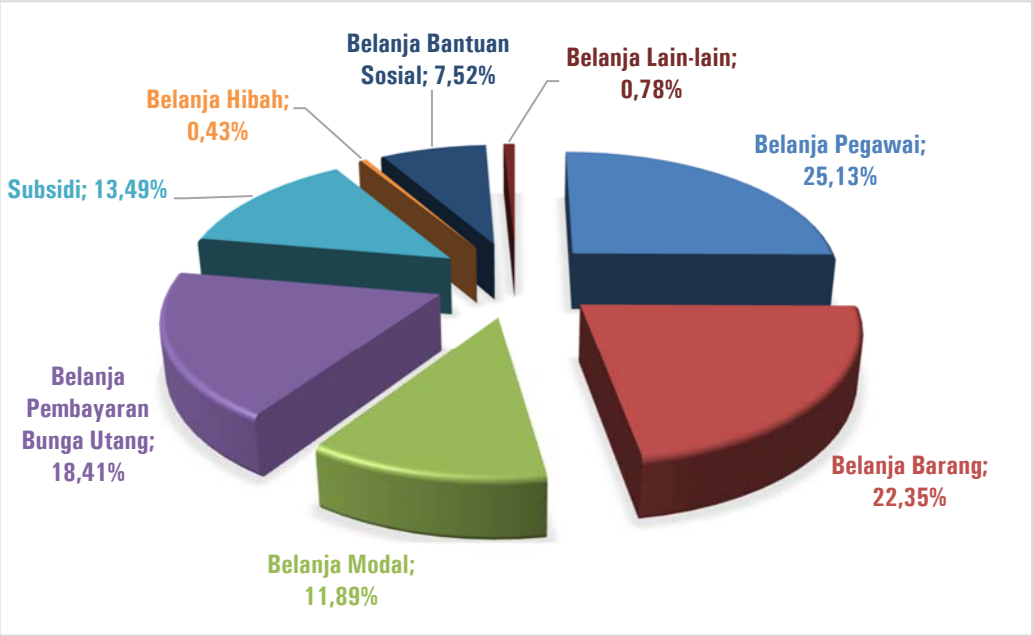
Grafik 22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2019

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran 2.B.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 23.



Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2019

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp376,07 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp376.074.259.852.619 atau 98,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp381.561.093.432.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2019 lebih besar Rp29.183.494.945.653 atau naik 8,41 persen dari realisasi TA 2018. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.321.261.837.421	88.761.414.586.452
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	61.403.644.288.750	59.259.965.936.719
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.011.570.524.956	687.701.259.485
Belanja Gaji Dokter PTT	66.695.423.253	143.441.868.160
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	15.785.948.877.732	7.815.199.731.645
Belanja Honorarium	1.876.741.556.492	1.715.499.887.178
Belanja Lembur	723.295.487.788	736.752.950.627
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	83.006.574.110.826	71.843.429.192.342
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	119.482.270.828.040	110.214.811.345.869
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	7.396.256.917.455	5.712.498.850.571
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(94)	49.297.918
Jumlah	**Rp376.074.259.852.619**	**346.890.764.906.966**

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terutama disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur Negara, serta adanya kenaikan tarif dan dasar perhitungan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang Rp334,41 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2019 adalah sebesar Rp334.418.207.630.784 atau 96,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp345.230.681.636.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2019 lebih kecil Rp13.050.127.479.785 atau turun 3,76 persen dari Realisasi TA 2018. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	44.385.250.069.807	43.230.122.239.028
Belanja Barang Non Operasional	70.563.122.087.864	76.260.723.012.604
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC		11.639.419.655
Belanja Kontribusi	509.322.406.367	317.058.748.451
Belanja Barang Persediaan	16.515.125.427.740	18.280.492.782.315
Belanja Jasa	32.584.351.712.027	35.723.270.208.473
Belanja Pemeliharaan	36.134.522.333.162	38.181.109.225.774
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.163.798.485.961	39.487.592.947.242
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.541.453.858.830	3.196.165.038.161
Belanja Barang BLU	41.238.015.097.725	36.718.290.173.038
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	22.265.717.321.271	30.103.540.060.344
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.048.499.740.731	1.260.615.823.049
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.469.030.412.202	24.697.784.830.577
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(1.322.903)	(69.398.142)
Jumlah	**334.418.207.630.784**	**347.468.335.110.569**

Belanja Barang BLU sebesar Rp41.238.015.097.725 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan	11.280.353.515.143	10.130.261.968.504
Belanja Barang	3.840.627.618.718	4.525.771.817.413
Belanja Jasa	5.740.856.493.387	4.925.312.401.378
Belanja Pemeliharaan	1.245.446.491.071	1.047.849.457.396
Belanja Perjalanan	1.313.100.429.261	1.101.344.741.454
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	1.920.222.868.140	2.154.624.925.372
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	5.734.385.403.341	6.276.885.963.449
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	959.702.444.183	251.835.550.050
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.560.788.364.084	3.046.747.996.648
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.695.211.120.606	2.137.863.721.756
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	26.556.821.615	10.452.851.992
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1.220.197.032	277.911.800
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	277.345.205.157	35.549.375.037
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	25.488.518.505	14.238.476.161
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	1.172.925.140	1.137.606.250
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.593.336.053.074	1.055.288.080.965
Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain		2.847.327.413
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU	111.224.200	-
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	983.995.000	-
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	440.000.000	-
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	20.623.130.068	-
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	42.280.000	-
Jumlah	**41.238.015.097.725**	**36.718.290.173.038**

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mencapai 96,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019, dan menurun dibandingkan tahun 2018 terutama karena Pemerintah terus berupaya agar kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran yang semakin baik di satuan kerja pemerintah, di antaranya melalui upaya efisiensi belanja yang kurang produktif. Namun demikian, untuk realisasi Belanja Barang BLU mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan meningkatnya aktivitas BLU dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp177, 84 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp177.841.479.636.714 atau 93,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp189.343.197.146.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2019 lebih kecil Rp6.286.147.863.560 atau turun 3,41 persen dari realisasi TA 2018. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	4.195.231.872.492	3.504.541.754.056
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.175.542.160.621	61.379.078.527.781
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.559.278.695.437	27.165.890.294.249
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.559.542.865.906	84.370.254.579.143
Belanja Modal Lainnya	6.497.408.341.901	3.074.437.667.301
Belanja Modal BLU	4.854.474.425.357	4.633.404.577.742
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	1.275.000	20.100.002
Jumlah	**177.841.479.636.714**	**184.127.627.500.274**

Belanja Modal BLU Rp4.854.474.425.357 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah - BLU	432.977.524.899	162.541.496.729
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.292.000.300.380	2.057.924.330.154
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.907.204.449.651	2.123.179.713.015
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	105.249.666.519	164.805.262.970
Belanja Modal Lainnya - BLU	117.042.483.908	124.953.774.874
Jumlah	**4.854.474.425.357**	**4.633.404.577.742**

Kinerja penyerapan Belanja Modal tahun 2019 yang mencapai 93,93 persen dari pagu APBN TA 2019 terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal pada dua Kementerian/Lembaga dengan alokasi Belanja Modal terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (realisasi sebesar Rp64.937.997.141.257 dari Pagu APBN 2019 sebesar Rp75.734.813.258.000), dan Kementerian Pertahanan (realisasi sebesar Rp28.221.377.515.489 dari Pagu APBN 2019 sebesar Rp33.895.822.817.000). Realisasi belanja modal pada Kementerian Pertahanan antara lain dipengaruhi oleh tidak terealisasi belanja modal yang bersumber dari Pinjaman luar negeri berupa pengadaan alutsista. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dipengaruhi oleh permasalahan ganti rugi lahan di beberapa proyek, payung hukum penugasan proyek yang baru terbit di pertengahan tahun 2019, terdapat proses lelang di satuan kerja yang tidak berhasil sepenuhnya, dan isu keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di provinsi Papua dan Papua Barat.

B.2.2.1.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp275,52 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2019 adalah sebesar Rp275.521.165.410.219 atau 99,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp275.885.267.880.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2019 lebih besar Rp17.569.137.268.940 atau naik 6,81 persen dari Realisasi TA 2018 sebesar Rp257.952.028.141.279.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	562.706.663.882	390.855.637.193
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	40.902.078.447.238	35.901.375.910.034
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	21.445.197.411.367	19.519.914.054.797
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	7.923.133.935.500	18.986.695.721.500
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	383.890.000.000	2.787.500.000
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	3.388.493.490.600	4.763.232.567.081
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Dalam Negeri	200.915.665.461.632-	178.387.166.750.674
Jumlah	**275.521.165.410.219**	**257.952.028.141.279**

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan Belanja Pembayaran Imbalan SBSN, karena meningkatnya *outstanding* SBN Neto pada tahun 2019, dan kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Jangka Panjang karena penambahan *outstanding* Pinjaman Tunai di tahun 2018.

B.2.2.1.5 Belanja Subsidi

Subsidi Rp201,80 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 adalah sebesar Rp201.802.566.846.111 atau 89,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp224.320.857.116.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 lebih kecil Rp15.080.737.269.190 atau turun 6,95 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp216.883.304.115.301.

Rincian realisasi subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Subsidi Minyak Solar	27.287.776.810.886	35.500.058.608.682
Belanja Subsidi Minyak Tanah	2.770.731.238.258	3.370.760.456.883
Belanja Subsidi Elpiji	54.150.841.096.873	58.144.013.468.021
Belanja Subsidi Listrik	52.666.457.809.744	56.507.587.695.000
Belanja Subsidi Pupuk	34.308.308.749.200	33.612.732.444.040
Belanja Subsidi PPh – DTP	11.153.533.500.306	10.111.762.370.778
Belanja Subsidi BM – DTP	354.326.302.000	370.614.635.480
Belanja Subsidi PT KAI	2.169.074.920.170	2.145.056.042.843
Belanja Subsidi PT PELNI	1.817.907.763.920	1.932.549.353.375
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	156.132.228.800	155.927.797.800
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	748.720.000.000	952.643.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	3.529.392.366.828	2.285.851.639.491
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	6.047.109.076	30.840.009.278
Belanja Subsidi Bunga Kredit *Biofuel* (KPEN-RP)	13.481.673.580	52.374.490.735
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	10.613.838.563.082	11.588.571.574.697
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	47.813.614.505	116.443.541.536
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	7.726.239.785	5.206.072.509
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	456.859.098	185.015.802
Belanja Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	-	125.898.351
Jumlah	**201.802.566.846.111**	**216.883.304.115.301**

Anggaran Belanja Subsidi yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp224.320.857.116.000. Adapun pagu belanja subsidi berdasarkan DIPA TA 2019 (awal) adalah sebesar Rp221.772.866.010.000. Selanjutnya dilakukan pergeseran pagu dari dari belanja lain-lain untuk pembayaran utang subsidi tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya pada Subsidi Energi, Pupuk, dan PPh-DTP Sebesar Rp28.355.560.488.000 sehingga pagu DIPA TA 2019 (akhir) menjadi sebesar Rp250.128.426.497.000

Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini terutama pada Subsidi Energi yaitu Subsidi Minyak Solar, Subsidi Elpiji, dan Subsidi Listrik yang dipengaruhi lebih rendahnya ICP dan menguatnya nilai tukar dari asumsi APBN 2019. Pada tahun 2019 untuk penurunan realisasi Belanja Subsidi untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu/JBT dan Belanja Subsidi Elpiji dibandingkan dengan tahun 2018 juga disebabkan karena penurunan pembayaran kurang bayar subsidi.

Selain Subsidi Energi, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya untuk kredit usaha rakyat juga menurun di tahun 2019 yang dipengaruhi oleh realisasi Kredit Usaha Rakyat.

Selain hal-hal di atas, penurunan realisasi Belanja Subsidi TA 2019 juga disebabkan oleh:

1. Penurunan volume subsidi solar, yaitu tahun 2019 sebesar 14,826 juta kiloliter, di mana sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 15,591 juta kilo liter . Untuk subsidi solar kebijakan subsidi adalah subsidi tetap Rp2.000 per liter.
2. Penurunan volume subsidi minyak tanah dan harga satuan nilai subsidi per liter. Tahun 2019 volume subsidi minyak tanah sebesar 0,482 juta kilo liter sedangkan tahun 2018 sebesar 540 ribu KL. Untuk nilai satuan subsidi tahun 2019 sebesar Rp4.975/liter, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp5.288/liter.
3. Turunnya rata-rata CPA *(Contract Price Aramco)* untuk subsidi LPG, menurunkan Harga Pokok Produksi LPG. Harga rata-rata CPA yaitu tahun 2019 sebesar 438,69 USD/metrik ton (MT) sedangkan tahun 2018 sebesar 540,39 USD/MT.
4. Terdapat *set-off* antara kelebihan bayar subsidi listrik TA 2018 sebesar Rp3.105.833.529.855 (piutang Pemerintah) dengan kurang bayar subsidi listrik TA 2016 dan 2017 sebesar Rp2.288.984.393.000 (utang Pemerintah).

Dari realisasi belanja subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) TA 2019 senilai Rp52.666.457.809.744, terdapat realisasi senilai Rp1.377.604.290.305 dengan menggunakan metode *set off* pajak PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 22.

Realisasi belanja subsidi pupuk tidak mencapai target anggaran karena pada bulan November 2018 terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang mengalokasikan volume pupuk bersubsidi sebesar 8.874.00 ton dari semula yang dianggarkan sebesar 9.550.000 ton, yang mengakibatkan jumlah dana yang tidak dapat dicairkan dalam DIPA senilai Rp2.174.915.346.

Rincian realisasi belanja dan pagu subsidi bunga kredit program per 31 Desember 2019, terdapat pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	% thd Total	% thd Pagu
Subsidi Bunga KKP-E	16.994.421.000	6.047.109.076	21,82%	35,58%
Subsidi Bunga KPEN-RP	22.421.350.000	13.481.673.580	48,65%	60,13%
Subsidi Risk Sharing KKP-E	27.509.358.000	-	0,00%	0,00%
Subsidi Bunga KUPS	7.772.348.000	7.726.239.785	27,88%	99,41%
Subsidi Bunga S-SRG	598.845.000	456.859.098	1,65%	76,29%
Jumlah	75.296.322.000	27.711.881.539	100,00%	36,80%

Jika realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2019 tersebut dibandingkan dengan pagu masing-masing skema, terlihat bahwa skema dengan persentase terbesar adalah:

1. Subsidi Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan realisasi sebesar Rp13.481.673.580 atau 60,13 persen dari pagu sebesar Rp22.421.350.000;
2. Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan realisasi sebesar Rp 7.726.239.785 atau 99,41 persen dari pagu sebesar Rp7.772.348.000;
3. Subsidi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan realisasi sebesar Rp6.047.109.076 atau 35,58 persen dari pagu sebesar Rp16.994.421.000; dan
4. Subsidi Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan realisasi sebesar Rp456.859.098 atau 76,29 persen dari pagu sebesar Rp 598.845.000.

B.2.2.1.6 Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp6,47 triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2019 adalah sebesar Rp6.476.205.662.045 atau berarti 333,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp 1.940.650.000.000.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 lebih besar Rp4.955.644.673.760 atau naik 325,91 persen dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Realisasi Belanja Hibah tersebut terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp234.274.387.286, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp6.241.521.667.087, dan *Banking Commission* sebesar Rp409.607.672.

Tingginya kenaikan belanja hibah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang terkena bencana pada tahun 2019. Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Kegiatan/Negara	Jumlah (Rp)
Hibah untuk kegiatan kemanusian di Palestina	14.121.887.286
Hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon	112.500.000.000
Hibah kepada Pemerintah Nauru	35.652.500.000
Hibah kepada Pemerintah Tuvalu	37.500.000.000
Hibah kepada Pemerintah Fiji	27.000.000.000
Hibah kepada Pemerintah Myanmar	7.500.000.000
Jumlah	**234.274.387.286**

Rincian realisasi Belanja Hibah untuk Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan MRT	1.595.957.324.416
Proyek Air Minum	1.017.000.000
Hibah air limbah	6.610.000.000
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	8.871.000.000
Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FSMRB)	16.572.767.929
Hibah *City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pelambang*	12.932.230.931
Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	51.390.504.000
Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project ADB*	116.326.537.023
Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project AIF*	23.270.891.302
Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project IFAD*	40.468.522.643
Hibah READ-SI	19.592.224.497
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	3.160.228.546.000
Hibah air minum perkotaan dan pedesaan	710.517.080.829
Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah	73.138.500.000
Hibah Jalan Daerah	404.628.537.517
Jumlah	**6.241.521.667.087**

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2019 yang mencapai Rp6.476.205.662.045 atau berarti 333,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 disebabkan adanya penambahan pagu yang merupakan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.08 dalam rangka pemberian Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana kepada Pemerintah Daerah, dan Hibah keluar negeri. Selain itu terdapat penambahan anggaran atas belanja hibah ke Pemda yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah yang diterushibahkan.

Belanja Bantuan Sosial Rp112,48 triliun

B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 adalah sebesar Rp112.480.254.777.629 atau 110,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp102.055.516.233.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 lebih besar Rp28.161.841.858.116 atau naik 33,40 persen dari realisasi TA 2018. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	397.798.295.384	262.639.545.303
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	47.129.306.212.971	36.130.093.800.799
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.827.675.472.473	2.888.119.938.473
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	34.703.408.078.000	19.077.821.483.801
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.789.409.255.595	19.131.121.934.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara	7.632.657.463.206	6.828.616.217.137
Jumlah	**112.480.254.777.629**	**84.318.412.919.513**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 meningkat dari tahun 2018 terutama dipengaruhi pembayaran selisih kenaikan Program Bantuan Iuran/program JKN bagi masyarakat tidak mampu, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial pangan, dan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana

B.2.2.1.8 Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-lain Rp11,69 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2019 adalah sebesar Rp11.699.746.548.649 atau 10,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp114.002.255.506.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2019 lebih kecil Rp4.464.098.996.781 atau turun 27,62 persen dari realisasi TA 2018.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	8.028.004.141.391	2.405.131.757.000
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	567.760.624.610	528.513.624.711
Belanja Lain-lain BUN	749.878.030.942	10.852.819.577.533
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D		22.826.732.841
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.103.751.706	2.354.553.853.345
Jumlah	**11.699.746.548.649**	**16.163.845.545.430**

Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN TA 2019 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L (melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA)), dan relokasi ke BA BUN (melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP)) sesuai dengan karakteristik belanjanya, dan pagu pada APBN 2019 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2019.

Pada TA 2019 realisasi belanja lain-lain dana cadangan yaitu sebesar Rp8.028.004.141.391. Belanja tersebut di antaranya digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik TA 2017 sebesar Rp7.456.451.880.000.

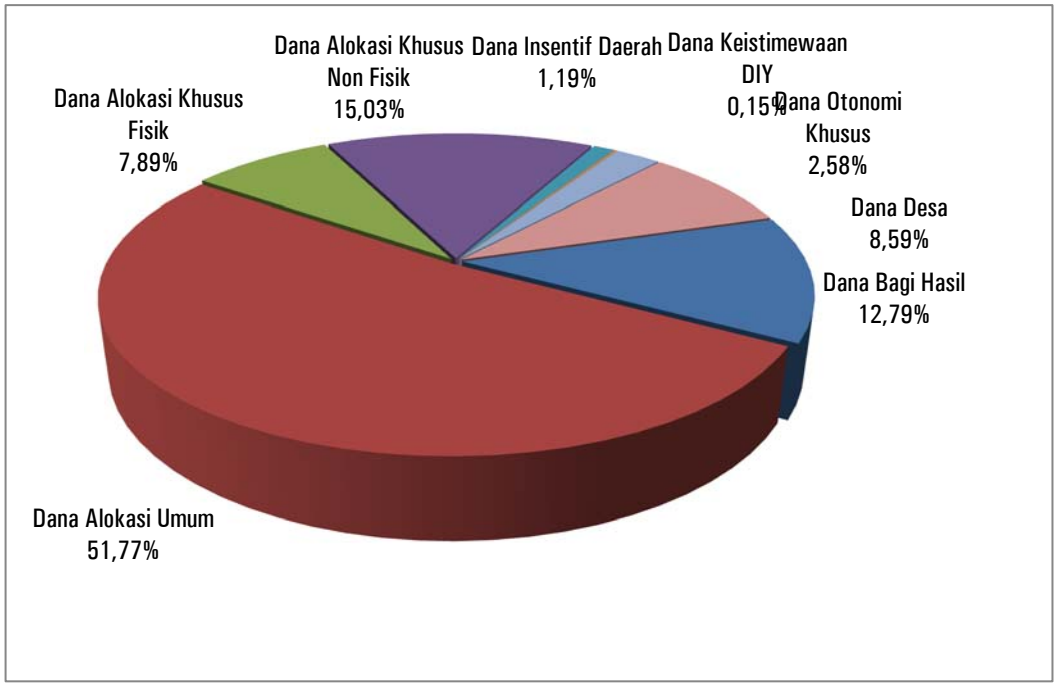
Pembayaran kompensasi adalah atas kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) karena kebijakan tarif Pemerintah bagi golongan tarif non-subsidi sebesar Rp7.456.451.880.000. Realisasi kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan metode *set off* pajak PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 22.

B.2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp812,97 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp812.973.423.142.613 atau 98,33 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp826.772.533.532.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 disajikan pada Grafik 24.



Grafik 24. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

Rincian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 3A.**

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp743,15 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp743.159.274.663.614 atau 98,20 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp 756.772.533.532.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2019 ini lebih besar Rp45.225.745.215.510 atau naik 6,48 persen dari Realisasi TA 2018. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

Rincian realisasi Transfer ke Daerah disajikan pada **Lampiran 3A.**

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp711,28 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2019 adalah sebesar Rp711.284.883.866.614 atau 98,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp724.592.590.224.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2019 ini lebih besar Rp42.641.687.604.510 atau naik 6,38 persen dari realisasi TA 2018. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum Rp524,89 triliun

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2019 adalah sebesar Rp524.890.210.970.419 atau 100,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp524.223.746.621.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2019 lebih besar Rp29.696.592.926.999 atau naik sebesar 6 persen dibandingkan TA 2018.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

DBH Rp103,97 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 adalah sebesar Rp103.979.972.414.419 atau 97,77 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp106.350.163.929.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2019 ini lebih besar Rp10.275.934.019.999 atau naik 10,97 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp93.704.038.394.420 .

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	22.073.087.555.530	29.991.687.612.756
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	17.085.663.586.461	15.703.491.292.037
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**39.158.751.141.991**	**45.695.178.904.793**
Dana Bagi Hasil Cukai	**3.136.352.925.658**	**2.922.191.165.245**
Dana Bagi Hasil SDA		
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	15.219.315.833.056	13.265.216.482.401
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	16.739.397.376.741	9.210.412.221.749
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	25.884.279.134.431	19.807.904.298.240
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Panas Bumi	1.372.588.054.173	832.936.590.394
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	2.119.085.885.757	1.612.576.032.153
Dana Bagi Hasil Perikanan	350.202.062.612	357.622.699.445
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**61.684.868.346.770**	**45.086.668.324.382**
Total Dana Bagi Hasil	**103.979.972.414.419**	**93.704.038.394.420**

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan DBH terutama disebabkan karena kenaikan pada DBH Gas Bumi sebesar Rp7.528.985.154.992, DBH Minyak Bumi sebesar Rp1.954.099.350.655 dan DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp6.076.374.836.191.

Realisasi DBH TA 2019 tidak mencapai 100 persen karena tidak tercapainya penerimaan negara pajak dan bukan pajak dan adanya kebijakan pada UU APBN Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk Triwulan IV Tahun 2019 diprioritaskan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Namun, untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran karena penggunaan untuk kedua jenis DBH tersebut bersifat *earmarked*. Dikarenakan sifatnya yang *earmarked*, maka daerah telah menyusun rencana penggunaan sejak awal tahun dan ditargetkan penyerapan seoptimal mungkin, sehingga atas alokasi Triwulan IV Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada **Lampiran 3B, 3C, dan 3D**.

B.2.2.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum

DAU Rp420,91 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2019 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 atau 100,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp417.873.582.692.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2019 ini lebih besar Rp19.420.658.907.000 atau naik 4,84 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000.

Realisasi DAU per 31 Desember 2019 tersebut melampaui Pagu dalam APBN 2019 (terdiri dari Pagu DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp414.873.582.692.000 dan pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000), dikarenakan terdapat pagu DAU Tambahan Bantuan Iuran sebesar Rp3.500.000.000.000, sehingga Pagu DIPA menjadi sebesar Rp421.373.582.692.000. Penambahan Pagu Tambahan Bantuan Iuran menggunakan mekanisme pergeseran anggaran dari BA 999.08 Belanja Lain-lain.

Realisasi sebesar Rp420.910.238.556.000 terdiri dari realisasi DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp414.873.582.692.000, realisasi DAU TambahanBantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.611.739.709.000, dan realisasi DAU Tambahan Bantuan Iuran sebesar Rp3.424.916.155.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2019 meningkat karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN TA 2019, dan juga memperhitungkan kenaikan gaji 5%, kenaikan formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 serta adanya kebijakan DAU Tambahan (bantuan pedanaan kelurahan dan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah).

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus Rp186,39 triliun

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2019 adalah sebesar Rp186.394.672.896.195 atau 93,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp200.368.843.603.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2019 ini lebih besar Rp12.945.094.677.511 atau naik 7,46 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp173.449.578.218.684.

Rincian realisasi Dana Transfer Khusus disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik Rp64,16 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270 atau 92,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp69.326.700.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2019 ini lebih besar Rp6.016.356.274.025 atau naik 10,35 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp58.149.298.269.245.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2019 meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
DAK Reguler	40.681.714.036.604	29.411.961.830.062
DAK Penugasan	17.211.588.461.829	22.482.775.199.874
DAK Affirmasi	6.272.352.044.837	6.254.561.239.309
Jumlah DAK Fisik	**64.165.654.543.270**	**58.149.298.269.245**

Terdapat sisa pagu penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp5.161.045.456.730 (7,4%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tidak Salur (Tidak ada Kontrak) sebesar Rp311.959.858.302
b. Optimalisasi pagu DAK Fisik yakni Nilai Kontrak di bawah pagu Rp4.761.024.599.468
c. Optimalisasi Kontrak yakni nilai kebutuhan untuk menyelesaikan DAK Fisik di bawah nilai Kontrak Rp88.060.998.960.

DAK Non Fisik Rp122,22 triliun

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2019 adalah sebesar Rp122.229.018.352.925 atau 93,27 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp131.042.143.603.000. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik naik sebesar 6,01 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp115.300.279.949.439. Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.001.837.749.380	55.016.720.212.332
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.977.231.267.885	1.727.102.404.861
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	463.968.756.915	588.007.130.574
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.200.273.626.885	44.367.351.931.006
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.129.087.154.156	7.454.358.890.915
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.923.557.400.000	1.753.419.417.979
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	199.819.750.000	92.221.616.897
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	907.500.000.000	
Dana Pelayanan Kepariwisataan	210.693.561.000	745.193.742.984
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.825.313.850.204	3.555.904.601.891
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.262.258.736.500	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	127.476.500.000	-
Jumlah	**122.229.018.352.925**	**115.300.279.949.439**

Penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp122.229.018.352.925 atau 93,27 % dari APBN 2019 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Non Fisik, pemanfaatan sisa dana di kas daerah, perubahan status guru penerima TPG (pensiun, beralih ke jabatan struktural/fungsional lain) dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru yang belum memperoleh sertifikasi menjadi penerima TPG, dan menurunnya jumlah sasaran penerima BOS, khususnya pada jenjang SD.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2019 mengalami peningkatan Rp6.928.738.403.486 atau 6,01 persen dari TA 2018 terutama disebabkan karena kenaikan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4.832.921.695.879, Dana Operasional Kesehatan sebesar Rp2.674.728.263.241, dan realisasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.659.144.484.813.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Rp9,69 triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp9.694.447.489.000 atau 96,94 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp10.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2019 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.463.697.489.000 dari sebelumnya sebesar Rp8.230.750.000.000 atau naik 17,78 persen dikarenakan terdapat penambahan pagu sebesar Rp1.500.000.000.000 sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja daerah.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pagu dana yang tidak terserap disebabkan karena terdapat 22 daerah yang tidak memenuhi syarat pencairan dana tahap ke dua.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah disajikan pada **Lampiran 3F**.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Keistimewaan DIY Rp1,2 triliun

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2019 adalah sebesar Rp1.200.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2019 lebih besar Rp200.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.000.000.000.000 atau naik 20 persen. Meningkatnya realisasi ini sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp20,97 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2019 adalah sebesar Rp20.979.943.308.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2019 ini lebih besar Rp920.360.122.000 atau naik 4,59 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Apabila dibandingkan pada tahun 2018 pagu dana otonomi khusus tahun 2019 bertambah sebesar Rp920.360.122.000 dikarenakan penyesuaian atas kenaikan Pagu DAU 2019.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.357.471.654.000	8.029.791.593.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.850.230.158.000	5.620.854.115.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.824.446.537.000	2.400.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.507.241.496.000	2.408.937.478.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.440.553.463.000	1.600.000.000.000
Jumlah	**20.979.943.308.000**	**20.059.583.186.000**

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2019 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan insfrastruktur untuk Provinsi Papua.

B.2.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa Rp69,81 triliun

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999 atau 99,73 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp70.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2019 ini lebih besar Rp9.954.739.869.724 atau naik 16,63 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp59.859.408.609.275. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015. Pada TA 2019, Dana Desa dialokasikan pada 74.953 desa.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terutama karena pada tahun 2019 terdapat penambahan alokasi sebesar Rp10.000.000.000.000 dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000, dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa melalui upaya percepatan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, capaian realisasi tersebut terutama didorong peningkatan kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu.

Rincian realisasi Dana Desa disajikan pada **Lampiran 3F**.

B.2.3 Defisit Anggaran

Defisit Anggaran minus Rp348,65 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2019, maka Defisit Anggaran TA 2019 adalah sebesar Rp348.653.725.921.394 atau 117,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296.000.236.667.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Negara	1.960.633.583.585.989	1.943.674.876.878.796
Belanja Negara	2.309.287.309.507.383	2.213.117.817.284.996
Defisit Anggaran	**(348.653.725.921.394)**	**(269.442.940.406.200)**

B.2.4 Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp402,05 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2019 adalah sebesar Rp402.051.510.185.251 atau 135,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296.000.236.667.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2019 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2019 sebesar Rp348.653.725.921.394 dan Produk Domestik Bruto tahun 2019 sebesar Rp15.833,9 triliun, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,20 persen.

Sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.05/2019 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, maka telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 53/PR/2019 mengenai Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019. Tambahan pembiayaan melalui utang dilakukan dengan Penerbitan SBN dan Penarikan Pinjaman Tunai.

Realisasi pembiayaan untuk menutup pelebaran defisit melalui penerbitan SBN, menambah realisasi SBN Neto sebesar Rp57.330.710.121.614 atau bertambah sebesar 14,74% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp388.957.891.000.000 menjadi realisasi sebesar Rp446.288.601.121.614.

Realisasi Pinjaman Tunai yang dialokasikan untuk penambahan pembiayaan terinci dalam tabel berikut:

No.	Lender	MTU	Jumlah Valas	Nama Program
1	ADB	USD	500.000.000	Emergency Assistance for Recovery and Rehabilitation from Recent Disaster
2	IBRD	JPY	77.556.500.000	Fiscal Reform Development Policy Loan (DPL) 3

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN 2019

Pada APBN 2019 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp296.000.236.667.000, sedangkan realisasi sebesar Rp402.051.510.185.251 yang terdiri atas Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, dan Pembiayaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	APBN 2019	Realisasi	% Realisasi
Pembiayaan Utang			
Surat Berharga Negara (Neto)	388.957.891.000.000	446.288.601.121.614	114,74%
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482.419.505.000	3.032.970.134.099	628,70%
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189.727.402.000)	(11.782.756.217.168)	39,03%
Total	**359.250.583.103.000**	**437.538.815.038.545**	121,79%
Pembiayaan Investasi			
Investasi Kepada BUMN	(17.800.000.000.000)	(17.800.000.000.000)	100,00%
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)	(2.500.000.000.000)	(3.490.000.000.000)	139,60%
Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(53.190.000.000.000)	(22.200.000.000.000)	41,74%
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.410.341.459.000)	(2.275.076.593.824)	94,39%
Penerimaan Investasi dari BPJT	-	1.376.096.205.074	-
Total	**(75.900.341.459.000)**	**(44.388.980.388.750)**	58,48%
Pemberian Pinjaman			
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(2.350.004.977.000)	(6.278.305.328.076)	267,16%
Total	**(2.350.004.977.000)**	**(6.278.305.328.076)**	267,16%
Pembiayaan Lainnya			
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00%
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	179.980.863.532	-
Total	**15.000.000.000.000**	**15.179.980.863.532**	101,20%
Total Pembiayaan	**296.000.236.667.000**	**402.051.510.185.251**	**135,83%**

B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp419,55 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp419.550.747.504.799 atau 126,08 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp332.769.652.580.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Pembiayaan Lain-lain.

Rekening Pemerintah/ Penggunaan SAL Rp15 triliun

B.2.4.1.1 Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2019, Penggunaan SAL yang diambil dari Rekening SAL sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.000.000.000.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000.

Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Rp4,43 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2019 adalah sebesar Rp4.438.174.482.674 atau 104,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp4.229.683.534.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Daerah	1.488.943.865	8.124.198.926
Pemberian Pinjaman DN kepada BUMD	163.606.368	150.000.004
Pemberian Pinjaman DN kepada BUMN	325.380.560.953	326.830.783.945
Pemberian Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	9.008.197.429	11.296.966.836
Pemberian Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	68.285.709.980	62.227.742.264
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMD		1.300.199.480
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.230.558.129.893	3.598.669.439.670
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	27.977.334.187	46.088.406.051
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	775.311.999.999	775.312.000.001
Total	**4.438.174.482.674**	**4.829.999.737.177**

B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp179,98 miliar

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2019 adalah sebesar Rp179.982.155.162. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN sebesar Rp169.188.403.022 dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp10.793.752.140 .

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	169.188.403.022	124.649.183.550
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	10.793.752.140	38.970.697.066
Jumlah	**179.982.155.162**	**163.619.880.616**

B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (Neto) Rp446,28 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2019 adalah sebesar Rp446.288.601.121.614 atau 114,74 persen dari yang dianggarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 sebesar Rp388.957.891.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan:		
Penerbitan/Penjualan SPN	89.340.000.000.000	143.050.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	443.560.323.000.000	320.274.306.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	8.348.270.101.000	5.446.859.375.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	163.086.014.982.928	96.869.377.647.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	2.899.618.230.714	1.734.060.896.401
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	37.360.000.000.000	51.680.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	119.059.172.200.000	97.877.550.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	29.517.600.000.000	42.854.500.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	28.311.796.017.072	22.526.588.353.000
Total Penerimaan	**921.482.794.531.714**	**782.313.242.271.401**
Pengeluaran:		
Pelunasan SPN	(109.440.000.000.000)	(170.257.290.000.000)
Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara	(152.631.506.730.386)	(83.438.091.186.177)
Pembelian Kembali Obligasi	(6.870.000.000.000)	(515.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	(8.033.396.484.000)	(5.546.137.909.040)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(92.013.671.000.000)	(73.588.948.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(2.691.011.895.714)	(1.640.239.131.401)
Pelunasan SPN Syariah	(41.050.000.000.000)	(46.070.000.000.000)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(40.999.607.300.000)	(28.241.044.500.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	(21.465.000.000.000)	(14.618.000.000.000)
Total Pengeluaran	**(475.194.193.410.100)**	**(423.914.750.726.618)**
Jumlah SBN (Neto)	**446.288.601.121.614**	**358.398.491.544.783**

Realisasi SBN Neto didalamnya termasuk penerimaan atas Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp443.560.323.000.000 dan Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp8.348.270.101.000 didalamnya termasuk *debtswitch*. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon (bunga atau imbalan), untuk Tahun 2019 realisasinya adalah sebesar Rp11.247.888.331.714. Terdapat Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang yang akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat didalamnya Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang sebesar Rp10.724.408.379.714.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara termasuk di dalamnya tambahan pembayaran angsuran pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 yang berasal dari surplus Bank Indonesia Tahun 2018 yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp30.091.907.824.702 sesuai dengan Surat Gubernur Bank Indonesia No.21/8/GBI-DKeu/Srt/B tanggal 24 Mei 2019 perihal Penyetoran Sisa Surplus Bank Indonesia Tahun 2018 Kepada Pemerintah dan Penggunaannya untuk Pembayaran Angsuran Pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003.

B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp3,03 triliun

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp3.032.970.134.099 atau 628,70 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar Rp 482.419.505.000. Pinjaman Dalam Negeri terdiri dari pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	4.242.231.101.525	2.397.198.022.147
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	-	32.189.482.599
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.209.260.967.426)	(1.075.568.713.531)
Jumlah	**3.032.970.134.099**	**1.353.818.791.215**

Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 naik sebesar Rp1.679.151.342.884 atau 124,03% dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 sebesar Rp1.353.818.791.215.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

Realisasi pagu Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri melebihi dari pagu APBN 2019 dikarenakan adanya percepatan penarikan PDN oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk realisasi Pengeluaran Pembiayaan PDN sebesar 82.04% dari alokasi pagu dikarenakan adanya perpanjangan waktu penarikan pinjaman, sehingga jadwal pembayaran 2019 bergeser ke tahun berikutnya

B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp44,38 triliun

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2019 adalah sebesar minus Rp44.388.980.388.750 atau 79,41 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar minus Rp55.900.341.459.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan PMN TA 2019 adalah:

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(17.800.000.000.000)	(3.600.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(2.275.076.593.824)	(2.331.096.461.400)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(8.200.000.000.000)	(5.530.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(3.490.000.000.000)	(2.500.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(12.000.000.000.000)	(31.152.730.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk pendirian BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional	(2.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.376.096.205.074	-
Jumlah	**(44.388.980.388.750)**	**(46.113.826.461.400)**

Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp17.800.000.000.000 merupakan PMN Tunai kepada PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) sebesar Rp6.500.000.000.000, PT Hutama Karya/HK (Persero) sebesar Rp10.500.000.000.000, dan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) sebesar Rp800.000.000.000. PMN tersebut dialokasikan dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan serta dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Kedaulatan Energi, dan Program terkait Pembiayaan di Bidang Perumahan.

PMN untuk Badan Internasional sebesar Rp2.275.076.593.824 digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector* (ICD) sebesar Rp42.120.677.000, *International Development Bank* (IDB)sebesar Rp80.844.636.000, *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp42.570.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp1.895.187.580.000, dan *International Development Association* sebesar Rp169.000.000.000, serta *International Development Association* (IDA) – non tunai (IDA17) sesuai dengan nilai SP2D pengesahan sebesar Rp45.353.700.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp8.200.000.000.000 adalah untuk BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp5.200.000.000.000, dan BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp3.000.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp3.490.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp2.500.000.000.000 dan Investasi sebesar Rp990.000.000.000 untuk Dana Abadi Penelitian.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah oleh BLU LMAN sebesar Rp12.000.000.000.000 untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp2.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional. Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp2.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional.

B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan Rp 0

Pada tahun APBN TA 2019 tidak dianggarkan Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan dikarenakan terdapat kebutuhan fiskal pada Investasi Pemerintah lainnya. Pada tahun 2018 realisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar minus Rp1.121.315.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	-	(297.400.000.000)
Percepatan penyediaan air minum	-	(1.102.000.000)
Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-	(389.500.000.000)
Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	-	(284.700.000.000)
Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Internasional kepada BUMN	-	(148.613.000.000)
Percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekas	-	-
Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional	-	-
Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	-	-
Penugasan kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infratruktur Daerah		
Jumlah	-	**(1.121.315.000.000)**

Seluruh dana dari realisasi kewajiban penjaminan masih berada di rekening dana cadangan karena selama tahun 2019 tidak ada pembayaran atas penjaminan yang gagal bayar.

Kewajiban Penjaminan ini adalah untuk keperluan penjaminan beberapa proyek sebagai berikut:

1. Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
2. Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
3. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
4. Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
5. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatra;
6. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
7. Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; dan
8. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional minus Rp5 triliun

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2019 adalah minus Rp5.000.000.000.000 atau 25 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar minus Rp20.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.1.9 Pembiayaan Lain-lain

Pembiayaan Lain-lain Rp 0

Pada tahun 2019 tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain. Pada tahun 2018 terdapat penerimaan pembiayaan lain-lain sebesar Rp5.000.000.000 yang merupakan penerimaan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp17,49 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.499.237.319.548 karena nilai pembayaran pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman luar negeri selama tahun 2019. APBN tahun 2019 menargetkan pembayaran pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman yaitu sebesar minus Rp36.769.415.913.000.

Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, (ii) Penerusan Pinjaman, dan (iii) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Rp74,21 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp74.210.001.746.454 atau 123,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp60.280.479.702.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Tunai/Pinjaman Program dan (ii) Penarikan Pinjaman Proyek/Pinjaman Kegiatan.

B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Tunai

Penarikan Pinjaman Tunai Rp36,71 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Pinjaman Tunai/Pinjaman Program TA 2019 adalah sebesar Rp36.717.630.284.048 atau 122,39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp30.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.907.423.315.952 dari sebelumnya sebesar Rp50.625.053.600.000.

Realisasi yang mencapai 122,39 persen dari APBN TA 2019 disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit yang menyebabkan tambahan penarikan pinjaman tunai. Kebijakan pemerintah ini sesuai UU APBN TA 2019 yaitu dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai

B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Kegiatan

Penarikan Pinjaman Kegiatan Rp37,49 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Kegiatan TA 2019 adalah sebesar Rp37.492.371.462.406 atau 123,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp30.280.479.702.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2019 tersebut mengalam penurunan sebesar Rp492.321.411.774 dari sebelumnya sebesar Rp37.984.692.874.180.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2 Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman minus Rp5,71 triliun

Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemberian Pinjaman TA 2019 adalah sebesar minus Rp5.716.481.102.380 atau 86,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar minus Rp6.579.688.511.000. Rincian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah	(1.971.239.845.494)	(3.618.555.506.556)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD	-	(5.481.184.228.679)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN	(3.745.241.256.886)	-
Total	**(5.716.481.102.380)**	**(9.099.739.735.235)**

Seluruh realisasi Pemberian Pinjaman merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) kepada pemerintah daerah yaitu Pemprov DKI sebesar Rp1.971.239.845.494 dan BUMN yaitu PLN sebesar Rp2.610.040.405.372, Pertamina sebesar Rp235.200.851.514, dan PT. SMI sebesar Rp900.000.000.000.

B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN minus Rp85,99 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2019. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2019 adalah sebesar minus Rp85.992.757.963.622 atau 95,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar minus Rp90.470.207.104.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(31.317.372.208.106)	(22.356.849.857.109)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(54.675.385.755.516)	(53.968.748.159.161)
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible*	-	(7.599.346.046)
Jumlah	**(85.992.757.963.622)**	**(76.333.197.362.316)**

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama disebabkan karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2019.

B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp53,39 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp348.653.725.921.394 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp402.051.510.185.251. Sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp53.397.784.263.857 dengan perhitungan sebagai berikut

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Negara	1.960.633.583.585.989	1.943.674.876.878.796
Belanja Negara	2.309.287.309.507.383	2.213.117.817.284.996
Surplus (Defisit)	(348.653.725.921.394)	(269.442.940.406.200)
Pembiayaan Neto	402.051.510.185.251	305.692.597.869.020
SiLPA (SiKPA)	**53.397.784.263.857**	**36.249.657.462.820**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/desentralisasi TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2019 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Desentralisasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	12.563.915.228	-	**4.822.781.076**
018	Kementerian Pertanian	1.367.048.566.239	-	**5.791.040.486.980**
019	Kementerian Perindustrian	67.813.741.536	-	-
023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	257.135.529.932	-	-
024	Kementerian Kesehatan	943.885.630.117	-	-
026	Kementerian Ketenagakerjaan	243.410.645.240	-	**88.041.169.028**
027	Kementerian Sosial	563.671.778.303	-	**101.741.815.703**
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	29.246.574.195	-	**129.590.258.807**
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	101.079.368.219	-	**95.785.539.452**
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	3.920.000.000	**1.302.025.491.591**
040	Kementerian Pariwisata	54.890.111.206	-	-
044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	106.341.180.603	-	**81.923.836.946**
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	48.092.616.634	-	-
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	29.469.567.230	-	-
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	16.098.934.704	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15.244.383.503	-	-
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	2.279.549.829.720	-	**500.513.218.985**
068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	12.115.506.087	-	-
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.449.642.084	-	-
090	Kementerian Perdagangan	66.465.386.199	-	**916.834.297.696**
092	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	109.014.091.188	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.657.943.700	-	-
	Total	**6.336.244.941.867**	**3.920.000.000**	**9.012.318.896.264**

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2019, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat 236 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	58
2	Kementerian Keuangan	7
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	18
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	39
9	Kementerian Perhubungan	34*
10	Kementerian ESDM	8
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
12	Sekretariat Negara	2
13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
14	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1

17	Kementerian Ristek Dikti	35
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
19	Kementerian Pertahanan	17
20	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
21	Kementerian Pariwiwsata	1
	Jumlah BLU	**236**

*Pada akhir TA 2019 Menteri Keuangan menetapkan satu BLU baru di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. BLU ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ditinjau dari jenis layanan, dari 236 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

1. 26 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 5 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 97 BLU bidang Kesehatan;
4. 98 BLU bidang Pendidikan;
5. 10 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **lampiran 2C**.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan **Lampiran 4**.

4. *Notice of Disbursement* (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2019

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman,dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2019 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Terdapat 1 (satu) kementerian lembaga dan 1 (satu) BUMN dengan total nilai sebesar Rp543.647.157.146 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp540.941.798.276 dan PT PLN (Persero) sebesar Rp2.705.358.870.

Selain itu, terdapat pinjaman dengan nomor register 1GNMNYFA pada Kementerian PUPR dan NOD tahun 2018 dengan nomor 01047034.0/C001 tanggal valuta 27 Juli 2018 dengan nilai EUR670217,84 atau ekivalen Rp11.357.980.669,13 yang belum SP3 sampai dengan 31 Maret 2020. Hal tersebut dikarenakan terdapat satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat dilikuidasi dan revisi DIPA selanjutnya ditangani oleh satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

5. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp163.235.120.939 dilakukan pemerintah selama TA 2019. *Refund* tersebut terjadi karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp162.771.652.025 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp97.484.664.

6. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

7. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2019.

Berikut adalah rekapitulasi belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	010	Kementerian Dalam Negeri	83.921.792.000	77.867.367.618
2	012	Kementerian Pertahanan	9.292.633.600.000	7.304.944.491.984
3	015	Kementerian Keuangan	-	-
4	018	Kementerian Pertanian	98.991.838.000	62.325.696.146
5	022	Kementerian Perhubungan	4.243.013.306.000	3.915.008.475.630
6	024	Kementerian Kesehatan	282.500.000.000	246.364.038.460
7	025	Kementerian Agama	815.479.068.000	659.472.306.768
8	026	Kementerian Ketenagakerjaan	34.202.758.000	7.854.105.000
9	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	13.670.518.789.865	9.831.545.399.835
10	040	Kementerian Pariwisata	33.260.000.000	11.280.863.400
11	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	2.159.029.233.000	1.837.526.442.018
12	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	161.767.022.000	146.152.953.567
13	056	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	299.329.983.000	41.204.286.310
14	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.165.975.452.000	4.492.911.286.921
15	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.062.182.638.000	984.220.045.369
16	075	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	102.050.000.000	-
17	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	111.250.000.000	85.152.985.616
18	083	Badan Informasi Geospasial	25.460.000.000	6.676.490.065
19	089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	47.212.131.000	35.388.856.287
20	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	193.621.568.000	140.822.819.470
		Grand Total	**37.882.399.178.865**	**27.392.234.426.890**

Berikut merupakan realisasi Belanja K/L yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	007	Kementerian Sekretariat Negara	46.679.936.000	42.841.878.853
2	010	Kementerian Dalam Negeri	11.968.685.000	9.918.411.005
3	015	Kementerian Keuangan	29.208.358.000	26.201.082.252
4	022	Kementerian Perhubungan	11.525.321.000	6.346.452.139
5	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	349.697.538.000	308.942.513.455
6	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	109.332.007.000	59.968.138.432

7	040	Kementerian Pariwisata	1.500.000.000	1.452.473.000
8	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	5.307.000.000	5.023.463.397
9	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	18.923.427.000	10.511.121.215
10	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.468.429.000	1.468.429.000
		Grand Total	**585.610.701.000**	**472.673.962.748**

Data realisasi pada tabel di atas mengacu kepada nilai yang tercantum di dalam realisasi belanja KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri pada Aplikasi E-Rekon LK.

Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana **Lampiran 2D dan 2E**.

8. Hibah melalui mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD-nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam: PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN". Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 2019 yang belum diterima NoD-nya sampai dengan 31 Maret 2020, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2019.

9. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan UU APBN TA 2019, dianggarkan sebesar Rp22.000.000.000.000 dan direalisasikan pengeluaran pembiayaan kepada LMAN sebesar Rp12.000.000.000.000 dan diakumulasikan dalam Aset Lainnya Dana Kelolaan BLU. Selanjutnya, LMAN melaksanakan pembayaran pengadaan tanah untuk PSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dengan pembiayaan operasional BPIP berada di Bagian Anggaran Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2019 berdasarkan ketentuan dari Peraturan Presiden tersebut dan hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 26 Agustus 2019, anggaran operasional BPIP ditetapkan terpisah dan mandiri menjadi Bagian Anggaran BPIP (BA 122). Alokasi yang ditetapkan adalah sebesar Rp312.617.996.000 dan mulai efektif berjalan sebagai bagian anggaran 122 pada bulan Oktober 2019. BPIP telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 122 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Dana Jaminan Sosial

Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang layak bagi setiap peserta (masyarakat). Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan/keberlangsungan program DJS Kesehatan Berdasarkan Pasal 38 PP 87/2013 Jo PP 84/2015 Jo PP 53/2018 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan diatur bahwa dalam hal aset DJS bernilai negatif, paling sedikit ada 3 (tiga) tindakan khusus yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu: penyesuaian besaran iuran, pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS; dan/atau penyesuaian manfaat Maka dalam

hal ini, pada tahun 2017 s.d. 2018, Pemerintah, dalam Bagian Anggaran 999.08 menganggarkan Cadangan Program JKN sebagai salah satu tindakan khusus untuk mengatasi aset neto DJS Kesehatan yang bernilai negatif. Aset neto DJS Kesehatan sampai dgn 31 Desember 2018 bernilai negatif sebesar Rp34,71 T. Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada DJS Kesehatan dititiberatkan untuk mengatasi kesulitan likuditas jangka pendek. Namun pada tahun 2019, Pemerintah mengambil kebijakan yang berbeda. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan terbitnya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dibandingkan dengan Perpres 82 Tahun 2018, terjadi kenaikan iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (pasal 29 ayat 1), peserta PPU (pasal 30 ayat 1), serta peserta PBPU dan BP (pasal 34 ayat 1).

Sebagai akibat kenaikan iuran tersebut, Pemerintah merealisasikan:

a. SP SABA dari BA 999.08 ke BA Kementerian Kesehatan sebesar 9.196.000.000.000 yang digunakan untuk tambahan anggaran PBI Tahun 2019 sebagai akibat kenaikan iuran jaminan kesehatan.
b. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.05 (BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp3.500.000.000.000 yang digunakan untuk alokasi DAU tambahan bantuan pembayaran selisih.
c. perubahan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.99 (BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp917.885.761.000 yang digunakan untuk Pembayaran Jaminan Kesehatan selaku Pemberi Kerja Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut masih belum dapat mengatasi permasalahan aset neto negatif DJS Kesehatan nilainya menjadi sebesar Rp50,99 T.
d. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.99 (BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp917.885.761.000 yang digunakan untuk Pembayaran Jaminan Kesehatan selaku Pemberi Kerja Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut masih belum dapat mengatasi permasalahan aset neto negatif DJS Kesehatan nilainya menjadi sebesar Rp50,99 T.

Namun demikian, pada tanggal 27 Februari 2020 dikeluarkan Putusan MK Nomor 7 P/HUM/2020, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut yang Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga diperkirakan permasalahan aset neto DJS Kesehatan bernilai negatif masih akan berlangsung hingga tahun 2020.

12. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
b. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2019 adalah sebesar Rp492.455.088.152.000. Realisasi fungsi pendidikan TA 2019 adalah sebesar Rp460.345.844.086 atau 93,48 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Uraian	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Pemerintah Pusat	155.160.209.460.571
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	299.194.879.925.515
Pembiayaan	5.990.000.000.000
Jumlah	**460.345.089.844.086**

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2019 adalah sebesar Rp123.113.800.000.000 Realisasi fungsi kesehatan TA 2019 adalah sebesar Rp102.285.553.679.586 atau 83,08 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Pemerintah Pusat	71.006.919.734.410
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	31.2788.633.945.176
Pembiayaan	-
Jumlah	**102.285.553.679.586**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 2F**.

13. Pembiayaan Utang

Selama tahun 2019, pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian bangsa melalui fungsinya dalam menutup defisit APBN, membiayai penyertaan modal negara pada BUMN, serta komitmennya dalam melaksanakan pendalaman pasar dalam negeri. Realisasi sementara defisit APBN tahun 2019 berkisar 2,20 persen dari PDB, meningkat dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal.

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai 135,83 persen dari target APBN. Realisasi sementara pembiayaan utang hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp435,53 triliun atau 121,79 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp446,28 triliun atau 114,74 persen target APBN dan realisasi Pinjaman neto sebesar negatif Rp8,74 triliun atau 29,45 persen target APBN.

Sementara itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB terjaga di kisaran 30 persen, yakni sebesar 30,23 persen dengan posisi utang Pemerintah sebesar Rp4.786,58 triliun dan PDB sebesar Rp15.833,94 triliun. Rasio ini meningkat jika dibandingkan posisi akhir tahun 2018 yang mencapai 29,81 persen, namun masih dalam batas aman, bahkan jauh di bawah batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

Dinamika perekonomian di dalam negeri yang muncul di tahun 2019 lebih didominasi oleh adanya penurunan suku bunga acuan BI 7-*day (Reverse) Repo Rate* sebanyak 4 (empat) kali dari sebesar 6% di awal tahun menjadi 5% di akhir tahun. Selain itu, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) berjalan pada kuartal III 2019 membaik. BI mencatat CAD sebesar USD7,7 Miliar atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD8,2 Miliar atau 2,9% dari PDB. Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang, seiring dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang terbilang stabil. Perekonomian global juga mengalami ketidakpastian yang diantaranya disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Selanjutnya, isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga turut berperan dalam menghangatnya kondisi global. Untuk merespon hal tersebut, *Federal Reserve* beberapa kali menurunkan tingkat bunga acuannya sehingga ada di kisaran 1.5%-1.75%

Namun, dari sisi *Yield* Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dalam Rupiah turun sekitar 11 persen (88 bps, dari 7,96% ke 7.09%), sementara untuk SUN tenor 10 tahun dalam USD juga turun sekitar 37 persen (170 bps, dari 4,56% ke 2,86%). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan utang secara pruden dan terukur dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global.

Selama tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan beberapa kali SBN valas. *Samurai Bonds* yang diterbitkan bulan

Mei berhasil mencatatkan beberapa pencapaian antara lain penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui *Public Offering* terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia, yaitu sebesar JPY177 bio. Selain itu, tenor 15 dan 20 tahun merupakan tenor *Samurai Bonds* terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia. Pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo *Samurai Bonds* dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan ini. Komitmen untuk menerbitkan *Samurai Bonds* secara regular dan perbaikan pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan semakin memperkuat pengakuan dan kepercayaan dari investor Jepang. Pencapaian ini telah diakui oleh *Japan Credit Rating Agency* (JCRA) dengan memberikan kenaikan *outlook* dari stabil ke positif.

Sementara itu pemerintah juga melakukan 2 kali penerbitan *dual currency bonds* yaitu di bulan Juni dan Oktober yang juga mencatatkan beberapa pencapaian. Untuk penerbitan di bulan Juni, Seri RIEUR0926 merupakan SUN valuta asing yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi Euro dengan tingkat kupon terendah sejak diterbitkan. Transaksi ini adalah penerbitan keenam Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi Euro dan merupakan penerbitan kedua denominasi Euro dalam format SEC-*Registered*. Sedangkan penerbitan SUN *dual currency* di bulan Oktober dilaksanakan pada momentum yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil serta respon positif atas pelaksanaan pelantikan Presiden dan pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024. Transaksi SUN dalam mata uang US Dollar bertenor 30 tahun kali ini menjadi penerbitan dengan *yield* dan *spread* terendah sepanjang sejarah penerbitan SUN dalam mata uang USD untuk tenor 30 tahun.

Kondisi pasar SBN tahun 2019 cenderung *bullish* dengan rata-rata *incoming bid* terbesar terjadi pada kuartal I sebesar Rp192 T dan rata-rata *awarded bid* terbesar juga terjadi di kuartal I sebesar Rp74 T. hal ini terjadi karena kondisi likuiditas di pasar saat awal tahun masih tinggi. Penerbitan SBN juga telah dikoordinasikan dengan BI dan Ditjen Perbendaharaan terkait kondisi kas pemerintah pusat dan likuiditas. Kondisi pasar SBN yang cenderung *bullish* juga membuat SUN Seri *benchmark* mengalami penurunan *yield*. Seri 5 tahun mengalami penurunan sebesar 140 bps dari 7,76% ke 6,36%, seri 10 tahun sebesar 85 bps dari 7,93% ke 7,07%, seri 15 tahun sebesar 77 bps dari 8,31% ke 7,54%, seri 20 tahun sebesar 80 bps dari 8,48 ke 7,68. Selama tahun 2019 telah dilakukan 2 kali *debt switch* SUN, yaitu bulan Maret dan September dengan hasil lelang masing-masing sebesar Rp4,75 T dan 2,12 T. Seri yang ditukar umumnya merupakan seri yang kurang likuid di pasar SUN dengan kupon tinggi. Dengan adanya *debt switch* ini, pemerintah telah menghemat pembayaran kupon untuk tahun 2020 sebesar Rp89 Milyar.

Selanjutnya, telah diterbitkan 10 seri SBN Ritel dengan total nominal mencapai Rp49,89 T. Dengan adanya tambahan 12 Mitra Distribusi *online*, maka total mitra distribusi online menjadi 23 dengan komposisi 14 bank, 4 perusahaan efek, dan 5 *fintech* (3 APERD dan 2 *peer to peer lending*). Jumlah investor SBN Ritel berdasarkan NIK sampai dengan akhir 2019 sebanyak 432.532, sedangkan jumlah investor yang memiliki SID (mulai seri SBN Ritel *online* sejak 2018) sebanyak 163.557 investor. Tahun 2019 juga diwarnai dengan semakin meningkatnya generasi millennial yang berpartisipasi sebagai investor dalam SBN terutama SBN Ritel. Hal tersebut merupakan hal yang sangat positif mengingat SBN merupakan salah satu penopang pembiayaan pembangunan terutama untuk pembangunan infrastruktur dan menjadi salah satu wujud bela negara bagi investor SBN untuk turut serta dalam membiayai pembangunan.

Kondisi pasar SBN pada tahun 2019 cenderung *bulish* dengan permintaan tertinggi pada kuartal I pada saat likuiditas di pasar sangat tinggi dan kuartal IV pada saat kondisi pasar semakin baik dan komunikasi kepada pelaku pasar terutama terkait tambahan pembiayaan utang untuk pelebaran defisit APBN. Bahkan kinerja penerbitan dan pengelolaan SBN mendapat apresiasi pasar yang ditunjukkan dengan penurunan level *yield* Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dalam Rupiah sekitar 12 persen, sementara untuk SUN tenor 10 tahun dalam USD turun jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 36 persen. Posisi SBN hingga 2019 yaitu SBN dalam mata uang Rupiah Rp2.961,29 triliun dan SBN valas Rp1.053,52 triliun.

Kepemilikan non-residen atas SBN domestik yang dapat diperdagangkan (*tradable*) pada akhir 2019 adalah sebesar Rp1.061,68 T atau sebesar 38,57% dengan nominal kepemilikan tertinggi terjadi pada tanggal 8 November 2019, yaitu sebesar Rp 1070,22 T. Sementara itu, secara persentase kepemilikan non-residen mencapai puncak tertingginya

pada tanggal 17 Juli 2019, yaitu sebesar 39,40%.

Jumlah nominal kepemilikan SBN *tradable* oleh investor di tahun 2019 tersebut menunjukkan tren kenaikan yang lebih disebabkan oleh faktor domestik, diantaranya lembaga pemeringkat utang S&P menaikkan kembali peringkat utang (rating) Indonesia satu tingkat menjadi BBB, dengan *outlook stable* pada bulan Mei 2019.

Kenaikan rating S&P merefleksikan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. Kebijakan Pemerintah telah efektif dalam mempromosikan keuangan publik yang berkelanjutan (*sustainable public financed*) dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Selanjutnya, peringkat Indonesia juga didukung oleh tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan kinerja fiskal yang moderat. Selain hal tersebut, stabilnya indikator makro (inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika) juga turut andil dalam meningkatkan kepemilikan SUN oleh kelompok investor non-residen.

Kepemilikan investor non-residen sempat menurun di bulan-bulan April, Mei, Agustus, dan Desember. Penurunan tersebut lebih disebabkan adanya pengaruh faktor global seperti yang terjadi di bulan April akibat adanya krisis presidensial di Venezuela. Kemudian di bulan Mei kondisi perang dagang AS dan China kembali menghangat di mana perang dagang terekskalasi dengan pengenaan tarif impor AS kepada China sebesar 10% di bulan Mei. Selain itu, di bulan Agustus juga terdapat sentimen negatif yang disebabkan oleh Argentina mengajukan restrukturisasi utang sebesar USD101 miliar dan kembali memasuki periode krisis setelah Mauricio Macri mengalami kekalahan besar pada pemilu awal.

Penurunan di bulan Desember ditengarai akibat adanya faktor global seperti perkembangan lanjutan dari hubungan dagang US-China menjelang *deadline* penerapan tarif baru untuk China. Namun kemudian, faktor penekan untuk pasar domestik diperkirakan berasal dari meningkatnya antisipasi risiko pasar akibat laporan *World Bank* yang memangkas proyeksi GDP Indonesia menjadi hanya 5,00% pada tahun 2019.

Pemerintah juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait Surat Utang Negara selama tahun 2019, antara lain *Samurai Bonds Best Deals* 2019 dari Nikkei Veritas, *The Best Sovereign Bond Award for SEA Region* dari *The Asset Triple A* untuk penerbitan SUN Valas (SEC4-Juni 2019), serta *International Public Relation Award* - kampanye kehumasan penjualan SBN Ritel oleh *International Public Relation Association* (IPRA) (September 2019).

Tahun 2019 juga diwarnai dengan semakin meningkatnya partisipasi generasi milenial sebagai investor SBN ritel. Hal tersebut merupakan hal yang sangat positif dan menjadi salah satu wujud dari upaya peningkatan basis investor dalam negeri dan sebagai upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan utang.

Penerbitan SBN di paruh pertama 2019 diwarnai dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui *platform online* dalam frekuensi lebih sering untuk menyediakan alternatif sarana berinvestasi bagi masyarakat. Kemudian terdapat penerbitan *Green* Sukuk Global yang mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,3 kali. Penerbitan *Green* Sukuk tersebut melengkapi penerbitan SBN dalam valuta asing di tahun 2019 yang secara rata-rata berhasil mencapai tingkat imbal hasil (*yield*) yang relatif rendah. Kondisi ini didorong oleh kenaikan peringkat kredit Indonesia oleh S&P di akhir Mei menjadi BBB/*stable* dari sebelumnya BBB-/*stable* (naik 2 *step*).

Paruh kedua diwarnai dengan penerbitan *Green* Sukuk Ritel yang pertama di dunia. Hal ini semakin mengukuhkan adanya sumbangsih pembiayaan bagi pelestarian lingkungan hidup. SBSN kembali berkontribusi dalam pembangunan nasional yaitu dengan membiayai pembangunan *underpass* terpanjang di Indonesia dengan panjang 1,3 kilometer pada *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang telah beroperasi pada tanggal 20 Desember 2019. *Underpass* ini diharapkan dapat menghubungkan Purworejo dengan Yogyakarta melalui jalan nasional pantai selatan Jawa.

Di akhir 2019, total pinjaman pemerintah adalah Rp764,48 triliun. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar Rp810,20 triliun. Menurunnya pinjaman Pemerintah merupakan suatu pengejawantahan tanggungjawab untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang didominasi mata uang asing, serta sebagai upaya mengedepankan kemampuan pasar dalam negeri.

Sebagai langkah mitigasi risiko valas dan sekaligus menjalankan strategi oportunisik yaitu memanfaatkan pasar SBN yang sedang *bullish*, maka Pemerintah mengurangi penarikan pinjaman program pada tahun 2019. Pinjaman program yang telah sebelumnya tersedia pada tahun 2019 baru akan dimanfaatkan untuk pembiayaan tahun 2020, yang bersumber dari AFD sebesar EUR100 juta, JICA sebesar eq. USD300 juta dan KfW sebesar EUR500 juta.

Sebagai manifestasi tanggungjawab Pemerintah untuk semakin mengurangi pinjaman, pada bulan Desember 2019 Pemerintah berhasil menegosiasikan konversi 2 pinjaman dari ADB. Konversi pinjaman dimaksud berupa perubahan pinjaman dengan mata uang USD dan tingkat bunga LIBOR menjadi mata uang EUR dengan tingkat bunga 0%. Dengan konversi ini, mulai tahun 2020 hingga 2033, Pemerintah hanya cukup membayar pokok utang tanpa membayar bunga. Transaksi ini diperkirakan menghasilkan penghematan sebesar USD 24 juta per tahun. Ke depannya akan dilakukan kembali konversi serupa dengan mengubah pinjaman dari mata uang USD ke mata uang JPY disertai tentu saja dengan negosiasi penurunan suku bunga.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL per 1 Januari 2019 sebesar Rp 175,24 triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 *(Audited)*. Saldo Anggaran Lebih Awal dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2019	1 Januari 2018
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Saldo Awal Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
	175.984.640.119.749	**139.599.450.932.318**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(277.316.178.796)	(1.228.785.283.159)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(485.172.315)	(39.676.912.721)
Selisih Kiriman Uang	(330.588.756.176)	298.353.410.242
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(134.534.327.816)	(276.326.293.082)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(742.924.435.103)**	**(1.246.435.078.720)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp15,00 triliun

Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp15.000.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp53,39 triliun

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53.397.784.263.857 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Pendapatan Negara	1.960.633.583.585.989	1.943.674.876.878.796
Belanja Negara	2.309.287.309.507.383	2.213.117.817.284.996
Surplus (Defisit)	(348.653.725.921.394)	(269.442.940.406.200)
Pembiayaan Neto	402.051.510.185.251	305.692.597.869.020
SiLPA/(SiKPA)	**53.397.784.263.857**	**36.249.657.462.820**

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar minus Rp1,66 triliun

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs *(unrealized)*, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp1.666.230.746.416 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Koreksi SiLPA	(1.337.580.362.637)	1.079.553.470.113
Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(69.218.984.057)	(312.233.301.456)
Koreksi Kas BUN	(168.278.530.526)	(270.884.828.683)
Koreksi Kas KPPN	-	4
Koreksi Kas Hibah	(9.921.980.606)	(5.418.309.131)
Koreksi Kas BLU	(62.087.570.751)	284.758.662.132
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	(18.965.531.957)	46.468.719.871
Koreksi Utang PFK	(121.911.422)	(18.524.998)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(55.874.460)	(2.774.598.030)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**(1.666.230.746.416)**	**819.451.289.822**

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp1.337.580.362.637 merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp393.879.449.283 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar minus Rp943.700.913.354. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai minus Rp360.522.973.854 dan transaksi pengembalian Hibah senilai minus Rp33.356.475.429.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp69.218.984.057 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp168.278.530.526 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp9.921.980.606 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2019 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo hibah ini dikarenakan adanya kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan Surat Pengesahan Hibah Langsung, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp62.087.570.751 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2019, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp18.965.531.957 merupakan koreksi terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.
7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp121.911.422 merupakan koreksi pembukuan/akuntansi yang dilakukan Satker BUN Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI berupa penambahan Utang PFK hasil Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Bekas Milik Bank Dalam Likuidasi (BDL).

8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp55.874.460 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,72 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp725.105.589.691 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	211.994.966.699	(575.403.332.739)
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	47.987.539.000	417.021.528.777
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	(472)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	465.123.083.992	(22.027.117.160)
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**725.105.589.691**	**(180.408.921.594)**

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL tahun 2019 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	285.150.273.469	285.150.273.469	-
Saldo Akhir	234.188.766.627	234.188.766.627	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp211.994.966.699 dan Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp47.987.539.000 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nlai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.
3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp465.123.083.992 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	330.588.756.176
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	134.534.327.816
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**465.123.083.992**

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(15.000.000.000.000)	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	**160.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	**53.397.784.263.857**	**36.249.657.462.820**
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	**213.639.499.948.503**	**174.602.673.316.418**
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	(1.337.580.362.637)	1.079.553.470.113
Selisih Kurs (*unrealized*)	(69.218.984.057)	(312.233.301.456)
Koreksi Kas BUN	(168.278.530.526)	(270.884.828.683)
Koreksi Kas KPPN	-	4
Koreksi Kas Hibah	(9.921.980.606)	(5.418.309.131)
Koreksi Kas BLU	(62.087.570.751)	284.758.662.132
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) [1)]	(18.965.531.957)	46.468.719.871
Koreksi Utang PFK [2)]	(121.911.422)	(18.524.998)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) [3)]	(55.874.460)	(2.774.598.030)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	**(1.666.230.746.416)**	**819.451.289.822**
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP [1)]	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL [4)]	211.994.966.699	(575.403.332.739)
Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* [5)]	47.987.539.000	417.021.528.777
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris [6)]	-	(472)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	465.123.083.992	(22.027.117.160)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	**725.105.589.691**	**(180.408.921.594)**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	234.188.766.627	285.150.273.469
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	50.961.506.842	(74.322.109.329)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	31.995.974.885	(27.853.389.458)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	**(18.965.531.957)**	**46.468.719.871**
Keterangan: **Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN**	**(18.965.531.957)**	**46.468.719.871**
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = **Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP**	-	-

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Saldo Awal Utang PFK (I)	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Saldo Akhir Utang PFK (II)	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	1.717.219.259.845	(513.714.225.993)
Mutasi Transaksi PFK (III)	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	**(804.160.913)**	**(245.182.918)**
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk *Invoice* (IV)	682.249.491	226.657.920
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk *Invoice* = **Koreksi Utang PFK pada BUN**	**(121.911.422)**	**(18.524.998)**
Keterangan: Koreksi terhadap Saldo Utang PFK karena perbaikan pembukuan/akuntansi pada BUN.	(121.911.422)	(18.524.998)

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	197.868.217.285	239.936.781.997
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	118.429.956.817	197.868.217.285
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(79.438.260.468)	(42.068.564.712)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(79.494.134.928)	(44.843.162.742)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)**	**(55.874.460)**	**(2.774.598.030)**
Keterangan: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(55.874.460)	(2.774.598.030)

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Saldo Awal RPL	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	(197.383.044.970)	(200.259.869.276)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	5.654.556.669.254	3.705.503.747.466
Koreksi Saldo RPL	-	5
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	5.654.556.669.254	3.705.503.747.471
Saldo Akhir RPL	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	(118.407.853.946)	(197.383.044.970)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(2.837.971.226.184)	1.949.052.921.783
Mutasi Transaksi RPL (III)	(2.625.976.259.485)	1.373.649.589.044
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = **Penyesuaian Transaksi RPL**	**211.994.966.699**	**(575.403.332.739)**
Keterangan: Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	211.994.966.699	(575.403.332.739)

5) Rekening *Escrow*

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Saldo Awal Rekening *Escrow*	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	(3.714.379.337.474)	(3.276.851.117.024)
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Koreksi Saldo Rek. *Escrow*	-	-
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Saldo Akhir Rekening *Escrow*	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun	(5.695.887.440.489)	(3.714.379.337.474)
Saldo Akhir Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (II)	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(40.528.910.089.016)	(7.048.091.865.264)
Mutasi Transaksi Rekening *Escrow* (III)	(40.480.922.550.016)	(6.631.070.336.487)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow***	**47.987.539.000**	**417.021.528.777**
Keterangan: Nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga Negara dan penyesuaian Rekening *Escrow* lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	47.987.539.000	417.021.528.777

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2019 *(Audited)*	TA 2018 *(Audited)*
Saldo Awal Kas Transitoris	-	(472)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	-
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	-	(472)
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	-
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	-	472
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris**	-	**(472)**
Keterangan: -	-	**(472)**

C.6.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp212,69 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 212.698.374.791.778. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Saldo Akhir Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
	212.723.083.673.014	**175.984.640.119.749**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(12.345.086.135)	(277.316.178.796)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(22.102.871)	(485.172.315)
Selisih Kiriman Uang	52.495.332	(330.588.756.176)
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(12.394.187.562)	(134.534.327.816)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(24.708.881.236)**	**(742.924.435.103)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2019 sebesar Rp37.456.659.107.132 dari Saldo SAL Tahun 2018.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

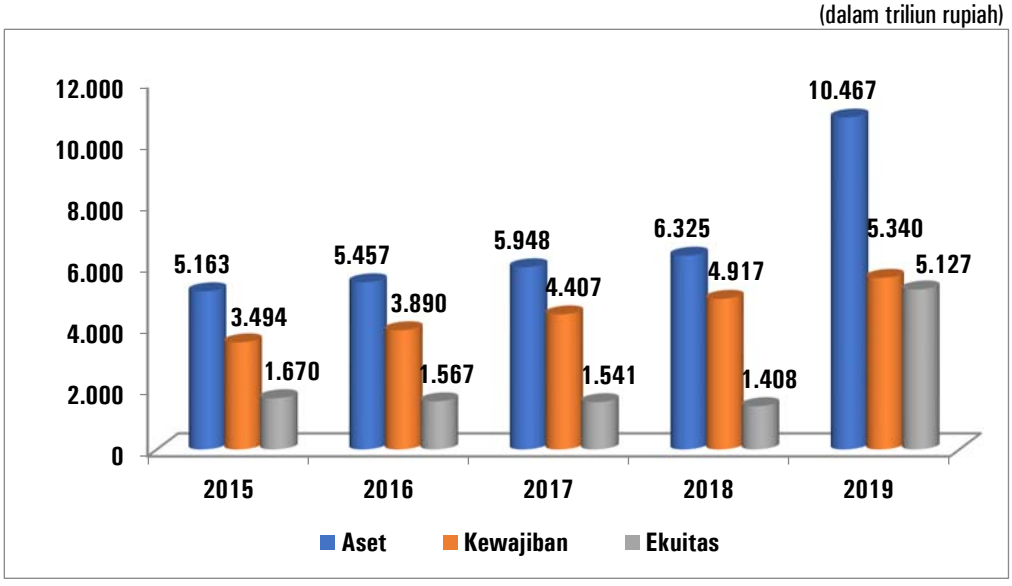
Neraca	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Aset Lancar	491.867.510.128.337	437.878.646.078.602	12,33
Investasi Jangka Panjang	3.001.201.131.873.675	2.877.282.832.067.532	4,31
Aset Tetap	5.949.595.402.491.414	1.931.051.040.187.638	208,10
Piutang Jangka Panjang	56.888.975.528.228	57.188.754.504.406	(0,52)
Aset Lainnya	967.981.447.325.579	1.021.884.513.023.392	(5,27)
Jumlah Aset	**10.467.534.467.347.233**	**6.325.285.785.861.570**	**65,49**
Kewajiban Jangka Pendek	704.682.072.672.981	750.502.434.401.484	(6,10)
Kewajiban Jangka Panjang	4.635.539.513.513.850	4.166.975.126.814.345	11,24
Jumlah Kewajiban	**5.340.221.586.186.831**	**4.917.477.561.215.829**	**8,60**
Ekuitas	**5.127.312.881.160.402**	**1.407.808.224.645.741**	**264,20**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**10.467.534.467.347.233**	**6.325.285.785.861.570**	**65,49**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 208,10 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2018. Sementara nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 6,10 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2018.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 25**.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

(dalam triliun rupiah)



Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2015 – 2019

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1 ASET

D.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Rp491,86 triliun

Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp491.867.510.128.337 dan Rp437.878.646.078.602.

Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

Aset Lancar	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas dan Setara Kas	208.962.960.718.114	178.625.211.629.388	16,98
Uang Muka dari Rekening BUN	5.455.736.715	106.939.618.970	(94,90)
Investasi Jangka Pendek	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582	74,05
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	34.972.003.392.136	31.026.237.178.411	12,72
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	3.028.979.606.205	637.147.289.481	375,40
Piutang	110.630.183.915.948	108.676.964.375.585	1,80
Persediaan	123.450.089.924.835	112.590.656.928.185	9,65
Jumlah	**491.867.510.128.337**	**437.878.646.078.602**	**12,33**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,33 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Kas dan Setara Kas yang mengalami kenaikan sebesar Rp30.337.749.088.726 karena adanya kenaikan SAL. Pendapatan yang Masih Harus Diterima mengalami kenaikan tertinggi sebesar 375,40 persen. Sementara Uang Muka dari Rekening BUN mengalami penurunan tertinggi sebesar 94,90 persen.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum

Kas di Rekening Pemerintah di BI dan BU Rp151,40 triliun

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp151.409.014.474.516 dan Rp114.834.181.946.110, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp36.574.832.528.406 atau 31,85 persen dibandingkan tahun 2018. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp135.363.107.144.280 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp16.045.907.330.236.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp135.363.107.144.280 dan Rp106.605.850.138.231, mengalami kenaikan sebesar Rp28.757.257.006.049 atau 26,98 persen. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain:

- Peningkatan saldo yang signifikan pada Rekening Kas SAL dan Rekening Kas Penempatan di dalam Rupiah sebagai penambah SAL likuid hasil LKPP 2018 *(Audited)* dan dari realisasi penggunaan dana SAL sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- Terdapat pembukaan reksus baru di tahun 2019 antara lain Reksus SBSN DJ Bina Marga, Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air, dan reksus SBSN DJ Perkeretaapian.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.404.070.486.688	2.457.631.451.020
Rekening SAL Nomor 500.000002980	92.839.841.214.312	78.075.064.058.877
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	28.700.791.990.043	15.859.223.125.982
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	1.769.926.850.368	3.406.147.015.577
Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program SKR (510000277980)	159.643.691	3
Rekening Khusus dalam Rupiah	9.648.316.959.174	6.807.784.486.772
Jumlah	**135.363.107.144.276**	**106.605.850.138.231**

Dalam akun Kas BUN di BI dalam rupiah pada RKUN sebesar Rp12.349.491.335, masih terdapat saldo yang seharusnya dipindahkan dari RKUN ke rekening khusus Dana PFK, di mana nilai ini juga menjadi pengurang fisik SAL.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.045.907.330.236 dan Rp8.228.331.807.879, mengalami kenaikan sebesar Rp7.817.575.522.357 atau 95,01 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan saldo pada Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Negara Penempatan dalam Valas sebagai rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan berupa pendapatan pajak/non pembiayaan dalam valas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	18.061.891.108	63.948.250.367
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	30.571.198.642	798.232.662
Rekening KUN dalam Valuta EUR	96.910.912.514	117.908.359.024
Reksus Depkeu dan Kemenkeu	3.353.370.060.258	3.584.946.612.701
Rekening Kas penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	12.546.993.267.714	4.460.730.353.125
Jumlah	**16.045.907.330.236**	**8.228.331.807.879**

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya Rp2,93 triliun

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.934.993.297.016 dan Rp5.851.939.714.224, mengalami penurunan sebesar Rp2.916.946.417.208 atau 49,85 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pendapatan hasil minyak perjanjian *production sharing* pada rekening penerimaan migas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 *(Audited)*
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	102.445.861.040	194.057.444.660
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	22.588.300	49.530.800
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	15.939.404.606	0
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.027.878.594.178	1.374.911.063.212
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.788.702.844.687	4.279.644.422.002
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	4.004.178	(4)
Kas Lainnya	0	3.276.069.510

Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	6	4
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	21	20
RPL BUN Unit Pelaksana Proyek Perkebunan SPH	0	1.179.020
Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	0	5.000
Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	0	1
RPL BUN Perusahaan Inti Rakyat Non SPH	0	(1)
Jumlah	**2.934.993.297.016**	**5.851.939.714.224**

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.027.878.594.178 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp1.788.702.844.687 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 1**.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN Rp2,89 triliun

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.891.119.214.103 dan Rp5.127.777.217.073, mengalami penurunan sebesar Rp2.236.658.002.970 atau 43,62 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.891.119.214.103 terdiri dari :

a. Saldo Kas di KPPN penerimaan sebesar Rp2.891.111.227.978, terdapat di rekening persepsi pada Bank/Pos persepsi/Lembaga persepsi lainnya. Saldo kas tersebut berbeda dengan rekening koran karena dicatat berdasarkan rekonsiliasi data penerimaan.
b. saldo Kas di KPPN KPH sebesar Rp7.986.125 terdapat di rekening retur USD KPPN KPH.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam Transito Rp52,49 juta

Kas dalam Transito per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp52.495.330 dan Rp465. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah.

Rincian Kas dalam Transito disajikan sebagai berikut.

Kas Dalam Transito	31 Desember 2019 (*Audited*)	31 Desember 2018 (*Audited*)
1. Kas Dalam Transito – BUN	-	330.588.756.176
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	52.495.332	(330.588.756.169)
3. Kas Dalam Transito rekening pinjaman/hibah	-	-
4. Pembulatan	(2)	458
Jumlah	**52.495.330**	**465**

Selisih Kiriman Uang Antar Rekening Bank sebesar Rp52.495.330 tersebut merupakan pengeluaran Kiriman Uang dari RPL BUN PIR SPH pada Bank Rakyat Indonesia nomor 020691000023305 yang dinihilkan pada tanggal 31 Desember 2019 (menggunakan mekanisme Sistem Kliring Nasional (SKN) ke Rekening Dana Investasi di Bank Indonesia nomor 513000000980). Pelimpahan melalui mekanisme SKN memerlukan waktu sehingga kiriman uang tersebut baru dapat dibukukan di Rekening Dana Investasi pada tanggal 2 Januari 2020.

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp234,18 miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp234.188.766.627 dan Rp285.150.273.469, mengalami penurunan sebesar Rp50.961.506.842 atau 17,87 persen. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Dari total saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp234.188.766.627 tersebut di atas, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah melewati masa 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp402.186.228 pada satker:

- Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara (419180) Kementerian Agama sebesar Rp8.422.407;
- KPU Kabupaten Buru (659630) sebesar Rp367.763.821;
- Sekretariat Daerah Prov NTT (249136) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp26.000.000

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp166,17 miliar

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp166.170.010.917 dan Rp92.280.796.378, mengalami kenaikan sebesar Rp73.889.214.539 atau 80,07 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp5,59 triliun

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.591.063.945.100 dan Rp3.638.728.687.898, mengalami kenaikan sebesar Rp1.952.335.257.202 atau 53,65 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
K/L	5.589.286.954.858	3.631.533.687.032
BUN	1.634.617.895.228	7.195.000.867
Penyesuaian	(1.632.840.904.986)	-
Jumlah*	**5.591.063.945.100**	**3.638.728.687.899**

**) Selisih TA 2018 Rp1 karena pembulatan*

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Setara kas lainnya	760.656.061	2.368.973.287
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.371.880.286.238	1.503.277.817.929,
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	4.941.163.989	16.827.906.795
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	506.175.037.833	407.179.162.727
Kas Lainnya di BLU	685.474.767.370	671.962.767.202
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	385.493.107.128	303.028.428.348
Jumlah	**5.589.286.954.858**	**3.631.533.687.032**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Sosial sebesar Rp2.011.950.360.632 sebagian besar merupakan saldo rekening penampung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak disalurkan kepada Penerima Bansos yang belum dikembalikan ke kas negara, pengembalian belanja barang yang belum disetor ke kas negara, pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara, dan Kas Lainnya dari Hibah.
2. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp471.433.500.118 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
3. Kementerian Kesehatan sebesar Rp511.420.745.577 sebagian besar merupakan Kas Lainnya dari Hibah, Kas Lainnya di BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Setara kas lainnya	-	11.446.470
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	55.958.989	7.183.554.397
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.634.561.936.239	-
Saldo penempatan pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara Bank BNI (BA 999.00)	-	-
Jumlah	**1.634.617.895.228**	**7.195.000.867**

Penyesuaian sebesar minus Rp1.632.840.904.986 terdiri dari:

1. Penyesuaian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada BUN sebesar Rp1.634.561.936.239.
2. Penyesuaian saldo Kas Lainnya di BLU sebesar minus Rp1.721.031.253.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp45,73 triliun

Kas pada BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp45.736.358.514.505 dan Rp48.795.152.993.771, atau mengalami penurunan sebesar Rp3.058.794.479.266 atau 6,27 persen.

Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	936.232.567.791	904.957.640.969
BLU di Kementerian Pertahanan	182.756.852.058	58.096.202.573
BLU di Kementerian Keuangan	19.207.516.720.261	22.717.545.215.069
BLU di Kementerian Pertanian	103.390.209.184	90.650.947.758
BLU di Kementerian Perindustrian	79.751.016.128	71.478.397.756
BLU di Kementerian ESDM	163.067.505.213	120.726.309.982
BLU di Kementerian Perhubungan	964.747.956.127	868.613.894.298
BLU di Kementerian Kesehatan	2.236.198.821.615	1.849.005.553.191

BLU di Kementerian Agama	1.110.285.022.766	884.621.264.398
BLU di Kementerian LH dan Kehutanan	1.010.393.623.043	922.303.158.596
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	79.080.567.361	27.095.500.565
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.506.030.211.811	2.269.856.342.589
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.405.488.920.088	3.176.916.338.139
BLU di Kementerian KUKM	1.038.852.694.897	883.834.264.321
BLU di Kementerian Kominfo	12.358.445.398.090	12.858.068.421.709
BLU di Kepolisian RI	318.598.320.819	256.232.999.313
BLU di BPPT	19.937.109.912	38.455.953.365
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	235.863.792.715	203.999.501.633
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	775.420.675.409	586.726.344.967
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	4.300.529.217	5.968.742.580
Jumlah	**45.736.358.514.505**	**48.795.152.993.771**

Kas pada BLU sebesar Rp45.736.358.514.505 merupakan Kas pada BLU yang sudah disahkan. Di samping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp10.817.836.834.384, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp56.554.195.348.889 (Rp45.736.358.514.505 ditambah Rp10.817.836.834.384). Nilai tersebut merupakan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN sebesar Rp56.554.199.281.529 dan yang belum disahkan oleh KPPN sebesar Rp3.932.640.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN Rp5,45 miliar

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.455.736.715 dan Rp106.939.618.970, mengalami penurunan sebesar Rp101.483.882.255 atau 94,90 persen. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* disajikan sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
IBRD	-	4.770.340.651
ADB	549.682.608	1.337.462.511
OECF/JBIC	-	-
IFAD	35.731.300	871.774.698
IDB	-	340.547.160
Bank Dunia	3.728.706.597	-
SBSN	-	98.985.926.350
KFW	1.141.616.210	633.567.600
Jumlah	**5.455.736.715**	**106.939.618.970**

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Rp10,81 triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.817.836.834.384 dan Rp6.215.489.058.582, mengalami kenaikan sebesar Rp4.602.347.775.802 atau 74,05 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

Investasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BLU pada Kementerian Keuangan	7.652.521.798.124	2.592.473.339.265
BLU pada Kementerian ESDM	18.000.000.000	5.500.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	19.000.000.000	9.000.000.000
BLU pada Kementerian Kesehatan	497.297.961.926	450.246.567.822
BLU pada Kementerian Agama	40.250.000.000	58.250.000.000
BLU pada Kementerian Ristek Dikti	2.590.767.074.334	3.100.019.151.495
Jumlah	**10.817.836.834.384**	**6.215.489.058.582**

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja Rp34,97 triliun

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp34.972.003.392.136 dan Rp31.026.237.178.411, yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.945.766.213.725 atau 12,72 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Belanja Dibayar Dimuka	10.459.525.595.574	23.669.417.801.342
2. Uang Muka Belanja	24.512.477.796.562	7.356.819.377.069
Jumlah	**34.972.003.392.136**	**31.026.237.178.411**

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 5.231.053.981.586 dan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.511.562.702.712.

Belanja Dibayar di Muka pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp5.231.053.981.586 merupakan realisasi belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 – 2019 berupa uang yang pertanggungjawabannya belum disampaikan oleh penerima bantuan. Belanja Bantuan Sosial berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan darurat bencana di seluruh Indonesia. Rincian Belanja Dibayar dimuka pada BNPB adalah sebagai berikut:

No	Belanja Dibayar Dimuka	31 Desember 2019 *(Audited)*
1	DSP TA 2015 BPBD Kab. Alor	4.913.487.521
2	DSP TA 2017	1.851.000.000
3	DSP TA 2018	1.881.313.921.166
4	DSP TA 2019	3.342.975.572.899
	Jumlah	**5.231.053.981.586**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.511.562.702.712 diantaranya merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada BPDPKS sebesar Rp2.098.824.072.300 terkait dengan Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang disalurkan pada pekebun/Kelompok Petani.

Belanja Dibayar Dimuka pada BPDPKS tersebut terdiri dari saldo dana pada rekening pekebun dan rekening Kelompok Tani, masing-masing sebesar Rp752.089.613.360 dan Rp1.087.958.186.349, serta penggunaan dana dari rekening-rekening tersebut sebesar Rp258.776.272.591 yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh BPDPKS per tanggal 31 Desember 2019.

Rincian saldo dana pada rekening pekebun dan rekening Kelompok Tani per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan tahun penyalurannya disajikan sebagai berikut:

Dana di Rekening	Penyaluran Tahun				Jumlah
	2016	2017	2018	2019	
Pekebun	6.350.000.000	-	11.276.382.280	734.463.231.080	752.089.613.360
Kelompok Tani	-	4.136.303.998	36.690.383.255	1.047.131.499.096	1.087.958.186.349
Jumlah	**6.350.000.000**	**4.136.303.998**	**47.966.765.535**	**1.781.594.730.176**	**1.840.047.799.709**

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp22.143.189.884.406, Kepolisian RI sebesar Rp2.284.441.428.139.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp3,02 triliun

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.028.979.606.205 dan Rp637.147.289.481, mengalami kenaikan sebesar Rp2.391.832.316.724 atau 375,40 persen. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.286.089.668.018, yang berasal dari potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2019 yang disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2020 pada seluruh satuan kerja dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas penggunaan sarana dan prasarana pada Badan Litbang SDM (MMTC) bulan Desember 2019.
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp94,69 triliun

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp94.699.061.189.535 dan Rp81.477.055.227.031. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* sebesar Rp Rp46.364.755.726.546 berasal dari nilai bruto sebesar Rp94.699.061.189.535 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp48.334.305.462.989.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	72.630.633.482	68.090.740.726
Penyisihan	(44.894.689.751)	(41.098.667.934)
Nilai Neto	**27.735.943.731**	**26.992.072.792**
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	22.068.427.707	13.386.314.501
Penyisihan	(3.439.615.711)	(3.388.774.933)
Nilai Neto	**18.628.811.996**	**9.997.539.568**
Jumlah Bruto	**94.699.061.189**	**81.477.055.227**
Penyisihan Piutang Perpajakan	**(48.334.305.462)**	**(44.487.442.867)**
Jumlah Neto	**46.364.755.727**	**36.989.612.360**

Piutang Perpajakan bruto mengalami kenaikan sebesar Rp13.222.005.962.504 atau sebesar 16,23 persen antara lain karena adanya kenaikan Piutang Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp8.585.194.430.442, Piutang PPh Pasal 23 sebesar Rp2.324.564.994.802, dan Piutang PPh Final sebesar Rp1.120.085.149.501.
Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)%
Piutang Pajak PPH Non Migas	30.435.164.967	24.226.282.819	25,63
Piutang Pajak PPN	24.748.525.693	24.061.126.456	2,86
Piutang Pajak PPnBM	418.059.962	506.938.435	(17,53)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.626.561.565	7.968.671.988	(16,84)
Piutang Cukai dan Bea Materai	17.501.473.662	8.913.391.928	96,35
Piutang Pajak Lainnya	10.813.279.461	11.704.776.608	(7,62)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.124.104.112	4.030.766.089	2,32
Piutang Bea Masuk Tindakan	31.891.767	65.100.905	(51,01)
Jumlah	**94.699.061.189**	**81.477.055.228**	**16,23**

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Piutang Pajak PPH Non Migas	19.093.073.806	15.608.454.940	22,32
Piutang Pajak PPN	13.589.170.170	12.910.651.974	5,26
Piutang Pajak PPnBM	327.960.650	452.316.382	(27,49)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	3.491.773.938	2.692.417.812	29,69
Piutang Cukai dan Bea Materai	166.669.071	157.090.888	6,10
Piutang Pajak Lainnya	8.518.179.658	9.561.022.376	(10,91)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.147.478.169	3.105.488.495	1,35
Jumlah	**48.334.305.462**	**44.487.442.867**	**8,65**

Penjelasan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 36**.
Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp166,25 triliun

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp166.256.763.245.523 dan Rp176.243.261.284.193, mengalami penurunan sebesar Rp9.986.498.038.670 atau 5,67 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp44.382.156.714.351, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp166.256.763.245.523 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp121.874.606.531.172.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	44.529.590.076.959	42.436.309.628.220
Penyisihan	(33.086.823.822.958)	(32.208.264.178.309)
Nilai Neto	**11.442.766.254.001**	**10.228.045.449.911**
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	121.727.173.168.564	133.806.951.655.973
Penyisihan	(88.787.782.708.214)	(93.997.385.751.924)
Nilai Neto	**32.939.390.460.350**	**39.809.565.904.049**
Jumlah Bruto	**166.256.763.245.523**	**176.243.261.284.193**
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(121.874.606.531.172)	(126.205.649.930.233)
Jumlah Neto	**44.382.156.714.351**	**50.037.611.353.960**

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp44,52 triliun

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp44.529.590.076.959 mengalami kenaikan sebesar Rp2.093.280.448.739 atau 4,93 persen dibandingkan tahun 2018. Piutang Bukan Pajak yang mempunyai nilai cukup signifikan berada pada K/L berikut.

1. Kejaksaan Agung sebesar Rp18.032.394.466.770 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
2. Kementerian ESDM sebesar Rp13.955.051.667.234 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalti dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment.*
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.372.368.215.572 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.467.263.638.513 sebagian besar merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.479.311.233.181 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Piutang Deviden pada BA 999.03	59.050.762.469	125.924.962.205
2. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	9.563.590.118.299	14.361.357.610.243
3. Piutang Subsidi pada BA 999.07	968.845.714.398	1.142.839.475.600
4. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	279.500.611.672	1.168.517.287.943
5. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	110.856.185.961.726	117.008.312.319.982
Jumlah	**121.727.173.168.564**	**133.806.951.655.973**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp121,72 triliun

a. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp59.050.762.469 dan Rp125.924.962.205, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Deviden pada BA 999.03	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Pokok Dividen	24.991.123.902	90.426.389.353
Denda	34.059.638.567	35.498.572.852
Jumlah	**59.050.762.469**	**125.924.962.205**

b. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.563.590.118.299 dan Rp14.361.357.610.243 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.797.767.491.944 atau 33.41 persen. Piutang pada BA 999.05 merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Piutang TKD	9.436.680.927.179	13.029.228.490.793
b. Piutang TKD Diestimasi	126.909.191.120	1.332.129.119.450
Jumlah	**9.563.590.118.299**	**14.361.357.610.243**

1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2019 sebesar 9.436.680.927.179, terdiri dari:

Piutang TKD	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Satker Dana Bagi Hasil	8.496.616.357.999
2) Satker DAU dan DAK Non Fisik	906.640.797.401
3) Satker Dana Keistimewaan DIY	33.423.771.779
Jumlah	**9.436.680.927.179**

- Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.496.616.357.999. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019.

- Piutang TKD pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2019 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD DAK Nonfisik yang tercatat per 31 Desember 2019 sebesar 906.640.797.401 akan diperhitungkan pada penyaluran DAK Nonfisik berikutnya melalui potongan SPM Penyaluran DAK Nonfisik Tahap I TA 2020 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 43 dan 44 pada PMK Nomor 48/PMK.07/2019.

  Rincian Piutang TKD DAK Nonfisik disajikan sebagai berikut.

Piutang Transfer ke Daerah pada Satker DAU-DAK	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Lebih Salur Dana BOS TA 2018	-	497.683.632.667
Piutang atas Sisa Dana di RKUD DAK Nonfisik TA 2019	906.640.797.401	-
Jumlah	**906.640.797.401**	**497.683.632.667**

- Piutang TKD Satker Dana Keistimewaan DIY per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp33.423.771.779 dan Rp37.227.311.557. Aset (Piutang) yang tercatat sebesar Rp33.423.771.779 merupakan sisa dana DK DIY TA 2019 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap Akhir TA 2019 tanggal 10 Februari 2020, mengacu pada pasal 11 PMK No 173/PMK.07/2017. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2020 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 PMK No 173/PMK.07/2017.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp126.909.191.120 dan Rp1.332.129.119.450, di mana mengalami penurunan sebesar Rp1.205.219.928.330 atau 90,47 persen. Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/ atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Nilai Piutang TKD Diestimasi sebesar Rp126.909.191.120 merupakan estimasi Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan untuk Dana Reboisasi tahun 2019 yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PNBP Dana Reboisasi TA 2019.

c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp968.845.714.398 dan Rp1.142.839.475.600. Rincian Piutang Subsidi pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.07	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Ditjen Anggaran	954.684.699.264	
b. Kementerian Perhubungan	-	143.196.727.531
c. Kementerian Keuangan	-	816.849.136.778
d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.708.000.000	203.000.000
e. Kementerian Pertanian	12.453.015.134	182.590.611.291
Jumlah	**968.845.714.398**	**1.142.839.475.600**

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp968.845.714.398 terdapat pada 3 (tiga) satker KPA Subsidi/PSO, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp954.684.699.264 yang merupakan koreksi atas penyajian beban subsidi listrik, utang jangka panjang subsidi, dan piutang subsidi berdasarkan BA Perhitungan Subsidi Listrik TA 2019 pada PT PLN oleh BPK sebesar Rp954.683.455.264 dan BAHP Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT Tahun 2019 pada PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar Rp1.244.000.

2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp1.708.000.000, merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya, yaitu merupakan piutang atas terjadinya duplikasi SPM senilai Rp948.000.000 pada Bank BJB dan senilai Rp760.000.000 pada Bank BTN, atas duplikasi SPM tersebut telah dilakukan penyetoran pada tahun anggaran 2020.
3. Piutang Subsidi Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.453.015.134 merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014.

d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp279.500.611.672 dan Rp1.168.517.287.943.
Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.08	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Kementerian Keuangan	-	888.686.999.287
b. Kementerian Pertanian	278.094.108.217	277.566.811.272
c. SKK Migas	619.689.095	
d. Otoritas Jasa Keuangan	786.814.360	2.263.477.384
Jumlah	**279.500.611.672**	**1.168.517.287.943**

1) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	71.678.605	71.870.618
Benih CBN di Penangkar	-	7.551.590.160
Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	258.706.584.419	249.920.932.558
Biaya Distribusi Benih CBN	14.315.134.984	14.388.461.647
Calon Benih	-	633.246.080
Benih Rusak/Kadaluwarsa	189.102.252	189.102.252
Jumlah	**278.094.108.217**	**277.566.811.272**

2) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp.619.689.095 merupakan piutang pekerja atas layanan kesehatan yang tidak ditanggung dan piutang kelebihan panjar perjalanan dinas, dan piutang kepada pihak ketiga.
3) Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp786.814.360 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta piutang atas kelebihan pembayaran pihak ketiga.

e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp110.856.185.961.726 dan Rp117.008.312.319.982.
Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

Piutang PNBP pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Piutang pada UAPBUN TK DJPB	119.229.957.112	162.094.275.907
b. Piutang pada UAPBUN TK DJA	17.810.948.543.909	22.880.302.482.313
c. Piutang pada UAPBUN TK DJKN	92.926.007.460.705	93.965.915.561.762
Jumlah	**110.856.185.961.726**	**117.008.312.319.982**

1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp119.229.957.112, terdiri dari:
   - Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp64.531.454.073 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Piutang UAPBUN TK DJPB	Nilai
Keterlanjuran pembayaran pensiun 2018 (PT Taspen)	6.512.840
Retur dan SUP bulan Desember 2019 (PT Asabri)	5.169.994.591
Piutang Jasa Giro PT Asabri Bulan Desember 2019	224.138.920
Kelebihan pencairan dana pensiun bulan Desember 2019 (PT Asabri)	8.438.516.848
Potongan Utang Non TGR PT Asabri (Non Dapem Desember 2019)	245.501.203
SUP lebih dari 3 bulan Desember 2019	2.810.692
SUP tahun 2019 dan SUP retur bulan Desember 2019	36.988.142.245
Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2019	2.946.242.284
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan November 2019	2.582.516.702
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2019	95.264.966
Kelebihan pendanaan bersama pensiun ketiga belas tahun 2019 Program Pensiun Eks PNS Dephun pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d Desember 2019	31.909.644
Kelebihan pencairan JKK Triwulan IV 2019 (PT Asabri)	2.841.280.305
Kelebihan pencairan JKM Triwulan IV 2019 (PT Asabri)	4.643.067.813
Keterlanjuran Pembayaran pensiun (Uji Petik KC Semarang)	116.233.960
Keterlanjuran Pembayaran pensiun (Uji Petik KC Bandung)	199.321.060
Jumlah	**64.531.454.073**

- Piutang pada Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp54.698.503.039 berasal dari piutang atas Pendapatan Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* bulan Desember 2019 yang diterima pada bulan Januari 2020 senilai Rp54.698.330.949 dan kurang setor Pendapatan Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* bulan November 2019 pada BPD Jabar dan Banten yang diterima pada bulan Januari 2020 senilai Rp172.090.

2) Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp17.810.948.543.909 dan Rp22.880.302.482.313, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang PNBP UAPBUN TK DJA	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Hasil Penjualan Minyak	9.929.120.618.652	10.163.287.329.467
Hasil Penjualan Gas	4.391.218.488.982	7.395.990.110.500
Overlifting KKKS	3.488.934.962.005	4.859.318.092.586
PNBP Migas Lainnya	1.674.474.270	461.706.949760
Jumlah	**17.810.948.543.909**	**22.880.302.482.313**

Piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.810.948.543.909 adalah lebih rendah Rp5.069.353.938.404 dari posisi per 31 Desember 2018. Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.810.948.543.909 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

a. Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terdapat piutang yang statusnya *dispute* disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS Conoco Phillips (Grissik) tahun 2017 sebesar USD18,238,353. Terjadi *dispute* atas *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas *overlifting* minyak dan dan gas bumi KKKS Conoco Phillips (Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45,022,132, hanya diakui oleh KKKS yang bersangkutan sebesar USD26,783,779.

b. Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah terkurangi oleh pencatatan atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS JOB PPEJ kepada PT Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014 sampai dengan Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil

penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.

3) Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp92.926.007.460.705 dan Rp93.965.915.561.762. Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
2) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	1.525.000	25.000
3) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	91.729.365.842.690	92.768.450.185.730
4) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	19.924.740.096	20.749.998.113
Jumlah	**92.926.007.460.705**	**93.965.915.561.762**

a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919. Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan.

Mutasi Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2019 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Piutang PNBP	Nilai
Saldo 1 Januari 2019	**1.176.715.352.919**
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2018	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2019	**1.176.715.352.919**

b) Piutang Bukan Pajak pada satker TK Pengelola Aset Lain-lain DJKN sebesar Rp1.525.000 yang merupakan nilai pokok lelang gratifikasi yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2020.

c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp91.729.365.842.690 dan Rp92.768.450.185.730. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a) Aset Kredit Eks BPPN	72.671.187.612.605	73.449.774.111.948
b) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	8.983.004.420.829	9.224.824.677.306
c) Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.075.173.809.256	10.093.368.778.479
d) Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat	-	482.618.000
Jumlah	**91.729.365.842.690**	**92.768.450.185.733**

1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp72.671.187.612.605 dan Rp73.449.744.111.948, terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp778.556.499.343 atau sebesar 1,06 persen. Perubahan tersebut karena adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, pengakuan piutang ke neraca karena proses pengurusan sudah PB/PJPN untuk piutang non ATK, koreksi besaran piutang negara, catatan pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 11**. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.983.004.420.829 dan Rp9.224.824.677.306. Terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp241.820.256.477 atau sebesar 2,62 persen. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.075.173.809.256 dan Rp10.093.368.778.479. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:
   - 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
   - 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
   - 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

   Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.
   - 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
   - 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.

   Penurunan nilai Piutang Eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2019.

   Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI tahun 2006	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 31 Desember 2018		(4.114.785.149.971)
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 31 Desember 2019	(4.126.175.102.807)	
Saldo I	**7.762.763.678.751**	**7.774.153.631.587**
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2018		(1.002.067.803.920)
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2019	(1.008.872.820.307)	
Saldo II	**2.312.410.130.505**	**2.319.215.146.892**
Jumlah Saldo I & II	**10.075.173.809.256**	**10.093.368.778.479**

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

4) Piutang kegiatan sewa kepada Indosat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp482.618.000.

d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS

Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.924.740.096 disajikan sebagai berikut.

BMN KKKS Yang Disewakan	Pihak Ketiga	Jumlah (USD)**	Jumlah (Rp)
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	1.354.466,15	18.828.433.951
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	68.392,50	950.724.142
Conoco Phillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	0	145.582.002
Jumlah*			**19.924.740.095**

**) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

***) Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901USD*

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp9,71 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.717.488.844 dan Rp10.541.206.650, mengalami penurunan sebesar Rp823.717.806 atau 7,81 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp7.946.292.638 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp9.717.488.844 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.771.196.206. Bagian Lancar TPA tersebut yang paling signifikan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.975.692.837 dan Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp135,72 miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 135.727.647.729 dan Rp132.923.950.960, mengalami kenaikan sebesar Rp2.803.696.769 atau 2,11 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp40.473.097.787 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp135.727.647.729 dikurangi penyisihan sebesar Rp95.254.549.942. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Rp23,11 triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp23.110.067.194.249 dan Rp23.609.406.852.881, yang mengalami penurunan sebesar Rp499.339.658.632 atau 2,12 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp11.362.970.422.301 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.110.067.194.249 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.747.096.771.948.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2019 *(Audited)*
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.156.182.595.276
Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	3.436.774.997.054
Piutang Denda Pemberian Pinjaman	1.288.283.859.309
Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman	671.584.428.684
Piutang biaya lain-lain Pemberian pinjaman	4.025.415.942.702
Piutang Bunga Akrual Pemberian Pinjaman	531.825.371.224
Piutang lancar kredit pemerintah (KUMK)	0
Jumlah	**23.110.067.194.249**

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp6,19 triliun

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.197.466.897.279 dan Rp6.295.339.227.189, mengalami penurunan sebesar Rp97.872.329.910 atau 1,56 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun 2015 - 2018	773.382.049.559	773.382.049.559
Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Bunga tahun 2015 - 2018	163.956.994.507	126.834.656.128
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	981.421.820.890	699.137.372.801
Piutang yang Jatuh Tempo	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.276.206.032.324	4.700.985.148.701
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.500.000.000	
Jumlah*	**6.197.466.897.280**	**6.295.339.227.189**

**) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp7,49 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.496.739.323.375 dan Rp7.520.013.178.234 mengalami penurunan sebesar Rp23.273.854.859 atau 0,31 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp6.549.384.129.328 berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.496.739.323.375 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp947.355.194.047.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp6.795.296.731.872 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp701.442.591.503.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	906.397.053.501	686.550.385.603
BLU di Kementerian Pertahanan	577.812.458.813	312.826.229.609
BLU di Kementerian Keuangan	72.842.746.758	93.149.342.874
BLU di Kementerian Pertanian	1.263.092.570	508.804.231
BLU di Kementerian Perindustrian	2.374.533.340	2.661.270.884
BLU di Kementerian ESDM	51.562.153.259	34.578.089.926
BLU di Kementerian Perhubungan	30.607.002.504	41.093.863.711
BLU di Kementerian Kesehatan	3.793.028.145.586	2.871.565.020.544
BLU di Kementerian Agama	5.425.465.064	28.718.269.464
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	390.623.204	1.571.906.365.165
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	123.480.566.340	205.372.142.586
BLU di Kementerian KUKM	6.914.246.522	8.114.895.954
BLU di Kementerian Kominfo	140.575.236.835	133.923.623.053
BLU di Kepolisian RI	426.582.022.074	276.844.130.422
BLU di BPPT	26.263.798.295	11.393.839.638
BLU di BPKPBPB Batam	629.777.587.207	471.366.114.135
Jumlah Bruto	**6.795.296.731.872**	**6.750.572.387.799**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(887.283.953.040)	(2.246.986.060.087)
Jumlah Neto	**5.908.012.778.832**	**4.503.586.327.712**

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	467.335.113	547.339.240
BLU di Kementerian Perhubungan	5.409.389.147	2.218.441.992
BLU di Kementerian Kesehatan	20.972.210.883	12.766.764.474
BLU di Kementerian Agama	3.202.798.191	4.226.996.513
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	397.644.873	
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	63.946.480.183	39.390.382.929
BLU di Kementerian Kominfo	606.471.293.018	588.244.764.265
BLU di Kepolisian RI	12.250.000	20.250.000
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	121.462.660.927
Jumlah Bruto	**701.442.591.503**	**769.440.790.435**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(60.071.241.007)	(24.149.158.948)
Jumlah Neto	**641.371.350.496**	**745.291.631.487**

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

Piutang PFK Rp912,90 juta

Piutang PFK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp912.908.715 dan Rp230.659.224, mengalami kenaikan sebesar Rp682.249.491 atau 295,78 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.1.1.6.9 Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Rp0

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp775.312.000.000. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 merupakan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK).

D.2.1.1.6.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp187,27 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp187.276.271.979.301 dan Rp187.387.119.210.777. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Piutang Pajak	48.334.305.462.989	44.487.442.867.354
2. Piutang Bukan Pajak	121.874.606.531.172	126.205.649.930.233
3. Bagian Lancar TPA	1.771.196.206	1.785.695.280
4. Bagian Lancar TP/TGR	95.254.549.942	87.509.960.349
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	11.747.096.771.948	14.333.596.061.526
6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.275.882.272.997	-
7. Piutang dari Kegiatan BLU	947.355.194.047	2.271.134.696.035
Jumlah	**187.276.271.979.301**	**187.387.119.210.777**

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.334.305.462.989 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8.**
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.874.606.531.172 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp33.086.823.822.958 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp88.787.782.708.214. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.771.196.206 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp39.878.464, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.220.552.288 dan pada LPP RRI sebesar Rp510.765.454.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.254.549.942. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 13.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.747.096.771.948.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.275.882.272.997 merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp947.355.194.047. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	83.425.653.985	64.012.286.114
BLU di Kementerian Pertahanan	23.796.516.924	16.567.283.293
BLU di Kementerian Keuangan	2.297.097.171	1.765.643.200
BLU di Kementerian Pertanian	6.727.763	2.544.021
BLU di Kementerian Perindustrian	459.701.305	199.115.966
BLU di Kementerian ESDM	16.039.461.640	14.646.654.148
BLU di Kementerian Perhubungan	3.029.897.733	3.591.972.257
BLU di Kementerian Kesehatan	457.019.134.086	440.324.448.386
BLU di Kementerian Agama	2.537.697.263	11.595.695.779
BLU di Kementerian PUPR	4.104.341	1.319.436.302.466
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	37.944.512.772	137.143.224.175
BLU di Kementerian KUKM	6.592.115.723	4.182.635.273
BLU di Kementerian Kominfo	180.191.717.160	142.512.030.691
BLU di Kepolisian RI	3.336.674.343	1.734.783.412
BLU di BPPT	469.268.994	98.531.698
BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	-	607.313.305
BLU di BPKPBPB Batam	130.204.912.844	112.714.231.851
Jumlah	**947.355.194.047**	**2.271.134.696.035**

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan Rp123,45 triliun

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp123.450.089.924.835 dan Rp112.590.656.928.185, mengalami kenaikan sebesar Rp10.859.432.996.650 atau 9,65 persen.

Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Persediaan di K/L	123.447.381.818.805	112.585.262.923.923
2. Persediaan di BUN	2.708.106.030	5.394.004.262
Jumlah	**123.450.089.924.835**	**112.590.656.928.185**

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

   Persediaan di K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp123.447.381.818.805. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp60.768.547.047.754, Kementerian PUPR sebesar Rp18.673.764.818.693, Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.076.615.771.648, Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.351.013.323.371, dan POLRI sebesar Rp6.150.975.026.091. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

   Persediaan di BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.708.106.030 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan di BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Kementerian Pertanian	-	1.319.754.895
b. Otoritas Jasa Keuangan	181.089.590	1.484.615.490
c. SKK Migas	2.527.016.440	2.589.633.877
Jumlah	**2.708.106.030**	**5.394.004.262**

1) Persediaan di BUN pada Kementerian Pertanian merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas Benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Pada tahun ini tidak terdapat saldo persediaan CBN. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2019 *(Audited)*		31 Desember 2018 *(Audited)*	
	Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
Padi Non Hibrida	-	-	193.939	1.319.754.895
Jumlah	-	-	**193.939**	**1.319.754.895**

2) Rincian Persediaan pada OJK disajikan sebagai berikut.

Persediaan pada OJK	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Barang Konsumsi	181.089.590	1.482.053.865
Barang untuk Pemeliharaan	0	2.561.625
Jumlah	**181.089.590**	**1.484.615.490**

3) Rincian Persediaan pada SKK dijelaskan sebagai berikut.

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Barang Konsumsi	2.508.105.620	2.571.084.787
Barang untuk Pemeliharaan	18.910.820	18.549.090
Jumlah	**2.527.016.440**	**2.589.633.877**

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Rp3,00 triliun

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.001.201.131.873.675 dan Rp2.877.282.832.067.532.

Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	97.162.978.446.357	83.779.964.051.931	15,97
Investasi Permanen	2.904.038.153.427.318	2.793.502.868.015.600	3,96
Jumlah*	**3.001.201.131.873.675**	**2.877.282.832.067.530**	**4,31**

**) selisih TA 2018 Rp2 karena pembulatan*

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp123.918.299.806.140 atau 4,31 persen. Kenaikan Investasi Jangka Panjang terutama berasal dari Investasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesar Rp110.535.285.411.718. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 15,97 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp47,11 triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp47.117.342.143.810 dan Rp38.751.152.041.474, mengalami kenaikan sebesar Rp8.366.190.102.336 atau 21,59 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	3.640.385.771.818	2.629.660.562.998
2. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.271.993.794.926	4.315.637.580.927
3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	34.404.077.877.505	29.463.190.892.831
4. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)	1.306.171.462.908	758.264.173.716
5. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	18.019.135.685	18.146.079.030
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.152.741.173.643	1.352.498.396.761
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	323.952.927.325	213.754.355.211
Jumlah	**47.117.342.143.810**	**38.751.152.041.474**

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.640.385.771.818 dan Rp2.629.660.562.998. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUMKM disebabkan oleh:
   a. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUMKM; dan
   b. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.
   c. Koreksi BPK atas Dana bergulir yang telah *incraht* di PN dan telah disetorkan a.n. Tunggal Kencana Jawa Timur sebesar Rp1.344.055.568 dan CV. Biliton Makmur Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp1.700.000.000. Serta dobel catat dana bergulir yang sudah diakui Tahun 2018 Rp18.838.513 (kelebihan pembayaran mitra).

   Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	3.264.041.974.460
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2018	376.343.797.358
Jumlah	**3.640.385.771.818**

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.271.993.794.926 dan Rp4.315.637.580.927 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

   Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	211.216.651.231
PT. Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821

PT. Pejagan Pemalang *Toll Road* | Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	246.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok *Port Tollways* | Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung *Tollway* | Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	**4.271.993.794.927**	**4.315.637.580.927**

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp34.404.077.877.505 dan Rp29.463.190.892.831 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

   Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Rupiah	
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir		
	* Tahun 2010	242.656.944.516	
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411	
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729	
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150	
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824	
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208	
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307	
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776	
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677	
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505	
Total Penyaluran Dana Bergulir			**44.366.864.224.103**
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir		
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900	
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.877	
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420	
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962	
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.057	
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544	
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361	
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817	
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829	
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831	
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir			**9.962.786.346.598**
Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)			**34.404.077.877.505**

4. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.306.171.462.908 dan Rp758.264.173.716. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Dana Bergulir merupakan jumlah realisasi bersih penyaluran dana bergulir sampai dengan akhir periode tahun 2019. Jumlah tersebut diperoleh dari nilai penyaluran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.346.941.073.535 dikurangi dengan pengembalian pokok pinjaman sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.769.610.627 sehingga diperoleh nilai realisasi bersih penyaluran Dana Bergulir. Sedangkan untuk 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp1.306.171.462.908.

5. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp18.019.135.685 dan Rp18.146.079.030. Mutasi Investasi dana bergulir tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang oleh debitur sebesar Rp126.943.344. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.
6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.152.741.173.643 dan Rp1.352.498.396.761. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.800.242.776.882 atau 133,11 persen karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp323.952.927.325 dan Rp213.754.355.211. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,12 Triliun

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.120.492.707.453 dan Rp1.015.195.857.543, mengalami kenaikan sebesar Rp105.296.849.910 atau 10,37 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	1.014.120.465.977	952.848.817.952
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	61.295.924.258	22.622.772.656
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.019.135.685	18.146.079.030
4. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	21.359.968.975	21.578.187.905
5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	5.697.212.558	-
Jumlah	**1.120.492.707.453**	**1.015.195.857.543**

1. BLU LPDB KUMKM

   Dana bergulir yang diragukan tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.014.120.465.977 dan Rp952.848.817.952. Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp544.624.287.554.

   Pada periode pelaporan 31 Desember 2019, terdapat koreksi BPK yang mempengaruhi nilai dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

   1. Dana bergulir yang telah *inkcraht* di PN dan telah disetorkan ke Kas Negara
   2. Koreksi atas pengurangan nilai jaminan berdasarkan jaminan yang ada.

2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

   Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp61.295.924.258 dan Rp22.622.772.656. Perhitungan penyisihan cadangan piutang pada BLU P2H dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Tagihan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

   Dana bergulir diragukan tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp18.019.135.685 dan Rp18.146.079.030. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Mutasi dana bergulir diragukan tertagih pada UAIP disebabkan adanya Mutasi Ekuitas pada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DNS) sebesar Rp126.943.344.

   Penurunan penyisihan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL. Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangl dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)

   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp21.359.968.975 dan Rp21.578.187.905. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan 169/PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo *outstanding* Investasi Non Permanen BLU.

   Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT disajikan sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir 2019	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2019	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2018
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	887.864.326	1.056.083.256
PT. Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	179.730.172.460	898.650.862	898.650.862
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	567.441.498	567.441.498
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	86.904.154	86.904.154
PT. Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	1.180.035.695	1.230.035.695
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	1.999.968.367	1.999.968.367
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	3.473.503.696	3.473.503.696
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	3.827.681.782	3.827.681.782
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	3.227.162.747	3.227.162.747
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	2.902.241.082	2.902.241.082
PT. MTD-CPP *Expressway* / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	1.439.983.948	1.439.983.948
PT Cimanggis Cibitung *Toll Way* / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	868.530.818	868.530.818
Jumlah	**4.271.993.794.927**	**21.359.968.975**	**21.578.187.905**

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

   Dana Bergulir pada BLU LPMUP per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.697.212.558 dengan rincian sebagai berikut.

Kolektibilitas	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir 31 Desember 2019
Lancar	16.773.198
Kurang Lancar	523.977.073
Diragukan	1.563.154.402
Macet	3.593.307.886
Jumlah*	**5.697.212.559**

**) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp51,42 triliun

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.422.761.195.268 dan Rp46.347.382.486.948, mengalami peningkatan sebesar Rp5.075.378.708.320 atau 10,95 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	51.418.671.963.087	46.343.293.254.767
Jumlah	**51.422.761.195.268**	**46.347.382.486.948**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.089.232.181 dan Rp4.089.232.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

(ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.418.671.963.087 dan Rp46.343.293.254.767. Kenaikan investasi jangka panjang tersebut disebabkan adanya pencairan alokasi investasi Pemerintah untuk BLU LPDP TA 2019 sebesar Rp5 triliun serta adanya penempatan kembali atas penyisihan dari investasi jangka panjang non permanen lainnya berupa investasi dalam Surat Utang Negara yang diperoleh secara premium sebesar Rp75.378.708.320. Dengan demikian, nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.075.378.708.320 atau sebesar 10,95 persen dari tahun 2018.

   Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1	Deposito	31.461.299.879.156	26.385.921.170.836
2	Obligasi Korporasi	2.687.000.000.000	2.687.000.000.000
3	Surat Utang Negara	15.770.372.083.931	15.770.372.083.931
4	Surat Berharga Syariah Negara	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
	Jumlah	**51.418.671.963.087**	**46.343.293.254.767**

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Rp256,63 miliar

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp256.632.185.268 dan Rp303.374.618.948. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI - BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp252.542.953.087.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

Unit Pengelola	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	252.542.953.087	299.285.386.767
Jumlah	**256.632.185.268**	**303.374.618.948**

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Rp2.397,25 triliun

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.397.253.380.483.284 dan Rp2.286.384.989.214.962, mengalami kenaikan sebesar 110.868.391.268.322 atau 4,85 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

Investasi PMP	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Persero	2.299.839.260.249.170	2.189.877.537.413.492
2. Perum	47.207.288.044.436	47.038.715.000.000
3. Lembaga Keuangan Internasional	22.637.252.581.227	21.293.200.765.776
4. Badan Usaha Lainnya	27.569.579.608.441	28.175.536.035.694
Jumlah*	**2.397.253.380.483.274**	**2.286.384.989.214.962**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp10 karena pembulatan*

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.299.839.260.249.170 dan Rp2.189.877.537.413.492. PMP pada Persero merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif (penihilan) terhadap 11 (sebelas) perseroan yang mengalami kerugian. Pada tahun 2019, terdapat penambahan perseroan yang memiliki ekuitas negatif yaitu PT Asabri (Persero) dan PT Industri Telekomunikasi (Persero).

   PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak yaitu:

   a. PMP Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

      Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.239.910.324.407.980 dan Rp2.133.010.292.264.222. Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

      PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2019 terdapat transaksi PMP sebesar Rp17.000.000.000.000 untuk PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) yang juga mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Persero selain surplus LO dan transaksi pos lainnya.

      BUMN berbentuk Persero berada dibawah pembinaan oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan Laporan Keuangan BUMN per 31 Desember 2019 berjumlah 99 BUMN dimana 10 BUMN berekuitas negatif sehingga pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp0. Dari 10 BUMN berekuitas negatif tersebut hanya 2 BUMN yang baru membukukan ekuitas negatif di tahun 2019 yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Asabri (Persero).

      Berikut adalah daftar BUMN dengan ekuitas negatif.

No	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	Status Laporan Keuangan	Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas
1	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	99,95%	*Audited* 2019	(1.227.093)
2	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	100%	*Audited* 2019	(282.365)
3	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	100%	*Audited* 2019	(269.230)
4	PT Asabri (Persero)	100%	*Unaudited* 2019	(6.105.216)
5	PT Asuransi Jiwasraya	100%	*Unaudited* 2019	(33.663.581)
6	PT PANN	93,04%	*Unaudited* 2019	(3..293.164)
7	PT Iglas	64%	*Audited* 2019	(1.117.732)
8	PT Survai Udara Penas	100%	Triwulan III/2019	(125.331)
9	PT Kertas Kraft Aceh	96,65%	*Unaudited* 2019	(1.072.630)
10	PT Merpati Nusantara Airlines	96,99%	Semester I/ 2019	(6.417.716)

Adapun BUMN yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* sebagai berikut.

No	BUMN	Status LK	Nilai (Juta Rp)
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	*Unaudited* 2019	51.861.325
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	*Unaudited* 2019	45.534.444
3	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	*Unaudited* 2019	14.632.886
4	Perum Perhutani	*Unaudited* 2019	11.428.098
5	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	*Unaudited* 2019	11.026.271
6	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	*Unaudited* 2019	6.169.921
7	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	*Unaudited* 2019	3.365.151
8	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	*Unaudited* 2019	1.540.240
9	PT Pertani (Persero)	*Unaudited* 2019	959.332
10	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	*Unaudited* 2019	432.758
11	Perum Perikanan Indonesia	*Unaudited* 2019	423.425
12	PT Indofarma (Persero) Tbk	Triwulan III / 2019	372.491
13	PT Perikanan Nusantara (Persero)	*Unaudited* 2019	370.797
14	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	*Unaudited* 2019	186.258
15	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Triwulan III / 2019	183.015
16	PT Berdikari (Persero)	*Unaudited* 2019	153.049
17	PT Asabri (Persero)	*Unaudited* 2019	-
18	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	*Unaudited* 2019	-
19	PT PANN (Persero)	*Unaudited* 2019	-
20	PT Survai Udara Penas (Persero)	Triwulan III / 2019	-
21	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	*Unaudited* 2019	-
22	PT Kertas Leces (Persero)	Triwulan III / 2018	-
23	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Semester I/2019	-
	Total		**148.639.461**
	Nilai Investasi Permanen pada LKIP *Audited* 2019		**2.904.038.153**

Terdapat 23 BUMN yang belum menyampaikan laporan keuangan *audited* dalam penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 *Audited* dengan total nilai kepemilikan Investasi Pemerintah sebesar Rp148, 64 triliun atau sebesar 5,12 persen jika dibandingkan kepada keseluruhan nilai Investasi Permanen tahun 2019 sebesar Rp2.904,03 triliun.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya- Nomor 21 dan 22.**
Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

b. PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp59.928.935.841.190 dan Rp56.867.245.149.275.

Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMP pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial dan PT Geo Dipa Energi. Pada tahun 2019 terdapat transaksi PMN sebesar Rp800.000.000.000 untuk PT SMF (Persero) yang juga mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Persero selain surplus LO dan transaksi pos lainnya.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp47.207.288.044.436 dan Rp47.038.715.000.000. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2019, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN. Rincian PMP pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 15.**
3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.637.252.581.227 dan Rp21.293.200.765.776. Kenaikan PMP ini disebabkan oleh penambahan investasi pemerintah pada 5 LKI yakni IFAD, IDB, IDA, AIIB, dan ICD . Selain itu, pencatatan juga dipengaruhi oleh konfirmasi yang dimintakan ke masing-masing LKI, untuk periode TA 2019, belum seluruh LKI belum menyampaikan konfirmasi saldo per tanggal 31 Desember 2019. Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 17.**
4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp27.569.579.608.441 dan Rp28.175.536.035.694.

   Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (**Lampiran 16**)	18.938.752.000.000	21.189.412.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	563.659.541	544.249.193
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (**Lampiran 18**)	2.786.422.786.500	2.689.936.311.392
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri (**Lampiran 17**)	1.723.724.000.000	1.795.644.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.615.692.282.400	2.500.000.000.000
Penyertaan Pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) (UAKPA KND DJKN)	1.504.424.880.000	
Jumlah	**27.569.579.608.441**	**28.175.536.560.585**

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp8,91 miliar

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.913.486.508 dan Rp8.743.190.882. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.913.486.508 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.276.292.008 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp506,77 triliun

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp506.775.859.457.526 dan Rp507.109.135.609.757, mengalami penurunan sebesar Rp333.276.152.231 atau 0,07 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. PMP Lain-lain	46.112.764.773.526	45.167.707.654.757
2. Bank Indonesia	340.833.461.000.000	359.822.197.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan (**Lampiran 19**)	119.829.633.684.000	102.119.230.955.000
Jumlah	**506.775.859.457.526**	**507.109.135.609.757**

1. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp46.112.764.773.526 dan Rp45.167.707.654.757.
   Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

PMN Lain-lain	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	1.785.730.338.835	1.603.071.923.643
Universitas Airlangga	2.389.871.206.147	2.277.484.798.858
Institut Teknologi Bandung	2.300.032.853.702	2.064.284.255.718
Universitas Indonesia	3.622.738.562.275	4.226.657.790.566
Universitas Gajah Mada	3.990.498.155.083	3.889.767.136.555
Universitas Pendidikan Indonesia	876.900.781.690	835.687.198.323
Universitas Sumatera Utara	1.823.667.495.644	1.926.351.353.085
Universitas Padjajaran	1.191.246.206.323	1.192.757.043.174
Universitas Diponegoro	2.216.135.638.034	2.110.921.913.156
Universitas Hasanuddin	2.208.121.563.247	2.067.472.666.539
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.082.371.976.722	998.767.982.046
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.303.087.282.749	10.124.002.619.904
BPJS Ketenagakerjaan	12.322.362.713.074	12.230.971.917.800
Jumlah	**46.112.764.773.526**	**45.548.198.599.368**
Eliminasi LKPP	-	**(380.490.944.611)**
Jumlah	**46.112.764.773.526**	**45.167.707.654.757**

   a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN
      Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.
      Rincian aset hibah tersebut disajikan pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 20.**
   b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
      Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp340.833.461.000.000 dan Rp359.822.197.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 119.829.633.684.000 dan Rp102.119.230.955.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

D.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Rp6.614,96 triliun

Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.614.964.945.715.306 dan Rp2.675.327.726.143.973. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.949.595.402.491.414 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614.964.945.715.306 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp665.369.543.223.892.

Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.565.754.448.540.161	1.018.648.023.083.736	348,22
Peralatan dan Mesin	643.684.366.617.610	590.286.694.016.479	9,05
Gedung dan Bangunan	365.443.028.479.378	287.028.466.749.583	27,32
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	852.163.469.354.018	593.241.196.851.828	43,65
Aset Tetap Lainnya	50.631.130.262.102	55.538.219.173.610	(8,84)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.288.502.462.037	130.585.126.268.737	5,13
Jumlah Bruto	**6.614.964.945.715.306**	**2.675.327.726.143.973**	**147,26**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(665.369.543.223.892)	(744.276.685.956.335)	(10,60)
Jumlah Neto	**5.949.595.402.491.414**	**1.931.051.040.187.638**	**208,10**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.939.637.219.571.333 atau 147,26 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Tanah yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.547.106.425.456.425 yang disebabkan revaluasi aset. Tanah mengalami kenaikan tertinggi sebesar 348,22 persen. Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 8,84 persen. Sementara nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 208,10 persen karena selain adanya kenaikan nilai bruto Aset Tetap juga disebabkan adanya penurunan nilai akumulasi penyusutannya

D.2.1.3.1 Tanah

Tanah Rp4.565,75 triliun

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.565.754.448.540.161 dan Rp1.018.648.023.083.736. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3.547.106.425.456.425 atau sebesar 348,22 persen. Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.450.878.813.257.800, Kementerian PUPR sebesar Rp944.793.411.541.173, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp563.825.145.662.880, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp352.606.484.493.014 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp312.551.921.002.102.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp643,68 triliun

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp643.684.366.617.610 dan Rp590.286.694.016.479. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp53.397.672.601.131 atau sebesar 9,05 persen. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp244.484.487.394.530, POLRI sebesar Rp124.343.236.274.961, Kementerian Perhubungan sebesar Rp51.191.308.641.024, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp25.526.249.736.793 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp22.482.127.439.185.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp365,44 triliun

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp365.443.028.479.378 dan Rp287.028.466.749.583. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp78.414.561.729.795 atau sebesar 27,32 persen. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp71.986.135.283.561, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp35.027.351.350.963, Kementerian Agama sebesar Rp32.880.351.409.690, POLRI sebesar Rp30.982.918.808.753 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26.101.194.186.746.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp852,16 triliun

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp852.163.469.354.018 dan Rp593.241.196.851.828. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp258.922.272.502.190 atau sebesar 43,65 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp673.689.964.604.995, Kementerian Perhubungan sebesar Rp134.734.662.130.363, Kementerian Pertahanan sebesar Rp13.278.074.914.779, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp8.332.905.283.962, dan Kementerian ESDM sebesar Rp5.600.863.024.279.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp50,63 triliun

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp50.631.130.262.102 dan Rp55.538.219.173.610. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.907.088.911.508 atau 8,84 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp31.663.073.245.824, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.266.450.324.374, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.176.088.889.584, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.795.441.665.354, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.644.008.610.213.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap KDP Rp137,28 triliun

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp137.288.502.462.037 dan Rp130.585.126.268.737. Terjadi peningkatan nilai KDP lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp6.703.376.193.300 atau sebesar 5,13 persen. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp70.152.213.383.529, Kementerian Perhubungan sebesar Rp42.749.102.979.012, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp6.668.088.167.077, Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.814.616.095.988, dan POLRI sebesar Rp3.307.508.125.235.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 20.**

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp665,36 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp665.369.543.223.892 dan Rp744.276.685.956.335. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	387.859.172.729.229	330.022.790.879.612
Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.519.733.114.032	61.566.244.373.632
Akum Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	234.115.041.589.829	345.009.781.777.629
Akum Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.875.595.790.802	7.677.868.925.462
Jumlah	**665.369.543.223.892**	**744.276.685.956.335**

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp60,56 triliun

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp60.567.534.435.197 dan Rp60.603.046.072.955, dimana mengalami penurunan sebesar Rp35.511.637.758 atau 0,06 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp56.888.975.528.228 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.567.534.435.197 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.678.558.906.969. Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Tagihan Penjualan Angsuran	85.835.295.500	95.661.712.269
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	179.183.980.687	163.209.394.539
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	57.465.257.010.430	57.777.575.276.481
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.837.258.148.580	2.566.599.689.666
Jumlah Bruto	**60.567.534.435.197**	**60.603.046.072.955**
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.678.558.906.969)	(3.414.291.568.549)
Jumlah Neto	**56.888.975.528.228**	**57.188.754.504.406**

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp85,83 miliar

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp85.835.295.500 dan Rp95.661.712.269, mengalami penurunan sebesar Rp9.826.416.769 atau 10,27 persen. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp85.406.119.022 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp85.835.295.500 dikurangi penyisihan sebesar Rp429.176.478, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR.

D.2.1.4.2 Piutang Tagihan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan TGR Rp179,18 miliar

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp179.183.980.687 dan Rp163.209.394.539, mengalami kenaikan sebesar Rp15.974.586.148 atau 9,79 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp65.717.339.560 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp179.183.980.687 dikurangi penyisihan sebesar Rp113.466.641.127. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Rp57,46 triliun

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp57.465.257.010.430 dan Rp57.777.575.276.481, mengalami penurunan sebesar Rp312.318.266.051 atau 0,54 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp56.833.750.112.515 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp631.506.897.915. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp56.549.581.361.953 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp57.465.257.010.430 dikurangi penyisihan sebesar Rp915.675.648.477.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2,83 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.837.258.148.580 dan Rp2.566.599.689.666, mengalami kenaikan sebesar Rp270.658.458.914 atau 10,54 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp188.270.707.693 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.837.258.148.580 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.648.987.440.887. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Dewan Perwakilan Rakyat	10.700.000	63.000.000
2. Kementerian Hukum dan HAM	7.683.800.000	9.449.000.000
3. Kementerian Keuangan	1.110.987.674	-
4. Kementerian Perindustrian	398.062.253	-
5. Kementerian ESDM	-	37.463.820.845
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
7. Kementerian Kesehatan	356.191.881	276.560.972
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.442.095.000	29.951.195.000
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan	109.286.679.242	111.069.351.155
10. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	304.132.717.193
12. BKKBN	8.238.183.016	8.238.183.016
13. BATAN	22.080.688	11.542.061
14. BNP2TKI	2.556.646.500	2.562.141.500
15. BUN	2.020.217.900.758	2.047.499.709.524
Jumlah Bruto	**2.837.258.148.580**	**2.566.599.689.666**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.648.987.440.887)	(2.382.192.891.007)
Jumlah Neto	**188.270.707.693**	**184.406.798.659**

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp10.700.000 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp7.683.800.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.110.987.674 merupakan hasil temuan BPK pada satker Pusdiklat PSDM untuk kegiatan Latsar tahun anggaran 2018.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp398.062.253 merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp356.191.881 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp276.560.972 dan Ditjen P2P sebesar Rp79.630.909.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp23.442.095.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.

8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp109.286.679.242 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp648.052.353.168 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT. Bakrie Telecom.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.238.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar Rp22.080.688 merupakan piutang penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp2.556.646.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa Pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.020.217.900.758 terdiri dari :
    a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp54.725.637.648 merupakan bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.
    b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp1.965.492.263.110 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/*penalty* PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.527.279.698. Saldo piutang jangka panjang tahun 2019 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp3,67 triliun

D.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.678.558.906.969 dan Rp3.414.291.568.548.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Tagihan Penjualan Angsuran	429.176.478	478.308.562
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	113.466.641.127	105.463.890.057
3. Piutang Pemberian Pinjaman	915.675.648.477	926.156.478.922
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.648.987.440.887	2.382.192.891.007
Jumlah	**3.678.558.906.969**	**3.414.291.568.548**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp429.176.478 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp113.466.641.127. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada **Lampiran 21.**

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp915.675.648.477 merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp284.168.750.562 dan Piutang Kredit Program sebesar Rp631.506.897.915.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.648.987.440.887 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Dewan Perwakilan Rakyat	53.500	315.000
Kementerian Hukum dan HAM	38.419.000	47.245.000
Kementerian Keuangan	5.554.938	-
Kementerian Perindustrian	1.990.311	-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
Kementerian ESDM	-	187.319.104
Kementerian Kesehatan	356.191.881	93.132.805
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.344.209.500	2.994.255.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan	546.433.395	555.346.755
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	304.132.717.193
BKKBN	8.238.183.016	8.238.183.016
BATAN	110.403	57.710
BNP2TKI	2.556.646.500	2.562.141.500
BUN	1.970.964.826.875	2.047.499.709.524
Jumlah	**2.648.987.440.887**	**2.382.192.891.007**

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp1.264,17 triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.264.178.048.235.928 dan Rp1.305.834.522.883.581, mengalami penurunan sebesar Rp41.656.474.647.660 atau sebesar 3,19 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp967.981.447.325.579 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.264.178.048.235.928 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp281.071.678.085.183 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Rp15.124.922.825.166.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Aset Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	290.379.621.425.039	142.696.848.159.921	103,49
2. Aset Tak Berwujud	39.697.831.857.235	35.776.524.869.463	10,96
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	192.908.799.354.854	212.155.787.167.225	(9,07)
4. Dana Penjaminan	4.449.053.184.785	4.449.043.145.097	0,00
5. Dana Kelolaan BLU	53.731.897.004.834	57.173.480.419.942	(6,02)
6. Aset Lain-lain	671.202.165.882.987	843.100.479.849.556	(20,39)
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	11.808.679.526.194	10.482.359.272.377	12,65
Jumlah Bruto	**1.264.178.048.235.928**	**1.305.834.522.883.581**	**(3,19)**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(281.071.678.085.183)	(271.738.387.743.944)	3,43
Amortisasi Aset Lainnya	(15.124.922.825.166)	(12.211.622.116.245)	23,86
Jumlah Neto	**967.981.447.325.579**	**1.021.884.513.023.392**	**(5,27)**

Penurunan Aset Lainnya terutama berasal dari Aset Lain-lain sebesar Rp171.898.313.966.569, antara lain berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada beberapa Kementerian/Lembaga dan terdapat Aset Tanah pada KKKS yang perlu penelusuran lebih lanjut, sehingga dikeluarkan dari saldo awal tahun 2019. Sementara nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 5,27 persen, terutama karena dipengaruhi dari kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp290,37 triliun

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp290.379.621.425.039 dan Rp142.696.848.159.921, mengalami kenaikan sebesar Rp147.682.773.265.118 atau 103,49 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp289.585.791.999.464 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp290.379.621.425.039 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Kementerian Luar Negeri	191.485.201.428	54.013.969.907
2. Kementerian Pertahanan	11.781.300.377.000	-
3. Kementerian Perhubungan	4.074.137.057.481	360.209.541.000
4. Kementerian Kesehatan	2.121.420.000	305.364.000
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	130.883.109.000	72.431.682.000
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	272.523.350.587.662	141.561.963.335.546
8. Kementerian Pariwisata	804.837.530.000	182.980.000.000
9. Kementerian PPN/BAPPENAS	490.209.375.000	83.647.500.000
10. Badan PKPB2 Batam	167.065.369.296	167.065.369.296
Jumlah	**290.379.621.425.039**	**142.696.848.159.921**

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2019 sebesar Rp191.485.201.428. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan hasil koreksi dari BPK berupa reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika. Kenaikan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disebabkan penyajian hasil penilaian kembali atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang sebelumnya di-*take out* pada Satker Konsolidasi.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.781.300.377.000. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada TNI AL senilai Rp8.838.604.683.000. berupa Tanah yang disewakan pada Lantamal I Belawan, Lantamal III Jakarta, dan Lantamal V Surabaya.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.074.137.057.481. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp3.675.650.839.481, berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Skema Kerjasama Pemanfaatan.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.121.420.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.883.109.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m2 pada satuan kerja Biro Umum. Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang

di-KSP-kan seluas 1.950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m2. Sisa tanah seluas 4.180 m2 dioperasionalkan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum.

6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp214.231.398.172. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah, Batam milik Ditjen PRL yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN.
7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2019 sebesar Rp272.523.350.587.662. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp465.687.736.000 dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp272.057.662.851.662.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar Rp804.837.530.000. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata mengalami kenaikan dari saldo per 31 Desember 2018 karena adanya revaluasi aset. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m2 yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan *(Build, Operate, and Transfer)* Tanah dan Gedung Sapta Pesona B, antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan PT Sisindosat Lintas Buana Nomor : 05/SL/PKS/1995 tanggal 21 Juni 1995, dan telah di addendum pertama pada tanggal 25 Maret 2004 Nomor: KS.001/1/10/ Sesmen/KKP/04 dan Nomor : 02/GLP/P.D/2004 serta addendum kedua tanggal 3 Maret 2008 Nomor : 52/Khusus/SEKJEN/DKP/III/08 dan Nomor : 001/GLP/D/08. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Sisindosat Lintas Buana selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 26 September 2010 sampai 25 September 2040.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375.000 dan Rp83.647.500.000. Kenaikan nilai tersebut berasal dari hasil revaluasi Tahun 2017/2018 atas aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2, dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp167.065.369.296. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jaringan, Irigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp40.121.852.086 dan pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Rp39,69 triliun

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp39.697.831.857.235 dan Rp35.776.524.869.463, mengalami kenaikan sebesar Rp3.921.306.987.772 atau 10,96 persen. Aset Tidak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa *goodwill*, hak cipta, paten, *software,* lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tidak berwujud lainnya. Nilai neto Aset Tidak Berwujud sebesar Rp24.984.156.823.825 berasal dari nilai bruto Aset Tak

Berwujud sebesar Rp39.697.831.857.235 dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.713.675.033.410.

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Hak Cipta	134.952.663.763	154.206.399.087
2. Paten	216.994.339.458	200.935.790.651
3. Software	19.235.389.864.532	15.902.423.231.301
4. Lisensi	4.149.811.660.278	3.891.264.529.385
5. Hasil Kajian/Penelitian	7.068.040.271.117	6.833.324.409.079
6. Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.439.486.065.126	8.516.061.249.377
7. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	453.156.992.961	278.309.260.583
Jumlah Bruto	**39.697.831.857.235**	**35.776.524.869.463**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(14.713.675.033.410)	(12.211.622.116.245)
Jumlah Neto	**24.984.156.823.825**	**23.564.902.753.218**

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Aset Tak Berwujud pada K/L	39.526.864.994.040	35.627.617.637.982
2. Aset Tak Berwujud pada BUN	170.966.863.195	148.907.231.481
Jumlah Bruto	**39.697.831.857.235**	**35.776.524.869.463**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya:		
K/L	(14.629.669.137.469)	(12.141.426.494.645)
BUN	(84.005.895.941)	(70.195.621.600)
Jumlah Neto	**24.984.156.823.825**	**23.564.902.753.218**

1. Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.526.864.994.040 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.203.074.520.673 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.251.142.274.474;
   b. Kepolisian RI sebesar Rp4.452.804.047.706 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp3.543.457.734.726;
   c. Badan Intelijen Negara sebesar Rp3.892.988.604.622 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.489.861.479.862.
2. Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.966.863.195 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
   a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
   b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
   c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp86.137.870.333 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Lampiran 22.**

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp192,90 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp192.908.799.354.854 dan Rp212.155.787.167.225, mengalami penurunan sebesar Rp19.246.987.812.371 atau 9,07 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana

tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Cadangan Dana Reboisasi	58.050.726.158	57.747.109.112
2. Cadangan Dana Subsidi/PSO	106.536.000.000	379.937.975.000
3. Dana Lainnya	186.444.554.339.424	207.402.492.132.157
4. Dana Perhitungan Fihak Ketiga	5.696.420.985.882	3.714.379.337.474
5. Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	603.237.303.390	601.230.613.482
Jumlah	**192.908.799.354.854**	**212.155.787.167.225**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	9.241.146.075.657	7.613.043.103.590
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	184.868.272.082.194	205.947.589.966.648
Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(1.200.618.602.997)	(1.404.845.903.013)
Jumlah	**192.908.799.354.854**	**212.155.787.167.225**

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.241.146.075.657 dan Rp7.613.043.103.590. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
   a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.347.222.941.546 dan Rp4.019.707.414.506. Dana tersebut paling signifkan berada pada TNI AU dengan nilai sebesar Rp3.407.554.610.570 berupa kontrak devisa, sisa pembayaran Kontrak AW-101, L/C kontrak devisa, dana *escrow,* dana *holding account* DFAS, sisa dana rekening penampungan perwira FMS, dan koreksi lebih catat karena kurs.
   b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.056.684.175.000 dan Rp1.952.635.775.000. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur (BNI dan BRI) dalam bentuk rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang belum diaktivasi oleh siswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2020 sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut tercatat pada Ditjen Dikdasmen dengan nilai paling signifkan berada pada Direktorat Pembinaan SD sebesar Rp919.060.425.000.
   c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp975.650.828.134 dan Rp622.038.911.501. Dana tersebut berupa Dana Lainnya dan Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri. Dana Lainnya sebesar Rp372.413.524.744 berupa Dana yang dibatasi penggunaannya untuk pengadaan gedung kantor (KBRI Phnom Penh dan KJRI Kuching), pembayaran renovasi Gedung kantor (KJRI Johor Bahru dan KRI Tawau), dan pembayaran renovasi Wisma Duta Besar (KBRI Warsawa). Sementara Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri dalam bentuk mata uang asing sebesar USD43,379,807.46 atau Rp603.237.303.390.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp184.868.272.082.194 dan Rp205.947.589.966.648. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
   a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.605.304.625.020 dan Rp54.152.706.611.021.

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya BA 999.00	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	302.239.103.987	129.468.876.553
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	779.706.666.210	1.216.643.079.980
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	72.325.400.000	13.255.000.000
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	13.498.000.000	45.478.946.480
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	-	167.860.809.595
6) Rekening Pembangunan Hutan (0001401400298850)	-	1.770.000.000.000
7) Rekening Pembangunan Hutan (1030205505635)	-	925.626.036.865
8) Rekening Pembangunan Hutan (2018151117)	-	925.626.036.865
9) Rekening Pembangunan Hutan (032901036282402)	-	757.765.227.270
10) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
11) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	-	43.314.553.530.000
12) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	5.695.887.440.489	3.714.379.337.474
13) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
14) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	89.942.361.389	89.942.361.389
15) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	4.245.466.000.000	4.245.466.000.000
16) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000	203.000.000.000
17) Rekening Cadangan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (519000149980))	2.000.000.000.000	-
18) Rekening Dana Abadi Penelitian (519000150980)	990.000.000.000	-
19) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD (609027411980)	32.720.173.800	-
20) Rekening Pembangunan Hutan (032901040474407)	167.860.809.595	-
21) Rekening Pembangunan Hutan (032901040472405)	4.379.017.301.000	-
22) Penyesuaian Dana Penjaminan	(4.448.466.000.000)	(4.448.466.000.000)
Jumlah	**15.605.304.625.020**	**54.152.706.611.021**

Terdapat selisih saldo Rekening Khusus Dana PFK (510000281980) dengan nilai Utang PFK sebesar Rp12.349.491.335. Hal ini disebabkan masih terdapat saldo yang belum dipindahkan dari RKUN ke Rekening Khusus Dana PFK dimana nilai sebesar Rp12.349.491.335 ini juga menjadi pengurang fisik SAL.

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp58.050.726.158 dan Rp57.747.109.112. Dana tersebut merupakan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* (DNS) pada rekening satker UAIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp106.536.000.000 dan Rp379.937.975.000. Dana tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp106.536.000.000, berada pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D nya per tanggal pelaporan, tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2019. Atas saldo per 31 Desember 2019 telah didistribusikan kepada pengembang pada 2 Januari sampai dengan 30 April 2020. Pada saldo rekening bank pelaksana per 30 April 2020 menunjukkan masih terdapat dana SBUM yang belum disalurkan pada Bank Mandiri sebesar Rp228.000.000, Bank Sumsel Babel sebesar Rp8.000.000, dan Bank KEB Hana sebesar Rp4.000.000. Atas dana sebesar Rp8.000.000 yang masih ada di rekening Bank Sumsel Babel akan dikembalikan ke Kas Negara karena 2 debitur mengembalikan dana SBUM/mengundurkan diri, untuk dana SBUM sebesar Rp4.000.000 yang ada di rekening Bank KEB Hana juga akan dikembalikan ke Kas Negara karena 1 debitur mengembalikan dana SBUM, sedangkan untuk dana sebesar Rp228.000.000 di rekening Bank Mandiri masih dalam proses pemindahbukuan ke 57 debitur.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang terdapat pada Ditjen Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut.

No.	Bank	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
1	Bank BJB Syariah No.Rek.0070102000821	Rp	-	Rp	1.936.000.000
2	Bank BPD Jateng No.Rek 1034025173	Rp	4.000.000	Rp	-
3	Bank BJB No. Rek. 0073947634001	Rp	1.908.000.000	Rp	2.212.000.000
4	Bank BPD Sulselbar Syariah No.Rek. 5100520000000060	Rp	-	Rp	616.000.000
5	Bank BTN No.Rek.1501300010194	Rp	77.040.000.000	Rp	335.382.000.000
6	Bank BRI No.Rek.121101000137308	Rp	868.000.000	Rp	-
7	Bank BTN Syariah No.Rek.7121002393	Rp	4.844.000.000	Rp	9.108.000.000
8	Bank BNI No.Rek.480635545	Rp	18.440.000.000	Rp	9.992.000.000
9	Bank BPD Sumbar No.Rek.21000101014484	Rp	-	Rp	536.000.000
10	Bank BPD NTT No.Rek.01601010000134	Rp	-	Rp	4.000.000
11	Bank BRI Syariah No.Rek.1032330505	Rp	1.836.000.000	Rp	3.492.000.000
12	Bank Artha Graha No. Rek.1000030689	Rp	-	Rp	6.548.000.000
13	Bank BPD Jatim No.Rek.0011269842	Rp	76.000.000	Rp	892.000.000
14	Bank BPD Sumsel Babel No.Rek.1703020013	Rp	8.000.000	Rp	720.000.000
15	Bank BPD Sumut No.Rek.01060000081	Rp	16.000.000	Rp	536.000.000
16	Bank BPD Sulselbar No.Rek.1300020000316950	Rp	-	Rp	1.376.000.000
17	Bank BPD Sulawesi Tenggara No.Rek.00101055002426	Rp	16.000.000	Rp	388.000.000
18	Bank Mandiri No.Rek.1260007322810	Rp	1.196.000.000	Rp	2.020.000.000
19	Bank Sumut Syariah No.Rek.61001060000130	Rp	-	Rp	1.116.000.000
20	Bank Jambi Rek. 3000974845	Rp	-	Rp	820.000.000
21	BPD Kalteng Rek. 1000020000038412	Rp	112.000.000	Rp	48.000.000
22	BPD Sumsel Babel Syariah Rek. 8013200004	Rp	56.000.000	Rp	192.000.000
23	BPD Kaltim Rek. 11100279	Rp	-	Rp	48.000.000
24	Bank Sulawesi Tengah Rek. 10103666778	Rp	-	Rp	36.000.000
25	BPD Kalbar Rek. 1000001844	Rp	-	Rp	1.292.000.000
26	Bank Jateng Syariah Rek. 5031002339	Rp	-	Rp	48.000.000
27	Bank Aceh Syariah Rek. 61001010000055	Rp	96.000.000	Rp	116.000.000
28	Bank Jambi Syariah Rek. 7001176476	Rp	-	Rp	72.000.000
29	Bank Jatim Syariah Rek. 6101005441	Rp	-	Rp	64.000.000
30	Bank Kalsel Syariah Rek. 901000400058	Rp	-	Rp	199.975.000
31	Bank Hana Rek. 110121800105211	Rp	4.000.000	Rp	112.000.000
32	Bank Kaltim Syariah Rek. 5100155110	Rp	-	Rp	16.000.000
33	Bank BPD Papua Rek. 1500105000074	Rp	4.000.000	Rp	-
34	Bank Nagari Syariah No. Rek 710000106000110	Rp	12.000.000	Rp	-
Total		**Rp**	**106.536.000.000**	**Rp**	**379.937.975.000**

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp169.098.380.731.016 dan Rp151.357.198.271.515. Dana tersebut terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan rincian sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	151.428.469.320.652	126.167.048.361.579
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	17.669.911.410.364	25.190.149.909.936
Jumlah	**169.098.380.731.016**	**151.357.198.271.515**

Nilai AIP di atas berdasarkan:

1) Nilai pada Laporan Atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Bulan Desember 2019 pada PT Taspen (Persero) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 *(Audited).*
2) Nilai AIP pada Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 *(Unaudited).*
   Berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 *(Unaudited)*, Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) Tahun 2019 disajikan sebesar Rp17.669 miliar. Nilai AIP tersebut mengalami penurunan dibandingkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *(Audited)* yang menyajikan nilai AIP sebesar Rp25.258 miliar. Nilai AIP LKBUN Tahun 2018 (*Audited)* sebesar Rp25.190 milyar masih berdasarkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *(Unaudited)* karena LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *(Audited)* baru diterbitkan pada 14 Februari 2020. Atas penyelesaian LK Tahun 2019 *(Audited),* Pemerintah telah menyatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus 2020. Penjelasan lebih lanjut untuk Dana yang Dibatasi Penggunaannya terkait AIP dilihat pada **Catatan Penting Lainnya No 32.**

Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp1.200.618.602.997 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp4,44 triliun

Dana Penjaminan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.449.053.184.785 dan Rp4.449.043.145.097, mengalami kenaikan sebesar Rp10.039.688 atau 0,0002 persen. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu.

Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Dana Penjaminan pada K/L	587.184.785	577.145.097
2. Dana Penjaminan pada BUN	4.448.466.000.000	4.448.466.000.000
Jumlah	**4.449.053.184.785**	**4.449.043.145.097**

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp587.184.785 dan Rp577.145.097 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.

2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.448.466.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

   Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	4.245.466.000.000	4.054.924.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	203.000.000.000	393.542.000.000
Jumlah	**4.448.466.000.000**	**4.448.466.000.000**

   a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp4.245.466.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
      1) pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
      2) pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
      3) pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
      4) pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
      5) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera;
      6) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
      7) pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
      8) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

   b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp203.000.000.000 yang merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN (999986) ke Satker Direktorat EAS (970974).

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU Rp53,73 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp53.731.897.004.834 dan Rp57.173.480.419.942, mengalami penurunan sebesar Rp3.441.583.415.108 atau 6,02 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	-	1.332.452.419.073
2. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	651.036.122.495	391.923.107.169
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	708.411.236.092	1.256.318.525.284
4. BLU LPDB KUMKM	1.756.677.326.054	2.773.100.141.070
5. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	45.742.466.421.161	47.635.938.979.318
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.847.258.826.357	2.647.501.603.239
7. BLU LPMUKP	1.026.047.072.675	1.136.245.644.789
Jumlah	**53.731.897.004.834**	**57.173.480.419.942**

1. Dana Kelolaan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp1.332.452.419.073.
2. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp651.036.122.495 dan Rp391.923.107.169.
   Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 30**.
3. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp708.411.236.092 dan Rp1.256.318.525.284.
   Dana Kelolaan BLU P3H per 31 Desember 2019 terdiri dari:

Nomor rekening	Nama Rekening	Jumlah
019301000830301	RPL 182 BLU Pusat P2H Dana Kelolaan	3.275.622.748
019301003317302	RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029)	1.947.623.289
0800566725	RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK	8.522.718.466
019301012745403	RPL 182 BLU PUSAT P2H UNTUK PKD BRI 01	495.000.000.000
019301012929405	RPL 182 PUSAT P2H UNTUK PKD BRI 01	100.000.000.000
SY094805	RPL 182 BLU PPPH UNTUK PKD	100.000.000.000
Bunga Jasa Giro dari Rekening 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK di Bank BNI dari bulan September s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(49.715.826)
Bunga Jasa Giro dari Rekening 019301003317302 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029) di Bank BRI dari bulan Juli s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(246.258.569)
Bunga Jasa Giro dari Rekening 019301000830301 RPL 182 BLU Pusat P2H Dana Kelolaan di Bank BRI dari bulan November s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(26.348.220)
Terdapat kekurangan pemindahbukuan bunga jasa giro rekening 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK di Bank BNI ke rekening bendahara penerimaan		(10.000)
Bunga Tutup rekening an. Debitur pada bank BNI yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(23.635.219)
Kelebihan pelunasan yang belum di transfer kembali ke yang bersangkutan sampai dengan akhir periode pelaporan;		(1.315.500)
Terdapat pengembalian pajak yang seharusnya masuk ke rekening 019301003317302 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029) tapi masih terdapat di rekening bendahara penerimaan 019301001699300 RPL 182 BLU Pusat P2H Untuk OPS		6.929.925
Terdapat kelebihan pengakuan pengembalian pokok yang seharusnya diperhitungkan dalam perhitungan nilai outstanding dana bergulir;		5.500.000
Potongan administrasi transaksi RTGS dalam aplikasi CMS BRI sebesar Rp85.000,-, potongan administrasi transaksi pada BNI direct sebesar Rp2.000,-, potongan administrasi pemindahbukuan bunga dari rekening BNI 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK bulan Juni, Juli sebesar Rp10.000,-, kelebihan pemindahbukuan bunga ke rekening bendahara penerimaan sebesar Rp10.000,-.		125.000
Pembulatan		(2)
Jumlah		**708.411.236.092**

4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.756.677.326.054 dan Rp2.773.100.141.070. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
   a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp836.951.790.000;
   b. Disetujui komite sebesar Rp327.969.187.500;
   c. Sisa sebesar Rp591.375.383.958 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2020;
   d. Koreksi audit dari BPK sebesar Rp380.964.596.
5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp45.742.466.421.161 dan Rp47.635.938.979.318. Dana Kelolaan BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

Dana Investasi	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	44.352.257.170.072	46.229.359.535.205
b. Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.390.209.251.089	1.406.579.444.113
Jumlah	**45.742.466.421.161**	**47.635.938.979.318**

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2018	**47.635.938.979.318**
a. Penggunaan dana kelolaan untuk *upgrade* aset kelolaan eks PPA	(13.375.623.837)
b. Penggunaan dana kelolaan untuk *upgrade* aset kelolaan eks HTBI	(2.149.305.185)
c. Penggunaan dana kelolaan untuk *upgrade* aset kelolaan eks Pertamina	(1.083.390.640)
d. Penggunaan dana kelolaan untuk pembayaran tanah PSN (pembayaran langsung kepada pihak yang berhak)	(2.622.078.588.471)
e. Penggunaan dana kelolaan untuk pembayaran tanah PSN (penggantian dana badan usaha)	(11.255.023.776.662)
f. Pencairan alokasi APBN TA 2019 untuk pendanaan tanah PSN	12.000.000.000.000
g. Pengembalian atas kelebihan bayar atas *upgrading* aset kelolaan apartemen Puri Casablanca Tahap I	238.126.638
Saldo per 31 Desember 2018	**45.742.466.421.161**

   a. Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan tanahnya merupakan bagian dari belanja modal Kementerian/Lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber pendanaan belanja modal tersebut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan.

   b. Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

6. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.847.258.826.357 dan Rp2.647.501.603.239. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.199.757.223.118 atau sebesar 45,32 persen.

Rekening	Nomor Rekening	Nominal
BNI (Deposito)	0790913598	650.000.000.000
BRI (Giro)	0329 01 003827 30 6	141.186.064.730
BNI (Giro)	2018220615	3.055.860.000.000
BRI (Giro)	0329 01 002911 30 6	212.761.650
Jumlah		**3.847.258.826.380**

Terdapat selisih pada rekening Giro BRI no 0329-01-002911-30-6 sebesar Rp23 dikarenakan kumulatif kelebihan penyetoran dan penyaluran dari tahun 2017 s.d 31 Desember 2019.

7. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.026.047.072.675 dan Rp1.136.245.644.789. Jumlah Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.026.047.072.675 setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp409.388.640.000 dikurangi dengan Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp83.435.712.675.

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp671,20 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp671.202.165.882.987 dan Rp843.100.479.849.556, mengalami penurunan sebesar Rp171.898.313.966.569 atau 20,39 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp390.519.899.083.370 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp671.202.165.882.987 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp280.686.235.015.735.
Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Aset Lain-lain pada K/L	83.922.411.398.055	264.349.885.641.992
2. Aset Lain-lain pada BUN	587.279.754.484.932	578.750.594.207.564
Jumlah Bruto	**671.202.165.882.987**	**843.100.479.849.556**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
K/L	(34.775.745.226.986)	(49.958.850.254.012)
BUN	(245.910.489.788.749)	(220.985.708.064.357)
Jumlah Neto	**390.515.930.867.252**	**572.155.921.531.187**

1. Aset Lain-lain pada K/L

   Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp83.922.411.398.055 dan Rp264.349.885.641.992. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.581.850.220.595 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp83.922.411.398.055 dikurangi Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lain-lain pada K/L Rp34.775.745.226.986. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp83.922.411.398.055 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp42.290.876.831.978 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp18.359.562.251.410.
   b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.098.325.036.995 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp13.077.498.739.511.
   c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.632.504.630.582 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Mabes TNI AD sebesar Rp4.258.666.865.080.

   Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 24**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp587.279.754.484.932 dan Rp578.750.594.207.564. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp341.369.264.696.183 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp587.279.754.484.932 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp245.910.489.788.749.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari.

No.	Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.03)	29.273.033.202.796	29.186.005.790.698
2.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.99)	558.006.721.282.136	549.564.588.416.866
	Jumlah	**587.279.754.484.932**	**578.750.594.207.564**

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp29.273.033.202.796 dan Rp29.186.005.790.698.

Rincian Aset Lain-Lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	191.885.476.870	113.776.576.669
b) Aset Eks Pertamina	28.511.710.609.563	28.510.627.218.923
c) Aset Lain-lain BUN	556.202.513.382	548.367.392.125
Jumlah	**29.273.033.202.796**	**29.186.005.790.698**

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi sasaran program ini yang pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam pemberdayaannya.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2019 sebesar Rp191.885.476.870. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan,

aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2018, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Mutasi nilai Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal per tanggal 31 Desember 2018 berupa 106 unit apartemen di Puri Casablanca sebesar Rp113.776.576.669;
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran *upgrade* Puri Casablanca sesuai rekomendasi BPK RI pada audit tahun 2018 sebesar minus Rp124.563.468;
- Pekerjaan *upgrade* atas 20 unit apartemen di Puri Casablanca sebesar Rp13.749.250.656;
- Penerimaan penyerahkelolaan 87 aset eks PPA sebesar Rp64.722.339.651; dan
- Kelebihan pembayaran *upgrading* Apartemen Puri Casablanca Tahap I sebesar minus Rp238.126.638.

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.511.710.609.563. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 2019 merupakan pekerjaan *upgrade* (fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun. Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

ASET	31 Desember 2018	MUTASI	31 Desember 2019
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	16.301.881.511.633	983.611.840	16.302.865.123.473
Kilang LNG Badak	10.821.108.475.290	-	10.821.108.475.290
Sub Total Aset Kilang	27.122.989.986.923	983.611.840	27.123.973.598.763
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000	-	1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	5.469.536.000	99.778.800	5.569.314.800
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000	-	35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000	-	36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	-	77.191.137.000
Sub Total Aset Properti	1.387.637.232.000	99.778.800	1.387.737.010.800
TOTAL	28.510.627.218.923	1.083.390.640	28.511.710.609.563

c) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2019 sebesar Rp556.202.513.382. Aset Lain lain BUN tersebut terdiri dari Tanah dari hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	31 Desember 2019 *(Audited)*
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	0
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	556.202.513.382
Jumlah	**556.202.513.382**

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2019. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Tanah PSN	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2019	**0**
Pengakuan aset tanah PSN dari hasil verifikasi BPKP atas dana badan usaha terlebih dahulu periode 2019	9.128.422.145.405
Pembayaran langsung tanah PSN periode 2019	2.622.078.588.471
Koreksi audit atas nilai yang *ineligible*	(3.407.495.700)
Koreksi audit atas pengakuan aset tanah PSN pada Proyek Bendungan Kuwil dan Proyek Pejagan Pemalang	5.013.298.701
Koreksi audit atas aset tanah PSN untuk diakui pada instansi yang memerlukan tanah	(11.752.106.536.877)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**0**

Pada tahun 2019 telah dilakukan penyerahan nilai pencatatan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima (BAST) dari BLU LMAN kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp11.752.106.536.877, yaitu kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.024.570.395.644 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.727.536.141.233.

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2019 sebesar Rp556.202.513.382. Rincian mutasi Aset Eks HTBI selama periode tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Aset Eks HTBI	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2019	**548.367.392.127**
Koreksi kelebihan pengakuan nilai aset pada tahun 2018	(5.729.400)
Kapitalisasi *upgrade* aset eks HTBI pada tahun 2019	2.232.910.012
Penerimaan hasil renovasi aset kelolaan di Cikini	5.607.940.642
Saldo Akhir 31 Desember 2019*	**556.202.513.381**

**) selisih Rp1 karena pembulatan*

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 558.006.721.282.136 dan Rp549.564.588.416.866.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1) Aset KKKS	497.614.873.512.269	491.602.418.832.866
2) Aset Eks BPPN	7.931.288.550.708	7.644.734.809.907
3) Aset Eks Pertamina	13.487.935.402.320	12.570.408.826.220
4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	78.520.698.400	40.518.095.500
5) Aset BMN *Idle*	74.778.884.370	79.383.729.148
6) Aset PKP2B	38.704.267.850.386	37.612.241.040.994
7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	115.056.383.683	14.883.082.231
Jumlah	**558.006.721.282.136**	**549.564.588.416.866**

1) Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp497.614.873.512.269 dan Rp491.602.418.832.866. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2019 sebesar Rp299.469.007.521.909 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp497.614.873.512.269 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp198.145.865.990.360 dengan rincian sebagai berikut.

Aset KKKS	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a) Aset Tanah	**10.069.984.072.287**	**22.365.774.965.994**
b) Aset Non-Tanah	**487.544.889.439.982**	**469.236.643.866.872**
1. HBM	462.116.330.419.664	443.187.162.878.817
2. HBI	109.937.191.954	97.017.511.748
3. Material Persediaan	25.318.621.828.364	25.952.463.476.307
Jumlah Bruto	**497.614.873.512.269**	**491.602.418.832.866**
Akumulasi Penyusutan	(198.145.865.990.360)	(177.629.405.691.706)
Jumlah Neto	**299.469.007.521.909**	**313.973.013.141.160**

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.069.984.072.287 dan Rp22.365.774.965.994.

Mutasi Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp10.073.952.288.407 dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2019 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**22.365.774.965.994**
Mutasi Tambah	**345.818.517.406**
Penambahan Aset PIS	36.106.169.817
Koreksi Tambah Pembenahan Pencatatan	309.712.347.590
Mutasi Kurang	**(12.641.609.411.114)**
Pengurangan Nilai (Alih Status)	(47.175.200.000)
Koreksi Kurang Biaya Tanam Tumbuh dan Tanah Sewa	(6.244.618.735)
Pembenahan Pencatatan	(12.588.189.592.379)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**10.069.984.072.287**

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2018 *(Audited).* Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp22.365.774.965.994.
2. Mutasi tambah sebesar Rp345.818.517.406 berasal dari:
   - Penambahan aset PIS Semester I dan Semester II sebesar Rp36.106.169.817 yang terdiri dari:
     - Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh Eks KKKS JOB Pertamina Talisman Jambi Merang kepada SKK Migas sebesar Rp183.405.518.

- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT Rizki Bukit Barisan E&P kepada SKK Migas sebesar Rp4.248.700.000.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS Talisman Sakakemang kepada SKK Migas sebesar Rp455.040.000.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT Tropik Energi Pandan kepada SKK Migas sebesar Rp1.042.604.998.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS VICO CBM kepada SKK Migas sebesar Rp27.775.606.691.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS Pertamina Hulu Mahakam kepada SKK Migas sebesar Rp67.118.610.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT Rizki Bukit Barisan E&P kepada SKK Migas sebesar Rp2.333.694.000.

- Koreksi Tambah Pembenahan Pencatatan sebesar Rp309.712.347.589, terdiri dari:
  - Pembaruan nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil dari Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah pada KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. sebesar Rp12.015.828.863,68.
  - Pembaruan nilai wajar hasil dari Penilaian ulang BMN Tanah pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam, sebesar Rp261.153.106.225.
  - Penambahan nilai sebesar Rp36.543.412.500, karena koreksi kurang catat dalam rekapan Tanah aset KKKS Medco E&P Malaka akibat *human error*.

3. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp12.641.609.411.114 berasal dari:
   - Koreksi karena bukan merupakan pelepasan hak atas tanah melainkan hanya kompensasi tanam tumbuh yang dilaporkan oleh KKKS Petrogas (Basin) LTD kepada SKK Migas sebesar Rp6.117.502.500.
   - Koreksi karena bukan merupakan pelepasan hak atas tanah melainkan aset sewa yang sudah ada dokumen pendukungnya pada KKKS PHE Metana Suban II sebesar Rp127.116.235.
   - Penghapusan karena alih status aset dari Pertamina Hulu OSES d.h. KKKS CNOOC SES ke Kementerian ESDM sebesar Rp47.175.200.000.
   - *Off Balance* Sheet Pembenahan pencatatan sebesar Rp12.588.189.592.379 dikarenakan masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada 8 KKKS, yaitu:

NO	NAMA KKKS	LUAS (m^2)	NILAI (Rp)
1	Job Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi	343.693,00	3.274.558.000,00
2	PT Chevron Pacific Indonesia	437.675.097,00	10.592.439.949.130,00
3	PT Pertamina Hulu Energi Siak	4.254.516,02	9.403.683.400,00
4	PT Pertamina EP Area Cepu	42.055,00	6.392.360.000,00
	PT Pertamina EP Region Sumatera	12.540.916,00	932.092.427.000,00
	PT Pertamina EP BWP Meruap Ltd	307.629,00	3.732.331.335,00
	PT Pertamina EP Region Jawa Bagian Barat	0	68.597.208.000,00
	PT Pertamina EP Cepu	89.369,00	30.319.456.000,00
5	Chevron Indonesia Company East Kalimantan	11.924.889,00	475.008.806.000,00

6	Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga. Llc,	111.674.422,68	371.056.100.334,00
7	Petroselat. Ltd,	411.388,00	10.602.840.000,00
8	PT Medco E&P Indonesia	6.260.454,00	85.269.873.180,00
JUMLAH		**585.524.428,70**	**12.588.189.592.379,00**

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya-Neraca Nomor 7.**

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp462.116.330.419.664 dan Rp443.187.162.878.817. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBM	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Saldo Awal	**443.187.162.878.817**	**442.731.782.028.218**
Penambahan	32.154.720.208.405	108.786.421.213.186
Pengurangan	(13.225.552.667.558)	(108.331.040.362.587)
Saldo Akhir	**462.116.330.419.664**	**443.187.162.878.817**

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp109.937.191.954 dan Rp97.017.511.748.

Mutasi Aset KKKS berupa dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBI	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Saldo Awal	**97.017.511.748**	**70.785.280.181**
Penambahan	27.622.163.524	33.131.455.226
Pengurangan	(14.702.483.318)	(6.899.223.661)
Saldo Akhir	**109.937.191.954**	**97.017.511.746**

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US Dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp25.318.621.828.363 dan Rp25.952.463.476.307. Mutasi Aset KKKS berupa material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Saldo Awal (USD)	1,792,173,432.97	1,821,519,253.00
Penambahan (USD)	857,672,647.61	961,236,541.08
Pengurangan	(828,493,527.91)	(990,582,361.11)
Saldo Akhir		
USD	**1.821.352.552,22**	**1,792,173,432.97**
Konversi Rp	**25.318.621.828.363**	**25.952.463.476.307**

Saldo awal aset material persediaan tahun 2019 merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2018 *Audited* sebesar USD1,792,173,432.97 atau setara Rp25.952.463.476.307 (kurs per 31 Desember 2018 adalah Rp14.481/USD).

Mutasi tambah sebesar USD857,672,647.61 berasal dari:

a. Pembelian material persediaan sebesar USD720,032,462.63.
b. Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD13,201,359.50 dan koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD4,135,449.08.
c. Pengembalian material persediaan perolehan 2019 sebesar USD90,421,117.82.
d. *Transfer In* sebesar USD23,146,053.40.
e. Alih kelola terima antar KKKS sebesar USD6,736,205.18.

Mutasi kurang sebesar USD828,493,527.91 berasal dari:

a. Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD1,071,897.28 dan *non-capital* sebesar USD13,216,435.91 akibat pembenahan pencatatan aset.
b. Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar USD302,285,080.10.
c. *Transfer Out* sebesar USD21,714,030.90.
d. Penghapusan sebesar USD13,368,864.33.
e. Alih Kelola Serah sebesar USD6,736,205,18.
f. Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain USD1,806,756.64.
g. Penggunaan Material Persediaan *non-capital* sebesar USD406,856,417.68.
h. Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD61,437,893.87.

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2019 senilai USD1,821,352,552.22 atau ekuivalen Rp25.318.621.828.364 (kurs per 31 Desember 2019 adalah Rp13.901/USD).

2) Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.931.288.550.708 dan Rp7.644.734.809.908. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

Aset Eks BPPN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a) Aset Properti Eks BPPN	2.353.306.709.831	2.338.126.115.203
b) Aset Inventaris	8.476.788.158	8.504.708.157
c) Aset Nostro	9.434.351.296	9.584.244.334
d) Surat Berharga Eks BPPN	466.078.565.798	485.257.220.136
e) Saham Eks BPPN	337.710.521.969	400.118.594.856
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	4.756.281.613.656	4.403.143.927.221
Jumlah	**7.931.288.550.708**	**7.644.734.809.908**

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2019 sejumlah 1.472 aset dengan nilai sebesar Rp2.353.306.709.831. Sedangkan per 31 Desember 2018 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp2.338.126.115.203. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp1.815.693.164 terletak di Jl. Kopi No. 10, Kel Roa Malaka, Jakarta ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilu sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.59/KM.6/2019 tanggal 19 Februari 2019.
- Aset di Springvale Tangkil, Bogor pencatatan ganda sejumlah 9 aset.
- Aset Tawangsari, Semarang (SHGB No.544) telah dijual dan telah dicabut blokir oleh Bankum surat No. S-969/SJ.8/2008 tanggal 12 Sept 2008 dan S-117/SJ.4/2017 tanggal 24 Mei 2017.
- Penambahan nilai dikarenakan 9 aset di Springvale Tangkil, Bogor sebelumnya dinilai Rp0. Sesuai hasil penilaian 31 Desember 2018, nilai 9 aset tersebut sebesar Rp20.899.386.000.
- Pengurangan sejumlah 4 aset dengan nilai Rp3.903.098.208 yang terletak di Jalan Daan Mogot Km 19,8, Tangerang karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen *copy*	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	**706**

b) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.476.788.157 untuk 18.620 unit dan Rp8.504.708.157 untuk 18.653 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan penghapusan aset inventaris sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit senilai Rp27.920.000 pada neraca LKTK BUN dan terjual melalui lelang dengan harga Rp8.650.000.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.434.351.295 dan 9.584.244.334. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2019 sebesar Rp454.445.361.291. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh Ditjen Kekayaan Negara.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp466.078.565.798 dan Rp485.257.220.136. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp337.710.521.969 dan Rp400.118.594.856. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2019.

Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.368.731.783. Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp298.341.790.186.

Nilai Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Juni 2019. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI karena melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2019 belum ada emiten yang memberikan tanggapan sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

f) Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.756.281.613.656 dan Rp4.403.143.927.221. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1	Aset Properti eks PPA	4.693.651.039.601	4.340.193.715.666
2	Surat Berharga eks PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
3	Saham Non Bank eks PPA	45.973.331.846	46.292.969.346
	Jumlah	**4.756.281.613.656**	**4.403.143.927.221**

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset Properti Eks BLBI dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 12 - 16.** Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 23**.

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.487.935.402.320 dan Rp12.570.408.826.220.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

- 3 (tiga) aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp47.580.000.000;
- BMN eks kontrak kerja sama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp13.440.355.402.320.

4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp78.520.698.400 dan Rp40.518.095.500. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp40.518.095.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp56.481.506.400 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp18.478.903.500.

5) Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp74.778.884.370 dan Rp79.383.729.148. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Pada tahun 2019, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp434.838.000 dan mutasi kurang Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.039.682.778.

Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 25.**

6) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp38.704.267.850.386 dan Rp37.612.241.040.994. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp2.912.344.062.224 dan non-Tanah sebesar Rp35.791.923.788.162. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disajikan sebagai berikut.

- Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.166.818.764.657 berasal dari:
  - Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp337.596.166.708;
  - Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp740.918.748.131;
  - Koreksi nilai perolehan sebesar Rp88.303.849.818.
- Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp74.864.629.609 berasal dari penghapusan aset melalui penjualan lelang.
- Koreksi kurs Kapitalisasi Kode aset FTK0013 PT Arutmin sebesar Rp72.674.344.

Aset PKP2B tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau *Coal*, PT Kaltim Prima *Coal*, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat aset non-Tanah sebesar Rp13.379.026.000 yang berasal dari BMN PKP2B PT Tanito Harum pada bulan Januari 2019 telah berakhir kontraknya. Aset tersebut masih tercatat pada aset lainnya dalam neraca dikarenakan usulan untuk menjadi UPK belum diputuskan.

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp115.056.383.683 dan Rp14.883.082.231.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Barang Gratifikasi KPK	114.202.983.683	14.201.806.017
Aset Eks USAID	228.400.000	56.276.214
Saham PT Aldevelco	625.000.000	625.000.000
Jumlah	**115.056.383.683**	**14.883.082.231**

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp11,80 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp11.808.679.526.194 dan Rp10.482.359.272.377, mengalami kenaikan sebesar Rp1.326.320.253.817 atau 12,65 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Yayasan TMII	90.879.019.884	90.793.868.244
2. Otorita Asahan	6.852.392.874	7.892.847.825
3. Yayasan Gedung Veteran	5.675.729.236	6.891.253.320
4. Badan Zakat Nasional	124.793.302.104	103.225.219.734
5. Badan Wakaf Indonesia	1.392.875.859	1.293.221.652
6. SKK Migas	(44.261.246.631)	(15.136.819.621)
7. Bapertarum PNS	843.916.661.365	484.186.960.628
8. OJK	5.945.724.548.298	5.652.154.041.966
9. Badan Pengelola Keuangan Haji	4.833.706.243.205	4.151.058.678.629
Jumlah	**11.808.679.526.194**	**10.482.359.272.377**

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

   Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp90.879.019.884 dan Rp90.793.868.244. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII sebesar Rp90.879.019.884 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019.

   Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

   Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.852.392.874 dan Rp7.892.847.825. Aset Lainnya sebesar Rp6.852.392.874 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019.

   Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

   Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2019 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran
   Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.675.729.236 dan Rp6.891.253.320. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp5.675.729.236 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2019.
4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
   Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp124.793.302.104 dan Rp103.225.219.734. Nilai Aset Lainnya sebesar Rp124.793.302.104 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019.
5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
   Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.392.875.859 dan Rp1.293.221.652. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.392.875.859 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2019.
6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
   Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp44.261.246.631 dan minus Rp15.136.819.621. Aset Lainnya sebesar minus Rp44.261.246.631 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2019 *(Audited)* dengan ekuitas sebesar minus Rp1.076.539.694.264 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.162.273.561.112 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp129.995.113.479. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2019 *(Audited)*	**(1.076.539.694.264)**
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	1.162.273.561.112
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(129.995.113.479)
Ekuitas bersih BP Migas per tanggal 13 November 2012	-
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2019	**(44.261.246.631)**

7. Penyesuaian atas ekuitas bersih BP Migas per 13 November 2012 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03).
8. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
   Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp843.916.661.365 dan Rp484.186.960.628. Aset Lainnya sebesar Rp843.916.661.365 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2019.
   Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016

tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS akfif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

   Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.945.724.548.298 dan Rp5.652.154.041.966. Aset Lainnya dari OJK per 31 Desember 2019 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

10. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

    Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.833.706.243.205 dan Rp4.151.058.678.629. Aset Lainnya dari BPKH sebesar Rp4.833.706.243.205 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp281,07 triliun

D.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp281.071.678.085.183 dan Rp271.738.387.743.944, mengalami kenaikan sebesar Rp9.333.290.341.239 atau 3,43 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	Desember 2018 *(Audited)*
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	35.161.188.296.434	50.752.679.679.587
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	245.910.489.788.749	220.985.708.064.357
Jumlah	**281.071.678.085.183**	**271.738.387.743.944**

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

   Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp35.161.188.296.434 dan Rp50.752.679.679.587. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp35.161.188.296.434 terdiri dari:

   a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp796.690.861.204;
   b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp15.756.326.917;
   c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp34.348.741.108.313.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

   Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp245.910.489.788.749 dan Rp220.985.708.064.357. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

   a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp198.145.865.990.360;
   b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp26.548.479.457;

c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp19.293.000.926.092;
d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp28.435.139.542.608;
e. Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp3.686.294.572; dan
f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp6.248.555.660.

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Rp15,12 triliun

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.124.922.825.166 dan Rp12.211.622.116.245, mengalami kenaikan sebesar Rp2.913.300.708.921 atau 23,86 persen.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	15.040.916.929.225	12.141.426.494.645
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	84.005.895.941	70.195.621.600
Jumlah	**15.124.922.825.166**	**12.211.622.116.245**

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L

   Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.040.916.929.225 dan Rp12.141.426.494.645.

   Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L terdiri dari:

   a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp16.620.345.886;
   b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp74.557.822.862;
   c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp11.579.725.487.469;
   d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.113.183.168.690;
   e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.845.582.312.562;
   f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp411.247.791.756

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN

   Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp84.005.895.941 dan Rp70.195.621.600. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:

   a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp55.885.087.776;
   b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp28.120.808.165.

D.2.1 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp704,68 triliun

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp704.682.072.672.981 dan Rp750.502.434.401.484, mengalami penurunan Rp45.820.361.728.503 atau 6,11 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494	43,02
Utang kepada Pihak Ketiga	130.742.404.048.899	99.881.440.679.615	30,90
Utang Bunga	67.847.210.447.268	63.568.707.486.877	6,73
Utang Subsidi	11.234.735.172.695	30.130.298.770.683	(62,71)
Utang Transfer	48.735.153.480.379	42.508.894.037.204	14,65
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	316.317.377.496.950	368.352.663.805.325	(14,13)
Unamortized Discount	(127.084.431.000)	(101.251.794.000)	25,51
Unamortized Premium	215.059.457.000	78.266.476.000	174,78
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000	(23,12)
Unamortized Discount	(1.134.143.215.000)	(1.664.040.194.000)	(31,84)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	28.578.908.772.939	24.856.986.958.911	14,97
Pendapatan Diterima Dimuka	16.963.437.058.895	15.685.573.384.005	8,15
Pendapatan yang Ditangguhkan	197.917.075.973	280.090.169.168	(29,34)
Utang Jangka Pendek Lainnya	291.951.872.644	32.878.446.202	787,97
Jumlah	**704.682.072.672.981**	**750.502.434.401.484**	(6,11)

Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp52.035.286.308.375. Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 787,97 persen. Sementara Utang Subsidi mengalami penurunan tertinggi sebesar 62,71 persen.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp5,70 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.709.145.435.339 dan Rp3.991.926.175.494, mengalami kenaikan sebesar Rp1.717.219.259.845 atau 43,02 persen. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan Utang PFK Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.202.982.706.703. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Utang PFK DJPK	4.807.262.096.854	3.604.283.936.351
2. Utang PFK DJPB	901.443.639.834	387.453.556.900
3. Utang PFK DJKN	439.698.651	188.682.243
Jumlah	**5.709.145.435.339**	**3.991.926.175.494**

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
   Utang PFK DJPK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.807.262.096.854 dan Rp3.604.283.936.351. Utang PFK DJPK sebesar Rp4.807.262.096.854 merupakan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan Setoran Pajak Rokok bulan Desember 2019 yang akan baru disetorkan pada Triwulan I TA 2020.
2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)
   Utang PFK DJPB per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 901.443.639.834 dan Rp387.453.556.900.
   Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. BPJS Kesehatan	228.369.973.005	97.974.338.980
b. Perum Bulog	1.676.894	-
c. PT. Taspen (Persero)	32.925.571.844	12.892.263.340
d. PT. Asabri (Persero)	234.510.462	583.281.959
e. Bapertarum PNS	639.911.907.629	276.003.672.621
Jumlah	**901.443.639.834**	**387.453.556.900**

Rincian penerimaan dana PFK Pegawai untuk disalurkan kepada badan penyelenggara sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2019
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Iuran Jaminan Kesehatan untuk disalurkan kepada BPJS Kesehatan	9.142.491.386.977
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Setoran/Potongan PFK Beras Bulog untuk disalurkan kepada Perum BULOG	210.096.537.152
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua PNS, Pejabat Negara, Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota untuk disalurkan kepada PT Taspen (Persero)	11.500.906.337.913
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota POLRI/PNS POLRI untuk disalurkan kepada PT Asabri (Persero)	2.077.857.763.733
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Iuran Tabungan Perumahan PNS untuk disalurkan kepada BAPERTARUM-PNS	272.660.545.222
Jumlah	**23.204.012.570.997**

Rincian pembayaran dana PFK Pegawai (jumlah dana PFK Pegawai yang telah disalurkan kepada Badan Penyelenggara) sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2019
BPJS Kesehatan	9.018.246.756.951
Perum BULOG	210.073.595.170
PT Taspen (Persero)	11.459.847.588.428
PT Asabri (Persero)	2.077.419.145.708
Bapertarum-PNS	0
Jumlah	**22.765.587.086.257**

Terdapat selisih antara nilai pada Utang PFK dan saldo pada Rekening Dana Khusus PFK sebesar Rp12.349.491.335 hal ini dikarenakan masih terdapat saldo yang belum dipindahkan dari RKUN ke rekening Dana Khusus PFK dimana nilai sebesar Rp12.349.491.335 ini juga menjadi pengurang fisik SAL.

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
   Utang PFK DJKN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp439.698.651 dan Rp188.682.243. Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp130,74 triliun

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp130.742.404.048.899 dan Rp99.881.440.679.615, mengalami kenaikan sebesar Rp30.860.963.369.284 atau 30,90 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. K/L	17.329.403.887.015	17.548.296.494.980
2. BUN	113.413.000.161.884	82.333.144.184.635
Jumlah	**130.742.404.048.899**	**99.881.440.679.615**

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

   Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.329.403.887.015 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

   Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

   a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.014.239.128.063 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
   b. Kementerian Keuangan sebesar Rp866.046.141.211 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
   c. Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.421.240.720.944 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
   d. Kementerian PUPERA sebesar Rp1.232.905.334.297 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

   Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp113.413.000.161.885 dan Rp82.333.144.184.635.

   Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. BA 999.03 (Investasi)	5.651.103.795.171	7.776.103.924.407
b. BA 999.08 (Belanja Lain-lain)	91.506.354.896.107	58.711.068.590.701
c. BA 999.99 (Transaksi Khusus)	16.328.389.618.740	15.813.940.969.921
d. BA.999.00 (Utang Kepada Pihak Ketiga)	118.429.956.817	197.868.217.285
Jumlah	**113.604.278.266.835**	**82.498.981.702.314**
Eliminasi BUN 999	(191.278.104.950)	(165.837.517.678)
Jumlah*	**113.413.000.161.885**	**82.333.144.184.636**

**) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

   a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

      Nilai kewajiban jangka pendek pada BA 999.03 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.651.103.795.171 dan Rp7.776.103.924.407. Nilai tersebut merupakan merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP tetapi belum direalisasikan penggantiannya oleh LMAN.

      Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per jenisnya dijelaskan sebagai berikut.

      1) Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp5.651.062.048.521;
      2) Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp41.746.650.

   b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)

      Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp91.506.354.896.107 dan Rp58.711.068.590.701. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Kementerian Keuangan	415.045.649.535	666.636.123.258
SKK Migas	4.864.554.151	11.562.165.044
Satker *Suspense*	91.086.444.692.421	58.032.870.302.399
Jumlah	**91.506.354.896.107**	**58.711.068.590.701**

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.058.915.050
Ditjen Perbendaharaan	409.812.566.485
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
Jumlah	**415.045.649.535**

2) SKK Migas

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp4.864.554.151 merupakan tunggakan tahun 2019 yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

3) Satker *Suspense*

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Satker *Suspense* adalah sebesar Rp91.086.444.692.421 dan Rp58.032.870.302.399, dimana mengalami kenaikan sebesar Rp33.053.574.390.022 atau 56,95 persen.

Dengan mengacu pada dokumen alokasi anggaran pada APBN 2020, Pemerintah baru mengalokasikan dana sebesar Rp15.000.000.000.000 pada pos Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM pada Belanja Lain-lain dalam APBN Tahun Anggaran 2020. Namun berdasarkan rapat di level pimpinan Kementerian Keuangan, Pemerintah berencana akan membayar utang kompensasi pada tahun 2020 sebesar Rp91.086.444.692.421, dengan rincian sebagai berikut :

- Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826, dengan penjelasan sebagai berikut :
  a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 32/AUDITAMA VII/PDTT/07/2019 tanggal 6 Juli 2018 dijelaskan bahwa adanya kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp23.173.464.343.826 untuk golongan tarif tidak bersubsidi tahun 2018.
  b. Setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019 hal Kebijakan Pemerintah atas Penerapan Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Non-Subsidi di Bawah Perhitungan *Tariff Adjustment* Tahun 2018 menyampaikan bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas subsidi listrik tahun 2018 pada PT PLN (Persero) dan anak perusahaan nomor: 43/AUDITAMA VIII/PDTT/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 terkait adanya kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp23.173.464.343.826 untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2018, disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah, yang pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

- Kompensasi atas kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik adalah sebesar Rp22.253.517.129.274, dengan penjelasan sebagai berikut :
  a. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826;
  b. Setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri ESDM, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 menyampaikan bahwa Pemerintah dapat menyetujui penggantian kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas yang pembayarannya dilakukan pada kesempatan pertama di tahun 2020 sesuai kemampuan keuangan negara.
- Kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar Rp45.659.463.219.321, terdiri atas:
  a. Kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT sebesar Rp45.000.000.000.000, dengan rincian:
     1) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
     2) Sebagian kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp24.211.083.111.050 dari total kekurangan penerimaan sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019.
  b. Kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat penetapan HJE BBM JBT sebesar Rp659.463.219.321, dengan rincian:
     1) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
     2) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Pemerintah telah menerbitkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-828/AG/2020 tanggal 15 Mei 2020 hal Penyampaian Klasifikasi Utang Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik pada LKBUN/LKPP 2019 *Audited* yang menjadi dasar rencana pembayaran utang kompensasi pada tahun 2020 sebesar Rp91.086.444.692.421 dimaksud.

Penyajian Utang kepada Pihak Ketiga pada satker *Suspense* berdasarkan :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan penyajian Utang Piutang Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 dan 2019 antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan Direktur keuangan PT PLN (Persero) Nomor BA-23/AG.6/2020 dan 0313.BA/KEU.02.04/A010600/2020 tanggal 15 Mei 2020.
2. Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan penyajian Utang Piutang Kompensasi antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-S0 tanggal 15 Mei 2020.

Jika dibandingkan dengan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp33.053.574.390.022. Kenaikan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Serah terima pencatatan utang sebesar minus Rp7.456.451.880.403 kepada satker Ditjen Anggaran (kode satker 983011). Serah terima pencatatan tersebut didasari oleh Berita Acara Serah Terima Pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga Nomor BAST-1/AG/2019 tanggal 31 Desember 2019 antara UAPBUN Belanja Lain-lain (mencatat utang menggunakan satker *Suspense*) dengan KPA Satker Pembayaran Kewajiban Pemerintah terhadap Kebijakan Tarif Listrik TA 2017.
2. Koreksi kurang sebesar Rp215.973.435.500 merupakan koreksi terkait kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018. Pada tahun 2018, utang tersebut tercatat sebesar Rp29.528.464.106.266 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2019 tanggal 30 April 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018. Selanjutnya, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018 dan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 31/AUDITAMA VII/PDTT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, maka kewajiban Pemerintah atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dimaksud kemudian dicatat sebesar Rp29.312.490.670.766. Atas hal tersebut, maka ada koreksi kurang sebesar Rp215.973.435.500 (Rp29.528.464.106.266 – Rp29.312.490.670.766).
3. Koreksi kurang sebesar Rp4.700.981.767.175 (Rp50.360.444.986.496 - Rp45.659.463.219.321) merupakan koreksi terkait kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM dengan rincian sebagai berikut:
    a. Reklasifikasi ke Utang Jangka Panjang sebesar Rp5.101.407.559.716 (Rp50.360.444.986.496– Rp45.259.037.426.780) dikarenakan dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM pada PT Pertamina dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru merencanakan pembayaran utang kompensasi atas kekurangan pendapatan dimaksud sebesar Rp45.259.037.426.780 pada Tahun 2020.
    b. Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02.2020 tanggal 27 Januari 2020.

4. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
5. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274 yang ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.328.389.618.740 dan Rp15.813.940.969.921. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Utang Kepada Pihak Ketika TK - DJPB	4.935.603.947.760	5.133.133.592.527
Utang Kepada Pihak Ketika TK - DJA	11.391.057.810.983	10.679.007.714.996
Utang Kepada Pihak Ketika TK - BKF	1.727.859.997	1.799.662.398
Jumlah	**16.328.389.618.740**	**15.813.940.969.921**

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2019 dan Desember 2018 sebesar Rp118.429.956.817 dan Rp197.868.217.285, dimana mengalami penurunan sebesar Rp79.438.260.468 atau 40,15 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan /atau nomor rekening dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang Retur KPPN	118.415.840.071	Utang retur di KPPN
Utang Jangka Pendek Lain-lain	14.116.743	Kewajiban ini berasal dari Kelebihan Limpah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2019 yang belum diminta pengembalian oleh bank/pos persepsi
Utang karena kesalahan perbankan	3	Saldo utang kepada Phak Ketiga senilai Rp3 yang merupakan pembulatan
Jumlah	**118.429.956.817**	

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga Rp67,84 triliun

Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp67.847.210.447.268 dan Rp63.568.707.486.877, mengalami kenaikan sebesar Rp4.278.502.960.391 atau 6,73 persen. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

Utang Bunga	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Utang Bunga Dalam Negeri	63.765.290.222.549	58.360.927.183.310
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	111.018.797.511	102.827.439.148
b. Utang Bunga Luar Negeri	3.970.901.427.208	5.104.952.864.420
Jumlah	**67.847.210.447.268**	**63.568.707.486.878**

Utang Biaya Pinjaman merupakan Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.847.210.447.268 yang terdiri dari:

1. Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp63.765.290.222.549, dimana didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp707.958.567.000.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.081.920.224.719, terdiri dari:
   a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp111.018.797.511; dan
   b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp3.970.901.427.208.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp11,23 triliun

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp11.234.735.172.695 dan Rp30.130.298.770.683, mengalami penurunan sebesar Rp18.895.563.597.988 atau 62,71 persen. Terdapat utang subsidi estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifkasi atas tagihan dimaksud. Utang subsidi estimasi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp183.683.286.370 dan Kementerian KUKM senilai Rp1.486.852.984.436.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga disajikan sebagai berikut.

Utang Subsidi	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Kementerian Keuangan	3.742.908.280.041	16.301.692.140.385
2. Kementerian Pertanian	5.712.863.663.000	9.773.249.000.000
3. Kementerian Perhubungan	0	108.285.000.000
4. Kementerian PUPR	292.110.245.218	617.792.089.221
5. Kementerian KUKM	1.486.852.984.436	3.329.280.541.077
Jumlah	**11.234.735.172.695**	**30.130.29.770.683**

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

   Utang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.742.908.280.041 dan Rp16.301.692.140.385. Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.558.783.860.344 atau 77,04 persen dibandingkan Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018. Rincian Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan disajikan sebagai berikut.

Eselon I	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	2.468.700.000.000	15.907.204.095.503
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	1.222.759.999.792	386.123.000.000
c. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	51.448.280.249	8.365.044.882
Jumlah	**3.742.908.280.041**	**16.301.692.140.385**

   a. Utang Subsidi pada DJA

      Utang Subsidi Jangka Pendek DJA per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.468.700.000.000.

      Utang Subsidi Jangka Pendek DJA terdiri atas:

1) Utang Subsidi sebesar Rp1.043.658.000.000 merupakan merupakan kekurangan subsidi BBM Jenis Minyak Solar kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk tahun 2018;
2) Utang Subsidi sebesar Rp 190.672.000.000 merupakan kekurangan subsidi BBM Jenis Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2018;
3) Utang Subsidi sebesar Rp1.234.370.000.000 merupakan kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2018.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.222.760.000.000 dan Rp386.123.000.000. Utang Subsidi PPh DTP per 31 Desember 2019 merupakan reklas Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1.222.759.999.792.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan

Utang subsidi Kredit Program per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp51.448.280.249 dan Rp.8.365.044.882.

Rincian Utang Subsidi ada Ditjen Perbendaharaan disajikan sebagai berikut.

Skema Subsidi	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	2	3	4	5=2+3+4
KKPE	1.600.244.896	12.032.641.010	1.544.360.486	12.088.525.420
KPEN-RP	580.453.812	25.147.954.981	580.453.812	25.147.954.981
Risk Sharing KKPE	0	12.558.622.170	0	12.558.622.170
KUPS	6.068.257.667	1.285.313.239	6.066.587.537	1.286.983.369
S-SRG	116.088.407	366.194.309	116.088.408	366.194.309
Jumlah	**8.365.044.782**	**51.390.725.709**	**8.307.490.242**	**51.448.280.249**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek merupakan Saldo akhir Utang Subsidi per 31 Desember 2018 senilai Rp8.365.044.882 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2019 yang belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp 51.390.725.709 dikurangi SPP Tahun 2019 atas BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2019 sebesar Rp6.919.518.778, dan dikurangi SPP Tahun 2019 atas BAV yang diterbitkan pada *Subsequent Event* penyusunan laporan keuangan Tahun 2018 sebesar Rp1.387.971.464, dan koreksi atas kesalahan pencatatan Utang Subsidi pada penerbitan BAV Skema KKPE Bank Papua Periode Juli – September 2018 yang semula tercatat Rp82.253.650 dikoreksi sebesar Rp100 menjadi Rp82.253.550.

Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran sebagai berikut.

Saldo utang Subsidi	Jumlah
Periode penyaluran Tahun 2015	Rp8.815.888.815
Periode penyaluran Tahun 2016	Rp6.243.948.437
Periode penyaluran Tahun 2017	Rp8.148.033.987
Periode penyaluran Tahun 2018	Rp10.205.257.924
Periode penyaluran Tahun 2019 (sampai penyusunan LK belum diterbitkan SP2D-nya)	Rp18.035.151.086

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.712.863.663.000 dan Rp9.773.249.000.000. Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.060.385.337.000 dibandingkan dengan jumlah utang subsidi per 31 Desember 2018. Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi Utang

Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.663.000. Utang Subsidi tahun 2018 direalisasikan senilai Rp9.773.248.999.000 atau 100 persen dari Pagu Kurang Bayar. Selisih Rp1.000 yang disebabkan pembulatan pada POK.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan
   Pada 31 Desember 2019, tidak terdapat Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp292.110.245.218 dan Rp617.792.089.221. Jumlah utang subsidi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp325.681.844.003 dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2018.
   Utang subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp292.110.245.218 terdiri dari:
   a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR
      Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp290.219.286.370 terdiri dari utang subsidi Rp106.536.000.000 berupa kontra akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Subsidi Estimasi sebesar Rp183.683.286.370. Utang Subsidi Estimasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp183.683.286.370 diantaranya terdiri sisa saldo utang tahun 2018 sebesar Rp58.710.111.102 yang belum dapat ditelusuri oleh KPA ke dokumen sumber hasil audit BPKP dengan surat tagih bank untuk berapa nilai yang layak bayar, tidak layak bayar, dan tunda bayar. Dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp106.536.000.000 merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2019.
   b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
      Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.890.958.848 dan Rp2.103.500.344.
      Utang subsidi estimasi merupakan estimasi tagihan subsidi bulan Maret s.d September 2019 dengan rincian sebagai berikut.

No	PDAM	PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA PERBULAN TA 2018				
		Indikasi Kebutuhan Subsidi Bunga Periode Oktober 2018				
		Sep-19	Okt-19	Nov-19	Des-19	Total Indikasi
1	Kab. Bogor	3.178.733,61	1.059.577,87	-	-	4.238.311,48
2	Kab. Ciamis	-	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Timur	-	-	-	-	-
4	Kota Banjarmasin	169.852.941,15	152.058.823,50	145.588.235,27	150.441.176,44	617.941.176,36
5	Kota Malang	-	-	-	-	-
6	Kota Denpasar	48.097.807,07	49.701.067,30	48.097.807,07	49.409.565,44	195.306.246,89
7	Kota Palopo	323.405.082,50	44.479.923,75	43.045.087,50	44.344.798,75	455.274.892,50
8	Kab. Cilacap	19.581.689,61	20.234.412,60	19.581.689,61	20.234.412,60	79.632.204,43
9	Giri Menang	96.366.270,36	99.578.479,38	96.366.270,36	98.864.655,15	391.175.675,25
10	Kab. Banyumas	37.104.595,09	37.751.878,95	35.962.329,47	36.571.537,80	147.390.341,31
TOTAL		697.587.119,39	404.864.163,35	388.641.419,28	399.866.146,19	1.890.958.848,21

5. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM
   Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.486.852.984.436 dan Rp3.329.280.541.077. Utang Utang Subsidi estimasi per 31 Desember 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.842.427.556.641 dikarenakan:
   a. Pembayaran atas utang subsidi estimasi sebesar Rp1.075.762.061.741
   b. koreksi kurang atas saldo per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan di tahun 2019 senilai Rp2.253.518.479.335 dikarenakan derajat kepastian kurang; dan
   c. Tagihan subsidi IJP dan Bunga KUR sampai dengan tahun 2019 yang belum dilakukan verifikasi sebesar Rp1.486.852.984.436. Atas utang subsidi estimasi tersebut, sampai dengan bulan Mei 2020 telah diverifikasi SIKP tagihan subsidi bunga senilai

Rp958.366.326.699 dari 37 Penyalur dan diaudit BPKP tagihan IJP senilai Rp46.372.454.177 dari 1 Penjamin KUR. Dari hasil verifikasi dan audit tersebut, sebesar Rp885.810.040.778 dinyatakan lolos verifikasi dan layak dibayarkan belanja subsidinya pada tahun 2020.

Terdapat perubahan kebijakan pengakuan utang estimasi pada tahun 2019 yaitu tidak mengakui utang atas tagihan yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali dan menghapusbukukan utang sejenis per 31 Desember 2018.

Utang Transfer Rp48,73 triliun

D.2.2.1.5 Utang Transfer

Utang Transfer per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp48.735.153.480.379 dan Rp42.508.894.037.204, mengalami kenaikan sebesar Rp6.226.259.443.175 atau 14,65 persen.
Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut:

Jenis Kewajiban	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Kewajiban TKD	10.316.654.476.421	24.143.153.891.576
2. Kewajiban TKD Estimasi	38.418.499.003.958	18.365.740.145.628
Jumlah	**48.735.153.480.379**	**42.508.894.037.204**

1. Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil

Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD Satker DBH per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.316.654.476.421 dan Rp24.143.153.891.576. Nilai kewajiban pada TA 2019 tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.826.499.403.155 atau 57,27 persen. Penurunan nilai kewajiban tersebut sebagai akibat dari realisasi penyelesaian sebagian Kurang Bayar TA 2017 berdasarkan PMK No. 77/PMK.07/2019, PMK No. 167/PMK.07/2019, Perdirjen No. Per 5/PK/2019, Perdirjen No. Per-8/PK/2019, dan PMK No. 180/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang pada TA 2019.
Rincian Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Kewajiban TKD Estimasi Dana Bagi Hasil

Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban transfer pada periode pelaporan keuangan tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada Satker DBH, Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul sebagai akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan Pajak dan PNBP Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan dengan besaran DBH Pajak dan PNBP SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan hasil perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* dan akan menjadi definitif sebagai Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.
Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp38.418.499.003.958. Saldo Kewajiban TKD Diestimasi TA 2019 merupakan nilai hasil estimasi Kurang Bayar DBH yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara TA 2019 yang akan dibagihasilkan. Dibandingkan dengan 31 Desember 2018 Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi mengalami kenaikan sebesar Rp20.052.758.858.330 di mana saldo Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Hal ini disebabkan oleh

kebijakan penundaan penyaluran DBH Reguler Triwulan IV Tahun 2019 guna melunasi utang/kewajiban DBH Definitif tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil berdasarkan Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019.

Rincian Estimasi Kurang Bayar DBH TA 2019 disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Jumlah (Rp)
KB DBH PPh Pasal 21	12.209.696.054.954
KB DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.495.517.854.670
KB DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	1.500.900.118.159
KB DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	5.975.281.887.635
KB DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	46.365.209.870
KB DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	217.249.129.111
KB DBH PBB Bagi Rata	586.300.671.249
KB DBH CHT	160.954.442.590
KB DBH SDA Minyak Bumi 15%	2.617.243.927.498
KB DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	85.909.040.118
KB DBH SDA Minyak Bumi Otonomi Khusus	147.087.840.667
KB DBH SDA Gas Bumi 30%	3.876.184.425.281
KB DBH SDA Gas Bumi 0,5%	57.447.204.921
KB DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus	587.426.193.138
KB DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	40.820.718.428
KB DBH SDA Minerba – Royalti	7.056.127.205.852
KB DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	1.042.349.211.774
KB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	10.826.863.200
KB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	961.350.378
KB DBH SDA Kehutanan - IIUPH	56.562.387.490
KB DBH SDA Kehutanan - PSDH	530.570.830.251
KB DBH SDA Perikanan	116.716.436.724
Total	**38.418.499.003.958**

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp316,31 triliun

Bagian Lancar UJP per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp316.317.377.496.950 dan Rp368.352.663.805.325, mengalami penurunan sebesar Rp52.035.286.308.375 atau 14,13 persen.

Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp316.405.352.522.950 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp316.317.377.496.950 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp127.084.431.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp215.059.457.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	93.861.285.668.664	88.732.967.798.966
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.503.721.849.368	1.410.104.071.397
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	220.842.513.473.516	278.132.014.827.761
Bagian Lancar UJP BUN	**316.207.520.991.548**	**368.275.086.698.124**
KL		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	**109.856.505.402**	**77.577.107.201**
Jumlah Bruto	**316.317.377.496.950**	**368.352.663.805.325**
Unamortized Discount	(127.084.431.000)	(101.251.794.000)
Unamortized Premium	215.059.457.000	78.266.476.000
Jumlah Neto	**316.405.352.522.950**	**368.329.678.487.325**

Bagian Lancar Obligasi Negara termasuk di dalamnya bagian lancar atas seri SRBI-01 sebesar Rp774.800.215.588 sesuai dengan jadwal angsuran pelunasan pokok pada Addendum Obligasi Negara RI dengan tingkat bunga tetap seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 29 Mei 2019.

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp79,11 triliun

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp79.110.000.000.000 dan Rp102.900.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp23.790.000.000.000 atau 23,12 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp77.975.856.785.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp79.110.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.134.143.215.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Utang SBN Jangka Pendek	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000
Jumlah Bruto	**79.110.000.000.000**	**102.900.000.000.000**
Unamortized Discount	(1.134.143.215.000)	(1.664.040.194.000)
Unamortized Premium	0	0
Jumlah Neto	**77.975.856.785.000**	**101.235.959.806.000**

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp28,57 triliun

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp28.578.908.772.939 dan Rp24.856.986.958.911, mengalami kenaikan sebesar Rp3.721.921.814.028 atau 14,97 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	28.255.733.681.955	24.681.785.707.564
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	323.169.904.285	174.546.010.077
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.645.760	51.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	1.540.939	604.241.270
Jumlah	**28.578.908.772.939**	**24.856.986.958.911**

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp16,96 triliun

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.963.437.058.895 dan Rp15.685.573.384.005, mengalami kenaikan sebesar Rp1.277.863.674.890 atau 8,15 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
K/L	16.879.575.100.899	15.584.991.431.064
BUN	83.861.957.997	100.581.952.941
Jumlah*	**16.963.437.058.896**	**15.685.573.384.005**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp16.879.575.100.899, terutama berasal dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.164.212.773.960, Kementerian Kominfo sebesar Rp11.011.826.851.692 dan BP Batam sebesar Rp2.243.559.020.186.
2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp83.861.957.997 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari:
   a. Pendapatan diterima dimuka dari aset yang timbul dari pemberian BLBI sebesar Rp4.832.775.083 Pendapatan diterima dimuka aset yang timbul dari pemberian BLBI berasal dari peningkatan transaksi sewa atas properti eks BPPN dan transaksi sewa aset properti eks Kelolaan PT PPA.
   b. Pendapatan diterima dimuka dari sewa aset KKKS sebesar Rp65.023.306.477
   c. Pendapatan diterima dimuka dari ABMA/T sebesar Rp4.387.892.600,
   d. Pendapatan Diterima Dimuka UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.617.983.836 dan Rp1.700.000.000.

Rincian pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp197,91 triliun

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp197.917.075.973 dan Rp280.090.169.168, mengalami penurunan sebesar Rp82.173.093.195 atau 29,34 persen. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan dana yang terdapat di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, yang berasal dari setoran penerimaan negara yang belum dapat diidentifikasi peruntukkannya sebesar Rp197.917.075.973.

Saldo ini terkait pada pengelolaan transaksi khusus (UAKPA BUN TK DJA) dan BA BUN lainnya. Pada BA 999.99 PNBP Khusus BUN menyajikan nilai pendapatan migas yang ditangguhkan atas nilai penyetoran yang diterima di Rekening Migas namun belum diketahui peruntukannya sebesar Rp197.917.075.973, yang merupakan saldo Migas.

Sementara itu, Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.02 merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Nantinya, setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan akun pengakuan pendapatan hibah. Saldo ini juga terpengaruh perubahan metode akuntansi untuk perhitungannya yang termaktub dalam PMK 195/PMK.05/2019.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp291,95 miliar

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp291.951.872.644 dan Rp32.878.446.202, mengalami kenaikan sebesar Rp259.073.426.442 atau 787,97 persen.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
K/L	339.806.045.078	58.508.784.553
BUN	4.861.788.467.503	1.799.325.227
Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(4.909.642.639.937)	(27.429.663.578)
Jumlah	**291.951.872.644**	**32.878.446.202**

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp339.806.045.078 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp4.861.788.467.503 merupakan Utang jangka pendek lain lain BUN sebesar Rp4.861.788.467.503.
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp4.909.642.639.937, terdiri dari reklas Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ke Utang kepada pihak ketiga sebesar minus Rp4.861.788.467.503 karena perbedaan *posting rule* antara KL dan BUN, jurnal penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp25.432.121.939, dan Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak lainnya pada Laporan Operasional sebesar minus Rp22.422.050.495.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Rp4,63 triliun

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.635.539.513.513.850 dan Rp4.166.975.126.814.345, mengalami kenaikan sebesar Rp468.564.386.699.505 atau 11,24 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.967.764.907.186.497	3.452.614.959.247.770	14,92
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	667.774.606.327.353	714.360.167.566.575	(6,52)
Jumlah	**4.635.539.513.513.850**	**4.166.975.126.814.345**	**11,24**

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp512.144.131.932.880. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 14,83 persen, sementara Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami penurunan sebesar 6,52 persen.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Rp8,66 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.663.939.872.341 dan Rp5.724.587.516.213, mengalami kenaikan sebesar Rp2.939.352.356.128 atau 51,35 persen. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri merupakan akun baru dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-304/PB/2019.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BJB	0	332.145.446.203
Bank Mandiri	4.024.892.232.370	2.062.398.778.243
PT BNI	4.310.197.389.156	2.732.334.773.460
PT BRI	82.796.869.202	124.195.303.801
Bank Jateng	55.780.646.123	92.967.743.533
Bank DKI	190.272735.491	380.545.470.973
Jumlah*	**8.663.939.872.342**	**5.724.587.516.213**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN

Utang Jangka Panjang SBN Rp3.714,85 triliun

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.714.851.256.058.415 dan Rp3.231.655.441.684.556, mengalami kenaikan sebesar Rp483.195.814.373.859 atau 14,95 persen. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.716.705.221.560.415 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.714.851.256.058.415 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp37.092.489.249.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp38.946.454.751.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Utang Jangka Panjang SBN	**3.714.851.256.058.415**	**3.231.655.441.684.556**
Unamortized Discount	(37.092.489.249.000)	(34.929.436.432.000)
Unamortized Premiun	38.946.454.751.000	35.276.299.121.000
Jumlah Neto	**3.716.705.221.560.415**	**3.232.002.304.373.556**

Utang Jangka Panjang SBN termasuk di dalamnya utang obligasi negara atas seri SRBI-01 sebesar Rp70.289.646.118.536 sesuai dengan jadwal angsuran pelunasan pokok pada Addendum Obligasi Negara RI dengan tingkat bunga tetap seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 29 Mei 2019.

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp0

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp43.314.553.530.000. Tidak terdapat pembiayaan surat berharga negara ditangguhkan pada periode semester II tahun 2019.

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp669,80 miliar

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp669.808.470.045 dan Rp5.326.890.009.308, mengalami penurunan sebesar Rp4.657.081.539.263 atau 87,43 persen.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
UPSL 2012-2013	0	1.557.126.930.000
UPSL 2014-2015	0	3.099.954.609.263
UPSL 2015-2016	669.808.470.045	669.808.470.045
Total	**669.808.470.045**	**5.326.890.009.308**

Unfunded Past Service Liability (UPSL) Pegawai Negeri Sipil Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* (UPSL) Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	**Jumlah**	**Tanggal/Keterangan**	**Jumlah**
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	**7.557.126.930.000**		**6.000.000.000.000**

   Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 - 2015

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	**Jumlah**	**Tanggal/Keterangan**	**Jumlah**
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	**6.899.954.609.263**		**3.800.000.000.000**

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 - 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Per 31 Desember 2019 masih terdapat potensi kewajiban pemerintah berupa UPSL THT TNI/POLRI yang timbul dari perubahan formula manfaat THT TNI dan POLRI berupa biaya pemakaman peserta pensiun, istri atau suami peserta pensiun, sesuai PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial TNI dan POLRI. PT Asabri (Persero) belum menyampaikan perhitungan UPSL THT yang belum ditagih tersebut kepada Pemerintah.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp224,73 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp224.737.743.429.342 dan Rp154.619.584.439.818, mengalami kenaikan sebesar Rp70.118.158.989.524 atau 45,35 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
BA 999.04 (Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999)	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.99 (Dana Titipan Atas Iuran Program Pensiun pada PT Taspen)	151.428.469.320.652	126.167.048.361.579
BA 999.99 (Dana Titipan atas Iuran Program Pensiun pada PT Asabri)	17.669.911.410.364	25.190.149.909.936
BA 999.08	51.502.656.693.703	-
BA 999.09	843.916.661.365	484.186.960.628
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.380.861.616.099	866.271.480.516
Jumlah	**224.737.743.429.342**	**154.619.584.439.818**

1. Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur *(channeling)* ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25 persen X Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas *Risk Sharing* Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola *Channeling* Sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

2. **DanaTitipan atas Iuran Program Pensiun pada PT Taspen (Persero)**

   Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp151.428.469.320.652 dan Rp126.167.048.361.579. Terdapat kenaikan sebesar Rp25.261.420.959.073. Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) merupakan nilai pada Laporan atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Bulan Desember 2019 pada PT Taspen (Persero). Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited* adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Penjelasan lebih lanjut untuk Kewajiban Pemerintah atas Pensiun dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 32.**

3. **DanaTitipan atas Iuran Program Pensiun pada PT Asabri (Persero)**

   Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp17.669.911.410.364 dan Rp25.190.149.909.936. Terdapat penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572. Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri (Persero) merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS Kemhan/POLRI sampai dengan 31 Desember 2019 atas dana yang dikelola PT Asabri (Persero). Nilai tersebut merupakan nilai dana bersih AIP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *(Audited)* dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2019 *(Unaudited)*. AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian *Unaudited*, karena PT

Asabri (Persero) sampai saat ini belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 *(Audited).* Penjelasan lebih lanjut untuk Kewajiban Pemerintah atas Pensiun dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 32.**

4. Utang Jangka Panjang dalam Negeri pada BA 999.08

Dana Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.502.656.693.703 dan Rp0. Saldo utang tersebut terdapat pada satker *suspense* yang merupakan kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha terkait kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM dan tarif Tenaga Listrik dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi utang dari kewajiban jangka pendek yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka panjang yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 karena dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM PT Pertamina dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru mengalokasikan pembayaran utang pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.259.037.426.780.
2. Pencatatan utang kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebesar Rp15.937.498.935.778, dengan penjelasan sebagai berikut.
   a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pada intinya diatur bahwa:
      1) Harga indeks pasar, harga dasar dan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM.
      2) Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar *(gas oil)* dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
      3) Dalam hal tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan formula perhitungan dengan mempertimbangkan antara lain:
         a) kemampuan keuangan negara;
         b) kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
         c) ekonomi riil dan sosial masyarakat.
      4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
   b. Berdasarkan Laporan BPK RI Nomor: 31/AUDITAMA VII/PDTT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT & LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan Instansi Terkait Lainnya, terdapat temuan terkait kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM sebagai berikut:
      1) Kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 adalah sebesar Rp400.425.792.541.

2) Kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBKP Tahun 2018, yang diakui hanya kekurangan penerimaan atas penyaluran JBKP Non-Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237.

3) Atas temuan pada huruf "b" di atas, Menteri Keuangan telah menyampaikan kebijakan pengaturan melalui surat sebagai berikut:

a) Surat Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018, yang pada intinya menyampaikan:.

- Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.
- Kekurangan dan kelebihan penerimaan dari hasil penjualan JBKP Premium Jamali sebagai kekurangan dan kelebihan penerimaan PT Pertamina (Persero).

b) Surat Nomor S-58/MK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

4) Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kekurangan pendapatan PT. AKR Corporindo Tbk akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebagaimana pada angka "2)" di atas sebesar Rp400.425.792.541 pada Tahun 2020. Utang kompensasi tersebut dicatat sebagai Utang Jangka Pendek Dalam Negeri Lainnya.

5) Sementara itu, kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Non Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237 dicatat sebagai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

c. Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara atas Hasil Pemeriksaan Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT serta Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan atas Penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) tanggal 27 April 2020, diketahui perhitungan kekurangan penerimaan atas penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 sebesar Rp31.397.088.732.150, dengan rincian:

a) Selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2019 sebesar Rp16.389.880.533.600.

b) Selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran JBKP Tahun 2019 sebesar Rp15.007.208.198.550, terdiri atas JBKP Premium Jamali sebesar Rp6.021.737.130.900 dan JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650.

2) Mengacu Berita Acara pada huruf "a" di atas, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 telah menyampaikan persetujuan atas kekurangan

penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 diberikan sebesar Rp30.864.175.990.750, terdiri atas:

a)JBT Minyak Solar sebesar Rp16.389.880.533.600;

b)JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650; dan

c)JBKP Premium Jamali sebesar Rp5.488.824.389.500.

Penyajian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada *Satker Suspense* dibuat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan Penyajian Utang Piutang Kompensasi antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-S0 tanggal 15 Mei 2020. Terhadap kekurangan penerimaan tersebut, pembayarannya akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan negara.

5. **Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada BA 999.09**

   Kewajiban Jangka Panjang BA 999.09 per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp843.916.661.365 dan Rp484.186.960.628. Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya yang berasal dari ekuitas bersih pada Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS.

6. **Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L**

   Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.380.861.616.099. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.353.299.918.870, Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp27.295.007.268, dan Kemenpora sebesar Rp266.689.961.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi Rp16,98 triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.988.193.854.354 dan Rp11.627.039.378.875, mengalami kenaikan sebesar Rp5.361.154.475.479 atau 46,01 persen. Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

No	K/L	Jumlah	
		31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1	Kementerian Keuangan	10.908.912.579.401	5.698.022.525.534
2	Kementerian Pertanian	5.485.688.506.936	5.757.944.602.218
3	Kementerian Perhubungan	593.592.768.018	25.552.071.501
5	Kementerian PUPR	-	145.520.179.622
Jumlah*		**16.988.193.854.355**	**11.627.039.378.875**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Kementerian Keuangan

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.908.912.579.401 dan Rp5.698.022.525.534. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.908.912.579.401, terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.449.516.519. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019
Sisa Utang tahun 2019 yang belum dialokasikan pembayarannya di tahun 2019	2.006.562.525.742
Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran JBT Solar Tahun 2019	5.829.303.868.800
Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran JBT Minyak Tanah Tahun 2019	283.485.153.596
Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kg Tahun 2019	2.481.097.968.381
Jumlah	**10.600.449.516.519**

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp308.463.062.882. Utang Subsidi per 31 Desember 2019 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang Tahun 2018 sebesar Rp1.222.759.999.792 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp1.222.760.000.000 ditambah Utang subsidi Tahun 2018 yang merupakan tagihan Subsidi PPh DTP Tahun 2019 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran Tahun 2019 tidak mencukupi sebesar Rp308.463.062.882.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.485.688.506.936 dan Rp5.757.944.602.218, terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 merupakan Utang Jangka Panjang Subsidi kurang bayar TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta Kurang Bayar TA. 2017 *(Audited)*.

Jumlah total utang subsidi Pupuk (jangka pendek dan jangka panjang) per 31 Desember 2019 adalah Rp11.198.552.169.936, yang terdiri sebagai berikut.

a. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.469 merupakan sisa kurang bayar utang jangka panjang tahun 2017 pada PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.
b. Utang Subsidi Jangka Panjang stahun 2018 sebesar Rp5.712.863.662.942 merupakan kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.
c. Jumlah tagihan atas penyaluran pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp869.826.858.421 berdasarkan asersi hasil verifikasi KPA belanja subsidi pupuk tahun 2019.
d. Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi Pupuk berdasarkan BA Perhitungan Subsidi Pupuk TA 2019 pada Kementan PT. Pupuk Indonesia oleh BPK sebesar Rp4.570.780.709.297.

Pada tahun 2020 dianggarkan alokasi untuk pembayaran utang subsidi pupuk sebesar sebesar Rp5.712.863.663.000. Atas utang subsidi sebesar Rp11.198.552.169.936 tersebut, dilakukan reklasifikasi ke utang jangka pendek sebesar Rp5.712.863.663.000, yang dianggarkan sebagai alokasi untuk pembayaran utang subsidi pupuk pada tahun 2020. Sedangkan yang diklasifikasikan sebagai utang subsidi jangka panjang adalah sebesar Rp5.485.688.506.936.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp593.592.768.018 dan Rp25.552.071.501. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp593.592.768.018 adalah sebagai berikut.

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT KAI sebesar Rp257.884.464.629.
   1) Hasil verifikasi tim Ditjen Perkeretaapian atas pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2019 untuk tanggal 15 – 31 Desember 2019 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan PSO Perkeretaapian dengan nilai Rp106.082.118.194.
   2) Sisa dari utang subsidi yang belum mendapat alokasi untuk dibayar pada tahun 2019 sebesar Rp2.216.878.520 dari utang subsidi sebesar Rp110.501.878.520. Utang tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk kekurangan pembayaran pemerintah terhadap pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 34/AUDITAMAVII/PDT/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp108.276.981.441 dan pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 52p/S/IX-XX.2/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp2.224.897.079. Atas utang jangka panjang ini kemudian dikoreksi sebesar Rp108.285.000.000 yang merupakan jurnal koreksi laporan keuangan belanja subsidi (BA 999.07) Tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, sehingga tersisa utang jangka panjang sebesar Rp2.216.878.520.
   3) Utang Subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp108.285.000.000 merupakan hasil dari jurnal koreksi laporan keuangan belanja subsidi (BA 999.07) Tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, yang dialokasikan untuk membayar utang subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp110.501.878.520. Dari utang subsidi sebesar Rp110.501.878.520, terdapat reklasifikasi ke utang jangka panjang subsidi sebesar Rp2.216.878.520 yang merupakan sisa dari hasil jurnal koreksi sebesar Rp108.285.000.000.
   4) Utang Subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp41.300.467.195 merupakan hasil dari jurnal koreksi Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi PSO KAI berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO KAI TA 2019 pada PT. KAI oleh BPK.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT Pelni sebesar Rp335.708.303.388, yang terdiri atas:
   - Hasil verifikasi tim Ditjen Perhubungan Laut atas tagihan subsidi PSO PT. PELNI (Persero) yang disetujui untuk dibayarkan dari Bulan Oktober, November, sampai dengan tanggal 10 Bulan Desember 2019 sebesar Rp55.140.979.907;
   - Reklasifikasi dari Utang Subsidi Estimasi ke Utang Jangka Panjang Subsidi karena nilai kurang bayar telah diketahui berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO PELNI TA 2019 pada PT. PELNI oleh BPK sebesar Rp230.111.046.524;
   - Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi PSO PELNI berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO PELNI TA 2019 pada PT. PELNI oleh BPK sebesar Rp50.456.276.957

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp145.520.179.622.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp667.750.107.263.114 dan Rp714.334.793.186.942, mengalami penurunan sebesar Rp46.584.685.923.828 atau 6,52 persen. Penurunan utang di tahun 2019 disebabkan realisasi

Rp667,75 miliar

pembiayaan pinjaman luar negeri neto negatif, adanya pendapatan selisih kurs dari Pinjaman Luar Negeri dan reklasifikasi ke Bagian Lancar.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Utang Program	349.111.788.301.602	367.807.804.985.617
Utang Proyek	318.638.318.961.512	346.526.988.201.325
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	**667.750.107.263.114**	**714.334.793.186.942**

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 28.**

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp24,49 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp24.499.064.239 dan Rp25.374.379.633, mengalami penurunan sebesar Rp875.315.394 atau 3,45 persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2019. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh perubahan kurs pada tanggal pelaporan. *Promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency dan Common Fund for Commodities.* Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

Lembaga Keuangan Internasional	Mata Uang Asal		31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	15.777.885.218	16.436.195.658
Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	3.483.277.476	3.700.282.430
Jumlah*			**24.499.064.239**	**25.374.379.633**

**) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901/USD, Rp15.588,60/EUR*

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.

Promissory Note	Tanggal	Nilai
2 *(two) promissory note*	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 *(one) promissory note*	21 Juni 1973	355.340.803,50
1 *(one) promissory note*	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 *(one) promissory note*	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 *(one) promissory note*	30 Juni 2000	2.163.936.250
1 *(one) promissory note*	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		**5.237.901.544,95**

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas Rp5.127,31 triliun

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.719.504.656.514.660 atau 264,21 persen.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun

2019, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85 persen, yang terdiri dari 71,15 persen hak pihak lain dan 13,85 persen merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB, dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP).*

2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh KPPN Khusus Investasi) dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu:

- Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	26.983.305.461
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	10.411.100
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	43.515.205.145
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	6.109.400
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	23.295.107.958
E1045	Retur GAJI-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	3.677.600
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	8.652.242.476
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E9001	RR RPKBUNP GAJI BRI SYARIAH (1032474183)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	2.390.200
E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	450.769.785
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	744.000

E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.608.311.269
E8004	RR Reksus SBSN Di Perkeretaapian (0221401042)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	4.545.633.885
E8008	RR Reksus SBSN Di Binamarga (3314010423)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	6.296.313.209
E8011	RR Reksus SBSN LIPI (7914010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	148.216.000
E8012	RR Reksus SBSN Sumber Daya Air (7331410424)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	1.889.416.458
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	1.788.702.844.687
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.027.878.594.178
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	-
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	21
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	6
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92 persen) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(2)
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92 persen) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0004	Cadangan pembayaran *fee* konversi dan *collecting fee* proyek PIR/UPP (5 persen) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	3.995.678
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3 persen) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	8.500
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				**2.934.993.297.016**

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) per 31 Desember 2019 sebesar USD128.674.401,02 atau setara Rp1.788.702.848.579. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama tahun 2019

Tabel 13. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019 *(Audited)*		31 Desember 2018 *(Audited)*	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	**295,535,144.40**	**4.279.644,43**	**147,311,078.56**	**1.995.770,49**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya [a)]	3.567.006.612,57	50.468.419,08	3,851,928,508.73	55.176.556,27
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	-	-	288,238.17	4.020,92
3. Penerimaan lain-lain [b)]	14.143.159,70	201.253,79	19,252,126.97	280.813,85
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening [c)]	176.863,48	2.483,87	4,523,238.05	65.435,72
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit [d)]		2.809.769,30	-	3.700.077,44
Total Penerimaan	**3.581.326.635,75**	**53.481.926,04**	***3,875,992,111.92***	***59.226.904,20***
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	824.568.647,83	11.639.819,89	834,667,784.93	12.283.733,40
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	4.798.347,18	67.466,72	5,953,901.49	84.399,21
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNBP SDA Migas	349.230.000,00	4.927.495,56	346,634,340.24	5.040.756,57
• Pendapatan dari PNBP Migas lainnya [e)]	162.423.555,36	2.265.236,74	26,934.57	6.024,33
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	1.341.020.550,37	18.900.018,91	*1,187,682,961.23*	*17.414.913,51*
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. *Reimbursement* PPN ke Kontraktor	729.434.716,82	10.299.499,71	640,388,765.78	9.156.490,04
b. Pembayaran DMO *Fee* KKKS	763.346.322,11	10.818.078,09	964,633,949.37	13.855.279,36
c. Pembayaran *Underlifting* KKKS	913.083.747,36	12.915.011,11	930,226,604.81	13.322.469,03
d. Pembayaran *Fee* penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	-	-
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.405.864.786,29	34.032.588,91	*2,535,249,319.96*	*36.334.238,43*
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	-	-	288,238.17	4.020,92
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit [f)]	-	3.021.755,29	-	3.122.777,07
5. Retur/Pengembalian karena salah rekening	176.863,48	2.495,46	4,547,526.72	67.080,24
6. Pengeluaran Lainnya	1.125.179,00	16.009,05	-	-
Total Pengeluaran	**3.748.187.379,14**	**55.972.867,62**	***3,727,768,046.08***	***56.943.030,17***
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**(166.860.743,38)**	**(2.490.941.58)**	**148,224,065.84**	**2.283.874,03**
V. Saldo Akhir (I + IV) I) [g)]	**128.674.401,02**	**1.788.702,85**	**295,535,144.40**	**4.279.644,52**

Penjelasan:

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.
   - PNBP SDA Migas
   - Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3.550.279.655,87 atau setara Rp50.230.276.631.604
   - PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas
     Meliputi setoran atas Penerimaan dari Kegiatan *Non-Lifting,* Denda atas Keterlambatan Pembayaran, serta Keuntungan atas Selisih Transaksi Retur sebesar USD16.726.956,70 atau setara Rp238.142.449.075.

b) Penerimaan Lain-Lain
Pada penerimaan lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD14.143.159,70 atau setara Rp201.253.791.039 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening
Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Reimbursement* PPN sebesar USD176,860.71 atau setara Rp2.483.831.811 dan atas retur penyelesaian *Underlifting* KKKS sebesar USD2.77 atau setara Rp40.060

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit
Selisih kurs pembukuan kredit sebesar Rp2.809.769.299.756,25 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN
Merupakan pemindahbukuan atas Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang disetorkan ke rekening migas Nomor 600.000411980 sebesar yang terdiri atas dan pendapatan atas keuntungan selisih atas retur *reimbursement* PPN sebesar USD824.86 atau setara Rp11.799.622 dan pendapatan atas kegiatan *non lifting* sebesar USD162.422.730,50 atau setara Rp2.265.224.937.416. Keuntungan transaksi retur sebesar Rp11.799.622 diakibatkan perbedaan nilai kurs pada saat dana retur masuk ke Rekening Migas dengan kurs pada saat pemindahbukuan kembali atas pembayaran kewajiban PPN *Reimbursement.*

f) Selisih Kurs Pembukuan Debit
Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp3.021.755.287.151 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

g) Pengeluaran Lainnya
Merupakan pemindahbukuan atas salah setoran PPh Migas atas PT. Mandiri Madura Barat ke Rekening Migas sebesar USD1,125,179.00 atau setara Rp16.009.046.812.

h) Saldo Akhir
Dari total saldo akhir sebesar USD128.674.401,02 atau setara dengan Rp1.788.702.848.579 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901/USD.

3. <u>Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)</u>

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.027.878.594.169 dan Rp1.374.911.063.212. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) dan pembayaran penggantian bonus produksi terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

	URAIAN	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
I.	**Saldo Awal**	**1.374.911.063.212**	**1.709.479.552.436**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.251.334.080.206	2.558.331.571.462
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	2	1
	Total Penerimaan	**2.251.334.080.208**	**2.558.331.571.463**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi [a)]	361.728.617.338	308.404.779.734
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi [b)]	199.232.752.080	213.668.402.122
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum [c)]	142.158.316.231	118.179.994.471
	4. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN [d)]	1.895.246.863.593	2.252.646.884.360
	Total Pengeluaran	**2.598.366.549.242**	**2.892.900.060.687**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**(347.032.469.038)**	**(334.568.489.224)**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)** [d)]	**1.027.878.594.178**	**1.374.911.063.212**

Penjelasan:

a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2019 sebesar Rp361.728.617.338 dibayarkan dalam satu kali pembayaran.

b. Pembayaran kembali *(reimbursement)* PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp199.232.752.080 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2018 dan 2019 dengan perincian sebagai berikut.
   1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2018 sebesar Rp100.806.666.543
   2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2019 sebesar Rp98.426.085.537

c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp142.158.316.231 dengan rincian sebagai berikut.
   1) penggantian bonus produksi tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp57.118.371.643
   2) penggantian bonus produksi tahun 2017 sebesar Rp6.538.523.554
   3) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp57.719.869.456
   4) penggantian bonus produksi tahun 2019 sebesar Rp20.711.551.578

d. Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2019 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp1.895.246.863.593 terdiri dari:
   1) PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp165.836.288.377
   2) PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp841.971.735.422
   3) PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp394.317.656.208
   4) PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp493.121.183.586

e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2019 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	*Reimbursement* PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	141.145.889.829	38.763.299.639	179.909.189.468
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	274.824.575.917	5.302.027.589	280.126.603.506
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	234.641.396.882	2.954.415.357	237.595.812.239
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	317.651.164.246	3.212.472.428	320.863.636.674
5.	PT. Geo Dipa Energy (Persero)	3.500.000.000	5.883.352.280	9.383.352.280
Jumlah		**971.763.026.874**	56.115.567.293	1.027.878.167

4. Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Pusat telah melakukan koreksi nilai wajar Aset Tetap sebesar Rp4.113.213.336.254.225 berdasarkan hasil penilaian kembali sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah melaksanakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) selama Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 945.460 NUP, namun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian kembali BMN masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Selanjutnya, Pemerintah memperbaiki hasil penilaian BMN Tahun 2019 dengan prioritas nilai BMN lebih dari Rp5,00 miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2020. Hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2019 atas 195.599 NUP adalah sebesar Rp5.363.112.948.794.350, dengan nilai wajar sebelumnya sebesar Rp5.498.627.747.663.320. Perbaikan nilai wajar hasil penilaian kembali BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai Rp275.420.699.877.276 dan ditargetkan selesai pada Tahun 2020.

Rincian penjelasan atas kebijakan penilaian kembali BMN sebagai berikut:

Latar Belakang

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dipandang perlu melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya, sebagai pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Kebijakan ini diambil dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Paragraf 59 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah:
a. Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;
b. Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;
c. Membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN;
d. Mengidentifikasi BMN *idle*;
e. Meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN meliputi:
a. Penyediaan data awal oleh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB);
b. Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, yang dilakukan oleh KPB;
c. Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau pendapatan;
d. Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang dan KPB;
e. Koreksi data BMN pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh KPB;

f. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dan KPKNL;
g. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian;
h. Monitoring dan evaluasi;
i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang telah dilaksanakan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 sebanyak 945.460 NUP BMN telah selesai dilakukan penilaian kembali dengan nilai wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Berikut rincian Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.

Inventarisasi				Penilaian		
Ditemukan	Tdk Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Perubahan	Nilai Wajar
748.568	157.531	39.361	945.460	1.538.185.259.209.587	4.190.306.958.698.349	5.728.492.217.907.936

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Tahun 2018 BPK telah melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian kembali masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Kesimpulan BPK tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai.
2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara memadai.
3. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan dokumentasi penyusunan daftar biaya yang memadai dan perhitungan yang akurat.
4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP dengan nilai buku sebesar Rp98.021.918.260.129.
6. Penetapan masa manfaat baru belum menyeluruh terhadap BMN non tanah.
7. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN pada Kementerian/Lembaga meliputi: (1) ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, (2) perbedaan nilai wajar SIMAN dan LPK, (3) ketidakakuratan hasil penilaian, (4) barang tidak ditemukan belum ditindaklanjuti, dan (5) barang dalam sengketa belum selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut berdampak terhadap nilai hasil penilaian kembali senilai Rp1.365.267.483.759.910 yang tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 yang berisiko dikuasai pihak lain. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365.267.483.759.910 tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 berisiko dikuasai pihak lain.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memperbaiki hasil penilaian pada Tahun 2019 dengan prioritas nilai BMN lebih dari Rp5,00 Miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2020.

Tindak Lanjut PDTT

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019.

Menindaklanjuti temuan pemeriksaan atas pelaksanaan penilaian kembali BMN sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah menerapkan langkah perbaikan atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi yang disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan, yakni:

1. Mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN.
2. Menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.
3. Mengkoordinasikan dan memantau seluruh Kementerian/Lembaga dalam memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN.

Beberapa perbaikan yang dilakukan Pemerintah antara lain :

1. Perbaikan atas alur bisnis pelaksanaan inventarisasi,
2. Penyempunaan proses, kertas kerja, dan hasil penilaian sesuai standar penilaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai bahan penyusunan kajian terkait kebijakan penilaian.
3. Perbaikan Modelling dan Penetapan Perubahan Daftar Biaya 2017-2018
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan perbaikan Laporan Penilaian Kembali.

Selanjutnya, guna memberikan kualitas hasil Penilaian Kembali yang lebih baik, maka pengujian untuk dilakukannya perbaikan atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dilakukan secara menyeluruh, yakni meliputi seluruh Kementerian/Lembaga dan BMN objek Penilaian Kembali. Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu yang ada, maka untuk efektivitas dan keseragaman gerak, perbaikan dilaksanakan dengan membuat skala prioritas penyelesaian, sebagai berikut:

1. BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali pada Kementerian Keuangan;
2. BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali pada BPK;
3. BMN yang menjadi catatan dalam temuan pemeriksaan BPK;
4. BMN yang memiliki nilai signifikan terhadap LKPP; dan
5. BMN selain kriteria 1 sampai dengan 4 di atas.

Reviu dan Pengujian Terbatas Dalam Rangka Pemeriksaan Interim 2019

Atas pelaksanaan perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan Pemerintah selama tahun 2019, melalui Surat Anggota II BPK-RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu, perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP.

Atas hasil reviu APIP tersebut, maka Pemerintah dapat menyajikan hasil revaluasi BMN 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan memperhatikan:

a. Pengelola Barang & Pengguna Barang harus selesai menindaklanjuti seluruh hasil reviu APIP paling lambat akhir Januari 2020.
b. Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020.
c. BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP 2019 *(Audited).*

Penyajian Hasil Penilaian Kembali Dalam Laporan Keuangan

Sehubungan dengan catatan yang disampaikan BPK, Pemerintah telah melaporkan bahwa seluruh K/L telah menyampaikan progres tindak lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP K/L yang terdiri atas 1.563 CHR dengan total catatan sebanyak 37.105 NUP. Seluruh catatan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja bersama KPKNL dimana sebanyak 30.416 NUP telah ditindaklanjuti dalam hasil perbaikan penilaian kembali di tahun 2019 sedangkan sisanya sebanyak 6.689 NUP merupakan objek penyelesaian target tahun 2020 dan akan dilakukan perbaikan penilaian kembali di tahun 2020.

Terkait dengan penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga telah menyajikan koreksi hasil penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019, dan melakukan proses *take in* jurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal *take out* Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2019 *(Audited)* dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019 Pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.498,63 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	49.617	4.730.424.322.028.610	4.705.749.328.830.090	- 24.674.993.198.511	- 0,52%
2	Gedung dan Bangunan	113.163	188.407.059.414.563	172.571.322.642.624	- 15.835.736.771.939	- 8,41%
3	JJBA	32.819	579.796.366.220.147	484.792.297.321.634	- 95.004.068.898.513	- 16,39%
	TOTAL	**195.599**	**5.498.627.747.663.320**	**5.363.112.948.794.350**	**- 135.514.798.868.963**	**- 2,46%**

Sehingga perbaikan nilai wajar hasil penilaian BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai Rp275.420.699.877.276 dan ditargetkan selesai pada Tahun 2020.

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam LKPP Tahun 2019 *(Audited)* adalah sebesar Rp4.113.213.336.254.225, yang terdiri atas penilaian kembali BMN pada K/L sebesar Rp4.113.170.188.094.720 dan penilaian kembali BMN pada BUN sebesar Rp43.148.159.496. Adapun rincian koreksi hasil penilaian kembali BMN pada Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut.

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah Total
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	624.977.904.902	-	(76.871.190.390)	**548.106.714.512**
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	988.884.712.188	-	55.606.854.655	**1.044.491.566.843**
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	3.974.748.052.924	17.439.431.149	319.476.132.791	**4.311.663.616.864**
4	005	Mahkamah Agung	10.369.939.318.758	4.970.608.302.305	1.072.441.866.539	**16.412.989.487.602**
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	10.386.118.627.454	958.405.850.378	1.524.465.676.181	**12.868.990.154.013**
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	284.017.301.933.079	191.386.462.490.228	23.509.659.291.767	**498.913.423.715.074**
7	010	Kementerian Dalam Negeri	3.261.384.990.754	6.331.426.227.449	593.011.679.889	**10.185.822.898.092**
8	011	Kementerian Luar Negeri	4.069.727.618.263	28.021.235.545.644	(13.613.658.744)	**32.077.349.505.163**
9	012	Kementerian Pertahanan	316.558.034.198.414	892.303.072.222.373	(17.204.835.310.288)	**1.191.656.271.110.500**
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	26.151.326.861.179	8.991.100.021.950	9.316.490.947.829	**44.458.917.830.958**
11	015	Kementerian Keuangan	75.975.423.031.858	55.620.768.185	4.721.556.745.099	**80.752.600.545.142**
12	018	Kementerian Pertanian	35.692.171.191.744	35.623.555.757.474	(4.585.470.592.644)	**66.730.256.356.574**
13	019	Kementerian Perindustrian	6.348.830.247.561	-	367.081.083.651	**6.715.911.331.212**
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.960.707.092.313	8.838.532.172.771	(2.121.223.516.014)	**12.678.015.749.070**
15	022	Kementerian Perhubungan	95.294.552.201.124	188.475.944.055.617	(9.727.035.372.126)	**274.043.460.884.615**
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	14.070.501.991.192	1.855.415.324.262	(1.734.902.076.512)	**14.191.015.238.943**
17	024	Kementerian Kesehatan	47.525.260.398.944	4.312.630.082.028	7.068.752.214.320	**58.906.642.695.292**
18	025	Kementerian Agama	34.496.611.656.259	15.916.425.791.677	(163.710.997.720)	**50.249.326.450.216**

	19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	4.036.541.977.297	2.558.722.275.540	(69.923.978.319)	**6.525.340.274.518**
	20	027	Kementerian Sosial	15.250.735.202.085	9.792.648.947	160.483.374.076	**15.421.011.225.108**
	21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.797.425.734.801	2.576.059.033.662	346.634.734.932	**9.720.119.503.395**
	22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.900.206.737.097	6.928.733.329.845	3.117.903.054.311	**15.946.843.121.253**
	23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	419.589.654.846.767	681.903.726.845.185	228.985.634.814	**1.101.722.367.326.770**
	24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3.925.194.930	-	(1.101.149.480)	**2.824.045.450**
	25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.113.676.653	-	41.697.000	**10.155.373.653**
	26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.028.510.497	(12.762.000)	(118.834.000)	**3.896.914.497**
	27	040	Kementerian Pariwisata	4.961.824.030.567	705.523.439.209	56.869.923.193	**5.724.217.392.969**
	28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.160.300.520.883	-	149.738.942.000	**1.310.039.462.883**
	29	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	190.728.671.140.640	95.433.674.517.651	6.270.760.188.984	**292.433.105.847.275**
	30	044	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	2.148.147.757.953	-	80.253.283.166	**2.228.401.041.119**
	31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.768.486.506	-	58.354.203.000	**76.122.689.506**
	32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	29.163.448.394	-	5.291.283.000	**34.454.731.394**
	33	050	Badan Intelijen Negara	3.118.141.847.029	47.364.000	1.093.965.397.000	**4.212.154.608.029**
	34	051	Lembaga Sandi Negara	427.967.461.006	-	56.667.015.886	**484.634.476.892**
	35	054	Badan Pusat Statistik	2.258.094.135.860	53.308.366.883	41.195.827.490	**2.352.598.330.233**
	36	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1.219.620.544.166	-	122.390.105.000	**1.342.010.649.166**
	37	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	6.697.468.852.367	641.580.907.937	315.670.825.054	**7.654.720.585.358**
	38	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1.616.817.495.228	821.581.789	29.661.427.000	**1.647.300.504.017**
	39	059	Kementerian Komunikasi san Informatika	3.941.492.416.853	286.793.736.561	550.976.041.810	**4.779.262.195.224**
	40	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	117.491.450.450.151	26.678.752.686.677	4.782.792.410.776	**148.952.995.547.604**
	41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	940.693.740.673	1.034.834.700	118.352.126.640	**1.060.080.702.013**
	42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.413.481.362.919	-	(38.215.507.000)	**1.375.265.855.919**
	43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.740.850.077.799	-	(54.505.474.000)	**1.686.344.603.799**
	44	066	Badan Narkotika Nasional	15.270.378.803	(33.307.911.519)	7.998.919.170	**(10.038.613.546)**
	45	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	418.648.914.318	331.914.071.032	117.936.783.743	**868.499.769.093**

46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.930.796.673.380	2.112.284.000	46.940.755.511	**1.979.849.712.891**
47	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.372.746.739	-	(1.855.491.000)	**1.517.255.739**
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.314.761.788.826	450.286.101.916	(32.049.308.667)	**2.732.998.582.075**
49	076	Komisi Pemilihan Umum	514.998.567.601	21.841.722.337	(2.615.787.168)	**534.224.502.770**
50	077	Mahkamah Konstitusi	330.026.072.893	-	124.665.719.000	**454.691.791.893**
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	324.855.497.524	-	(86.366.088.000)	**238.489.409.524**
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	22.022.229.167.995	861.478.800.207	71.959.740.366	**22.955.667.708.568**
53	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12.269.929.358.482	5.744.519.000	(389.958.815.448)	**11.885.715.062.034**
54	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3.921.737.536.398	29.092.397.786	350.988.085.712	**4.301.818.019.896**
55	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.633.493.345.522	(464.776.137)	(206.356.687.215)	**1.426.671.882.170**
56	083	Badan Informasi Geospasial	164.334.306.637	-	(30.971.066.650)	**133.363.239.987**
57	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	68.178.945.244	36.630.170.375	(2.668.864.000)	**102.140.251.619**
58	086	Lembaga Administrasi Negara	3.601.088.568.028	-	(808.820.640.315)	**2.792.267.927.713**
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	716.819.995.387	-	7.791.113.631	**724.611.109.018**
60	088	Badan Kepegawaian Negara	2.260.525.926.684	71.080.273.873	8.796.504.965	**2.340.402.705.522**
61	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3.316.076.286.725	1.710.615.545	51.608.026.564	**3.369.394.928.834**
62	090	Kementerian Perdagangan	1.710.226.791.125	-	153.003.485.471	**1.863.230.276.596**
63	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	556.968.958.083	-	(166.218.094.726)	**390.750.863.357**
64	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.271.590.097.291	10.813.878.000	(36.725.809.000)	**1.245.678.166.291**
65	095	Dewan Perwakilan Daerah	79.483.912.660	6.406.021.000	23.134.562.000	**109.024.495.660**
66	100	Komisi Yudisial	211.749.326.321	-	45.604.486.000	**257.353.812.321**
67	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	56.400.219.741	-	(74.402.286.001)	**(18.002.066.260)**
68	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	200.851.012.057	10.220.083.100	1.455.150.337	**212.526.245.494**
69	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-	-	-
70	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	225.955.997.823	-	90.274.510.000	**316.230.507.823**
71	107	Badan SAR Nasional	682.485.406.377	20.555.729.593	7.643.691.091	**710.684.827.061**
72	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	146.848.939.999	-	22.307.924.000	**169.156.863.999**
73	110	Ombudsman Republik Indonesia	-	18.532.116.000	105.497.000	**18.637.613.000**

74	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	(383.558.841)	39.954.360.932	48.335.144.760	**87.905.946.851**
75	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	27.053.532.234.208	-	400.975.026.247	**27.454.507.260.455**
76	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	(47.599.972.648)	-	(20.143.909.893)	**(67.743.882.541)**
77	115	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	2.346.592.238	-	-	**2.346.592.238**
78	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	10.009.779.614.754	59.279.655.704	414.925.525.245	**10.483.984.795.703**
79	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	8.994.177.335.929	105.062.818.125	(364.392.802.398)	**8.734.847.351.656**
80	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	(65.402.686.170)	1.013.924.498.093	(11.128.156.451)	**937.393.655.472**
81	119	Badan Keamanan Laut	-	164.843.029	(22.298.178.000)	**(22.133.334.971)**
		TOTAL	**1.874.187.241.976.160**	**2.208.899.465.122.070**	**30.083.480.996.497**	**4.113.170.188.094.730**

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 32.**

5. <u>Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Terhadap Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara</u>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan. Selanjutnya diatur bahwa jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN. Dalam pembahasan mengenai *underlying asset* untuk penerbitan SBSN atau Sukuk Negara di dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tanggal 23 Mei 2016, DPR meminta kepada Pemerintah agar aset yang digunakan tidak bertambah terus jumlahnya, tetapi besar secara nilainya. Bertepatan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sejalan dengan ketentuan paragraf 59 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) mulai tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian kembali BMN merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyajian nilai wajar BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan tujuan untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini dalam LKPP serta membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN. Pemerintah melaksanakan kegiatan penilaian kembali di tahun 2017 dan 2018 pada 82 Kementerian/Lembaga terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air. Dalam rangka menilai dan memberikan kesimpulan atas kesesuaian inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau praktik berterima umum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas hasil Penilaian Kembali BMN tersebut. Simpulan utama dari hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tgl. 31 Desember 2018, dinyatakan bahwa dengan mempertimbangkan signifikansi yang ada, maka BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil Penilaian Kembali BMN.

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019. Selain itu, Pemerintah juga tidak menggunakan hasil penilaian kembali dalam penggunaan BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan SBSN. Berangkat dari semangat yang sama untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan keinginan yang kuat dalam melakukan perbaikan atas pengelolaan BMN, pada tahun 2019 Pemerintah Pusat melakukan perbaikan serta koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang telah dilakukan dengan berpegang pada rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah. Terhadap perbaikan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Pemerintah, selama tahun 2019, melalui Surat Anggota II BPK-RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu, perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP. Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah dapat menyajikan hasil revaluasi BMN 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa catatan dari BPK. Mengingat bahwa penyajian hasil penilaian kembali BMN baru mulai disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2019, maka hasil penilaian kembali tersebut pun belum digunakan dalam penyiapan *underlying asset* untuk penerbitan SBSN di tahun 2019.

6. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2019

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2019 yaitu sebanyak 6.787 bidang tanah.
b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan permohonan dari satuan kerja.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi dan pendataan bidang tanah pada aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) per 31 Desember 2019 sebanyak 99.793 bidang yang terdiri dari 46.725 bidang tanah belum bersertipikat dan 53.068 bidang tanah sudah bersertipikat. Dengan demikian, persentase bidang tanah yang belum bersertipikat per 31 Desember 2019 sebesar 46.82 persen dari jumlah bidang tanah yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP.

2. Jumlah bidang tanah BMN yang berhasil disertipikatkan selama tahun 2019 sebanyak 6.900 bidang dari target pensertipikatan sebanyak 6.787 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2020, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 sebanyak 15.365 bidang tanah dan telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan biaya pensertipikatannya pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2020. Kementerian ATR/BPN mengalokasikan biaya pensertipikatan BMN pada DIPA Kementerian ATR/BPN sebanyak 15.426 bidang tanah yang dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tahun 2020.
Sebagai dampak kebijakan *refocussing* APBN yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menangani permasalahan pandemi virus COVID-19 yang dialami dunia, Kementerian ATR/BPN bersiap untuk melakukan revisi anggaran yang dialokasikan dan rencana output dalam DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 menjadi 6.280 bidang tanah.

7. Aset KKKS

Saldo awal aset tanah eks KKKS tahun 2019 sebesar Rp22.365.774.965.995. Dari saldo awal tersebut, aset tanah dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan/dicatat di CaLK sebesar Rp12.588.189.592.379, sehingga saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2019 di Neraca setelah adanya mutasi tambah tahun 2019 sebesar Rp345.818.517.406 dan mutasi kurang tahun 2019 sebesar Rp53.419.818.735 menjadi sebesar Rp10.069.984.072.287.

Pengeluaran pencatatan aset sebesar Rp12.588.189.592.379 dari Neraca tersebut dikarenakan masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada delapan KKKS, yaitu:

1. JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi
2. PT Chevron Pacific Indonesia
3. PT Pertamina Hulu Energi Siak
4. PT Pertamina EP
5. Eks Chevron Indonesia Company East Kalimantan
6. Eks Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga LLC.
7. Eks Petroselat Ltd.
8. Eks PT Medco E&P Indonesia.

Aset tanah pada 6 (enam) KKKS yang pertama telah dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang, dan masih perlu ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara DJKN, PPBMN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan KKKS yang bersangkutan. Sedangkan aset tanah eks KKKS Petroselat Ltd. dan PT Medco E&P Indonesia masih perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang. Khusus untuk aset tanah KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, mengingat data hasil inventarisasi dan penilaian tahun 2009/2010 tidak bisa diperbandingkan dengan data saat ini yang telah diverifikasi oleh SKK Migas, perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang dengan menggunakan data yang baru.

Rekonsiliasi dan dokumen pendukung atas selisih luas tanah tersebut akan diselesaikan dan disajikan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2020, termasuk permasalahan aset tanah KKKS PT Pertamina EP seluas 3.486.590,54 m2 dengan nilai Rp64.690.609.791,20, aset tanah KKKS eks Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga LLC. seluas 854.094,68 m2 dengan nilai Rp5.998.325.884, dan aset tanah KKKS eks Orchard Energy West Belida Ltd. seluas 20.988,07 m2 dengan nilai sebesar Rp2.311.307.000.
Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan akan melakukan rekonsiliasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan KKKS yang bersangkutan untuk menyelesaikan koreksi selisih kurang catat dan lebih catat aset tahun 2019 sebesar Rp1.019.544.784.239 dan Rp79.603.307.421,25, serta melakukan verifikasi atas keseluruhan *Subsequent Expenditure* (SE) yang belum *free* dan *clear* ke dalam aset induk dan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020.

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019
Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2019, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP 31 Desember Tahun 2019, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2018	**887.647.529.217**
Mutasi Tambah:	
Aset belum di IP yang baru dilaporkan SKK Migas	7.612.047.900
Pembenahan Pencatatan Aset	12.588.189.592.379
Mutasi Kurang:	
Reklas dari Calk ke Neraca	(10.750.818.552)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**13.472.698.350.945**

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2018 *(Audited).*
2) Mutasi tambah sebesar Rp12.595.801.640.279 terdiri dari:
   a) Mutasi tambah sebesar Rp7.612.047.900 disebabkan terdapat 2 (dua) KKKS yang baru melaporkan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah. yaitu:
      - Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS EMP Malacca Strait S.A. kepada SKK Migas sebesar Rp165.149.900.
      - Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. kepada SKK Migas sebesar Rp579.505.747.
      - Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. kepada SKK Migas sebesar Rp6.867.392.253.
   b) Pengeluaran pencatatan aset sebesar Rp12.588.189.592.379 dari Neraca karena masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada delapan KKKS, yaitu:
      1) JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi
      2. PT Chevron Pacific Indonesia
      3. PT Pertamina Hulu Energi Siak
      4. PT Pertamina EP
      5. Eks Chevron Indonesia Company East Kalimantan
      6. Eks Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga LLC.
      7. Eks Petroselat Ltd.
      8. Eks PT Medco E&P Indonesia.
3) Mutasi kurang sebesar Rp10.750.818.552 disebabkan reklasifikasi aset dari Calk ke neraca pada 2 (dua) KKKS, yaitu:
   a) Reklasifikasi ke neraca hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD sebesar Rp893.816.364.
   b) Reklasifikasi ke neraca hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp9.857.002.187.
4) Terdapat BMN berupa tanah yang telah diserahterimakan dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan yang berdasarkan surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-166/KN.4/2020 tanggal 23 April 2020 yang belum tercatat dan masih dalam tindak lanjut kebijakan pengelolaannya, sejumlah 16 *line* (item) tanah seluas 20.988,07 m2 dengan nilai sebesar Rp2.311.307.000 pada Eks KKKS Orchad Energy (West Belida) sesuai dengan Berita Acara Nomor 0024.BA/92/SJA .4/2019 dan BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

b. Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan
   Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi *(plug and abandoned).*

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2019 dengan total nilai USD152,572,616.67. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Penambahan	Pengurangan	Nilai Sumur 31 Desember 2019 (USD)
17 KKKS	152,279,075.85	110,367,210.75	110,073,669.93	152,572,616.67

- Mutasi tambah sebesar USD110,367.210,75 berasal dari pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA dan alih serah dari KKKS Terminasi ke KKKS Alih kelola.
- Mutasi kurang sebesar USD110,073,669.93 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
92,439,232.43	13,787,361.97	12,460,062.40	93,766,532

- Mutasi tambah sebesar USD13,787,361.97 berasal dari pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.
- Mutasi kurang sebesar USD12,460,062.40 berasal dari adanya penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1,624,050,995.67	99,839,676.02	440,307,925.62	1,283,582,746.07

- Mutasi Tambah aset sebesar USD99,839,676.02 berasal dari :

  1. Penambahan *Subsequent Expenditure* yang dilaporkan oleh SKK Migas serta reklasifikasi aset berupa *Subsequent Expenditure* pada KKKS PHE WMO, PHE ONWJ, dan JOB PJOK dari Neraca ke CaLK sebesar USD17,574,461.41 untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan rincian sebagai berikut:
     - PHE WMO 4 *Line Item* sebesar USD500,404 atau Rp758.806.058
     - PHE ONWJ 52 *Line Item* sebesar USD15,298,449.41 atau Rp99.852.449.649
     - JOB PJOK 76 *Line Item* sebesar USD1,775,608 atau Rp6.709.457.900
  2. Penambahan aset *Subsequent Expenditure* sebesar USD82,265,214.61 dikarenakan pelaporan penambahan *Subsequent Expenditure* baru dari SKK Migas dan koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset.

- Mutasi Kurang aset sebesar USD440,307,925.62 berasal dari penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.
- *Subsequence Expenditure* akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS. yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2019.
Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2019 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir 31 Desember 2019 (USD)
5,783,277,283.40	2,079,946,276,70	1,951,699,254.60	5,911,524,305.50

- Mutasi Tambah aset sebesar USD2,079,946,276,70 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD1,951,699,254.60 berasal dari Penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) Aset dalam proses penghapusan
Terdapat aset yang sudah terjual. namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir per 31 Desember 2019 (USD)
119,053,072.79	48,169,546.68	15,063,161.71	152,159,457.76

- Mutasi Tambah aset sebesar USD48,169,546.68 merupakan reklasifikasi asset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada tahun 2019 namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD15,063,161.71 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Perbedaan unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN tahun berikutnya
Terdapat koreksi selisih *line* yang dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 senilai USD520,977,505.48 terdiri dari koreksi *line* pada KKKS BP Tangguh LNG senilai USD516,808,859.32 dan Eks KKKS Total EP Mahakam senilai USD4,168,646.16 yang akan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK RI selanjutnya.

7) Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca
Jumlah aset KKKS Terminasi yg di *off-balance-sheet* kan sebesar nihil disebabkan direklas ke neraca sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan 2018 *Audited* (USD)	Mutasi Tambah/ Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2019 (USD)
11 KKKS	2.711.980.65	(2.711.980.65)	0

c. Aset Harta Benda Inventaris

Nilai Perolehan 2018 *Audited* (USD)	Mutasi Tambah(USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2019 (USD)
4,817,541.40	1,443,563.77	1,695,525.68	4,565,579.49

- Mutasi tambah aset sebesar USD1,443,563.77 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi kurang aset sebesar USD1,695,525.68 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA

8. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.

b. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.

c. Kementerian Luar Negeri, berupa Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gedung Pancasila. Aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
   - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.294,80 meter linier.
   - Poster sebanyak 336 lembar
   - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 129.616 lembar.
   - Arsip foto sebanyak 3.461.628 lembar
   - Arsip Film sebanyak 59.035 reel.
   - Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.
   - Arsip Video sebanyak 25.347 kaset.
   - Arsip Rekaman Suara sebanyak 51.536 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*.
   - Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.336 keping.
   - Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
   - Arsip *Flashdisk* sebanyak 1 keping.
   - Arsip elektronik sebanyak 350 *terrabyte*.

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Rafles, Tugu J.J. Smith, Tugu Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LIPI.

f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 960.307 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
   - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb);
   - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.

i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.

j. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
   - Candi/ tugu peringatan/ prasasti sebanyak 15unit;
   - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit; dan
   - Laporan/ bahan perpustakaan sebanyak 9 buah.

9. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 79 Unit Badan Lainnya dimana selain 72 UBL, terdapat penambahan 5 UBL yaitu:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Otoritas Nasional Senjata Kimia
3. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
5. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Apabila dilihat dari kategorinya, pada Laporan Keuangan Tahun 2019 *(Audited)* ini terdapat 79 UBL, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 67 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.
3. UBL Satker sekaligus Bukan Satker sebanyak 2 UBL, yaitu SKK Migas dan OJK

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
   Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
   Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.
3. Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)
   Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)
   Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
   Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa tugasnya dan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
   Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
7. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
   Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.
8. Otorita Asahan
   Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan sampai dengan bulan September tahun 2019.
9. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
   Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana
10. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
    Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum mendapatkan alokasi Dana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2019 *(Audited)*, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
7. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 29.**

10. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan

d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2019 sebanyak 34 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 10 aset diselesaikan sebagian status hukumnya. Sampai dengan akhir Tahun 2019, dari total ABMA/T sebanyak 1.015 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015, sebanyak 504 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 511 aset yang belum diselesaikan dengan tuntas yang terdiri dari 65 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 446 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No	Data ABMA/T	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Kompensasi	Nilai Pasar Aset	Besaran Kompensasi	Status
1	ABMA/T SD, SMP, SMA Gajah Mada (dh. SD/SMP Gajah Mada) Binjai Sumatera Utara	Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.6/2017 tanggal 3 April 2017	Rp1.655.058.000	Rp827.529.000	Dalam proses penetapan keputusan pelepasan oleh Direktur Jenderal
2	TK Aisyiyah Busthanul Athfal I Kota Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) di Jalan Diponegoro Nomor 33 Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Menteri Keuangan Nomor S-850/MK.6/2019 tanggal 11 Desember 2019	Rp1.012.130.000	Rp506.065.000	Dalam Proses Penerbitan SKL

3	Toko Yusuf dan Nyai Laundry (d.h Toko Swaka Prima Photocopy d.h SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Surat Menteri Keuangan Nomor S-750/MK.6/2019 tanggal 18 Oktober 2019	Rp71.576.000	Rp71.576.000	Dalam proses penetapan keputusan pelepasan oleh Direktur Jenderal
4	Yayasan Pendidikan Angkatan 45	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019	Rp4.144.299.000	Rp2.072.149.500	Belum dilunasi
5	Ruko IX (Gudang Aneka Makmur) (d.h Yayasan Pendidikan Gita Kirtti (GIKI))	Surat Menteri Keuangan Nomor S-519/MK.6/2019 tanggal 30 Juli 2019	Rp695.811.600	Rp695.811.600	Dalam proses penetapan keputusan pelepasan oleh Direktur Jenderal
6	SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah Kota Surabaya Jawa Timur	Surat Menteri Keuangan Nomor S-638/MK.6/2019 tanggal 6 September 2019	Rp41.324.629.500	Rp41.324.629.500	Belum dilunasi
7	Ruko Milik PT Kelapa Cengkir Raya (dh. Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI))	Surat Menteri Keuangan Nomor S-813/MK.6/2019 tanggal 27 November 2019	Rp629.455.200	Rp629.455.200	Belum dilunasi
8	Rumah Tinggal Puji Harjanto (dh. Sekolah Luas Biasa Yakut) Kabupaten Banyumas	Surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.6/2019 tanggal 31 Desember 2019	Rp224.171.000	Rp224.171.000	Belum dilunasi

11. Aset Kredit Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB).Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB.SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN.Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJPN

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	2.722.917.923,00
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	28.492.439.803.568,90

3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	4.620.479.746.508,38
	Jumlah	**33.115.642.468.000,30**

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

Daftar PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Bank Centris (BBKU), PT	897.678.554.101,21
2	Bank Aspac (BBKU), PT	3.579.412.035.913,11
3	Bank Orient (BBKU), PT	143.389.156.494,06
	Jumlah	**4.620.479.746.508,38**

12. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.069.231.521. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 156 unit aset senilai Rp 59.022.012.099.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN TA 2015

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.167
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117

Sampai dengan Periode Tahun 2019 belum dilaksanakan kegiatan penelusuran atas Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri, sehingga saldo Aset Properti eks BPPN yang masih perlu ditelusuri adalah sebanyak 272 aset senilai Rp85.328.090.117. Terdapat aset HTBI sejumlah 67 unit yang belum dapat dicatat dalam neraca karena belum memiliki kelengkapan dokumen.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum. Rincian aset eks BPPN yang berperkara di lembaga peradilan sampai dengan per 31 Desember 2019 disajikan di **Lampiran 25H.**

13. Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI

Aset Lainnya berupa Aset Property Eks BPPN dan Eks PPA berjumlah sebanyak 4.289 aset, terdiri dari kuadran I sebanyak 1.371 aset, Kuadran II sebanyak 1.367 aset, Kuadran III sebanyak 253 aset, dan Kuadran IV sebanyak 1.298 Aset. Kementerian Keuangan telah melaksanakan inventarisasi Aset Properti dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemetaan Aset Properti eks BPPN
   a. Terdapat 178 unit aset senilai Rp561.050.571.581 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran I);
   b. Terdapat 1.072 unit aset senilai Rp1.019.550.453.562, yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran II);
   c. Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran III);
   d. Terdapat 706 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran IV).

2. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
   a. Terdapat 1.193 unit aset senilai Rp3.177.853.998.305 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran I);
   b. Terdapat 295 unit aset senilai Rp814.142.915.844 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran II);
   c. Terdapat 31 unit aset senilai Rp701.654.125.452 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkpai dengan dokumen peralihan (Kuadran III);
   d. Terdapat 592 unit aset senilai Rp1.921.938.517.404 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran IV).

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah:

1. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya dan dikuasai berjumlah 1.996 aset;
2. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 857 aset;
3. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 2.293 aset;
4. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 737 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan pada 348 aset telah pula dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama.

Dari 1.298 aset properti yang belum tercatat di Neraca, sebanyak 592 aset telah dititipkan pada Kanwil DJKN untuk dilakukan pemeliharaan dan pengamanan, sedang 706 aset lainnya belum diketahui lokasinya. Berdasarkan laporan pemeliharaan dan pengamanan dari Kanwil DJKN, 292 aset yang dititipkan dikuasai oleh pihak ketiga (eks debitur atau pihak lain). Untuk melakukan penelusuran terhadap kelompok aset ini, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan desa/kelurahan dan BPN setempat.

Pemetaan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks PPA masih berdasarkan data rekapitulasi aset property yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan/peralihan dan penguasaan aset property tersebut pada tahun 2020 sebagai dasar penyajian aset property Eks BPPN dan Eks PPA tersebut pada Laporan Keuangan tahun 2020.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan akan melakukan pemetaan atas Jaminan Aset Kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui kejaksaan agung paling lambat Tahun 2022.

14. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sejak tahun 2015 hingga 2019, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 48 persetujuan, dengan aset sebanyak 44 lokasi dengan total PNBP sebesar Rp30.038.297.000. Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25C.**

15. Penggunaan Aset Properti Eks PPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga 2019, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 208 aset. Rincian atas penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25D.**

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang, dan Kab. Gowa dan satu aset telah laku dilelang pada tahun 2018. Rincian atas rencana penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25E.**

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25F.**

16. Pengungkapan Penting Terkait Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Tanggal 17 Juni 2016
   Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola

Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).

2. Tanggal 18 Januari 2017
   Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.
3. Tanggal 22 September 2017
   Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).
4. Tanggal 27 Desember 2018
   Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.
5. Tanggal 18 Desember 2019
   Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.
   Terkait daftar aset properti yang diserahkelolakan kepada LMAN sebagaimana tersebut di atas diuraikan rinci dalam **Lampiran 25G.**

17. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019, kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

a. karakteristik kewajiban kontinjensi;
b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
c. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, IPSAS 19-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets paragraph 100 juga menyatakan bahwa *"Unless the possibility of any outflow in settlement is remote, an entity should disclose for each class of contingent liability at the reporting date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable:*

a. *An estimate of its financial effect, measured under paragraphs 44 to 62;*
b. *An indication of the uncertainties relating to the amount or timing of any outflow; and*
   The possibility of any reimbursement."

Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan

bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan:

1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
2) percepatan penyediaan air minum;
3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera;
6) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
7) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan
9) Penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber *(risk factor)* dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber *(risk factor)* dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.

Kemudian melalui Perpres Nomor 58/2017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian /Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya *(default)*. Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain :

1. Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana;
2. Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2019 tidak dialokasikan dalam APBN TA 2019, mengingat terdapat kebutuhan fiskal pada Investasi Pemerintah lainnya. Namun untuk mengantisipasi pembayaran kewajiban penjaminan yang terjadi pada tahun anggaran 2019, Pemerintah akan menggunakan dana anggaran kewajiban penjaminan yang terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.

Pada tahun 2019, terdapat penerbitan 2 (dua) surat penjaminan baru sebagai berikut :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-260/MK.08/2019 tanggal 1 April 2019 atas penjaminan program percepatan infrastruktur ketenagalistrikan (35 GW) untuk transmisi dan gardu induk dengan nilai pinjaman sebesar Rp4.506.787.490.000; dan
2. *Guarantee Agreement* antara Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan KfW, Frankfurt tanggal 5 September 2019 atas penjaminan program pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dhi. KfW, Frankfurt kepada BUMN dhi. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan nilai pinjaman sebesar EUR294,700,000.

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terdapat gagal bayar *(default)* pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Sampai dengan semester II tahun 2019 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 84 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp496,51 triliun (USD21,50 miliar, Rp193,01 triliun dan EURO, 29 miliar) serta akumulasi posisi *outstanding* kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir semester II tahun 2019 adalah sebesar ekuivalen Rp231,99 triliun (USD13,16 miliar dan Rp49,03 triliun).

Adapun dengan rincian portofolio kewajiban penjaminan per program sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
						Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	36	10 s.d. 15	USD 3.96 IDR 40,891.93	IDR 95,922.09	USD 1.30 IDR 4,685.46	IDR 22,788.87
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	11	6 s.d. 13	IDR 328.16	IDR 328.16	IDR 98.08	IDR 98.08
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	6	15 s.d. 35	EUR 0.29 USD 2.28	IDR 36,266.01	EUR 0.00 USD 1.58	IDR 22,007.10
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan dan Wali Amanat	9	5 s.d. 25	IDR 54,943.75	IDR 54,943.75	IDR 32,338.60	IDR 32,338.60
5.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	10	15 s.d. 20	USD 5.46	IDR 75,919.11	USD 3.77	IDR 52,363.95
6.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15 s.d. 21	USD 3.20 IDR 68,536.14	IDR 113,019.35	USD 3.19 IDR 4,461.51	IDR 48,787.88
7.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5 s.d. 9	IDR 4,612.31	IDR 4,612.31	IDR 3,026.97	IDR 3,026.97
8.	Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15 s.d. 18	IDR 19,250.00	IDR 19,250.00	IDR 3,098.71	IDR 3,098.71
9.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	1	10 s.d. 10	IDR 4,506.79	IDR 96,253.42	IDR 1,318.08	IDR 47,476.78
			Pengembang Listrik Swasta	2	15 s.d. 20	USD 6.60		USD 3.32	
Total				**84**		**USD 21.50** **EUR 0.29** **IDR 193,069.07**	**IDR 496,514.21**	**USD 13.16** **EUR 0.00** **IDR 49,027.41**	**IDR 231,986.95**
Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2019 (IDR/USD1)							*13,901.01*		*13,901.01*
					(IDR/EUR1)		*15,588.60*		*15,588.60*

Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2018–2021 sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2021.

Penggunaan BMP 2018 - 2021 hingga akhir Triwulan IV 2019 telah direalisasikan sebesar 0,57% terhadap PDB 2021 atau sebesar IDR 112,2 Triliun. Realisasi dari BMP adalah untuk penjaminan Proyek LRT Jabodebek, Proyek KPBU jalan tol ruas Japek II Selatan dan ruas Probowangi, Proyek jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas Pekan Baru - Dumai dan ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung, dan Pinjaman Langsung BUMN kepada LKI untuk Proyek Mandalika dan proyek *Hydropower* serta Pinjaman Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Transmisi dan Gardu Induk.

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan.
Untuk mencegah terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan :

a. Pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.
b. Terhadap proyek jaminan Pemerintah yang berpotensi ter-klaim, Pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah mitigasi antara lain :

1. Proyek LRT Jabodebek
   - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT. KAI, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI,
   - Melaksanakan diseminiasi Risk Mitigation Plan (RMP) proyek LRT Jabodebek denga mengundang seluruh stakeholder terkait,
   - Mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk LRT Jabodebek dan mempercepat penyelesaian permasalahan penetapan trase jalur LRT Jabodebek dengan Pemprov DKI Jakarta,
   - Mendorong PT KAI untuk memulai proses negosiasi *term and condition* pinjaman sindikasi perbankan dan meminta segera menyampaikan permohonan perubahan lingkup penjaminan jika diperlukan.
2. Proyek Jalan Tol pada Skema KPBU
   - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT PII dan Kementerian PUPR, untuk mencapai target penyerahan tanah sesuai dalam Berita Acara Penyerahan Tanah,
   - Koordinasi dengan pihak terkait yaitu PT PII dan Kementerian PUPR terkait potensi terjadinya klaim/kompensasi tunai karena keterlambatan pengadaan tanah,
   - Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran terkait mekanisme penganggaran alokasi pembayaran klaim/kompensasi tunai oleh Kementerian PUPR sebagai PJPK,
   - Mengupayakan Kementerian PUPR selaku PJPK dapat melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan pembayaran apabila terjadi klaim/kompensasi tunai dengan melakukan optimalisasi anggaran,
   - Koordinasi dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – DJPB terkait ketersediaan akun/mata anggaran belanja untuk transaksi kewajiban pembayaran klaim/kompensasi tunai dan pengembalian piutang regres.

Risiko fiskal yang timbul pada penjaminan Pemerintah atas program percepatan pembangunan proyek infrastruktur, sebagai berikut:

a. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program* | FTP) I
   Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh pemerintah *(full credit guarantee)* terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero). Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara.

b. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/ FTP) II

   Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah yang akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek *Independent Power Producer* (IPP) terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

c. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

   Adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan penjaminan atas pelaksanaan program 35.000 MW memunculkan risiko fiskal dalam bentuk meningkatnya eksposur kewajiban kontinjensi pemerintah seiring adanya penambahan jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha atas proyek dalam program 35.000 MW yang dijamin. Adanya sebagian proyek program 35.000 MW yang telah berjalan yang pendanaannya tanpa jaminan pemerintah menurunkan eksposur risiko fiskal atas jaminan pemerintah atas program 35.000 MW. Sebagai upaya untuk menjaga risiko fiskal atas kebutuhan penjaminan pada program 35.000 MW, Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk mencari pendanaan investasi dengan biaya yang rendah dan terus

meningkatkan efisiensi perusahaan untuk menjaga kemampuan bayar PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban operasi kepada *supplier* dan kewajiban pembayaran cicilan pinjaman kepada *lender*. Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan agar pembayaran subsidi listrik dilakukan secara tepat waktu sehingga likuiditas PT PLN (Persero) terus terjaga.

d. Percepatan Penyediaan Air Minum

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water*/NRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

e. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek KPBU. Keterlibatan pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontinjensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

f. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat. Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hutama Karya, yang merupakan bagian ekuitas dari proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.
Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah *(credit guarantee)* ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (default), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

g. Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan hasil, baik melalui *results based loan* ADB maupun *program for result World Bank* merupakan terobosan dan memberikan fleksibilitas pemanfaatan pinjaman dimana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem *lender*, tetapi menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan PT PLN (Persero). Atas pinjaman yang dikucurkan oleh LKI selama periode 2016–2021, PT PLN (Persero) baru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif kecil, dengan demikian eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program ini masih sangat kecil.

h. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Risiko yang mungkin timbul dalam penugasan pembiayaan infrastruktur daerah antara lain risiko gagal bayar, risiko keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, dan risiko tidak tersedianya layanan umum atas infrastruktur yang telah dibangun. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko gagal bayar pinjaman daerah yaitu adanya perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di daerah sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya alokasi pembayaran pinjaman daerah di dalam APBD/P. Sedangkan terkait dengan risiko keterlambatan proyek lebih disebabkan oleh faktor teknis seperti adanya perubahan desain proyek.

i. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah *(credit guarantee)* ini terjadi ketika PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu *(default)*, sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan yang tidak terserap dapat dicairkan ke rekening dana cadangan penjaminan untuk menghindari pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan dana cadangan penjaminan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajibannya kepada *lender/investor* dan melakukan reviu atas risk mitigation plan yang disusun oleh pihak terjamin. Sedangkan dari sisi pemantauan terhadap perkembangan proyek, ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin itu sendiri, dengan beroperasinya proyek, dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk penjaminan pemerintah pada proyek KPBU, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mitigasi risiko terhadap kewajiban kontinjensi, yaitu pendirian BUPI dan pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN, serta pembentukan dana cadangan kewajiban penjaminan. Pemerintah telah mendirikan BUPI yaitu PT PII (Persero) pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) berperan sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu pelaksana/*single window policy* di mana seluruh rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII (Persero) juga berperan sebagai ring fencing terhadap APBN di mana pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara Penjaminan BUPI sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Adapun mitigasi risiko atas pelaksanaan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT SMI (Persero) adalah sebagai berikut:

a. Risiko Gagal Bayar

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan sejak tahap penyusunan RAPBD yaitu memastikan Pemda yang mempunyai kewajiban pembayaran pinjaman daerah telah mengalokasikan kewajibannya dalam rancangan APBD. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI (Persero) telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemantauan rancangan APBD/APBDP. Dalam hal terjadi risiko gagal bayar pinjaman daerah, Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan pemerintah daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah. Instrumen tersebut menggunakan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah

sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dan atas penggunaan dana jaminan dimaksud, akan dilakukan penggantian melalui pemotongan DAU dan/atau DBH (intercept) kepada daerah yang mempunyai tunggakan kepada PT SMI (Persero).

b. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek Infrastruktur

Untuk meminimalkan kemungkinan adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur sesuai waktu yang telah dijadwalkan, debitur (Pemda) wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada PT SMI (Persero) mengenai perkembangan pembangunan proyek infrastruktur. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur, PT SMI (Persero) akan melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan.

c. Risiko Tidak Tersedianya Layanan Umum atas Infrastruktur yang Telah Dibangun

Infrastruktur yang telah selesai dibangun seharusnya dapat memberikan fasilitas layanan umum kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat risiko atas infrastruktur yang telah dibangun tersebut yaitu tidak tersedianya layanan umum kepada masyarakat yang disebabkan antara lain belum tersedianya fasilitas penunjang seperti akses jalan menuju infrastruktur dimaksud dan kelengkapan alat kesehatan pada rumah sakit. Pendanaan fasilitas penunjang bersumber dari APBD masing-masing, sehingga perlu dilakukan monitoring untuk memastikan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait pengadaan fasilitas penunjang dimaksud.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.

a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
b. Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70 persen dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya *(payment default)*. Dari 70 persen jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4).
d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.

g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
h. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.8/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir Semester II Tahun 2019, tidak terdapat gagal bayar *(default)* pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 35 ayat (3) UU nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019 dan Pasal 4 ayat (3) PMK nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan pada APBN tahun berjalan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia yang bersifat akumulatif untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Namun dengan tidak adanya alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan pada APBN tahun anggaran 2019 maka tidak terjadi pemindahbukuan pada masing-masing rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah hingga terjadinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada akhir 2018 adalah sebesar Rp4.245.466.000.000 dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

18. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) KKKS

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 (enam puluh) Wilayah Kerja dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanjian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki rekening ASR di Bank Mandiri dan BNI, dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank Mandiri dan BRI.

Disajikan dalam dolar Amerika Serikat

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Bank & Deposito *Abandonment & Site Restoration*	1,416,917,639.76	1,256,703,350.41
Jasa Giro & Bunga Deposito *Abandonment & Site Restoration*	(58,346,113.61)	(36,403,800.17)
Saldo Bank & Deposito *Abandonment & Site Restoration* – Neto	1,361,571,526.15	1,220,299,550.24
Tagihan *Abandonment & Site Restoration* Yang Belum Dibayarkan	24,244,471.05	25,314,096.77
Kewajiban *Abandonment & Site Restoration*	1,382,815,997.20	1,245,613,647.01

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2018 sebesar USD205,244,474.91.

Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD1,110,716,611.47. Nilai tersebut terdiri dari saldo penerimaan pembayaran dari KKKS sebesar USD1,084,526,614.96 dan kumulasi penghasilan jasa giro (setelah pajak) sebesar USD26,189,996.51. Per 31 Desember 2017 terdapat nilai tagihan ASR yang belum dibayarkan sebesar USD14,995,680.95. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban atas kegiatan ASR per 31 Desember 2017 sebesar USD1,099,522,295.91.

19. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

a. Pemanfaatan BMN oleh Pertamina C.Q PT Pertamina EP

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No: 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 hal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola *"fixed payment and fixed term"*, dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan *(operating and maintenance)* menjadi unsur *cost recovery.*

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan biaya sewa sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp2.227.577.829.636,98.

Selanjutnya telah dilakukan rekonsiliasi BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan hasil bahwa aset sebanyak 42.989 unit terdiri dari Tanah, Sumur, Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya dengan nilai Rp 16,2 triliun. Adapun untuk aset berupa Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya sebanyak 34.120 unit dengan nilai Rp 8,4 Triliun. Berdasarkan hasil cek fisik oleh PT Pertamina EP, aset Berupa Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya yang dipergunakan sebanyak 20.902 unit dengan nilai Rp6,6 triliun. Sehingga selisih aset yang perlu diklarifikasi lebih lanjut sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp 1,79 trilun. Atas aset sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp 1,79 triliun, telah dilakukan pemetaan aset secara keseluruhan.

Untuk Saldo Piutang PNBP yang masih terdapat di Neraca, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Direktorat APK DJPb mengenai perlakuan akuntansi atas saldo eksisting Piutang PNBP dalam Neraca terkait perbedaan dasar perhitungan nilai sewa aset eks Pertamina periode 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2016 dengan periode selanjutnya, dan disetujui untuk tetap menyajikan di neraca sampai dengan tindak lanjut hasil pemetaan selesai dilaksanakan. Adapun koreksi atas saldo Piutang akan dilakukan setelah proses pemetaan aset selesai dan dilakukan adendum perjanjian sewa.

b. Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Aset Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan
2) Membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP
2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor : PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-S0.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;
   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:
   a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.
   b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15 persen (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57 persen jika dihitung dari nilai aset.
   c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.
   d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.
2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.
   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:
   a) Telah ditandatangani Perjanjian Sewa nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.
   b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-S0 tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.

   Selain itu, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib". BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.
   Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2018.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2019 adalah:

a) Telah dilakukan pemetaan aset yang berada di wilayah Pangkalan Susu, Pendopo, dan Prabumulih,
b) Telah dilakukan pengungkapan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2018 pada Laporan Keuangan Tahun 2019.
c) Telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap aset yang berada di wilayah Cirebon.

c. Kebijakan Akuntansi Atas Pengelolaan Aset Eks Pertamina Oleh LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkelolakan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahkelolaan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

20. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan Keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKIP).

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2017

Sesuai dengan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan asset tetap UI yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan UI disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan PTNBH UI tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang pada intinya Aset Tetap sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap karena aset aset tersebut telah selesai pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2019 *(Audited)* termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas Indonesia. Untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada LKBUN, perlu dilakukan eliminasi di level LKBUN karena terdapat sejumlah aset hibah yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan. Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Rincian aset adalah sebagai berikut :

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah	Dokumen Pendukung
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	5.347.889.590	**Dokumen pendukung pencatatan :** *Acceptance Certificate* No. 10696.1/UN2.PPK/LOG.01/2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai kontrak 104.836.048.971

							Dokumen pendukung Hibah : Naskah Perjanjian Hibah Nomor T/150/B.B1/PL.02.02/2019 dan Nomor 815/PKS/R/UI/2019 antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Indonesia tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Selesai**
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	21.598.007.200	0-	21.598.007.200	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3621/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Sedang proses**
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	49.830.000.000	0	49.830.000.000	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

							Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3621/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Sedang proses**
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	3.837.744.000	0	3.837.744.000	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3622/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Sedang proses**
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	24.368.312.958	0	24.368.312.958	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3621/A.A3/PL.0

							0.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Sedang proses**
6	Peralatan Medical Research Laboratory *Equipment* MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	38.228.343.871	0	38.228.343.871	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3622/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Sedang proses**
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting *Equipment* MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	16.830.777.445	0	16.830.777.445	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3622/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia

							Progres penyelesaian : Sedang proses
8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor B/3623/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN berupa gedung dan bangunan kepada Universitas Indonesia **Progres penyelesaian : Sedang proses**
9	Gedung Asrama Blok H1	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.545.400.000	0	16.545.400.000	0	**Dokumen pendukung pencatatan :** Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0311/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016 **Dokumen pendukung Hibah :** Surat Nomor S-409/MK.6/2019 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Yayasan **Progres penyelesaian : Sedang proses**
10	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	0	37.480.500.000	Rp18.363.932.684	**Dokumen pendukung pencatatan :** Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat

							Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0312/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016 **Dokumen pendukung Hibah :** Naskah Perjanjian Hibah Nomor 606/BA/DC/2019 dan Nomor 763/PKS/R/UI/2019 antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Universitas Indonesia. **Progres penyelesaian : SELESAI**
11	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	0	289.060.000	0	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0321/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
		Total	566.548.360.244	132.785.444.381	433.762.915.863	23.711.822.274	

Dari 11 Aset yang dihibahkan Pemerintah kepada UI pada tahun 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp566.548.360.244, pada tahun 2019 telah selesai diterbitkan BAST Hibah BMN pada 3 kelompok aset dengan nilai Rp23.711.822.274 (poin 1, 10, dan 11). BAST Hibah BMN menjadi dasar penghapusan BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Nilai yang telah dihibahkan dari Pemerintah sebesar Rp23.711.822.274 dari total nilai Aset BMN yang dihibahkan ke UI sebesar Rp433.762.915.863. Sehingga nilai outstanding BMN yang dihibahkan ke UI namun masih dicatat oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp410.051.093.589.

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2019

Pada tahun 2019, UI mendapatkan aset hibah dari Kementerian Ristekdikti berupa Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berikut sarana dan prasarananya dengan nilai hibah sebesar Rp1.082.715.656.970. Aset tersebut telah dicatat sebagai aset Tetap UI mengacu berdasarkan dokumen hibah dan juga mengacu pada PSAK 16. Namun proses administrasi hibah masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian Ristekdikti.

	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan/ Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2019)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah	Dokumen Pendukung Hibah
1	Rumah Sakit Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	1.082.715.656.970	Berita Acara Penetapan Nilai Aset Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI) Nomor: B/24/B1.3/PL.02.00/2019 **Dokumen Pendukung Pencatatan:** Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1126/SK/R/UI/2019 tentang Penetapan Daftar Aset Tetap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia **Progres Penyelesaian : Sedang Proses**
Total			1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	1.082.715.656.970	

21. Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

a. Nilai investasi permanen pada LKPP 2019 menggunakan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 *(Unaudited)*. Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp0 pada LKPP tahun 2019 sesuai PSAP 06 paragraf 46, dikarenakan **Nilai Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk** sebesar minus Rp33.663.581 juta sesuai Laporan Keuangan Tahun 2019 *(Unaudited)*. Selanjutnya, rugi tahun berjalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp3.326.996 juta sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 *(Unaudited)* tidak menjadi perhitungan Laporan Operasional LKPP Tahun 2019, dikarenakan Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) **telah dicatatkan sebesar Rp0 pada LKPP Tahun 2018 *(Audited)***.

b. Laporan Keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah selesai diperiksa oleh KAP dengan opini WTP DPP pada tanggal 3 April 2020. KAP mengungkapkan antara lain laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Perseroan mengalami defisiensi modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.302.974 juta dan menyebabkan Rasio Solvabilitas atau *Risk-Based Capital* (RBC) menjadi minus 1.431,02 persen, atau lebih kecil dari ketentuan yaitu 120 persen. Kondisi ini juga dapat turut dipengaruhi, antara lain ketidakpastian dunia bisnis akibat *pandemic* Covid-19, akan turut mempengaruhi kemampuan keberlangsungan usaha. Efektivitas rencana manajemen dan dukungan pemegang saham akan berperan mengatasi hal tersebut.

c. Berkenaan dengan permasalahan penurunan aset investasi yang tercatat pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 dan pemenuhan RBC 120 persen, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan mantan direksi dan pihak-pihak lain, yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde).*

d. Dalam rangka penanganan permasalahan, Pemerintah saat ini melakukan upaya restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui penjualan aset, divestasi kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada investor strategis, restrukturisasi portofolio tradisional dan korporat yang akan dialihkan ke perusahaan

lainnya, dan restrukturisasi portofolio *saving plan* dengan melakukan negosiasi dengan pemegang polis. Lebih lanjut PT Asuransi Jiwasraya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2019 yang direncanakan selesai akhir Juni tahun 2020.

22. Investasi Pemerintah pada PT Asabri (Persero)

a. Nilai investasi permanen pada LKPP 2019 menggunakan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 *(Unaudited)*. Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp0 pada LKPP tahun 2019 sesuai PSAP 06 paragraf 46 dikarenakan **Nilai Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas** sebesar minus Rp6.105.216 juta sesuai LK Tahun 2019 *(Unaudited)*. Selanjutnya rugi tahun berjalan PT Asabri (Persero) sebesar Rp6.210.535 juta sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 *(Unaudited)* yang diperhitungkan sebagai beban penyesuaian investasi pada Laporan Operasioal Pemerintah sebesar Rp2.304.378 juta sesuai dengan nilai Investasi yang dipulihkan sebagai saldo awal Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *Audited*, dikarenakan PT Asabri (Persero) baru mengalami ekuitas negatif pada tahun 2019.

b. Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2018 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat *(Disclaimer)*. KAP tidak dapat meyakini kewajaran penyajian nilai efek-efek atas saham dan reksadana PT Asabri (Persero) tahun 2018, termasuk saham dan reksadana yang bersumber dari program THT, JKK dan JKM. Dalam pernyataan opini Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) 2018 *(Audited)*, KAP juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai pihak yang berperan dalam hal terjadi penurunan nilai atas nilai investasi dari AIP. Rasio Solvabilitas atau *Risk-Based Capital* (RBC) Program THT menjadi minus 571,17 persen, atau lebih kecil dari ketentuan yaitu 120 persen. Sedangkan kinerja AIP tidak diukur dengan mengunakan Formula RBC karena menggunakan *skema pay as you go/defined benefit*.

c. Berkenaan dengan permasalahan yang mengakibatkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 mencatat penurunan aset investasi untuk program THT dan pemenuhan RBC 120 persen, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan beberapa pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*.

d. Pemerintah telah menyampaikan teguran tertulis kepada PT Asabri (Persero) yang isinya antara lain meminta perusahaan agar melakukan perbaikan kondisi. Selanjutnya Manajemen menyampaikan rencana upaya perbaikan melalui penguatan *cashflow* dengan cara meningkatkan proporsi *fixed income*, *recovery assets* terkait saham yang berkaitan dengan kasus hukum dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, serta mengubah klasifikasi portofolio investasi saham. Pemerintah juga telah mengganti pengurus perusahaan dan melakukan *law enforcement* dengan meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan hukum. Atas penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2019 *(Audited)*, Pemerintah telah menyatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus 2020.

23. Pengalihan Pencatatan PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) menjadi Investasi Permanen pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) sebagai bagian dari penyelesaian piutang/aset kredit eks kelolaan PT. PPA, yang semula dicatat pada Aset Lain-Lain (Neraca) berupa Saham (Non Bank) eks kelolaan PT PPA pada LK BUN Transaksi Khusus Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI (BA 999.99) telah dialihkan pencatatannya menjadi Investasi Permanen pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kajian dalam pelaksanaan konversi utang *Multi Years Bond* (MYB) PT TPI menjadi penambahan penyertaan modal negara telah dipenuhi kriteria pengakuan untuk dicatat sebagai investasi karena memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.

Pemerintah telah mengidentifikasi kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan kajian yang disusun pemerintah bahwa konversi utang MYB PT TPI menjadi penambahan penyertaan modal Negara akan memberikan beberapa dampak positif kepada Pemerintah, antara lain:

- Meningkatkan kinerja keuangan PT TPI dan menjadikan PT TPI sebagai salah satu tools utama pemerintah dalam menunjang industri pertrokimia nasional,
- Konversi MYB memiliki dampak yang positif terhadap kepemilikan saham pada PT TPI, sehingga pemerintah akan memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan di PT TPI, dan
- Kondisi keuangan PT TPI yang semakin membaik diharapkan mampu memberikan tambahan arus kas kepada pemerintah dimasa yang akan datang melalui pembayaran *uncoverted portion*, pajak perusahaan serta deviden.

Pada tahun 2019 perhitungan pengalihan pencatatan PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah sebagai Investasi Permanen pada Perusahaan Minoritas (Badan usaha lainnya – 122131) sebagai berikut:

	Transfer Masuk dari Aset Lain-Lain (Neraca) berupa Saham (Non Bank) eks kelolaan PT PPA pada LK BUN Transaksi Khusus		2.908.413.902.240
(+)	Laba Bersih dapat diatribusikan kepada Entitas Induk PT TPI pada LK *Audited* 2019 (47%)		201.693.920.000
(+)	Laba Komprehensif dapat diatribusikan kepada Entitas Induk PT TPI pada LK *Audited* 2019 (47%)		28.114.930.000
(-)	Selisih Pengakuan Saldo Awal (saldo awal 2019 dapat diatribusikan kepada Entitas Induk) – (47%)		(1.439.540.910.000)
(-)	Selisih pengakuan modal Disetor antara LK dengan pencatatan aset Saham LK PT TPI dapat diatribusikan kepada Entitas Induk (47%) Catatan LK BUN Transaksi Khusus	2.714.156.940.000 (2.908.413.902.240)	(194.256.962.240)
	Nilai Investasi Permanen Pada PT TPI (47%)		**1.504.424.880.000**

24. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar 18.399.657.640.675 dan 28.710.995.843.638,10. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2018 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2019 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 (Rp)
PT Perusahaan Listrik Negara	19.905.003.303204.00	9.249.737.322.589,00	876.670.707.629	13.806.824.973.945,00
PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	0	0	881.022.753.453,34
PT Pelindo I	527.133.217.252,50	527.133.217.252,50	0	0
PT ASDP	620.969.314.032,00	0	0	620.969.314.032,00
PT Pertamina	5.801.361.156.034,53	0	3.686.026.656.452,00	2.115.334.499.583
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	0	0	975.506.099.661,70
Jumlah	**28.710.995.843.638,10**	**0**	**4.562.697.364.081**	**18.399.657.640.675,04**

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp10.311.338.202.964. Pada tahun 2019, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

1) PT Perusahaan Listrik Negara

Nilai BPYBDS pada 31 Desember 2019 termasuk nilai BPYBDS yang telah ditetapkan menjadi PP PMN tahun 2019 sebesar Rp4.028.229.700.959 berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2019. NIlai berdasarkan PP tersebut belum menjadi pengurang saldo BPYBDS 31 Desember 2019 dikarenakan:

1. Kementerian ESDM belum melakukan penghapusan aset BPYBDS dikarenakan masih dalam proses penerbitan surat keputusan Menteri ESDM selaku Pengguna Barang; dan
2. PT PLN belum melakukan reklasifikasi akun BPYBDS menjadi modal disetor dikarenakan masih menunggu surat Menteri BUMN terkait penambahan modal disetor.

2) PT Angkasa Pura II
Dalam proses penetapan PP
3) PT Pelindo I
4) Telah ditetapkan menjadi PMN BPYBDS sebesar Rp527.133.217.252,50 dengan ditetapkannya PP Nomor 10 Tahun 2019
5) PT ASDP
Dalam proses Harmonisasi
6) PT Pertamina
Pengurangan Nilai BPYBDS di tahun 2019 sesuai BA-06/KN.3/REKON.BPYBDS/2020
7) Perum LPPNPI
Dalam proses pembahasan panitia antar kementerian

25. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

Atas kewajiban TKD sebesar Rp10.316.654.476.421 telah diterbitkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.316.654.476.421 terdiri atas:

a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.646.538.972.533; dan
b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.670.115.503.888.

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dilaksanakan untuk penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 / PMK .07 / 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota pada Tahun 2019.

26. Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 dalam rangka penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19). Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ditetapkan sebesar Rp14.712.739.389.435, terdiri atas:

1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.142.745.691.652; dan
2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.569.993.697.783.

Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dimaksud adalah 50 persen dari Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2019 yang dihitung berdasarkan selisih antara prognosis realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dengan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dimaksud ditetapkan kembali berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan Tahun 2019 dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019.

Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan daerah dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah provinsi/ kabupaten /kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil diperhitungkan dalam penetapan kembali Kurang Bayar Dana Bagi Hasil.

27. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Kewajiban
   a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
   b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntuan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
   c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)* atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap
   a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
      1) Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
      2) Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL jika SK penghapusan belum terbit.
   b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan
   c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Data Tuntutan Hukum pada seluruh Kementerian/Lembaga diperoleh dari aplikasi Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH). Untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang memadai terkait kewajiban Pemerintah yang berasal tuntutan hukum yang telah *inkracht*, Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-80/PB/2020 tanggal 16 Januari 2020 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hal Konfirmasi Pencatatan/Pengungkapan Data Tuntutan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Tetap *(inkracht)* .

Berdasarkan surat tanggapan dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2019, maka Data Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2019 yang dapat diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2019 sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 5 tuntutan hukum pada Kementerian Kuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA senilai Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 Ha.
2. Putusan *inkracht* BANI pada BPPPTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa pekerjaan USO melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional), sebesar Rp1.628.120.089.904 dan USD1,129,208. Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2019 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada PUPR :
   Putusan *inkracht* dan tidak ada upaya hukum lanjutan atas gugatan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kepala BWS Kalimantan II, dengan tergugat Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp428.203.200, namun belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2019.
4. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri berupa :
   Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada 2 (dua) Satker Perwakilan di luar negeri yang telah mendapatkan putusan hukum *(inkracht)*, namun belum dianggarkan dalam DIPA tahun 2018, adalah sebagai berikut:
   1. KBRI Amman
      Masalah sewa menyewa gedung kantor lama KBRI Amman yang belum dibayar sebesar JOD 30.444 (*Inkracht* Keputusan MA Yordania 14607/2016 tanggal 20 Oktober 2016).
   2. KBRI Mexico
      Merupakan tuntutan 7 (tujuh) orang mantan Pegawai Setempat yang diputus hubungan kerja pada tahun 2012, namun hanya 2 (dua) orang pegawai setempat yang telah *inkracht*, atas nama:
      a. Ingrid Gutierrez Pabst (hak lainnya USD80.765,39 dan upah USD70.812,50)
      b. Raul Arturo Valenzuela (468.875,88 peso)

28. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle.* BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut :

a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
   1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.
   2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017, atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.
c. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol, yaitu sebagai berikut:
   1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
   2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
   3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec.Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
   4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
6) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 31 Jember, perolehan tahun 1969 dengan nilai perolehan Rp125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember.

29. Yayasan Supersemar

Penyusunan Laporan Keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan 4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018).

Sepanjang tahun 2019 terdapat transaksi penyelesaian piutang berupa penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara sebesar Rp242.081.000.259. Selain itu, juga terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1) Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kemeneterian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2) Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara
3) Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
4) Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.

5) Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa *outstanding* Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
   a) Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016); dan
   b) Sebidang tanah seluas 8.120 m2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).

   Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.

30. Penyelesaian Piutang Negara

1. Piutang Negara terhadap PDAM Kabupaten Nganjuk berupa Piutang Non Pokok senilai Rp11.253.042.579 telah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang tersebut telah dihapusbukukan dari Neraca Pengelolaan Pemberian Pinjaman tanpa dihapuskan dari hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara pada PDAM Kabupaten Nganjuk mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden;

2. Pada Tahun 2019, terdapat piutang pemberian pinjaman kepada 10 Pemda yang telah dihapuskan secara bersyarat dan dihapusbukukan tanpa menghapus hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara telah mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden. Rincian piutang kepada Pemda yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagai berikut.

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok
1	Pemkab Labuhan Batu	Menkeu	S-842/MK.05/2018	7.152.177.124
2	Pemkab Musirawas	Menkeu	S-842/MK.05/2018	263.817.337
3	Pemko Makassar	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	81.942.086.810
4	Pemko Singkawang	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	17.666.354.371
5	Pemkot Bitung	Menkeu	S-750/MK.05/2011	8.230.202.848
6	Pemkot Manado	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	33.368.935.048
7	Pemkot Palembang	Presiden	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013	64.933.488.506
8	Pemerintah Aceh *)	Presiden	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019	23.833.926.049
9	Pemprov Maluku	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	59.027.326.563
10	Pemprov Riau	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	14.328.031.497
Jumlah				**310.746.346.153**

**) Termasuk Piutang Pokok sebesar Rp10.571.875.000*

31. Laporan Keuangan Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)

1) Satker TK Pengelola Utang PFK Pegawai

Pada prinsipnya Satuan Kerja Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (440780) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional bersaldo nihil (tidak ada transaksi).

2) Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun

a. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

b. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:
   1. AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) adalah senilai Rp1.185.277.702.770 sesuai dengan Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI periode 31 Desember 2019.
   2. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."
   3. Sehubungan dengan poin 2, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).

c. Menunjuk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-455/PB/2019 Hal Permintaan Jawaban/Penjelasan Progres Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK-RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan *Management Letter* Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018, terdapat satu temuan pemeriksaan pada LHP LK BUN yang menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem Perbendaharaan bersama dengan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA untuk penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut:

Temuan	Rekomendasi
Penetapan dan Pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: 1. Menyesuaikan pengaturan dan mengalokasikan BOP pembayaran manfaat pensiun melalui mekanisme APBN sesuai ketentuan yang berlaku. UIC : DSP DJPB, HPP DJA, Dit. Penyusunan APBN DJA. 2. Menerapkan Pasal 4 PMK no 211/PMK.02/2015 tentang BOP pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk memberikan pertimbangan bagi konsultan independen. UIC: DSP DJPB dan HPP DJA

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb telah melakukan tindak lanjut sbb:

1. Menyesuaikan pengaturan dan mengalokasikan BOP pembayaran manfaat pensiun melalui mekanisme APBN sesuai ketentuan yang berlaku :
   a) Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-690/PB/2019 tanggal 23 Agustus 2019 kepada Direktur Jenderal Anggaran hal Permintaan Alokasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun pada DIPA Tahun Anggaran 2020.
   b) Direktur Jenderal Anggaran melalui Nota Dinas Nomor ND-613/AG/2019 tanggal 5 September 2019 hal Tanggapan atas Permintaan Alokasi BOP Manfaat Pensiun pada DIPA Tahun Anggaran 2020 menyampaikan bahwa proses RUU APBN sedang dibahas pada tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPR RI, sehingga dalam hal alokasi BOP belum dibahas/disetujui oleh DPR RI dalam APBN Tahun 2020, agar menggunakan skema *existing* yaitu dengan pembebanan pada AIP.
   c) Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Direktur HPP DJA Nomor ND-1233/PB.7/2019 tanggal 5 September 2019 hal Usulan Perubahan Pengaturan Mengenai Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun.
   d) Hasil rapat antara Dit.SP DJPb dengan Dit HPP DJA dan Dit.Penyusunan APBN DJA tanggal 15 Oktober 2019 menyepakati untuk penyusunan alokasi BOP 2021 akan dilaksanakan dengan mekanisme penyusunan APBN untuk Bagian Anggaran BUN (BA BUN) yang akan dimulai Januari 2020.
   e) Telah disampaikan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) Nomor S-306/PB.7/2019 hal Permintaan Penyampaian Nama Calon Konsultan Independen dalam Rangka Perhitungan Biaya Operasional (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2021 sebagai persiapan penyusunan pagu BOP dalam mekanisme APBN Tahun 2021.
2. Menerapkan Pasal 4 PMK No. 211/PMK.02/2015 tentang BOP pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk memberikan pertimbangan bagi konsultan independen. Telah disampaikan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) Nomor S-784/MK.05/2019 tanggal 29 Oktober 2019 hal Pertimbangan Atas Usulan Konsultan Independen Dalam Rangka Perhitungan Proporsi Beban Kerja Pembayaran Manfaat Pensiun dan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Asabri (Persero) Nomor S-785/MK.05/2019 tanggak 29 Oktober hal Pertimbangan Atas Usulan Konsultan Independen Dalam Rangka Perhitungan Proporsi Beban Kerja Pembayaran Manfaat Pensiun.

32. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti *(Defined Benefit)*. Sedangkan, mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *pay as you go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan penyelenggara, jumlah penerima manfaat program pensiun per 31 Desember 2019 sebanyak 3.125.836 orang. Sedangkan, jumlah peserta aktif (belum pensiun) adalah sebanyak 5.048.933 orang yang mencakup PNS, prajurit TNI dan anggota Polri. Penerima Pensiun menerima manfaat pensiun berdasarkan persyaratan dan besaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan estimasi awal PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) terdapat potensi berupa *Unfunded Past Service Liabilities* (UPSL) dari Program Pensiun Pemerintah per 31 Desember 2019 sekitar Rp2.876,76 triliun. Nilai Potensi UPSL tersebut dihitung dengan metode ABCM *(Accrued Benefit Cost Method)* pada PT Taspen (Persero) dan metode PUC *(Projected Unit Credit)* pada PT Asabri (Persero). Sedangkan asumsi dan metode aktuaria yang digunakan disamakan dengan asumsi dan metode aktuaria dalam menghitung manfaat Tabungan Hari Tua (THT). Nilai potensi UPSL di atas akan direviu dan disesuaikan setiap tahunnya oleh badan penyelenggara berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Saldo dana AIP per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018, berturut-turut adalah sebesar Rp169,09 triliun dan Rp151,35 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk (i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), saldo dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Dana AIP	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)*	151.428.469.320.652	126.167.048.361.579
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)**	17.669.911.410.364	25.190.149.909.936
Jumlah	**169.098.380.731.016**	**151.357.198.271.515**

*) *Dana AIP PT Taspen berdasarkan LK (Audited) TA 2019*
**) *Dana AIP PT Asabri berdasarkan LK (Unaudited) TA 2019*

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Dana AIP pada PT Taspen (Persero) mengalami kenaikan sebesar Rp25.261.420.959.073 berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2019 *(Audited)*. Sedangkan, Dana AIP pada PT Asabri (Persero) mengalami penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572 yang disebabkan oleh permasalahan penurunan nilai investasi yang dilaporkan berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 *(Unaudited)*. Pemerintah meminta agar Badan Penyelenggara melakukan upaya-upaya seoptimal mungkin untuk mengembalikan penurunan nilai investasi tersebut.

Karena AIP bukan merupakan Dana Pensiun dan belum memenuhi kriteria sebagai Aset Program dari Dana Pensiun, maka dana AIP tidak diperhitungkan dengan potensi Kewajiban Manfaat Pasti Masa Depan Program Pensiun Pemerintah.

33. Subsidi Energi

a. Subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.

b. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah *(Kerosene)* dan Minyak Solar *(Gas Oil)*.

c. Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

d. Harga Jual Eceran untuk Minyak Tanah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran untuk Minyak Solar dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

e. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi terbatas.

f. Penyaluran BBM dalam Tahun 2019 melalui PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT Pertamina (Persero).

g. LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, Nelayan sasaran, dan Petani Sasaran.

h. Dari pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp54.150.841.096.873, terdapat kesalahan pencatatan pada level output sebesar Rp1.412.346.000.000. Output untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg adalah nomor 003, sedangkan tercatat pada SPM nomor 00102A/979321/AG.6.3/2019 tanggal 31 Desember 2019 merupakan output nomor 002. Hal ini sudah dikonsultasikan kepada KPPN Jakarta II sebagai mitra kerja dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan. SPM tersebut akan kami perbaiki apabila periode revisi dibuka kembali.

i. Verifikasi atas tagihan subsidi JBT yang diajukan PT Pertamina (Persero) Tahun 2019 dilakukan sampai dengan tagihan bulan November 2019. Adapun tagihan subsidi JBT bulan Desember 2019 sebesar Rp3.037.716.130.645 belum dilakukan verifikasi karena BPH Migas belum menyampaikan hasil verifikasi atas volume penjualan JBT periode Desember 2019 kepada KPA sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) PMK RI Nomor: 130/PMK.02/2015 s.t.d.d. PMK RI Nomor: 157/PMK.02/2016.

j. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.

k. Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).

l. Menteri ESDM melalui surat Nomor 2577/26/MEM.L/2017 tanggal 27 Maret, menyetujui usulan PT PLN (Persero) atas penyesuaian Tarif Tenaga Listrik *(Tariff Adjustment)* untuk golongan pelanggan diluar subsidi periode April – Juni 2017 dengan menggunakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik periode Januari – Maret 2017 (tarif tetap). Sehubungan kebijakan tarif listrik tetap bagi golongan tarif nonsubsidi, pada tahun 2019 Pemerintah merealisasikan pembayaran kompensasi atas kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) tahun 2017 senilai Rp7,456 T melalui pos anggaran Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL). Nilai tersebut telah dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 sesuai surat kesanggupan membayar Menteri Keuangan nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018.

m. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengamanatkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas efisiensi dan berkeadilan, serta melihat trend kenaikan harga pasar batubara yang sangat membebani Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) PT PLN (Persero), Pemerintah menerbitkan kebijakan harga maksimum pembelian batubara bagi pembangkit listrik PLN dan IPP (untuk kepentingan umum) melalui Kepmen ESDM Nomor 1925.K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen ESDM Nomor 1395.K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang mengatur bahwa *Domestic Market Obligation* (DMO) harga batu bara sektor ketenagalistrikan dipatok maksimal USD 70/ton untuk kalori 6.322 GAR atau mengikuti Harga Batubara Acuan (HBA) jika HBA di bawah USD 70/ton.

n. Terdapat pencatatan utang kompensasi Pemerintah atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM dan listrik, yang dijelaskan sebagai berikut :

- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02.2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Pencatatan Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237;
- Pencatatan Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019.

34. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	960.519	1.061.858	2.022.377
	b. Pinjaman luar negeri	761.611	-	761.611
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.722.130	1.061.858	2.783.988
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	92.998	1.899.429	1.992.427
	b. Pinjaman dalam negeri	-	10.168	10.168
	Jumlah Utang Dalam Negeri	92.998	1.909.597	2.002.595
Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah		**1.815.128**	**2.971.455**	**4.786.583**

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV *Balance of Payments Manual* (BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.
Laporan Pertanggungjawaban SBN dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

35. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2018, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT. Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam:

a. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang sebagaimana Lampiran dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
b. Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan aset konsesi jasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, sampai dengan tahun 2019, terdapat dua Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik jalan tol. Perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Sedangkan pengaturan konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik jaringan telekomunikasi dan informatika (Palapa Ring). Perjanjian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan *(financial liability model/scheme).*

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa adalah retrospektif, yaitu K/L harus bisa menyajikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan manajemen harus disertai alasan yg kuat dan jelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.

Pengaturan Konsesi Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020 seyogyanya mulai berlaku pada pelaporan keuangan tahun 2019. Namun demikian, sebagai tindak lanjut *High Level Meeting* antara Menteri Keuangan dan Pimpinan BPK pada tanggal 27 April 2020, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-379/MK.05/2020 tanggal 11 Mei 2020 hal Penundaan Penyajian Aset dan Konsesi Jasa pada lemar muka *(face)* Laporan Keuangan Tahun 2019.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan beragamnya mekanisme pencatatan dan permasalahan dokumen sumber sebagai dasar penyajian dan pengukuran aset/kewajiban konsesi jasa, maka Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki aset konsesi jasa dalam hal ini yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga *(Audited)* Tahun 2019, namun cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan; dan
2. Aset dan kewajiban konsesi jasa akan kembali disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai pengaturan konsesi jasa.

Dengan mempedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-379/MK.05/2020 dimaksud, maka pada laporan Keuangan tahun 2019, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa di neraca atau *face* laporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR dijelaskan bahwa terdapat aset kontruksi jalan tol per 31 Desember 2019 sebesar Rp329.319.444.106.150 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Aset konstruksi jalan tol tersebut saat ini masih dalam masa konsesi dan akan diserahkan kepada Kementerian PUPR setelah masa konsesi berakhir yang terdiri dari 71 ruas jalan, sepanjang 3.442,65 KM.

Sedangkan pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa terdapat aset konsesi jasa dari skema kewajiban keuangan senilai Rp7.803.289.731.012, berdasarkan Laporan Badan Usaha Pelaksana yang terdiri dari:

No	Tanggal Berita Acara	Proyek Palapa Ring	Nilai
1	15 April 2020	Paket Barat	1.342.892.756.599
2	15 April 2020	Paket Tengah	1.082.269.778.326
3	15 April 2020	Paket Timur	5.378.127.196.087
Total			**7.803.289.731.012**

Sedangkan untuk kewajiban konsesi jasa adalah senilai Rp7.399.830.131.510. Dalam Perjanjian Kerjasama KPBU, nilai tersebut merupakan rencana belanja modal *(capital expenditure)* dalam dokumen model keuangan *(financial model)* untuk seluruh paket Palapa Ring yang disampaikan oleh pemegang Saham awal Badan Usaha sebagai pemenang lelang kepada Menteri Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

36. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.247. Saldo piutang tersebut disajikan berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3). LP3 merupakan hasil *generate* data sumber dari Sistem Informasi DJP pada tanggal 10 April 2020 dan hasil perhitungan atas mutasi Piutang Pajak dari transaksi setelah tanggal neraca *(subsequent event)* sampai dengan 31 Mei 2020 untuk posisi saldo per 31 Desember 2019. Rincian mutasi piutang pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

1	SALDO AWAL	Rp	68.090.740.725.782
2	PIUTANG HAPUS BUKU S.D. 31 DESEMBER 2018)	Rp	23.545.731.800.088
3	JUMLAH PIUTANG AWAL SELURUHNYA (1+2)	**Rp**	**91.636.472.525.870**
4	PENAMBAH PIUTANG		
	KOHIR TERBIT	Rp	59.376.467.760.731
	PUTUSAN UH MENAMBAH	Rp	2.615.033.957.623
	PIUTANG *INKRACHT*	Rp	43.331.943.532.801
	PENAMBAH LAIN	Rp	23.626.369.813.090
	PINDAH MASUK	Rp	1.682.625.438.734
	UNREALIZED GAIN	Rp	-
	REALIZED GAIN	Rp	16.667.966.448
	JUMLAH PENAMBAH PIUTANG	**Rp**	**130.649.108.469.427**
5	PENGURANG PIUTANG		
	MPN	Rp	60.672.642.981.232
	PBK	Rp	12.727.581.092.945
	SKPKPP	Rp	7.905.984.965.193
	KURANG PUTUSAN	Rp	43.006.627.392.087
	KURANG INKRACHT	Rp	-
	UNREALIZED LOSS	Rp	178.498.659.360
	REALIZED LOSS	Rp	50.401.829.676

	PENGURANG LAIN	Rp	4.223.191.499.377
	PENGURANG PERIODE LALU	Rp	29.428.835.934.898
	PINDAH KELUAR	Rp	1.682.625.438.734
	HAPUS	Rp	3.210.299.903.446
	PLB	-Rp	45.341.638.111.061
	JUMLAH PENGURANG PIUTANG	Rp	117.745.051.585.887
6	SALDO AKHIR SEBELUM HAPUS BUKU (3+4-5)	**Rp**	**104.540.529.409.410**
7	HAPUS BUKU SAMPAI DENGAN 2019	Rp	31.909.895.927.163
8	SALDO PIUTANG SETELAH HAPUS BUKU (6-7)	Rp	72.630.633.482.247
9	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp	44.894.689.751.334
10	SALDO PIUTANG NETTO	Rp	27.735.943.730.913

1. Mutasi Tambah Piutang

   Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang *(realized gain and unrealized gain)*; dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

   Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang *(realized loss and unrealized loss),* penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

   Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak.

   Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap

   Selama tahun 2019, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 5.203 ketetapan pajak senilai Rp13.879.857.468.989 dan 41 ketetapan pajak senilai USD113,015,827;

b. Ketetapan Pajak belum diakui sebagai piutang pajak Tahun 2019 karena masih dalam upaya hukum banding sebanyak 2.601 ketetapan pajak senilai Rp4.939.609.752.083;

c. Ketetapan pajak yang belum disetujui WP namun telah dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar Rp23.090.471.083.541 dan akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak setelah adanya keputusan hukum tetap.

5. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan syarat berkas fisik telah diterima dan tidak terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang belum diterbitkan SP2B atau SP2PK karena masih dalam tahap penelitian KPP, sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2B tahun 2020	21
- Belum diterbitkan SP2B	267

b. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2PK tahun 2020	7
- Belum diterbitkan SP2PK	54

6. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp72.630.633.482.247 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp44.894.689.751.334 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp27.735.943.730.913. Penyisihan piutang pajak dibentuk berdasarkan umur piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Umur Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan
Sampai dengan 1 Tahun	21.247.931.766.681	2.355.735.609.268
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.780.396.978.201	6.891.118.784.668
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	12.798.058.654.573	9.935.786.958.578
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	8.610.694.597.256	8.576.812.272.011
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	6.671.629.410.267	6.652.784.387.102
Lebih dari 5 Tahun	10.521.922.075.293	10.482.451.739.695
Jumlah	**72.630.633.482.247**	**44.894.689.751.334**

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai barang sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	8.088.613.208.105	11.269.548.105.082	18.844.359.018.425	34.428.113.150.634	72.630.633.482.247
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	1.951.707.766	32.292.891.916	106.656.541.650,	140.901.141.332
Dasar Penghitungan Penyisihan	8.088.613.208.105	11.267.596.397.316	18.812.066.126.509	34.321.456.608.984	72.489.732.340.944
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	-
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	40.443.066.040	1.126.759.639.731	9.406.033.063.254	34.321.456.608.9	44.894.689.751.334

Perhitungan nilai piutang pajak netto per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	72.630.633.482.247	68.090.740.725.779	4.539.892.756.444	6,67%
Penyisihan Piutang Pajak	44.894.689.751.334	41.098.667.933.923	3.796.021.817.525	9,24%
Piutang Pajak Netto	27.735.943.730.913	26.992.072.791.856	743.870.938.919	2,76%

Nilai piutang daluwarsa per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163 mengalami kenaikan sebesar Rp8.364.164.127.074 dari saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp23.545.731.800.089 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Daluwarsa	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Total	**31.909.895.927.163**	**23.545.731.800.089**	**8.364.164.127.074**	**35,52**

7. Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada tahun 2019 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 16 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp3.210.299.903.444 dari 15 Kanwil dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan) dengan rincian berikut.

Tabel Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Papua dan Maluku	164/KMK.03/2019	15/02/2019	291	200.123.669.115
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	165/KMK.03/2019	15/02/2019	2.050	24.653.605.238
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	363/KMK.03/2019	30/04/2019	429	121.480.483.337
Kanwil DJP Jawa Tengah I	364/KMK.03/2019	30/04/2019	946	19.051.920.642
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	513/KMK.03/2019	21/06/2019	207	28.205.349.844
Kanwil DJP Banten	514/KMK.03/2019	21/06/2019	1.772	141.789.354.633
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara	515/KMK.03/2019	21/06/2019	1.508	204.013.268.286
Kanwil DJP Jawa Barat III	543/KMK.03/2019	04/07/2019	1.601	69.453.493.608
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	609/KMK.03/2019	01/08/2019	2.025	530.571.519.618
Kanwil DJP Jakarta Pusat	684/KMK.03/2019	27/08/2019	1.024	557.926.444.418
Kanwil DJP Jawa Barat II	731/KMK.03/2019	17/09/2019	191	54.857.113.920
Kanwil DJP Jakarta Barat	732/KMK.03/2019	17/09/2019	1.401	234.732.753.471
Kanwil DJP Jakarta Timur	799/KMK.03/2019	18/10/2019	1.103	268.822.139.599
Kanwil DJP Jawa Barat I	829/KMK.03/2019	18/10/2019	1.044	196.780.103.719
Kanwil DJP Jawa Barat II	830/KMK.03/2019	18/10/2019	1.950	330.728.101.640
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	914/KMK.03/2019	12/12/2019	1.061	227.110.582.356
Total			**18.603**	**3.210.299.903.444**

Pada tahun 2019 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp4.871.115.872.222 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel Rincian Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH
PPh Psl. 21	132.792.525.930
PPh Psl. 22	11.781.506.359
PPh Psl. 23	160.250.379.225
PPh Psl. 25 Badan	67.563.171
PPh Psl. 25 OP	17.813.773
PPh Psl. 26	90.124.468.941
PPh Psl.4 Ayat (2)	110.475.756.667
PPN	21.636.596.445
PPn BM	206.978.922.939
Bunga Penagihan PPh	658.844.684.926
Bunga Penagihan PPN	1.233.615.792.312
Bunga Penagihan PPnBM	19.140.541.644
PBB Kehutanan	112.941.504.248
PBB Perkebunan	228.355.664.132
PBB Pertambangan Migas	1.466.781.563.288
PBB Pertambangan Non Migas	417.310.588.222
TOTAL	**4.871.115.872.222**

37. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

"Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah".

Ayat (2) :

"Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20 persen (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis"

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli. Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran tahap I 20 persen, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.
2) Pembayaran tahap II 80 persen, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:
   - 80 persen seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga
   - Program *Resettlement* dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + "susuk" (kembalian) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20 persen. Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama.
   - Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20 persen yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.
   - 80 persen dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Suplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp251.675.334.037.435. Dibandingkan Tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar Rp225.730.103.236.335 nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp25.945.230.801.100 atau 11,49 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2019 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp256.333.681.840.703 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.658.347.803.268, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp256.333.681.840.703, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.168.930.811.365.837 dan Beban Operasional sebesar Rp2.425.264.493.206.540.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.658.347.803.268, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.895.868.020.651, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp378.083.000.000 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp10.932.298.823.919.

Laporan Operasional Tahun 2019 menyajikan angka Tahun 2018 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 (dalam triliun) dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2019

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2019 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp256.333.681.840.703. Dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar Rp80.438.866.944.409 nilai defisit tersebut bertambah sebesar Rp175.894.814.896.294 atau 218,67 persen. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp2.168,93 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp2.168.930.811.365.837 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.577.533.882.586.047, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp577.092.243.842.773, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp14.304.684.937.017. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2019 lebih rendah sebesar Rp220.401.622.942 atau turun 0,01 persen dibanding Tahun 2018 yang nilainya adalah sebesar Rp2.169.151.212.988.779. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2019

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp 1.577,53 triliun

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada Tahun 2019, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.577.533.882.586.047. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.390.865.341.810 atau naik 5,16 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp1.500.143.017.244.237. Pendapatan Perpajakan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Pajak Penghasilan	790.341.321.171.014	731.838.117.941.363
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	534.938.702.155.774	526.856.640.020.385
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.627.658.921.437	20.136.546.791.758
Pendapatan Cukai	181.009.918.441.271	168.411.747.414.517
Pendapatan Pajak Lainnya	8.600.854.484.661	6.796.688.674.946
Pendapatan Bea Masuk	37.560.846.208.126	39.464.702.540.677
Pendapatan Bea Keluar	3.432.159.153.269	6.665.716.676.905
Pendapatan Pajak Lain-lain	22.422.050.495	(27.142.816.314)
Total	**1.577.533.882.586.047**	**1.500.143.017.244.237**

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Rp790,34 triliun

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 adalah sebesar Rp790.341.321.171.014. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp58.503.203.229.651 atau 7,99 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp731.838.117.941.363. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan PPh Minyak Bumi	24.476.377.046.788	26.557.094.272.269
Pendapatan PPh Gas Bumi	34.652.118.896.779	38.118.280.365.523
Pendapatan PPh Migas Lainnya	2.541.269.599	33.800.919.649
Pendapatan PPh Pasal 21	148.962.352.462.971	134.918.491.786.219
Pendapatan PPh Pasal 22	21.450.645.481.140	18.036.931.666.751
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	53.750.052.700.672	54.702.019.166.469
Pendapatan PPh Pasal 23	45.499.149.466.003	36.885.174.569.421

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.557.660.082.012	9.511.668.574.521
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	261.687.731.414.986	240.638.465.110.601
Pendapatan PPh Pasal 26	46.731.219.638.473	49.134.847.249.977
Pendapatan PPh Final	130.283.487.190.539	113.047.874.567.462
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	134.377.615.887	141.479.051.817
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	97.269.537	235.050.235
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	7.345.980	12.987.522
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	730.495	167.200
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	-	(2.462.000)
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	472.736.000	503.900.818
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	(22.247.678)	-
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	2.240.629.780.907	1.892.891.197.764
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8.912.420.935.294	8.218.348.183.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	854.630	1.616.145
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	500.000	-
Jumlah	**790.341.321.171.014**	**731.838.117.941.363**

Kenaikan yang paling signifikan pada besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Final, dan Pendapatan PPh Pasal 21. Meskipun terdapat kenaikan yang signifikan pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan namun pertumbuhan tersebut terdampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional. Penerimaan sektor utama menunjukkan perlambatan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Kenaikan pada PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang sejalan dengan peningkatan suku bunga deposito, peningkatan jasa konstruksi dan pertumbuhan pada PPh Final atas Diskonto Bunga Obligasi dan Persewaan Tanah dan Bangunan. Adapun kenaikan pada PPh Pasal 21 antara lain ditopang oleh pertumbuhan Administrasi Pemerintahan, Industri Pengolahan, dan Jasa Keuangan. Pertumbuhan PPh Pasal 21 menjadi salah satu indikator tingkat utilisasi tenaga kerja yang secara umum masih cukup baik di tahun 2019. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran di tahun 2019.

E.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Rp534,93 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 adalah sebesar Rp534.938.702.155.774. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.082.062.135.389 atau 1,53 persen dibandingkan periode Tahun 2018 sebesar Rp526.856.640.020.385. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan PPN Dalam Negeri	347.356.073.946.386	323.715.962.911.317
Pendapatan PPN Impor	171.290.004.084.136	186.273.239.836.218
Pendapatan PPN Lainnya	162.985.906.464	68.355.639.470
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11.318.474.863.766	12.718.712.605.741
Pendapatan PPnBM Impor	4.778.052.113.626	4.105.334.910.489
Pendapatan PPnBM Lainnya	33.111.241.396	(24.965.882.850)
Jumlah	**534.938.702.155.774**	**526.856.640.020.385**

Peningkatan nilai Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun 2019 dipengaruhi oleh pertumbuhan pada Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan di tengah peningkatan restitusi dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Adapun penurunan pada Pendapatan PPN Impor disebabkan oleh penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Rp21,62 triliun

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebesar Rp21.627.658.921.437. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.491.112.129.679 atau 7,41 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp20.136.546.791.758. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan PBB Perkebunan	2.679.871.714.018	2.390.974.894.103
Pendapatan PBB Kehutanan	707.311.119.548	694.128.495.659
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	3.488.813.971.721	2.125.365.813.228
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.254.853.341.298	14.540.480.330.129
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	368.605.843.245	313.275.381.204
Pendapatan PBB Lainnya	128.202.931.607	72.321.877.435
Jumlah	**21.627.658.921.437**	**20.136.546.791.758**

Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 terutama ditopang oleh Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pendapatan PBB Perkebunan.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Rp181,01 triliun

Pendapatan Cukai Tahun 2019 adalah sebesar Rp181.009.918.441.271. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.598.171.026.754 atau 7,48 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp168.411.747.414.517. Pendapatan Cukai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	173.457.613.724.100	161.771.554.305.988
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	122.516.071.000	139.247.517.580
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	7.339.164.710.070	6.418.775.169.760
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	75.024.437.900	70.790.248.740
Pendapatan Cukai Lainnya	15.599.498.201	11.380.172.449
Jumlah	**181.009.918.441.271**	**168.411.747.414.517**

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau masih relatif cukup baik di tahun 2019 dan mendominasi Pendapatan Cukai Tahun 2019 selain Pendapatan Cukai Minuman Mengandung *Ethyl* Alkohol (MMEA). Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA.

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya Rp8,60 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.600.854.484.661. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.804.165.809.715 atau 26,54 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp6.796.688.674.946. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Bea Materai	1.480.547.017.178	1.470.393.848.442
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	4.117.446.934.631	3.985.405.294.453
Pendapatan PPn Batubara	538.680.322.182	656.409.788.263
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	97.145.996.283	28.230.225.569
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.229.599.650.789	166.418.719.567
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	917.242.557.662	460.284.397.839
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	220.033.197.452	26.406.406.436
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	158.808.484	3.139.994.377
Jumlah	**8.600.854.484.661**	**6.796.688.674.946**

Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya antara lain disebabkan oleh lonjakan setoran Pendapatan Bunga Penagihan Pajak pada tahun 2019. Selain itu, Pendapatan dari Penjualan Bea Materai dan Pendapatan Benda Materai dan juga mengalami peningkatan.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk Rp37,56 triliun

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp37.560.846.208.126. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.903.856.332.551 atau turun 4,82 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp39.464.702.540.677. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Bea Masuk	35.103.349.503.286	37.565.836.910.406
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	523.769.571.149	437.983.381.694
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	557.592.576.555	590.382.001.633
Denda atas Sanksi Administrasi dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	19.682.000
Pendapatan BM-DTP	354.326.302.000	370.614.637.000
Pendapatan Pabean Lainnya	8.516.851.048	32.636.375.103
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	271.986.036.790	285.949.034.841
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	1.864.000	44.227.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	741.303.503.298	181.236.291.000
Jumlah	**37.560.846.208.126**	**39.464.702.540.677**

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 mengalami penurunan terdampak melambatnya perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia. Faktor lain yang memengaruhi adalah penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar, dan penurunan impor yang didorong oleh penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC).

E.2.1.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan Bea Keluar Rp3,43 triliun

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.432.159.153.269. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.233.557.523.636 atau turun 48,51 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp6.665.716.676.905. Pendapatan Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Bea Keluar	3.431.785.216.838	6.664.583.965.922
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	373.535.431	1.108.158.983
Pendapatan Bunga Bea Keluar	401.000	24.552.000
Jumlah	**3.432.159.153.269**	**6.665.716.676.905**

Penurunan Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 terutama disebabkan oleh penurunan ekspor komoditas mineral yang memiliki *share* terbesar terutama konsentrat tembaga. Meskipun demikian, ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel mengalami peningkatan dikarenakan kebijakan moratorium ekspor nikel yang semula dipercepat per 29 Oktober 2019 ditunda hingga 1 Januari 2020.

E.2.1.1.1.8 Pendapatan Pajak Lain-Lain

Pendapatan Pajak Lain-lain Rp22,42 miliar

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2019 adalah sebesar Rp22.422.050.495. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp49.564.866.809 atau 182,61 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar minus Rp27.142.816.314.

Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara, namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

Pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp577,09 triliun

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2019 sebesar Rp577.092.243.842.773 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp172.627.170.700.849, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp237.410.883.862.102, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp116.779.973.933.458, dan Pendapatan BLU sebesar Rp50.274.215.346.364. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp67.732.533.316.309 atau turun 10,50 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp644.824.777.159.082.

Meskipun terjadi penurunan pada Pendapatan Sumber Daya Alam namun kinerja Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan terutama dari Surplus BI dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak K/L memberikan kontribusi yang cukup besar pada nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di tahun 2019.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam Rp172,62 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2019 adalah sebesar Rp172.627.170.700.849. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.222.434.425.683 atau turun 18,51 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp211.849.605.126.532. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi	96.743.924.765.308	121.738.497.289.681
Pendapatan Gas Bumi	43.025.533.710.437	51.430.690.878.645
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	329.897.894.657	897.013.139.014
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	25.336.541.437.191	29.793.097.476.683
Pendapatan Dana Reboisasi	1.621.321.817.342	1.949.707.502.589
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.054.313.008.732	1.131.630.995.767
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	153.200.888.858	57.999.849.716
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.669.225.474.530	1.603.935.082.478
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	-	25.630.000
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.133.823.161.944	2.768.651.348.961
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	33.769.617.067	28.111.645.960
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	3.682.709.348	1.492.401.435
Jumlah	**172.627.170.700.849**	**211.849.605.126.532**

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2019.

Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2019 antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara. Selain itu, penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi oleh harga ICP, serta *lifting* migas.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp237,41 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 adalah sebesar Rp237.410.883.862.102. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.088.727.228.191 atau turun 0,87 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp239.499.611.090.293. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan dari KND Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	50.629.562.819.999	45.056.688.696.658
Pendapatan dari KND Lainnya	30.091.907.824.703	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	156.689.413.217.400	194.442.922.393.635
Jumlah	**237.410.883.862.102**	**239.499.611.090.293**

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBP Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBP Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2019 sebesar Rp50.629.562.819.999 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp18.595.470.253.531 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp32.034.092.566.468.

Pendapatan dari KND Lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30.091.907.824.703 merupakan setoran PNBP yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp156.689.413.217.400. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp130.677.060.212.979, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp3.041.254.413.015, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp19.410.348 (pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal selama Tahun 2019 dari Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin),
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp22.733.265.756.658 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum IPB, UNAIR, ITB, UGM, UPI, UNDIP, UNHAS, ITS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2019 terdapat penurunan pendapatan operasional apabila dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan penurunan dari laba operasional Bank Indonesia,
5. Pendapatan Penyesuaian sebesar Rp122.121.142.000 berupa kenaikan nilai wajar investasi LPDP dari nilai per 31 Desember 2018 dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karateristik *available for sale*.
6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp115.692.282.400 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp116,77 triliun

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp116.779.973.933.458. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.167.305.923.752 atau turun 14,73 persen dari tahun 2018 sebesar Rp136.947.279.857.210. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	18.257.607.077.740	23.907.157.330.607
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	584.054.856.489	458.734.854.512
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	261.320.052.508	478.380.886.895
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	83.695.898.935	62.339.195.189
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	22.389.594.380.397	34.028.803.590.788
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.262.712.091.113	1.415.665.588.389
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**42.838.984.357.182**	**60.351.081.446.380**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	4.152387.184.196	3.503.202.732.697
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	672.001.706.644	738.668.412.347
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	878.817.568.804	839.274.977.108
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.040.746.153.806	2.142.477.014.496
Pendapatan Perizinan	1.643.400.661.631	1.508.010.868.552
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.166.831.888.928	8.517.324.476.741
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	960.165.945.007	874.985.688.834
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	598.656.088.407	555.352.078.123
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	**19.113.007.197.423**	**18.679.296.248.898**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.075.628.977.654	3.837.243.080.383
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	204.150.647.780	178.064.580.001
Pendapatan Jasa Karantina	361.118.490.833	344.100.255.227
Pendapatan Jasa Agraria	2.276.753.279.082	2.197.166.078.286
Pendapatan Jasa Keagamaan	908.056.396.376	870.085.779.188
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	**6.825.707.791.725**	**7.426.659.773.085**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.333.756.020.756	4.050.987.762.767
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	471.035.859.158	286.728.370.651
Pendapatan Penelitian/Riset, *Survey*, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	470.818.683.410	401.549.823.964
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	7.307.894.897	6.485.752.865
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	**5.282.918.458.221**	**4.745.751.710.247**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.800.583.039.237	6.398.009.015.712
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	17.806.844.910.890	18.798.087.224.921
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	172.363.356.753	192.895.695.221
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	**24.779.791.306.880**	**25.388.991.935.854**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	193.144.073.199	197.658.840.104

Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	29.304.366.554	35.824.212.787
Pendapatan Jasa Lainnya	208.613.608.815	671.885.799.338
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	**431.062.048.568**	**905.368.852.229**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.856.126.995.439	1.899.839.262.224
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	4.906.089.972.942	-
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan *Fee* Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	112.468.995.089	52.088.810.552
Pendapatan dari Selisih Kurs	-	506.350.147.007
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	250.300.537.228	294.971.681.310
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	7.762.671.609.771	6.053.304.476.813
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	661.434.155.257	481.813.432.813
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**15.549.092.265.726**	**9.288.367.810.719**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	607.707.985.438	638.613.682.993
Pendapatan Denda II	302.145.470.923	352.672.917.998
Pendapatan Denda III	396.251.260.289	308.741.808.895
Subtotal Pendapatan Denda	**1.306.104.716.650**	**1.300.028.409.886**
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	476.204.460	7.704.637.733.401
Pendapatan Lain-Lain II	305.891.401.869	246.396.187.644
Subtotal Pendapatan Lain-lain	**306.367.606.329**	**7.951.033.921.045**
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	795.220.944	55.663.300.189
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	**795.220.944**	**55.663.300.189**
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	346.142.963.810	855.036.448.678
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrual	**346.142.963.810**	**855.036.448.678**
Jumlah PNBP Lainnya	**116.779.973.933.458**	**136.947.279.857.210**

Penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha terutama pada Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan iuran produksi/royalti dan hasil produksi pada sektor mineral dan batu bara serta pendapatan *firm commitment* wilayah kerja minyak dan gas bumi. Selain itu, penurunan signifikan pada Pendapatan Lain-lain disebabkan karena pada tahun 2019 tidak ada Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun seperti pada tahun 2018 sebesar Rp7.704.637.733.401.

Meskipun cenderung mengalami penurunan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tahun 2019 mengalami kenaikan di antaranya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada tahun 2019 terdapat Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan kenaikan pada Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Pada tahun 2019 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum juga mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan umum masyarakat

(pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp50,27 triliun

Pendapatan BLU Tahun 2019 adalah sebesar Rp50.274.215.346.364. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.254.065.738.683 atau turun 11,06 persen dari tahun 2018 sebesar Rp56.528.281.085.047. Pendapatan BLU Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	34.409.116.101.702	29.207.035.124.112
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.193.071.664.155	1.104.430.435.632
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	5.302.611.898.735	18.549.624.166.808
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	715.253.770.340	1.061.407.297.957
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	**41.620.053.434.932**	**49.922.497.024.509**
Pendapatan Hibah BLU	744.837.706.710	371.494.767.316
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	976.138.212.549	1.670.308.372.743
Pendapatan dari Alokasi APBN	157.282.122.276	129.978.260.933
Pendapatan BLU Lainnya	6.775.903.869.897	4.434.002.659.546
Jumlah	**50.274.215.346.364**	**56.528.281.085.047**

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2019 yang signifikan adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Keuangan.

Terdapat penurunan pendapatan BLU dengan nilai signifikan berupa Pendapatan dari Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat karena pada tahun 2019 tidak terdapat Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit seperti pada tahun 2018 sebesar Rp 14.413.921.271.119. Adapun Penurunan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU tahun 2019 antara lain karena telah berakhirnya penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Rp14,30 triliun

Pendapatan Hibah selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp14.304.684.937.017. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.878.733.648.443 atau turun 40,85 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp24.183.418.585.460. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	4.535.834.189.821	6.845.900.809.329
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	854.875.450	2.069.086.533
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	3.673.078.332.679	13.178.185.591.822
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**8.209.767.397.950**	**20.026.155.487.684**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	591.671.964.284	418.374.595.589
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	469.822.176.046	750.246.244.476
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	4.557.091.285.795	3.062.037.983.142
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.232.593.695.958	1.968.300.051.909
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	**6.851.179.122.083**	**6.198.958.875.116**
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(756.261.583.016)	(2.041.695.777.340)
Jumlah Pendapatan Hibah	**14.304.684.937.017**	**24.183.418.585.460**

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada tahun 2019, Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami penurunan karena pada tahun 2018 terdapat pendapatan hibah langsung terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum.

Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam bentuk jasa.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp756.261.583.016 berasal dari pendapatan yang ditangguhkan pada BA 999.02 sebesar turun Rp865.152.763.986 dan jumlah neto dari pendapatan hibah KL yang belum disahkan sebesar Rp108.891.180.970 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya merupakan pendapatan hibah yang berasal dari reklasifikasi Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.02 sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP. Pendapatan ini digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke rekening khusus namun NOD-nya belum diterima. Perlakuan ini dipersamakan dengan hibah langsung yang telah diterima oleh K/L namun belum disahkan oleh Bendahara Umum Negara di tahun 2019.

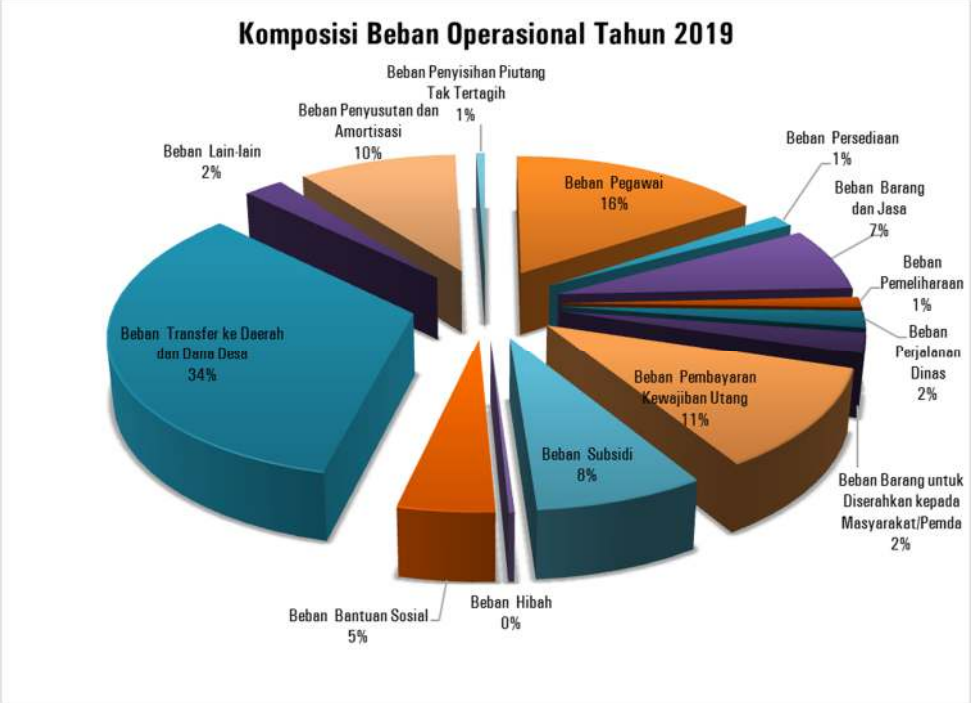
E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp2.425,26 triliun

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.425.264.493.206.540. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp175.674.413.273.352 atau 7,81 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp2.249.590.079.933.188. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang

untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2019

Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Pegawai	382.251.096.849.470	351.169.184.831.245
Beban Persediaan	33.410.271.463.784	29.932.790.690.126
Beban Barang dan Jasa	171.429.131.951.638	175.351.118.265.689
Beban Pemeliharaan	29.105.984.972.258	37.434.658.112.329
Beban Perjalanan Dinas	46.036.396.023.330	43.791.723.031.484
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	57.402.680.361.704	40.361.271.228.799
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	277.233.309.943.610	244.805.005.384.622
Beban Subsidi	189.329.386.425.202	196.719.559.440.096
Beban Hibah	6.476.207.286.209	1.520.560.988.285
Beban Bantuan Sosial	107.813.615.472.422	82.465.242.445.242
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	812.767.334.158.535	769.694.450.184.060
Beban Lain-lain	59.257.426.487.116	79.829.317.279.532
Beban Penyusutan dan Amortisasi	239.427.708.843.197	172.046.636.562.132
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13.323.942.968.065	24.468.561.489.547
Jumlah	**2.425.264.493.206.540**	**2.249.590.079.933.188**

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp382,25 triliun

Beban Pegawai untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp382.251.096.849.470. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.081.912.018.225 atau 8,85 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp351.169.184.831.245. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	85.226.296.329.141	88.563.658.473.682
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	61.403.616.357.443	59.259.416.151.054
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.012.151.341.499	687.001.379.214
Beban Gaji Dokter PTT	66.709.821.503	143.441.868.160
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	15.829.893.376.147	7.937.957.259.194
Beban Honorarium	1.875.981.047.121	1.715.801.833.161
Beban Lembur	722.353.102.378	736.296.210.306
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	82.912.239.677.327	72.174.671.173.005
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	114.621.544.011.613	104.131.084.968.049
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	7.311.746.189.636	5.672.979.906.636
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	11.268.565.595.662	10.146.875.608.784
Jumlah	**382.251.096.849.470**	**351.169.184.831.245**

Persentase kenaikan signifikan pada komponen Beban Pegawai Tahun 2019 terdapat pada Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito, Beban Pensiun dan Uang Tunggu, dan Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp33,41 triliun

Beban Persediaan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp33.410.271.463.784. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.477.480.773.658 atau 11,62 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp29.932.790.690.126. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Persediaan Konsumsi	19.359,077.297.762	10.081.393.034.417
Beban Persediaan Amunisi	1.490.379.822.174	1.830.768.691.065
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	3.085.310.580	4.422.606.537
Beban Persediaan Bahan Baku	5.063.418.526.096	6.325.326.611.464
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.270.625.963	5.117.260.083.422
Beban Persediaan Lainnya	7.482.039.881.209	6.573.619.663.221
Jumlah	**33.410.271.463.784**	**29.932.790.690.126**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban Persediaan Tahun 2019 meningkat secara signifikan pada Beban Persediaan Konsumsi. Beban Persediaan Konsumsi yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Penurunan Beban Persediaan Tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga terutama pada Bendahara Umum Negara (BA 999) disebabkan pada tahun 2019 tidak terdapat pencatatan beban persediaan untuk cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan sebagaimana terdapat pada tahun 2018 sebesar Rp5.085.034.701.212. Pada Tahun 2019, Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga hanya berupa penyaluran benih CBN berupa padi dan jagung hibrida dengan nilai Rp364.647.626 atau lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar Rp4.352.473.941.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp171,42 triliun

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 adalah sebesar Rp171.429.131.951.638. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.921.986.314.051 atau turun 2,24 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp175.351.118.265.689. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Barang Operasional	43.498.846.215.645	42.440.563.325.087
Beban Barang Non Operasional	69.651.215.376.781	74.546.230.599.301
Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	-	5.632.424.060
Beban Kontribusi	509.322.684.387	317.088.416.644
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.679.970.288.081	6.647.564.485.554
Beban Jasa Pos dan Giro	23.631.222.946	11.890.770.411
Beban Jasa Konsultan	5.971.711.705.594	7.060.533.356.141
Beban Sewa	5.802.846.302.732	6.024.492.993.884
Beban Jasa Profesi	4.602.959.572.516	4.429.562.928.448
Beban Jasa kepada BLU	1.233.431.300	63.616.000
Beban Jasa Lainnya	14.436.659.763.891	14.150.598.174.034
Beban Barang dan Jasa BLU	19.939.593.574.379	19.434.715.588.583
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	7.226.178.000	1.418.081.613
Beban Aset Ekstrakomptabel	303.915.635.386	280.763.505.929
Jumlah	**171.429.131.951.638**	**175.351.118.265.689**

Penurunan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang Non Operasional. Adapun kenaikan signifikan terdapat pada Beban Barang Operasional, dan Beban Barang dan Jasa BLU.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp29,10 triliun

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp29.105.984.972.258. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.328.673.140.071 atau turun 22,25 persen dibandingkan periode Tahun 2018 sebesar Rp37.434.658.112.329. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.666.495.098.778	5.779.343.603.707
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1.771.922.951	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	333.943.271.605	274.352.833.278
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.136.195.593.397	10.105.765.465.842
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.660.317.338.249	7.422.846.065.125
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	697.108.466	71.529.599
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.468.257.037	209.825.011.642
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.632.109.600.502	4.802.530.266.621
Beban Pemeliharaan Irigasi	843.607.481.181	902.274.127.125
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.604.081.612.615	1.575.935.041.281
Beban Pemeliharaan Lainnya	447.939.541.640	418.839.033.028
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.231.868.310.247	1.192.251.332.322
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	111.224.200	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	284.796.130.643	371.224.143.632
Beban Persediaan Suku Cadang	5.030.792.011.808	4.370.708.860.159
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	6.790.468.939	8.690.798.968
Jumlah	**29.105.984.972.258**	**37.434.658.112.329**

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp46,03 triliun

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 adalah sebesar Rp46.036.396.023.330. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.244.672.991.846 atau 5,13 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp43.791.723.031.484. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.545.832.538.626	20.833.110.878.840
Beban Perjalanan Dinas Tetap	81.622.654.790	80.592.786.539
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.009.695.727.331	2.671.908.131.049
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	6.776.673.431.833	6.394.737.205.622
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	9.768.362.441.018	9.525.162.333.752
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.783.767.706.245	1.749.509.630.662
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	44.060.179.995	8.932.751.868
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.712.236.079.558	1.428.394.538.224
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.314.145.263.934	1.099.374.774.928
Jumlah	**46.036.396.023.330**	**43.791.723.031.484**

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Beban Perjalanan Tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.

Beban Perjalanan Dinas dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Rp57,40 triliun

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2019 adalah sebesar Rp57.402.680.361.704. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp17.041.409.132.905 atau 42,22 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp40.361.271.228.799. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	6.247.584.732.816	20.285.122.978.607
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	330.494.682	18.206.747.221
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	17.804.744.758.176	20.027.851.008.336
Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	33.350.020.376.030	30.090.494.635
Jumlah	**57.402.680.361.704**	**40.361.271.228.799**

Pada tahun 2019 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan terutama pada Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat.

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda paling signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang Rp277,23 triliun

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2019 sebesar Rp277.233.309.943.610 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.428.304.558.988 atau 13,25 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp244.805.005.384.622. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	**20.882.043.996.401**	**21.331.207.774.570**
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	570.898.022.241	438.843.216.594
Beban Bunga Pinjaman Program	10.760.229.959.412	10.521.675.025.835
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.552.464.466	100.919.929.226
Beban Bunga Pinjaman Proyek	8.506.655.899.156	9.533.690.543.730
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	943.218.054.388	735.515.050.817
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	489.596.738	564.008.368
Beban Bunga SBN	**246.698.626.996.109**	**218.803.917.557.671**
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	168.287.501.028.232	144.427.987.921.696
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	114.302.414.090	82.862.689.592
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	35.432.465.969.539	37.254.812.556.426
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	81.057.207.629	89.529.197.775
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	33.751.880.934.060	27.597.567.223.452
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	132.542.448.817	31.602.995.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	8.875.876.187.742	9.295.028.481.230
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	23.000.806.000	24.526.492.500
Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang Menambah dan Mengurangi Beban Bunga	**9.652.638.951.100**	**4.669.880.052.381**
Jumlah	**277.233.309.943.610**	**244.805.005.384.622**

Beban Bunga Instrumen Pinjaman Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 antara lain karena adanya penguatan kurs rupiah di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp246.698.626.996.109 dan Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang menambah dan mengurangi Beban Bunga sebesar Rp9.652.638.951.100.

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon/pendapatan premium untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2019.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2019 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Mulai Tahun 2018, beban diskonto dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2019 (*Audited*)
542111	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	3.353.190.803.000	4.549.720.436.000
542121	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	3.274.832.902.500	(1.212.217.927.400)
542141	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	373.544.996.000	330.538.952.200
545111	Beban Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	1.123.099.682.600	(200.408.799.919)
545131	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.527.970.567.000	1.202.247.391.500
Jumlah		**9.652.638.951.100**	**4.669.880.052.381**

Beban Subsidi Rp189,32 triliun

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2019 sebesar Rp189.329.386.425.202 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.390.173.014.894 atau turun 3,76 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Subsidi Minyak Solar	32.438.883.567.686	31.170.578.161.186
Beban Subsidi Minyak Tanah	2.868.252.604.635	3.151.544.787.072
Beban Subsidi Elpiji	41.588.894.626.543	54.867.972.112.102
Beban Subsidi Listrik	51.711.774.354.480	48.101.754.165.145
Beban Subsidi Pupuk	29.975.667.317.918	31.204.983.758.555
Beban Subsidi PPh-DTP	10.557.240.293.147	10.714.023.989.644
Beban Subsidi BM-DTP	354.326.302.000	370.614.635.480
Beban Subsidi PT KAI	2.316.457.506.279	2.001.859.315.312
Beban Subsidi PT PELNI	2.130.280.875.028	1.877.169.078.654
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya (LKBN Antara)	156.132.228.800	155.927.797.800
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	632.060.000.000	952.440.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	3.323.491.684.431	2.413.742.864.095
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	1.156.833.360	9.198.526.756
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	16.265.935.542	29.348.058.401
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	9.579.101.472.424	7.710.610.390.234
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	4.699.315.947	13.422.500
Beban Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	265.313.074	74.782.015
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	1.476.359.572	3.320.662.330
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	532.604.682	227.503.961
Beban Subsidi Estimasi	1.672.427.229.654	1.984.155.428.854
Jumlah	**189.329.386.425.202**	**196.719.559.440.096**

Nilai Beban Subsidi tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, dan Subsidi Minyak Solar. Secara keseluruhan, beban subsidi lebih rendah antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga ICP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2019 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2019 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2019. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp1.672.427.229.654 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

Beban Hibah Rp6,47 triliun

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2019 sebesar Rp6.476.207.286.209. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.955.646.297.924 atau 325,91 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 (*Audited*)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	234.274.387.286	54.481.623.000
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	6.241.521.667.087	1.465.989.051.764
Beban Hibah Lainnya	411.231.836	90.313.521
Jumlah	**6.476.207.286.209**	**1.520.560.988.285**

Tingginya kenaikan beban hibah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang terkena bencana pada tahun 2019.
Beban Hibah tahun 2019 kepada Pemerintah Luar Negeri antara lain berupa bantuan kemanusiaan Palestina, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon, Pemerintah Nauru, Pemerintah Tuvalu, Pemerintah Fiji, dan Pemerintah Myanmar.

Beban Hibah juga mendukung kegiatan pemerintah daerah antara lain Hibah MRT pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hibah Air Minum kepada dua Pemda, Hibah Air Limbah kepada tiga Pemda, Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG) kepada 15 Pemda, Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FSMRB) kepada lima Pemda, Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) kepada Pemerintah Provinsi NTB, Kab. Lombok Barat dan Kab. Probolinggo, Hibah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang, Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP), Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative* (READ-SI) kepada 19 pemda, Hibah Jalan Daerah kepada 10 pemda, Hibah Air Minum kepada 200 Pemda, Hibah Sanitasi/Air Limbah kepada 50 pemda, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada 130 Pemda.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp107,81 triliun

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp107.813.615.472.422. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.348.373.027.180 atau 30,74 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp82.465.242.445.242. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	374.182.945.121	240.242.618.650
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	46.522.812.712.971	37.585.756.187.799
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	2.918.167.739.000	3.164.141.449.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	3.950.717.607.408	12.475.279.931.942
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	33.860.057.941.981	18.616.939.314.479
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	14.273.215.574.714	7.031.833.349.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	2.717.527.043.331	848.128.786.039
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	3.196.933.907.896	2.502.920.808.333
Jumlah	**107.813.615.472.422**	**82.465.242.445.242**

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang, Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang.

Beban Bantuan Sosial terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Peningkatan Beban Bantuan Sosial dipengaruhi oleh peningkatan target penerima manfaat menjadi 10 Juta KPM pada tahun 2019, adanya penambahan anggaran untuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial yang dibiayai dari BA-BUN untuk pemberian jadup dari belanja bansos terhadap daerah terkena bencana, serta adanya peningkatan penyaluran bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam dan bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang terjadi di masyarakat.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp812,76 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp812.767.334.158.535 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.072.883.974.475 atau 5,60 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp769.694.450.184.060. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Dana Bagi Hasil	104.713.947.999.521	106.140.461.465.325
Beban Dana Alokasi Umum	420.910.238.556.000	401.489.579.649.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	64.165.654.543.270	58.149.298.269.245
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	121.322.377.555.524	114.802.596.316.772
Beban Dana Otonomi Khusus	20.979.943.308.000	20.059.583.186.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.166.576.228.221	962.772.688.443
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	9.694.447.489.000	8.230.750.000.000
Beban Dana Desa	69.814.148.478.999	59.859.408.609.275
Jumlah	**812.767.334.158.535**	**769.694.450.184.060**

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 30 berikut.



Grafik 30. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019

Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 adalah sebesar Rp104.713.947.999.521. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.426.513.465.804 atau turun 1,34 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp106.140.461.465.325. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	29.700.461.156.954	26.982.923.728.366
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.806.363.414.670	1.881.345.263.440
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.459.140.234.859	3.181.650.100.692
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	13.669.038.797.935	12.616.952.097.642
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	105.515.816.770	94.539.271.512
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	489.996.644.211	428.607.668.790
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	2.114.590.004.049	1.920.863.967.650
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	11.901.910.112.248	15.065.174.948.231
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	390.671.141.718	495.733.751.842
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	668.881.581.817	763.755.981.148
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	9.797.587.763.681	10.079.889.654.768
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	145.205.689.471	142.508.695.650
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.484.800.270.188	1.205.967.383.357
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - IuranTetap	360.691.989.728	436.500.001.253
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	20.714.261.451.552	23.814.433.296.091
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.516.197.490.874	1.802.117.507.488
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	26.888.711.800	21.149.789.282
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	2.946.167.478	1.193.921.148
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	122.617.293.659	81.385.756.405
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	862.768.231.175	913.131.399.094
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	661.582.338.020	792.807.965.746
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	417.105.678.324	359.001.100.482
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.294.726.018.340	3.058.828.215.248
Jumlah	**104.713.947.999.521**	**106.140.461.465.325**

Turunnya jumlah beban dana bagi hasil disebabkan oleh penurunan pagu alokasi DBH Reguler TA 2019 dibanding pagu alokasi DBH Regular TA 2018 atau tidak tercapainya realisasi penerimaan negara terhadap target yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Kebijakan UU APBN Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Beban Transfer DBH merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp66.422.358.186.683. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 ini juga memperhitungkan pengakuan beban atas potensi/estimasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH di tahun berjalan sebesar Rp38.418.499.003.958 dan Rp126.909.191.120.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban DAU Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp19.420.658.907.000 atau 4,84 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan realisasi mengikuti pagu alokasi DAU TA 2019 yang naik secara moderat dan telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, kenaikan formasi CPNSD, THR dan Gaji ke-13 serta kebijakan DAU tambahan berupa bantuan pendanaan kelurahan dan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK Fisik berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Beban DAK FisikTahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp6.016.356.274.025 atau 10,35 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp58.149.298.269.245. Beban DAK Fisik Tahun 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270 terdiri dari Beban DAK Reguler sebesar Rp40.681.714.036.604, Beban DAK Penugasan sebesar Rp17.211.588.461.829, Beban DAK Affirmasi sebesar Rp6.272.352.044.837.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 adalah sebesar Rp121.322.377.555.524. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.519.781.238.752 atau 5,68 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp114.802.596.316.772. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.001.837.749.380	55.016.720.212.332
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.977.231.267.885	1.727.102.404.861
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	463.968.756.915	588.007.130.574
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.200.273.626.885	43.869.668.298.339
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	9.729.473.301.595	7.454.358.890.915
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.723.241.760.092	1.753.419.417.979
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	193.663.883.050	92.221.616.897
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	867.822.995.199	745.193.742.984
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.659.144.963.421	3.555.904.601.891
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	1.167.549.190.102	-
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	127.476.500.000	-
Beban Dana Pelayanan Kepariwisataan	210.693.561.000	-
Jumlah	**121.322.377.555.524**	**114.802.596.316.772.**

Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan. Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan lebih salur Dana BOS TA 2018 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 adalah sebesar Rp20.979.943.308.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp920.360.122.000 atau naik 4,59 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.357.471.654.000	8.029.791.593.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.850.230.158.000	5.620.854.115.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.824.446.537.000	2.408.937.478.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.507.241.496.000	2.400.000.000.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.440.553.463.000	1.600.000.000.000
Jumlah	**20.979.943.308.000**	**20.059.583.186.000**

Beban Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode tahun 2019. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya yang dibayarkan selama Tahun 2019 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai Beban Dana Otonomi Khusus dipengaruhi oleh adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2019, dan terdapat kenaikan dana tambahan insfrastruktur untuk Provinsi Papua.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.166.576.228.221 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp203.803.539.778 atau 21,17 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp962.772.688.443. Peningkatan tersebut sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 yang sejalan dengan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2019 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2019, dengan nilai sebesar Rp33.423.771.779.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2019 sebesar Rp9.694.447.489.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2019. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp1.463.697.489.000 atau 17,78 persen dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp8.230.750.000.000. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat penambahan pagu sebesar Rp1.500.000.000.000 pada tahun 2019 dari Rp8.500.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000 sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2019. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2019 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp9.954.739.869.724 atau 16,63 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp59.859.408.609.275. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2019 dipengaruhi oleh penambahan alokasi sebesar Rp10.000.000.000.000 dari alokasi tahun 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000, serta sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa melalui upaya percepatan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu juga meningkat.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain Rp59,25 triliun

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2019 sebesar Rp59.257.426.487.116. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.571.890.792.416 atau turun 25,77 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp79.829.317.279.532. Beban Lain-lain Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Cadangan Beras Pemerintah	880.895.042.614	-
Beban Operasional Kegiatan SKK Migas	-	
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.917.840.896	-
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	519.773.868.148	476.925.386.855
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	103.520.762.425	60.642.204.092
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	1.032.465.610
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	635.037.508.668	537.049.670.791
Beban Lain-lain BUN Lainnya	-	10.256.466.000.000
Beban Lain-lain	2.116.234.499.871	2.085.292.769.784
Biaya Perbankan (Bank Charge)	533.665	
Beban Pihak Ketiga Migas	36.809.117.831.201	39.433.405.824.736
Beban Pembayaran *Reimbursement* PPN	216.520.542.309	424.290.825.638
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	82.064.311.148	255.415.175.912
Beban Diestimasi *Reimbursement* PPN dan Penggantian Bonus Produksi	335.462.257.956	439.095.791.317
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	235.732.424.035	227.031.945.250
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	17.269.149.064.180	25.632.669.219.547
Jumlah	**59.257.426.487.116**	**79.829.317.279.532**

Penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Lain-lain BUN Lainnya, Beban Pihak Ketiga Migas, dan Beban Penyesuaian Nilai Investasi.

Beban Lain-lain BUN Lainnya pada tahun 2019 bernilai Rp0 karena tidak ada beban penyaluran Dana Cadangan Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS sampai dengan 31 Desember 2018.

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp36.809.117.831.201 antara lain berasal dari Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee KKKS sebesar Rp11.676.879.219.588, Beban Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN KKKS sebesar Rp10.376.295.747.793, dan Beban Pihak Ketiga Migas - Underlifting KKKS sebesar Rp14.709.019.950.195.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp17.269.149.064.180 berasal dari penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Padjajaran sebesar Rp341.981.703.767, bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp12.216.318.360.413, dan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp4.710.849.000.000.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp239,42 triliun

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 adalah sebesar Rp239.427.708.843.197. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.381.072.281.065 atau 39,16 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp172.046.636.562.132. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62.600.232.488.375	56.063.855.416.809
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	72.321.600	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.351.596.641.309	7.775.829.859.799
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	90.457.968.883.373	41.079.673.570.825
Beban Penyusutan Irigasi	34.388.148.666.323	8.769.015.107.863
Beban Penyusutan Jaringan	2.053.072.972.453	1.811.637.508.046
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.415.556.923.775	1.240.398.161.993
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.839.528.986	1.970.621.901
Beban Amortisasi Paten	15.139.312.402	11.365.450.298
Beban Amortisasi *Software*	2.136.825.864.602	1.586.121.075.234
Beban Amortisasi Lisensi	360.106.409.418	274.026.136.330
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	365.001.156.398	297.121.407.251
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.564.924.672	6.683.119.444
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	238.718.117.918	124.289.345.137
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	(88.383.368)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.782.722.791.815	23.348.452.533.888
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	24.908.802.394.824	24.831.323.877.527
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	4.424.901.690	3.170.941.883
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.128.496.846.079	2.134.114.441.323
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	2.207.368.946.572	2.684.647.299.307
Beban Penyusutan Aset *Idle* yang Sudah Diserahkan ke DJKN	386.575.300	437.351.106
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	2.662.175.313	2.591.719.536
Jumlah	**239.427.708.843.197**	**172.046.636.562.132**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan terutama pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan, Beban Penyusutan Irigasi, dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp13,32 triliun

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 adalah sebesar Rp13.323.942.968.065. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.144.618.521.482 atau turun 45,55 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp24.468.561.489.547. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2019. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	8.452.216.908.344	4.523.829.453.402
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	3.128.301.655.361	3.158.796.390.646
Beban Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	189.567.857.738	179.269.781.943
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	3.019.753.754.794	961.719.364.713
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	9.471.191.328	76.050.814.202
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	580.620.247.605	573.898.365.022
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(22.344.717.168)	7.009.810.653
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	323.105.593.835	5.408.785.349.422
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.018.188.531.727)	9.403.592.670.154
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	(1.823.598.864.031)	(321.624.478.370)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	(182.698.116.118)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	3.206.751.877	(1.395.591.788)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(48.575.983)	(41.075.382)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(9.342.950.323)	22.518.884.888
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	7.693.847.543	(143.407)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	53.445.540.072	133.543.204.403
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	474.537.573.577	295.061.131.922
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	(511.075.744)	557.381.177
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	36.782.669.499	129.375.581
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	105.205.574.325	192.604.162.311
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(11.430.425)	(95.984.813)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	19.302.940.938	(82.110.074.750)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	(4.688.169)	(56.209.583)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(22.520.189.083)	(63.481.092.799)
Jumlah	**13.323.942.968.065**	**24.468.561.489.547**

Penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2019 terdapat pada Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya antara lain berupa Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI pada BA BUN Transaksi Khusus (999.99), Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP terutama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman terutama berupa Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dan Beban Penyisihan Piutang - Piutang Bunga Penerusan Pinjaman pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (999.04).

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Surplus Rp4,65 triliun

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2019 sebesar Rp4.658.347.803.268 yang menandakan surplus. Surplus kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 sebesar minus Rp145.291.236.291.926, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp149.949.584.095.194. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp5,89 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 sebesar Rp5.895.868.020.651. Defisit ini naik sebesar Rp1.365.842.623.778 atau 30,15 persen dari Tahun 2018 yaitu sebesar Rp4.530.025.396.873. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp480.763.876.297 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.376.631.896.948.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp480,76 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp480.763.876.297. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp88.489.352.764 atau 22,56 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp392.274.523.533.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	3.948.035.294	5.711.186.853
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	111.118.368.021	76.064.406.719
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	196.870.000	9.327.477.116
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	135.365.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	7.130.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	209.010.880.903	226.000.424.634
Pendapatan Pelepasan Aset	156.489.722.079	75.028.533.211
Jumlah	**480.763.876.297**	**392.274.523.533**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Pelepasan Aset, dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp6,37 triliun

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.376.631.896.948. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.454.331.976.542 atau 29,55 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp4.922.299.920.406.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 (*Audited)*
Beban Kerugian Pelepasan Aset	6.376.631.896.948	4.922.299.920.406
Jumlah	**6.376.631.896.948**	**4.922.299.920.406**

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp5.743.685.359.256 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp632.946.537.692. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang minus Rp378,08 miliar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 adalah sebesar Rp378.083.000.000. Defisit ini naik sebesar Rp375.295.500.000 atau 13.463,52 persen dibandingkan defisit Tahun 2018 sebesar Rp2.787.500.000. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption*/*Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp5,80 miliar.

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp5.807.000.000. Pendapatan ini naik sebesar Rp5.807.000.000 dibanding Tahun 2018 sebesar Rp0. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp383,89 miliar

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 adalah sebesar Rp383.890.000.000. Beban ini naik sebesar Rp381.102.500.000 atau 13.671,84 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp2.787.500.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp10,93 triliun

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp10.932.298.823.919 yang menandakan surplus. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp151.690.722.218.972 dibandingkan surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 yaitu sebesar minus Rp140.758.423.395.053. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp125.751.731.865.679 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp114.819.433.041.760.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp125,75 triliun

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp125.751.731.865.679. Nilai tersebut naik sebesar Rp65.907.984.669.356 atau 110,13 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp59.843.747.196.323. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Pendapatan BLU Lainnya	60.296.406.733	41.441.438.303
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.950.810.289	314.568.800
Pendapatan dari Selisih Kurs	12.531.024.709	206.060.348
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	45.492.863.731	78.326.034.166
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	5.239.509.424.727	2.333.080.777.546
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	172.806.638.038	134.428.329.188
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	24.218.407.398	33.331.717.804
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	74.723.098.430.575	10.228.063.515.306
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	92.742.711.721	656.894.753.146
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	25.461.150.481.941	17.673.419.787.369
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	19.914.934.665.817	28.664.240.214.347
Jumlah	**125.751.731.865.679**	**59.843.747.196.323**

Besarnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999). Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp74.721.497.824.213 berupa selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp23.921.081.323.771 berupa penambahan pencatatan aset baru HBM, HBI dan Tanah pada KKKS per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.754.495.453.155 dan penambahan pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar Rp1.166.585.870.616.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I terutama pada Penerimaan Kembali transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp114,81 triliun

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp114.819.433.041.760. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp85.782.737.549.616 atau turun 42,76 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp200.602.170.591.376. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 *(Audited)*	Tahun 2018 *(Audited)*
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	3.321.314.672	2.813.451.079
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	5.138.251.399	108.940.331.089
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	10.334.914.070.220	25.981.938.354.598
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	5.654.603.528.934	4.646.507.417.333
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	458.037.177.476	168.777.433.477
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	240.984.341	1.897.445.254
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	5.889.071.283.348	111.584.564.231.171
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	3.672.195.959	3.677.279.036
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	-	6.430.019.496
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	59.079.719.679	63.754.326.447
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	92.411.354.515.746	58.032.870.302.399
Pembulatan	(14)	(3)
Jumlah	**114.819.433.041.760**	**200.602.170.591.376**

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019 terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp5.889.071.283.348 terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp4.967.033.658.810 dan pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp922.037.624.538.

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya. Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp92.411.354.515.746 antara lain berupa kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas penyaluran JBKP Non-Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium

Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) akibat penerapan tarif tenaga listrik pelanggan non-subsidi di bawah perhitungan tarif *adjustment* tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019 hal Kebijakan Pemerintah atas Penerapan Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Non-Subsidi di Bawah Perhitungan Tarif Adjustment Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT PLN (Persero akibat penerapan tarif tenaga listrik tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penerapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019, kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 Rp30.864.175.990.750,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019, dan Beban dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp182.698.116.118.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar Rp5.654.603.528.934 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.

Pos Luar Biasa Rp0

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2019.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2019.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp0

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2019.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 sebesar Rp240,15 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp240.152.602.171.525, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2018. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2018 sebesar Rp208.506.122.640.283, Saldo Awal Kas TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp31.646.479.531.242.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Kas Transitoris	-	(472)
Kas *Escrow*	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Kas pada BLU yang telah disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Saldo Awal Kas	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**

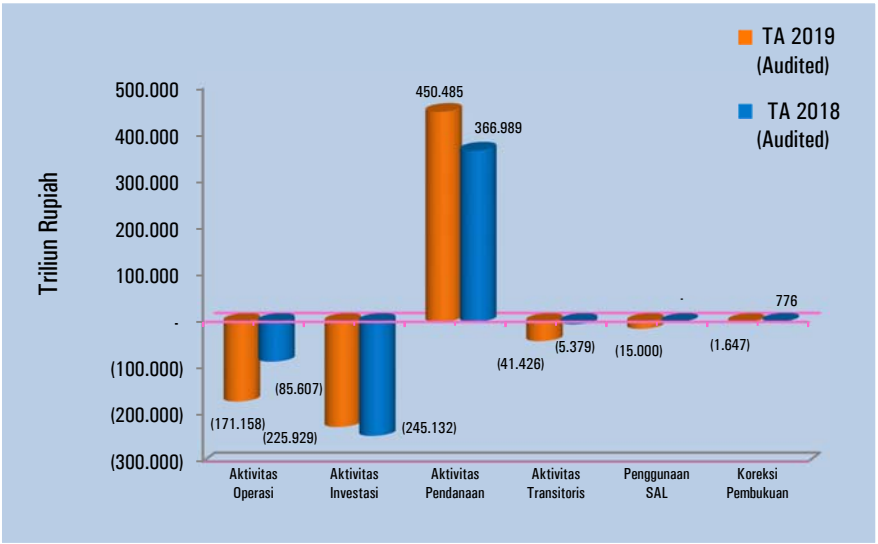
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (Penurunan) Kas sebesar Rp4,67 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(171.158.277.117.462)	(85.606.836.614.663)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(225.929.135.037.521)	(245.132.313.372.320)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	450.485.196.418.840	366.988.807.449.803
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(41.425.640.178.382)	(5.378.953.624.562)
Penggunaan SAL *)	(15.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan**)	(1.647.087.428.577)	775.775.692.984
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	**(4.674.943.343.102)**	**31.646.479.531.242**

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

*) Penggunaan SAL sebesar Rp15.000.000.000.000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp15.000.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

**) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.647.087.428.577, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	(1.337.580.362.637)
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(69.218.984.057)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(240.288.081.883)
Total Koreksi Pembukuan		**(1.647.087.428.577)**

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp1.337.580.362.637 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp393.879.449.283 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar minus Rp943.700.913.354. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai minus Rp360.522.973.854 dan transaksi pengembalian Hibah senilai minus Rp33.356.475.429.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar minus Rp69.218.984.057 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp240.288.081.883, terdiri dari:
   a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp62.087.570.751 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN PEKANBARU (008)	(1.423.761.017)
2	KPPN PADANG (010)	(256.164.234)
3	KPPN BUKITTINGGI (011)	266.465.000
4	KPPN BANDAR LAMPUNG (017)	96.558.253
5	KPPN JAKARTA II (019)	(50.609.588.697)
6	KPPN SURAKARTA (028)	(395.810.000)
7	KPPN PURWOKERTO (029)	395.810.000
8	KPPN DENPASAR (037)	2.146.350.558
9	KPPN KUPANG (039)	1.000
10	KPPN PONTIANAK (042)	1.158.652.908
11	KPPN SAMARINDA (046)	(17.802.979.908)
12	KPPN MANADO (049)	2.788.294.715
13	KPPN AMBON (061)	1.540.597.405
14	KPPN BANDUNG II (095)	8.003.266
		(62.087.570.751)

   b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp9.921.980.606 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN JAMBI (012)	(2.533.660.000)
2	KPPN MAKASSAR I (054)	(5.490.714.082)
3	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(238.918.969)
4	KPPN JAKARTA VI (175)	(1.658.687.555)
		(9.921.980.606)

c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp168.278.530.526.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp208,96 triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp208.962.960.718.114 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Saldo Akhir Kas[1])	**235.477.658.828.423**	**240.152.602.171.525**
Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Kas di Bendahara Penerimaan	166.170.010.917	92.280.796.378
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan [2])	3.956.502.008.861	2.911.840.057.154
Kas pada BLU yang Belum Disahkan [3])	(3.932.640)	-
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(10.817.836.834.384)	(6.215.489.058.582)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) [4])	(20.053.770.625.020)	(58.601.172.611.021)
Kas Transito (Kiriman Uang) [5])	52.495.330	465
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**208.962.960.718.114**	**178.625.211.629.388**

[1]) Saldo Akhir Kas sebesar Rp235.477.658.828.423 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Rekening Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening *Escrow*)	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Jumlah	**235.477.658.828.423**	**240.152.602.171.525**

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2019 sebesar Rp56.554.199.281.529 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp10.817.836.834.384 oleh Satker BLU.

[2]) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.956.502.008.861 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp5.591.063.945.100 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp1.634.561.936.239.

[3]) Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp3.932.640, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Total Kas pada BLU menurut K/L	45.736.358.514.505	48.795.152.993.771
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582
	56.554.195.348.889	55.010.642.052.353
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Kas pada BLU yang belum disahkan	**(3.932.640)**	-

[4]) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp20.053.770.625.020 merupakan Saldo Kas Rekening *Escrow* yang pada Neraca LKPP disajikan dalam komponen Aset Lainnya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

[5]) Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)
Kas Dalam Transito (Neraca)	52.495.330
Kas Transitoris (LAK)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	52.495.330

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp171,15 triliun

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp171.158.277.117.462 dan minus Rp85.606.836.614.663, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.960.287.552.753.207	1.943.383.353.170.059
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.131.445.829.870.669	2.028.990.189.784.722
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**(171.158.277.117.462)**	**(85.606.836.614.663)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp85.551.440.502.799 atau 99,94 persen dari TA 2018.

Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 sebesar minus Rp171.158.277.117.462 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat peningkatan arus kas masuk pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan peningkatan realisasi penerimaan negara. Namun demikian, arus kas keluar masih lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja Pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah terjadi terutama pada pos Belanja Hibah sebagai akibat peningkatan belanja pemerintah dalam rangka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,14 triliun

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2019 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp1.546.141.893.392.193 dan Rp1.518.789.777.151.030, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	772.265.718.286.668	749.977.029.683.808
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758
Pendapatan BPHTB	-	32.748.454
Pendapatan Cukai	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225
Pendapatan Pajak Lainnya	7.677.349.834.950	6.629.526.207.843
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1.505.088.202.287.697**	**1.472.907.964.370.352**
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	37.526.981.312.119	39.116.746.986.751
Bea Keluar	3.526.709.792.377	6.765.065.793.927
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**41.053.691.104.496**	**45.881.812.780.678**
Penerimaan Perpajakan	**1.546.141.893.392.193**	**1.518.789.777.151.030**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp27.352.116.241.163 atau 1,80 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp772,26 triliun

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp772.265.718.286.668 dan Rp749.977.029.683.808, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	24.493.086.993.337	26.549.508.906.106
Pendapatan PPh Gas Bumi	34.654.705.206.760	38.115.852.120.909
Pendapatan PPh Migas Lainnya	2.522.619.831	33.784.424.907
Jumlah Pendapatan PPh Migas	**59.150.314.819.928**	**64.699.145.451.922**
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	148.503.893.801.199	134.914.657.190.069
Pendapatan PPh Pasal 22	21.308.577.041.891	18.008.015.831.134
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	53.704.105.315.897	54.723.505.867.454
Pendapatan PPh Pasal 23	42.582.956.281.130	39.739.217.510.968
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.200.108.698.779	9.406.726.317.202
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	252.167.838.904.327	252.131.439.879.614
Pendapatan PPh Pasal 26	46.138.482.953.287	50.638.032.804.063
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	126.223.171.183.087	115.462.608.241.234
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	11.153.510.635.628	10.111.755.590.449
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	132.758.651.515	141.924.999.699
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	**713.115.403.466.740**	**685.277.884.231.886**
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	**772.265.718.286.668**	**749.977.029.683.808**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp22.288.688.602.860 atau 2,97 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp531,57 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp531.577.293.855.031 dan Rp537.267.909.259.264, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	344.440.292.858.365	333.921.320.457.564
Pendapatan PPN Impor	171.368.962.616.010	186.400.182.247.898
Pendapatan PPN Lainnya	162.381.392.806	68.708.364.877
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	10.847.390.983.819	12.794.658.786.886
Pendapatan PPnBM Impor	4.725.154.762.635	4.108.005.284.889
Pendapatan PPnBM Lainnya	33.111.241.396	(24.965.882.850)
Jumlah Pendapatan PPN dan PPnBM	**531.577.293.855.031**	**537.267.909.259.264**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.690.615.404.233 atau 1,06 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan PBB sebesar Rp21,14 triliun

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp21.145.900.040.486 dan Rp19.444.913.884.758, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan PBB Pedesaan	-	396.446.920
Pendapatan PBB Perkebunan	2.486.750.566.151	2.188.577.469.904
Pendapatan PBB Kehutanan	487.201.065.051	756.237.733.965
Pendapatan PBB Pertambangan	3.477.736.065.334	1.718.416.162.627
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.250.961.673.713	14.381.978.062.129
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	368.435.097.874	313.275.381.204
Pendapatan PBB Lainnya	74.815.572.363	86.032.628.009
Jumlah Pendapatan PBB	**21.145.900.040.486**	**19.444.913.884.758**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.700.986.155.728 atau 8,75 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pendapatan BPHTB sebesar Rp0

Pada TA 2019 tidak terdapat transaksi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB). Sedangkan pada TA 2018 adalah sebesar Rp32.748.454.

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai sebesar Rp172,42 triliun

Pendapatan Cukai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp172.421.940.270.562 dan Rp159.588.552.586.225, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	164.872.445.405.658	152.941.410.762.377
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	122.528.191.000	139.235.597.580
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	7.338.510.818.070	6.418.775.169.760
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	73.182.280.071	76.696.556.557
Pendapatan Cukai Lainnya	15.273.575.763	12.434.499.951
Jumlah Pendapatan Cukai	**172.421.940.270.562**	**159.588.552.586.225**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp12.833.387.684.337 atau 8,04 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp7,67 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp7.677.349.834.950 dan Rp6.629.526.207.843, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.598.023.951.809	5.455.839.042.895
Pendapatan PPn Batubara	538.680.322.182	656.409.788.263
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	75.490.463.210	27.615.845.263
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak:		
- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	655.039.379.502	(14.087.087.862)
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	589.923.712.311	499.442.551.458
- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	220.033.197.452	1.166.073.449
- Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	158.808.484	3.139.994.377
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**7.677.349.834.950**	**6.629.526.207.843**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp1.047.823.627.107 atau 15,81 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp41,05 triliun

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp41.053.691.104.496 dan Rp45.881.812.780.678, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	34.824.420.858.209	37.407.985.838.439
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	743.750
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	682.054.914.763	274.134.580.810
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	589.890.171.268	625.126.712.146
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	19.682.000
Perdapatan BM – DTP	354.326.302.000	370.614.635.480
Pendapatan Pabean Lainnya	29.077.858.500	11.675.815.285
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	308.468.786.790	247.390.857.841
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	22.101.000	44.227.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	738.720.319.589	179.753.894.000
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	**37.526.981.312.119**	**39.116.746.986.751**
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	3.526.335.855.946	6.763.961.349.944
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	373.535.431	1.079.891.983
Pendapatan Bunga Bea Keluar	401.000	24.552.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	**3.526.709.792.377**	**6.765.065.793.927**
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**41.053.691.104.496**	**45.881.812.780.678**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp4.828.121.676.182 atau 10,52 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP sebesar Rp408,64 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp408.648.315.368.093 dan Rp409.028.715.779.709, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Sumber Daya Alam	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80.726.119.206.790	45.060.521.375.969
Pendapatan PNBP Lainnya	124.157.596.399.650	128.282.486.329.481
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869.312.995.366	55.093.058.250.618
Jumlah PNBP	**408.648.315.368.093**	**409.028.715.779.709**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp380.400.411.616 atau 0,09 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan SDA sebesar Rp154,89 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp154.895.286.766.287 dan Rp180.592.649.823.641, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	83.622.340.876.020	101.486.695.315.900
Pendapatan Gas Bumi	37.467.520.404.392	41.302.551.779.459
Pendapatan Pertambangan Umum	26.343.691.801.600	30.313.666.621.680
Pendapatan Kehutanan	5.007.257.006.149	4.760.407.698.602
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.932.540.462.691	2.280.576.522.397
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	**154.895.286.766.287**	**180.592.649.823.641**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp25.697.363.057.354 atau 14,23 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp80,72 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp80.726.119.206.790 dan Rp45.060.521.375.969, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	49.773.695.752.482	44.602.870.375.969
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	860.515.629.605	457.651.000.000
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	30.091.907.824.703	-
Jumlah Pendapatan KND	**80.726.119.206.790**	**45.060.521.375.969**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp35.665.597.830.821 atau 79,15 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp124,15 triliun

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp124.157.596.399.650 dan Rp128.282.486.329.481, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	795.220.944	55.663.300.189
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	32.083.100.353.355	46.946.552.039.286
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	18.366.375.054.747	17.768.170.773.554
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.728.386.646.421	7.421.052.335.146
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	5.229.029.641.870	4.763.894.209.734
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	25.903.218.006.612	23.950.487.055.396
Pendapatan Jasa Lainnya	429.902.216.890	910.056.355.732
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	19.333.882.339.344	11.153.269.856.791
Pendapatan Denda	614.389.891.175	611.724.687.653
Pendapatan Lain-lain	15.468.517.028.292	14.701.615.716.000
Jumlah PNBP Lainnya	**124.157.596.399.650**	**128.282.486.329.481**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp4.124.889.929.831 atau 3,22 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU sebesar Rp48,86 triliun

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp48.869.312.995.366 dan Rp55.093.058.250.618, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	40.698.144.354.523	48.813.837.134.982
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	154.843.013.918	90.948.165.044
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	855.074.995.219	1.556.582.772.589
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	328.485.663.104	235.873.713.666
Pendapatan BLU Lainnya	6.832.764.968.602	4.395.816.464.337
Jumlah Pendapatan BLU	**48.869.312.995.366**	**55.093.058.250.618**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BLU sebesar Rp6.223.745.255.252 atau 11,30 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah sebesar Rp5,49 triliun

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.497.343.992.921 dan Rp15.564.860.239.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan	65.693.597.291	9.076.264.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	292.430.943.086	339.156.572.926
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	3.312.864.612.302	12.814.628.074.896
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	2.089.180.000	15.324.680.000
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**3.673.078.332.679**	**13.178.185.591.822**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	284.221.022.174	202.952.271.644
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral	305.016.747.985	215.422.323.945
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya	2.434.194.125	-
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral	686.083.404.317	1.527.744.362.454
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral	514.852.423.425	347.385.546.650
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya	31.657.868.216	93.170.142.805
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	**1.824.265.660.242**	**2.386.674.647.498**
Jumlah Pendapatan Hibah	**5.497.343.992.921**	**15.564.860.239.320**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp10.067.516.246.399 atau 64,68 persen dari TA 2018.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp376,07 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp376.074.259.852.619 dan Rp346.890.764.906.966, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	**TA 2019 (*Audited*)**	**TA 2018 (*Audited*)**
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.321.262.531.959	88.759.526.678.607
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	61.403.644.284.678	59.261.582.322.441
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.011.570.524.956	687.701.259.485
Belanja Gaji Dokter PTT	66.695.423.253	143.441.868.160
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	15.785.948.877.732	7.816.083.083.145
Belanja Honorarium	1.876.741.556.492	1.715.507.347.718
Belanja Lembur	723.295.487.788	736.748.654.327
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	83.006.573.420.266	71.842.863.496.643
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	119.482.270.828.040	110.214.811.345.869
Belanja Asuransi Kesehatan	7.396.256.917.455	5.712.498.850.571
Total Belanja Pegawai	**376.074.259.852.619**	**346.890.764.906.966**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp29.183.494.945.653 atau 8,41 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp334,41 triliun

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp334.418.207.630.784 dan Rp347.468.335.110.569, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	**TA 2019 (*Audited*)**	**TA 2018 (*Audited*)**
Belanja Barang	131.972.860.461.463	138.091.081.423.936
Belanja Jasa	32.584.478.436.045	35.722.999.519.182
Belanja Pemeliharaan	36.134.531.242.498	38.180.996.840.773
Belanja Perjalanan	44.705.074.918.849	42.692.124.890.095
Belanja Badan Layanan Umum	41.238.015.097.725	36.718.290.173.038
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	47.783.247.474.204	56.062.842.263.545
Jumlah Belanja Barang	**334.418.207.630.784**	**347.468.335.110.569**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp13.050.127.479.785 atau 3,76 persen dari TA 2018.

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp275,52 triliun

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp275.521.165.410.219 dan Rp257.952.028.141.279. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp17.569.137.268.940 atau 6,81 persen dari TA 2018.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp254.075.967.998.852 dan Rp21.445.197.411.367 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp254.075.967.998.852 dan Rp238.432.114.086.482, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	562.706.663.882	390.855.637.193
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	200.915.665.461.632	178.387.166.750.674
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	40.902.078.447.238	35.901.375.910.034
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	7.923.133.935.500	18.986.695.721.500
Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*	383.890.000.000	2.787.500.000
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara	3.388.493.490.600	4.763.232.567.081
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang DN	**254.075.967.998.852**	**238.432.114.086.482**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp15.643.853.912.370 atau 6,56 persen dari TA 2018.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp21.445.197.411.367 dan Rp19.519.914.054.797, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Bunga Pinjaman Program	11.653.996.532.055	9.593.734.945.579
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.790.711.282.574	9.925.615.100.850
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	489.596.738	564.008.368
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang LN	**21.445.197.411.367**	**19.519.914.054.797**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp1.925.283.356.570 atau 9,86 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi sebesar Rp201,80 triliun

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp201.802.566.846.111 dan Rp216.883.304.115.301, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	84.209.349.146.017	97.014.832.533.586
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM		
Belanja Subsidi Non BBM – Harga Biaya	86.974.766.558.944	90.120.320.139.040
Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak	11.507.859.802.306	10.482.377.006.258
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	4.143.114.912.890	4.233.533.194.018
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**186.835.090.420.157**	**201.851.062.872.902**
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	748.752.386.231	952.643.000.000
Belanja Subsidi – Bunga Kredit	14.162.727.326.335	13.957.637.714.201
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan *Risk Sharing*	47.813.614.505	116.569.439.887
Belanja Subsidi Kredit Program II	8.183.098.883	5.391.088.311
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	**14.967.476.425.954**	**15.032.241.242.399**
Jumlah Belanja Subsidi	**201.802.566.846.111**	**216.883.304.115.301**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Subsidi sebesar Rp15.080.737.269.190 atau 6,95 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar Rp6,47 triliun

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp6.476.205.662.045 dan Rp1.520.560.988.285, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	234.274.387.286	54.481.623.000
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	6.241.521.667.087	1.465.989.051.764
Belanja Hibah Lainnya	409.607.672	90.313.521
Jumlah Belanja Hibah	**6.476.205.662.045**	**1.520.560.988.285**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Hibah sebesar Rp4.955.644.673.760 atau 325,91 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp112,48 triliun

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp112.480.254.777.629 dan Rp84.318.412.919.513, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	397.798.295.384	262.639.545.303
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	47.129.306.212.971	36.130.093.800.799
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.827.675.472.473	2.888.119.938.473
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	34.703.408.078.000	19.077.821.483.801
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.789.409.255.595	19.131.121.934.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	7.632.657.463.206	6.828.616.217.137
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**112.480.254.777.629**	**84.318.412.919.513**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.161.841.858.116 atau 33,40 persen dari TA 2018.

Belanja Lain-lain sebesar Rp11,69 triliun

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp11.699.746.548.649 dan Rp16.163.845.545.430, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)	7.456.451.880.000	-
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	571.552.261.391	2.405.131.757.000
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	512.413.199.000	502.666.350.000
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.429.584.714	1.292.847.925
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.917.840.896	24.554.426.786
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	114.840.522.275	59.303.906.742
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	635.037.508.667	537.049.670.791
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	-	10.256.466.000.000
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	-	22.826.732.841
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.103.751.706	2.354.553.853.345
Jumlah Belanja Lain-lain	**11.699.746.548.649**	**16.163.845.545.430**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Lain-lain sebesar Rp4.464.098.996.781 atau 27,62 persen dari TA 2018.

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp39,15 triliun

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp39.158.751.141.991 dan Rp45.695.178.904.793, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	22.073.087.555.530	29.991.687.612.756
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	17.085.663.586.461	15.703.491.292.037
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**39.158.751.141.991**	**45.695.178.904.793**

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.536.427.762.802 atau 14,30 persen dari TA 2018.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp61,68 triliun

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp61.684.868.346.770 dan Rp45.086.668.324.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	15.219.315.833.056	13.265.216.482.401
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	16.739.397.376.741	9.210.412.221.749
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	25.884.279.134.431	19.807.904.298.240
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	1.372.588.054.173	832.936.590.394
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	2.119.085.885.757	1.612.576.032.153
Dana Bagi Hasil Perikanan	350.202.062.612	357.622.699.445
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**61.684.868.346.770**	**45.086.668.324.382**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp16.598.200.022.388 atau 36,81 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp3,13 triliun

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp3.136.352.925.658 dan Rp2.922.191.165.245. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp214.161.760.413 atau 7,33 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum sebesar Rp420,91 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 dan Rp401.489.579.649.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp19.420.658.907.000 atau 4,84 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp64,16 triliun

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270 dan Rp58.149.298.269.245. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp6.016.356.274.025 atau 10,35 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah sebesar Rp31,87 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp31.874.390.797.000 dan Rp29.290.333.186.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus Aceh	8.357.471.654.000	8.029.791.593.000
Dana Otonomi Khusus Papua	8.674.676.695.000	8.020.854.115.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	3.947.794.959.000	4.008.937.478.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.200.000.000.000	1.000.000.000.000
Dana Insentif Daerah	9.694.447.489.000	8.230.750.000.000
Jumlah	**31.874.390.797.000**	**29.290.333.186.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.584.057.611.000 atau 8,82 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp122,22 triliun

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp122.229.018.352.925 dan Rp115.300.279.949.439, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	53.979.069.017.265	56.743.822.617.193
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	463.968.756.915	588.007.130.574
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.200.273.626.885	44.367.351.931.006
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	12.052.644.554.156	9.207.778.308.894
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisataan	1.318.013.311.000	837.415.359.881
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.215.049.086.704	3.555.904.601.891
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**122.229.018.352.925**	**115.300.279.949.439**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp6.928.738.403.486 atau 6,01 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp69,81 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999 dan Rp59.859.408.609.275. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp9.954.739.869.724 atau 16,63 persen dari TA 2018.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp225,92 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp225.929.135.037.521 dan minus Rp245.132.313.372.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	2.677.421.193.017	1.230.455.589.354
Dikurangi Arus Kas Keluar	228.606.556.230.538	246.362.768.961.674
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(225.929.135.037.521)**	**(245.132.313.372.320)**

Dengan demikian, terdapat peningkatan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp19.203.178.334.799 atau 7,83 persen dari TA 2018. Hal ini memberikan informasi bahwa Pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sumber daya ekonomi berupa infrastruktur/sarana/prasarana dan penguatan sektor BUMN.

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp346,03 miliar

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp346.030.832.782 dan Rp291.523.708.737, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	341.531.328.482	250.827.244.737
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	4.499.504.300	40.696.464.000
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	**346.030.832.782**	**291.523.708.737**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp54.507.124.045 atau 18,70 persen dari TA 2018.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp179,98 miliar

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2019 dan TA 2018 sebesar Rp179.982.155.162 dan Rp163.619.880.616, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	169.188.403.022	124.649.183.550
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.793.752.140	38.970.697.066
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	**179.982.155.162**	**163.619.880.616**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp16.362.274.546 atau 10,00 persen dari TA 2018.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp1,37 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2019 sebesar Rp1.376.096.205.074, sedang pada TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp775,31 miliar

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp775.311.999.999 dan Rp775.312.000.001. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp2 dari TA 2018.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp174,84 triliun

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp177.841.479.636.714 dan Rp184.127.627.500.274, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	4.195.231.872.492	3.504.554.254.056
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.175.192.195.620	61.379.656.852.202
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.559.666.510.439	27.166.053.878.250
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.559.542.865.905	84.370.358.869.043
Belanja Modal Fisik Lainnya	6.497.371.766.901	3.073.599.068.981
Belanja Modal BLU	4.854.474.425.357	4.633.404.577.742
Jumlah Belanja Modal	**177.841.479.636.714**	**184.127.627.500.274**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Modal sebesar Rp6.286.147.863.560 atau 3,41 persen dari TA 2018.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5,00 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 dan Rp15.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.000.000.000.000 atau 66,67 persen dari TA 2018

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp8,20 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp8.200.000.000.000 dan Rp5.530.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp2.670.000.000.000 atau 48,28 persen dari TA 2018.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara sebesar Rp23,56 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN Lainnya. Penyertaan Modal Negara TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp23.565.076.593.824 dan Rp9.431.096.461.400, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	17.800.000.000.000	3.600.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	2.275.076.593.824	2.331.096.461.400
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.490.000.000.000	3.500.000.000.000
Jumlah PMN	**23.565.076.593.824**	**9.431.096.461.400**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp14.133.980.132.424 atau 149,87 persen dari TA 2018.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp14,00 triliun

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2019 dan TA 2018 sebesar Rp14.000.000.000.000 dan Rp32.274.045.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Investasi Pemerintah	2.000.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	12.000.000.000.000	31.152.730.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	-	1.121.315.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**14.000.000.000.000**	**32.274.045.000.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp18.274.045.000.000 atau 56,62 persen dari TA 2018

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp171.158.277.117.462 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp225.929.135.037.521 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp397.087.412.154.983. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp450,48 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp450.485.196.418.840 dan Rp366.988.807.449.803, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.018.597.889.862.368	877.412.063.987.503
Dikurangi Arus Kas Keluar	568.112.693.443.528	510.423.256.537.700
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**450.485.196.418.840**	**366.988.807.449.803**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp83.496.388.969.037 atau 22,75 persen dari TA 2018. Peningkatan pada Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan terlebih karena upaya pemerintah untuk mengurangi penerimaan pembiayaan dari luar negeri dan mengalihkannya pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp940,72 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp940.725.025.633.239 dan Rp784.742.629.776.147, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	15.000.000.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	2.429.387.504.746
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	772.906.022.331.714	641.581.192.271.401
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	148.576.772.200.000	140.732.050.000.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	4.242.231.101.525	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**940.725.025.633.239**	**784.742.629.776.147**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp155.982.395.857.092 atau 19,88 persen dari TA 2018.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL), sedangkan pada TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut. Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN tahun 2019 yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilakukan penarikan dari Rekening SAL sampai dengan 31 Desember 2019. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan pada TA 2019, sedang pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.429.387.504.746, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	-	2.397.198.022.147
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	-	32.189.482.599
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	**2.429.387.504.746**

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp772.906.022.331.714 dan Rp641.581.192.271.401, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	89.340.000.000.000	143.050.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	451.908.593.101.000	325.721.165.375.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	165.862.683.778.114	98.603.438.543.401
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	37.360.000.000.000	51.680.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	28.434.745.452.600	22.526.588.353.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	**772.906.022.331.714**	**641.581.192.271.401**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp131.324.830.060.313 atau 20,47 persen dari TA 2018.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp148.576.772.200.000 dan Rp140.732.050.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri	119.059.172.200.000	97.877.550.000.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang	29.517.600.000.000	42.854.500.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	**148.576.772.200.000**	**140.732.050.000.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp7.844.722.200.000 atau 5,57 persen dari TA 2018.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 sebesar Rp4.242.231.101.525 yang merupakan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN. Sedang pada TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp74,21 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp74.210.001.746.454 dan Rp88.609.746.474.180, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Tunai	36.717.630.284.048	50.625.053.600.000
Penarikan Pinjaman Kegiatan	37.492.371.462.406	37.984.692.874.180
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**74.210.001.746.454**	**88.609.746.474.180**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp14.399.744.727.726 atau 16,25 persen dari TA 2018.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp3,66 triliun

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp3.662.862.482.675 dan Rp4.054.687.737.176, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	336.041.308.615	346.401.949.711
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	3.326.821.174.060	3.708.285.787.465
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**3.662.862.482.675**	**4.054.687.737.176**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp391.825.254.501 atau 9,66 persen dari TA 2018.

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain sebesar Rp0

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2019, sedang pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp476,40 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp476.403.454.377.526 dan Rp424.990.319.440.149, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	1.075.568.713.531
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	412.729.586.110.100	381.055.706.226.618
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	62.464.607.300.000	42.859.044.500.000
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.209.260.967.426	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**476.403.454.377.526**	**424.990.319.440.149**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp51.413.134.937.377 atau 12,10 persen dari TA 2018.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp85,99 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp85.992.757.963.622 dan Rp76.333.197.362.316, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	31.317.372.208.106	22.356.849.857.109
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	54.675.385.755.516	53.968.748.159.161
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	-	7.599.346.046
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	**85.992.757.963.622**	**76.333.197.362.316**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp9.659.560.601.306 atau 12,65 persen dari TA 2018.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement sebesar Rp5,71 triliun

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.716.481.102.380 dan Rp9.099.739.735.235. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp3.383.258.632.855 atau 37,18 persen dari TA 2018.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp53,39 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp450.485.196.418.840 dan defisit anggaran sebesar Rp397.087.412.154.983, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp41,42 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp41.425.640.178.382 dan minus Rp5.378.953.624.562, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)
Transito (Neto)	2.817.768.874.869	3.498.307.513.555
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(45.959.771.656.851)	(8.693.890.485.382)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	(52.495.332)	330.588.756.176
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	**(41.425.640.178.382)**	**(5.378.953.624.562)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp36.046.686.553.820 atau 670,14 persen dari TA 2018.

F.2.4.1 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar Rp1,71 triliun

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp1.716.415.098.932 dan minus Rp513.959.408.911, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	25.515.614.381.003	24.075.116.293.031
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	-	1.610.035.356
Penerimaan PFK Beras BULOG	280.466.003.968	282.471.917.850
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	4.581.202.139.229	4.695.381.176.214
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	48.314.897
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	1.259.915.539	5.200.295
Penerimaan PFK Lain-lain	679.884.687.668	410.831.723.812
Jumlah Penerimaan PFK	**31.058.427.127.407**	**29.465.464.661.455**
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	16.441.954.391.147	15.238.490.910.891
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	52.559.070.000	27.083.035.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	129.104.986	170.157.244
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.122.009.541.801	1.581.206.158.711
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	3.467.016.222.000	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**21.083.668.329.934**	**16.846.950.261.846**
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji	(23.172.051.236.852)	(22.088.882.658.771)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.764.977.656.829)	(1.597.145.688.955)

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(280.491.880.002)	(282.639.079.083)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(5.017.916.032.378)	(5.117.174.430.880)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	(13.312.520)	(48.632.484)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(2.120.354.344)	-
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(307.548.821.039)	(133.410.258.982)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(30.545.119.293.964)**	**(29.219.300.749.155)**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(15.238.976.230.644)	(15.998.784.389.346)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(52.559.070.000)	(27.083.035.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(1.122.009.541.801)	(1.581.206.158.711)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	(3.467.016.222.000)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**(19.880.561.064.445)**	**(17.607.073.583.057)**
Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	**1.716.415.098.932**	**(513.959.408.911)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) sebesar Rp2.230.374.507.843 atau 433,96 persen dari TA 2018.

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto) sebesar Rp2,81 triliun

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *Escrow* dana subsidi dan reboisasi, Transito (Neto) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp2.817.768.874.869 dan Rp3.498.307.513.555, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	**TA 2019 (*Audited*)**	**TA 2018 (*Audited*)**
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	11.291.293.101.338	14.227.327.907.489
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	8.971.178.672.357	-
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	152.554.329	5.097.490.669
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	23.480.128.286.930	18.075.703.312.008
Penerimaan Escrow	8.737.496.913.592	8.073.039.013.608
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	-
Jumlah Penerimaan Transito	**52.480.249.528.546**	**40.381.167.723.774**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(11.309.426.786.254)	(14.205.270.777.282)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(8.971.178.672.357)	-
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(152.554.329)	(5.097.490.669)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(23.429.998.627.129)	(18.125.613.831.673)
Pengeluaran Escrow	(5.951.724.013.608)	(4.546.878.110.595)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(49.662.480.653.677)**	**(36.882.860.210.219)**
Jumlah Transito (Neto)	**2.817.768.874.869**	**3.498.307.513.555**

Dengan demikian, terdapat penurunan Transito (Neto) sebesar Rp680.538.638.686 atau 19,45 persen dari TA 2018.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar minus Rp45,95 triliun

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp45.959.771.656.851 dan minus Rp8.693.890.485.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (*Audited*)	TA 2018 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	40.312.556.247.186	53.295.000.063.027
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	942.358.812.624.291	835.624.944.478.326
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	17.776.784.379.532	53.744.151.269.687
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	562.020.730.222.589	544.069.346.552.982
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	8.156.386.337.513	6.123.553.023.046
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	71.975.041.983.110	69.118.894.560.000
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**1.642.600.311.794.221**	**1.561.975.889.947.068**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga	(40.392.038.442.495)	(53.305.566.836.926)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(952.732.631.126.359)	(844.068.965.823.547)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(52.948.605.117.911)	(53.749.151.946.195)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(562.367.762.691.627)	(544.403.906.181.709)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(8.143.992.149.951)	(5.989.018.695.230)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(71.975.041.983.110)	(69.118.894.560.000)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**(1.688.560.071.511.453)**	**(1.570.635.504.043.607)**
Neto	**(45.959.759.717.232)**	**(8.659.614.096.539)**
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	5.026.821.072.580	30.108.166.079.323
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(5.026.821.072.577)	(30.108.454.135.910)
	3	**(288.056.587)**
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	152.350.074.997	122.635.141.076
Koreksi PenerimaanPemindahbukuan	(152.362.014.619)	(156.623.473.332)
	(11.939.622)	**(33.988.332.256)**
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	**(45.959.771.656.851)**	**(8.693.890.485.382)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp37.265.881.171.469 atau 428,64 persen dari TA 2018.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar minus Rp52,49 juta

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp52.495.332 dan Rp330.588.756.176, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	**TA 2019 (*Audited*)**	**TA 2018 (*Audited*)**
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	14.838.442.845.811.636	14.571.295.116.506.261
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(14.838.442.898.307.968)	(14.570.964.527.750.085)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	**(52.495.332)**	**330.588.756.176**

Dengan demikian, terdapat penurunan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp330.641.251.508 atau 100,02 persen dari TA 2018.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp1.407,80 triliun

Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Nilai Ekuitas Awal tahun 2019 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2018 pada LKPP Tahun 2018 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit LO Rp249,22 triliun

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp249.226.639.571.213 dan Rp225.730.103.236.335. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp273.314.147.911.

G.3.2. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA minus Rp1,30 triliun

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp1.304.223.887.208 dan Rp1.501.069.710.656. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui *(null)* sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan tahun anggaran yang lalu 311212.

Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2019 *(Audited)*
311211	SILPA	(943.746.557.215)
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(360.477.329.993)
Jumlah		**(1.304.223.887.208)**

G.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp4,17 triliun

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.175.849.408.082 dan Rp6.005.920.659.013. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.722.382.276.282 yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu.
2. Kementerian PUPERA sebesar Rp141.185.324.694 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp312.281.807.106.

G.3.4. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp4.113,21 triliun

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.113.213.336.254.225 dan Rp0. Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP tahun 2019.

Rincian Revaluasi Aset Tetap yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L berikut.

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.191.656.271.110.500
- Kementerian PUPERA sebesar Rp1.101.722.367.326.770
- Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp498.913.423.715.074
- Kementerian Ristekdikti sebesar Rp292.433.105.847.275
- Kementerian Perhubungan sebesar Rp274.043.460.884.615
- Kepolisian RI sebesar Rp148.952.995.547.604

Rincian Revaluasi Aset Tetap disajikan pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 4.**

G.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi minus 82,07 triliun

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp82.075.076.826.694 dan minus Rp6.758.324.262.623. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2019 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di tahun 2019, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	(74.763.226.060.772)	(10.819.023.195.467)
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	2.942.057.554.556	(3.426.376.338)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	(3.670.950.852)	4.583.167.648.166
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	(5.381.414.523.626)	338.168.861.016
5. Penyesuaian Konsolidasi	(4.868.822.846.000)	(857.211.200.000)
Jumlah	**(82.075.076.826.694)**	**(6.758.324.262.623)**

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp74.763.226.060.772. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kementerian PUPR	(82.429.472.626.249)
Kepolisian RI	28.662.216.225.961
Kementerian Ristek dan Dikti	(11.372.475.533.427)
Kementerian Sekretariat Negara	(19.782.668.931.425)
Kementerian Pertahanan	9.481.177.970.709
Kementerian Perhubungan	(3.997.824.485.343)
Kementerian ESDM	2.853.088.828.262
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	1.822.732.490.740
Jumlah	**74.763.226.060.772**

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar Rp2.942.057.554.556. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kementerian Kesehatan	3.299.980.245.018
Kementerian PUPERA	(518.979.948.444)
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	161.057.257.982
Jumlah	**2.942.057.554.556**

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp3.670.950.852 yang berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain). Koreksi tersebut merupakan koreksi atas aset tetap pada BPKPBP Batam dan OJK dengan rincian sebagai berikut.
   a. BPKPBPB Batam sebesar Rp2.560.297.907, terdiri atas .
      1) Koreksi nilai aset KDP pada tahun 2018 sebesar Rp5.152.231.291;
      2) Koreksi nilai reklasifikasi KDP ke aset tetap tetap berupa Jalan sebesar Rp4.695.542.176 berdasarkan koreksi BPK;
      3) Koreksi penyajian hasil revaluasi BMN sebesar minus Rp7.287.475.560.
   b. OJK sebesar minus Rp5.790.012.956 merupakan koreksi kurang sebagai tindak lanjut dari penjualan bongkaran penataan di Gedung D Lantai 6 dan lantai 10 Komplek Perkantoran Bank Indonesia
   c. Koreksi pencatatan pengadaan APD Kantor Perwakilan Pamalu bulan Desember 2016 yang salah dibukukan ke Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp127.393.750 serta penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan Perlatan dan Mesin atas koreksi tersebut sebesar Rp6.201.391;
   d. Koreksi pencatatan biaya pengadaan Literatur Divisi Operasi Produksi Tahun 2016 (Ref. PJN 0073/SPPK1000/2016/S7 tanggal 02 Mei 2016) dengan masa berlangganan 1 tahun yang dicatat sebagai Aset Tetap sebesar minus Rp242.000.000;

e. Koreksi pencatatan ganda pada pengadaan 4 unit genset Kantor Perwakilan Pamalu perolehan bulan Desember 2016 sebesar minus Rp79.044.000 serta penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan Jaringan atas koreksi tersebut sebesar Rp1.000.556.

4. Koreksi Nilai Aset lainnya non revaluasi pada BUN sebesar minus Rp5.381.414.523.626 . Koreksi tersebut berasal dari:

a. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BA 999.03 merupakan koreksi yang dilakukan BLU LMAN sebesar minus Rp1.241.250.151 yang merupakan penyusutan sekaligus aset eks PPA batch II sejak periode penilaian hingga tahun 2018, penggunaan retensi untuk perbaikan aset Gereja Ayam dan koreksi kelebihan pengakuan perolehan aset upgrade Puri Casablanca tahap II.

b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp946.137.500 merupakan koreksi tambah atas perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)/Software tahun 2018 yang belum tercatat pada Aplikasi SIMAK-BMN Tahun 2018 dan baru dicatat pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan perolehan tersebut pada awalnya termasuk dalam tunggakan pembayaran terhadap pengadaan/perolehan BMN/Aset tahun 2018 namun setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap pembayarannya (penerbitan SPM/SP2D) telah dibayarkan/diterbitkan SPM/SP2D pada tahun 2018;

c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar minus Rp5.381.119.410.975. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:

1) Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar minus Rp93.845.055.963 yang merupakan hasil dari inventarisasi dan penilaian pada PT Adaro Indonesia sebesar Rp94.160.103.859, terdapat koreksi nilai perolehan dan pelepasan aset sebesar Rp7.472.262 pada PT KPC dan pada PT Tanito Harum terdapat koreksi kelebihan penyusutan terdahulu minus sebesar Rp2.007.250 dan reklasifikasi dari pendapatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp305.568.385 atas pencatatan aset PT KPC yang diperoleh sebelum tahun berjalan.

2) Satker Pengelola Aset KKKS sebesar minus Rp6.683.973.078.447

- Koreksi Tambah Nilai Wajar pada 2019 sebesar :
  - HBM : Rp20.336.492.945.996
  - HBI : Rp16.241.682.792
  - MP : Rp1.116.492.353.254
  - Tanah : Rp309.712.347.589
- Koreksi Kurang Nilai Wajar pada 2019 sebesar :
  - Tanah : Rp12.641.609.411.114
  - HBM : Rp14.008.738.723.865
  - HBI : Rp14.702.483.318
  - MP : Rp6.105.726.993.295
- Dikurangi dengan koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar minus Rp4.307.865.203.514 yang terdiri dari:
  - Koreksi tambah akumulasi penyusutan Harta Benda Modal sebesar Rp13.614.879.683.707
  - Koreksi tambah akumulasi penyusutan Harta Benda Inventarisasi sebesar Rp10.998.213.165
  - Koreksi kurang akumulasi penyusutan Harta Benda Modal sebesar Rp17.921.779.915.696

- Koreksi kurang akumulasi penyusutan Harta Benda Inventarisasi sebesar Rp11.963.184.690

3) Satker Eks Pertamina sebesar Rp 1.396.698.723.433 adalah nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kebijakan Mendasar pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina sebesar Rp1.396.698.723.433, yang merupakan selisih nilai wajar hasil Inventarisasi dan Penilaian Bulan Desember Tahun 2019 oleh KPKNL Cirebon.
4) Pembulatan sebesar Rp2.

5. Penyesuaian Konsolidasi LKPP TA 2019 sebesar minus Rp4.868.822.846.000 terdiri dari jurnal koreksi transaksi BPYBDS pada Kementerian Perindustrian sebesar minus Rp24.141.010.000 karena kesalahan akun dan Jurnal eliminasi pencatatan ganda antara TVRI dengan Kementerian Sekretariat Negara sebesar minus Rp4.844.681.836.000. Eliminasi pencatatan ganda dilakukan atas BMN berupa tanah pada Kementerian Sekretariat Negara dengan TVRI pada kawasan Senayan. Nilai yang dieliminasi merupakan nilai wajar tanah TVRI setelah revaluasi sebesar Rp5.701.893.036.000. Pada tahun 2018 sudah dilakukan eliminasi sebesar nilai harga perolehan sebesar Rp857.211.200.000, sehingga eliminasi pada TA 2019 senilai mutasi tambah sebesar Rp4.844.681.836.000.

G.3.6. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi minus Rp7,90 triliun

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp7.901.610.374.191 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi yang signifikan terdapat pada KL adalah sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kejaksaan Agung	(8.221.554.803.452)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	(978.622.232.168)
Kementerian Perhubungan	744.930.232.912
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	553.636.428.517
Jumlah	**(7.901.610.374.191)**

G.3.7. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya minus Rp57,77 triliun

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp57.777.054.738.064 dan Rp91.219.517.945.695. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2019 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Koreksi Lainnya pada K/L	(7.606.703.373.338)	28.927.660.594.840
2. Koreksi Lainnya pada BUN	(48.872.200.812.343)	72.605.784.273.115
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(1.298.150.552.384)	(10.313.926.922.260)
Jumlah*	**(57.777.054.738.064)**	**91.219.517.945.695**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Koreksi Lainnya pada K/L

   Koreksi Lainnya pada K/L untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp7.606.703.373.338 dan Rp28.927.660.594.840. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2019 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

   a. Kementerian Keuangan sebesar minus Rp12.234.512.666.453, di mana nilai Koreksi Lainnya terbesar berada di Ditjen Pajak sebesar minus Rp12.474.298.224.959 yang sebagian besarnya merupakan koreksi piutang perpajakan atas keputusan/putusan upaya hukum yang terbit pada periode sebelumnya namun dicatat pada periode berjalan.
   b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.146.839.824.485.
   c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp863.856.283.759, di mana nilai Koreksi Lainnya terbesar berada di Satker Kementeraian Pertahanan sebesar Rp1.319.434.005.691.

2. Koreksi Lainnya pada BUN

   Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp48.872.200.812.343 dan Rp72.605.784.273.115. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
a. 999.00 Kuasa BUN	(9.710.896.704.384)	11.059.805.369.942
b. 999.01 Pengelolaan Utang	23.817.039.836	(581.996.523.912)
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	1.713.550.086.234	3.259.483.730.332
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	(56.554.564.930.800)	44.292.061.973.245
e. 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman	2.701.116.570	(37.540.106.239)
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(4.212.787.952.888)	(2.482.307.601.567)
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	-	(449.954.500)
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	1.732.661.632.352	(288.200.235.546)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	216.262.939.952	(12.441.749.435)
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	966.590.553.080	2.426.198.123.797
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	17.116.302.925.293	14.971.171.246.998
l. Penyesuaian	(165.837.517.678)	
Jumlah*	**(48.872.200.812.433)**	**72.605.784.273.115**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp90 karena pembulatan*

   a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN

      Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp9.710.896.704.384 dan Rp11.059.805.369.942. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2019 *(Audited)*
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	(50.643.356.242)
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	907.673.305.405
Mutasi Kas BLU	1.543.557.229.176
Koreksi SAL (311111)	(154.125.800.908)
Koreksi penggunaan SAL (311112)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Ekuitas (391111)	3.042.641.918.190
Jumlah*	**(9.710.896.704.379)**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp5 karena pembulatan*

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp50.643.356.242 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran (akun 111611) sebesar Rp4.673.136.278, Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (akun 111613) sebesar minus Rp55.634.643.120 dan eliminasi sebesar Rp318.150.600.

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.817.039.836 dan minus Rp581.996.523.912. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang disajikan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.01	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Koreksi nilai Pinjaman Dalam Negeri	-	943.529.183
Koreksi nilai Utang Program	(5.925.391.708)	(39.766.798.366)
Koreksi nilai Utang Proyek	22.096.642.908	(530.777.632.700)
Koreksi nilai Utang Lainnya	8.783.284.092	(12.395.622.029)
Penyesuaian Beban Bunga LO	134.458.544	-
Penyesuaian Pendapatan LO	(1.271.954.000)	-
Jumlah	**23.817.039.836**	**(581.996.523.912)**

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.713.550.086.234 dan Rp3.259.483.730.332. Koreksi Lainnya LPE pada BUN Pengelolaan Hibah merupakan koreksi atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1815/PB/2019 dan Transaksi Jurnal Koreksi atas nilai pendapatan hibah yang ditangguhkan yang masih tersaji di neraca per Januari 2019 sesuai nota dinas Direktur APK, DJPB nomor ND-109/PB.6/2020.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan jenis transaksi, yaitu:

1) Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp854.878.040.105.
2) Koreksi atas nilai Pendapatan Hibah yang Ditangguhkan sebesar Rp858.672.046.129.

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp56.554.564.930.800 dan Rp44.292.061.973.245. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah disajikan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.03	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
KPA Dit PNBP DJA	64.899.993.857	(750.000.000)
BLU LPDB KUMKM	(5.697.606.196)	(71.521.952.645)
KPA Kemen BUMN	(28.295.649.664.359)	38.937.359.256.755
KPA DJKN	(2.223.363.743.339)	(892.437.514.807)
UAIP	(23.104.753.910.763)	7.285.019.959.916
BLU LMAN	-	609.278
KPA BKF	-	(1.000.000.000.000)
KPA PPKIM	-	34.391.614.748
KPA Dit. SMI (DJPB)	(990.000.000.000)	-
KPA Pinjaman Hibah (DJPPR)	(2.000.000.000.000)	-
Jumlah	**(56.554.564.930.800)**	**44.292.061.973.245**

e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.701.116.570 dan minus Rp37.540.106.239. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman pada TA 2019 berasal dari pencatatan NoD/SP4H yang telah dicatat sebagai penambahan aset pemberian pinjaman sebesar Rp2.705.358.870, namun NoD/SP4H tersebut belum dicatat dalam SPAN, sehingga perlu dilakukan jurnal manual untuk mengakomodasi hal tersebut. Selain itu, ekuitas digunakan untuk mencatat koreksi nilai piutang atas debitur PT. PLN yang dicatat lebih dari seharusnya *(overstated)* pada Laporan Keuangan BA 999.04 Tahun 2018 *Audited*. Kelebihan tersebut sebesar $300,00 dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2019 sebesar minus Rp4.242.300.

f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengeloaan TKDD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp4.212.787.952.888 dan minus Rp2.482.307.601.567. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD TA 2019 terdiri dari:

1) Koreksi Piutang atas Reklasifikasi Piutang TKD Diestimasi menjadi Piutang Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.152.586.714.065;
2) Koreksi Utang atas Reklasifikasi Utang TKD Diestimasi menjadi Utang TKD sebesar minus Rp5.365.374.666.953;

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL)

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Pengelolaan BSBL pada pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp449.954.500.

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.732.661.632.352 dan minus Rp288.200.235.546. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL disajikan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.07	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Kementerian PUPR	60.257.298.971	(192.951)
Kementerian Pertanian	(15.467.054.196)	(107.775.632.886)
Kementerian Keuangan	(565.647.093.460)	(654.267.108.728)
Kementerian Koperasi dan UKM	2.253.518.479.336	473.842.699.020
Kementerian Sosial	-	(1)
Kementerian Perhubungan	701	-
Jumlah Koreksi Lainnya	**1.732.661.632.352**	**(288.200.235.546)**

Koreksi lainnya pada Kementerian Koperasi dan UKM berupa penghapusan sisa saldo utang estimasi tahun 2018 karena adanya perubahan kebijakan pengakuan utang estimasi pada tahun 2019 yaitu tidak mengakui utang atas tagihan yang belum lolos verifikasi dengan pertimbangan derajat kepastian kurang.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp216.262.939.952 dan minus Rp12.441.749.435. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp525.889.755 merupakan koreksi utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak tahun 2017 setelah mendapat reviu dari BPKP.
2) Ditjen Anggaran sebesar minus Rp7.456.451.880.000 atas pembayaran kewajiban Pemerintah terhadap tarif listrik TA 2017.
3) Ditjen Tanaman Pangan sebesar minus Rp392.787.899 merupakan koreksi atas naik turunnya nilai persediaan yang menyebabkan bartambah dan berkurangnya nilai piutang bukan pajak.
4) SKK Migas sebesar Rp156.402.193 merupakan koreksi atas pencatatan piutang kepada pihak ketiga dan kepada pegawai.
5) Satker Suspen sebesar Rp7.672.425.315.903 merupakan koreksi atas serah terima Pencatatan Utang Pihak Ketiga Lainnya dari Satker Suspen kepada Satker DJA sebesar Rp7.456.451.880.403 dan koreksi atas pencatatan utang sebesar Rp215.973.435.500. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya.

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp966.590.553.080 dan Rp2.426.198.123.797. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.09	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Otorita Asahan	(1.040.454.951)	(5.723.385.343)
Yayasan TMII	85.151.640	838.358.276
Yayasan Gedung Veteran	(1.215.524.084)	(1.209.977.642)
Baznas	21.568.082.370	(36.779.821.723)
Badan Wakaf Indonesia	99.654.207	(10.671.526)
BP Dana Abadi Umat	-	(3.327.847.280.828)
SKK Migas	(29.124.427.010)	353.220.510.951
OJK	293.570.506.332	1.292.651.713.003
Badan Pengelola Keuangan Haji	682.647.564.576	4.151.058.678.629
Jumlah	**966.590.553.080**	**2.426.198.123.797**

k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.116.302.925.293 dan Rp14.971.171.246.998. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

UAPBUN TK	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	14.983.448.665.698	(760.210.994.707)
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	2.614.340.557.155	10.512.511.652.063
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(481.486.297.560)	5.218.871.004.032
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	**17.116.302.925.293**	**14.971.171.661.388**

I. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar minus Rp165.837.517.678 dan 0.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP
   Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp1.298.150.552.384 dan minus Rp10.313.926.922.260. Penyesuaian konsolidasian merupakan penyesuaian berasal dari eliminasi penyajian ganda antara KL dengan BA BUN.

Transaksi Antar Entitas Rp400,07 miliar

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp400.076.249.724 dan Rp513.172.752.484. Transaksi Antar Entitas TA 2019 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2019 *(Audited)*	31 Desember 2018 *(Audited)*
Ditagihkan Ke Entitas Lain	9.464.964.346.763.850	9.024.058.360.711.860
Diterima Dari Entitas Lain	(9.479.843.736.107.350)	(9.053.140.743.836.210)
Pengesahan Hibah Langsung	14.584.887.973.846	27.997.866.283.268
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(117.296.886.522)	(2.192.390.439.978)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	846.768.035.664	3.246.918.430.584
Setoran Surplus BLU	(1.171.178.672.357)	-
Transfer Keluar	(243.191.067.333.248)	(297.074.388.438.771)
Transfer Masuk	244.327.352.475.842	297.617.550.041.741
Jumlah*	**400.076.249.724**	**513.172.752.494**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.

5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dicatat pada BUN. Dana lainnya juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp9.464.964.346.763.850, DDEL sebesar minus Rp9.479.843.736.107.350, pengesahan hibah langsung sebesar Rp14.584.887.973.846, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp117.296.886.522, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp846.768.035.664, dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp1.171.178.672.357.
   Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebesar minus Rp736.208.892.869 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.
   Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Perbedaan pencatatan TAE pada BA BUN 99999	-
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(172.396.721.402)
c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP	7.141.889.589
d) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	47.997
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(3.312.755.009)
f) Jurnal balik Escrow Cadangan Alutsista	(568.638.448.046)
g) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL	997.094.000
h) Transaksi antar Entitas lainnya	1
Jumlah*	**(736.208.892.869)**

**) Selisih sebesar Rp 1 karena pembulatan*

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp736.208.892.869 di antaranya sebagai berikut.

a) Tidak ada perbedaan TAE pada BUN.

b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan posting rule ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp172.396.721.402.

c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp7.141.889.589. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) yang disebabkan karena selisih kurs.

d) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp47.997 lebih besar catatan KL.

e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp3.312.755.009. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.

f) Jurnal balik Cadangan Alutsista sebesar minus Rp568.638.448.046 di Rekening Escrow Dana yang dibatasi penggunaannya.

g) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL sebesar Rp997.094.000

h) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Rp1.

2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar(TK) konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp243.191.067.333.248 dan Transfer Masuk sebesar Rp244.327.352.475.842. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp1.136.285.142.594. Selisih lebih besar Transfer Masuk antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp928.032.666.662 antara lain disebabkan oleh karena perbedaan Harga Perolehan Terakhir(HPT) atas barang konsumsi, akibat koreksi revaluasi, kesalahan pengisian kode barang, dan aset yang dihentikan penggunaannya pada satker Transfer Masuk berubah ke kelompok induk golongan barang Aset Tetap.

b) Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar minus Rp261.090.792.688 antara lain disebabkan Transfer keluar barang dihentikan, Transfer keluar dari Aset Tetap yang tidak digunakan operasi Pemerintah, Transfer keluar yang sudah diusulkan penghapusan oleh pengelola barang.

c) Selisih pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp59.499.542.372 disebabkan adanya perbedaan penginputan Transfer Masuk ATR secara manual tanpa ADK, adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, dan adanya koreksi hasil reval dari koreksi Transfer Keluar akibat koreksi reval.

d) Selisih pada Kementerian Pertanian sebesar minus Rp97.951.889.494 antara lain disebabkan karena satker terlambat upload ke e-rekon, karena kesalahan sistem saat pengiriman data dari aplikasi SIMAK ke SAIBA, akibat koreksi revaluasi.

e) Selisih pada Kementerian Agama sebesar Rp11.998.920.522, antara lain karena adanya Transfer Keluar akibat koreksi revaluasi (trn 331), TM akibat koreksi IP (trn 424), penyusutan TM akibat koreksi revaluasi (trn 248), selisih TKTM persediaan

f) Selisih pada Kementerian Sosial sebesar Rp 4.552.636.205 akibat adanya akun akumulasi penyusutan yang ditransfer dari satker Inaktif (PSBR Bambu Apus) ke satker baru (BRSKPN Bambu Apus) dimana proses kapitalisasinya menggunakan cara yang berbeda sehingga akun akumulasi penyusutan tidak dapat di Transfer keluar ke satker baru

g) Selisih pada Badan Narkotika Nasional sebesar Rp3.478.952.090 disebabkan antara lain krn perbedaan HPT atas barang konsumsi, selisih akibat koreksi revaluasi atas barang yang sudah ditransfer keluar.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada **Lampiran 29**. Ringkasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai berikut.

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
KL	(227.177.035.055.927)	240.053.195.825.425	12.876.160.769.498
BA BUN	(16.014.032.277.321)	4.274.156.650.417	(11.739.875.626.904)
Total LKPP	**(243.191.067.333.248)**	**244.327.352.475.842**	**1.136.285.142.594**

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Kenaikan Ekuitas Rp3.719,50 triliun

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.719.504.656.514.661 dan minus Rp132.975.432.283.199. Nilai Kenaikan/ Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Rp5.127,31 triliun

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.407.808.224.645.741 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp3.719.504.656.514.661.



Republik Indonesia

INDEKS CALK

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	**B.2.1**	**Pendapatan Negara**	**87**
Catatan	**B.2.1.1**	**Penerimaan Perpajakan**	**88**
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	88
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	89
Catatan	**B.2.1.2**	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**89**
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	89
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	90
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	91
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	93
Catatan	**B.2.1.3**	**Penerimaan Hibah**	**93**
Catatan	**B.2.2**	**Belanja Negara**	**94**
Catatan	**B.2.2.1**	**Belanja Pemerintah Pusat**	**94**
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	97
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	97
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	99
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	100
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	100
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	102
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	103
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	103
Catatan	**B.2.2.2**	**Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	**104**
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	104
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	105
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	105
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	105
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	106
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	106
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	106
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	107
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	107
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	108
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	108
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	109
Catatan	**B.2.3**	**Defisit Anggaran**	**109**
Catatan	**B.2.4**	**Pembiayaan**	**109**
Catatan	**B.2.4.1**	**Pembiayaan Dalam Negeri**	**110**
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL	110
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	111
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	111
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara	112
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	113
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	113
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	114
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	115
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	115
Catatan	**B.2.4.2**	**Pembiayaan Luar Negeri**	**115**
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	115
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Tunai	116

Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Kegiatan	116
Catatan	B.2.4.2.2	Pemberian Pinjaman	116
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	116
Catatan	**B.2.5**	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	**117**
Catatan	**B.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**118**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	**C.1**	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**128**
Catatan	**C.2**	**Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**128**
Catatan	**C.3**	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**	**128**
Catatan	**C.4**	**Penyesuaian Pembukuan**	**129**
Catatan	**C.5**	**Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)**	**130**
Catatan	**C.6**	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**134**

NERACA

Catatan	**D.2.1**	**ASET**	**136**
Catatan	**D.2.1.1**	**Aset Lancar**	**136**
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	136
Catatan	D.2.1.1.1.1	Kas di Rekening Pemerintah di BI dan Bank Umum	136
Catatan	D.2.1.1.1.2	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	137
Catatan	D.2.1.1.1.3	Kas di Rekening Kas di KPPN	138
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	138
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	139
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	139
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	139
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas pada BLU	140
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka Rekening BUN	141
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	141
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	142
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	143
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	143
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	143
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	145
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	152
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian LancarTagihan TP/TGR	152
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	153
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	153
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	153
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	154
Catatan	D.2.1.1.6.9	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	155
Catatan	D.2.1.1.6.10	Penyisihan Piutang TidakTertagih – Piutang Jangka Pendek	155
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	156
Catatan	**D.2.1.2**	**Investasi Jangka Panjang**	157
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	157
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	157
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	160
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	162
Catatan	D.2.1.2.1.4	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	163
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	163
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	163
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	166
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	166

Catatan	**D.2.1.3**	**Aset Tetap**	**168**
Catatan	D.2.1.3.1	Tanah	168
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	168
Catatan	D.2.1.3.3	Gedung dan Bangunan	169
Catatan	D.2.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	169
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	169
Catatan	D.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	169
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	169
Catatan	**D.2.1.4**	**Piutang Jangka Panjang**	**170**
Catatan	D.2.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	170
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	170
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	170
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Lainnya	171
Catatan	D.2.1.4.5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	172
Catatan	**D.2.1.5**	**Aset Lainnya**	**173**
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	174
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	175
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	176
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	180
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	181
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	184
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	195
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	197
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	198
Catatan	**D.2.2**	**KEWAJIBAN**	**198**
Catatan	**D.2.2.1**	**Kewajiban Jangka Pendek**	**198**
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	199
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	200
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Bunga	205
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	206
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	209
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	210
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	211
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	211
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	211
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	212
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	212
Catatan	**D.2.2.2**	**Kewajiban Jangka Panjang**	**213**
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	213
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	213
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	214
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	214
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	214
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	216
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	220
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	222
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	222
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	223
Catatan	**D.2.3**	**EKUITAS**	**223**
Catatan	**D.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**224**

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	**E.2.1**	**Kegiatan Operasional**	**288**
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	289
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	290
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	290
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	292
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	292
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	292
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	292
Catatan	E.2.1.1.1.6	Pendapatan Bea Masuk	293
Catatan	E.2.1.1.1.7	Pendapatan Bea Keluar	293
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	294
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	294
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	294
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	295
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	297
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	299
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	299
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	300
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	302
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	302
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	303
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	304
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	304
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	305
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	305
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	307
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	308
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	308
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	309
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	314
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	315
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	315
Catatan	**E.2.2**	**Kegiatan Non Operasional**	**317**
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	317
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	317
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	318
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	318
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	318
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	318
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	320
Catatan	**E.2.3**	**Pos Luar Biasa**	**321**
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	321
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	321

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	322
Catatan	F.1.2	Kenaikan (Penurunan) Kas	322
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	324
Catatan	**F.2.1**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**325**
Catatan	**F.2.1.1**	**Arus Kas Masuk**	**326**

Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	326
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	326
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	327
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	327
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	327
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	327
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	328
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	328
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	329
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	329
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	329
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	330
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	330
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	330
Catatan	**F.2.1.2**	**Arus Kas Keluar**	**331**
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	331
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	331
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	332
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	333
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	333
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	333
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	334
Catatan	F.2.1.2.8	Dana Bagi Hasil Pajak	334
Catatan	F.2.1.2.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	334
Catatan	F.2.1.2.10	Dana Bagi Hasil Cukai	335
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	335
Catatan	F.2.1.2.12	Dana Alokasi Khusus	335
Catatan	F.2.1.2.13	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah	335
Catatan	F.2.1.2.14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	336
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	336
Catatan	**F.2.2**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**336**
Catatan	**F.2.2.1**	**Arus Kas Masuk**	**337**
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	337
Catatan	F.2.2.1.2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	337
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	337
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	337
Catatan	**F.2.2.2**	**Arus Kas Keluar**	**338**
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	338
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	338
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	338
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	338
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	339
Catatan	**F.2.3**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**339**
Catatan	**F.2.3.1**	**Arus Kas Masuk**	**339**
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	339
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	341
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	341
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	341
Catatan	**F.2.3.2**	**Arus Kas Keluar**	**342**
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	342
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	342
Catatan	F.2.3.2.3	Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari SLA	342
Catatan	**F.2.4**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**343**

Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	343
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	344
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	345
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	346

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	**G.1**	**Ekuitas Awal**	**347**
Catatan	**G.2**	**Surplus/Defisit LO**	**347**
Catatan	**G.3**	**Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas**	**347**
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	347
Catatan	G.3.2	Penyesuaian SiLPA	347
Catatan	G.3.3	Koreksi Nilai Persediaan	348
Catatan	G.3.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	348
Catatan	G.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	348
Catatan	G.3.6	Koreksi atas Reklasifikasi	351
Catatan	G.3.7	Koreksi Lainnya	351
Catatan	**G.4**	**Transaksi Antar Entitas**	**356**
Catatan	**G.5**	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**359**
Catatan	**G.6**	**Ekuitas Akhir**	**359**



Republik Indonesia

INDEKS SINGKATAN

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	BantuanPemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	*Capital Adequate Ratio*
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CICR	:	*Consolidated Interest Coverage Ratio*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea danCukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DNS	:	*Debt for Nature Swap*
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN		Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	*Debt Service Coverage Ratio*
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions*
GIZ-GGPAS	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems*
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	*Japanese Yen*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor *Production Sharing*
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam

NPL	:	*Non-Performing Loan*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	*Project Based Sukuk*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	*Real Time Gross Settlement*
SAA	:	*Separate Arrangement Agreement*
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*

SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	:	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan HariTua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USAID	:	*United State Agency for International Development*
USD	:	*United State Dollar*
UPP	:	Unit Pelaksana Proyek
UP3	:	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

Lampiran atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 disampaikan dalam bentuk softcopy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 sebagaimana link/tautan di bawah ini.

Tautan:
https://bit.ly/LKPP2019_Audited



Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat

Republik Indonesia

LAMPIRAN

LKPP

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2019

(*Audited*)

Juni 2020

Republik Indonesia

LAMPIRAN

LKPP

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2019

(*Audited*)

Juni 2020

DAFTAR ISI

1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2019 ..... L.1

2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 ..... L.14

3 Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 ..... L.46

4 Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Per 31 Desember 2019 ..... L.113

5 Saldo Kas Di Rekening KPPN Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.114

6 Kas Pada K/L dan BUN Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.115

7 Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.117

8 Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2019 ..... L.120

9 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.124

10 Rincian Piutang Transfer Ke Daerah Per 31 Desember 2019 ..... L.127

11 Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2019 ..... L.142

12 Rincian Aset Kredit Eks BPPN dan Eks PT PPA Per 31 Desember 2019 ..... L.143

13 Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.151

14 Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.153

15 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2019 ..... L.156

16 Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2019 ..... L.162

17 Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2019 ..... L.164

18 Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2019 ..... L.165

19 Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Per 31 Desember 2019 ..... L.166

20 Aset Tetap Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.167

21 TP/TGR Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.168

22 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.188

DAFTAR ISI

23 Rincian Aset Eks BPPN Per 31 Desember 2019 ..... L.191

24 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.203

25 Daftar BMN Eks BMN *Idle* yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2019 & Pemanfaatan Aset Eks BLBI/Eks PT PPA L.207

26 Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..... L.234

27 Rincian Kewajiban Transfer Ke Daerah (Dana Bagi Hasil) L.262

28 Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2019 ..... L.276

29 Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2019 ..... L.282

30 Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2019 ..... L.288

31 Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2019 ..... L.290

32 Rekapitulasi Revaluasi Aset Tetap Kementerian Lembaga Tahun 2019 ..... L.292

33 Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2019 ..... L.305



Republik Indonesia

Lampiran 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
41	**PENDAPATAN PERPAJAKAN**	**1.786.378.650.376.000**	**1.546.141.893.392.193**	**86,55%**	**1.518.789.777.151.030**	**27.352.116.241.160**	**1,80%**
411	**PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI**	**1.743.056.850.376.000**	**1.505.088.202.287.700**	**86,35%**	**1.472.907.964.370.350**	**32.180.237.917.345**	**2,18%**
4111	**Pendapatan Pajak Penghasilan**	**894.448.650.110.000**	**772.265.718.286.668**	**86,34%**	**749.977.029.683.808**	**22.288.688.602.860**	**2,97%**
41111	**Pendapatan PPh Migas**	**66.154.650.000.000**	**59.150.314.819.928**	**89,41%**	**64.699.145.451.922**	**-5.548.830.631.994**	**-8,58%**
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	29.853.100.000.000	24.493.086.993.337	82,05%	26.549.508.906.106	-2.056.421.912.769	-7,75%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	36.301.550.000.000	34.654.705.206.760	95,46%	38.115.852.120.909	-3.461.146.914.149	-9,08%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	2.522.619.831		33.784.424.907	-31.261.805.076	-92,53%
41112	**Pendapatan PPh Non-Migas**	**828.294.000.110.000**	**701.961.892.831.112**	**84,75%**	**675.165.778.735.455**	**26.796.114.095.657**	**3,97%**
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	145.756.375.850.000	148.503.893.801.199	101,89%	134.914.657.190.069	13.589.236.611.130	10,07%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	22.711.510.000.000	21.308.577.041.891	93,82%	18.008.015.831.134	3.300.561.210.757	18,33%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	68.260.490.000.000	53.704.105.315.897	78,68%	54.723.505.867.454	-1.019.400.551.557	-1,86%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	48.505.700.000.000	42.582.956.281.130	87,79%	39.739.217.510.968	2.843.738.770.162	7,16%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.923.713.000.000	11.200.108.698.779	102,53%	9.406.726.317.202	1.793.382.381.577	19,06%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	311.548.880.000.000	252.167.838.904.327	80,94%	252.131.439.879.614	36.399.024.713	0,01%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	82.473.700.000.000	46.138.482.953.287	55,94%	50.638.032.804.063	-4.499.549.850.776	-8,89%
411128	Pendapatan PPh Final	137.831.560.000.000	126.223.171.183.087	91,58%	115.462.258.335.252	10.760.912.847.835	9,32%
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	282.071.260.000	132.758.651.515	47,07%	141.924.999.699	-9.166.348.184	-6,46%
41113	**Pendapatan PPh Fiskal**	**0**			**349.905.982**	**-349.905.982**	**-100,00%**
411131	Pendapatan PPh Fiskal	0			349.905.982	-349.905.982	-100,00%
41114	**Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah**	**0**	**11.153.510.635.628**		**10.111.755.590.449**	**1.041.755.045.179**	**10,30%**
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	7.345.980		12.987.522	-5.641.542	-43,44%
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	730.495		167.200	563.295	336,90%
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah				-2.462.000	2.462.000	-100,00%
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	0	472.736.000		503.900.818	-31.164.818	-6,18%
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	0	-22.247.678			-22.247.678	
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	0	2.240.629.780.907		1.892.891.197.764	347.738.583.143	18,37%
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	0	8.912.420.935.294		8.218.348.183.000	694.072.752.294	8,45%
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	854.630		1.616.145	-761.515	-47,12%
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	0	500.000			500.000	
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai**	**655.394.900.106.000**	**531.577.293.855.031**	**81,11%**	**537.267.909.259.264**	**-5.690.615.404.233**	**-1,06%**
41121	**Pendapatan PPN**	**633.994.296.069.000**	**515.971.636.867.181**	**81,38%**	**520.390.211.070.339**	**-4.418.574.203.158**	**-0,85%**
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	410.687.726.381.000	344.440.292.858.365	83,87%	333.921.320.457.564	10.518.972.400.801	3,15%
411212	Pendapatan PPN Impor	223.306.569.688.000	171.368.962.616.010	76,74%	186.400.182.247.898	-15.031.219.631.888	-8,06%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	0	162.381.392.806		68.708.364.877	93.673.027.929	136,33%
41122	**Pendapatan PPnBM**	**21.400.604.037.000**	**15.605.656.987.850**	**72,92%**	**16.877.698.188.925**	**-1.272.041.201.075**	**-7,54%**
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	15.085.363.119.000	10.847.390.983.819	71,91%	12.794.658.786.886	-1.947.267.803.067	-15,22%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	6.165.186.918.000	4.725.154.762.635	76,64%	4.108.005.284.889	617.149.477.746	15,02%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	150.054.000.000	33.111.241.396	22,07%	-24.965.882.850	58.077.124.246	-232,63%
4113	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**19.103.600.160.000**	**21.145.900.040.486**	**110,69%**	**19.444.913.884.758**	**1.700.986.155.728**	**8,75%**
41131	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**19.103.600.160.000**	**21.145.900.040.486**	**110,69%**	**19.444.913.884.758**	**1.700.986.155.728**	**8,75%**
411311	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0			396.446.920	-396.446.920	-100,00%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	2.483.405.652.000	2.486.750.566.151	100,13%	2.188.577.469.904	298.173.096.247	13,62%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	680.343.496.000	487.201.065.051	71,61%	756.237.733.965	-269.036.668.914	-35,58%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.689.767.192.000	3.477.736.065.334	205,81%	1.718.416.162.627	1.759.319.902.707	102,38%
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bum	13.959.342.000.000	14.250.961.673.713	102,09%	14.381.978.062.129	-131.016.388.416	-0,91%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bum	289.352.597.000	368.435.097.874	127,33%	313.275.381.204	55.159.716.670	17,61%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	1.389.223.000	74.815.572.363	5385,43%	86.032.628.009	-11.217.055.646	-13,04%
4114	**Pendapatan BPHTB**	**0**			**32.748.454**	**-32.748.454**	**-100,00%**
41141	**Pendapatan BPHTB**	**0**			**32.748.454**	**-32.748.454**	**-100,00%**
411411	Pendapatan BPHTB	0			32.748.454	-32.748.454	-100,00%
4115	**Pendapatan Cukai**	**165.501.000.000.000**	**172.421.940.270.562**	**104,18%**	**159.588.552.586.225**	**12.833.387.684.337**	**8,04%**
41151	**Pendapatan Cukai**	**165.501.000.000.000**	**172.421.940.270.562**	**104,18%**	**159.588.552.586.225**	**12.833.387.684.337**	**8,04%**
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	158.855.592.463.000	164.872.445.405.658	103,79%	152.941.410.762.377	11.931.034.643.281	7,80%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	158.214.143.000	122.528.191.000	77,44%	139.235.597.580	-16.707.406.580	-12,00%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkoho	5.987.193.394.000	7.338.510.818.070	122,57%	6.418.775.169.760	919.735.648.310	14,33%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	73.182.280.071		76.696.556.557	-3.514.276.486	-4,58%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	500.000.000.000	15.273.575.763	3,05%	12.434.499.951	2.839.075.812	22,83%
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**8.608.700.000.000**	**7.677.349.834.950**	**89,18%**	**6.629.526.207.843**	**1.047.823.627.107**	**15,81%**
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**8.608.700.000.000**	**6.212.194.737.201**	**72,16%**	**6.139.864.676.421**	**72.330.060.780**	**1,18%**
411611	Pendapatan Bea Meterai	0	1.480.577.017.178		1.470.393.848.442	10.183.168.736	0,69%
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	4.117.446.934.631		3.985.445.194.453	132.001.740.178	3,31%
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	538.680.322.182		656.409.788.263	-117.729.466.081	-17,94%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	8.608.700.000.000	75.490.463.210	0,88%	27.615.845.263	47.874.617.947	173,36%
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**	**0**	**1.465.155.097.749**		**489.661.531.422**	**975.493.566.327**	**199,22%**
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	655.039.379.502		-14.087.087.862	669.126.467.364	-4749,93%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	589.923.712.311		499.442.551.458	90.481.160.853	18,12%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	220.033.197.452		1.166.073.449	218.867.124.003	18769,58%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	158.808.484		3.139.994.377	-2.981.185.893	-94,94%
412	**PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL**	**43.321.800.000.000**	**41.053.691.104.496**	**94,76%**	**45.881.812.780.678**	**-4.828.121.676.182**	**-10,52%**
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**38.899.300.000.000**	**37.526.981.312.119**	**96,47%**	**39.116.746.986.751**	**-1.589.765.674.632**	**-4,06%**
41211	**Pendapatan Bea Masuk**	**38.899.300.000.000**	**36.479.770.104.740**	**93,78%**	**38.689.558.007.910**	**-2.209.787.903.170**	**-5,71%**
412111	Pendapatan Bea Masuk	38.899.300.000.000	34.824.420.858.209	89,52%	37.407.985.838.439	-2.583.564.980.230	-6,91%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	0			743.750	-743.750	-100,00%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	682.054.914.763		274.134.580.810	407.920.333.953	148,80%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE	0	589.890.171.268		625.126.712.146	-35.236.540.878	-5,64%
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau	0			19.682.000	-19.682.000	-100,00%
412116	Pendapatan BM-DTP	0	354.326.302.000		370.614.635.480	-16.288.333.480	-4,39%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	29.077.858.500		11.675.815.285	17.402.043.215	149,04%
41212	**Pendapatan Bea Masuk Tindakan**	**0**	**1.047.211.207.379**		**427.188.978.841**	**620.022.228.538**	**145,14%**
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	308.468.786.790		247.390.857.841	61.077.928.949	24,69%
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan	0	22.101.000		44.227.000	-22.126.000	-50,03%
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	738.720.319.589		179.753.894.000	558.966.425.589	310,96%
4122	**Pendapatan Bea Keluar**	**4.422.500.000.000**	**3.526.709.792.377**	**79,74%**	**6.765.065.793.927**	**-3.238.356.001.550**	**-47,87%**
41221	**Pendapatan Bea Keluar**	**4.422.500.000.000**	**3.526.709.792.377**	**79,74%**	**6.765.065.793.927**	**-3.238.356.001.550**	**-47,87%**
412211	Pendapatan Bea Keluar	4.422.500.000.000	3.526.335.855.946	79,74%	6.763.961.349.944	-3.237.625.493.998	-47,87%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	0	373.535.431		1.079.891.983	-706.356.552	-65,41%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	401.000		24.552.000	-24.151.000	-98,37%
42	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**	**378.297.855.438.000**	**408.994.346.200.875**	**108,11%**	**409.320.239.488.446**	**-325.893.287.571**	**-0,08%**
421	**PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM**	**190.754.771.994.000**	**154.895.286.766.287**	**81,20%**	**180.592.649.823.641**	**-25.697.363.057.354**	**-14,23%**
4211	**PENDAPATAN MINYAK BUMI**	**118.606.710.000.000**	**83.622.340.876.020**	**70,50%**	**101.486.695.315.900**	**-17.864.354.439.880**	**-17,60%**
42111	**Pendapatan Minyak Bumi**	**118.606.710.000.000**	**83.622.340.876.020**	**70,50%**	**101.486.695.315.900**	**-17.864.354.439.880**	**-17,60%**
421111	Pendapatan Minyak Bumi	118.606.710.000.000	83.622.340.876.020	70,50%	101.486.695.315.900	-17.864.354.439.880	-17,60%
4212	**PENDAPATAN GAS BUMI**	**41.171.600.000.000**	**37.467.520.404.392**	**91,00%**	**41.302.551.779.459**	**-3.835.031.375.067**	**-9,29%**
42121	**Pendapatan Gas Bumi**	**41.171.600.000.000**	**37.467.520.404.392**	**91,00%**	**41.302.551.779.459**	**-3.835.031.375.067**	**-9,29%**
421211	Pendapatan Gas Bumi	41.171.600.000.000	37.467.520.404.392	91,00%	41.302.551.779.459	-3.835.031.375.067	-9,29%
4213	**PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**	**24.960.724.137.000**	**26.343.691.801.600**	**105,54%**	**30.313.666.621.680**	**-3.969.974.820.080**	**-13,10%**
42132	**Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara**	**571.198.698.000**	**450.864.987.160**	**78,93%**	**545.625.001.566**	**-94.760.014.406**	**-17,37%**
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksploras	155.746.751.000	54.471.693.795	34,97%	103.356.976.462	-48.885.282.667	-47,30%
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produks	415.451.947.000	396.383.327.407	95,41%	442.247.155.183	-45.863.827.776	-10,37%
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakya	0	9.965.958		20.869.921	-10.903.963	-52,25%
42133	**Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara**	**24.389.525.439.000**	**25.892.826.814.440**	**106,16%**	**29.768.041.620.114**	**-3.875.214.805.674**	**-13,02%**
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	19.128.059.644.000	19.718.730.438.003	103,09%	21.854.960.527.170	-2.136.230.089.167	-9,77%
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	2.172.690.000.000	1.249.063.747.310	57,49%	2.474.665.328.788	-1.225.601.581.478	-49,53%
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	1.866.906.217.000	1.891.027.836.171	101,29%	3.014.269.148.774	-1.123.241.312.603	-37,26%
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	57.187.977.000	68.373.867.540	119,56%	89.309.735.873	-20.935.868.333	-23,44%
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nike	644.086.049.000	2.014.421.160.336	312,76%	1.431.581.482.578	582.839.677.758	40,71%
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	512.495.550.000	574.626.561.705	112,12%	687.472.008.752	-112.845.447.047	-16,41%
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	8.100.002.000	376.583.203.375	4649,17%	215.783.388.179	160.799.815.196	74,52%
4214	**PENDAPATAN KEHUTANAN**	**4.511.543.106.000**	**5.007.257.006.149**	**110,99%**	**4.760.407.698.602**	**246.849.307.547**	**5,19%**
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**	**2.198.468.055.000**	**1.653.956.206.171**	**75,23%**	**1.982.019.914.364**	**-328.063.708.193**	**-16,55%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.198.468.055.000	1.653.956.206.171	75,23%	1.982.019.914.364	-328.063.708.193	-16,55%
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**	**930.974.040.000**	**1.078.460.288.969**	**115,84%**	**1.141.414.248.868**	**-62.953.959.899**	**-5,52%**
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	930.974.040.000	1.078.460.288.969	115,84%	1.141.414.248.868	-62.953.959.899	-5,52%
42143	**Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)**	**217.586.437.000**	**153.271.617.074**	**70,44%**	**101.732.195.506**	**51.539.421.568**	**50,66%**
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	217.586.437.000	153.271.617.074	70,44%	101.732.195.506	51.539.421.568	50,66%
42144	**Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan**	**1.164.514.574.000**	**2.121.568.893.935**	**182,18%**	**1.535.241.339.864**	**586.327.554.071**	**38,19%**
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.164.514.574.000	2.121.568.893.935	182,18%	1.535.241.339.864	586.327.554.071	38,19%
4215	**PENDAPATAN PERIKANAN**	**625.810.919.000**	**521.936.215.435**	**83,40%**	**448.751.885.603**	**73.184.329.832**	**16,31%**
42152	**Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan**	**304.132.000**	**6.727.835.681**	**2212,14%**	**6.274.976.907**	**452.858.774**	**7,22%**
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	164.069.000	6.173.718.151	3762,88%	6.023.274.817	150.443.334	2,50%
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	140.063.000	554.117.530	395,62%	251.702.090	302.415.440	120,15%
42153	**Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan**	**625.506.787.000**	**515.208.379.754**	**82,37%**	**442.476.908.696**	**72.731.471.058**	**16,44%**
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	625.506.787.000	515.208.379.754	82,37%	442.476.908.696	72.731.471.058	16,44%
4216	**PENDAPATAN PANAS BUMI**	**878.383.832.000**	**1.932.540.462.691**	**220,01%**	**2.280.576.522.397**	**-348.036.059.706**	**-15,26%**
42162	**Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi**	**846.157.641.000**	**1.895.246.863.593**	**223,98%**	**2.252.646.884.360**	**-357.400.020.767**	**-15,87%**
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	846.157.641.000	1.895.246.863.593	223,98%	2.252.646.884.360	-357.400.020.767	-15,87%
42163	**Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi**	**28.681.873.000**	**33.610.889.750**	**117,19%**	**26.437.236.602**	**7.173.653.148**	**27,13%**
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksploras	23.751.312.000	32.075.873.025	135,05%	25.409.429.618	6.666.443.407	26,24%
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produks	4.930.561.000	1.535.016.725	31,13%	1.027.806.984	507.209.741	49,35%
42164	**Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi**	**3.544.318.000**	**3.682.709.348**	**103,90%**	**1.492.401.435**	**2.190.307.913**	**146,76%**
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	3.544.318.000	3.682.709.348	103,90%	1.492.401.435	2.190.307.913	146,76%
422	**PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)**	**45.589.300.000.000**	**80.726.119.206.790**	**177,07%**	**45.060.521.375.969**	**35.665.597.830.821**	**79,15%**
4221	**PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN**	**45.589.300.000.000**	**50.634.211.382.087**	**111,07%**	**45.060.521.375.969**	**5.573.690.006.118**	**12,37%**
42213	**Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN**	**44.738.637.000.000**	**49.773.695.752.482**	**111,25%**	**44.602.870.375.969**	**5.170.825.376.513**	**11,59%**
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	15.976.500.000.000	18.595.470.253.531	116,39%	16.267.751.186.649	2.327.719.066.882	14,31%
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	28.762.137.000.000	31.178.225.498.951	108,40%	28.335.119.189.320	2.843.106.309.631	10,03%
42214	**Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan**	**850.663.000.000**	**860.515.629.605**	**101,16%**	**457.651.000.000**	**402.864.629.605**	**88,03%**
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	850.663.000.000	860.515.629.605	101,16%	457.651.000.000	402.864.629.605	88,03%
4222	**PENDAPATAN DARI KND LAINNYA**	**0**	**30.091.907.824.703**		**0**	**30.091.907.824.703**	
42221	**Pendapatan dari Surplus Lembaga**	**0**	**30.091.907.824.703**		**0**	**30.091.907.824.703**	
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	0	30.091.907.824.703		0	30.091.907.824.703	
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**47.884.451.844.000**	**48.869.312.995.366**	**102,06%**	**55.093.058.250.618**	**-6.223.745.255.252**	**-11,30%**
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**45.662.723.234.000**	**40.698.144.354.523**	**89,13%**	**48.813.837.134.982**	**-8.115.692.780.459**	**-16,63%**
42411	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat**	**28.449.783.873.000**	**33.307.807.529.959**	**117,08%**	**28.739.609.164.736**	**4.568.198.365.223**	**15,90%**
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	14.246.152.914.000	16.357.696.591.964	114,82%	13.468.152.546.364	2.889.544.045.600	21,45%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10.004.568.836.000	12.647.247.226.609	126,41%	11.053.330.293.568	1.593.916.933.041	14,42%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknolog	480.095.338.000	530.882.505.266	110,58%	440.382.485.600	90.500.019.666	20,55%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2.664.800.000	161.068.800	6,04%	70.022.700	91.046.100	130,02%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	305.579.782.000	303.688.692.268	99,38%	301.504.866.353	2.183.825.915	0,72%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikas	2.652.967.689.000	2.743.344.770.718	103,41%	2.569.200.853.792	174.143.916.926	6,78%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	39.787.110.000	220.786.962	0,55%	256.894.230	-36.107.268	-14,06%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	717.967.404.000	1.189.210.350	0,17%	13.961.044.004	-12.771.833.654	-91,48%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	723.376.677.022		892.750.158.125	-169.373.481.103	-18,97%
42412	**Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu**	**1.572.533.820.000**	**1.615.780.715.595**	**102,75%**	**1.507.220.557.604**	**108.560.157.991**	**7,20%**
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.282.754.109.000	1.332.326.711.631	103,86%	1.257.203.387.695	75.123.323.936	5,98%
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	0			464.463.334	-464.463.334	-100,00%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	289.779.711.000	283.454.003.964	97,82%	249.552.706.575	33.901.297.389	13,58%
42413	**Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat**	**14.994.337.541.000**	**5.003.672.214.239**	**33,37%**	**17.622.794.124.394**	**-12.619.121.910.155**	**-71,61%**
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	3.789.322.000	5.252.628.262	138,62%	4.331.943.877	920.684.385	21,25%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektora	423.423.028.000	315.069.336.520	74,41%	463.567.036.550	-148.497.700.030	-32,03%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	38.647.689.000	25.454.026.350	65,86%	23.025.867.119	2.428.159.231	10,55%
424136	Pendapatan Investasi	120.000.000.000	1.037.684.147.207	864,74%	867.305.481.511	170.378.665.696	19,64%
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasiona	0	3.607.055.917.983			3.607.055.917.983	
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	11.438.000.000.000			14.413.921.271.119	-14.413.921.271.119	-100,00%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	2.970.477.502.000	13.156.157.917	0,44%	1.850.642.524.218	-1.837.486.366.301	-99,29%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
42414	**Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang**	**646.068.000.000**	**770.883.894.730**	**119,32%**	**944.213.288.248**	**-173.329.393.518**	**-18,36%**
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	646.068.000.000	770.883.894.730	119,32%	944.213.288.248	-173.329.393.518	-18,36%
4242	**Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum**	**9.662.630.000**	**154.843.013.918**	**1602,49%**	**90.948.165.044**	**63.894.848.874**	**70,25%**
42421	**Pendapatan Hibah Terikat - Uang**	**9.662.630.000**	**89.369.579.649**	**924,90%**	**50.461.073.849**	**38.908.505.800**	**77,11%**
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.870.630.000	198.211.372	10,60%	2.269.722.309	-2.071.510.937	-91,27%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	7.052.000.000	17.222.959.992	244,23%	12.213.064.521	5.009.895.471	41,02%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	67.576.698.713		28.728.335.036	38.848.363.677	135,23%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang	500.000.000	138.613.955	27,72%		138.613.955	
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	4.233.095.617		5.445.026.983	-1.211.931.366	-22,26%
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang	0			1.804.925.000	-1.804.925.000	-100,00%
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang	240.000.000			0	0	
42422	**Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang**	**0**	**65.473.434.269**		**40.487.091.195**	**24.986.343.074**	**61,71%**
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	0	59.880.889.272		31.198.150.000	28.682.739.272	91,94%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	4.624.889.507		9.277.265.695	-4.652.376.188	-50,15%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	967.655.490			967.655.490	
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang				11.675.500	-11.675.500	-100,00%
4243	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**529.656.541.000**	**855.074.995.219**	**161,44%**	**1.556.582.772.589**	**-701.507.777.370**	**-45,07%**
42431	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**529.656.541.000**	**855.074.995.219**	**161,44%**	**1.556.582.772.589**	**-701.507.777.370**	**-45,07%**
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	43.038.279.000	64.938.557.559	150,89%	69.088.747.701	-4.150.190.142	-6,01%
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	386.626.369.000	662.062.231.024	171,24%	1.302.943.551.461	-640.881.320.437	-49,19%
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	99.991.893.000	128.074.206.636	128,08%	184.550.473.427	-56.476.266.791	-30,60%
4244	**Pendapatan dari Alokasi APBN**	**0**	**328.485.663.104**		**235.873.713.666**	**92.611.949.438**	**39,26%**
42442	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**0**	**328.485.663.104**		**235.873.713.666**	**92.611.949.438**	**39,26%**
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	173.181.163.285		191.521.434.832	-18.340.271.547	-9,58%
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	155.304.499.819		44.352.278.834	110.952.220.985	250,16%
4249	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.682.409.439.000**	**6.832.764.968.602**	**406,13%**	**4.395.816.464.337**	**2.436.948.504.265**	**55,44%**
42491	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.670.475.437.000**	**6.700.931.131.892**	**401,14%**	**4.182.323.918.597**	**2.518.607.213.295**	**60,22%**
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.670.475.437.000	6.457.293.927.737	386,55%	4.024.154.940.912	2.433.138.986.825	60,46%
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	0	583.725.327		543.344.744	40.380.583	7,43%
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	0	-2.578.745		2.844.811.716	-2.847.390.461	-100,09%
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	23.507.243.728		26.951.018.124	-3.443.774.396	-12,78%
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30.206.906.626		768.647.952	29.438.258.674	3829,88%
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	0	2.855.526.484		176.411.569	2.679.114.915	1518,67%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	186.486.380.735		126.884.743.580	59.601.637.155	46,97%
42492	**Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa**	**11.934.002.000**	**131.542.324.010**	**1102,25%**	**212.846.139.940**	**-81.303.815.930**	**-38,20%**
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	235.000.000	8.488.775.977	3612,25%	4.349.166.626	4.139.609.351	95,18%
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	3.064.000.000	40.193.556.153	1311,80%	18.550.007.884	21.643.548.269	116,68%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	100.000.000	55.331.546.499	55331,55%	170.834.730.030	-115.503.183.531	-67,61%
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	105.001.000	15.466.998.253	14730,33%	9.240.417.760	6.226.580.493	67,38%
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	6.417.857.752		4.130.945.157	2.286.912.595	55,36%
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	8.430.001.000	5.643.589.376	66,95%	5.740.872.483	-97.283.107	-1,69%
42493	**Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU**	**0**	**291.512.700**		**646.405.800**	**-354.893.100**	**-54,90%**
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	0	55.000.000			55.000.000	
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	0	133.517.000		535.368.000	-401.851.000	-75,06%
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	0	102.995.700		111.037.800	-8.042.100	-7,24%
425	**PENDAPATAN PNBP LAINNYA**	**94.069.331.600.000**	**124.503.627.232.432**	**132,35%**	**128.574.010.038.218**	**-4.070.382.805.786**	**-3,17%**
4251	**Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**	**29.631.801.286.000**	**32.429.131.186.137**	**109,44%**	**47.238.075.748.023**	**-14.808.944.561.886**	**-31,35%**
42511	**Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang**	**19.077.645.857.000**	**19.006.470.818.652**	**99,63%**	**22.768.752.720.908**	**-3.762.281.902.256**	**-16,52%**
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	18.305.604.794.000	18.580.975.151.710	101,50%	19.313.686.076.030	-732.710.924.320	-3,79%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	62.709.210.000	68.668.735.753	109,50%	65.938.056.673	2.730.679.080	4,14%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	4.500.000	1.452.205.712	32271,24%	1.385.489.934	66.715.778	4,82%
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murn	702.967.810.000	339.727.022.946	48,33%	3.355.203.918.148	-3.015.476.895.202	-89,87%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	6.359.543.000	15.647.702.531	246,05%	32.539.180.123	-16.891.477.592	-51,91%
42512	**Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN**	**152.219.276.000**	**341.531.328.482**	**224,37%**	**250.827.244.737**	**90.704.083.745**	**36,16%**
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	54.554.000	3.948.035.294	7236,93%	22.124.812.449	-18.176.777.155	-82,16%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.254.758.000	111.020.574.073	4923,84%	76.098.520.939	34.922.053.134	45,89%
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	8.791.243.000	10.831.949.400	123,21%	17.542.553.524	-6.710.604.124	-38,25%
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0			135.365.000	-135.365.000	-100,00%
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0			7.130.000	-7.130.000	-100,00%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	141.118.721.000	215.730.769.715	152,87%	134.918.862.825	80.811.906.890	59,90%
42513	**Pendapatan dari Pemanfaatan BMN**	**553.298.438.000**	**522.960.362.436**	**94,52%**	**1.575.471.215.636**	**-1.052.510.853.200**	**-66,81%**
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	250.627.650.000	430.901.024.632	171,93%	1.521.599.996.942	-1.090.698.972.310	-71,68%
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	624.015.000	4.427.843.340	709,57%	8.952.903.922	-4.525.060.582	-50,54%
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.000.000	4.427.118.712	9838,04%	768.092.244	3.659.026.468	476,38%
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.929.254.000	50.082.127.864	1016,02%	18.022.487.087	32.059.640.777	177,89%
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0			98.280.000	-98.280.000	-100,00%
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	30.788.411			30.788.411	
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	2.259.489.000	360.047.373	15,93%	360.047.373	0	0,00%
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)				2.125.500	-2.125.500	-100,00%
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	294.813.030.000	32.731.412.104	11,10%	25.667.282.568	7.064.129.536	27,52%
42514	**Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang**	**2.200.000.000**	**626.866.552.049**	**28493,93%**	**573.611.868.078**	**53.254.683.971**	**9,28%**
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	0	352.293.827.465		497.482.084.878	-145.188.257.413	-29,18%
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2E	0	10.953.567.000		26.515.283.300	-15.561.716.300	-58,69%
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	0	5.753.369.980		1.643.589.980	4.109.780.000	250,05%
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	0	1.721.611.720		787.691.588	933.920.132	118,56%
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	0	4.499.504.300		40.696.464.000	-36.196.959.700	-88,94%
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	2.200.000.000	251.644.671.584	11438,39%	6.486.754.332	245.157.917.252	3779,36%
42515	**Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**51.582.715.000**	**81.725.622.928**	**158,44%**	**62.256.481.499**	**19.469.141.429**	**31,27%**
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tus	51.582.715.000	81.725.622.928	158,44%	62.256.481.499	19.469.141.429	31,27%
42516	**Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas**	**8.844.855.000.000**	**10.530.277.359.314**	**119,06%**	**20.655.579.279.504**	**-10.125.301.920.190**	**-49,02%**
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	8.794.230.000.000	5.604.477.690.308	63,73%	7.499.912.603.765	-1.895.434.913.457	-25,27%
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	50.625.000.000	4.925.799.669.006	9729,97%	13.155.666.675.739	-8.229.867.006.733	-62,56%
42517	**Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**	**950.000.000.000**	**1.319.299.142.276**	**138,87%**	**1.351.576.937.661**	**-32.277.795.385**	**-2,39%**
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	678.242.124.000	1.033.323.653.631	152,35%	1.072.659.813.466	-39.336.159.835	-3,67%
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	271.757.876.000	285.666.685.044	105,12%	278.602.555.395	7.064.129.649	2,54%
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	308.803.601		314.568.800	-5.765.199	-1,83%
4252	**PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM**	**15.763.753.667.000**	**18.366.375.054.747**	**116,51%**	**17.768.155.575.932**	**598.219.478.815**	**3,37%**
42521	**Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum**	**3.391.168.025.000**	**4.303.327.782.245**	**126,90%**	**3.508.128.693.239**	**795.199.089.006**	**22,67%**
425211	Pendapatan Paspor	927.202.450.000	1.253.341.710.000	135,17%	1.097.623.900.000	155.717.810.000	14,19%
425212	Pendapatan Visa	132.785.800.000	406.729.595.455	306,31%	222.629.046.105	184.100.549.350	82,69%
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	708.418.750.000	716.924.200.000	101,20%	521.131.100.000	195.793.100.000	37,57%
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	235.095.000.000	182.197.521.707	77,50%	284.913.445.000	-102.715.923.293	-36,05%
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	521.839.850.000	750.037.350.000	143,73%	740.179.950.000	9.857.400.000	1,33%
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	194.021.000.000	238.892.867.249	123,13%	116.545.148.967	122.347.718.282	104,98%
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	171.805.175.000	40.468.433.955	23,55%	26.693.152.424	13.775.281.531	51,61%
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektua	500.000.000.000	714.326.594.505	142,87%	498.294.215.005	216.032.379.500	43,35%
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	409.509.374		118.735.738	290.773.636	244,89%
42522	**Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri**	**571.138.979.000**	**737.756.064.394**	**129,17%**	**801.858.988.566**	**-64.102.924.172**	**-7,99%**
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	217.750.000.000	300.888.401.352	138,18%	346.182.363.003	-45.293.961.651	-13,08%
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	133.500.000.000	129.232.888.295	96,80%	122.731.687.406	6.501.200.889	5,30%
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	178.550.000.000	157.602.960.540	88,27%	161.102.991.326	-3.500.030.786	-2,17%
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	41.338.979.000	50.513.757.196	122,19%	59.464.713.186	-8.950.955.990	-15,05%
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	0	13.032.788.858		22.740.691.177	-9.707.902.319	-42,69%
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	0	86.485.268.153		89.636.542.468	-3.151.274.315	-3,52%
42523	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi**	**316.829.966.000**	**738.384.144.329**	**233,05%**	**710.472.768.619**	**27.911.375.710**	**3,93%**
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	543.078.000	453.775.000	83,56%	332.375.000	121.400.000	36,53%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.681.237.000	2.728.044.000	162,26%	949.964.500	1.778.079.500	187,17%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.092.657.000	30.675.082.972	127,32%	28.345.178.960	2.329.904.012	8,22%
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.600.184.000	3.306.854.563	91,85%	7.021.831.765	-3.714.977.202	-52,91%
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	0	291.420.200		669.443.546	-378.023.346	-56,47%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadila	90.000.000.000	95.941.361.611	106,60%	91.838.022.563	4.103.339.048	4,47%
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	150.000.000.000	468.135.317.658	312,09%	458.458.080.139	9.677.237.519	2,11%
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	22.000.000.000	70.856.062.920	322,07%	89.431.576.201	-18.575.513.281	-20,77%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	24.912.810.000	65.996.225.405	264,91%	33.426.295.945	32.569.929.460	97,44%
42524	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**	**263.454.146.000**	**1.150.028.180.079**	**436,52%**	**1.253.573.712.907**	**-103.545.532.828**	**-8,26%**
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilar	49.266.772.000	208.172.274.861	422,54%	362.565.020.463	-154.392.745.602	-42,58%
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.438.480.000	66.923.562.763	4652,38%	247.731.735.938	-180.808.173.175	-72,99%
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	69.536.895.000	748.286.543.236	1076,10%	372.324.301.672	375.962.241.564	100,98%
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	29.995.244.000	5.523.390.703	18,41%	46.350.707.965	-40.827.317.262	-88,08%
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korups	66.000.000.000	4.067.467.388	6,16%	14.644.901.085	-10.577.433.697	-72,23%
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	35.044.755.000	78.164.268.761	223,04%	83.048.203.124	-4.883.934.363	-5,88%
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	11.000.000.000	100.000.000	0,91%	706.300.000	-606.300.000	-85,84%
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	72.000.000	4.579.268.922	6360,10%	75.988.842.399	-71.409.573.477	-93,97%
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.100.000.000	34.211.403.445	3110,13%	50.213.700.261	-16.002.296.816	-31,87%
42525	**Pendapatan Perizinan**	**1.024.254.437.000**	**1.705.887.057.430**	**166,55%**	**1.566.453.310.352**	**139.433.747.078**	**8,90%**
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	935.000.000.000	1.562.679.096.600	167,13%	1.423.430.821.900	139.248.274.700	9,78%
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	11.600.100.000	16.125.200.000	139,01%	17.046.100.000	-920.900.000	-5,40%
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	24.600.000.000	44.064.625.000	179,12%	44.497.990.000	-433.365.000	-0,97%
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	26.490.000.000	49.776.000.000	187,90%	45.459.250.000	4.316.750.000	9,50%
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.463.022.000	9.095.993.526	369,30%	4.055.863.250	5.040.130.276	124,27%
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	24.101.315.000	24.146.142.304	100,19%	31.963.285.202	-7.817.142.898	-24,46%
42526	**Pendapatan Pelayanan Kepolisian I**	**8.794.331.965.000**	**8.165.177.999.000**	**92,85%**	**8.491.555.385.000**	**-326.377.386.000**	**-3,84%**
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	910.137.010.000	662.022.775.000	72,74%	625.080.330.000	36.942.445.000	5,91%
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	694.173.305.000	643.802.560.000	92,74%	604.351.415.000	39.451.145.000	6,53%
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK	2.453.000.000.000	2.416.492.675.000	98,51%	2.403.053.325.000	13.439.350.000	0,56%
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK	0			282.528.300.000	-282.528.300.000	-100,00%
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.503.875.000.000	2.426.285.000.000	96,90%	2.485.384.975.000	-59.099.975.000	-2,38%
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.493.286.000.000	1.366.160.314.000	91,49%	1.344.034.000.000	22.126.314.000	1,65%
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	34.721.850.000	29.462.750.000	84,85%	29.147.850.000	314.900.000	1,08%
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	166.526.300.000	169.194.425.000	101,60%	170.302.050.000	-1.107.625.000	-0,65%
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	538.612.500.000	451.757.500.000	83,87%	547.673.140.000	-95.915.640.000	-17,51%
42527	**Pendapatan Pelayanan Kepolisian II**	**946.829.735.000**	**959.273.623.322**	**101,31%**	**876.003.488.818**	**83.270.134.504**	**9,51%**
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.400.000.000	1.354.200.000	16,12%	907.700.000	446.500.000	49,19%
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.400.000.000	1.099.800.000	13,09%	909.300.000	190.500.000	20,95%
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	277.760.035.000	304.062.795.000	109,47%	299.610.715.000	4.452.080.000	1,49%
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	239.909.475.000	220.762.225.000	92,02%	202.890.885.000	17.871.340.000	8,81%
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	20.783.705.000	29.633.095.000	142,58%	28.707.426.410	925.668.590	3,22%
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vita	387.576.520.000	397.718.508.322	102,62%	334.724.562.408	62.993.945.914	18,82%
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	4.000.000.000	4.643.000.000	116,08%	8.252.900.000	-3.609.900.000	-43,74%
42528	**Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi**	**455.746.414.000**	**606.540.203.948**	**133,09%**	**560.109.228.431**	**46.430.975.517**	**8,29%**
425281	Pendapatan Akreditasi	17.758.100.000	37.130.370.000	209,09%	19.279.600.000	17.850.770.000	92,59%
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.361.321.000	1.275.790.950	93,72%	928.417.100	347.373.850	37,42%
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	86.936.859.000	97.941.517.905	112,66%	87.180.831.927	10.760.685.978	12,34%
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	13.741.005.000	24.719.552.313	179,90%	27.305.089.529	-2.585.537.216	-9,47%
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	35.933.166.000	52.987.983.138	147,46%	42.226.504.374	10.761.478.764	25,49%
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	6.714.420.000	9.799.166.696	145,94%	7.629.518.962	2.169.647.734	28,44%
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	121.543.813.000	122.729.386.536	100,98%	101.480.009.436	21.249.377.100	20,94%
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	95.280.000.000	182.769.738.300	191,82%	198.000.292.900	-15.230.554.600	-7,69%
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	76.477.730.000	77.186.698.110	100,93%	76.078.964.203	1.107.733.907	1,46%
4253	**PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN**	**6.927.885.403.000**	**6.728.386.646.421**	**97,12%**	**7.421.052.335.146**	**-692.665.688.725**	**-9,33%**
42531	**Pendapatan Jasa Kesehatan**	**3.441.439.176.000**	**3.007.631.953.650**	**87,39%**	**3.849.996.353.287**	**-842.364.399.637**	**-21,88%**
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	136.970.350.000	310.473.901.765	226,67%	150.987.861.839	159.486.039.926	105,63%
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	2.492.054.635.000	2.004.913.997.324	80,45%	2.801.330.955.443	-796.416.958.119	-28,43%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	602.825.273.000	422.332.391.494	70,06%	574.772.060.540	-152.439.669.046	-26,52%
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	34.925.447.000	50.478.258.829	144,53%	48.359.610.383	2.118.648.446	4,38%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	149.063.980.000	186.486.124.238	125,10%	235.939.212.082	-49.453.087.844	-20,96%
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	25.599.491.000	32.947.280.000	128,70%	38.606.653.000	-5.659.373.000	-14,66%
42532	**Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan**	**89.810.000.000**	**196.358.994.030**	**218,64%**	**179.606.380.001**	**16.752.614.029**	**9,33%**
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	89.810.000.000	196.358.994.030	218,64%	179.606.380.001	16.752.614.029	9,33%
42533	**Pendapatan Jasa Karantina**	**192.517.999.000**	**361.295.658.526**	**187,67%**	**344.312.823.136**	**16.982.835.390**	**4,93%**
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	129.717.999.000	282.423.147.523	217,72%	267.493.327.963	14.929.819.560	5,58%
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	62.800.000.000	78.872.511.003	125,59%	76.819.495.173	2.053.015.830	2,67%
42534	**Pendapatan Jasa Agraria**	**2.358.115.228.000**	**2.255.101.568.584**	**95,63%**	**2.177.144.211.554**	**77.957.357.030**	**3,58%**
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.358.115.228.000	2.255.050.745.584	95,63%	2.177.144.211.554	77.906.534.030	3,58%
425342	Pendapatan Peneriman Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora	0	50.823.000		0	50.823.000	
42535	**Pendapatan Jasa Keagamaan**	**846.003.000.000**	**907.998.471.631**	**107,33%**	**869.992.567.168**	**38.005.904.463**	**4,37%**
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	846.003.000.000	883.380.971.243	104,42%	869.992.567.168	13.388.404.075	1,54%
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	24.617.500.388			24.617.500.388	
4254	**PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI**	**4.357.727.808.000**	**5.229.029.641.870**	**119,99%**	**4.763.894.209.734**	**465.135.432.136**	**9,76%**
42541	**Pendapatan Pendidikan**	**3.784.061.688.000**	**4.234.651.512.314**	**111,91%**	**4.091.137.740.960**	**143.513.771.354**	**3,51%**
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	78.963.924.000	77.814.031.824	98,54%	78.033.811.448	-219.779.624	-0,28%
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	3.434.503.640.000	3.880.258.521.192	112,98%	3.799.330.389.906	80.928.131.286	2,13%
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	77.722.597.000	64.809.654.774	83,39%	25.946.183.264	38.863.471.510	149,78%
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	192.871.527.000	211.769.304.524	109,80%	187.827.356.342	23.941.948.182	12,75%
42542	**Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**265.738.321.000**	**471.750.913.878**	**177,52%**	**283.378.471.210**	**188.372.442.668**	**66,47%**
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	254.462.983.000	432.209.746.650	169,85%	255.235.125.257	176.974.621.393	69,34%
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11.275.338.000	39.541.167.228	350,69%	28.143.345.953	11.397.821.275	40,50%
42543	**Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek**	**302.766.472.000**	**515.980.531.081**	**170,42%**	**383.125.471.424**	**132.855.059.657**	**34,68%**
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	40.983.282.000	96.697.907.922	235,94%	73.168.285.301	23.529.622.621	32,16%
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	92.422.295.000	141.095.689.020	152,66%	107.261.809.466	33.833.879.554	31,54%
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	102.880.370.000	158.700.588.501	154,26%	111.620.131.097	47.080.457.404	42,18%
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	6.043.390.000	16.285.033.806	269,47%	20.518.625.945	-4.233.592.139	-20,63%
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	24.944.910.000	29.271.262.669	117,34%	26.153.313.294	3.117.949.375	11,92%
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	944.995.000	9.446.517.906	999,64%	5.524.461.080	3.922.056.826	70,99%
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	34.547.230.000	64.483.531.257	186,65%	38.878.845.241	25.604.686.016	65,86%
42545	**Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan**	**5.161.327.000**	**6.646.684.597**	**128,78%**	**6.252.526.140**	**394.158.457**	**6,30%**
425451	Pendapatan Museum	3.126.121.000	3.280.582.500	104,94%	3.348.070.000	-67.487.500	-2,02%
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	2.035.206.000	3.366.102.097	165,39%	2.904.456.140	461.645.957	15,89%
4255	**PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**22.803.185.096.000**	**25.903.218.006.612**	**113,59%**	**23.950.487.055.396**	**1.952.730.951.216**	**8,15%**
42551	**Pendapatan Jasa Transportasi**	**6.769.179.733.000**	**6.965.694.762.838**	**102,90%**	**6.319.589.621.391**	**646.105.141.447**	**10,22%**
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	771.236.980.000	1.327.042.275.000	172,07%	938.634.625.000	388.407.650.000	41,38%
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	993.750.000.000	754.538.627.463	75,93%	902.206.837.845	-147.668.210.382	-16,37%
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.397.855.730.000	2.377.829.710.302	99,16%	2.234.327.178.826	143.502.531.476	6,42%
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	564.441.128.000	583.366.693.379	103,35%	548.045.578.845	35.321.114.534	6,44%
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	241.527.020.000	256.654.687.547	106,26%	238.311.705.954	18.342.981.593	7,70%
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	368.088.312.000	334.869.823.037	90,98%	340.384.958.211	-5.515.135.174	-1,62%
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	778.088.821.000	600.916.462.942	77,23%	521.181.218.991	79.735.243.951	15,30%
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	573.425.542.000	628.949.891.930	109,68%	508.428.602.995	120.521.288.935	23,70%
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	80.766.200.000	101.526.591.238	125,70%	88.068.914.724	13.457.676.514	15,28%
42552	**Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika**	**15.893.022.317.000**	**18.767.984.812.439**	**118,09%**	**17.446.455.866.510**	**1.321.528.945.929**	**7,57%**
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	14.786.883.682.000	17.605.970.108.203	119,06%	16.364.753.538.293	1.241.216.569.910	7,58%
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.061.187.075.000	1.098.145.698.318	103,48%	1.027.001.367.847	71.144.330.471	6,93%
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	38.747.068.000	53.817.359.746	138,89%	47.799.896.741	6.017.463.005	12,59%
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	181.000.000	860.002.500	475,14%	825.002.500	35.000.000	4,24%
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	2.540.690.000	4.364.165.031	171,77%	1.886.706.490	2.477.458.541	131,31%
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	1.182.800.000	1.437.450.524	121,53%	976.814.639	460.635.885	47,16%
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.300.002.000	3.390.028.117	147,39%	3.212.540.000	177.488.117	5,52%
42553	**Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik**	**140.983.046.000**	**169.538.431.335**	**120,25%**	**184.441.567.495**	**-14.903.136.160**	**-8,08%**
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	20.225.344.000	23.325.621.006	115,33%	24.921.968.222	-1.596.347.216	-6,41%
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI	58.450.000	23.650.000	40,46%	28.672.000	-5.022.000	-17,52%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	102.860.639.000	99.720.388.759	96,95%	112.877.812.351	-13.157.423.592	-11,66%
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	17.838.613.000	46.468.771.570	260,50%	46.613.114.922	-144.343.352	-0,31%
4256	**PENDAPATAN JASA LAINNYA**	**375.555.204.000**	**429.902.216.890**	**114,47%**	**910.056.355.732**	**-480.154.138.842**	**-52,76%**
42561	**Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**128.996.385.000**	**200.710.655.162**	**155,59%**	**204.088.090.073**	**-3.377.434.911**	**-1,65%**
425611	Pendapatan Wisata Alam	114.904.318.000	163.397.316.441	142,20%	167.966.219.615	-4.568.903.174	-2,72%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanar	14.052.892.000	22.813.875.898	162,34%	21.094.153.074	1.719.722.824	8,15%
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	39.175.000	14.499.462.823	37012,03%	15.027.717.384	-528.254.561	-3,52%
42562	**Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan**	**21.463.846.000**	**30.821.873.691**	**143,60%**	**21.799.455.591**	**9.022.418.100**	**41,39%**
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanar	18.469.207.000	27.586.904.928	149,37%	21.791.630.591	5.795.274.337	26,59%
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.994.639.000	3.234.968.763	108,03%	7.825.000	3.227.143.763	41241,45%
42569	**Pendapatan Jasa Lainnya**	**225.094.973.000**	**198.369.688.037**	**88,13%**	**684.168.810.068**	**-485.799.122.031**	**-71,01%**
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	23.751.980.000	7.061.872.692	29,73%	5.663.582.398	1.398.290.294	24,69%
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informas	35.834.494.000	43.416.365.465	121,16%	407.131.262.221	-363.714.896.756	-89,34%
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan To	120.000.000.000			110.076.543.484	-110.076.543.484	-100,00%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	45.508.499.000	147.891.449.880	324,98%	161.297.421.965	-13.405.972.085	-8,31%
4257	**PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**	**9.739.278.375.000**	**19.333.882.339.344**	**198,51%**	**11.153.269.856.791**	**8.180.612.482.553**	**73,35%**
42571	**Pendapatan Bunga**	**913.975.234.000**	**1.825.320.700.269**	**199,71%**	**1.656.180.667.138**	**169.140.033.131**	**10,21%**
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjamar	913.975.234.000	1.427.160.584.693	156,15%	1.309.111.487.158	118.049.097.535	9,02%
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	0	34.297.104.173		60.552.451.830	-26.255.347.657	-43,36%
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	0	363.779.834.791		286.216.349.005	77.563.485.786	27,10%
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	0	83.176.612		300.379.145	-217.202.533	-72,31%
42572	**Pendapatan Gain on Bond Redemption**	**0**	**5.807.000.000**		**0**	**5.807.000.000**	
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	0	5.807.000.000		0	5.807.000.000	
42573	**Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara**	**2.110.041.860.000**	**8.713.038.583.942**	**412,93%**	**2.282.759.533.200**	**6.430.279.050.742**	**281,69%**
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.110.041.860.000	6.467.340.854.900	306,50%	1.141.132.650.700	5.326.208.204.200	466,75%
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	0	2.245.697.729.042		1.141.626.882.500	1.104.070.846.542	96,71%
42574	**Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara**	**106.985.261.000**	**118.681.119.410**	**110,93%**	**94.901.097.815**	**23.780.021.595**	**25,06%**
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	106.985.261.000	109.490.920.300	102,34%	94.497.933.237	14.992.987.063	15,87%
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN				139.460.000	-139.460.000	-100,00%
425743	Pendapatan Kupon SBN				259.840.000	-259.840.000	-100,00%
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	0	9.190.199.110			9.190.199.110	
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	0			3.864.578	-3.864.578	-100,00%
42575	**Pendapatan dari Selisih Kurs**	**165.000.000.000**	**12.607.030.733**	**7,64%**	**242.930.299.187**	**-230.323.268.454**	**-94,81%**
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	165.000.000.000	12.344.438.960	7,48%	242.713.600.134	-230.369.161.174	-94,91%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0	262.591.562		207.685.127	54.906.435	26,44%
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	0	211		9.013.926	-9.013.715	-100,00%
42576	**Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening**	**280.969.644.000**	**232.120.267.593**	**82,61%**	**287.720.782.980**	**-55.600.515.387**	**-19,32%**
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	1.196.378		891.308	305.070	34,23%
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	0	621.867.500		160.641.039	461.226.461	287,12%
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	0	62.068.077.051		74.556.330.261	-12.488.253.210	-16,75%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	280.969.644.000	169.361.376.368	60,28%	207.822.645.528	-38.461.269.160	-18,51%
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	67.750.296		5.180.274.844	-5.112.524.548	-98,69%
42577	**Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara**	**5.580.000.000.000**	**7.736.672.109.435**	**138,65%**	**6.054.091.902.483**	**1.682.580.206.952**	**27,79%**
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	130.000.000.000	341.764.926.905	262,90%	256.947.451.726	84.817.475.179	33,01%
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	230.000.000.000	334.653.594.490	145,50%	332.449.155.560	2.204.438.930	0,66%
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	5.220.000.000.000	7.060.253.588.040	135,25%	5.464.695.295.197	1.595.558.292.843	29,20%
42578	**Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara**	**418.766.438.000**	**660.546.658.421**	**157,74%**	**481.447.093.712**	**179.099.564.709**	**37,20%**
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.800.000.000	1.720.573.299	95,59%	2.371.011.392	-650.438.093	-27,43%
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	399.160.000.000	419.520.706.655	105,10%	308.030.455.675	111.490.250.980	36,19%
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	75.207.825.916		68.037.631.165	7.170.194.751	10,54%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	96.652.759.212		91.608.841.688	5.043.917.524	5,51%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	17.806.438.000	67.444.793.339	378,77%	11.399.153.792	56.045.639.547	491,66%
42579	**Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**	**163.539.938.000**	**29.088.869.541**	**17,79%**	**53.238.480.276**	**-24.149.610.735**	**-45,36%**
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	163.396.287.000	14.941.008.384	9,14%	16.918.424.771	-1.977.416.387	-11,69%
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	115.651.000	1.021.552.126	883,31%	3.827.704.570	-2.806.152.444	-73,31%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	28.000.000	13.126.309.031	46879,68%	32.492.350.935	-19.366.041.904	-59,60%
4258	**PENDAPATAN DENDA**	**20.646.525.000**	**614.389.891.175**	**2975,75%**	**611.724.687.653**	**2.665.203.522**	**0,44%**
42581	**Pendapatan Denda I**	**20.646.525.000**	**417.029.576.247**	**2019,85%**	**540.373.238.968**	**-123.343.662.721**	**-22,83%**
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	10.126.325.000	372.701.521.461	3680,52%	508.183.330.466	-135.481.809.005	-26,66%
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	10.000.000.000	38.563.210.702	385,63%	25.421.045.096	13.142.165.606	51,70%
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	519.200.000	387.200.000	74,58%	216.600.000	170.600.000	78,76%
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	0			96.762	-96.762	-100,00%
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	1.000.000	7.544.393	754,44%	8.592.034	-1.047.641	-12,19%
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	0	5.013.364.234		347.459.213	4.665.905.021	1342,86%
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	0	89.629.117		6.196.115.397	-6.106.486.280	-98,55%
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi	0	267.106.340			267.106.340	
42582	**Pendapatan Denda II**	**0**	**189.899.072.757**		**65.693.449.290**	**124.205.623.467**	**189,07%**
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	0	70.201.415		5.278.945.347	-5.208.743.932	-98,67%
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	0	1.816.802.234		1.607.497.444	209.304.790	13,02%
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	0	386.907.790		180.092.454	206.815.336	114,84%
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK	0	3.894.939			3.894.939	
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	0	768.954.214		929.616.900	-160.662.686	-17,28%
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	186.852.312.165		57.697.297.145	129.155.015.020	223,85%
42583	**Pendapatan Denda III**	**0**	**7.461.242.171**		**5.657.999.395**	**1.803.242.776**	**31,87%**
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	7.461.242.171		5.657.999.395	1.803.242.776	31,87%
4259	**PENDAPATAN LAIN-LAIN**	**4.449.498.236.000**	**15.469.312.249.236**	**347,66%**	**14.757.294.213.811**	**712.018.035.425**	**4,82%**
42591	**Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I**	**4.433.034.437.000**	**14.879.041.347.105**	**335,64%**	**6.467.615.893.218**	**8.411.425.453.887**	**130,05%**
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20.121.288.000	353.165.642.076	1755,18%	185.172.872.106	167.992.769.970	90,72%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.272.450.000	1.648.403.305.946	129545,63%	1.101.775.087.107	546.628.218.839	49,61%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.201.232.000	1.261.227.358.017	39398,19%	1.434.357.954.147	-173.130.596.130	-12,07%
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.178.030.618.466		2.174.920.308.894	-996.889.690.428	-45,84%
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	0	73.285.930.819		34.731.049.514	38.554.881.305	111,01%
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.071.160.235.179		1.265.881.745.564	-194.721.510.385	-15,38%
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	4.408.439.467.000	20.573.663.715	0,47%	15.464.387.256	5.109.276.459	33,04%
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9.273.194.592.887		255.312.488.630	9.017.882.104.257	3532,10%
42592	**Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II**	**0**	**308.842.085.674**		**261.161.535.102**	**47.680.550.572**	**18,26%**
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	0	308.842.085.674		261.161.535.102	47.680.550.572	18,26%
42593	**Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan**	**0**	**24.230.256.247**		**33.306.961.074**	**-9.076.704.827**	**-27,25%**
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	17.114.436.445		29.301.333.275	-12.186.896.830	-41,59%
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	0	6.260.237.939		3.914.284.983	2.345.952.956	59,93%
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	0	631.281.364		1.314.216	629.967.148	47934,83%
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	0	224.300.499		90.028.600	134.271.899	149,14%
42598	**Pendapatan Lain-Lain I**	**0**	**476.204.460**		**7.704.637.733.401**	**-7.704.161.528.941**	**-99,99%**
425982	Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun				7.704.637.733.401	-7.704.637.733.401	-100,00%
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye	0	476.204.460			476.204.460	
42599	**Pendapatan Lain-Lain II**	**16.463.799.000**	**256.722.355.750**	**1559,31%**	**290.572.091.016**	**-33.849.735.266**	**-11,65%**
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	0	795.220.944		55.663.300.189	-54.868.079.245	-98,57%
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	10.493.898.000	5.449.196.082	51,93%	6.179.868.939	-730.672.857	-11,82%
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi	0			277.788	-277.788	-100,00%
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	171.834.472		5.412.836	166.421.636	3074,57%
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0	670.320			670.320	
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	0	79.508.146		160.324.477	-80.816.331	-50,41%
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	0	10.936.423.836		22.851.019.981	-11.914.596.145	-52,14%
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.969.901.000	239.289.501.950	4008,27%	205.711.886.806	33.577.615.144	16,32%
43	**PENDAPATAN HIBAH**	**435.310.000.000**	**5.497.343.992.921**	**1262,86%**	**15.564.860.239.320**	**-10.067.516.246.399**	**-64,68%**
431	**PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**	**435.310.000.000**	**5.497.343.992.921**	**1262,86%**	**15.564.860.239.320**	**-10.067.516.246.399**	**-64,68%**
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	**0**	**3.673.078.332.679**		**13.178.185.591.822**	**-9.505.107.259.143**	**-72,13%**
43113	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang**	**0**	**3.673.078.332.679**		**13.178.185.591.822**	**-9.505.107.259.143**	**-72,13%**
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan	0	65.693.597.291		9.076.264.000	56.617.333.291	623,80%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha	0	292.430.943.086		339.156.572.926	-46.725.629.840	-13,78%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	TA 2019 (*Audited*)	% Realisasi	TA 2018 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah	0	3.312.864.612.302		12.814.628.074.896	-9.501.763.462.594	-74,15%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	0	2.089.180.000		15.324.680.000	-13.235.500.000	-86,37%
4312	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**	**435.310.000.000**	**1.824.265.660.242**	**419,07%**	**2.386.674.647.498**	**-562.408.987.256**	**-23,56%**
43121	**Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana**	**435.310.000.000**	**591.671.964.284**	**135,92%**	**418.374.595.589**	**173.297.368.695**	**41,42%**
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	435.310.000.000	284.221.022.174	65,29%	202.952.271.644	81.268.750.530	40,04%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral	0	305.016.747.985		215.422.323.945	89.594.424.040	41,59%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya		2.434.194.125			2.434.194.125	
43123	**Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang**	**0**	**1.232.593.695.958**		**1.968.300.051.909**	**-735.706.355.951**	**-37,38%**
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral	0	686.083.404.317		1.527.744.362.454	-841.660.958.137	-55,09%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral	0	514.852.423.425		347.385.546.650	167.466.876.775	48,21%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya	0	31.657.868.216		93.170.142.805	-61.512.274.589	-66,02%
Grand Total		**2.165.111.815.814.000**	**1.960.633.583.585.990**	**90,56%**	**1.943.674.876.878.800**	**16.958.706.707.193**	**0,87%**

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
(1)	(2)	(3)
BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN		**50.634.211.382.087**
DIVIDEN		49.768.958.570.487
BUMN		49.660.873.135.291
PERBANKAN		**18.595.470.253.531**
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.252.196.310.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.754.055.616.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.252.267.799.962
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	336.950.527.569
NON PERBANKAN		**31.065.402.881.760**
1	PT Pertamina (Persero)	7.950.000.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.453.626.566.083
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.045.119.000.000
4	PT Jasa Raharja (Persero)	891.129.074.575
5	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	628.262.708.460
6	PT Pegadaian (Persero)	1.387.539.948.879
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	231.273.043.423
8	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	832.742.000.000
9	Perum Jaminan Kredit Indonesia	39.754.000.000
10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	388.805.155.132
11	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	227.891.712.000
12	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	130.453.258.000
13	PT Angkasa Pura II (Persero)	439.670.327.000
14	PT Angkasa Pura I (Persero)	461.614.212.521
15	PT Biofarma (Persero)	162.967.804.753
16	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	319.135.000.000
17	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	225.253.800.804
18	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	654.225.350.351
19	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	14.325.000.000
20	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	153.202.696.550
21	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2.399.651.035
22	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	74.900.000.000
23	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	65.704.694.672
24	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	21.913.464.278
25	Perum Jasa Tirta II	41.648.931.340
26	Perum Jasa Tirta I	28.456.961.063
27	PT Sucofindo (Persero)	41.017.390.950
28	PT Brantas Abipraya (Persero)	71.265.604.116
29	PT Surveyor Indonesia (Persero)	14.997.220.448

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
(1)	(2)	(3)
30	PT Dahana (Persero)	13.456.000.000
31	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	7.304.060.000
32	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	5.526.922.658
33	PT Kawasan Industri Makassar	1.441.460.784
34	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	4.674.592.477
35	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	42.607.650.113
36	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	12.772.626.604
37	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	64.900.000.000
38	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	65.884.000.000
39	PT Nindya Karya	352.978.417
40	PT Virama Karya (Persero)	3.842.493.700
41	PT Bina Karya	349.203.002
42	PT Indra Karya (Persero)	500.892.277
43	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	7.289.777.000
44	PT Garam (Persero)	13.101.350.638
45	PT Yodya Karya (Persero)	3.219.618.780
46	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	3.298.000.000
47	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	26.204.115.704
48	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.087.496.000.000
49	PT Askrindo (Persero)	65.080.300.000
50	PT Hutama Karya	454.975.200.000
51	PT Indah Karya	1.136.875.739
52	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	10.372.689.866
53	PT Pindad (Persero)	7.180.800.000
54	PT LEN Industri	12.240.000.000
55	Perum Perumnas	61.165.842.210
56	Perum Perhutani	78.967.380.000
57	Perum Perikanan Indonesia	2.652.000.000
58	Kawasan Industri Medan	8.115.475.358
59	PT PLN (Persero)	4.000.000.000.000
NON BUMN (MINORITAS)		**108.085.435.196**
NON PERBANKAN		**108.085.435.196**
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	17.434.236.063
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	27.081.686.868
3	PT Socfin Indonesia	38.791.490.150
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.698
5	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	13
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	57
7	PT Timah (Persero) Tbk	25
8	PT Perkebunan Nusantara IV	20.628.388.988

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
(1)	(2)	(3)
9	PT Perkebunan Nusantara VI	1.199.541.354
10	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	2.950.089.980
PEMBAYARAN PIUTANG		**4.737.181.995**
1	PT Perkebunan Nusantara II	300.000.000
2	PT Inhutani I	750.000.000
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	PT Balai Pustaka	35.000.000
5	PT Bina Karya	70.000.000
6	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	1.000.000.000
7	PT Indah Karya	2.282.181.995
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		**860.515.629.605**
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	505.266.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	144.000.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	155.456.000.000
4	LPEI	55.793.629.605
PENDAPATAN DARI SURPLUS BANK INDONESIA		**30.091.907.824.703**
JUMLAH TOTAL		**80.726.119.206.790**

Republik Indonesia

Lampiran 2

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**958.397.255.000**	**887.282.909.306**	**92,58%**	**71.114.345.694**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	165.540.373.000	158.151.560.607	95,54%	7.388.812.393
02	M A J E L I S	792.856.882.000	729.131.348.699	91,96%	63.725.533.301
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**5.739.310.147.000**	**4.714.765.127.133**	**82,15%**	**1.024.545.019.867**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.044.133.656.000	1.417.831.361.014	69,36%	626.302.294.986
02	D E W A N	3.695.176.491.000	3.296.933.766.119	89,22%	398.242.724.881
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**2.953.072.738.000**	**3.730.775.875.248**	**126,34%**	**-777.703.137.248**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.953.072.738.000	3.730.775.875.248	126,34%	-777.703.137.248
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**8.276.467.475.000**	**8.871.345.071.033**	**107,19%**	**-594.877.596.033**
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7.640.894.434.000	8.222.368.817.221	107,61%	-581.474.383.221
02	KEPANITERAAN	157.669.197.000	175.935.487.196	111,59%	-18.266.290.196
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	139.915.933.000	139.027.050.816	99,36%	888.882.184
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	70.627.868.000	70.140.280.850	99,31%	487.587.150
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TAT	23.717.231.000	23.147.736.063	97,60%	569.494.937
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN H	210.090.513.000	207.138.921.758	98,60%	2.951.591.242
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	33.552.299.000	33.586.777.129	100,10%	-34.478.129
006	**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**	**6.346.271.982.000**	**6.835.617.383.798**	**107,71%**	**-489.345.401.798**
01	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	6.346.271.982.000	6.835.617.383.798	107,71%	-489.345.401.798
007	**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**	**1.973.188.750.000**	**2.445.322.464.821**	**123,93%**	**-472.133.714.821**
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.247.743.075.000	1.385.307.596.455	111,03%	-137.564.521.455
03	SEKRETARIAT PRESIDEN	361.931.700.000	539.389.984.290	149,03%	-177.458.284.290
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	107.228.405.000	225.795.962.527	210,57%	-118.567.557.527
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	30.970.776.000	37.591.145.577	121,38%	-6.620.369.577
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	40.091.096.000	60.810.485.982	151,68%	-20.719.389.982
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	36.396.300.000	35.499.053.963	97,53%	897.246.037
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	65.064.838.000	76.116.145.606	116,99%	-11.051.307.606
10	KANTOR STAF PRESIDEN	83.762.560.000	84.812.090.421	101,25%	-1.049.530.421
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**3.172.970.626.000**	**3.297.046.701.392**	**103,91%**	**-124.076.075.392**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.040.540.220.000	1.063.781.550.110	102,23%	-23.241.330.110
02	INSPEKTORAT JENDERAL	73.785.352.000	76.791.793.329	104,07%	-3.006.441.329
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	237.329.445.000	244.242.439.745	102,91%	-6.912.994.745

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	140.323.540.000	148.505.803.492	105,83%	-8.182.263.492
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	227.651.971.000	228.533.844.989	100,39%	-881.873.989
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	237.309.528.000	218.943.770.456	92,26%	18.365.757.544
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	86.903.286.000	92.356.906.885	106,28%	-5.453.620.885
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	811.277.593.000	820.564.528.276	101,14%	-9.286.935.276
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	75.139.543.000	78.312.798.335	104,22%	-3.173.255.335
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	44.363.879.000	50.317.719.865	113,42%	-5.953.840.865
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	198.346.269.000	274.695.545.910	138,49%	-76.349.276.910
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**7.911.758.863.000**	**7.716.627.310.799**	**97,53%**	**195.131.552.201**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.493.014.781.000	6.289.575.065.790	96,87%	203.439.715.210
02	DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	96.923.001.000	99.843.901.941	103,01%	-2.920.900.941
03	DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA	52.082.524.000	58.209.896.035	111,76%	-6.127.372.035
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN	54.185.182.000	55.241.009.145	101,95%	-1.055.827.145
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	891.692.608.000	891.951.188.920	100,03%	-258.580.920
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	102.002.215.000	100.365.406.614	98,40%	1.636.808.386
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	38.002.298.000	41.416.822.261	108,99%	-3.414.524.261
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	119.445.511.000	109.086.229.959	91,33%	10.359.281.041
09	INSPEKTORAT JENDERAL	32.374.190.000	36.073.175.493	111,43%	-3.698.985.493
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	32.036.553.000	34.864.614.641	108,83%	-2.828.061.641
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**108.357.912.989.000**	**115.351.666.000.441**	**106,45%**	**-6.993.753.011.441**
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	20.267.817.940.000	17.087.213.606.627	84,31%	3.180.604.333.373
21	MARKAS BESAR TNI	7.961.643.493.000	8.337.920.806.534	104,73%	-376.277.313.534
22	MARKAS BESAR TNI AD	47.545.404.012.000	55.300.844.239.414	116,31%	-7.755.440.227.414
23	MARKAS BESAR TNI AL	18.248.574.705.000	19.479.267.313.633	106,74%	-1.230.692.608.633
24	MARKAS BESAR TNI AU	14.334.472.839.000	15.146.420.034.233	105,66%	-811.947.195.233
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**	**13.305.871.866.000**	**13.774.396.008.362**	**103,52%**	**-468.524.142.362**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.632.819.705.000	3.917.433.727.788	107,83%	-284.614.022.788
02	INSPEKTORAT JENDERAL	34.287.514.000	35.064.385.667	102,27%	-776.871.667
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	733.985.545.000	636.374.253.834	86,70%	97.611.291.166
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	5.881.088.841.000	6.053.098.456.587	102,92%	-172.009.615.587
06	DITJEN IMIGRASI	2.422.072.257.000	2.513.970.721.279	103,79%	-91.898.464.279

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	274.606.452.000	262.202.296.553	95,48%	12.404.155.447
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG	41.974.869.000	43.176.162.372	102,86%	-1.201.293.372
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	35.207.054.000	36.507.000.908	103,69%	-1.299.946.908
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	103.026.602.000	102.533.059.784	99,52%	493.542.216
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	29.704.002.000	31.175.012.935	104,95%	-1.471.010.935
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASAS	117.099.025.000	142.860.930.655	122,00%	-25.761.905.655
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**45.156.382.040.000**	**39.546.053.068.399**	**87,58%**	**5.610.328.971.601**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	20.770.728.252.000	19.836.580.701.309	95,50%	934.147.550.691
02	INSPEKTORAT JENDERAL	102.879.589.000	103.428.985.805	100,53%	-549.396.805
03	DITJEN ANGGARAN	115.737.072.000	125.636.686.763	108,55%	-9.899.614.763
04	DITJEN PAJAK	6.848.078.153.000	6.938.024.085.336	101,31%	-89.945.932.336
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.965.895.119.000	3.479.692.813.822	117,32%	-513.797.694.822
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	105.654.656.000	97.326.327.096	92,12%	8.328.328.904
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	111.665.174.000	114.729.082.981	102,74%	-3.063.908.981
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	12.559.627.039.000	7.344.623.352.416	58,48%	5.215.003.686.584
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	687.289.562.000	732.855.101.455	106,63%	-45.565.539.455
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	635.393.838.000	608.639.762.386	95,79%	26.754.075.614
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	128.330.558.000	118.351.823.946	92,22%	9.978.734.054
13	LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW	125.103.028.000	46.164.345.084	36,90%	78.938.682.916
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**21.686.516.683.000**	**19.424.292.887.561**	**89,57%**	**2.262.223.795.439**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.434.152.891.000	1.757.651.582.618	122,56%	-323.498.691.618
02	INSPEKTORAT JENDERAL	94.408.464.000	89.993.615.373	95,32%	4.414.848.627
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	6.010.019.254.000	4.697.449.049.191	78,16%	1.312.570.204.809
04	DITJEN HORTIKULTURA	1.040.378.419.000	944.676.148.736	90,80%	95.702.270.264
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.114.218.315.000	1.072.741.473.213	96,28%	41.476.841.787
06	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.073.121.296.000	1.961.635.163.170	94,62%	111.486.132.830
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	4.927.538.742.000	4.008.589.282.139	81,35%	918.949.459.861
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.865.476.595.000	1.816.964.915.174	97,40%	48.511.679.826
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PER	1.595.698.560.000	1.483.334.907.529	92,96%	112.363.652.471
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	678.688.925.000	659.662.417.614	97,20%	19.026.507.386
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	852.815.222.000	931.594.332.804	109,24%	-78.779.110.804

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**3.589.324.559.000**	**3.368.036.653.338**	**93,83%**	**221.287.905.662**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	241.689.149.000	229.842.044.429	95,10%	11.847.104.571
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	111.632.821.000	94.703.846.753	84,84%	16.928.974.247
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	123.079.282.000	115.853.207.963	94,13%	7.226.074.037
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TING	126.731.100.000	115.048.065.635	90,78%	11.683.034.365
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	379.810.561.000	370.413.167.969	97,53%	9.397.393.031
06	INSPEKTORAT JENDERAL	45.449.543.000	46.590.201.877	102,51%	-1.140.658.877
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	655.489.735.000	651.214.550.427	99,35%	4.275.184.573
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	119.379.658.000	76.246.437.467	63,87%	43.133.220.533
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	1.786.062.710.000	1.668.125.130.818	93,40%	117.937.579.182
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**4.989.416.415.000**	**4.764.913.690.907**	**95,50%**	**224.502.724.093**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	342.456.898.000	353.671.849.632	103,27%	-11.214.951.632
02	INSPEKTORAT JENDERAL	64.768.004.000	64.289.545.059	99,26%	478.458.941
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1.171.369.684.000	1.132.640.232.045	96,69%	38.729.451.955
05	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	97.538.427.000	99.185.783.132	101,69%	-1.647.356.132
06	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	295.524.722.000	433.484.884.670	146,68%	-137.960.162.670
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	35.632.701.000	37.601.312.033	105,52%	-1.968.611.033
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MI	425.059.669.000	337.695.325.200	79,45%	87.364.343.800
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	456.926.328.000	413.010.996.235	90,39%	43.915.331.765
13	BADAN GEOLOGI	735.681.081.000	680.872.029.390	92,55%	54.809.051.610
14	BPH MIGAS	168.810.242.000	172.294.921.739	102,06%	-3.484.679.739
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.195.648.659.000	1.040.166.811.772	87,00%	155.481.847.228
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**41.554.917.054.000**	**39.695.681.976.332**	**95,53%**	**1.859.235.077.668**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	701.230.745.000	699.827.844.620	99,80%	1.402.900.380
02	INSPEKTORAT JENDERAL	107.671.530.000	108.467.889.808	100,74%	-796.359.808
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	4.013.041.163.000	3.763.977.876.216	93,79%	249.063.286.784
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	10.311.153.289.000	9.676.518.638.996	93,85%	634.634.650.004
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	7.194.866.668.000	6.645.267.854.078	92,36%	549.598.813.922
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	15.167.603.688.000	14.779.928.550.652	97,44%	387.675.137.348
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	138.253.242.000	143.502.285.892	103,80%	-5.249.043.892
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	3.758.406.165.000	3.709.814.424.483	98,71%	48.591.740.517

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
13	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	162.690.564.000	168.376.611.587	103,50%	-5.686.047.587
023	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**35.993.087.934.000**	**36.494.689.999.332**	**101,39%**	**-501.602.065.332**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.800.491.734.000	1.860.149.471.975	103,31%	-59.657.737.975
02	INSPEKTORAT JENDERAL	188.524.713.000	180.668.801.363	95,83%	7.855.911.637
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	18.241.917.758.000	18.805.610.126.129	103,09%	-563.692.368.129
05	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1.813.256.980.000	1.785.408.080.509	98,46%	27.848.899.491
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.188.578.297.000	1.096.411.637.895	92,25%	92.166.659.105
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	581.986.879.000	535.059.772.212	91,94%	46.927.106.788
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.795.283.807.000	1.662.450.908.321	92,60%	132.832.898.679
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.383.047.766.000	10.568.931.200.928	101,79%	-185.883.434.928
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**58.746.540.744.000**	**67.279.326.079.500**	**114,52%**	**-8.532.785.335.500**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	28.764.787.454.000	37.837.839.780.591	131,54%	-9.073.052.326.591
02	INSPEKTORAT JENDERAL	108.750.943.000	114.600.192.101	105,38%	-5.849.249.101
03	DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT	1.673.642.056.000	1.549.382.410.061	92,58%	124.259.645.939
04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	15.952.041.884.000	17.522.930.056.513	109,85%	-1.570.888.172.513
05	DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.641.905.147.000	3.124.494.156.384	118,27%	-482.589.009.384
07	DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	4.479.337.816.000	1.979.331.071.599	44,19%	2.500.006.744.401
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	805.387.027.000	754.216.628.695	93,65%	51.170.398.305
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	4.320.688.417.000	4.396.531.783.556	101,76%	-75.843.366.556
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**62.066.722.163.000**	**63.946.369.726.213**	**103,03%**	**-1.879.647.563.213**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.108.030.791.000	2.271.871.196.804	107,77%	-163.840.405.804
02	INSPEKTORAT JENDERAL	163.527.316.000	163.869.337.164	100,21%	-342.021.164
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.157.052.074.000	5.896.753.728.441	114,34%	-739.701.654.441
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	48.514.443.637.000	49.395.201.627.935	101,82%	-880.757.990.935
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.822.655.787.000	1.851.568.884.364	101,59%	-28.913.097.364
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	929.890.212.000	900.339.902.852	96,82%	29.550.309.148
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	816.170.820.000	795.370.338.195	97,45%	20.800.481.805
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	263.005.769.000	269.165.707.163	102,34%	-6.159.938.163
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.486.621.215.000	1.611.922.763.828	108,43%	-125.301.548.828
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	603.908.079.000	702.967.571.726	116,40%	-99.059.492.726
12	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	201.416.463.000	87.338.667.741	43,36%	114.077.795.259

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
026	**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**	**5.785.135.777.000**	**5.288.351.939.479**	**91,41%**	**496.783.837.521**
01	SEKRETARIS JENDERAL	314.254.093.000	306.160.684.876	97,42%	8.093.408.124
02	INSPEKTUR JENDERAL	55.546.830.000	55.319.610.039	99,59%	227.219.961
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESE	750.290.524.000	731.513.334.080	97,50%	18.777.189.920
05	DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENA	170.078.518.000	163.603.557.766	96,19%	6.474.960.234
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMAT	230.824.201.000	222.190.988.547	96,26%	8.633.212.453
11	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	79.085.218.000	75.668.335.132	95,68%	3.416.882.868
13	DIRJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	4.185.056.393.000	3.733.895.429.039	89,22%	451.160.963.961
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**58.906.458.379.000**	**57.726.645.452.081**	**98,00%**	**1.179.812.926.919**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	372.227.070.000	442.404.491.923	118,85%	-70.177.421.923
02	INSPEKTORAT JENDERAL	47.302.812.000	47.596.689.248	100,62%	-293.877.248
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	429.362.610.000	505.989.236.755	117,85%	-76.626.626.755
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1.163.312.583.000	1.158.631.960.107	99,60%	4.680.622.893
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	34.765.659.285.000	34.763.181.659.013	99,99%	2.477.625.987
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	21.405.310.213.000	20.113.590.633.266	93,97%	1.291.719.579.734
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL	723.283.806.000	695.250.781.769	96,12%	28.033.024.231
029	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**9.076.472.682.000**	**8.843.040.517.179**	**97,43%**	**233.432.164.821**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	585.645.937.000	591.840.666.015	101,06%	-6.194.729.015
02	INSPEKTORAT JENDERAL	86.837.312.000	85.617.728.663	98,60%	1.219.583.337
03	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	265.005.339.000	266.781.622.388	100,67%	-1.776.283.388
04	DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	3.512.913.670.000	3.121.000.882.843	88,84%	391.912.787.157
05	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.589.553.025.000	1.608.881.836.978	101,22%	-19.328.811.978
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	442.985.426.000	422.599.646.291	95,40%	20.385.779.709
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	270.854.125.000	383.016.421.832	141,41%	-112.162.296.832
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	310.840.945.000	328.257.497.975	105,60%	-17.416.552.975
09	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	450.556.380.000	425.750.039.179	94,49%	24.806.340.821
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	443.634.941.000	444.947.977.138	100,30%	-1.313.036.138
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	297.068.857.000	354.949.337.164	119,48%	-57.880.480.164
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHA	282.282.534.000	283.584.370.086	100,46%	-1.301.836.086
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	538.294.191.000	525.812.490.627	97,68%	12.481.700.373
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**5.483.013.769.000**	**5.055.148.917.815**	**92,20%**	**427.864.851.185**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
01	SEKRETARIAT JENDERAL	523.438.939.000	419.012.813.148	80,05%	104.426.125.852
02	INSPEKTORAT JENDERAL	73.381.988.000	75.921.421.789	103,46%	-2.539.433.789
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	619.122.765.000	563.013.073.025	90,94%	56.109.691.975
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	656.379.044.000	605.821.514.373	92,30%	50.557.529.627
05	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	646.521.072.000	590.467.574.144	91,33%	56.053.497.856
06	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	362.218.547.000	343.412.626.959	94,81%	18.805.920.041
07	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	436.249.762.000	378.208.769.672	86,70%	58.040.992.328
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.635.981.255.000	1.542.991.437.489	94,32%	92.989.817.511
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL P	529.720.397.000	536.299.687.216	101,24%	-6.579.290.216
033	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**	**110.731.599.735.000**	**100.557.499.619.109**	**90,81%**	**10.174.100.115.891**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	533.866.730.000	503.875.860.224	94,38%	29.990.869.776
02	INSPEKTORAT JENDERAL	99.642.000.000	98.986.614.106	99,34%	655.385.894
04	DITJEN BINA MARGA	40.318.736.335.000	39.569.405.368.331	98,14%	749.330.966.669
05	DITJEN CIPTA KARYA	20.245.197.763.000	16.737.261.299.856	82,67%	3.507.936.463.144
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	39.726.515.171.000	33.846.339.715.517	85,20%	5.880.175.455.483
07	DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	7.819.665.837.000	7.660.998.518.340	97,97%	158.667.318.660
08	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	261.939.000.000	453.978.123.153	173,31%	-192.039.123.153
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	540.907.000.000	506.805.242.691	93,70%	34.101.757.309
13	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	558.160.700.000	529.723.478.422	94,91%	28.437.221.578
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	228.000.000.000	225.304.758.853	98,82%	2.695.241.147
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	398.969.199.000	424.820.639.616	106,48%	-25.851.440.616
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMA**	**281.470.604.000**	**269.109.796.329**	**95,61%**	**12.360.807.671**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	281.470.604.000	269.109.796.329	95,61%	12.360.807.671
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**414.168.403.000**	**427.700.998.822**	**103,27%**	**-13.532.595.822**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.168.403.000	427.700.998.822	103,27%	-13.532.595.822
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DA**	**342.898.144.000**	**279.023.455.431**	**81,37%**	**63.874.688.569**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KE	342.898.144.000	279.023.455.431	81,37%	63.874.688.569
040	**KEMENTERIAN PARIWISATA**	**3.831.062.805.000**	**3.632.840.841.308**	**94,83%**	**198.221.963.692**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	3.831.062.805.000	3.632.840.841.308	94,83%	198.221.963.692
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**208.269.902.000**	**202.523.377.661**	**97,24%**	**5.746.524.339**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	208.269.902.000	202.523.377.661	97,24%	5.746.524.339

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
042	**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**	**41.264.106.844.000**	**45.499.009.030.136**	**110,26%**	**-4.234.902.186.136**
01	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIK	29.230.079.918.000	33.190.321.989.362	113,55%	-3.960.242.071.362
02	INSPEKTORAT JENDERAL	54.833.402.000	52.422.196.478	95,60%	2.411.205.522
03	DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI	1.150.453.100.000	1.080.106.189.806	93,89%	70.346.910.194
04	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	5.849.690.600.000	6.307.070.008.217	107,82%	-457.379.408.217
05	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,	2.586.462.302.000	2.569.388.392.981	99,34%	17.073.909.019
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN	2.012.424.322.000	1.956.146.362.988	97,20%	56.277.959.012
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI	380.163.200.000	343.553.890.304	90,37%	36.609.309.696
044	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**	**961.432.185.000**	**904.735.506.509**	**94,10%**	**56.696.678.491**
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	961.432.185.000	904.735.506.509	94,10%	56.696.678.491
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AI**	**493.636.794.000**	**480.206.212.291**	**97,28%**	**13.430.581.709**
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	493.636.794.000	480.206.212.291	97,28%	13.430.581.709
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMA**	**323.335.887.000**	**313.618.680.764**	**96,99%**	**9.717.206.236**
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BI	323.335.887.000	313.618.680.764	96,99%	9.717.206.236
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**5.353.428.881.000**	**5.496.675.771.095**	**102,68%**	**-143.246.890.095**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.353.428.881.000	5.496.675.771.095	102,68%	-143.246.890.095
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**2.308.100.095.000**	**2.270.771.765.897**	**98,38%**	**37.328.329.103**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.308.100.095.000	2.270.771.765.897	98,38%	37.328.329.103
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**42.830.440.000**	**49.287.937.866**	**115,08%**	**-6.457.497.866**
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	42.830.440.000	49.287.937.866	115,08%	-6.457.497.866
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**5.211.787.965.000**	**4.974.323.553.780**	**95,44%**	**237.464.411.220**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	5.211.787.965.000	4.974.323.553.780	95,44%	237.464.411.220
055	**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**	**1.781.109.088.000**	**1.580.198.695.165**	**88,72%**	**200.910.392.835**
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.781.109.088.000	1.580.198.695.165	88,72%	200.910.392.835
056	**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**	**9.669.251.145.000**	**8.509.238.849.792**	**88,00%**	**1.160.012.295.208**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	8.790.640.157.000	7.700.538.776.819	87,60%	1.090.101.380.181
02	INSPEKTORAT JENDERAL	15.848.655.000	15.218.722.586	96,03%	629.932.414
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	220.906.151.000	318.242.465.959	144,06%	-97.336.314.959
04	DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN	384.393.813.000	234.279.247.236	60,95%	150.114.565.764
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	32.278.360.000	24.291.933.574	75,26%	7.986.426.426
06	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	21.149.080.000	20.674.654.963	97,76%	474.425.037

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	13.169.583.000	12.342.838.827	93,72%	826.744.173
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PEN(	177.447.968.000	170.540.849.998	96,11%	6.907.118.002
09	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA,PEMANFAATA	13.417.378.000	13.109.359.830	97,70%	308.018.170
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**730.775.563.000**	**728.378.381.461**	**99,67%**	**2.397.181.539**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	730.775.563.000	728.378.381.461	99,67%	2.397.181.539
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.380.355.088.000**	**6.498.885.970.314**	**120,79%**	**-1.118.530.882.314**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	267.672.875.000	285.024.784.365	106,48%	-17.351.909.365
02	INSPEKTORAT JENDERAL	25.074.586.000	28.844.027.710	115,03%	-3.769.441.710
03	DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	890.609.550.000	713.073.822.586	80,07%	177.535.727.414
04	DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	246.765.509.000	233.804.420.707	94,75%	12.961.088.293
05	DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	3.421.443.796.000	1.208.072.703.718	35,31%	2.213.371.092.282
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	263.470.629.000	354.473.239.980	134,54%	-91.002.610.980
07	DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	265.318.143.000	332.867.769.368	125,46%	-67.549.626.368
08	BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI)		3.342.725.201.880		-3.342.725.201.880
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**86.187.801.241.000**	**98.191.072.462.088**	**113,93%**	**-12.003.271.221.088**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	86.187.801.241.000	98.191.072.462.088	113,93%	-12.003.271.221.088
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**1.970.195.546.000**	**2.028.648.053.570**	**102,97%**	**-58.452.507.570**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.970.195.546.000	2.028.648.053.570	102,97%	-58.452.507.570
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**201.379.786.000**	**205.679.561.120**	**102,14%**	**-4.299.775.120**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	201.379.786.000	205.679.561.120	102,14%	-4.299.775.120
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**616.060.891.000**	**597.118.142.460**	**96,93%**	**18.942.748.540**
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	616.060.891.000	597.118.142.460	96,93%	18.942.748.540
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**1.509.378.128.000**	**1.519.687.203.447**	**100,68%**	**-10.309.075.447**
01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.509.378.128.000	1.519.687.203.447	100,68%	-10.309.075.447
067	**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRA**	**4.325.623.104.000**	**5.165.837.344.165**	**119,42%**	**-840.214.240.165**
02	INSPEKTORAT JENDERAL	57.047.436.000	61.644.989.399	108,06%	-4.597.553.399
03	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARA	2.175.133.778.000	2.987.464.451.000	137,35%	-812.330.673.000
04	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	315.277.856.000	301.283.931.773	95,56%	13.993.924.227
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU	215.470.572.000	210.478.716.011	97,68%	4.991.855.989
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	280.858.139.000	265.544.953.797	94,55%	15.313.185.203
07	DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERN	390.118.518.000	381.191.419.310	97,71%	8.927.098.690

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	403.257.449.000	392.465.417.310	97,32%	10.792.031.690
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	234.020.013.000	246.490.641.102	105,33%	-12.470.628.102
10	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA,PDT, DAN TRANSMIGRASI	254.439.343.000	319.272.824.463	125,48%	-64.833.481.463
068	**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**3.791.611.729.000**	**3.538.241.106.438**	**93,32%**	**253.370.622.562**
01	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.791.611.729.000	3.538.241.106.438	93,32%	253.370.622.562
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**85.794.908.000**	**97.558.419.021**	**113,71%**	**-11.763.511.021**
01	KOMNAS HAM	85.794.908.000	97.558.419.021	113,71%	-11.763.511.021
075	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**1.754.228.195.000**	**2.408.284.219.974**	**137,28%**	**-654.056.024.974**
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.754.228.195.000	2.408.284.219.974	137,28%	-654.056.024.974
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**18.104.139.070.000**	**17.432.278.990.495**	**96,29%**	**671.860.079.505**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	18.104.139.070.000	17.432.278.990.495	96,29%	671.860.079.505
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**539.645.401.000**	**519.882.725.310**	**96,34%**	**19.762.675.690**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	539.645.401.000	519.882.725.310	96,34%	19.762.675.690
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**180.362.223.000**	**195.685.169.459**	**108,50%**	**-15.322.946.459**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	180.362.223.000	195.685.169.459	108,50%	-15.322.946.459
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**1.424.079.428.000**	**1.431.828.441.271**	**100,54%**	**-7.749.013.271**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.424.079.428.000	1.431.828.441.271	100,54%	-7.749.013.271
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**888.905.286.000**	**976.335.669.773**	**109,84%**	**-87.430.383.773**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	888.905.286.000	976.335.669.773	109,84%	-87.430.383.773
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**1.372.693.070.000**	**1.560.963.664.572**	**113,72%**	**-188.270.594.572**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.372.693.070.000	1.560.963.664.572	113,72%	-188.270.594.572
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**792.864.792.000**	**796.286.547.322**	**100,43%**	**-3.421.755.322**
01	L A P A N	792.864.792.000	796.286.547.322	100,43%	-3.421.755.322
083	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**	**727.737.635.000**	**675.009.572.511**	**92,75%**	**52.728.062.489**
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	727.737.635.000	675.009.572.511	92,75%	52.728.062.489
084	**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**	**231.619.639.000**	**241.520.103.214**	**104,27%**	**-9.900.464.214**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	231.619.639.000	241.520.103.214	104,27%	-9.900.464.214
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**178.706.972.000**	**173.308.378.085**	**96,98%**	**5.398.593.915**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	178.706.972.000	173.308.378.085	96,98%	5.398.593.915
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**319.338.715.000**	**338.792.939.594**	**106,09%**	**-19.454.224.594**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	319.338.715.000	338.792.939.594	106,09%	-19.454.224.594

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**296.463.632.000**	**309.389.633.258**	**104,36%**	**-12.926.001.258**
01	ARSIP NASIONAL	296.463.632.000	309.389.633.258	104,36%	-12.926.001.258
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**625.144.810.000**	**614.789.701.800**	**98,34%**	**10.355.108.200**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	625.144.810.000	614.789.701.800	98,34%	10.355.108.200
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.431.753.914.000**	**1.592.579.258.133**	**111,23%**	**-160.825.344.133**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.431.753.914.000	1.592.579.258.133	111,23%	-160.825.344.133
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**3.293.722.353.000**	**3.246.524.101.571**	**98,57%**	**47.198.251.429**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	850.744.901.000	788.615.851.611	92,70%	62.129.049.389
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.553.209.890.000	1.611.218.814.855	103,73%	-58.008.924.855
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	148.617.706.000	142.123.480.126	95,63%	6.494.225.874
04	DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	152.200.926.000	148.970.638.913	97,88%	3.230.287.087
05	INSPEKTORAT JENDERAL	48.000.000.000	46.652.944.513	97,19%	1.347.055.487
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	161.752.534.000	141.806.818.166	87,67%	19.945.715.834
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	72.000.000.000	68.634.868.816	95,33%	3.365.131.184
08	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	40.000.000.000	39.488.179.020	98,72%	511.820.980
09	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	267.196.396.000	259.012.505.551	96,94%	8.183.890.449
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**1.951.091.970.000**	**2.051.207.494.609**	**105,13%**	**-100.115.524.609**
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.951.091.970.000	2.051.207.494.609	105,13%	-100.115.524.609
093	**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**	**813.449.265.000**	**894.360.498.200**	**109,95%**	**-80.911.233.200**
01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	813.449.265.000	894.360.498.200	109,95%	-80.911.233.200
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**1.087.118.025.000**	**1.037.924.462.836**	**95,47%**	**49.193.562.164**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	262.557.742.000	239.309.153.825	91,15%	23.248.588.175
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	824.560.283.000	798.615.309.011	96,85%	25.944.973.989
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**124.010.477.000**	**123.260.140.305**	**99,39%**	**750.336.695**
01	KOMISI YUDISIAL RI	124.010.477.000	123.260.140.305	99,39%	750.336.695
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**	**619.425.671.000**	**8.079.901.770.792**	**1304,42%**	**-7.460.476.099.792**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	619.425.671.000	8.079.901.770.792	1304,42%	-7.460.476.099.792
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJ**	**317.971.678.000**	**312.761.403.658**	**98,36%**	**5.210.274.342**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	317.971.678.000	312.761.403.658	98,36%	5.210.274.342
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**	**213.102.107.000**	**232.670.388.086**	**109,18%**	**-19.568.281.086**
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	213.102.107.000	232.670.388.086	109,18%	-19.568.281.086

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
107	**BADAN SAR NASIONAL**	**1.986.896.526.000**	**1.989.041.953.088**	**100,11%**	**-2.145.427.088**
01	BADAN SAR NASIONAL	1.986.896.526.000	1.989.041.953.088	100,11%	-2.145.427.088
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**	**131.177.030.000**	**134.810.868.491**	**102,77%**	**-3.633.838.491**
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	131.177.030.000	134.810.868.491	102,77%	-3.633.838.491
109	**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU**	**218.231.445.000**	**181.124.086.287**	**83,00%**	**37.107.358.713**
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	218.231.445.000	181.124.086.287	83,00%	37.107.358.713
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**150.718.755.000**	**161.415.619.730**	**107,10%**	**-10.696.864.730**
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	150.718.755.000	161.415.619.730	107,10%	-10.696.864.730
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**	**193.968.340.000**	**178.487.785.704**	**92,02%**	**15.480.554.296**
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	193.968.340.000	178.487.785.704	92,02%	15.480.554.296
112	**BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUH**	**1.820.890.963.000**	**1.565.257.279.198**	**85,96%**	**255.633.683.802**
01	BPKPB BATAM	1.820.890.963.000	1.565.257.279.198	85,96%	255.633.683.802
113	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**	**699.598.337.000**	**644.045.214.838**	**92,06%**	**55.553.122.162**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	699.598.337.000	644.045.214.838	92,06%	55.553.122.162
114	**SEKRETARIAT KABINET**	**756.072.365.000**	**387.471.129.222**	**51,25%**	**368.601.235.778**
01	SEKRETARIAT KABINET	756.072.365.000	387.471.129.222	51,25%	368.601.235.778
115	**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**	**8.628.733.903.000**	**6.403.439.094.449**	**74,21%**	**2.225.294.808.551**
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	8.628.733.903.000	6.403.439.094.449	74,21%	2.225.294.808.551
116	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**	**994.120.111.000**	**903.129.729.254**	**90,85%**	**90.990.381.746**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	994.120.111.000	903.129.729.254	90,85%	90.990.381.746
117	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**	**951.021.692.000**	**958.650.092.158**	**100,80%**	**-7.628.400.158**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	951.021.692.000	958.650.092.158	100,80%	-7.628.400.158
118	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB**	**221.429.833.000**	**187.330.729.253**	**84,60%**	**34.099.103.747**
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHA	221.429.833.000	187.330.729.253	84,60%	34.099.103.747
119	**BADAN KEAMANAN LAUT**	**447.416.980.000**	**424.130.206.696**	**94,80%**	**23.286.773.304**
01	BADAN KEAMANAN LAUT	447.416.980.000	424.130.206.696	94,80%	23.286.773.304
120	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**	**254.166.852.000**	**251.041.375.137**	**98,77%**	**3.125.476.863**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	254.166.852.000	251.041.375.137	98,77%	3.125.476.863
121	**BADAN EKONOMI KREATIF**	**657.151.214.000**	**595.577.623.225**	**90,63%**	**61.573.590.775**
01	BADAN EKONOMI KREATIF	657.151.214.000	595.577.623.225	90,63%	61.573.590.775
122	**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**		**141.463.962.029**		**-141.463.962.029**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) APBN
01	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		141.463.962.029		-141.463.962.029
999	**BENDAHARA UMUM NEGARA**	**778.893.674.484.000**	**622.886.657.892.672**	**79,97%**	**156.007.016.591.328**
01	PENGELOLAAN UTANG	275.885.267.880.000	275.521.165.410.219	99,87%	364.102.469.781
02	PENGELOLAAN HIBAH	1.940.650.000.000	6.476.205.662.045	333,71%	-4.535.555.662.045
07	PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI	224.320.857.116.000	201.802.566.846.111	89,96%	22.518.290.269.889
08	PENGELOLAAN BELANJA LAIN	150.719.182.841.000	10.496.948.415.372	6,96%	140.222.234.425.628
99	PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS	126.027.716.647.000	128.589.771.558.925	102,03%	-2.562.054.911.925
XX	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA SIAP DAN SAI		-47.997		
Jumlah Total		**1.634.339.518.949.000**	**1.496.313.886.364.770**	**91,55%**	**138.025.632.584.230**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	90.936.367.468	762.966.616.778	33.379.925.060						**887.282.909.306**
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.029.657.432.362	3.253.469.542.053	431.638.152.718						**4.714.765.127.133**
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.981.552.016.470	1.551.898.330.200	197.325.528.578						**3.730.775.875.248**
005	MAHKAMAH AGUNG	6.599.648.881.819	1.590.346.218.447	681.349.970.767				-	-	**8.871.345.071.033**
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3.507.308.841.606	1.470.558.927.990	1.857.749.614.202				-		**6.835.617.383.798**
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	477.381.347.893	1.643.277.302.287	324.663.814.641						**2.445.322.464.821**
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	806.607.836.734	2.262.568.608.837	227.870.255.821				-	-	**3.297.046.701.392**
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.221.353.506.027	3.483.821.451.742	1.011.452.353.030						**7.716.627.310.799**
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	50.498.629.604.956	36.631.658.879.996	28.221.377.515.489				-		**115.351.666.000.441**
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	6.885.840.107.867	5.261.614.869.573	1.626.941.030.922				-		**13.774.396.008.362**
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	21.460.995.199.786	16.605.824.448.271	1.479.233.420.342	-			-		**39.546.053.068.399**
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.520.263.223.317	16.020.690.039.440	883.339.624.804				-	-	**19.424.292.887.561**
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	727.823.878.539	1.852.762.580.553	787.450.194.246				-	-	**3.368.036.653.338**
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	868.607.111.629	2.866.149.389.301	1.030.157.189.977	-			-		**4.764.913.690.907**
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.724.838.136.058	13.491.370.875.316	22.479.472.964.958			-	-	-	**39.695.681.976.332**
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.836.523.305.435	17.026.512.844.031	983.598.242.341	-			9.648.055.607.525	-	**36.494.689.999.332**
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.320.523.710.930	22.390.617.563.645	3.791.042.130.925	-			35.777.142.674.000		**67.279.326.079.500**
025	KEMENTERIAN AGAMA	38.197.053.406.241	19.156.501.024.570	4.695.026.370.402				1.897.788.925.000	-	**63.946.369.726.213**
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	409.638.306.734	4.625.216.407.440	253.497.225.305					-	**5.288.351.939.479**
027	KEMENTERIAN SOSIAL	480.617.558.411	3.665.853.868.269	319.344.518.246				53.260.829.507.155		**57.726.645.452.081**
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.937.881.855.722	6.301.606.081.219	603.552.580.238	-			-		**8.843.040.517.179**
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.846.046.376.486	2.888.977.321.898	320.125.219.431				-	-	**5.055.148.917.815**
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.849.572.498.982	32.769.929.978.870	64.937.997.141.257	-			-	-	**100.557.499.619.109**
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	60.771.777.461	201.867.738.109	6.470.280.759						**269.109.796.329**
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	104.020.300.613	314.636.547.474	9.044.150.735						**427.700.998.822**
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	60.283.213.646	213.730.684.285	5.009.557.500						**279.023.455.431**
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	283.988.400.128	2.664.826.006.387	684.026.434.793				-		**3.632.840.841.308**
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	57.738.232.224	129.812.902.846	14.972.242.591					-	**202.523.377.661**
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	13.720.400.616.407	20.920.426.695.671	6.438.654.279.087				4.419.527.438.971	-	**45.499.009.030.136**
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	105.544.687.512	790.217.125.420	8.973.693.577				-		**904.735.506.509**
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	46.162.493.965	429.299.259.940	4.744.458.386						**480.206.212.291**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	83.374.031.254	216.017.283.001	14.227.366.509						**313.618.680.764**
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	435.449.495.818	3.875.901.067.277	1.185.325.208.000						**5.496.675.771.095**
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	141.667.583.983	250.381.041.023	1.878.723.140.891						**2.270.771.765.897**
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	23.311.593.242	25.976.344.624	-						**49.287.937.866**
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.134.590.486.821	2.200.051.068.346	639.681.998.613						**4.974.323.553.780**
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	169.235.794.623	1.129.733.334.979	281.229.565.563						**1.580.198.695.165**
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	2.065.199.297.477	5.801.573.416.691	642.466.135.624				-	-	**8.509.238.849.792**
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	106.287.632.022	450.254.165.121	171.836.584.318						**728.378.381.461**
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	402.768.963.633	5.918.040.200.898	178.076.805.783						**6.498.885.970.314**
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	51.751.238.649.800	25.667.059.860.728	20.772.773.951.560				-		**98.191.072.462.088**
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	620.888.676.463	1.044.377.452.726	363.381.924.381						**2.028.648.053.570**
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	75.037.761.136	111.482.206.225	19.159.593.759						**205.679.561.120**
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	131.854.948.448	401.061.835.511	64.201.358.501						**597.118.142.460**
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	505.348.867.578	874.240.265.249	140.098.070.620				-	-	**1.519.687.203.447**
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH	238.955.466.005	4.576.078.662.626	350.803.215.534				-		**5.165.837.344.165**
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.060.912.937.484	1.434.586.301.505	42.741.867.449	-					**3.538.241.106.438**
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	36.163.732.545	59.451.980.548	1.942.705.928						**97.558.419.021**
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	539.538.063.626	810.540.730.827	1.058.205.425.521					-	**2.408.284.219.974**
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.288.051.950.017	15.904.211.995.411	240.015.045.067					-	**17.432.278.990.495**
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	57.130.182.423	445.085.937.489	17.666.605.398						**519.882.725.310**
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.764.770.304	65.669.985.628	48.250.413.527						**195.685.169.459**
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	672.582.922.630	338.750.041.898	420.495.476.743						**1.431.828.441.271**
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	436.342.252.849	243.733.257.424	296.260.159.500						**976.335.669.773**
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	492.420.396.209	503.992.356.155	564.550.912.208						**1.560.963.664.572**
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	196.348.491.501	162.502.744.457	437.435.311.364						**796.286.547.322**
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	87.194.728.519	157.960.596.234	429.854.247.758				-		**675.009.572.511**
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	68.535.766.127	103.473.806.246	69.510.530.841						**241.520.103.214**
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	57.422.826.592	78.682.111.096	37.203.440.397						**173.308.378.085**
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	153.025.069.302	163.676.072.094	22.091.798.198						**338.792.939.594**
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	100.092.865.098	107.935.972.063	101.360.796.097						**309.389.633.258**
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	332.810.746.831	214.197.780.568	67.781.174.401						**614.789.701.800**
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	984.571.870.825	528.152.397.852	79.854.989.456						**1.592.579.258.133**
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	493.946.298.301	2.584.963.922.202	167.613.881.068				-	-	**3.246.524.101.571**
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	116.852.523.225	1.919.901.908.534	14.453.062.850			-	-		**2.051.207.494.609**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	600.027.587.851	253.293.476.054	41.039.434.295						**894.360.498.200**
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	316.078.472.365	713.762.314.696	8.083.675.775						**1.037.924.462.836**
100	KOMISI YUDISIAL RI	37.828.140.299	82.324.353.407	3.107.646.599						**123.260.140.305**
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	59.051.748.875	531.670.679.142	12.268.717.797				7.476.910.624.978	-	**8.079.901.770.792**
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	114.200.436.349	186.101.799.392	12.459.167.917						**312.761.403.658**
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	35.201.991.155	163.481.982.257	33.986.414.674						**232.670.388.086**
107	BADAN SAR NASIONAL	375.997.729.701	656.919.006.556	956.125.216.831						**1.989.041.953.088**
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	35.652.500.524	94.948.109.520	4.210.258.447						**134.810.868.491**
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	10.307.086.000	31.697.170.088	139.119.830.199						**181.124.086.287**
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	69.061.212.442	90.777.751.515	1.576.655.773						**161.415.619.730**
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	29.017.022.077	140.858.880.574	8.611.883.053						**178.487.785.704**
112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM		997.015.341.731	568.241.937.467						**1.565.257.279.198**
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	30.742.675.730	461.257.984.665	152.044.554.443				-		**644.045.214.838**
114	SEKRETARIAT KABINET	187.803.258.777	175.320.530.906	24.347.339.539						**387.471.129.222**
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	432.315.214.580	5.843.562.830.937	127.561.048.932				-	-	**6.403.439.094.449**
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	548.587.980.556	301.386.719.081	53.155.029.617						**903.129.729.254**
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	310.859.724.981	484.934.714.033	162.855.653.144						**958.650.092.158**
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		42.140.130.089	145.190.599.164						**187.330.729.253**
119	BADAN KEAMANAN LAUT	54.504.644.170	206.413.410.526	163.212.152.000						**424.130.206.696**
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	42.783.790.596	194.895.015.148	13.362.569.393						**251.041.375.137**
121	BADAN EKONOMI KREATIF	33.540.023.386	556.089.025.639	5.948.574.200						**595.577.623.225**
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	13.042.990.665	92.203.813.464	36.217.157.900						**141.463.962.029**
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	126.878.527.745.495	508.445.680.153	-	275.521.165.410.219	201.802.566.846.111	6.476.205.662.045	-	11.699.746.548.649	**622.886.657.892.672**
	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA BUN DAN SAI	(94)	(1.322.903)	1.275.000	-	-	-	-	-	**(47.997)**
	JUMLAH	**376.074.259.852.619**	**334.418.207.630.784**	**177.841.479.636.714**	**275.521.165.410.219**	**201.802.566.846.111**	**6.476.205.662.045**	**112.480.254.777.629**	**11.699.746.548.649**	**1.496.313.886.364.770**

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
31 Desember 2019

No	KD SATKER	Nama Satker BLU	RUMPUN	KD KL	KEMENTERIAN
1	344576	RS TNI AL dr. Ramelan Surabaya	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
2	415423	RS Cipto Mangunkusuma-Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
3	415432	RS Fatmawati-Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
4	415448	RS Persahabatan-Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
5	415460	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
6	415479	RS Dr.Hasan Sadikin-Bandung	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
7	415505	RSJ Dr.Marzoeki Mahdi Bogor	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
8	415536	RS Dr.Kariadi-Semarang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
9	415573	RSU Dr.Soeradji Tirtonegoro,Klaten	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
10	415582	RS Dr.Sardjito-Yogyakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
11	415602	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
12	415618	RS Dr.M.Djamil-Padang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
13	415624	RS Dr.Moh.Hoesin-Palembang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
14	415649	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
15	415655	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
16	415661	RS Sanglah-Denpasar	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
17	532214	RSU H. Adam Malik Medan	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
18	538815	RSU Prof.Dr.R.Kandou, Manado	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
19	548886	RS Dr.Wahidin Sudirohusodo-Makassar	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
20	344809	RS TNI AU dr. Hardjolukito Yogyakarta	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
21	559662	Balai Kesehatan Penerbang	KESEHATAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
22	257847	RS Stroke Nasional, Bk Tinggi	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
23	258462	Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
24	415381	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
25	415397	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
26	415401	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
27	415454	RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan,Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
28	415485	RS Paru Dr.Rotinsulu - Bandung	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
29	415491	RS Mata Cicendo Bandung	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
30	415511	RS Paru Goenawan Partowidigdo, Cisarua Bogor	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
31	415520	Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
32	415542	RS Jiwa Dr Soeroyo Magelang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
33	415551	RS Paru Dr.Ario Wirawan, Salatiga	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
34	415567	RS Orthopedi Prof Dr R Soeharso-Solo	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
35	415598	RS Jiwa Radjiman W, Lawang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
36	415630	Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
37	415670	RS Ketergantungan Obat , Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
38	415706	RS Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso,Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
39	520611	RS Anak Bunda Harapan Kita-Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
40	520628	RS Jantung Harapan Kita-Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
41	538857	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
42	548890	RS Kanker Dharmais-Jakarta	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
43	15514	RS Pusat Otak Nasional	KESEHATAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
44	418378	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto	KESEHATAN	12	KEMENTERIAN PERTAHANAN
45	418379	RS TNI AD Tk. II Putri Hijau Medan	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
46	418383	RS TNI AD Tk.II Dustira Cimahi	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
47	418384	RS TNI AD Tk. III Ciremai Cirebon	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
48	418389	RS TNI AD Tk. II dr. Soepraoen Malang	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
49	418391	RS TNI AD Tk. II Pelamonia Makassar	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
50	130467	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pontianak	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
51	640384	RS Bhayangkara Medan	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
52	641952	Rumkit Bhayangkara Sespimma Lemdiklat polri	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
53	642158	RS Bhayangkara Brimob Kelapa Dua	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
54	642818	Rumah Sakit Bhayangkara Bandung	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
55	644044	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kediri	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
56	644113	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Bojonegoro	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
57	644223	RS Bhayangkara Bondowoso	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
58	646307	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mappang Oudang Makassar	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
59	648261	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
60	650447	Rumah Sakit Bhayangkara PusdiksabharaTk. IV Porong	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
61	650456	Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Sukabumi	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
62	650552	RS Bhayangkara Tebing Tinggi	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
63	650772	RS Bhayangkara Jambi	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
64	650840	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
65	651032	Rumah Sakit Bhayangkara Semarang	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
31 Desember 2019

No	KD SATKER	Nama Satker BLU	RUMPUN	KD KL	KEMENTERIAN
66	651135	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
67	651203	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
68	651252	RS Bhayangkara Mataram	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
69	651465	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palangkaraya	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
70	651529	RS Bhayangkara Balikpapan	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
71	651650	RS Bhayangkara Kendari	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
72	651732	Rumkit Bhayangkara Manado	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
73	679389	Rumkit Bhayangkara Padang	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
74	679415	RS Bhayangkara Pekanbaru	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
75	679457	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
76	679571	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Indramayu	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
77	679614	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
78	679621	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tulungagung	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
79	679635	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lumajang	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
80	679710	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kupang	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
81	679787	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
82	679841	RS Bhayangkara Palu	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
83	679972	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
84	679986	Rumkit Bhayangkara Yogyakarta	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
85	51447	RS Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
86	55925	Rumkit Bhayangkara Hasta brata Batu	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
87	677557	Universitas Negeri Jakarta	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
88	677507	Universitas Negeri Semarang	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
89	677508	Universitas Sebelas Maret Surakarta	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
90	677558	Universitas Jenderal Soedirman	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
91	677509	Universitas Negeri Yogyakarta	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
92	414298	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
93	677511	Universitas Negeri Surabaya	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
94	677512	Universitas Brawijaya Malang	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
95	677563	Universitas Negeri Malang	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
96	677570	Universitas Syiah Kuala Aceh	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
97	677524	Universitas Negeri Medan	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
98	677513	Universitas Andalas	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
99	423548	Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
100	424208	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
101	677565	Universitas Negeri Jambi	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
102	677515	Universitas Sriwijaya	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
103	677516	Universitas Lampung	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
104	677517	Universitas Tanjung Pura	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
105	677567	Universitas Mulawarman Samarinda	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
106	677519	Universitas Sam Ratulangi	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
107	677521	Universitas Negeri Gorontalo	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
108	424260	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
109	677525	Universitas Pattimura, Maluku	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
110	531954	Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
111	637588	Politeknik Kesehatan Surabaya	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
112	677528	Universitas Nusa Cendana	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
113	677529	Universitas Bengkulu	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
114	677510	Universitas Haluoleo	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
115	677564	Universitas Riau	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
116	677602	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
117	307843	Universitas Islam Negeri Mataram	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
118	423925	Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
119	307314	Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
120	526181	Politeknik Penerbangan Surabaya	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
121	423501	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
122	423523	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
123	632174	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
124	423611	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
125	423755	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
126	423770	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
127	423812	Universitas Islam Negeri Malang	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
128	632259	Politeknik Kesehatan Surakarta	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
129	424007	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
31 Desember 2019

No	KD SATKER	Nama Satker BLU	RUMPUN	KD KL	KEMENTERIAN
130	632263	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
131	424157	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
132	424188	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
133	632291	Politeknik Kesehatan Pontianak	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
134	637567	Politeknik Kesehatan Malang	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
135	477198	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	PENDIDIKAN	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
136	579331	Politeknik AKA Bogor	PENDIDIKAN	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
137	412616	PPSDM Migas Cepu	PENDIDIKAN	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
138	477120	Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS	PENDIDIKAN	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
139	548929	PPSDM Goelogi, Mineral dan Batubara	PENDIDIKAN	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
140	634111	PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	PENDIDIKAN	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
141	287494	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
142	677526	Universitas Udayana	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
143	677531	Universitas Terbuka	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
144	414302	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
145	414324	Balai Besar Pend Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran(BP3IP)	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
146	414330	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
147	414349	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
148	632153	Politeknik Kesehatan Bengkulu	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
149	677522	Universitas Tadulako	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
150	449730	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
151	677527	Universitas Mataram	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
152	517988	Politeknik Transportasi Sungai ,Danau dan Penyebrangan Palembang	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
153	677573	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
154	677606	Politeknik Negeri Malang	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
155	526200	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
156	288127	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
157	526221	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
158	526222	Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
159	414355	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
160	649910	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
161	649911	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
162	414361	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
163	51159	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
164	632111	Politeknik Kesehatan Medan	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
165	424050	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
166	449731	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
167	632200	Politeknik Kesehatan Jakarta II	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
168	632217	Politeknik Kesehatan Jakarta III	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
169	632221	Politeknik Kesehatan Bandung	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
170	632242	Politeknik Kesehatan Semarang	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
171	526195	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
172	526217	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
173	654603	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	PENDIDIKAN	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
174	632348	Politeknik Kesehatan Makassar	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
175	677514	Universitas Negeri Padang	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
176	677530	Universitas Pendidikan Ganesha	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
177	691117	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	PENGELOLA DANA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
178	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	PENGELOLA DANA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
179	440781	Pusat Investasi Pemerintah	PENGELOLA DANA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
180	447852	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	PENGELOLA DANA	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN
181	660056	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	PENGELOLA DANA	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
182	499686	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	PENGELOLA DANA	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
31 Desember 2019

No	KD SATKER	Nama Satker BLU	RUMPUN	KD KL	KEMENTERIAN
183	446135	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PENGELOLA DANA	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
184	668444	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	PENGELOLA DANA	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
185	499672	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK),Jakarta	KAWASAN	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
186	499681	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran(PPKK), Jakarta	KAWASAN	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
187	604445	Lembaga Manajemen Aset Negara	BARANG JASA LAINNYA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
188	499962	Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan	BARANG JASA LAINNYA	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
189	568717	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	KAWASAN	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
190	683499	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	KAWASAN	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG
191	237551	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	BARANG JASA LAINNYA	018	KEMENTERIAN PERTANIAN
192	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	BARANG JASA LAINNYA	018	KEMENTERIAN PERTANIAN
193	247136	Balai Besar Industri Agro	BARANG JASA LAINNYA	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
194	247140	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	BARANG JASA LAINNYA	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
195	247161	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	BARANG JASA LAINNYA	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
196	539060	Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung	BARANG JASA LAINNYA	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
197	412596	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	BARANG JASA LAINNYA	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
198	412600	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	BARANG JASA LAINNYA	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
199	579191	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	BARANG JASA LAINNYA	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
200	634099	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan konservasi Energi	BARANG JASA LAINNYA	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
201	288312	Bandar Udara A.S Hanandjoeddin di Tanjung Pandan	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
202	288326	Bandar Udara Radin Inten II Lampung	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
203	288372	Bandar Udara Juwata Tarakan	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
204	288393	Bandara Djalaluddin Gorontalo	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
205	288401	Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
206	288550	Bandar Udara Sentani Jayapura	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
207	288621	Bandar Udara Fatmawati Bengkulu	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
208	413962	Bandar Udara Kalimarau di Tanjung Redeb	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
209	559683	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
210	401519	Pusat Peragaan IPTEK Jakarta	BARANG JASA LAINNYA	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
211	446141	Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta	BARANG JASA LAINNYA	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
212	667875	BPPT Enjiniring Jakarta	BARANG JASA LAINNYA	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
213	424075	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	PENDIDIKAN	025	KEMENTERIAN AGAMA
214	677506	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
215	215137	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
216	641792	Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung	KESEHATAN	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
217	445372	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	BARANG JASA LAINNYA	025	KEMENTERIAN AGAMA
218	418393	Rumkit Tk.II Udayana	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
31 Desember 2019

No	KD SATKER	Nama Satker BLU	RUMPUN	KD KL	KEMENTERIAN
219	418394	Rumkit Tk.II Kartika Husada	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
220	418382	Rumkit AD Tk.IV dr. Bratanata Unang	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
221	344808	Rumkit AU Tk.II dr. M. Salamun Bandung	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
222	418387	Rumkit AD Tk.II dr. Soedjono Magelang	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
223	418388	Rumkit AD Tk.II Wijayakusuma Purwokerto	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
224	677523	Universitas Negeri Makassar	PENDIDIKAN	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
225	418327	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	KAWASAN	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
226	632306	Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
227	632181	Politeknik Kesehatan Denpasar	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
228	632327	Politeknik Kesehatan Manado	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
229	632238	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
230	418395	RS TNI AD Tk.II Prof. dr. J. A. Latumenten Maluku	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
231	418392	RS TNI AD Tk.II Robert Walter Monginsidi Manado	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
232	344807	RS TNI AU DR. Esnawan Antariksa	KESEHATAN	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
233	632284	Politeknik Kesehatan Kupang	PENDIDIKAN	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
234	439039	Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	PENGELOLA DANA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
235	0	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	PENGELOLA DANA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
236	467005	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	BARANG JASA LAINNYA	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
Kementerian Dalam Negeri																						
LK PLN 1	Second Additional Financing For Third Water Supply And Sanitation For Low Income Communities/ Community Based Water Supply Project	Bank Dunia	PAMSIMAS III	IBRD LOAN No. 8378 ID	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2020	Rp	26.779.800.000	8.962.144.753	4.877.067.436	-	4.877.067.436	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	BPKP
LK PLN 2	Asian Development Bank Ordinary Fund	ADB	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	3440-INO	1RUX78CA	2 September 2016	9 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	15.155.076.803	14.037.695.061	-	14.011.422.415	26.272.636	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KemenPUPR	BPK
LK PLN 3	Asian Development Bank Ordinary Fund	ADB	Integrated Particpatory Develepoment and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	3529-INO & 8327-INO (ADB)	1Z83YQWA & 11DDKSIA	31 Juli 2017	8 September 2017	30 Juni 2023	USD	600.000.000	17.425.523.167	43.892.461.874	-	43.714.492.374	177.909.500	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KemenPUPR	BPK
LK PLN 4	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	IBRD dan ADB	SIMURP	IBRD No.891-ID & ADB No. L0060A	1NF3PM6A & 11184NSA	IBRD 25 Juli 2018 & ADB 11 Juli 2018	25 Oktober 2018 & 11 Oktober 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000 & 250.000.000	-	6.340.279.560	-	6.340.279.560	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KemenPUPR	BPK
LK PLN 5	National Affordable Housing Program	IBRD	NAHF	IBRD LOAN No.8717-ID	111072SWA	30 November 2017	24 Januari 2018	31 Maret 2021	Rp	26.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR	BPKP
LK PLN 6	National Urban Supply Water Project	IBRD	NUSWP	IBRD LOAN No.8572-ID	1CPUK3GA	20 Agustus 2018	20 Agustus 2018	31 Desember 2022	Rp	50.753.000.000	-	8.719.863.697	-	8.719.863.697	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	BPKP
Kementerian Kesehatan																						
LK PLN 1	Indonesia Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Program/ Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) Program	World Bank	Indonesia Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Program/ Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) Program	IBRD-8873-ID	1B4ND8ZA	17 Juli 2018	09 Oktober 2018	30 April 2024	USD	150.000.000	-	281.990.000.000	-	20.825.339.481	397.691.804.600	-	138.897.929.540	638.955.805.275	5.309.258.288	783.162.993.003	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	BPK
LK PLN 2	Health Services Referral Program IsDB	Islamic Development Bank	Penguatan RS. Rujukan Nasional RS Unit Pelaksanaan Teknis Vertikal	Tidak ada	Tidak ada	Belumada	Belumada	Belumada	Rp	10.000.000	-	-										
LK PLN 2	Program for human Resources Development in Health Sector	Islamic Development Bank	Improvement of Facilities and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector																			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																						
LK PLN 1	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	3455-INO	1F1NDHGA	28/11/2016	21/12/2016	30/06/2020	USD	148.200.000	30.921.829.528	165.354.333.722		21.004.944.485	144.349.389.237			102.657.374.560	65.451.103.148		Sekretariat Jenderal	BPK

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
LK PLN 2	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	INA-19	21654001	22/12/2012	14/02/2012	14/06/2022	USD	100.000.000	159.201.503.218	206.572.471.509		-	206.572.471.509			206.572.471.509			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 9	Upper Citarum Basin Flood Management Sector Loan	JICA	Upper Citarum Basin Flood Management Sector Loan	IP-559	21668801	28/03/2013	25/07/2013	25/07/2020	JPY	3.311.000.000	34.178.834.597	123.209.321.238		-	123.209.321.238			123.209.321.238			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 10	Urgent Disaster Reduction Project for Mt.Merapi and Lower Progo River Area – Phase II	JICA	Urgent Disaster Reduction Project for Mt.Merapi and Lower Progo River Area – Phase II	IP-566	21682601	24/02/2014	23/07/2014	23/07/2021	JPY	5.111.000.000	59.285.043.476	78.486.480.881		-	78.486.480.881			78.486.480.881			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 11	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)	IP-567	21684001	24/02/2014	23/07/2014	23/07/2021	JPY	4.954.000.000	89.315.131.871	139.495.335.651		36.106.737.600	103.388.598.051			103.388.598.051			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 12	Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	JICA	Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	IP-573	1HJ95NBA	30/03/2017	27/07/2017	27/07/2026	JPY	48.237.000.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 13	Komering Irrigation Project Stage III	JICA	Komering Irrigation Project Stage III	IP-574	1SYVA92A	30/03/2017	27/07/2017	27/07/2025	JPY	15.896.000.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 14	Bali Beach Conservation Project II Komponen Ditjen SDA	JICA	Bali Beach Conservation Project II Komponen Ditjen SDA	IP-575	17HCS2YA	30/03/2017	27/07/2017	27/07/2025	JPY	9.855.000.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 15	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	IFAD	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	2000001445	1116F8FA	13/02/2017	13/02/2017	30/09/2023	EUR	93.150.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 16	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	ADB	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	3440-INO	1RUX78CA	02/11/20116	09/12/2016	30/06/2023	USD	108.700.000	89.331.208.000	118.466.740.676		310.886.100	118.155.854.576			118.155.854.576			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
LK PLN 17	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	ADB-OCR	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	3529-INO	1Z83YQPA	31/07/2017	08/09/2017	30/06/2023	USD	500.000.000	68.551.323.480	371.721.724.395		102.068.961.796	269.652.762.599			269.652.762.599			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
LK PLN 18	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	ADB-AIF	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	8327-INO (AIF)	11DDKS1A	31/07/2017	08/09/2017	30/06/2023	USD	100.000.000	13.967.729.431	74.350.752.392		20.453.605.840	53.897.146.552			53.897.146.552			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
LK PLN 19	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	World Bank	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	8711-ID	1ZZ7LGXA	09/05/2017	04/08/2017	30/06/2023	USD	125.000.000	85.779.222.274	141.958.823.719		56.892.697.083	85.066.126.636			85.066.126.636			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
LK PLN 20	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	AIIB	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	LN000010-1-IDN	1XH37L2A	09/05/2017	04/08/2017	30/06/2023	USD	125.000.000	85.755.483.991	141.946.422.831		56.880.296.105	85.066.126.726			85.066.126.726			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 21	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	World Bank	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	8891-ID	1NF3PM6A	11/07/2018	23/08/2018	30/06/2024	USD	250.000.000	-	567.580.414		464.230.914	103.349.500			103.349.500			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
LK PLN 22	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	AIIB	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	0060A	1HS4NF9A	11/07/2018	23/08/2018	30/06/2024	USD	250.000.000	-	567.580.414		464.230.914	103.349.500			103.349.500			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 23	Engineering Services Project for Multipurpose Dams, Rivers, and Coastal	Korea	Engineering Services Project for Multipurpose Dams, Rivers, and Coastal	INA-22	1P2DDW5A	30/10/2018	15/02/2019	15/05/2022	USD	31.705.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 24	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	IP-551	21616401	31/03/2009	28/07/2009	28/12/2018	JPY	7.490.000.000	59.730.101.262	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 25	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I)	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I)	IP-552	21617101	31/03/2009	28/07/2009	28/07/2018	JPY	6.060.000.000	16.460.370.121	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
LK PLN 26	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP II)	World Bank	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP II)	8027-ID	10837101	06/10/2011	04/11/2011	31/05/2018	USD	150.000.000	54.750.491.308	-		-	-			-			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
LK PLN 27	Jakarta urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	World Bank	Jakarta urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	8121-ID	10845701	17/02/2012	08/08/2012	28/02/2019	USD	139.640.000	105.390.779.288	3.290.030.221		108.800.000	3.181.230.221			3.181.230.221			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
LK PLN 28	Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan - Kertosono Section) Phase I	China	Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan - Kertosono Section) Phase I	o. (2015) 39 TOTA	1MZJG1EA	29/12/2015	30/09/2016	30/09/2021	USD	198.772.235	1.277.232.416.424	373.765.739.395		-	373.765.739.395			373.765.739.395			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 29	Toll Road Development of Balikpapan - Samarinda	China	Toll Road Development of Balikpapan - Samarinda	o. (2015) 42 TOTA	1VMMBHYA	13/06/2016	30/09/2016	30/09/2021	USD	53.405.756	170.327.495.551	255.264.141.984		-	255.264.141.984			255.264.141.984			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 30	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan-Sumedang Phase II	China	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan-Sumedang Phase II	o. (2016) 01 TOTA	1RVNVDTA	13/06/2016	30/09/2016	30/09/2021	USD	219.398.580	864.521.696.290	590.996.919.878		-	590.996.919.878			590.996.919.878			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 31	Toll Road Development of Manado-Bitung	China	Toll Road Development of Manado-Bitung	o. (2016) 07 TOTA	1UGBAGFA	13/06/2016	30/09/2016	30/09/2021	USD	78.099.963	552.071.906.582	291.436.291.145		-	291.436.291.145			291.436.291.145			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 32	Patimban Port Development Project (I)	JICA	Patimban Port Development Project (I)	IP-577	1AVH2LAA	15/11/2017	13/03/2018	13/03/2026	JPY	11.535.000.000	147.365.517.243	492.188.392.203		-	492.188.392.203			492.188.392.203			Ditjen. Bina Marga	BPKP

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
LK PLN 33	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Ijara)	IDB	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Ijara)	IDN-1012/11	1SMHNPCA	16/05/2017	19/07/2019	20/01/2024	USD	15.000.000	-	24.208.607.689		170.965.500	24.037.642.189			24.037.642.189			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 34	Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	World Bank	Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	8043-ID	10842601	14/12/2011	12/03/2012	28/02/2021	USD	250.000.000	526.281.255.242	181.149.063.076		1.545.296.715	179.603.766.361			2.221.681.280.485	7.666.713.334		Ditjen. Bina Marga	BPK
LK PLN 35	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan-Sumedang Phase III	China	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan-Sumedang Phase III	o. (2018) 14 TOTA	1SFVCKOA	07/05/2018	18/10/2018	18/10/2023	USD	130.387.426	-	675.175.457.104		-	675.175.457.104			675.175.457.104			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 36	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Isthisnaa)	IDB	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Isthisnaa)	IDN-1012/50	1NO47EHA	16/05/2017	02/08/2019	03/02/2023	USD	235.000.000	-	120.185.559.124		-	120.185.559.124			120.185.559.124			Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 37	Toll Road Development of Medan - Kualanamu Project	China	Toll Road Development of Medan - Kualanamu Project	o. (2012) 44 TOTA	21663301	12/11/2012	11/03/2013	11/03/2018	USD	122.429.914	368.392.154.294	-		-	-						Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 38	Regional Road Development (RRDP)	ADB	Regional Road Development (RRDP)	2817-INO	10846401	07/05/2019	05/08/2012	30/11/2018	USD	180.000.000	365.140.103.365	-		-	-						Ditjen. Bina Marga	BPK
LK PLN 39	Regional Road Development (RRDP)	IDB	Regional Road Development (RRDP)	IND-161	10848801	17/04/2012	29/04/2013	10/06/2019	USD	65.000.000	154.347.186.228	22.400.000.228		-	22.400.000.228			153.827.566.773	312.116.809.496		Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 40	Padang Bypass Capacity Expansion Project	Korea	Padang Bypass Capacity Expansion Project	INA-17	21643301	03/01/2011	14/04/2011	14/08/2017	USD	58.000.000	2.086.075.454	-		-	-						Ditjen. Bina Marga	BPKP
LK PLN 41	Metropolitan Sanitation Management Investment Program Engineering Service for Sewerage System Development in DKI Jakarta	JICA	Metropolitan Sanitation Management Investment Program Engineering Service for Sewerage System Development in DKI Jakarta	IP-565	21683301	24/02/2014	23/06/2014	23/06/2021	JPY	1.968.000.000	54.811.395.418	53.335.575.254		-	53.335.575.254			53.335.575.254			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 42	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	Hongaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	HS00216000	15PR17RA	20/05/2016	01/08/2016	03/08/2020	USD	36.443.330	228.939.526.983	143.202.727.389		-	143.202.727.389			143.202.727.389			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 43	Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management	KfW Jerman	Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management	BMZ 201066471	21667101	02/05/2013	02/05/2013	31/12/2019	EUR	75.000.000	121.190.147.115	317.977.270.380		-	317.977.270.380			317.977.270.380			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 44	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	2654-INO	10811901	21/019/2010	22/11/2010	31/12/2020	USD	35.000.000	-	86.309.511.771		-	86.309.511.771			318.861.884.200			Ditjen. Cipta Karya	BPK

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
LK PLN 45	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - Ordinary Operations	ADB-OCR	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - Ordinary Operations	3123-INO	10883301	13/05/2014	09/07/2014	31/12/2020	USD	80.000.000	15.437.864.965	59.243.790.779		-	59.243.790.779			59.243.790.779			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 46	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - AIF	ADB-AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - AIF	8280-INO (AIF)	10884001	13/05/2015	09/07/2014	31/12/2020	USD	40.000.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 47	National SlumUpgrading Project (Service Ijara)	IDB	National Slum Upgrading Project (Service Ijara)	IND-174	1VFX57JA	19/05/2016	18/09/2016	04/05/2021	USD	8.000.000	9.828.555.605	13.254.610.227		13.254.610.227	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 48	National SlumUpgrading Project (Isthisna Financing)	IDB	National Slum Upgrading Project (Isthisna Financing)	IND-175	1ENYRFPA	19/05/2017	18/09/2016	09/05/2021	USD	311.760.000	874.672.705.842	1.047.528.876.499		1.045.115.152.099	2.413.724.400			2.413.724.400			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 49	National SlumUpgrading Project (ISFD Loan)	IDB	National Slum Upgrading Project (ISFD Loan)	IND-176	1NT81PXA	19/05/2018	18/09/2016	22/11/2021	USD	10.000.000	-	4.500.000.000		4.500.000.000	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 50	Community Based Sanitation Program (SANIMAS PROJECT)	IDB	Community Based Sanitation Program (SANIMAS PROJECT)	IND-167	10880201	19/02/2014	12/06/2015	12/06/2020	USD	100.000.000	179.138.390.249	337.325.870.657		337.325.870.657	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 51	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase - 2 (NUSP-2)	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase - 2 (NUSP-2)	3122-INO	10882601	23/04/2014	17/07/2014	31/12/2019	USD	74.400.000	203.982.090.188	35.831.060.143		13.306.415.143	22.524.645.000			318.676.827.600			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 52	Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Base Water Supply Project (PAMSIMAS III)	World Bank	Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Base Water Supply Project (PAMSIMAS III)	8578-ID	1NPB3NNA	30/06/2016	22/08/2016	31/12/2020	USD	300.000.000	911.009.288.532	992.201.438.339		992.201.438.339	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 53	National SlumUpgrading Program (NSUP)	World Bank	National Slum Upgrading Program (NSUP)	8636-ID	18K6ECNA	22/08/2016	11/10/2016	31/03/2022	USD	216.500.000	392.235.447.886	686.283.841.783		621.812.629.533	64.471.212.250			64.471.212.250			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 54	National SlumUpgrading Program (NSUP)	AIIB	National Slum Upgrading Program (NSUP)	LN00040-IND	1PTD0QAA	01/09/2016	31/10/2016	31/03/2022	USD	216.500.000	437.851.602.405	443.282.435.361		400.786.410.620	42.496.024.741			42.496.024.741			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 55	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	World Bank	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	8872-ID	1CPUK3GA	02/08/2018	08/08/2018	31/12/2022	USD	100.000.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 56	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)	JICA	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)	IP-564	21681901	24/02/2014	23/06/2014	28/02/2019	JPY	10.029.000.000	-	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPKP

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
LK PLN 57	Fourth National Program for Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM)	World Bank	Fourth National Program for Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM)	8213-ID	10861901	28/12/2012	01/03/2013	31/12/2018	USD	266.000.000	173.972.546.000	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 58	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	World Bank	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	8259-ID	10865701	11/06/2013	02/08/2013	30/11/2018	USD	99.900.000	263.169.488.790	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPK
LK PLN 59	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	sche Bank - Spa	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	LA 21.06.2016	1ZPKKNUA	21/06/2016	02/08/2016	31/08/2018	EUR	6.979.739	56.874.921.496	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 60	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	ICO - Spanyol	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	DNI-00805-023-T	1GNMNYFA	21/06/2016	02/08/2016	31/08/2018	EUR	6.979.739	45.344.434.060	-		-	-			-			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
LK PLN 61	National Affordable Housing Program	World Bank	National Affordable Housing Program	8717-ID	1HG72SWA	30/11/2017	24/01/2018	31/03/2021	USD	450.000.000	586.710.455.120	1.162.775.711.317		1.162.775.711.317	-			-			Ditjen. PIPUP	BPK
LK PLN 62	Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas/ Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	World Bank	Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas/ Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	8861-ID	1M1JWRAA	24/10/2018	28/11/2018	31/12/2023	USD	300.000.000	-	27.054.045.161		27.054.045.161	-			-		3.560.810.000	BPIW	BPK
LK PLN 63	Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Cooperation / Integrated Master Plan for Priority Tourism Destination Preparation Advance	World Bank	Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Cooperation / Integrated Master Plan for Priority Tourism Destination Preparation Advance	P4820	1NM60KDA	21/11/2017	21/11/2017	30/11/2018	USD	4.000.000											BPIW	BPK
Kementerian Pariwisata																						
LK PLN 1	Kementerian Pariwisata	Bank Dunia	Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	IBRD8861-ID	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2019	31 Desember 2019	Rp	25.785.000.000	-	3.811.072.400	-	3.811.072.400	-	-	-	-	-	-	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika																						
LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	NATIXIS	Proyek Pembangunan Sistem Informasi Meteorologi Maritim	-	164RS1QA	25 April 2018	13 Agustus 2018	31 Juli 2025	EUR	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BMKG	-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PER 31 DESEMBER 2019

	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	NATIXIS	Proyek Scalling Up Strengthening BMKG Service Capacity	-	1XCJ3SRA	-	25 Januari 2019	31 Agustus 2019	EUR	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BMKG	-
Badan Informasi Geospasial																						
LK PLN 1	Programto Accelerate Agrarian Reform(One Map Project)	World Bank	Programto Accelerate Agrarian Reform(One Map Project)	8897-ID	1BUY9N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	10.000.000	-	6.676.490.065	-	-	6.676.490.065	-	-	6.676.490.065	-	-	Kementerian ATR/BPN	BPK
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi																						
LK PLN 1	IDRD 8127	Bank Dunia	Village Innovation Project	IDRD 8127	10862601	22 Januari 2013	22 Maret 2013	31 Desember 2019	USD	650.000.000	6.005.467.596	5.323.243.322	-	5.323.243.322	-	-	-	-	-	-	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	BPK
LK PLN 2	-	Bank Dunia	National Program for Community Empowerment in Rural Areas 2012-2015 tanggal 25 April 2017 menjadi Village Innovation Project	IBRD 8217-ID	10862601	22 Januari 2013	22 Maret 2013	31 Desember 2019	USD	650.000.000	284.885.260.820	374.738.869.691	-	374.738.869.691	-	-	-	-	-	-	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	BPKP
LK PLN 3	IFAD Loan 755-ID	IFAD	ProgramPembangunan Desa Mandiri	755-ID	10780201	18 November 2008	17 Maret 2009	30 Juni 2019	SDR	42.033.300	105.104.484.874	7.485.281.376	-	7.485.281.376	-	-	-	-	-	-	-	-
LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	World Bank	PAMSIMAS	8578-ID	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2020	USD	300.000.000	8.801.444.883	4.924.123.018	-	4.924.123.018	-	-	-	-	-	-	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	BPKP
LK PLN 5	Pusat Data dan Informasi Balilatfo	World Bank	ProgramInovasi Desa (PID)	Loan IBRD-8127 ID	P128832	Februari 2019	April 2019	31 Desember 2019	Rp	17.512.921.000	-	15.658.248.802	-	15.658.248.802	-	-	-	-	-	-	PIU Pusdatin	BPKP
LK PLN 6	Loan	World Bank	National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM Rural 2012-2015) / Program Inovasi Desa, Administrative Service Firm(ASF) for Providing Support to National Facilitation Professional Staff for ProgramDevelopment, (PID 2015-2019)	Loan IBRD-8127 ID	P128832	22 Januari 2013	25 Maret 2013	31 Desember 2019	USD	650.000.000	82.285.434.873	72.174.240.611	-	72.174.240.611	-	-	-	-	-	-	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	BPKP
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia																						
LK PLN 1	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	World Bank	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)	8336-ID	10881901	19 Juni 2019 (Amendment to the Amended & Restated LA)	05 Juni 2014	31 Juni 2022	USD	47.380.000	22.200.000	27.958.147	-	32.408.658.878	53.173.107.157	-	1.012.253.950	53.173.107.157	-	-	**Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (P2O) LIPI**	BPK
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan																						
PLN 1	State Accountability Revitalization (STAR)	Asian Development Bank	State Accountability Revitalization (STAR)	2927-INO	10859501	26 Nopember 2012	19 Februari 2013	31-Mar-19	USD	57.750.000	Rp927.363.267.874	Rp35.387.903.885	-	28.551.069.062	6.836.834.823	-	-	6.657.004.823	179.830.000	-	**BPKP**	BPK

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2019

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan /GrantID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan/Grant Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
														Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
Kementerian Sekretariat Negara																							
1	LK HLN 1	*Investing in Nutrition and Early Years (INEY)*	Bank Dunia	Kegiatan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)	TF A7565	278EATNA	1 Agustus 2018	27 September 2018	31 Desember 2021	Rp	46.679.936.000	-	42.841.878.853	-	42.841.878.853	-	-	-	-	-	-	Kementerian Sekretariat Negara cq. Sekretariat Wakil Presiden	BPKP
Kementerian Dalam Negeri																							
2	LK HLN 1	AUSAID	Bank Dunia	Penyusunan Petunjuk Teknis Kerjasama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi	Grant TF-0A6336	2B7K43PA	20 November 2019	20 November 2019	10 Desember 2019	Rp	578.197.000	-	430.115.057	-	430.115.057	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	-
				Penyusunan Modul Pelatihan Kerja Sama Desa Untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi	Grant TF-0A6336	2B7K43PA	25 November 2019	25 November 2019	10 Desember 2019	Rp	673.803.000	-	611.377.248	-	611.377.248	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	-
				Konsultan Individu	Grant TF-0A6336	2B7K43PA	1 November 2019	1 November 2019	31 Desember 2019	Rp	321.000.000	-	158.400.000	-	158.400.000	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	-
3	LK HLN 2	*Investing in Nutrition and Early Years (INEY)*	Bank Dunia	*Investing in Nutrition and Early Years (INEY)*	TF A7565	278EATNA	1 Agustus 2018	15 November 2018	31 Desember 2021	Rp	54.000.000.000	-	4.147.494.987	-	4.147.494.987	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Sekretariat Wakil Presiden	BPKP
4	LK HLN 3	Second Additional Financing For Third Water Supply And Sanitation For Low Income Communities / Community Based Water Supply Project	Bank Dunia	PAMBIMAS I	Grant TF-0A6336	2B7K43PA	29 Januari 2019	29 Januari 2019	31 Desember 2020	Rp	5.500.000.000	-	4.571.023.713	-	4.571.023.713	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Sekretariat Wakil Presiden	BPKP
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
5	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	KFW	Forest & Climate Change (FORCLIME) FC Module	BMZ2007660 89	71227101	19 Oktober 2010	Mei 2011	30 Desember 2020	Rp	238.660.000.000	174.490.032.563	29.934.540.882	-	29.844.540.882	90.000.000	-	-	90.000.000	-	-	Setjen Kementerian LHK	BPK
6	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	World Bank	Forest Investment Program-Project 2 (FIP-2) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan	TF0A2105	22PS3R0A	-	29 Juni 2016	31 Desember 2021	Rp	228.430.100.000	6.222.992.005	11.344.229.641	-	8.933.984.991	2.410.244.650	-	812.072.760	2.360.194.650	50.050.000	-	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK	BPK
7	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	DANIDA	Forest Investment Program-Project 2 (FIP-2) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan	TF0A2105	22PS3R0A	-	29 Juni 2016	31 Desember 2021	Rp	228.430.100.000	-	2.092.454.383	-	2.092.454.383	-	-	-	-	-	-	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK	BPK
8	LK HLN 4	Hibah Luar Negeri	ADB	Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation	-	25AWBGKA	-	-	-	Rp	54.376.000.000	-	1.108.343.953	-	1.108.343.953	-	-	-	-	-	-	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL, Kementerian LHK	BPK
9	LK HLN 5	Hibah Luar Negeri	KFW	Forest Programme II	2011.66.255	267XEYY5	16 Juli 2014	28 Juni 2016	31 Desember 2022	Rp	345.000.000.000	70.769.664.724	147.908.244.481	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit. Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASHL, Kementerian LHK	-
10	LK HLN 6	Hibah Luar Negeri	KFW	Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser	-	2AHFU6NL	-	-	-	Rp	135.360.000.000	11.773.031.862	14.091.592.202	-	11.001.833.194	3.899.759.008	-	-	3.899.759.008	-	-	Direktorat Kawasan Konservasi, Kementerian LHK	-
11	LK HLN 7	Hibah Luar Negeri	KFW	Forest Programme III Sulawesi: Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape	Grant 2012 67 004	21LHDAJA	29 Desember 2015	28 November 2016	8 Januari 2024	Rp	203.431.500.000	17.987.382.419	10.790.052.967	-	10.790.053.967	-	-	-	-	-	-	Dit. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen KSDAE, Kementerian LHK	-
12	LK HLN 8	Hibah Luar Negeri	DANIDA & World Bank	Forest Investment Program-Project 2 (FIP-2) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan	TF0A2014 & TF0A285	22PS3R0A & 2SN87DLA	-	29 Juni 2016	31 Desember 2021	USD	22.420.000	28.364.291.805	29.737.966.747	-	29.737.966.747	-	-	-	-	-	-	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK	BPK
13	LK HLN 9	Hibah Luar Negeri	World Bank	Forest Investment Program-Project 2 (FIP-2) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan	TF0A2104	22PS3R0A	-	29 Juni 2016	31 Desember 2021	Rp	228.430.100.000	-	4.657.000.000	-	-	4.657.000.000	-	-	-	-	-	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK	BPK
14	LK HLN 10	Forest Programme 2	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	Biodiversity Conservation and Management	Project ID: 2011 66 255	267XEYY5	16 Juli 2014	Januari 2016	Desember 2022	€	23.000.000	6.535.503.089	13.224.741.357	-	12.771.441.357	453.300.000	-	-	453.300.000	-	-	Direktorat Konservasi Tanah, Kementerian LHK	BPKP
15	LK HLN 11	Forest Investment Programme 1 (FIP 1)	Asian Development Bank	Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation	Project ID: 0501-INO	25AWBGKA	26 Oktober 2016	6 Desember 2016	30 Juni 2022	USD	17.000.000	14.606.067.092	29.984.898.870	-	28.941.788.792	1.043.110.078	-	-	1.043.110.078	-	-	Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	BPKP
16	LK HLN 12	Forest Investment Programme 2 (FIP 2)	World Bank	Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development	Project ID: TFA02858	2SN87DLA	20 Juli 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2021	USD	5.070.000	4.692.139.800	17.441.113.189	-	17.441.113.189	-	-	-	-	-	-	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK	BPK

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2019

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan /GrantID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan/Grant Amount		Disbursement s.d 2018	Disbursement Tahun 2019	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
														Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
17	LK HLN 13	Forest Programme 3	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	Collaborative Integrated Management of The Lore Lidu Landscape	Project ID: 012 67 004	21LHDAJA	29 Desember 2015	18 April 2016	31 Desember 2023	Rp	13.500.000.000	1.452.691.000	4.897.088.700	-	4.897.088.700	-	-	-	-	-	-	Dit. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen KSDAE, Kementerian LHK	BPKP
18	LK HLN 14	Hibah Luar Negeri	World Bank	HCFC Ohase-out in the Polyurethane Foam Sector Project	TF014673	73921901	11 Juli 2013	15 Juli 2013	30 Juni 2023	Rp	97.570.900.000	56.542.990.000	30.620.730.000	-	30.620.730.000	-	-	-	-	-	-	Dit. Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI, Kementerian LHK	BPK
19	LK HLN 15	Hibah Luar Negeri	World Bank	Biocarbon Fund plus Initiative for Sustainable Forest Landscape	TF-0A7246 & TF-0A7244	2P9VGJLA	31 Oktober 2018	13 Februari 2019	31 Desember 2019	Rp	-	-	30.630.940.564	-	30.630.940.564	-	-	-	-	-	-	Dit. Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI, Kementerian LHK	BPK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																							
20	LK HLN 1	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	Australia (DFAT)	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	66387	74936401	28/02/2014	28/02/2014	31/12/2021	AUD	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Jenderal	BPK
21	LK HLN 2	TA for Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management Programme	KfW Jerman	TA for Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management Programme	202060796	73657101	02/05/2013	02/05/2013	31/12/2020	EUR	7.600.000	9.124.373.324	8.651.064.312	-	-	8.651.064.312	-	-	8.651.064.312	-	-	Ditjen. Cipta Karya	BPKP
22	LK HLN 3	Feasibility Studi for the Project Emission Reduction in Cities - Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	KfW Jerman	Feasibility Studi for the Project Emission Reduction in Cities - Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	FA07112016	2H1GNLLA	07/11/2016	07/11/2016	30/06/2019	EUR	2.550.000	15.210.896.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	BPKP
23	LK HLN 4	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	KfW Jerman	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	FA07112016	2VPZOG7A	07/11/2018	07/11/2018	28/02/2019	EUR	750.000	1.868.736.375	4.575.320.620	-	4.575.320.620	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	BPKP
24	LK HLN 5	Palembang City Sewerage Project PCSP	Australia (AusAID)	Palembang City Sewerage Project PCSP	73826	2K6Q8TSA	12/09/2017	12/09/2017	31/08/2022	AUD	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	
25	LK HLN 6	Sanitation Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIIG)	Australia (AusAID)	Sanitation Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIIG)	FA07112016	2H1GNLLA	01/07/2012	01/07/2012	30/06/2020	AUD	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	
26	LK HLN 7	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase II	Australia (AusAID)	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase II	62031	72599501	01/07/2012	01/07/2012	30/06/2020	AUD	93.645.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	
27	LK HLN 8	DFAT Support Trust Fund for PAMSIMAS III	IBRD	DFAT Support Trust Fund for PAMSIMAS III	TF-0A6338	2B7K43PA	29/01/2012	29/01/2012	31/12/2020	USD	5.900.000	-	40.812.818.500	-	40.812.818.500	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	
28	LK HLN 5	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK/CSRRP	World Bank	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK/CSRRP	TF 0A2519	23AEKS4A	20/05/2016	20/05/2016	31/03/2018	USD	1.619.522	7.758.707.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditjen. Cipta Karya	BPK
29	LK HLN 9	Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplan (IMP) for Priority Tourism Destination	World Bank	Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplan (IMP) for Priority Tourism Destination	TF-A4649	2XNH4UXA	21/11/2017	21/11/2017	30/04/2019	USD	2.100.000	7.867.080.613	5.928.935.000	-	5.928.935.000	-	-	-	-	-	-	BPIW	BPK
Kementerian Pariwisata																							
30	LK HLN 1	Preparation of National Human Resource	World Bank	Integrated Tourism Development Program	TF0A4649	-	-	22 Juli 2019	18 Desember 2019	Rp	1.500.000.000	-	1.452.473.000	-	1.452.473.000	-	-	-	-	-	-	Asisten Deputi Manajemen Strategis	
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi																							
31	LK HLN 1	IFAD Grant GC-1053-ID	IFAD	Program Pembangunan Desa Mandiri	GC-1053-ID	70833301	18 November 2008	17 Maret 2009	30 Juni 2019	SDR	246.800	1.522.034.976	1.468.429.000	-	1.468.429.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi Anggaran Mandatory Spending APBN TA 2019

1. Fungsi Pendidikan

Uraian	Realisasi
APBN	**492.455.088.152.000**
Kementerian Dalam Negeri	594.635.386.524
Kementerian Pertahanan	182.084.256.898
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri	46.104.255.965
Kementerian Keuangan	2.180.278.093.628
Kementerian Pertanian	636.869.254.594
Kementerian Perindustrian	2.150.004.181.726
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	130.128.336.873
Kementerian Perhubungan	3.709.814.424.483
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	36.494.690.457.316
Kementerian Kesehatan	1.839.295.505.098
Kementerian Agama	52.727.580.558.644
Kementerian Ketenagakerjaan	2.640.898.535.530
Kementerian Sosial	130.357.858.912
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	255.984.594.978
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	448.786.412.486
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3.629.399.044.085
Kementerian Pariwisata	795.375.266.503
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	44.541.654.246.320
Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	113.716.050.407
Badan Pusat Statistik	40.884.644.765
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	522.737.712.723
Kementerian Komunikasi Dan Informatika	111.504.556.788
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	246.490.641.102
Badan Tenaga Nuklir Nasional	35.644.963.288
Lembaga Administrasi Negara	25.246.776.083
Kementerian Perdagangan	930.043.902.852
Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	**155.160.209.918.571**
Dana Transfer Umum	168.861.700.000.000
DAK Pendidikan	15.677.003.310.302
DAK Fisik Bidang GOR	583.513.385.444
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	52.001.837.749.380
Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	463.968.756.915
Bantuan Operasional Sekolah	49.200.273.626.885
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	3.825.313.850.204
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan	199.819.750.000
Bantuan Operasional Kesetaraan	1.262.258.736.500
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	127.476.500.000
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.977.231.267.885
Dana Otonomi Khusus	5.014.482.992.000
Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah	**299.194.879.925.515**
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000
Dana Abadi Penelitian	990.000.000.000
Jumlah Realisasi Pembiayaan	**5.990.000.000.000**
Total Realisasi Anggaran Pendidikan	**460.345.089.844.086**
% Realisasi Anggaran Pendidikan	**93,48%**

Realisasi Anggaran Mandatory Spending APBN TA 2019

2. Fungsi Kesehatan

Uraian	Realisasi
APBN	**123.113.800.000.000**
Kementerian Kesehatan	65.440.030.574.402
BPOM	2.028.648.053.570
BKKBN	3.538.241.106.438
Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	**71.006.919.734.410**
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	2.898.659.688.180
DAK Penugasan Bidang Kesehatan	4.891.757.561.592
DAK Reguler Bidang Kesehatan	10.181.972.141.248
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.923.557.400.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.129.087.154.156
Dana Otonomi Khusus	1.253.600.000.000
Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah	**31.278.633.945.176**
Jumlah Realisasi Pembiayaan	-
Total Realisasi Anggaran Pendidikan	**102.285.553.679.586**
% Realisasi Anggaran Pendidikan	**83,08%**

Republik Indonesia

Lampiran 3

Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH	Total Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	540.519.206.125	716.076.427.833	25.918.965.198	1.282.514.599.156	15.438.158.834.000	5.892.008.259.188	13.439.450.754.729	36.052.132.447.073
2	Provinsi Sumatera Utara	1.231.416.723.034	304.545.637.717	18.423.800.503	1.554.386.161.254	25.202.162.576.000	10.903.842.321.245	4.541.003.634.224	42.201.394.692.723
3	Provinsi Sumatera Barat	310.593.500.020	88.493.452.069	12.612.545.756	411.699.497.845	14.017.980.238.000	5.604.018.822.844	1.517.326.464.795	21.551.025.023.484
4	Provinsi Riau	3.795.272.665.955	5.511.230.035.858	-	9.306.502.701.813	9.012.592.047.000	4.979.629.468.577	1.683.524.940.384	24.982.249.157.774
5	Provinsi Kepulauan Riau	361.722.312.331	2.098.513.118.864	5.807.579.916	2.466.043.011.111	4.564.301.576.000	1.795.434.556.375	412.607.889.680	9.238.387.033.166
6	Provinsi Jambi	695.711.361.693	1.530.889.383.221	8.756.956.703	2.235.357.701.617	8.301.731.805.000	3.100.335.683.934	1.441.788.440.501	15.079.213.631.052
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.535.370.909.761	6.539.449.745.558	3.945.292.662	10.078.765.947.981	13.002.459.915.000	6.142.005.268.380	3.027.123.324.612	32.250.354.455.973
8	Provinsi Bangka Belitung	189.521.664.895	933.069.557.325	-	1.122.591.222.220	4.473.107.208.000	1.406.260.465.302	400.064.884.600	7.402.023.780.122
9	Provinsi Bengkulu	139.080.977.344	306.132.771.926	-	445.213.749.270	6.675.722.843.000	2.515.083.151.751	1.129.024.787.803	10.765.044.531.824
10	Provinsi Lampung	343.257.292.030	169.889.490.879	11.351.961.746	524.498.744.655	13.433.096.470.000	5.729.286.546.559	2.657.825.556.488	22.344.707.317.702
11	Provinsi DKI Jakarta	11.907.698.874.389	113.233.107.126	-	12.020.931.981.515	480.616.495.000	2.869.479.741.412	42.579.794.000	15.413.608.011.927
12	Provinsi Jawa Barat	3.089.024.297.568	1.522.958.621.979	358.850.710.924	4.970.833.630.471	36.383.482.298.000	21.207.220.172.867	6.451.547.961.870	69.013.084.063.208
13	Provinsi Banten	1.388.479.825.359	21.834.492.088	-	1.410.314.317.447	8.868.136.573.000	4.941.635.252.959	1.287.958.022.428	16.508.044.165.834
14	Provinsi Jawa Tengah	1.246.560.761.970	114.345.268.009	714.027.145.065	2.074.933.175.044	38.959.065.522.000	17.857.717.138.799	9.248.092.156.997	68.139.807.992.840
15	Provinsi DI Yogyakarta	154.741.151.601	7.268.666.473	17.387.648.052	179.397.466.126	5.815.250.107.000	2.409.945.767.463	2.000.342.491.000	10.404.935.831.589
16	Provinsi Jawa Timur	2.125.256.929.045	6.021.185.351.648	1.604.039.346.062	9.750.481.626.755	41.701.548.941.000	19.252.645.187.891	8.805.227.733.556	79.509.903.489.202
17	Provinsi Kalimantan Barat	451.643.992.416	244.352.080.133	3.043.401.250	699.039.473.799	12.146.736.882.000	5.412.590.992.295	2.108.697.456.800	20.367.064.804.894
18	Provinsi Kalimantan Tengah	566.252.553.869	1.654.899.560.085	5.988.615.363	2.227.140.729.317	10.495.648.974.000	3.360.790.084.291	1.582.579.847.794	17.666.159.635.402
19	Provinsi Kalimantan Selatan	564.063.350.143	5.819.057.456.470	-	6.383.120.806.613	8.430.644.328.000	3.715.078.206.106	1.770.463.998.360	20.299.307.339.079
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.375.377.205.899	14.989.955.932.130	-	17.365.333.138.029	5.517.695.139.000	2.983.304.083.116	1.073.430.550.536	26.939.762.910.681
21	Provinsi Kalimantan Utara	428.744.449.073	1.085.208.627.511	-	1.513.953.076.584	3.872.328.173.000	1.071.333.179.097	462.778.064.000	6.920.392.492.681
22	Provinsi Sulawesi Utara	235.237.417.266	232.188.789.164	-	467.426.206.430	8.979.968.573.000	3.231.248.724.974	1.469.544.685.995	14.148.188.190.399
23	Provinsi Gorontalo	60.636.880.022	9.283.277.547	7.141.445.500	77.061.603.069	4.207.582.328.000	1.605.353.364.306	844.996.132.000	6.734.993.427.375
24	Provinsi Sulawesi Tengah	238.772.392.115	514.499.727.961	7.402.166.763	760.674.286.839	9.978.426.320.000	4.359.560.503.499	1.754.665.187.312	16.853.326.297.650
25	Provinsi Sulawesi Selatan	447.610.311.507	331.824.715.278	18.222.452.976	797.657.479.761	19.480.352.717.000	8.597.804.813.793	2.723.197.147.200	31.599.012.157.754
26	Provinsi Sulawesi Barat	68.293.219.678	5.006.019.623	-	73.299.239.301	4.431.517.273.000	1.940.276.873.245	692.304.056.000	7.137.397.441.546
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	173.770.881.767	677.298.688.901	-	851.069.570.668	10.316.695.106.000	4.242.808.503.196	1.864.519.849.559	17.275.093.029.423
28	Provinsi Bali	350.072.919.021	6.204.064.239	12.460.848.475	368.737.831.735	7.534.276.932.000	2.666.580.802.851	1.041.676.880.000	11.611.272.446.586
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	140.827.263.218	326.235.611.051	295.672.145.167	762.735.019.436	8.921.451.403.000	4.929.219.058.498	1.385.393.910.399	15.998.799.391.333
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	191.123.045.415	26.406.748.758	5.299.897.577	222.829.691.750	14.077.197.803.000	6.748.846.674.975	3.033.976.218.495	24.082.850.388.220
31	Provinsi Maluku	145.111.405.862	89.506.554.391	-	234.617.960.253	8.217.236.805.000	3.096.366.451.296	1.200.783.766.991	12.749.004.983.540
32	Provinsi Maluku Utara	109.697.792.887	416.562.066.514	-	526.259.859.401	6.572.026.830.000	2.657.692.213.931	1.030.989.691.657	10.786.968.594.989
33	Provinsi Papua	842.026.139.484	2.442.892.468.446	-	3.284.918.607.930	23.090.382.368.000	6.663.920.971.385	13.697.465.277.034	46.736.687.224.349
34	Provinsi Papua Barat	715.261.469.229	6.814.370.829.995	-	7.529.632.299.224	8.310.657.154.000	2.505.349.589.795	5.865.587.718.200	24.211.226.761.219
35	Sisa Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**39.158.751.141.991**	**61.684.868.346.770**	**3.136.352.925.658**	**103.979.972.414.419**	**420.910.238.556.000**	**186.394.672.896.195**	**101.688.539.275.999**	**812.973.423.142.613**

Catatan: Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas adalah Total dari Realisasi Pemerintah Provinsi ditambah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	145.057.765.619	55.145.292.593	62.689.946.071	117.835.238.664
2	Kab. Aceh Barat	17.907.120.743	3.814.502.684	7.692.630.353	11.507.133.037
3	Kab. Aceh Besar	13.643.054.465	4.581.636.070	6.921.559.723	11.503.195.793
4	Kab. Aceh Selatan	10.290.914.723	3.516.133.488	5.318.534.856	8.834.668.344
5	Kab. Aceh Singkil	15.526.535.550	2.019.602.206	10.778.386.637	12.797.988.843
6	Kab. Aceh Tengah	10.799.379.249	2.851.215.694	5.733.430.891	8.584.646.585
7	Kab. Aceh Tenggara	8.368.169.487	1.989.420.240	5.169.641.321	7.159.061.561
8	Kab. Aceh Timur	37.387.841.616	3.742.588.626	25.977.268.129	29.719.856.755
9	Kab. Aceh Utara	91.447.515.851	3.290.326.643	67.458.968.828	70.749.295.471
10	Kab. Bireuen	12.560.171.326	3.524.117.400	6.821.556.096	10.345.673.496
11	Kab. Pidie	12.372.840.970	3.862.285.707	5.420.593.620	9.282.879.327
12	Kab. Simeulue	7.978.859.458	1.771.904.205	4.999.397.342	6.771.301.547
13	Kota Banda Aceh	35.680.040.580	27.062.009.760	4.591.098.330	31.653.108.090
14	Kota Sabang	7.808.256.249	1.925.129.400	4.665.803.250	6.590.932.650
15	Kota Langsa	12.248.523.898	5.127.218.818	5.680.928.290	10.808.147.108
16	Kota Lhokseumawe	58.195.255.902	4.906.090.305	33.949.591.888	38.855.682.193
17	Kab. Nagan Raya	14.643.819.457	2.803.029.782	9.551.413.156	12.354.442.938
18	Kab. Aceh Jaya	9.780.784.063	1.701.005.573	6.281.243.142	7.982.248.715
19	Kab. Pidie Jaya	7.811.879.115	1.752.907.333	4.771.382.529	6.524.289.862
20	Kab. Aceh Barat Daya	8.815.730.976	1.963.900.423	5.627.536.664	7.591.437.087
21	Kab. Gayo Lues	8.522.772.522	1.584.143.463	5.602.127.210	7.186.270.673
22	Kab. Aceh Tamiang	99.749.677.750	3.436.088.116	87.631.244.591	91.067.332.707
23	Kab. Bener Meriah	8.064.282.408	2.018.099.691	4.839.930.944	6.858.030.635
24	Kota Subulussalam	9.794.859.922	1.905.023.376	6.051.320.668	7.956.344.044
25	Provinsi Sumatera Utara	400.411.323.365	201.341.476.998	115.464.306.029	316.805.783.027
26	Kab. Asahan	65.694.614.238	8.500.956.000	41.251.312.950	49.752.268.950

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
27	Kab. Dairi	13.220.562.472	3.660.547.322	6.607.815.463	10.268.362.785
28	Kab. Deli Serdang	70.312.038.629	20.797.772.624	30.925.368.794	51.723.141.418
29	Kab. Karo	13.351.570.739	4.426.977.600	5.792.107.884	10.219.085.484
30	Kab. Labuhan Batu	47.108.021.919	8.487.374.445	29.652.844.086	38.140.218.531
31	Kab. Langkat	174.581.265.370	6.763.370.366	138.709.225.030	145.472.595.396
32	Kab. Mandailing Natal	24.801.498.986	5.533.395.265	13.770.524.261	19.303.919.526
33	Kab. Nias	8.862.463.395	2.877.339.000	4.374.789.989	7.252.128.989
34	Kab. Simalungun	51.756.898.650	6.796.225.800	35.288.190.755	42.084.416.555
35	Kab. Tapanuli Selatan	50.990.147.586	6.136.465.800	36.795.552.488	42.932.018.288
36	Kab. Tapanuli Tengah	15.455.728.033	3.612.961.200	8.510.968.868	12.123.930.068
37	Kab. Tapanuli Utara	27.602.133.665	6.488.800.478	12.033.587.046	18.522.387.524
38	Kab. Toba Samosir	13.123.923.256	5.785.385.149	4.942.245.759	10.727.630.908
39	Kota Binjai	17.380.685.262	5.890.269.069	7.671.019.330	13.561.288.399
40	Kota Medan	180.053.323.789	136.522.676.307	9.400.462.530	145.923.138.837
41	Kota Pematang Siantar	16.132.812.311	8.305.320.000	4.427.129.659	12.732.449.659
42	Kota Sibolga	11.420.767.535	4.784.807.868	4.471.325.811	9.256.133.679
43	Kota Tanjung Balai	20.841.107.826	4.257.360.930	10.936.074.790	15.193.435.720
44	Kab. Batu Bara	27.037.712.940	9.392.866.356	13.640.733.913	23.033.600.269
45	Kab. Labuhan Batu Utara	41.333.591.402	4.062.173.656	29.232.225.829	33.294.399.485
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	65.431.637.091	5.226.819.000	48.485.979.394	53.712.798.394
47	Kab. Padang Lawas Utara	32.914.839.304	3.645.827.611	13.804.408.869	17.450.236.480
48	Kab. Padang Lawas	31.965.065.254	3.817.483.200	13.935.011.803	17.752.495.003
49	Kab. Nias Utara	9.879.446.751	3.065.393.066	4.691.437.119	7.756.830.185
50	Kab. Nias Barat	9.041.067.556	2.940.594.600	4.341.302.314	7.281.896.914
51	Kota Tebing Tinggi	11.262.153.815	4.675.266.600	4.446.123.565	9.121.390.165
52	Kota Padang Sidempuan	13.451.651.908	5.423.529.462	5.132.670.341	10.556.199.803

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
53	Kab. Pakpak Bharat	10.280.496.984	3.026.830.800	5.151.654.514	8.178.485.314
54	Kab. Nias Selatan	12.353.351.045	3.200.585.400	6.328.170.734	9.528.756.134
55	Kab. Humbang Hasundutan	10.499.347.214	3.349.725.600	5.212.184.938	8.561.910.538
56	Kab. Serdang Bedagai	44.274.489.073	6.128.099.400	29.147.026.253	35.275.125.653
57	Kab. Samosir	10.661.619.968	3.202.795.800	5.002.196.936	8.204.992.736
58	Kota Gunungsitoli	12.799.353.012	5.421.742.331	4.291.529.887	9.713.272.218
59	Provinsi Sumatera Barat	101.324.936.811	56.869.429.786	19.042.411.173	75.911.840.959
60	Kab. Lima Puluh Kota	11.542.473.455	2.530.694.198	5.982.316.135	8.513.010.333
61	Kab. Agam	15.524.384.297	3.357.726.479	8.011.256.886	11.368.983.365
62	Kab. Kepulauan Mentawai	12.354.808.944	2.527.758.833	8.050.991.066	10.578.749.899
63	Kab. Padang Pariaman	8.486.247.932	2.319.631.800	5.005.900.377	7.325.532.177
64	Kab. Pasaman	9.706.164.684	2.333.575.200	5.146.898.308	7.480.473.508
65	Kab. Pesisir Selatan	19.737.101.445	4.654.224.490	11.337.660.774	15.991.885.264
66	Kab. Sijunjung	11.450.954.351	2.484.501.437	6.519.903.644	9.004.405.081
67	Kab. Solok	10.130.284.476	2.862.373.978	5.352.049.560	8.214.423.538
68	Kab. Tanah Datar	10.909.175.369	2.882.917.354	4.868.068.325	7.750.985.679
69	Kota Bukit Tinggi	11.404.153.022	3.915.612.275	4.105.358.966	8.020.971.241
70	Kota Padang Panjang	8.189.070.402	2.073.576.254	4.250.702.132	6.324.278.386
71	Kota Padang	63.712.333.009	38.508.115.076	7.954.990.308	46.463.105.384
72	Kota Payakumbuh	8.840.584.169	3.170.874.215	4.179.673.160	7.350.547.375
73	Kota Sawahlunto	9.076.638.952	2.433.771.600	4.876.533.769	7.310.305.369
74	Kota Solok	10.116.462.762	3.530.267.305	4.329.314.029	7.859.581.334
75	Kota Pariaman	9.560.996.990	3.353.065.875	4.585.859.992	7.938.925.867
76	Kab. Pasaman Barat	27.216.871.414	2.813.085.984	19.414.290.934	22.227.376.918
77	Kab. Dharmasraya	20.950.965.399	3.093.468.410	15.580.749.365	18.674.217.775
78	Kab. Solok Selatan	23.671.410.264	2.609.877.000	13.674.023.568	16.283.900.568

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
79	Provinsi Riau	987.226.845.374	122.347.227.621	686.508.494.261	808.855.721.882
80	Kab. Bengkalis	1.806.334.385.795	24.297.369.146	1.499.888.567.854	1.524.185.937.000
81	Kab. Indragiri Hilir	59.302.656.689	8.952.232.592	35.968.813.392	44.921.045.984
82	Kab. Indragiri Hulu	95.668.276.879	7.812.451.108	72.736.129.827	80.548.580.935
83	Kab. Kampar	290.078.698.761	7.503.088.827	218.422.223.706	225.925.312.533
84	Kab. Kuantan Singingi	37.219.842.729	7.367.131.325	20.633.320.535	28.000.451.860
85	Kab. Pelalawan	143.240.918.329	17.817.050.939	97.040.153.561	114.857.204.500
86	Kab. Rokan Hilir	336.391.987.222	8.779.231.961	238.301.643.682	247.080.875.643
87	Kab. Rokan Hulu	77.983.205.483	6.745.932.952	57.229.212.906	63.975.145.858
88	Kab. Siak	565.481.211.043	15.930.113.043	451.420.342.766	467.350.455.809
89	Kota Dumai	64.664.889.724	29.211.069.297	28.454.334.300	57.665.403.597
90	Kota Pekanbaru	94.859.963.350	55.495.921.200	20.548.632.424	76.044.553.624
91	Kab. Kepulauan Meranti	67.221.970.469	6.218.114.809	49.643.861.921	55.861.976.730
92	Provinsi Kepulauan Riau	144.771.251.947	69.501.946.200	32.202.657.387	101.704.603.587
93	Kab. Bintan	21.158.055.687	8.248.214.384	8.595.359.805	16.843.574.189
94	Kab. Natuna	115.030.721.873	5.937.698.165	63.317.434.000	69.255.132.165
95	Kab. Karimun	49.740.604.248	10.363.833.159	25.767.102.762	36.130.935.921
96	Kota Batam	84.100.374.749	53.994.511.200	8.890.346.504	62.884.857.704
97	Kab. Kepulauan Anambas	70.510.851.094	9.576.589.446	35.101.472.286	44.678.061.732
98	Kota Tanjung Pinang	23.746.163.587	11.337.994.557	6.052.855.192	17.390.849.749
99	Kab. Lingga	16.350.487.529	5.587.744.769	7.246.552.515	12.834.297.284
100	Provinsi Jambi	187.996.107.895	36.690.381.000	113.537.413.797	150.227.794.797
101	Kab. Batanghari	95.586.517.489	2.989.464.000	79.006.913.116	81.996.377.116
102	Kab. Bungo	30.939.036.834	4.692.106.833	18.547.551.338	23.239.658.171
103	Kab. Kerinci	10.039.340.931	1.787.895.928	6.619.018.168	8.406.914.096
104	Kab. Merangin	15.793.541.747	3.372.920.201	9.955.700.076	13.328.620.277

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
105	Kab. Muaro Jambi	100.879.794.984	3.782.209.908	80.993.492.997	84.775.702.905
106	Kab. Sarolangun	61.369.285.539	2.601.397.687	46.621.968.272	49.223.365.959
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	171.317.929.462	4.182.852.160	113.418.793.161	117.601.645.321
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	79.264.647.904	3.798.971.956	59.444.012.365	63.242.984.321
109	Kab. Tebo	37.895.910.116	2.853.375.600	28.761.427.865	31.614.803.465
110	Kota Jambi	73.638.651.036	25.218.800.763	39.147.769.093	64.366.569.856
111	Kota Sungai Penuh	9.451.532.529	3.343.985.596	4.342.939.813	7.686.925.409
112	Provinsi Sumatera Selatan	908.312.065.583	146.094.423.835	617.121.059.875	763.215.483.710
113	Kab. Lahat	152.615.164.258	6.701.213.400	82.392.813.510	89.094.026.910
114	Kab. Musi Banyuasin	937.258.382.782	12.085.960.800	706.396.060.320	718.482.021.120
115	Kab. Musi Rawas	270.810.995.973	4.798.081.106	210.770.741.890	215.568.822.996
116	Kab Musi Rawas Utara	37.706.841.328	5.284.744.053	25.449.415.027	30.734.159.080
117	Kab. Muara Enim	622.295.807.754	30.622.240.072	494.940.436.220	525.562.676.292
118	Kab. Ogan Komering Ilir	68.357.855.100	8.534.035.850	47.982.826.226	56.516.862.076
119	Kab. Ogan Komering Ulu	85.789.328.806	5.834.246.400	64.712.872.085	70.547.118.485
120	Kota Palembang	113.213.699.355	90.654.975.895	6.964.885.680	97.619.861.575
121	Kota Pagar Alam	13.115.054.578	4.712.743.427	5.822.471.173	10.535.214.600
122	Kota Lubuk linggau	13.976.000.234	6.084.516.600	4.992.134.549	11.076.651.149
123	Kota Prabumulih	134.652.230.911	11.626.324.839	104.803.014.804	116.429.339.643
124	Kab. Empat Lawang	14.087.058.264	4.587.932.599	6.848.192.589	11.436.125.188
125	Kab. Banyuasin	85.184.340.541	9.505.193.722	60.152.527.188	69.657.720.910
126	Kab. Ogan Ilir	77.486.411.148	4.775.160.000	61.417.242.564	66.192.402.564
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	27.442.591.761	4.833.860.113	18.524.165.518	23.358.025.631
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	15.393.062.775	4.663.244.070	7.766.889.981	12.430.134.051
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	701.298.819.006	6.344.187.707	640.570.076.074	646.914.263.781
130	Provinsi Bangka Belitung	52.751.309.824	21.869.635.557	21.498.388.918	43.368.024.475

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
131	Kab. Bangka	68.191.222.508	4.978.182.585	18.724.214.511	23.702.397.096
132	Kab. Belitung	27.929.114.602	3.409.882.200	20.617.356.094	24.027.238.294
133	Kota Pangkal Pinang	20.199.611.479	11.602.565.126	5.159.144.526	16.761.709.652
134	Kab. Bangka Selatan	20.696.692.118	2.629.119.257	13.831.365.185	16.460.484.442
135	Kab. Bangka Tengah	22.328.602.120	4.040.710.222	15.468.283.481	19.508.993.703
136	Kab. Bangka Barat	31.147.214.057	4.264.099.998	23.085.842.529	27.349.942.527
137	Kab. Belitung Timur	23.849.384.872	2.597.830.520	15.745.044.186	18.342.874.706
138	Provinsi Bengkulu	39.325.951.812	17.551.329.489	11.873.621.936	29.424.951.425
139	Kab. Bengkulu Selatan	8.643.269.996	1.653.278.168	4.807.486.037	6.460.764.205
140	Kab. Bengkulu Utara	27.250.853.235	2.372.012.665	21.790.655.807	24.162.668.472
141	Kab. Rejang Lebong	9.216.965.756	2.434.037.423	5.024.725.373	7.458.762.796
142	Kota Bengkulu	24.623.010.336	10.274.740.651	4.804.054.046	15.078.794.697
143	Kab. Kaur	8.331.266.358	1.234.265.735	5.730.100.268	6.964.366.003
144	Kab. Seluma	10.667.969.088	1.492.868.093	6.671.396.239	8.164.264.332
145	Kab. Mukomuko	19.749.522.261	2.100.123.100	12.726.242.735	14.826.365.835
146	Kab. Lebong	10.905.328.236	1.463.537.224	6.915.893.122	8.379.430.346
147	Kab. Bengkulu Tengah	13.828.643.908	1.702.528.185	9.917.914.325	11.620.442.510
148	Kab. Kepahiang	8.280.529.866	1.599.603.739	4.940.562.984	6.540.166.723
149	Provinsi Lampung	108.518.024.269	54.544.731.600	29.446.567.341	83.991.298.941
150	Kab. Lampung Barat	9.822.934.599	2.701.856.522	4.981.071.101	7.682.927.623
151	Kab. Lampung Selatan	24.568.988.551	5.990.438.401	15.133.188.714	21.123.627.115
152	Kab. Lampung Tengah	40.167.910.698	7.806.145.064	26.723.205.711	34.529.350.775
153	Kab. Lampung Utara	16.966.905.588	4.223.233.842	9.523.141.931	13.746.375.773
154	Kab. Lampung Timur	32.594.659.144	4.311.217.200	15.512.512.862	19.823.730.062
155	Kab. Tanggamus	43.786.664.107	4.149.834.830	27.446.354.628	31.596.189.458
156	Kab. Tulang Bawang	21.453.463.730	4.110.412.135	13.816.062.119	17.926.474.254

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
157	Kab. Way Kanan	16.073.104.935	2.947.465.641	11.202.380.044	14.149.845.685
158	Kab. Pesawaran	13.076.324.588	2.846.422.603	6.343.505.434	9.189.928.037
159	Kab. Pesisir Barat	9.686.184.685	2.272.900.574	5.306.935.745	7.579.836.319
160	Kab. Pringsewu	11.096.106.798	3.106.158.052	4.744.282.086	7.850.440.138
161	Kab. Mesuji	19.493.538.788	2.426.994.244	13.224.727.186	15.651.721.430
162	Kab. Tulang Bawang Barat	12.691.199.205	2.528.286.660	7.614.238.109	10.142.524.769
163	Kota Bandar Lampung	47.718.075.594	32.376.205.283	5.960.329.994	38.336.535.277
164	Kota Metro	12.592.623.732	5.208.870.243	4.727.616.131	9.936.486.374
165	Provinsi DKI Jakarta	13.990.775.231.761	11.849.398.889.410	58.299.984.979	11.907.698.874.389
166	Provinsi Jawa Barat	1.301.472.356.996	900.205.628.736	141.939.544.780	1.042.145.173.516
167	Kab. Bandung	167.677.374.001	38.632.709.370	102.638.602.347	141.271.311.717
168	Kab. Bekasi	357.562.328.108	245.621.369.288	49.389.349.730	295.010.719.018
169	Kab. Bogor	185.571.841.501	90.154.967.873	60.636.204.555	150.791.172.428
170	Kab. Ciamis	38.392.400.877	17.854.759.180	8.108.560.089	25.963.319.269
171	Kab. Cianjur	54.347.082.323	24.986.118.206	16.445.661.928	41.431.780.134
172	Kab. Cirebon	60.007.997.212	28.520.689.598	17.981.409.467	46.502.099.065
173	Kab. Garut	93.787.521.176	20.658.631.695	54.641.040.346	75.299.672.041
174	Kab. Indramayu	172.507.698.801	39.164.061.902	107.455.956.827	146.620.018.729
175	Kab. Karawang	212.033.396.555	134.267.269.862	38.947.526.934	173.214.796.796
176	Kab. Kuningan	34.466.409.035	17.721.574.674	7.384.116.257	25.105.690.931
177	Kab. Majalengka	46.096.074.285	19.561.243.676	16.661.285.564	36.222.529.240
178	Kab. Pangandaran	29.552.877.825	16.632.992.103	6.783.574.950	23.416.567.053
179	Kab. Purwakarta	69.930.338.952	47.688.398.283	8.791.834.153	56.480.232.436
180	Kab. Subang	123.928.956.371	26.549.476.924	58.505.216.116	85.054.693.040
181	Kab. Sukabumi	91.564.083.889	25.169.821.924	47.953.036.852	73.122.858.776
182	Kab. Sumedang	40.303.995.237	20.135.684.735	7.203.462.187	27.339.146.922

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
183	Kab. Tasikmalaya	37.548.420.139	18.205.491.302	10.492.398.409	28.697.889.711
184	Kab. Bandung Barat	51.783.328.411	30.330.337.064	10.472.775.649	40.803.112.713
185	Kota Bandung	274.990.124.798	216.878.156.279	8.118.290.063	224.996.446.342
186	Kota Bekasi	105.069.948.033	77.069.891.266	9.010.454.285	86.080.345.551
187	Kota Bogor	66.142.728.255	43.260.104.936	5.658.009.934	48.918.114.870
188	Kota Cirebon	37.641.426.746	24.094.884.848	5.896.304.739	29.991.189.587
189	Kota Depok	72.622.437.037	52.294.893.729	7.039.235.886	59.334.129.615
190	Kota Sukabumi	31.677.809.146	20.702.224.584	4.450.619.322	25.152.843.906
191	Kota Cimahi	41.590.283.399	26.971.390.177	4.789.406.993	31.760.797.170
192	Kota Tasikmalaya	37.200.404.925	20.192.599.806	5.187.236.336	25.379.836.142
193	Kota Banjar	28.642.352.735	17.668.998.690	5.248.812.160	22.917.810.850
194	Provinsi Banten	648.567.186.841	524.967.181.203	8.917.898.036	533.885.079.239
195	Kab. Lebak	63.357.311.997	37.838.523.700	14.890.839.959	52.729.363.659
196	Kab. Pandeglang	75.565.348.268	37.348.173.897	10.758.008.373	48.106.182.270
197	Kab. Serang	76.592.104.188	52.706.841.992	8.962.481.637	61.669.323.629
198	Kab. Tangerang	195.342.806.703	151.565.863.341	8.918.512.244	160.484.375.585
199	Kota Cilegon	113.913.723.380	91.829.790.698	4.714.100.263	96.543.890.961
200	Kota Tangerang	268.472.483.644	215.864.532.741	6.979.318.678	222.843.851.419
201	Kota Serang	74.442.394.945	56.258.631.927	4.928.902.223	61.187.534.150
202	Kota Tangerang Selatan	190.142.333.081	145.140.072.969	5.890.151.478	151.030.224.447
203	Provinsi Jawa Tengah	514.026.208.315	329.030.168.983	57.788.371.745	386.818.540.728
204	Kab. Banjarnegara	22.216.765.601	6.725.628.122	9.759.710.951	16.485.339.073
205	Kab. Banyumas	34.000.337.096	13.064.319.000	10.624.673.622	23.688.992.622
206	Kab. Batang	30.307.606.097	13.266.808.028	10.267.255.092	23.534.063.120
207	Kab. Blora	120.437.030.278	9.785.735.089	83.146.914.667	92.932.649.756
208	Kab. Boyolali	23.743.762.902	11.208.278.326	7.158.711.934	18.366.990.260

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
209	Kab. Brebes	31.117.678.821	9.654.595.615	11.391.530.291	21.046.125.906
210	Kab. Cilacap	65.247.218.443	40.538.289.299	15.101.585.707	55.639.875.006
211	Kab. Demak	21.837.816.132	8.808.580.988	7.577.234.588	16.385.815.576
212	Kab. Grobogan	36.894.257.776	6.971.475.507	15.971.443.335	22.942.918.842
213	Kab. Jepara	33.834.163.823	16.247.114.358	10.004.507.578	26.251.621.936
214	Kab. Karanganyar	22.104.067.425	9.673.099.093	7.212.388.482	16.885.487.575
215	Kab. Kebumen	21.939.301.808	6.747.208.800	7.767.240.048	14.514.448.848
216	Kab. Kendal	28.560.702.177	10.275.816.408	11.978.649.197	22.254.465.605
217	Kab. Klaten	21.394.100.103	10.484.082.600	6.392.616.989	16.876.699.589
218	Kab. Kudus	76.112.118.877	56.451.439.150	6.610.867.398	63.062.306.548
219	Kab. Magelang	19.429.350.106	8.102.213.279	6.561.702.525	14.663.915.804
220	Kab. Pati	27.197.062.931	8.647.692.517	8.797.925.534	17.445.618.051
221	Kab. Pekalongan	22.076.450.715	5.878.947.212	8.299.374.232	14.178.321.444
222	Kab. Pemalang	23.060.035.163	6.247.846.367	9.354.569.786	15.602.416.153
223	Kab. Purbalingga	20.825.199.386	7.055.691.292	5.977.405.426	13.033.096.718
224	Kab. Purworejo	17.972.779.062	5.885.328.000	6.241.113.261	12.126.441.261
225	Kab. Rembang	23.494.932.763	6.791.406.860	8.982.454.027	15.773.860.887
226	Kab. Semarang	28.495.930.891	12.908.397.508	9.160.369.193	22.068.766.701
227	Kab. Sragen	18.760.767.320	6.975.652.800	6.490.911.707	13.466.564.507
228	Kab. Sukoharjo	24.513.131.865	11.702.183.855	5.721.630.254	17.423.814.109
229	Kab. Tegal	22.984.233.940	6.791.058.600	8.180.149.265	14.971.207.865
230	Kab. Temanggung	18.902.396.948	6.508.697.660	6.588.242.078	13.096.939.738
231	Kab. Wonogiri	19.792.404.020	7.074.105.512	7.129.524.652	14.203.630.164
232	Kab. Wonosobo	22.138.708.935	6.083.503.009	9.175.505.598	15.259.008.607
233	Kota Magelang	16.573.848.591	7.679.070.890	4.378.288.888	12.057.359.778
234	Kota Pekalongan	16.166.553.561	7.293.406.200	4.995.766.761	12.289.172.961

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
235	Kota Salatiga	15.457.523.090	7.707.318.430	4.250.871.073	11.958.189.503
236	Kota Semarang	145.471.596.583	114.657.320.190	7.812.144.149	122.469.464.339
237	Kota Surakarta	33.180.347.259	19.926.782.400	4.783.232.326	24.710.014.726
238	Kota Tegal	16.672.545.131	7.775.295.000	4.301.322.664	12.076.617.664
239	Provinsi DI Yogyakarta	73.817.749.262	49.592.548.916	2.164.451.954	51.757.000.870
240	Kab. Bantul	23.605.084.694	10.543.465.800	5.649.062.411	16.192.528.211
241	Kab. Gunung kidul	17.545.019.764	8.439.559.200	5.571.047.062	14.010.606.262
242	Kab. Kulon Progo	17.274.839.899	7.246.976.400	4.851.906.219	12.098.882.619
243	Kab. Sleman	44.061.557.278	26.246.026.451	5.948.288.753	32.194.315.204
244	Kota Yogyakarta	38.038.541.226	23.955.615.092	4.532.203.343	28.487.818.435
245	Provinsi Jawa Timur	890.435.690.592	556.930.943.553	115.396.180.431	672.327.123.984
246	Kab. Bangkalan	29.657.746.134	8.957.873.332	12.744.925.072	21.702.798.404
247	Kab. Banyuwangi	61.972.189.874	15.819.302.463	17.712.958.736	33.532.261.199
248	Kab. Blitar	23.121.570.223	9.191.200.621	7.881.318.382	17.072.519.003
249	Kab. Bojonegoro	495.958.456.769	14.242.638.152	195.662.508.652	209.905.146.804
250	Kab. Bondowoso	24.243.213.890	7.842.927.239	10.139.369.274	17.982.296.513
251	Kab. Gresik	118.103.977.877	53.049.889.736	31.294.909.613	84.344.799.349
252	Kab. Jember	46.353.695.575	20.482.761.932	18.506.145.762	38.988.907.694
253	Kab. Jombang	26.299.458.034	11.697.280.482	8.636.144.962	20.333.425.444
254	Kab. Kediri	35.365.229.330	12.134.646.882	15.322.696.078	27.457.342.960
255	Kab. Lamongan	30.842.714.414	10.804.102.007	12.221.385.779	23.025.487.786
256	Kab. Lumajang	26.271.901.015	10.004.090.415	10.249.935.798	20.254.026.213
257	Kab. Madiun	25.282.822.024	8.959.357.716	8.729.821.310	17.689.179.026
258	Kab. Magetan	18.534.565.634	8.312.801.632	5.644.301.985	13.957.103.617
259	Kab. Malang	59.646.972.878	25.774.319.048	18.765.502.834	44.539.821.882
260	Kab. Mojokerto	32.025.570.744	14.632.990.787	9.459.482.732	24.092.473.519

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
261	Kab. Nganjuk	25.709.478.894	8.912.485.041	9.293.386.536	18.205.871.577
262	Kab. Ngawi	28.839.872.873	8.245.938.549	10.613.332.384	18.859.270.933
263	Kab. Pacitan	16.964.262.333	7.419.336.024	5.479.050.332	12.898.386.356
264	Kab. Pamekasan	23.496.846.138	9.387.717.658	7.471.045.769	16.858.763.427
265	Kab. Pasuruan	44.742.322.367	24.790.545.273	10.126.473.861	34.917.019.134
266	Kab. Ponorogo	26.704.280.982	8.737.709.489	8.469.589.810	17.207.299.299
267	Kab. Probolinggo	26.962.732.642	12.874.945.792	8.429.559.956	21.304.505.748
268	Kab. Sampang	20.308.012.245	8.476.506.789	8.304.215.331	16.780.722.120
269	Kab. Sidoarjo	110.372.801.389	70.796.196.580	17.133.142.446	87.929.339.026
270	Kab. Situbondo	23.443.521.796	8.031.944.286	8.913.844.474	16.945.788.760
271	Kab. Sumenep	32.411.806.982	8.569.381.200	17.781.028.979	26.350.410.179
272	Kab. Trenggalek	20.887.214.673	7.757.352.000	7.286.634.503	15.043.986.503
273	Kab. Tuban	77.179.056.328	14.016.389.443	43.095.762.412	57.112.151.855
274	Kab. Tulungagung	28.093.571.408	10.372.015.569	9.187.923.828	19.559.939.397
275	Kota Blitar	16.468.473.499	9.465.476.244	4.181.838.134	13.647.314.378
276	Kota Kediri	31.414.825.360	21.592.799.959	4.388.223.826	25.981.023.785
277	Kota Madiun	21.049.455.548	12.568.594.785	4.234.859.129	16.803.453.914
278	Kota Malang	50.825.847.067	36.658.578.289	5.348.432.827	42.007.011.116
279	Kota Mojokerto	18.393.940.017	8.799.201.600	4.267.341.387	13.066.542.987
280	Kota Pasuruan	25.666.562.747	14.670.660.133	4.338.319.836	19.008.979.969
281	Kota Probolinggo	19.625.155.397	9.802.070.004	6.776.302.101	16.578.372.105
282	Kota Surabaya	328.757.535.948	289.414.623.194	9.189.575.728	298.604.198.922
283	Kota Batu	17.666.600.005	7.487.276.412	4.894.587.746	12.381.864.158
284	Provinsi Kalimantan Barat	136.188.057.238	59.073.436.157	48.925.521.627	107.998.957.784
285	Kab. Bengkayang	25.330.949.898	2.994.255.656	9.726.407.377	12.720.663.033
286	Kab. Landak	28.260.036.385	3.764.584.566	16.970.378.905	20.734.963.471

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
287	Kab. Kapuas Hulu	32.036.578.008	4.349.496.467	19.530.183.061	23.879.679.528
288	Kab. Ketapang	93.647.065.237	8.505.153.006	58.978.987.165	67.484.140.171
289	Kab. Mempawah	12.902.732.963	4.151.531.834	6.045.939.557	10.197.471.391
290	Kab. Sambas	30.524.478.324	4.412.390.771	22.313.593.711	26.725.984.482
291	Kab. Sanggau	45.487.873.045	5.261.948.723	30.235.119.149	35.497.067.872
292	Kab. Sintang	39.116.150.062	5.120.574.918	24.764.328.346	29.884.903.264
293	Kota Pontianak	40.672.307.142	28.911.900.663	5.459.220.132	34.371.120.795
294	Kota Singkawang	11.786.721.126	5.081.726.718	4.633.927.369	9.715.654.087
295	Kab. Kayong Utara	16.399.072.110	3.062.390.370	8.469.834.443	11.532.224.813
296	Kab. Kubu Raya	32.239.477.819	10.036.944.336	17.197.929.672	27.234.874.008
297	Kab. Sekadau	26.697.656.560	3.501.157.750	11.965.388.377	15.466.546.127
298	Kab. Melawi	24.407.060.192	3.486.670.016	14.713.071.574	18.199.741.590
299	Provinsi Kalimantan Tengah	159.504.026.744	38.322.136.800	80.923.953.196	119.246.089.996
300	Kab. Barito Selatan	17.274.847.706	2.762.939.400	11.695.782.464	14.458.721.864
301	Kab. Barito Utara	70.670.472.089	4.293.234.267	35.819.600.281	40.112.834.548
302	Kab. Kapuas	48.141.186.189	3.201.764.051	32.373.970.926	35.575.734.977
303	Kab. Kotawaringin Barat	64.548.501.290	8.279.027.400	49.193.195.373	57.472.222.773
304	Kab. Kotawaringin Timur	91.768.441.422	8.581.004.024	71.568.872.358	80.149.876.382
305	Kota Palangkaraya	21.935.000.949	10.377.394.097	5.170.017.118	15.547.411.215
306	Kab. Barito Timur	24.387.384.445	5.724.355.374	14.193.656.915	19.918.012.289
307	Kab. Murung Raya	51.846.102.518	3.170.488.200	23.860.065.034	27.030.553.234
308	Kab. Pulang Pisau	17.019.663.388	3.127.382.191	10.059.479.305	13.186.861.496
309	Kab. Gunung Mas	27.077.866.162	2.567.400.956	19.402.128.513	21.969.529.469
310	Kab. Lamandau	32.047.343.805	2.165.719.316	17.557.679.627	19.723.398.943
311	Kab. Sukamara	16.468.782.884	1.858.587.569	9.865.299.012	11.723.886.581
312	Kab. Katingan	101.402.737.786	2.690.863.489	50.063.513.617	52.754.377.106

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
313	Kab. Seruyan	50.131.133.900	2.425.005.600	34.958.037.396	37.383.042.996
314	Provinsi Kalimantan Selatan	196.233.436.701	61.632.178.557	69.983.250.545	131.615.429.102
315	Kab. Banjar	33.815.482.803	6.597.016.860	16.922.828.597	23.519.845.457
316	Kab. Barito Kuala	18.505.642.724	4.655.441.437	11.553.508.852	16.208.950.289
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	27.448.593.481	3.451.008.000	17.597.647.712	21.048.655.712
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.228.339.840	3.881.850.000	5.287.893.725	9.169.743.725
319	Kab. Hulu Sungai Utara	12.404.419.531	3.712.812.590	5.850.926.342	9.563.738.932
320	Kab. Kotabaru	47.438.081.015	8.795.301.652	28.542.443.674	37.337.745.326
321	Kab. Tabalong	91.271.910.140	8.143.244.400	68.465.297.706	76.608.542.106
322	Kab. Tanah Laut	59.891.538.892	5.757.288.000	41.738.160.631	47.495.448.631
323	Kab. Tapin	111.160.840.993	4.047.906.000	46.120.558.559	50.168.464.559
324	Kota Banjarbaru	25.924.701.859	11.626.817.980	5.151.561.745	16.778.379.725
325	Kota Banjarmasin	35.986.761.943	21.586.323.600	5.194.528.633	26.780.852.233
326	Kab. Balangan	29.876.266.381	6.771.899.884	14.745.751.968	21.517.651.852
327	Kab. Tanah Bumbu	152.293.678.627	8.349.301.800	67.900.600.694	76.249.902.494
328	Provinsi Kalimantan Timur	748.684.610.290	171.675.381.600	379.282.845.010	550.958.226.610
329	Kab. Berau	100.166.570.571	22.352.914.442	58.861.128.746	81.214.043.188
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.431.819.878.563	30.247.730.400	986.558.406.399	1.016.806.136.799
331	Kab. Kutai Barat	109.186.855.773	14.903.602.853	58.429.401.899	73.333.004.752
332	Kab. Kutai Timur	308.972.672.656	31.120.795.800	193.481.322.009	224.602.117.809
333	Kab. Mahakam Ulu	30.459.718.682	9.190.824.600	14.266.810.539	23.457.635.139
334	Kab. Paser	88.243.960.736	15.320.601.600	61.548.610.460	76.869.212.060
335	Kota Balikpapan	90.081.798.988	60.331.621.200	7.823.719.456	68.155.340.656
336	Kota Bontang	178.692.982.674	31.727.381.400	90.586.096.664	122.313.478.064
337	Kota Samarinda	98.758.615.607	33.175.010.400	36.992.641.048	70.167.651.448
338	Kab. Penajam Paser Utara	105.564.082.180	10.130.302.200	57.370.057.174	67.500.359.374

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
339	Provinsi Kalimantan Utara	114.155.846.798	12.104.176.800	75.362.049.069	87.466.225.869
340	Kab. Bulungan	110.528.456.303	5.203.748.239	78.096.221.148	83.299.969.387
341	Kab. Malinau	54.053.165.812	3.079.115.514	29.116.743.231	32.195.858.745
342	Kab. Nunukan	90.549.233.775	2.728.455.428	59.255.325.572	61.983.781.000
343	Kab. Tana Tidung	24.259.965.567	1.917.032.400	18.224.031.898	20.141.064.298
344	Kota Tarakan	157.877.055.048	6.173.277.600	137.484.272.174	143.657.549.774
345	Provinsi Sulawesi Utara	72.187.785.494	37.094.065.800	17.154.163.752	54.248.229.552
346	Kab. Bolaang Mongondow	13.712.829.399	1.602.486.000	6.888.304.305	8.490.790.305
347	Kab. Minahasa	21.228.160.483	3.495.046.800	13.813.129.835	17.308.176.635
348	Kab. Sangihe	8.726.202.119	2.396.335.800	4.557.594.596	6.953.930.396
349	Kota Bitung	34.692.760.978	4.357.559.400	13.766.685.317	18.124.244.717
350	Kota Manado	38.753.752.663	21.749.970.678	7.754.157.572	29.504.128.250
351	Kab. Kepulauan Talaud	8.311.325.832	1.660.944.000	5.053.937.375	6.714.881.375
352	Kab. Minahasa Selatan	9.401.669.713	2.312.964.000	5.029.442.154	7.342.406.154
353	Kab. Minahasa Tenggara	8.058.160.286	1.784.791.200	4.823.778.946	6.608.570.146
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	7.520.350.416	1.641.942.000	4.578.684.659	6.220.626.659
355	Kota Kotamobagu	9.921.074.847	3.433.061.357	4.453.447.015	7.886.508.372
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7.946.288.497	1.631.518.800	4.948.237.167	6.579.755.967
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.508.413.425	1.639.998.093	6.508.850.138	8.148.848.231
358	Kota Tomohon	11.408.622.059	2.626.756.941	4.830.993.537	7.457.750.478
359	Kab. Minahasa Utara	39.187.351.028	6.190.087.024	30.895.695.491	37.085.782.515
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	8.119.866.804	1.538.131.800	5.024.655.714	6.562.787.514
361	Provinsi Gorontalo	15.494.798.774	9.749.604.899	2.985.096.697	12.734.701.596
362	Kab. Boalemo	8.586.556.178	1.364.547.691	5.668.826.506	7.033.374.197
363	Kab. Gorontalo	10.464.853.865	2.561.953.667	5.416.594.245	7.978.547.912
364	Kota Gorontalo	12.537.961.507	5.967.132.420	4.237.341.237	10.204.473.657

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
365	Kab. Pohuwato	9.886.124.818	1.627.523.087	6.690.999.434	8.318.522.521
366	Kab. Gorontalo Utara	9.023.668.231	1.341.304.512	6.228.503.154	7.569.807.666
367	Kab. Bone Bolango	8.330.579.992	1.761.943.771	5.035.508.702	6.797.452.473
368	Provinsi Sulawesi Tengah	72.209.362.946	23.252.589.067	26.001.368.115	49.253.957.182
369	Kab. Banggai	117.460.904.007	5.581.447.200	71.998.485.227	77.579.932.427
370	Kab. Banggai Laut	7.537.696.729	1.189.425.600	4.744.845.956	5.934.271.556
371	Kab. Banggai Kepulauan	8.505.137.542	1.637.432.726	5.171.701.146	6.809.133.872
372	Kab. Buol	11.768.276.450	1.544.601.000	8.115.087.922	9.659.688.922
373	Kab. Tolitoli	9.718.646.030	2.096.120.400	5.578.980.867	7.675.101.267
374	Kab. Donggala	11.281.785.639	1.572.381.000	7.182.057.839	8.754.438.839
375	Kab. Morowali	18.720.462.556	4.265.939.803	8.096.649.879	12.362.589.682
376	Kab. Morowali Utara	18.398.988.377	2.478.159.883	12.006.609.161	14.484.769.044
377	Kab. Poso	12.061.215.011	2.426.358.768	6.989.010.096	9.415.368.864
378	Kota Palu	20.177.121.220	9.964.571.800	4.885.310.273	14.849.882.073
379	Kab. Parigi Moutong	10.479.834.491	1.760.885.400	6.408.335.924	8.169.221.324
380	Kab. Sigi	8.616.974.605	1.424.478.295	5.200.329.883	6.624.808.178
381	Kab. Tojo Una Una	9.162.825.410	1.497.718.462	5.701.510.423	7.199.228.885
382	Provinsi Sulawesi Selatan	160.419.114.025	96.295.320.000	21.473.332.312	117.768.652.312
383	Kab. Bantaeng	9.625.241.961	2.814.932.962	4.992.872.758	7.807.805.720
384	Kab. Barru	10.037.588.607	2.870.046.000	4.920.894.506	7.790.940.506
385	Kab. Bone	16.844.768.126	4.247.520.422	7.873.770.190	12.121.290.612
386	Kab. Bulukumba	13.278.557.090	3.725.066.245	6.598.177.877	10.323.244.122
387	Kab. Enrekang	10.337.034.396	2.790.316.800	5.655.192.850	8.445.509.650
388	Kab. Gowa	15.195.101.887	4.278.208.509	6.510.857.223	10.789.065.732
389	Kab. Jeneponto	13.043.356.912	3.764.538.000	5.579.364.352	9.343.902.352
390	Kab. Luwu	12.282.356.414	2.986.465.800	5.268.315.142	8.254.780.942

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
391	Kab. Luwu Utara	11.940.278.595	2.761.902.000	6.579.091.285	9.340.993.285
392	Kab. Maros	20.202.780.839	5.985.085.913	10.918.840.934	16.903.926.847
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	23.646.264.325	5.144.015.080	12.861.912.136	18.005.927.216
394	Kab. Pinrang	11.535.397.033	3.297.040.749	5.325.817.699	8.622.858.448
395	Kab. Kepulauan Selayar	10.113.408.241	2.480.596.256	5.373.312.246	7.853.908.502
396	Kab. Sidenreng Rappang	11.311.471.167	3.653.281.589	5.660.583.357	9.313.864.946
397	Kab. Sinjai	10.342.917.685	2.914.561.976	4.928.371.053	7.842.933.029
398	Kab. Soppeng	10.622.723.211	2.722.932.501	4.997.716.025	7.720.648.526
399	Kab. Takalar	13.989.898.507	3.058.621.487	7.830.497.449	10.889.118.936
400	Kab. Tana Toraja	10.518.865.875	2.669.123.400	4.842.201.632	7.511.325.032
401	Kab. Wajo	29.817.026.178	3.524.896.991	18.740.862.395	22.265.759.386
402	Kota Parepare	11.473.311.877	4.796.725.929	4.491.675.245	9.288.401.174
403	Kab. Toraja Utara	9.853.281.220	2.752.714.200	4.813.719.303	7.566.433.503
404	Kota Makassar	93.648.053.161	67.219.193.266	6.964.031.833	74.183.225.099
405	Kota Palopo	11.241.002.710	3.893.774.400	4.451.283.901	8.345.058.301
406	Kab. Luwu Timur	38.573.993.468	10.187.893.090	19.122.844.239	29.310.737.329
407	Provinsi Sulawesi Barat	15.427.141.760	7.293.219.629	5.426.211.772	12.719.431.401
408	Kab. Majene	8.237.562.927	1.583.954.851	5.338.137.640	6.922.092.491
409	Kab. Mamuju	14.021.272.227	3.771.322.367	7.085.412.499	10.856.734.866
410	Kab. Mamuju Tengah	10.351.648.249	900.748.787	7.954.133.736	8.854.882.523
411	Kab. Polewali Mandar	9.544.886.597	2.501.813.017	5.568.415.305	8.070.228.322
412	Kab. Mamasa	7.770.364.148	1.203.168.472	5.361.532.552	6.564.701.024
413	Kab. Pasangkayu	17.395.070.435	1.359.959.446	12.945.189.605	14.305.149.051
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	47.552.598.777	22.670.014.917	10.414.562.922	33.084.577.839
415	Kab. Buton	7.118.503.731	1.084.464.539	4.824.419.518	5.908.884.057
416	Kab. Konawe	11.057.056.709	1.767.453.252	6.513.275.115	8.280.728.367

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
417	Kab. Konawe Kepulauan	6.754.601.077	909.648.603	4.690.662.918	5.600.311.521
418	Kab. Kolaka	29.658.486.374	5.151.322.800	12.824.793.895	17.976.116.695
419	Kab. Kolaka Timur	7.444.717.127	1.048.365.918	5.045.716.307	6.094.082.225
420	Kab. Muna	7.763.916.571	1.656.971.846	4.752.701.320	6.409.673.166
421	Kota Kendari	21.088.987.943	10.756.954.078	4.787.229.471	15.544.183.549
422	Kota Bau-bau	9.497.358.307	2.630.866.774	4.856.736.133	7.487.602.907
423	Kab. Konawe Selatan	17.381.030.068	1.516.483.470	11.531.045.834	13.047.529.304
424	Kab. Bombana	14.021.225.822	1.380.068.397	5.456.196.723	6.836.265.120
425	Kab. Konawe Utara	22.274.287.674	842.496.403	8.078.990.257	8.921.486.660
426	Kab. Buton Utara	6.884.415.697	870.675.713	4.863.978.190	5.734.653.903
427	Kab. Wakatobi	7.392.846.453	1.151.341.307	5.012.177.168	6.163.518.475
428	Kab. Kolaka Utara	9.334.157.172	1.338.982.119	6.686.012.942	8.024.995.061
429	Kab. Muna Barat	6.893.456.857	1.201.623.976	4.450.694.080	5.652.318.056
430	Kab. Buton Tengah	7.589.140.789	1.319.889.952	5.073.463.772	6.393.353.724
431	Kab. Buton Selatan	7.865.217.951	1.184.931.761	5.425.669.377	6.610.601.138
432	Provinsi Bali	157.648.556.774	120.552.065.497	3.184.754.386	123.736.819.883
433	Kab. Badung	77.848.647.692	55.868.302.533	4.689.343.622	60.557.646.155
434	Kab. Bangli	16.220.253.532	8.212.916.152	4.588.069.461	12.800.985.613
435	Kab. Buleleng	22.483.869.772	11.250.007.619	5.709.250.711	16.959.258.330
436	Kab. Gianyar	24.018.246.477	13.890.369.835	4.735.718.855	18.626.088.690
437	Kab. Jembrana	17.085.065.667	8.583.441.686	5.273.031.335	13.856.473.021
438	Kab. Karangasem	18.203.101.709	9.257.166.577	5.044.919.777	14.302.086.354
439	Kab. Klungkung	15.352.371.869	7.882.903.800	4.386.164.667	12.269.068.467
440	Kab. Tabanan	19.518.828.889	10.518.245.837	5.094.453.266	15.612.699.103
441	Kota Denpasar	76.338.714.870	55.758.721.693	5.593.071.712	61.351.793.405
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	61.765.578.909	30.400.509.600	5.749.131.600	36.149.641.200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
443	Kab. Bima	12.585.469.019	1.703.720.400	6.256.721.660	7.960.442.060
444	Kab. Dompu	10.141.066.447	2.494.200.867	5.439.689.819	7.933.890.686
445	Kab. Lombok Barat	10.959.992.603	3.076.425.600	4.413.054.800	7.489.480.400
446	Kab. Lombok Tengah	12.967.265.610	5.831.254.800	5.049.527.600	10.880.782.400
447	Kab. Lombok Timur	13.425.545.648	5.081.170.200	5.443.262.700	10.524.432.900
448	Kab. Sumbawa	37.288.245.424	3.293.263.800	8.054.091.400	11.347.355.200
449	Kota Mataram	24.255.945.917	12.866.065.200	3.905.951.400	16.772.016.600
450	Kab. Lombok Utara	8.377.606.495	2.011.799.400	3.707.685.400	5.719.484.800
451	Kota Bima	12.924.429.554	6.320.797.121	4.656.958.251	10.977.755.372
452	Kab. Sumbawa Barat	27.115.917.539	5.473.749.600	9.598.232.000	15.071.981.600
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	48.012.480.730	28.374.601.200	7.865.109.418	36.239.710.618
454	Kab. Alor	7.845.814.883	1.439.833.200	5.117.393.587	6.557.226.787
455	Kab. Belu	7.990.056.371	1.888.597.188	4.462.368.190	6.350.965.378
456	Kab. Ende	9.607.117.999	2.223.945.988	5.046.134.379	7.270.080.367
457	Kab. Flores Timur	8.743.305.409	1.905.692.284	5.264.194.969	7.169.887.253
458	Kab. Kupang	9.057.551.798	1.462.240.200	5.594.319.743	7.056.559.943
459	Kab. Lembata	7.382.544.481	1.223.738.400	4.765.698.751	5.989.437.151
460	Kab. Malaka	7.391.105.019	1.327.391.126	4.498.261.545	5.825.652.671
461	Kab. Manggarai	9.950.157.641	1.644.693.000	5.888.121.482	7.532.814.482
462	Kab. Ngada	7.719.720.200	1.329.347.552	4.892.983.631	6.222.331.183
463	Kab. Sikka	9.339.196.425	2.461.740.600	5.133.622.543	7.595.363.143
464	Kab. Sumba Barat	7.149.002.768	1.336.931.400	4.551.509.296	5.888.440.696
465	Kab. Sumba Timur	10.935.914.055	2.347.373.455	6.306.250.855	8.653.624.310
466	Kab. Timor Tengah Selatan	9.431.882.499	1.699.160.400	5.741.721.223	7.440.881.623
467	Kab. Timor Tengah Utara	7.810.518.021	1.360.871.933	5.086.986.970	6.447.858.903
468	Kota Kupang	22.011.620.974	12.177.829.800	4.620.469.465	16.798.299.265

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
469	Kab. Rote Ndao	7.500.572.445	1.036.288.200	4.905.334.201	5.941.622.401
470	Kab. Nagekeo	7.259.396.151	971.836.612	4.739.130.791	5.710.967.403
471	Kab. Sumba Tengah	6.757.493.176	805.216.800	4.721.220.174	5.526.436.974
472	Kab. Sumba Barat Daya	7.667.187.994	1.203.873.499	4.980.379.652	6.184.253.151
473	Kab. Manggarai Timur	8.628.224.762	2.110.730.720	4.892.942.648	7.003.673.368
474	Kab. Sabu Raijua	6.448.065.482	935.837.263	4.260.728.130	5.196.565.393
475	Kab. Manggarai Barat	8.247.181.327	1.473.245.099	5.047.147.853	6.520.392.952
476	Provinsi Maluku	39.166.518.780	14.956.743.600	13.534.531.219	28.491.274.819
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	9.605.687.357	2.059.489.028	6.133.196.931	8.192.685.959
478	Kab. Maluku Tengah	16.546.835.293	1.823.627.736	11.311.662.633	13.135.290.369
479	Kab. Maluku Tenggara	8.251.036.251	1.575.824.699	5.375.013.406	6.950.838.105
480	Kab. Buru	9.691.621.533	1.223.949.761	6.480.429.636	7.704.379.397
481	Kota Ambon	20.349.115.653	10.219.225.800	5.510.810.085	15.730.035.885
482	Kab. Seram Bagian Barat	8.918.781.041	1.084.681.675	6.139.414.048	7.224.095.723
483	Kab. Seram Bagian Timur	34.008.023.159	1.701.995.814	25.022.726.172	26.724.721.986
484	Kab. Maluku Barat Daya	16.578.678.241	1.157.345.705	9.709.272.883	10.866.618.588
485	Kab. Buru Selatan	7.915.975.043	859.445.047	5.523.324.861	6.382.769.908
486	Kab. Kepulauan Aru	9.897.889.477	1.172.511.331	7.003.604.200	8.176.115.531
487	Kota Tual	6.971.098.432	807.810.600	4.724.768.992	5.532.579.592
488	Provinsi Maluku Utara	31.586.139.808	15.308.885.400	6.608.289.535	21.917.174.935
489	Kab. Halmahera Tengah	9.820.838.045	1.170.853.800	6.535.487.837	7.706.341.637
490	Kab. Halmahera Barat	8.502.373.915	1.174.037.400	5.786.045.961	6.960.083.361
491	Kota Ternate	15.428.462.629	6.965.044.743	5.557.782.496	12.522.827.239
492	Kab. Halmahera Timur	12.229.063.744	1.180.077.600	7.354.067.264	8.534.144.864
493	Kota Tidore Kepulauan	10.208.529.225	2.804.679.194	5.220.523.081	8.025.202.275
494	Kab. Kepulauan Sula	9.439.171.174	1.132.074.000	6.801.896.187	7.933.970.187

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
495	Kab. Pulau Morotai	7.693.248.206	1.144.522.800	5.229.329.766	6.373.852.566
496	Kab. Pulau Taliabu	9.319.614.435	929.359.168	5.548.193.021	6.477.552.189
497	Kab. Halmahera Selatan	20.148.615.945	1.537.150.200	8.207.648.023	9.744.798.223
498	Kab. Halmahera Utara	21.273.905.423	5.809.695.000	7.692.150.411	13.501.845.411
499	Provinsi Papua	262.423.042.280	123.731.201.927	86.480.761.174	210.211.963.101
500	Kab. Yalimo	8.523.587.129	2.072.645.565	4.718.003.982	6.790.649.547
501	Kab. Lanny Jaya	8.541.451.986	1.808.928.000	4.976.695.865	6.785.623.865
502	Kab. Biak Numfor	12.624.602.856	3.815.253.977	6.836.725.183	10.651.979.160
503	Kab. Jayapura	16.786.965.909	4.233.337.261	9.883.335.393	14.116.672.654
504	Kab. Jayawijaya	14.516.085.613	6.024.674.752	6.545.217.644	12.569.892.396
505	Kab. Merauke	41.716.810.194	5.536.363.279	31.841.898.781	37.378.262.060
506	Kab. Mimika	359.739.272.534	91.216.150.047	211.418.456.387	302.634.606.434
507	Kab. Nabire	16.667.901.892	2.730.170.246	9.044.544.944	11.774.715.190
508	Kab. Paniai	11.719.278.371	3.114.269.713	5.929.117.815	9.043.387.528
509	Kab. Puncak Jaya	10.914.084.293	2.347.327.440	6.231.387.623	8.578.715.063
510	Kab. Kepulauan Yapen	11.582.930.588	2.351.925.000	6.926.831.983	9.278.756.983
511	Kota Jayapura	32.676.022.689	21.111.738.785	5.368.494.713	26.480.233.498
512	Kab. Sarmi	24.266.803.152	2.072.422.441	11.310.299.940	13.382.722.381
513	Kab. Keerom	14.200.580.258	2.135.204.400	8.144.761.001	10.279.965.401
514	Kab. Yahukimo	13.651.558.700	2.529.690.624	8.590.319.973	11.120.010.597
515	Kab. Pegunungan Bintang	14.129.994.050	2.040.256.321	9.298.836.313	11.339.092.634
516	Kab. Tolikara	11.764.283.772	1.868.080.200	7.292.428.397	9.160.508.597
517	Kab. Boven Digoel	24.849.081.041	2.149.459.007	12.554.972.819	14.704.431.826
518	Kab. Mappi	13.053.009.673	2.083.237.795	8.728.168.545	10.811.406.340
519	Kab. Asmat	13.168.809.955	2.218.164.806	8.268.614.464	10.486.779.270
520	Kab. Waropen	17.334.976.504	1.828.351.800	13.183.605.055	15.011.956.855

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
521	Kab. Mamberamo Raya	15.043.301.821	1.821.314.087	10.731.834.114	12.553.148.201
522	Kab. Mamberamo Tengah	8.984.452.917	2.106.845.255	4.763.505.581	6.870.350.836
523	Kab. Nduga	8.878.384.444	1.965.607.979	5.229.003.794	7.194.611.773
524	Kab. Dogiyai	9.519.072.514	1.893.926.400	5.713.628.801	7.607.555.201
525	Kab. Intan Jaya	11.984.528.847	1.864.525.011	8.265.840.595	10.130.365.606
526	Kab. Puncak	11.206.296.352	2.535.313.362	6.834.769.080	9.370.082.442
527	Kab. Deiyai	10.418.813.115	1.936.667.863	6.399.903.992	8.336.571.855
528	Kab. Supiori	9.418.505.735	2.053.875.052	5.317.247.138	7.371.122.190
529	Provinsi Papua Barat	190.813.249.920	22.898.705.207	118.991.118.351	141.889.823.558
530	Kab. Sorong	176.329.019.714	2.713.802.211	151.246.722.257	153.960.524.468
531	Kab. Manokwari	24.810.893.213	5.916.836.271	12.168.952.410	18.085.788.681
532	Kab. Manokwari Selatan	9.581.031.566	930.943.003	7.115.868.334	8.046.811.337
533	Kab. Fak Fak	15.107.910.854	1.077.503.036	11.703.239.388	12.780.742.424
534	Kota Sorong	25.343.158.077	8.951.953.895	6.405.210.272	15.357.164.167
535	Kab. Pegunungan Arfak	17.810.297.335	1.262.533.539	14.411.059.408	15.673.592.947
536	Kab. Sorong Selatan	13.407.909.950	1.240.228.816	9.919.398.759	11.159.627.575
537	Kab. Raja Ampat	15.161.353.543	1.050.668.088	10.884.195.507	11.934.863.595
538	Kab. Teluk Bintuni	426.116.078.557	9.351.404.019	275.735.103.722	285.086.507.741
539	Kab. Teluk Wondama	13.184.342.191	979.632.193	10.079.646.854	11.059.279.047
540	Kab. Tambrauw	11.661.627.297	1.169.888.402	8.545.750.858	9.715.639.260
541	Kab. Maybrat	11.474.620.073	1.242.411.026	8.601.937.700	9.844.348.726
542	Kab. Kaimana	13.475.880.824	913.488.965	9.753.266.738	10.666.755.703
	Dana Cadangan	-	-	-	-
	JUMLAH	**49.237.108.842.139**	**22.073.087.555.530**	**17.085.663.586.461**	**39.158.751.141.991**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**527.219.292.115**	**345.311.728.108**	**159.172.776.675**	**9.194.355.568**	**23.348.500**	**328.209.762**	-	**514.030.418.613**
2	Kab. Aceh Barat	29.009.984.241	1.274.296.626	1.579.380.147	25.319.439.382	2.122.400	9.971.093	689.340.471	28.874.550.119
3	Kab. Aceh Besar	5.199.061.571	1.274.296.626	1.579.380.147	1.213.853.238	272.566.568	42.081.806	689.340.471	5.071.518.856
4	Kab. Aceh Selatan	4.952.587.697	1.274.296.626	1.579.380.147	1.265.363.875	2.122.400	10.721.757	689.340.471	4.821.225.276
5	Kab. Aceh Singkil	4.611.800.232	1.274.296.626	1.579.380.147	788.021.607	2.122.400	24.140.246	689.340.471	4.357.301.497
6	Kab. Aceh Tengah	6.941.172.472	1.274.296.626	1.579.380.147	3.056.967.309	2.122.400	80.838.783	689.340.471	6.682.945.736
7	Kab. Aceh Tenggara	4.591.063.692	1.274.296.626	1.579.380.147	778.380.055	2.122.400	14.204.355	689.340.471	4.337.724.054
8	Kab. Aceh Timur	18.124.355.500	3.840.732.391	12.663.595.597	756.160.666	2.122.400	45.458.681	689.340.471	17.997.410.206
9	Kab. Aceh Utara	52.542.961.498	27.296.567.678	23.662.155.898	752.212.339	2.122.400	11.843.273	689.340.471	52.414.242.059
10	Kab. Bireuen	4.568.094.647	1.274.296.626	1.579.380.147	758.927.176	2.122.400	10.687.324	689.340.471	4.314.754.144
11	Kab. Pidie	5.292.565.537	1.274.296.626	1.579.380.147	1.605.187.760	2.122.400	10.443.244	689.340.471	5.160.770.648
12	Kab. Simeulue	4.574.071.244	1.274.296.626	1.579.380.147	752.212.339	2.122.400	21.116.176	689.340.471	4.318.468.159
13	Kota Banda Aceh	4.563.225.652	1.274.296.626	1.579.380.147	752.212.339	2.122.400	12.534.031	689.340.471	4.309.886.014
14	Kota Sabang	4.632.113.275	1.274.296.626	1.579.380.147	752.212.339	73.159.405	14.204.355	689.340.471	4.382.593.343
15	Kota Langsa	4.563.620.081	1.274.296.626	1.579.380.147	752.212.339	2.122.400	12.928.460	689.340.471	4.310.280.443
16	Kota Lhokseumawe	4.564.895.976	1.274.296.626	1.579.380.147	752.212.339	2.122.400	14.204.355	689.340.471	4.311.556.338
17	Kab. Nagan Raya	5.606.191.192	1.274.296.626	1.579.380.147	1.914.947.702	2.122.400	13.392.365	689.340.471	5.473.479.711
18	Kab. Aceh Jaya	4.600.541.290	1.274.296.626	1.579.380.147	774.404.204	2.122.400	25.674.019	689.340.471	4.345.217.867
19	Kab. Pidie Jaya	4.566.683.889	1.274.296.626	1.579.380.147	753.999.828	2.122.400	14.204.355	689.340.471	4.313.343.827
20	Kab. Aceh Barat Daya	4.663.015.799	1.274.296.626	1.579.380.147	851.956.781	2.122.400	12.578.113	689.340.471	4.409.674.538
21	Kab. Gayo Lues	6.516.088.296	1.274.296.626	1.579.380.147	2.676.628.012	2.122.400	32.181.935	689.340.471	6.253.949.591
22	Kab. Aceh Tamiang	13.016.092.849	9.830.797.618	1.579.380.147	754.349.673	2.122.400	33.156.695	689.340.471	12.889.147.004
23	Kab. Bener Meriah	4.612.215.883	1.274.296.626	1.579.380.147	752.212.339	2.122.400	61.524.262	689.340.471	4.358.876.245
24	Kota Subulussalam	4.591.850.677	1.274.296.626	1.579.380.147	781.241.553	2.122.400	10.712.348	689.340.471	4.337.093.545
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**68.526.366.379**	**1.104.625.500**	**887.290.250**	**42.625.643.214**	**733.749.065**	**19.399.279.846**	-	**64.750.587.875**
26	Kab. Asahan	3.710.200.527	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	74.592.963	689.340.471	3.493.526.651
27	Kab. Dairi	4.658.174.863	69.038.750	55.455.400	3.313.340.808	45.859.229	216.784.641	689.340.471	4.389.819.299
28	Kab. Deli Serdang	4.175.409.316	130.698.557	331.787.415	2.559.239.838	45.859.229	234.745.999	689.340.471	3.991.671.509
29	Kab. Karo	4.225.457.391	69.038.750	55.455.400	2.564.735.995	45.859.229	579.454.390	689.340.471	4.003.884.235
30	Kab. LabuhanBatu	3.730.661.337	69.038.750	55.455.400	2.587.060.638	45.859.229	74.169.278	689.340.471	3.520.923.766
31	Kab. Langkat	8.808.624.227	2.180.294.397	3.069.414.259	2.559.239.838	45.859.229	80.650.357	689.340.471	8.624.798.551
32	Kab. Mandailing Natal	7.364.675.723	69.038.750	55.455.400	4.677.692.533	1.467.498.831	276.364.546	689.340.471	7.235.390.531
33	Kab. Nias	3.866.469.216	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	230.876.598	689.340.471	3.649.810.286
34	Kab. Simalungun	3.977.373.433	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	151.068.814	689.340.471	3.570.002.502
35	Kab. Tapanuli Selatan	104.009.117.271	69.038.750	55.455.400	102.562.315.370	45.859.229	469.240.525	689.340.471	103.891.249.745
36	Kab. Tapanuli Tengah	4.599.610.451	69.038.750	55.455.400	3.295.616.119	45.859.229	234.513.718	689.340.471	4.389.823.687
37	Kab. Tapanuli Utara	4.739.362.782	69.038.750	55.455.400	3.016.329.202	45.859.229	600.544.216	689.340.471	4.476.567.268
38	Kab. Toba Samosir	4.322.471.772	69.038.750	55.455.400	2.569.955.196	45.859.229	616.916.342	689.340.471	4.046.565.388
39	Kota Binjai	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
40	Kota Medan	3.866.271.486	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	237.600.227	689.340.471	3.656.533.915

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Kota Pematang Siantar	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
42	Kota Sibolga	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
43	Kota Tanjung Balai	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
44	Kab. Batu Bara	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
45	Kab. LabuhanBatu Utara	4.038.786.292	69.038.750	55.455.400	2.560.727.360	45.859.229	408.627.150	689.340.471	3.829.048.360
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	6.623.956.722	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	2.554.151.594	689.340.471	5.973.085.282
47	Kab. Padang Lawas Utara	4.202.174.248	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	488.490.007	689.340.471	3.907.423.695
48	Kab. Padang Lawas	6.527.364.672	1.979.068.420	103.066.734	2.559.239.838	45.859.229	935.174.043	689.340.471	6.311.748.735
49	Kab. Nias Utara	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
50	Kab. Nias Barat	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
51	Kota Tebing Tinggi	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
52	Kota Padang Sidempuan	4.374.736.444	69.038.750	55.455.400	3.064.185.703	45.859.229	234.450.820	689.340.471	4.158.330.373
53	Kab. Pakpak Bharat	3.993.498.451	69.038.750	55.455.400	2.586.730.732	45.859.229	334.868.321	689.340.471	3.781.292.903
54	Kab. Nias Selatan	4.671.418.467	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	862.339.355	689.340.471	4.281.273.043
55	Kab. Humbang Hasundutan	4.393.069.351	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	764.398.092	689.340.471	4.183.331.780
56	Kab. Serdang Bedagai	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
57	Kab. Samosir	4.122.765.364	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	476.169.570	689.340.471	3.895.103.258
58	Kota Gunungsitoli	3.869.779.457	69.038.750	55.455.400	2.559.239.838	45.859.229	234.450.820	689.340.471	3.653.384.508
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**29.123.188.795**	-	-	**8.438.510.480**	**455.581.840**	**18.915.041.603**	-	**27.809.133.923**
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.139.453.611	-	-	1.217.330.064	50.620.360	181.014.345	689.340.471	2.138.305.240
61	Kab. Agam	1.934.792.630	-	-	1.170.734.328	50.620.360	22.949.100	689.340.471	1.933.644.259
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4.024.147.381	-	-	909.627.218	50.620.360	2.233.152.160	689.340.471	3.882.740.209
63	Kab. Padang Pariaman	1.904.978.611	-	-	909.627.218	50.620.360	174.587.116	689.340.471	1.824.175.165
64	Kab. Pasaman	2.048.089.346	-	-	1.049.250.318	50.620.360	178.061.754	689.340.471	1.967.272.903
65	Kab. Pesisir Selatan	3.417.048.354	-	-	2.482.955.415	50.620.360	192.983.737	689.340.471	3.415.899.983
66	Kab. Sijunjung	4.267.562.891	-	-	3.016.564.580	50.620.360	509.889.109	689.340.471	4.266.414.520
67	Kab. Solok	2.360.873.039	-	-	1.218.682.020	421.471.960	30.208.843	689.340.471	2.359.703.294
68	Kab. Tanah Datar	1.909.367.848	-	-	911.016.454	50.620.360	177.586.741	689.340.471	1.828.564.026
69	Kota Bukit Tinggi	1.904.977.389	-	-	909.627.218	50.620.360	174.585.901	689.340.471	1.824.173.950
70	Kota Padang Panjang	1.904.977.389	-	-	909.627.218	50.620.360	174.585.901	689.340.471	1.824.173.950
71	Kota Padang	1.914.764.135	-	-	914.010.294	50.620.360	179.989.305	689.340.471	1.833.960.430
72	Kota Payakumbuh	1.905.058.631	-	-	909.627.218	50.620.360	174.667.143	689.340.471	1.824.255.192
73	Kota Sawahlunto	18.514.148.530	-	-	17.594.843.180	50.620.360	178.196.148	689.340.471	18.513.000.159
74	Kota Solok	1.904.989.494	-	-	909.627.218	50.620.360	174.598.006	689.340.471	1.824.186.055
75	Kota Pariaman	1.904.977.389	-	-	909.627.218	50.620.360	174.585.901	689.340.471	1.824.173.950
76	Kab. Pasaman Barat	2.106.928.955	-	-	1.188.679.037	50.620.360	177.140.716	689.340.471	2.105.780.584
77	Kab. Dharmasraya	2.740.088.189	-	-	1.800.411.895	50.620.360	192.425.988	689.340.471	2.732.798.714
78	Kab. Solok Selatan	2.762.243.934	-	-	1.480.260.906	540.312.080	51.182.106	689.340.471	2.761.095.563
79	**Provinsi Riau**	**993.200.755.065**	**808.593.969.597**	**21.611.234.844**	**13.914.778.147**	**119.145.600**	**33.907.095.718**	-	**878.146.223.906**
80	Kab. Bengkalis	1.147.066.063.510	1.128.514.537.313	4.304.433.497	2.362.829.234	70.182.000	9.774.747.162	689.340.471	1.145.716.069.677

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Kab. Indragiri Hilir	212.706.797.378	147.017.084.788	3.929.315.722	26.560.290.129	14.893.200	11.833.960.105	689.340.471	190.044.884.415
82	Kab. Indragiri Hulu	232.305.144.230	217.256.749.277	4.304.433.497	5.466.896.971	14.893.200	3.990.173.820	689.340.471	231.722.487.236
83	Kab. Kampar	531.402.595.029	507.051.893.688	14.813.921.657	3.152.232.998	14.893.200	4.617.074.292	689.340.471	530.339.356.306
84	Kab. Kuantan Singingi	185.123.719.439	147.017.084.788	3.929.315.722	8.635.520.945	157.273.200	3.684.503.569	689.340.471	164.113.038.695
85	Kab. Pelalawan	276.125.627.040	218.766.707.151	38.505.603.609	2.412.219.427	14.893.200	14.624.333.782	689.340.471	275.013.097.640
86	Kab. Rokan Hilir	722.295.397.785	711.593.336.482	4.304.433.497	2.362.829.234	14.893.200	2.486.491.678	689.340.471	721.451.324.562
87	Kab. Rokan Hulu	235.005.720.552	223.224.727.489	4.304.433.497	3.015.074.627	14.893.200	3.144.003.019	689.340.471	234.392.472.303
88	Kab. Siak	596.169.372.981	579.606.919.882	3.559.140.750	2.362.829.234	40.622.400	8.371.219.868	689.340.471	594.630.072.605
89	Kota Dumai	179.725.118.218	147.017.084.788	3.929.315.722	2.362.829.234	14.893.200	4.659.695.205	689.340.471	158.673.158.620
90	Kota Pekanbaru	177.934.451.696	147.017.084.788	3.929.315.722	2.362.829.234	14.893.200	3.049.363.110	689.340.471	157.062.826.525
91	Kab. Kepulauan Meranti	230.648.887.289	214.493.405.794	6.765.857.682	3.657.235.705	14.893.200	4.304.290.516	689.340.471	229.925.023.368
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**644.449.572.966**	**125.868.120.345**	**487.584.099.221**	**29.134.205.260**	**14.893.200**	**1.471.507.596**	-	**644.072.825.622**
93	Kab. Bintan	138.563.717.207	30.862.920.892	69.550.027.748	9.549.455.300	14.893.200	49.121.710	689.340.471	110.715.759.321
94	Kab. Natuna	523.053.645.430	168.948.744.605	346.528.480.565	6.303.141.265	14.893.200	48.410.059	689.340.471	522.533.010.165
95	Kab. Karimun	150.994.343.995	30.862.920.892	69.550.027.734	21.923.783.768	14.893.200	89.506.623	689.340.471	123.130.472.688
96	Kota Batam	135.827.613.393	30.862.920.892	69.550.027.734	6.302.039.465	14.893.200	50.232.628	689.340.471	107.469.454.390
97	Kab. Kepulauan Anambas	372.798.805.021	110.141.284.185	254.897.086.670	6.302.039.465	120.019.200	99.878.210	689.340.471	372.249.648.201
98	Kota Tanjung Pinang	135.893.945.624	30.862.920.892	69.550.027.734	6.332.739.709	26.670.700	74.109.090	689.340.471	107.535.808.596
99	Kab. Lingga	138.689.493.471	30.862.920.892	69.550.027.734	9.340.180.055	26.670.700	337.000.029	689.340.471	110.806.139.881
100	**Provinsi Jambi**	**277.687.968.722**	**66.769.990.737**	**124.788.424.363**	**41.607.442.371**	**114.897.300**	**11.135.889.530**	-	**244.416.644.301**
101	Kab. Batanghari	94.502.606.106	21.006.920.136	38.658.380.810	30.470.158.791	26.670.700	3.517.406.533	689.340.471	94.368.877.441
102	Kab. Bungo	88.855.176.076	13.353.998.250	24.957.684.225	43.214.314.654	26.670.700	827.839.049	689.340.471	83.069.847.349
103	Kab. Kerinci	54.758.731.509	13.353.998.250	24.957.684.225	7.989.741.273	26.670.700	1.077.553.261	689.340.471	48.094.988.180
104	Kab. Merangin	57.189.999.419	13.353.998.250	24.957.684.225	11.141.820.545	26.670.700	1.189.155.187	689.340.471	51.358.669.378
105	Kab. Muaro Jambi	79.350.143.813	23.731.019.911	38.445.672.242	14.984.083.856	26.670.700	1.222.855.113	689.340.471	79.099.642.293
106	Kab. Sarolangun	113.371.200.257	20.976.505.261	38.660.910.062	51.508.289.885	26.670.700	1.323.195.306	689.340.471	113.184.911.685
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	490.250.859.529	142.646.792.633	330.746.738.340	11.394.153.603	151.812.500	4.055.452.850	689.340.471	489.684.290.397
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	151.572.125.523	39.644.200.866	94.705.637.277	7.989.741.273	4.827.965.800	2.386.700.852	689.340.471	150.243.586.539
109	Kab. Tebo	65.671.046.380	13.767.578.660	24.957.684.225	18.396.651.800	689.709.300	1.519.983.158	689.340.471	60.020.947.614
110	Kota Jambi	69.561.309.827	19.389.224.563	38.658.380.810	7.989.741.273	815.670.100	1.017.546.124	689.340.471	68.559.903.341
111	Kota Sungai Penuh	55.454.950.230	13.353.998.250	24.957.684.225	7.989.741.273	689.709.300	1.106.601.184	689.340.471	48.787.074.703
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.128.151.290.203**	**102.031.161.650**	**537.282.230.936**	**349.953.449.242**	**734.723.978**	**8.065.975.573**	-	**998.067.541.379**
113	Kab. Lahat	522.681.280.901	18.825.631.441	124.527.379.976	376.493.372.449	705.548.713	1.228.029.250	689.340.471	522.469.302.300
114	Kab. Musi Banyuasin	1.709.335.781.235	234.995.643.384	1.352.059.918.426	107.128.320.184	9.116.731.285	4.803.964.511	689.340.471	1.708.793.918.261
115	Kab. Musi Rawas	332.733.221.788	31.360.447.026	247.339.630.711	50.702.473.544	695.335.785	1.568.168.176	689.340.471	332.355.395.713
116	Kab. Musi Rawas Utara	222.369.055.956	19.527.255.769	100.633.737.393	99.680.985.992	695.335.785	948.487.480	689.340.471	222.175.142.890
117	Kab. Muara Enim	695.265.522.708	37.836.122.691	174.062.975.270	479.970.188.388	1.072.698.027	1.119.663.714	689.340.471	694.750.988.561
118	Kab. Ogan Komering Ilir	146.956.624.799	12.753.895.198	67.160.278.919	43.430.415.877	695.335.785	5.912.375.283	689.340.471	130.641.641.533
119	Kab. Ogan Komering Ulu	195.200.475.591	30.294.114.336	102.779.384.623	60.302.052.267	695.335.785	284.640.163	689.340.471	195.044.867.645
120	Kota Palembang	141.236.727.363	12.753.895.198	67.160.278.919	42.890.695.232	695.335.785	953.158.445	689.340.471	125.142.704.050

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Kota Pagar Alam	141.153.166.987	12.753.895.198	67.160.278.919	42.890.695.232	722.083.930	953.707.551	689.340.471	125.170.001.301
122	Kota Lubuk linggau	141.325.520.099	12.753.895.198	67.160.278.919	42.890.695.232	797.446.885	953.158.445	689.340.471	125.244.815.150
123	Kota Prabumulih	192.576.516.861	27.037.421.916	108.297.551.787	54.778.304.703	695.335.785	953.237.837	689.340.471	192.451.192.499
124	Kab. Empat Lawang	294.699.978.331	12.753.895.198	67.160.278.919	52.958.101.795	86.254.013.885	953.158.445	689.340.471	220.768.788.713
125	Kab. Banyuasin	255.857.354.983	23.623.621.549	100.633.737.393	48.369.489.373	79.710.339.685	2.063.227.015	689.340.471	255.089.755.486
126	Kab. Ogan Ilir	187.376.530.780	25.211.600.618	100.616.095.199	44.741.526.588	6.640.118.685	953.158.445	689.340.471	178.851.840.006
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	182.053.228.780	12.753.895.198	67.160.278.919	43.478.204.695	40.964.844.085	926.242.840	689.340.471	165.972.806.208
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	165.495.285.245	12.753.895.198	67.160.278.919	60.161.529.865	6.648.696.168	953.197.272	689.340.471	148.366.937.893
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	202.969.787.592	28.521.284.956	104.910.058.230	55.969.405.313	6.640.118.685	1.361.898.315	689.340.471	198.092.105.970
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**218.450.125.780**	**2.790.791.875**	-	**203.335.026.519**	**6.634.492.200**	**432.078.411**	-	**213.192.389.005**
131	Kab. Bangka	158.506.155.782	392.248.339	-	125.901.527.953	31.342.447.500	53.169.835	689.340.471	158.378.734.098
132	Kab. Belitung	85.402.908.777	392.248.339	-	72.822.589.547	6.634.492.200	3.733.429	689.340.471	80.542.403.986
133	Kota Pangkal Pinang	67.420.011.605	392.248.339	-	54.803.738.742	6.634.492.200	39.687.062	689.340.471	62.559.506.814
134	Kab. Bangka Selatan	116.744.176.644	392.248.339	-	103.967.164.765	6.634.492.200	200.426.078	689.340.471	111.883.671.853
135	Kab. Bangka Tengah	96.482.853.134	392.248.339	-	83.811.268.638	6.634.492.200	94.998.695	689.340.471	91.622.348.343
136	Kab. Bangka Barat	119.176.726.050	392.248.339	-	106.558.123.160	6.634.492.200	42.017.089	689.340.471	114.316.221.259
137	Kab. Belitung Timur	100.701.703.651	392.248.339	-	92.475.573.296	6.731.414.900	285.704.961	689.340.471	100.574.281.967
138	**Provinsi Bengkulu**	**44.044.367.133**	-	-	**33.637.839.532**	**6.732.772.200**	**772.156.050**	-	**41.142.767.782**
139	Kab. Bengkulu Selatan	48.695.847.728	-	-	7.267.575.198	40.104.997.800	16.444.637	689.340.471	48.078.358.106
140	Kab. Bengkulu Utara	45.640.672.562	-	-	38.021.600.354	6.634.492.200	243.364.902	689.340.471	45.588.797.927
141	Kab. Rejang Lebong	20.057.315.905	-	-	7.255.309.315	6.747.917.901	14.364.749	689.340.471	14.706.932.436
142	Kota Bengkulu	15.331.089.393	-	-	7.255.309.315	6.728.184.400	45.757.571	689.340.471	14.718.591.757
143	Kab. Kaur	21.779.293.676	-	-	9.688.681.700	6.634.492.200	31.234.960	689.340.471	17.043.749.331
144	Kab. Seluma	24.157.629.205	-	-	12.070.933.054	6.634.492.200	18.066.725	689.340.471	19.412.832.450
145	Kab. Mukomuko	19.976.050.703	-	-	7.292.795.931	6.634.492.200	9.036.561	689.340.471	14.625.665.163
146	Kab. Lebong	23.623.191.078	-	-	11.478.410.145	6.634.492.200	86.716.784	689.340.471	18.888.959.600
147	Kab. Bengkulu Tengah	61.917.917.512	-	-	49.838.601.624	6.634.492.200	15.589.784	689.340.471	57.178.024.079
148	Kab. Kepahiang	20.111.620.566	-	-	7.255.309.315	6.785.585.419	17.858.090	689.340.471	14.748.093.295
149	**Provinsi Lampung**	**58.245.378.939**	**33.392.946.301**	**9.922.412.335**	**1.874.297.203**	**7.549.040.829**	**586.921.464**	-	**53.325.618.132**
150	Kab. Lampung Barat	16.959.269.971	2.297.029.832	1.322.337.360	277.376.652	6.830.453.227	82.631.552	689.340.471	11.499.169.094
151	Kab. Lampung Selatan	17.630.666.860	2.297.029.832	1.322.337.360	940.096.813	6.859.429.020	87.626.856	689.340.471	12.195.860.352
152	Kab. Lampung Tengah	5.894.918.452	2.297.029.832	1.322.337.360	319.952.632	480.761.804	83.772.952	689.340.471	5.193.195.051
153	Kab. Lampung Utara	5.589.559.203	2.297.029.832	1.322.337.360	240.585.511	230.681.904	82.566.904	689.340.471	4.862.541.982
154	Kab. Lampung Timur	25.191.784.155	22.300.313.853	1.322.337.360	235.977.600	533.599.904	83.772.952	689.340.471	25.165.342.140
155	Kab. Tanggamus	11.557.823.178	2.297.029.832	1.322.337.360	4.246.642.698	2.215.129.028	85.620.388	689.340.471	10.856.099.777
156	Kab. Tulang Bawang	5.821.346.882	2.297.029.832	1.322.337.360	496.460.962	230.681.904	83.772.952	689.340.471	5.119.623.481
157	Kab. Way Kanan	6.163.744.108	2.297.029.832	1.322.337.360	448.785.402	230.681.904	473.845.738	689.340.471	5.462.020.707
158	Kab. Pesawaran	6.236.575.811	2.297.029.832	1.322.337.360	449.677.665	692.694.130	83.772.952	689.340.471	5.534.852.410
159	Kab. Pesisir Barat	5.585.974.404	2.297.029.832	1.322.337.360	235.977.600	230.681.904	83.590.612	689.340.471	4.858.957.779
160	Kab. Pringsewu	5.587.648.758	2.297.029.832	1.322.337.360	237.468.567	230.681.904	83.772.952	689.340.471	4.860.631.086

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Kab. Mesuji	7.050.889.228	2.297.029.832	1.322.337.360	561.583.807	636.810.004	797.155.097	689.340.471	6.304.256.571
162	Kab. Tulang Bawang Barat	5.518.540.266	2.297.029.832	1.322.337.360	235.977.600	160.423.604	83.772.952	689.340.471	4.788.881.819
163	Kota Bandar Lampung	5.800.575.304	2.297.029.832	1.322.337.360	235.977.600	445.100.464	83.772.952	689.340.471	5.073.558.679
164	Kota Metro	5.518.540.266	2.297.029.832	1.322.337.360	235.977.600	160.423.604	83.772.952	689.340.471	4.788.881.819
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**113.237.234.101**	**81.825.247.633**	**30.666.562.796**	-	**29.773.800**	**22.190.590**	**689.332.307**	**113.233.107.126**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**250.085.580.619**	**85.842.981.586**	**83.507.138.417**	**5.139.120.125**	**73.810.932.674**	**1.070.333.197**	-	**249.370.505.999**
167	Kab. Bandung	284.580.482.065	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	271.827.521.312	164.830.693	689.340.471	283.972.651.168
168	Kab. Bekasi	38.660.382.787	11.823.107.120	19.926.663.340	377.147.282	5.704.786.098	82.419.635	689.340.471	38.603.463.946
169	Kab. Bogor	119.926.544.429	4.797.020.800	6.116.790.610	12.826.864.673	94.802.377.951	122.025.433	689.340.471	119.354.419.938
170	Kab. Ciamis	18.799.750.962	4.797.020.800	6.116.790.610	405.125.311	5.704.786.098	443.592.637	689.340.471	18.156.655.927
171	Kab. Cianjur	19.067.648.678	4.797.020.800	6.116.790.610	799.093.347	5.704.786.098	382.633.212	689.340.471	18.489.664.538
172	Kab. Cirebon	18.769.293.946	4.797.020.800	6.116.790.610	558.339.979	5.955.929.298	90.892.032	689.340.471	18.208.313.190
173	Kab. Garut	155.859.892.782	4.797.020.800	6.116.790.610	792.805.827	142.791.561.690	108.913.022	689.340.471	155.296.432.420
174	Kab. Indramayu	42.523.728.537	19.164.733.627	16.331.075.989	377.147.282	5.724.779.498	185.041.114	689.340.471	42.472.117.981
175	Kab. Karawang	50.175.166.259	12.943.558.743	30.312.606.910	377.147.282	5.704.786.098	84.242.229	689.340.471	50.111.681.733
176	Kab. Kuningan	18.470.313.635	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.704.786.098	152.221.025	689.340.471	17.837.306.286
177	Kab. Majalengka	20.236.928.177	6.688.902.231	6.516.618.270	377.147.282	5.789.544.198	118.938.998	689.340.471	20.180.491.450
178	Kab. Pangandaran	18.674.156.357	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.283	5.704.786.098	374.420.514	689.340.471	18.059.505.776
179	Kab. Purwakarta	33.905.474.847	4.797.020.800	6.116.790.610	543.308.796	20.950.979.879	248.023.757	689.340.471	33.345.464.313
180	Kab. Subang	89.069.233.438	11.599.855.647	55.272.269.604	377.147.282	20.968.824.362	104.744.180	689.340.471	89.012.181.546
181	Kab. Sukabumi	104.759.801.761	4.797.020.800	6.116.790.610	759.714.571	91.574.001.474	240.254.487	689.340.471	104.177.122.413
182	Kab. Sumedang	33.702.957.946	4.797.020.800	6.116.790.610	377.269.393	20.953.303.341	145.211.874	689.340.471	33.078.936.489
183	Kab. Tasikmalaya	18.566.396.253	4.797.020.800	6.116.790.610	471.624.569	5.704.786.098	184.033.124	689.340.471	17.963.595.672
184	Kab. Bandung Barat	33.964.466.637	4.797.020.800	6.116.790.610	377.569.117	21.231.871.725	143.869.455	689.340.471	33.356.462.178
185	Kota Bandung	18.420.293.456	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.747.077.298	82.419.635	689.340.471	17.809.796.096
186	Kota Bekasi	18.380.644.078	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.704.786.098	82.419.635	689.340.471	17.767.504.896
187	Kota Bogor	18.435.247.959	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.761.817.898	82.419.635	689.340.471	17.824.536.696
188	Kota Cirebon	18.409.159.956	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.735.943.798	82.419.635	689.340.471	17.798.662.596
189	Kota Depok	18.383.116.456	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.709.900.298	82.419.635	689.340.471	17.772.619.096
190	Kota Sukabumi	18.380.644.078	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.704.786.098	82.419.635	689.340.471	17.767.504.896
191	Kota Cimahi	18.380.644.078	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.704.786.098	82.419.635	689.340.471	17.767.504.896
192	Kota Tasikmalaya	18.380.728.528	4.797.020.800	6.116.790.610	377.147.282	5.704.786.098	82.504.085	689.340.471	17.767.589.346
193	Kota Banjar	20.193.299.210	4.797.020.800	6.116.790.610	2.078.717.625	5.708.477.898	245.583.094	689.340.471	19.635.930.498
194	**Provinsi Banten**	**2.991.898.085**	-	-	**2.433.346.423**	**160.748.752**	**298.394.219**	-	**2.892.489.394**
195	Kab. Lebak	1.803.586.281	-	-	937.297.169	67.195.215	105.963.233	689.340.471	1.799.796.088
196	Kab. Pandeglang	6.927.840.948	-	-	5.478.140.087	180.514.752	576.055.445	689.340.471	6.924.050.755
197	Kab. Serang	1.911.251.553	-	-	670.691.205	436.924.600	85.501.540	689.340.471	1.882.457.816
198	Kab. Tangerang	1.555.268.860	-	-	690.840.638	61.038.715	85.255.299	689.340.471	1.526.475.123
199	Kota Cilegon	1.807.050.527	-	-	670.691.205	332.969.815	85.255.299	689.340.471	1.778.256.790
200	Kota Tangerang	1.535.119.427	-	-	670.691.205	61.038.715	85.255.299	689.340.471	1.506.325.690

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Kota Serang	1.911.894.379	-	-	670.691.205	437.813.667	85.255.299	689.340.471	1.883.100.642
202	Kota Tangerang Selatan	1.670.333.527	-	-	670.691.205	196.252.815	85.255.299	689.340.471	1.641.539.790
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**15.566.413.001**	**1.615.889.000**	**7.138.885.600**	**50.198.938**	**196.509.069**	**5.071.669.846**	-	**14.073.152.453**
204	Kab. Banjarnegara	1.671.838.752	95.052.100	419.934.900	515.187	33.787.651	339.004.510	689.340.471	1.577.634.819
205	Kab. Banyumas	1.849.932.709	95.052.100	419.934.900	14.704.279	78.339.163	465.762.088	689.340.471	1.763.133.001
206	Kab. Batang	1.970.547.779	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	584.846.908	689.340.471	1.823.476.517
207	Kab. Blora	31.861.824.099	4.296.874.742	22.449.404.335	514.487	33.787.651	4.390.754.041	689.340.471	31.860.675.727
208	Kab. Boyolali	1.761.963.195	95.052.100	419.934.900	514.487	53.181.629	395.226.331	689.340.471	1.653.249.918
209	Kab. Brebes	2.199.236.947	95.052.100	419.934.900	514.487	126.056.565	710.979.982	689.340.471	2.041.878.505
210	Kab. Cilacap	1.695.436.367	95.052.100	419.934.900	32.236.791	60.124.451	305.431.217	689.340.471	1.602.119.930
211	Kab. Demak	1.638.082.154	95.052.100	419.934.900	514.487	49.525.751	293.598.199	689.340.471	1.547.965.908
212	Kab. Grobogan	2.468.643.905	95.052.100	419.934.900	514.487	84.310.151	992.196.466	689.340.471	2.281.348.575
213	Kab. Jepara	1.708.498.535	95.052.100	419.934.900	11.112.887	33.787.651	357.057.631	689.340.471	1.606.285.640
214	Kab. Karanganyar	1.798.785.205	95.052.100	419.934.900	514.487	206.843.552	301.112.616	689.340.471	1.712.798.126
215	Kab. Kebumen	1.714.099.288	95.052.100	419.934.900	28.326.594	33.787.651	358.783.965	689.340.471	1.625.225.681
216	Kab. Kendal	2.093.104.639	95.052.100	419.934.900	514.487	49.157.374	652.141.634	689.340.471	1.906.140.966
217	Kab. Klaten	1.653.340.465	95.052.100	419.934.900	1.046.967	71.102.551	287.876.252	689.340.471	1.564.353.241
218	Kab. Kudus	1.756.735.912	95.052.100	419.934.900	514.487	172.008.951	288.551.806	689.340.471	1.665.402.715
219	Kab. Magelang	1.790.195.035	95.052.100	419.934.900	514.487	196.828.940	299.297.506	689.340.471	1.700.968.404
220	Kab. Pati	2.063.569.392	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	669.266.231	689.340.471	1.907.895.840
221	Kab. Pekalongan	1.704.392.763	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	379.105.503	689.340.471	1.617.735.112
222	Kab. Pemalang	2.346.470.006	95.052.100	419.934.900	514.487	45.596.662	922.511.126	689.340.471	2.172.949.746
223	Kab. Purbalingga	1.650.013.319	95.052.100	419.934.900	514.487	48.196.680	308.471.765	689.340.471	1.561.510.403
224	Kab. Purworejo	1.670.402.152	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	343.430.690	689.340.471	1.582.060.299
225	Kab. Rembang	2.543.823.415	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	1.219.206.727	689.340.471	2.457.836.336
226	Kab. Semarang	2.032.564.758	95.052.100	419.934.900	514.487	296.821.537	411.906.022	689.340.471	1.913.569.517
227	Kab. Sragen	1.716.604.604	95.052.100	419.934.900	514.487	58.700.253	360.373.879	689.340.471	1.623.916.090
228	Kab. Sukoharjo	1.615.467.847	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	287.850.924	689.340.471	1.526.480.533
229	Kab. Tegal	2.051.681.638	95.052.100	419.934.900	514.487	60.408.246	590.699.485	689.340.471	1.855.949.689
230	Kab. Temanggung	1.716.121.467	95.052.100	419.934.900	514.487	99.062.890	326.229.540	689.340.471	1.630.134.388
231	Kab. Wonogiri	1.797.597.094	95.052.100	419.934.900	142.034.879	44.242.331	317.079.589	689.340.471	1.707.684.270
232	Kab. Wonosobo	1.677.493.685	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	348.360.389	689.340.471	1.586.989.998
233	Kota Magelang	1.615.469.172	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	287.850.924	689.340.471	1.526.480.533
234	Kota Pekalongan	1.615.467.757	95.052.100	419.934.900	514.487	33.787.651	287.850.924	689.340.471	1.526.480.533
235	Kota Salatiga	1.666.222.196	95.052.100	419.934.900	514.487	84.542.090	287.850.924	689.340.471	1.577.234.972
236	Kota Semarang	5.944.496.701	95.052.100	419.934.900	514.487	4.160.072.751	373.255.149	689.340.471	5.738.169.858
237	Kota Surakarta	2.198.836.665	95.052.100	419.934.900	514.487	603.013.651	287.850.924	689.340.471	2.095.706.533
238	Kota Tegal	6.819.660.457	95.052.100	419.934.900	514.487	5.237.980.351	287.850.924	689.340.471	6.730.673.233
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**646.743.230**	-	-	**24.504.069**	**592.843.300**	**12.599.399**	-	**629.946.768**
240	Kab. Bantul	1.305.149.144	-	-	-	592.843.300	6.348.064	689.340.471	1.288.531.835

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241	Kab. Gunung kidul	1.350.869.963	-	-	-	635.231.800	25.149.321	689.340.471	1.349.721.592
242	Kab. Kulon Progo	1.403.124.519	-	-	98.023.251	592.843.300	6.299.766	689.340.471	1.386.506.788
243	Kab. Sleman	1.320.244.366	-	-	-	622.129.900	6.299.174	689.340.471	1.317.769.545
244	Kota Yogyakarta	1.307.644.630	-	-	-	600.550.300	6.299.174	689.340.471	1.296.189.945
245	**Provinsi Jawa Timur**	**1.333.191.195.610**	**1.143.504.841.962**	**163.222.298.748**	**17.755.569.283**	**799.271.107**	**5.442.689.087**	-	**1.330.724.670.187**
246	Kab. Bangkalan	78.634.130.049	61.587.463.806	14.357.905.411	952.460.946	604.001.673	289.438.158	689.340.471	78.480.610.465
247	Kab. Banyuwangi	118.049.205.712	53.785.363.532	5.978.092.816	50.524.136.778	705.217.464	3.034.550.914	689.340.471	114.716.701.975
248	Kab. Blitar	66.180.932.956	53.785.363.532	5.978.092.816	954.359.700	604.001.673	710.780.326	689.340.471	62.721.938.518
249	Kab. Bojonegoro	2.240.462.709.651	2.226.891.439.349	7.613.512.072	952.460.946	3.349.221.773	809.295.916	689.340.471	2.240.305.270.527
250	Kab. Bondowoso	66.473.602.876	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	901.712.788	721.780.834	689.340.471	63.028.751.387
251	Kab. Gresik	93.430.445.792	73.140.658.295	17.575.017.776	952.460.946	604.001.673	318.741.080	689.340.471	93.280.220.241
252	Kab. Jember	67.133.754.771	53.785.363.532	5.978.092.816	1.408.602.557	537.584.973	1.263.026.929	689.340.471	63.662.011.278
253	Kab. Jombang	65.339.800.552	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	61.293.073	399.152.912	689.340.471	61.865.703.750
254	Kab. Kediri	65.442.774.428	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	61.293.073	524.954.064	689.340.471	61.991.504.902
255	Kab. Lamongan	65.991.481.483	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	333.741.473	798.604.155	689.340.471	62.537.603.393
256	Kab. Lumajang	65.957.780.159	53.785.363.532	5.978.092.816	1.614.003.548	61.293.073	511.325.892	689.340.471	62.639.419.332
257	Kab. Madiun	66.088.414.733	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	88.097.734	1.045.475.718	689.340.471	62.538.831.217
258	Kab. Magetan	65.417.374.184	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	270.863.449	290.465.905	689.340.471	61.966.587.119
259	Kab. Malang	65.714.141.924	53.785.363.532	5.978.092.816	1.359.513.732	76.532.434	500.573.392	689.340.471	62.389.416.377
260	Kab. Mojokerto	65.848.032.410	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	628.039.523	356.613.394	689.340.471	62.389.910.682
261	Kab. Nganjuk	65.700.817.348	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	74.044.973	731.889.825	689.340.471	62.211.192.563
262	Kab. Ngawi	65.892.218.296	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	86.448.713	857.624.487	689.340.471	62.349.330.965
263	Kab. Pacitan	65.292.892.678	53.785.363.532	5.978.092.816	1.037.878.445	61.293.073	283.479.979	689.340.471	61.835.448.316
264	Kab. Pamekasan	65.221.400.969	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	61.293.073	292.994.007	689.340.471	61.759.544.845
265	Kab. Pasuruan	65.311.596.371	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	97.430.974	353.013.120	689.340.471	61.855.701.859
266	Kab. Ponorogo	65.675.734.165	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	114.050.832	691.115.277	689.340.471	62.210.423.874
267	Kab. Probolinggo	65.402.458.276	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	61.293.073	466.410.758	689.340.471	61.932.961.596
268	Kab. Sampang	65.204.230.780	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	61.293.073	281.398.124	689.340.471	61.747.948.962
269	Kab. Sidoarjo	79.101.915.500	61.752.931.922	15.225.706.677	952.460.946	61.293.073	280.543.860	689.340.471	78.962.276.949
270	Kab. Situbondo	65.274.581.629	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	62.146.500	336.807.434	689.340.471	61.804.211.699
271	Kab. Sumenep	77.470.073.357	61.928.403.888	13.387.033.838	952.460.946	61.293.073	310.520.909	689.340.471	77.329.053.125
272	Kab. Trenggalek	65.623.976.222	53.785.363.532	5.978.092.816	1.369.468.999	61.293.073	405.369.805	689.340.471	62.288.928.696
273	Kab. Tuban	81.900.117.070	70.391.285.600	8.605.121.832	952.460.946	61.293.073	1.019.291.840	689.340.471	81.718.793.762
274	Kab. Tulungagung	65.582.067.367	53.785.363.532	5.978.092.816	1.361.743.116	61.293.073	353.739.745	689.340.471	62.229.572.753
275	Kota Blitar	65.328.820.845	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	154.092.773	280.543.860	689.340.471	61.839.894.398
276	Kota Kediri	65.188.029.128	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	280.543.860	689.340.471	61.728.723.198
277	Kota Madiun	65.188.161.236	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	280.543.860	689.340.471	61.728.723.198
278	Kota Malang	65.188.029.132	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	280.543.860	689.340.471	61.728.723.198
279	Kota Mojokerto	65.188.029.128	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	280.543.860	689.340.471	61.728.723.198
280	Kota Pasuruan	65.188.029.128	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	280.543.860	689.340.471	61.728.723.198

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281	Kota Probolinggo	65.188.029.128	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	280.543.860	689.340.471	61.728.723.198
282	Kota Surabaya	65.191.275.753	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	42.921.573	283.790.485	689.340.471	61.731.969.823
283	Kota Batu	65.225.789.858	53.785.363.532	5.978.092.816	952.460.946	77.361.720	283.987.440	689.340.471	61.766.606.925
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**81.031.466.759**	-	-	**23.630.898.045**	**285.868.800**	**54.434.340.886**	-	**78.351.107.731**
285	Kab. Bengkayang	5.905.832.132	-	-	4.183.951.706	31.763.200	988.830.858	689.340.471	5.893.886.235
286	Kab. Landak	7.713.178.702	-	-	5.186.464.191	-	1.836.225.669	689.340.471	7.712.030.331
287	Kab. Kapuas Hulu	10.805.483.398	-	-	7.095.257.111	-	2.715.717.879	689.340.471	10.500.315.461
288	Kab. Ketapang	40.873.115.211	-	-	31.991.682.808	-	8.190.943.561	689.340.471	40.871.966.840
289	Kab. Mempawah	7.157.705.805	-	-	5.219.278.703	-	1.247.938.260	689.340.471	7.156.557.434
290	Kab. Sambas	4.628.134.766	-	-	2.912.194.205	-	636.732.292	689.340.471	4.238.266.968
291	Kab. Sanggau	47.672.550.216	-	-	45.442.670.686	-	1.539.390.688	689.340.471	47.671.401.845
292	Kab. Sintang	8.462.398.443	-	-	4.550.434.072	-	3.221.475.529	689.340.471	8.461.250.072
293	Kota Pontianak	5.029.718.428	-	-	2.874.711.581	-	1.075.801.162	689.340.471	4.639.853.214
294	Kota Singkawang	4.908.641.004	-	-	2.911.937.618	-	917.497.701	689.340.471	4.518.775.790
295	Kab. Kayong Utara	5.919.881.089	-	-	4.315.904.805	-	911.214.843	689.340.471	5.916.460.119
296	Kab. Kubu Raya	7.007.759.764	-	-	3.114.440.837	-	2.530.051.133	689.340.471	6.333.832.441
297	Kab. Sekadau	6.301.400.123	-	-	4.688.716.327	-	914.575.019	689.340.471	6.292.631.817
298	Kab. Melawi	6.246.107.820	-	-	3.453.955.099	-	1.650.448.265	689.340.471	5.793.743.835
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**579.439.775.298**	**28.977.850**	**169.980.800**	**167.197.982.693**	-	**385.300.991.344**	-	**552.697.932.687**
300	Kab. Barito Selatan	72.538.858.741	4.457.750	26.142.600	66.501.080.093	-	4.513.233.350	689.340.471	71.734.254.264
301	Kab. Barito Utara	186.471.888.912	57.954.600	339.857.650	168.686.631.905	-	16.617.568.036	689.340.471	186.391.352.662
302	Kab. Kapuas	212.540.821.519	4.457.750	26.142.600	199.006.489.411	-	12.813.242.916	689.340.471	212.539.673.148
303	Kab. Kotawaringin Barat	43.498.988.180	4.457.750	26.142.600	35.560.847.620	-	7.217.051.368	689.340.471	43.497.839.809
304	Kab. Kotawaringin Timur	50.895.411.138	4.457.750	26.142.600	42.012.874.267	-	6.750.375.140	689.340.471	49.483.190.228
305	Kota Palangkaraya	32.682.433.634	4.457.750	26.142.600	24.048.356.099	-	4.210.414.411	689.340.471	28.978.711.331
306	Kab. Barito Timur	72.100.508.440	4.457.750	26.142.600	66.028.583.574	-	4.589.668.610	689.340.471	71.338.193.005
307	Kab. Murung Raya	133.294.906.959	4.457.750	26.142.600	109.293.349.743	-	21.497.022.959	689.340.471	131.510.313.523
308	Kab. Pulang Pisau	35.372.523.226	4.457.750	26.142.600	24.044.982.882	-	6.952.494.954	689.340.471	31.717.418.657
309	Kab. Gunung Mas	56.741.190.142	4.457.750	26.142.600	35.895.349.289	-	18.123.524.371	689.340.471	54.738.814.481
310	Kab. Lamandau	58.536.840.217	4.457.750	26.142.600	46.216.915.589	-	9.737.244.005	689.340.471	56.674.100.415
311	Kab. Sukamara	34.459.058.556	4.457.750	26.142.600	24.316.962.954	-	5.724.843.914	689.340.471	30.761.747.689
312	Kab. Katingan	69.489.525.697	4.457.750	26.142.600	52.356.275.937	-	16.111.690.169	689.340.471	69.187.906.927
313	Kab. Seruyan	63.649.259.630	4.457.750	26.142.600	35.388.977.311	-	27.539.193.127	689.340.471	63.648.111.259
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**1.054.171.254.411**	**4.298.901.750**	-	**945.634.689.805**	-	**5.887.703.725**	-	**955.821.295.280**
315	Kab. Banjar	315.613.503.237	716.483.900	-	313.967.360.506	-	149.571.162	689.340.471	315.522.756.039
316	Kab. Barito Kuala	174.323.394.345	716.483.900	-	156.398.408.133	-	126.375.749	689.340.471	157.930.608.253
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	301.108.300.589	716.483.900	-	299.490.086.087	-	121.642.933	689.340.471	301.017.553.391
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	210.384.038.326	716.483.900	-	208.766.091.892	-	121.374.865	689.340.471	210.293.291.128
319	Kab. Hulu Sungai Utara	174.302.736.249	716.483.900	-	156.445.680.316	-	58.445.470	689.340.471	157.909.950.157
320	Kab. Kotabaru	289.108.026.412	716.483.900	-	287.401.517.074	-	208.382.852	689.340.471	289.015.724.297

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	Kab. Tabalong	434.983.126.150	10.367.092.766	-	423.149.878.204	-	775.666.338	689.340.471	434.981.977.779
322	Kab. Tanah Laut	672.202.083.087	716.483.900	-	670.457.744.903	-	247.766.615	689.340.471	672.111.335.889
323	Kab. Tapin	452.788.451.636	716.483.900	-	451.221.312.180	-	70.567.887	689.340.471	452.697.704.438
324	Kota Banjarbaru	174.362.072.022	716.483.900	-	156.441.345.963	-	122.108.756	689.340.471	157.969.279.090
325	Kota Banjarmasin	174.350.862.817	716.483.900	-	156.398.408.133	-	153.844.221	689.340.471	157.958.076.725
326	Kab. Balangan	776.856.825.162	2.677.046.409	-	773.350.364.213	-	138.925.698	689.340.471	776.855.676.791
327	Kab. Tanah Bumbu	779.062.974.411	716.483.900	-	776.900.300.938	-	666.101.904	689.340.471	778.972.227.213
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**3.359.815.995.707**	**365.500.867.101**	**950.166.993.344**	**1.529.206.339.390**	-	**319.315.416.041**	-	**3.164.189.615.876**
329	Kab. Berau	1.284.162.466.024	59.321.811.958	134.027.098.254	1.035.846.368.239	-	28.576.338.523	689.340.471	1.258.460.957.445
330	Kab. Kutai Kartanegara	2.846.056.444.937	397.091.681.782	832.461.601.036	1.599.776.830.287	-	15.023.589.135	689.340.471	2.845.043.042.711
331	Kab. Kutai Barat	1.126.418.985.927	59.321.811.958	134.027.098.254	885.347.033.100	-	19.681.314.985	689.340.471	1.099.066.598.768
332	Kab. Kutai Timur	2.082.903.274.916	79.086.786.985	198.275.898.195	1.775.907.819.689	-	25.333.530.849	689.340.471	2.079.293.376.189
333	Kab. Mahakam Ulu	712.995.151.041	59.321.811.958	134.027.098.254	479.776.571.797	-	13.378.019.499	689.340.471	687.192.841.979
334	Kab. Paser	1.046.148.893.187	59.321.811.958	134.027.098.254	817.221.131.403	-	8.899.520.529	689.340.471	1.020.158.902.615
335	Kota Balikpapan	607.414.279.663	59.321.811.958	134.027.098.254	337.305.908.295	-	6.894.259.464	689.340.471	538.238.418.442
336	Kota Bontang	674.537.983.001	84.648.263.832	202.253.338.229	337.517.945.089	-	5.956.029.845	689.340.471	631.064.917.466
337	Kota Samarinda	869.870.869.150	81.336.861.377	200.382.019.993	580.101.449.021	-	6.902.026.802	689.340.471	869.411.697.664
338	Kab. Penajam Paser Utara	798.123.394.815	88.945.487.612	222.302.976.023	476.792.962.790	-	9.104.796.079	689.340.471	797.835.562.975
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**341.960.445.748**	**13.689.145.250**	**1.724.395.200**	**128.854.594.701**	-	**178.956.014.132**	-	**323.224.149.283**
340	Kab. Bulungan	147.734.644.877	23.127.920.490	2.694.348.076	106.743.100.051	-	13.709.473.318	689.340.471	146.964.182.406
341	Kab. Malinau	221.235.504.097	6.844.572.900	862.197.600	184.760.329.983	-	17.110.269.936	689.340.471	210.266.710.890
342	Kab. Nunukan	159.666.423.826	16.270.499.351	1.368.739.900	130.030.390.244	-	10.879.415.475	689.340.471	159.238.385.441
343	Kab. Tana Tidung	145.644.658.421	6.844.572.900	862.197.600	126.326.762.010	-	9.664.178.739	689.340.471	144.387.051.720
344	Kota Tarakan	106.247.662.179	26.634.122.383	2.254.648.025	63.705.926.903	-	7.844.109.989	689.340.471	101.128.147.771
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**43.066.821.550**	-	-	**41.077.184.054**	-	**1.069.154.161**	-	**42.146.338.215**
346	Kab. Bolaang Mongondow	13.044.134.966	-	-	12.339.573.743	-	14.072.381	689.340.471	13.042.986.595
347	Kab. Minahasa	6.916.093.825	-	-	5.743.327.838	339.015.794	11.769.537	689.340.471	6.783.453.640
348	Kab. Sangihe	7.370.371.774	-	-	6.536.610.516	-	11.769.537	689.340.471	7.237.720.524
349	Kota Bitung	64.584.368.986	-	-	63.882.110.607	-	11.769.537	689.340.471	64.583.220.615
350	Kota Manado	6.629.132.523	-	-	5.746.855.634	48.526.597	11.769.537	689.340.471	6.496.492.239
351	Kab. Kepulauan Talaud	6.609.174.447	-	-	5.775.407.304	-	11.769.537	689.340.471	6.476.517.312
352	Kab. Minahasa Selatan	9.049.746.182	-	-	8.306.090.239	47.525.948	5.641.153	689.340.471	9.048.597.811
353	Kab. Minahasa Tenggara	6.708.548.496	-	-	5.971.239.934	45.877.324	942.396	689.340.471	6.707.400.125
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	6.577.078.031	-	-	5.743.327.838	-	11.769.537	689.340.471	6.444.437.846
355	Kota Kotamobagu	6.914.837.074	-	-	6.221.028.495	-	3.319.737	689.340.471	6.913.688.703
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.440.575.792	-	-	5.746.410.575	-	3.676.375	689.340.471	6.439.427.421
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	18.737.416.681	-	-	17.945.536.157	-	101.391.682	689.340.471	18.736.268.310
358	Kota Tomohon	6.892.426.342	-	-	5.743.327.838	315.348.311	11.769.537	689.340.471	6.759.786.157
359	Kab. Minahasa Utara	17.209.049.239	-	-	16.442.603.730	64.187.130	11.769.537	689.340.471	17.207.900.868
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	7.165.701.154	-	-	6.426.682.878	-	48.529.434	689.340.471	7.164.552.783

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361	**Provinsi Gorontalo**	**4.524.046.436**	-	-	**453.807.734**	-	**1.857.589.818**	-	**2.311.397.552**
362	Kab. Boalemo	820.968.505	-	-	3.789.826	-	123.742.348	689.340.471	816.872.645
363	Kab. Gorontalo	1.247.194.337	-	-	363.759.001	-	192.935.990	689.340.471	1.246.035.462
364	Kota Gorontalo	806.411.673	-	-	459.931	-	111.641.050	689.340.471	801.441.452
365	Kab. Pohuwato	1.649.413.518	-	-	570.891.261	-	388.033.415	689.340.471	1.648.265.147
366	Kab. Gorontalo Utara	849.285.197	-	-	98.176.011	-	20.501.332	689.340.471	808.017.814
367	Kab. Bone Bolango	1.657.023.666	-	-	958.375.591	-	3.531.413	689.340.471	1.651.247.475
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**102.893.018.450**	**6.581.153.150**	**53.577.250.018**	**28.827.845.863**	-	**9.137.744.938**	-	**98.123.993.969**
369	Kab. Banggai	136.633.604.199	21.759.808.337	107.154.499.001	5.657.844.055	-	1.370.963.964	689.340.471	136.632.455.828
370	Kab. Banggai Laut	16.002.410.338	1.096.858.950	8.929.541.837	4.441.812.974	-	141.438.341	689.340.471	15.298.992.573
371	Kab. Banggai Kepulauan	15.955.496.161	1.096.858.950	8.929.541.837	4.429.904.427	-	106.312.559	689.340.471	15.251.958.244
372	Kab. Buol	17.165.699.760	1.096.858.950	8.929.541.837	6.129.351.276	-	66.201.771	689.340.471	16.911.294.305
373	Kab. Tolitoli	17.893.381.114	1.096.858.950	8.929.541.837	6.541.811.549	-	342.511.201	689.340.471	17.600.064.008
374	Kab. Donggala	17.427.888.681	1.096.858.950	8.929.541.837	6.417.393.101	-	64.992.384	689.340.471	17.198.126.743
375	Kab. Morowali	70.839.772.197	1.096.858.950	8.929.541.837	59.390.518.952	-	398.496.154	689.340.471	70.504.756.364
376	Kab. Morowali Utara	36.996.724.666	1.096.858.950	8.929.541.837	25.450.265.579	-	605.828.635	689.340.471	36.771.835.472
377	Kab. Poso	18.324.103.559	1.096.858.950	8.929.541.837	6.059.876.453	-	1.316.564.768	689.340.471	18.092.182.479
378	Kota Palu	16.397.415.395	1.096.858.950	8.929.541.837	4.776.545.497	-	145.490.614	689.340.471	15.637.777.369
379	Kab. Parigi Moutong	19.169.846.444	1.096.858.950	8.929.541.837	7.967.232.038	-	259.911.155	689.340.471	18.942.884.451
380	Kab. Sigi	16.202.830.976	1.096.858.950	8.929.541.837	4.603.773.999	-	187.237.559	689.340.471	15.506.752.816
381	Kab. Tojo Una Una	22.251.542.534	1.096.858.950	8.929.541.837	6.386.316.800	-	4.924.595.282	689.340.471	22.026.653.340
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**61.186.493.713**	**1.420.590**	**17.316.834.150**	**38.360.899.247**	-	**2.272.606.638**	-	**57.951.760.625**
383	Kab. Bantaeng	5.747.849.290	123.530	1.505.812.000	3.258.653.040	-	23.976.889	689.340.471	5.477.905.930
384	Kab. Barru	6.355.503.582	123.530	1.505.812.000	4.130.031.368	-	29.022.016	689.340.471	6.354.329.385
385	Kab. Bone	6.529.649.724	123.530	1.505.812.000	4.284.672.496	-	46.031.808	689.340.471	6.525.980.305
386	Kab. Bulukumba	5.011.853.332	123.530	1.505.812.000	2.523.891.310	-	23.027.266	689.340.471	4.742.194.577
387	Kab. Enrekang	5.869.770.547	123.530	1.505.812.000	3.376.099.553	-	28.278.437	689.340.471	5.599.653.991
388	Kab. Gowa	5.889.842.685	123.530	1.505.812.000	3.258.653.040	-	160.605.299	689.340.471	5.614.534.340
389	Kab. Jeneponto	5.747.169.404	123.530	1.505.812.000	3.258.653.040	-	23.513.344	689.340.471	5.477.442.385
390	Kab. Luwu	7.184.604.713	123.530	1.505.812.000	4.962.749.641	-	24.216.308	689.340.471	7.182.241.950
391	Kab. Luwu Utara	6.819.780.991	123.530	1.505.812.000	4.248.645.474	-	24.925.487	689.340.471	6.468.846.962
392	Kab. Maros	5.767.233.244	123.530	1.505.812.000	3.267.476.063	-	34.816.869	689.340.471	5.497.568.933
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	6.501.928.226	123.530	1.505.812.000	4.279.132.998	-	17.665.203	689.340.471	6.492.074.202
394	Kab. Pinrang	5.749.863.094	123.530	1.505.812.000	3.258.653.040	-	26.398.441	689.340.471	5.480.327.482
395	Kab. Kepulauan Selayar	5.813.715.291	123.530	1.505.812.000	3.325.730.339	-	23.027.266	689.340.471	5.544.033.606
396	Kab. Sidenreng Rappang	6.117.583.783	123.530	1.505.812.000	3.635.046.829	-	17.118.599	689.340.471	5.847.441.429
397	Kab. Sinjai	6.385.018.406	123.530	1.505.812.000	4.157.268.565	-	29.495.436	689.340.471	6.382.040.002
398	Kab. Soppeng	6.372.137.006	123.530	1.505.812.000	4.124.750.111	-	50.603.909	689.340.471	6.370.630.021
399	Kab. Takalar	5.746.625.479	123.530	1.505.812.000	3.258.663.624	-	23.027.266	689.340.471	5.476.966.891
400	Kab. Tana Toraja	6.429.913.722	123.530	1.505.812.000	4.197.910.413	-	31.602.107	689.340.471	6.424.788.521

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	Kab. Wajo	38.907.420.236	4.742.940	34.633.668.850	3.284.990.434	-	25.018.111	689.340.471	38.637.760.806
402	Kota Parepare	5.746.614.194	123.530	1.505.812.000	3.258.653.040	-	23.027.266	689.340.471	5.476.956.307
403	Kab. Toraja Utara	6.385.104.615	123.530	1.505.812.000	4.163.033.141	-	24.212.456	689.340.471	6.382.521.598
404	Kota Makassar	5.875.842.960	123.530	1.505.812.000	3.258.653.040	-	153.463.131	689.340.471	5.607.392.172
405	Kota Palopo	5.755.778.267	123.530	1.505.812.000	3.267.815.770	-	23.027.266	689.340.471	5.486.119.037
406	Kab. Luwu Timur	105.352.110.772	123.530	1.505.812.000	102.891.542.204	-	236.385.616	689.340.471	105.323.203.821
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**509.163.069**	-	-	**72.152.305**	-	**360.821.246**	-	**432.973.551**
408	Kab. Majene	711.357.092	-	-	2.757.788	-	14.957.025	689.340.471	707.055.284
409	Kab. Mamuju	872.186.484	-	-	162.465.292	-	16.712.513	689.340.471	868.518.276
410	Kab. Mamuju Tengah	781.288.669	-	-	20.225.945	-	53.155.806	689.340.471	762.722.222
411	Kab. Polewali Mandar	748.943.481	-	-	37.293.057	-	16.277.776	689.340.471	742.911.304
412	Kab. Mamasa	737.569.773	-	-	20.294.914	-	20.620.203	689.340.471	730.255.588
413	Kab. Pasangkayu	762.744.880	-	-	45.600.598	-	26.642.329	689.340.471	761.583.398
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**119.910.397.545**	-	-	**97.269.587.690**	-	**6.830.937.076**	-	**104.100.524.766**
415	Kab. Buton	20.268.057.332	-	-	19.511.269.267	-	59.808.814	689.340.471	20.260.418.552
416	Kab. Konawe	22.624.688.765	-	-	21.717.189.433	-	196.397.386	689.340.471	22.602.927.290
417	Kab. Konawe Kepulauan	19.552.958.788	-	-	18.805.656.820	-	55.236.050	689.340.471	19.550.233.341
418	Kab. Kolaka	154.552.706.697	-	-	151.752.846.831	-	2.102.449.851	689.340.471	154.544.637.153
419	Kab. Kolaka Timur	14.662.769.244	-	-	11.832.951.035	-	180.903.067	689.340.471	12.703.194.573
420	Kab. Muna	14.679.983.323	-	-	11.986.215.593	-	37.522.993	689.340.471	12.713.079.057
421	Kota Kendari	18.859.578.458	-	-	18.110.492.051	-	58.597.565	689.340.471	18.858.430.087
422	Kota Bau-bau	18.945.127.210	-	-	18.190.592.951	-	62.570.630	689.340.471	18.942.504.052
423	Kab. Konawe Selatan	56.958.710.035	-	-	56.206.611.575	-	60.612.641	689.340.471	56.956.564.687
424	Kab. Bombana	50.634.633.493	-	-	49.878.673.534	-	65.471.117	689.340.471	50.633.485.122
425	Kab. Konawe Utara	86.578.819.793	-	-	85.713.566.339	-	174.764.612	689.340.471	86.577.671.422
426	Kab. Buton Utara	19.014.891.871	-	-	18.137.676.076	-	186.726.953	689.340.471	19.013.743.500
427	Kab. Wakatobi	14.530.669.706	-	-	11.828.645.482	-	51.718.782	689.340.471	12.569.704.735
428	Kab. Kolaka Utara	23.128.070.545	-	-	22.368.019.460	-	55.479.963	689.340.471	23.112.839.894
429	Kab. Muna Barat	14.530.990.344	-	-	11.829.547.462	-	51.112.897	689.340.471	12.570.000.830
430	Kab. Buton Tengah	14.578.724.935	-	-	11.887.135.800	-	41.259.150	689.340.471	12.617.735.421
431	Kab. Buton Selatan	18.972.142.790	-	-	18.211.830.915	-	69.823.033	689.340.471	18.970.994.419
432	**Provinsi Bali**	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
434	Kab. Bangli	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
435	Kab. Buleleng	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
436	Kab. Gianyar	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
437	Kab. Jembrana	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
438	Kab. Karangasem	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
439	Kab. Klungkung	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
440	Kab. Tabanan	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	Kota Denpasar	690.488.842	-	-	-	-	-	689.340.471	689.340.471
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**61.103.327.599**	**-**	**-**	**59.779.369.300**	**-**	**698.261.100**	**-**	**60.477.630.400**
443	Kab. Bima	20.605.036.078	-	-	19.883.183.548	-	22.517.128	689.340.471	20.595.041.147
444	Kab. Dompu	20.663.895.288	-	-	19.811.569.106	-	122.862.053	689.340.471	20.623.771.630
445	Kab. Lombok Barat	13.821.977.708	-	-	13.200.925.944	-	12.369.600	590.155.800	13.803.451.344
446	Kab. Lombok Tengah	13.670.986.403	-	-	13.060.992.000	-	-	590.155.800	13.651.147.800
447	Kab. Lombok Timur	13.720.739.999	-	-	13.116.119.770	-	-	590.155.800	13.706.275.570
448	Kab. Sumbawa	15.138.494.865	-	-	14.412.309.066	-	67.086.000	590.155.800	15.069.550.866
449	Kota Mataram	13.679.976.092	-	-	13.060.992.000	-	10.250.400	590.155.800	13.661.398.200
450	Kab. Lombok Utara	13.679.959.217	-	-	13.060.992.000	-	10.250.400	590.155.800	13.661.398.200
451	Kota Bima	20.193.537.685	-	-	19.460.001.494	-	25.634.703	689.340.471	20.174.976.668
452	Kab. Sumbawa Barat	120.908.110.106	-	-	120.220.813.426	-	-	590.155.800	120.810.969.226
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.902.712.357**	**-**	**-**	**1.416.263.817**	**458.988.958**	**26.550.402**	**-**	**1.901.803.177**
454	Kab. Alor	841.813.445	-	-	28.146.517	116.140.349	7.037.737	689.340.471	840.665.074
455	Kab. Belu	2.002.531.252	-	-	1.265.839.534	43.713.134	2.489.742	689.340.471	2.001.382.881
456	Kab. Ende	929.944.754	-	-	49.875.799	168.376.396	21.120.449	689.340.471	928.713.115
457	Kab. Flores Timur	811.282.470	-	-	11.842.668	108.684.002	184.632	689.340.471	810.051.773
458	Kab. Kupang	1.775.627.270	-	-	1.038.612.832	43.713.134	2.812.462	689.340.471	1.774.478.899
459	Kab. Lembata	1.130.584.197	-	-	11.842.668	425.636.391	2.533.970	689.340.471	1.129.353.500
460	Kab. Malaka	752.116.453	-	-	15.361.255	43.713.134	2.466.211	689.340.471	750.881.071
461	Kab. Manggarai	1.550.348.423	-	-	135.806.772	721.518.839	2.533.970	689.340.471	1.549.200.052
462	Kab. Ngada	921.966.223	-	-	162.139.694	66.720.953	2.533.970	689.340.471	920.735.088
463	Kab. Sikka	775.734.110	-	-	11.842.668	43.713.134	29.607.140	689.340.471	774.503.413
464	Kab. Sumba Barat	773.115.398	-	-	36.291.305	43.713.134	2.533.970	689.340.471	771.878.880
465	Kab. Sumba Timur	1.457.561.028	-	-	720.732.378	43.713.134	2.533.970	689.340.471	1.456.319.953
466	Kab. Timor Tengah Selatan	2.585.742.487	-	-	1.848.904.692	43.713.134	2.635.819	689.340.471	2.584.594.116
467	Kab. Timor Tengah Utara	1.769.650.193	-	-	1.032.914.247	43.713.134	2.533.970	689.340.471	1.768.501.822
468	Kota Kupang	748.660.940	-	-	11.842.668	43.713.134	2.533.970	689.340.471	747.430.243
469	Kab. Rote Ndao	762.463.178	-	-	25.727.232	43.713.134	2.533.970	689.340.471	761.314.807
470	Kab. Nagekeo	808.274.837	-	-	71.538.891	43.713.134	2.533.970	689.340.471	807.126.466
471	Kab. Sumba Tengah	784.642.821	-	-	47.815.192	43.713.134	2.533.970	689.340.471	783.402.767
472	Kab. Sumba Barat Daya	789.505.699	-	-	52.669.685	43.713.134	2.533.970	689.340.471	788.257.260
473	Kab. Manggarai Timur	820.087.574	-	-	83.351.628	43.713.134	2.533.970	689.340.471	818.939.203
474	Kab. Sabu Raijua	990.665.422	-	-	253.929.476	43.713.134	2.533.970	689.340.471	989.517.051
475	Kab. Manggarai Barat	748.846.518	-	-	12.110.572	43.713.134	2.533.970	689.340.471	747.698.147
476	**Provinsi Maluku**	**54.610.220.628**	**93.069.900**	**-**	**2.209.341.866**	**-**	**49.868.271.022**	**-**	**52.170.682.788**
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	3.698.197.560	18.614.200	-	404.916.104	-	2.283.738.634	689.340.471	3.396.609.409
478	Kab. Maluku Tengah	3.483.931.718	18.614.200	-	406.090.519	-	2.110.212.617	689.340.471	3.224.257.807
479	Kab. Maluku Tenggara	1.735.505.260	18.614.200	-	404.916.104	-	418.560.205	689.340.471	1.531.430.980
480	Kab. Buru	3.461.622.825	18.614.200	-	404.916.104	-	2.288.789.153	689.340.471	3.401.659.928

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
481	Kota Ambon	2.332.433.337	18.614.200	-	404.916.104	-	1.014.527.018	689.340.471	2.127.397.793
482	Kab. Seram Bagian Barat	4.942.768.351	18.614.200	-	631.859.448	-	3.316.253.903	689.340.471	4.656.068.022
483	Kab. Seram Bagian Timur	3.078.154.256	196.229.310	-	405.956.894	-	1.393.040.640	689.340.471	2.684.567.315
484	Kab. Maluku Barat Daya	8.272.025.743	18.614.200	-	6.403.919.783	-	1.014.528.274	689.340.471	8.126.402.728
485	Kab. Buru Selatan	5.118.093.457	18.614.200	-	470.652.357	-	2.718.960.812	689.340.471	3.897.567.840
486	Kab. Kepulauan Aru	2.401.817.560	18.614.200	-	404.916.104	-	1.049.641.213	689.340.471	2.162.511.988
487	Kota Tual	2.331.472.072	18.614.200	-	404.916.104	-	1.014.527.018	689.340.471	2.127.397.793
488	**Provinsi Maluku Utara**	**91.842.918.278**	-	-	**53.252.372.304**	-	**30.883.995.660**	-	**84.136.367.964**
489	Kab. Halmahera Tengah	57.617.561.097	-	-	55.221.785.334	-	1.705.286.921	689.340.471	57.616.412.726
490	Kab. Halmahera Barat	17.267.016.155	-	-	15.942.406.830	-	591.055.249	689.340.471	17.222.802.550
491	Kota Ternate	12.912.087.216	-	-	10.448.608.495	-	60.467.116	689.340.471	11.198.416.082
492	Kab. Halmahera Timur	51.537.455.989	-	-	47.684.294.249	-	3.103.411.381	689.340.471	51.477.046.101
493	Kota Tidore Kepulauan	13.203.753.198	-	-	10.470.531.180	-	327.678.947	689.340.471	11.487.550.598
494	Kab. Kepulauan Sula	26.868.433.441	-	-	24.526.699.800	-	1.469.329.811	689.340.471	26.685.370.082
495	Kab. Pulau Morotai	19.809.840.701	-	-	16.875.025.685	-	2.193.853.435	689.340.471	19.758.219.591
496	Kab. Pulau Taliabu	41.619.753.975	-	-	40.354.873.024	-	574.392.109	689.340.471	41.618.605.604
497	Kab. Halmahera Selatan	70.027.579.445	-	-	65.591.927.280	257.505.884	3.305.859.525	689.340.471	69.844.633.160
498	Kab. Halmahera Utara	25.581.924.941	-	-	24.488.666.138	-	338.635.447	689.340.471	25.516.642.056
499	**Provinsi Papua**	**535.195.003.378**	-	-	**379.551.368.827**	-	**117.479.967.611**	-	**497.031.336.438**
500	Kab. Yalimo	31.172.137.401	-	-	26.728.983.002	-	1.026.707.440	689.340.471	28.445.030.913
501	Kab. Lanny Jaya	31.172.137.401	-	-	26.728.983.002	-	1.026.707.440	689.340.471	28.445.030.913
502	Kab. Biak Numfor	31.147.853.938	-	-	26.728.983.002	-	999.895.059	693.017.760	28.421.895.821
503	Kab. Jayapura	38.534.597.687	-	-	36.087.107.008	-	1.754.472.919	693.017.760	38.534.597.687
504	Kab. Jayawijaya	37.360.919.524	-	-	35.639.481.843	-	1.028.419.921	693.017.760	37.360.919.524
505	Kab. Merauke	40.539.350.218	-	-	26.728.983.002	-	10.391.391.339	693.017.760	37.813.392.101
506	Kab. Mimika	1.004.677.366.502	-	-	998.378.923.978	-	5.605.424.764	693.017.760	1.004.677.366.502
507	Kab. Nabire	48.359.197.490	-	-	39.005.898.056	-	8.662.810.592	689.340.471	48.358.049.119
508	Kab. Paniai	41.013.113.417	-	-	39.295.917.135	-	1.026.707.440	689.340.471	41.011.965.046
509	Kab. Puncak Jaya	37.713.256.014	-	-	35.995.113.506	-	1.027.653.666	689.340.471	37.712.107.643
510	Kab. Kepulauan Yapen	31.172.157.781	-	-	26.728.983.002	-	1.026.716.189	689.340.471	28.445.039.662
511	Kota Jayapura	31.182.547.850	-	-	26.728.983.002	-	1.034.588.971	693.017.760	28.456.589.733
512	Kab. Sarmi	46.067.353.561	-	-	40.426.918.286	-	4.949.946.433	689.340.471	46.066.205.190
513	Kab. Keerom	48.375.067.144	-	-	38.975.848.473	-	8.708.729.829	689.340.471	48.373.918.773
514	Kab. Yahukimo	31.538.627.323	-	-	27.095.347.808	-	1.026.727.123	689.340.471	28.811.415.402
515	Kab. Pegunungan Bintang	38.882.281.023	-	-	37.165.084.741	-	1.026.707.440	689.340.471	38.881.132.652
516	Kab. Tolikara	38.267.607.068	-	-	36.550.410.786	-	1.026.707.440	689.340.471	38.266.458.697
517	Kab. Boven Digoel	35.303.807.747	-	-	26.777.383.529	-	5.109.971.021	689.340.471	32.576.695.021
518	Kab. Mappi	31.486.551.590	-	-	26.728.983.002	-	1.341.121.629	689.340.471	28.759.445.102
519	Kab. Asmat	31.656.468.007	-	-	26.728.983.002	-	1.511.038.046	689.340.471	28.929.361.519
520	Kab. Waropen	32.007.246.200	-	-	27.855.005.830	-	735.751.710	689.340.471	29.280.098.011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521	Kab. Mamberamo Raya	33.094.341.451	-	-	28.915.426.703	-	762.319.210	689.340.471	30.367.086.384
522	Kab. Mamberamo Tengah	31.172.137.401	-	-	26.728.983.002	-	1.026.707.440	689.340.471	28.445.030.913
523	Kab. Nduga	31.172.278.291	-	-	26.728.983.002	-	1.026.848.330	689.340.471	28.445.171.803
524	Kab. Dogiyai	31.172.137.401	-	-	26.728.983.002	-	1.026.707.440	689.340.471	28.445.030.913
525	Kab. Intan Jaya	37.175.321.740	-	-	35.458.125.458	-	1.026.707.440	689.340.471	37.174.173.369
526	Kab. Puncak	31.172.137.401	-	-	26.728.983.002	-	1.026.707.440	689.340.471	28.445.030.913
527	Kab. Deiyai	31.172.137.401	-	-	26.728.983.002	-	1.026.707.440	689.340.471	28.445.030.913
528	Kab. Supiori	31.194.968.640	-	-	26.750.423.467	-	1.028.097.831	689.340.471	28.467.861.769
529	**Provinsi Papua Barat**	**5.306.592.084.522**	**447.744.246.922**	**4.622.375.708.065**	**3.789.262.601**	**-**	**94.306.041.343**	**-**	**5.168.215.258.931**
530	Kab. Sorong	117.342.644.313	30.205.424.586	81.361.584.641	499.889.128	-	3.721.356.888	689.340.471	116.477.595.714
531	Kab. Manokwari	60.307.926.336	3.694.619.217	39.662.681.609	2.023.826.745	-	2.032.114.880	689.340.471	48.102.582.922
532	Kab. Manokwari Selatan	60.282.888.644	3.694.619.217	39.662.681.609	140.040.325	-	4.069.130.930	689.340.471	48.255.812.552
533	Kab. Fak fak	64.313.728.256	3.694.619.217	39.662.681.609	1.402.383.840	-	5.198.716.729	689.340.471	50.647.741.866
534	Kota Sorong	58.490.369.675	3.694.619.217	39.662.681.609	248.672.937	-	1.965.321.572	689.340.471	46.260.635.806
535	Kab. Pegunungan Arfak	58.335.537.436	3.694.619.217	39.662.681.598	140.040.325	-	1.931.217.433	689.340.471	46.117.899.044
536	Kab. Sorong Selatan	59.706.771.114	3.694.619.217	39.662.681.609	223.905.985	-	3.151.964.049	689.340.471	47.422.511.331
537	Kab. Raja Ampat	92.827.963.193	6.376.756.329	75.352.138.281	7.885.243.065	-	2.008.104.760	689.340.471	92.311.582.906
538	Kab. Teluk Bintuni	948.759.452.509	40.207.419.631	898.216.208.510	1.213.943.730	-	5.907.224.738	689.340.471	946.234.137.080
539	Kab. Teluk Wondama	64.440.160.819	3.694.619.217	39.662.681.609	1.075.889.665	-	6.702.312.778	689.340.471	51.824.843.740
540	Kab. Tambrauw	58.418.901.411	3.694.619.217	39.662.681.609	227.137.273	-	1.907.418.579	689.340.471	46.181.197.149
541	Kab. Maybrat	62.047.860.397	3.694.619.217	39.662.681.609	225.641.821	-	5.820.708.504	689.340.471	50.092.991.622
542	Kab. Kaimana	69.824.803.019	3.694.619.217	39.662.681.609	2.300.987.288	-	9.878.410.747	689.340.471	56.226.039.332
JUMLAH		**63.771.975.786.654**	**15.219.315.833.056**	**16.739.397.376.741**	**25.884.279.134.431**	**1.372.588.054.173**	**2.119.085.885.757**	**350.202.062.612**	**61.684.868.346.770**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**8.066.363.231**	**7.883.283.947**
2	Kab. Aceh Barat	366.652.362	358.330.589
3	Kab. Aceh Besar	819.107.293	790.361.278
4	Kab. Aceh Selatan	364.571.919	358.330.589
5	Kab. Aceh Singkil	358.139.933	179.102.433
6	Kab. Aceh Tengah	723.601.401	707.242.357
7	Kab. Aceh Tenggara	358.204.866	268.686.116
8	Kab. Aceh Timur	460.136.536	449.410.895
9	Kab. Aceh Utara	545.698.496	536.782.589
10	Kab. Bireuen	363.224.101	361.043.589
11	Kab. Pidie	906.841.062	889.272.903
12	Kab. Simeulue	358.330.589	358.330.589
13	Kota Banda Aceh	364.571.919	358.330.589
14	Kota Sabang	364.571.919	358.330.589
15	Kota Langsa	366.652.362	358.330.589
16	Kota Lhokseumawe	364.571.919	358.330.589
17	Kab. Nagan Raya	362.235.886	358.075.000
18	Kab. Aceh Jaya	366.652.362	268.811.839
19	Kab. Pidie Jaya	1.085.249.366	1.068.514.118
20	Kab. Aceh Barat Daya	362.491.475	358.330.589
21	Kab. Gayo Lues	7.061.599.756	6.919.784.512
22	Kab. Aceh Tamiang	366.652.362	358.330.589
23	Kab. Bener Meriah	1.713.408.645	1.655.287.732
24	Kota Subulussalam	366.652.362	358.330.589
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**5.810.186.420**	**5.606.284.523**
26	Kab. Asahan	183.743.429	175.247.522
27	Kab. Dairi	462.777.798	422.627.067
28	Kab. Deli Serdang	654.866.026	577.611.991
29	Kab. Karo	653.678.091	641.096.330
30	Kab. Labuhanbatu	177.321.119	87.674.142
31	Kab. Langkat	183.693.049	175.197.142
32	Kab. Mandailing Natal	187.411.384	176.194.875
33	Kab. Nias	181.619.452	175.247.522
34	Kab. Simalungun	675.371.049	666.875.142
35	Kab. Tapanuli Selatan	181.619.452	175.247.522
36	Kab. Tapanuli Tengah	183.743.429	175.247.522
37	Kab. Tapanuli Utara	1.230.080.858	1.220.174.244
38	Kab. Toba Samosir	181.619.452	175.247.522
39	Kota Binjai	179.495.476	87.724.522
40	Kota Medan	362.419.555	351.942.167
41	Kota Pematang Siantar	4.333.791.613	4.263.758.638
42	Kota Sibolga	183.693.049	175.197.142
43	Kota Tanjung Balai	183.693.049	175.197.142
44	Kab. Batu Bara	183.743.429	175.247.522
45	Kab. Labuhanbatu Utara	181.619.452	175.247.522
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	181.619.452	175.247.522
47	Kab. Padang Lawas Utara	181.619.452	175.247.522

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
48	Kab. Padang Lawas	258.454.429	249.958.522
49	Kab. Nias Utara	181.619.452	175.247.522
50	Kab. Nias Barat	177.221.174	87.574.197
51	Kota Tebing Tinggi	183.693.049	175.197.142
52	Kota Padang Sidempuan	181.469.127	175.097.197
53	Kab. Pakpak Bharat	202.284.689	191.124.169
54	Kab. Nias Selatan	183.693.049	175.197.142
55	Kab. Humbang Hasundutan	483.126.897	463.929.661
56	Kab. Serdang Bedagai	183.743.429	175.247.522
57	Kab. Samosir	181.619.452	175.247.522
58	Kota Gunungsitoli	181.569.072	175.197.142
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**3.913.261.585**	**3.783.834.004**
60	Kab. Limapuluh Kota	2.632.771.720	2.547.885.996
61	Kab. Agam	1.042.727.470	1.015.548.418
62	Kab. Kepulauan Mentawai	217.291.095	210.100.651
63	Kab. Padang Pariaman	217.403.056	210.212.612
64	Kab. Pasaman	228.182.507	210.536.465
65	Kab. Pesisir Selatan	215.605.445	210.212.612
66	Kab. Sijunjung	217.403.056	210.212.612
67	Kab. Solok	664.224.168	646.607.702
68	Kab. Tanah Datar	1.087.524.590	1.056.024.908
69	Kota Bukit Tinggi	217.291.095	210.100.651
70	Kota Padang Panjang	213.807.833	210.212.611
71	Kota Padang	217.403.056	210.212.612
72	Kota Payakumbuh	229.743.303	210.589.252
73	Kota Sawahlunto	636.923.390	619.191.592
74	Kota Solok	217.403.055	210.212.611
75	Kota Pariaman	217.403.055	210.212.611
76	Kab. Pasaman Barat	212.010.223	210.212.612
77	Kab. Dharmasraya	217.403.056	210.212.612
78	Kab. Solok Selatan	213.807.834	210.212.612
79	**Provinsi Riau**	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1.796.701.760**	**1.742.514.436**
93	Kab. Bintan	294.717.624	290.202.000
94	Kab. Natuna	299.449.487	290.418.240

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
95	Kab. Karimun	299.449.487	290.418.240
96	Kota Batam	2.395.022.162	2.322.772.280
97	Kab. Kepulauan Anambas	299.449.487	290.418.240
98	Kota Tanjung Pinang	299.449.487	290.418.240
99	Kab. Lingga	299.449.487	290.418.240
100	**Provinsi Jambi**	**2.686.967.807**	**2.627.333.491**
101	Kab. Batang hari	270.562.670	262.611.425
102	Kab. Bungo	266.527.320	262.551.697
103	Kab. Kerinci	2.343.168.240	2.255.599.396
104	Kab. Merangin	719.917.276	712.192.850
105	Kab. Muaro Jambi	268.696.284	262.732.850
106	Kab. Sarolangun	268.696.284	262.732.850
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	270.684.095	262.732.850
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	264.477.811	262.490.000
109	Kab. Tebo	270.684.095	262.732.850
110	Kota Jambi	270.684.095	262.732.850
111	Kota Sungai Penuh	1.074.689.611	1.060.513.594
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**2.672.507.303**	**653.677.813**
113	Kab. Lahat	163.110.000	-
114	Kab. Musi Banyuasin	163.110.000	40.777.500
115	Kab. Musi Rawas	163.110.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	163.110.000	-
117	Kab. Muara Enim	163.110.000	122.332.500
118	Kab. Ogan Komering Ilir	165.712.599	40.816.888
119	Kab. Ogan Komering Ulu	163.110.000	-
120	Kota Palembang	164.391.605	-
121	Kota Pagar Alam	163.110.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	163.110.000	-
123	Kota Prabumulih	163.110.000	-
124	Kab. Empat Lawang	168.391.460	122.487.538
125	Kab. Banyuasin	165.750.730	81.632.519
126	Kab. Ogan Ilir	166.954.816	163.110.000
127	Kab. OKU Timur	376.714.947	187.043.766
128	Kab. OKU Selatan	3.372.264.267	2.451.819.750
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	163.149.388	81.594.388
130	**Provinsi Bangka Belitung**	-	-
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	**Provinsi Bengkulu**	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	**Provinsi Lampung**	**3.539.401.758**	**3.424.797.879**
150	Kab. Lampung Barat	3.105.090.923	3.003.332.516
151	Kab. Lampung Selatan	269.927.476	260.226.319
152	Kab. Lampung Tengah	298.932.397	287.733.134
153	Kab. Lampung Utara	309.731.750	299.227.734
154	Kab. Lampung Timur	796.364.566	767.342.170
155	Kab. Tanggamus	701.944.911	684.831.101
156	Kab. Tulang Bawang	235.959.572	228.319.324
157	Kab. Way Kanan	264.794.908	192.301.824
158	Kab. Pesawaran	479.586.688	464.801.111
159	Kab. Pesisir Barat	249.331.572	241.691.324
160	Kab. Pringsewu	493.600.352	475.442.834
161	Kab. Mesuji	256.736.572	249.096.324
162	Kab. Tulang Bawang Barat	240.774.051	234.843.324
163	Kota Bandar Lampung	283.478.572	275.838.324
164	Kota Metro	270.365.240	262.136.504
165	**Provinsi DKI Jakarta**	-	-
166	**Provinsi Jawa Barat**	**117.613.717.373**	**114.243.070.135**
167	Kab. Bandung	13.952.492.710	10.200.671.952
168	Kab. Bekasi	4.627.763.430	1.149.961.098
169	Kab. Bogor	4.757.988.065	4.621.592.253
170	Kab. Ciamis	5.028.994.793	4.887.682.971
171	Kab. Cianjur	5.107.563.638	4.961.378.161
172	Kab. Cirebon	5.498.094.586	4.007.128.026
173	Kab. Garut	28.282.395.381	27.446.640.955
174	Kab. Indramayu	4.785.468.571	3.487.221.980
175	Kab. Karawang	91.688.958.180	89.666.877.847
176	Kab. Kuningan	6.577.980.828	6.394.370.109
177	Kab. Majalengka	10.482.716.003	10.243.202.292
178	Kab. Pangandaran	5.020.709.411	4.877.480.322
179	Kab. Purwakarta	4.726.413.976	3.466.353.060
180	Kab. Subang	4.878.211.447	3.554.704.791
181	Kab. Sukabumi	4.785.506.560	4.648.430.495
182	Kab. Sumedang	21.247.461.508	20.026.999.488
183	Kab. Tasikmalaya	4.956.543.624	4.848.826.630
184	Kab. Bandung Barat	5.349.950.263	5.194.133.978
185	Kota Bandung	4.641.080.947	3.406.449.349
186	Kota Bekasi	4.639.663.020	4.539.226.165
187	Kota Bogor	4.712.209.492	4.577.131.514
188	Kota Cirebon	4.685.188.864	3.438.311.711

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
189	Kota Depok	4.538.809.000	-
190	Kota Sukabumi	4.694.734.940	4.593.074.650
191	Kota Cimahi	4.664.884.919	4.563.926.677
192	Kota Tasikmalaya	4.754.366.195	4.652.428.782
193	Kota Banjar	4.743.759.840	1.153.435.533
194	**Provinsi Banten**	-	-
195	Kab. Lebak	-	-
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**220.631.984.675**	**214.208.143.121**
204	Kab. Banjarnegara	6.901.170.714	6.698.380.980
205	Kab. Banyumas	6.605.299.764	6.416.110.092
206	Kab. Batang	7.290.137.180	7.094.938.981
207	Kab. Blora	9.005.099.824	8.725.756.178
208	Kab. Boyolali	18.696.813.715	18.139.090.481
209	Kab. Brebes	6.921.226.342	6.721.258.148
210	Kab. Cilacap	6.682.999.361	6.489.204.656
211	Kab. Demak	15.928.159.979	15.533.567.364
212	Kab. Grobogan	10.388.364.121	10.089.699.202
213	Kab. Jepara	6.918.195.235	6.718.089.282
214	Kab. Karanganyar	12.630.942.337	12.190.302.303
215	Kab. Kebumen	8.057.682.567	7.823.399.886
216	Kab. Kendal	18.194.222.675	17.626.160.259
217	Kab. Klaten	15.684.201.953	15.211.474.759
218	Kab. Kudus	162.887.819.453	158.209.584.979
219	Kab. Magelang	14.404.434.985	13.921.988.571
220	Kab. Pati	7.008.169.437	6.807.012.627
221	Kab. Pekalongan	6.565.623.617	6.374.716.089
222	Kab. Pemalang	7.605.188.432	7.384.255.570
223	Kab. Purbalingga	7.087.704.791	6.880.785.553
224	Kab. Purworejo	7.540.184.379	7.314.288.502
225	Kab. Rembang	23.192.123.467	22.603.368.201
226	Kab. Semarang	9.356.516.424	9.081.239.049
227	Kab. Sragen	7.612.952.428	7.394.493.245
228	Kab. Sukoharjo	7.023.224.475	6.801.221.903
229	Kab. Tegal	7.225.301.901	7.016.271.111
230	Kab. Temanggung	32.474.928.986	31.502.686.832
231	Kab. Wonogiri	8.216.708.004	7.997.532.602
232	Kab. Wonosobo	14.004.847.398	13.595.523.233
233	Kota Magelang	6.583.364.550	6.391.525.514
234	Kota Pekalongan	6.959.395.301	6.739.143.262
235	Kota Salatiga	6.490.085.941	6.301.116.905

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
236	Kota Semarang	8.769.872.680	8.526.919.201
237	Kota Surakarta	7.405.827.660	7.197.657.332
238	Kota Tegal	6.489.175.610	6.300.239.092
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**5.371.389.028**	**5.216.294.116**
240	Kab. Bantul	4.107.066.151	3.948.215.188
241	Kab. Gunung Kidul	1.965.998.914	1.915.871.639
242	Kab. Kulon Progo	2.004.791.974	1.966.018.230
243	Kab. Sleman	3.102.278.854	3.027.282.101
244	Kota Yogyakarta	1.353.106.160	1.313.966.778
245	**Provinsi Jawa Timur**	**495.561.142.354**	**481.211.806.219**
246	Kab. Bangkalan	14.140.607.894	13.723.393.705
247	Kab. Banyuwangi	16.708.891.485	16.223.684.480
248	Kab. Blitar	20.779.181.645	20.279.795.991
249	Kab. Bojonegoro	40.791.897.635	39.690.526.836
250	Kab. Bondowoso	28.348.547.507	27.540.114.158
251	Kab. Gresik	14.611.853.074	14.192.459.070
252	Kab. Jember	55.030.438.803	53.288.236.632
253	Kab. Jombang	35.478.972.334	34.487.153.810
254	Kab. Kediri	37.272.837.086	36.166.639.955
255	Kab. Lamongan	31.285.454.142	30.417.019.724
256	Kab. Lumajang	19.298.250.784	18.765.467.031
257	Kab. Madiun	15.075.325.794	14.634.708.466
258	Kab. Magetan	15.084.092.048	14.641.542.301
259	Kab. Malang	67.469.570.294	65.140.121.077
260	Kab. Mojokerto	15.809.095.872	15.368.330.409
261	Kab. Nganjuk	16.232.019.693	15.739.707.658
262	Kab. Ngawi	20.556.457.433	19.954.023.679
263	Kab. Pacitan	14.641.872.106	14.217.098.109
264	Kab. Pamekasan	48.660.728.256	47.231.468.478
265	Kab. Pasuruan	183.195.060.701	177.705.461.221
266	Kab. Ponorogo	16.233.520.656	15.770.375.264
267	Kab. Probolinggo	56.622.462.749	55.014.235.027
268	Kab. Sampang	19.760.908.050	19.197.251.059
269	Kab. Sidoarjo	18.655.294.907	18.223.295.235
270	Kab. Situbondo	29.133.955.081	28.265.433.928
271	Kab. Sumenep	35.547.252.903	34.495.297.228
272	Kab. Trenggalek	14.407.543.042	13.993.879.613
273	Kab. Tuban	21.108.127.841	20.486.304.203
274	Kab. Tulungagung	19.657.382.880	19.096.505.674
275	Kota Blitar	26.228.177.494	25.795.388.690
276	Kota Kediri	61.302.013.191	59.465.470.096
277	Kota Madiun	14.354.972.826	13.939.983.813
278	Kota Malang	34.745.537.611	33.933.352.226
279	Kota Mojokerto	14.524.817.248	14.096.570.877
280	Kota Pasuruan	14.302.816.927	13.889.887.051
281	Kota Probolinggo	14.284.302.914	13.869.423.064
282	Kota Surabaya	21.042.464.236	20.374.839.467

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
283	Kota Batu	13.926.619.101	13.513.094.538
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	2.306.761.501	**567.906.250**
285	Kab. Bengkayang	3.031.541.810	**1.514.419.500**
286	Kab. Landak	177.443.810	**87.370.500**
287	Kab. Kapuas Hulu	177.443.810	**87.370.500**
288	Kab. Ketapang	221.589.694	**87.370.500**
289	Kab. Mempawah	177.443.810	**87.370.500**
290	Kab. Sambas	177.443.810	**43.685.250**
291	Kab. Sanggau	177.443.810	**43.685.250**
292	Kab. Sintang	177.443.810	**87.370.500**
293	Kota Pontianak	177.443.810	**87.370.500**
294	Kota Singkawang	177.443.810	**43.685.250**
295	Kab. Kayong Utara	**177.443.810**	**87.370.500**
296	Kab. Kubu Raya	177.443.810	43.685.250
297	Kab. Sekadau	177.443.810	87.370.500
298	Kab. Melawi	177.443.810	87.370.500
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**2.088.393.324**	**2.024.709.923**
300	Kab. Barito Selatan	174.530.877	168.741.448
301	Kab. Barito Utara	168.603.114	47.114
302	Kab. Kapuas	171.497.828	84.325.114
303	Kab. Kotawaringin Barat	472.386.525	449.079.474
304	Kab. Kotawaringin Timur	174.717.602	168.741.448
305	Kota Palangkaraya	174.620.753	168.831.324
306	Kab. Barito Timur	168.603.114	47.114
307	Kab. Murung Raya	174.392.543	168.603.114
308	Kab. Pulang Pisau	2.277.261.466	2.249.447.389
309	Kab. Gunung Mas	174.530.877	168.741.448
310	Kab. Lamandau	168.603.113	84.325.113
311	Kab. Sukamara	174.392.542	168.603.113
312	Kab. Katingan	170.050.471	47.114
313	Kab. Seruyan	168.603.113	84.325.113
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	-
329	Kab. Berau	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Paser	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	**Provinsi Gorontalo**	2.208.694.000	**2.208.694.000**
362	Kab. Boalemo	441.739.000	220.869.500
363	Kab. Gorontalo	2.944.926.000	2.944.926.000
364	Kota Gorontalo	441.739.000	441.739.000
365	Kab. Pohuwato	441.739.000	441.739.000
366	Kab. Gorontalo Utara	441.739.000	441.739.000
367	Kab. Bone Bolango	441.739.000	441.739.000
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**2.305.434.536**	**2.235.998.945**
369	Kab. Banggai	2.050.800.648	2.031.735.379
370	Kab. Banggai Laut	210.216.110	203.272.541
371	Kab. Banggai Kepulauan	210.216.110	203.272.541
372	Kab. Buol	210.216.110	203.272.541
373	Kab. Toli-Toli	208.430.082	203.222.406
374	Kab. Donggala	210.216.110	203.272.541
375	Kab. Morowali	208.480.217	203.272.541
376	Kab. Morowali Utara	210.216.110	203.272.541

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
377	Kab. Poso	208.480.217	152.504.541
378	Kota Palu	260.385.243	204.836.758
379	Kab. Parigi Moutong	959.350.495	947.738.541
380	Kab. Sigi	210.165.975	203.222.406
381	Kab. Tojo Una-Una	208.480.217	203.272.541
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**5.626.705.892**	**5.466.768.382**
383	Kab. Bantaeng	358.848.326	349.235.356
384	Kab. Barru	270.630.671	263.042.898
385	Kab. Bone	983.589.540	957.660.173
386	Kab. Bulukumba	404.001.113	390.443.466
387	Kab. Enrekang	298.141.521	291.187.691
388	Kab. Gowa	244.639.521	237.685.691
389	Kab. Jeneponto	262.026.193	254.596.898
390	Kab. Luwu	270.654.080	263.025.691
391	Kab. Luwu Utara	244.639.521	237.685.691
392	Kab. Maros	244.639.521	237.685.691
393	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	244.639.521	237.685.691
394	Kab. Pinrang	244.639.521	237.685.691
395	Kab. Kepulauan Selayar	244.639.521	237.685.691
396	Kab. Sidenreng Rappang	244.639.521	237.685.691
397	Kab. Sinjai	1.832.558.412	1.776.500.360
398	Kab. Soppeng	4.754.661.340	4.621.154.158
399	Kab. Takalar	244.639.521	237.685.691
400	Kab. Tana Toraja	244.639.521	237.685.691
401	Kab. Wajo	268.920.259	261.350.074
402	Kota Pare-pare	244.527.676	237.573.846
403	Kab. Toraja Utara	244.639.521	237.685.691
404	Kota Makassar	244.639.521	237.685.691
405	Kota Palopo	244.639.521	237.685.691
406	Kab. Luwu Timur	244.639.521	237.685.691
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Pasangkayu	-	-
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	Kab. Muna Barat	-	-
430	Kab. Buton Tengah	-	-
431	Kab. Buton Selatan	-	-
432	**Provinsi Bali**	**3.850.506.683**	**3.738.255.041**
433	Kab. Badung	477.805.219	467.281.631
434	Kab. Bangli	677.658.522	661.732.925
435	Kab. Buleleng	3.524.538.711	3.418.047.923
436	Kab. Gianyar	1.568.248.824	1.519.643.992
437	Kab. Jembrana	564.706.550	548.905.268
438	Kab. Karangasem	724.108.975	705.136.802
439	Kab. Klungkung	481.313.082	467.281.631
440	Kab. Tabanan	481.313.082	467.281.631
441	Kota Denpasar	481.313.082	467.281.631
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**91.059.439.109**	**88.697.524.000**
443	Kab. Bima	10.010.326.571	9.746.778.804
444	Kab. Dompu	5.467.646.833	5.298.616.562
445	Kab. Lombok Barat	15.983.226.509	15.562.017.000
446	Kab. Lombok Tengah	49.551.383.926	48.235.331.000
447	Kab. Lombok Timur	56.064.311.065	54.376.192.000
448	Kab. Sumbawa	9.615.551.496	9.354.304.000
449	Kota Mataram	50.860.527.134	49.873.475.000
450	Kab. Lombok Utara	9.721.900.222	9.454.726.000
451	Kota Bima	2.118.044.779	2.062.314.801
452	Kab. Sumbawa Barat	3.092.837.929	3.010.866.000
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**4.821.855.984**	**2.357.101.518**
454	Kab. Alor	541.038.811	230.811
455	Kab. Belu	284.232.638	58.638
456	Kab. Ende	224.024.000	-
457	Kab. Flores Timur	1.302.677.897	969.607.317
458	Kab. Kupang	312.402.452	289.793
459	Kab. Lembata	463.042.276	231.579.776
460	Kab. Malaka	224.024.000	112.012.000
461	Kab. Manggarai	1.797.450.020	1.988.020
462	Kab. Ngada	236.750.886	237.532
463	Kab. Sikka	896.504.000	-
464	Kab. Sumba Barat	242.124.415	-
465	Kab. Sumba Timur	376.030.437	385.825
466	Kab. Timor Tengah Selatan	257.629.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	224.024.000	-
468	Kota Kupang	224.024.000	-
469	Kab. Rote Ndao	224.024.000	-
470	Kab. Nagekeo	743.807.700	185.003.383

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
471	Kab. Sumba Tengah	224.024.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.095.354.970	535.741.770
473	Kab. Manggarai Timur	491.030.680	475.876.221
474	Kab. Sabu Raijua	245.260.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	433.207.112	429.784.973
476	**Provinsi Maluku**	-	-
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-
487	Kota Tual	-	-
488	**Provinsi Maluku Utara**	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	**Provinsi Papua**	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	**Provinsi Papua Barat**	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		**3.272.122.300.207**	**3.136.352.925.658**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**2.322.266.506.000**	**2.322.266.506.000**	**1.826.271.773.000**	**1.752.911.004.628**
2	Kab. Aceh Barat	588.209.483.000	588.209.483.000	203.635.347.000	190.075.537.970
3	Kab. Aceh Besar	751.399.714.000	751.399.714.000	273.266.475.000	256.536.720.432
4	Kab. Aceh Selatan	660.081.905.000	660.081.905.000	294.778.541.000	269.045.690.126
5	Kab. Aceh Singkil	454.078.750.000	454.078.750.000	121.383.192.000	117.879.793.467
6	Kab. Aceh Tengah	623.701.928.000	623.701.928.000	209.155.656.000	191.553.083.829
7	Kab. Aceh Tenggara	602.160.379.000	602.160.379.000	185.176.213.000	174.691.813.921
8	Kab. Aceh Timur	819.436.048.000	819.436.048.000	253.468.007.000	245.061.516.446
9	Kab. Aceh Utara	895.221.997.000	895.221.997.000	475.036.443.000	455.165.428.006
10	Kab. Bireuen	834.727.911.000	834.727.911.000	305.598.595.000	287.501.019.159
11	Kab. Pidie	825.287.235.000	825.287.235.000	288.570.856.000	259.152.133.236
12	Kab. Simeulue	465.338.369.000	465.338.369.000	162.338.274.400	155.909.153.757
13	Kota Banda Aceh	605.014.830.000	605.014.830.000	125.375.722.000	114.081.195.870
14	Kota Sabang	370.143.343.000	370.143.343.000	111.213.691.000	101.427.980.728
15	Kota Langsa	456.700.561.000	456.700.561.000	154.050.822.000	148.506.327.482
16	Kota Lhokseumawe	469.471.445.000	469.471.445.000	115.030.278.000	104.027.873.967
17	Kab. Nagan Raya	522.187.942.000	522.187.942.000	153.750.346.000	145.333.511.975
18	Kab. Aceh Jaya	437.094.042.000	437.094.042.000	120.787.264.000	116.881.994.590
19	Kab. Pidie Jaya	441.952.256.000	441.952.256.000	168.696.615.400	161.482.733.760
20	Kab. Aceh Barat Daya	460.983.806.000	460.983.806.000	155.772.645.000	148.721.174.930
21	Kab. Gayo Lues	472.230.875.000	472.230.875.000	105.224.745.000	103.023.139.832
22	Kab. Aceh Tamiang	547.975.351.000	547.975.351.000	169.073.754.000	152.848.825.758
23	Kab. Bener Meriah	458.759.081.000	458.759.081.000	153.103.470.000	144.364.691.621
24	Kota Subulussalam	353.735.077.000	353.735.077.000	100.563.072.000	95.825.913.698
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**2.754.578.133.000**	**2.754.335.503.000**	**4.476.538.802.800**	**4.280.364.744.654**
26	Kab. Asahan	917.363.719.000	917.363.681.000	267.119.058.000	241.617.990.917
27	Kab. Dairi	633.471.400.000	631.990.848.000	201.152.602.000	188.470.855.649
28	Kab. Deli Serdang	1.528.112.060.000	1.525.468.065.000	475.185.278.000	437.945.856.833
29	Kab. Karo	761.654.097.000	759.734.097.000	236.116.973.000	214.919.677.643
30	Kab. LabuhanBatu	715.851.140.000	711.594.401.000	237.197.440.000	201.779.222.277
31	Kab. Langkat	1.229.427.123.000	1.229.417.604.000	381.104.494.720	358.797.534.002
32	Kab. Mandailing Natal	822.447.946.000	817.263.946.000	327.555.997.000	304.349.920.363
33	Kab. Nias	445.430.278.000	445.363.208.000	179.771.111.000	171.734.211.391
34	Kab. Simalungun	1.261.415.709.000	1.261.348.107.000	403.279.300.000	373.109.321.103
35	Kab. Tapanuli Selatan	676.183.229.000	676.164.172.000	179.204.744.000	173.137.172.623
36	Kab. Tapanuli Tengah	673.021.721.000	673.021.721.000	204.070.296.000	179.114.987.145
37	Kab. Tapanuli Utara	662.711.066.000	662.702.592.000	229.067.330.000	220.840.905.201
38	Kab. Toba Samosir	548.690.496.000	548.690.496.000	194.557.748.000	178.527.360.533
39	Kota Binjai	594.193.792.000	587.336.929.000	135.671.636.000	124.338.281.743
40	Kota Medan	1.717.625.774.000	1.690.606.936.000	413.386.310.000	373.430.419.574
41	Kota Pematang Siantar	617.348.795.000	617.344.615.000	170.939.186.000	154.405.270.744
42	Kota Sibolga	428.921.402.000	425.753.360.000	76.097.327.000	68.765.533.517
43	Kota Tanjung Balai	451.056.356.000	451.056.356.000	96.303.464.000	85.447.482.938
44	Kab. Batu Bara	630.941.496.000	630.941.496.000	180.642.650.000	150.250.716.251
45	Kab. LabuhanBatu Utara	612.604.336.000	612.604.336.000	183.322.179.000	172.636.862.277
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	525.098.108.000	524.727.970.000	155.109.525.000	133.892.758.495
47	Kab. Padang Lawas Utara	555.990.539.000	555.990.539.000	201.097.660.000	189.907.774.747
48	Kab. Padang Lawas	541.654.796.000	541.654.796.000	203.377.620.000	197.209.133.432
49	Kab. Nias Utara	429.813.062.000	429.619.903.000	235.669.876.000	227.864.833.863
50	Kab. Nias Barat	360.613.977.000	360.613.977.000	206.686.432.400	195.171.264.445
51	Kota Tebing Tinggi	435.234.831.000	435.195.368.000	112.479.806.000	103.455.319.872
52	Kota Padang Sidempuan	525.198.898.000	525.198.898.000	168.870.383.000	159.033.637.746
53	Kab. Pakpak Bharat	356.431.429.000	356.431.429.000	108.961.759.000	101.263.165.882
54	Kab. Nias Selatan	589.776.225.000	589.776.225.000	276.629.897.000	264.850.082.968
55	Kab. Humbang Hasundutan	537.926.193.000	537.926.193.000	184.032.834.000	162.229.916.367
56	Kab. Serdang Bedagai	803.443.971.000	802.263.243.000	269.986.973.000	252.632.039.082

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
57	Kab. Samosir	466.392.298.000	465.281.884.000	168.044.581.000	162.075.954.323
58	Kota Gunungsitoli	447.379.682.000	447.379.682.000	114.982.991.000	100.272.112.645
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**2.076.425.741.000**	**2.076.423.879.000**	**1.959.792.397.000**	**1.859.096.319.284**
60	Kab. Lima Puluh Kota	769.112.424.000	769.112.424.000	266.464.399.000	241.722.013.285
61	Kab. Agam	844.924.099.000	844.847.282.000	313.978.139.000	293.473.190.792
62	Kab. Kepulauan Mentawai	626.670.939.000	626.664.707.000	204.367.396.000	184.089.277.891
63	Kab. Padang Pariaman	792.616.064.000	792.616.064.000	371.922.402.000	344.577.743.749
64	Kab. Pasaman	619.592.444.000	619.592.444.000	189.112.680.000	165.376.978.437
65	Kab. Pesisir Selatan	862.608.266.000	862.608.266.000	357.019.557.000	337.445.094.669
66	Kab. Sijunjung	562.186.498.000	562.186.498.000	195.131.929.000	168.973.858.954
67	Kab. Solok	731.032.814.000	731.031.541.000	256.889.692.000	243.531.704.311
68	Kab. Tanah Datar	720.168.239.000	720.168.239.000	292.759.650.000	265.839.504.335
69	Kota Bukit Tinggi	469.287.988.000	465.047.471.000	95.494.717.000	81.809.509.268
70	Kota Padang Panjang	390.319.648.000	390.319.648.000	65.821.696.000	56.724.920.810
71	Kota Padang	1.176.324.044.000	1.176.301.985.000	336.247.292.000	306.418.878.419
72	Kota Payakumbuh	468.545.741.000	468.507.057.000	146.794.493.000	134.847.316.326
73	Kota Sawahlunto	390.090.115.000	390.090.115.000	95.091.795.000	81.613.422.807
74	Kota Solok	413.239.169.000	413.167.121.000	103.579.419.000	88.109.918.300
75	Kota Pariaman	431.078.208.000	428.104.412.000	102.603.036.000	90.010.608.643
76	Kab. Pasaman Barat	661.892.619.000	661.892.619.000	251.664.178.000	241.673.601.110
77	Kab. Dharmasraya	524.890.763.000	524.888.502.000	234.563.239.600	224.445.247.215
78	Kab. Solok Selatan	494.409.964.000	494.409.964.000	233.334.897.000	194.239.714.239
79	**Provinsi Riau**	**1.548.578.928.000**	**1.548.578.928.000**	**2.011.198.886.000**	**1.918.559.366.971**
80	Kab. Bengkalis	378.847.350.000	378.847.350.000	296.953.479.000	265.968.494.174
81	Kab. Indragiri Hilir	998.828.184.000	991.610.493.000	313.985.680.000	279.039.846.046
82	Kab. Indragiri Hulu	696.496.358.000	696.496.358.000	249.990.314.000	235.948.064.118
83	Kab. Kampar	824.550.546.000	824.542.129.000	435.828.030.000	413.310.248.080
84	Kab. Kuantan Singingi	661.888.113.000	659.852.354.000	293.020.802.200	274.916.766.368
85	Kab. Pelalawan	646.966.289.000	646.966.289.000	218.896.639.000	193.496.640.626
86	Kab. Rokan Hilir	467.823.211.000	463.196.486.000	272.015.783.000	258.304.768.750
87	Kab. Rokan Hulu	696.331.503.000	696.331.503.000	267.675.100.000	253.711.334.485
88	Kab. Siak	347.790.047.000	346.124.426.000	265.785.270.200	252.539.028.694
89	Kota Dumai	471.728.655.000	465.621.378.000	213.564.040.000	195.447.803.655
90	Kota Pekanbaru	878.080.500.000	862.694.427.000	267.970.697.000	240.831.437.460
91	Kab. Kepulauan Meranti	432.655.271.000	431.729.926.000	212.194.980.000	197.555.669.150
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1.190.057.596.000**	**1.190.057.596.000**	**668.051.973.865**	**645.982.573.999**
93	Kab. Bintan	519.049.539.000	516.396.743.000	173.548.743.000	165.186.652.289
94	Kab. Natuna	396.221.521.000	396.184.452.000	192.375.024.827	166.097.040.783
95	Kab. Karimun	440.011.289.000	434.644.288.000	222.351.760.000	189.045.807.033
96	Kota Batam	659.246.735.000	659.164.959.000	265.263.014.000	234.365.630.661
97	Kab. Kepulauan Anambas	388.468.053.000	388.468.053.000	197.999.576.000	183.542.757.358
98	Kota Tanjung Pinang	491.501.568.000	491.496.457.000	97.108.351.000	91.571.553.075
99	Kab. Lingga	487.901.606.000	487.889.028.000	123.596.185.600	119.642.541.177
100	**Provinsi Jambi**	**1.440.421.795.000**	**1.440.279.732.000**	**1.092.978.848.000**	**1.071.620.709.209**
101	Kab. Batanghari	632.048.032.000	632.048.032.000	179.601.386.000	163.938.061.698
102	Kab. Bungo	657.963.331.000	657.963.331.000	213.725.138.000	202.470.317.451
103	Kab. Kerinci	613.626.479.000	613.626.479.000	194.264.715.000	180.997.460.003
104	Kab. Merangin	742.330.942.000	742.330.942.000	272.340.970.000	239.597.542.930
105	Kab. Muaro Jambi	700.817.793.000	700.817.793.000	199.399.895.000	182.662.518.814
106	Kab. Sarolangun	600.491.112.000	600.491.112.000	220.943.220.000	211.193.891.759
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	537.184.504.000	537.183.193.000	175.209.230.000	166.498.906.384
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	565.638.307.000	565.638.307.000	211.719.258.000	189.167.882.580
109	Kab. Tebo	599.222.674.000	599.202.800.000	171.414.932.000	160.270.455.017
110	Kota Jambi	759.707.231.000	759.707.231.000	239.346.630.000	225.056.068.682
111	Kota Sungai Penuh	452.463.791.000	452.442.853.000	112.798.570.000	106.861.869.407
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.775.424.377.000**	**1.775.424.377.000**	**2.360.092.905.484**	**2.273.763.203.431**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
113	Kab. Lahat	740.455.384.000	739.708.988.000	292.560.977.000	279.988.217.333
114	Kab. Musi Banyuasin	417.849.626.000	417.849.626.000	314.649.342.000	304.876.937.420
115	Kab. Musi Rawas	664.497.988.000	664.495.347.000	260.443.352.000	246.498.967.618
116	Kab. Musi Rawas Utara	398.553.954.000	398.551.693.000	123.911.194.000	115.886.089.587
117	Kab. Muara Enim	703.066.521.000	702.188.094.000	286.101.487.000	268.383.103.183
118	Kab. Ogan Komering Ilir	1.087.890.530.000	1.085.510.457.000	362.046.862.000	347.421.921.243
119	Kab. Ogan Komering Ulu	662.537.879.000	662.537.879.000	214.625.038.000	197.911.631.470
120	Kota Palembang	1.357.511.167.000	1.357.511.167.000	437.385.118.000	406.204.078.808
121	Kota Pagar Alam	415.080.471.000	415.074.581.000	109.515.051.000	97.290.374.570
122	Kota Lubuk linggau	497.399.929.000	497.399.929.000	150.099.512.000	143.040.264.436
123	Kota Prabumulih	441.352.435.000	441.352.435.000	120.774.358.000	115.137.023.238
124	Kab. Empat Lawang	445.127.349.000	445.115.531.000	132.994.516.000	128.580.174.095
125	Kab. Banyuasin	979.541.981.000	979.541.981.000	383.298.685.000	371.770.283.011
126	Kab. Ogan Ilir	652.182.323.000	649.591.357.000	294.829.166.000	283.217.915.149
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	811.605.957.000	811.605.957.000	296.960.957.000	282.787.093.949
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	624.566.997.000	624.566.997.000	182.141.482.000	175.881.650.229
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	334.433.519.000	334.433.519.000	106.161.026.000	103.366.339.610
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**1.052.085.722.000**	**1.052.085.722.000**	**513.272.825.490**	**492.922.264.975**
131	Kab. Bangka	552.815.332.000	552.815.332.000	172.534.413.000	166.586.706.174
132	Kab. Belitung	510.538.719.000	510.538.719.000	148.784.205.000	139.646.670.262
133	Kota Pangkal Pinang	478.084.511.000	478.084.511.000	95.549.786.000	91.097.897.002
134	Kab. Bangka Selatan	485.316.056.000	485.316.056.000	157.015.583.000	152.445.613.102
135	Kab. Bangka Tengah	463.219.200.000	463.209.681.000	132.830.549.000	129.352.511.386
136	Kab. Bangka Barat	468.051.560.000	468.051.560.000	137.589.196.000	129.239.611.771
137	Kab. Belitung Timur	463.005.627.000	463.005.627.000	113.708.729.000	104.969.190.630
138	**Provinsi Bengkulu**	**1.334.178.390.000**	**1.334.178.390.000**	**736.632.462.000**	**710.032.014.066**
139	Kab. Bengkulu Selatan	578.711.000.000	575.590.220.000	223.214.726.000	209.128.836.547
140	Kab. Bengkulu Utara	644.133.638.000	644.128.033.000	250.195.859.000	236.116.336.099
141	Kab. Rejang Lebong	623.033.900.000	623.033.900.000	226.650.231.000	213.028.642.622
142	Kota Bengkulu	711.789.540.000	711.789.540.000	205.743.428.000	189.425.743.535
143	Kab. Kaur	453.887.218.000	453.887.218.000	168.709.877.600	154.602.058.752
144	Kab. Seluma	520.991.341.000	520.991.341.000	253.947.253.000	241.858.440.409
145	Kab. Mukomuko	504.096.898.000	503.535.801.000	176.337.189.000	167.742.015.616
146	Kab. Lebong	420.352.075.000	420.283.979.000	127.835.425.000	121.706.166.297
147	Kab. Bengkulu Tengah	449.845.174.000	449.845.174.000	154.623.898.000	142.480.897.319
148	Kab. Kepahiang	440.789.942.000	438.459.247.000	136.006.837.800	128.962.000.489
149	**Provinsi Lampung**	**1.927.012.713.000**	**1.927.012.713.000**	**2.237.322.900.000**	**2.158.403.418.393**
150	Kab. Lampung Barat	543.777.950.000	543.777.950.000	245.352.330.000	236.540.622.886
151	Kab. Lampung Selatan	1.054.042.773.000	1.054.042.773.000	367.971.471.000	333.898.743.167
152	Kab. Lampung Tengah	1.385.745.954.000	1.385.745.954.000	422.427.419.000	392.516.387.836
153	Kab. Lampung Utara	985.869.713.000	984.417.524.000	281.189.503.311	254.202.251.632
154	Kab. Lampung Timur	1.106.577.701.000	1.106.577.701.000	396.223.748.000	329.892.986.445
155	Kab. Tanggamus	802.326.253.000	802.229.562.000	298.386.685.000	283.557.587.496
156	Kab. Tulang Bawang	642.123.007.000	641.645.423.000	240.687.787.000	161.047.325.767
157	Kab. Way Kanan	681.963.677.000	681.963.677.000	299.828.678.000	290.795.273.015
158	Kab. Pesawaran	687.093.922.000	686.981.290.000	230.581.944.000	197.762.502.662
159	Kab. Pesisir Barat	437.182.078.000	437.182.078.000	144.713.959.000	140.222.570.863
160	Kab. Pringsewu	642.871.686.000	642.821.564.000	221.252.424.000	208.906.305.558
161	Kab. Mesuji	458.680.038.000	458.616.312.000	169.893.255.000	161.963.038.421
162	Kab. Tulang Bawang Barat	488.530.984.000	488.530.984.000	184.295.574.000	173.735.988.342
163	Kota Bandar Lampung	1.114.926.193.000	1.114.812.630.000	269.543.563.000	253.447.913.662
164	Kota Metro	476.738.335.000	476.738.335.000	164.629.936.000	152.393.630.414
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**483.067.970.000**	**480.616.495.000**	**3.156.303.637.000**	**2.869.479.741.412**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**3.212.647.404.000**	**3.212.647.404.000**	**10.450.590.890.000**	**10.075.621.018.001**
167	Kab. Bandung	2.161.676.902.000	2.159.456.282.000	771.538.000.000	731.305.461.299
168	Kab. Bekasi	1.266.071.923.000	1.264.776.440.000	379.388.887.000	356.569.418.719

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
169	Kab. Bogor	2.089.128.061.000	2.088.940.702.000	807.625.856.000	759.082.964.712
170	Kab. Ciamis	1.233.744.940.000	1.233.744.940.000	550.627.862.500	526.804.870.703
171	Kab. Cianjur	1.627.020.432.000	1.627.020.432.000	599.293.470.000	564.218.883.776
172	Kab. Cirebon	1.591.969.932.000	1.591.291.632.000	594.607.568.000	551.754.445.226
173	Kab. Garut	1.843.826.881.000	1.843.826.881.000	767.510.693.000	725.814.322.850
174	Kab. Indramayu	1.433.686.342.000	1.433.498.850.000	555.439.162.000	526.233.062.580
175	Kab. Karawang	1.325.359.517.000	1.325.136.134.000	555.348.944.000	515.206.324.337
176	Kab. Kuningan	1.243.402.427.000	1.243.359.240.000	466.597.796.800	446.179.327.972
177	Kab. Majalengka	1.252.081.607.000	1.251.699.137.000	464.835.012.000	436.798.606.580
178	Kab. Pangandaran	569.048.937.000	569.048.937.000	260.240.872.000	246.413.826.115
179	Kab. Purwakarta	897.956.020.000	896.228.020.000	281.165.220.000	267.869.915.761
180	Kab. Subang	1.328.857.253.000	1.328.854.745.000	469.385.968.000	442.483.130.749
181	Kab. Sukabumi	1.654.343.840.000	1.653.905.700.000	626.458.132.000	594.965.541.464
182	Kab. Sumedang	1.180.845.020.000	1.180.845.020.000	503.047.373.000	476.937.109.639
183	Kab. Tasikmalaya	1.517.258.806.000	1.517.258.806.000	652.330.406.000	601.301.621.637
184	Kab. Bandung Barat	1.131.830.999.000	1.131.771.909.000	483.379.043.000	430.840.843.733
185	Kota Bandung	1.798.102.095.000	1.798.002.611.000	504.140.659.000	457.727.415.878
186	Kota Bekasi	1.277.170.408.000	1.277.170.408.000	322.759.365.000	302.768.199.134
187	Kota Bogor	856.516.761.000	856.516.761.000	204.362.379.000	195.113.906.149
188	Kota Cirebon	608.372.747.000	600.608.045.000	163.176.305.000	154.128.072.476
189	Kota Depok	950.369.136.000	950.369.136.000	223.351.043.000	205.338.503.439
190	Kota Sukabumi	524.001.511.000	524.001.511.000	163.269.542.000	138.121.611.620
191	Kota Cimahi	598.835.644.000	598.835.644.000	162.229.380.000	146.935.341.921
192	Kota Tasikmalaya	835.071.299.000	835.006.661.000	273.802.449.000	259.157.124.503
193	Kota Banjar	389.660.310.000	389.660.310.000	96.399.014.000	71.529.301.894
194	**Provinsi Banten**	**1.219.386.759.000**	**1.219.386.759.000**	**2.632.569.137.000**	**2.518.886.808.290**
195	Kab. Lebak	1.135.371.610.000	1.135.371.610.000	546.526.625.000	501.335.308.015
196	Kab. Pandeglang	1.213.995.208.000	1.213.906.668.000	523.046.704.000	485.316.065.593
197	Kab. Serang	1.126.094.983.000	1.126.094.983.000	429.783.109.000	405.523.107.657
198	Kab. Tangerang	1.231.056.917.000	1.231.056.917.000	434.982.231.000	388.468.470.905
199	Kota Cilegon	646.571.367.000	646.547.218.000	137.067.056.000	126.406.217.487
200	Kota Tangerang	964.844.367.000	964.844.367.000	238.608.664.000	210.279.646.159
201	Kota Serang	678.327.701.000	678.272.088.000	166.968.046.000	158.773.149.544
202	Kota Tangerang Selatan	655.051.293.000	652.655.963.000	159.245.274.000	146.646.479.309
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**3.866.391.968.000**	**3.865.871.349.000**	**7.200.991.834.000**	**7.007.565.860.738**
204	Kab. Banjarnegara	999.003.344.000	999.003.344.000	352.093.122.000	332.573.656.999
205	Kab. Banyumas	1.447.059.397.000	1.441.765.282.000	518.848.499.000	486.338.323.834
206	Kab. Batang	819.664.317.000	819.664.317.000	266.214.951.000	246.168.307.234
207	Kab. Blora	966.572.992.000	966.559.787.000	383.711.076.000	357.642.115.499
208	Kab. Boyolali	1.050.149.229.000	1.050.149.229.000	386.800.514.000	362.281.677.074
209	Kab. Brebes	1.374.223.726.000	1.374.223.726.000	506.171.510.000	476.226.830.807
210	Kab. Cilacap	1.423.200.397.000	1.422.779.243.000	490.479.785.000	448.408.114.970
211	Kab. Demak	946.467.336.000	946.467.336.000	314.401.093.000	297.415.209.039
212	Kab. Grobogan	1.144.560.870.000	1.144.560.870.000	422.736.926.760	390.568.156.729
213	Kab. Jepara	1.039.864.085.000	1.039.715.258.000	345.648.943.000	324.718.507.586
214	Kab. Karanganyar	1.018.664.459.000	1.018.544.740.000	345.142.467.000	315.110.034.092
215	Kab. Kebumen	1.279.681.428.000	1.279.491.466.000	419.493.939.000	391.576.565.463
216	Kab. Kendal	998.236.127.000	998.236.127.000	339.965.359.000	313.417.582.067
217	Kab. Klaten	1.282.250.122.000	1.282.250.122.000	403.088.448.000	358.603.391.442
218	Kab. Kudus	852.530.611.000	852.530.611.000	263.776.090.000	245.306.372.364
219	Kab. Magelang	1.097.366.974.000	1.097.324.509.000	363.406.182.000	332.119.972.551
220	Kab. Pati	1.240.426.635.000	1.240.426.635.000	412.254.219.800	380.156.984.897
221	Kab. Pekalongan	974.248.885.000	974.154.151.000	358.105.532.000	329.385.202.729
222	Kab. Pemalang	1.225.772.132.000	1.225.772.132.000	375.756.991.000	355.802.725.183
223	Kab. Purbalingga	922.838.009.000	922.838.009.000	362.775.625.000	335.642.823.195
224	Kab. Purworejo	963.312.191.000	963.312.191.000	343.782.523.000	313.535.078.357

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
225	Kab. Rembang	799.845.626.000	799.845.626.000	244.204.759.000	217.764.773.005
226	Kab. Semarang	1.001.565.375.000	1.001.529.351.000	347.165.666.000	325.195.543.831
227	Kab. Sragen	1.088.750.091.000	1.088.618.022.000	352.687.975.000	331.276.896.789
228	Kab. Sukoharjo	946.104.486.000	946.104.315.000	303.834.983.000	280.684.573.361
229	Kab. Tegal	1.203.613.836.000	1.203.571.314.000	404.705.406.000	370.243.003.339
230	Kab. Temanggung	828.948.502.000	828.948.502.000	284.792.379.000	263.185.547.795
231	Kab. Wonogiri	1.181.037.066.000	1.181.037.066.000	427.419.605.000	401.239.241.921
232	Kab. Wonosobo	877.474.203.000	877.474.203.000	350.559.640.000	332.565.631.220
233	Kota Magelang	457.656.738.000	457.656.738.000	110.700.478.000	101.753.110.573
234	Kota Pekalongan	475.842.089.000	475.842.089.000	124.991.718.000	116.835.801.413
235	Kota Salatiga	469.967.335.000	469.967.335.000	90.087.947.000	82.875.491.885
236	Kota Semarang	1.317.685.763.000	1.317.685.763.000	339.392.680.000	311.454.641.339
237	Kota Surakarta	879.134.427.000	879.123.635.000	220.794.012.000	200.899.521.271
238	Kota Tegal	506.059.851.000	506.021.129.000	135.956.166.000	121.179.868.208
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**1.351.102.020.000**	**1.351.102.020.000**	**1.033.505.258.000**	**985.229.093.748**
240	Kab. Bantul	1.015.907.068.000	1.015.907.068.000	342.688.858.000	321.427.373.250
241	Kab. Gunung kidul	980.038.118.000	979.917.658.000	379.357.539.000	349.488.568.265
242	Kab. Kulon Progo	732.238.573.000	732.088.720.000	318.695.498.000	294.202.467.196
243	Kab. Sleman	1.035.921.414.000	1.035.862.077.000	335.825.546.000	307.893.039.443
244	Kota Yogyakarta	700.372.564.000	700.372.564.000	171.069.860.000	151.705.225.561
245	**Provinsi Jawa Timur**	**3.998.431.715.000**	**3.998.431.715.000**	**7.920.028.504.000**	**7.611.063.053.369**
246	Kab. Bangkalan	1.045.049.890.000	1.043.513.890.000	358.259.949.000	340.845.604.225
247	Kab. Banyuwangi	1.438.463.198.000	1.438.456.035.000	473.253.354.000	414.558.298.721
248	Kab. Blitar	1.158.989.547.000	1.158.989.547.000	423.812.217.000	383.107.621.120
249	Kab. Bojonegoro	975.387.399.000	975.083.760.000	429.140.059.000	379.960.829.713
250	Kab. Bondowoso	948.677.072.000	948.677.072.000	423.736.691.000	387.386.783.856
251	Kab. Gresik	969.995.279.000	965.183.485.000	354.675.450.000	320.033.904.258
252	Kab. Jember	1.783.372.343.000	1.783.082.384.000	577.264.301.000	510.464.787.392
253	Kab. Jombang	1.126.979.694.000	1.126.979.694.000	375.702.724.000	344.678.823.675
254	Kab. Kediri	1.277.494.956.000	1.277.494.956.000	458.550.518.000	426.814.399.832
255	Kab. Lamongan	1.190.440.820.000	1.190.373.769.000	411.992.181.000	373.383.315.254
256	Kab. Lumajang	1.009.167.969.000	1.009.080.759.000	352.473.457.000	318.003.966.865
257	Kab. Madiun	908.924.372.000	908.734.942.000	346.274.168.000	321.281.504.162
258	Kab. Magetan	940.406.347.000	935.400.706.000	322.258.112.000	291.133.590.631
259	Kab. Malang	1.728.909.519.000	1.728.154.706.000	655.834.668.000	596.082.409.655
260	Kab. Mojokerto	1.006.900.017.000	1.006.900.017.000	364.858.910.000	325.334.247.543
261	Kab. Nganjuk	1.105.447.597.000	1.105.447.597.000	402.506.181.000	373.486.600.306
262	Kab. Ngawi	1.075.611.690.000	1.075.611.690.000	366.782.371.000	341.832.106.345
263	Kab. Pacitan	818.510.458.000	818.488.114.000	318.511.194.000	300.526.644.593
264	Kab. Pamekasan	892.340.709.000	892.340.709.000	311.836.835.000	291.743.602.350
265	Kab. Pasuruan	1.227.489.552.000	1.223.047.896.000	448.186.785.000	409.858.914.617
266	Kab. Ponorogo	1.088.150.278.000	1.088.150.278.000	365.299.843.000	344.151.619.737
267	Kab. Probolinggo	1.010.715.706.000	1.010.715.706.000	357.297.756.000	334.489.594.978
268	Kab. Sampang	870.084.822.000	870.084.822.000	318.437.209.000	305.329.741.173
269	Kab. Sidoarjo	1.265.567.253.000	1.265.114.331.000	367.402.934.000	339.103.120.518
270	Kab. Situbondo	834.508.641.000	834.508.641.000	311.191.097.000	296.369.314.115
271	Kab. Sumenep	1.195.079.604.000	1.195.005.295.000	358.697.487.000	332.905.805.753
272	Kab. Trenggalek	916.327.610.000	915.972.405.000	350.188.361.000	320.933.901.944
273	Kab. Tuban	1.066.053.324.000	1.066.053.324.000	341.146.029.000	310.232.797.808
274	Kab. Tulungagung	1.195.403.668.000	1.195.403.668.000	448.690.804.000	407.659.174.092
275	Kota Blitar	440.564.006.000	440.564.006.000	95.393.368.000	87.057.343.528
276	Kota Kediri	641.421.550.000	641.421.550.000	137.330.161.000	122.831.996.763
277	Kota Madiun	529.963.464.000	529.911.100.000	85.477.493.000	78.789.441.469
278	Kota Malang	891.670.046.000	891.626.859.000	215.461.165.000	190.217.838.126
279	Kota Mojokerto	417.570.475.000	414.331.667.000	75.745.960.000	63.432.807.284
280	Kota Pasuruan	453.605.815.000	447.605.818.000	97.766.137.000	82.168.721.963

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
281	Kota Probolinggo	486.728.858.000	481.611.213.000	124.946.075.000	92.117.909.266
282	Kota Surabaya	1.363.881.011.000	1.304.532.940.000	477.827.337.000	412.578.618.538
283	Kota Batu	500.387.220.000	499.461.875.000	83.777.337.000	70.694.432.354
290	**Provinsi Kalimantan Barat**	**1.756.069.684.000**	**1.756.069.684.000**	**1.727.976.983.990**	**1.696.831.495.759**
291	Kab. Bengkayang	601.748.082.000	601.377.944.000	290.991.450.000	244.248.052.741
292	Kab. Landak	684.638.092.000	684.638.092.000	286.464.654.000	276.247.221.303
293	Kab. Kapuas Hulu	997.684.686.000	997.674.483.000	395.612.463.000	370.589.120.008
294	Kab. Ketapang	1.149.707.988.000	1.149.675.156.000	514.666.728.000	495.441.516.752
295	Kab. Mempawah	600.583.745.000	600.579.223.000	183.361.954.000	172.387.991.567
296	Kab. Sambas	896.478.655.000	896.243.986.000	409.358.294.000	384.754.864.510
297	Kab. Sanggau	845.559.592.000	844.407.592.000	338.360.760.000	327.846.526.304
298	Kab. Sintang	937.286.994.000	934.214.994.000	365.233.275.013	349.812.254.513
299	Kota Pontianak	728.440.231.000	728.434.151.000	197.251.606.000	184.882.349.957
300	Kota Singkawang	518.961.237.000	518.955.898.000	143.639.902.000	133.170.309.910
301	Kab. Kayong Utara	489.564.946.000	489.559.037.000	157.383.137.000	142.038.517.221
302	Kab. Kubu Raya	811.508.636.000	811.508.636.000	272.029.121.240	251.865.629.110
303	Kab. Sekadau	515.570.134.000	515.570.134.000	139.066.353.000	121.258.489.226
304	Kab. Melawi	617.827.872.000	617.827.872.000	269.790.029.202	261.216.653.414
305	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.610.547.345.000**	**1.610.412.863.000**	**1.001.364.983.029**	**966.105.042.211**
306	Kab. Barito Selatan	597.435.089.000	597.344.934.000	140.751.030.000	134.948.230.673
307	Kab. Barito Utara	581.193.263.000	579.275.902.000	218.759.265.000	203.840.576.160
308	Kab. Kapuas	898.043.313.000	898.017.131.000	352.523.006.000	331.202.692.697
309	Kab. Kotawaringin Barat	673.256.263.000	673.256.263.000	207.976.810.000	198.944.903.065
310	Kab. Kotawaringin Timur	853.696.991.000	853.626.957.000	300.667.709.000	290.010.977.632
311	Kota Palangkaraya	676.840.853.000	676.834.241.000	155.232.262.000	147.898.968.133
312	Kab. Barito Timur	495.829.317.000	495.774.046.000	150.846.366.200	142.758.313.147
313	Kab. Murung Raya	691.411.852.000	691.411.852.000	145.661.958.000	134.718.512.793
314	Kab. Pulang Pisau	582.449.742.000	582.427.056.000	164.446.479.000	146.259.544.918
315	Kab. Gunung Mas	577.229.670.000	577.229.670.000	160.342.690.000	152.055.556.996
316	Kab. Lamandau	473.915.987.000	473.915.987.000	100.074.922.000	95.468.015.700
317	Kab. Sukamara	432.962.550.000	432.891.338.000	78.393.047.000	74.402.812.176
318	Kab. Katingan	721.120.250.000	721.120.250.000	181.621.987.000	174.569.655.065
319	Kab. Seruyan	632.665.691.000	632.110.484.000	182.512.974.000	167.606.282.925
320	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**1.190.132.846.000**	**1.190.059.639.000**	**1.153.648.408.025**	**1.115.628.531.227**
321	Kab. Banjar	756.913.147.000	756.873.019.000	316.153.594.000	268.615.498.812
322	Kab. Barito Kuala	596.093.645.000	596.093.645.000	196.896.832.000	188.484.444.153
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	549.729.177.000	549.729.177.000	259.087.992.000	245.604.922.074
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	548.262.095.000	546.726.095.000	215.711.083.000	189.563.613.612
325	Kab. Hulu Sungai Utara	517.886.917.000	517.872.458.000	211.392.359.000	195.909.429.858
326	Kab. Kotabaru	638.366.993.000	637.598.993.000	224.749.998.000	211.423.519.664
327	Kab. Tabalong	517.978.293.000	517.978.293.000	225.277.661.000	203.887.185.523
328	Kab. Tanah Laut	566.347.927.000	566.347.927.000	247.225.526.000	232.668.181.152
329	Kab. Tapin	478.637.415.000	478.637.415.000	166.394.943.000	149.160.928.041
330	Kota Banjarbaru	459.236.966.000	459.236.966.000	152.352.733.000	145.407.954.911
331	Kota Banjarmasin	735.326.613.000	725.703.025.000	206.078.099.000	189.444.770.720
332	Kab. Balangan	400.091.773.000	400.091.773.000	155.009.256.000	140.768.324.929
333	Kab. Tanah Bumbu	488.663.010.000	487.695.903.000	244.640.203.000	238.510.901.430
334	**Provinsi Kalimantan Timur**	**816.725.151.000**	**816.725.151.000**	**1.206.955.389.688**	**1.158.543.609.667**
335	Kab. Berau	597.399.169.000	597.389.726.000	217.445.913.000	200.565.708.316
336	Kab. Kutai Kartanegara	316.336.031.000	307.906.912.000	409.540.391.000	393.662.293.029
337	Kab. Kutai Barat	624.848.726.000	624.772.897.000	158.720.612.000	145.648.920.489
338	Kab. Kutai Timur	585.522.708.000	585.522.708.000	207.350.211.000	196.843.517.793
339	Kab. Mahakam Ulu	499.664.873.000	499.664.873.000	102.337.793.000	95.059.252.321
340	Kab. Paser	412.273.181.000	412.273.181.000	195.135.162.000	182.884.622.708
341	Kota Balikpapan	447.301.801.000	441.301.804.000	190.230.150.000	175.791.615.985
342	Kota Bontang	238.192.013.000	238.192.013.000	70.604.408.000	66.786.489.955

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
343	Kota Samarinda	720.471.726.000	710.059.966.000	282.451.873.000	260.143.909.897
344	Kab. Penajam Paser Utara	288.327.564.000	283.885.908.000	115.041.049.000	107.374.142.956
284	**Provinsi Kalimantan Utara**	**1.209.588.640.000**	**1.209.588.640.000**	**357.778.615.000**	**343.568.379.166**
285	Kab. Bulungan	531.374.694.000	530.646.348.000	206.456.204.000	195.263.808.739
286	Kab. Malinau	817.495.721.000	817.495.721.000	157.259.031.000	153.119.532.547
287	Kab. Nunukan	485.282.394.000	485.282.394.000	216.345.476.000	204.672.138.198
288	Kab. Tana Tidung	417.880.714.000	417.880.714.000	62.542.255.000	54.926.643.822
289	Kota Tarakan	411.434.356.000	411.434.356.000	126.807.810.000	119.782.676.625
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**1.475.480.220.000**	**1.475.480.220.000**	**1.113.788.926.400**	**1.054.124.518.040**
346	Kab. Bolaang Mongondow	572.217.368.000	571.847.230.000	205.392.576.464	179.641.464.851
347	Kab. Minahasa	700.750.525.000	687.008.369.000	213.456.045.000	203.101.159.933
348	Kab. Sangihe	558.354.893.000	558.289.457.000	263.641.598.800	235.909.712.123
349	Kota Bitung	522.576.244.000	522.576.244.000	129.891.516.000	125.752.467.354
350	Kota Manado	788.240.853.000	788.144.580.000	181.733.294.000	164.217.078.003
351	Kab. Kepulauan Talaud	509.501.154.000	509.485.099.000	182.804.805.000	163.999.763.254
352	Kab. Minahasa Selatan	549.968.817.000	549.968.817.000	201.961.347.000	192.085.572.089
353	Kab. Minahasa Tenggara	430.024.180.000	429.777.522.000	112.700.898.000	106.062.462.312
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	406.861.248.000	406.837.403.000	104.587.797.000	96.360.837.831
355	Kota Kotamobagu	397.656.494.000	397.592.388.000	130.130.004.000	125.271.374.072
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	359.669.534.000	359.652.719.000	95.669.988.000	93.837.039.789
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	364.595.503.000	364.591.532.000	92.595.803.000	89.048.572.390
358	Kota Tomohon	439.347.707.000	439.347.707.000	89.419.697.000	83.408.097.678
359	Kab. Minahasa Utara	524.679.676.000	524.679.676.000	199.865.796.000	188.115.520.314
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	394.945.131.000	394.689.610.000	137.530.120.460	130.313.084.941
361	**Provinsi Gorontalo**	**1.060.338.567.000**	**1.059.891.725.000**	**457.430.350.400**	**441.018.726.162**
362	Kab. Boalemo	471.578.143.000	471.529.579.000	200.244.928.080	186.676.184.213
363	Kab. Gorontalo	678.719.638.000	678.664.139.000	319.323.532.000	307.573.376.000
364	Kota Gorontalo	543.288.613.000	543.202.904.000	135.377.816.000	124.909.263.256
365	Kab. Pohuwato	532.356.833.000	532.300.954.000	216.698.970.000	207.486.656.118
366	Kab. Gorontalo Utara	419.416.566.000	419.416.566.000	164.123.638.000	158.375.015.136
367	Kab. Bone Bolango	502.577.392.000	502.576.461.000	185.444.275.000	179.314.143.421
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.649.120.545.000**	**1.648.920.494.000**	**1.250.068.022.767**	**1.223.726.237.535**
369	Kab. Banggai	920.153.087.000	911.493.271.000	282.058.413.000	269.797.765.532
370	Kab. Banggai Laut	415.876.921.000	415.343.576.000	92.687.215.160	83.952.941.948
371	Kab. Banggai Kepulauan	491.912.768.000	491.912.768.000	218.002.988.478	204.085.892.460
372	Kab. Buol	545.091.149.000	545.091.149.000	199.808.307.000	192.625.926.923
373	Kab. Tolitoli	650.314.134.000	650.314.134.000	259.397.973.000	244.464.422.185
374	Kab. Donggala	699.332.768.000	699.332.768.000	351.537.613.000	341.543.376.918
375	Kab. Morowali	524.831.285.000	524.831.285.000	205.280.253.000	195.815.259.680
376	Kab. Morowali Utara	586.512.006.000	586.512.006.000	234.943.712.000	232.057.027.082
377	Kab. Poso	754.085.752.000	754.085.752.000	280.141.291.800	267.506.554.934
378	Kota Palu	710.846.148.000	702.728.505.000	225.894.955.000	211.002.887.540
379	Kab. Parigi Moutong	796.086.796.000	796.054.059.000	402.335.389.260	390.256.621.976
380	Kab. Sigi	650.870.014.000	650.870.014.000	248.229.256.000	240.155.352.180
381	Kab. Tojo Una Una	600.936.539.000	600.936.539.000	267.918.140.200	262.570.236.606
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**2.586.312.342.000**	**2.586.312.342.000**	**2.816.520.494.000**	**2.669.490.585.057**
383	Kab. Bantaeng	538.856.527.000	538.773.934.000	249.844.592.000	236.717.980.557
384	Kab. Barru	540.040.862.000	537.375.298.000	173.288.098.000	160.659.636.412
385	Kab. Bone	1.145.192.059.000	1.144.920.834.000	493.804.644.000	474.305.128.600
386	Kab. Bulukumba	744.927.117.000	744.808.424.000	284.853.681.000	273.329.511.351
387	Kab. Enrekang	565.012.687.000	565.012.687.000	221.453.368.000	204.452.883.974
388	Kab. Gowa	899.982.301.000	899.835.412.000	365.667.654.000	357.896.718.636
389	Kab. Jeneponto	684.277.857.000	684.139.518.000	354.945.415.000	336.370.331.084
390	Kab. Luwu	727.192.394.000	725.938.926.000	319.965.552.000	314.551.569.660
391	Kab. Luwu Utara	687.354.603.000	686.119.309.000	230.726.412.052	224.123.128.333
392	Kab. Maros	746.111.942.000	746.051.655.000	218.467.348.000	213.551.247.673

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	793.548.716.000	793.548.716.000	216.394.485.000	209.689.173.558
394	Kab. Pinrang	749.978.575.000	749.978.575.000	224.087.357.000	217.211.012.181
395	Kab. Kepulauan Selayar	606.186.753.000	606.186.506.000	183.043.156.000	176.621.198.607
396	Kab. Sidenreng Rappang	650.900.251.000	650.894.722.000	293.867.776.000	280.092.016.759
397	Kab. Sinjai	625.198.393.000	625.198.393.000	251.297.557.000	244.163.438.379
398	Kab. Soppeng	660.303.945.000	660.303.945.000	247.172.364.000	238.338.831.037
399	Kab. Takalar	640.957.851.000	636.594.062.000	226.604.470.000	210.015.184.395
400	Kab. Tana Toraja	597.509.494.000	597.509.494.000	230.871.639.000	212.799.060.670
401	Kab. Wajo	760.785.755.000	760.785.755.000	275.407.230.000	266.849.220.454
402	Kota Parepare	480.715.688.000	480.619.453.000	165.343.924.000	159.891.478.668
403	Kab. Toraja Utara	561.642.609.000	561.620.968.000	213.667.015.000	201.581.656.568
404	Kota Makassar	1.406.148.187.000	1.378.982.976.000	409.656.598.000	372.770.768.172
405	Kota Palopo	553.929.041.000	545.288.008.000	186.440.007.000	178.163.487.995
406	Kab. Luwu Timur	573.615.809.000	573.552.805.000	169.742.036.000	164.169.565.013
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**1.064.068.728.000**	**1.064.068.728.000**	**613.203.102.000**	**578.824.276.640**
408	Kab. Majene	542.319.093.000	542.216.360.000	213.431.342.435	212.055.920.213
409	Kab. Mamuju	661.382.467.000	661.382.467.000	207.012.310.000	202.632.746.015
410	Kab. Mamuju Tengah	368.528.920.000	368.423.660.000	190.851.840.520	188.477.960.397
411	Kab. Polewali Mandar	749.942.907.000	749.833.619.000	391.239.522.000	381.103.761.452
412	Kab. Mamasa	541.842.014.000	541.842.014.000	225.916.087.000	210.485.636.348
413	Kab. Pasangkayu	503.822.302.000	503.750.425.000	165.844.930.000	166.696.572.180
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**1.618.010.763.000**	**1.617.951.293.000**	**1.255.771.327.000**	**1.215.563.652.015**
415	Kab. Buton	444.932.909.000	444.845.984.000	157.869.797.000	145.587.436.917
416	Kab. Konawe	720.111.946.000	720.066.802.000	363.150.003.000	340.645.026.820
417	Kab. Konawe Kepulauan	334.614.326.000	334.614.326.000	114.322.923.000	109.426.430.933
418	Kab. Kolaka	613.465.346.000	613.465.346.000	233.357.496.000	220.977.833.697
419	Kab. Kolaka Timur	419.944.822.000	419.944.822.000	134.419.727.000	129.890.679.539
420	Kab. Muna	692.927.318.000	692.805.186.000	278.628.929.600	274.334.695.499
421	Kota Kendari	706.229.124.000	706.213.677.000	208.910.254.000	201.362.340.249
422	Kota Bau-bau	546.139.264.000	546.129.745.000	177.234.030.000	162.350.422.919
423	Kab. Konawe Selatan	696.199.550.000	696.199.550.000	271.094.610.200	261.966.199.559
424	Kab. Bombana	507.599.197.000	507.566.707.000	212.585.318.000	206.427.390.010
425	Kab. Konawe Utara	473.662.395.000	473.662.395.000	164.281.766.000	160.032.398.858
426	Kab. Buton Utara	430.807.964.000	430.807.964.000	103.568.616.112	101.389.291.573
427	Kab. Wakatobi	489.961.146.000	485.140.403.000	250.920.267.000	245.187.686.783
428	Kab. Kolaka Utara	505.448.697.000	505.448.697.000	127.840.438.800	126.493.679.261
429	Kab. Muna Barat	376.197.757.000	376.194.907.000	145.685.074.480	144.773.747.990
430	Kab. Buton Tengah	378.620.191.000	376.769.501.000	98.286.635.000	95.027.618.343
431	Kab. Buton Selatan	370.632.506.000	368.867.801.000	105.224.246.000	101.371.972.231
432	**Provinsi Bali**	**1.325.847.555.000**	**1.325.847.555.000**	**1.150.185.324.000**	**1.105.788.247.823**
433	Kab. Badung	386.655.356.000	386.064.969.000	163.465.075.000	149.708.361.912
434	Kab. Bangli	596.072.660.000	595.947.431.000	146.147.437.000	125.959.531.500
435	Kab. Buleleng	1.028.451.956.000	1.028.451.956.000	306.498.819.000	287.110.524.805
436	Kab. Gianyar	717.774.914.000	717.737.408.000	221.405.340.000	205.333.148.999
437	Kab. Jembrana	592.425.572.000	590.574.882.000	132.378.410.000	121.156.090.518
438	Kab. Karangasem	795.849.744.000	794.649.362.000	222.167.551.720	206.724.529.233
439	Kab. Klungkung	564.462.148.000	564.281.762.000	128.390.583.000	116.988.494.459
440	Kab. Tabanan	847.281.658.000	847.281.658.000	232.470.785.000	212.322.995.660
441	Kota Denpasar	683.613.381.000	683.439.949.000	151.952.426.000	135.488.877.942
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**1.594.562.601.000**	**1.594.562.601.000**	**1.653.819.570.000**	**1.591.903.868.737**
443	Kab. Bima	909.112.358.000	909.065.732.000	422.509.861.900	411.059.584.158
444	Kab. Dompu	594.561.094.000	594.526.590.000	278.828.633.000	245.280.066.946
445	Kab. Lombok Barat	798.014.013.000	798.014.013.000	488.868.107.000	453.262.163.242
446	Kab. Lombok Tengah	1.032.682.055.000	1.032.682.055.000	458.841.648.800	432.257.058.581
447	Kab. Lombok Timur	1.193.782.074.000	1.193.782.074.000	608.585.487.000	589.385.411.397
448	Kab. Sumbawa	853.796.671.000	853.749.190.000	445.597.942.000	425.324.657.807

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
449	Kota Mataram	634.376.234.000	634.297.688.000	195.452.172.000	180.913.654.215
450	Kab. Lombok Utara	409.698.184.000	409.689.501.000	316.802.982.000	291.724.203.427
451	Kota Bima	484.764.635.000	483.668.278.000	133.568.599.000	126.589.009.862
452	Kab. Sumbawa Barat	417.480.922.000	417.413.681.000	202.492.962.000	181.519.380.126
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.879.067.231.000**	**1.879.012.473.000**	**2.237.880.102.000**	**2.168.656.332.771**
454	Kab. Alor	631.586.597.000	631.576.698.000	229.357.652.000	221.557.646.826
455	Kab. Belu	519.024.474.000	519.024.474.000	229.273.151.500	219.790.202.245
456	Kab. Ende	656.576.274.000	656.576.274.000	292.404.839.100	278.896.951.883
457	Kab. Flores Timur	641.765.840.000	641.739.981.000	195.033.214.100	186.844.430.206
458	Kab. Kupang	705.486.817.000	705.453.662.000	258.261.885.000	243.488.208.343
459	Kab. Lembata	490.941.198.000	490.886.345.000	205.631.941.000	202.158.241.150
460	Kab. Malaka	454.162.076.000	454.162.076.000	194.090.701.000	165.318.076.836
461	Kab. Manggarai	608.342.812.000	608.337.169.000	278.230.413.000	270.743.836.832
462	Kab. Ngada	488.481.165.000	488.481.165.000	148.350.694.000	142.728.120.937
463	Kab. Sikka	655.275.257.000	654.647.934.000	263.179.921.200	246.277.244.441
464	Kab. Sumba Barat	418.595.763.000	414.305.206.000	161.280.176.000	153.931.559.270
465	Kab. Sumba Timur	660.778.051.000	660.778.051.000	301.613.714.000	280.567.015.308
466	Kab. Timor Tengah Selatan	772.116.922.000	772.116.922.000	284.729.847.000	266.360.091.907
467	Kab. Timor Tengah Utara	609.878.126.000	603.770.108.000	271.406.750.000	238.813.180.481
468	Kota Kupang	685.294.530.000	675.595.958.000	207.804.882.000	186.438.019.202
469	Kab. Rote Ndao	462.162.779.000	462.159.701.000	172.686.702.000	164.646.919.773
470	Kab. Nagekeo	456.389.993.000	456.389.993.000	200.233.861.000	182.975.127.530
471	Kab. Sumba Tengah	371.499.425.000	371.499.425.000	130.728.529.000	123.692.895.336
472	Kab. Sumba Barat Daya	494.022.540.000	494.022.540.000	250.824.776.000	225.224.639.670
473	Kab. Manggarai Timur	535.026.385.000	535.024.485.000	255.320.276.916	246.377.252.837
474	Kab. Sabu Raijua	367.505.365.000	366.579.545.000	124.710.981.000	111.360.357.589
475	Kab. Manggarai Barat	535.057.618.000	535.057.618.000	244.517.760.000	222.000.323.602
476	**Provinsi Maluku**	**1.701.463.565.000**	**1.701.436.566.000**	**884.935.111.000**	**844.992.578.899**
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	581.878.545.000	581.138.269.000	203.841.355.000	189.204.107.046
478	Kab. Maluku Tengah	994.933.429.000	994.933.429.000	433.912.959.000	411.296.367.868
479	Kab. Maluku Tenggara	507.863.085.000	507.857.575.000	186.280.205.000	182.530.743.832
480	Kab. Buru	529.488.761.000	529.459.995.000	285.703.068.000	249.013.020.376
481	Kota Ambon	698.473.685.000	698.473.685.000	175.721.504.000	168.299.924.071
482	Kab. Seram Bagian Barat	624.110.217.000	624.093.079.000	283.580.423.000	267.917.754.832
483	Kab. Seram Bagian Timur	548.080.167.000	548.065.290.000	218.672.687.800	212.871.735.834
484	Kab. Maluku Barat Daya	579.507.186.000	579.322.117.000	192.725.946.000	179.657.108.942
485	Kab. Buru Selatan	442.710.510.000	442.710.510.000	147.140.439.000	141.511.621.463
486	Kab. Kepulauan Aru	602.501.466.000	602.501.466.000	195.878.559.000	163.463.954.264
487	Kota Tual	407.800.031.000	407.244.824.000	91.440.757.000	85.607.533.869
488	**Provinsi Maluku Utara**	**1.357.603.855.000**	**1.357.603.855.000**	**808.583.782.000**	**780.404.316.088**
489	Kab. Halmahera Tengah	462.160.802.000	462.127.780.000	139.900.711.200	136.129.840.079
490	Kab. Halmahera Barat	505.847.371.000	505.847.371.000	230.980.900.000	221.928.413.415
491	Kota Ternate	654.298.337.000	654.295.449.000	126.159.879.000	123.128.628.613
492	Kab. Halmahera Timur	488.568.711.000	488.568.711.000	182.153.912.000	180.000.899.133
493	Kota Tidore Kepulauan	571.113.288.000	571.111.540.000	174.164.856.000	167.468.648.144
494	Kab. Kepulauan Sula	496.549.859.000	496.549.859.000	154.066.058.000	146.552.856.913
495	Kab. Pulau Morotai	408.837.058.000	408.837.058.000	234.437.655.000	232.904.396.935
496	Kab. Pulau Taliabu	357.154.871.000	357.154.757.000	134.796.727.000	127.792.846.902
497	Kab. Halmahera Selatan	767.334.499.000	767.334.347.000	356.694.543.000	348.507.534.102
498	Kab. Halmahera Utara	502.659.506.000	502.596.103.000	197.268.115.400	192.873.833.607
499	**Provinsi Papua**	**2.616.545.381.000**	**2.616.545.381.000**	**1.260.973.985.000**	**1.205.082.088.741**
500	Kab. Yalimo	633.767.161.000	633.765.489.000	244.532.585.200	240.296.503.893
501	Kab. Lanny Jaya	658.338.490.000	658.334.386.000	200.154.683.000	198.265.299.580
502	Kab. Biak Numfor	608.692.041.000	608.688.868.000	267.463.864.000	258.531.835.163
503	Kab. Jayapura	706.489.378.000	706.489.378.000	165.275.578.000	157.835.258.461
504	Kab. Jayawijaya	750.794.516.000	750.794.516.000	272.469.609.000	264.549.480.734

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
505	Kab. Merauke	1.250.061.861.000	1.248.026.102.000	262.388.340.000	243.042.465.574
506	Kab. Mimika	636.745.915.000	629.449.915.000	194.314.221.300	188.469.665.774
507	Kab. Nabire	730.805.825.000	729.140.204.000	306.096.329.000	291.412.961.331
508	Kab. Paniai	604.641.829.000	602.790.759.000	191.837.257.400	145.631.186.646
509	Kab. Puncak Jaya	783.563.755.000	782.411.755.000	148.113.426.600	127.688.617.588
510	Kab. Kepulauan Yapen	567.668.047.000	567.633.543.000	141.943.363.000	133.989.194.430
511	Kota Jayapura	660.189.706.000	660.189.706.000	149.411.249.000	145.563.248.118
512	Kab. Sarmi	726.838.061.000	726.453.510.000	139.690.392.000	130.172.701.243
513	Kab. Keerom	557.310.251.000	557.305.064.000	318.807.142.000	289.741.485.699
514	Kab. Yahukimo	763.672.609.000	763.672.609.000	291.479.630.000	283.691.747.109
515	Kab. Pegunungan Bintang	869.086.525.000	869.085.822.000	309.765.489.700	302.851.550.471
516	Kab. Tolikara	752.192.457.000	751.424.457.000	213.959.150.000	209.152.725.471
517	Kab. Boven Digoel	848.903.800.000	848.903.800.000	203.454.427.000	190.032.161.038
518	Kab. Mappi	799.165.239.000	799.160.622.000	219.504.423.000	214.406.727.233
519	Kab. Asmat	914.873.377.000	914.873.377.000	150.693.158.000	121.745.840.232
520	Kab. Waropen	582.788.692.000	582.788.692.000	183.983.669.000	181.034.706.740
521	Kab. Mamberamo Raya	735.691.873.000	735.691.037.000	203.982.987.000	163.427.398.654
522	Kab. Mamberamo Tengah	672.340.569.000	672.339.581.000	112.659.470.820	109.973.987.600
523	Kab. Nduga	646.262.157.000	646.261.169.000	187.514.448.000	177.127.901.677
524	Kab. Dogiyai	517.560.866.000	517.560.714.000	175.584.772.000	156.328.185.772
525	Kab. Intan Jaya	717.339.157.000	717.337.694.000	137.953.909.200	131.331.800.112
526	Kab. Puncak	826.547.373.000	826.546.385.000	142.054.837.000	130.957.146.966
527	Kab. Deiyai	502.441.290.000	502.441.290.000	150.543.161.000	146.606.865.007
528	Kab. Supiori	464.282.699.000	464.276.543.000	133.516.421.000	124.980.234.328
529	**Provinsi Papua Barat**	**1.463.622.784.000**	**1.463.616.419.000**	**542.659.057.000**	**493.888.729.098**
530	Kab. Sorong	547.294.214.000	547.294.214.000	291.141.416.000	266.363.464.190
531	Kab. Manokwari	552.362.842.000	552.357.807.000	192.093.626.000	184.081.381.880
532	Kab. Manokwari Selatan	355.167.408.000	355.163.532.000	95.151.250.900	91.070.748.327
533	Kab. Fak fak	697.731.006.000	697.703.456.000	123.961.071.000	118.399.401.902
534	Kota Sorong	515.228.619.000	515.228.619.000	130.931.027.000	125.516.742.186
535	Kab. Pegunungan Arfak	388.294.922.000	388.292.737.000	121.911.557.000	114.830.095.651
536	Kab. Sorong Selatan	475.087.801.000	475.087.801.000	154.705.391.800	149.500.828.027
537	Kab. Raja Ampat	684.141.009.000	684.087.866.000	244.694.840.000	233.355.997.289
538	Kab. Teluk Bintuni	562.353.864.000	561.983.726.000	149.649.751.000	145.312.039.565
539	Kab. Teluk Wondama	460.458.547.000	460.446.995.000	162.821.626.000	154.901.518.863
540	Kab. Tambrauw	531.201.013.000	531.201.013.000	206.770.910.200	198.510.335.127
541	Kab. Maybrat	454.883.479.000	454.521.900.000	173.830.363.300	151.619.734.220
542	Kab. Kaimana	623.671.069.000	623.671.069.000	88.913.779.000	77.998.573.470
543	**Sisa Dana Cadangan**	32.983.778.000	-	2.581.119.957.532	-
	JUMLAH	**421.373.582.692.000**	**420.910.238.556.000**	**200.368.843.603.000**	**186.394.672.896.195**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 +11
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**8.357.471.654.000**	-	-	-	**8.357.471.654.000**	**8.357.471.654.000**	**12.092.064.000**	-	-	**8.369.563.718.000**
2	Kab. Aceh Barat	-	12.092.064.000	-	249.482.526.000	261.574.590.000	-	-	-	248.832.320.000	248.832.320.000
3	Kab. Aceh Besar	-	-	-	438.519.093.000	438.519.093.000	-	-	-	438.519.093.000	438.519.093.000
4	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	203.653.902.000	203.653.902.000	-	-	-	203.653.901.995	203.653.901.995
5	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	106.901.862.000	106.901.862.000	-	-	-	106.901.862.000	106.901.862.000
6	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	221.436.663.000	221.436.663.000	-	-	-	221.436.663.000	221.436.663.000
7	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	283.801.698.000	283.801.698.000	-	10.019.599.000	-	283.801.698.000	293.821.297.000
8	Kab. Aceh Timur	-	10.019.599.000	-	387.123.385.000	397.142.984.000	-	-	-	387.123.385.000	387.123.385.000
9	Kab. Aceh Utara	-	-	-	627.981.678.000	627.981.678.000	-	22.696.675.000	-	627.307.230.000	650.003.905.000
10	Kab. Bireuen	-	22.696.675.000	-	453.997.662.000	476.694.337.000	-	-	-	453.997.662.000	453.997.662.000
11	Kab. Pidie	-	-	-	525.951.016.000	525.951.016.000	-	-	-	524.655.511.065	524.655.511.065
12	Kab. Simeulue	-	-	-	117.222.029.000	117.222.029.000	-	23.010.581.000	-	117.222.029.000	140.232.610.000
13	Kota Banda Aceh	-	23.010.581.000	-	74.192.333.000	97.202.914.000	-	10.392.723.000	-	73.175.122.875	83.567.845.875
14	Kota Sabang	-	10.392.723.000	-	23.635.698.000	34.028.421.000	-	-	-	23.635.698.000	23.635.698.000
15	Kota Langsa	-	-	-	57.772.687.000	57.772.687.000	-	10.018.090.000	-	57.772.686.997	67.790.776.997
16	Kota Lhokseumawe	-	10.018.090.000	-	58.773.330.000	68.791.420.000	-	-	-	58.146.508.302	58.146.508.302
17	Kab. Nagan Raya	-	10.792.337.000	-	174.634.430.000	185.426.767.000	-	-	-	174.634.430.000	174.634.430.000
18	Kab. Aceh Jaya	-	10.205.512.000	-	134.071.262.000	144.276.774.000	-	10.792.337.000	-	134.071.262.000	144.863.599.000
19	Kab. Pidie Jaya	-	10.664.040.000	-	165.797.075.000	176.461.115.000	-	-	-	165.797.075.000	165.797.075.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	117.947.229.000	117.947.229.000	-	10.205.512.000	-	117.626.676.600	127.832.188.600
21	Kab. Gayo Lues	-	-	-	112.011.067.000	112.011.067.000	-	-	-	112.011.066.895	112.011.066.895
22	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	170.293.947.000	170.293.947.000	-	11.171.741.000	-	170.293.947.000	181.465.688.000
23	Kab. Bener Meriah	-	11.171.741.000	-	180.968.089.000	192.139.830.000	-	10.664.040.000	-	180.968.089.000	191.632.129.000
24	Kota Subulussalam	-	-	-	69.331.821.000	69.331.821.000	-	-	-	69.331.821.000	69.331.821.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**	-	-	-	-	-	-	**10.939.377.000**	-	-	**10.939.377.000**
26	Kab. Asahan	-	10.939.377.000	-	146.090.415.000	157.029.792.000	-	21.323.941.000	-	145.800.985.000	167.124.926.000
27	Kab. Dairi	-	21.323.941.000	-	127.172.564.000	148.496.505.000	-	-	-	127.172.564.000	127.172.564.000
28	Kab. Deli Serdang	-	-	-	306.386.948.000	306.386.948.000	-	-	-	306.386.907.600	306.386.907.600
29	Kab. Karo	-	-	-	197.078.926.000	197.078.926.000	-	-	-	196.824.341.200	196.824.341.200
30	Kab. LabuhanBatu	-	-	-	70.226.102.000	70.226.102.000	-	-	-	69.956.159.200	69.956.159.200
31	Kab. Langkat	-	-	-	205.446.268.000	205.446.268.000	-	-	-	205.170.800.400	205.170.800.400
32	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	285.841.420.000	285.841.420.000	-	-	-	284.315.396.300	284.315.396.300
33	Kab. Nias	-	-	-	180.585.127.000	180.585.127.000	-	-	-	180.413.087.847	180.413.087.847
34	Kab. Simalungun	-	-	-	294.442.204.000	294.442.204.000	-	23.132.664.000	-	294.214.197.460	317.346.861.460
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	23.132.664.000	-	167.751.279.000	190.883.943.000	-	-	-	167.751.279.000	167.751.279.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-	140.541.973.000	140.541.973.000	-	-	-	140.541.973.000	140.541.973.000
37	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	184.186.164.000	184.186.164.000	-	10.393.118.000	-	183.145.248.800	193.538.366.800
38	Kab. Toba Samosir	-	10.393.118.000	-	176.101.238.000	186.494.356.000	-	-	-	176.101.238.000	176.101.238.000
39	Kota Binjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kota Medan	-	-	-	-	-	-	22.438.314.000	-	-	22.438.314.000
41	Kota Pematang Siantar	-	22.438.314.000	-	-	22.438.314.000	-	-	-	-	-
42	Kota Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Batu Bara	-	-	-	118.843.171.000	118.843.171.000	-	-	-	118.843.171.000	118.843.171.000
45	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-	79.123.527.000	79.123.527.000	-	-	-	78.844.864.200	78.844.864.200
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	61.548.371.000	61.548.371.000	-	-	-	61.548.371.000	61.548.371.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	-	14.168.597.000	-	287.244.660.000	301.413.257.000	-	-	-	285.165.197.800	285.165.197.800
48	Kab. Padang Lawas	-	-	-	230.097.858.000	230.097.858.000	-	14.168.597.000	-	229.206.211.800	243.374.808.800
49	Kab. Nias Utara	-	-	-	137.008.319.000	137.008.319.000	-	-	-	133.134.980.200	133.134.980.200
50	Kab. Nias Barat	-	-	-	114.000.248.000	114.000.248.000	-	-	-	114.000.247.984	114.000.247.984
51	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	39.678.754.000	39.678.754.000	-	10.929.686.000	-	39.678.754.000	50.608.440.000
53	Kab. Pakpak Bharat	-	10.929.686.000	-	48.298.630.000	59.228.316.000	-	-	-	45.263.394.400	45.263.394.400
54	Kab. Nias Selatan	-	-	-	348.422.333.000	348.422.333.000	-	12.815.324.000	-	300.759.550.033	313.574.874.033
55	Kab. Humbang Hasundutan	-	12.815.324.000	-	123.336.297.000	136.151.621.000	-	-	-	123.336.297.000	123.336.297.000
56	Kab. Serdang Bedagai	-	-	-	184.774.302.000	184.774.302.000	-	10.482.264.000	-	184.774.302.000	195.256.566.000
57	Kab. Samosir	-	10.482.264.000	-	108.744.499.000	119.226.763.000	-	-	-	108.744.499.000	108.744.499.000
58	Kota Gunungsitoli	-	-	-	89.077.769.000	89.077.769.000	-	18.319.448.000	-	84.966.883.000	103.286.331.000
59	**Provinsi Sumatera Barat**	-	**18.319.448.000**	-	-	**18.319.448.000**	-	**45.357.649.000**	-	-	**45.357.649.000**
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	45.357.649.000	-	75.446.605.000	120.804.254.000	-	49.815.313.000	-	75.446.605.000	125.261.918.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
61	Kab. Agam	-	49.815.313.000	-	74.249.755.000	124.065.068.000	-	47.127.208.000	-	74.249.755.000	121.376.963.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	47.127.208.000	-	54.390.771.000	101.517.979.000	-	22.884.576.000	-	54.390.713.800	77.275.289.800
63	Kab. Padang Pariaman	-	22.884.576.000	-	95.038.398.000	117.922.974.000	-	9.630.660.000	-	95.038.398.000	104.669.058.000
64	Kab. Pasaman	-	9.630.660.000	-	48.262.081.000	57.892.741.000	-	29.946.867.000	-	48.262.081.000	78.208.948.000
65	Kab. Pesisir Selatan	-	29.946.867.000	-	166.305.833.000	196.252.700.000	-	22.448.614.000	-	166.305.833.000	188.754.447.000
66	Kab. Sijunjung	-	22.448.614.000	-	58.787.649.000	81.236.263.000	-	10.324.443.000	-	58.787.649.000	69.112.092.000
67	Kab. Solok	-	10.324.443.000	-	74.487.563.000	84.812.006.000	-	42.961.158.000	-	74.487.563.000	117.448.721.000
68	Kab. Tanah Datar	-	42.961.158.000	-	66.854.249.000	109.815.407.000	-	26.013.224.000	-	66.854.249.000	92.867.473.000
69	Kota Bukit Tinggi	-	26.013.224.000	-	-	26.013.224.000	-	17.241.091.000	-	-	17.241.091.000
70	Kota Padang Panjang	-	34.482.183.000	-	-	34.482.183.000	-	52.141.161.000	-	-	52.141.161.000
71	Kota Padang	-	52.141.161.000	-	-	52.141.161.000	-	33.014.812.000	-	-	33.014.812.000
72	Kota Payakumbuh	-	33.014.812.000	-	-	33.014.812.000	-	22.193.148.000	-	-	22.193.148.000
73	Kota Sawahlunto	-	22.193.148.000	-	28.211.222.000	50.404.370.000	-	21.540.682.000	-	28.211.222.000	49.751.904.000
74	Kota Solok	-	21.540.682.000	-	-	21.540.682.000	-	22.621.066.000	-	-	22.621.066.000
75	Kota Pariaman	-	22.621.066.000	-	48.050.234.000	70.671.300.000	-	22.565.475.000	-	48.050.233.995	70.615.708.995
76	Kab. Pasaman Barat	-	22.565.475.000	-	47.238.491.000	69.803.966.000	-	45.953.176.000	-	47.238.491.000	93.191.667.000
77	Kab. Dharmasraya	-	45.953.176.000	-	51.593.117.000	97.546.293.000	-	36.296.683.000	-	51.593.117.000	87.889.800.000
78	Kab. Solok Selatan	-	36.296.683.000	-	43.409.551.000	79.706.234.000	-	4.923.997.000	-	43.409.551.000	48.333.548.000
79	**Provinsi Riau**	**-**	**9.847.994.000**	**-**	-	**9.847.994.000**	-	-	-	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-	-	131.071.696.000	131.071.696.000	-	11.745.691.000	-	131.071.695.996	142.817.386.996
81	Kab. Indragiri Hilir	-	23.491.383.000	-	168.394.033.000	191.885.416.000	-	-	-	167.341.453.000	167.341.453.000
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	160.181.885.000	160.181.885.000	-	36.886.299.000	-	160.181.885.000	197.068.184.000
83	Kab. Kampar	-	36.886.299.000	-	209.669.588.000	246.555.887.000	-	22.671.514.000	-	209.110.399.200	231.781.913.200
84	Kab. Kuantan Singingi	-	22.671.514.000	-	172.266.776.000	194.938.290.000	-	35.156.855.000	-	172.266.776.000	207.423.631.000
85	Kab. Pelalawan	-	35.156.855.000	-	104.309.775.000	139.466.630.000	-	-	-	103.817.025.800	103.817.025.800
86	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	143.289.390.000	143.289.390.000	-	12.935.781.000	-	143.289.390.000	156.225.171.000
87	Kab. Rokan Hulu	-	12.935.781.000	-	139.861.061.000	152.796.842.000	-	47.867.943.000	-	139.861.060.400	187.729.003.400
88	Kab. Siak	-	47.867.943.000	-	111.240.674.000	159.108.617.000	-	21.467.529.000	-	111.240.673.988	132.708.202.988
89	Kota Dumai	-	21.467.529.000	-	-	21.467.529.000	-	12.179.366.000	-	-	12.179.366.000
90	Kota Pekanbaru	-	12.179.366.000	-	-	12.179.366.000	-	22.291.511.000	-	-	22.291.511.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	22.291.511.000	-	96.400.996.000	118.692.507.000	-	25.741.099.000	-	96.400.993.000	122.142.092.000
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**-**	**53.307.431.000**	**-**	-	**53.307.431.000**	-	**27.826.858.000**	-	-	**27.826.858.000**
93	Kab. Bintan	-	45.055.885.000	-	36.845.062.000	81.900.947.000	-	-	-	36.845.062.000	36.845.062.000
94	Kab. Natuna	-	27.826.858.000	-	63.632.478.000	91.459.336.000	-	-	-	63.632.478.000	63.632.478.000
95	Kab. Karimun	-	30.480.111.000	-	41.812.032.000	72.292.143.000	-	31.563.207.000	-	41.812.032.000	73.375.239.000
96	Kota Batam	-	31.563.207.000	-	-	31.563.207.000	-	40.835.575.000	-	-	40.835.575.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-	51.179.675.000	51.179.675.000	-	15.240.055.000	-	51.179.675.000	66.419.730.000
98	Kota Tanjung Pinang	-	40.835.575.000	-	-	40.835.575.000	-	14.364.531.000	-	-	14.364.531.000
99	Kab. Lingga	-	14.364.531.000	-	67.863.809.000	82.228.340.000	-	22.527.942.000	-	66.780.474.680	89.308.416.680
100	**Provinsi Jambi**	**-**	**25.741.099.000**	**-**	-	**25.741.099.000**	-	**35.469.501.000**	-	-	**35.469.501.000**
101	Kab. Batanghari	-	35.469.501.000	-	98.515.111.000	133.984.612.000	-	-	-	98.515.111.000	98.515.111.000
102	Kab. Bungo	-	-	-	114.776.496.000	114.776.496.000	-	33.542.355.000	-	114.100.345.000	147.642.700.000
103	Kab. Kerinci	-	33.542.355.000	-	212.339.214.000	245.881.569.000	-	43.598.450.000	-	206.737.377.600	250.335.827.600
104	Kab. Merangin	-	43.598.450.000	-	169.713.094.000	213.311.544.000	-	9.907.981.000	-	169.713.093.977	179.621.074.977
105	Kab. Muaro Jambi	-	9.907.981.000	-	123.271.746.000	133.179.727.000	-	9.998.362.000	-	123.271.746.000	133.270.108.000
106	Kab. Sarolangun	-	9.998.362.000	-	128.709.843.000	138.708.205.000	-	-	-	127.677.481.724	127.677.481.724
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	106.213.808.000	106.213.808.000	-	10.184.609.000	-	106.213.808.000	116.398.417.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	10.184.609.000	-	71.225.440.000	81.410.049.000	-	-	-	71.225.440.000	71.225.440.000
109	Kab. Tebo	-	-	-	105.115.708.000	105.115.708.000	-	11.291.209.000	-	105.115.708.000	116.406.917.000
110	Kota Jambi	-	11.291.209.000	-	-	11.291.209.000	-	44.139.667.000	-	-	44.139.667.000
111	Kota Sungai Penuh	-	44.139.667.000	-	54.677.600.000	98.817.267.000	-	66.475.238.000	-	54.610.957.200	121.086.195.200
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**-**	**66.475.238.000**	**-**	-	**66.475.238.000**	-	-	-	-	-
113	Kab. Lahat	-	-	-	301.179.650.000	301.179.650.000	-	35.294.840.000	-	301.179.650.000	336.474.490.000
114	Kab. Musi Banyuasin	-	35.294.840.000	-	227.973.390.000	263.268.230.000	-	-	-	227.973.390.000	227.973.390.000
115	Kab. Musi Rawas	-	-	-	191.128.612.000	191.128.612.000	-	33.911.170.000	-	191.128.612.000	225.039.782.000
116	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	101.742.140.000	101.742.140.000	-	22.091.246.000	-	101.742.139.999	123.833.385.999
117	Kab. Muara Enim	-	33.911.170.000	-	238.799.957.000	272.711.127.000	-	33.698.721.000	-	238.799.957.000	272.498.678.000
118	Kab. Ogan Komering Ilir	-	33.698.721.000	-	293.505.905.000	327.204.626.000	-	28.457.814.000	-	292.447.631.800	320.905.445.800
119	Kab. Ogan Komering Ulu	-	28.457.814.000	-	136.244.878.000	164.702.692.000	-	61.655.874.000	-	135.501.304.000	197.157.178.000
120	Kota Palembang	-	61.655.874.000	-	-	61.655.874.000	-	20.377.462.000	-	-	20.377.462.000
121	Kota Pagar Alam	-	12.184.320.000	-	-	12.184.320.000	-	11.136.466.000	-	-	11.136.466.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
122	Kota Lubuk linggau	-	11.136.466.000	-	-	11.136.466.000	-	35.281.887.000	-	-	35.281.887.000
123	Kota Prabumulih	-	20.377.462.000	-	21.214.413.000	41.591.875.000	-	12.184.320.000	-	21.214.413.000	33.398.733.000
124	Kab. Empat Lawang	-	-	-	128.136.700.000	128.136.700.000	-	-	-	128.136.700.000	128.136.700.000
125	Kab. Banyuasin	-	35.281.887.000	-	299.914.538.000	335.196.425.000	-	9.465.334.000	-	299.148.252.213	308.613.586.213
126	Kab. Ogan Ilir	-	9.465.334.000	-	204.595.806.000	214.061.140.000	-	32.647.211.000	-	204.569.511.600	237.216.722.600
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	32.647.211.000	-	245.139.214.000	277.786.425.000	-	9.569.062.000	-	245.139.214.000	254.708.276.000
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	9.569.062.000	-	217.175.934.000	226.744.996.000	-	-	-	217.175.934.000	217.175.934.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	77.195.208.000	77.195.208.000	-	-	-	77.195.208.000	77.195.208.000
130	**Provinsi Bangka Belitung**	-	**25.485.802.000**	-	-	**25.485.802.000**	-	**59.726.397.000**	-	-	**59.726.397.000**
131	Kab. Bangka	-	59.726.397.000	-	59.701.593.000	119.427.990.000	-	-	-	59.701.593.000	59.701.593.000
132	Kab. Belitung	-	-	-	46.568.028.000	46.568.028.000	-	10.240.398.000	-	46.568.028.000	56.808.426.000
133	Kota Pangkal Pinang	-	10.240.398.000	-	-	10.240.398.000	-	-	-	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	49.432.250.000	49.432.250.000	-	10.284.342.000	-	49.432.250.000	59.716.592.000
135	Kab. Bangka Tengah	-	10.284.342.000	-	55.192.786.000	65.477.128.000	-	-	-	54.886.145.600	54.886.145.600
136	Kab. Bangka Barat	-	-	-	55.781.378.000	55.781.378.000	-	-	-	55.781.378.000	55.781.378.000
137	Kab. Belitung Timur	-	-	-	43.155.579.000	43.155.579.000	-	10.288.774.000	-	43.155.579.000	53.444.353.000
138	**Provinsi Bengkulu**	-	**22.091.246.000**	-	-	**22.091.246.000**	-	-	-	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	109.814.061.000	109.814.061.000	-	-	-	109.814.061.000	109.814.061.000
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	169.662.351.000	169.662.351.000	-	-	-	168.961.539.800	168.961.539.800
141	Kab. Rejang Lebong	-	-	-	110.877.573.000	110.877.573.000	-	-	-	110.875.052.700	110.875.052.700
142	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Kab. Kaur	-	-	-	146.407.949.000	146.407.949.000	-	-	-	146.137.895.960	146.137.895.960
144	Kab. Seluma	-	-	-	143.052.107.000	143.052.107.000	-	24.091.141.000	-	143.052.107.000	167.143.248.000
145	Kab. Mukomuko	-	24.091.141.000	-	124.132.565.000	148.223.706.000	-	-	-	124.132.565.000	124.132.565.000
146	Kab. Lebong	-	-	-	78.571.304.000	78.571.304.000	-	-	-	78.571.304.000	78.571.304.000
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-	111.163.857.000	111.163.857.000	-	26.756.363.000	-	110.895.818.343	137.652.181.343
148	Kab. Kepahiang	-	-	-	85.736.940.000	85.736.940.000	-	-	-	85.736.940.000	85.736.940.000
149	**Provinsi Lampung**	-	**26.756.363.000**	-	-	**26.756.363.000**	-	**35.041.614.000**	-	-	**35.041.614.000**
150	Kab. Lampung Barat	-	35.041.614.000	-	127.188.856.000	162.230.470.000	-	34.537.921.000	-	127.188.855.977	161.726.776.977
151	Kab. Lampung Selatan	-	34.537.921.000	-	261.327.894.000	295.865.815.000	-	-	-	261.327.894.000	261.327.894.000
152	Kab. Lampung Tengah	-	-	-	309.099.745.000	309.099.745.000	-	-	-	309.099.744.990	309.099.744.990
153	Kab. Lampung Utara	-	-	-	248.160.049.000	248.160.049.000	-	-	-	248.160.048.996	248.160.048.996
154	Kab. Lampung Timur	-	-	-	273.707.506.000	273.707.506.000	-	12.405.685.000	-	273.707.506.000	286.113.191.000
155	Kab. Tanggamus	-	12.405.685.000	-	293.682.614.000	306.088.299.000	-	9.689.913.000	-	292.606.457.348	302.296.370.348
156	Kab. Tulang Bawang	-	9.689.913.000	-	132.914.182.000	142.604.095.000	-	12.865.766.000	-	131.102.381.081	143.968.147.081
157	Kab. Way Kanan	-	12.865.766.000	-	183.883.610.000	196.749.376.000	-	9.163.335.000	-	183.883.610.000	193.046.945.000
158	Kab. Pesawaran	-	14.169.449.000	-	155.640.921.000	169.810.370.000	-	-	-	155.640.921.000	155.640.921.000
159	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	121.008.709.000	121.008.709.000	-	57.178.308.000	-	121.008.708.096	178.187.016.096
160	Kab. Pringsewu	-	-	-	129.567.419.000	129.567.419.000	-	13.809.071.000	-	129.567.419.000	143.376.490.000
161	Kab. Mesuji	-	13.809.071.000	-	101.767.947.000	115.577.018.000	-	13.973.334.000	-	101.767.947.000	115.741.281.000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	-	13.973.334.000	-	89.161.665.000	103.134.999.000	-	-	-	89.161.665.000	89.161.665.000
163	Kota Bandar Lampung	-	9.163.335.000	-	-	9.163.335.000	-	20.768.002.000	-	-	20.768.002.000
164	Kota Metro	-	20.768.002.000	-	-	20.768.002.000	-	14.169.449.000	-	-	14.169.449.000
165	**Provinsi DKI Jakarta**	-	**57.178.308.000**	-	-	**57.178.308.000**	-	**42.579.794.000**	-	-	**42.579.794.000**
166	**Provinsi Jawa Barat**	-	**42.579.794.000**	-	-	**42.579.794.000**	-	**11.571.605.000**	-	-	**11.571.605.000**
167	Kab. Bandung	-	11.571.605.000	-	311.070.693.000	322.642.298.000	-	24.212.869.000	-	311.070.693.000	335.283.562.000
168	Kab. Bekasi	-	24.212.869.000	-	241.022.957.000	265.235.826.000	-	25.048.642.000	-	241.022.957.000	266.071.599.000
169	Kab. Bogor	-	25.048.642.000	-	488.434.210.000	513.482.852.000	-	20.410.087.000	-	488.434.209.602	508.844.296.602
170	Kab. Ciamis	-	20.410.087.000	-	254.821.787.000	275.231.874.000	-	11.071.383.000	-	254.518.375.800	265.589.758.800
171	Kab. Cianjur	-	11.071.383.000	-	412.662.735.000	423.734.118.000	-	24.827.028.000	-	412.324.560.600	437.151.588.600
172	Kab. Cirebon	-	24.827.028.000	-	436.288.708.000	461.115.736.000	-	22.747.930.000	-	436.288.708.000	459.036.638.000
173	Kab. Garut	-	22.747.930.000	-	484.184.357.000	506.932.287.000	-	23.718.391.000	-	484.184.357.000	507.902.748.000
174	Kab. Indramayu	-	23.718.391.000	-	372.069.062.000	395.787.453.000	-	58.658.558.000	-	372.069.062.000	430.727.620.000
175	Kab. Karawang	-	58.658.558.000	-	341.088.318.000	399.746.876.000	-	30.555.011.000	-	337.518.698.880	368.073.709.880
176	Kab. Kuningan	-	30.555.011.000	-	298.926.989.000	329.482.000.000	-	38.198.990.000	-	298.926.989.000	337.125.979.000
177	Kab. Majalengka	-	38.198.990.000	-	376.682.253.000	414.881.243.000	-	-	-	376.682.253.000	376.682.253.000
178	Kab. Pangandaran	-	34.730.579.000	-	89.358.559.000	124.089.138.000	-	62.388.421.000	-	89.358.559.000	151.746.980.000
179	Kab. Purwakarta	-	-	-	167.398.755.000	167.398.755.000	-	-	-	167.398.755.000	167.398.755.000
180	Kab. Subang	-	-	-	208.795.750.000	208.795.750.000	-	20.134.218.000	-	208.795.660.000	228.929.878.000
181	Kab. Sukabumi	-	20.134.218.000	-	354.347.829.000	374.482.047.000	-	49.222.417.000	-	353.489.615.288	402.712.032.288
182	Kab. Sumedang	-	49.222.417.000	-	218.940.543.000	268.162.960.000	-	31.739.145.000	-	218.940.541.600	250.679.686.600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
183	Kab. Tasikmalaya	-	31.739.145.000	-	390.383.696.000	422.122.841.000	-	-	-	390.088.429.100	390.088.429.100
184	Kab. Bandung Barat	-	-	-	241.510.582.000	241.510.582.000	-	34.730.579.000	-	241.510.582.000	276.241.161.000
185	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	60.780.190.000	-	-	60.780.190.000
186	Kota Bekasi	-	60.780.190.000	-	-	60.780.190.000	-	41.073.011.000	-	-	41.073.011.000
187	Kota Bogor	-	41.073.011.000	-	-	41.073.011.000	-	22.488.561.000	-	-	22.488.561.000
188	Kota Cirebon	-	22.488.561.000	-	-	22.488.561.000	-	10.232.668.000	-	-	10.232.668.000
189	Kota Depok	-	20.465.336.000	-	-	20.465.336.000	-	33.794.565.000	-	-	33.794.565.000
190	Kota Sukabumi	-	33.794.565.000	-	-	33.794.565.000	-	22.226.103.000	-	-	22.226.103.000
191	Kota Cimahi	-	42.092.139.000	-	-	42.092.139.000	-	24.915.617.000	-	-	24.915.617.000
192	Kota Tasikmalaya	-	22.226.103.000	-	-	22.226.103.000	-	42.092.139.000	-	-	42.092.139.000
193	Kota Banjar	-	24.915.617.000	-	22.086.828.000	47.002.445.000	-	-	-	22.086.828.000	22.086.828.000
194	**Provinsi Banten**	-	-	-	-	-	-	**8.936.361.000**	-	-	**8.936.361.000**
195	Kab. Lebak	-	8.936.361.000	-	286.755.343.000	295.691.704.000	-	-	-	286.755.343.000	286.755.343.000
196	Kab. Pandeglang	-	-	-	264.064.732.000	264.064.732.000	-	33.271.070.000	-	264.064.732.000	297.335.802.000
197	Kab. Serang	-	33.271.070.000	-	260.671.405.000	293.942.475.000	-	26.070.533.000	-	257.969.465.600	284.039.998.600
198	Kab. Tangerang	-	26.070.533.000	-	280.581.836.000	306.652.369.000	-	33.166.816.000	-	278.749.719.828	311.916.535.828
199	Kota Cilegon	-	33.166.816.000	-	-	33.166.816.000	-	44.332.710.000	-	-	44.332.710.000
200	Kota Tangerang	-	44.332.710.000	-	-	44.332.710.000	-	-	-	-	-
201	Kota Serang	-	-	-	-	-	-	29.155.470.000	-	-	29.155.470.000
202	Kota Tangerang Selatan	-	29.155.470.000	-	-	29.155.470.000	-	25.485.802.000	-	-	25.485.802.000
203	**Provinsi Jawa Tengah**	-	**62.388.421.000**	-	-	**62.388.421.000**	-	**23.796.747.000**	-	-	**23.796.747.000**
204	Kab. Banjarnegara	-	23.796.747.000	-	262.654.461.000	286.451.208.000	-	44.828.869.000	-	262.654.461.000	307.483.330.000
205	Kab. Banyumas	-	44.828.869.000	-	360.743.521.000	405.572.390.000	-	24.560.987.000	-	360.743.521.000	385.304.508.000
206	Kab. Batang	-	24.560.987.000	-	192.327.469.000	216.888.456.000	-	34.200.765.000	-	192.327.469.000	226.528.234.000
207	Kab. Blora	-	34.200.765.000	-	268.253.846.000	302.454.611.000	-	46.340.200.000	-	268.253.846.000	314.594.046.000
208	Kab. Boyolali	-	46.340.200.000	-	219.802.085.000	266.142.285.000	-	-	-	219.802.085.000	219.802.085.000
209	Kab. Brebes	-	-	-	441.009.459.000	441.009.459.000	-	46.363.857.000	-	441.009.459.000	487.373.316.000
210	Kab. Cilacap	-	46.363.857.000	-	287.722.232.000	334.086.089.000	-	56.494.117.000	-	286.955.948.800	343.450.065.800
211	Kab. Demak	-	56.494.117.000	-	276.950.857.000	333.444.974.000	-	36.594.974.000	-	276.950.857.000	313.545.831.000
212	Kab. Grobogan	-	36.594.974.000	-	289.687.819.000	326.282.793.000	-	32.300.321.000	-	289.687.819.000	321.988.140.000
213	Kab. Jepara	-	32.300.321.000	-	234.090.663.000	266.390.984.000	-	31.229.271.000	-	234.090.663.000	265.319.934.000
214	Kab. Karanganyar	-	31.229.271.000	-	160.000.995.000	191.230.266.000	-	34.569.662.000	-	160.000.995.000	194.570.657.000
215	Kab. Kebumen	-	34.569.662.000	-	396.569.628.000	431.139.290.000	-	36.454.064.000	-	395.411.358.600	431.865.422.600
216	Kab. Kendal	-	36.454.064.000	-	240.437.047.000	276.891.111.000	-	-	-	240.437.047.000	240.437.047.000
217	Kab. Klaten	-	-	-	374.660.994.000	374.660.994.000	-	56.420.303.000	-	374.660.994.000	431.081.297.000
218	Kab. Kudus	-	56.420.303.000	-	139.077.753.000	195.498.056.000	-	47.781.527.000	-	136.723.311.800	184.504.838.800
219	Kab. Magelang	-	47.781.527.000	-	383.071.777.000	430.853.304.000	-	36.798.657.000	-	383.071.777.000	419.870.434.000
220	Kab. Pati	-	36.798.657.000	-	417.038.558.000	453.837.215.000	-	35.186.769.000	-	417.038.558.000	452.225.327.000
221	Kab. Pekalongan	-	35.186.769.000	-	259.749.216.000	294.935.985.000	-	46.648.038.000	-	259.142.008.800	305.790.046.800
222	Kab. Pemalang	-	46.648.038.000	-	301.814.036.000	348.462.074.000	-	43.832.487.000	-	301.814.036.000	345.646.523.000
223	Kab. Purbalingga	-	43.832.487.000	-	237.221.605.000	281.054.092.000	-	35.465.110.000	-	237.221.605.000	272.686.715.000
224	Kab. Purworejo	-	35.465.110.000	-	369.061.708.000	404.526.818.000	-	-	-	366.917.898.000	366.917.898.000
225	Kab. Rembang	-	-	-	258.436.412.000	258.436.412.000	-	44.330.102.000	-	258.436.412.000	302.766.514.000
226	Kab. Semarang	-	44.330.102.000	-	181.931.854.000	226.261.956.000	-	58.175.406.000	-	181.931.854.000	240.107.260.000
227	Kab. Sragen	-	58.175.406.000	-	168.044.095.000	226.219.501.000	-	43.339.923.000	-	168.044.095.000	211.384.018.000
228	Kab. Sukoharjo	-	43.339.923.000	-	146.662.487.000	190.002.410.000	-	44.577.009.000	-	146.662.487.000	191.239.496.000
229	Kab. Tegal	-	44.577.009.000	-	340.958.369.000	385.535.378.000	-	41.768.103.000	-	340.958.368.997	382.726.471.997
230	Kab. Temanggung	-	41.768.103.000	-	241.944.648.000	283.712.751.000	-	47.569.421.000	-	241.944.648.000	289.514.069.000
231	Kab. Wonogiri	-	47.569.421.000	-	227.393.914.000	274.963.335.000	-	33.824.742.000	-	227.393.914.000	261.218.656.000
232	Kab. Wonosobo	-	33.824.742.000	-	212.114.096.000	245.938.838.000	-	42.396.139.000	-	212.114.096.000	254.510.235.000
233	Kota Magelang	-	42.396.139.000	-	-	42.396.139.000	-	33.260.942.000	-	-	33.260.942.000
234	Kota Pekalongan	-	33.260.942.000	-	-	33.260.942.000	-	37.543.129.000	-	-	37.543.129.000
235	Kota Salatiga	-	37.543.129.000	-	-	37.543.129.000	-	83.443.826.000	-	-	83.443.826.000
236	Kota Semarang	-	83.443.826.000	-	-	83.443.826.000	-	46.763.298.000	-	-	46.763.298.000
237	Kota Surakarta	-	46.763.298.000	-	-	46.763.298.000	-	-	-	-	-
238	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	58.831.799.000	-	-	58.831.799.000
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	-	**58.831.799.000**	**1.200.000.000.000**	-	**1.258.831.799.000**	-	**67.489.680.000**	**1.200.000.000.000**	-	**1.267.489.680.000**
240	Kab. Bantul	-	67.489.680.000	-	98.359.905.000	165.849.585.000	-	59.059.047.000	-	98.359.905.000	157.418.952.000
241	Kab. Gunung kidul	-	59.059.047.000	-	136.052.137.000	195.111.184.000	-	68.604.961.000	-	136.052.137.000	204.657.098.000
242	Kab. Kulon Progo	-	68.604.961.000	-	90.337.907.000	158.942.868.000	-	71.847.341.000	-	90.337.907.000	162.185.248.000
243	Kab. Sleman	-	71.847.341.000	-	99.035.176.000	170.882.517.000	-	35.760.859.000	-	99.035.176.000	134.796.035.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
244	Kota Yogyakarta	-	35.760.859.000	-	-	35.760.859.000	-	73.795.478.000	-	-	73.795.478.000
245	**Provinsi Jawa Timur**	-	**73.795.478.000**	-	-	**73.795.478.000**	-	**9.078.913.000**	-	-	**9.078.913.000**
246	Kab. Bangkalan	-	9.078.913.000	-	330.890.066.000	339.968.979.000	-	72.212.116.000	-	330.890.066.000	403.102.182.000
247	Kab. Banyuwangi	-	72.212.116.000	-	200.471.705.000	272.683.821.000	-	23.279.135.000	-	199.679.711.400	222.958.846.400
248	Kab. Blitar	-	23.279.135.000	-	185.804.655.000	209.083.790.000	-	33.175.993.000	-	185.524.212.200	218.700.205.200
249	Kab. Bojonegoro	-	33.175.993.000	-	367.201.310.000	400.377.303.000	-	8.986.706.000	-	367.201.310.000	376.188.016.000
250	Kab. Bondowoso	-	8.986.706.000	-	230.866.115.000	239.852.821.000	-	42.730.918.000	-	230.866.115.000	273.597.033.000
251	Kab. Gresik	-	42.730.918.000	-	280.483.802.000	323.214.720.000	-	-	-	280.483.802.000	280.483.802.000
252	Kab. Jember	-	-	-	285.367.067.000	285.367.067.000	-	49.169.078.000	-	285.367.067.000	334.536.145.000
253	Kab. Jombang	-	49.169.078.000	-	274.889.392.000	324.058.470.000	-	59.345.517.000	-	274.889.384.712	334.234.901.712
254	Kab. Kediri	-	59.345.517.000	-	310.974.159.000	370.319.676.000	-	44.723.754.000	-	310.974.159.000	355.697.913.000
255	Kab. Lamongan	-	44.723.754.000	-	367.123.481.000	411.847.235.000	-	-	-	367.123.481.000	367.123.481.000
256	Kab. Lumajang	-	-	-	189.221.532.000	189.221.532.000	-	46.331.464.000	-	188.469.078.400	234.800.542.400
257	Kab. Madiun	-	46.331.464.000	-	162.170.498.000	208.501.962.000	-	35.547.724.000	-	162.170.498.000	197.718.222.000
258	Kab. Magetan	-	35.547.724.000	-	167.714.460.000	203.262.184.000	-	76.926.900.000	-	167.445.096.800	244.371.996.800
259	Kab. Malang	-	76.926.900.000	-	365.827.590.000	442.754.490.000	-	50.246.730.000	-	365.827.590.000	416.074.320.000
260	Kab. Mojokerto	-	50.246.730.000	-	235.653.897.000	285.900.627.000	-	31.397.158.000	-	234.330.122.000	265.727.280.000
261	Kab. Nganjuk	-	31.397.158.000	-	278.092.493.000	309.489.651.000	-	30.680.922.000	-	277.415.447.400	308.096.369.400
262	Kab. Ngawi	-	30.680.922.000	-	192.609.327.000	223.290.249.000	-	35.770.257.000	-	192.609.327.000	228.379.584.000
263	Kab. Pacitan	-	35.770.257.000	-	145.072.735.000	180.842.992.000	-	14.257.593.000	-	145.072.735.000	159.330.328.000
264	Kab. Pamekasan	-	14.257.593.000	-	198.798.859.000	213.056.452.000	-	55.786.492.000	-	198.798.855.000	254.585.347.000
265	Kab. Pasuruan	-	55.786.492.000	-	362.897.025.000	418.683.517.000	-	34.763.254.000	-	361.738.924.000	396.502.178.000
266	Kab. Ponorogo	-	34.763.254.000	-	252.106.956.000	286.870.210.000	-	29.980.110.000	-	252.106.956.000	282.087.066.000
267	Kab. Probolinggo	-	29.980.110.000	-	392.410.257.000	422.390.367.000	-	-	-	392.410.256.987	392.410.256.987
268	Kab. Sampang	-	-	-	232.543.589.000	232.543.589.000	-	31.722.029.000	-	232.543.589.000	264.265.618.000
269	Kab. Sidoarjo	-	63.444.058.000	-	295.899.068.000	359.343.126.000	-	12.483.707.000	-	292.819.178.057	305.302.885.057
270	Kab. Situbondo	-	12.483.707.000	-	133.156.458.000	145.640.165.000	-	13.835.235.000	-	132.840.677.600	146.675.912.600
271	Kab. Sumenep	-	13.835.235.000	-	338.395.871.000	352.231.106.000	-	44.186.896.000	-	338.395.870.000	382.582.766.000
272	Kab. Trenggalek	-	44.186.896.000	-	148.700.015.000	192.886.911.000	-	33.028.828.000	-	148.700.015.000	181.728.843.000
273	Kab. Tuban	-	33.028.828.000	-	256.256.128.000	289.284.956.000	-	60.119.097.000	-	256.256.128.000	316.375.225.000
274	Kab. Tulungagung	-	60.119.097.000	-	233.413.883.000	293.532.980.000	-	51.430.800.000	-	233.413.883.000	284.844.683.000
275	Kota Blitar	-	51.430.800.000	-	-	51.430.800.000	-	31.846.958.000	-	-	31.846.958.000
276	Kota Kediri	-	31.846.958.000	-	-	31.846.958.000	-	55.542.726.000	-	-	55.542.726.000
277	Kota Madiun	-	55.542.726.000	-	-	55.542.726.000	-	73.871.078.000	-	-	73.871.078.000
278	Kota Malang	-	73.871.078.000	-	-	73.871.078.000	-	34.465.714.000	-	-	34.465.714.000
279	Kota Mojokerto	-	34.465.714.000	-	-	34.465.714.000	-	14.879.994.000	-	-	14.879.994.000
280	Kota Pasuruan	-	29.759.988.000	-	-	29.759.988.000	-	18.332.450.000	-	-	18.332.450.000
281	Kota Probolinggo	-	36.664.901.000	-	-	36.664.901.000	-	85.635.881.000	-	-	85.635.881.000
282	Kota Surabaya	-	85.635.881.000	-	-	85.635.881.000	-	11.271.613.000	-	-	11.271.613.000
283	Kota Batu	-	22.543.226.000	-	26.548.999.000	49.092.225.000	-	15.271.459.000	-	26.548.999.000	41.820.458.000
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	-	**15.271.459.000**	-	-	**15.271.459.000**	-	-	-	-	-
285	Kab. Bengkayang	-	-	-	106.551.026.000	106.551.026.000	-	-	-	105.939.141.800	105.939.141.800
286	Kab. Landak	-	-	-	185.369.629.000	185.369.629.000	-	-	-	185.369.629.000	185.369.629.000
287	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	268.121.598.000	268.121.598.000	-	21.029.171.000	-	267.677.322.400	288.706.493.400
288	Kab. Ketapang	-	21.029.171.000	-	255.830.330.000	276.859.501.000	-	4.650.584.000	-	255.830.330.000	260.480.914.000
289	Kab. Mempawah	-	9.301.169.000	-	66.548.772.000	75.849.941.000	-	-	-	66.548.772.000	66.548.772.000
290	Kab. Sambas	-	-	-	204.977.785.000	204.977.785.000	-	13.919.532.000	-	204.977.785.000	218.897.317.000
291	Kab. Sanggau	-	13.919.532.000	-	149.860.398.000	163.779.930.000	-	-	-	149.860.398.000	149.860.398.000
292	Kab. Sintang	-	-	-	338.481.456.000	338.481.456.000	-	57.526.840.000	-	338.481.456.000	396.008.296.000
293	Kota Pontianak	-	57.526.840.000	-	-	57.526.840.000	-	-	-	-	-
294	Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Kab. Kayong Utara	-	-	-	48.681.267.000	48.681.267.000	-	10.482.860.000	-	48.091.885.400	58.574.745.400
296	Kab. Kubu Raya	-	10.482.860.000	-	134.452.632.000	144.935.492.000	-	13.636.005.000	-	131.658.673.200	145.294.678.200
297	Kab. Sekadau	-	-	-	81.168.640.000	81.168.640.000	-	-	-	80.488.905.000	80.488.905.000
298	Kab. Melawi	-	-	-	152.528.200.000	152.528.200.000	-	-	-	152.528.167.000	152.528.167.000
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	-	**13.636.005.000**	-	-	**13.636.005.000**	-	-	-	-	-
300	Kab. Barito Selatan	-	-	-	82.580.260.000	82.580.260.000	-	22.811.541.000	-	81.993.480.000	104.805.021.000
301	Kab. Barito Utara	-	22.811.541.000	-	90.156.152.000	112.967.693.000	-	24.627.618.000	-	90.156.152.000	114.783.770.000
302	Kab. Kapuas	-	24.627.618.000	-	183.958.547.000	208.586.165.000	-	28.430.307.000	-	182.873.010.600	211.303.317.600
303	Kab. Kotawaringin Barat	-	28.430.307.000	-	78.452.976.000	106.883.283.000	-	12.464.431.000	-	77.629.234.400	90.093.665.400
304	Kab. Kotawaringin Timur	-	12.464.431.000	-	153.823.619.000	166.288.050.000	-	13.493.701.000	-	153.007.699.000	166.501.400.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
305	Kota Palangkaraya	-	13.493.701.000	-	-	13.493.701.000	-	-	-	-	-
306	Kab. Barito Timur	-	27.096.175.000	-	83.940.664.000	111.036.839.000	-	55.518.389.000	-	81.409.316.400	136.927.705.400
307	Kab. Murung Raya	-	-	-	123.560.091.000	123.560.091.000	-	27.096.175.000	-	123.560.091.000	150.656.266.000
308	Kab. Pulang Pisau	-	12.326.077.000	-	92.074.702.000	104.400.779.000	-	-	-	92.074.702.000	92.074.702.000
309	Kab. Gunung Mas	-	11.044.165.000	-	101.479.057.000	112.523.222.000	-	12.326.077.000	-	100.768.300.000	113.094.377.000
310	Kab. Lamandau	-	13.733.770.000	-	76.755.627.000	90.489.397.000	-	11.044.165.000	-	76.755.626.995	87.799.791.995
311	Kab. Sukamara	-	21.661.627.000	-	35.377.750.000	57.039.377.000	-	13.733.770.000	-	35.377.750.000	49.111.520.000
312	Kab. Katingan	-	-	-	143.868.650.000	143.868.650.000	-	-	-	143.866.360.799	143.866.360.799
313	Kab. Seruyan	-	-	-	101.114.450.000	101.114.450.000	-	21.661.627.000	-	99.900.323.600	121.561.950.600
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-	**55.518.389.000**	-	-	**55.518.389.000**	-	**24.267.787.000**	-	-	**24.267.787.000**
315	Kab. Banjar	-	24.267.787.000	-	213.261.986.000	237.529.773.000	-	21.461.681.000	-	213.261.986.000	234.723.667.000
316	Kab. Barito Kuala	-	21.461.681.000	-	151.857.387.000	173.319.068.000	-	30.326.045.000	-	151.310.854.760	181.636.899.760
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	30.326.045.000	-	118.638.000.000	148.964.045.000	-	-	-	118.380.353.200	118.380.353.200
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-	127.754.747.000	127.754.747.000	-	33.752.902.000	-	127.754.747.000	161.507.649.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	33.752.902.000	-	174.701.975.000	208.454.877.000	-	12.470.646.000	-	174.701.975.000	187.172.621.000
320	Kab. Kotabaru	-	12.470.646.000	-	165.433.272.000	177.903.918.000	-	22.632.498.000	-	165.433.272.000	188.065.770.000
321	Kab. Tabalong	-	22.632.498.000	-	106.611.659.000	129.244.157.000	-	-	-	106.611.659.000	106.611.659.000
322	Kab. Tanah Laut	-	-	-	107.128.351.000	107.128.351.000	-	35.302.817.000	-	106.247.715.000	141.550.532.000
323	Kab. Tapin	-	35.302.817.000	-	100.812.471.000	136.115.288.000	-	10.031.650.000	-	100.812.471.000	110.844.121.000
324	Kota Banjarbaru	-	10.031.650.000	-	-	10.031.650.000	-	28.436.603.000	-	-	28.436.603.000
325	Kota Banjarmasin	-	28.436.603.000	-	-	28.436.603.000	-	12.295.158.000	-	-	12.295.158.000
326	Kab. Balangan	-	12.295.158.000	-	119.058.393.000	131.353.551.000	-	26.727.417.000	-	117.281.592.400	144.009.009.400
327	Kab. Tanah Bumbu	-	26.727.417.000	-	121.078.780.000	147.806.197.000	-	9.883.392.000	-	121.078.777.000	130.962.169.000
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	**9.883.392.000**	-	-	**9.883.392.000**	-	**10.652.016.000**	-	-	**10.652.016.000**
329	Kab. Berau	-	10.652.016.000	-	109.901.417.000	120.553.433.000	-	-	-	108.830.771.000	108.830.771.000
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	185.361.774.000	185.361.774.000	-	14.539.165.000	-	181.918.327.800	196.457.492.800
331	Kab. Kutai Barat	-	14.539.165.000	-	173.097.834.000	187.636.999.000	-	33.274.329.000	-	173.097.834.000	206.372.163.000
332	Kab. Kutai Timur	-	33.274.329.000	-	171.877.602.000	205.151.931.000	-	-	-	169.261.401.936	169.261.401.936
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	72.481.479.000	72.481.479.000	-	35.641.998.000	-	71.741.502.200	107.383.500.200
334	Kab. Paser	-	-	-	122.624.619.000	122.624.619.000	-	46.534.186.000	-	121.075.068.600	167.609.254.600
335	Kota Balikpapan	-	46.534.186.000	-	-	46.534.186.000	-	31.973.282.000	-	-	31.973.282.000
336	Kota Bontang	-	31.973.282.000	-	-	31.973.282.000	-	30.087.063.000	-	-	30.087.063.000
337	Kota Samarinda	-	30.087.063.000	-	-	30.087.063.000	-	10.028.749.000	-	-	10.028.749.000
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	20.057.499.000	-	34.774.857.000	54.832.356.000	-	-	-	34.774.857.000	34.774.857.000
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-	-	83.963.363.000	83.963.363.000	-	-	-	83.963.363.000	83.963.363.000
341	Kab. Malinau	-	-	-	148.072.875.000	148.072.875.000	-	-	-	148.072.875.000	148.072.875.000
342	Kab. Nunukan	-	-	-	190.854.966.000	190.854.966.000	-	-	-	190.364.516.000	190.364.516.000
343	Kab. Tana Tidung	-	-	-	40.377.310.000	40.377.310.000	-	-	-	40.377.310.000	40.377.310.000
344	Kota Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	**35.641.998.000**	-	-	**35.641.998.000**	-	-	-	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-	160.098.474.000	160.098.474.000	-	31.959.784.000	-	160.098.473.200	192.058.257.200
347	Kab. Minahasa	-	31.959.784.000	-	170.062.089.000	202.021.873.000	-	23.394.370.000	-	170.062.089.000	193.456.459.000
348	Kab. Sangihe	-	23.394.370.000	-	113.221.776.000	136.616.146.000	-	-	-	113.221.776.000	113.221.776.000
349	Kota Bitung	-	-	-	-	-	-	42.568.988.000	-	-	42.568.988.000
350	Kota Manado	-	42.568.988.000	-	-	42.568.988.000	-	23.937.836.000	-	-	23.937.836.000
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	23.937.836.000	-	111.960.481.000	135.898.317.000	-	9.396.242.000	-	111.413.281.800	120.809.523.800
352	Kab. Minahasa Selatan	-	9.396.242.000	-	137.493.501.000	146.889.743.000	-	21.697.584.000	-	137.103.059.400	158.800.643.400
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	12.628.776.000	-	105.297.497.000	117.926.273.000	-	11.508.192.000	-	105.297.497.000	116.805.689.000
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	23.864.885.000	-	68.726.607.000	92.591.492.000	-	25.433.850.000	-	68.726.607.000	94.160.457.000
355	Kota Kotamobagu	-	25.433.850.000	-	21.267.784.000	46.701.634.000	-	-	-	21.267.784.000	21.267.784.000
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	23.016.385.000	-	67.413.050.000	90.429.435.000	-	-	-	66.740.628.595	66.740.628.595
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-	68.752.683.000	68.752.683.000	-	20.694.982.000	-	68.752.683.000	89.447.665.000
358	Kota Tomohon	-	21.697.584.000	-	-	21.697.584.000	-	13.508.446.000	-	-	13.508.446.000
359	Kab. Minahasa Utara	-	27.016.892.000	-	101.466.625.000	128.483.517.000	-	23.864.885.000	-	101.466.625.000	125.331.510.000
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	84.800.247.000	84.800.247.000	-	12.628.776.000	-	84.800.247.000	97.429.023.000
361	**Provinsi Gorontalo**	-	**10.288.774.000**	-	-	**10.288.774.000**	-	-	-	-	-
362	Kab. Boalemo	-	-	-	90.317.147.000	90.317.147.000	-	35.068.584.000	-	90.317.147.000	125.385.731.000
363	Kab. Gorontalo	-	35.068.584.000	-	213.867.281.000	248.935.865.000	-	35.426.866.000	-	213.867.281.000	249.294.147.000
364	Kota Gorontalo	-	35.426.866.000	-	-	35.426.866.000	-	32.315.885.000	-	-	32.315.885.000
365	Kab. Pohuwato	-	32.315.885.000	-	88.672.032.000	120.987.917.000	-	31.353.470.000	-	88.672.032.000	120.025.502.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
366	Kab. Gorontalo Utara	-	20.909.431.000	-	101.119.813.000	122.029.244.000	-	53.307.431.000	-	101.119.813.000	154.427.244.000
367	Kab. Bone Bolango	-	31.353.470.000	-	142.638.192.000	173.991.662.000	-	20.909.431.000	-	142.638.192.000	163.547.623.000
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**-**	**20.694.982.000**	**-**	-	**20.694.982.000**	**-**	**46.875.407.000**	**-**	-	**46.875.407.000**
369	Kab. Banggai	-	46.875.407.000	-	231.272.233.000	278.147.640.000	-	-	-	231.272.233.000	231.272.233.000
370	Kab. Banggai Laut	-	33.629.858.000	-	55.056.531.000	88.686.389.000	-	-	-	55.056.531.000	55.056.531.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	113.132.741.000	113.132.741.000	-	24.464.684.000	-	113.132.741.000	137.597.425.000
372	Kab. Buol	-	24.464.684.000	-	92.247.506.000	116.712.190.000	-	-	-	92.247.487.925	92.247.487.925
373	Kab. Tolitoli	-	-	-	88.924.948.000	88.924.948.000	-	-	-	85.995.272.800	85.995.272.800
374	Kab. Donggala	-	-	-	142.050.156.000	142.050.156.000	-	-	-	141.388.871.600	141.388.871.600
375	Kab. Morowali	-	-	-	103.094.201.000	103.094.201.000	-	-	-	103.094.201.000	103.094.201.000
376	Kab. Morowali Utara	-	-	-	111.846.722.000	111.846.722.000	-	28.941.848.000	-	111.846.722.000	140.788.570.000
377	Kab. Poso	-	-	-	129.386.922.000	129.386.922.000	-	51.780.758.000	-	129.386.922.000	181.167.680.000
378	Kota Palu	-	51.780.758.000	-	-	51.780.758.000	-	-	-	-	-
379	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	235.010.486.000	235.010.486.000	-	9.890.864.000	-	235.010.485.987	244.901.349.987
380	Kab. Sigi	-	11.536.956.000	-	145.444.862.000	156.981.818.000	-	16.814.929.000	-	145.444.862.000	162.259.791.000
381	Kab. Tojo Una Una	-	9.890.864.000	-	120.483.411.000	130.374.275.000	-	11.536.956.000	-	120.483.411.000	132.020.367.000
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**-**	**28.941.848.000**	**-**	-	**28.941.848.000**	**-**	**18.724.878.000**	**-**	-	**18.724.878.000**
383	Kab. Bantaeng	-	18.724.878.000	-	45.639.495.000	64.364.373.000	-	12.269.050.000	-	45.639.495.000	57.908.545.000
384	Kab. Barru	-	24.538.100.000	-	49.331.603.000	73.869.703.000	-	9.486.726.000	-	49.331.603.000	58.818.329.000
385	Kab. Bone	-	9.486.726.000	-	337.332.552.000	346.819.278.000	-	31.178.098.000	-	337.332.552.000	368.510.650.000
386	Kab. Bulukumba	-	31.178.098.000	-	108.344.633.000	139.522.731.000	-	-	-	108.344.633.000	108.344.633.000
387	Kab. Enrekang	-	-	-	115.526.328.000	115.526.328.000	-	20.450.374.000	-	115.526.328.000	135.976.702.000
388	Kab. Gowa	-	20.450.374.000	-	147.622.452.000	168.072.826.000	-	-	-	147.622.452.000	147.622.452.000
389	Kab. Jeneponto	-	-	-	106.818.350.000	106.818.350.000	-	-	-	106.818.350.000	106.818.350.000
390	Kab. Luwu	-	-	-	195.242.489.000	195.242.489.000	-	32.630.452.000	-	195.242.489.000	227.872.941.000
391	Kab. Luwu Utara	-	32.630.452.000	-	174.756.329.000	207.386.781.000	-	23.194.399.000	-	172.902.485.200	196.096.884.200
392	Kab. Maros	-	23.194.399.000	-	86.296.412.000	109.490.811.000	-	22.023.525.000	-	86.296.412.000	108.319.937.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	22.023.525.000	-	71.198.484.000	93.222.009.000	-	13.007.644.000	-	71.198.483.800	84.206.127.800
394	Kab. Pinrang	-	-	-	67.521.173.000	67.521.173.000	-	10.129.214.000	-	66.960.293.800	77.089.507.800
395	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	82.222.354.000	82.222.354.000	-	-	-	82.222.354.000	82.222.354.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	65.498.274.000	65.498.274.000	-	21.801.790.000	-	65.498.274.000	87.300.064.000
397	Kab. Sinjai	-	10.129.214.000	-	70.834.464.000	80.963.678.000	-	-	-	69.302.960.400	69.302.960.400
398	Kab. Soppeng	-	21.801.790.000	-	52.014.824.000	73.816.614.000	-	-	-	52.014.824.000	52.014.824.000
399	Kab. Takalar	-	-	-	80.246.588.000	80.246.588.000	-	-	-	80.246.588.000	80.246.588.000
400	Kab. Tana Toraja	-	-	-	124.964.994.000	124.964.994.000	-	32.589.092.000	-	124.964.994.000	157.554.086.000
401	Kab. Wajo	-	32.589.092.000	-	119.030.097.000	151.619.189.000	-	28.982.849.000	-	119.030.097.000	148.012.946.000
402	Kota Parepare	-	28.982.849.000	-	-	28.982.849.000	-	31.415.999.000	-	-	31.415.999.000
403	Kab. Toraja Utara	-	34.351.814.000	-	133.918.314.000	168.270.128.000	-	12.496.864.000	-	133.918.314.000	146.415.178.000
404	Kota Makassar	-	62.831.999.000	-	-	62.831.999.000	-	34.351.814.000	-	-	34.351.814.000
405	Kota Palopo	-	13.007.644.000	-	-	13.007.644.000	-	21.261.622.000	-	-	21.261.622.000
406	Kab. Luwu Timur	-	21.261.622.000	-	116.788.775.000	138.050.397.000	-	-	-	116.788.775.000	116.788.775.000
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**-**	**36.084.161.000**	**-**	-	**36.084.161.000**	**-**	**34.070.971.000**	**-**	-	**34.070.971.000**
408	Kab. Majene	-	34.070.971.000	-	64.292.022.000	98.362.993.000	-	18.531.499.000	-	64.292.022.000	82.823.521.000
409	Kab. Mamuju	-	18.531.499.000	-	79.016.987.000	97.548.486.000	-	24.603.346.000	-	79.016.987.000	103.620.333.000
410	Kab. Mamuju Tengah	-	10.381.537.000	-	52.667.274.000	63.048.811.000	-	-	-	52.667.273.000	52.667.273.000
411	Kab. Polewali Mandar	-	24.603.346.000	-	161.694.868.000	186.298.214.000	-	10.276.945.000	-	161.694.814.000	171.971.759.000
412	Kab. Mamasa	-	10.276.945.000	-	144.159.731.000	154.436.676.000	-	34.213.149.000	-	144.159.731.000	178.372.880.000
413	Kab. Pasangkayu	-	34.213.149.000	-	58.395.782.000	92.608.931.000	-	10.381.537.000	-	58.395.782.000	68.777.319.000
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**-**	**12.496.864.000**	**-**	-	**12.496.864.000**	**-**	**4.864.805.000**	**-**	-	**4.864.805.000**
415	Kab. Buton	-	9.729.610.000	-	71.946.394.000	81.676.004.000	-	32.825.418.000	-	71.946.394.000	104.771.812.000
416	Kab. Konawe	-	32.825.418.000	-	222.441.807.000	255.267.225.000	-	31.802.131.000	-	201.129.293.200	232.931.424.200
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	-	73.512.493.000	73.512.493.000	-	-	-	73.179.520.000	73.179.520.000
418	Kab. Kolaka	-	31.802.131.000	-	85.554.828.000	117.356.959.000	-	22.467.348.000	-	85.554.828.000	108.022.176.000
419	Kab. Kolaka Timur	-	-	-	96.012.368.000	96.012.368.000	-	20.246.843.000	-	96.012.368.000	116.259.211.000
420	Kab. Muna	-	22.467.348.000	-	123.284.292.000	145.751.640.000	-	32.358.142.000	-	123.284.291.400	155.642.433.400
421	Kota Kendari	-	32.358.142.000	-	-	32.358.142.000	-	14.722.538.000	-	-	14.722.538.000
422	Kota Bau-bau	-	14.722.538.000	-	-	14.722.538.000	-	-	-	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	251.213.678.000	251.213.678.000	-	-	-	251.213.678.000	251.213.678.000
424	Kab. Bombana	-	-	-	104.130.905.000	104.130.905.000	-	12.370.937.000	-	104.130.905.000	116.501.842.000
425	Kab. Konawe Utara	-	-	-	124.568.295.000	124.568.295.000	-	-	-	124.568.294.760	124.568.294.760
426	Kab. Buton Utara	-	-	-	68.196.699.000	68.196.699.000	-	-	-	68.196.698.600	68.196.698.600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
427	Kab. Wakatobi	-	12.370.937.000	-	66.406.147.000	78.777.084.000	-	9.725.367.000	-	66.066.706.600	75.792.073.600
428	Kab. Kolaka Utara	-	9.725.367.000	-	125.503.455.000	135.228.822.000	-	-	-	125.503.455.000	125.503.455.000
429	Kab. Muna Barat	-	20.246.843.000	-	78.692.194.000	98.939.037.000	-	22.869.254.000	-	78.692.194.000	101.561.448.000
430	Kab. Buton Tengah	-	22.869.254.000	-	62.567.584.000	85.436.838.000	-	-	-	62.567.583.999	62.567.583.999
431	Kab. Buton Selatan	-	-	-	59.786.450.000	59.786.450.000	-	68.434.406.000	-	59.786.450.000	128.220.856.000
432	**Provinsi Bali**	-	**68.434.406.000**	-	-	**68.434.406.000**	-	**74.538.152.000**	-	-	**74.538.152.000**
433	Kab. Badung	-	74.538.152.000	-	52.584.767.000	127.122.919.000	-	42.898.678.000	-	52.584.767.000	95.483.445.000
434	Kab. Bangli	-	42.898.678.000	-	61.334.645.000	104.233.323.000	-	43.803.047.000	-	61.334.645.000	105.137.692.000
435	Kab. Buleleng	-	43.803.047.000	-	124.026.738.000	167.829.785.000	-	48.392.124.000	-	124.026.738.000	172.418.862.000
436	Kab. Gianyar	-	48.392.124.000	-	59.992.299.000	108.384.423.000	-	19.168.984.000	-	59.992.299.000	79.161.283.000
437	Kab. Jembrana	-	19.168.984.000	-	49.043.178.000	68.212.162.000	-	31.313.915.000	-	49.043.178.000	80.357.093.000
438	Kab. Karangasem	-	31.313.915.000	-	78.718.974.000	110.032.889.000	-	47.024.460.000	-	78.718.974.000	125.743.434.000
439	Kab. Klungkung	-	47.024.460.000	-	51.533.982.000	98.558.442.000	-	49.122.725.000	-	51.533.982.000	100.656.707.000
440	Kab. Tabanan	-	49.122.725.000	-	118.204.542.000	167.327.267.000	-	18.878.781.000	-	118.204.542.000	137.083.323.000
441	Kota Denpasar	-	18.878.781.000	-	34.750.461.000	53.629.242.000	-	36.346.428.000	-	34.750.461.000	71.096.889.000
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	-	**36.346.428.000**	-	-	**36.346.428.000**	-	**6.110.538.000**	-	-	**6.110.538.000**
443	Kab. Bima	-	12.221.076.000	-	185.618.739.000	197.839.815.000	-	24.359.784.000	-	185.618.739.000	209.978.523.000
444	Kab. Dompu	-	24.359.784.000	-	70.794.926.000	95.154.710.000	-	22.304.545.000	-	70.794.926.000	93.099.471.000
445	Kab. Lombok Barat	-	22.304.545.000	-	155.598.022.000	177.902.567.000	-	14.284.203.000	-	155.598.022.000	169.882.225.000
446	Kab. Lombok Tengah	-	14.284.203.000	-	193.175.390.000	207.459.593.000	-	9.473.144.000	-	193.175.390.000	202.648.534.000
447	Kab. Lombok Timur	-	9.473.144.000	-	307.330.344.000	316.803.488.000	-	23.419.080.000	-	307.330.225.400	330.749.305.400
448	Kab. Sumbawa	-	23.419.080.000	-	144.052.683.000	167.471.763.000	-	32.995.203.000	-	144.052.683.000	177.047.886.000
449	Kota Mataram	-	32.995.203.000	-	-	32.995.203.000	-	13.537.330.000	-	-	13.537.330.000
450	Kab. Lombok Utara	-	29.778.622.000	-	64.347.204.000	94.125.826.000	-	-	-	64.347.203.000	64.347.203.000
451	Kota Bima	-	13.537.330.000	-	-	13.537.330.000	-	27.802.130.000	-	-	27.802.130.000
452	Kab. Sumbawa Barat	-	27.802.130.000	-	60.412.147.000	88.214.277.000	-	29.778.622.000	-	60.412.142.999	90.190.764.999
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Kab. Alor	-	-	-	163.156.591.000	163.156.591.000	-	-	-	163.156.591.000	163.156.591.000
455	Kab. Belu	-	-	-	84.043.335.000	84.043.335.000	-	-	-	84.043.335.000	84.043.335.000
456	Kab. Ende	-	-	-	198.280.230.000	198.280.230.000	-	-	-	198.280.230.000	198.280.230.000
457	Kab. Flores Timur	-	-	-	173.650.002.000	173.650.002.000	-	-	-	173.650.002.000	173.650.002.000
458	Kab. Kupang	-	-	-	165.133.602.000	165.133.602.000	-	-	-	164.239.671.600	164.239.671.600
459	Kab. Lembata	-	-	-	131.833.144.000	131.833.144.000	-	-	-	131.833.144.000	131.833.144.000
460	Kab. Malaka	-	-	-	110.237.185.000	110.237.185.000	-	-	-	110.227.853.592	110.227.853.592
461	Kab. Manggarai	-	-	-	149.132.954.000	149.132.954.000	-	-	-	149.132.954.000	149.132.954.000
462	Kab. Ngada	-	-	-	110.433.806.000	110.433.806.000	-	19.540.038.000	-	109.682.319.436	129.222.357.436
463	Kab. Sikka	-	19.540.038.000	-	151.300.419.000	170.840.457.000	-	-	-	151.300.419.000	151.300.419.000
464	Kab. Sumba Barat	-	-	-	85.550.126.000	85.550.126.000	-	-	-	85.550.125.990	85.550.125.990
465	Kab. Sumba Timur	-	-	-	125.908.849.000	125.908.849.000	-	-	-	124.899.974.700	124.899.974.700
466	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	287.091.027.000	287.091.027.000	-	-	-	286.081.705.800	286.081.705.800
467	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	160.388.979.000	160.388.979.000	-	-	-	160.388.978.200	160.388.978.200
468	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	Kab. Rote Ndao	-	-	-	104.793.226.000	104.793.226.000	-	-	-	104.394.398.000	104.394.398.000
470	Kab. Nagekeo	-	-	-	86.209.887.000	86.209.887.000	-	-	-	86.209.887.000	86.209.887.000
471	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	70.606.507.000	70.606.507.000	-	-	-	70.606.507.000	70.606.507.000
472	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	231.558.590.000	231.558.590.000	-	-	-	229.561.940.177	229.561.940.177
473	Kab. Manggarai Timur	-	-	-	198.015.408.000	198.015.408.000	-	-	-	198.015.408.000	198.015.408.000
474	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	85.193.667.000	85.193.667.000	-	-	-	85.193.667.000	85.193.667.000
475	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	147.987.069.000	147.987.069.000	-	-	-	147.987.069.000	147.987.069.000
476	**Provinsi Maluku**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	-	82.696.960.000	82.696.960.000	-	32.880.138.000	-	82.696.960.000	115.577.098.000
478	Kab. Maluku Tengah	-	32.880.138.000	-	175.993.709.000	208.873.847.000	-	24.210.761.000	-	174.850.684.600	199.061.445.600
479	Kab. Maluku Tenggara	-	24.210.761.000	-	146.739.711.000	170.950.472.000	-	14.321.934.000	-	146.739.711.000	161.061.645.000
480	Kab. Buru	-	14.321.934.000	-	81.626.059.000	95.947.993.000	-	10.860.813.000	-	81.626.059.000	92.486.872.000
481	Kota Ambon	-	10.860.813.000	-	37.432.375.000	48.293.188.000	-	-	-	37.432.374.291	37.432.374.291
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	103.750.347.000	103.750.347.000	-	-	-	103.444.855.000	103.444.855.000
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	159.641.606.000	159.641.606.000	-	-	-	157.091.045.400	157.091.045.400
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-	105.365.129.000	105.365.129.000	-	-	-	105.365.129.000	105.365.129.000
485	Kab. Buru Selatan	-	-	-	87.193.753.000	87.193.753.000	-	-	-	87.193.753.000	87.193.753.000
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	108.537.803.000	108.537.803.000	-	-	-	108.537.800.700	108.537.800.700
487	Kota Tual	-	-	-	33.531.749.000	33.531.749.000	-	-	-	33.531.749.000	33.531.749.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
488	**Provinsi Maluku Utara**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	58.095.474.000	58.095.474.000	-	44.225.740.000	-	58.095.463.572	102.321.203.572
490	Kab. Halmahera Barat	-	20.772.657.000	-	130.458.534.000	151.231.191.000	-	-	-	130.192.835.600	130.192.835.600
491	Kota Ternate	-	44.225.740.000	-	-	44.225.740.000	-	20.772.657.000	-	-	20.772.657.000
492	Kab. Halmahera Timur	-	-	-	97.797.587.000	97.797.587.000	-	-	-	97.797.587.000	97.797.587.000
493	Kota Tidore Kepulauan	-	21.871.817.000	-	45.743.234.000	67.615.051.000	-	34.074.583.000	-	45.743.233.988	79.817.816.988
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	73.755.725.000	73.755.725.000	-	21.871.817.000	-	73.755.724.508	95.627.541.508
495	Kab. Pulau Morotai	-	34.074.583.000	-	75.514.080.000	109.588.663.000	-	-	-	75.514.079.589	75.514.079.589
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-	-	63.954.401.000	63.954.401.000	-	-	-	63.954.401.000	63.954.401.000
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-	-	194.264.695.000	194.264.695.000	-	18.706.535.000	-	194.264.695.000	212.971.230.000
498	Kab. Halmahera Utara	-	18.706.535.000	-	152.020.340.000	170.726.875.000	-	-	-	152.020.339.400	152.020.339.400
499	**Provinsi Papua**	**8.357.471.654.000**	-	-	-	**8.357.471.654.000**	**8.357.471.654.000**	-	-	-	**8.357.471.654.000**
500	Kab. Yalimo	-	-	-	243.261.623.000	243.261.623.000	-	-	-	243.261.623.000	243.261.623.000
501	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	349.888.263.000	349.888.263.000	-	-	-	349.888.263.000	349.888.263.000
502	Kab. Biak Numfor	-	-	-	202.716.131.000	202.716.131.000	-	20.549.463.000	-	202.716.131.000	223.265.594.000
503	Kab. Jayapura	-	41.098.926.000	-	128.846.060.000	169.944.986.000	-	-	-	128.846.060.000	128.846.060.000
504	Kab. Jayawijaya	-	-	-	280.676.060.000	280.676.060.000	-	31.874.187.000	-	280.676.060.000	312.550.247.000
505	Kab. Merauke	-	31.874.187.000	-	220.530.160.000	252.404.347.000	-	-	-	220.530.160.000	220.530.160.000
506	Kab. Mimika	-	-	-	146.712.955.000	146.712.955.000	-	20.240.728.000	-	143.848.195.404	164.088.923.404
507	Kab. Nabire	-	20.240.728.000	-	90.739.268.000	110.979.996.000	-	-	-	90.739.268.000	90.739.268.000
508	Kab. Paniai	-	-	-	195.984.381.000	195.984.381.000	-	-	-	195.984.381.000	195.984.381.000
509	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	280.489.494.000	280.489.494.000	-	-	-	280.489.494.000	280.489.494.000
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-	135.700.906.000	135.700.906.000	-	34.203.487.000	-	135.700.906.000	169.904.393.000
511	Kota Jayapura	-	34.203.487.000	-	25.805.239.000	60.008.726.000	-	-	-	25.805.239.000	25.805.239.000
512	Kab. Sarmi	-	-	-	99.025.592.000	99.025.592.000	-	-	-	99.025.592.000	99.025.592.000
513	Kab. Keerom	-	-	-	99.458.668.000	99.458.668.000	-	-	-	99.458.668.000	99.458.668.000
514	Kab. Yahukimo	-	-	-	405.937.774.000	405.937.774.000	-	-	-	405.937.774.000	405.937.774.000
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	253.279.404.000	253.279.404.000	-	-	-	253.279.404.000	253.279.404.000
516	Kab. Tolikara	-	-	-	419.512.047.000	419.512.047.000	-	-	-	419.512.047.000	419.512.047.000
517	Kab. Boven Digoel	-	-	-	136.206.844.000	136.206.844.000	-	-	-	136.206.843.994	136.206.843.994
518	Kab. Mappi	-	-	-	180.922.561.000	180.922.561.000	-	-	-	180.922.561.000	180.922.561.000
519	Kab. Asmat	-	-	-	246.961.264.000	246.961.264.000	-	-	-	246.961.264.000	246.961.264.000
520	Kab. Waropen	-	-	-	102.972.237.000	102.972.237.000	-	-	-	102.972.236.600	102.972.236.600
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	98.810.603.000	98.810.603.000	-	-	-	97.465.760.226	97.465.760.226
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-	88.550.750.000	88.550.750.000	-	-	-	88.550.750.000	88.550.750.000
523	Kab. Nduga	-	-	-	214.316.240.000	214.316.240.000	-	-	-	214.316.240.000	214.316.240.000
524	Kab. Dogiyai	-	-	-	113.379.892.000	113.379.892.000	-	-	-	113.379.892.000	113.379.892.000
525	Kab. Intan Jaya	-	-	-	136.333.836.000	136.333.836.000	-	-	-	136.333.836.000	136.333.836.000
526	Kab. Puncak	-	-	-	205.140.134.000	205.140.134.000	-	-	-	205.140.133.974	205.140.133.974
527	Kab. Deiyai	-	-	-	93.082.889.000	93.082.889.000	-	-	-	92.915.240.836	92.915.240.836
528	Kab. Supiori	-	-	-	42.261.734.000	42.261.734.000	-	-	-	42.261.734.000	42.261.734.000
529	**Provinsi Papua Barat**	**4.265.000.000.000**	-	-	-	**4.265.000.000.000**	**4.265.000.000.000**	-	-	-	**4.265.000.000.000**
530	Kab. Sorong	-	10.156.872.000	-	175.045.196.000	185.202.068.000	-	-	-	175.045.196.000	175.045.196.000
531	Kab. Manokwari	-	-	-	140.853.254.000	140.853.254.000	-	10.156.872.000	-	140.853.253.200	151.010.125.200
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	60.747.361.000	60.747.361.000	-	-	-	60.747.361.000	60.747.361.000
533	Kab. Fak fak	-	-	-	138.140.255.000	138.140.255.000	-	-	-	138.140.255.000	138.140.255.000
534	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	21.717.977.000	-	-	21.717.977.000
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	139.457.632.000	139.457.632.000	-	36.084.161.000	-	139.457.632.000	175.541.793.000
536	Kab. Sorong Selatan	-	12.445.857.000	-	105.648.091.000	118.093.948.000	-	9.491.287.000	-	105.648.091.000	115.139.378.000
537	Kab. Raja Ampat	-	21.717.977.000	-	104.770.020.000	126.487.997.000	-	6.222.928.000	-	104.770.020.000	110.992.948.000
538	Kab. Teluk Bintuni	-	18.982.575.000	-	112.647.475.000	131.630.050.000	-	-	-	112.647.356.400	112.647.356.400
539	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	70.928.885.000	70.928.885.000	-	-	-	70.928.241.200	70.928.241.200
540	Kab. Tambrauw	-	-	-	176.969.767.000	176.969.767.000	-	-	-	176.969.766.400	176.969.766.400
541	Kab. Maybrat	-	-	-	197.466.565.000	197.466.565.000	-	-	-	197.466.564.000	197.466.564.000
542	Kab. Kaimana	-	-	-	94.240.757.000	94.240.757.000	-	-	-	94.240.757.000	94.240.757.000
	JUMLAH	**20.979.943.308.000**	**10.000.000.000.000**	**1.200.000.000.000**	**70.000.000.000.000**	**102.179.943.308.000**	**20.979.943.308.000**	**9.694.447.489.000**	**1.200.000.000.000**	**69.814.148.478.999**	**101.688.539.275.999**

Republik Indonesia

Lampiran 4

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Per 31 Desember 2019

PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)
PER 31 DESEMBER 2019

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total sd 2024
1	011	Kementerian Luar Negeri	249.694.841.000	267.484.085.000	257.088.395.000	246.392.879.000	235.491.389.000	1.256.151.589.000
2	012	Kementerian Pertahanan	1.722.051.035.000	2.175.146.572.000				3.897.197.607.000
3	015	Kementerian Keuangan	790.455.096.000	1.392.470.558.000	644.952.649.000	387.095.171.000	826.261.649.000	4.041.235.123.000
4	025	Kementerian Agama	1.003.816.517.400	1.057.107.056.100	855.119.311.500			2.916.042.885.000
5	024	Kementerian Kesehatan	179.419.022.000	148.394.002.200				327.813.024.200
Jumlah			**3.945.436.511.400**	**5.040.602.273.300**	**1.757.160.355.500**	**633.488.050.000**	**1.061.753.038.000**	**12.438.440.228.200**

Republik Indonesia

Lampiran 5

Saldo Kas Rekening KPPN
Per 31 Desember 2019
& 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)	31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	2.891.111.227.978	5.126.994.858.550
2	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	7.986.125	782.358.523
JUMLAH KAS DI KPPN			**2.891.119.214.103**	**5.127.777.217.073**



Republik Indonesia

Lampiran 6

Kas pada KL dan BUN
Per 31 Desember 2019
& 31 Desember 2018

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2018 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2018 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2018 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	7.991.268
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	152.903.312	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-	5.899.219.611	43.223.870.642
4	005	MAHKAMAH AGUNG	331.818.397	273.808.265	22.228.000	172.019.680	3.031.425	83.330.667
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.256.573.831	1.437.588.539	90.660.879.712	49.747.260.089	70.599.089.462	64.023.781.991
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	9.086.376.908	5.134.682.240	-	-	58.563.511.865	43.346.258.768
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	32.852.895	143.743.791	4.716.981.000	4.030.950.000	1.159.231.725	1.129.504.310
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	177.159.041.478	166.373.082.924	14.480.375.170	17.634.868.167	19.585.248.866	49.597.819.355
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	77.391.000	513.621.500	27.884.662	-	320.544.677.910	86.891.991.725
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.937.351.678	2.473.362.985	-	-	52.788.944.267	32.906.472.664
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.210.908.064	2.313.040.226	5.041.393.083	3.658.057.948	454.064.488.257	363.024.058.349
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	266.681.076	348.601.261	14.061.000	1.400.000	192.184.569.582	16.728.092.179
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.221.986.058	487.542.376	89.842.259	-	528.198.431	17.974.532
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	85.601.054	-	-	-	2.262.493.816	3.305.418.786
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.366.397.215	1.703.397.121	16.015.058.606	1.381.754.969	31.552.751.711	37.072.720.984
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.978.861.883	8.424.255.920	1.604.000	325.000	80.465.430.689	222.407.919.463
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	38.995.296	1.659.565.736	125.769.723	849.108.715	511.420.745.577	173.145.297.853
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	888.226.527	2.097.762.414	828.552.276	813.089.991	42.846.058.768	69.233.159.758
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	279.559.381	38.350.000	82.500.000	500	82.690.942	433.310.701
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	67.666.000	211.191.900	-	992.366.000	2.011.950.360.632	391.775.845.227
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.161.926.711	433.086.289	192.341.000	498.020.500	59.800.603.661	58.433.019.192
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.124.586	997.164.079	2.337.500	81.252.337	323.118.323.305	4.153.747.344
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	74.664.285	89.433.535	-	-	1.804.456.796	39.139.679
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	58.450.000	-	-	-	2.245.494.963
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	149.980.723	-	-	-	93.422.527	756.122.835
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	87.591	185.843.797	-	-	180.462.613	204.488.113
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	30.996.559	2.050.000	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG	657.972.636	2.120.995.548	27.159.742.703	6.790.646.185	471.433.500.118	1.281.396.850.338
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	100.000	-	-	-	4.294.107.374	5.214.488.215
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	177.838.780	-	-	-	171.322.254	2.123.408.012
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	95.000	-	-	23.771.608	46.512.282
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	23.811.826	178.812.587
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	60.431.458	262.099.491	-	80.000	1.211.662.100	8.573.176.162
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	38.136.194	205.713.244	-	-	5.967.367.257	26.811.835.914
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	89.560.967	25.043.881	-	-	2.429.202.388	20.185.135.659
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	214.654	13.720.600	-	-	31.124.387	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	225.009	160.430.233	-	-	2.448.615.012	212.857.027
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	156.344.184	122.930.729	2.090.260.500	1.527.976.500	178.573.565.699	126.473.628.235
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	16.910.010	-	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	472.469.831	-	-	1.202.743.681	1.519.541.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	159.405.201	909.613	-	-	1.510.737.282	13.366.623.268
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	500.000	16.831.000	-	-	1.178.000	-

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2018 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2018 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2018 *Audited*
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	170.275.490	301.703.933
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	3.439.915.392	6.249.325.250
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.337.000	-	-	1.375.000	3.780.165	170.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.149.243.313	12.199.147.128	-	-	366.268.764.461	20.645.677.672
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	101.921.980	150.729.965
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	16.777.287	1.394.382	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	2.642.352	-	13.300.000	361.996.100	899.375.091	1.809.135.278
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	668.429.983	-	-	622.968.861	548.841.411
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	814.521.772	3.221.303	373.138.050	894.941.252	2.489.073.382	2.883.687.144
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	88.731.703	-	-	1.772.240	32.025.846
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	139.085.359	387.465.154
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	18.792.186	10.564.192
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.720.000	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	44.019.000	160.675.524
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	111.982.741	-	-	-	200.650	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7.139.398.465	9.242.309.176	4.198.728.123	2.833.954.982	738.698.927	2.465.438.568
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.611.000	354.442.744	1.844.000	-	2.873.893.828	13.575.289.272
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	500.000.000	393.051	852.463	29.125.942.979	13.274.181.027
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.607.730.318	1.244.617.605	-	-	7.683.851.598	7.142.305.426
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	4.266.989	6.448.280
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	27.509.790.021	265.088.934.982
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	150.000.000	-	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	9.840
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	190.793.773	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	42.000.924	465.454.036
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	94.215.715.907	105.945.287.155
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	6.433.319	55.078.000	-	-	993.915.575	2.247.800.333
79	114	SEKRETARIAT KABINET	3.272.809.348	6.650.017.080	-	-	1.035.224.316	2.528.755.745
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.765.985.583	54.650.444.304	-	-	139.688.221.070	30.423.399.232
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	8.292.002	191.778.834	4.750.000	8.500.000	44.452.120	304.983.823
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	41.776.624	2.700.000	23.996.500	-	34.860.215	223.138.219
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	3.052.000
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	2.041.278
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	122.551.396	-
	PENYESUAIAN		-	-	-	-	**(1.632.840.904.986)**	(722.521.164.344)
	JUMLAH KAS PADA K/L		**234.188.766.627**	**284.832.122.869**	**166.170.010.917**	**92.280.796.378**	**3.956.446.049.872**	**2.904.645.056.288**
	JUMLAH KAS PADA SATKER BUN		-	**318.150.600**	-	-	**1.634.617.895.228**	**734.083.631.611**
	JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN		**234.188.766.627**	**285.150.273.469**	**166.170.010.917**	**92.280.796.378**	**5.591.063.945.100**	**3.638.728.687.899**

Republik Indonesia

Lampiran 7

Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja & Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2019 & 31 Desember 2018

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*	31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*	31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	365.650.226	8.081.642.144	-	-	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.730.282.768	10.047.125.304	-	-	-	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	-	12.244.268.080	-	-	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	18.823.430.028	18.806.044.829	-	-	-	15.799.083
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.350.000.000	-	-	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	91.616.963.772	46.339.409.828	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.086.250.000	10.281.967.652.641	22.143.189.884.406	5.825.359.174.425	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.853.310.665	11.586.621.509	5.558.458.273	-	51.754.279	6.258.866
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.511.562.702.712	403.999.653.767	3.556.618.919	3.191.963.782	528.706.457.547	547.460.256.932
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	544.750.050.814	7.199.940.494.192	-	-	1.240.370.197	39.400.000
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	630.838.321	-	-	-	1.314.847.300	1.683.139.314
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	609.681.944	609.884.111	-	65.712.600	16.659.426.427	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17.396.021.069	13.232.318.730	-	-	917.568.894	656.668.774
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	771.004.826.422	746.624.152.037	-	3.239.072.280	1.929.044.625	1.276.144.200
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.781.000.944	57.881.942.877	63.429.896.254	-	1.120.943.972	514.275.732
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	138.064.742.375	110.961.057.652	1.682.122.214	2.863.054.200	73.053.399.031	453.533.788
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	621.810.720
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	508.490.858	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	11.186.221.915	20.715.982.899	-	-	6.007.500	6.007.500
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.889.438.586	1.538.743.092	-	-	4.262.423.003	559.083.651
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.392.000.000	4.392.000.000	-	8.035.327.500	2.419.364.698	12.469.580.396
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	502.280.600	58.236.633	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	8.583.486.818	9.633.438.059	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	601.380.961	481.258.001	-	-	379.285.240	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	291.032.815.892	4.690.204.581	2.518.238.998	152.800.298	49.477.919.354	26.684.078.461
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	352.191.621	415.762.001	-	-	-	(1.768.108.828)
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	182.011.382	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	154.413.458.451	225.026.073.712	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	5.881.096.260	-	3.790.686.623	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	26.189.689	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.790.809.575	1.616.040.032	-	-	9.623.499	11.190.198
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	43.207.682.176	28.553.827.881	-	-	2.287.530	224.200

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*	31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*	31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	560.234.407	389.100.033	-	-	-	17.586.730
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	14.001.410.618	10.710.114.042	-	-	61.157.500	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.658.378.421	207.086.265	-	-	2.286.089.668.018	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	233.004.734.647	167.323.892.899	2.284.441.428.139	1.494.519.431.842	1.766.258.494	19.080.548
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	6.765.197.904	14.190.671.821	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	195.083.750	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	10.796.730.375	49.500.000	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	7.432.341.022	1.234.307.331	-	-	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	15.126.451	-	-	-	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	22.125.795	927.000	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.000.000	3.000.000	-	-	28.806.305.761	13.557.888.534
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.252.180.457	25.449.832.216	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	23.678.775	99.467.503	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.195.433.272	1.783.708.900	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	5.567.090.500	155.833.333	-	-	245.350.843	88.405.911
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	171.545.000	153.609.000	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	35.750.000	37.950.000	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	701.140	556.499.787
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	149.897.742	82.848.542	4.310.462.736	13.793.480.760	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	45.510.904	-	-	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6.650.000	6.650.000	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.176.497.935	1.211.250.276	-	-	3.713.750	15.440.600
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.037.890.897	7.423.010.101	-	-	8.889.876	21.816.188
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	5.123.314.000	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.970.442.639	2.209.379.781	-	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.637.210.047	2.052.169.757	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	428.033.556	340.575.001	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	5.231.053.981.586	3.848.213.548.984	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	196.211.756	529.976.513	-	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	3.373.051.041	259.589.052	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	527.085.247	882.592.499	-	-	45.543.000	-
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	59.239.583	497.751.375	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.867.065.556	3.113.505.376	-	-	-	-

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*	31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*	31 DESEMBER 2019 *(Audited)*	31 DESEMBER 2018 *(Audited)*
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	30.206.210.977	27.818.764.946
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	144.827.210.119	249.816.402.819	-	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	79.311.444	-	-	294.034.000	-	22.946.250
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	-	60.412	-	-	-	4.339.517.000
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	95.123.449.077	106.203.147.477	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	5.226.680.846	3.084.017.500	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	3.333.746.667	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**10.459.108.928.890**	**23.667.667.801.258**	**24.512.477.796.562**	**7.356.819.377.069**	**3.028.979.606.205**	**637.147.289.481**
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	416.666.684	1.750.000.084	-	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BA BUN			**416.666.684**	**1.750.000.084**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL			**10.459.525.595.574**	**23.669.417.801.342**	**24.512.477.796.562**	**7.356.819.377.069**	**3.028.979.606.205**	**637.147.289.481**

Republik Indonesia

Lampiran 8

Piutang Pajak & Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2019

A. Direktorat Jenderal Pajak

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai	Penyisihan	Netto
115121	Piutang PPh Psl. 21	1.354.212.067.614	665.221.978.528	**688.990.089.086**
115122	Piutang PPh Psl. 22	596.148.019.480	460.636.155.805	**135.511.863.675**
115124	Piutang PPh Psl. 23	3.598.683.656.963	2.852.234.169.141	**746.449.487.822**
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	1.818.888.178.087	1.185.723.916.303	**633.164.261.784**
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	18.693.188.405.174	11.570.939.204.674	**7.122.249.200.500**
115127	Piutang PPh Psl. 26	1.339.521.126.420	1.105.290.231.110	**234.230.895.310**
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	2.938.856.976.586	1.228.192.571.040	**1.710.664.405.546**
115131	Piutang PPN	24.501.507.270.666	13.491.413.970.676	**11.010.093.299.990**
115141	Piutang PPn BM	350.738.062.929	325.601.777.115	**25.136.285.814**
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.316.906.729.273	545.901.484.809	**771.005.244.464**
115154	Piutang PBB Kehutanan	774.739.317.320	315.434.947.539	**459.304.369.781**
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.459.840.421.372	2.617.496.862.208	**1.842.343.559.164**
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	75.075.097.032	12.940.644.402	**62.134.452.630**
115172	Piutang PTLL	20.762.097.400	5.259.519.843	**15.502.577.557**
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6.770.110.735.523	5.162.165.260.527	**1.607.945.474.996**
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	3.847.382.735.658	3.208.304.203.547	**639.078.532.111**
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	174.072.584.750	141.932.854.056	**32.139.730.694**
	Total (Berdasarkan LP3 BA 015)	**72.630.633.482.247**	**44.894.689.751.322**	**27.735.943.730.925**
	Penyesuaian Pada Neraca Percobaan	**(24)**	**126**	**(150)**
	Total sesuai dengan Neraca Percobaan	**72.630.633.482.223**	**44.894.689.751.448**	**27.735.943.730.775**

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kode Akun	Nama Akun	Nilai	Penyisihan	Netto
115123	PPh Pasal 22 Impor	95.666.537.530	24.835.578.824	**70.830.958.706**
115132	PPN Impor	247.018.422.483	97.756.200.065	**149.262.222.419**
115142	PPnBM Impor	67.321.898.706	2.358.873.071	**64.963.025.635**
115161	Cukai Hasil Tembakau	17.454.350.119.048	124.089.112.586	**17.330.261.006.462**
115163	Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.758.616.600	3.101.498.700	**657.117.900**
115164	Denda Administrasi Cukai	30.349.568.596	26.805.495.936	**3.544.072.660**
115169	Cukai Lainnya	13.015.357.332	12.672.963.377	**342.393.955**
115174	Bunga Penagihan PPN	951.307.304	517.819.994	**433.487.310**
115181	Bea masuk	1.404.755.869.213	739.852.437.781	**664.903.431.432**
115183	Denda Administrasi Pabean	1.944.319.862.879	1.854.543.008.850	**89.776.854.029**
115184	Pabean Lainnya	370.965.660.045	358.589.708.435	**12.375.951.610**
115185	Pajak/Pungutan Ekspor (Bea Keluar)	387.247.103.503	154.662.924.625	**232.584.178.878**
115186	Denda Administrasi Bea Keluar	16.036.999.082	16.036.999.082	-
115187	Bunga Bea Keluar	778.617.683	778.401.183	**216.500**
115191	Bea Masuk Andidumping	24.869.736.599	22.979.578.879	**1.890.157.720**
115193	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	7.022.030.709	35.110.154	**6.986.920.555**
	Total	**22.068.427.707.312**	**3.439.615.711.541**	**18.628.811.995.770**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2019

A. PIUTANG PAJAK

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	3 sd 4 thn	4 sd 5 thn	diatas 5 th	JUMLAH
115121	Piutang PPh Psl. 21	542.449.034.484	230.090.859.473	187.322.094.004	112.217.795.331	119.018.999.813	163.113.284.509	1.354.212.067.614
115122	Piutang PPh Psl. 22	133.730.951.525	35.118.444.087	4.178.122.323	4.379.719.974	3.860.938.171	414.879.843.400	596.148.019.480
115124	Piutang PPh Psl. 23	784.184.966.250	229.038.088.471	2.148.421.241.501	74.039.556.329	105.595.690.456	257.404.113.956	3.598.683.656.963
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	431.197.236.278	392.669.681.269	197.172.765.053	154.006.820.650	195.590.655.657	448.251.019.180	1.818.888.178.087
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	6.326.788.353.950	2.344.498.981.832	1.733.959.214.437	2.943.856.389.808	1.718.552.803.636	3.625.532.661.511	18.693.188.405.174
115127	Piutang PPh Psl. 26	164.061.764.712	152.829.020.567	26.576.766.922	80.312.732.118	699.004.685.448	216.736.156.653	1.339.521.126.420
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	1.465.145.110.697	845.180.992.487	195.242.088.411	126.295.448.407	142.486.394.289	164.506.942.295	2.938.856.976.586
115131	Piutang PPN	7.895.663.993.825	5.224.370.386.635	2.950.494.365.810	1.795.206.762.497	2.036.825.873.004	4.598.945.888.895	24.501.507.270.666
115141	Piutang PPn BM	892.728.204	49.095.403.772	1.038.557.316	6.791.231.937	138.730.547.238	154.189.594.462	350.738.062.929
115153	Piutang PBB Perkebunan	625.794.407.965	238.133.925.207	140.582.641.199	157.124.325.463	155.271.429.439	-	1.316.906.729.273
115154	Piutang PBB Kehutanan	379.987.266.774	113.177.958.047	101.822.968.554	93.816.619.413	85.934.504.532	-	774.739.317.320
115155	Piutang PBB Pertambangan	926.543.951.562	1.560.690.792.991	370.039.376.370	503.508.616.904	1.099.228.428.916	-	4.460.011.166.743
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	59.804.186.522	4.076.224.823	1.854.690.168	6.693.114.089	2.476.136.059	-	74.904.351.661
115172	Piutang PTLL	18.582.876.900	2.119.142.500	-	60.078.000	-	-	20.762.097.400
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.222.547.379.335	946.023.312.670	2.603.756.559.462	1.473.288.743.988	89.643.963.967	434.850.776.101	6.770.110.735.523
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	270.557.557.698	385.208.936.556	2.086.970.931.012	1.037.008.521.834	24.572.177.188	43.064.611.370	3.847.382.735.658
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	28.074.826.814	48.626.272.031	42.088.120.514	54.836.182.454	447.182.937	174.072.584.750
Jumlah		**21.247.931.766.681**	**12.780.396.978.201**	**12.798.058.654.573**	**8.610.694.597.256**	**6.671.629.410.267**	**10.521.922.075.269**	**72.630.633.482.247**

B. PIUTANG BEA DAN CUKAI

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	di atas 3 thn	JUMLAH
115123	Piutang PPh 22 Impor	66.331.141.864	4.387.072.500	1.766.214.600	23.182.108.565	95.666.537.529
115132	Piutang PPN Impor	138.897.603.987	9.855.098.500	4.379.035.600	93.886.684.395	247.018.422.482
115142	Piutang PPnBM Impor	65.289.473.000	-	-	2.032.425.706	67.321.898.706
115161	Piutang Cukai HT	17.416.813.393.430	-	1.063.360.000	36.473.365.619	17.454.350.119.049
115163	Piutang Cukai MMEA	660.420.000	-	-	3.098.196.600	3.758.616.600
115164	Piutang Denda Administrasi Cukai	3.527.531.920	37.976.000	-	26.784.060.676	30.349.568.596
115169	Piutang Cukai Lain	79.189.000	8.369.000	512.137.600	12.415.661.732	13.015.357.332
115174	Piutang Piutang Bunga Penagihan PPN	382.998.000	58.227.000	-	510.082.304	951.307.304
115181	Piutang Bea Masuk	653.427.938.831	4.496.362.000	21.079.813.800	725.751.754.582	1.404.755.869.213
115183	Piutang Denda Administrasi Pabean	60.872.845.431	15.418.474.800	27.165.458.000	1.840.863.084.648	1.944.319.862.879
115184	Piutang Pabean Lain	1.012.362.793	2.664.069.920	17.813.127.000	349.476.100.331	370.965.660.044
115185	Piutang Bea Keluar	233.740.978.560	1.223.000	21.609.026	153.483.292.919	387.247.103.505
115186	Piutang Denda Administrasi Bea Keluar	-	-	-	16.036.999.081	16.036.999.081
115187	Piutang Bunga Bea Keluar	-	-	433.000	778.184.683	778.617.683
115191	Piutang Bea Masuk Anti Dumping	1.899.656.000	-	-	22.970.080.599	24.869.736.599
115193	Piutang Bea Masuk Tindak Pengamanan	7.022.030.709	-	-	-	7.022.030.709
Jumlah		**18.649.957.563.525**	**36.926.872.720**	**73.801.188.626**	**3.307.742.082.440**	**22.068.427.707.312**

JUMLAH PIUTANG PAJAK, BEA DAN CUKAI (A+B)	**94.699.061.189.559**
Penyesuaian Berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang Pajak LK BA 015	**-24**
JUMLAH PIUTANG PERPAJAKAN & BEA CUKAI	**94.699.061.189.535**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2019

1. Direktorat Jenderal Pajak

(dalam Rupiah)

Akun	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
115121	Piutang PPh Psl. 21	1.145.587.608	28.855.461.956	200.159.182.644	435.061.746.321	665.221.978.528
115122	Piutang PPh Psl. 22	203.430.024	7.318.122.618	29.063.525.872	424.051.077.291	460.636.155.805
115124	Piutang PPh Psl. 23	1.457.812.628	34.116.364.929	148.497.514.530	2.668.162.477.054	2.852.234.169.141
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	789.860.943	21.921.698.659	268.610.262.242	894.402.094.459	1.185.723.916.303
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	12.085.652.457	320.963.955.948	1.781.062.598.037	9.456.826.998.232	11.570.939.204.674
115127	Piutang PPh Psl. 26	550.243.782	3.332.712.735	94.685.911.997	1.006.721.362.596	1.105.290.231.110
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	2.100.717.468	87.200.472.291	502.446.814.019	636.444.567.263	1.228.192.571.040
115131	Piutang PPN	17.234.878.191	371.379.774.797	4.173.595.630.745	8.929.203.686.943	13.491.413.970.676
115141	Piutang PPn BM	846.788	72.337.056	24.316.741.456	301.211.851.815	325.601.777.115
115153	Piutang PBB Perkebunan	968.212.899	43.224.415.547	189.311.138.484	312.397.717.879	545.901.484.809
115154	Piutang PBB Kehutanan	511.825.563	27.784.885.598	107.387.112.433	179.751.123.945	315.434.947.539
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.163.880.499	49.912.611.534	962.685.080.094	1.602.735.290.081	2.617.496.862.208
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	272.341.156	533.595.589	2.965.457.509	9.169.250.148	12.940.644.402
115172	Piutang PTLL	12.724.100	972.970.493	4.213.747.250	60.078.000	5.259.519.843
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	829.012.207	104.358.047.861	502.311.376.824	4.554.666.823.635	5.162.165.260.527
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	116.039.735	24.679.668.312	389.938.794.668	2.793.569.700.832	3.208.304.203.547
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	-	24.913.847.306	117.019.006.750	141.932.854.056
	Total (Berdasarkan LP3 BA 015)	**40.443.066.047**	**1.126.627.095.922**	**9.406.164.736.109**	**34.321.454.853.244**	**44.894.689.751.322**
	Penyesuaian pada Neraca Percobaan					**126**
	Total pada Neraca Percobaan					**44.894.689.751.448**

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Akun	Uraian	s.d 1 th	1-2 th	2-3 th	diatas 3 th	Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
115123	**Piutang PPh Pasal 22 Impor**	331.655.709	438.707.250	883.107.300	23.182.108.565	**24.835.578.824**
115132	**Piutang PPN Impor**	694.488.020	985.509.850	2.189.517.800	93.886.684.395	**97.756.200.065**
115142	**Piutang PPnBM Impor**	326.447.365	-	-	2.032.425.706	**2.358.873.071**
115161	**Piutang Cukai Hasil Tembakau**	87.084.066.967	-	531.680.000	36.473.365.619	**124.089.112.586**
115163	**Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkoh**	3.302.100	-	-	3.098.196.600	**3.101.498.700**
115164	**Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai**	17.637.660	3.797.600	-	26.784.060.676	**26.805.495.936**
115169	**Piutang Pendapatan Cukai lainnya**	395.945	836.900	256.068.800	12.415.661.732	**12.672.963.377**
115174	**Piutang Bunga Penagihan PPN**	1.914.990	5.822.700	-	510.082.304	**517.819.994**
115181	**Piutang Bea Masuk**	3.267.139.694	449.636.200	10.539.906.900	725.595.754.988	**739.852.437.782**
115183	**Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean**	304.364.227	1.541.847.480	13.582.729.000	1.839.114.068.144	**1.854.543.008.851**
115184	**Piutang Pendapatan Pabean Lainnya**	5.061.814	266.406.992	8.906.563.500	349.411.676.129	**358.589.708.435**
115185	**Piutang Pungutan Ekspor**	1.168.704.893	122.300	10.804.513	153.483.292.919	**154.662.924.625**
115186	**Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Kelu**	-	-	-	16.036.999.081	**16.036.999.081**
115187	**Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar**	-	-	216.500	778.184.683	**778.401.183**
115191	**Piutang Bea Masuk Anti Dumping**	9.498.280	-	-	22.970.080.599	**22.979.578.879**
115193	**Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan**	35.110.154	-	-	-	**35.110.154**
		93.249.787.818	**3.692.687.272**	**36.900.594.313**	**3.305.772.642.140**	**3.439.615.711.543**

PIUTANG PAJAK DALUARSA
PER 31 DESEMBER 2019
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	DALUARSA
115121	Piutang PPh Psl. 21	132.792.525.930
115122	Piutang PPh Psl. 22	11.781.506.359
115124	Piutang PPh Psl. 23	160.250.379.225
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	17.813.773
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	67.563.171
115127	Piutang PPh Psl. 26	90.124.468.941
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	110.475.756.667
115131	Piutang PPN	21.636.596.445
115141	Piutang PPn BM	206.978.922.939
115153	Piutang PBB Perkebunan	228.355.664.132
115154	Piutang PBB Kehutanan	112.941.504.248
115155	Piutang PBB Pertambangan	1.884.092.151.510
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	-
115172	Piutang PTLL	-
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	658.844.684.926
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.233.615.792.312
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	19.140.541.644
Jumlah		**4.871.115.872.222**



Republik Indonesia

Lampiran 9

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 & 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	10.000	(50)	9.950	170.026.803	(850.135)	169.176.668
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.683.822.832	(36.016.306)	1.647.806.526	600.181.033	(15.375.905)	584.805.128
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	917.662.114	(81.098.836)	836.563.278	616.722.457	(79.594.140)	537.128.317
4	005	MAHKAMAH AGUNG	642.611.134	(3.213.055)	639.398.079	918.553.121	(4.592.765)	913.960.356
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	18.032.394.466.770	(11.174.011.634.407)	6.858.382.832.363	17.658.347.583.931	(11.389.499.015.869)	6.268.848.568.062
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	22.419.702	(112.098)	22.307.604	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	21.571.905.607	(6.231.171.963)	15.340.733.644	33.844.804.945	(4.905.287.529)	28.939.517.416
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	49.671.000.228	(248.355.002)	49.422.645.226	51.407.086.714	(257.614.420)	51.149.472.294
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	495.738.554.707	(19.898.600.136)	475.839.954.571	456.088.556.143	(32.578.121.269)	423.510.434.874
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	322.805.448.526	(302.472.521.625)	20.332.926.901	386.127.641.921	(347.983.315.237)	38.144.326.684
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	76.080.391.177	(45.332.331.819)	30.748.059.358	106.065.442.231	(45.572.869.279)	60.492.572.952
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	112.842.918.084	(8.476.051.039)	104.366.867.045	101.880.036.002	(2.408.637.087)	99.471.398.915
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	52.967.327.256	(21.765.609.241)	31.201.718.015	56.789.334.387	(27.054.979.774)	29.734.354.613
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13.955.051.667.234	(13.386.383.805.159)	568.667.862.075	14.659.967.368.426	(13.715.443.026.585)	944.524.341.841
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.101.976.973.940	(235.889.424.283)	866.087.549.657	847.089.111.102	(266.148.929.509)	580.940.181.593
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.756.763.770	(23.783.819)	4.732.979.951	2.150.450.806	(10.752.255)	2.139.698.551
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	35.693.557.113	(2.948.051.054)	32.745.506.059	30.317.031.629	(3.417.159.202)	26.899.872.427
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	4.685.410.154	(2.840.099.042)	1.845.311.112	16.032.073.364	(2.421.177.379)	13.610.895.985
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	7.796.020.668	(38.980.102)	7.757.040.566	120.649.943	(603.250)	120.046.693
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	360.334.178.898	(1.801.670.900)	358.532.507.998	343.275.773	(1.716.386)	341.559.387
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.372.368.215.572	(3.969.547.069.780)	402.821.145.792	3.999.519.410.852	(3.636.250.700.963)	363.268.709.889
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.815.898.311	(16.297.073.362)	26.518.824.949	57.096.652.401	(19.683.633.005)	37.413.019.396
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.467.263.638.513	(1.912.041.122.718)	555.222.515.795	393.573.107.028	(34.881.416.800)	358.691.690.228
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	16.274.468	-	16.274.468	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	138.642.677	(693.212)	137.949.465	184.217.101	(921.084)	183.296.017
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	14.356.730	(71.783)	14.284.947	449.026.084	(2.245.132)	446.780.952
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	13.600.207.017	(68.001.034)	13.532.205.983	25.289.572.755	(126.447.863)	25.163.124.892
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	366.556.424	(108.215.814)	258.340.610	3.879.053.586	(444.927.415)	3.434.126.171
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	105.349.562.172	(52.035.211.197)	53.314.350.975	119.788.093.963	(64.042.573.002)	55.745.520.961
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	101.057.937.896	(100.897.964.800)	159.973.096	97.892.269.367	(97.393.704.417)	498.564.950
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	241.323.805	-	241.323.805
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	120.593.953	(602.970)	119.990.983	834.372.539	(4.171.863)	830.200.676
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA		-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	5.006.471.688	(25.032.358)	4.981.439.330	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	9.237.728.594	(90.609.491)	9.147.119.103	2.621.948.090	(57.584.671)	2.564.363.419

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	3.516.480	(17.582)	3.498.898
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.008.494.175	(2.420.943.359)	587.550.816	3.065.256.942	(2.543.903.682)	521.353.260
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		-	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.479.311.233.181	(1.363.499.875.646)	115.811.357.535	2.323.688.942.817	(2.198.455.907.576)	125.233.035.241
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.400.982.331	(37.821.032)	2.363.161.299	6.752.094.238	(59.576.595)	6.692.517.643
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	14.299.682.033	(71.498.411)	14.228.183.622	2.746.515.029	(13.732.576)	2.732.782.453
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	71.735.340	(358.676)	71.376.664
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	15.304.508	-	15.304.508	29.563.380	-	29.563.380
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	535.787.205	(2.678.938)	533.108.267	287.628.443	(1.438.145)	286.190.298
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	551.036.448	(2.522.535)	548.513.913	14.895.514	(74.477)	14.821.037
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.169.106.175	(5.847.528)	1.163.258.647	12.218.691.442	(61.133.287)	12.157.558.155
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	5.725.000	-	5.725.000	425.000	(2.125)	422.875
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	4.355.611.591	(21.778.058)	4.333.833.533	40.350.361.621	(201.751.809)	40.148.609.812
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	51.472.962	(257.365)	51.215.597	236.837.860	(1.184.189)	235.653.671
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	5.099.650.895	(1.817.535.875)	3.282.115.020	4.879.096.474	(1.747.572.299)	3.131.524.175
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.359.984.703	(1.807.085.515)	1.552.899.188	4.362.560.602	(1.812.098.394)	2.550.462.208
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	36.791.867.026	(30.735.257.843)	6.056.609.183	35.100.915.315	(29.888.966.967)	5.211.948.348
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	5.673.118.370	(28.365.592)	5.644.752.778	108.908.698	(544.543)	108.364.155
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.735.077.436	(89.509.877)	1.645.567.559	1.585.146.089	(153.885.795)	1.431.260.294
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.081.085.944	(293.754.694)	787.331.250	1.101.085.944	(21.681.407)	1.079.404.537
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	51.677.374	(626.085)	51.051.289	26.040.828	(130.204)	25.910.624
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	256.473.838	(36.537.994)	219.935.844	485.956.341	(2.429.782)	483.526.559
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	638.672.617	(339.476.299)	299.196.318	1.194.544.373	(313.662.276)	880.882.097
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	260.427.796	-	260.427.796	-	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.141.375.084	(135.737.791)	3.005.637.293	10.034.043.078	(171.690.419)	9.862.352.659
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	22.500.000	(112.500)	22.387.500	30.406.745	(152.034)	30.254.711
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	695.695.615.952	(11.274.816.006)	684.420.799.946	576.147.537.379	(10.677.075.615)	565.470.461.764
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	172.603.982	(863.020)	171.740.962	225.846.455	(1.129.232)	224.717.223
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	26.195.023.392	(130.975.117)	26.064.048.275	114.048.605	(570.243)	113.478.362
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	177.742.924	(888.715)	176.854.209	101.308.655	(506.544)	100.802.111
72	107	BADAN SAR NASIONAL	29.416.028.000	(28.977.342.800)	438.685.200	30.341.969.149	(27.167.783.497)	3.174.185.652

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	335.340.958.705	(291.570.162.699)	43.770.796.006	162.347.404.463	(152.173.372.020)	10.174.032.443
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	646.249.000	(3.231.245)	643.017.755
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	80.704.123	(403.521)	80.300.602	37.014.633	(185.073)	36.829.560
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	89.025.650	(445.128)	88.580.522	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.625.251.924	-	1.625.251.924	1.966.135.668	-	1.966.135.668
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	27.600.000	-	27.600.000	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.015.161.662	(1.072.841.784)	942.319.878	2.051.472.500	(1.166.621.888)	884.850.612
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	110.564.190.526	(91.270.387.724)	19.293.802.802	101.396.470.471	(89.403.169.333)	11.993.301.138
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.649.577.340	(1.544.599.791)	104.977.549	1.768.746.963	(1.523.968.203)	244.778.760
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	242.982.432	(1.214.912)	241.767.520	545.277.384	(2.726.387)	542.550.997
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	223.178.442	(1.115.893)	222.062.549	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	7.268.891.284	(36.344.456)	7.232.546.828	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**44.529.590.076.959**	**(33.086.823.822.958)**	**11.442.766.254.001**	**42.436.309.628.220**	**(32.208.264.178.309)**	**10.228.045.449.911**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	121.727.173.168.564	(88.787.782.708.214)	32.939.390.460.350	133.806.951.655.973	(93.997.385.751.924)	39.809.565.904.049
TOTAL			**166.256.763.245.523**	**(121.874.606.531.172)**	**44.382.156.714.351**	**176.243.261.284.193**	**(126.205.649.930.233)**	**50.037.611.353.960**



Republik Indonesia

Lampiran 10

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah Per 31 Desember 2019

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
1	Provinsi Aceh	16.334.762.126	-	73.399.553.063	89.734.315.189	2.196.298.401	-	91.930.613.590
2	Kab. Aceh Barat	1.043.648.708	-	542.922.227	1.586.570.935	159.770.841	-	1.746.341.776
3	Kab. Aceh Besar	1.336.203.659	-	456.926.948	1.793.130.607	11.521.281.559	-	13.314.412.166
4	Kab. Aceh Selatan	913.867.196	-	768.850.718	1.682.717.914	4.266.061.152	-	5.948.779.066
5	Kab. Aceh Singkil	312.443.823	-	561.142.251	873.586.074	1.807.576.413	-	2.681.162.487
6	Kab. Aceh Tengah	778.229.651	25.578.000	1.785.016.445	2.588.824.096	504.945.366	-	3.093.769.462
7	Kab. Aceh Tenggara	680.065.003	-	422.725.815	1.102.790.818	143.900.707	-	1.246.691.525
8	Kab. Aceh Timur	17.022.545	-	9.675.247.054	9.692.269.599	8.589.544.988	-	18.281.814.587
9	Kab. Aceh Utara	5.129.869.268	-	4.090.003.111	9.219.872.379	3.316.522.772	-	12.536.395.151
10	Kab. Bireuen	-	-	422.790.653	422.790.653	7.052.281.318	-	7.475.071.971
11	Kab. Pidie	1.925.946.673	-	560.301.324	2.486.247.997	824.674.717	-	3.310.922.714
12	Kab. Simeulue	789.910.789	-	422.292.351	1.212.203.140	757.731.390	-	1.969.934.530
13	Kota Banda Aceh	2.664.563.005	-	422.790.653	3.087.353.658	942.807.555	-	4.030.161.213
14	Kota Sabang	684.036.687	-	422.809.204	1.106.845.891	1.224.387.544	-	2.331.233.435
15	Kota Langsa	2.417.021.793	-	425.066.020	2.842.087.813	1.610.106.804	-	4.452.194.617
16	Kota Lhokseumawe	5.632.103.649	-	422.809.204	6.054.912.853	2.125.333.109	-	8.180.245.962
17	Kab. Gayo Lues	590.669.822	-	422.292.351	1.012.962.173	61.680.900	-	1.074.643.073
18	Kab. Aceh Barat Daya	704.195.815	-	452.415.757	1.156.611.572	3.364.685.477	-	4.521.297.049
19	Kab. Aceh Jaya	156.668.671	-	422.292.351	578.961.022	531.001.360	-	1.109.962.382
20	Kab. Nagan Raya	1.203.056.677	-	668.381.560	1.871.438.237	2.384.849.477	-	4.256.287.714
21	Kab. Aceh Tamiang	2.444.397.841	-	762.732.638	3.207.130.479	5.908.423.954	-	9.115.554.433
22	Kab. Bener Meriah	454.745.763	-	467.204.784	921.950.547	340.150.713	-	1.262.101.260
23	Kab. Pidie Jaya	15.535.235	-	422.809.204	438.344.439	644.561.879	-	1.082.906.318
24	Kota Subulussalam	9.127.221	-	436.807.551	445.934.772	660.678.765	-	1.106.613.537
25	Provinsi Sumatera Utara	5.915.124.470	-	277.682.172	6.192.806.642	-	-	6.192.806.642
26	Kab. Asahan	2.510.527.156	-	536.228	2.511.063.384	942.155.315	-	3.453.218.699
27	Kab. Dairi	25.274.456	-	771.254.794	796.529.250	-	-	796.529.250
28	Kab. Deli Serdang	-	-	50.191.871	50.191.871	433.384.574	-	483.576.445
29	Kab. Karo	877.161.416	-	536.228	877.697.644	820.648.205	-	1.698.345.849
30	Kab. Labuhanbatu	2.883.409.142	-	126.623.447	3.010.032.589	151.483.203	-	3.161.515.792
31	Kab. Langkat	1.364.332.756	-	1.228.860.242	2.593.192.998	488.389.081	-	3.081.582.079
32	Kab. Mandailing Natal	27.213.763.233	12.564.182	5.750.709.803	32.977.037.218	1.248.757.320	-	34.225.794.538
33	Kab. Nias	76.690.685	-	536.228	77.226.913	-	-	77.226.913
34	Kab. Simalungun	2.753.475.550	19.179.794	63.329.697	2.835.985.041	4.488.162.832	-	7.324.147.873
35	Kab. Tapanuli Selatan	12.989.610.147	6.033.071	4.734.018.235	17.729.661.453	904.881.382	-	18.634.542.835
36	Kab. Tapanuli Tengah	500.658.706	-	937.169.307	1.437.828.013	-	-	1.437.828.013
37	Kab. Tapanuli Utara	278.990.406	-	1.832.935.328	2.111.925.734	1.476.677.308	-	3.588.603.042
38	Kab. Toba Samosir	486.049.286	-	193.346.328	679.395.614	438.398.220	-	1.117.793.834

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
39	Kota Binjai	-	-	536.228	536.228	10.452.437	-	10.988.665
40	Kota Medan	6.454.135.671	-	88.210.482	6.542.346.153	7.815.999.693	-	14.358.345.846
41	Kota Pematang Siantar	1.585.341.442	-	536.228	1.585.877.670	170.588.261	-	1.756.465.931
42	Kota Sibolga	365.689.859	-	536.228	366.226.087	137.853.048	-	504.079.135
43	Kota Tanjung Balai	-	-	536.228	536.228	846.958.980	-	847.495.208
44	Kota Tebing Tinggi	517.356.946	-	536.228	517.893.174	-	-	517.893.174
45	Kota Padang Sidempuan	-	-	388.406.228	388.406.228	2.185.735.450	-	2.574.141.678
46	Kab. Pakpak Bharat	-	-	1.042.268.499	1.042.268.499	194.338.690	-	1.236.607.189
47	Kab. Nias Selatan	1.786.213.954	8.299.082	5.964.735.018	7.759.248.054	-	-	7.759.248.054
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.066.137.775	18.105.399	6.441.454.718	7.525.697.892	1.127.272.647	-	8.652.970.539
49	Kab. Serdang Bedagai	870.374.875	-	536.228	870.911.103	2.358.686.456	-	3.229.597.559
50	Kab. Samosir	-	-	536.228	536.228	656.167.803	-	656.704.031
51	Kab. Batu Bara	1.817.432.346	-	536.228	1.817.968.574	390.274.814	-	2.208.243.388
52	Kab. Padang Lawas	-	-	536.228	536.228	202.381.930	-	202.918.158
53	Kab. Padang Lawas Utara	735.631.224	-	25.575.228	761.206.452	140.132.297	-	901.338.749
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.679.475.802	-	536.228	1.680.012.030	269.163.759	-	1.949.175.789
55	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	1.947.608.608	1.947.608.608	154.066.748	-	2.101.675.356
56	Kab. Nias Utara	-	-	536.228	536.228	-	-	536.228
57	Kab. Nias Barat	-	-	536.228	536.228	1.306.890.449	-	1.307.426.677
58	Kota Gunungsitoli	-	-	536.228	536.228	430.731.498	-	431.267.726
59	Provinsi Sumatera Barat	587.152.851	-	814.666.487	1.401.819.338	955.759.351	-	2.357.578.689
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	82.943.803	82.943.803	6.238.421.998	-	6.321.365.801
61	Kab. Agam	-	-	38.442.403	38.442.403	6.985.775.035	-	7.024.217.438
62	Kab. Kepulauan Mentawai	463.360.208	-	1.331.070.540	1.794.430.748	6.081.929.539	-	7.876.360.287
63	Kab. Padang Pariaman	986.319.170	-	35.428.077	1.021.747.247	3.911.933.037	-	4.933.680.284
64	Kab. Pasaman	22.408.026	-	515.754.346	538.162.372	1.401.721.530	-	1.939.883.902
65	Kab. Pesisir Selatan	163.881.785	-	30.621.914	194.503.699	294.823.096	-	489.326.795
66	Kab. Sijunjung	1.072.647.068	6.203.154	1.062.132.957	2.140.983.179	6.493.045.050	-	8.634.028.229
67	Kab. Solok	-	-	132.517.192	132.517.192	4.147.602.142	-	4.280.119.334
68	Kab. Tanah Datar	11.309.998	-	34.640.405	45.950.403	1.221.362.243	-	1.267.312.646
69	Kota Bukit Tinggi	545.743.440	-	37.349.064	583.092.504	2.424.082.500	-	3.007.175.004
70	Kota Padang Panjang	-	-	35.428.077	35.428.077	1.355.608.469	-	1.391.036.546
71	Kota Padang	728.800.739	-	25.164.395	753.965.134	62.771.023	-	816.736.157
72	Kota Payakumbuh	1.359.669.041	-	35.430.420	1.395.099.461	2.569.586.912	-	3.964.686.373
73	Kota Sawahlunto	-	-	54.099.074	54.099.074	319.172.836	-	373.271.910
74	Kota Solok	-	-	35.288.821	35.288.821	211.341.632	-	246.630.453
75	Kota Pariaman	267.990.562	-	39.974.332	307.964.894	87.110.635	-	395.075.529
76	Kab. Pasaman Barat	2.323.768.959	-	32.441.799	2.356.210.758	863.809.534	-	3.220.020.292

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
77	Kab. Dharmasraya	2.705.650.185	-	8.008.432	2.713.658.617	1.795.266.978	-	4.508.925.595
78	Kab. Solok Selatan	193.889.239	-	57.588.100	251.477.339	68.022.484	-	319.499.823
79	Provinsi Riau	11.194.501.712	-	1.418.332.588	12.612.834.300	1.050.903.291	-	13.663.737.591
80	Kab. Bengkalis	24.530.531.426	-	46.674.546.805	71.205.078.231	1.864.371.749	-	73.069.449.980
81	Kab. Indragiri Hilir	4.910.935.716	-	7.928.847.298	12.839.783.014	5.868.047.651	-	18.707.830.665
82	Kab. Indragiri Hulu	10.326.608.658	-	3.814.267.478	14.140.876.136	2.069.950.194	-	16.210.826.330
83	Kab. Kampar	6.098.077.866	-	10.612.410.517	16.710.488.383	301.885.950	-	17.012.374.333
84	Kab. Kuantan Singingi	4.364.156.131	-	12.431.547.141	16.795.703.272	2.160.000	-	16.797.863.272
85	Kab. Pelalawan	24.586.077.182	-	42.336.000	24.628.413.182	1.086.247.526	-	25.714.660.708
86	Kab. Rokan Hilir	3.091.462.104	-	10.560.450.364	13.651.912.468	120.410.600	-	13.772.323.068
87	Kab. Rokan Hulu	3.890.264.063	-	3.150.281.403	7.040.545.466	54.813.600	-	7.095.359.066
88	Kab. Siak	5.615.108.536	-	18.804.085.739	24.419.194.275	6.406.369.860	-	30.825.564.135
89	Kota Dumai	1.175.329.629	-	6.029.191.727	7.204.521.356	40.059.750	-	7.244.581.106
90	Kota Pekanbaru	9.523.319.126	-	2.860.203.165	12.383.522.291	-	-	12.383.522.291
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.933.696.014	-	11.229.732.170	14.163.428.184	3.792.638.216	-	17.956.066.400
92	Provinsi Jambi	3.340.675.229	-	1.880.442.720	5.221.117.949	64.932.621	-	5.286.050.570
93	Kab. Batanghari	289.949.842	-	74.255.300	364.205.142	2.455.612.578	-	2.819.817.720
94	Kab. Bungo	1.525.524.014	-	107.535.091	1.633.059.105	5.698.157.745	-	7.331.216.850
95	Kab. Kerinci	90.226.786	-	-	90.226.786	182.700.000	-	272.926.786
96	Kab. Merangin	570.722.345	17.241.079	541.617.441	1.129.580.865	3.498.782.428	-	4.628.363.293
97	Kab. Muaro Jambi	750.554.402	-	-	750.554.402	187.265.259	-	937.819.661
98	Kab. Sarolangun	1.933.947.126	-	3.360.673.367	5.294.620.493	557.981.669	-	5.852.602.162
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.467.174.724	-	1.199.062.568	2.666.237.292	2.412.799.448	-	5.079.036.740
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	786.075.948	-	-	786.075.948	1.649.129.758	-	2.435.205.706
101	Kab. Tebo	3.617.800.914	-	3.219.597.944	6.837.398.858	4.286.872.265	-	11.124.271.123
102	Kota Jambi	3.030.369.294	-	-	3.030.369.294	857.368.044	-	3.887.737.338
103	Kota Sungai Penuh	225.622.337	-	-	225.622.337	996.986.491	-	1.222.608.828
104	Provinsi Sumatera Selatan	22.293.407.957	58.599.052	31.412.432.612	53.764.439.621	800.166.276	-	54.564.605.897
105	Kab. Lahat	2.236.286.796	-	819.227.415	3.055.514.211	1.104.010.902	-	4.159.525.113
106	Kab. Musi Banyuasin	1.545.699.884	-	11.728.104.592	13.273.804.476	321.713.108	-	13.595.517.584
107	Kab. Musi Rawas	2.562.259.936	4.600.949	20.206.737.147	22.773.598.032	32.631.080	-	22.806.229.112
108	Kab. Muara Enim	100.208.441.038	-	6.892.005.090	107.100.446.128	5.473.749.676	-	112.574.195.804
109	Kab. Ogan Komering Ilir	156.423.489	3.662.428	4.132.452.557	4.292.538.474	-	-	4.292.538.474
110	Kab. Ogan Komering Ulu	73.220.319	-	938.251.842	1.011.472.161	228.441.687	-	1.239.913.848
111	Kota Palembang	4.336.170.077	-	132.619.803	4.468.789.880	1.920.399.776	-	6.389.189.656
112	Kota Prabumulih	6.344.250	-	259.802.496	266.146.746	867.396.171	-	1.133.542.917
113	Kota Pagar Alam	94.281.394	-	4.490.062.686	4.584.344.080	654.674.631	-	5.239.018.711
114	Kota Lubuk Linggau	601.690.523	4.485.931	3.127.754.400	3.733.930.854	6.994.134	-	3.740.924.988

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
115	Kab. Banyuasin	953.695.492	4.600.949	11.873.855.836	12.832.152.277	41.978.650	-	12.874.130.927
116	Kab. Ogan Ilir	4.838.384.235	-	2.069.131.618	6.907.515.853	775.461.343	-	7.682.977.196
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.294.177.227	9.118.328	7.095.129.710	9.398.425.265	780.330.079	-	10.178.755.344
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.144.703.971	67.099.697	3.781.664.698	4.993.468.366	108.827.000	-	5.102.295.366
119	Kab. Empat Lawang	197.139.717	4.600.949	4.404.985.676	4.606.726.342	1.076.947.374	-	5.683.673.716
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.132.386.509	-	1.835.473.266	2.967.859.775	3.913.850.000	-	6.881.709.775
121	Kab. Musi Rawas Utara	22.718.774	-	264.372.488	287.091.262	-	-	287.091.262
122	Provinsi Bengkulu	5.006.381.052	-	10.547.058.682	15.553.439.734	-	-	15.553.439.734
123	Kab. Bengkulu Selatan	735.049.869	-	2.866.057.470	3.601.107.339	1.412.569.540	-	5.013.676.879
124	Kab. Bengkulu Utara	10.986.928.784	-	31.289.852.972	42.276.781.756	3.070.943.587	-	45.347.725.343
125	Kab. Rejang Lebong	1.264.196.595	-	1.658.601.270	2.922.797.865	40.803.246	-	2.963.601.111
126	Kota Bengkulu	882.882.218	-	1.002.971.353	1.885.853.571	4.497.440.373	-	6.383.293.944
127	Kab. Kaur	867.171.026	-	5.278.171.234	6.145.342.260	-	-	6.145.342.260
128	Kab. Seluma	549.194.339	-	2.332.695.939	2.881.890.278	38.290.804	-	2.920.181.082
129	Kab. Mukomuko	100.657.993	-	1.477.941.241	1.578.599.234	-	-	1.578.599.234
130	Kab. Lebong	2.300.136.454	-	1.844.396.160	4.144.532.614	-	-	4.144.532.614
131	Kab. Kepahiang	520.820.000	-	1.890.972.898	2.411.792.898	1.838.503.800	-	4.250.296.698
132	Kab. Bengkulu Tengah	2.454.747.910	-	9.260.899.489	11.715.647.399	102.148.400	-	11.817.795.799
133	Provinsi Lampung	2.338.484.645	-	7.389.396.057	9.727.880.702	835.981.637	-	10.563.862.339
134	Kab. Lampung Barat	17.090.961	-	1.005.069.735	1.022.160.696	1.943.017.178	-	2.965.177.874
135	Kab. Lampung Selatan	6.906.987.106	-	1.009.011.579	7.915.998.685	-	-	7.915.998.685
136	Kab. Lampung Tengah	1.969.960.718	-	999.110.677	2.969.071.395	2.195.282.296	-	5.164.353.691
137	Kab. Lampung Utara	734.075.850	-	978.982.773	1.713.058.623	377.967.500	-	2.091.026.123
138	Kab. Lampung Timur	615.730	-	994.078.355	994.694.085	157.841.005	-	1.152.535.090
139	Kab. Tanggamus	1.799.927.254	-	1.222.665.916	3.022.593.170	317.894.495	-	3.340.487.665
140	Kab. Tulang Bawang	964.360.864	-	969.886.355	1.934.247.219	422.466.068	-	2.356.713.287
141	Kab. Way Kanan	1.970.466.019	-	1.483.857.124	3.454.323.143	1.179.505.276	-	4.633.828.419
142	Kota Bandar Lampung	499.054.861	-	982.079.560	1.481.134.421	4.734.413.867	-	6.215.548.288
143	Kota Metro	-	-	969.886.355	969.886.355	1.258.584.043	-	2.228.470.398
144	Kab. Pesawaran	27.050.803	-	1.039.795.510	1.066.846.313	660.476.352	-	1.727.322.665
145	Kab. Pringsewu	25.299.664	-	990.241.655	1.015.541.319	610.349.519	-	1.625.890.838
146	Kab. Mesuji	19.198.801	-	1.063.067.770	1.082.266.571	13.736.347	-	1.096.002.918
147	Kab. Tulang Bawang Barat	677.877.659	-	969.886.355	1.647.764.014	871.928.183	-	2.519.692.197
148	Kab. Pesisir Barat	12.651.389	-	970.223.514	982.874.903	188.435.203	-	1.171.310.106
149	Provinsi DKI Jakarta	883.273.842.721	-	21.368.452.382	904.642.295.103	89.022.450	-	904.731.317.553
150	Provinsi Jawa Barat	6.408.215.169	-	6.981.760	6.415.196.929	1.767.681.523	-	8.182.878.452
151	Kab. Bandung	5.712.502.940	-	59.265.011	5.771.767.951	17.086.792.107	-	22.858.560.058
152	Kab. Bekasi	7.661.563.089	-	-	7.661.563.089	31.787.848.519	-	39.449.411.608

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
153	Kab. Bogor	968.616.981	-	-	968.616.981	6.856.924.874	-	7.825.541.855
154	Kab. Ciamis	-	-	-	-	1.369.839.954	-	1.369.839.954
155	Kab. Cianjur	1.497.562.303	-	480.528.046	1.978.090.349	809.825.344	-	2.787.915.693
156	Kab. Cirebon	-	-	127.827.240	127.827.240	14.441.383.297	-	14.569.210.537
157	Kab. Garut	2.536.146.955	-	678.741.087	3.214.888.042	123.048.915	-	3.337.936.957
158	Kab. Indramayu	6.504.154.677	-	2.224.515.401	8.728.670.078	1.302.976.617	-	10.031.646.695
159	Kab. Karawang	7.026.194.780	-	5.576.670.133	12.602.864.913	9.798.825.690	-	22.401.690.603
160	Kab. Kuningan	-	-	-	-	2.773.915.864	-	2.773.915.864
161	Kab. Majalengka	1.275.976.260	-	776.092.108	2.052.068.368	226.787.047	-	2.278.855.415
162	Kab. Purwakarta	2.303.777.960	-	83.220.036	2.386.997.996	978.048.081	-	3.365.046.077
163	Kab. Subang	2.286.164.015	109.524.735	24.484.858.696	26.880.547.446	12.800.891.155	-	39.681.438.601
164	Kab. Sukabumi	2.403.198.844	-	655.179.012	3.058.377.856	1.139.188.251	-	4.197.566.107
165	Kab. Sumedang	273.394.607	-	-	273.394.607	4.108.948.632	-	4.382.343.239
166	Kab. Tasikmalaya	1.710.144.554	-	18.313.525	1.728.458.079	6.237.158.403	-	7.965.616.482
167	Kota Bandung	2.397.208.668	-	-	2.397.208.668	18.353.954.406	-	20.751.163.074
168	Kota Bekasi	1.062.115.676	-	29.303.005	1.091.418.681	12.586.075.283	-	13.677.493.964
169	Kota Bogor	-	-	127.827.240	127.827.240	3.945.649.676	-	4.073.476.916
170	Kota Cirebon	184.528.036	-	12.497.217	197.025.253	816.985.102	-	1.014.010.355
171	Kota Depok	-	-	127.827.240	127.827.240	-	-	127.827.240
172	Kota Sukabumi	-	-	127.827.240	127.827.240	3.032.415.287	-	3.160.242.527
173	Kota Tasikmalaya	43.050.165	-	-	43.050.165	610.562.747	-	653.612.912
174	Kota Cimahi	58.495.980	-	127.827.240	186.323.220	3.040.009.714	-	3.226.332.934
175	Kota Banjar	3.764.071.653	-	131.728.552	3.895.800.205	1.339.019.871	-	5.234.820.076
176	Kab. Bandung Barat	2.592.947.627	-	-	2.592.947.627	16.569.660	-	2.609.517.287
177	Kab. Pangandaran	2.149.267.131	110.045.812	417.021.521	2.676.334.464	617.296.415	-	3.293.630.879
178	Provinsi Jawa Tengah	24.332.593.892	-	315.459.284	24.648.053.176	1.344.168.288	-	25.992.221.464
179	Kab. Banjarnegara	1.883.443.449	80.289.857	298.784.609	2.262.517.915	3.026.220.256	-	5.288.738.171
180	Kab. Banyumas	4.317.647.618	81.916.650	298.784.609	4.698.348.877	-	-	4.698.348.877
181	Kab. Batang	447.949.663	-	1.903.606	449.853.269	5.155.633.580	-	5.605.486.849
182	Kab. Blora	1.077.830.505	-	8.655.523.492	9.733.353.997	2.299.844.321	-	12.033.198.318
183	Kab. Boyolali	1.176.582.589	-	1.903.606	1.178.486.195	1.063.956.282	-	2.242.442.477
184	Kab. Brebes	435.090.386	-	25.992.131	461.082.517	1.110.399.089	-	1.571.481.606
185	Kab. Cilacap	3.767.821.741	-	75.556.889	3.843.378.630	3.811.601.241	-	7.654.979.871
186	Kab. Demak	805.562.729	-	1.903.606	807.466.335	3.626.419.658	-	4.433.885.993
187	Kab. Grobogan	493.870.863	-	1.903.606	495.774.469	7.180.745.483	-	7.676.519.952
188	Kab. Jepara	1.275.343	-	9.161.206	10.436.549	5.246.307.631	-	5.256.744.180
189	Kab. Karanganyar	1.811.325.914	-	4.209.055	1.815.534.969	3.388.230.884	-	5.203.765.853
190	Kab. Kebumen	2.025.005.893	-	25.708.506	2.050.714.399	5.534.965.454	-	7.585.679.853

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
191	Kab. Kendal	1.258.410.802	-	1.903.606	1.260.314.408	3.854.462.136	-	5.114.776.544
192	Kab. Klaten	2.457.207.745	392.576.959	298.944.109	3.148.728.813	8.739.502.360	-	11.888.231.173
193	Kab. Kudus	23.418.968.567	3.919.109.364	298.784.609	27.636.862.540	7.489.103.708	-	35.125.966.248
194	Kab. Magelang	4.173.839.607	-	1.903.606	4.175.743.213	10.084.239.315	-	14.259.982.528
195	Kab. Pati	833.512.089	-	1.903.606	835.415.695	2.349.729.975	-	3.185.145.670
196	Kab. Pekalongan	385.947.436	-	1.903.606	387.851.042	2.087.500.544	-	2.475.351.586
197	Kab. Pemalang	459.985.573	-	2.390.098	462.375.671	3.123.119.225	-	3.585.494.896
198	Kab. Purbalingga	430.323.742	-	1.903.606	432.227.348	7.364.667.421	-	7.796.894.769
199	Kab. Purworejo	870.987.330	-	1.903.606	872.890.936	6.175.459.398	-	7.048.350.334
200	Kab. Rembang	2.200.307.818	-	669.917.012	2.870.224.830	4.378.500.756	-	7.248.725.586
201	Kab. Semarang	912.107.254	-	1.903.606	914.010.860	4.518.493.124	-	5.432.503.984
202	Kab. Sragen	566.600.402	-	1.903.606	568.504.008	1.136.028.927	-	1.704.532.935
203	Kab. Sukoharjo	1.134.045.820	-	1.903.606	1.135.949.426	1.538.542.179	-	2.674.491.605
204	Kab. Tegal	1.167.439.080	-	46.278.035	1.213.717.115	4.162.781.986	-	5.376.499.101
205	Kab. Temanggung	-	-	12.339.063	12.339.063	3.112.783.007	-	3.125.122.070
206	Kab. Wonogiri	881.091.841	169.991.950	372.480.871	1.423.564.662	7.174.798.974	-	8.598.363.636
207	Kab. Wonosobo	96.215.482	-	1.903.606	98.119.088	1.460.144.457	-	1.558.263.545
208	Kota Magelang	826.152.066	-	1.903.606	828.055.672	1.222.432.862	-	2.050.488.534
209	Kota Pekalongan	2.134.253.445	-	253.076.499	2.387.329.944	1.134.048.792	-	3.521.378.736
210	Kota Salatiga	810.792.504	-	1.903.606	812.696.110	779.348.324	-	1.592.044.434
211	Kota Semarang	15.098.022.266	-	1.903.606	15.099.925.872	7.569.894.423	-	22.669.820.295
212	Kota Surakarta	18.327.427.899	211.275.967	298.784.609	18.837.488.475	1.482.048.878	-	20.319.537.353
213	Kota Tegal	2.198.771.153	-	1.903.606	2.200.674.759	1.052.018.244	-	3.252.693.003
214	Provinsi DI Yogyakarta	3.853.712.964	-	7.837.755	3.861.550.719	470.024.188	33.423.771.779	37.755.346.686
215	Kab. Bantul	533.658.231	-	505.813	534.164.044	6.770.695.281	-	7.304.859.325
216	Kab. Gunung Kidul	117.762.283	-	12.269.477	130.031.760	5.096.938.050	-	5.226.969.810
217	Kab. Kulon Progo	-	-	29.327.767	29.327.767	126.264.462	-	155.592.229
218	Kab. Sleman	1.591.093.306	-	505.813	1.591.599.119	5.802.681.137	-	7.394.280.256
219	Kota Yogyakarta	11.877.524.804	64.810.694	505.813	11.942.841.311	2.953.469.691	-	14.896.311.002
220	Provinsi Jawa Timur	46.117.758.398	12.029.327.399	209.204.794	58.356.290.591	31.814.653	-	58.388.105.244
221	Kab. Bangkalan	1.242.401.376	339.375.275	2.510.441.985	4.092.218.636	3.164.954.086	-	7.257.172.722
222	Kab. Banyuwangi	1.238.895.031	-	419.267.772	1.658.162.803	2.560.846.277	-	4.219.009.080
223	Kab. Blitar	3.349.840.501	412.224.601	118.903.887	3.880.968.989	1.790.594.074	-	5.671.563.063
224	Kab. Bojonegoro	17.504.191.860	1.207.343.797	370.055.038.485	388.766.574.142	3.852.155.453	-	392.618.729.595
225	Kab. Bondowoso	3.807.761.002	620.633.287	1.862.249.387	6.290.643.676	2.428.093.960	-	8.718.737.636
226	Kab. Gresik	347.060.746	-	867.676	347.928.422	1.991.871.678	-	2.339.800.100
227	Kab. Jember	4.454.580.106	-	14.623.184	4.469.203.290	5.395.437.407	-	9.864.640.697
228	Kab. Jombang	1.764.549.792	638.612.148	1.292.992	2.404.454.932	1.763.623.418	-	4.168.078.350

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
229	Kab. Kediri	4.960.598.562	988.955.898	2.048.770.875	7.998.325.335	2.388.558.567	-	10.386.883.902
230	Kab. Lamongan	-	724.822.050	1.292.992	726.115.042	560.663.090	-	1.286.778.132
231	Kab. Lumajang	2.517.384.450	528.411.439	1.104.106.918	4.149.902.807	4.203.573.208	-	8.353.476.015
232	Kab. Madiun	2.224.103.850	361.326.600	1.139.902.545	3.725.332.995	2.148.070.980	-	5.873.403.975
233	Kab. Magetan	2.122.848.567	349.776.137	2.550.619.194	5.023.243.898	1.824.211.367	-	6.847.455.265
234	Kab. Malang	4.067.954.201	1.750.465.934	1.997.847	5.820.417.982	172.745.125	-	5.993.163.107
235	Kab. Mojokerto	355.692.737	366.737.914	3.554.321	725.984.972	3.105.224.119	-	3.831.209.091
236	Kab. Nganjuk	2.620.071.610	455.294.249	386.616.829	3.461.982.688	3.942.484.436	-	7.404.467.124
237	Kab. Ngawi	2.394.264.561	493.633.526	2.261.433.397	5.149.331.484	1.541.500.860	-	6.690.832.344
238	Kab. Pacitan	1.248.231.026	342.725.592	2.773.224.753	4.364.181.371	2.760.287.924	-	7.124.469.295
239	Kab. Pamekasan	1.238.226.389	1.063.879.800	2.315.621.518	4.617.727.707	438.631.184	-	5.056.358.891
240	Kab. Pasuruan	1.747.738.940	1.821.166.491	2.963.812	3.571.869.243	423.536.266	-	3.995.405.509
241	Kab. Ponorogo	3.770.245.177	358.024.332	1.372.071.641	5.500.341.150	621.307.791	-	6.121.648.941
242	Kab. Probolinggo	929.304.782	572.641.967	1.292.992	1.503.239.741	1.261.634.447	-	2.764.874.188
243	Kab. Sampang	755.287.628	455.415.193	1.292.992	1.211.995.813	2.857.520.540	-	4.069.516.353
244	Kab. Sidoarjo	-	-	1.027.169	1.027.169	7.593.297.443	-	7.594.324.612
245	Kab. Situbondo	1.510.771.560	647.753.982	2.304.085.196	4.462.610.738	2.313.164.705	-	6.775.775.443
246	Kab. Sumenep	1.580.773.861	842.335.377	867.676	2.423.976.914	3.211.641.142	-	5.635.618.056
247	Kab. Trenggalek	2.456.221.681	343.169.209	1.943.341.614	4.742.732.504	2.546.813.244	-	7.289.545.748
248	Kab. Tuban	113.632.727	-	867.676	114.500.403	1.884.743.712	-	1.999.244.115
249	Kab. Tulungagung	3.421.121.049	455.224.431	1.139.140.621	5.015.486.101	3.317.844.535	-	8.333.330.636
250	Kota Blitar	3.194.472.068	358.170.839	1.509.430.607	5.062.073.514	653.696.808	-	5.715.770.322
251	Kota Kediri	4.969.103.278	1.768.446.719	1.292.992	6.738.842.989	228.892.887	-	6.967.735.876
252	Kota Madiun	4.331.660.907	336.552.715	2.115.420.135	6.783.633.757	669.103.087	-	7.452.736.844
253	Kota Malang	3.462.345.793	718.923.285	1.292.992	4.182.562.070	73.980.454	-	4.256.542.524
254	Kota Mojokerto	2.324.753.963	350.889.757	1.827.294.476	4.502.938.196	316.158.561	-	4.819.096.757
255	Kota Pasuruan	1.071.220.905	339.034.680	2.083.038.621	3.493.294.206	966.874.916	-	4.460.169.122
256	Kota Probolinggo	4.534.678.861	338.426.277	1.240.205.780	6.113.310.918	583.663.660	-	6.696.974.578
257	Kota Surabaya	25.235.930.536	-	867.676	25.236.798.212	1.022.323.268	-	26.259.121.480
258	Kota Batu	1.078.798.776	318.479.325	1.397.871.711	2.795.149.812	387.926.607	-	3.183.076.419
259	Provinsi Kalimantan Barat	5.899.344.427	-	16.978.415.849	22.877.760.276	251.811.341	-	23.129.571.617
260	Kab. Bengkayang	2.260.541.520	-	810.802.392	3.071.343.912	-	-	3.071.343.912
261	Kab. Landak	152.603.005	-	3.969.432.780	4.122.035.785	97.700.000	-	4.219.735.785
262	Kab. Kapuas Hulu	2.783.253.004	-	6.853.401.515	9.636.654.519	126.600.000	-	9.763.254.519
263	Kab. Ketapang	6.037.878.861	-	40.508.077.776	46.545.956.637	1.632.167.356	-	48.178.123.993
264	Kab. Mempawah	1.632.483.560	-	157.679.962	1.790.163.522	204.447.568	-	1.994.611.090
265	Kab. Sambas	6.922.031.908	-	23.663.638	6.945.695.546	437.154.812	-	7.382.850.358
266	Kab. Sanggau	7.492.633.890	-	8.681.795.503	16.174.429.393	2.454.361.245	-	18.628.790.638

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
267	Kab. Sintang	4.465.979.619	-	3.812.359.410	8.278.339.029	261.383.555	-	8.539.722.584
268	Kota Pontianak	155.773.112	-	233.876.652	389.649.764	2.693.664.122	-	3.083.313.886
269	Kota Singkawang	553.870.941	-	3.423.210	557.294.151	538.867.280	-	1.096.161.431
270	Kab. Sekadau	159.906.886	-	671.645.800	831.552.686	14.944.400	-	846.497.086
271	Kab. Melawi	2.713.362.438	-	15.115.316.824	17.828.679.262	-	-	17.828.679.262
272	Kab. Kayong Utara	395.651.878	-	3.880.514.853	4.276.166.731	555.915.835	-	4.832.082.566
273	Kab. Kubu Raya	3.904.660.912	-	11.660.778.341	15.565.439.253	436.306.095	-	16.001.745.348
274	Provinsi Kalimantan Tengah	9.210.090.429	-	32.543.235.226	41.753.325.655	51.634.291	-	41.804.959.946
275	Kab. Barito Selatan	3.048.075.183	-	9.856.663.986	12.904.739.169	85.886.797	-	12.990.625.966
276	Kab. Barito Utara	4.901.837.532	-	65.405.559.571	70.307.397.103	3.517.268.766	-	73.824.665.869
277	Kab. Kapuas	2.364.475.658	-	3.767.902.909	6.132.378.567	3.216.073.228	-	9.348.451.795
278	Kab. Kotawaringin Barat	13.908.691.209	-	2.085.769.447	15.994.460.656	638.699.343	-	16.633.159.999
279	Kab. Kotawaringin Timur	36.708.507.427	-	5.963.000.337	42.671.507.764	86.339.842	-	42.757.847.606
280	Kota Palangkaraya	445.061.464	-	245.722.400	690.783.864	1.822.505.213	-	2.513.289.077
281	Kab. Katingan	6.152.202.647	-	6.930.068.533	13.082.271.180	60.763.562	-	13.143.034.742
282	Kab. Seruyan	10.830.095.916	-	11.739.886.487	22.569.982.403	736.966.628	-	23.306.949.031
283	Kab. Sukamara	481.900.765	-	3.992.972.673	4.474.873.438	2.937.257.267	-	7.412.130.705
284	Kab. Lamandau	114.229.309	-	7.656.522.201	7.770.751.510	301.945.607	-	8.072.697.117
285	Kab. Gunung Mas	1.970.599.902	-	4.893.202.825	6.863.802.727	470.463.966	-	7.334.266.693
286	Kab. Pulang Pisau	346.665.032	-	2.045.108.392	2.391.773.424	2.721.318.753	-	5.113.092.177
287	Kab. Murung Raya	2.338.937.665	-	97.206.357.040	99.545.294.705	15.758.440	-	99.561.053.145
288	Kab. Barito Timur	255.743.702	-	15.515.503.859	15.771.247.561	1.590.623.591	-	17.361.871.152
289	Provinsi Kalimantan Selatan	16.423.892.608	-	228.546.708.406	244.970.601.014	357.843.854	-	245.328.444.868
290	Kab. Banjar	2.905.499.220	-	104.241.190.532	107.146.689.752	3.196.964.112	-	110.343.653.864
291	Kab. Barito Kuala	3.456.029.716	-	29.234.399.898	32.690.429.614	579.921.220	-	33.270.350.834
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	38.062.802.258	-	32.319.440.496	70.382.242.754	377.037.741	-	70.759.280.495
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.212.726.619	-	35.424.740.669	36.637.467.288	513.665.252	-	37.151.132.540
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.286.145.875	-	43.442.340.018	44.728.485.893	-	-	44.728.485.893
295	Kab. Kotabaru	10.396.584.740	-	186.973.769.585	197.370.354.325	-	-	197.370.354.325
296	Kab. Tabalong	12.815.623.582	-	162.686.573.620	175.502.197.202	-	-	175.502.197.202
297	Kab. Tanah Laut	4.277.095.690	-	102.130.239.439	106.407.335.129	935.373.971	-	107.342.709.100
298	Kab. Tapin	5.067.090.555	-	67.017.268.613	72.084.359.168	881.302.880	-	72.965.662.048
299	Kota Banjarbaru	2.406.850.638	-	44.561.453.247	46.968.303.885	208.903.293	-	47.177.207.178
300	Kota Banjarmasin	15.535.351.288	-	31.247.491.889	46.782.843.177	4.510.665.618	-	51.293.508.795
301	Kab. Balangan	1.506.721.115	-	155.602.713.186	157.109.434.301	494.295.367	-	157.603.729.668
302	Kab. Tanah Bumbu	7.718.679.238	-	56.647.509.670	64.366.188.908	759.108.163	-	65.125.297.071
303	Provinsi Kalimantan Timur	8.143.751.967	-	7.166.177.105	15.309.929.072	84.988.227	-	15.394.917.299
304	Kab. Berau	23.317.629.706	-	142.476.622.481	165.794.252.187	1.915.606.288	-	167.709.858.475

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
305	Kab. Kutai Kartanegara	60.914.896.672	-	182.632.065.724	243.546.962.396	3.308.293.194	-	246.855.255.590
306	Kab. Kutai Barat	6.762.648.731	-	122.097.283.246	128.859.931.977	5.829.428.405	-	134.689.360.382
307	Kab. Kutai Timur	14.457.634.339	-	463.814.512.324	478.272.146.663	5.190.586.868	-	483.462.733.531
308	Kab. Paser	47.462.327.940	-	58.750.337.022	106.212.664.962	414.233.523	-	106.626.898.485
309	Kota Balikpapan	21.506.997.665	-	62.199.405.662	83.706.403.327	768.629.866	-	84.475.033.193
310	Kota Bontang	7.959.532.071	-	66.113.971.482	74.073.503.553	1.864.276.030	-	75.937.779.583
311	Kota Samarinda	14.813.112.989	-	109.370.354.656	124.183.467.645	4.128.193.919	-	128.311.661.564
312	Kab. Penajam Paser Utara	6.728.460.388	-	71.485.719.711	78.214.180.099	376.457.975	-	78.590.638.074
313	Kab. Mahakam Ulu	3.408.462.444	-	80.379.918.680	83.788.381.124	605.374.900	-	84.393.756.024
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.544.109.382	-	451.874.840	1.995.984.222	831.189.884	-	2.827.174.106
315	Kab. Bolaang Mongondow	646.815.200	-	4.522.548.439	5.169.363.639	6.183.503.277	-	11.352.866.916
316	Kab. Minahasa	-	-	6.747.339	6.747.339	240.881.000	-	247.628.339
317	Kab. Sangihe	27.110.991	-	6.996.939	34.107.930	2.456.992.520	-	2.491.100.450
318	Kota Bitung	1.112.896.302	-	6.996.939	1.119.893.241	337.370.026	-	1.457.263.267
319	Kota Manado	742.499.721	-	10.093.739	752.593.460	618.409.621	-	1.371.003.081
320	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	175.615.039	175.615.039	5.363.030.756	-	5.538.645.795
321	Kab. Minahasa Selatan	24.243.837	-	9.226.810	33.470.647	154.258.066	-	187.728.713
322	Kota Tomohon	135.381.405	-	6.996.939	142.378.344	471.156.334	-	613.534.678
323	Kab. Minahasa Utara	21.927.805.447	-	2.929.725.712	24.857.531.159	609.752.860	-	25.467.284.019
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	17.615.022	-	6.996.939	24.611.961	17.979.616	-	42.591.577
325	Kota Kotamobagu	-	-	6.996.939	6.996.939	2.256.262.475	-	2.263.259.414
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	71.604.027	-	258.874.435	330.478.462	4.599.872.867	-	4.930.351.329
327	Kab. Minahasa Tenggara	30.389.921	-	20.989.014	51.378.935	46.064.755	-	97.443.690
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	668.226.068	-	3.379.891.311	4.048.117.379	552.833.700	-	4.600.951.079
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	1.496.990.683	1.496.990.683	1.685.681.526	-	3.182.672.209
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.277.470.570	62.555.097	66.133.065.565	69.473.091.232	167.225.170	-	69.640.316.402
331	Kab. Banggai	5.027.299.595	5.212.913	120.321.992.816	125.354.505.324	665.967.629	-	126.020.472.953
332	Kab. Banggai Kepulauan	25.562.401	-	7.993.735.995	8.019.298.396	196.639.300	-	8.215.937.696
333	Kab. Buol	62.469.353	-	9.141.507.569	9.203.976.922	5.286.747.563	-	14.490.724.485
334	Kab. Tolitoli	301.915.809	-	11.667.719.543	11.969.635.352	1.606.904.683	-	13.576.540.035
335	Kab. Donggala	514.037.494	4.184.179	17.702.579.382	18.220.801.055	263.194.418	-	18.483.995.473
336	Kab. Morowali	30.743.378	-	14.737.763.880	14.768.507.258	-	-	14.768.507.258
337	Kab. Poso	534.856.962	-	10.055.015.673	10.589.872.635	69.832.205	-	10.659.704.840
338	Kota Palu	427.865.029	-	9.152.568.094	9.580.433.123	2.530.850.084	-	12.111.283.207
339	Kab. Parigi Moutong	1.760.511.831	6.934.007	22.853.655.812	24.621.101.650	316.344.746	-	24.937.446.396
340	Kab. Tojo Una Una	399.126.266	5.212.913	17.926.395.959	18.330.735.138	10.995.148	-	18.341.730.286
341	Kab. Sigi	654.371.968	-	8.980.078.994	9.634.450.962	26.930.760	-	9.661.381.722
342	Kab. Banggai Laut	181.603	-	8.019.995.875	8.020.177.478	-	-	8.020.177.478

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
343	Kab. Morowali Utara	541.881.702	5.212.913	30.360.050.428	30.907.145.043	1.644.075.512	-	32.551.220.555
344	Provinsi Sulawesi Selatan	7.192.230.081	-	2.510.076.539	9.702.306.620	11.681.656	-	9.713.988.276
345	Kab. Bantaeng	7.119.872	-	213.550.398	220.670.270	1.303.418.553	-	1.524.088.823
346	Kab. Barru	236.792	-	228.381.738	228.618.530	321.708.000	-	550.326.530
347	Kab. Bone	3.093.893.173	27.812.066	5.970.425.804	9.092.131.043	7.255.721.710	-	16.347.852.753
348	Kab. Bulukumba	1.459.711.108	-	11.428.803.999	12.888.515.107	811.498.746	-	13.700.013.853
349	Kab. Enrekang	92.699.947	-	294.206.498	386.906.445	2.392.783.189	-	2.779.689.634
350	Kab. Gowa	592.236.399	-	379.489.471	971.725.870	1.142.913.564	-	2.114.639.434
351	Kab. Jeneponto	-	-	213.550.398	213.550.398	865.126.841	-	1.078.677.239
352	Kab. Luwu	955.373.001	-	711.313.092	1.666.686.093	5.852.647.896	-	7.519.333.989
353	Kab. Luwu Utara	1.164.849.440	6.014.524	927.436.396	2.098.300.360	1.521.308.456	-	3.619.608.816
354	Kab. Maros	4.570.490.800	-	300.796.141	4.871.286.941	471.230.542	-	5.342.517.483
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	276.110.966	276.110.966	165.963.460	-	442.074.426
356	Kota Palopo	575.434.418	-	213.550.398	788.984.816	2.230.929.550	-	3.019.914.366
357	Kab. Luwu Timur	11.336.684.160	-	1.719.778.524	13.056.462.684	31.625.113	-	13.088.087.797
358	Kab. Pinrang	-	-	213.550.398	213.550.398	319.500.000	-	533.050.398
359	Kab. Sinjai	-	-	213.550.398	213.550.398	161.596.715	-	375.147.113
360	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	1.259.369.998	1.259.369.998	-	-	1.259.369.998
361	Kab. Sidenreng Rappang	405.967.430	-	535.425.098	941.392.528	725.295.210	-	1.666.687.738
362	Kab. Soppeng	28.814.138	-	213.550.398	242.364.536	1.152.873.202	-	1.395.237.738
363	Kab. Takalar	13.660.485	-	213.550.398	227.210.883	51.400.976	-	278.611.859
364	Kab. Tana Toraja	548.694.455	-	213.550.398	762.244.853	883.290.072	-	1.645.534.925
365	Kab. Wajo	1.552.620.432	7.857.521	14.194.908.405	15.755.386.358	8.977.889.694	-	24.733.276.052
366	Kota Parepare	1.026.471.232	-	213.550.398	1.240.021.630	654.205.795	-	1.894.227.425
367	Kota Makassar	1.270.555.125	-	238.068.082	1.508.623.207	397.116.563	-	1.905.739.770
368	Kab. Toraja Utara	714.620.540	7.865.258	1.840.334.427	2.562.820.225	528.989.495	-	3.091.809.720
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	5.417.548.666	-	4.282.999.006	9.700.547.672	1.288.366.760	-	10.988.914.432
370	Kab. Buton	199.206.958	-	162.259.501	361.466.459	810.400	-	362.276.859
371	Kab. Konawe	1.059.312.816	-	3.811.541.175	4.870.853.991	2.089.991.596	-	6.960.845.587
372	Kab. Kolaka	12.892.724.507	-	3.506.245.270	16.398.969.777	1.977.095.152	-	18.376.064.929
373	Kab. Muna	37.274.444	-	138.595.800	175.870.244	108.667.153	-	284.537.397
374	Kota Kendari	-	-	686.206	686.206	657.961.395	-	658.647.601
375	Kota Bau-bau	361.440.338	-	-	361.440.338	289.119.126	-	650.559.464
376	Kab. Konawe Selatan	183.644.598	-	-	183.644.598	4.099.504.610	-	4.283.149.208
377	Kab. Bombana	4.872.636.880	-	2.281.522.672	7.154.159.552	321.509.887	-	7.475.669.439
378	Kab. Wakatobi	10.228.853	-	-	10.228.853	176.263.700	-	186.492.553
379	Kab. Kolaka Utara	903.753.708	-	3.579.231.848	4.482.985.556	935.977.688	-	5.418.963.244
380	Kab. Konawe Utara	5.860.867.187	-	18.883.161.780	24.744.028.967	-	-	24.744.028.967

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
381	Kab. Buton Utara	-	-	30.360.962	30.360.962	160.290.000	-	190.650.962
382	Kab. Konawe Kepulauan	34.872.517	-	141.073.944	175.946.461	144.013.460	-	319.959.921
383	Kab. Kolaka Timur	-	-	22.944.568	22.944.568	385.204.600	-	408.149.168
384	Kab. Muna Barat	39.963.550	-	-	39.963.550	-	-	39.963.550
385	Kab. Buton Tengah	101.196.595	-	-	101.196.595	4.486.053.482	-	4.587.250.077
386	Kab. Buton Selatan	-	-	10.560.668	10.560.668	802.964.524	-	813.525.192
387	Provinsi Bali	595.188.719	-	-	595.188.719	1.324.507.962	-	1.919.696.681
388	Kab. Badung	331.029.769	-	-	331.029.769	525.236.957	-	856.266.726
389	Kab. Bangli	1.770.800	-	-	1.770.800	1.986.328.935	-	1.988.099.735
390	Kab. Buleleng	109.315.307	-	-	109.315.307	1.985.956.215	-	2.095.271.522
391	Kab. Gianyar	4.082.000	-	-	4.082.000	835.426.766	-	839.508.766
392	Kab. Jembrana	211.285.951	-	-	211.285.951	2.030.988.157	-	2.242.274.108
393	Kab. Karangasem	26.472.953	-	-	26.472.953	4.378.571.665	-	4.405.044.618
394	Kab. Klungkung	-	-	-	-	1.297.817.508	-	1.297.817.508
395	Kab. Tabanan	78.656.626	-	-	78.656.626	2.270.391.689	-	2.349.048.315
396	Kota Denpasar	2.420.751.538	-	-	2.420.751.538	4.033.067.836	-	6.453.819.374
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7.064.389.936	-	7.218.836.777	14.283.226.713	-	-	14.283.226.713
398	Kab. Bima	3.211.322.624	-	1.377.004.302	4.588.326.926	790.148.733	-	5.378.475.659
399	Kab. Dompu	84.119.750	-	2.154.937.558	2.239.057.308	848.237.821	-	3.087.295.129
400	Kab. Lombok Barat	79.787.591	-	1.190.346.232	1.270.133.823	1.104.531.759	-	2.374.665.582
401	Kab. Lombok Tengah	1.838.586.901	-	1.190.817.227	3.029.404.128	-	-	3.029.404.128
402	Kab. Lombok Timur	60.674.563	-	1.182.592.102	1.243.266.665	-	-	1.243.266.665
403	Kab. Sumbawa	2.854.750.779	-	5.285.405.464	8.140.156.243	1.813.942.720	-	9.954.098.963
404	Kota Mataram	3.500.076.837	-	1.190.817.227	4.690.894.064	3.127.264.253	-	7.818.158.317
405	Kota Bima	329.670.220	-	1.190.817.227	1.520.487.447	415.479.494	-	1.935.966.941
406	Kab. Sumbawa Barat	6.740.408.534	-	13.498.844.719	20.239.253.253	1.296.210.373	-	21.535.463.626
407	Kab. Lombok Utara	43.984.564	-	1.190.817.227	1.234.801.791	1.334.125.970	-	2.568.927.761
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.986.687.480	-	665.613.648	3.652.301.128	-	-	3.652.301.128
409	Kab. Alor	206.503.195	-	2.993.023	209.496.218	2.822.078.296	-	3.031.574.514
410	Kab. Belu	1.113.007.864	-	706.577.746	1.819.585.610	410.810.600	-	2.230.396.210
411	Kab. Ende	221.773.106	-	21.287.613	243.060.719	1.670.552.595	-	1.913.613.314
412	Kab. Flores Timur	319.285.176	-	1.091.323	320.376.499	-	-	320.376.499
413	Kab. Kupang	124.944.050	-	363.107.391	488.051.441	877.856.640	-	1.365.908.081
414	Kab. Lembata	-	-	1.091.323	1.091.323	4.124.402	-	5.215.725
415	Kab. Manggarai	48.196.975	-	82.224.950	130.421.925	336.486.157	-	466.908.082
416	Kab. Ngada	92.381.883	-	1.091.323	93.473.206	-	-	93.473.206
417	Kab. Sikka	199.961.047	-	13.860.223	213.821.270	1.528.073.150	-	1.741.894.420
418	Kab. Sumba Barat	39.359.508	-	336.174.459	375.533.967	183.900.000	-	559.433.967

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
419	Kab. Sumba Timur	237.215.696	-	599.504.523	836.720.219	50.734.223	-	887.454.442
420	Kab. Timor Tengah Selatan	142.663.624	-	2.368.445	145.032.069	2.568.448.910	-	2.713.480.979
421	Kab. Timor Tengah Utara	768.790.880	-	1.303.117.492	2.071.908.372	699.688.200	-	2.771.596.572
422	Kota Kupang	433.878.711	-	2.583.756	436.462.467	-	-	436.462.467
423	Kab. Rote Ndao	-	-	1.091.323	1.091.323	-	-	1.091.323
424	Kab. Manggarai Barat	-	-	1.091.323	1.091.323	-	-	1.091.323
425	Kab. Nagekeo	-	-	5.530.853	5.530.853	1.107.549.050	-	1.113.079.903
426	Kab. Sumba Barat Daya	41.835.048	-	561.619.823	603.454.871	756.766.450	-	1.360.221.321
427	Kab. Sumba Tengah	-	-	476.826.723	476.826.723	405.592.400	-	882.419.123
428	Kab. Manggarai Timur	-	-	69.084.700	69.084.700	4.271.890	-	73.356.590
429	Kab. Sabu Raijua	-	-	24.949.477	24.949.477	1.081.827.400	-	1.106.776.877
430	Kab. Malaka	-	-	1.091.323	1.091.323	157.232.933	-	158.324.256
431	Provinsi Maluku	1.080.318.570	-	2.363.710.052	3.444.028.622	717.031.817	-	4.161.060.439
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	675.957.221	-	-	675.957.221	545.021.635	-	1.220.978.856
433	Kab. Maluku Tengah	3.697.705.898	-	2.034.264.496	5.731.970.394	9.579.919.477	-	15.311.889.871
434	Kab. Maluku Tenggara	256.032.346	-	-	256.032.346	78.196.100	-	334.228.446
435	Kab. Buru	-	-	836.212.868	836.212.868	142.455.776	-	978.668.644
436	Kota Ambon	1.010.046.887	-	-	1.010.046.887	16.973.373	-	1.027.020.260
437	Kab. Seram Bagian Barat	697.215.420	-	5.281.192.184	5.978.407.604	1.295.100.000	-	7.273.507.604
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	-	-
439	Kab. Kepulauan Aru	1.211.326.132	-	820.320.910	2.031.647.042	8.108.530	-	2.039.755.572
440	Kota Tual	-	-	-	-	-	-	-
441	Kab. Maluku Barat Daya	196.578.413	-	456.541.822	653.120.235	593.758.704	-	1.246.878.939
442	Kab. Buru Selatan	235.649.351	-	4.082.102.054	4.317.751.405	4.634.150	-	4.322.385.555
443	Provinsi Papua	14.074.242.801	-	209.852.014.831	223.926.257.632	879.083.270	-	224.805.340.902
444	Kab. Biak Numfor	1.179.543.288	-	15.810.780.375	16.990.323.663	234.292.600	-	17.224.616.263
445	Kab. Jayapura	1.202.905.181	-	16.735.426.382	17.938.331.563	-	-	17.938.331.563
446	Kab. Jayawijaya	172.315.709	-	14.580.929.478	14.753.245.187	696.769.143	-	15.450.014.330
447	Kab. Merauke	9.728.718.284	-	8.333.131.262	18.061.849.546	-	-	18.061.849.546
448	Kab. Mimika	40.142.815.508	-	374.940.770.127	415.083.585.635	351.200.000	-	415.434.785.635
449	Kab. Nabire	136.586.225	-	3.886.833.029	4.023.419.254	16.138.768	-	4.039.558.022
450	Kab. Paniai	1.447.835.877	-	13.874.507.536	15.322.343.413	-	-	15.322.343.413
451	Kab. Puncak Jaya	121.264.465	-	22.294.694.401	22.415.958.866	-	-	22.415.958.866
452	Kab. Kepulauan Yapen	1.289.666.233	-	6.425.662.673	7.715.328.906	4.170.732	-	7.719.499.638
453	Kota Jayapura	1.282.786.241	-	6.985.683.164	8.268.469.405	348.901.123	-	8.617.370.528
454	Kab. Sarmi	295.180.459	-	21.008.457.798	21.303.638.257	-	-	21.303.638.257
455	Kab. Keerom	2.736.105.057	-	9.549.978.678	12.286.083.735	-	-	12.286.083.735
456	Kab. Yahukimo	153.969.391	-	20.784.305.382	20.938.274.773	120.600.000	-	21.058.874.773

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
457	Kab. Pegunungan Bintang	133.514.696	-	7.634.740.755	7.768.255.451	245.647.000	-	8.013.902.451
458	Kab. Tolikara	180.746.677	-	6.998.488.548	7.179.235.225	5.800.000	-	7.185.035.225
459	Kab. Boven Digoel	162.931.421	-	3.013.442.334	3.176.373.755	-	-	3.176.373.755
460	Kab. Mappi	429.577.055	-	5.240.397.172	5.669.974.227	89.400.000	-	5.759.374.227
461	Kab. Asmat	80.985.699	-	7.436.781.824	7.517.767.523	664.842.056	-	8.182.609.579
462	Kab. Waropen	5.385.781.507	-	8.393.232.032	13.779.013.539	-	-	13.779.013.539
463	Kab. Supiori	91.873.829	-	6.484.755.435	6.576.629.264	576.937.800	-	7.153.567.064
464	Kab. Mamberamo Raya	15.875.957.482	-	33.504.313.879	49.380.271.361	-	-	49.380.271.361
465	Kab. Mamberamo Tengah	142.140.550	-	6.247.410.596	6.389.551.146	32.100.000	-	6.421.651.146
466	Kab. Yalimo	137.231.621	-	6.290.246.666	6.427.478.287	-	-	6.427.478.287
467	Kab. Lanny Jaya	158.148.177	-	6.230.015.750	6.388.163.927	-	-	6.388.163.927
468	Kab. Nduga	140.258.044	-	6.265.524.866	6.405.782.910	1.034.259.500	-	7.440.042.410
469	Kab. Dogiyai	814.643.892	-	5.722.913.355	6.537.557.247	-	-	6.537.557.247
470	Kab. Puncak	267.649.357	-	5.920.570.202	6.188.219.559	-	-	6.188.219.559
471	Kab. Intan Jaya	4.059.748.710	-	4.137.685.565	8.197.434.275	-	-	8.197.434.275
472	Kab. Deiyai	136.526.922	-	6.204.148.217	6.340.675.139	-	-	6.340.675.139
473	Provinsi Maluku Utara	16.915.503.588	-	13.095.252.114	30.010.755.702	23.398.242	-	30.034.153.944
474	Kab. Halmahera Tengah	3.246.939.494	-	9.162.494.514	12.409.434.008	61.882.750	-	12.471.316.758
475	Kota Ternate	1.970.188.295	-	5.584.733	1.975.773.028	352.814.731	-	2.328.587.759
476	Kab. Halmahera Barat	1.081.419.027	-	1.671.641.796	2.753.060.823	300.000	-	2.753.360.823
477	Kab. Halmahera Timur	27.056.595.721	-	43.084.607.019	70.141.202.740	-	-	70.141.202.740
478	Kab. Halmahera Selatan	1.973.541.262	-	1.255.186.023	3.228.727.285	23.605.566	-	3.252.332.851
479	Kab. Halmahera Utara	10.902.394.265	-	43.928.377.126	54.830.771.391	534.437.291	-	55.365.208.682
480	Kab. Kepulauan Sula	1.811.721.353	-	27.582.720.696	29.394.442.049	826.745.848	-	30.221.187.897
481	Kota Tidore Kepulauan	656.337.249	-	3.160.655.136	3.816.992.385	627.400.950	-	4.444.393.335
482	Kab. Pulau Morotai	365.250.621	-	1.779.501.779	2.144.752.400	127.645.005	-	2.272.397.405
483	Kab. Pulau Taliabu	27.700.200	-	2.989.055.240	3.016.755.440	-	-	3.016.755.440
484	Provinsi Banten	231.777.836	-	316.363.255	548.141.091	251.960.900	-	800.101.991
485	Kab. Lebak	8.183.725.646	-	519.590.681	8.703.316.327	431.544.042	-	9.134.860.369
486	Kab. Pandeglang	14.511.458	-	469.062.693	483.574.151	70.773.375	-	554.347.526
487	Kab. Serang	1.044.057.355	-	70.125.977	1.114.183.332	422.577.233	-	1.536.760.565
488	Kab. Tangerang	3.245.245.463	-	56.650.777	3.301.896.240	7.218.444.547	-	10.520.340.787
489	Kota Cilegon	150.426.646	-	56.650.777	207.077.423	88.944.668	-	296.022.091
490	Kota Tangerang	4.357.128.011	-	56.650.777	4.413.778.788	3.518.939.971	-	7.932.718.759
491	Kota Serang	20.225.642	-	56.650.777	76.876.419	621.038.908	-	697.915.327
492	Kota Tangerang Selatan	-	-	56.650.777	56.650.777	-	-	56.650.777
493	Provinsi Bangka Belitung	686.789.711	-	27.671.235.398	28.358.025.109	574.787.525	-	28.932.812.634
494	Kab. Bangka	2.481.650.661	-	6.839.049.156	9.320.699.817	2.133.229.227	-	11.453.929.044

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
495	Kab. Belitung	8.813.505.336	-	3.271.309.364	12.084.814.700	3.899.299.350	-	15.984.114.050
496	Kota Pangkal Pinang	3.044.903.001	-	747.762.406	3.792.665.407	2.146.414.101	-	5.939.079.508
497	Kab. Bangka Selatan	6.962.591.704	-	8.044.630.082	15.007.221.786	827.563.207	-	15.834.784.993
498	Kab. Bangka Tengah	8.677.379.311	-	2.686.068.051	11.363.447.362	747.056.708	-	12.110.504.070
499	Kab. Bangka Barat	16.724.596.887	-	13.487.368.362	30.211.965.249	2.250.732.627	-	32.462.697.876
500	Kab. Belitung Timur	2.445.542.167	-	5.861.268.818	8.306.810.985	650.528.594	-	8.957.339.579
501	Provinsi Gorontalo	1.962.259.124	-	2.017.337.215	3.979.596.339	42.874.168	-	4.022.470.507
502	Kab. Boalemo	789.674.487	-	-	789.674.487	-	-	789.674.487
503	Kab. Gorontalo	521.614.080	-	763.103.820	1.284.717.900	713.255.000	-	1.997.972.900
504	Kota Gorontalo	505.507.249	-	-	505.507.249	1.432.319.594	-	1.937.826.843
505	Kab. Pohuwato	724.779.471	-	3.455.023.672	4.179.803.143	-	-	4.179.803.143
506	Kab. Bone Bolango	422.349.634	-	1.757.765.773	2.180.115.407	2.656.542.825	-	4.836.658.232
507	Kab. Gorontalo Utara	1.635.218.606	-	374.794.859	2.010.013.465	266.002.240	-	2.276.015.705
508	Provinsi Kepulauan Riau	6.137.870.100	-	631.087.500	6.768.957.600	-	-	6.768.957.600
509	Kab. Natuna	322.916.584	-	-	322.916.584	1.805.492.880	-	2.128.409.464
510	Kab. Kepulauan Anambas	2.451.925.182	-	26.085	2.451.951.267	606.979.580	-	3.058.930.847
511	Kab. Karimun	252.561.053	-	737.644.388	990.205.441	-	-	990.205.441
512	Kota Batam	4.601.131.786	-	-	4.601.131.786	17.915.999	-	4.619.047.785
513	Kota Tanjung Pinang	-	-	15.040.000	15.040.000	303.125.596	-	318.165.596
514	Kab. Lingga	925.902.600	-	133.196	926.035.796	-	-	926.035.796
515	Kab. Bintan	901.209.158	-	-	901.209.158	469.150.901	-	1.370.360.059
516	Provinsi Papua Barat	550.735.654	-	24.629.304.613	25.180.040.267	-	-	25.180.040.267
517	Kab. Fak Fak	1.733.821.923	-	3.835.552.244	5.569.374.167	-	-	5.569.374.167
518	Kab. Manokwari	4.870.883.691	-	4.199.926.907	9.070.810.598	-	-	9.070.810.598
519	Kab. Sorong	3.475.661.959	-	4.130.096.488	7.605.758.447	-	-	7.605.758.447
520	Kota Sorong	872.861.777	-	-	872.861.777	-	-	872.861.777
521	Kab. Raja Ampat	3.927.584.704	-	9.779.419.062	13.707.003.766	56.415.000	-	13.763.418.766
522	Kab. Sorong Selatan	1.236.598.246	-	4.683.954.827	5.920.553.073	1.200.000	-	5.921.753.073
523	Kab. Teluk Bintuni	908.367.286	-	24.587.367.138	25.495.734.424	-	-	25.495.734.424
524	Kab. Teluk Wondama	1.845.080.810	-	4.133.242.042	5.978.322.852	-	-	5.978.322.852
525	Kab. Kaimana	407.117.216	-	2.937.554.099	3.344.671.315	-	-	3.344.671.315
526	Kab. Maybrat	391.134.561	-	216.000.000	607.134.561	-	-	607.134.561
527	Kab. Tambrauw	761.962.130	-	2.108.126.921	2.870.089.051	1.000	-	2.870.090.051
528	Kab. Manokwari Selatan	-	-	216.000.000	216.000.000	-	-	216.000.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	87.650	-	-	87.650	-	-	87.650
530	Provinsi Sulawesi Barat	2.000.146.555	-	656.775.889	2.656.922.444	162.325.974	-	2.819.248.418
531	Kab. Majene	88.468.525	-	-	88.468.525	13.462.699	-	101.931.224
532	Kab. Mamuju	495.526.154	-	383.253.046	878.779.200	14.296.247	-	893.075.447

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil				Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	CHT	SDA	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
533	Kab. Polewali Mandar	247.139.263	-	46.400.200	293.539.463	47.976.271	-	341.515.734
534	Kab. Mamasa	138.426.102	-	1.718.118.225	1.856.544.327	40.355.300	-	1.896.899.627
535	Kab. Pasangkayu	1.223.596.835	-	250.404.547	1.474.001.382	439.564.875	-	1.913.566.257
536	Kab. Mamuju Tengah	957.867.602	-	-	957.867.602	68.754.800	-	1.026.622.402
537	Provinsi Kalimantan Utara	2.277.057.983	-	7.856.775.603	10.133.833.586	433.038.032	-	10.566.871.618
538	Kab. Bulungan	602.518.250	-	44.361.008.997	44.963.527.247	4.090.060.035	-	49.053.587.282
539	Kab. Malinau	7.702.996	-	14.578.274.945	14.585.977.941	5.545.391.713	-	20.131.369.654
540	Kab. Nunukan	4.711.813.739	-	54.048.372.074	58.760.185.813	10.702.608.819	-	69.462.794.632
541	Kota Tarakan	9.553.295.699	-	868.576.181	10.421.871.880	1.153.213.771	-	11.575.085.651
542	Kab. Tana Tidung	1.130.005.278	-	7.004.362.848	8.134.368.126	2.498.446.754	-	10.632.814.880
	Jumlah	**2.639.655.715.809**	**38.246.575.648**	**5.818.714.066.542**	**8.496.616.357.999**	**906.640.797.401**	**33.423.771.779**	**9.436.680.927.179**

Republik Indonesia

Lampiran 11

Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2019

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2019	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2019
				Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2018	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2019			
1	2		3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan								
1	PT. Bank Anrico	07 Juni 2007	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	62.756.907.617,78	-	72.289.864.957,85	140.797.811.123,91	137.790.863.417,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	54.706.150.483,21	258.799.861,00	238.519.958.344,21	106.107.201.031,41	12.535.049.655,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	105.717.286.516,52	420.652.534,00	691.865.995.549,52	136.297.409.195,04	3.174.316.317.302,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	8.948.929.578,00	36.363.636,00	34.083.482.051,19	172.736.782.621,00	167.718.684.884,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	52.288.033.866,83	-	99.160.235.937,83	157.450.001.984,00	102.652.378.353,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	9.507.058.537,00	501.518.939,00	41.194.577.476,00	6.760.484.884,70	295.568.632.390,98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	286.635.034.003,96	33.537.227,00	618.691.647.498,76	1.638.279.007.000,00	1.514.674.787.340,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	373.974.723.951,15	4.693.961.186,00	1.236.055.902.530,80	1.015.640.110.944,00	451.293.612.841,73
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	97.482.364.439,79	40.156.142,00	196.825.239.962,68	181.953.841.474,06	702.573.783.343,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	28.025.558.872,00	-	34.995.693.472,00	114.546.599.155,04	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	31 Maret 2008	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	82.867.150.792,42	2.776.458.614,00	217.593.213.006,42	56.733.811.676,21	361.325.047.692,35
12	PT. Bank Pinaesaan	05 Maret 2008	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	47.138.284.872,52	2.554.458.470,00	68.149.423.442,63	92.182.282.117,24	612.935.067.476,95
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00	-	210.993.999.999,67	81.323.394.608**	0,00
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	84.057.822.350,00	74.046.227,00	363.255.868.577,00	238.376.301.422,00	148.214.360.749,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	-	2.500.000.000,00	0,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan		**11.888.938.781.558,30**	**2.730.645.774.151,38**	**1.384.139.375.819,18**	**11.389.952.836,00**	**4.126.175.102.806,56**	**4.057.861.644.628,61**	**7.762.763.678.751,39**

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2019	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2019
				Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2018	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2019			
1	2		3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan								
1	PT Bank Asiatic		886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	84.385.858.678,00	128.026.312,00	89.513.884.990,00		797.065.339.453,83
2	PT Bank Dagang Bali		1.331.516.911.477,24	-	494.158.458.863,00	2.692.120.745,00	496.850.579.608,00		834.666.331.869,24
3	PT Bank Global Internasional		804.234.270.395,51	-	325.806.586.482,00	3.984.869.330,00	329.791.455.812,00		474.442.814.583,51
4	PT Bank Ratu		71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00		0,00
5	PT Bank Prasidha Utama		227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52	-	20.898.914.545,52		206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan		**3.321.282.950.812,58**	**9.000.000.000,00**	**993.067.803.920,52**	**6.805.016.387,00**	**1.008.872.820.307,52**		**2.312.410.130.505,06**

TOTAL SALDO PIUTANG EKS BDL	**15.210.221.732.370,90**	**2.739.645.774.151,38**	**2.377.207.179.739,70**	**18.194.969.223,00**	**5.135.047.923.114,08**		**10.075.173.809.256,40**

Republik Indonesia

Lampiran 12

Rincian Aset Kredit Eks BPPN & Eks PT PPA Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2019

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	18.008.043.845.742,00	26.706.094.431.981,30	27.957.049.334.881,30	**72.671.187.612.604,60**

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited) nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (Audited)	Saldo 31 Desember 2018 (Audited) nilai konversi
Dollar Amerika	555.614.830,61	7.723.604.538.383,76	542.894.417,41	7.861.654.058.514,21
Poundsterling	266.124,00	4.856.745.701,94		
Rupiah	7.735.862.119.807,99	7.735.862.119.807,99	7.707.128.416.677,64	7.707.128.416.677,64
Yen Jepang	5.615.941.858,85	718.652.985.474,71	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30
Euro	12.826.978,45	199.954.572.130,78	13.093.102,45	216.818.503.296,39
		16.382.930.961.499,20		**16.521.935.756.905,50**

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited) (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited) nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (Audited) (audited)	Saldo 31 Desember 2018 (Audited) nilai konversi
Dollar Amerika	28.356.584,87	394.185.028.060,79	28.356.584,87	410.631.705.502,47
Rupiah	1.230.927.856.182,05	1.230.927.856.182,05	1.224.986.625.699,63	1.224.986.625.699,63
		1.625.112.884.242,84		**1.635.618.331.202,10**

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2019

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited) nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (Audited)	Saldo 31 Desember 2018 (Audited) nilai konversi
Dollar Amerika	583.971.415,48	8.117.789.566.444,56	571.251.002,28	8.272.285.764.016,68
Poundsterling	266.124,00	4.856.745.701,94		
Rupiah	8.966.789.975.990,04	8.966.789.975.990,04	8.932.115.042.377,27	8.932.115.042.377,27
Yen Jepang	5.615.941.858,85	718.652.985.474,71	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30
Euro	12.826.978,45	199.954.572.130,78	13.093.102,45	216.818.503.296,39
Jumlah		**18.008.043.845.742,00**		**18.157.554.088.107,60**

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited)	Mutasi TA 2019 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 (Audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00	0,00	577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00	0,00	155.727.000.000,00
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00	0,00	170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00	0,00	4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	0,00	0,00	0,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00	0,00	136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00	0,00	596.794.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636,00	0,00	509.986.363.636,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.828.253.577.427,18	2.857.186.364,00	7.831.110.763.791,18
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00	0,00	188.483.118.182,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00	0,00	790.557.000.000,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2019

Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703,00	0,00	2.525.651.574.703,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00	0,00	70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00	0,00	406.415.000.000,00
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669,00	0,00	4.893.525.874.669,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00	0,00	424.656.000.000,00
KAHARUDIN ONGKO	Bank Arya Panduartha (BBK	359.435.826.603,76	0,00	359.435.826.603,76
SUJANTO GONDOKUSUMO	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305,32	0,00	822.254.323.305,32
HINDARTO TANTULAR/ANTON TANTULAR	Bank Central Dagang (BBKU	1.470.120.709.878,01	0,00	1.470.120.709.878,01
SJAMSUL NURSALIM	Bank Dewa Rutji (BBKU)	470.658.063.577,00	0,00	470.658.063.577,00
Jumlah		**26.706.094.431.981,30**	**2.857.186.364,00**	**26.708.951.618.345,30**

Catatan:

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (Audited)	Saldo 31 Desember 2018 (Audited) nilai konversi
Rupiah	11.335.502.500.103,00	11.335.502.500.103,00	11.364.155.398.555,00	11.364.155.398.555,00
Dollar Amerika	996.655.658,92	13.854.515.297.925,20	996.655.658,92	14.432.570.596.820,50
Yen Jepang	998.413.744,00	127.763.612.212,95	998.413.744,00	130.907.117.885,93
Deutschmark	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro **	436.387,00	6.802.660.206,27	436.387,00	7.226.459.623,25
Dollar Australia	1.332.783,00	12.980.046.940,07	1.332.783,00	13.609.433.720,07
Poundsterling**	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**25.337.564.117.387,50**		**25.948.469.006.604,80**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2019

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (Audited)	Saldo 31 Desember 2018 (Audited) nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31
	Dollar Amerika	26.403.988,65	367.041.978.243,59	26.403.988,65	382.356.159.640,65
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00
Total			**2.619.485.217.493,84**		**2.634.799.398.890,90**

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Dollar Amerika	13.901,01	14.481,00
2	Yen Jepang	127,97	131,12
3	Deutschmark	7.970,32	8.466,87
4	Euro	15.588,60	16.559,75
5	Dollar Australia	9.739,06	10.211,29
6	Poundsterling	18.249,94	18.372,78
7	Dollar Singapura	10.320,74	10.602,97

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2019

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2019 (*Audited*)
TOTAL	3.956.623.100.039,14	5.026.381.320.789,52	**8.983.004.420.828,66**

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (*Audited*)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (*Audited*)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.508,72	1.484.801.217.779,26	106.812.508,72	1.546.751.938.774,32
Dollar Singapore	79.397,45	819.440.438,11	79.397,45	841.848.780,43
Rupiah	2.446.885.947.801,74	2.446.885.947.801,74	2.448.509.128.092,74	2.448.509.128.092,74
Yen Jepang	141.216.722,50	18.071.023.841,47	141.216.722,50	18.515.644.692,26
Deutchmark	758.512,78	6.045.591.145,32	758.512,78	6.422.225.862,48
Jumlah		**3.956.623.221.005,90**		**4.021.040.786.202,22**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2019

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2019 (*Audited*)	Saldo 31 Desember 2018 (*Audited*)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00	1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75	34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50	69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00	62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84	30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00	8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65	26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	537.678.898.460,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	811.643.881.275,00	873.811.488.440,40
Jumlah		**3.471.126.878.506,89**	**3.610.641.294.586,29**

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2019

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019 (*Audited*)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2018 (*Audited*)
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
		Dollar Amerika	38.822.432,00	539.670.821.344,16	38.822.432,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
		Dollar Amerika	960.092,00	13.346.243.692,46	960.092,00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
		Dollar Amerika	2.435,00	33.848.947,18	2.435,00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
		Dollar Amerika	25.540.008,00	355.031.778.908,04	25.540.008,00
Grand Total				**1.530.685.103.224,83**	

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2019 (*Audited*)	Saldo 31 Desember 2018 (*Audited*)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875,00	24.561.586.875,00
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933,42	4.911.933,42
3	Faridah	Rupiah	2.528.941,32	2.528.941,32
4	Haryanto	Rupiah	59.266,60	59.266,60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041,46	252.041,46
Total			**24.569.339.057,80**	**24.569.339.057,80**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2019

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Dollar Amerika	13.901,01	14.481,00
2	Yen Jepang	127,97	131,12
3	Deutschmark	7.970,32	8.466,87
4	Euro	15.588,60	16.559,75
5	Dollar Australia	9.739,06	10.211,29
6	Poundsterling	18.249,94	18.372,78
7	Dollar Singapura	10.320,74	10.602,97

Republik Indonesia

Lampiran 13

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2019 & 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (Audited)			31 DESEMBER 2018 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	82.051.392	(410.257)	81.641.135
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	89.976.996	(13.837.802)	76.139.194	106.226.996	(13.919.051)	92.307.945
4	005	MAHKAMAH AGUNG	202.296.079	(49.519.945)	152.776.134	1.041.454.419	(867.137.012)	174.317.407
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	17.892.450	(89.462)	17.802.988	20.262.450	(101.312)	20.161.138
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.365.979.574	(9.418.049.956)	8.947.929.618	18.509.229.574	(92.546.148)	18.416.683.426
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	35.182.495.569	(32.940.270.573)	2.242.224.996	34.908.690.307	(33.289.023.154)	1.619.667.153
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	427.956.678	(2.139.784)	425.816.894	337.616.858	(1.688.082)	335.928.776
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	308.286.675	(1.541.434)	306.745.241	239.190.122	(1.195.951)	237.994.171
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	21.474.181.169	(17.810.177.092)	3.664.004.077	24.227.611.824	(17.783.976.531)	6.443.635.293
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.046.668	(9.492.833)	2.553.835	10.230.000	(9.483.750)	746.250
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8.100.000	(40.500)	8.059.500	-	-	-
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	577.095.000	(2.885.475)	574.209.525	840.073.333	(4.200.367)	835.872.966
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	613.457.018	(24.729.862)	588.727.156	542.781.764	(3.055.728)	539.726.036
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	-	-	-	5.392.000	-	5.392.000
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12.739.654.804	(5.473.155.124)	7.266.499.680	12.866.689.195	(5.473.790.297)	7.392.898.898
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10.734.095.274	(9.335.814.535)	1.398.280.739	9.491.101.667	(9.422.471.963)	68.629.704
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.223.544	(45.160)	12.178.384	23.827.151	(109.626)	23.717.525
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	135.619.210	(515.096)	135.104.114	188.021.714	(940.110)	187.081.604
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.004	(17.500)	3.482.504	3.500.004	(17.500)	3.482.504
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	250.000	(1.250)	248.750	3.000.000	(15.000)	2.985.000
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	19.996.000	(99.980)	19.896.020	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	24.609.633.188	(18.122.541.878)	6.487.091.310	19.710.338.388	(18.330.000.346)	1.380.338.042
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	51.805.080	(259.025)	51.546.055	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	189.094.326	(945.471)	188.148.855	319.962.078	(1.742.310)	318.219.768
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3.194.098	(15.970)	3.178.128	4.396.980	(21.985)	4.374.995
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.229.749.548	(757.983.498)	471.766.050	1.269.849.548	(762.633.498)	507.216.050
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	474.513.998	(2.372.570)	472.141.428	235.891.869	(1.749.460)	234.142.409
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.839.984	(24.200)	4.815.784	4.839.984	(24.200)	4.815.784
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	8.395.000	(41.975)	8.353.025	12.009.672	(60.049)	11.949.623
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	88.468.100	(442.338)	88.025.762	88.468.100	(442.338)	88.025.762
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39.433.680	(197.168)	39.236.512	39.433.680	(197.168)	39.236.512
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	-	-	-	12.356.464	(61.782)	12.294.682
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.903.889.653	(12.869.113)	1.891.020.540	1.762.067.846	(27.364.195)	1.734.703.651
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	81.000.000	(81.000.000)	-	101.904.000	(101.904.000)	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	-	-	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	2.375.000	(11.875)	2.363.125	21.136.000	(105.680)	21.030.320
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	198.741.111	(993.706)	197.747.405	198.741.111	(993.706)	197.747.405
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.688.093.229	(8.440.466)	1.679.652.763	2.100.434.041	(10.502.170)	2.089.931.871
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	20.555.530	(102.778)	20.452.752	4.104.000	(20.520)	4.083.480
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	12.000.000	(60.000)	11.940.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.068.956	(310.344)	61.758.612	62.068.956	(310.344)	61.758.612
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	473.568.000	(2.367.840)	471.200.160	873.971.250	(4.369.856)	869.601.394
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	109.866.324	(549.332)	109.316.992	101.466.324	(507.332)	100.958.992
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	132.984.381	(664.922)	132.319.459	162.032.709	(6.282.664)	155.750.045
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	101.285.715	(506.429)	100.779.286	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (Audited)			31 DESEMBER 2018 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	531.468.683	(245.934.342)	285.534.341
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	246.498.400	(12.632.492)	233.865.908	192.580.000	(12.362.900)	180.217.100
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	4.060.000	(20.300)	4.039.700
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	3.480.000	(17.400)	3.462.600	664.701.149	(456.883.215)	207.817.934
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	735.616.452	(464.948.692)	270.667.760	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	-	-	-	181.451.044	(148.918.027)	32.533.017
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	553.672.152	(265.414.185)	288.257.967	188.620.978	(464.100)	188.156.878
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	245.280.578	(1.136.403)	244.144.175	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	165.144.000	(825.720)	164.318.280
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	1.106.041.198	(5.530.206)	1.100.510.992	-	-	-
TOTAL			**135.727.647.729**	**(95.254.549.942)**	**40.473.097.787**	**132.923.950.960**	**(87.509.960.349)**	**45.413.990.611**



Republik Indonesia

Lampiran 14

Persediaan
Per 31 Desember 2019
& 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	20.555.125.996	11.286.396.319
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	26.808.990.001	23.226.536.663
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15.122.730.192	15.843.612.528
4	005	MAHKAMAH AGUNG	21.655.458.707	23.353.040.743
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	461.669.749.675	468.311.929.929
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	653.664.943.349	596.880.169.078
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	92.299.467.705	170.851.287.822
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	68.130.933.519	63.604.896.877
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	60.768.547.047.754	57.801.718.824.526
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	539.879.870.427	411.488.366.832
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	357.732.469.934	368.543.028.343
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.379.388.077.960	889.356.431.578
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	220.913.541.087	312.622.732.637
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.898.748.247.837	2.027.676.296.737
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8.076.615.771.648	8.189.041.789.589
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	366.768.189.689	1.232.210.766.192
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.351.013.323.371	8.848.474.789.132
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	99.843.951.234	81.382.238.309
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	783.296.342.562	416.157.184.324
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	455.884.848.039	451.765.319.891
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.199.736.345.919	973.194.410.140
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.769.644.733	187.113.345.598
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	18.673.764.818.693	10.117.302.555.177
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	46.235.386	13.038.950
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	439.174.124	781.297.894
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.519.072.537	1.828.380.778
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	20.941.321.841	29.104.736.750
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.731.275.125	1.633.934.371
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.949.226.892.025	2.809.327.268.968
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	88.240.415.725	64.301.362.339
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.831.258.497	8.426.066.348
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.361.041.177	1.474.233.641
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	13.050.016.603	11.181.461.354
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	815.092.601	611.821.950
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	754.000	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	78.536.117.950	29.209.225.390
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	88.524.541.338	1.003.556.532.748
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	113.094.198.603	82.903.600.336
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	12.630.909.647	11.868.690.299

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.585.979.022	7.442.895.214
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.150.975.026.091	5.823.228.307.786
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	158.059.162.101	155.641.585.196
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	261.879.434	249.894.626
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.910.569.434	2.156.865.494
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	26.909.822.005	36.902.363.191
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	406.694.677.561	581.713.720.524
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	572.820.250.095	623.579.528.663
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	309.804.498	527.832.004
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	128.439.482.685	114.812.864.174
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	84.739.247.412	1.050.272.584.033
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.475.602.620	2.052.266.170
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.059.387.646	1.772.854.264
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	26.008.324.171	81.013.520.968
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	79.010.653.331	66.781.667.698
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	20.045.027.316	14.646.643.458
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	58.138.811.220	57.318.366.099
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	128.296.169.856	131.413.937.869
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	170.039.539	111.866.751
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.818.379.154	3.252.036.988
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.412.869.884	2.640.228.608
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.804.956.408	2.268.275.397
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	9.231.603.900	11.054.864.115
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.220.571.216	9.843.219.941
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.361.324.664.214	3.881.570.620.917
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	321.446.283.566	498.832.224.112
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.222.364.380.882	1.098.833.089.639
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	675.040.151	790.360.885
68	100	KOMISI YUDISIAL	665.953.472	484.539.172
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	191.049.761.763	234.196.545.653
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	44.919.082.188	45.677.965.002
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	493.086.650	1.060.478.766
72	107	BADAN SAR NASIONAL	123.152.102.407	157.465.334.995
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	241.905.396	368.339.492
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	69.909.295.651	90.363.242.495
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	976.731.399	837.246.364
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	155.033.238.928	11.331.227.996
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	16.583.264.314	18.626.355.115
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	475.377.062	438.355.222
79	114	SEKRETARIAT KABINET	3.466.775.929	1.763.974.162

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	14.448.455.322	169.498.213
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.935.224.196	4.855.554.074
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.788.828.755	2.544.479.692
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	189.068.620	206.172.928
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	13.487.365.480	15.325.391.914
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	207.218.045	321.591.664
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	13.765.638.114	874.545.140
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	586.572.492	-
JUMLAH PADA K/L			**123.447.381.818.805**	**112.585.262.923.923**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	2.708.106.030	5.394.004.262
TOTAL			**123.450.089.924.835**	**112.590.656.928.185**

Republik Indonesia

Lampiran 15

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
1	Perum Bulog	Audited 2019		28.918.894	7.091.564	36.010.458	25.956.829	995.096	26.951.925	12.522.387	-	-	(228.324)	(3.129.997)	9.164.066	(105.532)	9.058.533	100,00	9.164.065
2	Perum Damri	Audited 2019		217.020	1.059.880	1.276.900	108.398	375.594	483.992	19.700	631.987	-	(53.031)	194.252	792.908	-	792.908	100,00	792.908
3	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2019		14.326.658	3.217.039	17.543.697	4.973.771	616.040	5.589.811	7.638.733	-	-	140.030	4.175.106	11.953.869	16	11.953.885	100,00	11.953.869
4	Perum Jasa Tirta I	Audited 2019		615.854	364.916	980.770	138.829	21.358	160.187	31.701	4.186	-	414	783.645	819.946	637	820.582	100,00	819.946
5	Perum Jasa Tirta II	Audited 2019		765.189	666.677	1.431.865	141.339	94.892	236.231	164.548	-	-	(40.587)	1.061.708	1.185.669	9.965	1.195.634	100,00	1.185.669
6	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2019		164.387	78.758	243.145	63.028	124.101	187.129	9.116	47.605	-	(55.659)	54.667	55.729	287	56.016	100,00	55.729
7	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2019		3.839.173	2.276.235	6.115.408	925.916	39.488	965.404	1.541.350	(516.195)	975.506	21.584	3.127.759	5.150.004	-	5.150.004	100,00	5.150.004
8	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2019		91.114	233.493	324.607	148.454	102.587	251.041	231.769	271.038	-	5.683	(434.924)	73.566	-	73.566	100,00	73.566
9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	TW III / 2019		649.894	97.422	747.316	393.088	171.213	564.301	43.749	-	-	(88)	139.354	183.015	-	183.015	100,00	183.015
10	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2019		2.623.182	3.442.379	6.065.561	1.489.233	1.509.594	2.998.827	363.573	(64.059)	-	(107.362)	2.860.790	3.052.942	13.792	3.066.734	100,00	3.052.942
11	Perum Perhutani	Unaudited 2019		3.122.656	13.387.346	16.510.002	1.333.536	3.755.953	5.089.489	2.586.303	(1.334.148)	-	(791.998)	10.967.941	11.428.098	(7.585)	11.420.513	100,00	11.428.098
12	Perum Perikanan indonesia	Unaudited 2019		470.367	455.008	925.375	252.574	249.376	501.950	341.434	-	-	245	81.746	423.425	-	423.425	100,00	423.425
13	Perum Perumnas	Audited 2019		9.634.407	747.037	10.381.444	4.138.293	3.327.268	7.465.561	1.000	1.960.375	-	281.006	661.198	2.903.579	12.304	2.915.883	100,00	2.903.580
14	Perum Produksi Film Negara	Audited 2019		10.724	30.355	41.079	14.739	5.868	20.607	40.000	16.782	-	(281)	(36.029)	20.472	-	20.472	100,00	20.472
	Total Perum			**65.449.518**	**33.148.109**	**98.597.628**	**40.078.027**	**11.388.429**	**51.466.456**	**25.535.363**	**1.017.571**	**975.506**	**(828.369)**	**20.507.216**	**47.207.287**	**(76.117)**	**47.131.171**		**47.207.288**
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2019		30.315.155	6.200.678	36.515.833	24.493.177	5.188.359	29.681.536	356.085	2.588.834	-	467.669	3.397.430	6.810.019	24.279	6.834.298	51,00	3.473.109
2	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2019		834.839	248.558	1.083.397	627.656	252.833	880.489	44.285	-	-	235.212	(76.588)	202.908	-	202.908	100,00	202.908
3	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2019		8.190.498	34.596.053	42.786.551	6.180.789	20.625.255	26.806.043	6.414.412	(5.453)	-	340.668	9.225.382	15.975.009	5.498	15.980.508	100,00	15.975.009
4	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2019		5.964.266	38.033.765	43.998.030	5.339.907	14.215.315	19.555.221	15.971.652	(59.049)	869.462	(342.708)	7.621.449	24.060.806	382.002	24.442.809	100,00	24.060.806
5	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2019		22.007.107	8.848.624	30.855.731	1.706.050	35.254.897	36.960.947	200.000	-	-	(2.667.792)	(3.637.424)	(6.105.216)	-	(6.105.216)	100,00	-
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2019		1.930.778	5.669.119	7.599.897	922.468	201.605	1.124.073	4.030.810	1.114.559	620.969	(10.340)	609.765	6.365.763	110.061	6.475.824	100,00	6.365.763
7	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Unaudited 2019		6.645.199	6.343.093	12.988.292	2.303.102	7.311.589	9.614.691	425.000	-	-	73.903	2.866.248	3.365.151	8.450	3.373.601	100,00	3.365.151
8	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2019		-	-	19.123.247	-	-	52.780.692	235.000	3.037	-	2.588.898	(36.490.516)	(33.663.581)	6.136	(33.657.445)	100,00	-
9	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Unaudited 2019		20.186.045	1.180.556	21.366.601	10.268.864	70.844	10.339.708	6.611.000	-	-	(129.145)	4.544.416	11.026.271	622	11.026.893	100,00	11.026.271
10	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2019		1.669.889	2.567.266	4.237.155	949.496	1.969.649	2.919.145	272.500	-	-	(7.069)	131.367	396.798	921.212	1.318.010	100,00	396.798
11	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2019		120.306	176.271	296.577	131.059	37.367	168.426	14.400	-	-	122.614	(8.863)	128.151	-	128.151	100,00	128.151
12	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2019		534.759.396	783.486.939	1.318.246.335	1.013.881.190	95.330.620	1.109.211.810	11.666.667	17.316.192	-	32.307.934	143.310.060	204.600.853	4.433.672	209.034.525	60,00	122.760.512
13	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019		222.114.271	623.490.937	845.605.208	639.610.575	80.990.685	720.601.260	9.054.807	14.568.468	-	16.428.799	82.463.505	122.515.579	2.488.369	125.003.948	60,00	73.509.347
14	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019		1.361.995.923	54.762.917	1.416.758.840	1.059.118.759	148.855.745	1.207.974.504	6.167.291	839.185	-	17.989.526	181.327.431	206.323.433	2.460.903	208.784.336	57,20	118.017.004
15	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2019		303.146.868	8.629.960	311.776.828	233.955.118	53.985.515	287.940.633	5.295.000	2.054.454	-	3.124.744	13.361.997	23.836.195	-	23.836.195	60,00	14.301.717
16	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2019		3.833.838	1.104.897	4.938.735	3.271.567	403.760	3.675.327	762.915	3.221	-	477.598	19.674	1.263.408	-	1.263.408	100,00	1.263.408
17	PT Berdikari (Persero)	Unaudited 2019		519.246	192.566	711.812	520.846	37.917	558.763	75.000	-	-	8.982	69.067	153.049	-	153.049	100,00	153.049
18	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2019		572.133	394.230	966.362	361.531	9.267	370.798	375.000	-	-	1.134	219.430	595.565	-	595.565	100,00	595.565
19	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2019		58.405	47.495	105.900	41.706	12.030	53.736	15.000	-	-	(5.949)	43.113	52.164	-	52.164	100,00	52.164
20	PT BioFarma (Persero)	Audited 2019		2.523.919	5.416.480	7.940.399	967.100	825.056	1.792.156	2.000.000	-	-	1.872.547	2.275.696	6.148.243	-	6.148.243	100,00	6.148.243
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2019		594.397	353.232	947.629	118.131	121.746	239.877	255.000	-	-	15.751	437.001	707.752	-	707.752	100,00	707.752
22	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2019		467.462	418.246	885.708	450.845	200.099	650.944	340.916	9.564	-	284.128	(399.793)	234.815	(51)	234.764	100,00	234.815
23	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2019		3.888.980	2.414.257	6.303.237	3.089.041	1.392.877	4.481.918	161.555	-	-	372.963	1.258.709	1.793.226	28.092	1.821.319	100,00	1.793.226
24	PT Dahana (Persero)	Audited 2019		1.278.645	579.026	1.857.671	789.044	66.819	855.863	250.000	6.397	-	37.287	673.511	967.195	34.613	1.001.808	100,00	967.195
25	PT Danareksa (Persero)	Audited 2019		-	-	2.455.062	-	-	1.697.844	701.480	240.655	-	458.879	(721.345)	679.669	77.549	757.219	100,00	679.669
26	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2019		9.522.950	3.586.833	13.109.783	7.444.222	2.042.001	9.486.223	20.319.940	1.027.256	-	1.023.392	(18.747.028)	3.623.560	-	3.623.560	100,00	3.623.560
27	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2019		350.148	790.064	1.140.212	196.300	422.780	619.080	1.999.473	1.427	-	(839)	(1.478.940)	521.121	10	521.132	73,54	383.233
28	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2019		997.491	1.452.990	2.450.481	3.304.511	373.063	3.677.574	976.600	634	-	550.092	(2.754.419)	(1.227.093)	-	(1.227.093)	99,95	-
29	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2019		215.557	426.676	642.232	467.837	449.359	917.195	240.936	50	-	172.200	(695.551)	(282.365)	7.402	(274.963)	100,00	-
30	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2019		64.348	27.327	91.675	56.011	2.664	58.675	15.555	-	-	710	16.723	32.988	12	33.000	100,00	32.988
31	PT Garam (Persero)	Audited 2019		543.069	577.298	1.120.367	68.547	148.873	217.420	600.000	-	-	276.742	26.206	902.947	-	902.947	100,00	902.947
32	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019		16.071.785	47.082.952	63.154.737	46.176.567	6.764.060	52.940.627	18.572.575	194.949	-	570.574	(9.487.211)	9.850.887	363.223	10.214.110	60,54	5.963.727
33	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2019		193.464	9.550.328	9.743.792	224.862	998.708	1.223.570	101.700	82	-	8.508.497	(91.210)	8.519.069	1.153	8.520.222	100,00	8.519.069
34	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2019		21.806.516	69.841.177	91.647.693	21.587.312	47.101.772	68.689.084	16.600.000	-	-	467.494	5.404.228	22.471.722	486.887	22.958.609	100,00	22.471.722
35	PT Iglas (Persero)	Audited 2019		16.773	141.207	157.980	1.275.712	-	1.275.712	47.007	94.583	-	-	(1.259.321)	(1.117.732)	-	(1.117.732)	64,00	-
36	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2019		376.141	419.362	795.503	136.569	486.805	623.375	7.000	-	-	99.906	65.222	172.128	-	172.128	100,00	172.128

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
37	PT Indofarma (Persero) Tbk	TW III / 2019		744.220	581.632	1.325.852	748.823	115.225	864.048	309.927	81.120	-	51	70.706	461.804	-	461.804	80,66	372.491
38	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2019		43.665.723	121.177.309	164.843.032	24.144.410	68.907.844	93.052.254	54.177.941	(19.001.920)	-	14.010.124	9.390.433	58.576.578	13.214.200	71.790.778	100,00	58.576.578
39	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2019		127.569	114.020	241.589	119.706	39.904	159.610	2.000	-	-	57.307	22.672	81.979	-	81.979	100,00	81.979
40	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Unaudited 2019		166.833	606.190	773.023	97.685	242.580	340.265	456.694	3.656	-	(645)	(26.947)	432.758	-	432.758	100,00	432.758
41	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2019		6.157.304	1.318.051	7.475.356	5.658.747	126.931	5.785.679	1.251.843	-	-	388.034	26.007	1.665.885	23.792	1.689.677	100,00	1.665.885
42	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2019		29.111	21.652	50.763	19.092	26.939	46.031	27.200	-	-	-	(22.468)	4.732	-	4.732	100,00	4.732
43	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Unaudited 2019		188.126	414.086	602.212	302.398	113.556	415.954	198.870	650	-	190.376	(203.638)	186.258	-	186.258	100,00	186.258
44	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2019		481.814	911.529	1.393.343	818.105	843.874	1.661.980	350.000	1.229	-	751.642	(1.372.101)	(269.230)	593	(268.637)	100,00	-
45	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2019		11.612.566	88.067.004	99.679.570	41.526.417	34.967.416	76.493.833	3.628.936	3.997.085	-	(707.449)	11.764.108	18.682.680	4.503.057	23.185.737	70,00	13.077.876
46	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2019		15.712.310	1.214.886	16.927.196	5.183.843	323.323	5.507.166	8.500.000	13.504	-	(413.464)	3.255.305	11.355.345	64.685	11.420.030	100,00	11.355.345
47	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2019		558.801	1.621.382	2.180.183	551.940	223.197	775.137	363.945	111.968	-	(5.764)	934.872	1.405.021	25	1.405.045	73,15	1.027.773
48	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2019		192.829	116.439	309.268	45.987	54.063	100.050	40.000	-	-	(1.322)	170.540	209.219	-	209.219	60,00	125.531
49	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2019		309.463	312.606	622.069	134.921	1.850	136.771	150.000	-	-	-	335.298	485.298	-	485.298	60,00	291.179
50	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2019		117.460	243.252	360.711	50.932	41.773	92.705	25.863	-	-	(40)	241.582	267.406	600	268.006	51,09	136.618
51	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2019		6.898.724	38.006.824	44.905.547	8.113.388	16.986.535	25.099.923	12.268.743	-	-	(394.644)	7.694.358	19.568.457	237.168	19.805.624	100,00	19.568.457
52	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2019		54.057	752.252	806.309	1.737.327	141.612	1.878.939	798.994	-	-	-	(1.871.624)	(1.072.630)		(1.072.630)	96,65	-
53	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018		26.791	567.027	593.818	591.048	725.419	1.316.467	417.049	-	-	618.400	(1.758.098)	(722.649)		(722.649)	100,00	-
54	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2019		7.344.787	11.008.090	18.352.877	7.392.140	3.547.810	10.939.950	555.400	(885.401)	-	5.114.990	2.456.905	7.241.894	171.033	7.412.927	90,03	6.519.877
55	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2019		2.206.868	19.091	2.225.959	1.848.543	11.819	1.860.362	102.000	-	-	(1.414)	263.465	364.051	1.546	365.597	100,00	364.051
56	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Unaudited 2019		14.586.690	42.607.540	57.194.230	11.601.348	27.905.389	39.506.737	13.997.860	1.701.263	-	20.456.640	(17.864.654)	18.291.108	(603.614)	17.687.494	80,00	14.632.886
57	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2019		4.841.997	1.919.697	6.761.694	4.688.953	1.125.148	5.814.101	175.001	-	-	305.065	378.308	858.374	89.219	947.593	100,00	858.374
58	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	SMT I/2019		80.444	504.187	584.631	3.880.871	3.121.337	7.002.208	1.964.558	-	-	45.162	(8.427.436)	(6.417.716)	139	(6.417.577)	96,99	-
59	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2019		3.712.548	2.788.253	6.500.801	3.057.595	3.118.688	6.176.283	3.885.661	12.450	-	213.618	(3.787.180)	324.550	(32)	324.518	100,00	324.550
60	PT PANN (Persero)	Unaudited 2019		66.668	806.082	872.750	5.354	4.160.560	4.165.914	45.997	192.066	-	86.850	(3.618.077)	(3.293.164)	-	(3.293.164)	93,04	-
61	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2019		38.621	56.168	94.789	7.902	33.252	41.154	19.000	-	-	-	34.635	53.635	-	53.635	100,00	53.635
62	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2019		53.830.391	11.493.786	65.324.177	32.674.362	9.589.505	42.263.867	6.250.000	-	-	6.989.355	9.818.269	23.057.624	2.686	23.060.310	100,00	23.057.624
63	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2019		2.601.862	13.921.028	16.522.890	1.938.843	8.065.405	10.004.248	1.700.000	527.133	-	(217.436)	3.428.860	5.438.557	1.080.085	6.518.642	100,00	5.438.557
64	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2019		21.061.762	30.978.837	52.040.600	5.353.723	28.560.666	33.914.389	1.444.029	(290.771)	-	(105.009)	15.729.277	16.777.526	1.348.685	18.126.211	100,00	16.777.526
65	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2019		5.407.567	25.348.348	30.755.915	3.265.197	16.443.854	19.709.051	1.018.953	-	-	675.410	8.457.731	10.152.095	894.769	11.046.864	100,00	10.152.095
66	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2019		1.144.585	9.377.608	10.522.194	1.133.250	3.199.570	4.332.820	3.112.085	1.466	-	10.201	3.058.119	6.181.871	7.503	6.189.374	100,00	6.181.871
67	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2019		3.449.572	3.751.085	7.200.657	803.573	224.255	1.027.828	7.065.092	564.951	-	(105.366)	(1.354.756)	6.169.921	2.908	6.172.829	100,00	6.169.921
68	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2019		41.704.590	17.460.958	59.165.548	30.490.993	11.348.422	41.839.415	619.990	4.710.055	-	2.200.164	5.904.243	13.434.452	3.891.681	17.326.133	51,00	6.851.571
69	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2019		301.374	1.738.199	2.039.573	294.289	205.007	499.296	880.000	297.808	-	(4.103)	366.535	1.540.240	37	1.540.277	100,00	1.540.240
70	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Unaudited 2019		336.981	450.716	787.697	130.768	286.132	416.900	352.529	-	-	-	18.268	370.797	-	370.797	100,00	370.797
71	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2019		24.379.147	108.253.849	132.632.996	25.705.921	56.846.043	82.551.964	34.059.877	(13.964.699)	-	37.324.978	(11.885.712)	45.534.444	4.546.588	50.081.032	100,00	45.534.444
72	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2019		16.870.154	9.053.851	25.924.005	6.679.209	16.380.303	23.059.512	1.300.000	-	-	8.442	1.541.105	2.849.547	14.946	2.864.493	100,00	2.849.547
73	PT Pertamina (Persero)	Audited 2019		319.838.893	612.729.265	932.568.158	169.082.701	329.503.452	498.586.152	600.000	211.625.288	2.115.334	863.302	184.880.687	400.084.611	33.897.394	433.982.005	100,00	400.084.611
74	PT Pertani (Persero)	Unaudited 2019		665.809	1.166.105	1.831.914	365.885	506.674	872.559	1.021.315	39.722	-	784.282	(885.987)	959.332	23	959.355	100,00	959.332
75	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2019		151.366.673	1.433.688.340	1.585.055.013	159.298.153	496.376.447	655.674.600	115.181.002	6.641.363	13.806.825	661.509.952	131.332.627	928.471.769	908.644	929.380.413	100,00	928.471.769
76	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2019		8.671.359	5.744.073	14.415.432	7.101.679	1.890.209	8.991.888	2.996.688	(308.059)	-	435.407	2.292.641	5.416.677	6.867	5.423.544	100,00	5.416.677
77	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2019		316.792	2.845.362	3.162.154	165.500	952.756	1.118.256	156.200	-	-	(29.891)	1.914.029	2.040.338	3.561	2.043.899	100,00	2.040.338
78	PT Pindad (Persero)	Audited 2019		5.864.487	1.025.304	6.889.791	4.838.044	588.651	5.426.695	1.367.542	-	-	(336.274)	431.812	1.463.080	16	1.463.096	100,00	1.463.080
79	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2019		4.003.645	5.442.440	9.446.085	3.725.501	1.655.388	5.380.889	455.023	-	-	1.912.312	1.696.558	4.063.893	1.303	4.065.196	100,00	4.063.893
80	PT Primissima (Persero)	Audited 2019		54.558	128.460	183.018	122.241	10.193	132.433	13.000	2.276	-	104.868	(69.559)	50.585	-	50.585	53,00	26.810
81	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2019		51.467.947	84.085.643	135.553.590	26.646.943	37.154.934	63.801.877	25.000.000	-	-	32.286.421	14.200.449	71.486.870	264.843	71.751.713	100,00	71.486.870
82	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2019		4.557.487	9.187.278	13.744.765	4.039.976	3.204.195	7.244.171	1.051.567	996.231	-	3.184.138	1.156.557	6.388.493	112.101	6.500.594	100,00	6.388.493
83	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2019		8.889.868	893.954	9.783.822	6.032.344	524.832	6.557.176	878.358	270	-	1.091.071	1.256.930	3.226.629	17	3.226.646	100,00	3.226.629
84	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2019		189.449	5.100.355	5.289.804	842.818	1.271.935	2.114.753	534.000	1.008	-	4.694.459	(2.054.416)	3.175.051	-	3.175.051	100,00	3.175.051
85	PT Sarinah (Persero)	Audited 2019		224.972	146.753	371.725	106.176	32.382	138.558	46.850	181	-	-	186.086	233.117	50	233.167	100,00	233.117
86	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2019		1.071.983	4.499.287	5.571.270	468.526	1.620.451	2.088.977	993.253	1.270.607	-	(49.534)	1.267.929	3.482.255	38	3.482.293	76,00	2.646.514

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
87	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019		16.658.531	63.148.536	79.807.067	12.240.252	33.674.891	45.915.143	593.152	1.458.258	-	451.122	29.774.283	32.276.815	1.615.109	33.891.924	51,01	16.464.403
88	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2019		12.342	597.671	610.012	20.818	565.883	586.701	133.713	-	-	5.305	(115.707)	23.312		23.312	61,48	14.332
89	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2019		1.843.399	1.854.836	3.698.235	514.012	387.536	901.548	300.000	1.141	-	785.424	1.710.498	2.797.063	(375)	2.796.688	95,00	2.657.210
90	PT Survai Udara Penas (Persero)	TW III / 2019		60.350	67.196	127.546	88.760	162.892	251.652	13.000	-	-	(24.849)	(113.482)	(125.331)	1.225	(124.106)	100,00	-
91	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2019		1.064.054	678.100	1.742.154	380.544	74.603	455.147	25.000	105	-	200.599	1.066.374	1.292.078	(5.071)	1.287.007	85,12	1.099.817
92	PT Taspen (Persero)	Audited 2019		86.332.353	176.921.151	263.253.504	12.662.217	239.175.390	251.837.607	500.000	-	-	(3.349.128)	14.254.409	11.405.281	10.616	11.415.897	100,00	11.405.281
93	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2019		41.722.000	179.486.000	221.208.000	58.369.000	45.589.000	103.958.000	4.953.000	2.711.000	-	408.000	91.489.000	99.561.000	17.689.000	117.250.000	52,09	51.861.325
94	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2019		321.121	490.455	811.576	104.232	11.605	115.837	250.000	106	-	(24.691)	470.324	695.739	1	695.740	100,00	695.739
95	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2019		83.234	250.889	334.124	78.906	24.713	103.619	11.000	-	-	232.585	(13.081)	230.505	-	230.505	100,00	230.505
96	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2019		337.730	121.550	459.280	206.623	53.205	259.828	25.000	1.051	-	109.184	64.218	199.452	-	199.452	100,00	199.452
97	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2019		49.037.843	73.551.416	122.589.259	45.023.495	48.447.295	93.470.790	1.357.390	5.552.026	-	739.582	10.233.410	17.882.408	11.236.061	29.118.469	66,04	11.809.542
98	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2019		42.335.472	19.775.375	62.110.847	30.349.457	12.545.657	42.895.114	896.995	6.556.306	-	1.788.272	7.261.130	16.502.703	2.713.030	19.215.733	65,05	10.735.008
99	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2019		383.557	83.613	467.170	239.440	1.236	240.676	50.000	-	-	(5.884)	182.378	226.494	-	226.494	100,00	226.494
	Total Persero			**3.672.162.027**	**4.950.344.298**	**8.644.084.634**	**3.863.948.316**	**2.100.211.543**	**6.018.638.394**	**452.095.645**	**254.621.538**	**17.412.590**	**880.971.191**	**910.558.430**	**2.515.659.394**	**109.786.846**	**2.625.446.240**		**2.239.910.324**
	TOTAL			**3.737.611.545**	**4.983.492.408**	**8.742.682.261**	**3.904.026.343**	**2.111.599.972**	**6.070.104.850**	**477.631.009**	**255.639.108**	**18.388.097**	**880.142.821**	**931.065.646**	**2.562.866.681**	**109.710.730**	**2.672.577.411**		**2.287.117.612**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	Perum Bulog	Audited 2019	26.637.045	26.355.237	281.808	536.423	435.731	382.500	2.525.426	(2.142.926)	(372.932)	(1.769.994)	22.859	(1.747.135)	(1.756.640)	(1.733.912)
2	Perum Damri	Audited 2019	1.241.951	1.211.518	30.433	48.093	11.105	67.421	19.495	47.926	4.664	43.262	8.596	51.858	43.262	51.859
3	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2019	3.312.044	2.601.848	710.196	55.518	-	765.714	-	765.714	139.935	625.779	59.820	685.599	625.779	685.599
4	Perum Jasa Tirta I	Audited 2019	544.733	388.902	155.831	20.190	18.735	157.286	-	157.286	35.857	121.429	(951)	120.478	121.407	120.454
5	Perum Jasa Tirta II	Audited 2019	812.881	653.564	159.317	48.881	17.833	190.365	-	190.365	36.556	153.809	9.019	162.828	153.844	162.828
6	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2019	373.573	361.100	12.473	6.979	1.866	17.586	670	16.915	3.974	12.941	(10.073)	2.868	12.899	2.827
7	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2019	3.452.869	2.912.915	539.954	162.764	34.594	668.124	-	668.124	167.949	500.175	1.183	501.358	500.175	501.358
8	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2019	418.509	379.149	39.360	4.365	12.677	31.048	-	31.048	7.308	23.740	63	23.803	23.740	23.803
9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	TW III / 2019	212.049	182.582	29.467	1.395	4.348	26.514	24.454	2.060	-	2.060	-	2.060	2.060	2.060
10	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2019	3.884.672	3.376.524	508.148	543.800	28.977	1.022.971	142.711	880.260	154.954	725.306	(72.521)	652.785	722.380	649.960
11	Perum Perhutani	Unaudited 2019	4.153.940	3.710.482	443.458	200.933	13.768	630.623	33.386	597.237	146.298	450.939	-	450.939	450.939	450.939
12	Perum Perikanan indonesia	Unaudited 2019	489.679	504.080	(14.401)	66.013	902	50.710	40.782	9.928	-	9.928	-	9.928	9.928	9.928
13	Perum Perumnas	Audited 2019	854.997	877.212	(22.215)	19.288	384.313	(387.240)	-	(387.240)	21.060	(408.300)	865	(407.435)	(407.974)	(407.109)
14	Perum Produksi Film Negara	Audited 2019	14.470	17.127	-2.657	6.867	147	4.063	1.375	2.688	676	2.012	-281	1.731	2.012	1.731
	Total Perum		**46.403.412**	**43.532.240**	**2.871.172**	**1.721.509**	**964.996**	**3.627.685**	**2.788.300**	**839.385**	**346.299**	**493.086**	**18.579**	**511.665**	**503.812**	**522.324**
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2019	15.307.860	12.971.807	2.336.054	340.164	1.444.464	1.231.754	545.262	686.492	21.443	665.048	559	665.608	663.806	664.365
2	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2019	570.235	526.492	43.743	804	13.456	31.092	21.051	10.041	1.889	8.151	4.647	12.799	8.151	12.799
3	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2019	8.758.803	6.033.641	2.725.162	198.327	8.952	2.914.537	860.270	2.054.267	602.040	1.452.227	(70.697)	1.381.530	1.451.360	1.380.673
4	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2019	11.084.234	8.747.211	2.337.023	378.159	205.609	2.509.573	795.854	1.713.719	706.463	1.007.256	-87.327	919.930	1.018.280	950.319
5	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2019	(9.274.585)	2.851.315	(12.125.900)	5.918.732	-	(6.207.168)	-	(6.207.168)	3.367	(6.210.535)	(2.218.709)	(8.429.244)	(6.210.535)	(8.429.244)
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2019	3.125.252	2.951.969	173.283	235.372	11.765	396.890	41.368	355.522	37.418	318.104	(999)	317.105	351.334	350.330
7	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Unaudited 2019	5.196.473	4.511.557	684.916	384.189	767.541	301.564	66.335	235.229	24.042	211.187	20.979	232.166	210.455	231.434
8	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2019	3.382.683	99.866	3.282.817	-	6.583.799	(3.300.982)	-	(3.300.982)	26.014	(3.326.996)	(27.151)	(3.354.147)	(3.327.183)	(3.354.147)
9	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Unaudited 2019	9.072.612	7.522.893	1.549.719	13.840	259.547	1.304.012	-	1.304.012	148.246	1.155.766	(25.467)	1.130.299	1.155.574	1.130.107
10	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2019	682.759	555.041	127.718	38.477	-	166.195	-	166.195	41.293	124.902	(468)	124.434	54.304	54.004
11	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2019	155.975	148.943	7.032	4.652	204	11.480	118	11.362	3.002	8.360	435	8.795	8.360	8.795
12	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2019	129.991.193	93.539.679	36.451.514	12.529	22.603	36.441.440	-	36.441.440	7.985.848	28.455.592	7.211.076	35.666.668	27.482.133	34.655.095
13	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019	78.402.963	58.916.340	19.486.623	22.074	139.591	19.369.106	-	19.369.106	3.860.523	15.508.583	2.875.356	18.383.939	15.384.476	18.192.475
14	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019	153.482.026	112.137.230	41.344.796	2.019.257	-	43.364.053	-	43.364.053	8.950.228	34.413.825	5.084.772	39.498.597	34.372.609	39.403.628
15	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2019	27.829.726	27.307.953	521.773	127	110.838	411.062	-	411.062	201.799	209.263	348.069	557.332	209.263	557.332
16	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2019	2.227.574	2.044.994	182.580	23.254	20.821	185.013	61.440	123.573	52.414	71.159	(2.776)	68.383	71.159	68.383
17	PT Berdikari (Persero)	Unaudited 2019	603.201	587.196	16.005	45.615	13.449	48.171	2.079	46.092	1.411	44.681	-	44.681	44.681	44.681
18	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2019	883.094	829.814	53.280	35.837	-	89.117	-	89.117	22.133	66.984	2.584	69.568	66.984	69.568
19	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2019	69.056	71.593	(2.537)	12.779	2.080	8.162	-	8.162	2.831	5.331	454	5.784	5.331	5.784
20	PT BioFarma (Persero)	Audited 2019	2.542.592	1.972.733	569.859	428.503	420.502	577.860	87.246	490.614	134.674	355.940	(7.569)	348.371	355.940	348.371
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2019	908.439	737.470	170.969	20.659	41.020	150.608	-	150.608	40.465	110.143	(7.402)	102.741	110.143	102.741
22	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2019	343.984	339.259	4.725	13.540	1.577	16.688	5.753	10.935	988	9.947	(3.927)	6.020	9.847	5.920
23	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2019	3.921.401	3.470.045	451.356	22.481	92.570	381.267	98.003	283.264	639	282.625	24.564	307.189	274.951	299.515
24	PT Dahana (Persero)	Audited 2019	1.989.400	1.899.007	90.393	19.775	-	110.168	15.926	94.242	20.144	74.098	(357)	73.741	75.612	75.255

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
25	PT Danareksa (Persero)	Audited 2019	394.009	473.322	(79.313)	138.157	19.523	39.321	-	39.321	21.686	17.635	(64.467)	(46.833)	3.883	(53.457)
26	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2019	3.691.583	3.025.193	666.390	15.136	223.549	457.977	311.155	146.821	(3.989)	150.811	(12.137)	138.673	150.811	138.673
27	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2019	625.812	576.427	49.385	58.598	19.819	88.164	21.147	67.017	2.338	64.679	60	64.739	64.677	64.737
28	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2019	290.030	452.977	(162.947)	76.709	88.152	(174.390)	-	(174.390)	(58.017)	(116.373)	31.057	(85.316)	(116.373)	(85.316)
29	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2019	193.193	210.348	(17.155)	83.403	48.532	17.716	11.444	6.273	3.556	2.717	511	3.228	2.027	2.537
30	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2019	38.447	35.121	3.326	1.199	2.869	1.656	113	1.543	300	1.243	(89)	1.154	1.243	1.154
31	PT Garam (Persero)	Audited 2019	242.360	225.099	17.261	16.924	8.338	25.847	31	25.816	6.400	19.416	(3.314)	16.102	19.416	16.102
32	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019	64.807.998	62.491.464	2.316.534	870.591	462.352	2.724.773	1.984.078	740.695	649.166	91.529	1.206.406	1.297.935	99.013	1.313.043
33	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2019	730.266	697.376	32.890	51.070	6.754	77.206	33.956	43.250	3.136	40.114	(2.507)	37.607	40.431	37.924
34	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2019	26.391.551	23.570.330	2.821.221	886.549	725.315	2.982.455	810.794	2.171.661	149.067	2.022.594	(179.914)	1.842.680	1.994.935	1.815.021
35	PT Iglas (Persero)	Audited 2019	47	8.258	(8.211)	16.930	27.552	(18.833)	55.033	(73.866)	(18.212)	(55.654)	-	(55.654)	(55.654)	(55.654)
36	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2019	181.418	161.065	20.353	5.398	2.416	23.335	9.292	14.043	3.913	10.130	195	10.325	10.130	10.325
37	PT Indofarma (Persero) Tbk	TW III / 2019	583.538	574.814	8.724	6.503	28.939	(13.712)	29.367	(43.079)	(8.236)	(34.843)	-	(34.843)	(34.843)	(34.843)
38	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2019	80.628.662	74.856.912	5.771.750	2.460.374	665.903	7.566.221	5.300.340	2.265.881	2.241.341	24.540	(11.935)	12.605	(1.200.391)	(1.061.960)
39	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2019	191.619	179.045	12.574	119	-2.820	15.513	56	15.457	4.936	10.521	-1.483	9.038	10.520	9.038
40	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Unaudited 2019	141.100	124.546	16.554	1.270	8	17.816	5.228	12.588	2.156	10.432	-	10.432	10.432	10.432
41	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2019	3.401.342	3.010.102	391.240	-	17.290	373.950	222.925	151.025	40.857	110.168	7.789	117.958	99.220	107.012
42	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2019	36.234	34.825	1.409	3.273	285	4.397	1.238	3.159	601	2.558	(241)	2.317	2.558	2.317
43	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Unaudited 2019	198.020	209.224	(11.204)	11.311	5.681	(5.574)	8.177	(13.751)	864	(14.615)	-	(14.615)	(14.615)	(14.615)
44	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2019	395.377	482.213	(86.836)	13.719	304.674	(377.791)	74.133	(451.924)	(17.159)	(434.765)	36.999	(397.766)	(429.940)	(392.941)
45	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2019	26.345.260	21.379.140	4.966.120	1.617.488	726.346	5.857.262	2.759.659	3.097.603	1.023.715	2.073.888	(77.481)	1.996.407	2.207.117	2.129.659
46	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2019	6.384.430	5.092.096	1.292.334	612.671	-	1.905.005	-	1.905.005	346.004	1.559.001	72.338	1.631.339	1.551.785	1.623.540
47	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2019	737.433	577.919	159.514	131	577	159.068	17.886	141.182	48.579	92.603	(544)	92.059	92.603	92.059
48	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2019	89.233	55.439	33.794	13.422	4.020	43.196	-	43.196	4.998	38.198	1.317	39.515	38.198	39.515
49	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2019	331.928	251.740	80.188	2.369	68	82.489	3.263	79.227	7.075	72.151	(1.326)	70.825	72.151	70.825
50	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2019	111.169	72.088	39.081	3.898	49	42.930	3.557	39.373	6.024	33.349	(649)	32.700	33.349	32.700
51	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2019	26.251.715	23.031.828	3.219.887	410.484	85.401	3.544.969	994.522	2.550.448	575.400	1.975.047	(171.928)	1.803.119	2.023.014	1.851.157
52	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2019	24.909	46.720	(21.811)	1.356	563	(21.018)	50.005	(71.023)	-	(71.023)	-	(71.023)	(71.023)	(71.023)
53	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018			-			-		-		-		-		
54	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2019	9.400.535	9.109.106	291.429	249.912	5.056	536.285	497.970	38.315	22.425	15.890	4.764.483	4.780.373	(12.724)	4.796.872
55	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2019	112.478	60.275	52.203	18.484	2.785	67.902	-	67.902	17.557	50.345	15	50.360	50.247	50.262
56	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Unaudited 2019	19.860.065	22.740.544	(2.880.479)	134.444	1.043.777	(3.789.812)	1.636.890	(5.426.703)	1.761.078	(7.187.781)	959.311	(6.228.470)	(7.163.294)	(6.204.082)
57	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2019	4.238.284	3.988.015	250.269	72.454	80.965	241.758	131.056	110.702	39.455	71.247	11.770	83.017	42.618	54.317
58	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	SMT I/2019	32.602	86.410	(53.808)	11.848	2.629	(44.589)	128	(44.717)	-	(44.717)	-	(44.717)	(44.719)	(44.719)
59	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2019	1.631.089	1.531.394	99.695	174.668	4.268	270.095	95.517	174.578	79.301	95.277	(975)	94.302	95.276	94.301
60	PT PANN (Persero)	Unaudited 2019	8.892	9.246	(354)	6.277	4.462	1.461	-	1.461	-	1.461	-	1.461	1.461	1.461
61	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2019	62.529	63.113	(584)	691	470	(364)	-	(364)	2.601	(2.965)	6	(2.958)	(2.965)	(2.958)
62	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2019	17.693.653	10.837.361	6.856.292	22.439	-	6.878.731	2.647.739	4.230.992	1.122.914	3.108.078	1.223.354	4.331.432	3.107.499	4.330.853
63	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2019	3.060.195	2.441.445	618.750	145.646	119.647	644.749	342.206	302.543	(37.214)	339.757	(59.343)	280.414	369.512	310.169
64	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2019	11.141.752	8.520.358	2.621.394	2.096.330	302.387	4.415.337	1.200.237	3.215.100	711.290	2.503.810	16.237	2.520.047	2.455.763	2.473.311
65	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2019	10.647.163	7.905.980	2.741.183	633.376	-	3.374.559	714.939	2.659.620	530.607	2.129.013	(292.465)	1.836.548	2.096.571	1.803.510

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
66	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2019	3.661.291	3.094.722	566.568	139.050	38.111	667.507	100.636	566.870	128.010	438.860	8.637	447.496	438.781	447.418
67	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2019	5.656.607	5.401.457	255.150	156.527	20.003	391.674	12.941	378.733	98.198	280.535	-	280.535	279.864	279.864
68	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2019	24.659.999	22.003.313	2.656.686	574.546	1.209.314	2.021.918	782.155	1.239.763	31.492	1.208.271	34.632	1.242.903	930.323	947.308
69	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2019	313.478	229.963	83.515	18.045	16.901	84.659	-	84.659	31.592	53.067	(3.406)	49.661	53.351	49.945
70	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Unaudited 2019	369.380	405.594	(36.214)	10.282	41.722	(67.654)	-	(67.654)	-	(67.654)	-	(67.654)	(67.654)	(67.654)
71	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2019	37.161.525	37.632.207	(470.682)	4.874.976	19.443	4.384.851	3.689.012	695.839	644.396	51.443	(2.628.868)	(2.577.425)	(145.684)	(2.770.765)
72	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2019	5.154.201	4.869.097	285.104	1.011.756	5.541	1.291.319	-	1.291.319	314.008	977.311	(5.116)	972.195	973.231	968.257
73	PT Pertamina (Persero)	Audited 2019	772.154.558	657.902.309	114.252.248	22.508.153	54.058.967	82.701.434	13.654.992	69.046.442	32.006.598	37.039.844	(2.853.871)	34.185.973	35.780.072	28.143.113
74	PT Pertani (Persero)	Unaudited 2019	1.210.544	1.266.985	(56.441)	34.996	7.585	(29.030)	57.514	(86.544)	-	(86.544)	779.086	692.542	(86.546)	692.540
75	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2019	359.605.880	315.440.938	44.164.942	10.241.429	3.667.666	50.738.705	24.619.495	26.119.210	21.797.080	4.322.130	(4.295.591)	26.539	4.270.922	(24.669)
76	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2019	6.669.457	6.289.760	379.697	204.443	159.199	424.941	89.230	335.711	8.639	327.072	(10.121)	316.951	324.913	314.854
77	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2019	2.047.951	2.044.139	3.812	4.500	153.218	(144.906)	4.760	(149.666)	(54.900)	(94.766)	(10.786)	(105.552)	(95.287)	(106.038)
78	PT Pindad (Persero)	Audited 2019	3.398.783	3.063.488	335.295	99.397	20.078	414.614	253.770	160.844	59.764	101.080	(3.764)	97.316	101.078	97.314
79	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2019	5.341.638	5.473.864	(132.226)	623.188	393.606	97.356	9.178	88.178	(35.283)	123.461	(104.379)	19.082	120.209	15.863
80	PT Primissima (Persero)	Audited 2019	146.830	155.352	(8.522)	-	6.889	(15.411)	-	(15.411)	(4.566)	(10.845)	19.075	8.230	(10.845)	8.230
81	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2019	71.307.242	62.721.898	8.585.344	415.588	-	9.000.932	3.649.954	5.350.978	1.638.938	3.712.040	3.068.420	6.780.460	3.641.754	6.710.174
82	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2019	6.523.333	6.225.811	297.522	140.465	132.387	305.600	362.066	(56.466)	8.412	(64.878)	(110.455)	(175.333)	(29.857)	(132.478)
83	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2019	4.756.223	4.449.483	306.740	19.880	18.427	308.193	76.500	231.693	11.853	219.840	102.328	322.168	219.839	322.167
84	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2019	144.539	276.779	(132.240)	68.180	41.978	(106.038)	64.336	(170.374)	-	(170.374)	49.131	(121.243)	(170.374)	(121.243)
85	PT Sarinah (Persero)	Audited 2019	514.386	516.896	(2.510)	7.514	11.901	(6.897)	684	(7.580)	(2.345)	(5.235)	(1.110)	(6.345)	(5.239)	(6.350)
86	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2019	1.999.517	1.765.573	233.944	10.237	0	244.181	157.609	86.572	56.498	30.074	-2.481	27.593	30.072	27.592
87	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2019	40.368.107	34.275.028	6.093.079	309.787	1.793	6.401.073	3.205.298	3.195.775	824.542	2.371.233	(103.083)	2.268.150	2.392.151	2.316.376
88	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2019	16.370	4.616	11.754	41	0	11.795	1.899	9.896	0	9.896	0	9.896	9.896	9.896
89	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2019	2.849.238	2.396.817	452.421	37.562	15.506	474.477	183	474.294	128.067	346.227	(10.734)	335.493	345.417	334.701
90	PT Survai Udara Penas (Persero)	TW III / 2019	14.139	13.567	572	1.999	254	2.317	8.717	(6.400)	-	(6.400)	-	(6.400)	(6.379)	(6.379)
91	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2019	1.651.671	1.436.749	214.922	25.301	10.975	229.248	1.160	228.088	65.796	162.292	(1.820)	160.472	165.035	163.217
92	PT Taspen (Persero)	Audited 2019	18.167.392	18.399.642	(232.250)	1.118.392	292.591	593.551	-	593.551	198.640	394.911	1.303.827	1.698.738	392.858	1.696.685
93	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2019	135.567.000	93.999.000	41.568.000	3.061.000	2.481.000	42.148.000	4.240.000	37.908.000	10.316.000	27.592.000	(2.192.000)	25.400.000	18.663.000	16.624.000
94	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2019	454.862	259.510	195.352	21.294	265	216.381	973	215.408	56.671	158.737	(2.051)	156.686	158.737	156.686
95	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2019	139.418	142.627	(3.209)	428	89	(2.870)	614	-3.484	-871	(2.613)	232.391	229.778	(2.613)	229.778
96	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2019	446.561	397.154	49.407	7.847	7.693	49.561	9.304	40.257	15.455	24.802	(78)	24.724	24.802	24.724
97	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2019	31.387.390	27.154.294	4.233.096	1.923.147	1.207.059	4.949.184	3.620.534	1.328.650	299.752	1.028.898	(66.141)	962.757	938.142	872.001
98	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2019	27.212.914	24.663.378	2.549.536	2.121.683	997.711	3.673.508	884.252	2.789.256	168.241	2.621.015	(93.096)	2.527.919	2.285.022	2.190.255
99	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2019	244.107	225.718	18.389	280	477	18.192	4.921	13.271	6.899	6.372	989	7.361	6.372	7.361
	Total Persero		**2.343.901.400**	**1.984.570.654**	**359.330.747**	**70.926.679**	**80.237.340**	**350.020.086**	**82.137.472**	**267.882.613**	**100.993.404**	**166.889.209**	**13.671.261**	**180.560.471**	**153.372.317**	**162.504.185**
	TOTAL		**2.390.304.812**	**2.028.102.894**	**362.201.919**	**72.648.188**	**81.202.337**	**353.647.770**	**84.925.772**	**268.721.998**	**101.339.703**	**167.382.295**	**13.689.840**	**181.072.136**	**153.876.129**	**163.026.509**

Republik Indonesia

Lampiran 16

Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/ Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2019

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 -6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 -13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
	PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	AUDITED 2019	5.321.239.732.980	3.210.652.166.747	2.110.587.566.233	141.879.212.346	82.316.034.506	2.170.150.744.073	-	2.170.150.744.073	466.557.149.393	1.703.593.594.680	79.990.800.667	1.783.584.395.347	1.703.593.594.680	1.783.584.395.347
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	AUDITED 2019	1.008.034.576.000	413.629.008.000	594.405.568.000	-	-	594.405.568.000	-	594.405.568.000	64.986.055.000	529.419.513.000	117.148.753.000	646.568.266.000	529.419.513.000	646.568.266.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	AUDITED 2019	1.863.081.000.000	1.261.478.000.000	601.603.000.000	-	-	601.603.000.000	-	601.603.000.000	128.715.000.000	472.888.000.000	34.128.000.000	507.016.000.000	472.888.000.000	507.016.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	AUDITED 2019	794.142.804.396	581.640.279.328	212.502.525.068	28.696.533.528	40.697.340.733	200.501.717.863	-	200.501.717.863	57.290.118.876	143.211.598.987	(4.730.906.209)	138.480.692.778	133.659.385.335	129.244.030.569
	Total		**8.986.498.113.376**	**5.467.399.454.075**	**3.519.098.659.301**	**170.575.745.874**	**123.013.375.239**	**3.566.661.029.936**	-	**3.566.661.029.936**	**717.548.323.269**	**2.849.112.706.667**	**226.536.647.458**	**3.075.649.354.125**	**2.839.560.493.015**	**3.066.412.691.916**
	PMP Badan Usaha Lainnya															
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	AUDITED 2019	7.367.231.000.000	13.023.277.000.000	(5.656.046.000.000)	21.188.000.000	-	(5.634.858.000.000)	-	(5.634.858.000.000)	(924.009.000.000)	(4.710.849.000.000)	15.982.000.000	(4.694.867.000.000)	(4.710.849.000.000)	(4.694.867.000.000)
	Grand Total		**16.353.729.113.376**	**18.490.676.454.075**	**(2.136.947.340.699)**	**191.763.745.874**	**123.013.375.239**	**(2.068.196.970.064)**	-	**(2.068.196.970.064)**	**(206.460.676.731)**	**(1.861.736.293.333)**	**242.518.647.458**	**(1.619.217.645.875)**	**(1.871.288.506.985)**	**(1.628.454.308.084)**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2019

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistibusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 + 6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 8 + 9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*6 = 11 + 12 + 13 + 14 + 1*	*(17)*	*(18 = 16 + 17)*	*(19)*	*(20 = 16 x 19)*
	PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan																	
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	AUDITED 2019	-	-	75.818.614.841.004	-	-	38.964.406.789.478	30.516.600.000.000	-		596.840.761.436	5.740.767.290.090	36.854.208.051.526		36.854.208.051.526	100,00	36.854.208.051.526
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	AUDITED 2019	-	-	11.111.240.009.000	-	-	139.457.066.000	8.000.000.000.000			6.615.985.000	2.985.166.958.000	10.971.782.943.000		10.971.782.943.000	100,00	10.971.782.943.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	AUDITED 2019	-	-	26.698.287.000.000	-	-	17.349.349.000.000	6.800.000.000.000			4.359.000.000	2.544.579.000.000	9.348.938.000.000		9.348.938.000.000	100,00	9.348.938.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	AUDITED 2019	611.392.119.147	3.139.836.811.697	3.751.228.930.844	310.607.989.526	489.793.933.212	800.401.922.738	3.275.443.770.000				(324.616.761.894)	2.950.827.008.106		2.950.827.008.106	93,33	2.754.006.846.665
	Total		**611.392.119.147**	**3.139.836.811.697**	**117.379.370.780.848**	**310.607.989.526**	**489.793.933.212**	**57.253.614.778.216**	**48.592.043.770.000**	-	-	**607.815.746.436**	**10.925.896.486.196**	**60.125.756.002.632**	-	**60.125.756.002.632**	-	**59.928.935.841.191**
	PMP Badan Usaha Lainnya																	
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	AUDITED 2019	-	-	108.701.725.000.000	-	-	89.762.973.000.000	22.146.276.000.000			21.264.000.000	(3.228.788.000.000)	18.938.752.000.000		18.938.752.000.000	100,00	18.938.752.000.000
	Total		-	-	**108.701.725.000.000**	-	-	**89.762.973.000.000**	**22.146.276.000.000**	-	-	**21.264.000.000**	**(3.228.788.000.000)**	**18.938.752.000.000**	-	**18.938.752.000.000**	-	**18.938.752.000.000**
	GRAND TOTAL		**611.392.119.147**	**3.139.836.811.697**	**226.081.095.780.848**	**310.607.989.526**	**489.793.933.212**	**147.016.587.778.216**	**70.738.319.770.000**	-	-	**629.079.746.436**	**7.697.108.486.196**	**79.064.508.002.632**	-	**79.064.508.002.632**	-	**78.867.687.841.191**

Republik Indonesia

Lampiran 17

Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2019

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2019

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang		
				USD	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.557.288.302.853			
	World Bank Group							
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD		167.203.427,47	2.324.294.845.272			-
3	International Development Association (IDA)	USD		49.670.315,00	690.467.049.720			5.237.901.545
4	International Finance Corporation (IFC)	USD		31.602.000,00	439.299.402.000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	52.793.495.820	USD	1.135.018	15.777.885.218
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	140.267.947,57		2.696.331.457.230			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	28.636.060.000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	ID	125.140,32		2.405.537.311			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		74.959.000,00	1.042.005.059.000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017	EUR	223.450,00		17.786.024.354	EUR	223.450	3.483.277.476
		USD		1.028.901,00				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		19.274.199,53	267.930.647.667			
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	175.152.600.000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		672.100.000,00	9.342.862.100.000			
	Jumlah*		**429.716.537,89**	**1.034.295.663,00**	**22.637.252.581.227**			
	PMN Lainnya							
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.668.120.000.000			
16	International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	55.604.000.000			
	Jumlah		-	**124.000.000,00**	**1.723.724.000.000**			
	Jumlah		**429.716.537,89**	**1.158.295.663,00**	**24.360.976.581.227**			**24.499.064.239**

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,36331
2. Kurs Euro to IDR 15.499,98
3. Kurs USD to IDR Rp 13.901

Republik Indonesia

Lampiran 18

Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (minoritas) Tahun 2019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2019	661.920	520.400	141.520	12.775	1.846	152.449	224	152.225	16.922	135.303	(615)	134.688	135.445	134.830
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2019	370.225	186.832	183.393	14.682	13.071	185.004	-	185.004	30.302	154.702	(39)	154.663	154.702	154.663
3	PT Nindya Karya	Audited 2019	5.783.502	5.382.961	400.541	64.777	-	465.318	86.032	379.286	163.413	215.873	(5.984)	209.889	223.784	217.790
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2019	672.053	684.072	(12.019)	20.300	7.397	884	141.565	(140.681)	-	(140.681)	-	(140.681)	(140.618)	(140.618)
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2019	1.113.916	1.231.176	(117.260)	637.854	70.976	449.618	222.646	226.972	-	226.972	-	226.972	226.972	226.972
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2019	4.755.968	4.127.188	628.780	399.992	116.083	912.689	513.658	399.031	183.857	215.174	(947.134)	(731.960)	263.353	(683.781)
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2019	4.129.248	3.739.125	390.123	74.953	1.588	463.488	354.558	108.930	27.199	81.731	-	81.731	81.730	81.730
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2019	1.273.751	1.157.473	116.278	22.587	28.551	110.314	97.017	13.297	10.001	3.296	-	3.296	5.129	5.129
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2019	2.444.000	2.739.000	(295.000)	279.000	-	(16.000)	677.000	(693.000)	-	(693.000)	(332.000)	(1.025.000)	(694.000)	(1.026.000)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2019	1.253.146	1.853.351	(600.205)	1.493.538	-	893.333	219.144	674.189	732	673.457	-	673.457	673.361	673.361
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2019	1.000.936	1.292.278	(291.342)	120.202	-	(171.140)	196.937	(368.077)	10.141	(378.218)	-	(378.218)	(378.218)	(378.218)
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2019	2.627.938	2.402.305	225.633	232.223	92.644	365.212	220.538	144.674	50.390	94.284	(149.807)	(55.523)	84.724	(65.086)
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2019	4.020.462.047	3.973.493.786	46.968.261	111.130.127	1.210.723	156.887.665	172.315.488	(15.427.823)	66.090.863	(81.518.686)	55.894.335	(25.624.351)	(81.729.882)	(25.624.351)
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2019	1.488.770	1.419.338	69.432	278.024	88.382	259.074	226.120	32.954	16.706	16.248	-	16.248	16.248	16.424
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2019	1.091.657	1.338.331	(246.674)	57.351	137.666	(326.989)	418.447	(745.436)	(374)	(745.062)	(107.863)	(852.925)	(737.534)	(845.397)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2019	1.018.227	1.077.754	(59.527)	24.290	20.583	(55.820)	183.820	(239.640)	-	(239.640)	-	(239.640)	(239.640)	(239.640)
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2019	7.713.324	7.277.894	435.430	96.712	-	532.142	259.955	272.187	23.645	248.542	28.682	277.224	232.549	261.231
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2019	14.868	38.652	(23.784)	531.806	167.310	340.712	-	340.712	86.045	254.667	-	254.667	254.667	254.667
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2019	26.117.533	25.831.298	286.235	4.103.717	41.895	4.348.057	2.760.866	1.587.191	(43.181)	1.630.372	(21.767)	1.608.605	1.568.991	1.549.166
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2019	5.652.319	6.820.352	(1.168.033)	1.409.352	6.702	234.617	36.741	197.876	47.292	150.584	87.464	238.048	150.251	237.715
21	PT Socfindo	Audited 2018	2.071.280	1.312.154	759.126	21.399	2.351	778.174	-	778.174	206.261	571.913	16.337	588.250	571.913	588.250
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017	905.384	839.664	65.720	16.142	-	81.862	-	81.862	12.529	69.333	-	69.333	69.333	69.333
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2018	973.679	583.622	390.057	26.031	129.371	286.717	2.827	283.890	87.217	196.673	3.313	199.986	196.673	199.986
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	-	752	(752)	1.614	-	862	-	862	232	630	-	630	631	631
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2019	21.953.592	16.939.237	5.014.355	568.477	-	5.582.832	127.670	5.455.162	1.414.768	4.040.394	(197.056)	3.843.338	4.056.888	3.859.832
26	PT Timah Tbk	Unaudited 2019	18.975.784	18.920.391	55.393	92.097	3.035	144.455	743.745	(599.290)	20.338	(619.628)	(115.967)	(735.595)	(613.562)	(729.529)
27	PT Aneka Tambang Tbk	TW III / 2019	24.537.136	23.301.838	1.235.298	257.026	194.528	1.297.796	387.158	910.638	349.446	561.192	(46.766)	514.426	561.192	514.426
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Unaudited 2019	54.589.252	47.714.738	6.874.514	2.030.931	2.179.358	6.726.087	2.338.551	4.387.536	1.721.288	2.666.248	88.680	2.754.928	1.993.807	2.082.487
29	PT Istaka Karya (Persero)	Unaudited 2019	304.859	307.710	(2.851)	24.850	-	21.999	8.642	13.357	8.301	5.056	-	5.056	5.056	5.056

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2019	539.082	409.929	949.011	67.967	26.868	94.835	200.000	-	-	(5.774)	660.089	854.315	(139)	854.176	50,00%	427.157.500.000
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2019	555.871	245.313	801.184	156.409	8.945	165.354	200.000	-	-	(106)	435.936	635.830	-	635.830	50,00%	317.915.000.000
3	PT Nindya Karya	Audited 2019	4.830.380	1.245.943	6.076.323	4.023.380	366.306	4.389.686	559.497	-	-	350.149	750.188	1.659.834	26.803	1.686.637	1,00%	59.500.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2019	200.471	2.298.633	2.499.104	1.074.991	1.497.584	2.572.575	160.997	7.766	-	302.819	(545.280)	(73.698)	227	(73.471)	24,00%	38.641.000.000
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2019	744.014	7.180.344	7.924.358	3.046.306	2.101.448	5.147.754	327.606	10.371	-	3.716.409	(1.279.568)	2.774.818	1.786	2.776.604	10,00%	32.761.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2019	2.343.185	15.783.776	18.126.961	2.443.904	8.787.413	11.231.317	2.942.116	45.659	-	3.093.308	786.734	6.867.817	27.827	6.895.644	10,00%	294.212.000.000
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2019	1.639.477	7.801.326	9.440.803	1.267.206	6.153.613	7.420.819	1.311.361	5.902	-	1.108.451	(405.731)	2.019.983	1	2.019.984	10,00%	131.332.000.000
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2019	543.343	3.918.332	4.461.675	1.006.110	1.914.130	2.920.240	653.293	28.014	-	595.337	240.931	1.517.575	23.860	1.541.435	10,00%	65.329.000.000
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2019	1.748.000	12.084.000	13.832.000	5.081.000	7.189.000	12.270.000	1.401.000	9.000	-	4.372.000	(4.223.000)	1.559.000	3.000	1.562.000	10,00%	140.122.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2019	1.610.946	10.569.223	12.180.169	2.058.251	2.882.422	4.940.673	930.302	-	-	5.964.365	342.557	7.237.224	2.272	7.239.496	13,17%	122.528.000.000
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2019	1.168.072	4.016.665	5.184.737	2.127.066	1.445.354	3.572.420	1.599.815	-	-	2.034.744	(2.022.242)	1.612.317	-	1.612.317	10,00%	159.981.000.000
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2019	2.301.908	9.892.316	12.194.224	1.466.035	2.294.076	3.760.111	1.845.596	489	-	5.956.087	561.653	8.363.825	70.288	8.434.113	10,00%	184.560.000.000
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2019	1.423.697	6.723.351	8.147.048	2.287.834	2.083.130	4.370.964	1.168.481	13.901	-	2.598.628	(5.137.223)	(1.356.213)	211.196	(1.145.017)	10,00%	116.848.000.000
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2019	1.139.991	10.617.349	11.757.340	2.788.748	2.337.047	5.125.795	1.272.976	-	-	5.227.938	126.755	6.627.669	3.876	6.631.545	10,00%	127.298.000.000
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2019	381.515	4.384.813	4.766.328	2.996.219	4.185.153	7.181.372	1.029.738	31.544	-	1.291.421	(4.871.753)	(2.519.050)	104.006	(2.415.044)	10,00%	102.974.000.000
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2019	459.941	1.966.107	2.426.048	1.170.230	1.941.505	3.111.735	237.859	1	-	1.324.633	(2.248.180)	(685.687)	-	(685.687)	10,00%	23.500.000.000
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2019	8.495.600	2.169.204	10.664.804	6.556.224	3.072.530	9.628.754	450.000	-	-	255.918	291.632	997.550	38.500	1.036.050	4,97%	22.366.000.000
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2019	420.089	523.274	943.363	191.886	78.042	269.928	100.001	1.302.751	-	1.461	(730.778)	673.435	-	673.435	5,00%	1.000.000
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2019	12.444.795	50.368.205	62.813.000	22.129.440	26.976.367	49.105.807	543.393	1.546.587	-	489.573	10.143.717	12.723.270	983.923	13.707.193	14,29%	77.662.499.900
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2019	86.295.834	9.688.458	95.984.292	84.056.405	3.095.403	87.151.808	1.376.437	2.923.938	-	1.495.956	3.013.799	8.810.130	22.354	8.832.484	11,44%	150.785.787.600
21	PT Socfindo	Audited 2018	322.824	1.469.932	1.792.756	333.125	584.694	917.819	42.250	3.671	-	-	829.016	874.937	-	874.937	10,00%	4.225.000.000
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017	978.516	2.670.815	3.649.330	210.068	462.601	672.670	1.000.500	-	-	-	1.976.161	2.976.661	-	2.976.661	13,00%	132.483.000.000
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2018	1.127.250	520.515	1.647.765	166.329	129.598	295.927	50.888	(22.638)	-	-	1.323.588	1.351.838	-	1.351.838	5,00%	2.478.911.250
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	21.461	304	21.765	78	-	78	8.656	-	-	-	13.031	21.687	-	21.687	20,36%	1.762.087.000
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2019	11.679.884	14.418.168	26.098.052	4.691.251	2.983.975	7.675.226	1.152.066	(119.918)	-	169.078	17.057.049	18.258.275	164.551	18.422.826	0,00%	500
26	PT Timah Tbk	Unaudited 2019	13.866.606	6.496.702	20.363.308	11.621.641	3.135.290	14.756.931	372.388	55	-	(141.084)	5.374.826	5.606.185	192	5.606.377	0,00%	50
27	PT Aneka Tambang Tbk	TW III / 2019	8.254.149	24.400.729	32.654.878	5.679.838	7.027.433	12.707.271	2.403.076	3.934.833	-	2.810.123	10.799.556	19.947.588	19	19.947.607	0,00%	100
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Unaudited 2019	31.364.970	72.340.676	103.705.646	15.113.997	41.953.602	57.067.599	4.867.181	(6.615.251)	-	(828.097)	39.644.846	37.068.679	9.569.368	46.638.047	0,00%	100
29	PT Istaka Karya (Persero)	Unaudited 2019	418.967	206.820	625.787	429.533	-	429.533	50.000	602.898	-	147.662	(604.306)	196.254	-	196.254	7,66%	50.000.000.000
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas	SMT I/2019																**745.072.500.000**
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																	**2.041.350.286.500**
	Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	**2.786.422.786.500**

Republik Indonesia

Lampiran 19

Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Per 31 Desember 2019

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)
AUDITED 2019	4.000.000.000.000	17.733.941.800.000	(23.539.071.000)	102.119.230.955.000	119.829.633.684.000

Republik Indonesia

Lampiran 20

Aset Tetap
Per 31 Desember 2019
& 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)	31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	855.795.947.000	343.728.232.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.143.368.231.643	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.980.428.125.661	1.989.704.672.051
4	005	MAHKAMAH AGUNG	19.810.522.554.459	4.864.312.403.867
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	17.152.277.843.897	3.844.291.889.173
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	563.825.145.662.880	87.070.470.339.603
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	11.780.535.039.124	2.253.066.003.779
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	38.217.108.897.564	11.502.743.450.419
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.450.878.813.257.800	294.345.486.868.825
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	54.456.131.211.590	12.625.444.631.053
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	95.993.397.699.923	19.436.535.504.094
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	76.634.434.244.419	11.608.949.370.893
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	8.694.889.734.067	2.620.380.005.603
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.410.585.700.127	3.276.347.034.160
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	312.551.921.002.102	74.768.518.687.719
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.811.909.997.257	4.040.119.575.914
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	70.914.878.240.094	15.404.565.123.149
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	61.700.844.520.566	17.129.404.796.332
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	7.643.451.530.970	1.622.328.251.528
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	18.532.038.706.705	3.495.475.164.694
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.974.257.123.792	2.365.498.329.641
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.045.992.090.586	2.444.400.900.882
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	944.793.411.541.173	269.138.602.834.438
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	6.202.012.808.068	1.420.230.276.062
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.448.189.807.000	273.198.404.650
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	352.606.484.493.014	76.039.000.565.104
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.282.411.957.000	876.321.187.609
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.626.120.000	294.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.649.972.594.296	1.651.451.539.479
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.162.535.693.980	446.959.267.105
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.052.318.324.207	772.800.959.901
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.484.443.750.305	180.483.709.805
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	9.059.218.112.964	2.040.367.985.540
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.866.606.161.000	326.366.052.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.493.014.424.141	998.225.868.635
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	211.086.192.098.983	41.953.588.425.160
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.559.938.837.794	622.657.329.807
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.378.951.719.000	100.600.000.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.959.546.919.000	333.830.014.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	592.366.444.327	324.379.067.106
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	677.750.355.000	122.404.255.697
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.068.090.785.806	372.869.158.878
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.387.359.220.617	860.125.687.828
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.012.520.186.736	585.704.428.389
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	506.815.456.000	89.075.216.326
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	233.761.358.040	81.705.022.040
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	29.454.769.398.491	6.201.291.154.537
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	13.034.026.829.000	1.782.773.318.225

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)	31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.697.895.152.000	781.190.927.385
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.612.229.053.490	325.015.190.655
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	185.634.271.000	27.226.540.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	112.976.306.000	11.250.883.554
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.037.206.399.100	515.131.306.413
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	802.566.806.600	216.312.132.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.551.874.317.382	440.002.155.618
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.073.366.152.305	1.015.394.877.901
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.690.879.809.666	937.546.345.302
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	618.688.640.000	336.575.243.520
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.736.548.733.375	515.234.741.435
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	201.791.893.509	69.139.276.742
68	100	KOMISI YUDISIAL	272.460.683.000	48.799.520.400
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	279.632.984.000	113.143.589.776
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	237.659.879.100	43.853.876.181
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	369.821.075.000	116.490.960.000
72	107	BADAN SAR NASIONAL	954.743.527.882	314.683.285.364
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.987.200.000	1.987.200.000
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	735.650.903.712	471.736.231.125
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	26.592.174.000	7.315.400.000
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	42.356.379.117.074	21.822.314.130.937
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.261.256.000	38.261.256.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	9.942.054.967	221.628.762
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	12.615.286.988.073	2.585.286.126.373
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	11.358.325.846.639	3.307.355.554.899
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.769.726.523.620	597.525.625.314
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	18.556.963.495	6.737.260.600
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	
JUMLAH PADA K/L			**4.571.429.747.469.160**	**1.019.501.217.507.960**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	26.594.107.000	4.016.775.779
		Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN	(5.701.893.036.000)	(857.211.200.000)
TOTAL			**4.565.754.448.540.160**	**1.018.648.023.083.740**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	175.144.642.083	(139.768.822.185)	35.375.819.898	157.535.478.383	(127.882.666.316)	29.652.812.067
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.658.100.510.792	(1.099.476.810.539)	558.623.700.253	1.320.157.553.414	(929.544.472.379)	390.613.081.035
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.991.163.973.440	(1.696.950.217.916)	294.213.755.524	1.971.544.524.387	(1.630.757.004.133)	340.787.520.254
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.231.892.316.912	(2.539.050.676.958)	692.841.639.954	2.917.147.390.887	(2.301.314.727.130)	615.832.663.757
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	5.398.671.339.531	(2.630.682.436.133)	2.767.988.903.398	3.487.200.803.633	(2.064.770.585.061)	1.422.430.218.572
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.023.211.260.680	(2.432.680.109.813)	1.590.531.150.867	3.622.893.042.849	(2.129.636.610.118)	1.493.256.432.731
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.064.758.107.592	(2.763.830.269.568)	300.927.838.024	2.963.315.687.798	(2.679.559.533.823)	283.756.153.975
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.431.479.656.691	(1.640.859.082.753)	790.620.573.938	2.160.421.214.721	(1.467.545.543.785)	692.875.670.936
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	244.484.487.394.530	(127.567.544.790.539)	116.916.942.603.991	227.303.639.687.598	(108.488.012.725.453)	118.815.626.962.145
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.398.289.284.727	(5.208.649.428.511)	2.189.639.856.216	6.680.447.076.850	(4.407.498.695.412)	2.272.948.381.438
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.299.282.360.083	(11.404.194.747.156)	2.895.087.612.927	14.107.977.235.913	(10.861.430.455.942)	3.246.546.779.971
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.548.535.528.157	(5.175.230.663.237)	1.373.304.864.920	6.225.890.240.250	(4.700.564.104.242)	1.525.326.136.008
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.276.684.437.117	(2.223.119.262.684)	1.053.565.174.433	2.838.718.583.443	(1.953.087.290.290)	885.631.293.153
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.304.868.050.573	(4.291.886.898.696)	1.012.981.151.877	5.134.852.582.106	(3.966.609.219.808)	1.168.243.362.298
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	51.191.308.641.024	(30.020.487.586.567)	21.170.821.054.457	49.051.998.331.321	(25.733.040.571.422)	23.318.957.759.899
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.696.121.667.905	(2.690.762.980.117)	1.005.358.687.788	3.417.235.655.314	(2.446.822.749.458)	970.412.905.856
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	22.482.127.439.185	(16.525.172.470.439)	5.956.954.968.746	19.931.915.819.977	(14.702.932.779.488)	5.228.983.040.489
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	9.457.063.852.416	(7.349.431.382.176)	2.107.632.470.240	8.666.975.027.179	(6.587.245.554.537)	2.079.729.472.642
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.600.242.724.246	(1.766.789.368.841)	833.453.355.405	2.493.107.556.237	(1.515.160.349.103)	977.947.207.134
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.904.924.241.165	(1.552.647.621.419)	352.276.619.746	1.788.554.554.510	(1.402.111.593.278)	386.442.961.232
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.476.102.967.487	(2.533.887.876.342)	942.215.091.145	3.373.676.281.912	(2.444.112.122.135)	929.564.159.777
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.761.526.276.152	(4.095.790.164.800)	1.665.736.111.352	5.631.552.945.324	(3.728.287.515.633)	1.903.265.429.691
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	13.743.729.056.080	(9.014.768.306.551)	4.728.960.749.529	13.109.431.069.667	(7.885.247.316.585)	5.224.183.753.082
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	126.310.524.363	(102.255.359.701)	24.055.164.662	125.456.875.877	(94.025.592.776)	31.431.283.101
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	73.866.781.172	(57.838.802.839)	16.027.978.333	64.652.995.149	(49.172.886.473)	15.480.108.676
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	76.925.679.564	(62.189.092.633)	14.736.586.931	75.422.307.424	(57.514.810.127)	17.907.497.297
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	636.501.767.984	(383.561.951.290)	252.939.816.694	471.713.974.169	(333.857.259.112)	137.856.715.057
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	125.125.261.746	(100.730.167.953)	24.395.093.793	122.026.524.215	(92.638.266.811)	29.388.257.404
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	25.526.249.736.793	(19.085.997.095.625)	6.440.252.641.168	23.585.360.888.712	(17.122.789.183.343)	6.462.571.705.369
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	408.983.616.837	(365.975.320.031)	43.008.296.806	406.599.540.127	(347.934.033.813)	58.665.506.314
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95.673.691.804	(79.552.158.307)	16.121.533.497	95.571.541.415	(69.673.879.550)	25.897.661.865
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	109.999.882.248	(78.398.689.409)	31.601.192.839	103.103.352.431	(70.059.645.563)	33.043.706.868
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	11.288.534.107.107	(7.167.749.760.905)	4.120.784.346.202	10.505.136.328.482	(5.393.001.721.005)	5.112.134.607.477
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.673.246.745.248	(6.082.680.059.497)	1.590.566.685.751	6.793.202.944.519	(5.422.295.375.071)	1.370.907.569.448
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	158.352.426.940	(123.825.120.127)	34.527.306.813	158.821.733.247	(98.335.210.140)	60.486.523.107
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.115.313.606.795	(1.607.683.274.699)	507.630.332.096	1.891.531.310.334	(1.497.332.102.001)	394.199.208.333

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	211.862.975.921	(18.868.682.085)	192.994.293.836	220.385.697.914	(53.307.270.932)	167.078.426.982
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	877.245.448.738	(78.229.247.507)	799.016.201.231	907.534.052.443	(188.580.554.347)	718.953.498.096
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.508.643.269.633	(167.143.122.339)	2.341.500.147.294	2.332.971.508.643	(316.182.639.145)	2.016.788.869.498
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8.238.230.128.101	(841.889.652.971)	7.396.340.475.130	7.992.652.726.378	(1.572.348.334.794)	6.420.304.391.584
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	5.194.376.730.278	(451.794.085.025)	4.742.582.645.253	6.007.786.627.706	(1.251.601.872.108)	4.756.184.755.598
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	6.634.905.572.103	(440.835.410.048)	6.194.070.162.055	5.790.344.144.015	(1.748.617.456.319)	4.041.726.687.696
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.756.244.855.806	(206.729.829.210)	2.549.515.026.596	2.522.795.952.068	(652.840.708.857)	1.869.955.243.211
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.231.708.942.471	(804.216.035.834)	8.427.492.906.637	6.451.334.088.938	(3.957.710.066.559)	2.493.624.022.379
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	71.986.135.283.561	(12.158.195.476.298)	59.827.939.807.263	44.899.893.872.846	(14.083.695.076.689)	30.816.198.796.157
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.958.064.335.324	(1.010.882.340.912)	10.947.181.994.412	10.457.963.798.623	(2.323.816.547.094)	8.134.147.251.529
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	16.435.861.201.445	(1.389.990.400.427)	15.045.870.801.018	14.544.545.225.457	(3.755.337.542.619)	10.789.207.682.838
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	5.968.056.274.799	(524.822.572.147)	5.443.233.702.652	4.734.934.884.794	(1.089.264.819.476)	3.645.670.065.318
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.150.853.666.779	(219.681.354.373)	1.931.172.312.406	1.675.432.517.112	(390.886.203.044)	1.284.546.314.068
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.559.745.423.102	(214.466.197.396)	2.345.279.225.706	2.166.250.483.575	(598.483.944.019)	1.567.766.539.556
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	26.101.194.186.746	(2.282.633.152.230)	23.818.561.034.516	25.586.841.177.815	(3.433.685.733.626)	22.153.155.444.189
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.679.857.570.435	(443.756.973.306)	6.236.100.597.129	5.004.481.460.948	(932.178.235.827)	4.072.303.225.121
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	16.309.053.886.131	(1.649.968.144.835)	14.659.085.741.296	13.574.335.256.508	(2.903.594.715.702)	10.670.740.540.806
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	32.880.351.409.690	(2.253.910.404.087)	30.626.441.005.603	26.802.836.201.742	(4.646.032.458.595)	22.156.803.743.147
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.919.956.354.498	(176.031.821.927)	1.743.924.532.571	1.442.717.606.755	(277.117.457.764)	1.165.600.148.991
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.798.628.848.267	(182.053.118.595)	1.616.575.729.672	1.513.338.943.015	(361.072.631.791)	1.152.266.311.224
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.293.584.141.911	(255.913.152.553)	3.037.670.989.358	2.397.477.874.437	(455.828.665.741)	1.941.649.208.696
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.064.491.114.759	(368.205.780.239)	4.696.285.334.520	4.103.635.605.049	(603.034.197.284)	3.500.601.407.765
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	23.888.215.003.244	(1.328.727.943.854)	22.559.487.059.390	17.505.734.217.644	(1.569.561.723.730)	15.936.172.493.914
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	10.474.038.777	(537.689.242)	9.936.349.535	8.134.999.202	(920.333.975)	7.214.665.227
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	29.541.154.075	(1.779.587.595)	27.761.566.480	22.785.169.780	(4.100.080.218)	18.685.089.562
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	154.040.207.650	(8.360.129.765)	145.680.077.885	162.802.785.121	(17.750.071.892)	145.052.713.229
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.624.135.755.412	(92.193.671.434)	1.531.942.083.978	1.167.697.980.889	(222.582.630.238)	945.115.350.651
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	396.488.627.387	(18.434.322.660)	378.054.304.727	245.548.812.957	(41.869.842.418)	203.678.970.539
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	35.027.351.350.963	(2.651.183.986.378)	32.376.167.364.585	29.801.781.695.588	(4.928.782.106.647)	24.872.999.588.941
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	837.639.845.313	(75.646.709.150)	761.993.136.163	797.166.836.674	(170.319.817.769)	626.847.018.905
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	173.068.613.000	(9.220.192.205)	163.848.420.795	104.426.273.203	(9.288.716.796)	95.137.556.407
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	72.771.604.892	(5.049.121.269)	67.722.483.623	37.572.097.436	(5.808.012.690)	31.764.084.746
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.016.285.850.700	(90.908.180.505)	925.377.670.195	730.064.092.473	(110.438.044.612)	619.626.047.861
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.219.355.500.423	(64.561.908.060)	1.154.793.592.363	1.016.402.983.406	(72.388.014.872)	944.014.968.534
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.900.603.566.704	(152.084.221.131)	1.748.519.345.573	1.930.243.613.988	(364.456.539.093)	1.565.787.074.895
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	157.938.995.269	(18.822.558.857)	139.116.436.412	144.131.361.953	(34.504.274.610)	109.627.087.343
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.720.651.469.735	(206.192.205.538)	2.514.459.264.197	2.083.541.389.078	(337.182.419.604)	1.746.358.969.474
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	626.331.814.823	(28.535.167.799)	597.796.647.024	556.219.926.984	(61.462.435.333)	494.757.491.651
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	904.605.812.309	(94.701.801.577)	809.904.010.732	739.117.374.472	(209.055.295.451)	530.062.079.021
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	30.982.918.808.753	(3.100.557.941.250)	27.882.360.867.503	21.137.675.588.196	(4.558.876.072.562)	16.578.799.515.634
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	723.899.395.952	(62.711.739.251)	661.187.656.701	669.133.787.588	(138.352.024.302)	530.781.763.286

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	301.883.925.323	(16.150.150.905)	285.733.774.418	274.667.240.692	(24.927.059.575)	249.740.181.117
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	264.256.245.644	(28.396.929.423)	235.859.316.221	245.317.298.605	(58.887.102.839)	186.430.195.766
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	743.326.833.659	(41.678.916.556)	701.647.917.103	1.020.982.337.974	(154.539.268.910)	866.443.069.064
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	579.836.981.600	(36.904.129.929)	542.932.851.671	329.194.678.847	(39.039.732.598)	290.154.946.249
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	592.058.400.638	(65.238.706.743)	526.819.693.895	367.230.483.740	(111.690.663.556)	255.539.820.184
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.663.103.000	(734.575.445)	12.928.527.555	11.440.763.193	(1.144.076.319)	10.296.686.874
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.227.870.898.793	(105.095.786.833)	1.122.775.111.960	1.060.044.349.465	(224.726.111.508)	835.318.237.957
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	640.132.644.926	(39.227.528.459)	600.905.116.467	503.775.867.237	(74.749.011.115)	429.026.856.122
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	247.832.944.456	(14.085.867.338)	233.747.077.118	249.040.949.062	(43.230.167.739)	205.810.781.323
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	224.201.982.974	(13.977.770.616)	210.224.212.358	147.070.688.731	(19.852.382.588)	127.218.306.143
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.402.966.092.176	(86.461.467.491)	1.316.504.624.685	1.215.315.192.230	(197.489.134.192)	1.017.826.058.038
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.108.708.019.384	(177.238.170.890)	931.469.848.494	607.102.240.600	(258.474.880.040)	348.627.360.560
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.043.739.095.308	(139.842.550.634)	903.896.544.674	882.480.723.826	(181.349.873.405)	701.130.850.421
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	368.971.545.823	(35.772.184.531)	333.199.361.292	317.054.317.655	(83.008.126.628)	234.046.191.027
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	67.603.738.668	(6.598.292.484)	61.005.446.184	113.637.697.525	(27.715.786.908)	85.921.910.617
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	867.997.875	(24.329.275)	843.668.600	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.660.420.614	(938.546.699)	13.721.873.915	19.950.542.915	(4.812.747.250)	15.137.795.665
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	663.471.874.888	(45.704.851.479)	617.767.023.409	466.235.260.661	(104.888.123.762)	361.347.136.899
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	364.584.089.636	(30.986.612.256)	333.597.477.380	232.559.835.154	(57.350.517.341)	175.209.317.813
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	839.776.988.996	(64.910.006.719)	774.866.982.277	687.835.852.268	(124.269.328.618)	563.566.523.650
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.078.044.520.683	(93.594.994.753)	984.449.525.930	913.574.996.570	(201.982.264.181)	711.592.732.389
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	918.066.690.182	(104.191.053.761)	813.875.636.421	794.985.145.735	(143.970.715.514)	651.014.430.221
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	330.872.511.049	(20.853.563.909)	310.018.947.140	254.853.529.859	(49.255.433.817)	205.598.096.042
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	411.539.424.542	(36.385.275.648)	375.154.148.894	407.107.703.622	(44.946.939.118)	362.160.764.504
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	42.316.260.700	(2.250.628.280)	40.065.632.420	65.863.779.175	(5.013.541.288)	60.850.237.887
68	100	KOMISI YUDISIAL	95.036.057.478	(5.627.886.659)	89.408.170.819	72.314.003.716	(13.493.236.208)	58.820.767.508
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	406.800.511.244	(20.398.601.546)	386.401.909.698	576.047.389.075	(46.697.340.620)	529.350.048.455
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	83.267.294.308	(5.328.948.563)	77.938.345.745	74.834.040.087	(11.906.893.096)	62.927.146.991
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	217.763.289.441	(11.150.301.598)	206.612.987.843	160.657.530.329	(11.037.351.555)	149.620.178.774
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.086.380.524.878	(62.215.453.378)	1.024.165.071.500	946.399.056.369	(103.131.248.788)	843.267.807.581
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	173.700.000	(50.773.847)	122.926.153	173.700.000	(45.429.231)	128.270.769
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	119.284.397.671	(3.634.011.430)	115.650.386.241	36.419.569.236	(3.345.626.821)	33.073.942.415
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.357.048.000	(27.140.960)	1.329.907.040	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	648.121.641.004	(14.102.355.957)	634.019.285.047	30.273.586.663	(2.894.590.367)	27.378.996.296
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	3.776.851.791.730	(730.756.904.137)	3.046.094.887.593	1.233.215.663.807	(188.568.337.618)	1.044.647.326.189
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	220.393.658.418	(8.318.692.281)	212.074.966.137	205.269.758.084	(14.835.307.177)	190.434.450.907
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	28.561.033.507	(1.607.641.620)	26.953.391.887	1.940.294.000	(77.611.760)	1.862.682.240
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	792.103.284.438	(118.797.001.943)	673.306.282.495	463.272.406.105	(159.301.576.147)	303.970.829.958
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.097.034.809.193	(171.533.191.942)	925.501.617.251	479.810.814.660	(194.357.970.143)	285.452.844.517
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	119.963.194.270	(7.088.606.891)	112.874.587.379	1.522.249.681.813	(120.080.591.206)	1.402.169.090.607

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	30.903.574.928	(1.392.774.005)	29.510.800.923	47.107.069.885	(6.237.784.772)	40.869.285.113
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-				-
JUMLAH PADA K/L			**365.440.618.077.924**	**(36.519.699.209.677)**	**328.920.918.868.247**	**287.027.976.732.583**	**(61.566.239.473.462)**	**225.461.737.259.121**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	2.410.401.454	(33.904.355)	2.376.497.099	490.017.000	(4.900.170)	485.116.830
TOTAL			**365.443.028.479.378**	**(36.519.733.114.032)**	**328.923.295.365.346**	**287.028.466.749.583**	**(61.566.244.373.632)**	**225.462.222.376.051**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	433.773.685.330	(236.258.194.736)	197.515.490.594	332.663.047.278	(219.799.543.037)	112.863.504.241
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.920.546.112.445	(2.079.068.939.052)	841.477.173.393	2.618.852.315.583	(1.819.887.630.853)	798.964.684.730
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	654.719.668.603	(333.143.799.859)	321.575.868.744	558.958.560.402	(249.337.171.171)	309.621.389.231
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.988.219.795.411	(1.508.459.452.959)	479.760.342.452	2.146.630.406.292	(1.434.297.408.422)	712.332.997.870
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	124.343.236.274.961	(71.530.000.351.896)	52.813.235.923.065	110.053.992.531.197	(54.943.646.544.149)	55.110.345.987.048
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.646.113.790.733	(1.674.074.319.017)	972.039.471.716	2.434.616.953.555	(1.447.632.923.296)	986.984.030.259
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	357.718.182.514	(292.114.819.449)	65.603.363.065	350.702.533.884	(257.273.579.791)	93.428.954.093
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	264.795.085.610	(220.420.635.531)	44.374.450.079	232.085.022.345	(208.364.527.467)	23.720.494.878
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.102.945.947.691	(1.367.542.102.556)	735.403.845.135	2.026.684.912.696	(1.107.894.183.748)	918.790.728.948
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	367.861.952.630	(264.548.073.679)	103.313.878.951	344.347.161.374	(229.816.758.575)	114.530.402.799
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	469.492.592.390	(384.270.395.574)	85.222.196.816	454.276.912.620	(358.991.953.504)	95.284.959.116
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	24.660.595.661	(21.830.343.217)	2.830.252.444	27.794.544.161	(24.854.145.591)	2.940.398.570
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	5.126.879.453.062	(3.565.055.208.347)	1.561.824.244.715	4.158.147.493.545	(3.135.554.878.698)	1.022.592.614.847
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.492.197.617.709	(872.000.067.350)	620.197.550.359	1.304.109.267.235	(727.024.679.172)	577.084.588.063
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	262.741.301.366	(235.483.388.941)	27.257.912.425	255.815.979.563	(222.332.659.936)	33.483.319.627
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	146.478.871.735	(101.997.535.400)	44.481.336.335	118.793.778.109	(87.175.449.795)	31.618.328.314
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.760.736.824.605	(1.085.070.327.481)	675.666.497.124	1.723.437.864.534	(1.127.698.823.009)	595.739.041.525
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.234.002.287.911	(695.310.225.668)	538.692.062.243	1.013.923.992.497	(595.864.147.550)	418.059.844.947
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.394.773.255.000	(2.079.022.628.748)	1.315.750.626.252	2.994.893.473.642	(1.876.960.845.823)	1.117.932.627.819
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.795.425.017.339	(877.956.697.722)	917.468.319.617	1.368.808.513.310	(755.640.242.292)	613.168.271.018
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.093.797.501.925	(850.297.929.114)	243.499.572.811	1.034.767.353.697	(776.592.235.901)	258.175.117.796
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	227.150.577.482	(198.275.718.536)	28.874.858.946	41.509.541.786	(29.926.011.659)	11.583.530.127
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	151.857.221.185	(94.546.315.879)	57.310.905.306	120.042.125.093	(78.128.930.239)	41.913.194.854
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	185.566.904.080	(158.502.097.020)	27.064.807.060	176.039.169.071	(149.789.427.780)	26.249.741.291
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	221.057.763.568	(182.723.430.638)	38.334.332.930	196.135.354.724	(170.519.136.473)	25.616.218.251
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	557.396.934.784	(451.523.348.089)	105.873.586.695	539.281.544.640	(428.443.721.524)	110.837.823.116
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	425.017.008.495	(329.599.842.479)	95.417.166.016	381.726.544.930	(300.753.302.051)	80.973.242.879
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	844.845.772.199	(667.149.221.233)	177.696.550.966	771.053.591.013	(645.245.133.726)	125.808.457.287
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	598.627.791.420	(479.995.258.903)	118.632.532.517	682.617.192.748	(432.200.825.066)	250.416.367.682
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	619.926.156.543	(435.242.316.098)	184.683.840.445	605.972.934.481	(363.363.123.793)	242.609.810.688
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	140.247.104.900	(123.421.467.292)	16.825.637.608	137.187.762.130	(117.557.831.415)	19.629.930.715
68	100	KOMISI YUDISIAL	50.809.915.580	(45.497.519.146)	5.312.396.434	49.765.110.623	(43.570.068.789)	6.195.041.834
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.288.161.095.504	(1.124.216.549.809)	163.944.545.695	1.301.094.714.025	(1.006.930.866.457)	294.163.847.568
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	168.043.227.113	(145.675.590.473)	22.367.636.640	167.841.381.133	(138.085.844.574)	29.755.536.559
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	267.245.049.940	(195.913.778.048)	71.331.271.892	208.050.847.316	(129.336.280.053)	78.714.567.263
72	107	BADAN SAR NASIONAL	9.594.218.826.241	(5.548.286.687.463)	4.045.932.138.778	8.601.402.036.170	(4.661.260.231.535)	3.940.141.804.635
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	28.793.016.373	(21.688.809.712)	7.104.206.661	28.161.334.109	(20.260.272.594)	7.901.061.515

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	49.158.435.046	(22.808.707.827)	26.349.727.219	33.262.317.682	(20.967.135.230)	12.295.182.452
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	42.673.256.004	(33.911.399.058)	8.761.856.946	41.357.097.591	(29.564.103.963)	11.792.993.628
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	257.657.876.741	(85.189.696.935)	172.468.179.806	79.414.853.670	(56.123.409.898)	23.291.443.772
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.344.159.267.549	(964.437.508.753)	379.721.758.796	1.221.776.217.713	(850.616.980.842)	371.159.236.871
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	345.529.969.439	(233.545.280.149)	111.984.689.290	317.333.696.415	(168.724.029.178)	148.609.667.237
79	114	SEKRETARIAT KABINET	64.892.159.254	(45.993.304.559)	18.898.854.695	55.019.747.053	(43.100.096.667)	11.919.650.386
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	457.564.827.607	(201.168.448.544)	256.396.379.063	354.870.590.962	(135.443.539.890)	219.427.051.072
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.378.777.595.373	(1.160.905.509.366)	217.872.086.007	1.358.515.800.522	(1.129.616.551.398)	228.899.249.124
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.763.322.049.122	(1.627.298.828.607)	1.136.023.220.515	2.532.465.596.166	(1.367.020.241.310)	1.165.445.354.856
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	58.652.237.458	(44.774.852.436)	13.877.385.022	57.636.862.010	(40.341.576.809)	17.295.285.201
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2.022.269.725.417	(824.117.193.026)	1.198.152.532.391	1.347.247.788.067	(656.550.790.187)	690.696.997.880
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	111.353.395.238	(63.886.488.023)	47.466.907.215	100.422.974.762	(43.780.967.605)	56.642.007.157
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	31.551.646.060	(18.915.958.553)	12.635.687.507	28.091.846.029	(12.445.615.436)	15.646.230.593
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	32.378.088.100	(2.736.987.472)	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**643.224.820.265.615**	**(387.467.972.377.378)**	**255.727.206.787.609**	**589.844.387.849.927**	**(329.678.110.529.237)**	**260.166.277.320.690**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	459.546.351.995	(391.217.254.584)	68.329.097.411	442.306.166.552	(344.680.350.375)	97.625.816.177
TOTAL			**643.684.366.617.610**	**(387.859.189.631.962)**	**255.795.535.885.020**	**590.286.694.016.479**	**(330.022.790.879.612)**	**260.263.903.136.867**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(3.905.724.336)	9.740.553.364	13.646.277.700	(3.553.308.580)	10.092.969.120
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	93.206.026.002	(35.057.521.497)	58.148.504.505	90.637.956.944	(40.142.772.764)	50.495.184.180
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	390.041.392.700	(222.238.000.000)	167.803.392.700	352.549.239.113	(216.390.289.863)	136.158.949.250
4	005	MAHKAMAH AGUNG	234.168.244.636	(85.731.398.417)	148.436.846.219	249.518.888.772	(96.517.729.176)	153.001.159.596
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	58.079.452.455	(28.721.288.321)	29.358.164.134	66.084.044.018	(39.860.667.266)	26.223.376.752
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	844.101.432.447	(226.043.000.000)	618.058.432.447	814.259.751.249	(514.733.606.903)	299.526.144.346
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	291.580.470.407	(88.524.573.088)	203.055.897.319	284.698.704.165	(122.075.841.748)	162.622.862.417
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	24.792.326.158	(12.316.101.705)	12.476.224.453	45.366.823.820	(39.488.880.748)	5.877.943.072
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	13.278.074.914.779	(4.239.050.000.000)	9.039.024.914.779	11.739.190.777.222	(7.201.955.039.741)	4.537.235.737.481
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	99.520.892.828	(48.137.670.513)	51.383.222.315	74.628.773.346	(48.688.864.957)	25.939.908.389
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	494.748.320.295	(122.657.000.000)	372.091.320.295	492.466.667.314	(191.431.511.743)	301.035.155.571
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	636.398.426.494	(176.927.000.000)	459.471.426.494	608.350.078.280	(267.419.208.831)	340.930.869.449
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	79.422.928.203	(45.526.487.033)	33.896.441.170	39.083.159.489	(14.838.695.711)	24.244.463.778
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.600.863.024.279	(847.324.000.000)	4.753.539.024.279	1.625.304.817.685	(361.226.107.241)	1.264.078.710.444
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134.734.662.130.363	(43.825.400.000.000)	90.909.262.130.363	109.896.131.855.771	(51.100.510.033.793)	58.795.621.821.978
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	268.803.858.914	(102.990.000.000)	165.813.858.914	253.532.131.731	(112.982.103.721)	140.550.028.010
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	599.526.448.925	(227.725.000.000)	371.801.448.925	659.140.096.700	(322.164.666.134)	336.975.430.566
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	512.371.379.458	(151.890.000.000)	360.481.379.458	852.690.815.796	(223.662.940.060)	629.027.875.736
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	73.810.949.272	(42.537.737.414)	31.273.211.858	87.131.238.977	(62.661.926.117)	24.469.312.860
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	102.663.682.834	(37.267.884.326)	65.395.798.508	116.099.265.531	(54.928.812.462)	61.170.453.069
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	433.943.153.388	(136.685.000.000)	297.258.153.388	366.068.778.168	(161.409.243.755)	204.659.534.413
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.670.002.974.743	(983.172.000.000)	2.686.830.974.743	2.867.557.664.078	(1.329.097.279.387)	1.538.460.384.691
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	673.689.964.604.995	(177.777.000.000.000)	495.912.964.604.995	448.629.109.542.751	(276.172.334.850.102)	172.456.774.692.649
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANA	2.548.154.233	(609.021.773)	1.939.132.460	2.475.255.400	(542.701.287)	1.932.554.113
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	144.386.000	(36.780.975)	107.605.025	144.386.000	(33.171.325)	111.214.675
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	42.185.538.195	(17.320.003.806)	24.865.534.389	56.927.687.773	(29.161.163.550)	27.766.524.223
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(1.076.136.491)	2.124.919.929	3.201.056.420	(987.919.863)	2.213.136.557
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.360.957.011.452	(503.755.000.000)	857.202.011.452	1.275.363.488.177	(628.405.530.355)	646.957.957.822
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	38.211.323.571	(13.654.394.666)	24.556.928.905	48.254.855.445	(22.103.633.324)	26.151.222.121
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAI	5.152.456.725	(5.148.194.225)	4.262.500	5.152.456.725	(4.633.723.553)	518.733.172
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(648.589.182)	746.627.368	1.395.216.550	(603.858.894)	791.357.656
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	136.101.935.773	(50.304.991.747)	85.796.944.026	142.624.465.295	(60.540.546.196)	82.083.919.099
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.418.725.981	(12.570.188.377)	24.848.537.604	37.449.601.826	(12.861.647.553)	24.587.954.273
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-	-	-
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.020.002.566	(3.121.445.789)	2.898.556.777	6.507.585.170	(3.153.379.513)	3.354.205.657
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	23.767.433.670	(9.242.558.657)	14.524.875.013	22.816.996.787	(8.898.074.532)	13.918.922.255
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(991.775.508)	53.732.593.434	54.724.368.942	(957.853.858)	53.766.515.084
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.051.832.982	(9.662.478.863)	19.389.354.119	31.262.337.137	(12.101.181.807)	19.161.155.330
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	893.600.716.423	(376.521.000.000)	517.079.716.423	847.085.525.229	(459.488.158.831)	387.597.366.398
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	28.190.634.667	(6.496.978.035)	21.693.656.632	28.520.550.327	(7.227.367.300)	21.293.183.027
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	10.950.590.247	(1.951.095.501)	8.999.494.746	11.118.997.502	(2.059.426.170)	9.059.571.332

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	9.022.115.183	(3.727.809.678)	5.294.305.505	4.863.164.183	(1.607.288.915)	3.255.875.268
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	55.581.626.760	(15.518.092.301)	40.063.534.459	45.387.927.803	(15.750.916.292)	29.637.011.511
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	836.311.807.753	(225.366.000.000)	610.945.807.753	732.005.217.423	(190.165.972.058)	541.839.245.365
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	28.676.374.492	(13.827.988.794)	14.848.385.698	27.500.273.480	(14.123.553.364)	13.376.720.116
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	202.581.021.061	(70.454.651.892)	132.126.369.169	229.990.006.233	(93.183.026.150)	136.806.980.083
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.517.642.710	(502.267.526)	1.015.375.184	1.284.045.495	(462.665.517)	821.379.978
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.418.669.050	(23.350.522.023)	22.068.147.027	45.054.462.043	(23.280.974.631)	21.773.487.412
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	235.602.000	(53.999.790)	181.602.210	628.286.198	(357.002.027)	271.284.171
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	275.087.358.726	(90.866.578.878)	184.220.779.848	203.024.166.928	(90.114.751.486)	112.909.415.442
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	413.078.126.893	(98.713.669.993)	314.364.456.900	121.863.800.285	(41.252.019.440)	80.611.780.845
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	122.430.873.378	(32.382.967.687)	90.047.905.691	123.426.801.131	(33.644.640.593)	89.782.160.538
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	58.610.857.849	(16.064.262.934)	42.546.594.915	42.420.442.869	(26.651.419.398)	15.769.023.471
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.216.788.655	(2.376.487.779)	6.840.300.876	9.420.314.030	(2.880.752.972)	6.539.561.058
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	500.500.000	(131.490.046)	369.009.954	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.356.628.189	(1.346.997.998)	1.009.630.191	2.272.411.872	(1.030.662.162)	1.241.749.710
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	10.903.259.475	(4.376.769.805)	6.526.489.670	9.201.428.880	(3.660.184.058)	5.541.244.822
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	62.881.974.526	(25.494.023.715)	37.387.950.811	11.741.372.797	(6.158.324.313)	5.583.048.484
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	21.187.821.770	(12.207.229.140)	8.980.592.630	23.239.393.756	(14.151.529.407)	9.087.864.349
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.351.803.443	(7.017.429.349)	10.334.374.094	15.185.311.538	(8.812.507.418)	6.372.804.120
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26.399.268.021	(21.200.113.250)	5.199.154.771	25.690.278.749	(22.060.204.221)	3.630.074.528
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.234.395.736	(2.778.787.831)	3.455.607.905	11.881.430.936	(8.990.874.337)	2.890.556.599
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129.488.001.499	(40.204.175.436)	89.283.826.063	126.156.177.603	(34.948.712.402)	91.207.465.201
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.316.491.000	(123.217.605)	2.193.273.395	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.588.869.628	(3.464.989.986)	123.879.642	3.588.869.628	(3.457.085.931)	131.783.697
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.190.429.000	(166.660.060)	1.023.768.940	1.190.429.000	(119.042.900)	1.071.386.100
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	7.469.703.800	(3.747.769.425)	3.721.934.375	12.077.735.207	(9.823.672.353)	2.254.062.854
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	50.177.807.433	(9.353.954.025)	40.823.853.408	57.593.114.435	(15.385.843.125)	42.207.271.310
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	134.063.722.892	(18.399.606.559)	115.664.116.333	105.238.959.033	(20.686.235.155)	84.552.723.878
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	179.303.478.217	(20.290.592.650)	159.012.885.567	36.015.310.318	(24.129.367.370)	11.885.942.948
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	8.332.905.283.962	(2.585.700.000.000)	5.747.205.283.962	7.427.274.269.254	(3.962.176.977.500)	3.465.097.291.754
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	77.270.141.359	(6.891.845.848)	70.378.295.511	58.854.528.469	(19.411.879.312)	39.442.649.157
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.115.711.700	(602.883.757)	512.827.943	1.115.711.700	(553.413.763)	562.297.937
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	22.740.493.037	(10.859.839.629)	11.880.653.408	20.006.091.035	(10.974.725.569)	9.031.365.466
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	45.879.655.104	(23.338.063.531)	22.541.591.573	26.715.212.180	(12.077.175.979)	14.638.036.201
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.446.365.989.648	(161.709.000.000)	1.284.656.989.648	617.385.904.920	(278.289.223.243)	339.096.681.677
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	13.432.024.000	(3.966.207.844)	9.465.816.156	35.895.980.460	(6.833.181.469)	29.062.798.991
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-				
JUMLAH PADA K/L			**851.550.907.014.621**	**(234.036.514.967.009)**	**617.514.392.047.612**	**593.013.461.009.196**	**(344.949.039.523.544)**	**248.064.421.485.652**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	612.562.339.397	(78.267.167.400)	534.295.171.997	227.735.842.632	(60.842.255.085)	166.893.587.547
TOTAL			**852.163.469.354.018**	**(234.114.782.134.409)**	**618.048.687.219.609**	**593.241.196.851.828**	**(345.009.881.778.629)**	**248.231.315.073.199**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	18.572.540.654	-	18.572.540.654	73.440.383.488	-	73.440.383.488
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	20.469.974.368	-	20.469.974.368	19.832.817.868	-	19.832.817.868
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	17.891.717.899	(599.270.781)	17.292.447.118	24.329.110.328	(482.415.781)	23.846.694.547
4	005	MAHKAMAH AGUNG	83.643.272.035	(1.009.494.413)	82.633.777.622	73.890.244.537	(525.440.920)	73.364.803.617
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.653.849.242	(518.100.073)	12.135.749.169	12.425.940.639	(497.222.054)	11.928.718.585
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.176.088.889.584	(4.658.134.973)	3.171.430.754.611	3.214.731.558.617	(4.503.555.713)	3.210.228.002.904
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	182.589.491.050	(137.938.093.876)	44.651.397.174	186.880.348.286	(137.811.871.932)	49.068.476.354
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.515.966.160	(6.404.732.124)	91.111.234.036	97.258.327.925	(5.861.398.720)	91.396.929.205
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.266.450.324.374	(1.183.930.828.333)	4.082.519.496.041	5.624.453.663.962	(1.365.586.686.650)	4.258.866.977.312
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	29.342.783.620	(5.467.887.245)	23.874.896.375	68.218.739.768	(6.043.713.717)	62.175.026.051
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	62.353.519.449	(996.180.731)	61.357.338.718	51.089.377.176	(585.696.709)	50.503.680.467
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	72.003.399.911	(1.792.072.767)	70.211.327.144	72.295.320.166	(1.468.982.573)	70.826.337.593
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	35.304.338.520	(1.022.649.100)	34.281.689.420	28.003.391.321	(1.022.149.100)	26.981.242.221
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	396.588.988.563	(1.743.854.011)	394.845.134.552	430.305.894.454	(1.598.722.991)	428.707.171.463
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.795.441.665.354	(94.161.247.078)	2.701.280.418.276	3.303.454.098.620	(80.887.399.119)	3.222.566.699.501
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	407.805.021.259	(5.023.630.737)	402.781.390.522	412.300.389.335	(4.722.701.103)	407.577.688.232
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	179.903.386.095	(3.470.398.347)	176.432.987.748	180.330.322.376	(3.278.310.046)	177.052.012.330
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.419.064.014.733	(75.360.145.420)	1.343.703.869.313	1.320.276.033.117	(71.400.253.882)	1.248.875.779.235
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	10.541.848.852	(533.158.076)	10.008.690.776	16.880.404.515	(1.190.018.197)	15.690.386.318
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.990.010.062	(3.466.709.781)	18.523.300.281	14.798.697.676	(3.430.878.695)	11.367.818.981
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	72.979.895.525	(8.837.934.584)	64.141.960.941	105.333.767.646	(5.249.320.685)	100.084.446.961
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.814.510.994	(6.417.084.754)	77.397.426.240	116.166.184.657	(6.111.680.008)	110.054.504.649
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	31.663.073.245.824	(5.195.340.095.606)	26.467.733.150.218	35.911.136.545.120	(5.821.560.452.289)	30.089.576.092.831
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	27.153.226.550	(3.000.000)	27.150.226.550	24.595.834.418	(3.000.000)	24.592.834.418
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	464.570.712	-	464.570.712	63.071.925	0	63.071.925
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	969.168.592	(137.445.000)	831.723.592	1.439.174.836	(120.264.375)	1.318.910.461
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	16.352.787.812	(1.164.720.736)	15.188.067.076	15.236.395.367	(840.089.751)	14.396.305.616
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.066.410.162	-	1.066.410.162	1.046.413.262	0	1.046.413.262
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.076.998.825.638	(58.924.420.649)	1.018.074.404.989	1.019.472.809.235	(53.255.002.897)	966.217.806.338

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.416.599.885	(54.245.083)	3.362.354.802	3.069.152.260	-	3.069.152.260
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.310.076	(17.625.000)	297.685.076	315.310.076	(13.875.000)	301.435.076
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.066.687.595	-	1.066.687.595	864.607.100	0	864.607.100
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.327.369.145	(39.750.000)	3.287.619.145	3.133.994.145	(39.750.000)	3.094.244.145
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.080.408.071	(206.963.026)	6.873.445.045	6.778.000.866	(143.498.901)	6.634.501.965
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	568.097.704	-	568.097.704	811.201.804	0	811.201.804
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	54.000.004.095	(97.263.142)	53.902.740.953	51.045.639.716	(38.727.714)	51.006.912.002
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	101.395.867.321	-	101.395.867.321	5.379.109.730	0	5.379.109.730
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.644.008.610.213	(2.481.441.554)	1.641.527.168.659	1.478.019.156.338	(2.384.273.929)	1.475.634.882.409
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	211.408.483.218	(124.291.683)	211.284.191.535	194.244.882.925	(15.900.000)	194.228.982.925
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.478.468.553	(333.416.365)	30.145.052.188	48.196.091.736	(368.160.615)	47.827.931.121
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	76.204.526.855	(17.968.460.196)	58.236.066.659	66.043.685.608	(18.098.799.570)	47.944.886.038
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	18.800.129.290	(123.343.794)	18.676.785.496	18.972.377.860	(58.607.348)	18.913.770.512
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	10.673.616.963	(886.617.168)	9.786.999.795	10.573.803.403	(886.617.168)	9.687.186.235
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	852.077.649	(444.976.050)	407.101.599	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	17.053.162.464	(2.278.044.784)	14.775.117.680	13.069.442.164	(2.150.063.936)	10.919.378.228
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	151.075.117.594	(12.064.395.864)	139.010.721.730	159.755.240.972	(14.323.842.768)	145.431.398.204
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.782.451.267	(77.344.001)	2.705.107.266	2.936.690.490	(64.150.063)	2.872.540.427
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.057.480.946	-	2.057.480.946	1.553.250.979	(33.534.981)	1.519.715.998
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	11.243.405.980	(827.522.950)	10.415.883.030	12.972.272.991	(753.816.700)	12.218.456.291
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.963.533.963	(804.531.892)	3.159.002.071	3.878.987.154	(676.408.641)	3.202.578.513
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	25.695.097.079	(650.008.804)	25.045.088.275	24.893.021.573	-206912750	24.686.108.823
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	382.506.987	(22.552.500)	359.954.487	306.151.787	(22.552.500)	283.599.287
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	353.555.931.035	(61.097.083)	353.494.833.952	366.066.403.488	(13.406.000)	366.052.997.488
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	29.660.425.411	(109.684.797)	29.550.740.614	26.806.386.594	(31.200.000)	26.775.186.594
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	41.752.819.597	(849.517.112)	40.903.302.485	39.222.145.529	(263.783.941)	38.958.361.588
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	13.396.253.680	(22.270.000)	13.373.983.680	13.422.975.780	(17.952.500)	13.405.023.280
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.808.356.342	(36.400.000)	9.771.956.342	12.365.100.402	(36.400.000)	12.328.700.402

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.213.240.578	-	1.213.240.578	3.307.132.388	0	3.307.132.388
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	5.370.705.973	(3.000.000)	5.367.705.973	2.040.553.507	(3.000.000)	2.037.553.507
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.387.966.086	(88.845.389)	6.299.120.697	6.109.228.202	(66.608.214)	6.042.619.988
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	26.865.394.160	(60.483.100)	26.804.911.060	15.627.955.878	(60.483.100)	15.567.472.778
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.878.382.893	(573.622.512)	13.304.760.381	9.889.943.122	(129.192.970)	9.760.750.152
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5.189.208.959	(590.236.381)	4.598.972.578	3.810.633.321	(457.712.040)	3.352.921.281
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.486.947.253	(607.460.403)	7.879.486.850	8.246.574.376	(615.062.339)	7.631.512.037
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	38.971.004.037	(5.903.779.375)	33.067.224.662	86.321.915.762	(33.603.053.855)	52.718.861.907
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	5.673.302.198	-	5.673.302.198	7.297.619.585	0	7.297.619.585
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	44.344.441.857	(950.178.248)	43.394.263.609	44.466.968.323	-391613526	44.075.354.797
68	100	KOMISI YUDISIAL	2.225.816.257	-	2.225.816.257	1.901.048.257	0	1.901.048.257
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	14.183.138.780	-	14.183.138.780	13.345.213.780	0	13.345.213.780
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.014.510.408	(276.955.250)	15.737.555.158	10.637.399.936	(276.955.250)	10.360.444.686
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	695.197.035	(37.267.400)	657.929.635	641.685.335	(34.150.000)	607.535.335
72	107	BADAN SAR NASIONAL	29.727.542.422	(2.209.353.317)	27.518.189.105	21.973.714.657	-1869041000	20.104.673.657
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	3.171.148.246	(5.637.500)	3.165.510.746	1.787.801.648	(5.637.500)	1.782.164.148
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	5.592.717.893	-	5.592.717.893	5.588.990.050	0	5.588.990.050
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	4.225.119.385	(606.667.262)	3.618.452.123	4.225.119.385	(336.465.610)	3.888.653.775
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	220.452.865	(4.395.287)	216.057.578	17.069.784.125	-	17.069.784.125
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.992.748.009	(547.039.500)	14.445.708.509	14.912.068.009	(536.448.250)	14.375.619.759
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4.497.207.735	-	4.497.207.735	4.497.207.735	0	4.497.207.735
79	114	SEKRETARIAT KABINET	11.207.596.930	-	11.207.596.930	1.123.646.923	0	1.123.646.923
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	20.250.002.748	(620.852.754)	19.629.149.994	10.713.420.664	(133.760.620)	10.579.660.044
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	15.595.955.504	(5.967.645.736)	9.628.309.768	15.821.273.204	(6.090.618.088)	9.730.655.116
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	18.488.830.957	(1.663.178.281)	16.825.652.676	5.090.373.816	(1.471.137.102)	3.619.236.714
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	38.013.827.949	(136.874.651)	37.876.953.298	38.013.827.949	(136.874.651)	37.876.953.298
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	22.897.683.772	-	22.897.683.772	20.230.559.652	0	20.230.559.652
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	77.391.654.834	(56.963.200)	77.334.691.634	77.166.944.364	-64050000	77.102.894.364

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	13.751.130.817	-	13.751.130.817	13.751.130.817	0	13.751.130.817
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	3.150.808.300	-				
JUMLAH PADA K/L			**50.547.784.127.411**	**(6.860.413.487.589)**	**43.684.219.831.522**	**55.451.024.499.809**	**(7.665.412.014.697)**	**47.785.612.485.112**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	83.346.134.691	(15.182.303.213)	68.163.831.478	87.194.673.901	(12.456.910.765)	74.737.763.136
TOTAL			**50.631.130.262.102**	**(6.875.595.790.802)**	**43.752.383.663.000**	**55.538.219.173.710**	**(7.677.868.925.462)**	**47.860.350.248.248**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)	31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	17.201.344.575	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	48.800.000	18.925.965.286
4	005	MAHKAMAH AGUNG	335.957.047.294	195.373.014.198
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	211.168.435.402	15.699.534.950
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	9.347.165.666	5.325.208.050
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	24.016.934.779	182.496.252.653
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	94.605.435.790	415.204.726.270
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.814.616.095.988	6.991.717.524.943
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	217.154.025.040	722.754.577.352
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	130.966.788.109	278.968.308.402
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	109.794.054.699	14.198.879.909
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	142.441.255.953	51.976.363.654
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	305.146.699.950	667.023.445.885
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	42.749.102.979.012	42.859.398.535.213
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	563.946.376.700	764.495.228.518
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.112.015.308.839	3.148.494.656.000
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.594.266.254.238	1.840.176.765.988
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	66.232.461.701	57.859.210.133
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	281.836.313	623.272.587
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	42.995.053.578	35.479.636.017
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	176.053.544.514	339.926.330.712
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	70.152.213.383.529	59.955.196.610.516
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	395.964.080.975	240.073.284.120
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.647.770.000	47.802.332.780
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	6.668.088.167.077	6.242.058.075.615
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.522.511.000	4.407.331.012
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	5.369.662.030
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	60.491.450.298	247.504.586.414
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.109.199.298	23.786.153.661
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	11.819.517.817	16.179.258.363
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.399.308.095	742.732.400
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.307.508.125.235	2.346.499.832.363
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	153.245.015.219	85.011.000.826
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	5.553.739.362
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)	31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.142.185.000	11.585.610.008
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	31.608.897.585	11.181.884.170
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.618.524.600	5.761.235.555
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	44.085.900
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	67.464.562.161	41.661.090.360
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	132.035.123.866	14.122.950.475
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.244.701.582	7.778.778.600
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	730.911.500	1.223.689.500
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	400.425.130.743	583.053.947.699
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.270.000	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	104.724.121.000	45.122.863.976
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	28.583.355.350
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	168.744.037	3.712.566.399
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.303.688.712	5.584.600.500
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.345.309.000	18.547.973.000
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	834.285.000
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	120.234.730	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.534.331.148	2.534.331.148
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	325.937.404	27.005.000
72	107	BADAN SAR NASIONAL	593.716.510	200.985.906.541
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	221.669.000	99.438.855.200
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.840.394.050	11.482.425.218
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	393.987.073.321	437.978.646.602
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	72.000.000	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	5.672.605.314	3.907.353.514
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	463.125.675	463.125.675
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	276.979.017.829	157.235.901.675
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	344.032.060.237	847.029.736.240
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	191.700.000	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	
JUMLAH PADA K/L			**137.280.116.874.059**	**130.374.085.651.859**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	8.385.587.978	211.040.616.878
		Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)	-	-
TOTAL			**137.288.502.462.037**	**130.585.126.268.737**



Republik Indonesia

Lampiran 21

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2019 & 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	221.441.541	(210.057.208)	11.384.333	216.000.000	(210.030.000)	5.970.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.055.767.909	(2.588.888.511)	466.879.398	3.196.262.033	(2.696.178.366)	500.083.667
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.572.974	(22.865)	4.550.109	13.770.947	(68.854)	13.702.093
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	90.188.627	(438.943)	89.749.684	93.888.627	(469.443)	93.419.184
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	18.750.000	(93.750)	18.656.250
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	816.397.648	(788.195.265)	28.202.383	825.035.872	(788.281.647)	36.754.225
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.757.871.682	(84.433.721)	1.673.437.961	1.097.460.531	(85.597.165)	1.011.863.366
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.619.224.233	(12.003.781.456)	615.442.777	12.051.328.428	(11.772.909.904)	278.418.524
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	21.641.534.363	(179.946.428)	21.461.587.935	9.199.782.860	(132.861.669)	9.066.921.191
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.690.359.139	(376.524.103)	9.313.835.036	9.894.416.883	(498.436.997)	9.395.979.886
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	88.902.167	(444.511)	88.457.656
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.575.645.704	(1.616.104.466)	6.959.541.238	8.843.156.898	(1.672.952.782)	7.170.204.116
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	135.120.000	(5.000.000)	130.120.000	800.585.529	(5.075.000)	795.510.529
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.377.771.125	(1.265.291.170)	112.479.955	2.686.969.463	(1.271.842.162)	1.415.127.301
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	161.370.000	(161.370.000)	-	71.515.619	(215.130)	71.300.489
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	322.573.733	(214.665.986)	107.907.747	431.664.134	(236.413.983)	195.250.151
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	168.064.805	(168.064.805)	-	168.064.805	(168.064.805)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	28.964.410	(144.822)	28.819.588	33.964.410	(169.822)	33.794.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	7.067.607.565	(5.386.079.766)	1.681.527.799	7.659.162.099	(5.389.399.515)	2.269.762.584
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.332.000	(11.660)	2.320.340	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	783.412.600	(783.412.600)	-	784.230.781	(784.230.781)	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	837.351.144	(4.186.756)	833.164.388	280.954.219	(23.539.911)	257.414.308

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.650.541.830	(2.007.180.516)	643.361.314	2.818.354.115	(2.008.102.701)	810.251.414
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.869.573	(489.347)	97.380.226	101.589.211	(507.945)	101.081.266
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.467.992.809	(9.023.075.344)	1.444.917.465	10.580.559.280	(1.338.850.567)	9.241.708.713
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.273.396	(26.367)	5.247.029	10.113.380	(50.567)	10.062.813
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	752.121.114	(752.121.114)	-	756.943.840	(755.401.590)	1.542.250
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	31.644.572	-	31.644.572	19.541.286	-	19.541.286
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	37.139.058	(185.695)	36.953.363	58.626.778	(790.655)	57.836.123
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	189.863.000	(189.863.000)	-	189.863.000	(189.863.000)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.000.000	(10.000)	1.990.000	5.238.000	(26.190)	5.211.810
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.369.270.829	(56.578.859)	11.312.691.970	5.770.862.410	(117.604.056)	5.653.258.354
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	9.540.934.923	(9.540.934.923)	-	9.782.496.467	(9.782.496.467)	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23.640.957.235	(19.970.718.831)	3.670.238.404	22.905.685.655	(19.967.042.473)	2.938.643.182
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	103.708.888	(29.251.294)	74.457.594	103.708.888	(29.251.294)	74.457.594
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	7.487.105.546	(6.609.246.203)	877.859.343	8.360.332.688	(5.777.466.579)	2.582.866.109
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.395.959.442	(10.379.644.705)	16.314.737	10.710.968.626	(10.700.119.146)	10.849.480
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	14.360.000	(71.800)	14.288.200
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	93.103.480	(465.518)	92.637.962	155.172.436	(775.862)	154.396.574
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	28.400.564.911	(28.193.580.036)	206.984.875	28.816.238.986	(28.552.394.836)	263.844.150
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.733.455.929	(729.693.146)	2.003.762.783	2.267.093.320	(331.351.332)	1.935.741.988
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	41.025.372	(205.127)	40.820.245	152.132.669	(760.663)	151.372.006
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	338.719.555	(142.116.926)	196.602.629	527.808.275	(169.984.725)	357.823.550
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	70.990.922	(1.340.922)	69.650.000
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	640.508.179	-	640.508.179	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	9.687.500	(48.437)	9.639.063	101.182.608	(505.913)	100.676.695
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	283.242.844	(2.016.610)	281.226.234	363.569.394	(1.304.097)	362.265.297
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	513.719.500	(2.568.598)	511.150.902	110.096.000	(550.480)	109.545.520
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**179.183.980.687**	**(113.466.641.127)**	65.717.339.560	**163.209.394.539**	**(105.463.890.057)**	57.745.504.482
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			**179.183.980.687**	**(113.466.641.127)**	**65.717.339.560**	**163.209.394.539**	**(105.463.890.057)**	**57.745.504.482**



Republik Indonesia

Lampiran 22

Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2019
& 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)				31 DESEMBER 2018 (*Audited*)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	4.661.296.020	-	(1.574.714.895)	3.086.581.125	1.887.621.020	-	(1.570.558.520)	**317.062.500**
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	55.973.161.942	-	(24.242.583.477)	31.730.578.465	47.375.876.247	-	(22.343.908.839)	**25.031.967.408**
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	163.565.836.169	-	(110.015.543.468)	53.550.292.701	176.965.980.064	-	(113.780.436.620)	**63.185.543.444**
4	005	MAHKAMAH AGUNG	45.492.383.622	-	(34.359.868.623)	11.132.514.999	35.119.419.017	-	(30.230.407.133)	**4.889.011.884**
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	636.556.219.757	-	(365.101.104.895)	271.455.114.862	615.696.541.777	-	(213.679.502.596)	**402.017.039.181**
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	59.072.433.543	-	(38.515.789.965)	20.556.643.578	55.941.988.423	-	(29.025.309.652)	**26.916.678.771**
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	777.425.934.136	-	(729.256.428.168)	48.169.505.968	803.524.362.949	-	(762.999.735.964)	**40.524.626.985**
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	98.493.216.692	-	(69.866.615.671)	28.626.601.021	92.736.286.129	-	(59.712.893.675)	**33.023.392.454**
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.783.684.025.449	-	(1.400.835.680.346)	2.382.848.345.103	3.298.265.237.160	186.738.706.991	(1.146.630.409.887)	**2.338.373.534.264**
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	625.234.698.857	-	(442.517.380.284)	182.717.318.573	526.019.128.257	-	(354.852.166.897)	**171.166.961.360**
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.486.901.020.449	-	(1.035.960.188.625)	450.940.831.824	1.370.630.220.833	-	(1.085.012.343.458)	**285.617.877.375**
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	94.884.700.643	-	(21.894.137.302)	72.990.563.341	92.020.243.837	-	(22.006.731.346)	**70.013.512.491**
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	50.771.688.191	-	(21.963.363.486)	28.808.324.705	27.358.799.081	-	(22.442.735.215)	**4.916.063.866**
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	335.179.989.780	-	(200.710.553.809)	134.469.435.971	249.839.002.115	213.324.400	(173.012.024.968)	**77.040.301.547**
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.703.315.677.279	-	(447.404.239.878)	2.255.911.437.401	2.488.094.406.760	44.504.716.108	(412.839.551.474)	**2.119.759.571.394**
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	259.992.096.164	-	(119.006.412.377)	140.985.683.787	273.541.419.740	-	(135.847.321.339)	**137.694.098.401**
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	288.877.983.543	-	(187.149.269.657)	101.728.713.886	271.946.991.563	-	(180.961.896.869)	**90.985.094.694**
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	207.847.630.425	-	(105.308.245.336)	102.539.385.089	161.835.481.098	-	(101.780.914.757)	**60.054.566.341**
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	53.770.946.007	-	(39.331.274.772)	14.439.671.235	51.411.962.866	-	(32.738.104.837)	**18.673.858.029**
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	98.538.827.706	-	(85.278.449.458)	13.260.378.248	94.613.896.087	-	(72.837.403.209)	**21.776.492.878**
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	125.131.514.980	-	(80.002.540.750)	45.128.974.230	113.349.663.351	-	(58.461.720.931)	**54.887.942.420**
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	215.816.602.225	-	(90.499.336.968)	125.317.265.257	216.434.890.696	-	(97.851.052.099)	**118.583.838.597**
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.203.074.520.673	-	(95.895.451.139)	7.107.179.069.534	7.484.744.654.096	33.446.695.075	(102.086.956.816)	**7.416.104.392.355**
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	13.430.621.425	-	(12.084.103.929)	1.346.517.496	13.430.621.425	-	(11.331.679.989)	**2.098.941.436**
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	15.106.143.042	-	(10.456.491.860)	4.649.651.182	14.473.017.969	-	(6.536.854.292)	**7.936.163.677**
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.437.526.500	-	(749.370.063)	688.156.437	1.267.026.500	-	(674.038.438)	**592.988.062**
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	50.120.547.321	-	(19.383.854.316)	30.736.693.005	43.742.820.878	-	(14.411.746.192)	**29.331.074.686**
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	23.246.192.650	-	(18.200.326.459)	5.045.866.191	23.033.447.590	-	(16.821.802.780)	**6.211.644.810**
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	714.640.521.975	-	(362.364.839.998)	352.275.681.977	685.639.932.233	10.000.000	(297.142.550.306)	**388.507.381.927**
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	36.168.848.828	-	(19.450.495.595)	16.718.353.233	34.332.242.833	-	(35.572.294.821)	**(1.240.051.988)**
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.798.326.700	-	(15.290.490.864)	2.507.835.836	17.450.041.700	-	(11.906.626.938)	**5.543.414.762**
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	4.214.073.020	-	(2.874.389.394)	1.339.683.626	3.212.718.420	-	(2.304.079.688)	**908.638.732**
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.892.988.604.622	-	(936.791.549.756)	2.956.197.054.866	3.625.879.247.072	-	(748.798.612.096)	**2.877.080.634.976**
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.401.189.077.691	-	(644.530.648.098)	756.658.429.593	524.522.811.827	-	(327.481.890.454)	**197.040.921.373**
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	117.450.021.182	-	(77.782.773.712)	39.667.247.470	118.329.609.412	-	(60.653.532.110)	**57.676.077.302**
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	818.269.993.123	-	(512.227.609.935)	306.042.383.188	660.902.639.698	-	(444.748.810.285)	**216.153.829.413**
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	55.783.312.439	-	(35.825.335.474)	19.957.976.965	49.586.947.884	-	(35.707.224.356)	**13.879.723.528**
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	215.425.808.967	-	(157.417.431.486)	58.008.377.481	199.607.672.280	-	(143.313.223.160)	**56.294.449.120**
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	180.959.556.233	-	(25.378.110.318)	155.581.445.915	133.099.603.713	-	(35.222.740.249)	**97.876.863.464**
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	383.340.834.073	-	(298.012.674.181)	85.328.159.892	362.881.073.382	-	(276.796.047.384)	**86.085.025.998**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)				31 DESEMBER 2018 (*Audited*)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.452.804.047.706	-	(1.835.851.571.656)	2.616.952.476.050	3.260.389.635.058	-	(1.118.262.922.344)	**2.142.126.712.714**
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	103.338.739.947	-	(45.031.586.155)	58.307.153.792	97.890.198.613	-	(38.480.862.511)	**59.409.336.102**
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	215.693.329.531	-	(195.424.664.377)	20.268.665.154	210.664.394.406	-	(189.805.985.167)	**20.858.409.239**
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	106.522.243.049	-	(69.086.243.488)	37.435.999.561	80.164.757.135	-	(58.478.381.211)	**21.686.375.924**
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	170.237.674.270	-	(106.561.863.597)	63.675.810.673	150.801.107.700	-	(89.207.571.092)	**61.593.536.608**
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.854.215.654	-	(6.173.813.529)	1.680.402.125	7.854.215.654	-	(4.167.482.042)	**3.686.733.612**
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	37.444.918.522	-	(31.543.455.740)	5.901.462.782	37.160.307.101	-	(31.840.084.367)	**5.320.222.734**
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	817.610.000	-	(596.972.500)	220.637.500	658.885.000	-	(2.722.070.005)	**(2.063.185.005)**
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	433.297.132.629	-	(405.552.342.610)	27.744.790.019	449.658.379.456	-	(399.190.246.112)	**50.468.133.344**
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	18.568.425.806	-	(9.831.282.800)	8.737.143.006	11.162.754.056	-	(6.312.261.630)	**4.850.492.426**
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	28.361.978.911	-	(16.032.714.847)	12.329.264.064	27.256.404.411	-	(12.509.075.514)	**14.747.328.897**
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	37.044.447.353	-	(20.942.776.917)	16.101.670.436	23.821.857.738	-	(18.799.050.866)	**5.022.806.872**
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	160.833.905.655	-	(33.176.678.891)	127.657.226.764	126.791.506.448	-	(26.578.765.283)	**100.212.741.165**
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	46.363.881.524	-	(28.934.809.891)	17.429.071.633	38.345.597.682	-	(24.382.605.982)	**13.962.991.700**
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	157.174.213.886	-	(99.762.703.280)	57.411.510.606	108.958.715.394	-	(95.581.586.295)	**13.377.129.099**
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	514.319.186.407	-	(196.736.813.210)	317.582.373.197	374.445.802.861	4.528.150.000	(87.637.845.809)	**291.336.107.052**
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.996.886.940.090	-	(1.854.052.239.115)	1.142.834.700.975	2.642.771.136.054	2.421.811.801	(1.527.896.901.137)	**1.117.296.046.718**
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.725.556.950	-	(8.154.343.858)	1.571.213.092	9.160.797.150	-	(8.091.726.868)	**1.069.070.282**
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.949.866.393	-	(6.452.518.282)	5.497.348.111	10.668.937.629	-	(4.343.875.451)	**6.325.062.178**
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4.707.376.900	-	(3.487.828.277)	1.219.548.623	3.891.837.900	-	(2.804.112.568)	**1.087.725.332**
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.970.656.383	-	(10.150.466.033)	5.820.190.350	11.520.424.655	-	(9.057.490.982)	**2.462.933.673**
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	182.079.955.859	-	(172.722.774.340)	9.357.181.519	178.604.173.959	-	(168.328.442.736)	**10.275.731.223**
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	47.251.536.048	-	(27.802.744.973)	19.448.791.075	47.405.179.997	701.263.200	(24.729.384.337)	**23.377.058.860**
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	104.242.462.764	-	(64.404.381.263)	39.838.081.501	103.885.747.514	-	(89.625.170.759)	**14.260.576.755**
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	933.066.953.889	-	(11.048.831.413)	922.018.122.476	935.513.694.684	-	(12.160.483.365)	**923.353.211.319**
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	78.129.402.444	-	(50.168.672.327)	27.960.730.117	69.466.817.064	725.055.000	(41.814.250.597)	**28.377.621.467**
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.197.450.152	-	(4.431.180.867)	766.269.285	4.813.495.152	-	(6.618.468.543)	**(1.804.973.391)**
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.326.595.940	-	(2.316.452.846)	1.010.143.094	3.017.355.940	-	(2.086.234.928)	**931.121.012**
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	192.362.676.115	-	(94.828.288.092)	97.534.388.023	190.119.649.115	-	(65.536.374.673)	**124.583.274.442**
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	15.280.255.238	-	(13.008.043.769)	2.272.211.469	14.469.131.238	-	(12.144.886.323)	**2.324.244.915**
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	45.123.049.668	-	(20.736.806.495)	24.386.243.173	29.107.768.566	1.714.492.815	(19.466.375.243)	**11.355.886.138**
72	107	BADAN SAR NASIONAL	215.077.349.629	-	(128.976.622.717)	86.100.726.912	204.836.520.335	-	(97.201.349.826)	**107.635.170.509**
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	931.099.863	-	(732.537.038)	198.562.825	882.292.863	-	(612.519.108)	**269.773.755**
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	87.802.204.971	-	(2.493.227.561)	85.308.977.410	85.906.871.271	2.160.000	(2.263.892.478)	**83.645.138.793**
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	848.899.234	-	(600.971.109)	247.928.125	764.229.234	-	(663.562.449)	**100.666.785**
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210.174.630.963	-	(10.229.032.883)	199.945.598.080	204.846.316.215	-	(9.166.239.619)	**195.680.076.596**
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	203.162.103.666	-	(23.092.157.616)	180.069.946.050	193.842.470.450	3.302.885.193	(19.487.045.291)	**177.658.310.352**
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	238.149.897.668	-	(34.809.635.080)	203.340.262.588	232.294.756.728	-	(20.885.329.074)	**211.409.427.654**
79	114	SEKRETARIAT KABINET	3.671.760.383	-	(2.954.432.518)	717.327.865	3.457.298.192	-	(8.229.847.146)	**(4.772.548.954)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)				31 DESEMBER 2018 (*Audited*)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	18.244.862.446	-	(10.276.267.378)	7.968.595.068	11.294.156.637	-	(12.680.323.010)	**(1.386.166.373)**
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	8.541.645.118	-	(5.936.789.308)	2.604.855.810	5.771.910.518	-	(4.324.226.615)	**1.447.683.903**
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	5.774.406.516	-	(2.017.500.890)	3.756.905.626	3.683.270.416	-	(1.300.145.143)	**2.383.125.273**
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	310.609.000	-	-	310.609.000	310.609.000	-	-	**310.609.000**
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	66.766.427.848	-	(64.160.506.139)	2.605.921.709	68.295.955.208	-	(59.933.646.610)	**8.362.308.598**
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	5.607.181.289	-	(2.423.880.674)	3.183.300.615	3.940.368.500	-	(1.213.292.439)	**2.727.076.061**
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	9.239.838.720	-	(358.337.083)	8.881.501.637	7.995.138.520	-	(200.716.250)	**7.794.422.270**
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	752.977.000	-	(91.705.250)	661.271.750	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**39.526.864.994.040**	-	**(14.629.669.137.469)**	**24.897.195.856.571**	**35.349.308.377.399**	**278.309.260.583**	**(12.138.950.950.437)**	**23.488.666.687.545**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	170.966.863.195	-	(84.005.895.941)	86.960.967.254	148.907.231.481	-	(70.195.621.600)	**78.711.609.881**
TOTAL			**39.697.831.857.235**	-	**(14.713.675.033.410)**	**24.984.156.823.825**	**35.498.215.608.880**	**278.309.260.583**	**(12.209.146.572.037)**	**23.567.378.297.426**

Republik Indonesia

Lampiran 23

Rincian Aset Eks BPPN
Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2019

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2018 (Audited)		Mutasi Semester I 2019		Saldo Per 30 juni 2019		Mutasi Semester II 2019		Saldo Per 31 Desember 2019 (Audited)	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	915	794.072.652.297,00	(1)	(1.815.693.164,00)	914	792.256.959.133,00	(4)	(3.903.098.208,00)	910	788.353.860.925,00
2	Temuan BPK	369	782.795.799.869,15			369	782.795.799.869,15			369	782.795.799.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-			-	-			-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-			-	-			-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00			2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	Covernote	96	340.566.527.037,00	(10)	20.899.386.000,00	86	361.465.913.037,00			86	361.465.913.037,00
		1.487	**2.338.126.115.203,15**	**(11)**	**19.083.692.836**	**1.476**	**2.357.209.808.039**	**(4)**	**(3.903.098.208)**	**1.472**	**2.353.306.709.831**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Audited)		Mutasi TA 2019		Saldo 31 Desember 2019 (Audited)		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	**Aset Inventaris**	**18.653**	**8.504.708.157,35**			**18.620**	**8.476.788.157,35**	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338,35			11.274	6.400.600.338,35	
	b. Tidak Digunakan (idle)	7.379	2.104.107.819,00	(33)	(27.920.000)	7.346	2.076.187.819,00	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2019

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 30 Juni 2019	Mutasi (Rp)	Nilai per 31 Desember 2019
			Rekening Nostro tercatat dalam Neraca			
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp 5.841.796.415,00	-	Rp 5.841.796.415,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	Rp 3.654.578.828,50	Rp (62.023.947,81)	Rp 3.592.554.880,69
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	Rp -		Rp -
	Total			**Rp 9.496.375.243,50**	**Rp (62.023.947,81)**	**Rp 9.434.351.295,69**
			Rekening Nostro tercatat dalam CaLK			
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negari	Rp 2.044.748,60		Rp 2.044.748,60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp 83.311.328,35		Rp 83.311.328,35
4	BUN	Citibank		Rp 8.776.916.074,45		Rp 8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp 97.686.237,95		Rp 97.686.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp 706.429.119,47		Rp 706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp 196.059.779,49		Rp 196.059.779,49
8	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp 287.761,43		Rp 287.761,43
9	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp 6.601.373,85		Rp 6.601.373,85
10	Bank Aken BBKU	Bank Central Dagang		Rp 625.069,88		Rp 625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2.994.990,16		Rp 2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp 6.207.877,95		Rp 6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp 122.086.331,08		Rp 122.086.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp 4.887.591,05		Rp 4.887.591,05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp 1.020.060.447,69		Rp 1.020.060.447,69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp 6.017.122,84		Rp 6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp 11.739.033,84		Rp 11.739.033,84
20	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp 141.402.439,43		Rp 141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		Rp 361.433.693,83		Rp 361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp 2.864.035,05		Rp 2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp 268.237.424,51		Rp 268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKU	Indover Bank		Rp 109.652.042,65		Rp 109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp 925.492.300,93		Rp 925.492.300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp 531.317.595,65		Rp 531.317.595,65
27	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.530.231,65		Rp 24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32.416.251,32		Rp 32.416.251,32
29	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16.993.382,21		Rp 16.993.382,21
30	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 45.288.112,29		Rp 45.288.112,29
31	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.849.497,60		Rp 24.849.497,60
32	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 354.542.691,02		Rp 354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 92.060.251,91		Rp 92.060.251,91
34	Bank Ficorinvent BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77.574.756,22		Rp 77.574.756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 1.139.267,42		Rp 1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11.664.932,40		Rp 11.664.932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108.150.696,65		Rp 108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120.045.719,99		Rp 120.045.719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 341.740.942,42		Rp 341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195.403.134,60		Rp 195.403.134,60
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 956.004.466,45		Rp 956.004.466,45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2.996.775,68		Rp 2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254.274.894,54		Rp 254.274.894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27.358.123,38		Rp 27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp 122.424.186,80		Rp 122.424.186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp 406.733.525.331,33		Rp 406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp 2.359.921.197,78		Rp 2.359.921.197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp 2.257.377.867,88		Rp 2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp 1.758.722.655,31		Rp 1.758.722.655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp 1.834.239.834,61		Rp 1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 666.429.511,70		Rp 666.429.511,70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp 61.815.826,61		Rp 61.815.826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp 44.241.246,97		Rp 44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp 2.270.531,95		Rp 2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp 378.699.549,31		Rp 378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp 234.342.412,12		Rp 234.342.412,12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp 58.834.913,90		Rp 58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 65.028.723,58		Rp 65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41.766.481,92		Rp 41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6.616.463.903,03		Rp 6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266.632.029,06		Rp 266.632.029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339.690.834,35		Rp 339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357.108.818,21		Rp 357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp 6.463.800,47		Rp 6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 208.766.445,27		Rp 208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 327.222.390,61		Rp 327.222.390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp 1.675.910,59		Rp 1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp 1.312.775.083,50		Rp 1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp 490.837.088,12		Rp 490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp 4.122.298,55		Rp 4.122.298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp 909.494.195,25		Rp 909.494.195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp 980.037.418,44		Rp 980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp 103.609.247,09		Rp 103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp 1.708.457.513,38		Rp 1.708.457.513,38
75	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		Rp 1.332.284.084,60		Rp 1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp 25.528.725,87		Rp 25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72.226.080,57		Rp 72.226.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp 566.327.485,65		Rp 566.327.485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 456.068.074,81		Rp 456.068.074,81
80	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1.550.878.033,20		Rp 1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp 219.893.772,84		Rp 219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp 457.663.217,47		Rp 457.663.217,47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp 449.662.818,68		Rp 449.662.818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp 25.317.208,51		Rp 25.317.208,51
85	BUN	UMBC KualaLumpur		Rp 230.472.902,02		Rp 230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp 124.810.097,58		Rp 124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp 22.488.860,17		Rp 22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp 93.484.495,37		Rp 93.484.495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp 51.007.390,52		Rp 51.007.390,52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp 1.926.555.302,27		Rp 1.926.555.302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp 7.752.795,93		Rp 7.752.795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp 508.554.149,20		Rp 508.554.149,20
	Total			**Rp 454.445.361.290,83**		**Rp 454.445.361.290,83**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2019

*** Pengkonversian nilai rekening BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Coutts Bank menggunakan kurs tengah Bank Indonesia**

	Akhir Desember 2018		31 Desember 2019
Kurs tengah Bank Indonesia	Rp 14.481,00	Rp	13.901,01

**** Mutasi nilai rekening eks. BIRA di Clearstream merupakan selisih kurs**

****** Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN**		
Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp	54.584.286,49
Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	1.187.712.120,85
Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	8.840.515.509,00
Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2019)	Rp	4.697.519.206,00
Total	**Rp**	**14.780.331.122,34**

Penjelasan

Penelusuran dan Konfirmasi Dana Nostro

1 Telah dilaksanakan rapat dengan PPATK pada tanggal 18 Juni 2015

2 DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfimasi rekening tersebut serta telah menyetorkannnya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Progress Pengelolaan Dana Nostro di Bank Indonesia

1 Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014,menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.

2 Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014.
a. Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa
b. Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee
c. Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait

3 Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Nomor LAP- OI /KN.5.2/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian/Penelusuran Dokumen Aset Nostro Eks BPPN dan surat tugas Direktur PKNSI nomor ST-1131/KN.5/2016

4 Melalui surat nomor 18/35/DPTP/Srt/B tanggal 31 Maret 2016, Bank Indonesia menyampaikan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan hak Kementerian Keuangan. Selanjutnya melalui surat nomor 18/104/DPTP-GPTP-DPT/Srt/B tanggal 29 April 2016, Bank Indonesia menyatakan dana eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata tersebut telah disetorkan ke RKUN tanggal 26 April 2016.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. BDR di PT Bank Ganesha Tbk

1 Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00.

2 Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa :
a. Tidak terdapat outstanding dana eks BDNI pada PT Bank Ganesha.
b. Terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668,00.

3 Menanggapi surat PT Bank Ganesha tersebut, melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00 ke RKUN karena dana tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 penyelesainya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap. Namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari PT Bank Ganesha.

4 Melalui surat nomor S-2734/KN.5/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Dit PKNSI telah meminta bantuan saran/pendapat dari OJK terkait dana eks. BDR yang tersimpan di PT Bank Ganesha. Melalui surat nomor SR-08/PB.332/2016 tanggal 12 Januari 2016, OJK menyarankan DJKN membicarakan langsung hal tersebut dengan manajemen PT Bank Ganesha, sehingga permasalahan dana eks. BDR di PT Bank Ganesha dapat diselesaikan dengan baik.

5 Selanjutnya, melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.

6 Berdasarkan PMK nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijaminkan pemerintah sehingga sehingga set off dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, Direktorat PKNSI telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke RKUN.

7 Menanggapi surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui surat nomor 037/DIR/II/17 tanggal 2 Februari 2017, PT Bank Ganesha menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, demi hukum akan terjadi set off antara tagihan eks. BDR kepada PT Bank Ganesha dengan tagihan Bank Ganesha kepada eks. BDR. Dengan demikian, PT Bank Ganesha tidak lagi memiliki tagihan kepada eks. BDR, bahkan sebaliknya eks. BDR masih memiliki kewajiban sebesar Rp45.605.763.668,00 kepada PT Bank Ganesha.

8 Berkenaan dengan tanggapan PT Bank Ganesha tersebut, Direktorat PKNSI akan melakukan koordinasi dengan internal Kementerian Keuangan terkait guna pengembalian dana eks. BDR ke rekening kas Negara.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank BIRA di ClearStream Banking SA

1 Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di Clearstream Banking S.A dengan nilai 258.438,50 USD

2 Melalui surat nomor S-10044/KN.5/2015 tanggal 18 November 2015, DJKN telah meminta rekening dalam valuta asing kepada Ditjen Perbendaharaan dan telah mendapat tanggapan melalui surat nomor S-9935/PB.3/2015

3 Selanjutnya melalui surat nomor S-S-1147/KN.5/2017 Tanggal 31 Juli 2017, dalam rangka pengalihan dana tersebut ke RKUN, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada Konsultan Hukum Widyawan & Partners selaku kuasa hukum Clearstream Banking S.A nomor RKUN dalam dollar USD serta draf surat Direktur PKNSI kepada Clearstream Banking S.A untuk permintaan pengalihan dana eks. Bank BIRA tersebut ke RKUN dan spesimen tanda tangan Direktur PKNSI.

4 Saat ini, Direktorat PKNSI sedang menunggu tanggapan dari Konsultan Hukum Widyawan & Partners untuk pengembalian dana eks. Bank Bira tersebut ke RKUN.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank Bahari di Coutts Bank

1 Berdasarkan surat surat Konsultan Hukum Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) nomor 001/COB-1601/4/XII/2017/AAD-PW tanggal 4 Desember 2017 dan nomor 004/COB-1601/14/XI/2017/AAD-PW tanggal 14 November 2014 hal Penyampaian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengembalian Aset Bank Bahari, surat Alternate Chief Executive, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch tanggal 21 Juli 2017 hal Pemberian Konfirmasi dan Permintaan Dokumen serta Prosedur oleh DJKN, dan surat Head and Front Office, Coutts and Co Ltd, Singapore Branch tanggal 17 April 2017 hal Permohonan Klarifikasi Proses Pengembalian Asett maka elah terkonfirmasi dana eks. Bank Bahari tersimpan di Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch sebesar USD350.526,24.

2 Mengingat Coutts and Co Ltd akan segera menutup cabang nya di Hongkong dan Singapura, Direktorat PKNSI melalui surat nomor S-1823/KN.5/2017 tanggal 11 Desember 2017, telah meminta Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch untuk segera memindahbukukan dana tersebut ke. RKUN di Bank Indonesia dengan rincian Nomor rekening : 600.502411980, Nama rekening : RKUN dalam valuta USD di Bank Indonesia, SWIFT Code: INDOIDJA.

3 melalui email tanggal 2 Januari 2017, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan terkendala SWIFT details RKUN di Bank Indonesia.

4 Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI DJKN melalui surat nomor S-22/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2018 telah bantuan informasi kepada Bank Indonesia mengenai SWIFT details RKUN di Bank Indonesia dan mekanisme pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN.

5 Selanjutnya, melalui email tanggal 26 Januari 2018 Direktorat PKNSI menyampaikan kembali mekasnisme pemindahbukuan dana tersebut ke RKUN sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 20/27/DOTP-GLP-LIP/Srt/B tangg

6 Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2985/PB.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telaj efektif diterima RKUN pada tanggal 1 Februari 2018.

6 Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2985/PB.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telah efektif diterima RKUN pada tanggal 1 Februari 2019 .

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar/Lembar per 31 Desember 2019	Nilai Pasar per 31 Desember 2019	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 30 Juni 2019	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2019	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds												
1	DGS International Finance Co.	*Scripless*	0,01	USD	1.000.000	-	-		-	-	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	*Scripless*	101,88	USD	4.500.000	1,02	4.584.686	31 Desember 2019	64.832.037.656	63.731.736.059	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	*Scripless*	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000	31 Desember 2019	3.535.250.000	3.475.251.250	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	*Coupon*	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000	27 Juni 2008	38.750.000	38.750.000	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	*Coupon*	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000	27 Juni 2008	800.000.000	800.000.000	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	*Coupon*	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000	27 Juni 2008	38.125.000	38.125.000	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	*Coupon*	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000	27 Juni 2008	38.125.000	38.125.000	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	3.000.000	0,02	63.000	31 Desember 2019	890.883.000	875.763.315	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	TPE International Finance Co. Bv	*Scripless*	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000	31 Desember 2019	282.820.000	278.020.100	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	*Principal dan Coupon*	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000	10 Juni 2015	500.000.000	500.000.000	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	4.000.000	0,02	84.000	31 Desember 2019	1.187.844.000	1.167.684.420	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	88,21	USD	182.000	0,88	160.547	31 Desember 2019	2.270.301.915	2.231.771.322	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total									**74.414.136.570**	**73.175.226.466**		
b. Medium Term Notes												
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	93,92	USD	182.000	0,94	170.937,49	31 Desember 2019	2.417.227.046,09	2.376.202.903,18	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000,00	29 Maret 2019	254.538.000.000,00	250.218.090.000,00	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	960.560	0,90	864.504,00	29 Maret 2019	12.224.951.064,00	12.017.474.426,52	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	965.840	0,90	869.256,00	29 Maret 2019	12.292.149.096,00	12.083.532.002,28	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	14.141.000.000,00	13.901.005.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	14.141.000.000,00	13.901.005.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	14.141.000.000,00	13.901.005.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000,00	01 Oktober 2004	70.705.000.000,00	69.505.025.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total									**394.600.327.206,09**	**387.903.339.331,98**		
c. Non-Convertible Debentures												
1	Polysindo Eka Perkasa	*Principal*	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000,00	31 Desember 2019	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**		
Total (a+b+c)									**474.014.463.776,27**	**466.078.565.798,12**		

Total Nilai

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2019

Catatan		
Kurs Tengah BI	**Per 31 Desember 2019**	
1	Dollar Amerika	14.481,00

Keterangan :

* Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berhara di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI

** Emiten surat berharga berstatus akfif karena masih tercatat di Bursa

*** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2019

Aset Saham Pada Kustodi Citibank

No.	Nama Emiten	*Core Business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2019	Nilai Per 30 Juni 2019	Nilai Per 31 Desember 2019		Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32.137.300	144	4.627.771.200	4.627.771.200	-	Aktif		Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37.459.700	56	3.970.728.200	2.097.743.200	(1.872.985.000)	Aktif		Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	***Scripless***	40.000	850	34.000.000	34.000.000	-	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46.250	75	3.468.750	3.468.750	-	BBO		-	-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75	27.225	27.225	-	BBO		-	-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	50	20.000	20.000	-	BBKU		-	-	-	-
7	PT Bank PDFCI	-	Sertifikat	250	350	87.500	87.500	-	BTO		-	-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300	240.000	240.000	-	BBO		-	-	-	-
9	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	***Scripless***	11.304.425	70	1.345.226.575	791.309.750	(553.916.825)	Aktif		Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	034/CTT/TF/Lrgal/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
10	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	***Scripless***	41.421.439	70	4.929.151.241	2.899.500.730	(2.029.650.511)	Aktif		Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	034/CTT/TF/Lrgal/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	585	130.000	117.000	(13.000)	Aktif		Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13.898.500	1.180	26.198.672.500	16.400.230.000	(9.798.442.500)	Aktif		Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	0396/LCA.DIR/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk	Manufaktur Plastik	***Scripless***	57.901.002	89	8.337.744.288	5.153.189.178	(3.184.555.110)	Aktif		Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	102/VII/14/Im-sb tanggal 11 Juli 2014	-
14	PT Star Pacipic, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	140	14.000	14.000	-	Aktif		Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2019

15	PT Merck, Tbk.	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	40.000	4.000.000	4.000.000	-	Aktif	Berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2019	Surat Nomor S-1369/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	127/BN/AS/MM/VI/ 14 tanggal 15 Juli 2014	
16	PT Mulia Industrindo, Tbk	Manufaktur Keramik dan Kaca	Sertifikat	-	0	-	-	-	-		Berdasarkan hasil penelitian dokumen, 30.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desember 1998, diketahui bahwa 30.000.000 lembar saham tersebut merupakan			
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94.600	675	63.855.000	63.855.000	-	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49.251.500	50	2.462.575.000	2.462.575.000	-	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk	Manufaktur *velg* Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2.500	75	187.500	187.500	-	Aktif		Surat Nomor S-1371/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
20	PT Sierad Produce, Tbk	Peternakan	***Scripless***	1.918.865	850	1.966.836.625	1.631.035.250	(335.801.375)	Aktif		Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
21	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	9.175	6.090.000	6.422.500	332.500	Aktif		Surat Nomor S-1373/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak tercatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	290/XL.08/FD/2014 tanggal 14 Agustus	-
22	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk)	Manufaktur Kabel	***Scripless***	348.000	9.175	3.027.600.000	3.192.900.000	165.300.000	Aktif		Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	290/XL.08/FD/2014 tanggal 14 Agustus	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	380	40.000	38.000	(2.000)	Aktif		Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	34/JT/PTTS/2014 tanggal 15 Juli 2014	-
24	Unit Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Prima d.h. saham PT BDNI Reksadana	-	***Scripless***	80.000.000		44.798.339.066	-	(44.798.339.066)	Aktif		Sudah dilepaskan seluruhnya pada tanggal 06 November 2019 dengan penerimaan ke akun 711312 nomor dokumen 21/R/S/363882 uraian REDEMPTION REKSA DANA PRIMA Rp46.982.613.416,00			

Senua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikana nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing.

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2019 kecuali untuk KIK Reksadana Prima berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Juni 2019 (sumber : https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/296/reksa-dana-prima)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2019

Saham Pengelolaan Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2018	Nilai Per 31 Desember 2019	Status Emiten		Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karabha Digdaya	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100,00%	10.000	Rp 251.240.740.586	Rp 251.240.740.586	Aktif	0,00	Nilai buku berdasarkan surat Direksi PT Karabha Digdaya Nomor 067.2/DIR/PTKD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0,0024%	312	Rp 312.000	Rp 312.000	Aktif	0,00	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk	Manufaktur Kabel	6,24%	69.882.400	Rp 47.100.737.600	Rp 47.100.737.600	Aktif	0,00	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Kabelindo Murni, Tbk Nomor 084/DIR-S/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
4	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	Perhotelan		1.218	Rp -	Rp -	Aktif	0,00		
	Total				**Rp 298.341.790.186**	**Rp 298.341.790.186**				
Total Aset Saham Eks BPPN							**337.710.521.968,80**			

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2019 (Unaudited), melalui surat nomor S-19/KN.5/2019 (Unaudited) tanggal 8 Januari 2019 (Unaudited) , Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2019 (Unaudited) kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2019 (Unaudited) belum ada emiten yang menberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2019 (Unaudited) menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2019

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang disajikan dalam Neraca	**Saldo Per 31 Desember 2018**		**Mutasi Semester I 2019**		Saldo Per 30 Juni 2019		Mutasi Semester II 2019		Saldo Per 31 Desember 2019	
	Unit	**Nilai**	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	286	1.831.530.732.851	(19)	(32.595.103.000)	267	1.798.935.629.851	(34)	(47.993.683.407)	233	1.750.941.946.444
BS	991	1.518.799.338.019	(1)	(28.260.360.000)	990	1.490.538.978.019	(17)	(55.619.703.658)	973	1.434.919.274.361
BT	323	865.910.243.344	(36)	(40.132.000.000)	287	825.778.243.344	(5)	(19.642.550.000)	282	806.135.693.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123.953.401.452	(1)	596.103.184.000	36	720.056.585.452	(5)	(18.402.460.000)	31	701.654.125.452
penebusan tanah										
JUMLAH	**1.637**	**4.340.193.715.666**	(57)	495.115.721.000	1.580	4.835.309.436.666	(61)	(141.658.397.065)	1.519	4.693.651.039.601
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang diungkap dalam CaLK										
BD (Dokumen berupa AJB,APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	633	2.083.549.091.833	(4)	(4.254.540.000)	629	2.079.294.551.833	(37)	(157.356.034.429)	592	1.921.938.517.404
JUMLAH	**633**	**2.083.549.091.833**	(4)	(4.254.540.000)	629	2.079.294.551.833	(37)	(157.356.034.429)	592	1.921.938.517.404
JUMLAH TOTAL	**2.270**	**6.423.742.807.499**	**(61)**	**490.861.181.000**	**2.209**	**6.914.603.988.499**	**(98)**	**(299.014.431.494)**	**2.111**	**6.615.589.557.005**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2019

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 30 Juni 2019 (Audited)*	Nilai Aset Per 31 Desember 2019	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 186.230.000.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00	BII	USD	15.356.072,52	Rp 129.989.153.881,80	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 253.950.000.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 12.697.500.000,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 8.465.000.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			**16.657.242.209,00**	**16.657.242.209,00**				**Rp 625.201.523.307,80**	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs 8465

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2019

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 30 Juni 2019	Nilai Per 31 Desember 2019		Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan	0	n/a	Rp 223.500	Rp 223.500	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum,
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14,29%	Rp 141.550.000	Rp 141.550.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , KemenkumhamMelaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000	Rp 28.310.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui ,
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	Rp 234.871	Rp 234.871	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui,
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	Rp 125.015.692	Rp 125.015.692	Rp -	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	Rp 385.154.000	Rp 385.154.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui,
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	200.933	2.30%	Rp 323.903.996	Rp 323.903.996	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 06/DIR/SJV/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	498.260	3,67%	Rp 355.094.954	Rp 355.094.954	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 453/SKV/07/2017 tanggal 28 Juli 2017	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.066	1,04%	Rp 390.958.650	Rp 390.958.650	Rp -	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/I/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,41%	Rp 31.286.000	Rp 31.286.000	Rp -	Aktif	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	-
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp 4.038.531.684	Rp 4.038.531.684	Rp -	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited)	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521-0799, Fax : (021) 521 0755	- Berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI per 31 Desember 2017 (audited), saham perseroan yang dimiliki Kementerian Keuangan adalah 1.412 lembar saham, yang terdiri atas 1.115 lembar saham eks. kelolaan PT PPA dan 397 lembar saham eks BDL. Berdasarkan hal tersebut dilakukan koreksi pencatatan - Pada tahun 2018, berdasarkan hasil RUPST perseroan tahun 2017, dilakukan pembagian cash sebagai hasil divestasi anak usaha PT SBPI yaitu AFC. Merchant Bank. Atas kepemilikan 1.115 lembar saham P SBPI, Kementerian Keuangan menerima Rp24.382.173.300,00,
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.341.276.000	Rp 4.341.276.000	Rp -	Aktif	Nilai wajar saham per 09 Juni 2017 berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT AJTM Nomor LAP-0215/1/1/WKN.07/KNL.03/03.01/2017 tanggal 8 Juli 2017	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11. Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	-
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000	Rp 335.020.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007	-	-
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	-	BDNI	0	0,00%	Rp -	Rp -	Rp -	0	0		Saham PT BDNI Reksadana dihapusbukukan dari akun surat berharga eks kelolaan PT PPA dikarenaka berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten no DEIX/2014-7152 tangg 9 Oktober 2014, diketahui bahwa Kementerian Keuangan hanya memiliki 80.000.000 saham PT Reksadana Perdana Tbk dh PT BDNI Reksadana dalam bentuk scripless yang tersimpan di kustor
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000	Rp 61.553.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 056/SSV/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	861.465	3,74%	Rp 970.886.000	Rp 970.886.000	Rp -	Aktif	Nilai saldo saham berdasarkan surat Direksi PT Sarana Sumbar Ventura nomor 07/SSBV-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018	Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2019

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 30 Juni 2019	Nilai Per 31 Desember 2019		Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
20	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000	Rp 82.471.000	Rp -	Aktif	Nilai Modal Disetor Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 16/ADM/SPV.V/2016 tanggal 22 Agustus 2016	Jalan Santorosa, Tasangkapura No. 20, 99223. Jayapura, Papua	-
21	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000	Rp 3.750.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	-
22	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000	Rp 1.100.325.000	Rp -	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2019		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah di-*suspend* oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
23	PT Jembo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 4.188.800.000	Rp 4.041.537.500	Rp (147.262.500)	Aktif	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2019		Pada tahun 2016, aset saham PT Jembo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
24	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13,87%	Rp 1.425.000.000	Rp 1.425.000.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
25	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-		100,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Aktif			Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA
26	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273.000	96,53%	Rp 22.470.000.000	Rp 22.470.000.000	Rp -	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Pada tahun 2018, aset saham PT Sejahtera Eka Graha tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke aset saham eks kelolaan PT PPA.
27	PT Turban Petrochemical Industries	Petrokimia	-	175.406	46,99%	Rp 8.750.000	Rp 2.908.409.694.537	Rp 2.908.400.944.537	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017		1. Pada tahun 2018, aset saham PT Turban Petrochemical Industries tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke aset saham eks kelolaan PT PPA. 2. RUPSLB tanggal 5 Nov 2019: penerbitan saham baru 157.906 lembar untuk menampung konversi utang pokok MYB Rp2.618.241.494.537. penerbitan saham baru 190.372 lembar ekuivalen dengan 51% senilai Rp16.581.014 per lembar saham
Total						**Rp 46.129.344.347**	**Rp 2.954.383.026.384**	**Rp 2.908.253.682.037**				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2019, melalui surat nomor S-36/KN.5/2019 tanggal 15 Januari 2020, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2019 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2019 belum ada emiten yang menberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2019 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.



Republik Indonesia

Lampiran 24

Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2019
& 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	17.496.296.270	(1.343.981.189)	16.152.315.081	12.287.110.720	(262.752.167)	12.024.358.553
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	20.173.827.251	(10.249.884.151)	9.923.943.100	18.627.927.252	(8.284.185.458)	10.343.741.794
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	10.117.675.753	(9.332.784.682)	784.891.071	61.551.373.767	(55.653.217.360)	5.898.156.407
4	005	MAHKAMAH AGUNG	134.270.790.419	(121.132.540.564)	13.138.249.855	135.623.038.742	(114.569.274.531)	21.053.764.211
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	78.105.303.293	(67.550.375.113)	10.554.928.180	78.507.611.770	(72.786.529.897)	5.721.081.873
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	264.537.455.528	(123.472.178.418)	141.065.277.110	262.071.923.074	(114.947.470.049)	147.124.453.025
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	466.402.451.690	(219.184.986.354)	247.217.465.336	388.378.557.288	(177.980.572.171)	210.397.985.117
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	395.869.847.716	(92.117.353.769)	303.752.493.947	113.688.381.260	(81.938.129.579)	31.750.251.681
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.632.504.630.582	(3.702.529.825.677)	2.929.974.804.905	6.305.613.513.814	(3.471.143.073.409)	2.834.470.440.405
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	326.651.278.466	(256.181.205.310)	70.470.073.156	349.586.548.982	(256.677.527.937)	92.909.021.045
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.280.812.642.589	(1.204.620.241.889)	76.192.400.700	1.139.813.993.517	(910.595.400.676)	229.218.592.841
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	772.510.080.456	(255.444.818.181)	517.065.262.275	716.975.689.013	(245.244.101.082)	471.731.587.931
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.091.275.271.237	(817.822.719.132)	273.452.552.105	1.180.818.896.191	(828.808.401.464)	352.010.494.727
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	930.953.945.445	(372.778.505.891)	558.175.439.554	1.129.200.211.249	(413.742.922.887)	715.457.288.362
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6.562.888.409.971	(1.877.503.973.199)	4.685.384.436.772	5.231.113.506.667	(1.382.199.721.916)	3.848.913.784.751
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	572.360.053.029	(533.697.385.376)	38.662.667.653	607.599.164.234	(539.078.925.000)	68.520.239.234
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.098.325.036.995	(9.180.365.484.936)	3.917.959.552.059	5.896.652.429.657	(4.821.936.883.640)	1.074.715.546.017
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	377.897.410.777	(232.400.665.470)	145.496.745.307	303.467.082.927	(208.612.292.851)	94.854.790.076
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	439.111.606.995	(378.418.760.358)	60.692.846.637	545.056.528.846	(458.228.910.138)	86.827.618.708
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	26.297.974.644	(23.497.248.286)	2.800.726.358	27.417.688.583	(24.858.951.495)	2.558.737.088
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.993.377.950.941	(520.048.478.151)	1.473.329.472.790	482.878.816.419	(383.422.746.684)	99.456.069.735
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	347.666.128.627	(295.012.299.155)	52.653.829.472	342.965.519.318	(258.241.124.883)	84.724.394.435
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	42.290.876.831.978	(10.838.067.676.213)	31.452.809.155.765	233.130.907.196.903	(31.778.517.454.240)	201.352.389.742.663
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.028.775.466	(131.472.623)	897.302.843	1.028.775.466	(116.970.835)	911.804.631
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	513.326.510	(497.976.948)	15.349.562	3.380.215.129	(2.908.769.049)	471.446.080
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	250.365.400	(250.365.400)	-	250.365.400	(250.365.400)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	64.592.895.321	(15.202.583.970)	49.390.311.351	57.765.832.615	(11.233.662.781)	46.532.169.834
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	151.433.500	(68.021.600)	83.411.900	906.938.624	(882.577.124)	24.361.500

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	511.933.872.514	(290.100.975.274)	221.832.897.240	555.046.603.518	(308.887.568.529)	246.159.034.989
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	38.140.973.294	(23.273.631.440)	14.867.341.854	185.922.326.191	(16.947.230.725)	168.975.095.466
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	618.114.185	(580.626.685)	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	2.572.608.800	(2.555.693.000)	16.915.800	1.484.310.584	(1.484.018.084)	292.500
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.767.753.563	(1.976.276.686)	2.791.476.877	4.767.753.563	(1.802.482.743)	2.965.270.820
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	14.789.826.926	(13.884.007.124)	905.819.802	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.910.803.103	(3.725.522.622)	185.280.481	9.285.528.963	(2.143.836.815)	7.141.692.148
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	119.939.596.185	(112.766.919.982)	7.172.676.203	99.943.393.399	(87.230.572.407)	12.712.820.992
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	68.180.544.422	(6.977.126.803)	61.203.417.619	62.680.178.299	(2.607.734.195)	60.072.444.104
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	122.459.665.056	(115.352.248.687)	7.107.416.369	125.004.264.599	(114.427.810.259)	10.576.454.340
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.969.907.624	(26.023.553.407)	71.946.354.217	93.930.401.983	(8.786.378.146)	85.144.023.837
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.903.683.354	(25.955.356.055)	1.948.327.299	20.621.187.552	(18.983.762.369)	1.637.425.183
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.075.050.005.534	(915.394.862.554)	159.655.142.980	856.260.491.543	(777.902.275.224)	78.358.216.319
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	21.341.215.127	(19.506.073.185)	1.835.141.942	15.276.035.516	(15.838.332.019)	(562.296.503)
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	6.502.014.047	(4.196.598.138)	2.305.415.909	8.343.400.965	(197.200.000)	8.146.200.965
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	49.773.970	(49.773.970)	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	48.378.820.356	(47.706.727.822)	672.092.534	50.688.053.831	(49.759.618.763)	928.435.068
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.851.342.537.306	(919.988.872.487)	931.353.664.819	1.994.248.710.782	(889.622.125.693)	1.104.626.585.089
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	8.848.862.345	(8.242.311.595)	606.550.750	14.797.720.282	(10.129.262.907)	4.668.457.375
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.558.222.192	(2.558.222.192)	-	2.356.007.867	(104.785.675)	2.251.222.192
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	45.878.706.396	(41.378.892.678)	4.499.813.718	36.375.441.590	(27.370.078.199)	9.005.363.391
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	89.792.431.168	(81.954.852.341)	7.837.578.827	62.663.133.603	(58.927.231.688)	3.735.901.915
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	12.136.402.704	(12.045.803.072)	90.599.632	7.000.920.398	(6.989.131.973)	11.788.425
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	4.336.379.891	(3.012.957.003)	1.323.422.888	3.107.133.503	(94.176.500)	3.012.957.003
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	104.763.204.465	(54.610.534.943)	50.152.669.522	104.689.484.879	(56.807.950.403)	47.881.534.476
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.302.771.391	(3.126.001.825)	176.769.566	8.528.081.274	(8.645.504.434)	(117.423.160)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	292.625.134.604	(163.648.194.189)	128.976.940.415	237.493.496.013	(109.451.928.198)	128.041.567.815
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	96.279.697.967	(6.467.469.895)	89.812.228.072	5.983.005.475	(4.812.248.441)	1.170.757.034
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	406.647.875	(406.152.875)	495.000	-	-	#VALUE!
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	10.131.712.521	(8.736.971.132)	1.394.741.389	4.322.338.489	(1.578.329.735)	2.744.008.754
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.144.732.285	(1.123.388.900)	21.343.385	1.260.701.850	(1.119.293.140)	141.408.710
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.651.189.878	(1.640.749.240)	10.440.638	1.375.539.100	(1.328.233.450)	47.305.650
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	5.719.311.911	(5.554.278.612)	165.033.299	7.254.929.769	(7.124.928.900)	130.000.869
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	9.691.419.774	(9.678.959.049)	12.460.725	5.040.713.882	(4.945.244.595)	95.469.287
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	16.014.374.923	(15.584.380.145)	429.994.778	2.778.682.115	(2.575.132.384)	203.549.731
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	112.322.656.076	(71.685.849.294)	40.636.806.782	111.442.518.114	(47.878.273.001)	63.564.245.113
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	155.963.830.881	(52.588.918.451)	103.374.912.430	196.677.386.495	(82.460.492.234)	114.216.894.261
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	14.731.134.942	(12.762.142.829)	1.968.992.113	4.435.355.597	(4.203.290.277)	232.065.320
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	8.663.242.280	(8.640.302.881)	22.939.399	9.594.029.740	(6.850.182.100)	2.743.847.640
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.331.114.444	(1.321.548.986)	9.565.458	100.987.032	-	100.987.032
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	79.056.426.225	(76.642.324.207)	2.414.102.018	81.529.802.239	(71.720.001.019)	9.809.801.220
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.537.387.618	(16.001.819.318)	535.568.300	23.375.013.984	(22.902.059.451)	472.954.533
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	7.013.983.227	(6.748.910.397)	265.072.830	9.685.537.677	(1.627.893.151)	8.057.644.526
72	107	BADAN SAR NASIONAL	84.968.890.058	(29.827.749.756)	55.141.140.302	213.233.575.302	(65.346.477.613)	147.887.097.689
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	1.602.900.000	(1.602.900.000)	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	912.570.495	(806.453.836)	106.116.659	815.822.395	(509.078.084)	306.744.311
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	916.921.000	(744.234.928)	172.686.072	37.195.313.400	(21.855.629.535)	15.339.683.865
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	243.038.329.815	(149.799.540.762)	93.238.789.053	245.153.378.589	(149.836.409.876)	95.316.968.713
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	683.050.000	(662.621.428)	20.428.572
79	114	SEKRETARIAT KABINET	6.922.173.376	(6.922.173.376)	-	6.261.239.836	(941.919.382)	5.319.320.454
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10.435.239.541	(8.833.531.774)	1.601.707.767	13.564.770.668	(7.234.337.428)	6.330.433.240
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	42.371.373.191	(41.524.721.829)	846.651.362	42.526.514.418	(41.255.719.947)	1.270.794.471
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	210.006.379.664	(184.765.113.440)	25.241.266.224	218.664.209.118	(193.540.378.614)	25.123.830.504

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2019 (*Audited*)			31 DESEMBER 2018 (*Audited*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(2.791.326.766)	756.262.630	3.547.589.396	(2.287.151.679)	1.260.437.717
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2.676.092.322	(2.483.053.473)	193.038.849	14.445.733.031	(14.439.506.531)	6.226.500
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	1.290.322.969	(593.627.041)	696.695.928	46.249.000	(34.303.417)	11.945.583
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-				
JUMLAH PADA K/L			**83.922.411.398.055**	**(34.775.745.226.986)**	49.146.666.171.069	**264.349.885.641.992**	**(49.961.295.798.220)**	214.388.589.843.772
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	587.279.754.484.932	(245.910.489.788.749)	341.369.264.696.183	**578.750.594.207.564**	**(3.586.380.347)**	578.747.007.827.217
TOTAL			**671.202.165.882.987**	**(280.686.235.015.735)**	390.515.930.867.252	**843.100.479.849.556**	**(49.964.882.178.567)**	793.135.597.670.989

Republik Indonesia

Lampiran 25

Daftar BMN Eks BMN *Idle* yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2019

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2019

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Jalan		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Bandar Lampung	Bandar Lampung	Jl. Cut Mutia No.68	1.160	01/01/2008	639.161.000	-	639.161.000	PSP ke Ombudsman RI KMK No.60/KM.6/KN.5/2019 BAST No.01/WKN.05/KNL.03/2019
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Metro	Metro	Jl. Tongkol No.28	1.600	01/01/1991	391.699.000	-	391.699.000	PSP ke Kemenkeu KMK No.328/KM.6/2018 BAST 01/idle/WKN.05/KNL.04/2019
3	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No. 1	1.225	30/12/1982	551.250.000	-	551.250.000	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
4	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	KPKNL Jayapura	Kab. Merauke	Jl. Raya Mandala Spadim Kompleks Kpkn No 7	480	31/12/2002	188.000.000	-	188.000.000	PSP ke Kemenkeu KMK No.23/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/MK.06/WKN.17/KNL.02/2019
5	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Lebak Rejo No.16 Kelurahan Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur	1.086	01/01/1971	699.540.000	-	699.540.000	PSP ke Kementerin Agama KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019
TOTAL TANAH						**5.551**		**2.469.650.000**	**-**	**2.469.650.000**	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Bandar Lampung	Bandar Lampung	Jl. Cut Mutia No.68	423	01/01/2008	1.357.048.000	298.550.560	1.058.497.440	PSP ke Ombudsman RI KMK No.60/KM.6/KN.5/2019 BAST No.01/WKN.05/KNL.03/2019
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Metro	Metro	Jl. Tongkol No.28	150	01/01/1991	154.153.000	42.960.672	111.192.328	PSP ke Kemenkeu KMK No.328/KM.6/2018 BAST 01/idle/WKN.05/KNL.04/2019
3	4010209999	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya	KPKNL Metro	Metro	Jl. Tongkol No.28	60	01/01/1990	3.813.000	173.318	3.639.682	PSP ke Kemenkeu KMK No.328/KM.6/2018 BAST 01/idle/WKN.05/KNL.04/2019
4	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No.1	50	30/12/1983	27.939.000	10.325.281	17.613.719	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
5	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	50	30/12/1982	22.550.000	8.712.500	13.837.500	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
6	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	50	30/12/1982	39.833.000	15.390.025	24.442.975	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
7	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma	50	30/12/1982	84.768.000	32.751.275	52.016.725	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2019

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Jalan		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	50	30/12/1983	9.450.000	3.492.395	5.957.605	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
9	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma	50	30/12/1982	9.450.000	3.651.141	5.798.859	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
10	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	50	30/12/1982	32.100.000	12.402.275	19.697.725	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
11	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	50	30/12/1982	21.650.000	8.364.775	13.285.225	PSP ke Bawaslu KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019 BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019
12	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo	157	01/04/1976	76.400.000	41.896.774	34.503.226	PSP ke Kemenhan KMK No.274/KM.6/2017 BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2018
13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo	402	20/02/1998	449.100.000	101.796.000	347.304.000	PSP ke Kemenhan KMK No.274/KM.6/2017 BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2019
14	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo	15	01/04/1978	6.200.000	3.011.429	3.188.571	PSP ke Kemenhan KMK No.274/KM.6/2017 BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2020
15	4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo	126	20/02/1998	62.500.000	14.166.667	48.333.333	PSP ke Kemenhan KMK No.274/KM.6/2017 BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2021
16	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo	1 (P: 153 m)	30/04/1998	43.928.000	9.957.013	33.970.987	PSP ke Kemenhan KMK No.274/KM.6/2017 BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2022
17	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jayapura	Kab. Merauke	Jl. Raya Mandala Spadim Kompleks Kpkn No 7	50	31/12/1978	60.107.000	28.383.863	31.723.137	PSP ke Kemenkeu KMK No.23/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/MK.06/WKN.17/KNL.02/2019
18	4010202014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Lebak Rejo/Sekip No.19/838 Kel. Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I	70	01/01/1971	43.843.778	37.580.381	6.263.397	PSP ke Kementerin Agama KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019
19	4010202014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Lebak Rejo/Sekip No.16/837 Kel. Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I	50	01/01/1973	37.100.000	26.712.000	10.388.000	PSP ke Kementerin Agama KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019
20	4010202015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Lebak Rejo/Sekip No.16/835 Kel. Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I	50	01/01/1973	17.500.000	12.600.000	4.900.000	PSP ke Kementerin Agama KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019
21	4010202015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Lebak Rejo/Sekip No.17/836 Kel. Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I	50	01/01/1973	10.600.000	7.632.000	2.968.000	PSP ke Kementerin Agama KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019
TOTAL BANGUNAN						**2.003**		**2.570.032.778**	**720.510.344**	**1.849.522.434**	
TOTAL						**7.554**		**5.039.682.778**	**720.510.344**	**4.319.172.434**	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166128	*Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN*									
	TANAH		**347.650**	**65.401.076.228**	**644**	**376.267.000**	**5.551**	**2.469.650.000**	**342.743**	**63.307.693.228**
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	7.298	2.738.248.602			480	188.000.000	6.818	2.550.248.602
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	15.819	11.421.231.416			2.311	1.250.790.000	13.508	10.170.441.416
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000.000					200	1.001.000.000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	17.802	14.968.830.500	644	376.267.000	2.760	1.030.860.000	15.686	14.314.237.500
2.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	M2	1.015	1.380.400.000					1.015	1.380.400.000
2.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga	M2	6.508	71.980.550					6.508	71.980.550
2.01.01.99.999	Tanah Persil Lainnya	M2	889	7.477.138.000					889	7.477.138.000
2.01.02.01.001	Tanah Rawa	M2	4.939	1.840.735.160					4.939	1.840.735.160
2.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	26.990	107.621.000					26.990	107.621.000
2.01.03.08.003	Tanah untuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	M2	266.190	24.393.891.000					266.190	24.393.891.000

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GEDUNG DAN BANGUNAN		**121**	**13.982.652.920**	**3**	**58.571.000**	**21**	**2.570.032.778**	**103**	**11.471.191.142**
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	16	8.371.779.212	1	45.171.000	4	2.036.701.000	13	6.380.249.212
4.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	2	41.673.113					2	41.673.113
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	3	65.465.000			1	6.200.000	2	59.265.000
4.01.01.04.001	Gedung Instalasi Studio	Unit	1	7.562.000					1	7.562.000
4.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	2	8.694.000					2	8.694.000
4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	2	295.543.000					2	295.543.000
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	10.184.248					1	10.184.248
4.01.01.13.002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	8	260.634.347					8	260.634.347
4.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	62.500.000			1	62.500.000	-	-
4.01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	109.116.485					1	109.116.485
4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	118.927.000					2	118.927.000
4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	2	120.804.437					2	120.804.437
4.01.02.01.013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	4	173.936.000					4	173.936.000
4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692					1	338.711.692
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	6	745.200.591					6	745.200.591
4.01.02.02.008	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Unit	1	15.317.000					1	15.317.000
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	52	1.769.175.029			9	307.847.000	43	1.461.328.029
4.01.02.02.013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	1	77.520.134	2	13.400.000			3	90.920.134
4.01.02.02.014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Unit	2	80.943.778			2	80.943.778	-	-
4.01.02.02.015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Unit	2	28.100.000			2	28.100.000	-	-
4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Unit	2	398.222.854					2	398.222.854
4.01.02.09.999	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya	Unit	1	3.813.000			1	3.813.000	-	-
4.01.02.99.999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Unit	3	703.311.000					3	703.311.000
4.04.01.01.009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	4	135.588.000			1	43.928.000	3	91.660.000
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000					1	39.931.000
TOTAL TANAH DAN BANGUNAN				**79.383.729.148**		**434.838.000**		**5.039.682.778**		**74.778.884.370**

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	KUADRAN		KET. KUADRAN
1	BFA	EKS BPPN		Cikopomayak	S-89/MK.6/2015	14 April 2015	PRJ-5/MK.6/2015	06 Agustus 2015	Rp 20.281.344.000,00	36	Agustus 2015	Agustus 2018	Berakhir	III	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan	
2	SPH	EKS BPPN		Jl. Pemuda No.18 Medan	S-389/MK.6/2016 S-42/MK.6/2017	06/12/2016 22/02/2017	PRJ-1/MK.6/2017	22 Februari 2017	Rp 108.000.000,00	36	22 Februari 2017	21 Februari 2020	Berakhir, sudah perpanjangan	-		aset diketahui pada saat dilakukan inventarisasi, dan selanjutnya akan dicatat pada CaLK
3	SPH	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001865	Jl. Ahmad Yani No. 102A	S-389/MK.6/2016 S-42/MK.6/2017	06/12/2016 22/02/2017	PRJ-2/MK.6/2017	22 Februari 2017	Rp 125.000.000,00	60	22 Februari 2017	21 Februari 2022		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
4	BNP	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001746	Jalan Ciungwanara, Kelurahan Lebak, Kota Bandung	S-20/MK.6/2017	06 Februari 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2017	10 April 2017	Rp 1.350.000.000,00	36	10 April 2017	9 April 2020	Berakhir	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
5	TEL	EKS BPPN		Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan	S-2227/MK.6/2016	27 Desember 2016	-	-	Rp 249.433.000,00		Sudah dibayar tanggal 5 Juni 2017 Jangka waktu Sewa : 1 Maret 2010 s.d. 28 Februari 2015		HTBI, serah kelola ke LMAN	-		aset eks HTBI, telah serah kelola ke LMAN
6	IDS	EKS BPPN		Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan	S-128/MK.6/2017	24 Mei 2017	PRJ-1/MK.6/2019	18 Maret 2019	Rp 546.360.000,00	60	17 Juli 2014	16 Juli 2019	HTBI, serah kelola ke LMAN	-		aset eks HTBI, telah serah kelola ke LMAN
7	TEL	EKS BPPN		Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan	S-129/MK.6/2017	24 Mei 2017	PRJ-2/MK.6/2019	18 Maret 2019	Rp 459.570.000,00	60	1 Maret 2015	28 Februari 2020	HTBI, serah kelola ke LMAN	-		aset eks HTBI, telah serah kelola ke LMAN
8	CVJ	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001963, HTBI	Jln. Pasar 16 Ilir No.123 Kota Palembang	S-342/MK.6/2017	19 Desember 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.04/2018	02 Januari 2018	Rp 450.000.000,00	24	2 Januari 2018	1 Januari 2020	Berakhir (PROSES DIPERPANJANG)	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
9	SOF	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001658	Jalan Imam Bonjol, Kompleks Batam Blok A No.10 dan No.11, Nagoya Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	S-328/MK.6/2017	07 Desember 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2018	29 Maret 2018	Rp 190.000.000,00	24	29 Maret 2018	28 Maret 2020	Berakhir, proses perpanjangan	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
10	ARM	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001749, HTBI	Jalan Nusantara No. 106 Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar	S-395/MK.6/2017	29 Desember 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.15/2018	21 Februari 2018	Rp 24.000.000,00	36	21 Februari 2018	20 Februari 2021		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
11	RMN	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000113	Jalan Bakti No.72, Kisaran Timur, Kab. Asahan	S-409/MK.6/2018	07 September 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2018	01 Oktober 2018	Rp 55.000.000,00	60	1 Oktober 2018	20 September 2023		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
12	SKY	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0015810, HTBI	Jalan Kol. Sugiono No.5 (dh. Jl. Damarwulan) RT 06/05 Jkel. Tisnonegaran, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo	S-443/MK.6/2018	01 Oktober 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2018	11 Oktober 2018	Rp 54.700.000,00	12	11 Oktober 2018	10 Oktober 2019	Berakhir (sdh diperpanjang)	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
13	SYC	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001666	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	S-460/MK.6/2018	05 Oktober 2018	PRJ-82/MK.6/WKN.09/2018	17 Desember 2018	Rp 33.500.000,00	12	17 Desember 2018	16 Desember 2019	Berakhir (sdh diperpanjang)	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
14	BRK	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001984, PRK-B002936, PRK-B002937, PRK-B002938	Jalan Surya Kencana No. 157A, 157B, 157C dan 157, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-461/MK.6/2018	05 Oktober 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2018	05 November 2018	Rp 123.000.000,00	36	5 November 2018	4 November 2021		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
15	BRK	EKS BPPN		Jalan Kol. Ahmad Syam(Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	S-458/MK.6/2018	05 Oktober 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.8/2018	05 November 2018	Rp 138.000.000,00	36	5 November 2018	4 November 2021		II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	
16	WTN	EKS BPPN		Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Utara (SHM No.162/Tanjung Morawa)	S-515/MK.6/2018	19 November 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2018	10 Desember 2018	Rp 88.500.000,00	60	10 Desember 2018	9 Desember 2023		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
17	WTN	EKS BPPN		Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara a. (SHGB No.13/Tanjung Morawa)	S-516/MK.6/2018	19 November 2018	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2018	10 Desember 2018	Rp 241.500.000,00	60	10 Des 2018	9 Des 2023		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
18	SMS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000026 s.d PRK-C000030 dan PRK-C000036	Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	S-520/MK.6/2018	19 November 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.10/2018	19 Desember 2018	Rp 145.000.000,00	12	19 Desember 2018	18 Desember 2019	Berakhir	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	
19	JND	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002073	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan	S-555/MK.6/2018	07 Desember 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2019	10 Januari 2019	Rp 88.300.000,00	12	10 Januari 2019	9 Januari 2020	Berakhir (sdg proses diperpanjang)	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
20	GPS	EKS BPPN		JalanLegian No.188 (Jl. Padma Utara), Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung	S-420/MK.6/2018	12 September 2018	PRJ-01/WKN.14/2019	04 Februari 2019	Rp 3.375.000.000,00	60	12 Oktober 2018	11 Oktober 2023		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
21	SRM	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0014971	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	S-621/MK.6/2018	26 Desember 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2019	18 Januari 2019	Rp 8.650.000,00	12	18 Januari 2019	17 Januari 2020	Berakhir	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	KUADRAN		KET. KUADRAN
22	DTM	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0014982	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	S-624/MK.6/2018	26 Desember 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.08/2019	28 Januari 2019	Rp 9.800.000,00	12	28 Januari 2019	27 Januari 2020	Berakhir	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	
23	YKH	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002921	Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	S-84/MK.6/2019	08 Februari 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.06/2019	14 Maret 2019	Rp 180.000.000,00	36	14 Maret 2019	13 Maret 2022		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
24	SRH	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002921	Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	S-94/MK.6/2019	13 Februari 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2019	11 Maret 2019	Rp 51.000.000,00	12	11 Maret 2019	10 Maret 2020	Berakhir (sdg proses diperpanjang)	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
25	MSL	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001839, HTBI	Ruko Bintaro Jaya Sektor IX Blok E No. 1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	S-112/MK.6/2019	19 Februari 2019	PRJ-02/MK.6/WKN.06/2019	12 Maret 2019	Rp 79.500.000,00	36	12 Maret 2019	11 Maret 2022		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
26	FPP	EKS BPPN		Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-113/MK.6/2019	19 Februari 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.08/2019	01 Maret 2019	Rp 13.000.000,00	60	01 Maret 2019	29 Februari 2024		-		aset diketahui pada saat dilakukan inventarisasi, dan selanjutnya akan dicatat pada CaLK
27	MIL	EKS BPPN		Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	S-287/MK.6/2019	24 April 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2019	01 Juli 2019	Rp 62.895.000,00	60	01 Juli 2019	30 Juni 2024		-		aset diketahui pada saat dilakukan inventarisasi, dan selanjutnya akan dicatat pada CaLK
28	KIS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002629 dan PRK-B002630	Desa Salamnunggal (dh. Desa Karangnunggal) Cibeber, Cianjur	S-345/MK.6/2019	15 Mei 2019	PRJ-04/MK.6/WKN.08/2019	22 Mei 2019	4.800.000,00	24	22 Mei 2019	21 Mei 2021		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
29	BJP	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000214	Jl. Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung	S-343/MK.6/2019	15 Mei 2019	PRJ-05/MK.6/WKN.08/2019	13 Juni 2019	5.000.000,00	12	13 Juni 2019	12 Juni 2020		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
30	AKU	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000215	Jl. Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung	S-353/MK.6/2019	20 Mei 2019	PRJ-06/MK.6/WKN.08/2019	13 Juni 2019	14.100.000,00	36	13 Juni 2019	12 Juni 2022		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
31	DYS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002412	Taman Permata Gadog Blok A6 No.3 Gadog, Cianjur	S-368/MK.6/2019	27 Mei 2019	PRJ-07/MK.6/WKN.08/2019	24 Juni 2019	15.000.000,00	24	24 Juni 2019	23 Juni 2021		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
32	IRP	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000212	Jl. Raya Gading Boulevard Blok F3A-3 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung	S-351/MK.6/2019	16 Mei 2019	PRJ-08/MK.6/WKN.08/2019	24 Juni 2019	6.600.000,00	12	24 Juni 2019	23 Juni 2020		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
33	MIL	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000114	Jl. MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat Psar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	S-344/MK.6/2019	15 Mei 2019	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2019	06 Agustus 2019	182.345.000,00	60	08 Juni 2019	08 Mei 2024		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
34	TMS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0013603	Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogar, Provinsi Jawa Barat	S-499/MK.6/2019	22 Juli 2019	PRJ-10/MK.6/WKN.08/2019	06 Agustus 2019	102.500.000,00	60	06 Agustus 2019	05 Agustus 2024		II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	
35	YTI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001617	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-550/MK.6/2019	12 Agustus 2019	PRJ-11/MK.6/WKN.08/2019	30 Agustus 2019	52.000.000,00	60	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
36	HBS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002625	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-551/MK.6/2019	12 Agustus 2019	PRJ-12/MK.6/WKN.08/2019	30 Agustus 2019	57.000.000,00	60	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
37	DAJ	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001811	Jalan Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	S-573/MK.6/2019	23 Agustus 2019	PRJ-14/MK.6/WKN.08/2019	10 September 2019	4.000.000,00	24	10 September 2019	09 September 2021		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
38	HBS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001616	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-545/MK.6/2019	12 Agustus 2019	PRJ-13/MK.6/WKN.08/2019	30 Agustus 2019	58.500.000,00	60	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
39	NWA	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002011	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	S-644/MK.6/2019	13 September 2019	PRJ-4/MK.6/WKN.14/2019	11 November 2019	16.600.000,00	12	11 November 2019	10 November 2020		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
40	DWS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRI-0000261	Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	KMK-233/MK.6/2019	09 September 2019	PRJ-1/MK.6/WKN.08/2020	05 Februari 2020	202.000.000,00	60	30 Oktober 2019	29 Oktober 2024		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
41	KUR	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001298	Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat	S-630/MK.6/2019	04 September 2019	PRJ-3/MK.6/WKN.14/2019	10 Oktober 2019	17.500.000,00	60	10 Oktober 2019	09 Oktober 2024		I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
42	ITI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002174	Villa Permata Bogor, Jl. Bangbarung Ujung No. 9, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat	KMK-184/MK.6/2019	30 Juli 2019	PRJ-15/MK.6/WKN.08/2019	18 September 2019	15.500.000,00	12	06 September 2019	05 September 2020		II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	KUADRAN		KET. KUADRAN
43	TPR	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002821	Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1 Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi (d.h Kec. Pacet), Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat	S-356/MK.6/2019	20 Mei 2019	PRJ-09/MK.6/WKN.08/2019	02 Juli 2019	17.500.000,00	60	02 Juli 2019	01 Juli 2024		IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
44	BBS	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001632	Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	S-651/MK.6/2019	18 September 2019			345.000.000,00	36			sudah bayar belum ada perjanjian sewa	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
45	SYC	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK- B001666	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	S-747/MK.6/2019	14 Oktober 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2019	16 Desember 2019	40.200.000,00	12	17 Desember 2019	16 Desember 2020	Perpanjangan	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
46	SKY	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0015810, HTBI	Jalan Kol. Sugiono No. 5 (dh. Jl. Damarwulan) RT/RW. 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	S-819/MK.6/2019	02 Desember 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2019	05 Desember 2019	271.000.000,00	60	05 Desember 2019	04 Desember 2024	Perpanjangan	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	
47	MIL	EKS BPPN		Jl. Medan - Binjai, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumut	S-927/MK.6/2019	23 Desember 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2020	13 Maret 2020	44.100.000,00	60	13 Maret 2020	12 Maret 2025		-		aset diketahui pada saat dilakukan inventarisasi, dan selanjutnya akan dicatat pada CaLK
48	MIL	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000120	Jl. Irian Barat No. 35/37, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumut	S-928/MK.6/2019	23 Desember 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2020	13 Maret 2020	36.000.000,00	60	13 Maret 2020	12 Maret 2025		II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan	
	JUMLAH								30.038.297.000,00							

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Sebelum Tahun 2015

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
1	PRK-B001647	JL. DIPONEGORO NO. 7	318	SHGB	2488/PETISAH TENGAH	PSP Kwl Mdn - No. KMK-73/KM.6/2009	11 Juni 2009	7.329.800.000
2	PRK-B002336	KOMP.PERMATA SEMERU BLOK B NO. 12 A		AJB	22/GMK/XII/1997	PSP Kwl SMg - KMK	11 Juni 2009	1.256.451.000
3	PRK-C000188	JALAN A.H NASOTION NO.16 KEL.YOSODADI METRO	100	SHM	166/Ys/YOSODADI	PSP KPKNL Metro - No. KMK-74/KM.6/2009	11 Juni 2009	66.063.000
4	PRK-0012344-B	Jl. Boulevard Diponegoro, Perumahan Lippo Kawaraci, Tangerang				PSP Ditjen Pajak dan DJKN (KPKNL serpong) - No. KMK-184/KM.6/2009	12 November 2009	22.865.781.009
5	PRK-B002810	Jalan Desa Kampung Puncak RT 001/ RW 01, Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat	-	SHGB	215CILOTO	PSP PPATK	17 Maret 2010	1.281.000.000
6	PRK-B002882	JL. MT. HARYONO, KEL. CAWANG, KEC. KRAMAT JATI	-	SHGB	95/CAWANG	PSP Kementerian Kesehatan - KMK No. KMK-151/KM.6/2010	27 Juli 2010	92.661.000.000
7	PRK-B002883	JL. MT. HARYONO, KEL. CAWANG, KEC. KRAMAT JATI	-	SHGB	365/CAWANG	PSP Kementerian Kesehatan - KMK No. KMK-151/KM.6/2010	27 Juli 2010	
8	PRK-B002426	Perum. Villa Collibah, Blok IV Kav. 209, Desa Cimacan, Kec. Pacet, Kab. Cianjur	514	SHM	298/DESA CIMACAN	PSP Wisma DJKN	08 September 2010	1.928.000.000
9	PRI-0000230	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO.382/XVI/3/MAPHAR, LUAS 88 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16A-1601, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	88	SHMSRS	382/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	348.000.000
10	PRI-0000231	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO.383/XVI/3/MAPHAR, LUAS 133 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16B-1602, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	133	SHMSRS	383/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	497.000.000
11	PRI-0000232	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 384/XVI/3/MAPHAR, LUAS 124 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16C-1603, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	124	SHMSRS	384/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	464.000.000
12	PRI-0000233	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 385/XVI/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16D-1605, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	SHMSRS	385/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	278.000.000

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
13	PRI-0000234	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 386/XVI/3/MAPHAR, LUAS 86 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16E-1606, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	86	SHMSRS	386/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	332.000.000
14	PRI-0000235	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 387/XVI/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16F-1607, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	SHMSRS	387/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	278.000.000
15	PRI-0000236	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 388/XVI/3/MAPHAR, LUAS 57 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16G-1608, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	57	SHMSRS	388/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	225.000.000
16	PRI-0000237	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 391/XVI/3/MAPHAR, LUAS 89 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 16 RUANG 16K-1611, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	89	SHMSRS	391/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	344.000.000
17	PRI-0000238	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 392/XVII/3/MAPHAR, LUAS 88 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17A-1701, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	88	SHMSRS	392/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	348.000.000

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
18	PRI-0000239	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 393/XVII/3/MAPHAR, LUAS 133 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17B-1702, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	133	SHMSRS	393/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	513.000.000
19	PRI-0000240	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 394/XVII/3/MAPHAR, LUAS 124 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17C-1703, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	124	SHMSRS	394/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	464.000.000
20	PRI-0000241	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 395/XVII/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17D-1705, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	SHMSRS	395/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	284.000.000
21	PRI-0000242	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 396/XVII/3/MAPHAR, LUAS 86 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17E-1706 , KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	86	SHMSRS	396/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	340.000.000
22	PRI-0000243	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 397/XVII/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17F-1707, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	SHMSRS	397/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	284.000.000

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
23	PRI-0000244	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 398/XVII/3/MAPHAR, LUAS 57 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17G-1708, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	57	SHMSRS	398/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	225.000.000
24	PRI-0000245	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 399/XVII/3/MAPHAR, LUAS 67 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17H-1709, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	67	SHMSRS	399/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	265.000.000
25	PRI-0000246	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 400/XVII/3/MAPHAR, LUAS 133 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17J-1710, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	133	SHMSRS	400/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	497.000.000
26	PRI-0000247	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 401/XVII/3/MAPHAR, LUAS 89 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 17 RUANG 17K-1711, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	89	SHMSRS	401/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	344.000.000
27	PRI-0000248	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 403/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 71 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 18 RUANG 18F-1802, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	71	SHMSRS	403/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	280.000.000

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
29	PRI-0000250	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 405/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 66 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 18 RUANG 18H-1805, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	66	SHMSRS	405/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	261.000.000
30	PRI-0000251	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 406/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 132 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 18 RUANG 18J-1806, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	132	SHMSRS	406/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	510.000.000
31	PRI-0000252	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO. 407/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 89 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL. HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 18 RUANG 18K-1807, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	89	SHMSRS	407/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012	14 November 2012	352.000.000
32	PRK-B001987	Sebidang tanah sertipikat SHGB No. 6069/PONDOK PINANG, luas 143 m2, berikut bangunan ruko di atasnya, terletak di JL. TB SIMATUPANG, PONDOK INDAH PLAZA BLOK D NO. 4, JAKARTA SELATAN	162	SHGB	6069/PONDOK PINANG	PSP Rumah Lelang DJKN	Tahun 2013	1.950.000.000
33	PRK-C000047	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 272/DUKUH PAKIS, LUAS 824M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JALAN MAYJEN SUNGKONO NO. 9A, KEL. DUKUH PAKIS, KEC,. KARANGPILANG, SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR	293	SHM	272/DUKUH PAKIS	PSP kepada MA untuk Pengadilan Agama	01 April 2013	8.298.480.000
TOTAL								**145.369.575.009**

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Tahun 2015

NO.	K/L	KODE ASET	LUAS		NILAI	DOKUMEN KEPEMILIKAN	KEPUTUSAN	
			TANAH	BANGUNAN			NOMOR	TANGGAL
1	KEMENKUMHAM	PRK-B002215	14.042	2.015	42.138.000.000	SHGB Nomor 338/Desa Pabaton (Kelurahan Tanah Sereal) tanggal 2 Mei 1983 atas nama Bank Indonesia	KMK 28/KM.6/2015	10-Feb-15
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-B002387	248	152	633.440.000	SHM No.1151/Gayamsari a.n. Santoso Rahardjo	KMK 119/KM.6/2015	11-Mar-15
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-0013057	1.093	-	2.738.100.000	SHM No.1370/Solok Sipin a.n. Tommy Tandri		
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-B002591	976	-	1.854.400.000	SHM No. 197 dan 198/Bendulmerisi a.n. Bambang Wahyudi		
5	KPK	Eks BPPN	6.531	16.903,22	404.424.862.000	SHGB No. 618 dan 541 a.n. Bank Papan Sejahtera Tbk	KMK 130/KM.6/2015	18-Mar-15
6	KEMENTERIAN KEUANGAN	Eks BPPN	1.016	3.078	68.920.431.000	SHGB No. 402/Pegangsaan tanggal 1 Mei 1996 atas nama PT Bank Danahutama	KMK-241/KM.6/2015	08-Jun-15
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	2 PRK			3.594.112.000	SHMSRS Menteng Dalam a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional	KMK-366/KM.6/2015	28-Jul-15
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	96 PRK			133.454.880.000	SHMSRS Menteng Dalam a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional	KMK-432/KM.6/2015	21-Agu-15
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	4 PRK			7.020.928.000	SHMSRS Menteng Dalam a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional	KMK 485/KM.6/2015	28-Sep-15
10	BPKS	PRK-B001861	221	220	2.712.621.000	SHMSRS Nomor 279/V/3 dan 278/V/3	KMK 490/KM.6/2015	01-Okt-15
JUMLAH					**667.491.774.000**			

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Tahun 2016

NO.	K/L	NOMOR ASET	LUAS		NILAI		DOKUMEN KEPEMILIKAN	KEPUTUSAN	
			TANAH	BANGUNAN				NOMOR	TANGGAL
1	KPU	PRK-B001624		1.862	Rp	20.757.576.000	SHMSRS Nomor 276/I-II-III-IV/3 Kel. Maphar tanggal 31 Januari 2000, luas 1.862 m2, atas nama PT Hayam Wuruk Sakti	KMK 66/KM.6/2016	14-Mar-16
2	BPOM	PRK-B002329	9.988		Rp	29.964.000.000	SHM Nomor 35/Kelapa Dua Wetan tanggal 16 Mei 1983, luas 2.725 m2, atas nama Nurhadi Marto Subroto; SHM Nomor 43/Kelapa Dua Wetan tanggal 29 Februari 1984, luas 3.725 m2, atas nama Doktorandus Meizal Zam SHM Nomor 76/Kelapa Dua Wetan tanggal 24 Juni 1988, luas 1.098 m2, atas nama Bambang Riadi Lelono Putro Nomor 124/Kelapa Dua Wetan tanggal 30 Desember 1989, luas 2.440 m2, atas nama Taufik Hidayat	KMK 102/KM.6/2016	20-Apr-16
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-B003025	207		Rp	825.930.000	SHM No. 1445/Purwantoro a.n. Doktorandus Agus Apriyono tanggal 8 April 1992	KMK 105/KM.6/2016	21-Apr-16
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-0013082	1.800	-	Rp	1.687.600.000	SHM No. 3292/Lorok Pakjo a.n. Siwen tanggal 24 Oktober 1985	KMK 106/KM.6/2016	21-Apr-16
		PRK-0013229	301	95	Rp	250.700.000	SHM No. 5324/Lorok Pakjo a.n. Ir. Marliza AR. tanggal 29 Maret 1996		
		PRK-0013274	559	98	Rp	252.300.000	SHGB No. 226/2 Ilir a.n. Hendra AM. tanggal 20 Juli 1987		
5	KEMENTERIAN AGAMA	PRK-B002878	1.036	-	Rp	27.343.000.000	SHGB No. 260/Palmeriam tanggal 5 Agustus 1992 seluas 300 M² dan SHGB No. 309/Palmeriam tanggal 7 Maret 1995 seluas 763 M², keduanya a.n. Perseroan Terbatas PT. BANK INDONESIA RAYA Tbk.	KMK 146/KM.6/2016	25-Mei-16
6	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-0016126	4.532	-	Rp	11.538.472.000	SHM No. 20016, No. 20017, No. 20018/Gunung Sari tanggal 6 Februari 1995 atas nama Suyud Subakti	KMK 250/KM.6/2016	16-Agu-16
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-B003052	2.261	906	Rp	2.381.460.000	SHM Nomor 173/Perwira a.n. Raymond Budiono Handoko tanggal 24 Februari 1987	KMK 333/KM.6/2016	10-Okt-2016
8	KEMENTERIAN PUPR	PRK-B002763, PRK-0019432, PRK-B003010, PRK-B003011, PRK-B003012, PRK-B003074	313.380	71.849	Rp	85.517.360.000		KMK 377/KM.6/2016	31-Okt-2016
JUMLAH			**317.912**	**74.617**	**Rp**	**180.518.398.000**			

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Tahun 2017

NO.	K/L ATAU PIHAK LAIN	NOMOR ASET	LUAS		NILAI pada KMK	Nilai pada LKTK 2017	DOKUMEN KEPEMILIKAN	KEPUTUSAN	
			TANAH	BANGUNAN				NOMOR	TANGGAL
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-B002339	500	400	Rp 2.791.660.000	Rp 1.335.960.000	• SHGB No.1409/ Tanjung Rejo luas 329m2 an. PT Unibank, berakhir pada 16-11-2006 • SHGB No.835/ Tanjung Rejo an. PT Unibank, berakhir pada 20-02-2011	KMK 22/KM.6/2017	09-Feb-17
		PRK-B002318	157	150	Rp 540.000.000	Rp 462.660.000	SHGB No.1159/ Tanjung Rejo an. Syaifullah, Sarjana Ekonomi, berakhir pada 12-01-2011		
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-C000186	925		Rp 907.000.000	Rp 915.750.000	Sertipikat Hak Milik Nomor 1/TL. (Sisa) a.n. Po Heng Tjong alias Lim Tjong Hay	KMK 273/KM.6/2017	06-Apr-17
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	Eks BPPN	857	735	Rp 16.557.900.000	Rp 1.600.409.549	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5603/Sunter a.n. PT. Bank Mashill Utama Tbk. tanggal 2 Agustus 1986	KMK 496/KM.6/2017	06-Jun-17
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-C000175	990	585	Rp 499.318.000	Rp 453.300.000	Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Murtajih a.n. Ganda Prayitno, tanggal 20 September 1993	KMK 775/KM.6/2017	08-Des-17
5	BNN	PRK-B002281	3.000	448	Rp 19.517.920.000,00	Rp 4.200.000.000,00	Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Sukomanunggal tanggal 15 April 1972 a.n. Chindra Hudaya Widarto	KMK 773/KM.6/2017	07-Des-17
6	KPPU	PRK-B001990	216	97	Rp 2.160.900.000,00	Rp 1.687.000.000,00	• Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/0890/402.5.12/97 tanggal 5 Februari 1997 • Ijin Mendirikan Bangunan No.188.45/593.91/402.5.09/1993 tanggal 12 April 1993	KMK 798/KM.6/2017	29-Des-17
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-C000154	399		Rp 428.700.000,00	Rp 428.700.000,00	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3358/Damai a.n. Kusni Salim, tanggal 10 November 2000	KMK 815/KM.6/2017	29-Des-17
JUMLAH			**7.044**	**2.415**	**43.403.398.000**	**11.083.779.549**			

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Tahun 2018

NO.	Pemohon	NILAI PENGELOLAAN BMN	PENETAPAN/PERSETUJUAN		Keterangan
			TANGGAL	TENTANG	
1	Kementerian Agama	Rp7.785.000.000	20-Agu-18	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Agama	PRK-B001683 SHGB No. 194/ Kebon Manggis a.n. PT Bank Intan SHGB No. 114/ Kebon Manggis a.n. PT Bank Intan
2	Kementerian Keuangan	Rp6.829.000.000	17-Des-18	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	Aset eks BPPN SHM No. 3348/ Semanan a.n. Mardiyono dan aset eks PT PPA PRK-B001825 SHM No. 3365/ Semanan a.n. Nona Hartati Kusmaja di Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok A Nomor 11, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat
JUMLAH		**Rp14.614.000.000**			

Tahun 2019

NO.	PEMOHON	NILAI PENGELOLAAN BMN	PENETAPAN/PERSETUJUAN			Keterangan
			NOMOR	TANGGAL	TENTANG	
1	Bawaslu	Rp1.815.693.164	KMK 59/KM.6/2019	19-Feb-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN kepada Bawaslu	Eks BPPN Jl. Kopi No.10 Jakarta Barat
2	Kementerian Keuangan	Rp284.460.000	KMK 92/KM.6/2019	22-Mar-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	PRK-B002226 Perum Jaka Permai, Jalan Kediri Nomor 1, RT 05/RW 06B, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat SHGB No. 1565/ Jakasampurna a.n. PT. Bank Aken Aset
3	Polri	Rp14.849.689.000	KMK 116/KM.6/2019	07-Mei-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kepolisian RI	PRK-B003057 8 bidang tanah seluas 37.452 m2 terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung, Provinsi Lampung
4	Kementerian Keuangan	Rp3.903.098.208	KMK 127/KM.6/2019	23-Mei-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN kepada Kementerian Keuangan	Eks BPPN Gudang Aspac Jl. Daan Mogot KM 19,8 Tangerang
5	Kementerian Keuangan	Rp1.790.000.000	KMK 181/KM.6/2019	25-Jul-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	PRK-0019118 Sebidang tanah 18.580 m2 terletak di Jln. Komplek Perumahan Universitas Tirtayasa, Kel. Banjar Agung, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten
6	Kementerian Keuangan	Rp223.800.000	KMK 316/KM.6/2019	23-Des-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	Eks PPA PRK-C000153 Jalan Mulawarman Bhakti, Kel. Damai, Balikpapan
7	Kementerian Keuangan	Rp921.920.000	KMK 315/KM.6/2019	23-Des-19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	Eks PPA PRK-B001831 Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok B Nomor 9 Kalideres, Jakarta Barat
JUMLAH		**Rp23.788.660.372**				

DAFTAR ASET PROPERTI YANG DIUSULKAN UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016

No.	Jenis Aset	Alamat Objek	Kota/Kabupaten	Luas berdasarkan		Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
				LT (m2)	LB (m2)							
1	TANAH	TANAH DI WILAYAH KARET BELAKANG - SETIABUDI JAKARTA	Jakarta	25.132	-	Girik dan SPH	Girik No. 529/Krt/SDA/72529/Krt/SDA/726463PERSIL NO. 59 LO/48/V/PT/60360/Kr/nds/71(PERSIL NO. 59 M)PERSIL NO. 59 KO/489/KR/60 Girik Agg.237/kr/ads/71Reg I/hal.638Agenda13/kr/ads/71258/KR./ADS./69, Girik 8A - MOCHAMAD SOHAREG I HAL 254 (45E SISA) - MUHIDINREG I HAL 674301/kr/ads/7145 D - ROCHGAYA 60 C (JATIRAH)60REG I / HAL 635 REG III/U/HAL 33045 C - NANANG KARDJA95 - SUDIJAH	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002968, PRK-B002969, PRK-B002970	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
2	TANAH	JL. MUARA BARU, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA	JAKARTA UTARA	56.045	-	SHM 448 s.d. 456/Penjaringan, SHM 465 s.d. 469/Penjaringan	Sebagian aset pada kuadran IV hanya dilengkapi dokumen berupa AJB tanpa dok kepemilikan	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002884 s.d. PRK-B002893, PRK-B002974 s.d. PRK-B002977,	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
				8.400		Verponding 114/116 , 115/102	-	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003065, PRK-B003072	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
				30.280		-	Dok. Peralihan AJB No. 52-60	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003066 s.d. PRK-B003071, PRK-B003073	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
3	TANAH	TANAH DI JALAN DESA JAMPANG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR	BOGOR	578.548	-	-	-	-	Laku Lelang RL No : 1577/32/2018 tanggal 9 November 2018		-	
4	TANAH	TANAH DI DESA KATULAMPA, KEC. BOGOR TIMUR	BOGOR	214.305	-	-	Dokumen berupa Covernote NO. 142/Not/Jkt/XII/1998	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002635	III	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan
5	TANAH	Desa Pasir Ampu, Desa Koper & Desa Patra Sana, Kecamatan Kresek, Tangerang	TANGERANG	101.085	-	-	SPH No.1-74	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002760	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
6	TANAH	TANAH DI DESA KOPER, KAB. TANGERANG	TANGERANG	101.220	-	-	PPJB No. 11	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003181	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
7	TANAH	TANAH DI DESA PATRASANA, KAB. TANGERANG	TANGERANG	122.935	-	-	PPJB No. 13	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003186	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
8	TANAH	TANAH DI DESA PASIR AMPU, DESA KOP DAN PATRA SANA, KEC.KRESEK, TANGERANG	TANGERANG	200.885	-	-	PPJB No. 16	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003188	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
9	TANAH	DESA PS AMPO, KOPER, TANGERANG	TANGERANG	201.625	-	-	PPJB No. 15	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002686	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
10	Tanah	TANAH DI DESA KOTABUMI - KOTAJAYA	TANGERANG	174.461	-	SHGB No. 1/Sukabumi	Dok. Kepemilikan Copy, tanpa Dok Peralihan	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002664	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
11	TANAH	TANAH TERLETAK DI JALAN KH. NOER ALI (D/H KALIMALANG RAYA) DESA BINTARA JAYA DAN JAKA SAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT	BEKASI	200.147	-	SHGB No. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA	SHGB (6 sertifikat telah berakhir masa berlakunya, dan 6 sertifikat akan berakhir pada tanggal 24 September 2024 Dokumen peralihan berupa AJB dari PT Albaraya kepada BPPN	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRI-0000263	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
12	TANAH	TANAH DI DUSUN ANJASMORO DESA JARAK KEC.WONOSALAM, JOMBANG, JAWA TIMUR	JOMBANG	187.825	-	SHM NO. 3, 9, 12, 180, 188, 189, 196-201, 215	Dok. Peralihan AJB	Kosong	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002626	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
13	TANAH	TANAH DI DESA KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.	BANDAR LAMPUNG	126.471	-	SHM No. 8979, 9557, 9558, 9559, 9562, 9610/Kedamaian, 19, 20, 99, 111, 118, DAN 198/Campang Raya	Dok. Peralihan AJB	Kosong, sebagian ditanami warga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002771	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
14	TANAH	TANAH DI JL. RE. MARTADINATA KEL. SUKAMAJU KEC. TELUK BETUNG BARAT BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	124.283	-	-	AJB No. 7/XII/AJB/SBB/BB/1988	Kosong, sebagian ditanami warga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003055	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
15	TANAH	TANAH DI SUKA MAJU,TELUK BETUNG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	360.126	-	SHGB No. 27/Sukamaju	Dok. Kepemilikan Copy, tanpa Dok Peralihan	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003176	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
16	TANAH	TANAH DI DESA SUKARAJA NUBAN, KEC. SUKADANA, KAB. LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	136.770	-				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
17	TANAH	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.247, LUAS 154.090 M2, TERLETAK DI PERUMAHAN SASANA PATRA JL. TEGAL BINANGUN KEL. PLAJU DARAT KEC. SEBERANG ULU II, PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN.	PALEMBANG	154.090	-	SHGB NO. 247/PLAJU DARAT (LADANG PLAJU)	Dok. Peralihan AJB	Kosong	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002682	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

DAFTAR ASET PROPERTI YANG DIUSULKAN UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016

No.	Jenis Aset	Alamat Objek	Kota/Kabupaten	Luas berdasarkan		Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
				LT (m2)	LB (m2)							
18	TANAH	PERUMAHAN TAMAN SASANA PATRA JL. TEGAL BINANGUN KEL. PLAJU DARAT SEBERANG ULU II	PALEMBANG	147.571	-	SHGB No. 372, 371/PLAJU DARAT	Tidak ada dok. Peralihan	Kosong	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002683	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
19	TANAH	TANAH DI KEL. GUNUNG SARIK KEC. KURANJI, PADANG	PADANG	138.750	-				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
20	GEDUNG	TANAH BERIKUT BANGUNAN DI JL. S. PARMAN, DESA TG. PIAYU, KEC. SEI BEDUK (D.H. KEC. SUNGAI BEDUK), KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU.	BATAM	59.310	71.849				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
21	TANAH	TANAH DI KEC. PANTAI CERMIN	DELI SERDANG	360.296	-	-	592.23/60/1988 (SURAT GANTI RUGI)	sebagian digunakan oleh TNI, sebagian oleh warga	Diusulkan PSP untuk TNI dan Polri	PRK-B003004	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
22	Tanah	JL. SANRANGAN DAYA BIRINGKANAYA RT/RW 01/01, KEL DAYA, KEC. BIRINGKANAYA, KOTA MAKASAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.	Makassar	2.009	-	SHM 375/DAYA	Dok. Peralihan AJB	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-0016101	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
23	Tanah	JALAN DUSUN MANGEMPANG, DESA MONCONGLOE, KEC MANDAI, KAB MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN.	Maros	8.881	-	SHM 701/MONCONGLOE	Dok. Peralihan AJB	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-0016168	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
24	Tanah	DESA LEPO-LEPO, KEC. BARUGA, KENDARI	Kendari	4.648	-	SHM 876 / KEL. LEPO-LEPO	Dok. Peralihan AJB	lokasi tidak jelas	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002666	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
25	Tanah	Jl. URIP SUMOHARJO, KEL. PANAIKANG, KEC. PANAKKUKANG, KOTA MAKASAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.	Makassar	4.263		SHM No. 53,808,809,811,2631, 3038 dan 3143/PANAIKANG	Dok. Peralihan AJB	sebagian dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002947,PRK-B002949 s.d. PRK-B002954	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
26	Tanah	Jl Penangkaran Buaya, Desa Paccelekang, Kec Bontomarannu, Kab Gowa	Makassar	20.000	-				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
27	Tanah	Jalan Kumala, Komplek Malombasang Country, Kel Jongaya, Kec. Tamalate	Makassar	1.127	-	SHM No. 2093, 2091/JONGAYA	Dok. Peralihan AJB	digunakan sebagai fasos/fasum perumahan	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-C000219	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

Penyediaan Rumah ASN/TNI/POLRI dan MBR

No.	Alamat	Kota/Kab.	Luas Tanah (m2)	Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
1	Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat	Kota Bogor	33.500	SHGB No. 36	SHGB 36/Empang berlaku hingga 24/09/2025 Dokumen peralihan berupa AJB ke BPPN Nomor 47/2004 tanggal 31 Maret 2004	Sebagian dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	Eks BPPN	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
2	Jl. Anjasmoro, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	Kota Semarang	8.348	SHGB No. 546	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	Eks BPPN	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
3	Lingkungan III, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur	Kota Malang	5.680	SHM No. 1250	SHM Nomor 1250 Ada Surat Kuasa ke Bank BCA untuk menjual aset (1987), dan ada fotokopi SHM	-	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	Eks BPPN	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
4	12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA, LUAS KESELURUHAN 200.147 m2, TERLETAK DI JALAN KH. NOER ALI (D/H KALIMALANG RAYA) DESA BINTARA JAYA DAN JAKA SAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT	Kota Bekasi	178.564	SHGB No. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA	SHGB (6 sertifikat telah berakhir masa berlakunya, dan 6 sertifikat akan berakhir pada tanggal 24 September 2024 Dokumen peralihan berupa AJB dari PT Albaraya kepada BPPN	Sebagian dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRI-0000263	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
5	4 (EMPAT) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.20, 21, 22, DAN 23, LUAS KESELURUHAN 10.130M2, TERLETAK DI JALAN H. SAIDIN, DESA BAMBU APUS, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG, PROVINSI BANTEN.	Kab. Tangerang	10.130	SHM No. 20, 21, 22, 23/BAMBU APUS	SHM No. 20, 21, 22, 23/BAMBU APUS a.n. pihak ketiga (debitur). Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual No 98,100,102,104 tanggal 28 September 1998.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-0011434	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
6	JL. DESA SUKATANI RT/RW 02/03, SUKATANI - KALIANDA	Kota Lampung	42.600	SHM No. 1/DESA SUMUR KUMBANG	SHM Nomor 1/Desa Sumur Kumbang, masih a.n. pihak ketiga (debitur) Dokumen peralihan berupa Akta Kuasa Menjual Nomor 38 tanggal 8 Maret 1994 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 8 Maret 1994	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-0013103	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
7	Jl. Simpang Dukuh / Genteng Bandar I dan II RT/RW IX Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya	Kota Surabaya	7.450	SHM No. 50/GENTENG	SHM 50/GENTENG a.n. pihak ketiga	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri dan terdapat permohonan PSP dari Kementerian Perhubungan	PRK-0014411	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
8	Jalan Raya Ciseeng-Parung, desa bojong sempu, Kec. Parung, Kab. Bogor	Kab. Bogor	7.015	SHM No. 67/DS.BOJONG SEMPU	Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) dari debitur kepada bank	Dimanfaatkan pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-0017160	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
9	12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SERTIPIKAT SHM NO. 8979, 9557, 9558, 9559, 9562, 9610/KEDAMAIAN, 19, 20, 99, 111, 118, DAN 198/CAMPANG RAYA, LUAS KESELURUHAN 126.471M2, TERLETAK DI DESA KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.	Kota Bandar Lampung	126.471	SHM No. 8979, 9557, 9558, 9559, 9562, 9610/Kedamaian, 19, 20, 99, 111, 118, DAN 198/Campang Raya	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk PMN ke BUMN	PRK-B002771	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
10	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1222/DAMAI, LUAS 14.930M2, TERLETAK DI JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. DAMAI, KEC. BALIKPAPAN TIMUR, KODYA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Kota Balikpapan	14.930	SHM No. 1222/DAMAI	Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) Nomor 69 tanggal 12 November 1993	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-B002838	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
11	7 (TUJUH) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 613, 614, 615, 616, 617, 618, DAN 619, LUAS KESELURUHAN 63.778 M2, TERLETAK DESA KOTO LUAR, KEC. PAUH PADANG, PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT.	Kota Padang	63.778	SHM No. 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619	AJB No. 19/7/P/JB/1995, No. 17/7/P/JB/95, 13/7/P/JB/95, 14/7/P/JB/95, 16/7/P/JB/95, 15/7/P/JB/95, 18/7/P/JB/95 tanggal 17 Juli 1995 (Notaris Hajjah Deetjee Farida Sjanas SH). Surat Pernyataan dan Kuasa Deddy Djunarto pada bulan Juli 1999.	Kosong	Diusulkan untuk PMN ke BUMN	PRK-B002928	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
12	JL.IR.SUTAMI LB. 36 KT E,F, KT/5,6,7,8 CAMPANG RAYA BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	22.360	SHM No. 85/CAMPANG RAYA	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Dimanfaatkan pihak ketiga	Diusulkan untuk PMN ke BUMN	PRK-B002964	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
13	Jl. Kalijudan IX Kel. Kalijudan, Kec. Sukolilo, Surabaya - Jawa Timur	Kota Surabaya	4.220	SHM No. 129, 126/KALIJUDAN	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-B003014	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
14	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.1181/KARANG JOANG, LUAS 19.978M2, TERLETAK DI JALAN SOEKARNO - HATTA KM 11, KEL KARANG JOANG, KEC BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Kota Balikpapan	19.978	SHM No. 1181/KARANG JOANG	Dokumen peralihan berupa Risalah Lelang Nomor 175/1997 - 1998	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-C000157	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
15	Jalan Raya Cilegon-Serang km. 3 RT 01/RW 002, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten	Kota Cilegon	31.800	SHGB No. 25/SUKMAJAYA	SHGB 25/SUKMAJAYA, masa berlaku berakhir pada 12/12/2015	Kosong	Terdapat permohonan pemanfaatan dalam bentuk sewa	PRK-0013790	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
16	Jalan Krukut-Grogol, Kel. Krukut, Kec. Sawangan, Kab. Bogor	Kab. Bogor	27.867	Girik .80 (LETTER C), 1770, 969, 975, 1089/1771, 676	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-B002621	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
Total			**604.691**							

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eks HTBI	Jl. Gereja Ayam No. 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 5 lantai	SHGB No. 2333/Pasar Baru	400	1.227	2.334.100.000
2	Eks HTBI	Jl. Cikini Raya No. 91 A-B, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 4 lantai	SHGB No. 425/Cikini	140	936	4.245.400.000
3	Eks HTBI	Jl. Cikini Raya No. 91 C-D, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat		SHGB No. 411/Cikini	195		
4	Eks HTBI	Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B/105, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat		SHGB No. 1515/Petojo Selatan	66	247	4.968.507.000
5	Eks HTBI	Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B No. 04, 05, 06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	3 unit Ruko (4 lantai)	SHGB No. 1556/Petojo Selatan	307	1.118	
6	Eks HTBI	Jl. Kyai Caringin Blok A No. 6, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Jl. Tarakan)	Ruko 3 lantai	SHGB No. 1149/Cideng	73	221	
7	Eks HTBI	Komplek Pertokoan Plaza Glodok Blok A-15 dan A-17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Mangga Besar, Jakarta Barat	Rukan 4 lantai	SHGB No. 235/Mangga Besar	50	308	2.006.180.000
8	Eks HTBI			SHGB No. 237/Mangga Besar	50		
9	Eks HTBI	Komp Pertokoan Taman Kedoya Permai Blok A No. 3-A dan 3-B, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Ruko 3 lantai	SHGB No. 5183/Kedoya	74	481	961.075.000
10	Eks HTBI			SHGB No. 5184/Kedoya	90		
11	Eks HTBI	Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 1 Blok UA Persil No. 01, Jl. Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rukan 2 lantai	SHGB No. 3079/Pondok Pinang	110	199	2.057.160.000
12	Eks HTBI	Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 2 Blok BA Persil No. 11, Jl. Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rukan 2 lantai	SHGB No. 5264/Pondok Pinang	110	196	442.800.000
13	Eks HTBI	Jl. Panglima Polim Raya No. 20 Blok B. III persil No. 152, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rukan 3 lantai	SHGB No. 873/Kramat Pela	491	656,25	4.333.010.000
14	Eks HTBI	Komplek Pertokoan Bintaro Blok D-50, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang	Ruko	SHGB No. 1839/Pondok Karya	75	150	448.531.000
15	Eks HTBI	Komplek Ruko THD Blok A No. 16 dan No. 17, Jl. Pekojan, Purwadinatan, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah	Ruko	SHGB No. 499/Purwodinatan	104	692	716.084.000
16	Eks HTBI			SHGB No. 500/Purwodinatan	138		
17	Eks HTBI	Komplek Ruko THD Blok B-17 Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah	Ruko	SHGB No. 516/Purwodinatan	130	372	630.000.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Eks HTBI	Jl. Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara	Gedung Kantor	SHGB No. 741/Aur, Medan	241	723	1.001.816.000
19	Eks HTBI	Jl. Kol. Sugiono, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara	Gedung Kantor	SHGB No. 293/Aur, Medan	87	787,50	1.962.550.000
20	Eks HTBI			SHGB No. 294/Aur, Medan	87		
21	Eks HTBI			SHGB No. 295/Aur, Medan	87		
22	Eks HTBI	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara	Kantor Ruko	SHGB No. 2428/Petisah Tengah	81	230	465.750.000
23	Eks HTBI	Jl. Slamet Riyadi I No. 7, RT.05/RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur	Lahan parkir	SHGB No. 140/ Kbn. Manggis	574	-	8.295.000.000
24	Eks HTBI	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C No. 19, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	Gedung Kantor	SHGB No. 90/Karet	4.000	9.359	45.000.000.000
25	PRI-0000009	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 17 NO. 17.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	649/XIV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
26	PRI-0000013	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 18 NO. 18.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	657/XV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
27	PRI-0000014	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 18 NO. 18.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	653/XV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
28	PRI-0000019	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	665/XVI/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
29	PRI-0000020	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 19 NO. 19.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	661/XVI/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
30	PRI-0000023	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 20 NO. 20.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	673/XVII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
31	PRI-0000024	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 20 NO. 20.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	669/XVII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
32	PRI-0000027	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 21 NO. 21.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	681/XVIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
33	PRI-0000028	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 21 NO. 21.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	677/XVIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
34	PRI-0000031	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 22 NO. 22.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	689/XIX/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	PRI-0000032	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 22 NO. 22.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	685/XIX/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
36	PRI-0000035	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 23 NO. 23.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	697/XX/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
37	PRI-0000039	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 25 NO. 25.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	701/XXI/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
38	PRI-0000043	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 26 NO. 26.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	713/XXII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
39	PRI-0000049	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 27 NO. 27.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	721/XXIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
40	PRI-0000050	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 27 NO. 27.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	722/XXIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
41	PRI-0000054	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 28 NO. 28.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	729/XXIV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
42	PRI-0000056	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 28 NO. 28.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	730/XXIV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
43	PRI-0000061	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 29 NO. 29.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	737/XXV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
44	PRI-0000073	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 11 NO. 11.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	867/X/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
45	PRI-0000074	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 12 NO. 12.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	875/XI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
46	PRI-0000075	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 15 NO. 15.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	883/XII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
47	PRI-0000076	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 17 NO. 17.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	899/XIV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
48	PRI-0000077	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 18 NO. 18.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	907/XV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
49	PRI-0000078	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	915/XVI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
50	PRI-0000079	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 20 NO. 20.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	923/XVII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
51	PRI-0000080	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 21 NO. 21.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	931/XVIII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	PRI-0000081	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 6 NO. 06.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	825/V/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
53	PRI-0000093	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN- BLOK B LANTAI 17 NO. 17.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	898/XIV/B/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
54	PRI-0000098	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 22 NO. 22.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	939/XIX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
55	PRI-0000099	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 23 NO. 23.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	947/XX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
56	PRI-0000100	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 25 NO. 25.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	955/XXI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
57	PRI-0000101	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 2 NO. 02.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	801/II/B/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500
58	PRI-0000102	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 2 NO. 02.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	802/II/B	88	88	323.712.500
59	PRI-0000103	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 3 NO. 03.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	809/III/B/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500
60	PRI-0000104	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 3 NO. 03.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	810/III/B/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500
61	PRI-0000105	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 5 NO. 05.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	821/IV/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
62	PRI-0000106	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 6 NO. 06.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	829/V/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
63	PRI-0000107	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 7 NO. 07.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	834/VI/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
64	PRI-0000108	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	842/VII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
65	PRI-0000109	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 9 NO. 09.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	850/VIII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
66	PRI-0000121	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 5 NO. 05.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	819/IV/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000
67	PRI-0000122	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	843/VII/B	109	109	397.691.000
68	PRI-0000123	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 9 NO. 09.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	851/VIII/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
69	PRI-0000124	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 10 NO. 10.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	859/IX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
70	PRI-0000125	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 26 NO. 26.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	963/XXII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
71	PRI-0000126	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 27 NO. 27.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	971/XXIII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
72	PRI-0000127	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 28 NO. 28.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	979/XXIV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
73	PRI-0000130	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 3 NO. 03.02 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	808/III/B/MENTENG DALAM	112	112	409.603.000
74	PRI-0000143	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 3 NO. 03.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	557/III/A/MENTENG DALAM	112	112	410.218.000
75	PRI-0000144	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 5 NO. 05.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1069/IV/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
76	PRI-0000145	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 9 NO. 09.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1101/VIII/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
77	PRI-0000146	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 10 NO. 10.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1109/IX/C/ MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
78	PRI-0000147	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 12 NO. 12.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1125/XI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
79	PRI-0000148	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 15 NO. 15.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1133/XII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
80	PRI-0000149	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 16 NO. 16.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1141/XIII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
81	PRI-0000150	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 17 NO. 17.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1149/XIV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
82	PRI-0000151	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 20 NO. 20.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1173/XVII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
83	PRI-0000152	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 21 NO. 21.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1181/XVIII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
84	PRI-0000153	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 22 NO. 22.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1189/XIX/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
85	PRI-0000154	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 23 NO. 23.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1197/XX/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	PRI-0000155	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 27 NO. 27.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1221/XXIII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
87	PRI-0000156	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 28 NO. 28.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1229/XXIV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
88	PRI-0000157	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 29 NO. 29.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1237/XXV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
89	PRI-0000158	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 30 NO. 30.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1245/XXVI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
90	PRI-0000159	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 1 NO. 01.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	545/I/A/MENTENG DALAM	118	118	410.218.000
91	PRI-0000161	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 5 NO. 05.02 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	816/IV/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000
92	PRI-0000162	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 7 NO. 07.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	833/VI/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
93	PRI-0000163	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	841/VII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
94	PRI-0000164	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	844/VII/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000
95	PRI-0000165	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	845/VII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
96	PRI-0000169	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 17 NO. 17.02 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	896/XIV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
97	PRI-0000170	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 18 NO. 18.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	908/XV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
98	PRI-0000175	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 22 NO. 22.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	940/XIX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
99	PRI-0000187	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 29 NO. 29.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	988/XXV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
100	PRI-0000189	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 30 NO. 30.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	996//XXVI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
101	PRI-0000192	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 2 NO. 02.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1049/II/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500
102	PRI-0000193	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 2 NO. 02.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1052/II/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	PRI-0000194	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 3 NO. 03.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1057/III/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500
104	PRI-0000195	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 3 NO. 03.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1060/III/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500
105	PRI-0000196	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 5 NO. 05.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1066/IV/C/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000
106	PRI-0000197	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 5 NO. 05.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1068/IV/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
107	PRI-0000198	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 6 NO. 06.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1073/V/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
108	PRI-0000199	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 6 NO. 06.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1076/V/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
109	PRI-0000200	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 6 NO. 06.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1077/V/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
110	PRI-0000201	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO. 07.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1078/VI/C/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000
111	PRI-0000202	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO. 07.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1081/VI/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
112	PRI-0000203	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO. 07.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1084/VI/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
113	PRI-0000204	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO. 07.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1085/VI/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
114	PRI-0000205	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 8 NO. 08.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1089/VII/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
115	PRI-0000206	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 9 NO. 09.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1094/VIII/C/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000
116	PRI-0000207	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 9 NO. 09.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1097/VIII/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000
117	PRI-0000208	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 10 NO. 10.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1105/IX/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
118	PRI-0000209	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 11 NO. 11.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1116/X/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
119	PRI-0000210	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 12 NO. 12.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1121/XI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
120	PRI-0000211	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 12 NO. 12.08, MENTENG DALAM - TEBET, JAKARTA SELATAN	Apartemen	1124/XI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
121	PRI-0000212	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 15 NO. 15.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1132/XII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
122	PRI-0000213	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 16 NO. 16.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1134/XIII/C/ MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
123	PRI-0000214	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 17 NO. 17.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1148/XIV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
124	PRI-0000215	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 18 NO. 18.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1150/XV/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
125	PRI-0000216	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 18 NO. 18.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1153/XV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500
126	PRI-0000217	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 19 NO. 19.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1158/XVI/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
127	PRI-0000218	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1162/XVI/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
128	PRI-0000219	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 20 NO. 20.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1166/XVII/C	110	110	400.626.500
129	PRI-0000220	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 21 NO. 21.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1174/XVIII/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500
130	PRI-D000001	APARTEMEN PURI CASABLANCA Blok B LT.9 NO.09.03, JL. CASABLANCA KAV.7, JAKARTA SELATAN	Apartemen	849 / VIII / B	92	92	328.710.000
131	PRK-B001358	Apartemen Taman Anggrek, Jl. Letjen S. Parman, Blok Laelia, Lantai 40, No.40J, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 361/XXXVIII/LAELIA	88,00	88,00	1.108.300.000
132	PRK-B001359	Apartemen Taman Anggrek, Jl. Letjen S. Parman, Blok Laelia Lantai 40 No. 40K, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 362/XXXVIII/LAELIA	88,00	88,00	1.108.300.000
133	PRI-0000001	Apartemen Tropik, Jl. S. Parman Blok I No. 2703 Lantai 27, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 160/XXIV-XXV/I	519	519	773.410.000
134	PRK-B001360	Apartemen Tropik, Jl. Let. Jend. S. Parman Blok I No. 2607, Lantai. 26, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 157/XXIII/I	147	147	1.108.300.000
135	PRK-C000140	Kondominium Menara Kelapa Gading No.14.05, Blok B(2), Jl. Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 143/XIII/II	141	141	1.112.800.000
136	PRK-C000141	Kondominium Menara Kelapa Gading No.10.02, Blok A(1), Jl. Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara.	Apartemen	SHMSRS 50/X/I	141	141	1.112.800.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
137	PRK-C000142	Kondominium Menara Kelapa Gading No.2.03, Blok C(3), Jl.Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 147/II/III	133	133	948.910.000
138	PRK-C000143	Kondominium Menara Kelapa Gading No. 3.01-B, Blok E(5), Jl.Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 286/III/V	77	77	548.036.000
139	PRK-C000144	Kondominium Menara Kelapa Gading No. 4.06-A, Blok E(5), Jl. Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 297/IV/V	77	77	545.680.000
140	PRK-C000145	Kondominium Menara Kelapa Gading No. 7.01-B, Blok E(5), Jl.Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 314/VII/V	77	77	545.680.000
141	PRK-B001972	Jl. Raya Gading Indah No. 8 Kav A2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko	SHM 396/Kelapa Gading Timur	64	254	1.920.000.000
142	PRK-B001973	Jl. Raya Gading Indah No. 8 Kav A3, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko	SHM 395/Kelapa Gading Timur	64	254	1.920.000.000
143	PRK-B001669	Jl. Kali Besar Timur No. 27, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Gedung	SHGB 1904/PINANGSIA	1.835	2.044	3.098.000.000
144	PRK-B001747	Jl.Kali Besar Timur No.23,24,Dan 25 – Pinangsia, Jakarta Barat	Gedung	PPJB (TGL.18/12/1997) DIDAFTARKAN NO. 1093/W/1998 (DUPLO) TGL. 03/04/1998	3.475		11.235.141.871
145	PRK-B001673	Jalan Kebayoran Lama No.174 A2, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	SHGB 236/CIPULIR	308	506	565.421.178
146	PRK-B001696	Jalan Raya Kebayoran Lama No.47 A RT 002 RW 01, Kel. Cipulir, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	SHGB 226/CIPULIR	318	519	223.791.086
147	PRK-B001697	Jalan Kebayoran Lama No.37, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	SHM 1052, 1051/GROGOL SELATAN	934	869	837.000.000
148	PRK-B001856	Komplek Glodok Plaza Blok F No. 91, 92, 93, 136, 137 Dan 138, Jl. Pinangsia, Jakarta Barat	Ruko	PPJB 31	1.200		1.574.400.000
149	PRK-B001932	Jl. K.H. Fachrudin Kav. 36 Blok F No. 1-2, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 464, 465/KAMPUNG BALI	126	384	1.607.000.000
150	PRK-B001961	Jalan Panglima Polim Raya No. 57, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB 806/MELAWAI	356	714	420.435.909
151	PRI-0000254	Sebidang Tanah Sertipikat SHGB No. 5115/Kalideres, Luas 10.405 M2, Terletak Di JL. Peta Selatan RT/RW 08/01, GANG DARUL SALAM (Jl. Benda Raya) - Kalideres, Jakarta Barat	Tanah	SHGB 5115/KALI DERES	10.405		1.504.440.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
152	PRK-B002860	Jl.Kebon Besar I No.27 RT 06/06, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	Tanah	SHGB 76, 80, 100/GANDARIA SELATAN	3.198		2.296.000.000
153	PRK-B002990	Jl Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Tanah	SHM 129/RAWABUAYA	6.410		1.941.000.000
154	PRK-B002991	Jl Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Tanah	SHM 130/RAWABUAYA	4.180		219.000.000
155	PRK-B001752	Jl Panglima Polim Raya No. 55, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Gedung	SHGB 1155, 1154/MELAWAI	236	118	1.568.733.157
156	PRI-0000044	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 26 No. 26.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 709/XXII/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
157	PRI-0000055	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 28 No. 28.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 725/XXIV/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
158	PRI-0000062	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 29 No. 29.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 733/XXV/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
159	PRI-0000069	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 30 No. 30.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 745/XXVI/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
160	PRI-0000070	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 30 No. 30.07 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 746/XXVI/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
161	PRI-0000071	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 31 No. 31.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 753/XXVII/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
162	PRI-0000072	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 31 No. 31.07 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 754/XXVII/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
163	PRI-0000138	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 777/XXX/A/Menteng Dalam	109	109	400.626.500

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
164	PRI-0000139	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.07 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 778/XXX/A/Menteng Dalam	109	109	400.626.500
165	PRI-0000140	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 19 No. 19.02 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 662/XVI/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
166	PRI-0000160	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 773/XXX/A/Menteng Dalam	109	109	400.626.500
167	PRI-0000120	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 35 No. 35.05 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 1026/XXX/B/Menteng Dalam	93	93	340.543.500
168	PRI-0000128	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 29 No. 29.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 987/XXV/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
169	PRI-0000129	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 30 No. 30.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 995/XXVI/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
170	PRI-0000172	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 21 No. 21.02 Menteng Dalam, Te17bet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 928/XVIII/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
171	PRI-0000173	Jln. C18asablanca Kav. 7, Kuninga19n - Blok B Lantai 22 No. 22.02 20Menteng Dalam, Tebet, Jakart2a Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 936/XIX/B/Menteng Dalam	109	109	400.626.500
172	PRI-0000177	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 23 No. 23.02 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 944/XX/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500
173	PRI-0000191	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 35 No. 35.03 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 1025/XXX/B/Menteng Dalam	93	93	340.543.500
174	PRK-B001529	Apartemen Hayam Wuruk Lantai 23 No. 2308, Jakarta Barat	Apartemen	PPJB 20	60	60	71.800.000
175	PRK-B001600	Apartemen Hayam Wuruk LT. 11 B2-1107 & LT. 16 A4-1610, JL. Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat	Apartemen	NA (SURAT PENYERAHAN HAK)	-	-	1.639.000.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
176	PRK-B002301	Apartemen Taman Anggrek Tower I 01 33B,34C,35D,36C,37D	Apartemen	NA (SURAT PERSETUJUAN TGL. 12/02/1999, LUAS 85.48 M2)	-	-	3.600.175.143
177	PRK-B001534	Apartemen Puri Kemayoran Tower I, Unit No. 25 I	Apartemen	NA (PPJB SATUAN RUMAH SUSUN PURI KEMAYORAN APARTEMEN)	-	66	508.200.000
178	PRK-B001539	Apartemen Taman Rasuna Tower 14 lantai 14 no. H, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2682/XIII/14	74,00	74,00	197.000.000
179	PRK-B001547	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 19 no. H, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2968/XVIII/15	74,00	74,00	195.885.572
180	PRK-B001549	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 21 no. D, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2980/XX/15	74,00	74,00	211.885.572
181	PRK-B001551	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 22 no. H, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2992/XXI/15	74,00	74,00	199.223.347
182	PRK-B001557	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 26 no. D, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 3020/XXV/15	73,82	73,82	212.461.539
183	PRK-B001566	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai dasar bawah no. G, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2837/B1/15	89,65	89,65	211.931.056
184	PRK-B001583	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 27 no. B, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 1832/XXVI/9	73,82	73,82	189.223.347
185	PRK-B001586	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 28 no. C, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 1841/XXVII/9/MENTENG ATAS	73,82	73,82	190.885.571
186	PRK-B001590	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 29 no. B, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 1848/XXVIII/9/MENTENG ATAS	73,82	73,82	190.315.587
187	PRK-B001530	Apartemen Taman Kemang Jaya, Tower A Lantai 8, Unit 1085, Kelurahan Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 64/VIII/A/BANGKA	94	94	325.407.466
188	PRK-B001531	Apartemen Taman Kemang Jaya Tower A lt. 9 unit 1097, Jl. Kemang Selatan 8, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 74/IX/A/BANGKA	169,70	169,70	563.261.460
189	PRK-B001532	Apartemen Taman Kemang Jaya Tower A lt. 10 unit 1101, Jl. Kemang Selatan 8, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 76/X/A/BANGKA	192,70	192,70	636.343.640

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
190	PRK-B001314	Apartemen Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso no. 89 blok C lt. 4 no. 4.05, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.	Apartemen	SHMSRS 64/IV/A/SUNTER JAYA	124	124	41.780.000
191	PRK-B001319	Apartemen Kompleks Mitra Bahari, Jl. Pakin no. 1, unit A lantai V no. 14, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Apartemen	Covernote 214/SMR/LG/XII/98	-	69	82.300.000
192	PRK-B001760	Jalan Kebayoran Lama No. 16B, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	Covernote N/190/VI/Jkt/2000	122		160.206.980
193	PRK-B001944	Jl. Mangga Besar IX Blok D no. 74, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 568, 895/TANGKI	71	319	422.000.000
194	PRK-B001945	Jl. Mangga Besar Raya no. 38CE, Kel. Taman Sari, Kec. Taman sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 654/TAMANSARI	67	180	308.000.000
195	PRK-B001946	Jl. Mangga Besar Raya no. 38CF, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 617/TAMANSARI	68	180	308.000.000
196	PRK-B002019	Komplek Green Garden Blok I-9 No.49, Taman Kedoya Barat Indah, Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Ruko	AJB 70/Kebon Jeruk/1995	138	250	320.000.000
197	PRK-0019500	Jl. Pasar Glodok Selatan no. 4, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1292/GLODOK	576	-	1.466.700.000
198	PRK-B001674_A	Jl. Kedoya Raya/Tomang Tol Blok A2 no. 16, RT 09/04, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1198/KEDOYA SELATAN	158	158	438.000.000
199	PRK-B002152	Jl. Jelambar Baru no.3E, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1240/JELAMBAR BARU	86	151	277.000.000
200	PRK-B002967	Jl. Kali Besar Timur no.27 K, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat	Ruko	SHM 68/PINANGSIA	94	-	165.664.063
201	PRK-C000200	Jl. Latumenten no. 19, Blok F no. 16-17, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 3823, 3824	142	494	246.200.000
202	PRK-B001926	JL. Utama II No. 3 (dh.KAMAL RAYA NO. 25), Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 888/CENGKARENG BARAT	109	180	1.325.160.000
203	PRK-B001967	Jl. Pinangsia Raya no.105, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1905/PINANGSIA	54	-	545.000.000
204	PRK-B001998	Jl.K.H Mas Mansyur no. 71 A, Kec. Tambora, Jakarta Barat	Ruko	AJB 375/Tambora/1990	106	228	227.292.111
205	PRK-B002034	Komp. Daan Mogot Arcadia Blok E no. 16 (d/h. Komplek Daan Mogot Center Blok E), Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1163/BATUCEPER	64	-	130.000.000
206	PRK-B001770	Komp. Ruko Jl. Kosambi Baru no. 1 E-F, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1059, 2863, 2862/DURI KOSAMBI	-		402.000.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
207	PRK-B001854	GG CENGKARENG BLOK-D (pasar Cengkareng Blok D)	Ruko	PPJB 159	28		1.206.240.000
208	PRK-B001855	GG CENGKARENG BLOK-E (pasar Cengkareng Blok E)	Ruko	PPJB 154	198		5.383.800.000
209	PRK-B001860	GROGOL PERMAI A/17	Ruko	NA (TANDA TERIMA TGL. 08/08/1995)	74		140.619.000
210	PRK-B001948	Jl. Mangga Besar XIII no. 3 RT 019/05, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 1755, 1754/MANGGA DUA SELATAN	287	553	422.000.000
211	PRK-0018513	Jl. Letjen Soeprapto no. 29 K RT/RW 07/02, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 431/HARAPAN MULIA	61	244	89.500.000
212	PRK-B001748	Jl. Lautze no. 44 A, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 378/KARTINI	92	180	186.743.681
213	PRK-B001922	Jl. K H. Hasyim Ashari Blok D1 no. 9, Kel. Cideng, Kec. Gambir	Ruko	SHGB 1712/CIDENG	75	250	871.000.000
214	PRK-B001930	Jl. Kebon Jati no.18 Blok F no. 115 , Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Ruko	PPJB 051/PPJB/MCPW/VI/94	68		172.073.250
215	PRK-B002101	Ruko Tanah Abang Blok F No.111 A	Ruko	PPJB 012/L-MCPW/SPP/97	-		305.908.000
216	PRK-B002102	Ruko Tanah Abang Blok F No.111 B	Ruko	Covernote 033/MCPW/SP/X/97	-		305.908.000
217	PRK-0003038	Jl. RC. Veteran Kav. 11 RT/RW 02/01, Bintaro – Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Ruko	SHM 4144//BINTARO	495	765	414.996.113
218	PRK-B002007	Jl. Warung Buncit Raya no.10 C, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Ruko	SHM 1483/RAGUNAN	81	-	1.355.014.000
219	PRK-B001792	Jalan Sultan Hasanuddin no. 70, RT 001 RW 01, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB 754/MELAWAI	395	-	1.583.000.000
220	PRK-B001871	Rukan Bintaro Jaya Sektor I Blok E No.14, Jalan Bintaro Utama, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB 932/BINTARO	75	-	204.800.000
221	PRK-B001732	Jl. RS. Fatmawati 26A, Jakarta Selatan	Ruko	Covernote 156/AD.JP/7/95	69		172.690.000
222	PRK-B001733	Jl. RS. Fatmawati 26H, Jakarta Selatan	Ruko	Covernote 157/AD.JP/7/95	66		129.300.000
223	PRK-B001884	Jl. Fatmawati no. 40X, Jakarta Selatan	Ruko	633/IPB/1987	229		413.276.567
224	PRK-B001636	JL. BALI MESTER RT.015 RW 01 KP. MELAYU, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara (Fakta Jl. Basuki Rachmat RT 002/02 No.8G), Jakarta Timur	Ruko	APH 10 (JUAL BELI BANGUNAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH)	75	300	402.000.000

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NO. ASET	LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (M^2)		NILAI
					TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
225	PRK-B001924	Jl. Kali Malang Raya Kav. PTB (Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Blok G 17/2), Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	Ruko	AJB 277/Jatinegara/1996	68	188	88.800.000
226	PRK-B002052	Pertokoan Klender Blok B1 no. 7-8, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur,	Ruko	11523/IMB (BLOK B1 NO. 7)	-		200.000.000
227	PRK-B001682	Jl. RE Martadinata Ancol no. 1 A, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko	SHGB 455/MANGGA DUA UTARA	122	275	230.000.000
228	PRK-B001857	Pertokoan Grand Boutique blok C no.52, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara	Ruko	PPJB 191	170		159.600.000
229	PRK-B001952	Jl. Pluit Karang Timur Blok B VIII, Kav. 18 no.108, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko	194 (JUAL BELI DAN PENYERAHAN HAK)	150		95.294.385
TOTAL							196.590.561.651

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
1	385/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	PT Rodial Eron dianggap wan prestasi untuk membayar kewajibannya/hutang kepada PT SBU yang berasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran dan SPBU yang sampai dengan per 30 September 2000 telah berjumlah	Proses PK Perkara ditangani di Tk. PK	
2	312/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Eksekusi lelang atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Cengkeh 16 Kav.12 Jakarta Lelang	Sampai saat ini belum ada pengajuan PK Tk. Kasasi Menang	
3	39/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Permohonan Penetapan keabsahan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PT SBU (DL) per posisi tanggal 24 Mei 2003 yang merupakan pertanggungjawaban Tim Likuidasi PT SBU.	Sampai saat ini belum ada pengajuan PK Tk. Pertama, Tk. Banding, dan Tk. Kasasi Menang	
4	275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Penyerahan Barang Jaminan berupa Gedung Kantor yang terletak di Jl.K.H.Wahid Hasyim No.65, Jakarta Pusat dan Jl.Tiang Bendera No.15, Jakarta Barat oleh TL PT SBU kepada DJKN yang kemudian dilelang oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara	Sampai saat ini tidak ada pengajuan Kasasi Tk. Pertama dan Tk. Banding, Menang	
5	321/Pdt.G/2009/PN.MDN	Pengadilan Negeri Medan	Tunggakan biaya maintenance, listrik dan biaya-biaya lain oleh TL PT SBU(DL) terhadap PT Aksara Jaya Indah	Proses Kasasi Tk. Pertama dan Tk. Banding Kalah	
6	442/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Proses Lelang yang akan dilaksanakan atas sebidang Tanah HGB seluas 269m2 yang terletak di Kec. Palmerah, Jakarta Barat yang menjadi jaminan atas pinjaman Albert Kongoasa pada PT SBU	Proses Kasasi Tk. Pertama dan Tk. Banding Menang	
7	483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1 (Satu) bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Jelambar Baru Blok A IX No. 223 RT. 006/RW. 09, Kelurahan Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tk. PK Kalah Baru ditangani di Tk. PK	
8	530/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah Hak Milik No. 946, yang terletak di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela, seluas 384 M2, Gambar Situasi No. 3/249/1982 tanggal 1 Februari 1982	Gugatan Dicabut	SELESAI
9	117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHM No. 228/Kelapa Dua, seluas 251 M2, Gambar Situasi No. 5375/1990 tanggal 20 November 1990, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Pada Tingkat Banding gugatan Dicabut Sesuai Akta Pencabutan Banding No. 01/Srt.Pdt/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 31 Mei 2011	SELESAI
10	443/Pdt.G/2010/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Terkait pending item dalam Program Penjualan Aset Properti 6 (PPAP 6) dengan Nomor Aset adalah B20044, tanah seluas 389.719 M2	Gugatan Dicabut	SELESAI
11	03/Pdt.G/2011/PN.LP.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Ada 6 (enam) objek tanah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara : •SHM No. 9/Desa Tegal Sari seluas 2.394 M2; •SHM No. 13/Desa Tegal Sari seluas 20.590 M2; •SHM No. 8/Desa Tegal Sari seluas 3.195 M2; •SHM No. 10/Desa Tegal Sari seluas 1.699 M2; •SHM No. 11/Desa Tegal Sari seluas 6.259 M2; •SHM No. 12/Desa Tegal Sari seluas 2.337 M2	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDI SUYONO tersebut.
12	26/Pdt.G/2011/PN.MDN	Pengadilan Negeri Medan	Tanah seluas 60.000M2 (eks. Jaminan piutang Negara PT. SBU)	Proses PK Tk. Pertama Menang, Tk. Banding dan Tk. Kasasi Kalah	
13	238/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aset eks BDL PT. Bank Kosagraha berupa sebidang tanah seluas 2205 M2 yang terletak di Desa Kunciran, Kecamatan Pinang (d/h kecamatan Cipondoh) Propinsi Banten (d/h. Propinsi Jawa Barat) SHM No.1832 yang saat ini sudah berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan.	Sampai saat ini belum ada pengajuan Kasasi Tk. Pertama dan Tk. Banding Menang	
14	133/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pelelangan atas SHGB No 2591/Pasar baru dan SHGB No 2590/Pasar Baru oleh PUPN	Putus Banding (Sesuai SIPP, relaas belum diterima) Tk. Pertama Menang	
15	64/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	• Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); • Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Total jumlah Sertifikat Deposito yang dimiliki Penggugat sebanyak 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. BANK INDANESIA, II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDANESIA, Para Pemohon Kasasi III.1. PT GLOBAL INTERNASIONAL, Tbk., (Dalam Likuidasi) dan 2. SURYO tersebut
16	63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	(*). Sertipikat Deposito No. SD BB 000198 tertanggal 25 Okt 2004 yg jatuh tempo pada tgl. 25 Nov 2004 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (*). Sertipikat Deposito No. SD BB 000199 tertanggal 25 Okt 2004 yg jatuh tempo pada tgl. 25 Nov 2004 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Putusan Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut	Putusan PN Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
17	146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	(*). SHGB No. 730/Pinangsia Jakarta Barat seluas 162 M2, SHGB No. 266/Mangga Dua Utara seluas 1.266 M2	Putusan PN	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)
18	344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	(-) SHGB No. 674/Desa Sunter Agung, Gambar Situasi No. 1674/1987 tgl. 31 Agustus 1987 seluas 90 M2, (-) SHGB No. 3578/Desa Sunter Agung Gambar Situasi No. 330/1991 seluas 343 M2, (-) SHGB No. 6709/Desa Sunter Agung Gambar Situasi No. 3972/1994 seluas 87 M2, (-) SHM No. 789/Desa Tegal Alur, Gambar Situasi No. 5393/1993, (-) SHM No. 952/Desa Tegal Alur Gambar Situasi No. 8205/1994	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Tjan Agnes Rumanauw, tersebut.
19	240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aset berupa tanah seluas 6.788.059 M2 yg terletak di Prop. Jawa Barat,Kab. Bogor, Kec. Cimanggis, Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw. Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan sukatani yg dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf dengan EMERALDA disebut Proyek Emeralda	Putusan Peninjauan Kembali	Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: 1. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., 2. PT BANK CIMB Niaga dahulu PT PT BANK LIPPO, Tbk., Pemohon Peninjauan Kembali II: PT KARABHA DIGDAYA dan Pemohon Peninjauan Kembali III: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
20	72/Pdt.G/2011/PN.Mks.	Pengadilan Negeri Makassar	Sengketa kredit dengan 9 (sembilan) BPKB mobil dan 11 Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan ke PT. Bank Perniagaan Cabang Sungguminasa	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. SUDIRMAN BIN H. NONGKO, dan 2. Hj. MURNI tersebut;
21	237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHGB No. 136/Cipete Utara, Gambar Situasi No. 478/3255/1975, luas 709 M2, tercata an. Ny. Evi Husna Lukman, sekarang HGB No. 284/Cipete Utara, Gambar Situasi No. 3607/1990, tgl. 29 Januari 1990, terletak di Jl. Taman Brawijaya III/136, Kebayoran Baru, Jak-Sel.	Putusan Tingkat PN	Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem
22	238/Pdt.G/2011/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	5 Unit villa yg terletak di Jl. Saraswati III No. 9, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, SHM No. 7442/Kuta, seluas 1.520 M2, Surat Ukur Nomor: 314/1999	Putusan Kasasi	Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi LAW TZE SENG (WILLIAM), tersebut
23	255/Pdt.G/2011/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No. 2595/Desa Benoa dan SHM No. 2334/Desa Benoa terletak di Kel. Benoa, Kab. Badung, Prop. Bali	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
24	236/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan yg terletak di Jl. Kelapa Puan Timur VI Blok NB-7 No. 22 Rt. 006/Rw. 012, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara SHGB No. 1913 dengan Surat Ukur No. 334 tahun 1987	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIGOR BARIGIN SIAHAAN.B.AP Selaku suami dari HERMIEN B.BUDOYO,di lanjutkan oleh ahli warisnya RICHARD P.H.SIAHAAN tersebut
25	236/Pdt.G/2011/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	*. SHM No. 4841, terletak di Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Dati Tk. II Badung, Prop. Dati I Bali, gambar situasi tertanggal 11 Juli 1995 No. 1762/1995, Luas 2.400 m2 an. Maeniar Benny Sutedja; *. Sebidang tanah sewa seluas 1.966 m2, milik I Lantar, dkk sebidang tanah hak milik Pipil No. 67, Persil Nomor : 54a, Kelas III, Luas seluruhnya No. 118, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Dati Tk. II Badung, Prop. Dati Tk I Bali, berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah No. 206 tertanggal 31 Januari 1990	Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima	Oleh karena pihak Penggugat Tidak Banding atas putusan yang mengalahkannya, maka putusannya menjadi in kracht. SELESAI
26	349/Pdt.G/2011/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana terurai dalam *. SHM No. 353, luas 930 m2, Gambar Situasi No. 1896/1994 tgl. 26 Mei 1994, *. SHM No. 354, luas 371 m2, Gambar Situasi No. 2032/1994 tgl. 13 Juni 1994 keduanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik, desa Tlogopatut setempat dikenal sebagai Jalan Dr. Sutomo No. 116 Gresik, selanjutnya disebut : "Obyek sengketa".	Proses Tingkat Kasasi	
27	166//Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHGB No. 1 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp. 850.000.000; - SHGB No. 2 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp. 1.850.000.000 - HIPOTIK KEDUA : sebesar Rp. 504.221.800; - SHGB No. 4 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp. 5.321.052.000 (sehingga jumlah total keseluruhan hipotik yaitu Rp 8.750.000.000	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Penggugat
28	464/Pdt.G/2011/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	Tanah seluas 5.500 M2 dengan No. SHM 312 yg terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali; Tanah seluas 5.400 M2 dengan No. SHM 2366 yg terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SURAHMAN tersebut

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
29	32/Pdt.G/2011/PN.Bgr.	Pengadilan Negeri Bogor	SHM No. 840/Cibuluh seluas 3.650 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl. 20-7-1994, No. 9680/1981, Sertifikat tgl. 26-7-1994; SHM No. 847/Cibuluh seluas 1.000 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl. 18-4-1981, No. 8/1978, Sertifikat tgl. 13-10-1994; SHM No. 850/Cibuluh seluas 2.015 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl. 11-8-1981, No. 10374/1981, Sertifikat tgl. 13-10-1994; SHM No. 694/Pabaton seluas 850 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kel. Pabaton, Surat Ukur tertanggal 3-12-1974 No. 371/1974, Sertifikat tgl. 4-12-1974; SHM No. 740/Cibuluh seluas 6.710 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl. 9-2-1988, No. 4224/1988, Sertifikat tgl. 27-4-1998;	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari PEmohon Kasasi: CV. DELIMA JAYA diwakili oleh WIYANTA (Direktur) dan EVY (Persero Komanditer), tersebut
30	338/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Aset Negara berupa tanah seluas 384 m2 SHM No. 946 yg terletak di Jalan Bangka IX No. 62 Jakarta Selatan	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. TAMSIL LUBIS tersebut
31	338/Pdt.G/2011/PN.Bdg.	Pengadilan Negeri Bandung	*). SHM No. 3228 (dahulu No. 2095)/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 53 m2 dan; SHM No. 2841/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 362 m2. *). SHM No. 2774/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 68 m2; SHM No. 2775/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 1503 m2.	Gugatan Dicabut	SELESAI
32	108/Pdt.G/2011/PN.BB	Pengadilan Negeri Bale Bandung	1. SHM No. 344/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 23-6-1994 No. 6342/1994, luas 2.130 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju 2. SHM No. 345/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 23-6-1994 No. 6369/1994, luas 3.500 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju 3. SHM No. 346/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 23-6-1994 No. 6373/1994, luas 4.770 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju 4. SHM No. 259/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 11-2-1991 No. 665/1991, luas 3.110 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju	Proses Kasasi	
33	403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 427 atas nama Anwirdi Mansur seluas 486 M2, Jalan Pejaten Raya Rt. 003 Rw. 002 No. 48 Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Putusan PN Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Penggugat tidak mengajukan banding SELESAI
34	56/Pdt.G/2011/PN.PTK.	Pengadilan Negeri Pontianak	Sebidang tanah terletak di Gang Balsa Rt/Rw. 04/X Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak kota Pontianak seluas + 760 M2, Lebar + 17,5 M, Panjang + 44 M, dan batasannya adalah sebelah barat dengan tanah Sarmun, sebelah timur dengan tanah Sukir, sebelah utara dengan tanah Syarif Aman, sebelah selatan dengan tanah Said/Amat. Dan terhadap tanah tersebut telah disertipikatkan dengan bukti SHM No. 1009, Surat Ukur No. 7248 tahun 1983 tercatat atas nama SOEKEMI BIN SANMUKIMIN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pontianak/Turut Tergugat II	Gugatan Dicabut	SELESAI
35	387/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Sebidang tanah dan bangunan yg terletak di Jalan Sunter Agung Utara Raya Blok A No. 33, 34 (Tampak Muka) dan Jalan Sunter Agung Utara Blok A - 36 D No. 15 (Tampak Belakang) Jakarta Utara	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. LORETTE V. PELEALU tersebut
36	34/Pdt.G/2011/PN.Kraksaan	Pengadilan Negeri Kraksaan	SHM No. 1569 Gambar Situasi 896/1987, seluas 10.600 m2 (Sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yg terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Dati II Badung, Bali atau yg berasal dari Pipil No. 1881, Persil No. 263, Kelas III, seluas 1,060 ha terletak di Desa Kerobokan No. 116, Kecamatan Kuta, Dati II Badung, Bali.	Gugatan Dicabut	SELESAI
37	473/Pdt.G/2011/PN.Bdg.	Pengadilan Negeri Bandung	SHM. No. 929/Turangga Gambar Situasi tertanggal 26 Desember 1992 Nomor 10362/1992 seluas 2.605 m2 tercatat atas nama Mochamad Basari setempat dikenal dengan Jalan Buah Batu Nomor 161 Bandung	Putusan PN: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.	Karena yg dihukum BPN Bandung untuk merubah membalik nama SHM SELESAI
38	451/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	(*) SHM. No. 3228 (dahulu No. 2095) Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 53 m2 dan, SHM No. 2841/Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 362 m2. (*) SHM No. 2774/Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 68 m2 dan SHM No. 2775/Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 1503 m2.	Gugatan Dicabut	SELESAI
39	455/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah dengan luas 2970 m2 yg terletak di Kampung Babakan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik No. 137/Jagakarsa atas nama Angelina Suyanto	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Penggugat

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
40	582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah dg Hak Guna Bangunan Nomor : 280 seluas + 1.250 M2, Gambar Situasi tanggal 12 Agustus 1993 Nomor : 3008/1993 Desa Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (setempat di kenal jalan Genteng Hijau Nomor : 80 Rt.001/07) pemegang hak terdaftar atas nama : LIE TJUN NIO (LIE SOK TJIN) - OEY KOK TIONG - OEY KOK HOEN - OEY KOK SENG dan OEY SIOE LIE, serta sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 281/Karet Kuningan seluas 0 = 828 M2, Gambar Situasi tanggal 12 Agustus 1993 Nomor : 3009/1993 Desa Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (setempat dikenal jalan Genteng Hijau Nomor : 80 Rt. 011/07) pemegang hak terdaftar atas nama : LIE TJUN NIO (LIE SOK TJIN) - OEY KOK TIONG - OEY KOK HOEN - OEY KOK SENG dan OEY SIOE LIE	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Oey Kok Seng, 2. Oey Kok Tiong, 3. Lie Tjun Nio al Lie Sok Tjin al Felicia Wirianata, 4. Oey Kok Hoen al Muliawan Wirianata, 5. Oey Soie Lie tersebut.
41	759/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Sebidang tanah dan bangunan yg beralamat di Jalan Palm Raya No. 440, Rt/Rw 006/007 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SHGB Nomor 1085	Putusan Banding	Menyatakan permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima.
42	780/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Sebidang tanah dan bangunan yg beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 8 Jakarta Selatan, SHM No. 1132/Cilandak Barat seluas 2.210 M2 yg tercatat atas nama B. A. Van Der Kolk	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
43	73/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan yang beralamat di Taman Giri Loka Sektor IV.5 Blok G No. 7, Tangerang, Banten, yang berdiri di atas tanah dengan alas hak berupa SHGB No. 1148 dan No. 1487 an. Jenny Irwan	Putusan Banding: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 73/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
44	129/Pdt.G/2012/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan Taman Beverly 2 Lippo Cikarang setempat dikenal sebagai Jalan Palem Puteri 07 No. 011, RT/RW. 001/010, Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas + 252 m2, berdasarkan SHGB Nomor: 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat terbit tanggal 19-11-1996, Gambar Situasi No. 1082/1996 27-05-1996 tercatat an. Gunawan Susilo	Putusan Peninjauan Kembali	Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. CINDELFIA GLORITY tersebut SELESAI
45	109/Pdt.Plw/2012/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah seluas 37.300 m2 terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, SHM No. 2/Kel. Tandes an. Soedarsono Ongkowidjojo	Putusan Banding: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 109/Pdt. Plw/2012/PN. Sby , yang dimohonkan banding tersebut diatas.	Putusan PN: Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
46	165/Pdt.G/2012/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT. ALBARAYA SEGARA UTAMA atau pemilik atas 14.250 helai saham sedangkan Tergugat III adalah Direktur sekaligus pemilik atas 750 helai saham. PT. ALBARAYA SEGARA UTAMA adalah pemilik sah atas tanah-tanah seluas 200.147 m2.	Proses Kasasi	
47	317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1.SHGB No. 1/Caringin seluas 175.783 m2 an. PT. Kencana Sinar Semesta; 2.SHGB No. 3/Caringin seluas 2.270 m2 an. PT. Kencana Sinar Semesta; 3.SHGB No. 4/Caringin seluas 675 m2 an. PT. Kencana Sinar Semesta; 4.SHGB No. 5/Caringin seluas 10.330 m2 an. PT. Kencana Sinar Semesta; 5.SHGB No. 6/Caringin seluas 2.050 m2 an. PT. Kencana Sinar Semesta; 6.SHGB No. 270/Adiwarna seluas 178 m2 an. PT. Inti Sumber Tatagraha;	Putusan PK 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta, dan 2. Menkeu RI, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 95 K/Pdt/2014 Tanggal 26 Juni 2014	INKRACT SELESAI
48	25/G/2012/PTUN-JKT	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/KM.6/2011 tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Eks. Pemegang Saham Bank Putera Multikarsa Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara	Proses Kasasi	
49	385/Pdt.G/2012/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	1.SHM No. 1236/Desa Sidomulyo, luas 237 m2 setempat dikenal dengan tanah rumah an. Nafik; 2.SHM No. 92/Desa Semambung, luas 751 m2, Desa Semambung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo an. Soetikno; 3.SHM No. 154/Desa Semambung, luas 799 m2, Desa Semambung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo an. Soetikno 4.Tanah sewa kotamadya Surabaya, luas 169 m2, Desa Semambung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo an. Soetikno; 5.Tanah Eigendom Verponding No. 17640 dan 17515, luas 90 m2	Putusan PN	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
50	183/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah Adat Persil 55a, S.II; seluas kurang lebih 43.590 m2 Kelurahan Duri Kepa, sekarang bernama: Kelurahan Duri Kepa.	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT MASTRACO tersebut
51	593/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian tentang Modal Pinjaman tertanggal 4 September 1997 dan Penggugat telah memberikan modal pinjaman kepada Tergugat sesuai apa yang telah diperjanjikan.	Proses Peninjauan Kembali	

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
52	141/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHGB No. 436/Meruya Udik in casu objek Eksekusi dalam perkara perdata No. 163/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Bar. jo. No. 535/PDT/2004/PT.DKI. jo. No. 899 K/Pdt/2006 merupakan aset property yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI.	Putusan Peninjauan Kembali	Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya. Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu RI (Pelawan), Pihak Kementerian Keuangan pada tingkat PK menang
53	106/Pdt.Bth/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah/Bangunan seluas 285 M2 SHGB No. 56/Menteng a.n. Dr. H. Suardi, SE, dan Tanah/Bangunan seluas 813 M2 SHM No. 232/Cilangkap a.n. Dr. H. Suardi, SE.	Menyatakan gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima	
54	136/Pdt.G/2012/PN.Mdn.	Pengadilan Negeri Medan	1.Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan SHGB No. 714 yg dikeluarkan oleh BPN Kota Medan pada tgl. 19 Juli 2004, tanah mana terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, 2.Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pengggugat dari Sdr. Ngarijan Salim yg beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 26A Medan sebagaimana tertuang dalam akta jual beli No. 103 tertanggal 25 Mei 2005 yg dikeluarkan oleh Susan Widjaja, SH PPAT Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, 3.Penggugat juga adalah pemilik tanah dengan SHGB No. 715 yg dikeluarkan oleh BPN Kota Medan pada tgl. 19 Juli 2004, terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prop Sumatera Utara , 4.Bahwa tanah tersebut juga dibeli oleh Penggugat masih dari Sdr. Ngarijan Salim yg beralamt di Jl. Imam Bonjol No. 26 A Medan sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 104 tertanggal 25 Mei 2005 yg dikeluarkan oleh Susan Widjaja, SH PPAT Kota Medan, 5.Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sebelum tanah tersebut dijual kepada Penggugat, ternyata kedua bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa di pengadilan	Proses Kasasi	
55	169/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 427 an. Anwirdi Mansur, seluas 486 M2 di Jalan Pejaten Raya Rt. 003/002 No. 48 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
56	265/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan nota kesepakatan No. 10 (MRNIA) tgl. 23 Mei 2001, yg dibuat dihadapan Olva Alfiaty SH., Notaris di Jakarta	Putusan Banding: Membatalkan Putusan PN. Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2013 No. 265/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
57	377/Pdt.G/2011/PN.Bdg.	Pengadilan Negeri Bandung	99 (sembilan puluh sembilan) bidang tanah HGB yang semuanya terletak di Kelurahan Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kotamadya, Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah per kaveling 75 m2	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. BANK JAKARTA (DALAM PEMBERESAN), Tersebut.
58	506/Pdt.G/2012/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Vervonding No. 4071, seluas 1.678 m2; Vervonding No. 4086, seluas 1.698 m2; Vervonding No. 4096, seluas 2.183 m2; Vervonding No. 11682, seluas 1.307 m2; Kesemuanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasain, Jl. Embong Wingu No. 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43, 47, 49, 51 dan 53 Surabaya	Gugatan Dicabut	SELESAI
59	631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	-Akta Jaminan Pribadi (borgtocht) Nomor 49 tanggal 23 April 1997 yg dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta; -Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 22 April 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta; -Akta Pengakuan Utang Nomor 38 tertanggal 22 April 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta; -Akta Pernyataan Kesanggupan Nomor 39 tanggal 22 April 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta; -Perjanjian Kredit TERGUGAT II dengan TERGUGAT III, dengan jaminan pribadi TERGUGAT I; -Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 15 April 1999 antara TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT I yang telah dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor: 786/Leg/1999 tertanggal 15 April 1999; -Perjanjian Jual Beli Piutang antara TURUT TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT II yg dibuat pada tanggal 28 Januari 2003, yg telah dilegalisasi oleh Sugito Tedjamulya, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor: 626/N/II/2003;	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
60	481/Pdt.Bth/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Berupa tanah berikut bangunan luas 285 m2 yg terletak di Jalan Menteng Atas Selatan RT.012/012 No. 31, Setiabudi, Jakarta Selatan, sesuai SHGB No. 56/Menteng Atas dan tanah berikut bangunan luas 813 m2 yg terletak di Jalan Cilangkap RT. 003/01 No. 4 Jakarta Timur sesuai SHM No. 232/Cilangkap	Proses Kasasi	

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
61	654/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Akta Perjanjian Kredit No. 37 tertanggal 7 Desember 1995 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ny. Agustina Junaedi, S.H. antara Penggugat dengan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
62	405/Pdt.G/2012/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No. 02/1965 yg terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta (kini Kecamatan Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 5.200 m2	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : (1). Ni Made Sorji, (2). Sudiana, (6) I Wayan Riben tersebut.
63	147/Pdt.G/2012/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Bahwa Penggugat pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) periode 1993-1994 sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jaminan berupa : 1. SHGB No. 1, SHGB No. 2, SHGB No. 4 untuk wilayah Kec. Cibitung	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMEN Tersebut
64	227/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie), bahwa PENGGUGAT adalah nasabah pada PT. BANK Umum Nasional dengan kualifikasi kredit usaha kecil menengah (UKM), dimana Penggugat mendapat pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- dengan menjaminkan 2 buah SHM kepada PT Bank Umum Nasional, yaitu SHM No. 440/Curug an. Linawati.	Proses Kasasi	
65	580/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah SHM Nomor 103, 168, 169, 170, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 449/Kesiman seluas 17.006 m2 yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kotamadya Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Kesiman Kertalangu, setempat dikenal sebagai Jalan WR. Supratman No. 256 Denpasar atau dahulu dikenal dengan nama Jalan Gianyar-Tohpati Denpasar (selanjutnya akan disebut "Tanah RSU Dharma Yadnya").	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
66	552/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pemegang hak atas tanah Bekas Hak Guna Bangunan seluas 73.620 m2 dengan SHGB No. 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor 4807/1996, terletak dan setempat dikenal Kampung Gunung, Lingkungan Rt-001/Rw-10, Desa Tonjong, Kecamatan Bojong Gede (sekarang masuk wilayah Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.	Dicabut diganti dengan perkara 04/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	SELESAI
67	04/Pdt.G/2013/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No. 2334 dan SHM No. 2595 Desa Benoa, Denpasar	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
68	04/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor 4807/1996, terletak dan setempat dikenal Kampung Gunung, Lingkungan Rt. 001/Rw. 10, Desa Tonjong, Kecamatan Bojong Gede (sekarang masuk wilayah Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.	Putusan Kasasi	Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. MAMAT SOMANTRI, 2. SYARIEF HIDAYAT, 3. TUKIRAN, 4. AMBANG PURWADI SOEWONDO, 5. SARIYAH WIJAYA, 6. ROCHMUHAYATI, 7. SUNANDAR, 8. Ir. HIDAYAT, 9. SUNARSIH, 10. TOHIR, 11. EDI POERWANTO, 12. M. ABDURACHMAN, 13. Ir. PRIATNA, 14. SOETONI, 15. Drs. WASDJUD, 16. AS. WIJAYA, 17. ISMANTORO, 18. T. HADIGUNO S, 19. WARNO HARDJO tersebut;.
69	149/Pdt.G/2012/PN.Bgr.	Pengadilan Negeri Bogor	SHGB No. 4757/Jelambar, GS No. 6177/1992 an. AMIN ROILANDO (TJONG MIN TJOE) seluas 142 m2 setempat dikenal dengan Jalan Hemat No. 7 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat	Gugatan Digugurkan Penetapan PN. Bogor Tgl. 26 Februari 2014	SELESAI
70	12/Pdt.Plw/2013/PN.KRAKS	Pengadilan Negeri Kraksaan	Pelelangan atas sebidang tanah pertanian dengan SHM No 226/Maron	Putus Kasasi Menang (Sesuai SIPP, relaas belum diterima) Tk. Pertama dan Tk. Banding Menang	
71	93/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHGB No. 141/Pesanggrahan beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 200 m2, tertulis an. CHANDRA HEMAWAN	Putusan Banding: Menguatkan Putusan PN. Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2013, No. 93/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN: Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima
72	43/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	SHGB No. 1787/Kel. Kapuk Muara beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kel. Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 70 m2, tertulis an. CHANDRA HEMAWAN, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 3584/1993 tertanggal 23 Desember 1993. Setempat dikenal sebagai Komplek Duta Harapan Indah Blok KK No. 28, sebagaimana tercantum dalam tanda terima yang diterbitkan oleh Bank Tifa Mayora Sentosa No. 64/TTM/CM/VII/94 tertanggal 22 Juli 1994.	Putusan Banding: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 43/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 01 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut	Putusan PN: Menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet on van kelijk vezklaard)
73	176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Dana dalam bentuk deposito dan rekening Koran. Total jumlah uang atau dana dalam bentuk deposito dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Koran adalah sebesar Rp. 3.043.600.364,- (tiga milyar empat puluh tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah).	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
74	84/Pdt.G/2013/PN.Tdo.	Pengadilan Negeri Tondano	SHM No. 49, an. Engkom Singal, SHM No. 50 an. Mieke Manus yang kedua obyek tersebut terletak di Kelurahan Katinggolan Tondano, dan SHM No. 130 an. Engkom Singal/Lintje Wangania yang terletak di Kelurahan Ranowangko Tondano.	Putusan PN	1. Mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT-TERGUGAT ; 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
75	22/Pdt.G/2013/PN.Lmj.	Pengadilan Negeri Lumajang	Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya atas SHGB No. 715/Kel. Tompokersan, seluas 255 m2, Surat Ukur No. 83 tanggal 21 Desember 1991, pemegang hak tercatat a.n. Johannes Soegiharto, yang terletak di Kel. Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, berikut bangunan dan semua yang berdiri diatasnya.	Putusan PN	• Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; • Menyatakan bahwa hutang Almarhum Tuan Johannes Soegiharto kepada PT. Bank Umum Nasional atau disingkat PT. BUN juga disebut Nasional Universal Bank, berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui kantor cabangnya di Probolinggo, telah lunas;
76	289/Pdt.Bth/2013/PN.Tng.	Pengadilan Negeri Tangerang	Jaminan 4 (empat) sertifikat milik Pembantah diantaranya sebidang tanah SHGB No. 3247, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Desa Pakulon Barat, Kec. Tangerang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten) seluas 162 M2, tertulis atas nama Chandra Hemawan (Pembantah). Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 21582/1995 tertanggal 13 Desember 1995.	Gugatan Dicabut	SELESAI
77	487/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Bidang-bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana: •Vervonding No. 4071, seluas 1.678 m2; •Vervonding No. 4086, seluas 1.698 m2; •Vervonding No. 4096, seluas 2.183 m2 dan; •Vervonding No. 11682, seluas 1.307 m2. Kesemuanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kel. Embong Kaliasin, Jl. Embong Wungu No. 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43, 47, 49, 51 dan 53 Surabaya	Proses Banding	
78	41/Pdt.G/2013/PN.Gs.	Pengadilan Negeri Gresik	SHM Nomor: 21/Desa Dalegan, Gambar Situasi Nomor: 1710/1989 Tanggal 9-9-1989, Luas 6.455 M2, terletak di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik	Digugurkan	SELESAI
79	336/Pdt.Plw/2013/PN.Tng.	Pengadilan Negeri Tangerang	Sebidang tanah seluas 16.501 m2 yang terletak di Jl. AMD Manunggal X Rt 001/Rw 002 Kel. Kedaung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang Banten dan SHM No. 145/Desa Kedaung Wetan, Gambar Situasi No. 1685 tanggal 03-05-1995 seluas 14.885 m2.	Putusan PN	Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (NO)
80	296/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No. 480 atas nama Riosdy Baharoedin dan SHGB No. 481 atas nama Riosdi Baharoedin dengan luas masing-masing 318 M2 dan 159 M2 yang kedua bidang tanah tersebut, terletak di desa Pangkalan Jati, Kec. Sawangan, Kab. Bogor	Putusan PN	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
81	250/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Jaminan utang PT. Timor Putra Nasional, diantaranya berupa: Rekening-rekening deposito a.n. PT. TPN di Bank Mandiri Cabang Jakarta	Putusan Banding	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
82	639/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah-tanah dan bangunan: -Verponding No. 4071, seluas: 1.678 M2; -Verponding No. 4086, seluas: 1.698 M2; -Verponding No. 4096, seluas: 2.183 M2; -Verponding No. 11682, seluas: 1.307 M2; kesemuanya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, Jl. Embong Wungu No. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, dan 53 Surabaya.	Proses Kasasi	
83	513/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 3.201 M2, yang terletak di RT 011/012, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat	Putusan Banding: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 513/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Bar Tanggal 12 Agustus 2014, Yang Dimohonkan Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding Tersebut	Putusan PN: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
84	271/Pdt.G/2013/PN.Mks.	Pengadilan Negeri Makassar	Aset eks BPPN eks jaminan debitur PT. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (selanjutnya disebut PT. Bank Uppindo), yaitu PT. Lawang Kencana Utama, PT. Terracota Nusantara Perkasa dan PT. Furin International & Trading Co. yang terdiri dari 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) - PT PPA, tersebut;
85	515/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Obyek sengketa berupa SHM No. 1227/Desa Simomulyo, luas 447 m2, Surat Ukur Sementara No. 992/1981 tanggal 17 Desember 1981 tertulis a.n. Soenarno, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, Desa Simomulyo, setempat dikenal sebagai Jalan Simo Gunung Barat 3-A/10 Surabaya	Gugatan Dicabut	SELESAI

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
86	209/Pdt.G/2013/PN.Mks.	Pengadilan Negeri Makassar	6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (selanjutnya disebut objek sengketa perkara a quo), dengan alas hak berupa : 1) SHM No. 808/Panaikang, Gambar Situasi No. 3905/1981 tanggal 27 November 1981, luas 2.190 m², a.n. Sdr. Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-7); 2) SHM No. 809/Panaikang, Gambar Situasi No. 3906/1981 tanggal 27 November 1981, luas 2.510 m², a.n. Sdr. Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-8); 3) SHM No. 811/Panaikang, Gambar Situasi No. 3907/1981 tanggal 27 November 1981, luas 3.341 m², a.n. Sdr. Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-9); 4) SHM No. 2631/Panaikang, Gambar Situasi No. 3135/1987 tanggal 7 Desember 1987, luas 817 m², a.n. Sdr. Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-10); 5) SHM No. 3038/Panaikang, Gambar Situasi No. 135/1990 tanggal 8 Februari 1990, luas 791 m², a.n. Sdr. Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-11); 6) SHM No. 3143/Panaikang, Gambar Situasi No. 864/1991 tanggal 15 April 1991, luas 1.576 m², a.n. Sdr. Bambang Samijono (Bukti PI-11)	Gugatan Dicabut	SELESAI
87	794/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Menyatakan bahwa asset-aset kayu olahan atas 115 container yang terletak di Komplek Pergudangan Wirulusan Blok G/2 Jalan Mayjend Sungkono Km 2,6 Gresik Jawa Timur	Putusan Banding	PN: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2014, Nomor 794/Pdt.G/2013/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
88	45/Pdt.G/2013/PN.Kds.	Pengadilan Negeri Kudus	Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1870 atas nama Watiah Binti Matsirat terletak di Jl. PUK di Desa Jepang Rt. 02/02, Kec. Mejobo, Kab. Kudus	Putusan Kasasi	Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KATEMI tersebut.
89	25/Pdt.G/2013/PN.Dmk.	Pengadilan Negeri Demak	SHM No. 66 atas nama Sarwani Bin Mustaman alias Haji Sofwan, seluas + 1406 M2, yang terletak di Desa Donorejo, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah	Gugatan Dicabut	SELESAI
90	879/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan SHM No. 300 Gambar Situasi No. 1775/1986 tanggal 8 Januari 1986 seluas 363 M2, yang terletak di Jl. Dukuh Menanggal VI/16 Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur an. Siti Mafrifah	Proses Kasasi	
91	648/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Domang Jakarta Barat (Hak Milik No. 1151, Hak Milik No. 1123, Hak Milik No. 1124)	Gugatan Dicabut	SELESAI
92	26/Pdt.G/2013/PN/Lmg.	Pengadilan Negeri Lamongan	Tanah dan bangunan SHM No. 300 Gambar Situasi No. 1775/1986 tanggal 8 Januari 1986 seluas 363 M2, yang terletak di Jl. Dukuh Menanggal VI/16 Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur an. Siti Mafrifah	Gugatan Dicabut	SELESAI
93	234/Pdt.G/2013/PN.Ska.	Pengadilan Negeri Surakarta	- Sebidang tanah dan bangunan berdasar SHM Kedua/Sertifikat Pengganti No. 947 seluas + 645 m2, yg terletak di Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah; dan - Sebidang tanah seluas + 548,1 m2, terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV No. 8, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong, Tangerang,	Putusan Peninjauan Kembali	1.Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali I.1NGO IM MING, 2.LAUW HWAN JONG, 3.JOSEPHINE LAETITIA dan II.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SURAKARTA tersebut
94	655/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan H. Domang Jakarta Barat (Hak Milik No. 1151, Hak Milik No. 1123, Hak Milik No. 1124)	Gugatan Dicabut	SELESAI
95	245/Pdt.G/2013/PN.Smg.	Pengadilan Negeri Semarang	SHM No. 409 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bima I No. 23 F, seluas kurang lebih 258 M2 di Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah (dh. Kec. Semarang Barat) Kodya Semarang.	Putusan Tingkat Banding	PN: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Tk. Banding : Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat.
96	60/Pdt.G/2013/PN.Tsm.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Aset Tanah Hak Milik SHM No. 00455, seluas 168 m2 an. Neni Mulyani terletak di Blok Palahan Kel. Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya	Putusan PN	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
97	229/Pdt.G/2013/PN.BB	Pengadilan Negeri Bandung	Sebidang tanah SHM No. 2166 desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung, berikut bangunan yang berada di atasnya, setempat lebih dikenal sebagai Komplek Taman Kopo Indah I Blok E No. 176	Putusan Banding: Menguatkan putusan pengadilan negeri bale bandung tanggal 10 Juli 2014 Nomor 229/Pdt..G/2013/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
98	25/Pdt.G/2013/PN.Psr.	Pengadilan Negeri Pasuruan	1. Sebidang tanah hak milik/SHM No.283, seluas 206 m2, terletak di Kel. Ngemplak Rejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan a.n. Damhudji, berikut turutannya yang berdiri melekat diatasnya 2. Sebidang tanah dan bangunan SHM No.287, seluas 101 m2, terletak di Kel. Ngemplak Rejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan a.n. Damhudji 3. Sebidang tanah dan bangunan SHM No.285, seluas 50 m2, terletak di Kel. Ngemplak Rejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan a.n. Damhudji 4. Sebidang tanah dan bangunan SHM No.132, seluas 135 m2, terletak di Kel. Ngemplak Rejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan a.n. Damhudji, Ubaidilah, Fitriyah	Gugatan Digugurkan	SELESAI
99	724/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah berikut bangunan seluas 352 m2, yang terletak di Jalan Adam No. 101 Rt. 002/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 289/Sukabumi Utara, atas nama Meri Ernahani.	Putusan PN	
100	203/Pdt.G/2013/PN.Pbr.	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah objek perkara a quo seluas +/- 8.000,-m2 dahulu berada di Km.6 Bencah Laweh Kedesaan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.01 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Gugatan Dicabut	SELESAI
101	62/Pdt.G/2013/PN.Sungg.	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Tanah yang terletak di Jalan Malino, lingkungan Panggentungan, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau yang lebih dikenal dalam SHM No. 602/Tamarunang	Gugatan Digugurkan	SELESAI
102	709/Pdt.G/2013/PN.Mdn.	Pengadilan Negeri Medan	Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat berupa : 1. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/75/1991 an. M. Jono; 2. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/76/1991 an. Dasijem; 3. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/77/1991 an. Muhammad Yusuf; 4. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/78/1991 an. Rusman/Wagiman; 5. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/79/1991 an. Kanti Suandi; 6. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/80/1991 an. Mat. Tali; 7. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/81/1991 an. Ramdani Yusuf; 8. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/82/1991 an. M. Turnip; 9. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/83/1991 an. Rais Sukarjo; 10. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/84/1991 an. Gito; 11. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/85/1991 an. Musiran-Misnem; 12. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/86/1991 an. Zakaria-Rusmi; 13. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/87/1991 an. Dasiyem; 14. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/88/1991 an. Sadali; 15. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/89/1991 an. Sabar Sembiring; 16. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/90/1991 an. Parmono; 17. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/91/1991 an. M. Arifin; 18. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/92/1991 an. Tadim Harahap; 19. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/93/1991 an. Kasdi; 20. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/94/1991 an. Darmiati Rohena; 21. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/95/1991 an. Yaehman Kromoarjo; 22. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/96/1991 an. R. Turnip; 23. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/97/1991 an. Abdul Kiram; 24. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/98/1991 an. Nasib Suryono; 25. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/99/1991 an. Muhammad Salim; 26. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/100/1991 an. Turnip;	Gugatan Dicabut	SELESAI
103	176/Pdt.G/2013/PN.Bwi.	Pengadilan Negeri Banyuwangi	4 (empat) buah SHM, antara lain : 1. SHM No. 3576 tahun 1994, seluas 6.150 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto); 2. SHM No. 9534 tahun 1994, seluas 12.010 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto); 3. SHM No. 464 tahun 1994, seluas 2.600 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto); 4. SHM No. 465 tahun 1995, seluas 3.950 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto);	Gugatan Dicabut	SELESAI
104	04/Pdt.G/2014/PN.Bgr.	Pengadilan Negeri Bogor	Tanah berikut bangunan di atasnya SHGB No. 153/Kel. Babakan seluas 185 m2 yang terletak di Jalan Brawijaya No. 48 Villa Indah Pajajaran (V.I.P), Kel. Babakan, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	Proses Peninjauan Kembali	Putusan terakhir pada Tk. Kasasi Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NENENG SARIANDEWI tersebut
105	21/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHM No. 2119 Desa Jelambar tertanggal 23 Juni 1997 berdasarkan Gambar Situasi No. 3252/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama Tjie Lie Hia, dengan batas-batas sebagai berikut: • Sebelah Utara : Tembok Bangunan; • Sebelah Timur: Rumah No. 45; • Sebelah Barat : Rumah No. 48; • Sebelah Selatan : Jl. Prof. Dr. Latumenten II;	Proses Tk. Banding	Putusan Tk. Pertama Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
106	662/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHM No. 143/Duri Kosambi, luas + 798 m2	Putusan Tk. Pertama	Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima
107	68/Pdt.G/2013/PN.Gs.	Pengadilan Negeri Gresik	Perjanjian Kontrak Kerja Pengamanan Pemeliharaan Aset kelolaan dan titipan PT. PPA pada Kanwil X DJKN Surabaya atas objek berupa tanah milik Penggugat dengan SHM No. 21	Tingkat PN menyatakan perkara perdata gugatan no.68/pdt.G/2013/Pn.gs tersebut telah habis panjar biaya perkara	Perkara SELESAI
108	133/Pdt.G/2013/PN.TK.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Lelang atas tanah dan bangunan SHM No. 1182/Pengajaran, Luas 529 m2 milik Penggugat	Tingkat PN Menyatakan perkara perdata Nomor: 133/pdt.G/2013/PN.TK dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan.	Perkara SELESAI
109	61/Pdt.G/2014/PN.Plg.	Pengadilan Negeri Palembang	Lelang terhadap HGB No. 245/Plaju Darat dan HGB No. 247/Plaju Darat, terletak di Sumsel Kotamadya Palembang, Kec. Seberang Ulu II, Kel. Plaju Darat an. Pemegang Hak PT. Kumala Berlian	Putusan PN	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard);
110	414/Pdt.G/2014/PN.Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No.95 Seb/Kel.Tanah Tinggi di komplek perumahan Modernland Blok AG7 Nomor: 47, Kel.Cipete, Kec.Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Pemeriksaan Tingkat Kasasi	
111	413/Pdt.G/2014/PN.Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No.110 Seb, Kel. Tanah Tinggi di komplek perumahan Modernland Blok G1 Nomor: 285, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten.	Menang inkracht di pengadilan tingkat pertama	
112	453/Pdt.G/2014/PN.Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No. B 110 Seb/Kel.Sukasari di komplek perumahan Modernland Blok G1 Nomor: 284, Kel.Cipete, Kec.Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Gugatan Dicabut	SELESAI
113	415/Pdt.G/2014/PN.Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No.95 Seb/Kel.Tanah Tinggi di komplek perumahan Modernland Blok AG6 Nomor: 19, Kel.Cipete, Kec.Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Gugatan Dicabut	SELESAI
114	249/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah Jl. Pulau Puteri VII, Komplek Perumahan Kota Modern Blok O3 Nomor: 1 RT.01/RW.02, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Kalau pada sidang 28 Januari 2015 Penggugat tidak hadir, Majelis Hakim akan menyatakan gugur perkara ini	
115	354/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Kota Modern Land Blok DG.2 No.77 Tanah terletak di perum kota modern land Blok G.4 No.216	Telah diputus di tingkat banding dengan amar yang pada pokoknya memenangkan Para Tergugat. Belum ada upaya hukum lanjutan dari Penggugat.	
116	375/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pengalihan Piutang PT Bank Dagang Nas. Indonesia kepada T II (NISP Sekuritas)	Putusan kasasi:menolak permohonan kasasi Penggugat. Lalu Penggugat mengajukan PK pada 10 Oktober 2018. Belum ada memori PK yang diterima Kemenkeu.	
117	04/Pdt.G/2014/PN.Tbn.	Pengadilan Negeri Tuban	SHM No. 162 atas nama Listiyono luas 167 m2 terletak di Desa Beji, Kec. Jenu, Kab. Tuban, Prop. Jawa Timur.	Putusan Tk. Kasasi	
118	20/Pdt.G/2014/PN.Pbr.	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah objek perkara a quo seluas +/- 8.000,-m2 dahulu berada di Km.6 Bencah Laweh Kedesaan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.01 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Putusan Tk. Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan Tk. PN : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
119	11/Pdt.G/2014/PN.Kdi.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	a. Tanah pekarangan dan rumah yang berdiri diatasnya, dengan identitas sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik (SHM Nomor : 948 Atas nama : H. Murni Azis Tanggal Sertipikat : 29 Juli 1991 Dusun : Pucanganom Desa : Duwet Kecamatan : Wates Kabupaten : Kediri Propinsi : Jawa Timur Surat Ukur (SU) No.: 4231 Tanggal : 29 Juli 1991 Luas : 3.540 M2 Dengan batas-batas sebagai berikut: • Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : antara tugu I sampai tugu II berbatasan dengan Jalan Desa, antara tugu II sampai tugu III berbatasan dengan tanah milik Bapak Masduki, antara tugu III sampai tugu IV berbatasan dengan tanah milik Bapak Masduki; • Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : antara tugu IV sampai tugu V berbatasan dengan Jalan Desa; • Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : antara tugu V sampai tugu VI berbatasan dengan tanah milik Ibu Sunarsih; • Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : antara tugu VI sampai tugu I berbatasan dengan tanah milik Bapak Usup; b. Tanah pekarangan/kebun dan tanaman diatasnya, dengan identitas sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik (SHM Nomor : 190 Atas nama : H. Murni Azis Tanggal Sertipikat : 24 Nopember 1988 Dusun : Babadan Desa : Duwet	Putusan Kasasi	Menolak Kasasi dari Para Penggugat
120	50/Pdt.Plw/2014/PN.Mks.	Pengadilan Negeri Makassar	Tanah Bangunan dengan alas hak berupa SHGB No. 20009 seluas 158 m2 a.n. Sukarsih yang terletak kompleks perumahan taman anggrek Blok B.3 Jln. Angrek Masiro	Putusan Tk. Pertama	Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima
121	60/Pdt.Plw/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	SHM No.1289/Luas 455 m2 a.n Ali Djojonegoro Kromodihardjo, setempat dikenal jalan raya Tenggilis mejoyo No.18, F-14, Kotamadya Surabaya.	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2014 Nomor 60/Pdt.Plw/2014/PN.Sby. yang dimohonkan banding ;	Putusan Tingkat PN: Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
122	06/Pdt.G/2014/PN.Mgt.	Pengadilan Negeri Magetan	SHM No. 369/Desa Manjung luas 2010 m2 a.n. Surat yang terletak di Desa Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan	Putusan Tk. Banding: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Mgt., yang dimohonkan banding tersebut ;	Putusan Tingkat PN: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
123	03/Pdt.G/2014/PN.Am.	Pengadilan Negeri Arga Makmur	1 (satu) buah Gedung PT. Bank Danamon Unit Pasar D1 Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan Tanah seluas 1.190 SHM No. 1244 tanggal 30 Agustus 2005, beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
124	45/Pdt.G/2014/PN.Slmn.	Pengadilan Negeri Sleman	a. SHM No. 1161/Ds. Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan luas 284 m2 atas nama Istiq Maliyah (Penggugat I); b. SHM No. 1075/Ds. Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan luas 1.155 m2 atas nama Tri Haryono (Penggugat II);	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formal.
125	85/Pdt.Bth/2014/PN.Bdg.	Pengadilan Negeri Bandung	2 (dua) SHM yaitu SHM No. 2991/Kel. Sukaasih, Tanah Luas + 42 M2, Surat Ukur No. 629/Sukaasih/2004 tanggal 19/08/2004 dan SHM No. 2994/Kel. Sukaasih/2004 Tanah Luas + 48 M2, Surat Ukur No. 628/Sukaasih/2004 tanggal 19/08/2014	Putusan Tingkat Pertama	Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya
126	97/Pdt.G/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan diatasnya dalam SHM No. 1425, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, setempat dikenal Jalan Bukit Pakis Utara IV No. TB. 16 (Villa Bukit Mas Monaco TB.16) Surabaya	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 September 2014 Nomor 97/Pdt.G/2014/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;	Putusan Tingkat PN: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
127	59/Pdt.G/2014/PN.Ska.	Pengadilan Negeri Surakarta	Sertifikat tanah Hak Milik No. 5467, Gentan atas tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya seluas + 175 M2, yang terletak di Desa Gentan, Kec. Baki,, Kab. Sukoharjo tercatat atas nama Dra Marfuah Hasyim Ashari Mulyo	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
128	60/Pdt.G/2014/PN.Plr.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	SHM No. 15.01.01.01.1.05986 yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kotamadya Palangkaraya, Kec. Pahandut, Kel. Langkai dengan 313 M2 atas nama Ahram, SE.	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Plk, yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan Tingkat PN: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
129	04/Pdt.G/2014/PN.Kb.Mn.	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	SHM No. 708/Bagi, Surat Ukur (Sementara) No. 45 Tahun 1982 tanggal 12 Januari 1982, luas tanah 2654 m2, terletak di Desa Bagi Kec. Madiun, Kab. Madiun; SHM No. 816/Bagi, Surat Ukur (Sementara) No. 237/1982 15 Januari 1982, luas tanah 3584 m2, terletak di Desa Bagi Kec. Madiun, Kab. Madiun.	Putusan Kasasi	Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi YAYUK WINARTI tersebut
130	55/Pdt.G/2014/PN.Dpk.	Pengadilan Negeri Depok	Berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 15320/Tugu seluas 99 m2 yang terletak di Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok – Jawa Barat	Gugatan Dicabut	SELESAI
131	16/Pdt.G/2014/PN.Rap.	Pengadilan Negeri Rantauparapat	Sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.827 m2 dengan SHM No. 280/Tanjung Medan, terletak di Jalan Beringin Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, atas nama Suharman.	Putusan Banding	Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya
132	07/Pdt.G/2014/PN.Mgl.	Pengadilan Negeri Magelang	SHM No. 2046, seluas 203 m2 atas nama Dewi Anggraeni Hestungkari dan SHGB No. 0774 seluas 121 m2 atas nama Agus Lasmono/Penggugat, yang kesemuanya terletak di Desa Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.	Gugatan Dicabut	SELESAI
133	286/Pdt.G/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah hak milik No. 2 – Kel. Romokalisari seluas 37.300 m2, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 31 Oktober 1990 No. 1419/U/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Soedarsono Ongkowidjojo, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Romokalisari.	Proses Peninjauan Kembali	
134	168/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	• Tanah seluas 3.607 m2, SHM No. 677/Kedoya, Gambar Situasi No. 64/916/1984 tanggal 21 Februari 1984, terletak di Kedoya Rt. 003/04, Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat; • Tanah seluas 1.590 m2, SHM No. 682/Kedoya, Gambar Situasi No. 65/917/1984 tanggal 21 Februari 1984, terletak di Kedoya Rt. 003/04, Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat; • Tanah seluas 3.448 m2, SHM No. 910/Kedoya, Gambar Situasi No. 1020/4427/1985 tanggal 30 Juli 1985, terletak di Kedoya Rt 003/04, Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;	Gugatan Dicabut	SELESAI
135	17/Pdt.G/2014/PN.Krw.	Pengadilan Negeri Karawang	26 bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Dati II Karawang, Kecamatan Klari, Desa Lemahmulya, dengan keseluruhan 45 ha.	Gugatan Gugur	SELESAI
136	177/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	jaminan berupa : • Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1660/Joglo yang terletak di Taman Alfa Indah F II No. 1 Joglo, seluas 405 m2 tertulis atas nama Ir. Bambang Sudarsono; • Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Swadarma Raya Rt. 010/03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan SHM No. 818/Ulujami seluas 1.320 m2 tertulis atas nama Ir. Bambang Sudarsono	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Ir. BAMBANG SUDARSONO tersebut.
137	158/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah berikut segala bangunan dan tanaman yang berada diatasnya seluas 17.950 m2, yang terletak dahulu dikenal sebagai Girik Letter C Nomor : 770, Persil Blok 25, Kelas D. I, Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat atau sekarang dikenal sebagai Kel. Cirendeu, Kec. Cirendeu, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
138	156/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHM No. 103, 168, 169, 170, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 449/Kesiman luas 17.006 m2, yang terletak di Jalan W.R. Supratman No. 256 Denpasar	Gugatan Dicabut	SELESAI
139	199/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHM No. 103, 168, 169, 170, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 449/Kesiman luas 17.006 m2, yang terletak di Jalan W.R. Supratman No. 256 Denpasar	Proses Peninjauan Kembali	
140	84/Pdt.G/2014/PN.Ab.	Pengadilan Negeri Ambon	SHM No. 658 Tahun 1985, luas 19.128 m2, terletak di Jalan Perumtel, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.	Proses Peninjauan Kembali	
141	03/Pdt.Sus/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	tanah seluas 58.000 m2 sebagian dari luas tanah 113.408 m2 ex SHGB No. 442/Meruya Udik (sekarang Meruya Selatan) yang diperoleh dengan Hibah No. 583/Kembangan/1995 tanggal 22 Februari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoedin yang terletak di Jalan Meruya Selatan No. 1, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, setempat yang dikenal dengan Kampus Universitas Mercu Buana	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum., dan Drs. JOKO PRABOWO, S.H., M.H., tersebut.

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
142	197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	• Deposito Berjangka 1 (satu) bulan, No. Seri SB 007061 dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,-, tercatat atas nama PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 27 Oktober 1998, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 1998 hingga 27 November 1998; • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan, No. Seri SB 008217 dengan nilai nominal Rp. 800.000.000,-, tertanggal 1 Maret 1999, tercatat atas nama PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 1 Maret 1999 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 hingga tanggal 1 April 1999 ; • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan, No. Seri SB 008263 dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- tercatat atas nama PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999 tertanggal 12 Maret 1999, terhitung mulai tanggal 12 Maret 1999 hingga tanggal 12 April 1999; • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan No. Seri SB 008263 dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- tercatat atas nama PT. Wilhara Prima Realty tertanggal 12 Maret 1999 tertanggal 12 Maret 1999 hingga tanggal 12 April 1999; • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan No. Seri SB 008262 dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,-, tercatat atas nama PT. Wilhara Prima Realty tertanggal 12 Maret 1999 terhitung mulai 12 Maret 1999 hingga 12 April 1999; • Rekening Koran No. Rek. 100-007056-1-01-6 atas nama Penggugat dengan jumlah saldo sebesar Rp. 143.600.364,- yang tercatat pada periode tanggal 1 Maret 1999 sampai dengan 12 Maret 1999 yang dikeluarkan Bank Sanbo;	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)
143	53/Pdt.G/2014/PN.Tk.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Akta Risalah Lelang No. 36/1987-1986 tertanggal 11 Desember 1987	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Tuan AMAT ALI tersebut.
144	202/Pdt.G/2014/PN.Smg.	Pengadilan Negeri Semarang	SHM No. 195 yang terletak di Jl. Puspowarno IX/2 Semarang	Gugatan Damai	SELESAI
145	10/Pdt.G/2014/PN.Trk.	Pengadilan Negeri Trenggalek	sebidang tanah sawah pertanian SHM No. 265 Surat Ukur Tanggal 9-5-2001 No. 94/2001 Luas 3005 m2, atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing, Kec. Mujungan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur dan tanah pekarangan SHM No. 1565, Surat Ukur Tanggal 21-02-2008 No. 467/Sambirejo/2008 Luas 657 m2, atas nama Mochamad Kosin Nurahman, yang terletak di Desa Sambirejio, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur	Proses di Tingkat Kasasi	
146	319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 667/Kedoya, Gambar Situasi No. 64/916/1984 tanggal 21 Februari 1984 atas nama Karyana Nusa; SHM No. 682/Kedoya, Gambar Situasi No. 65/917/1984 tanggal 21 Februari 1984 atas nama Tuty Ridwan Tjandra; dan SHM No. 910/Kedoya, Gambar Situasi 1020/4427/1985 tanggal 30 Juli 1985 atas nama Terunodjoyo;	Putusan Tingkat Banding: Membatalkan Putusan PN. Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2015 No. 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan Tingkat PN: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
147	96/Pdt.G/2014/PN.Plg.	Pengadilan Negeri Palembang	Tanah seluas 28.706 m2, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta RT. 06/09 Kel. Siring Agung Palembang (dahulu Kel. Lorok Pakjo Palembang) sebagaimana SHM No. 3010, Gambar Situasi No. 1024 Tahun 1984 an. M. Yusuf	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard).
148	33/Pdt.G/2014/PN.Mjk.	Pengadilan Negeri Mojokerto	SHM No. 184, luas 98 m2, yang terletak di Kel. Kauman, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur	Putusan Tingkat Banding : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 03 Februari 2015 Nomor. 33/Pdt.G/2014/PN.Mjk, yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan Tingkat PN: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
149	322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT. 009/RW. 002, Menteng, Jakarta Pusat (SHM nO. 162/Menteng an. RG. Doeriat); 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No. 3261/Pondok Pinang an. Ny. F. Siti Rabini); dan 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No. 3264/Pondok Pinang an. Ny. F. Siti Rabini).	Proses Tingkat Banding	
150	42/Pdt.G/2014/PN.Kwg.	Pengadilan Negeri Karawang	Tanah dan bangunan SHGB 4 buah dengan luas tanah + 1.065 hektar. SHGB No.1/Karanganyar; SHGB No. 2/Karanganyar; SHGB No. 3/Karanganyar; SHGB No. 4/Karanganyar.	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
151	101/Pdt.G/2014/PN.Tk.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Surat Keputusan (SK) PUPN Cabang Lampung Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara dengan No. PJP-N002/PUPNC.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014.	Gugatan Gugur	SELESAI

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
152	30/Pdt.G/2014/PN.Sng.	Pengadilan Negeri Subang	Tanah bekas HGU No. 1/Cihambulu seluas 10.860.500 m2, yg terletak di Desa Karangmukti, Kec. Cipeundeuy, Desa Cihambulu Kadawung, Salamjaya, Kec. Pabuaran, Kab. Subang; Tanah bekas HGU No. 1/Cipeundeuy seluas 7.853.080 m2, yg terletak di Desa Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang;	Proses Banding	
153	399/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	SHGB No. 250/selong, luas 750 m2, an. FX. Widyastanto	Putusan Tingkat Pertama	- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Terlawan, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VI; - Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
154	930/Pdt.G/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	-SHGB No. 07, seluas 101.755 m2, terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 8, seluas 36.540 m2, terletak di Desa Klikiran, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 10, seluas 4.100 m2, terletak di Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 12, seluas 6.340 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 13, seluas 32.050 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 1356, seluas 33.500 m2, terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 35, seluas 8.600 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No. 36, seluas 51.700 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; -Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-1115 HT.04.06.TH.2000/NSTD, tanggal 24 November 2000, yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI	Pencabutan Perkara Banding	
155	132/Pdt.G/2014/PN.LP.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Sebidang tanah seluas 2.394 m2, sebagaimana SHM No. 9/Desa Telaga Sari, an. Tergugat III, terletak di Desa Telaga Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dan Sebidang tanah seluas 6.259 m2, sebagaimana SHM No. 11/Telaga Sari, an. Tergugat V, terletak di Desa Telaga Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.	Putusan Banding	Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
156	631/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 84, seluas 276 m2, di Desa Beberan, Blok KD Dadap Baberan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, an. Yusri Yusuf; SHM No. 1296/Mekarsari, seluas 115 m2, alamat Perum Kompas Indah, Jl. Trembesi Blok B5 No.1, Mekarsari, Tambun, Bekasi, an. Yusri Yusuf; SHM No. 1945/Mekarsari, seluas 135 m2, alamat Prum Kompas Indah, Jl. Alamanda Blok C2 No. 2, Mekarsari, Tambun, Bekasi, an. Yusri Yusuf; SHM No. 1456, seluas 135 m2, alamat Perum Sinar Kompas Utama, Jl. Kenanga Blok B2 No. 22, Mekarsari, Tambun, Bekasi, an. Susanti; Dll..	Gugatan Dicabut	SELESAI
157	517/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah-tanah yang beralamat di Jl. H. Domang, No. 6, RT/RW 0013/02, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat: SHM No. 1123/Kebon Jeruk, tgl. 16 Juli 1991, Surat Ukur No. 1372/1991 tgl. 22 Februari 1991, seluas 1.656 m2, an. Iwan Sutadi Sidarta; SHM No. 1124/Kebon Jeruk, tgl. 16 Juli 1991, Surat Ukur No. 1373/1991 tgl. 22 Februari 1991, seluas 462 m2, an. Iwan Sutadi Sidarta; SHM No. 1151/Kebon Jeruk, tgl. 22 Oktober 1991, Surat Ukur No. 1374/1991, tgl. 22 Februari 1991, seluas 732 m2, an. Iwan Sutadi Sidarta.	Putusan Tingkat Banding: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 517/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. yang diajukan banding tersebut.	Putusan Tingkat PN: Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
158	827/Pdt.G/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 36, Gambar Situasi 625/1977, luas 1770 m2, terletak di Desa Bojong Rawa Lumbu (sekarang Kelurahan Bojong Rawa Lumbu) Kec. Tambung (sekarang Kecamatan Bekasi Timur) Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Narogong KM 5,5 Bekasi.	Putusan Tingkat Pertama	1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III; 2. Menyatakan Pengadilan negeri tidak berwenang untuk, mengadili perkara aquo ;

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
159	788/Pdt.G/2014/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	Bidang tanah sesuai SHM No. 4841, seluas 2.400 m2, sesuai Gambar Situasi No. 1762/1995 tanggal 11 Juli 1995, terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali; Sebagian bidang tanah sewa Hak Milik Pipil No. 67, seluas 1.966 m2, sesuai Akta Sewa-Menyewa Tanah No. 206 tanggal 31 Januari 1990, dibuat dihadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di denpasar.	Gugatan Gugur	SELESAI
160	891/Pdt.G/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Klampisngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, SHM No. 1076, seluas 47 m2 dan tanah dan bangunan rumah berdiri di atas rumah sewa Kota Surabaya sesuai SIPT No. 188.45/1324P/436.6.18/2013 tanggal 18 April 2013, seluas 588 m2, terletak di Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya Jalan Kalibokor Selatan No. 146.	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RENDY HERDIANTO HARSO, 2. RR. INDAH WARNIATI tersebut
161	173/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/Cikini	Putusan PN Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian	Biro Advokasi tidak mengajukan banding karena amar putusan perkara tersebut hanya menghukum Tergugat untuk melakukan roya dan sesuai dengan data dimaksud tidak lagi terdapat kewajiban kepada Negara.
162	282/Pdt.G/2015/PN.Tnn.	Pengadilan Negeri Tondano	SHM No. 50/Katingolan, Tondano , SHM No. 49/Katingolan dan SHM No. 130/Ranowangko	Putusan Kasasi	Menang tingkat kasasi (berdasarkan informasi dari website Mahkamah Agung, namun relaas belum diterima KPKNL Manado)
163	728/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 05162/Cilandak Barat, tgl. 17 Januari 2000, atas nama H. Djuanda seluas 1.984 m2, terletak di Rt. 13 Rw. 02 (dahulu Rt. 04/02) Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak Jakarta Selatan	Gugatan Dicabut	SELESAI
164	04/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	menuntut pembayaran atas 5 (lima) Sertifikat Deposito dan 1 (satu) Rekening Koran atas nama Penggugat, dengan perincian sebagai berikut: a. Deposito Berjangka, No. Seri SB 007061, No. 100/10196/10/98, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) a.n. PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 27 Oktober 1998; b. Deposito Berjangka, No. Seri SB 008217, No. 100/10246/03/99, Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) a.n. PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 1 Maret 1999; c. Deposito Berjangka, No. Seri SB 008261, No. 100/13275/03/99, Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) a.n. PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999; d. Deposito Berjangka, No. Seri SB 008263, No. 100/10309/03/99, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999; e. Deposito Berjangka, No. Seri SB 008262, No. 100/10308/03/99, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999; f. Rekening Koran No. Rek. 100-007056-1-01-6 sebesar Rp. 143.600.364,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) a.n. PT. Wilhara Prima Realty	Putusan Kasasi	Menolak Permohonan kasasi Pemohon Kasasi : PT WILHARA PRIMA REALTY tersebut
165	03/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Meminta pembatalan Hak Tanggungan atas tanah seluas 38.029 m2 milik Penggugat yang terletak di Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat yang telah dibangun jalan tol yaitu Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II yaitu : hak tanggungan atas SHGB No. 436/Meruya Udik dan SHGB No. 442/Meruya Udik.	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
166	18/Pdt.G/2015/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	SHGB No. 1/Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat seluas 3.760 m2; SHGB No. 2/Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat seluas 8.168 m2; SHGB No. 4/Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat seluas 18.430 m2.	Putusan Kasasi	Mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi I: 1. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN LAIN-LAIN, 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, Pemohon Kasasi II: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA tersebut
167	102/Pdt.Bth//2015/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah seluas 154 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya SHM No. 2276 atas nama Ong David yang terletak di Jl. Residen Sudirman No. 56A, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya.	Gugatan Dicabut	SELESAI

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
168	152/Pdt.Bth/2015/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan SHM No. 1355, luas 26 m2, an. Ny. The Lanny Tedjakusuma, terletak di Jalan Kembang Jepun No. 113, Kel. Bongkaran, Kec. Pabenan Cantian, Kota Surabaya; Tanah dan bangunan SHM No. 1751, luas 375 m2, an. Ny. The Lanny Tedjakusuma, terletak di Jalan Satelit Indah 6/JN-12 Kel. Tnjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya; Tanah dan bangunan SHM No. 1427, luas 39 m2, an. Ny. The Lanny Tedjakusuma, terletak di Ruko Kartika Ceria Jalan Kembang Jepun No. 129 S, Kel. Bongkaran, Kec. Pabenan Cantian, Kota Surabaya; Tanah dan bangunan SHM No. 531 an. Jo Iskandar terletak di Prop. Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Asemrowo, Kel. Asemrowo; Persediaan Barang Dagangan terletak di Ruko Kartika Ceria Jalan Kembang Jepun No. 129 S Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya	Gugatan Dicabut	SELESAI
169	153/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 84, seluas 276 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya seluas 168 m2, Jalan Desa Beberan, Blok KD Dadap beberan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, an. Yusri Yusuf; SHM No. 1296/Mekarsari, seluas 115 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya seluas 163 m2, Perum Kompas Indah, Jalan Trembesi Blok B.5 No. 1 Mekarsari, Tambun, Bekasi, an. Yusri Yusuf; Dll,.	Putusan Banding	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard);
170	154/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah milik Adat C No. 286 seluas 2.305 m2, dari Rimin bin Pandjul berdasarkan Akta Jual Beli No. 1062/1973 tanggal 28 Juli 1973 yang dibuat dihadapan Kusnadi, Camat/PPAT Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan Cilandak Barat Rt. 004/Rw. 002, Kel. Cilandak, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi SHM No. 582/Cilandak seluas 2.305 m2, sesuai Gambar Situasi No. 1262/1914/1973 tgl. 22-09-1973 an. H. Utas.	Putusan PN	Menolak Gugatan Penggugat
171	191/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat Tanah No. 46 GS No. 5940/1990 luas 720 m2, atas nama Ir. Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas; Sertifikat Tanah No. 47 GS No. 5941/1990 luas 720 m2, atas nama Ir. Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas; Sertifikat Tanah No. 48 GS No. 5942/1990 luas 720 m2, atas nama Ir. Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas;	Gugatan Dicabut	SELESAI
172	265/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHGB No. 358/Meruya Selatan, Jakarta Barat, dengan luas tanah 144 m2 dan luas bangunan 152 m2.	Proses Banding	
173	109/Pdt.G/2015/PN.Blb.	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Sertifikat tanah No. 46 GS No. 5940/1990 luas 720 m2, atas nama Ir. Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas; Sertifikat Tanah No. 47 GS No. 5941/1990 luas 4080 m2, atas nama Ir. Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas; Sertifikat Tanah No. 48 GS No. 5942/1990 luas 2000 m2, atas nama Ir. Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas;	Putusan PN	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
174	126/Pdt.G/2015/PN.Cbi.	Pengadilan Negeri Cibinong	Sertifikat No. 429/Tengah, luas 22.870 m2, terletak di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, An. Gito Sewoyo.	Putusan Peninjauan Kembali	Menolak Permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HARYO WIJAKSONO tersebut

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
175	83/Pdt.G/2015/PN.Tjk.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	a) SHM No. 19, an. Anwar Salim (dh. Lim Tjay Goen), Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung; b) SHM No. 9557, an. Teddy Mustopo, Desa Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung; c) SHM No. 8979, an. Anwar Salim (dh. Lim Tjay Goen), Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung; d) SHM No. 20, an. Anwar Salim (dh. Lim Tjay Goen), Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung; e) SHM No. 111, an. Vivian Asalli, Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung; f) SHM No. 99, an. Vivian Asalli, Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung; g) SHM No. 9559, an. Rudi Mustopo, Desa Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung; h) SHM No. 9610, an. Rudi Mustopo, Desa Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung; i) SHM No. 9562, Desa Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung; j) SHM No. 198, Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung; k) SHM No. 118, Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung; l) SHM No. 9558, Desa Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung;	Gugatan Dicabut	SELESAI
176	270/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No. 4988/Sunter, GS No. 1876 Tahun 1985, dan surat-surat Oper Pakai atas ruko milik Pembantah, yang terletak di Jl. Krekot Jaya Blok C-II/12 D, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan surat-surat Tanah Bekas Hak Pakai yang terletak di Jl. Karang Anyar A VII No.19A Rt. 007/07, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.	Proses Peninjauan Kembali	
177	377/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 57 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SHGB No. 1499/Gondangdia tgl. 07-12-2012, Surat Ukur No. 00012/Gondangdia/2011 tgl. 28-09-2011, seluas 930 m2, an. Budi Prakoso.	Putusan Tingkat Kasasi	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, 2. PT. SUNDAE P.R, 3. Hj. R. AY. MONIEK SRIWIDIYATNI, tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 243/PDT/2017/PT.DKI tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 2016;
178	680/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 982/Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Surat Ukur No. 00947/2004 tanggal 7 Juni 2004, dengan luas 111 m2, dengan lokasi lahan berada di Jalan Mampang Prapatan (d/h Jl. Buncit Raya) RT. 002 RW. 01, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dan SHM No. 983/Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Surat Ukur No. 00948/2004 tanggal 7 Juni 2004, dengan luas 115 m2, dengan lokasi lahan berada di Jalan Mampang Prapatan (d/h Jl. Buncit Raya) RT. 002 RW. 01, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	Gugatan Damai	SELESAI
179	362/Pdt.G/2015/PN.TNG	Pengadilan Negeri Tangerang	Surat No. S-4806/KN/2007	Proses Kasasi Tk. Pertama dan Tk. Banding Menang	
180	101/Pdt.G/2015/PN.JMR	Pengadilan Negeri Jember	Tanah seluas 691m2 berikut bangunan diatasnya tercatat dalam SHM No. 3265 atas nama Ny. Nanik Widowati, terletak di Desa Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur	Belum ada pengajuan PK Tk. Pertama Kalah Tk. Banding Menang TK. Kasasi Menang	

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
181	795/Pdt.G/2016/PN.Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	Sertifikat Hak Milik No.1438 tanggal 9 Mei 1986 atas nama Robert Leo terletak di Desa Sarua	Pemeriksaan tingkat banding Tingkat 1 memenangkan Kemenkeu	
182	108/Pdt.G/2016/PNJKT.UTR	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Agung Tengah 4 Blok II F 1/1-20, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sesuai dengan SHGB No. 5603/Sunter Tahun 1986 seluas 857m2 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Gambar Situasi No. 1943/1986 tanggal 12 Juli 1986	Relaas Pemberitahuan Putusan Belum diterima sampai saat ini. Biro Bantuan Hukum mendapat Informasi dari Kuasa Penggugat isi dari putusan adalah Pihak PKNSI Menang.	
183	09/Pdt.G/2016/PN.LSM	Pengadila Negeri Lhokseumawe	Sebidang tanah seluas 8275m2 yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kota Lhokseumawe, Kecamatan Muara Dua, Desa Keude Cunda dengan bukti pemilikan SHM No. 116,	Putusan Kasasi kalah Tk. Pertama dan Tk. Banding Menang	
184	465/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No, 1239/kebayoran Lama Utara seluas 305 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Prov. DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan kebayoran Lama, kelurahan Kebayoran Lama Utara	Proses Kasasi Tk. Pertama dan Banding Kalah	
185	578/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah SHGB No. 1762, seluas 756m2, terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE Nomor 3	Putusan Banding Menang (Sesuai SIPP, relaas belum diterima) Tk. Pertama Menang	
186	363/Pdt.Bth/2016/PN.MDN	Pengadilan Negeri Medan	Sebidang tanah seluas ± 5564m2 yang terletak di Jalan Dr. Mansyur masuk ke Jalan SMK/IKadin/Gg. Merdeka, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 25010/A/I/24 tertanggal 15 Juni 1974	Sudah Putus di Tk. Pertama, tetapi belum ada upaya banding sampai saat ini	
187	1084/Pdt.G/2015/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Menanggal Harapan I/18, RT 008/RW 004, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam SHM No. 658 tanggal 21 Oktober 1986, GS No. 1159/86 tanggal 21 Januari 1986, luas 197 m2, an. Agustinus Yosep Soepadmo, MS.	Gugatan Dicabut	SELESAI
188	94/Pdt.G/2015/PN.Srg.	Pengadilan Negeri Serang	Meminta Pembatalan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tanggal 21 Agustus 2015 No. 445/2015.	Putusan Tingkat Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 94/Pdt.G/2015/PN.Srg. tanggal 21 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut	Putusan PN Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
189	210/Pdt.G/2015/PN.Blb.	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Jaminan sebidang tanah dan rumah milik Penggugat yang terletak di Blok Sumur Bandung (setempat dikenal dengan Jl. Raya Cililin No. 26 Kampung Sumur Bandung, RT 02 RW 02) Desa Cililin, Kec. Cililin, Kab. Bandung, dengan luas kurang lebih 235 m2, berdasarkan SHM No. 421/Cililin, Kabupaten Bandung, an. Dayat.	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
190	389/Pdt.Bth/2015/PN.Mks.	Pengadilan Negeri Makassar	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 8 No. 32 s/d 34, sebagaimana sesuai SHM No. 20256 (Eks No. 3201), GS No. 10731, luas 200 m2, SHM No. 20309 (Eks. No. 3200), GS No. 10730, luas 67 m2, dan SHM No. 20310 (Eks No. 3208), GS No. 10718, luas 33 m2, dengan batas-batas keseluruhannya, Utara dengan tanah kosong, Timur dengan Ruko No. 35, Selatan dengan Jalanan, Barat dengan Ruko No. 31.	Proses Tingkat Kasasi	
191	14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Jaminan Kebendaan : Sebidang tanah SHGB No. 250/Selong, luas 750 m2, an. FX. Widyastanto Sebidang tanah SHGB No. 3/Cikiwul, luas 13.955 m2, an. Turut Tergugat I Tiga bidang tanah : Tanah adat persil No. 214.D Kohir 256, luas 700 m2, an. PIIT Bin Iman, milik FX. Widyastanto, berdasarkan AJB No. 105/FS/594.4/II/1990 tgl. 5 Februari 1990; Tanah Milik Adat Persil No. 214.D Kohir No. 527, luas 910 m2, an. Masir Bin Udi, milik FX. Widyastanto berdasarkan AJB No. 106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990; Tanah Milik Adat Persil No. 214 Kohir 401 luas 5.000 m2, an. H. Tajudin Bin Inong, milik FX. Widyastanto berdasarkan AJB No. 107/FS/594.4/II/1990 tgl. 5 Februari 1990 Sebidang tanah SHM No. 162/Menteng, luas 769 m2, an. R. Gondholpus Doeriat; Jaminan Perusahaan: Diberikan oleh Turut Tergugat II Jaminan Perorangan: Diberikan oleh FX. Widyastanto	Putusan Banding: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2017 yang diajukan banding tersebut;	Putusan PN: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
192	21/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah seluas + 83 Ha, yang terletak di Desa Bojong dan Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, tercatat an. PT. Pentabinangun Sejahtera yang diperoleh/dimiliki melalui pelepasan hak (SPH) dari pemilik awal/masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK/231.S/KWBPN/172-90, tertanggal 21 Februari 1990.	Proses Banding	
193	30/Pdt.G/2016/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	Jaminan 22 Unit Ruko berlantai 3, terdiri dari 25 SHM, yang keseluruhannya terletak di Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prop. Bali atau sekarang dikenal dengan nama Kuta Square.	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I HARIJANTO KARJADI;
194	71/Pdt.G/2016/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	Jaminan sebidang tanah seluas 5.500 m2, berikut segala turutannya, dengan SHM No. 312, atas nama I Ngeha Ridja (Tergugat V) terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.	Proses Peninjauan Kembali	Putusan Tk. Kasasi: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I SURAHMAN dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG DENPASAR tersebu
195	60/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Obyek harta warisan milik Penggugat yang berada di Jalan Pintu Air Raya No. 15, RT. 008, RW. 001, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, SHM No. 253/Pasar Baru, seluas 980 m2.	Putusan Tk. Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 60/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;	Putusan PN: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
196	45/G/2016/PTUN.JKT.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No. S-10215/KN.5/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Tanggapan Atas Permohonan Penebusan Aset Terletak di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat Sesuai SHGB Nomor 1149/Kebon Kacang.	Proses Tingkat Kasasi	Putusan Banding: Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
197	17/Pdt.G/2016/PN.Cbi.	Pengadilan Negeri Cibinong	Tanah dan bangunan seluas 2.450 m2, SHM No. 432/Pabuaran, atas nama Yufrida Siahaan, Gambar Situasi No. 5260/1983, tanggal 13 September 1983, terletak di Jl. Raya Bogor KM. 39 No. 44, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.	Putusan Tingkat BandingMenguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Cbi. yang dimohonkan banding	Putusan PN Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
198	96/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah dan bangunan rumah, seluas 314 m2, dengan SHM No. 262 an. Conny Martie Rawung, yang terletak di Kel. Sario Utara.	Proses Tingkat Kasasi	
199	69/Pdt.G/2016/PN.Blb.	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Tanah seluas 6.800 m2, Jl. Papan KM.5 No. 499, Desa Bojong Emas Majalaya, sebelumnya berdiri bangunan pabrik berkontrusi baja dengan luas + 1.200 m2.	Gugatan Dicabut	SELESAI
200	03/G/2016/PTUN-PLG	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	SHM No. 1845, Desa Talang Kelapa, Tanggal 8 April 1980, GS No. 130/1980, tanggal 8 April 1980, luas 117.854 m2, an. Dasuki Angkosubroto, terletak di Desa Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang	Putusan Peninjauan Kembali	Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
201	301/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Niaga Hijau II/32, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seluas 200 m2, sebagaimana dimaksud di dalam SHM No. 5228/Pondok Pinang, luas 200 m2, atas nama Ir. Raden Soepangat Soemarto	Gugatan Dicabut	SELESAI
202	343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1. Sebidang tanah seluas 568 m, SHGB No. 90/Rawa Bunga, an. Alm. Tn. Darwinto, yang terletak di Jl. Bekasi III No. 4, Jatinegara, Jakarta Timur; 2. Sebidang tanah seluas 249 m2, SHGB No. 148/Rawa Bunga, an. Ny. Emmy Sutanto/Penggugat I, yang terletak di Jl. Bekasi III No. 7, Jatinegara, Jakarta Timur; 3. Sebidang tanah seluas 912 m2, SHM No. 981/Nanggewer, an. Andrianto/Penggugat II, yang terletak di Jl. Raya Cibinong KM. 48.5 Bogor;	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. Tuan ANDRIANTO, 2.Tuan ERWIN dan 3. ERSA NOVITA tersebut
203	465/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah SHM No. 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m2, diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 9 September 1996 No. 4249/1996, terletak di Poprinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, an. Ny. Dokter Myrna Kantjananingrat	Putusan Banding: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 April 2017 Nomor 465/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding	Putusan PN: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
204	381/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah seluas 468 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya sesuai SHM No. 427/Jatipadang, yang terletak di Jl. Pejaten Raya No. 48, RT. 013/02, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, jakarta Selatan.	Proses Banding	
205	138/Pdt.G/2016/PN.Tjk.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Surat Keputusan (SK) Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Lampung Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas namaÂ Â Â Â PT Jupiter Indah dengan Nomor : PJPN-002/PUPNC.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
206	148/Pdt.G/2016/PN.Pdg.	Pengadilan Negeri Padang	Memberi izin kepada Kantor BPN Kota Padang untuk menghapuskan Hak Tanggungan/MEROYA di dalam SHM No. 2125/Kel. Flamboyan Surat Ukur No. 395 tanggal 23 Desember 1971 an. Zanzibar Gelar Datuk Mantari Basa	Putusan PN	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
207	871/Pdt.G/2016/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14/Sukomanunggal. Gambar Situasi No. 79/U/1972 tanggal 10 April 1972 an. Chindra Hudaya Widarto.	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterim

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
208	605/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1295, Surat Ukur tertanggal 05 Mei 1998 No. 14/1998, seluas 1.192 M2 terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, setempat terkenal dengan Jalan Jeruk No. 01.	Proses Kasasi	
209	71/Pdt.G/2016/PN.Cbn.	Pengadilan Negeri Cirebon	Berupa 23 bidang tanah dan bangunan SHM No. 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/Paklipan total seluas 2.435 m2 an. Susilawan Suryanatadiredja (d/h. Kho Joe Keng) yang terletak di Kompleks Pusat Niaga Jl. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon.	Putusan PN	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
210	94/Pdt.G/2016/PN.Srg.	Pengadilan Negeri Serang	Pembatalan Perjanjian Untuk Jual Beli sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Untuk Jual Beli (APJB) No. 19 tanggal 18 Januari 1992, yang dibuat oleh Notaris Soetji Mardiyati Solihin, SH, antara Fadilah Muslim alias Fadilah Mus dengan Purnomo ex-Direktur PT Palwaaminatama Jaladri.	Putusan PN	Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
211	276/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat-sertifikat tanah milik penggugat yang terdiri atas: 1. SHGB No. 1/Caringin seluas 175.783m2 a.n. PT Kencana Sinar Semesta 2. SHGB No. 3/Caringin seluas 2.270m2 a.n. PT Kencana Sinar Semesta 3. SHGB No. 4/Caringin seluas 675m2 a.n. PT Kencana Sinar Semesta 4. SHGB No. 5/Caringin seluas 10.330m2 a.n. PT Kencana Sinar Semesta 5. SHGB No. 6/Caringin seluas 2.050m2 a.n. PT Kencana Sinar Semesta 6. SHGB No. 270/Caringin seluas 178m2 a.n. PT Kencana Sinar Semesta	Sudah Putus di Tk. Pertama menang, tetapi belum ada upaya banding sampai saat ini	
212	256/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Akta Perjanjian Kredit Nomor 82 tanggal 26 Februari 1998	Sudah Putus di Tk. Pertama Menang (Inkracht)	
213	654/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Deposito Milik Penggugat berikut bunganya yang diperhitungkan sampai dengan tanggal di daftarkannya gugatan ini adalah sebesar Rp. 1.713.160.384.139,-	Gugatan Dicabut	SELESAI
214	695/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No. 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi No. 10821/1996 27-05-1996 tercatat ayas nama Gunawan Susilo	Proses Banding	
215	920/Pdt.G/2016/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	Sebidang atas bangunan atas nama I Nyoman Ordi Sugita yang sertifikat an. I Gusti Ngurah Oka Budiana, SHM No. 1692, luas 3.980 m2, SHM No. 1693 luas 1689 m2, SHM No. 1694 luas 1069 m2, dan SHM No. 1691 awalnya luasnya 2.800 m2, yang dipecah oleh Tergugat III I Gusti Oka Budiana menjadi SHM No. 3486 luas 240 m2, dan oleh Tergugat III I Gusti Ngurah Oka Budiana dipecah menjadi SHM No. 3487 luas 173 m2, dengan an. Tergugat IV (Ersa Nur Arsiah) dari keseluruhannya terletak di Desa Kel. Sumerta Klod. Banjar Sebudi, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali.	Gugatan Dicabut	SELESAI
216	132/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan seluas 325 m2 dan bangunan seluas 380 m2, SHGB No. 6199 beralamat di Jl. Pluit Utara VII, No. 2, RT. 005, RW. 005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, atas dasar pembelian dari Sdr. Cheong Njin Foe pada tahun 1994, dengan Akta Jual Beli PPAT Abdoellah Hamidy, SH. tertanggal 26-8-1994, No. 346/Penjaringan/1994.	Proses Banding	
217	129/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan KH. Ashari No. 69 B, Jakarta Pusat an. Ang Rukiman	Putusan Kasasi	Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUHERMAN HARTONO tersebut;
218	03/Pdt.G/2017/PN.Lsm.	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Aset PT Genali Raya yang bergerak di bidang pembangunan perumahan pada tahun 1995 dengan jaminan SHM No. 58 yang akan dipecahkan menjadi 149 kavling, yang terletak di Desa Padang Saksti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekarang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.	Proses Kasasi	
219	886/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 223/Rawa Barat, seluas 340 m2, terletak di Jalan Suryo No. 16 Blok Q/3 Persil No. 19, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
220	385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHGB No. 6211 atas nama PT. Karsindo Utama	Proses Banding	
221	436/Pdt.G/2017/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Memerintahkan Kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat HAK GUNA BANGUAN No. 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sertifikat HAK GUNA BANGUAN No. 2/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sertifikat HAK GUNA BANGUAN No. 4/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Proses Kasasi	
222	176/Pdt.G/2017/PN.Dpk.	Pengadilan Negeri Depok	Tanah seluas + 6.778.059 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, dengan Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru. Lw. Naggung, Jati Jajar, Cimpaeum dan Sukatani, yang dikelola untuk pembangunan perumahan dan Golf Course dengan nama EMERALDA.	Proses Banding	

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
223	498/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebuah tanah dan bangunan sesuai SHGB No.: 1712/Cideng, luas 75M2 (Gambar situasi No. 971/1991, tanggal 31 -08-1991), atas nama Penggugat, yang terletak di Jl. KH. Hasyim Ashari Blok D-1 No. 9, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.	Putusan Banding: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2018 Nomor. 498/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).
224	637/Pdt.G/2017/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Tanah seluas 25.644 m2, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Sultan Hasanudin, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tanah ex SHGB No. 1/Mekarsari atas nama PT Jembatan Kencana Raya.	Gugatan Dicabut	SELESAI
225	637/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement ("MSAA") 21 September 1998 dan perubahannya	Proses Banding	
226	1006/Pdt.G/2017/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Pemberian Hak Penebusan atas Penggugat terkait penyelesaian pengambilan kembali Obyek Jaminan atas luas tanah seluas + 3.000 M2 sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 /Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana Gambar Situasi Tanggal 10 April 1972 Nomor : 79 /U/1972 yang dahulu pernah dijaminkan pada PT. Bank Umum Servitia tbk. sebagai bagian Bank yang terlikuidasi	Proses Kasasi	
227	4/Pdt.G/2018/PN.Plg	Pengadilan Negeri Palembang	SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 5/Desa Gasing, dengan GAMBAR SITUASI No. : 296/Desa Gasing /1972, yang terletak di Jalan Pangeran Ayin No. : 28 RT. 06 RW. 03, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dahulu di Jalan Kebun Sayur atau Jalan Suka Maju, Kenten Laut, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	Pemeriksaan Tingkat Kasasi Tingkat 1 dan 2 memenangkan Kemenkeu	
228	501/Pdt.G/2018/PA.Bjr	Pengadilan Agama Banjar	SHM 566, SHM No. 568, SHM No. 576, SHM No.5 di Blok G Gembok, Dusun pananjung, Desa Mulyasari, Banjar, Ciamis	Putusan sela: Gugatan NO (eksepsi kompetensi absolut diterima)	
229	17/pdt.G/2018/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang Tanah seluas 144 m2 beserta bangunan yang terletak di Perumahan Citra Indah Cluster Bukit Bougenvile Blok AI 10/03 Kelurahan Singaraja, Kecamatan jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai dengan SHGB No. 7702/Singajaya	Menang Tk. Banding Menang Tk. Pertama	
230	287/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan Jl. Kelapa Dua Wetan No. 99, Ciracas, jakarta timur	Putus di Tk. Pertama Menang (Inkracht)	
231	295/Pdt.G/2018/PN.CBI	Pengadilan Negeri Cibinong	SHGB No. 182/Wanaherang	Proses Persidangan (Tahap Pembuktian)	
232	56/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Somasi permintaan pencabutan pemblokiran atas aset yang diklaim milik Penggugat, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03639/Wijaya Kusuma, seluas ± 1.038 m², yang terletak di Jl. Daan Mogot Km.2 No. 50B	Gugatan Dicabut	SELESAI
233	861/Pdt.G/2018/PN.Tng.	Pengadilan Negeri Tangerang	Tanah dan Bangunan Seluas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi), Yang Terletak di Perumahan Bumi Serpong Damai Blok BL/24, Desa Rawabuntu, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, Jawa Barat, atas nama Tan Joen Lie (Penggugat) Sebagaimana Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3187/Rawabuntu, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi No. 5772/1994, tanggal 11 Mei 1994	Proses Pembacaan Putusaan	
234	277/G/2018/PTUN-JKT	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Surat Nomor : S-806/KN.5/2017 tanggal 9 Juni 2017, tentang Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks. Kelolaan PT PPA (Persero)	Proses Banding	Telah diputus Tk. Pertama 16 Mei 2019, gugatan dikabulkan. Telah dinyatakan banding pada tanggal 29 Mei 2019. Sedang menunggu putusan banding.
235	470/Pdt.G/2019/PN.DPS	Pengadilan Negeri Denpasar	Seidang Tanah dengan SHM Nomor 507 dengan gambar situasi, No. 8573/1991, tanggal 31 Desember 1991 seluas 56850m2, terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	Pemeriksaan Para Pihak	
236	316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB Nomor 1712/Cideng, luas 75 m2 di Jalan KH Hasyim Ashari Blok D-1 No 9 Kel Cideng Kec Gambir Jakarta Pusat	Pemeriksaan Para Pihak	



Republik Indonesia

Lampiran 26

Utang Kepada Pihak Ketiga & Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2019 & 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.211.095.190	345.213.143	-	-	-	7.991.268
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.761.291.336	99.388.158	4.417.868.884	5.361.621.728	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	63.624.154.354	62.537.868.997	1.689.080.325	952.515.553	1.979.850	1.286.850
4	005	MAHKAMAH AGUNG	32.063.223.376	23.504.418.265	1.184.068.053	971.400.491	-	2.819.000
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	362.711.718.337	132.869.792.442	316.645.746	419.977.265	-	1.031.673.674
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	134.857.515.116	107.303.946.550	62.210.464.141	63.334.688.539	3.372.583.154	5.541.091.473
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	15.900.155.128	12.099.580.668	5.244.269.447	3.388.124.870	17.811.505	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	350.592.296.261	66.046.352.492	578.664.833	383.250.000	85.745.636	197.781.298
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	8.014.239.128.063	8.488.408.342.644	1.164.212.773.960	1.169.368.774.536	-	25.144.591.430
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	64.435.234.760	105.218.621.484	430.662.482.004	297.076.909.128	-	893.850
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	866.046.141.211	472.206.297.236	87.794.965.558	88.730.205.183	9.704.380.143	2.690.975.505
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	295.808.434.356	247.540.754.802	5.102.190.855	4.991.253.179	-	-
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	30.267.344.663	4.736.812.603	27.813.881.634	19.723.767.548	101.858.681	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	36.898.011.578	111.949.273.418	23.432.344.332	10.351.484.291	781.442.436	288.913.070
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	562.452.924.944	446.077.282.624	21.025.467.934	31.947.759.585	108.614.356	1.781.300
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	508.057.767.851	508.819.563.523	2.383.551.950	1.405.663.161	421.038.089	268.624.707
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.421.240.720.944	2.247.499.237.957	74.168.610.467	115.414.379.017	30.997.279	109.374.898
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	244.933.936.997	489.786.337.885	33.103.950.454	28.527.070.912	1.926.065.946	4.072.446.624
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	992.265.029	3.397.831.487	618.277.435.260	551.319.155.846	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.702.361.654	1.205.917.841	1.967.279.648	146.742.000	10.341.818	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.762.110.766	48.511.655.011	3.784.346.489	1.663.905.634	282.653.560	2.727.272
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.944.099.065	9.224.707.014	3.525.392.023	2.795.261.502	25.267.463	-
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.232.905.334.297	1.152.176.385.294	16.627.111.769	18.512.859.775	88.798.376	13.349.261
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	168.247.453	2.132.143.718	-	-	-	257.551.671
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.606.249.808	4.232.554.692	-	-	78.445.027	93.258.415
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	369.920.663	384.536.115	-	-	180.462.613	106.603.805
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	14.675.892.027	30.808.255.546	3.020.787.757	4.453.731.971	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	102.881.340	6.626.846.612	3.278.144.675	1.627.566.300	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	717.454.462.210	1.466.618.127.260	512.887.479.869	480.381.269.898	4.897.443.675	7.559.368.598
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	7.230.000.821	7.907.900.743	13.277.548.984	27.580.098.626	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.000.000	7.203.141.374	-	10.283.000	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	533.790.332	2.694.682.148	-	-	2.514.559	12.543.385
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	20.754.009.936	54.791.945.996	1.149.557.917	473.783.631	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.098.612.286	937.297.137	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	337.177.139	1.076.426.760	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	81.489.985.473	132.577.726.879	168.876.626	406.655.330	2.603.458	162.548.572
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	4.546.685.157	21.715.821.483	197.392.416	200.409.583	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	81.739.452.684	57.486.088.181	407.198.535.144	428.229.924.943	71.888.966	28.517.852
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	33.745.395	2.771.297.238	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	77.535.296.413	48.449.639.269	11.011.826.851.692	10.455.045.823.788	4.213.620	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	528.076.509.868	309.249.930.906	20.156.714.388	20.182.640.866	11.082.251.743	1.142.655.681
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	3.162.277.457	12.307.969.987	25.702.335.439	33.391.680.815	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	527.169.875	461.426.721	1.611.678.581	1.251.405.956	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.687.019.513	2.018.700.285	863.863.762	1.627.616.429	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.947.169.047	2.647.769.945	3.877.500	19.387.500	-	388.900
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	7.317.993.160	4.357.312.149	353.000.000	-	1.178.000	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	75.504.231.305	3.716.023.450	463.760.517	467.789.000	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	219.204.864	715.839.862	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.207.698.304	1.260.040.398	-	-	3.780.165	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4.987.117.537	19.325.252.305	-	-	264.256.292	1.685.207.180
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	665.797.147	540.604.451	1.062.650.319	1.806.470.877	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	810.628.363	144.780.102	17.868.416	3.828.330	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.990.916.664	2.333.816.164	-	361.643.820	699.814.495	717.750.664
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.274.842.761	24.119.681.385	124.806.600	107.883.967	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	32.655.147.128	26.850.031.216	308.800.000	-	646.514.629	1.373.004.832
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.149.792.663	10.216.744.310	79.790.375	93.913.250	1.762.909	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.612.318.230	3.354.183.940	46.037.470	69.030.970	-	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4.938.805.832	5.225.574.491	-	609.000.000	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	66.956.370	14.916.503	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	202.533.880	542.824.852	1.548.058.622	2.576.406.102	18.792.186	10.564.192
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	781.858.417	2.458.992.441	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.544.968.188	1.961.186.258	339.543.666	299.415.347	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.200.679.957	2.846.298.102	459.705.249	714.393.028	200.650	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2019 *Audited*	31 DESEMBER 2018 *Audited*
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.873.544.164	3.077.868.216	1.298.667.399	1.476.673.228	88.653.324	16.128.950
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	13.588.327.008	29.111.364.834	497.388.718	628.236.150	310.000	4.076.053
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	32.801.376.924	14.794.536.717	63.064.556	29.427.488	288.030.698.611	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	7.880.785.685	4.763.656.901	-	-	134.546.994	218.367.763
68	100	KOMISI YUDISIAL	146.394.569	129.925.795	81.052.667	10.512.667	4.266.989	6.448.280
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	13.508.814.110	179.616.426.130	65.985.000	197.955.000	13.990.712.750	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	4.645.309.793	4.471.661.968	83.590.261	17.513.526	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	3.030.510.271	620.028.446	182.561.046	293.488.828	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	3.925.414.663	5.300.455.703	2.020.205.377	201.646.100	-	-
73	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	14.238.864	23.903.801	2.642.968.996	6.709.073.996	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	246.835.467	16.097.200	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	116.917.314	375.211.249	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	126.421.174	540.454.036	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	107.908.038.238	123.023.117.279	2.243.559.020.186	1.671.126.470.419	9.757.909	8.079.500
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	206.869.613	-	-	364.784.554	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	6.690.194.255	8.147.367.714	-	-	-	385.225.904
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.550.491.610	3.126.405.160	-	-	317.542.167	2.303.213.408
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.960.847.927	2.359.492.707	12.333.528.963	14.262.668.912	-	-
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	158.942.829.763	138.167.775.441	20.298.480.773	10.862.669.813	1.826.519.105	3.040.959.468
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	3.052.000	531.239.740	380.174.667	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	287.256.465	451.754.231	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	2.144.583.467	2.503.407.505	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	438.808.399	831.846.622	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	3.107.471.409	-	-		122.551.396	
JUMLAH PADA K/L			**17.329.403.887.015**	**17.548.296.494.980**	**16.879.575.100.899**	**15.584.991.431.064**	**339.806.045.078**	**58.508.784.553**
Jurnal Konsolidasi SPAN			**4.861.788.467.503**	**5.065.326.093.892**	**-**	**-**	**(4.909.642.639.937)**	**(5.092.755.757.470)**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	108.551.211.694.382	77.267.818.090.744	83.861.957.996	100.581.952.941	4.861.788.467.503	5.067.125.419.119
TOTAL			**130.742.404.048.900**	**99.881.440.679.616**	**16.963.437.058.895**	**15.685.573.384.005**	**291.951.872.644**	**32.878.446.202**

Republik Indonesia

Lampiran 27

Rincian Kewajiban Transfer Ke Daerah (DBH) Per 31 Desember 2019

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	Provinsi Aceh	183.079.284	40.900.421.533	9.524.524.600	50.608.025.417
2	Kab. Aceh Barat	8.321.773	433.684.302	4.025.382.191	4.467.388.266
3	Kab. Aceh Barat Daya	4.160.886	811.244.065	636.919.310	1.452.324.261
4	Kab. Aceh Besar	28.746.015	408.414.604	640.166.920	1.077.327.539
5	Kab. Aceh Jaya	8.321.773	817.591.302	775.376.126	1.601.289.201
6	Kab. Aceh Selatan	6.241.330	420.645.985	636.021.302	1.062.908.617
7	Kab. Aceh Singkil	-	814.950.504	1.180.536.991	1.995.487.495
8	Kab. Aceh Tamiang	8.321.773	406.503.318	3.669.877.309	4.084.702.400
9	Kab. Aceh Tengah	16.359.044	826.888.234	1.268.434.621	2.111.681.899
10	Kab. Aceh Tenggara	-	811.238.869	635.126.773	1.446.365.642
11	Kab. Aceh Timur	10.725.641	406.501.554	3.571.389.352	3.988.616.547
12	Kab. Aceh Utara	8.915.907	412.182.685	8.572.435.907	8.993.534.499
13	Kab. Bener Meriah	58.120.913	811.238.869	642.425.902	1.511.785.684
14	Kab. Bireuen	2.180.512	811.241.640	874.000.098	1.687.422.250
15	Kab. Gayo Lues	141.815.244	839.415.058	634.218.884	1.615.449.186
16	Kab. Nagan Raya	4.160.886	424.965.918	887.556.973	1.316.683.777
17	Kab. Pidie	17.568.159	422.030.826	1.857.805.099	2.297.404.084
18	Kab. Pidie Jaya	16.735.248	811.240.226	631.342.014	1.459.317.488
19	Kab. Simeulue	-	818.486.831	635.673.513	1.454.160.344
20	Kota Banda Aceh	6.241.330	811.238.869	662.289.585	1.479.769.784
21	Kota Langsa	8.321.773	811.238.869	709.144.885	1.528.705.527
22	Kota Lhokseumawe	6.241.330	811.238.869	13.842.160.580	14.659.640.779
23	Kota Sabang	6.241.330	799.007.488	630.356.545	1.435.605.363
24	Kota Subulussalam	8.321.773	815.777.938	805.881.261	1.629.980.972
25	Provinsi Sumatera Utara	203.901.897	12.090.718.633	10.587.274.760	22.881.895.290
26	Kab. Asahan	8.495.907	693.828.535	3.209.137.213	3.911.461.655
27	Kab. Batu Bara	8.495.907	692.935.360	730.880.089	1.432.311.356
28	Kab. Dairi	40.150.731	859.322.552	1.150.755.994	2.050.229.277
29	Kab. Deli Serdang	77.254.035	588.361.345	6.276.202.727	6.941.818.107
30	Kab. Humbang Hasundutan	19.197.236	671.617.245	664.772.386	1.355.586.867
31	Kab. Karo	12.581.761	709.516.904	994.978.964	1.717.077.629
32	Kab. Labuhanbatu	2.123.977	671.617.245	2.409.035.355	3.082.776.577
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	6.371.930	2.084.206.857	2.663.444.962	4.754.023.749
34	Kab. Labuhanbatu Utara	6.371.930	671.618.401	1.785.618.221	2.463.608.552
35	Kab. Langkat	8.495.907	588.642.717	9.915.676.880	10.512.815.504
36	Kab. Mandailing Natal	11.216.509	413.994.327	1.169.309.297	1.594.520.133
37	Kab. Nias	6.371.930	693.780.677	635.480.520	1.335.633.127
38	Kab. Nias Barat	2.123.977	692.935.360	711.332.566	1.406.391.903
39	Kab. Nias Selatan	8.495.907	1.249.315.482	1.436.956.748	2.694.768.137
40	Kab. Nias Utara	6.371.930	692.935.360	931.175.238	1.630.482.528
41	Kab. Padang Lawas	8.495.907	690.440.823	8.005.608.373	8.704.545.103
42	Kab. Padang Lawas Utara	6.371.930	943.844.031	8.206.932.459	9.157.148.420
43	Kab. Pakpak Bharat	11.160.520	679.520.148	868.434.435	1.559.115.103
44	Kab. Samosir	6.371.930	729.014.813	982.070.902	1.717.457.645
45	Kab. Serdang Bedagai	8.495.907	692.935.360	2.877.436.956	3.578.868.223
46	Kab. Simalungun	8.495.907	1.304.474.639	2.080.822.195	3.393.792.741
47	Kab. Tapanuli Selatan	6.371.930	377.432.919	2.058.055.118	2.441.859.967
48	Kab. Tapanuli Tengah	8.495.907	671.774.769	1.250.672.832	1.930.943.508
49	Kab. Tapanuli Utara	9.906.614	841.518.276	1.025.919.994	1.877.344.884
50	Kab. Toba Samosir	6.371.930	883.501.628	666.823.107	1.556.696.665
51	Kota Binjai	4.247.954	692.935.360	1.576.518.588	2.273.701.902
52	Kota Gunungsitoli	6.371.930	692.935.360	1.349.160.114	2.048.467.404

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
53	Kota Medan	10.477.388	671.617.245	2.390.564.926	3.072.659.559
54	Kota Padang Sidempuan	6.371.930	692.970.975	922.366.353	1.621.709.258
55	Kota Pematang Siantar	70.032.975	692.935.360	656.372.935	1.419.341.270
56	Kota Sibolga	8.495.907	692.935.360	703.308.046	1.404.739.313
57	Kota Tanjung Balai	8.495.907	692.935.360	829.838.964	1.531.270.231
58	Kota Tebing Tinggi	8.495.907	692.935.360	752.016.680	1.453.447.947
59	Provinsi Sumatera Barat	129.427.581	4.207.838.914	5.415.057.728	9.752.324.223
60	Kab. Agam	27.179.052	3.677.289	1.771.302.615	1.802.158.956
61	Kab. Dharmasraya	7.190.444	23.342.202	739.907.130	770.439.776
62	Kab. Kepulauan Mentawai	7.190.444	452.811.075	711.094.748	1.171.096.267
63	Kab. Limapuluh Kota	84.885.724	3.677.289	1.559.714.306	1.648.277.319
64	Kab. Padang Pariaman	7.190.444	258.747.096	633.982.778	899.920.318
65	Kab. Pasaman	17.646.042	258.788.716	1.071.336.766	1.347.771.524
66	Kab. Pasaman Barat	1.797.611	3.677.289	1.370.351.689	1.375.826.589
67	Kab. Pesisir Selatan	5.392.833	3.677.289	1.484.685.491	1.493.755.613
68	Kab. Sijunjung	7.190.444	3.677.289	1.187.555.946	1.198.423.679
69	Kab. Solok	17.616.466	3.745.731	780.291.389	801.653.586
70	Kab. Solok Selatan	3.595.222	3.677.289	4.145.017.964	4.152.290.475
71	Kab. Tanah Datar	31.499.682	258.748.302	1.655.754.701	1.946.002.685
72	Kota Bukit Tinggi	7.190.444	258.747.075	1.571.542.743	1.837.480.262
73	Kota Padang	7.190.444	258.747.927	5.313.407.075	5.579.345.446
74	Kota Padang Panjang	3.595.222	258.747.075	919.400.421	1.181.742.718
75	Kota Pariaman	7.190.444	258.747.075	628.106.663	894.044.182
76	Kota Payakumbuh	19.154.051	258.747.075	626.545.951	904.447.077
77	Kota Sawahlunto	17.731.798	3.677.289	785.053.126	806.462.213
78	Kota Solok	7.190.444	258.747.075	1.027.694.380	1.293.631.899
79	Provinsi Riau	-	368.425.203.443	71.360.919.236	439.786.122.679
80	Kab. Bengkalis	-	4.322.921.899	127.064.651.004	131.387.572.903
81	Kab. Indragiri Hilir	-	72.567.501.771	5.023.077.698	77.590.579.469
82	Kab. Indragiri Hulu	-	1.865.771.989	4.928.710.990	6.794.482.979
83	Kab. Kampar	-	3.404.680.709	36.534.644.537	39.939.325.246
84	Kab. Kepulauan Meranti	-	2.317.941.845	4.275.376.911	6.593.318.756
85	Kab. Kuantan Singingi	-	67.279.960.637	3.180.646.552	70.460.607.189
86	Kab. Pelalawan	-	3.562.518.279	16.595.479.696	20.157.997.975
87	Kab. Rokan Hilir	-	2.702.873.547	58.592.403.733	61.295.277.280
88	Kab. Rokan Hulu	-	1.963.730.664	3.840.745.074	5.804.475.738
89	Kab. Siak	-	4.929.115.335	46.389.529.857	51.318.645.192
90	Kota Dumai	-	67.412.142.917	873.464.356	68.285.607.273
91	Kota Pekanbaru	-	66.834.679.800	1.687.341.776	68.522.021.576
92	Provinsi Jambi	59.634.316	106.540.736.340	17.121.899.645	123.722.270.301
93	Kab. Batang hari	7.951.245	401.771.364	2.996.715.470	3.406.438.079
94	Kab. Bungo	3.975.623	18.499.206.398	3.426.240.029	21.929.422.050
95	Kab. Kerinci	87.568.844	21.312.047.187	671.196.454	22.070.812.485
96	Kab. Merangin	7.724.426	18.646.510.837	816.174.482	19.470.409.745
97	Kab. Muaro Jambi	5.963.434	775.698.944	6.415.135.676	7.196.798.054
98	Kab. Sarolangun	5.963.434	570.077.615	4.589.465.703	5.165.506.752
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.951.245	1.814.255.776	43.286.862.288	45.109.069.309
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.987.811	3.955.686.983	10.347.290.103	14.304.964.897
101	Kab. Tebo	7.951.245	18.092.627.612	1.400.984.777	19.501.563.634
102	Kota Jambi	7.951.245	3.206.682.818	2.032.683.512	5.247.317.575
103	Kota Sungai Penuh	14.176.017	21.309.083.198	649.356.132	21.972.615.347
104	Provinsi Sumatera Selatan	61.516.990	413.442.371.329	67.951.681.452	481.455.569.771

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
105	Kab. Banyuasin	2.563.211	2.457.990.990	7.364.295.428	9.824.849.629
106	Kab. Empat Lawang	5.126.422	39.710.588.339	979.874.586	40.695.589.347
107	Kab. Lahat	-	636.145.640	40.563.371.222	41.199.516.862
108	Kab. Muara Enim	-	1.647.630.440	35.792.106.835	37.439.737.275
109	Kab. Musi Banyuasin	-	1.735.142.236	169.198.114.206	170.933.256.442
110	Kab. Musi Rawas	-	1.167.218.938	39.287.198.438	40.454.417.376
111	Kab. Musi Rawas Utara	-	578.296.562	3.116.659.625	3.694.956.187
112	Kab. Ogan Ilir	3.844.816	12.141.406.447	4.233.277.941	16.378.529.204
113	Kab. Ogan Komering Ilir	2.563.211	52.200.849.005	5.252.136.398	57.455.548.614
114	Kab. Ogan Komering Ulu	-	455.636.712	6.527.482.155	6.983.118.867
115	Kab. OKU Selatan	103.171.267	39.691.854.857	1.018.158.719	40.813.184.843
116	Kab. OKU Timur	2.829.681	51.492.391.460	1.189.321.770	52.684.542.911
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	463.030.327	6.235.376.335	6.698.406.662
118	Kota Lubuk Linggau	-	51.493.295.685	971.090.442	52.464.386.127
119	Kota Pagar Alam	-	51.138.309.719	1.106.351.556	52.244.661.275
120	Kota Palembang	1.281.605	51.493.295.685	1.093.304.023	52.587.881.313
121	Kota Prabumulih	-	358.663.255	6.244.678.108	6.603.341.363
122	Provinsi Bengkulu	-	9.410.474.086	2.907.482.598	12.317.956.684
123	Kab. Bengkulu Selatan	-	2.003.764.063	1.225.428.684	3.229.192.747
124	Kab. Bengkulu Tengah	-	48.259.618	1.073.655.103	1.121.914.721
125	Kab. Bengkulu Utara	-	192.563.627	732.030.544	924.594.171
126	Kab. Kaur	-	34.333.084	645.311.953	679.645.037
127	Kab. Kepahiang	-	2.018.795.062	942.712.052	2.961.507.114
128	Kab. Lebong	-	30.129.050	1.334.561.241	1.364.690.291
129	Kab. Mukomuko	-	2.003.164.648	2.512.847.363	4.516.012.011
130	Kab. Rejang Lebong	-	1.976.706.256	786.971.569	2.763.677.825
131	Kab. Seluma	-	63.960.957	1.366.160.473	1.430.121.430
132	Kota Bengkulu	-	1.987.778.829	4.890.259.179	6.878.038.008
133	Provinsi Lampung	114.603.879	896.308.065	5.320.820.900	6.331.732.844
134	Kab. Lampung Barat	101.758.407	2.328.041.034	944.100.772	3.373.900.213
135	Kab. Lampung Selatan	9.701.157	2.247.043.937	1.045.795.875	3.302.540.969
136	Kab. Lampung Tengah	11.199.263	2.289.691.723	951.409.753	3.252.300.739
137	Kab. Lampung Timur	29.022.396	127.319.850	9.172.883.845	9.329.226.091
138	Kab. Lampung Utara	10.504.016	2.370.687.061	988.151.342	3.369.342.419
139	Kab. Mesuji	7.640.248	2.289.691.723	1.512.768.600	3.810.100.571
140	Kab. Pesawaran	14.785.577	2.247.043.937	1.704.133.107	3.965.962.621
141	Kab. Pesisir Barat	7.640.248	2.370.685.154	1.005.375.136	3.383.700.538
142	Kab. Pringsewu	18.157.518	2.370.688.508	1.756.654.470	4.145.500.496
143	Kab. Tanggamus	17.113.810	2.247.043.937	5.975.892.285	8.240.050.032
144	Kab. Tulang Bawang	7.640.248	2.289.691.723	1.162.825.838	3.460.157.809
145	Kab. Tulang Bawang Barat	5.930.727	2.370.685.154	1.074.850.490	3.451.466.371
146	Kab. Way Kanan	8.469.584	2.289.691.723	689.747.106	2.987.908.413
147	Kota Bandar Lampung	7.640.248	2.328.037.368	1.774.671.026	4.110.348.642
148	Kota Metro	8.228.736	2.370.685.154	903.953.251	3.282.867.141
149	Provinsi DKI Jakarta	-	4.755.979	19.351.483.553	19.356.239.532
150	Provinsi Jawa Barat	3.370.647.238	199.320.111.383	35.439.013.276	238.129.771.897
151	Kab. Bandung	355.220.008	1.946.383.332	2.004.052.004	4.305.655.344
152	Kab. Bandung Barat	155.816.285	1.946.939.107	2.885.210.820	4.987.966.212
153	Kab. Bekasi	33.911.832	15.329.984.059	7.650.266.481	23.014.162.372
154	Kab. Bogor	136.395.812	1.823.585.443	5.008.704.469	6.968.685.724
155	Kab. Ciamis	141.311.822	17.207.025.157	5.791.715.598	23.140.052.577
156	Kab. Cianjur	146.185.477	16.998.528.416	4.979.295.762	22.124.009.655

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
157	Kab. Cirebon	156.806.060	16.952.540.124	4.016.928.451	21.126.274.635
158	Kab. Garut	835.754.426	1.795.841.350	4.198.974.538	6.830.570.314
159	Kab. Indramayu	137.163.591	15.321.445.566	11.216.392.078	26.675.001.235
160	Kab. Karawang	2.022.080.333	15.351.008.556	9.852.292.711	27.225.381.600
161	Kab. Kuningan	183.610.719	17.174.722.579	3.562.881.984	20.921.215.282
162	Kab. Majalengka	239.513.711	15.336.899.831	3.349.164.956	18.925.578.498
163	Kab. Pangandaran	143.229.089	17.115.940.923	1.460.061.630	18.719.231.642
164	Kab. Purwakarta	105.927.166	1.784.794.384	2.381.175.686	4.271.897.236
165	Kab. Subang	139.614.906	182.690.368	25.037.329.699	25.359.634.973
166	Kab. Sukabumi	137.076.065	1.865.843.570	4.782.757.192	6.785.676.827
167	Kab. Sumedang	1.220.462.020	1.989.768.816	5.081.020.831	8.291.251.667
168	Kab. Tasikmalaya	107.716.994	17.077.995.103	2.594.251.697	19.779.963.794
169	Kota Bandung	100.442.098	17.111.101.154	5.490.155.048	22.701.698.300
170	Kota Banjar	136.028.307	16.940.973.713	1.322.884.281	18.399.886.301
171	Kota Bekasi	100.436.855	17.111.101.154	1.066.109.465	18.277.647.474
172	Kota Bogor	135.077.978	17.111.786.107	4.845.770.115	22.092.634.200
173	Kota Cimahi	100.958.242	17.111.101.154	3.012.731.220	20.224.790.616
174	Kota Cirebon	101.436.903	17.111.101.154	1.208.315.951	18.420.854.008
175	Kota Depok	-	17.111.101.154	1.272.201.164	18.383.302.318
176	Kota Sukabumi	101.660.290	17.111.101.154	1.256.669.932	18.469.431.376
177	Kota Tasikmalaya	101.937.413	17.111.101.154	4.561.742.379	21.774.780.946
178	Provinsi Jawa Tengah	6.423.841.554	4.925.495.040	29.818.365.584	41.167.702.178
179	Kab. Banjarnegara	202.789.734	310.117.441	2.116.244.694	2.629.151.869
180	Kab. Banyumas	189.189.672	277.948.199	4.088.940.735	4.556.078.606
181	Kab. Batang	195.198.199	479.408.092	1.851.704.712	2.526.311.003
182	Kab. Blora	279.343.646	12.136.880	16.089.728.024	16.381.208.550
183	Kab. Boyolali	557.723.234	348.119.371	1.884.172.832	2.790.015.437
184	Kab. Brebes	199.968.194	503.889.897	5.315.148.171	6.019.006.262
185	Kab. Cilacap	193.794.705	307.275.522	3.586.912.158	4.087.982.385
186	Kab. Demak	394.592.615	297.027.937	1.929.132.689	2.620.753.241
187	Kab. Grobogan	298.664.919	608.212.759	7.849.304.884	8.756.182.562
188	Kab. Jepara	200.105.953	335.763.572	1.548.584.558	2.084.454.083
189	Kab. Karanganyar	440.640.034	275.346.017	1.800.204.312	2.516.190.363
190	Kab. Kebumen	234.282.681	293.048.784	3.490.214.366	4.017.545.831
191	Kab. Kendal	568.062.416	598.691.147	1.861.877.173	3.028.630.736
192	Kab. Klaten	472.727.194	293.412.605	810.917.557	1.577.057.356
193	Kab. Kudus	4.678.234.474	300.924.833	1.082.173.134	6.061.332.441
194	Kab. Magelang	482.446.414	285.719.643	1.907.394.184	2.675.560.241
195	Kab. Pati	201.156.810	506.954.166	4.608.393.259	5.316.504.235
196	Kab. Pekalongan	190.907.528	285.952.897	4.397.376.658	4.874.237.083
197	Kab. Pemalang	220.932.862	555.642.930	3.439.832.833	4.216.408.625
198	Kab. Purbalingga	206.919.238	283.402.179	4.356.734.037	4.847.055.454
199	Kab. Purworejo	225.895.877	291.346.013	2.581.376.747	3.098.618.637
200	Kab. Rembang	588.755.266	283.805.605	3.957.338.120	4.829.898.991
201	Kab. Semarang	275.277.375	381.044.059	1.612.287.897	2.268.609.331
202	Kab. Sragen	218.459.183	296.805.211	2.194.485.542	2.709.749.936
203	Kab. Sukoharjo	222.002.572	293.412.896	2.374.118.373	2.889.533.841
204	Kab. Tegal	209.030.790	626.768.736	4.009.732.671	4.845.532.197
205	Kab. Temanggung	972.242.154	275.346.017	2.533.990.583	3.781.578.754
206	Kab. Wonogiri	219.175.402	287.916.956	2.345.245.128	2.852.337.486
207	Kab. Wonosobo	409.324.165	298.268.593	2.931.838.647	3.639.431.405
208	Kota Magelang	191.839.036	293.417.136	1.820.851.956	2.306.108.128

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
209	Kota Pekalongan	220.252.039	293.412.605	1.036.953.086	1.550.617.730
210	Kota Salatiga	188.969.036	284.953.017	907.555.410	1.381.477.463
211	Kota Semarang	242.953.479	352.135.689	1.192.401.460	1.787.490.628
212	Kota Surakarta	208.170.328	293.412.605	2.727.306.784	3.228.889.717
213	Kota Tegal	188.936.518	293.412.605	1.542.064.069	2.024.413.192
214	Provinsi DI Yogyakarta	155.094.912	8.497.147	5.197.704.567	5.361.296.626
215	Kab. Bantul	158.850.963	7.923.468	2.660.377.886	2.827.152.317
216	Kab. gunung kidul	50.127.275	3.677.290	786.088.630	839.893.195
217	Kab. Kulon Progo	38.773.744	7.924.818	2.117.179.497	2.163.878.059
218	Kab. Sleman	74.996.753	7.924.819	3.152.452.174	3.235.373.746
219	Kota Yogyakarta	39.139.382	36.679.953	2.203.348.540	2.279.167.875
220	Provinsi Jawa Timur	14.349.336.135	7.852.967.784	85.254.289.236	107.456.593.155
221	Kab. Bangkalan	417.214.189	446.309.057	4.719.774.529	5.583.297.775
222	Kab. Banyuwangi	485.207.005	10.625.985.350	17.985.098.631	29.096.290.986
223	Kab. Blitar	499.385.654	11.031.031.214	2.620.860.897	14.151.277.765
224	Kab. Bojonegoro	1.101.370.799	504.148.256	237.717.601.100	239.323.120.155
225	Kab. Bondowoso	808.433.349	11.031.031.092	2.789.321.145	14.628.785.586
226	Kab. Gresik	419.394.004	435.760.976	14.967.774.813	15.822.929.793
227	Kab. Jember	1.742.202.171	10.927.120.634	1.995.115.163	14.664.437.968
228	Kab. Jombang	991.818.524	11.124.679.819	1.758.976.387	13.875.474.730
229	Kab. Kediri	1.106.197.131	11.033.485.526	3.112.674.764	15.252.357.421
230	Kab. Lamongan	868.434.418	11.059.935.885	3.182.571.640	15.110.941.943
231	Kab. Lumajang	532.783.753	10.625.985.350	2.484.210.466	13.642.979.569
232	Kab. Madiun	440.617.328	11.348.304.522	3.711.447.078	15.500.368.928
233	Kab. Magetan	442.549.747	11.050.037.870	1.680.058.806	13.172.646.423
234	Kab. Malang	2.329.449.217	10.628.269.053	7.845.376.431	20.803.094.701
235	Kab. Mojokerto	440.765.463	11.073.524.774	2.721.028.067	14.235.318.304
236	Kab. Nganjuk	492.312.035	11.174.403.200	3.393.904.478	15.060.619.713
237	Kab. Ngawi	602.433.754	11.326.862.137	5.360.976.471	17.290.272.362
238	Kab. Pacitan	424.773.997	11.053.258.456	1.650.436.978	13.128.469.431
239	Kab. Pamekasan	1.429.259.778	11.067.385.708	3.355.246.928	15.851.892.414
240	Kab. Pasuruan	5.489.599.480	11.048.295.561	1.906.297.426	18.444.192.467
241	Kab. Ponorogo	463.145.392	11.078.446.569	5.126.269.733	16.667.861.694
242	Kab. Probolinggo	1.608.227.722	11.091.852.136	2.372.133.813	15.072.213.671
243	Kab. Sampang	563.656.991	11.049.535.784	1.023.854.977	12.637.047.752
244	Kab. Sidoarjo	431.999.672	429.050.368	4.302.964.039	5.164.014.079
245	Kab. Situbondo	868.521.153	11.094.648.440	2.957.923.885	14.921.093.478
246	Kab. Sumenep	1.051.955.675	433.474.757	2.347.437.777	3.832.868.209
247	Kab. Trenggalek	413.663.429	10.661.321.880	2.553.550.106	13.628.535.415
248	Kab. Tuban	621.823.638	562.532.421	10.397.214.786	11.581.570.845
249	Kab. Tulungagung	560.877.206	10.717.190.577	4.399.324.123	15.677.391.906
250	Kota Batu	413.524.563	11.049.822.795	2.543.677.105	14.007.024.463
251	Kota Blitar	432.788.804	11.050.216.653	659.737.846	12.142.743.303
252	Kota Kediri	1.836.543.095	11.050.216.653	701.622.891	13.588.382.639
253	Kota Madiun	414.989.013	11.050.639.686	712.127.273	12.177.755.972
254	Kota Malang	812.185.385	11.050.216.667	863.781.876	12.726.183.928
255	Kota Mojokerto	428.246.371	11.050.216.653	2.334.213.114	13.812.676.138
256	Kota Pasuruan	412.929.876	11.050.216.653	3.041.456.890	14.504.603.419
257	Kota Probolinggo	414.879.850	11.050.216.653	693.684.564	12.158.781.067
258	Kota Surabaya	667.624.769	11.050.216.653	1.591.704.738	13.309.546.160
259	Provinsi Kalimantan Barat	35.136.501	8.582.989.392	6.741.225.882	15.359.351.775
260	Kab. Bengkayang	2.702.810	11.152.753	8.765.703.952	8.779.559.515

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
261	Kab. Kapuas Hulu	2.702.810	977.202.358	4.217.877.404	5.197.782.572
262	Kab. Kayong Utara	2.702.810	10.954.557	2.817.055.305	2.830.712.672
263	Kab. Ketapang	46.848.694	3.677.289	10.970.763.877	11.021.289.860
264	Kab. Kubu Raya	2.702.810	2.158.035.922	1.765.173.079	3.925.911.811
265	Kab. Landak	2.702.810	3.677.289	3.175.061.989	3.181.442.088
266	Kab. Melawi	2.702.810	1.448.550.453	2.665.065.232	4.116.318.495
267	Kab. Mempawah	2.702.810	3.677.289	1.340.076.769	1.346.456.868
268	Kab. Sambas	2.702.810	1.248.426.476	705.639.364	1.956.768.650
269	Kab. Sanggau	2.702.810	3.677.289	3.727.525.076	3.733.905.175
270	Kab. Sekadau	2.702.810	28.077.686	6.691.025.372	6.721.805.868
271	Kab. Sintang	2.702.810	3.677.289	3.208.439.149	3.214.819.248
272	Kota Pontianak	2.702.810	1.248.418.200	1.052.800.087	2.303.921.097
273	Kota Singkawang	2.702.810	1.248.418.200	846.714.917	2.097.835.927
274	Provinsi Kalimantan Tengah	63.683.401	85.632.166.809	15.559.063.943	101.254.914.153
275	Kab. Barito Selatan	5.789.429	2.576.487.558	1.033.218.979	3.615.495.966
276	Kab. Barito Timur	-	2.441.070.477	1.254.701.053	3.695.771.530
277	Kab. Barito Utara	-	257.891.489	19.516.726.775	19.774.618.264
278	Kab. Gunung Mas	5.789.429	6.411.965.289	1.981.919.900	8.399.674.618
279	Kab. Kapuas	2.894.714	3.677.289	5.541.720.459	5.548.292.462
280	Kab. Katingan	1.447.357	965.837.289	26.632.325.156	27.599.609.802
281	Kab. Kotawaringin Barat	23.307.051	3.677.289	1.497.728.991	1.524.713.331
282	Kab. Kotawaringin Timur	5.976.154	4.522.184.139	6.259.181.684	10.787.341.977
283	Kab. Lamandau	-	5.964.826.274	9.351.604.801	15.316.431.075
284	Kab. Murung Raya	5.789.429	5.714.587.622	16.372.247.298	22.092.624.349
285	Kab. Pulang Pisau	27.814.077	11.704.299.090	1.612.816.327	13.344.929.494
286	Kab. Seruyan	-	3.677.289	4.295.281.616	4.298.958.905
287	Kab. Sukamara	5.789.429	11.839.451.213	2.904.866.101	14.750.106.743
288	Kota Palangkaraya	5.789.429	11.859.981.777	2.847.589.662	14.713.360.868
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	314.934.173.704	26.874.814.815	341.808.988.519
290	Kab. Balangan	-	3.677.289	3.911.355.214	3.915.032.503
291	Kab. Banjar	-	290.588.771	4.723.737.778	5.014.326.549
292	Kab. Barito Kuala	-	52.492.635.364	1.171.038.038	53.663.673.402
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	290.588.771	1.169.416.404	1.460.005.175
294	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	290.588.771	1.281.038.041	1.571.626.812
295	Kab. Hulu Sungai Utara	-	52.492.635.364	1.139.388.813	53.632.024.177
296	Kab. Kotabaru	-	295.567.894	2.660.855.224	2.956.423.118
297	Kab. Tabalong	-	3.677.289	5.401.279.210	5.404.956.499
298	Kab. Tanah Bumbu	-	290.588.771	48.488.718.605	48.779.307.376
299	Kab. Tanah Laut	-	290.588.771	3.713.807.440	4.004.396.211
300	Kab. Tapin	-	290.588.771	37.070.580.263	37.361.169.034
301	Kota Banjarbaru	-	52.492.657.265	4.609.343.354	57.102.000.619
302	Kota Banjarmasin	-	52.492.635.364	972.889.312	53.465.524.676
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	626.430.685.196	100.670.806.810	727.101.492.006
304	Kab. Berau	-	82.300.831.019	2.021.397.748	84.322.228.767
305	Kab. Kutai Barat	-	87.587.239.739	19.415.881.028	107.003.120.767
306	Kab. Kutai Kartanegara	-	3.245.095.324	309.867.818.282	313.112.913.606
307	Kab. Kutai Timur	-	11.559.541.892	41.457.937.938	53.017.479.830
308	Kab. Mahakam Ulu	-	82.623.612.208	2.181.076.905	84.804.689.113
309	Kab. Paser	-	83.224.602.000	696.091.806	83.920.693.806
310	Kab. Penajam Paser Utara	-	921.689.074	23.509.955.707	24.431.644.781
311	Kota Balikpapan	-	221.513.490.054	731.018.850	222.244.508.904
312	Kota Bontang	-	139.208.537.489	41.796.750.160	181.005.287.649

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
313	Kota Samarinda	-	1.470.349.290	11.020.737.347	12.491.086.637
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	3.264.571.761	4.661.657.513	7.926.229.274
315	Kab. Bolaang Mongondow	-	48.965.413	3.342.772.610	3.391.738.023
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	48.965.418	3.476.755.083	3.525.720.501
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	48.965.418	654.716.926	703.682.344
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	48.965.418	794.953.951	843.919.369
319	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	470.025.743	638.464.426	1.108.490.169
320	Kab. Kepulauan Talaud	-	470.080.020	817.289.035	1.287.369.055
321	Kab. Minahasa	-	424.737.614	872.321.697	1.297.059.311
322	Kab. Minahasa Selatan	-	3.677.289	1.017.252.962	1.020.930.251
323	Kab. Minahasa Tenggara	-	3.677.289	681.424.066	685.101.355
324	Kab. Minahasa Utara	-	3.677.289	629.351.159	633.028.448
325	Kab. Kepulauan Sangihe	-	470.061.176	857.962.718	1.328.023.894
326	Kota Bitung	-	48.965.418	9.369.833.532	9.418.798.950
327	Kota Kotamobagu	-	48.965.418	882.909.974	931.875.392
328	Kota Manado	-	424.737.930	1.834.209.131	2.258.947.061
329	Kota Tomohon	-	424.737.614	933.814.648	1.358.552.262
330	Provinsi Sulawesi Tengah	69.435.591	15.271.270.042	13.561.436.874	28.902.142.507
331	Kab. Banggai	19.065.269	3.677.289	37.327.395.055	37.350.137.613
332	Kab. Banggai Kepulauan	6.943.569	2.252.854.344	928.594.459	3.188.392.372
333	Kab. Banggai Laut	6.943.569	2.252.469.597	890.546.738	3.149.959.904
334	Kab. Buol	6.943.569	814.651.806	864.585.779	1.686.181.154
335	Kab. Donggala	6.943.569	735.738.852	1.274.198.534	2.016.880.955
336	Kab. Morowali	5.207.676	1.072.780.667	3.152.228.803	4.230.217.146
337	Kab. Morowali Utara	6.943.569	720.135.455	2.027.740.748	2.754.819.772
338	Kab. Parigi Moutong	11.611.954	726.772.927	1.207.104.213	1.945.489.094
339	Kab. Poso	5.207.676	742.652.812	1.051.055.580	1.798.916.068
340	Kab. Sigi	6.943.569	2.228.966.868	1.098.021.750	3.333.932.187
341	Kab. Tojo Una-Una	5.207.676	720.135.455	946.641.149	1.671.984.280
342	Kab. Toli-toli	5.207.676	939.253.878	945.353.458	1.889.815.012
343	Kota Palu	55.548.485	2.432.496.933	2.082.159.323	4.570.204.741
344	Provinsi Sulawesi Selatan	159.937.510	10.358.194.362	10.135.376.037	20.653.507.909
345	Kab. Bantaeng	9.612.970	864.406.958	654.403.056	1.528.422.984
346	Kab. Barru	7.587.773	3.759.987	1.003.143.722	1.014.491.482
347	Kab. Bone	25.929.367	11.750.135	2.036.016.846	2.073.696.348
348	Kab. Bulukumba	13.557.647	863.495.601	1.089.770.548	1.966.823.796
349	Kab. Enrekang	6.953.830	864.961.564	721.248.502	1.593.163.896
350	Kab. Gowa	6.953.830	881.586.601	2.050.874.967	2.939.415.398
351	Kab. Jeneponto	7.429.295	863.714.196	1.816.422.415	2.687.565.906
352	Kab. Kepulauan Selayar	6.953.830	863.569.025	1.048.695.927	1.919.218.782
353	Kab. Luwu	7.628.389	7.565.988	2.241.915.993	2.257.110.370
354	Kab. Luwu Timur	6.953.830	92.565.228	3.212.976.942	3.312.496.000
355	Kab. Luwu Utara	6.953.830	1.123.753.577	1.144.588.748	2.275.296.155
356	Kab. Maros	6.953.830	863.513.392	665.845.144	1.536.312.366
357	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	6.953.830	31.554.348	2.263.976.006	2.302.484.184
358	Kab. Pinrang	6.953.830	863.101.275	1.347.179.434	2.217.234.539
359	Kab. Sidenreng Rappang	6.953.830	865.044.171	727.396.782	1.599.394.783
360	Kab. Sinjai	56.058.052	9.537.380	1.147.588.031	1.213.183.463
361	Kab. Soppeng	133.507.182	4.825.633	1.476.592.618	1.614.925.433
362	Kab. Takalar	6.953.830	863.495.065	1.098.375.164	1.968.824.059
363	Kab. Tana Toraja	6.953.830	16.411.809	1.586.844.781	1.610.210.420
364	Kab. Toraja Utara	6.953.830	8.271.281	1.041.558.152	1.056.783.263

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
365	Kab. Wajo	7.570.185	863.497.765	5.033.034.213	5.904.102.163
366	Kota Makassar	6.953.830	859.627.475	3.460.308.536	4.326.889.841
367	Kota Palopo	6.953.830	863.497.121	1.257.122.785	2.127.573.736
368	Kota Pare-pare	6.953.830	863.492.821	644.598.943	1.515.045.594
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	50.626.042.596	5.362.869.819	55.988.912.415
370	Kab. Bombana	-	3.677.289	5.061.322.987	5.065.000.276
371	Kab. Buton	-	24.460.741	637.145.545	661.606.286
372	Kab. Buton Selatan	-	3.677.289	652.963.918	656.641.207
373	Kab. Buton Tengah	-	6.279.439.439	631.682.491	6.911.121.930
374	Kab. Buton Utara	-	3.677.289	639.741.872	643.419.161
375	Kab. Kolaka	-	25.840.124	7.149.526.865	7.175.366.989
376	Kab. Kolaka Timur	-	6.274.908.858	762.370.293	7.037.279.151
377	Kab. Kolaka Utara	-	48.771.269	636.656.405	685.427.674
378	Kab. Konawe	-	69.684.139	1.686.455.504	1.756.139.643
379	Kab. Konawe Kepulauan	-	8.727.369	658.679.952	667.407.321
380	Kab. Konawe Selatan	-	6.869.789	2.117.997.701	2.124.867.490
381	Kab. Konawe Utara	-	3.677.289	9.266.135.718	9.269.813.007
382	Kab. Muna	-	6.298.379.535	639.699.194	6.938.078.729
383	Kab. Muna Barat	-	6.279.439.439	724.170.482	7.003.609.921
384	Kab. Wakatobi	-	6.279.360.847	634.464.364	6.913.825.211
385	Kota Bau-bau	-	8.399.820	1.028.973.877	1.037.373.697
386	Kota Kendari	-	3.677.289	1.849.304.289	1.852.981.578
387	Provinsi Bali	112.251.642	-	3.666.696.730	3.778.948.372
388	Kab. Badung	10.523.588	3.677.289	3.182.433.769	3.196.634.646
389	Kab. Bangli	15.925.597	3.677.289	1.148.131.313	1.167.734.199
390	Kab. Buleleng	106.490.788	3.677.289	1.846.263.833	1.956.431.910
391	Kab. Gianyar	48.604.832	3.677.289	1.848.910.905	1.901.193.026
392	Kab. Jembrana	15.801.282	3.677.289	946.028.522	965.507.093
393	Kab. Karangasem	18.972.173	3.677.289	1.264.617.549	1.287.267.011
394	Kab. Klungkung	14.031.451	3.677.289	790.431.109	808.139.849
395	Kab. Tabanan	14.031.451	3.677.289	1.279.639.415	1.297.348.155
396	Kota Denpasar	14.031.451	3.677.289	738.749.669	756.458.409
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.361.915.109	2.003.594.432	11.578.452.276	15.943.961.817
398	Kab. Bima	263.547.767	32.005.557	2.931.179.782	3.226.733.106
399	Kab. Dompu	169.030.271	128.483.136	1.009.265.874	1.306.779.281
400	Kab. Lombok Barat	421.209.509	59.324.733	1.809.674.514	2.290.208.756
401	Kab. Lombok Tengah	1.316.052.926	63.526.756	685.164.832	2.064.744.514
402	Kab. Lombok Timur	1.688.119.065	46.317.691	1.115.881.435	2.850.318.191
403	Kab. Lombok Utara	267.174.222	59.435.698	1.500.273.861	1.826.883.781
404	Kab. Sumbawa	261.247.496	220.771.024	17.498.622.947	17.980.641.467
405	Kab. Sumbawa Barat	81.971.929	311.062.486	3.439.934.161	3.832.968.576
406	Kota Bima	55.729.978	59.435.698	628.747.556	743.913.232
407	Kota Mataram	987.052.134	59.489.733	3.344.494.897	4.391.036.764
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	112.499.966	192.934.829	2.386.477.763	2.691.912.558
409	Kab. Alor	-	3.677.289	647.314.634	650.991.923
410	Kab. Belu	-	21.774.558	796.559.333	818.333.891
411	Kab. Ende	-	3.943.927	1.234.251.250	1.238.195.177
412	Kab. Flores Timur	10.291.580	3.940.911	828.769.188	843.001.679
413	Kab. Kupang	4.897.659	21.774.558	1.035.072.929	1.061.745.146
414	Kab. Lembata	-	3.940.911	752.192.323	756.133.234
415	Kab. Malaka	-	22.053.181	904.444.525	926.497.706
416	Kab. Manggarai	-	3.677.289	1.378.254.895	1.381.932.184

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
417	Kab. Manggarai Barat	3.422.139	21.774.558	885.063.495	910.260.192
418	Kab. Manggarai Timur	15.154.459	21.774.558	910.041.123	946.970.140
419	Kab. Nagekeo	5.876.567	21.774.558	893.655.232	921.306.357
420	Kab. Ngada	1.870.354	3.942.314	856.480.520	862.293.188
421	Kab. Rote Ndao	-	21.774.558	886.080.523	907.855.081
422	Kab. Sabu Raijua	-	21.774.558	746.038.730	767.813.288
423	Kab. Sikka	-	22.038.180	755.195.967	777.234.147
424	Kab. Sumba Barat	7.481.415	22.056.821	643.639.371	673.177.607
425	Kab. Sumba Barat Daya	25.542.700	22.094.993	805.808.546	853.446.239
426	Kab. Sumba Tengah	-	22.068.144	710.922.477	732.990.621
427	Kab. Sumba Timur	2.970.612	22.071.413	1.134.325.997	1.159.368.022
428	Kab. Timor Tengah Selatan	-	21.774.558	1.116.360.172	1.138.134.730
429	Kab. Timor Tengah Utara	-	21.774.558	670.469.571	692.244.129
430	Kota Kupang	-	22.038.180	1.403.927.311	1.425.965.491
431	Provinsi Maluku	-	7.811.836.841	3.484.861.157	11.296.697.998
432	Kab. Buru	-	192.011.929	967.382.433	1.159.394.362
433	Kab. Buru Selatan	-	3.908.341.500	817.267.148	4.725.608.648
434	Kab. Kepulauan Aru	-	766.299.278	799.718.402	1.566.017.680
435	Kab. Maluku Barat Daya	-	466.310.960	3.035.866.767	3.502.177.727
436	Kab. Maluku Tengah	-	831.522.341	1.847.570.791	2.679.093.132
437	Kab. Maluku Tenggara	-	653.482.373	616.801.843	1.270.284.216
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	965.739.243	640.511.144	1.606.250.387
439	Kab. Seram Bagian Barat	-	918.065.769	862.294.036	1.780.359.805
440	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.260.335.837	4.152.006.490	5.412.342.327
441	Kota Ambon	-	656.560.513	1.091.683.503	1.748.244.016
442	Kota Tual	-	653.482.370	834.508.605	1.487.990.975
443	Provinsi Papua	-	122.206.892.810	-	122.206.892.810
444	Kab. Asmat	-	8.732.683.124	1.180.518.886	9.913.202.010
445	Kab. Biak Numfor	-	8.729.005.835	-	8.729.005.835
446	Kab. Boven Digoel	-	8.732.703.099	6.536.183.618	15.268.886.717
447	Kab. Deiyai	-	8.732.683.124	883.255.837	9.615.938.961
448	Kab. Dogiyai	-	8.732.683.124	819.247.029	9.551.930.153
449	Kab. Intan Jaya	-	3.677.289	630.924.224	634.601.513
450	Kab. Jayapura	-	-	-	-
451	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-
452	Kab. Keerom	-	3.677.289	1.655.463.449	1.659.140.738
453	Kab. Kepulauan Yapen	-	8.732.720.367	866.493.367	9.599.213.734
454	Kab. Lanny Jaya	-	8.732.683.124	781.657.852	9.514.340.976
455	Kab. Mamberamo Raya	-	8.733.158.899	954.097.964	9.687.256.863
456	Kab. Mamberamo Tengah	-	8.732.683.124	1.046.405.184	9.779.088.308
457	Kab. Mappi	-	8.732.683.124	802.388.855	9.535.071.979
458	Kab. Merauke	-	8.729.005.835	-	8.729.005.835
459	Kab. Mimika	-	-	-	-
460	Kab. Nabire	-	3.677.289	2.423.227.037	2.426.904.326
461	Kab. Nduga	-	8.732.683.124	715.432.634	9.448.115.758
462	Kab. Paniai	-	3.677.289	1.221.373.324	1.225.050.613
463	Kab. Pegunungan Bintang	-	3.677.289	1.050.331.703	1.054.008.992
464	Kab. Puncak	-	8.732.683.124	633.881.339	9.366.564.463
465	Kab. Puncak Jaya	-	3.677.289	1.019.730.949	1.023.408.238
466	Kab. Sarmi	-	3.677.289	6.753.531.430	6.757.208.719
467	Kab. Supiori	-	8.732.684.351	951.293.902	9.683.978.253
468	Kab. Tolikara	-	3.677.289	1.156.726.018	1.160.403.307

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
469	Kab. Waropen	-	8.732.816.658	972.880.187	9.705.696.845
470	Kab. Yahukimo	-	8.733.020.738	968.014.479	9.701.035.217
471	Kab. Yalimo	-	8.732.683.124	791.042.719	9.523.725.843
472	Kota Jayapura	-	8.729.005.835	-	8.729.005.835
473	Provinsi Maluku Utara	-	24.799.703.895	3.349.948.515	28.149.652.410
474	Kab. Halmahera Barat	-	168.680.021	749.669.645	918.349.666
475	Kab. Halmahera Selatan	-	585.826.752	7.203.504.547	7.789.331.299
476	Kab. Halmahera Tengah	-	30.777.434	1.078.586.504	1.109.363.938
477	Kab. Halmahera Timur	-	220.543.418	2.215.169.438	2.435.712.856
478	Kab. Halmahera Utara	-	236.147.627	4.148.339.635	4.384.487.262
479	Kab. Kepulauan Sula	-	613.301.789	631.394.652	1.244.696.441
480	Kab. Pulau Morotai	-	192.400.180	653.230.369	845.630.549
481	Kab. Pulau Taliabu	-	30.777.434	1.775.700.832	1.806.478.266
482	Kota Ternate	-	5.514.581.863	698.324.243	6.212.906.106
483	Kota Tidore Kepulauan	-	5.522.688.071	1.061.027.687	6.583.715.758
484	Provinsi Banten	-	309.864.838	4.036.224.758	4.346.089.596
485	Kab. Lebak	-	3.677.289	934.255.164	937.932.453
486	Kab. Pandeglang	-	3.677.289	14.574.769.945	14.578.447.234
487	Kab. Serang	-	92.202.701	1.633.495.430	1.725.698.131
488	Kab. Tangerang	-	92.202.701	676.427.506	768.630.207
489	Kota Cilegon	-	92.202.701	788.603.676	880.806.377
490	Kota Serang	-	92.202.701	2.555.693.020	2.647.895.721
491	Kota Tangerang	-	92.202.701	1.182.889.808	1.275.092.509
492	Kota Tangerang Selatan	-	92.202.701	8.258.796.395	8.350.999.096
493	Provinsi Bangka Belitung	-	-	1.390.631.377	1.390.631.377
494	Kab. Bangka	-	408.027.039	31.040.742.934	31.448.769.973
495	Kab. Bangka Barat	-	408.027.039	631.032.471	1.039.059.510
496	Kab. Bangka Selatan	-	408.027.039	1.943.040.170	2.351.067.209
497	Kab. Bangka Tengah	-	408.027.039	850.256.863	1.258.283.902
498	Kab. Belitung	-	408.027.039	1.413.774.012	1.821.801.051
499	Kab. Belitung Timur	-	408.027.039	2.455.368.495	2.863.395.534
500	Kota Pangkal Pinang	-	408.027.039	661.025.353	1.069.052.392
501	Provinsi Gorontalo	-	570.206.673	102.082.166	672.288.839
502	Kab. Boalemo	-	13.115.678	725.336.179	738.451.857
503	Kab. Bone Bolango	-	18.496.398	762.640.585	781.136.983
504	Kab. Gorontalo	-	3.710.925	1.253.304.214	1.257.015.139
505	Kab. Gorontalo Utara	-	132.145.546	673.481.272	805.626.818
506	Kab. Pohuwato	-	3.677.289	702.096.647	705.773.936
507	Kota Gorontalo	-	15.915.537	760.649.732	776.565.269
508	Provinsi Kepulauan Riau	54.187.324	624.570.936	16.820.024.780	17.498.783.040
509	Kab. Bintan	4.515.624	89.174.145.915	1.056.556.768	90.235.218.307
510	Kab. Karimun	9.031.247	89.225.103.537	6.525.135.537	95.759.270.321
511	Kab. Kepulauan Anambas	9.031.247	1.639.464.856	21.144.377.668	22.792.873.771
512	Kab. Lingga	9.031.247	89.261.037.535	1.027.128.992	90.297.197.774
513	Kab. Natuna	9.031.247	1.667.167.309	38.905.807.987	40.582.006.543
514	Kota Batam	72.249.882	90.807.901.216	1.229.901.428	92.110.052.526
515	Kota Tanjung Pinang	9.031.247	90.781.379.089	2.069.988.476	92.860.398.812
516	Provinsi Papua Barat	-	443.107.364.892	36.080.604.860	479.187.969.752
517	Kab. Fak Fak	-	43.760.934.618	1.362.913.300	45.123.847.918
518	Kab. Kaimana	-	43.545.675.496	1.551.564.069	45.097.239.565
519	Kab. Manokwari	-	39.083.694.360	2.469.462.221	41.553.156.581
520	Kab. Manokwari Selatan	-	38.512.850.484	749.387.388	39.262.237.872

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (DANA BAGI HASIL)
Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil			Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Cukai	SDA	Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
521	Kab. Maybrat	-	38.281.629.729	718.907.973	39.000.537.702
522	Kab. Pegunungan Arfak	-	39.123.065.079	751.574.598	39.874.639.677
523	Kab. Raja Ampat	-	1.653.542.110	1.998.874.868	3.652.416.978
524	Kab. Sorong	-	2.770.040.458	8.328.464.385	11.098.504.843
525	Kab. Sorong Selatan	-	39.336.398.699	937.967.306	40.274.366.005
526	Kab. Tambrauw	-	39.187.319.585	696.663.204	39.883.982.789
527	Kab. Teluk Bintuni	-	8.086.512.032	131.823.935.787	139.910.447.819
528	Kab. Teluk Wondama	-	40.396.503.418	785.228.116	41.181.731.534
529	Kota Sorong	-	39.161.796.961	6.197.949.527	45.359.746.488
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	243.972.474	169.190.622	413.163.096
531	Kab. Majene	-	13.775.159	647.135.884	660.911.043
532	Kab. Mamasa	-	23.421.329	637.333.492	660.754.821
533	Kab. Mamuju	-	11.746.259	1.193.594.849	1.205.341.108
534	Kab. Mamuju Tengah	-	59.453.085	712.694.999	772.148.084
535	Kab. Pasangkayu	-	3.719.274	1.067.613.751	1.071.333.025
536	Kab. Polewali Mandar	-	19.316.109	646.950.339	666.266.448
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	59.996.975.075	12.876.975.901	72.873.950.976
538	Kab. Bulungan	-	2.467.158.744	15.076.274.853	17.543.433.597
539	Kab. Malinau	-	35.124.039.251	15.085.614.557	50.209.653.808
540	Kab. Nunukan	-	1.370.655.527	17.703.002.723	19.073.658.250
541	Kab. Tana Tidung	-	4.027.081.800	1.818.441.969	5.845.523.769
542	Kota Tarakan	-	16.393.601.523	3.611.892.941	20.005.494.464
Total		**92.429.101.299**	**6.670.115.503.888**	**3.554.109.871.234**	**10.316.654.476.421**

Republik Indonesia

Lampiran 28

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2019

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	2	905.735.570	-	14.119.131.391.791	14.119.131.391.791
	USD	7	2.000.000.000	-	27.802.000.000.000	27.802.000.000.000
ADB-OF	USD	27	4.988.071.206	19.609.581.736.620	49.729.596.097.291	69.339.177.833.911
AFD	EUR	7	854.028.571	83.176.208.911	13.229.916.499.267	13.313.092.708.178
	USD	3	370.000.000	1.112.080.000.000	4.031.290.000.000	5.143.370.000.000
IBRD	JPY	1	110.795.000.000	-	14.178.048.367.500	14.178.048.367.500
	USD	35	12.684.930.246	10.950.043.634.135	165.383.171.711.897	176.333.215.346.032
IDA	SDR	1	21.316.500	45.529.012.320	364.232.098.752	409.761.111.072
JICA	JPY	35	320.065.881.000	6.683.714.352.702	34.273.996.208.285	40.957.710.560.987
KfW	EUR	5	1.100.000.000	366.768.110.240	16.780.669.889.760	17.147.438.000.000
	USD	5	767.358.765	1.447.318.151.314	9.219.736.037.059	10.667.054.188.373
TOTAL		**118**		**40.298.211.206.241**	**349.111.788.301.602**	**389.409.999.507.843**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 13.901,-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2019

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
2	ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	1	5.608.924,20	19.430.036.668,58	68.005.126.937,06	87.435.163.605,64
3	ADB-OF	ADB	6	24.630.471,64	126.200.228.500,00	216.187.957.767,64	342.388.186.267,64
4		USD	82	1.759.952.215,04	3.397.482.025.811,29	21.067.613.715.459,70	24.465.095.741.271,00
5	ADB-SF	SDR	42	287.543.707,56	1.195.120.571.465,96	4.332.251.606.760,25	5.527.372.178.226,21
6	AFD	EUR	1	30.865.440,15	56.605.692.229,27	424.542.690.784,22	481.148.383.013,49
7		USD	4	83.394.621,05	138.815.968.674,32	1.020.452.658.500,03	1.159.268.627.174,35
8	AIIB	USD	4	159.329.651,90	-	2.214.841.491.061,90	2.214.841.491.061,90
9	AKA	USD	1	22.957.487,75	86.535.716.735,28	232.596.320.477,47	319.132.037.212,75
10	ATRADIUS DSB	EUR	1	15.362.308,78	155.768.574.034,29	83.708.005.367,45	239.476.579.401,73
11		USD	1	4.210.652,07	38.072.570.370,70	20.459.704.054,37	58.532.274.425,07
12	AUSTRALIA	AUD	2	459.204.001,05	94.961.609.603,00	4.377.244.524.782,99	4.472.206.134.385,99
13	B A W A G	EUR	2	11.123.074,02	39.689.924.534,48	133.703.004.656,62	173.392.929.191,10
14	BANCO DE SABADELL	USD	1	28.752.078,74	133.227.549.040,26	266.455.097.524,48	399.682.646.564,74
15	BANK MANDIRI SIN	USD	13	203.127.700,59	325.283.831.904,07	2.498.394.333.997,52	2.823.678.165.901,59
16	BANQUE DE FRANCE	EUR	3	53.639.431,36	292.647.532.550,17	543.515.034.359,70	836.162.566.909,87
17	BBVA	EUR	2	4.468.316,07	36.765.054.701,78	32.889.647.820,70	69.654.702.522,48
18		USD	2	29.017.857,13	146.043.244.034,38	257.333.987.929,75	403.377.231.964,13
19	BBVAIT	EUR	5	31.103.254,91	152.509.547.088,93	332.346.030.336,00	484.855.577.424,93
20	BELGIUM	EUR	10	14.266.733,94	72.540.374.091,35	149.857.749.271,06	222.398.123.362,41
21	BLG	EUR	1	20.080.000,00	39.127.335.800,00	273.891.350.600,00	313.018.686.400,00
22	BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	59.968.698,00	-	861.494.123.919,54	861.494.123.919,54
23		EUR	6	74.014.079,18	831.008.320.938,42	322.766.073.485,35	1.153.774.394.423,76
24		GBP	1	3.159.181,30	19.218.278.950,77	38.436.558.631,54	57.654.837.582,31
25		USD	3	23.657.368,77	221.604.442.521,77	107.256.640.750,00	328.861.083.271,77
26	BNP PARIBAS, SPAIN	EUR	1	-	-	-	-
27	BOC CAYMAN ISLAND	USD	1	3.151.364,36	43.807.115.968,36	-	43.807.115.968,36
28	BRI SINGAPORE	USD	1	2.036.483,70	11.323.663.965,48	16.985.495.948,22	28.309.159.913,70
29	BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	14.157.186,13	42.089.166.000,00	178.601.262.562,40	220.690.428.562,40
30		USD	4	111.029.883,29	1.047.844.943.887,38	495.581.463.726,91	1.543.426.407.614,29
31	BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	1.052.805,24	14.635.045.641,24	-	14.635.045.641,24
32	CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	99.166.665,92	275.703.175.934,00	1.102.812.647.019,92	1.378.515.822.953,92
33	CASA OF FRANCE	EUR	1	91.036.314,00	354.781.715.923,53	1.064.345.147.770,59	1.419.126.863.694,12
34	CASSA DEPOSITI	USD	2	1.226.933,03	11.370.394.957,18	5.685.201.092,85	17.055.596.050,03
35	CDC	GBP	1	998.809,23	11.856.609.740,92	6.371.588.789,94	18.228.198.530,85
36	CESCE, SPAIN	USD	1	7.192.519,46	65.034.506.195,18	34.948.706.832,18	99.983.213.027,36
37	CEXIM	USD	1	5.987.400,00	83.230.847.400,00	-	83.230.847.400,00
38	CIDA	CAD	24	67.587.814,15	99.749.019.754,97	620.341.690.371,25	720.090.710.126,22
39	CITIBANK LONDON	EUR	3	21.493.517,75	74.456.316.108,03	260.597.104.819,26	335.053.420.927,30
40	COFACE	EUR	1	26.958.174,27	273.346.651.054,92	146.893.005.206,92	420.239.656.261,84
41		USD	1	16.187.711,66	146.368.695.414,06	78.656.684.371,60	225.025.379.785,66
42	CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	6	82.971.271,90	525.616.024.152,16	767.788.285.562,75	1.293.404.309.714,90
43		USD	2	81.033.512,02	196.930.833.379,67	929.516.017.210,35	1.126.446.850.590,02
44	CREDIT SUISSE	CHF	2	2.784.872,63	20.003.364.215,31	20.003.364.071,66	40.006.728.286,97
45	CZECH EXPORT BANK	USD	1	56.499.105,94	-	785.394.071.671,94	785.394.071.671,94
46	DENMARK	DKK	3	9.183.589,30	7.283.756.480,89	11.875.690.368,03	19.159.446.848,91
47	DEUTSCHE BANK AG, HK	USD	1	-	-	-	-
48	DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	18.784.670,07	75.618.382.892,08	185.507.315.750,99	261.125.698.643,07
49	DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	2	6.131.237,29	18.919.247.694,24	76.658.035.299,91	95.577.282.994,15
50	DEUTSCHE BANK TOKYO	USD	2	-	-	-	-
51	DFAS	USD	1	970.960,16	8.779.401.037,25	4.717.916.146,91	13.497.317.184,16
52	DRESDNER SINGAPORE	EUR	3	32.415,21	505.307.094,30	-	505.307.094,30
53		USD	1	39.947,36	555.308.251,36	-	555.308.251,36
54	DZ Bank AG Singapore	USD	3	8.148.395,25	68.734.279.072,44	44.536.563.297,81	113.270.842.370,25
55	E I B	USD	1	3.382.913,56	47.025.881.397,56	-	47.025.881.397,56
56	ECGD	GBP	1	40.163.210,96	476.767.255.189,67	256.208.533.405,57	732.975.788.595,23
57		USD	1	7.663.396,89	69.292.169.365,05	37.236.710.802,85	106.528.880.167,89
58	EDC	USD	3	89.590.828,82	365.684.896.397,08	879.717.215.029,74	1.245.402.111.426,82
59	EFIC	EUR	3	11.875.359,49	121.537.398.958,18	63.582.592.402,50	185.119.991.360,68
60		USD	17	36.521.798,81	312.153.665.860,66	195.535.859.411,05	507.689.525.271,71
61	EKF	EUR	1	1.011.516,71	10.256.434.675,01	5.511.674.480,17	15.768.109.155,17
62		USD	1	3.964.307,93	35.845.135.003,18	19.262.709.476,15	55.107.844.479,33
63	EKN	USD	1	2.298.022,46	20.789.750.576,42	11.155.059.640,05	31.944.810.216,46
64	EKSPORTFINANS ASA	USD	5	9.251.532,21	81.755.936.981,97	46.849.612.269,24	128.605.549.251,21
65	EKSPORTKREDITT AS	USD	1	92.049.935,00	-	1.279.586.146.435,00	1.279.586.146.435,00
66	ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	17.707.683,76	19.279.904.613,46	256.757.740.294,00	276.037.644.907,46
67	EXIM BANK KOREA	KRW	17	340.431.580.160,00	149.661.358.513,80	3.938.921.919.207,80	4.088.583.277.721,60
68		USD	19	953.468.516,59	2.403.815.674.565,49	10.850.350.174.510,40	13.254.165.849.075,90
69	EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	852.545.913,91	308.595.269.369,21	1.388.678.712.420,24	1.697.273.981.789,45
70		USD	17	1.644.389.377,34	1.989.828.767.914,32	20.868.827.966.516,80	22.858.656.734.431,10
71	EXIM BANK TAIPEI	USD	1	574.377,06	5.193.497.214,52	2.790.918.296,55	7.984.415.511,06
72	EXIMBANK HUNGARY	USD	1	36.440.994,45	-	506.566.263.849,45	506.566.263.849,45
73	FINNVERA	EUR	4	328.864,42	2.380.094.402,42	2.746.434.871,14	5.126.529.273,56

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2019

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
74		USD	1	378.415,18	3.421.616.828,18	1.838.732.589,00	5.260.349.417,18
75	GIEK	USD	1	2.248.845,31	20.333.988.122,81	10.927.210.531,50	31.261.198.654,31
76	GOSPODRSTWA	USD	2	2.650.432,84	16.910.153.084,26	19.933.513.824,58	36.843.666.908,84
77	HAPOALIM, ZURICH	USD	1	1.360.000,00	18.905.360.000,00	-	18.905.360.000,00
78	HSBC LONDON	GBP	4	1.658.582,21	27.928.364.824,59	2.340.644.407,15	30.269.009.231,75
79	IBRD	USD	63	4.068.987.919,31	2.694.957.859.599,97	53.868.043.206.672,70	56.563.001.066.272,70
80	ICO	EUR	9	77.875.628,29	6.897.459.350,99	1.207.073.002.297,94	1.213.970.461.648,93
81		USD	16	100.579.699,42	265.181.301.408,66	1.132.977.100.228,76	1.398.158.401.637,42
82	IDA	SDR	31	630.180.746,59	3.373.969.149.996,45	8.739.818.891.036,41	12.113.788.041.032,90
83		USD	46	96.249.167,73	463.437.682.700,73	874.521.997.914,00	1.337.959.680.614,73
84	IDB	ACU	41	194.380.447,25	706.788.675.617,57	3.029.732.235.305,51	3.736.520.910.923,07
85		USD	28	955.701.136,51	1.336.446.579.770,88	11.948.754.918.826,80	13.285.201.498.597,70
86	IFAD	EUR	2	14.295.732,70	7.540.102.614,52	215.310.070.238,05	222.850.172.852,57
87		SDR	8	116.328.122,98	131.750.196.930,88	2.104.392.739.316,12	2.236.142.936.247,00
88		USD	2	3.000.000,00	-	41.703.000.000,00	41.703.000.000,00
89	ING BANK AMSTERDAM	EUR	6	350.380.255,78	739.920.720.302,77	4.722.009.927.344,23	5.461.930.647.646,99
90	JAICAF	JPY	2	5.506.950.000,00	135.901.062.832,50	568.804.054.342,50	704.705.117.175,00
91	JBIC	JPY	9	19.878.468.190,00	1.631.177.683.991,97	912.600.315.643,66	2.543.777.999.635,64
92		USD	4	23.968.756,07	275.006.016.846,48	58.183.661.282,59	333.189.678.129,07
93	JICA	JPY	226	974.127.721.763,00	13.073.712.700.129,60	111.582.002.406.855,00	124.655.715.106.985,00
94	KFAED	KWD	1	443.400,00	20.331.517.186,29	-	20.331.517.186,29
95	KfW	EUR	60	587.435.483,73	1.735.708.289.172,14	7.421.576.743.791,66	9.157.285.032.963,80
96		USD	2	22.288.480,35	201.531.665.476,57	108.300.499.868,78	309.832.165.345,35
97	KOMERCNI BANKA	USD	1	2.015.178,30	28.012.993.548,30	-	28.012.993.548,30
98	MAFF, JAPAN	JPY	2	3.060.029.501,00	152.673.526.287,17	238.907.738.852,55	391.581.265.139,72
99	METI, GOV. OF JAPAN	JPY	1	3.368.261.092,00	280.361.713.292,40	150.662.869.737,02	431.024.583.029,42
100	MIZUHO SINGAPORE	USD	1	11.821.823,27	46.952.904.483,80	117.382.260.792,47	164.335.165.276,27
101	MUFG SINGAPORE	USD	5	83.861.817,97	545.878.531.641,70	619.884.599.959,27	1.165.763.131.600,97
102	N I O	EUR	9	46.369.446,27	318.625.317.483,74	404.208.505.251,86	722.833.822.735,60
103	NATIXIS BANQUE	EUR	57	391.950.613,82	1.188.261.543.398,97	4.921.691.956.183,20	6.109.953.499.582,18
104	NIB	EUR	3	8.273.084,92	10.100.857.357,42	118.864.788.764,80	128.965.646.122,21
105	NORDEA FINLAND	USD	1	4.759.030,05	22.051.759.603,40	44.103.517.093,85	66.155.276.697,25
106	OEKB	EUR	1	29.810.912,36	302.272.483.670,19	162.437.308.526,66	464.709.792.196,85
107	ONDD	EUR	1	8.289.693,26	84.054.666.438,65	45.169.880.120,32	129.224.546.558,97
108	PT BNI TOKYO BRANCH	USD	3	34.095.441,60	73.479.832.200,58	400.480.901.481,02	473.960.733.681,60
109	PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	2	63.280.710,96	902.287.472.593,65	84.168.952.663,19	986.456.425.256,84
110		USD	4	318.077.594,11	1.225.814.709.982,62	3.195.781.925.740,49	4.421.596.635.723,11
111	PT MANDIRI HONGKONG	USD	4	67.772.955,50	147.698.125.000,00	794.413.729.405,50	942.111.854.405,50
112	PT. BNI-HONG KONG	USD	5	60.035.503,28	89.775.079.554,20	744.778.451.541,08	834.553.531.095,28
113	PT. BNI-SINGAPORE	GBP	1	340.535,91	6.214.756.519,99	-	6.214.756.519,99
114		USD	27	217.083.394,99	994.307.387.728,71	2.023.368.886.027,28	3.017.676.273.755,99
115	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	12.233.840,56	38.141.640.268,30	152.566.562.008,51	190.708.202.276,81
116	RUSIA FED.	USD	7	180.662.693,25	399.483.608.710,50	2.111.908.490.157,75	2.511.392.098.868,25
117	SACE	EUR	1	229.496,93	2.327.027.898,68	1.250.503.354,38	3.577.531.253,06
118		USD	1	1.074.781,28	9.718.134.608,08	5.222.399.965,20	14.940.534.573,28
119	SERV	CHF	5	27.620.859,12	247.704.051.955,46	149.089.752.587,96	396.793.804.543,42
120	SFD	SAR	5	186.604.762,09	73.312.159.712,80	618.179.776.926,01	691.491.936.638,81
121	SOCIETE GENERALE	EUR	1	5.808.460,00	25.072.866.929,25	65.472.776.457,55	90.545.643.386,80
122	SWISS	CHF	1	-	-	-	-
123	UBS AG, SINGAPORE	USD	2	-	-	-	-
124	UBS, ZURICH	CHF	1	11.584.814,40	-	166.424.315.770,51	166.424.315.770,51
125	UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	29	173.133.672,71	496.203.879.563,80	2.202.704.228.169,85	2.698.908.107.733,65
126	UNICREDIT MUNICH	EUR	1	3.090.225,89	19.268.893.464,09	28.903.340.040,25	48.172.233.504,34
127	US DEP TREASURY	USD	2	2.544.929,34	26.478.199.568,41	8.898.863.186,93	35.377.062.755,34
128	US EXIM	USD	8	86.425.983,43	553.148.733.303,67	648.258.862.356,77	1.201.407.595.660,43
129	USAID	USD	110	159.453.026,71	534.849.197.747,32	1.681.707.326.520,59	2.216.556.524.267,91
130	USDA	USD	10	82.724.455,13	313.718.967.656,30	836.233.683.105,83	1.149.952.650.762,13
131	VNESHECONOMBANK	USD	1	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0034	6/15/2021	(558.538.000,00)	29.829.695.000,00
2	FR0035	6/15/2022	(4.804.488.000,00)	-
3	FR0037	9/15/2026	(52.871.925.000,00)	-
4	FR0039	8/15/2023	(12.544.585.000,00)	-
5	FR0040	9/15/2025	(9.961.372.000,00)	518.554.904.000,00
6	FR0042	7/15/2027	(95.614.684.000,00)	43.192.462.000,00
7	FR0043	7/15/2022	(46.358.832.000,00)	26.526.170.000,00
8	FR0044	9/15/2024	(507.085.664.000,00)	9.801.450.000,00
9	FR0045	5/15/2037	(37.150.634.000,00)	620.314.358.000,00
10	FR0046	7/15/2023	(619.704.568.000,00)	209.518.537.000,00
11	FR0047	2/15/2028	(759.656.445.000,00)	28.882.079.000,00
12	FR0050	7/15/2038	(446.036.507.000,00)	135.197.243.000,00
13	FR0052	8/15/2030	(272.096.948.000,00)	102.304.927.000,00
14	FR0053	7/15/2021	(115.659.323.000,00)	601.125.904.000,00
15	FR0054	7/15/2031	(352.979.082.000,00)	363.072.959.000,00
16	FR0056	9/15/2026	(694.165.603.000,00)	1.845.920.687.000,00
17	FR0057	5/15/2041	(27.305.398.000,00)	1.117.462.886.000,00
18	FR0058	6/15/2032	(40.392.088.000,00)	3.663.761.875.000,00
19	FR0059	5/15/2027	(971.227.256.000,00)	1.064.715.975.000,00
20	FR0061	5/15/2022	(177.877.401.000,00)	922.989.720.000,00
21	FR0062	4/15/2042	(358.628.369.000,00)	105.442.781.000,00
22	FR0063	5/15/2023	(2.687.202.441.000,00)	108.501.980.000,00
23	FR0064	5/15/2028	(4.315.640.785.000,00)	124.332.741.000,00
24	FR0065	5/15/2033	(3.849.805.524.000,00)	597.021.411.000,00
25	FR0067	2/15/2044	(376.798.530.000,00)	986.814.913.000,00
26	FR0068	3/15/2034	(2.086.350.009.000,00)	1.587.637.062.000,00
27	FR0070	3/15/2024	(369.750.697.000,00)	1.440.860.160.000,00
28	FR0071	3/15/2029	(174.938.177.000,00)	2.715.367.699.000,00
29	FR0072	5/15/2036	(626.362.869.000,00)	2.636.472.938.000,00
30	FR0073	5/15/2031	(180.746.351.000,00)	3.395.973.939.000,00
31	FR0074	8/15/2032	(416.009.791.000,00)	475.380.585.000,00
32	FR0075	5/15/2038	(1.865.210.579.000,00)	1.203.166.625.000,00
33	FR0076	5/15/2048	(2.023.242.458.000,00)	10.902.319.000,00
34	FR0077	5/15/2024	(186.068.096.000,00)	1.307.509.815.000,00
35	FR0078	5/15/2029	(246.833.888.000,00)	2.538.743.362.000,00
36	FR0079	4/15/2039	(206.310.056.000,00)	1.365.285.944.000,00
37	FR0080	6/15/2035	(196.890.957.000,00)	77.549.945.000,00
38	FR0081	6/15/2025	(418.557.717.000,00)	26.911.681.000,00
39	FR0082	9/15/2030	(1.323.169.229.000,00)	-
40	FR0083	4/15/2040	(79.497.968.000,00)	-
Grand Total			**(27.232.065.832.000,00)**	**32.007.047.731.000,00**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	10/12/2035	-	600.231.922.000,00
2	RI0037	2/17/2037	(124.012.640.000,00	-
3	RI0038	1/17/2038	(254.148.314.000,00	-
4	RI0122	1/8/2022	(9.377.794.000,00	-
5	RI0123	1/11/2023	(19.051.559.000,00	-
6	RI0124	1/15/2024	(54.570.315.000,00	-
7	RI0125	1/15/2025	(77.235.105.000,00	-
8	RI0126	1/8/2026	(74.882.831.000,00	-
9	RI0127	1/8/2027	(47.896.831.000,00	-
10	RI0128	1/11/2028	(57.156.947.000,00	-
11	RI0142	1/17/2042	(218.195.560.000,00	157.978.072.000,00
12	RI0144	1/15/2044	(245.061.498.000,00	-
13	RI0145	1/15/2045	(238.651.073.000,00	-
14	RI0146	1/8/2046	(105.335.385.000,00	-
15	RI0147	1/8/2047	(136.997.316.000,00	-
16	RI0148	1/11/2048	(184.154.944.000,00	-
17	RI0224	2/11/2024	(12.781.988.000,00	-
18	RI0229	2/11/2029	(40.842.697.000,00	-
19	RI0249	2/11/2049	(64.353.958.000,00	-
20	RI0422	4/25/2022	(35.084.259.000,00	-
21	RI0423	4/15/2023	(50.149.824.000,00	-
22	RI0428	4/24/2028	(28.196.795.000,00	-
23	RI0443	4/15/2043	(224.781.511.000,00	-
24	RI0521	5/5/2021	(50.256.720.000,00	-
25	RI0727	7/18/2027	(41.295.128.000,00	-
26	RI0747	7/18/2047	(96.701.792.000,00	-
27	RI0929	9/18/2029	(44.724.692.000,00	-
28	RI1023	10/17/2023	(22.677.725.000,00	-
29	RI1049	10/30/2049	(125.122.274.000,00	-
30	RIEUR0425	4/24/2025	(25.248.066.000,00	-
31	RIEUR0623	6/14/2023	(102.511.662.000,00	-
32	RIEUR0628	6/14/2028	(233.217.265.000)	-
33	RIEUR0721	7/8/2021	(21.757.132.000)	-
34	RIEUR0724	7/18/2024	(17.950.949.000)	-
35	RIEUR0725	7/30/2025	(153.869.634.000)	-
36	RIEUR0926	9/18/2026	(28.626.007.000)	-
37	RIEUR1031	10/30/2031	(20.301.730.000)	-
Grand Total			**(3.287.179.920.000)**	**758.209.994.000**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi SBSN Rupiah
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(4.928.752.000,00	13.320.385.000,00
2	IFR0007	15-Jan-25	(7.455.592.000,00	9.151.121.000,00
3	IFR0010	15-Feb-36	(15.002.829.000,00	251.923.220.000,00
4	PBS002	15-Jan-22	(604.527.538.000,00	-
5	PBS003	15-Jan-27	(373.759.037.000,00	1.965.327.000,00
6	PBS004	15-Feb-37	(1.255.907.787.000,00	-
7	PBS005	15-Apr-43	(2.300.721.879.000,00	-
8	PBS007	15-Sep-40	(13.725.633.000,00	335.736.550.000,00
9	PBS011	15-Aug-23	(3.563.456.000,00	827.769.286.000,00
10	PBS012	15-Nov-31	(58.639.787.000,00	2.739.679.747.000,00
11	PBS014	15-May-21	(601.588.875.000,00	29.832.105.000,00
12	PBS015	15-Jul-47	(891.160.518.000,00	46.003.029.000,00
13	PBS017	15-Oct-25	(215.574.015.000,00	-
14	PBS018	15-May-28	(58.992.694.000,00	-
15	PBS019	15-Sep-23	(43.705.732.000,00	1.166.475.877.000,00
16	PBS020	15-Oct-27	(21.003.068.000,00	3.976.176.000,00
17	PBS021	15-Nov-26	(3.800.245.000,00	388.036.809.000,00
18	PBS022	15-Apr-34	(23.159.143.000,00	265.666.659.000,00
19	PBS023	15-May-30	(5.073.921.000,00	-
20	PBS024	15-May-32	(19.482.462.000,00	9.380.857.000,00
21	PBS025	15-May-33	(26.071.941.000,00	83.579.630.000,00
22	PBS026	15-Oct-24	(25.398.593.000,00	8.700.248.000,00
Grand Total			**(6.573.243.497.000,00)**	**6.181.197.026.000,00**

Republik Indonesia

Lampiran 29

Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2019 (*Audited*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	9.000.000		8.957.733			8.957.733	42.267		Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						-	-		Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	253.500.000	-	231.725.000			231.725.000	21.775.000		Bagian satker	018
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2.725.254		2.725.254			2.725.254	-		Bagian satker	050
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	189.589.783	6.118.476	158.472.716	16.232.103		180.823.295	8.766.488		Satker	026
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000		15.000.000			15.000.000	-		Bagian satker	025
7	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda						-	-		tidak aktif	033
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	51.408.920	8.365.707	37.184.272	3.729.368		49.279.347	2.129.573		Satker	033
9	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	179.628.189	46.131.084	107.358.016	18.805.822	-	172.294.922	7.333.267		Satker	020
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)						-	-		Likuidasi	025
11	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	-	-	-		-			Bukan satker	025
12	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	20.000.000	8.154.772	9.793.839	916.585		18.865.196	1.134.804		Satker	090
13	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.174.600		1.137.276			1.137.276	37.324		Bagian satker	088
14	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)						-	-		Bukan satker	091
15	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						-	-		Bagian satker	040
16	Badan Restorasi Gambut	150.282.150	8.038.999	128.844.918	2.641.212		139.525.129	10.757.021		Satker	029
17	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	10.000.000	4.061.979	5.937.859			9.999.838	162		Bukan satker	025
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	40.130.907	17.429.821	19.784.061	387.430		37.601.312	2.529.595		Satker	020
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	20.000.000		18.987.102	248.040		19.235.142	764.858		Satker	036
20	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	250.558.768				212.910.688	212.910.688	37.648.080		Satker	999
21	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	1.531.175	-	1.526.871	-	-	1.526.871	4.304		Bagian satker	018
22	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	14.500.000		14.164.124			14.164.124	335.876		Bagian satker	044
23	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	18.535.000	1.934.299	16.395.452	154.450		18.484.201	50.799		Satker	035
24	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	866.340		859.050			859.050	7.290		Bagian satker	026
25	Dewan Pers	21.724.468	2.935.283	16.486.682	352.325		19.774.290	1.950.178		Satker	059
26	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1.316.188	-	1.304.595			1.304.595	11.593		Bagian satker	010
27	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	36.396.300	2.946.629	31.817.191	735.234		35.499.054	897.246		Satker	007
28	Dewan Riset Nasional (DRN)	3.530.224	-	2.756.379			2.756.379	773.845		Bagian satker	042
29	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.620.385	313.825	9.989.913	199.491		10.503.229	117.156		Satker	033
30	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	7.367.800		7.195.431			7.195.431	172.369		Bagian satker	055
31	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	36.908.928	9.550.752	23.712.610	2.602.695		35.866.057	1.042.871		Bagian satker	048
32	Komisi Banding Merek	369.260		353.932			353.932	15.328		Bagian satker	013
33	Komisi Banding Paten	910.340	-	477.797	-		477.797	432.543		Bagian satker	013
34	Komisi Informasi Pusat (KIP)	21.972.110	4.709.040	16.584.774	320.650		21.614.464	357.646		Satker	059
35	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	915.620		915.620			915.620	-		Bagian satker	043
36	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	13.233.651	2.923.634	9.432.498	91.856		12.447.988	785.663		Bagian satker	034
37	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	16.601.914	3.733.002	11.314.272	855.140		15.902.414	699.500		Bagian satker	034
38	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	20.799.306.000	11.379.592.707	7.971.429.795	123.785.500		19.474.808.002	1.324.497.998		Bagian satker	074

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2019 (*Audited*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
39	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	-		-			-	-		Bagian satker	027
40	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	-	-	-			-	-		tidak aktif	036
41	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-		-			-	-		tidak aktif	025
42	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	54.134.130	6.645.699	41.654.790	2.499.813		50.800.302	3.333.828		Satker	059
43	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	17.500.000	1.395.000	14.716.568	1.271.670		17.383.238	116.762		Satker	047
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	20.710.839		19.366.199	1.301.044		20.667.243	43.596	19.366.199	1301044	
45	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	67.755.897		66.871.758	274.230		67.145.988	609.909		Bagian satker	035
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	-	-	-	-	-	-	-		Bagian satker	012
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000	-	996.117			996.117	3.883		Bagian satker	035
48	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	69.750.000	-	53.753.299	2.614.151	3.004	56.370.454	13.379.546		satker	055
49	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	33.350.000		32.143.437	-		32.143.437	1.206.563		Bagian satker	035
50	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	304.170		203.519			203.519	100.651		Bagian satker	078
51	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	41.177.989	8.716.843	31.280.409	623.070	-	40.620.322	557.667		Satker	022
52	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	-	-		-	-	-		Bagian satker	092
53	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	11.001.372	-	10.661.087	-	-	10.661.087	340.285		Bagian satker	048
54	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)						-	-		Tidak aktif	035
55	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)						-	-		Tidak aktif	041
56	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	5.087.641		5.002.237			5.002.237	85.404		Satker	015
57	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-		Tidak aktif	084
58	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	32.198.130	-	28.035.083	2.086.120		30.121.203	2.076.927		Satker	024
59	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.200.000		803.084		-	803.084	396.916		Bagian satker	088
60	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.448.477		1.141.490			1.141.490	306.987		Bagian satker	026
61	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	76.604.393	11.819.352	61.408.799	2.887.999	-	76.116.150	488.243		Satker	007
62	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	2.973.500		2.640.856			2.640.856	332.644		Bagian satker	026
63	Lembaga Sensor Film (LSF)	40.715.526	12.376.257	24.890.961	1.567.636		38.834.854	1.880.672		Satker	023
64	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						-	-		Tidak aktif	024
65	Otorita Asahan	-	-	-			-	-		Likuidasi	019
66	Sekretariat Pengadilan Pajak	105.249.425	73.119.327	23.547.417	5.673.914		102.340.658	2.908.767		Satker	015
67	SKK MIGAS (Satker)	1.855.627.475				1.700.577.006	1.700.577.006	155.050.469		satker	999
68	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.855.627.475				1.700.577.006	1.700.577.006	155.050.469		Bukan satker	999
69	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	38.236.000	-	25.430.574			25.430.574	12.805.426		Bagian satker	114
70	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	31.208.446	-	23.087.062	-		23.087.062	8.121.384		Bagian satker	114
71	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)						-	-		Bukan Satker	999
72	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-				-	-	-		Satker	999
73	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						-	-		Bukan Satker	007
74	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						-	-		Bukan Satker	007
75	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPODT)	40.451.577	2.986.884	26.605.657	7.959.709		37.552.250	2.899.327		Satker	040
76	Otoritas Nasional Senjata Kimia	-		-			-	-		Bagian satker	019
77	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	30.000.000	3.932.901	9.897.696	334.433		14.165.030	15.834.970		satker	040
79	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia						-	-		Belum aktif	024
	Total	**26.632.916.736**	**11.627.932.272**	**9.386.763.131**	**201.151.690**	**3.614.067.704**	**24.829.914.797**	**1.803.001.939**	**19.366.199**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (*Audited*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	350.697	-	350.697	291.703	-	291.703	58.994	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	420	-	420	166.420.897	(254.575)	166.166.322	(166.165.902)	026	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda			-			-	-	033	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	1.947.914	1.947.914	46.466.878	-	46.466.878	(44.518.964)	033	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.249.534.496	5.981.289	1.255.515.785	197.375.286	542.474	197.917.760	1.057.598.025	020	Satker
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000	14.655.257	29.655.257	15.000.000	12.778.313	27.778.313	1.876.944	025	Satker
7	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)			-			-	-	025	Likuidasi
8	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	16.176.937	289.202	16.466.139	16.020.843	-	16.020.843	445.296	025	Bukan satker
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)		137.327	137.327	18.383.384	75.613	18.458.997	(18.321.670)	090	Satker
10	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	371.323.865	-	371.323.865	11.594.164		11.594.164	359.729.701	091	Bukan satker
11	Badan Restorasi Gambut	62.001	4.450.043	4.512.044	156.796.346	18.052	156.814.398	(152.302.354)		
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	10.000.000	107.649	10.107.649	9.999.838	17.710	10.017.548	90.101	025	Bukan satker
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	594.312	594.312	38.456.951	175.990	38.632.941	(38.038.629)	020	Satker
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	-	-	30.593.496	1.165	30.594.661	(30.594.661)	036	Satker
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	7.091	2.043.193	2.050.284	43.240.021	9.418	43.249.439	(41.199.155)	999	Satker
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	7.876	7.876	18.371.274	757	18.372.031	(18.364.155)	035	Satker
17	Dewan Pers	-	2.250	2.250	20.324.229	296	20.324.525	(20.322.275)	059	Satker
18	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	23.800	23.800	35.508.776	29.285	35.538.061	(35.514.261)	007	Satker
19	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	63	63	10.550.371	125	10.550.496	(10.550.433)	033	Satker
20	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	525	62.846	63.371	45.077.752	10.600	45.088.352	(45.024.981)	048	
21	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	-	-	21.925.697	(8.615)	21.917.082	(21.917.082)	059	Satker
22	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	20.704	20.704	52.082.697	4.956	52.087.653	(52.066.949)	059	Satker
23	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)		-	-	16.982.728	-	16.982.728	(16.982.728)	047	Satker
24	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	16.290	16.290	54.638.224	2.549	54.640.773	(54.624.483)	055	Satker
25	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	245.992	245.992	45.606.707	-	45.606.707	(45.360.715)	022	Satker
26	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)		1.927	1.927	5.036.620	525	5.037.145	(5.035.218)	015	Satker
27	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	12.329.624	304.814	12.634.438	30.236.413	129.295	30.365.708	(17.731.270)	024	Satker
28	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	-	172.590	172.590	80.833.191	172.590	81.005.781	(80.833.191)	007	Satker
29	Lembaga Sensor Film (LSF)	3.452.602	2.654.659	6.107.261	43.836.832	47.350	43.884.182	(37.776.921)	023	Satker
30	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024	Tidak aktif
31	Otorita Asahan	-		-			-	-	019	Likuidasi
32	Sekretariat Pengadilan Pajak	4.226	243.240	247.466	98.927.628	29.005	98.956.633	(98.709.167)	015	Satker

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (*Audited*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14	11
33	SKK MIGAS (Satker)	63.005	5.811.984	5.874.989	1.680.637.652	722.470	1.681.360.122	(1.675.485.133)	999	satker
34	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.700.741.250		1.700.741.250	2.000.360.797	119.285.499	2.119.646.296	(418.905.046)	999	Bukan satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.027.949.391	-	6.027.949.391	5.588.879.904	-	5.588.879.904	439.069.487	999	Bukan Satker
36	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	122.600	122.600	33.772.488	1.263.823	35.036.311	(34.913.711)	999	Satker
37	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	129.914.328	1.879.007	131.793.335	123.749.160	7.713.547	131.462.707	330.628	007	Bukan satker
38	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	5.190.055	-	5.190.055	6.357.809	-	6.357.809	(1.167.754)	007	Bukan satker
39	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	-	1.855	1.855	31.072.086	44	31.072.130	(31.070.275)	040	satker
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	-	-	-	13.614.287	(502)	13.613.785	(13.613.785)	040	satker
41	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	-	-	-	203.519	-	203.519	(203.519)	078	satker
42	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	4.683.881.446	4.683.881.446	2.450.000	5.470.140.925	5.472.590.925	(788.709.479)	-	satker
43	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)			-	-	-	-	-	0	
	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.448.477		1.448.477		-	-	1.448.477	0	
44	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	10.611.087	-	10.611.087	(10.611.087)	-	satker
45	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	231.725.000	-	231.725.000	(231.725.000)	-	satker
45	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	34.572.000		34.572.000	20.667.244		20.667.244	13.904.756		satker
	Total	**9.578.120.990**	**4.725.660.129**	**14.303.781.119**	**11.074.679.979**	**5.612.908.684**	**16.687.588.663**	**(2.383.807.544)**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2019 (*Audited*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	101.960	-	26.369	-	128.329	3.536	-	3.536	124.793	128.329	**Bukan satker**
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	853.832		23.808.662	206.160	24.868.654	-	-	-	24.868.654	24.868.654	**Satker**
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda					-			-	-	-	**Belum aktif**
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	-	5.198.856	14.840	5.213.696	-	-	-	5.213.696	5.213.696	**Satker**
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	38.566.408	-	290.763.758	1.557.477	330.887.643	22.239.135		22.239.135	308.648.508	330.887.643	**Satker**
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)					-			-	-	-	**Tidak aktif**
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	63.808.580	61.168.136	143.870	10.546	125.131.132	274.661	120.022.764	120.297.425	4.833.707	125.131.132	**Bukan Satker**
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	87.996		864.265	246.800	1.199.061	-		-	1.199.061	1.199.061	**Satker**
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	1.370.364.109	9.142.417.020	-	-	10.512.781.129	1.591.292	9.667.273.176	9.668.864.468	843.916.661	10.512.781.129	**Bukan satker**
10	Badan Restorasi Gambut	144.927.873		13.416.640	543.989	158.888.502	-	-	-	158.888.502	158.888.502	**Satker**
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	879.544	146.581	325.124	5.160.450	6.511.699	702.442	4.440.436	5.142.878	1.368.821	6.511.699	**Bukan satker**
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	362.199		2.728.937	14.000	3.105.136	-		-	3.105.136	3.105.136	**Satker**
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional	262.272		744.480	-	1.006.752	39.657		39.657	967.095	1.006.752	**Satker**
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	597.789.638	3.301.928	601.091.566	-	-	-	601.091.566	601.091.566	**Satker**
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	125.086		136.053	50.188	311.327	124.849		124.849	186.478	311.327	**Satker**
16	Dewan Pers	202.999		1.700.211	201.750	2.104.960	434.739		434.739	1.670.221	2.104.960	**Satker**
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	722.225		940.542	-	1.662.767	7.574		7.574	1.655.193	1.662.767	**Satker**
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	11.515	-	540.929	-	552.444	-	-	-	552.444	552.444	**Satker**
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	136.750	-	7.055.718	451.421	7.643.889	118.801		118.801	7.525.088	7.643.889	**Satker**
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	154.255	-	536.332	17.813	708.400	340.956		340.956	367.444	708.400	**Satker**
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	271.886	-	7.601.720	109.618	7.983.224	464.996		464.996	7.518.228	7.983.224	**Satker**
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	76.986		1.478.576	402.091	1.957.653	-	-	-	1.957.653	1.957.653	**Satker**
23	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	49.358	-	3.252.074	-	3.301.432	282.829		282.829	3.018.603	3.301.432	**Satker**
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	49.365	-	7.310.147	10.800.397	18.159.909	-		-	18.159.909	18.159.909	**Satker**
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	17.508		-		17.508	-	-	-	17.508	17.508	**Satker**
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	1.820.913		163.629.070	568.771	166.018.754	315.535		315.535	165.703.219	166.018.754	**Satker**
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	64.805		140.367.300	471.282	140.903.387	104.791		104.791	140.798.596	140.903.387	**Satker**
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	1.549.120	-	9.643.997	546.541	11.739.658	-		-	11.739.658	11.739.658	**Satker**
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-		-	-	-	**Tidak aktif**
30	Otorita Asahan	2.471.153		4.615.662	-	7.086.815	234.422		234.422	6.852.393	7.086.815	**Bukan satker (dibubarkan)**
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	895.512	-	18.158.285	201	19.053.998	-	-	-	19.053.998	19.053.998	**Satker**
32	SKK MIGAS (Satker)	3.146.705		70.049.852	61.663.110	134.859.667	4.864.554	-	4.864.554	129.995.113	134.859.667	**satker**
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.693.490		88.904.930		90.598.420	116.400.042	1.050.738.073	1.167.138.115	(1.076.539.695)	90.598.420	**Bukan satker**
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.520.384.973		1.322.027.084	790.657.045	8.633.069.102	194.600.825	2.404.715.622	2.599.316.447	6.033.752.655	8.633.069.102	**Bukan Satker**
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	1.232.657		64.799.520	21.995.930	88.028.107		-	-	88.028.107	88.028.107	**Satker**
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	20.947.504	-	105.423.043	136.667	126.507.214	18.432.295	17.195.899	35.628.194	90.879.020	126.507.214	**Bukan Satker**
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	2.560.837		3.128.932		5.689.769	14.039		14.039	5.675.730	5.689.769	**Bukan Satker**
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	52.717		10.636.300	-	10.689.017	-	-	-	10.689.017	10.689.017	**Satker**
39	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	-		4.700.481	25.376	4.725.857	-	-	-	4.725.857	4.725.857	**Satker**
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	423.389		623.785	17.000	1.064.174	60.000		60.000	1.004.174	1.064.174	**Satker**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019 (*Audited*)
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	-	-	1.448.477	-	1.448.477	-	-	-	1.448.477	1.448.477	**Satker**
41	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	2.411.156.918				2.411.156.918	-	-	-	2.411.156.918	2.411.156.918	**Satker**
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-		375		375	-	-	-	375	375	
43	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	-	-	855.140		855.140	-	-	-	855.140	855.140	**Satker**
		10.590.433.399	**9.203.731.737**	**2.975.375.134**	**899.171.391**	**23.668.711.660**	**361.651.970**	**13.264.385.970**	**13.626.037.939**	**10.042.673.721**	**23.668.711.660**	

Republik Indonesia

Lampiran 30

Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
1	BTN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	38.844.533,27
2	MANDIRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	1.946.514,91
3	BTN SYARIAH	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	1.869.380,00
4	BUKOPIN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	1.506.561,35
5	BANK RIAU KEPRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	250.583.371,34
6	BANK SUMUT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	1.620.143,13
7	BANK SUMUT Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	1.378.280,30
8	BANK Kaltim	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	11100252	1.184.220,05
9	BANK Sumsel Babel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1703000001	1.776.754,65
10	BANK NTT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	1.804.839,20
11	BANK DIY	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1111001471	45.526.452,65
12	BRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	3.377.440,81
13	BNI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	3.840.300.087,00
14	BRI SYARIAH	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	2.929.547,03
15	BPD JATIM	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	11268862	92.369.842,00
16	BPD JATIM Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	89.945.117,35
17	BPD JATENG	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1-034-02557-2	1.104.572,00
18	BPD Papua	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	1.305.852,55
19	BPD Kalteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000102003656	1.412.555,00
20	BPD Kalsel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	1.952.052,93
21	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7122212216	57.323.613,44
22	BPD Nagari (Sumbar)	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	1.826.805,30
23	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500231-0	1.796.772,00
24	Bank Artha Graha	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1075015719	1.942.067,81
25	Bank NTB	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	1.927.142,49
26	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	13.606.916,00
27	Bank Mayora	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	76.149.599,97
28	Bank Sumsel Babel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	2.119.151,00
29	Bank Jambi	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	3000947217	1.868.281,34
30	Bank Jabar Banten Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	70102000901	41.664.053,03
31	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	510-052-000000004-7	1.342.317,00
32	Bank Sulut Go	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1601420000036	63.846.644,45
33	Bank Sulselbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	2.484.388,18
34	Bank Kalbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000001909	8.675.824,54
35	Bank Sulteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10101000353	1.561.115,63
36	Bank Bali	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100121000548	25.413.293,85
37	Bank Kalsel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	901.00.01.00303.8	1.995.204,31
38	Bank Aceh Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610 01.01.000007-0	1.682.385,81
39	BTPN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5373000630	22.024.220,00
40	Bank Jambi Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7001170273	90.072.931,15
41	Bank Kaltimtara syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5100052101	23.104.423,00
42	Bank Jateng Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5031004003	92.643.704,00
43	Bank DKI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	40001208662	0
44	KEB Hana	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	110121800087211	1.274.817,02
45	BRI Agro	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1001000505407	114.432.640,84
46	Bank Nagari Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7100010600084	93.994.093,00
47	Bank Riau Kepri Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	82-00-30000-1	30.552.127,96
48	Bank BNI	Pengelolaan Kas	900064959	100.000.000.000,00
49	Bank BNI	Pengelolaan Kas	900065272	100.000.000.000,00
50	Bank BNI	Pengelolaan Kas	900064154	125.000.000.000,00
51	Bank BRI	Pengelolaan Kas	0193-01-012960-40-1	100.000.000.000,00
52	Bank BRI	Pengelolaan Kas	0193-01-012961-40-7	100.000.000.000,00
53	Bank BRI	Pengelolaan Kas	0193-01-012962-40-3	125.000.000.000,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)				**655.158.062.650,64**
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2)*				**-4.121.940.155,73**
Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)**				**651.036.122.494,91**
Total Aset Lainnya (4=3)				**651.036.122.494,91**

Keterangan :

Selisih kas rekening dana kelolaan senilai (Rp.4.121.940.155,73) terdiri dari akumulasi dari nilai-nilai berikut ini :

a. Jasa giro yang belum dipindahkan ke rekening operasional sebesar (Rp.4.123.325.801,17);
b. Biaya-biaya yang muncul pada rekening Dana Kelolaan sebesar Rp.1.512.441,00;
c. Adanya double koreksi mutasi atas pengembalian pajak oleh Bank Bukopin sebesar (Rp.85.121,30);
d. Kesalahan Bank Mandiri sebesar Rp3,00;
e. Tarif BSM yang masuk ke rekening dana kelolaan sebesar (Rp.41.679,58,00);
f. 6. Pembulatan sebesar Rp2,00.

Republik Indonesia

Lampiran 31

Rincian Transfer Keluar Dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2019

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih TK-TM
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	555.500.000	(555.500.000)	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	74.495.868.183	(72.916.598.750)	1.579.269.433
4	005	MAHKAMAH AGUNG	253.179.742.565	(251.679.668.133)	1.500.074.432
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.313.453.171.995	(1.329.821.965.995)	(16.368.794.000)
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	351.333.458.244	(831.345.967.088)	(480.012.508.844)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	126.722.900.394	(131.965.145.077)	(5.242.244.683)
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	100.389.678.706	(134.600.558.763)	(34.210.880.057)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	120.017.046.739.227	(120.945.079.405.889)	(928.032.666.662)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R	2.672.741.179.477	(2.305.741.571.879)	366.999.607.598
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.303.002.074.693	(2.301.348.219.080)	1.653.855.613
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.574.221.035.516	(6.660.893.884.010)	(86.672.848.494)
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.353.335.160.972	(4.349.793.268.117)	3.541.892.855
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	304.650.007.364	(236.473.634.334)	68.176.373.030
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15.531.995.332.365	(16.568.105.144.741)	(1.036.109.812.376)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	41.993.429.439	(37.142.218.893)	4.851.210.546
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	895.656.332.909	(893.420.219.264)	2.236.113.645
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.717.317.502.700	(1.780.048.436.015)	(62.730.933.315)
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.938.824.017.557	(3.917.881.357.409)	20.942.660.148
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	718.750.608.475	(714.040.295.270)	4.710.313.205
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	115.638.068.159	(115.729.489.213)	(91.421.054)
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	632.375.261.780	(641.629.030.057)	(9.253.768.277)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	15.197.052.354.010	(24.477.937.654.385)	(9.280.885.300.375)
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	7.451.000	(7.451.000)	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	3.303.483.412	-	3.303.483.412
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	799.127.024	-	799.127.024
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	7.654.756.943	(9.093.207.213)	(1.438.450.270)
28	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG	1.787.906.262.558	(1.914.892.818.437)	(126.986.555.879)
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	4.199.776.560	(4.199.776.560)	-
30	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMA	-	-	-
31	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	10.103.000	(10.103.000)	-
32	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	-	-	-
33	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	243.104.000	(320.050.377)	(76.946.377)
34	054	BADAN PUSAT STATISTIK	132.072.685.368	(132.379.004.368)	(306.319.000)
35	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	26.154.967.366	-	26.154.967.366
36	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	352.643.588.190	(352.838.559.314)	(194.971.124)
37	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
38	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.914.624.816.452	(14.735.222.438.349)	179.402.378.103
39	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	29.493.744.257.252	(29.855.755.734.626)	(362.011.477.374)
40	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	20.953.425.298	(24.743.201.308)	(3.789.776.010)
41	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	414.676.151	(3.718.002.263)	(3.303.326.112)
42	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	274.992.512.412	(365.748.797.709)	(90.756.285.297)
43	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRA	2.063.285.631	(37.890.631)	2.025.395.000
44	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	124.924.685.403	(124.515.407.197)	409.278.206
45	074	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	67.766.000	-	67.766.000
46	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	141.177.544.762	(141.275.811.887)	(98.267.125)
47	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	919.673.098.552	(919.673.098.552)	-
48	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	-	-
49	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	7.524.970	-	7.524.970
50	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	164.923.513.483	(191.058.673.220)	(26.135.159.737)
51	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	12.960.518.051	(11.910.876.376)	1.049.641.675
52	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	5.602.251.836	(5.602.251.836)	-
53	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	6.714.713.942	(6.714.713.942)	-
54	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	881.057.487	(2.054.442.555)	(1.173.385.068)
55	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	2.079.736.450	(9.352.450.745)	(7.272.714.295)
56	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	832.331.381	-	832.331.381
57	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-
58	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3.226.400	(3.226.400)	-
59	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.496.773.350	(1.496.773.350)	-
60	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.116.925.165	(12.510.362.695)	(2.393.437.530)
61	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	41.930.801.535	(41.893.844.188)	36.957.347
62	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.006.586.389.618	(972.040.088.647)	34.546.300.971
63	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	112.612.593.753	(1.391.299.626)	111.221.294.127
64	100	KOMISI YUDISIAL RI	100.467.066	(100.467.066)	-
65	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	(684.455.456)	(684.455.456)
66	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJ	58.706.000	(58.706.000)	-
67	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	-	-	-
68	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	(23.754.762.375)	(23.754.762.375)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2019

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih TK-TM
69	107	BADAN SAR NASIONAL	238.559.258.891	(238.554.473.993)	4.784.898
70	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	11.476.875	(11.476.875)	-
71	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	-
72	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	(987.944.221.315)	(987.944.221.315)
73	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUH	60.487.857.398	(3.731.567.631)	56.756.289.767
74	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	(726.274.323)	(726.274.323)
75	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	9.302.438.383	(20.559.292.671)	(11.256.854.288)
76	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	7.427.022.908	(7.427.022.908)	-
77	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	51.978.672.921	(231.033.516.079)	(179.054.843.158)
78	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-
Jumlah Pada KL			**227.177.035.055.927,00**	**(240.053.195.825.425,00)**	(12.876.160.769.498)
79	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	16.014.032.277.321	(4.274.156.650.417)	11.739.875.626.904
		Penyesuaian Konsolidasian LKPP	-	-	-
TOTAL KONSOLIDASIAN TK TM LKPP			**243.191.067.333.248**	**(244.327.352.475.842)**	**(1.136.285.142.594)**

Republik Indonesia

Lampiran 32

Rekapitulasi Revaluasi Aset Tetap Kementerian dan Lembaga Tahun 2019

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	131111	Tanah	512.067.714.395			
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	-8.087.049.168			
3	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.126.049.285			
					548.106.714.512	**548.106.714.512**	**0**	
4	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	131111	Tanah	954.959.074.643			
5	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	-68.359.379.427			
6	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	79.492.601			
7	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134112	Irigasi	-3.810.949.560			
8	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	148.006.529.593			
9	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	12.755.194.361			
10	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	861.604.632			
					1.044.491.566.843	**1.044.491.566.843**	**0**	
11	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131111	Tanah	4.004.747.942.854			
12	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	64.520.194.696			
13	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	3.646.113.168			
14	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134112	Irigasi	395.512.449			
15	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	222.124.000.744			
16	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	12.958.349.289			
17	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.271.503.664			
					4.311.663.616.864	**4.311.663.616.864**	**0**	
18	005	MAHKAMAH AGUNG	131111	Tanah	14.941.074.348.663			
19	005	MAHKAMAH AGUNG	132111	Peralatan dan Mesin	1.290.488			
20	005	MAHKAMAH AGUNG	133111	Gedung dan Bangunan	173.977.768.669			
21	005	MAHKAMAH AGUNG	134111	Jalan dan Jembatan	-14.615.934.077			
22	005	MAHKAMAH AGUNG	134112	Irigasi	-3.723.993.312			
23	005	MAHKAMAH AGUNG	135121	Aset Tetap Lainnya	67.868.989			
24	005	MAHKAMAH AGUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.136.488			
25	005	MAHKAMAH AGUNG	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.292.194.599.552			
26	005	MAHKAMAH AGUNG	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.410.926.830			
27	005	MAHKAMAH AGUNG	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.603.748.288			
					16.412.989.487.602	**16.412.989.487.602**	**0**	
28	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	13.179.710.095.222			
29	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	-1.350.205.569.292			
30	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	-8.407.150.863			
31	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	-1.933.123.370			
32	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.029.997.163.685			
33	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.531.344.521			
34	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.297.394.110			
					12.868.990.154.013	**12.868.990.154.013**	**0**	
35	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	131111	Tanah	496.402.573.990.820			
36	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	483.419.520.598			
37	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	-126.981.659.639			
38	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134112	Irigasi	135.732.079.319			
39	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.601.458.594.822			
40	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	372.944.994.220			
41	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	44.276.194.934			
					498.913.423.715.074	**498.913.423.715.074**	**0**	

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
42	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	9.506.286.907.345			
43	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	85.151.061.755			
44	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	-42.630.032.048			
45	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134112	Irigasi	26.157.510.316			
46	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	551.923.247.009			
47	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	53.371.573.587			
48	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	5.562.630.128			
					10.185.822.898.092	**10.185.822.898.092**	**0**	
49	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	131111	Tanah	27.014.617.544.895			
50	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.189.662.281.427			
51	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	6.378.034.338			
52	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.861.197.358.567			
53	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.494.285.936			
					32.077.349.505.163	**32.077.349.505.163**	**0**	
54	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131111	Tanah	1.160.114.994.104.610			
55	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	132111	Peralatan dan Mesin	-949.198.300			
56	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	133111	Gedung dan Bangunan	16.570.019.183.721			
57	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134111	Jalan dan Jembatan	410.199.006.432			
58	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134112	Irigasi	245.338.766.531			
59	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	379.679.300			
60	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.851.434.659.470			
61	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.240.740.354.292			
62	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	224.114.554.443			
					1.191.656.271.110.500	**1.191.656.271.110.500**	**0**	
63	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	131111	Tanah	42.680.634.464.332			
64	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	133111	Gedung dan Bangunan	-204.914.784.971			
65	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	134111	Jalan dan Jembatan	488.537.307			
66	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	134112	Irigasi	-1.553.161.273			
67	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.963.709.024.473			
68	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.738.753.568			
69	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.814.997.522			
					44.458.917.830.958	**44.458.917.830.958**	**0**	
70	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	131111	Tanah	64.869.296.426.870			
71	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	768.730.444.171			
72	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	-58.335.445.580			
73	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134112	Irigasi	-15.453.206.095			
74	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.703.999.582.514			
75	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	74.405.722.078			
76	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	25.238.615.593			
77	015	KEMENTERIAN KEUANGAN			12.384.718.405.591			
					80.752.600.545.142	**80.752.600.545.142**	**0**	
78	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	131111	Tanah	64.747.224.068.667			
79	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	133111	Gedung dan Bangunan	924.534.562.411			
80	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134111	Jalan dan Jembatan	-26.708.244.634			
81	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134112	Irigasi	30.578.002.204			
82	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	885.278.657.372			
83	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	140.061.563.698			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
84	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	29.287.746.856			
					66.730.256.356.574	**66.730.256.356.574**	**0**	
85	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	131111	Tanah	6.015.280.675.047			
86	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	133111	Gedung dan Bangunan	327.158.886.572			
87	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134111	Jalan dan Jembatan	3.898.673.044			
88	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134112	Irigasi	34.658.917.821			
89	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	328.166.534.197			
90	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.465.189.653			
91	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.282.454.878			
					6.715.911.331.212	**6.715.911.331.212**	**0**	
92	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	131111	Tanah	11.865.700.492.340			
93	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133111	Gedung dan Bangunan	229.735.277.524			
94	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	134111	Jalan dan Jembatan	-24.978.125.331			
95	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	134112	Irigasi	27.398.559.018			
96	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	512.009.445.715			
97	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	42.512.904.438			
98	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	25.637.195.366			
99	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0			
					12.678.015.749.070	**12.678.015.749.070**	**0**	
100	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	131111	Tanah	235.112.035.218.970			
101	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	133111	Gedung dan Bangunan	-2.724.097.503.247			
102	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134111	Jalan dan Jembatan	10.860.967.453.830			
103	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134112	Irigasi	-850.770.514.736			
104	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0			
105	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.144.391.277.849			
106	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	27.074.432.167.169			
107	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.426.371.614.780			
108	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	313221	Transfer Masuk	131.170.000			
					274.043.460.884.615	**274.043.460.884.615**	**0**	
109	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	131111	Tanah	12.242.119.965.156			
110	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.063.062.001.529			
111	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134111	Jalan dan Jembatan	-5.992.346.495			
112	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134112	Irigasi	-6.941.584.123			
113	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	135121	Aset Tetap Lainnya	0			
114	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	836.978.099.371			
115	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	49.270.189.658			
116	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	12.518.913.847			
117	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	88.172.178.795			
118	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0			
					14.279.187.417.738	**14.191.015.238.943**	**88.172.178.795**	**merupakan reklas ke Koreksi AT Non Revaluasi karena aset bukan obyek revaluasi**
119	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	131111	Tanah	55.573.091.937.130			
120	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.047.865.503.631			
121	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134111	Jalan dan Jembatan	-82.548.837.902			
122	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134112	Irigasi	2.617.978.092			
123	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.213.928.700.587			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
124	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	136.301.373.104			
125	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	15.386.040.650			
					58.906.642.695.292	**58.906.642.695.292**	**0**	
126	025	KEMENTERIAN AGAMA	131111	Tanah	43.570.157.461.261			
127	025	KEMENTERIAN AGAMA	133111	Gedung dan Bangunan	2.938.340.752.251			
128	025	KEMENTERIAN AGAMA	134111	Jalan dan Jembatan	-60.551.076.301			
129	025	KEMENTERIAN AGAMA	134112	Irigasi	-38.997.020.829			
130	025	KEMENTERIAN AGAMA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	303.315.447			
131	025	KEMENTERIAN AGAMA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.694.734.265.331			
132	025	KEMENTERIAN AGAMA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	103.662.426.245			
133	025	KEMENTERIAN AGAMA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	41.536.291.691			
134	025	KEMENTERIAN AGAMA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	140.035.120			
135	025	KEMENTERIAN AGAMA	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0			
136	025	KEMENTERIAN AGAMA	596111	Pengembalian Beban Kerugian Pelepasan Aset	0			
					50.249.326.450.216	**50.249.326.450.216**	**0**	
137	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	131111	Tanah	6.019.197.998.442			
138	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	133111	Gedung dan Bangunan	280.684.702.449			
139	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134111	Jalan dan Jembatan	-21.010.618.326			
140	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134112	Irigasi	495.888.049			
141	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	214.774.463.756			
142	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	28.761.702.768			
143	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.436.137.380			
					6.525.340.274.518	**6.525.340.274.518**	**0**	
144	027	KEMENTERIAN SOSIAL	131111	Tanah	14.939.498.374.203			
145	027	KEMENTERIAN SOSIAL	133111	Gedung dan Bangunan	174.120.943.582			
146	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134111	Jalan dan Jembatan	-13.508.152.362			
147	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134112	Irigasi	-2.083.795.943			
148	027	KEMENTERIAN SOSIAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	286.009.872.333			
149	027	KEMENTERIAN SOSIAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	29.302.628.925			
150	027	KEMENTERIAN SOSIAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	7.671.354.370			
					15.421.011.225.108	**15.421.011.225.108**	**0**	
151	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	131111	Tanah	8.609.797.144.023			
152	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	133111	Gedung dan Bangunan	658.507.720.055			
153	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	134111	Jalan dan Jembatan	28.606.724.433			
154	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	134112	Irigasi	-16.531.191.588			
155	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	355.574.728.030			
156	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	62.162.736.002			
157	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	22.001.642.440			
					9.720.119.503.395	**9.720.119.503.395**	**0**	
158	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	131111	Tanah	13.049.375.113.602			
159	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	855.205.448.068			
160	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	788.171.690.101			
161	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134112	Irigasi	22.966.296.416			
162	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	409.535.664.725			
163	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	124.595.682.168			
164	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	696.993.226.173			
165	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operas	0			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
166	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0			
167	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0			
168	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591312	Beban Penyusutan Irigasi	0			
169	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591312	Pengembalian Beban Penyusutan Irigasi	0			
					15.946.843.121.253	**15.946.843.121.253**	**0**	
170	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	131111	Tanah	715.750.378.302.700			
171	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	132111	Peralatan dan Mesin	-1.198.958.000			
172	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	5.155.147.314.057			
173	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	91.252.252.918.265			
174	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134112	Irigasi	81.567.524.108.715			
175	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.146.850.457			
176	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.185.408.556.320			
177	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	166.933.651.018.651			
178	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	39.878.057.215.601			
					1.101.722.367.326.770	**1.101.722.367.326.770**	**0**	
179	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAM	133111	Gedung dan Bangunan	2.099.134.500			
180	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAM	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	724.910.950			
					2.824.045.450	**2.824.045.450**	**0**	
181	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	133111	Gedung dan Bangunan	6.755.984.295			
182	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.399.389.358			
					10.155.373.653	**10.155.373.653**	**0**	
183	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA D	133111	Gedung dan Bangunan	-8.968.143.051			
184	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA D	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.865.057.548			
					3.896.914.497	**3.896.914.497**	**0**	
185	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	131111	Tanah	5.403.342.154.006			
186	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	133111	Gedung dan Bangunan	126.378.226.541			
187	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134111	Jalan dan Jembatan	-9.037.084.960			
188	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134112	Irigasi	820.202.680			
189	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	186.757.085.264			
190	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.647.159.774			
191	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.309.649.664			
					5.724.217.392.969	**5.724.217.392.969**	**0**	
192	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131111	Tanah	1.174.991.402.350			
193	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	99.715.894.581			
194	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.332.165.952			
					1.310.039.462.883	**1.310.039.462.883**	**0**	
195	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	131111	Tanah	287.477.691.111.818			
196	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	132111	Peralatan dan Mesin	10.274.513			
197	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	133111	Gedung dan Bangunan	1.111.950.109.389			
198	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	134111	Jalan dan Jembatan	-60.366.895.321			
199	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	134112	Irigasi	5.914.006.574			
200	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-10.274.513			
201	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.522.075.020.624			
202	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	336.983.282.266			
203	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	38.859.211.925			
					292.433.105.847.275	**292.433.105.847.275**	**0**	
204	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	131111	Tanah	2.066.302.293.391			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
205	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	133111	Gedung dan Bangunan	22.857.076.639			
206	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	134111	Jalan dan Jembatan	-10.790.473.507			
207	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	134112	Irigasi	746.941.633			
208	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	139.692.463.850			
209	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.113.017.908			
210	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	479.721.205			
					2.228.401.041.119	**2.228.401.041.119**	**0**	
211	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	131111	Tanah	1.332.000.000			
212	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	133111	Gedung dan Bangunan	68.642.339.797			
213	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.148.349.709			
					76.122.689.506	**76.122.689.506**	**0**	
214	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORM	133111	Gedung dan Bangunan	30.432.858.697			
215	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORM	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.021.872.697			
					34.454.731.394	**34.454.731.394**	**0**	
216	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	131111	Tanah	3.918.500.510.795			
217	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	200.155.819.062			
218	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	5.887.812.883			
219	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134112	Irigasi	-12.410.342.405			
220	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	81.202.537.562			
221	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.438.069.794			
222	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	10.380.200.338			
223	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0			
					4.212.154.608.029	**4.212.154.608.029**	**0**	
224	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	131111	Tanah	532.883.483.896			
225	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	-77.080.381.155			
226	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	134112	Irigasi	-3.476.077.845			
227	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.028.890.701			
228	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.278.561.295			
					484.634.476.892	**484.634.476.892**	**0**	
229	054	BADAN PUSAT STATISTIK	131111	Tanah	2.237.772.699.085			
230	054	BADAN PUSAT STATISTIK	133111	Gedung dan Bangunan	-176.962.561.595			
231	054	BADAN PUSAT STATISTIK	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	291.788.192.743			
					2.352.598.330.233	**2.352.598.330.233**	**0**	
232	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	131111	Tanah	1.303.960.040.500			
233	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	11.874.387.906			
234	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	-177.207.490			
235	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	134112	Irigasi	-310.375.114			
236	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.465.901.188			
237	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	158.969.842			
238	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	38.932.334			
					1.342.010.649.166	**1.342.010.649.166**	**0**	
239	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	131111	Tanah	6.944.826.863.093			
240	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	133111	Gedung dan Bangunan	453.959.674.651			
241	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134111	Jalan dan Jembatan	1.003.404.903			
242	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134112	Irigasi	-663.298.611			
243	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	254.111.087.587			
244	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	265.374.317			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
245	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.217.479.418			
					7.654.720.585.358	**7.654.720.585.358**	**0**	
246	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	1.522.820.261.000			
247	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	66.753.903.344			
248	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.934.436.673			
249	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	18.791.903.000			
					1.647.300.504.017	**1.647.300.504.017**	**0**	
250	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	131111	Tanah	4.497.587.823.506			
251	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	133111	Gedung dan Bangunan	104.624.818.221			
252	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134111	Jalan dan Jembatan	-4.089.522.516			
253	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134112	Irigasi	579.441.333			
254	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.424.987.822			
255	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.332.998.157			
256	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	801.648.701			
					4.779.262.195.224	**4.779.262.195.224**	**0**	
257	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	139.396.087.901.212			
258	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	5.587.380.066.049			
259	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	15.910.257.511			
260	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	-699.079.273			
261	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.691.582.348.040			
262	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	201.131.606.183			
263	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	61.602.447.882			
					148.952.995.547.604	**148.952.995.547.604**	**0**	
264	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	131111	Tanah	932.588.060.442			
265	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	-1.866.064.056			
266	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	-368.233.483			
267	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134112	Irigasi	-485.942.577			
268	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.016.811.487			
269	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.247.518.383			
270	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	948.551.817			
					1.060.080.702.013	**1.060.080.702.013**	**0**	
271	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	131111	Tanah	1.278.351.719.000			
272	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	84.751.669.734			
273	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	452.716.515			
274	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134112	Irigasi	-1.033.231.120			
275	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.488.424.981			
276	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.052.686.965			
277	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	201.869.844			
					1.375.265.855.919	**1.375.265.855.919**	**0**	
278	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	131111	Tanah	1.625.716.905.000			
279	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	133111	Gedung dan Bangunan	12.162.336.395			
280	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.465.362.404			
					1.686.344.603.799	**1.686.344.603.799**	**0**	
281	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	131111	Tanah	154.554.723.724			
282	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	-293.768.552.962			
283	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	4.221.952.279			
284	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134112	Irigasi	511.124.393			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
285	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	118.459.596.996			
286	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.866.377.184			
287	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.116.164.840			
					-10.038.613.546	**-10.038.613.546**	**0**	
288	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	131111	Tanah	571.755.122.303			
289	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	133111	Gedung dan Bangunan	217.767.389.416			
290	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	134111	Jalan dan Jembatan	55.884.891.503			
291	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	134112	Irigasi	-6.276.684.491			
292	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.518.379.916			
293	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.547.352.916			
294	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TR	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.303.317.530			
					868.499.769.093	**868.499.769.093**	**0**	
295	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	131111	Tanah	1.688.666.457.504			
296	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	192.264.105.831			
297	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	-918.378.419			
298	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	134112	Irigasi	1.580.585.232			
299	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.006.480.025			
300	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.754.361.062			
301	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	496.101.656			
					1.979.849.712.891	**1.979.849.712.891**	**0**	
302	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	604.799.807			
303	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	912.455.932			
					1.517.255.739	**1.517.255.739**	**0**	
304	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	131111	Tanah	2.523.495.803.769			
305	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	133111	Gedung dan Bangunan	2.974.114.552			
306	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	134111	Jalan dan Jembatan	-9.735.203.277			
307	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	134112	Irigasi	-3.879.696.487			
308	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	182.273.179.844			
309	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.457.280.555			
310	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	12.413.103.119			
					2.732.998.582.075	**2.732.998.582.075**	**0**	
311	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	377.324.129.899			
312	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	100.878.559.131			
313	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134111	Jalan dan Jembatan	-21.329.550			
314	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134112	Irigasi	89.315.965			
315	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.923.288.448			
316	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.927.908			
317	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	21.610.969			
					534.224.502.770	**534.224.502.770**	**0**	
318	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	131111	Tanah	417.740.239.674			
319	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	133111	Gedung dan Bangunan	-1.111.669.467			
320	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	134111	Jalan dan Jembatan	-780.386.993			
321	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.082.382.335			
322	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.761.226.344			
323	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0			
					454.691.791.893	**454.691.791.893**	**0**	
324	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131111	Tanah	244.350.697.000			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
325	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	66.550.684.743			
326	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	-437.108.198			
327	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.119.900.881			
328	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	271.323.098			
329	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN			-86.366.088.000			
					238.489.409.524	**238.489.409.524**	**0**	
330	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	131111	Tanah	22.603.902.006.954			
331	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	84.642.523.860			
332	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	16.204.235.691			
333	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134112	Irigasi	44.295.729.010			
334	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	164.017.667.164			
335	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	30.328.089.690			
336	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	12.277.456.199			
					22.955.667.708.568	**22.955.667.708.568**	**0**	
337	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	131111	Tanah	11.251.253.510.775			
338	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	158.008.051.529			
339	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	472.064.158			
340	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134112	Irigasi	282.074.385.200			
341	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	192.938.552.615			
342	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	468.110.390			
343	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	500.387.367			
					11.885.715.062.034	**11.885.715.062.034**	**0**	
344	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	131111	Tanah	3.936.331.804.335			
345	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	133111	Gedung dan Bangunan	256.334.697.673			
346	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	134111	Jalan dan Jembatan	-8.526.907.029			
347	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	134112	Irigasi	134.974.212			
348	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	112.430.145.685			
349	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.779.167.756			
350	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	334.137.264			
					4.301.818.019.896	**4.301.818.019.896**	**0**	
351	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	131111	Tanah	1.316.997.432.898			
352	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	32.228.368.423			
353	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	-7.493.574.080			
354	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	134112	Irigasi	3.637.132.692			
355	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.158.037.418			
356	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.471.334.593			
357	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	673.150.226			
					1.426.671.882.170	**1.426.671.882.170**	**0**	
358	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131111	Tanah	158.407.731.000			
359	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	133111	Gedung dan Bangunan	-48.501.257.012			
360	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134111	Jalan dan Jembatan	204.259.000			
361	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134112	Irigasi	-436.298.375			
362	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.490.914.720			
363	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	909.789.000			
364	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	288.101.654			
					133.363.239.987	**133.363.239.987**	**0**	
365	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131111	Tanah	101.725.422.446			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
366	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	133111	Gedung dan Bangunan	-5.656.084.370			
367	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134111	Jalan dan Jembatan	207.638.297			
368	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134112	Irigasi	-123.421.980			
369	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.299.066.434			
370	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.630.457.374			
371	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	57.173.418			
					102.140.251.619	**102.140.251.619**	**0**	
372	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	131111	Tanah	2.516.331.092.687			
373	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	187.482.884.361			
374	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	419.713.711			
375	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134112	Irigasi	404.545.884			
376	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.914.935.990			
377	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	610.846.144			
378	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	103.908.936			
					2.792.267.927.713	**2.792.267.927.713**	**0**	
379	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	586.254.674.204			
380	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	39.713.395.896			
381	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	51.614.224.229			
382	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	-351.269.500			
383	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.486.178.804			
384	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	796.937.688			
385	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	96.967.697			
					724.611.109.018	**724.611.109.018**	**0**	
386	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	131111	Tanah	2.103.995.623.764			
387	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	127.468.467.793			
388	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	2.578.278.750			
389	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134112	Irigasi	-3.221.989.792			
390	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.988.249.609			
391	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.524.371.374			
392	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.069.704.024			
					2.340.402.705.522	**2.340.402.705.522**	**0**	
393	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	131111	Tanah	3.064.028.696.502			
394	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	133111	Gedung dan Bangunan	137.787.635.368			
395	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	134111	Jalan dan Jembatan	123.013.448			
396	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	134112	Irigasi	-182.661.543			
397	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	161.976.713.762			
398	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.766.414.501			
399	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	895.116.796			
					3.369.394.928.834	**3.369.394.928.834**	**0**	
400	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	131111	Tanah	1.711.266.031.470			
401	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	93.050.952.880			
402	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	77.276.000			
403	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	1.523.806.000			
404	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	57.135.896.935			
405	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	117.330.000			
406	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	58.983.311			
					1.863.230.276.596	**1.863.230.276.596**	**0**	

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
407	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	131111	Tanah	294.688.795.680			
408	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	133111	Gedung dan Bangunan	57.780.643.501			
409	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134111	Jalan dan Jembatan	-5.500.400.200			
410	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134112	Irigasi	-338.120.000			
411	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.378.856.298			
412	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.665.928.800			
413	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	75.159.278			
					390.750.863.357	**390.750.863.357**	**0**	
414	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	131111	Tanah	1.221.313.991.940			
415	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	133111	Gedung dan Bangunan	883.583.000			
416	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.480.591.351			
					1.245.678.166.291	**1.245.678.166.291**	**0**	
417	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	131111	Tanah	132.576.836.767			
418	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	133111	Gedung dan Bangunan	-26.589.423.175			
419	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.037.082.068			
					109.024.495.660	**109.024.495.660**	**0**	
420	100	KOMISI YUDISIAL RI	131111	Tanah	223.661.162.600			
421	100	KOMISI YUDISIAL RI	133111	Gedung dan Bangunan	22.364.884.262			
422	100	KOMISI YUDISIAL RI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.327.765.459			
					257.353.812.321	**257.353.812.321**	**0**	
423	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	131111	Tanah	166.489.394.224			
424	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	133111	Gedung dan Bangunan	-214.866.629.278			
425	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.375.168.794			
					-18.002.066.260	**-18.002.066.260**	**0**	
426	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	131111	Tanah	193.186.797.919			
427	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	133111	Gedung dan Bangunan	5.906.980.518			
428	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	134111	Jalan dan Jembatan	-3.647.014.437			
429	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	134112	Irigasi	-414.774.600			
430	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.511.375.567			
431	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.887.573.920			
432	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KER	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	95.306.607			
					212.526.245.494	**212.526.245.494**	**0**	
433	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	131111	Tanah	222.510.543.499			
434	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	133111	Gedung dan Bangunan	1.084.391.571			
435	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	134111	Jalan dan Jembatan	-2.001.294.938			
436	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	134112	Irigasi	-123.182.341.197			
437	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	174.590.764			
438	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.784.580.657			
439	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	116.094.806.573			
					216.465.276.929	**0**	**216.465.276.929**	**BPLS sudah likuidasi**
440	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	131111	Tanah	253.330.115.000			
441	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	133111	Gedung dan Bangunan	56.696.674.162			
442	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.203.718.661			
					316.230.507.823	**316.230.507.823**	**0**	
443	107	BADAN SAR NASIONAL	131111	Tanah	625.925.021.227			
444	107	BADAN SAR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	14.710.691.255			
445	107	BADAN SAR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	-6.860.564.187			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
446	107	BADAN SAR NASIONAL	134112	Irigasi	-5.314.427.596			
447	107	BADAN SAR NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	72.233.674.342			
448	107	BADAN SAR NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.816.034.417			
449	107	BADAN SAR NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.192.213.698			
450	107	BADAN SAR NASIONAL	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-17.816.095			
					710.684.827.061	**710.684.827.061**	**0**	
451	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	131111	Tanah	164.554.181.287			
452	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	133111	Gedung dan Bangunan	-5.234.890.884			
453	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134111	Jalan dan Jembatan	-3.372.353.590			
454	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134112	Irigasi	944.600.884			
455	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.297.818.569			
456	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.166.915.679			
457	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.800.592.054			
					169.156.863.999	**169.156.863.999**	**0**	
458	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	18.637.613.000			
					18.637.613.000	**18.637.613.000**	**0**	
459	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	133111	Gedung dan Bangunan	-4.996.502.863			
460	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134111	Jalan dan Jembatan	73.973.734.660			
461	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134112	Irigasi	-3.650.891.500			
462	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.944.169.837			
463	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	15.649.641.000			
464	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4.985.795.717			
					87.905.946.851	**87.905.946.851**	**0**	
465	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	131111	Tanah	20.966.585.645.133			
466	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	133111	Gedung dan Bangunan	3.170.440.059.797			
467	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	134111	Jalan dan Jembatan	-1.523.345.957.640			
468	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	134112	Irigasi	2.357.845.130.080			
469	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	149.735.002.450			
470	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.177.150.505.185			
471	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	156.096.875.450			
472	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0			
473	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operas	0			
474	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAB	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0			
					27.454.507.260.455	**27.454.507.260.455**	**0**	
475	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	133111	Gedung dan Bangunan	-61.939.917.104			
476	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	134111	Jalan dan Jembatan	-26.964.744.331			
477	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	134112	Irigasi	460.936.851			
478	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.529.243.227			
479	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	11.255.469.593			
480	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	915.129.223			
					-67.743.882.541	**-67.743.882.541**	**0**	
481	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	2.346.592.238			
					2.346.592.238	**2.346.592.238**	**0**	
482	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	10.031.332.782.850			
483	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	310.293.068.599			
484	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	-424.592.120			
485	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	1.822.992.325			

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2019

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah Total (*e-rekon*)	Selisih Revaluasi Aset (LPE)	Selisih	Keterangan
486	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	22			
487	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.525.622.203			
488	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.902.392.354			
489	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	532.529.470			
					10.483.984.795.703	**10.483.984.795.703**	**0**	
490	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	7.999.377.356.559			
491	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	551.233.135.158			
492	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	13.191.258.957			
493	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	3.777.652.495			
494	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.715.193.251			
495	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.580.763.851			
496	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	971.991.385			
					8.734.847.351.656	**8.734.847.351.656**	**0**	
497	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	131111	Tanah	1.167.369.212.286			
498	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	133111	Gedung dan Bangunan	-260.361.109.813			
499	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	134111	Jalan dan Jembatan	-205.042.705.856			
500	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	134112	Irigasi	-3.065.591.349			
501	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.870.286.305			
502	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	203.791.387.443			
503	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	9.832.176.456			
					937.393.655.472	**937.393.655.472**	**0**	
504	119	BADAN KEAMANAN LAUT	131111	Tanah	10.288.494.400			
505	119	BADAN KEAMANAN LAUT	133111	Gedung dan Bangunan	-16.908.311.957			
506	119	BADAN KEAMANAN LAUT	134111	Jalan dan Jembatan	-23.584.086.460			
507	119	BADAN KEAMANAN LAUT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.281.237.987			
508	119	BADAN KEAMANAN LAUT	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.789.331.059			
					-22.133.334.971	**-22.133.334.971**	**0**	
							0	
					4.113.474.825.550.450	**4.113.170.188.094.730**	**304.637.455.724**	

Republik Indonesia

Lampiran 33

Laporan Pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2019

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN 4
II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2019 7
III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN 8
A. Bunga Utang Surat Berharga Negara 9
B. Surat Berharga Negara Neto 9
IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2019 11
A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah 11
B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 15
C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing 18
D. Pelaksanaan Debt Switching/Buyback 18
V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2019 20
VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2019 27
I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah 27
II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas) 42
III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2019 45
VII. PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SBN Neto Tahun 2019 10
Tabel 2. Seri ON Yang Diterbitkan Tahun 2019 11
Tabel 3. Pelunasan Seri ON Tahun 2019 15
Tabel 4. Seri SPN Yang Diterbitkan Tahun 2019 16
Tabel 5. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2019 17
Tabel 6.Realisasi Penerbitan Obligasi Negara Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 18
Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2019 19
Tabel 8. Rincian Realisasi Pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2019 19
Tabel 9. Daftar Penerbitan SPN-S Tahun 2019 22
Tabel 10. Daftar Pelunasan SPN-S Tahun 2019 23
Tabel 11. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2019 24
Tabel 12. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Tahun 2019 26
Tabel 13. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2019 26
Tabel 14. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2019 26
Tabel 15. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2019 26
Tabel 16. *Outstanding* SBN Seri Fixed Rate (FR) Per 31 Desember 2019 28
Tabel 17. Data *Outstanding* ORI Per 31 Desember 2019 30
Tabel 18. Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) 32
Tabel 19. Struktur *Outstanding* SPN Per 31 Desember 2019 33
Tabel 20. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah 34
Tabel 21. Struktur *Outstanding* SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2019 36
Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2019 37
Tabel 23. Struktur Outstanding SBSN Seri SR dan ST Per 31 Desember 2019 39
Tabel 24. Struktur *Outstanding* SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2019 40
Tabel 25. Struktur *Outstanding* SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2019 41
Tabel 26. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas Per 31 Desember 2019 43
Tabel 27. Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2019 46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah Seri FR Tgl 31 Desember 2019 29
Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR 29
Grafik 3. Struktur Outstanding ORI Per 31 Desember 2019 30
Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI Per 31 Desember 2019 31
Grafik 5. Struktur Outstanding VR Per 31 Desember 2019 32
Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR Per 31 Desember 2019 32
Grafik 7. Struktur Outstanding SPN Per 31 Desember 2019 33
Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN Per 31 Desember 2019 34
Grafik 9. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2019 35
Grafik 10.Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2019 .. 35
Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2019 36
Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2019 36
Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2019 37
Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2019 38
Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN Seri SR Per 31 Desember 2019 39
Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SR Per 31 Desember 2019 39
Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2019 40
Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2019 41
Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2019 42
Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2019 42

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2019. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

a. Membiayai defisit APBN;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Instrumen Fiskal

   Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar

sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan *(registry)* dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter*/ OTC). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

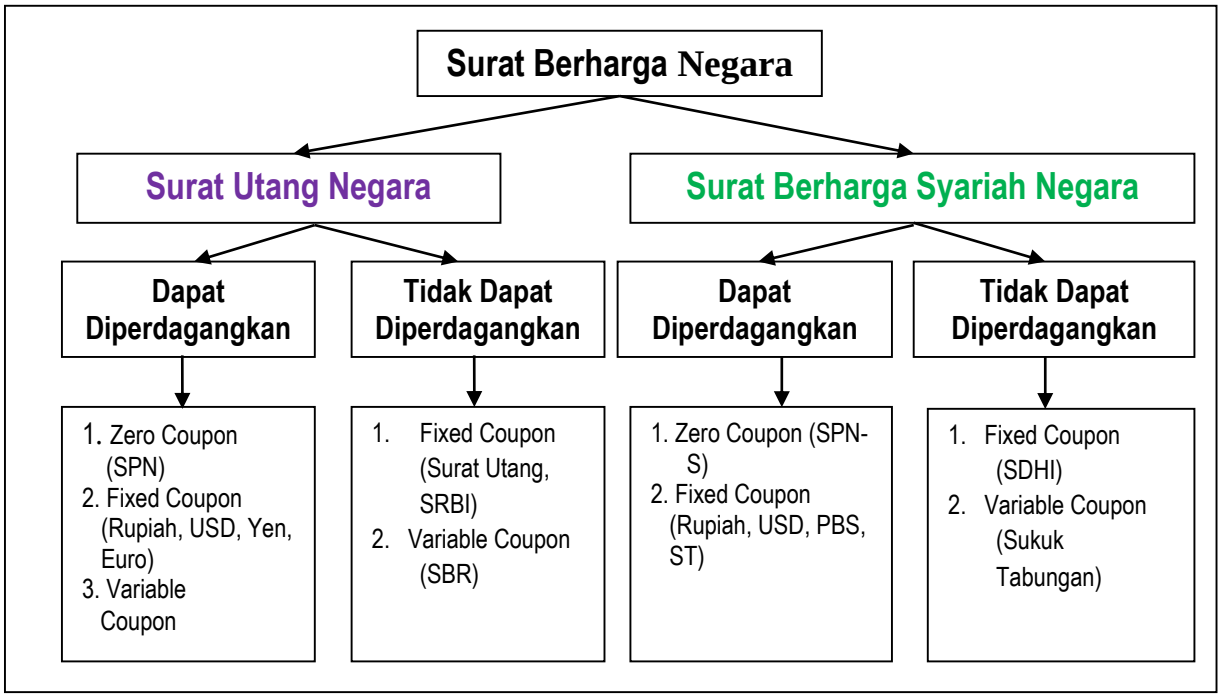
SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk

penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada Tahun 2019 dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara



II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2019

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut[1]:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestk Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;
2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai dan peningkatan kinerja kegiatan yang dibiayai dengan utang;
3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;

[1] Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 53/PR/2019 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019

5. Melakukan upaya *lengthening duration* untuk mengendalikan utang jatuh tempo jangka pendek - menengah melalui pelaksanaan penerbitan SBN dan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *Asset Liabilitiy Management* (ALM);
7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;
9. Memperkuat dan mengoptimalkan peran hubungan investor dan kelembagaan, optimalisasi strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka perluasan basis investor untuk menciptakan gambaran dan pengetahuan positif mengenai SBN;
10. Meningkatkan pendalaman pasar domestic dengan mengoptimalkan penerbitan SBN riel secara dalam jaringan (*online*);
11. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik;
12. Melaksanakan sosialisasi dan pemasaran SBN dalam negeri sebagai strategi untuk meningkatkan investor domestik dan mendorong penambahan investor usia muda.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN Tahun 2019 sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2018 sesuai dengan strategi pembiayaan Tahun 2019, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp432.390,6 miliar terdiri atas SBN neto sebesar Rp439.031,2 miliar dan Pinjaman neto sebesar negatif Rp6.640,6 miliar. Dengan memperhatikan outlook defisit APBN tahun anggaran 2019, pembiayaan non-utang, dan utang jatuh tempo, maka kebutuhan pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp929.933,6 miliar yang terdiri dari pembiayaan melalui (a) penerbitan SBN sebesar Rp848.939,9 miliar, pembiayaan melalui

penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019 sebesar Rp47.590,0 miliar sehingga penerbitan SBN Bruto sebesar Rp896.529,9 miliar; (b) pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp80.993,7 miliar. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang mengutamakan penerbitan melalui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (*development partners*) multilateral dan bilateral.

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2019, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp255.426.217.733.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp253.513.213.859.761,-, atau sebesar 99,25%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Negara Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2018 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk Tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, target SBN neto adalah sebesar Rp388.957.891.000.000,- Realisasi SBN neto Tahun 2019 adalah sebesar Rp446.288.601.121.614,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada Tabel 1.

Realisasi SBN neto Tahun 2019 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar Rp523.479.952.000,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp11.247.888.331.714,- dan pembayaran sebesar Rp10.724.408.379.714,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN Tahun 2019 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN Tahun 2019 adalah sebesar Rp921.482.794.31.714,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp772.906.022.331.714,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD3.850.000.000,- dan EUR1.750.000.000,- serta JPY177.000.000.000,- atau setara dengan Rp148.576.772.200.000,-.

Atas penerbitan SBN di Akhir Tahun 2018, terdapat penerbitan valas yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2019 *(prefunding)* sebesar USD3.000.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di Tahun 2019. Adapun selama Tahun 2019 Transaksi *Debt switching* SBN tercatat sebesar Rp6.870.000.000.000,-.

Pelunasan SBN Tahun 2019 adalah sebesar Rp475.194.193.410.100,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp412.729.586.110.100,- dan pelunasan SBN valas Rp62.464.607.300.000,-.

Tabel 1. SBN Neto Tahun 2019

No.	Akun	Uraian	Jumlah (IDR)
Penerimaan Pembiayaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	89,340,000,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	443,560,323,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	8,348,270,101,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	163,086,014,982,928
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	2,899,618,230,714
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	37,360,000,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	28,311,796,017,072
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	119,059,172,200,000
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	29,517,600,000,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			**921,482,794,531,714**
Pengeluaran Pembiayaan			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	109,440,000,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	152,631,506,730,386
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali	6,870,000,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	8,033,396,484,000
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	92,013,671,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	2,691,011,895,714
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	41,050,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	40,999,607,300,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	-
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	21,465,000,000,000
Total Pengeluaran			**475,194,193,410,100**
SBN Netto (IDR)			**446,288,601,121,614**

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2019

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, target SBN neto adalah sebesar Rp388.957.891.000.000,-. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SBN setelah dikurangi dengan jumlah SBN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo *(buyback)*.

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2019 dilakukan lelang sejak bulan Januari sampai Desember 2019.

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di Tahun 2019, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp436.690.323.000.000,- dengan rincian:

a. ON dalam negeri sebesar Rp417.100.000.000.000,-; dan
b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan *Saving Bond Retail* (SBR) adalah sebesar Rp19.590.323.000.000,-.

Tabel 2. **Seri ON yang diterbitkan Tahun 2019**

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	1/7/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	2,750,000,000,000.00
2	1/7/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	9,750,000,000,000.00
3	1/7/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	6,650,000,000,000.00
4	1/7/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	4,100,000,000,000.00
5	1/17/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	2,500,000,000,000.00
6	1/17/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	9,150,000,000,000.00
7	1/17/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	8,550,000,000,000.00
8	1/17/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	2,550,000,000,000.00
9	1/31/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	1,250,000,000,000.00
10	1/31/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	6,600,000,000,000.00
11	1/31/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	3,450,000,000,000.00
12	1/31/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	6,900,000,000,000.00
13	2/14/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	1,900,000,000,000.00
14	2/14/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,850,000,000,000.00
15	2/14/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	7,050,000,000,000.00
16	2/14/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	7,450,000,000,000.00
17	2/14/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	1,750,000,000,000.00
18	2/28/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	5,100,000,000,000.00
19	2/28/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	1,650,000,000,000.00
20	2/28/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	6,350,000,000,000.00
21	2/28/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	4,900,000,000,000.00
22	3/11/2019	5/15/2027	FR0059	IDR	1,000,000,000,000.00
23	3/14/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	3,050,000,000,000.00
24	3/14/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,150,000,000,000.00
25	3/14/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	2,000,000,000,000.00
26	3/14/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	5,800,000,000,000.00
27	3/14/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	2,050,000,000,000.00
28	3/28/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	7,000,000,000,000.00
29	3/28/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,650,000,000,000.00
30	3/28/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	2,000,000,000,000.00
31	3/28/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	3,900,000,000,000.00
32	3/28/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	6,400,000,000,000.00
33	4/11/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	4,550,000,000,000.00
34	4/11/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	650,000,000,000.00
35	4/11/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	2,300,000,000,000.00
36	4/11/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	4,050,000,000,000.00
37	4/11/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	750,000,000,000.00
38	4/25/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	4,000,000,000,000.00
39	4/25/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	950,000,000,000.00
40	4/25/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	5,600,000,000,000.00
41	4/25/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	6,000,000,000,000.00
42	4/25/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	3,900,000,000,000.00
43	5/9/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	4,550,000,000,000.00
44	5/9/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,150,000,000,000.00
45	5/9/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	4,000,000,000,000.00
46	5/9/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	5,850,000,000,000.00
47	5/9/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	1,350,000,000,000.00
48	5/20/2019	8/15/2032	FR0074	IDR	1,300,000,000,000.00
49	5/23/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	2,400,000,000,000.00
50	5/23/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	100,000,000,000.00

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
51	5/23/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	2,100,000,000,000.00
52	5/23/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	3,100,000,000,000.00
53	5/23/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	900,000,000,000.00
54	5/28/2019	5/15/2027	FR0059	IDR	1,000,000,000,000.00
55	5/28/2019	3/15/2024	FR0070	IDR	1,000,000,000,000.00
56	6/20/2019	3/15/2034	FR0068	IDR	4,900,000,000,000.00
57	6/20/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,000,000,000,000.00
58	6/20/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	5,000,000,000,000.00
59	6/20/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	7,900,000,000,000.00
60	6/20/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	2,600,000,000,000.00
61	7/4/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,900,000,000,000.00
62	7/4/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	2,050,000,000,000.00
63	7/4/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	5,400,000,000,000.00
64	7/4/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	3,350,000,000,000.00
65	7/4/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	5,450,000,000,000.00
66	7/18/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	2,700,000,000,000.00
67	7/18/2019	5/15/2024	FR0077	IDR	2,750,000,000,000.00
68	7/18/2019	5/15/2029	FR0078	IDR	5,500,000,000,000.00
69	7/18/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	3,950,000,000,000.00
70	7/18/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	4,800,000,000,000.00
71	8/1/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	150,000,000,000.00
72	8/1/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	150,000,000,000.00
73	8/1/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	1,450,000,000,000.00
74	8/1/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	5,050,000,000,000.00
75	8/1/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	11,600,000,000,000.00
76	8/15/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	350,000,000,000.00
77	8/15/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	700,000,000,000.00
78	8/15/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	1,200,000,000,000.00
79	8/15/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	3,950,000,000,000.00
80	8/15/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	5,700,000,000,000.00
81	8/29/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	650,000,000,000.00
82	8/29/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	500,000,000,000.00
83	8/29/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	1,000,000,000,000.00
84	8/29/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	5,000,000,000,000.00
85	8/29/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	6,150,000,000,000.00
86	9/12/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	300,000,000,000.00
87	9/12/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	3,350,000,000,000.00
88	9/12/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	2,250,000,000,000.00
89	9/12/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	3,100,000,000,000.00
90	9/12/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	10,050,000,000,000.00
91	9/26/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,150,000,000,000.00
92	9/26/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	400,000,000,000.00
93	9/26/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	2,150,000,000,000.00
94	9/26/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	4,100,000,000,000.00
95	9/26/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	5,200,000,000,000.00
96	10/10/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,000,000,000,000.00
97	10/10/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	1,200,000,000,000.00
98	10/10/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	1,400,000,000,000.00
99	10/10/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	8,950,000,000,000.00
100	10/10/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	7,250,000,000,000.00

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
101	10/24/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,750,000,000,000.00
102	10/24/2019	4/15/2039	FR0079	IDR	2,900,000,000,000.00
103	10/24/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	2,950,000,000,000.00
104	10/24/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	7,150,000,000,000.00
105	10/24/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	8,450,000,000,000.00
106	11/7/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	1,550,000,000,000.00
107	11/7/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	2,350,000,000,000.00
108	11/7/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	3,800,000,000,000.00
109	11/7/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	8,550,000,000,000.00
110	11/7/2019	4/15/2040	FR0083	IDR	4,000,000,000,000.00
111	11/21/2019	5/15/2048	FR0076	IDR	950,000,000,000.00
112	11/21/2019	6/15/2035	FR0080	IDR	1,700,000,000,000.00
113	11/21/2019	6/15/2025	FR0081	IDR	6,350,000,000,000.00
114	11/21/2019	9/15/2030	FR0082	IDR	7,250,000,000,000.00
115	11/21/2019	4/15/2040	FR0083	IDR	2,950,000,000,000.00
116	10/30/2019	10/15/2022	ORI016	IDR	8,213,531,000,000.00
117	1/30/2019	1/10/2021	SBR005	IDR	4,006,031,000,000.00
118	4/24/2019	4/10/2021	SBR006	IDR	2,259,225,000,000.00
119	7/31/2019	7/10/2021	SBR007	IDR	3,216,085,000,000.00
120	9/25/2019	9/10/2021	SBR008	IDR	1,895,451,000,000.00
Total (IDR)					**436,690,323,000,000.00**

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 5 kali penerbitan, yaitu seri ORI016, SBR005, SBR006, SBR007 dan SBR008, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan Obligasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp152.775.247.814.326,- yang terdiri dari:

a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp 110.289.539.814.326,-;
b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI dan SBR sebesar Rp19.691.455.000.000,-; dan
c. ON bunga variable (*Variable Rate*) sebesar Rp 22.794.253.000.000,-.

Tabel 3. Pelunasan Seri ON Tahun 2019

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SRBI01	2/1/2019	486,554,076,844.00
2	SU007	2/1/2019	1,642,713,434,176.00
3	SU002	4/1/2019	680,212,653,882.00
4	FR0069	4/15/2019	61,881,000,000,000.00
5	SBR003	5/20/2019	16,511,000,000.00
6	SU004	5/31/2019	1,718,841,848,640.00
7	SRBI01	6/11/2019	30,091,907,824,702.00
8	SRBI01	8/1/2019	359,953,642,549.00
9	SU007	8/1/2019	1,724,849,105,885.00
10	VR0029	8/26/2019	12,212,320,000,000.00
11	FR0036	9/16/2019	9,184,500,000,000.00
12	SU002	10/1/2019	714,223,286,576.00
13	ORI013	10/15/2019	19,691,455,000,000.00
14	SBR004	10/21/2019	62,407,000,000.00
15	SU004	11/29/2019	1,804,783,941,072.00
16	VR0030	12/26/2019	10,503,015,000,000.00
Total (IDR)			152,775,247,814,326.00

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada Tahun 2019, Pemerintah menerbitkan seri SPN dengan total mencapai Rp89.340.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 4 .

Tabel 4. Seri SPN yang diterbitkan Tahun 2019

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPN	Mata Uang	Jumlah
1	1/7/2019	4/6/2019	SPN03190406	IDR	2,000,000,000,000.00
2	1/7/2019	1/6/2020	SPN12200106	IDR	3,000,000,000,000.00
3	1/17/2019	4/16/2019	SPN03190416	IDR	2,000,000,000,000.00
4	1/17/2019	1/6/2020	SPN12200106	IDR	3,000,000,000,000.00
5	1/31/2019	4/30/2019	SPN03190430	IDR	2,000,000,000,000.00
6	1/31/2019	1/30/2020	SPN12200130	IDR	3,000,000,000,000.00
7	2/14/2019	5/13/2019	SPN03190513	IDR	2,000,000,000,000.00
8	2/14/2019	2/13/2020	SPN12200213	IDR	3,000,000,000,000.00
9	2/28/2019	5/27/2019	SPN03190527	IDR	2,000,000,000,000.00
10	2/28/2019	2/13/2020	SPN12200213	IDR	2,000,000,000,000.00
11	3/14/2019	6/13/2019	SPN03190613	IDR	2,000,000,000,000.00
12	3/14/2019	3/13/2020	SPN12200313	IDR	2,000,000,000,000.00
13	3/28/2019	6/27/2019	SPN03190627	IDR	2,000,000,000,000.00
14	3/28/2019	3/13/2020	SPN12200313	IDR	2,000,000,000,000.00
15	4/11/2019	7/10/2019	SPN03190710	IDR	1,420,000,000,000.00
16	4/11/2019	4/10/2020	SPN12200410	IDR	2,000,000,000,000.00
17	4/25/2019	7/24/2019	SPN03190724	IDR	950,000,000,000.00
18	4/25/2019	1/6/2020	SPN12200106	IDR	2,000,000,000,000.00
19	5/9/2019	8/8/2019	SPN03190808	IDR	1,370,000,000,000.00
20	5/9/2019	5/8/2020	SPN12200508	IDR	3,300,000,000,000.00
21	5/23/2019	2/13/2020	SPN12200213	IDR	2,200,000,000,000.00
22	6/20/2019	9/19/2019	SPN03190919	IDR	1,500,000,000,000.00
23	6/20/2019	6/19/2020	SPN12200619	IDR	1,100,000,000,000.00
24	7/4/2019	10/3/2019	SPN03191003	IDR	2,000,000,000,000.00
25	7/4/2019	7/3/2020	SPN12200703	IDR	2,000,000,000,000.00
26	7/18/2019	10/17/2019	SPN03191017	IDR	1,450,000,000,000.00
27	7/18/2019	4/10/2020	SPN12200410	IDR	900,000,000,000.00
28	8/1/2019	10/31/2019	SPN03191031	IDR	2,000,000,000,000.00
29	8/1/2019	4/10/2020	SPN12200410	IDR	1,050,000,000,000.00
30	8/15/2019	11/14/2019	SPN03191114	IDR	1,100,000,000,000.00
31	8/15/2019	8/14/2020	SPN12200814	IDR	2,000,000,000,000.00
32	8/29/2019	11/28/2019	SPN03191128	IDR	2,000,000,000,000.00
33	8/29/2019	5/8/2020	SPN12200508	IDR	2,000,000,000,000.00
34	9/12/2019	12/11/2019	SPN03191211	IDR	2,000,000,000,000.00
35	9/12/2019	9/11/2020	SPN12200911	IDR	2,200,000,000,000.00
36	9/26/2019	12/26/2019	SPN03191226	IDR	2,000,000,000,000.00
37	9/26/2019	6/19/2020	SPN12200619	IDR	3,000,000,000,000.00
38	10/10/2019	1/6/2020	SPN12200106	IDR	2,000,000,000,000.00
39	10/10/2019	10/9/2020	SPN12201009	IDR	2,000,000,000,000.00
40	10/24/2019	1/23/2020	SPN03200123	IDR	2,000,000,000,000.00
41	10/24/2019	7/3/2020	SPN12200703	IDR	2,000,000,000,000.00
42	11/7/2019	2/6/2020	SPN03200206	IDR	2,000,000,000,000.00
43	11/7/2019	11/6/2020	SPN12201106	IDR	2,000,000,000,000.00
44	11/21/2019	2/20/2020	SPN03200220	IDR	1,850,000,000,000.00
45	11/21/2019	8/14/2020	SPN12200814	IDR	1,950,000,000,000.00
Total (IDR)					**89,340,000,000,000.00**

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp109.440.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2019

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPN12190104	1/4/2019	5,000,000,000,000.00
2	SPN12190104	1/4/2019	5,000,000,000,000.00
3	SPN03190110	1/10/2019	3,000,000,000,000.00
4	SPN03190124	1/24/2019	2,600,000,000,000.00
5	SPN12190131	1/31/2019	5,000,000,000,000.00
6	SPN03190207	2/7/2019	1,000,000,000,000.00
7	SPN12190214	2/14/2019	3,300,000,000,000.00
8	SPN12190214	2/14/2019	5,000,000,000,000.00
9	SPN12190214	2/14/2019	5,000,000,000,000.00
10	SPN03190222	2/22/2019	1,000,000,000,000.00
11	SPN12190314	3/14/2019	5,000,000,000,000.00
12	SPN12190314	3/14/2019	4,050,000,000,000.00
13	SPN03190406	4/8/2019	2,000,000,000,000.00
14	SPN12190411	4/11/2019	4,450,000,000,000.00
15	SPN12190411	4/11/2019	3,000,000,000,000.00
16	SPN03190416	4/16/2019	2,000,000,000,000.00
17	SPN03190430	4/30/2019	2,000,000,000,000.00
18	SPN03190513	5/13/2019	2,000,000,000,000.00
19	SPN03190527	5/27/2019	2,000,000,000,000.00
20	SPN12190606	6/10/2019	700,000,000,000.00
21	SPN12190606	6/10/2019	1,500,000,000,000.00
22	SPN12190606	6/10/2019	3,000,000,000,000.00
23	SPN03190613	6/13/2019	2,000,000,000,000.00
24	SPN03190627	6/27/2019	2,000,000,000,000.00
25	SPN12190704	7/4/2019	3,000,000,000,000.00
26	SPN12190704	7/4/2019	3,500,000,000,000.00
27	SPN03190710	7/10/2019	1,420,000,000,000.00
28	SPN03190724	7/24/2019	950,000,000,000.00
29	SPN12190801	8/1/2019	950,000,000,000.00
30	SPN12190801	8/1/2019	3,000,000,000,000.00
31	SPN03190808	8/8/2019	1,370,000,000,000.00
32	SPN12190829	8/29/2019	1,100,000,000,000.00
33	SPN12190913	9/13/2019	4,500,000,000,000.00
34	SPN03190919	9/19/2019	1,500,000,000,000.00
35	SPN03191003	10/3/2019	2,000,000,000,000.00
36	SPN12191010	10/10/2019	3,000,000,000,000.00
37	SPN03191017	10/17/2019	1,450,000,000,000.00
38	SPN03191031	10/31/2019	2,000,000,000,000.00
39	SPN12191107	11/7/2019	1,000,000,000,000.00
40	SPN03191114	11/14/2019	1,100,000,000,000.00
41	SPN03191128	11/28/2019	2,000,000,000,000.00
42	SPN03191211	12/11/2019	2,000,000,000,000.00
43	SPN03191226	12/26/2019	2,000,000,000,000.00
Total (IDR)			109,440,000,000,000.00

C. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Valuta Asing

Total penerbitan Obligasi Negara (ON) Valas Tahun 2019 adalah sebesar USD4.750.000.000,- dan EUR1.750.000.000,- serta JPY177.000.000.000,- atau setara dengan Rp119.059.172.200.000,- yang terdiri atas *International Bonds* sebesar USD4.750.000.000,- dan EUR1.750.000.000,- serta JPY177.000.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada Tahun 2019, disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.Realisasi Penerbitan Obligasi Negara Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	12/11/2018	2/11/2024	RI0224	USD	750,000,000.00
2	12/11/2018	2/11/2029	RI0229	USD	1,250,000,000.00
3	12/11/2018	2/11/2049	RI0249	USD	1,000,000,000.00
4	5/22/2019	5/20/2022	RIJPY0522	JPY	75,700,000,000.00
5	5/22/2019	5/22/2024	RIJPY0524	JPY	80,200,000,000.00
6	5/22/2019	5/22/2026	RIJPY0526	JPY	4,500,000,000.00
7	5/22/2019	5/22/2029	RIJPY0529	JPY	7,600,000,000.00
8	5/22/2019	5/22/2034	RIJPY0534	JPY	4,000,000,000.00
9	5/22/2019	5/20/2039	RIJPY0539	JPY	5,000,000,000.00
10	6/18/2019	9/18/2029	RI0929	USD	750,000,000.00
11	6/18/2019	9/18/2026	RIEUR0926	EUR	750,000,000.00
12	10/30/2019	10/30/2049	RI1049	USD	1,000,000,000.00
13	10/30/2019	10/30/2031	RIEUR1031	EUR	1,000,000,000.00

Catatan: Seri RI0224, RI0229 dan RI0249 diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2019

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2019 adalah sebanyak 2 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp6.870.000.000.000,- sebagaimana disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2019

No.	Tanggal Debtswitch	Penawaran (IDR)	Dimenangkan (IDR)
1	26-Mar-19	8,447,000,000,000	4,748,000,000,000
2	24-Sep-19	4,767,000,000,000	2,122,000,000,000
Total (IDR)		**13,214,000,000,000**	**6,870,000,000,000**

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2019 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2019
(dalam juta rupiah)

Seri yang ditukar (*Source bonds*)					
No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	*Size* ditawarkan	*Size* yang dimenangkan
1	FR0031	15-Nov-20	11.00%	138,000	75,000
2	FR0034	15-Jun-21	12.80%	319,000	157,000
3	FR0053	15-Jul-21	8.25%	3,282,000	1,440,000
4	FR0061	15-May-22	7.00%	2,008,000	1,849,000
5	FR0035	15-Jun-22	12.90%	271,000	271,000
6	FR0043	15-Jul-22	10.25%	295,000	295,000
7	FR0063	15-May-23	5.63%	1,521,000	48,000
8	FR0046	15-Jul-23	9.50%	499,000	499,000
9	FR0039	15-Aug-23	11.75%	114,000	114,000
Total				**8,447,000**	**4,748,000**
Seri penukar (*destination bonds*)					
No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	*Size* yang diterbitkan	
1	FR0078	15-May-29	8.25%	755,000	
2	FR0068	15-Mar-34	8.38%	1,408,000	
3	FR0079	15-Apr-39	8.38%	2,530,000	
4	FR0076	15-May-48	7.38%	55,000	
Total				**4,748,000**	
Tanggal Setelmen					
26-Mar-19					

Seri yang ditukar (*Source bonds*)					
No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	*Size* ditawarkan	*Size* yang dimenangkan
1	FR0031	15-Nov-20	11.000%	279,000	214,000
2	FR0034	15-Jun-21	12.800%	241,000	211,000
3	FR0053	15-Jul-21	8.250%	214,000	50,000
4	FR0061	15-May-22	7.000%	1,481,000	300,000
5	FR0035	15-Jun-22	12.900%	410,000	310,000
6	FR0043	15-Jul-22	10.250%	580,000	580,000
7	FR0063	15-May-23	5.625%	469,000	-
8	FR0046	15-Jul-23	9.500%	144,000	144,000
9	FR0070	15-Mar-24	8.375%	462,000	-
10	FR0044	15-Sep-24	10.000%	487,000	313,000
Total				**4,767,000**	**2,122,000**
Seri penukar (*destination bonds*)					
No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	*Size* yang diterbitkan	
1	FR0081	15-Jun-25	6.500%	1,830,000	
2	FR0082	15-Sep-30	7.000%	107,000	
3	FR0080	15-Jun-35	7.500%	-	
4	FR0079	15-Apr-39	8.375%	-	
5	FR0076	15-May-48	7.375%	185,000	
Total				**2,122,000**	
Tanggal Setelmen					
24 September 2019					

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Namun demikian, pada Tahun 2019 tidak terdapat transaksi *buyback*.

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2019

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.

c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir Tahun 2019 terdiri atas 6 jenis instrumen yakni Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI), dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 9, 11, 12 dan 13 berikut.

Tabel 9. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2019

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPNS	Mata Uang	Jumlah
1	1/10/2019	7/9/2019	SPNS09072019	IDR	2,000,000,000,000.00
2	1/24/2019	7/9/2019	SPNS09072019	IDR	1,000,000,000,000.00
3	1/24/2019	1/23/2020	SPNS23012020	IDR	3,460,000,000,000.00
4	2/8/2019	8/1/2019	SPNS01082019	IDR	1,300,000,000,000.00
5	2/21/2019	8/1/2019	SPNS01082019	IDR	1,300,000,000,000.00
6	3/21/2019	9/20/2019	SPNS20092019	IDR	1,400,000,000,000.00
7	4/5/2019	10/3/2019	SPNS03102019	IDR	500,000,000,000.00
8	4/22/2019	10/3/2019	SPNS03102019	IDR	1,800,000,000,000.00
9	5/3/2019	11/1/2019	SPNS01112019	IDR	1,550,000,000,000.00
10	5/16/2019	11/1/2019	SPNS01112019	IDR	2,000,000,000,000.00
11	5/16/2019	5/15/2020	SPNS15052020	IDR	4,200,000,000,000.00
12	5/31/2019	12/1/2019	SPNS01122019	IDR	1,500,000,000,000.00
13	6/27/2019	12/1/2019	SPNS01122019	IDR	1,450,000,000,000.00
14	7/11/2019	1/10/2020	SPNS10012020	IDR	1,050,000,000,000.00
15	7/25/2019	1/10/2020	SPNS10012020	IDR	1,500,000,000,000.00
16	8/8/2019	2/7/2020	SPNS07022020	IDR	1,650,000,000,000.00
17	8/22/2019	2/7/2020	SPNS07022020	IDR	2,600,000,000,000.00
18	9/5/2019	3/4/2020	SPNS04032020	IDR	1,000,000,000,000.00
19	9/19/2019	3/4/2020	SPNS04032020	IDR	1,050,000,000,000.00
20	10/3/2019	4/2/2020	SPNS02042020	IDR	1,000,000,000,000.00
21	10/17/2019	4/2/2020	SPNS02042020	IDR	1,000,000,000,000.00
22	10/31/2019	4/2/2020	SPNS02042020	IDR	1,000,000,000,000.00
23	11/14/2019	5/15/2020	SPNS15052020	IDR	1,050,000,000,000.00
24	11/28/2019	5/15/2020	SPNS15052020	IDR	1,000,000,000,000.00
Total (IDR)					**37,360,000,000,000.00**

Tabel 10. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2019

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPNS11012019	1/11/2019	900,000,000,000.00
2	SPNS11012019	1/11/2019	2,900,000,000,000.00
3	SPNS08022019	2/8/2019	3,000,000,000,000.00
4	SPNS08022019	2/8/2019	850,000,000,000.00
5	SPNS05032019	3/5/2019	1,300,000,000,000.00
6	SPNS05032019	3/5/2019	1,100,000,000,000.00
7	SPNS03042019	4/4/2019	1,400,000,000,000.00
8	SPNS03042019	4/4/2019	1,000,000,000,000.00
9	SPNS11042019	4/11/2019	1,100,000,000,000.00
10	SPNS11042019	4/11/2019	1,000,000,000,000.00
11	SPNS01052019	5/2/2019	1,050,000,000,000.00
12	SPNS01052019	5/2/2019	950,000,000,000.00
13	SPNS08052019	5/8/2019	1,200,000,000,000.00
14	SPNS08052019	5/8/2019	1,000,000,000,000.00
15	SPNS05062019	6/10/2019	1,200,000,000,000.00
16	SPNS03072019	7/3/2019	1,000,000,000,000.00
17	SPNS03072019	7/3/2019	1,000,000,000,000.00
18	SPNS09072019	7/9/2019	2,000,000,000,000.00
19	SPNS09072019	7/9/2019	1,000,000,000,000.00
20	SPNS01082019	8/1/2019	1,300,000,000,000.00
21	SPNS01082019	8/1/2019	1,300,000,000,000.00
22	SPNS01082019	8/1/2019	1,600,000,000,000.00
23	SPNS01082019	8/1/2019	1,700,000,000,000.00
24	SPNS20092019	9/20/2019	1,400,000,000,000.00
25	SPNS03102019	10/3/2019	1,800,000,000,000.00
26	SPNS03102019	10/3/2019	500,000,000,000.00
27	SPNS01112019	11/1/2019	1,550,000,000,000.00
28	SPNS01112019	11/1/2019	2,000,000,000,000.00
29	SPNS01122019	12/2/2019	1,500,000,000,000.00
30	SPNS01122019	12/2/2019	1,450,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			41,050,000,000,000.00

Tabel 11. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2019

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	1/10/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	1,800,000,000,000.00
2	1/10/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	4,450,000,000,000.00
3	1/10/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	405,000,000,000.00
4	1/24/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	5,200,000,000,000.00
5	1/24/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	340,000,000,000.00
6	2/8/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	5,600,000,000,000.00
7	2/8/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	1,260,000,000,000.00
8	2/8/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	250,000,000,000.00
9	2/8/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	1,710,000,000,000.00
10	2/12/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	3,000,000,000,000.00
11	2/21/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	2,800,000,000,000.00
12	2/21/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	1,620,000,000,000.00
13	2/21/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	2,400,000,000,000.00
14	3/8/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	7,800,000,000,000.00
15	3/8/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	1,100,000,000,000.00
16	3/8/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	1,000,000,000,000.00
17	3/21/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	4,800,000,000,000.00
18	3/21/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	1,320,000,000,000.00
19	3/21/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	180,000,000,000.00
20	3/21/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	1,250,000,000,000.00
21	3/21/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	30,000,000,000.00
22	4/5/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	4,900,000,000,000.00
23	4/5/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	920,000,000,000.00
24	4/5/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	340,000,000,000.00
25	4/5/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	950,000,000,000.00
26	4/5/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	420,000,000,000.00
27	4/22/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	650,000,000,000.00
28	4/22/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	900,000,000,000.00
29	4/22/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	990,000,000,000.00
30	4/22/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	1,720,000,000,000.00
31	4/23/2019	11/15/2031	PBS012	IDR	641,594,000,000.00
32	5/3/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	1,500,000,000,000.00
33	5/3/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	620,000,000,000.00
34	5/3/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	450,000,000,000.00
35	5/3/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	520,000,000,000.00
36	5/3/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	430,000,000,000.00
37	5/15/2019	5/15/2030	PBS023	IDR	3,000,000,000,000.00
38	5/16/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	550,000,000,000.00
39	5/16/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	360,000,000,000.00
40	5/16/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	1,040,000,000,000.00
41	5/21/2019	11/15/2031	PBS012	IDR	3,000,000,000,000.00
42	5/28/2019	5/15/2032	PBS024	IDR	1,500,000,000,000.00
43	5/29/2019	5/15/2033	PBS025	IDR	1,500,000,000,000.00
44	5/31/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	2,200,000,000,000.00
45	5/31/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	1,390,000,000,000.00
46	5/31/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	70,000,000,000.00
47	6/21/2019	5/15/2032	PBS024	IDR	1,500,000,000,000.00
48	6/21/2019	5/15/2033	PBS025	IDR	1,500,000,000,000.00
49	6/27/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	1,850,000,000,000.00
50	6/27/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	3,550,000,000,000.00

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
51	6/27/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	250,000,000,000.00
52	6/27/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	900,000,000,000.00
53	7/2/2019	5/15/2033	PBS025	IDR	3,000,000,000,000.00
54	7/11/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	2,550,000,000,000.00
55	7/11/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	400,000,000,000.00
56	7/11/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	3,450,000,000,000.00
57	7/11/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	300,000,000,000.00
58	7/11/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	250,000,000,000.00
59	7/25/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	4,600,000,000,000.00
60	7/25/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	200,000,000,000.00
61	7/25/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	1,500,000,000,000.00
62	7/25/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	150,000,000,000.00
63	7/25/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	50,000,000,000.00
64	8/8/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	4,100,000,000,000.00
65	8/8/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	2,050,000,000,000.00
66	8/8/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	230,000,000,000.00
67	8/22/2019	4/15/2043	PBS005	IDR	1,100,000,000,000.00
68	8/22/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	150,000,000,000.00
69	8/22/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	4,150,000,000,000.00
70	9/5/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	2,600,000,000,000.00
71	9/5/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	50,000,000,000.00
72	9/5/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	3,050,000,000,000.00
73	9/5/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	300,000,000,000.00
74	9/19/2019	4/15/2043	PBS005	IDR	2,550,000,000,000.00
75	9/19/2019	5/15/2021	PBS014	IDR	400,000,000,000.00
76	9/19/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	2,300,000,000,000.00
77	9/19/2019	11/15/2026	PBS021	IDR	400,000,000,000.00
78	9/19/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	350,000,000,000.00
79	10/3/2019	1/15/2022	PBS002	IDR	2,750,000,000,000.00
80	10/3/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	210,000,000,000.00
81	10/3/2019	9/15/2023	PBS019	IDR	2,800,000,000,000.00
82	10/3/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	360,000,000,000.00
83	10/17/2019	1/15/2022	PBS002	IDR	3,000,000,000,000.00
84	10/17/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	390,000,000,000.00
85	10/17/2019	10/15/2024	PBS026	IDR	2,650,000,000,000.00
86	10/31/2019	1/15/2022	PBS002	IDR	1,900,000,000,000.00
87	10/31/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	630,000,000,000.00
88	10/31/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	900,000,000,000.00
89	10/31/2019	10/15/2024	PBS026	IDR	3,000,000,000,000.00
90	11/14/2019	1/15/2022	PBS002	IDR	2,000,000,000,000.00
91	11/14/2019	4/15/2043	PBS005	IDR	200,000,000,000.00
92	11/14/2019	10/15/2024	PBS026	IDR	4,750,000,000,000.00
93	11/28/2019	1/15/2022	PBS002	IDR	1,750,000,000,000.00
94	11/28/2019	7/15/2047	PBS015	IDR	3,300,000,000,000.00
95	11/28/2019	4/15/2034	PBS022	IDR	150,000,000,000.00
96	11/28/2019	10/15/2024	PBS026	IDR	1,700,000,000,000.00
Total (IDR)					**161,096,594,000,000.00**

Tabel 12. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Tahun 2019

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	2/27/2019	2/10/2021	ST003	IDR	3,127,293,000,000.00
2	5/28/2019	5/10/2021	ST004	IDR	2,633,790,000,000.00
3	8/28/2019	8/10/2021	ST005	IDR	1,962,684,000,000.00
4	11/28/2019	11/10/2021	ST006	IDR	1,459,880,000,000.00
5	3/28/2019	3/10/2022	SR-011	IDR	21,117,570,000,000.00
Total (IDR)					**30,301,217,000,000.00**

Tabel 13. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2019

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	1/11/2019	1/11/2022	USDPBS002	USD	100,000,000.00
2	2/20/2019	2/20/2029	SNI0229	USD	1,250,000,000.00
3	2/20/2019	8/20/2024	SNI0824	USD	750,000,000.00
Total (USD)					**2,100,000,000.00**

Tabel 14. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2019

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	PBS010	1/25/2019	4,050,000,000,000.00
2	SDHI-2019B	2/11/2019	2,000,000,000,000.00
3	SR-008	3/11/2019	31,500,000,000,000.00
4	SDHI-2019A	3/21/2019	3,000,000,000,000.00
5	SDHI2019C	4/29/2019	1,000,000,000,000.00
6	PBS013	5/15/2019	50,425,000,000,000.00
7	ST002	11/11/2019	38,671,000,000.00
Total (IDR)			**92,013,671,000,000.00**

Tabel 15. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2019

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (USD)	Jumlah (IDR)
1	SNI19	3/15/2019	1,500,000,000.00	21,465,000,000,000.00

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2019

I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi Berbunga Tetap (*Fixed Rate Bonds* – FR)

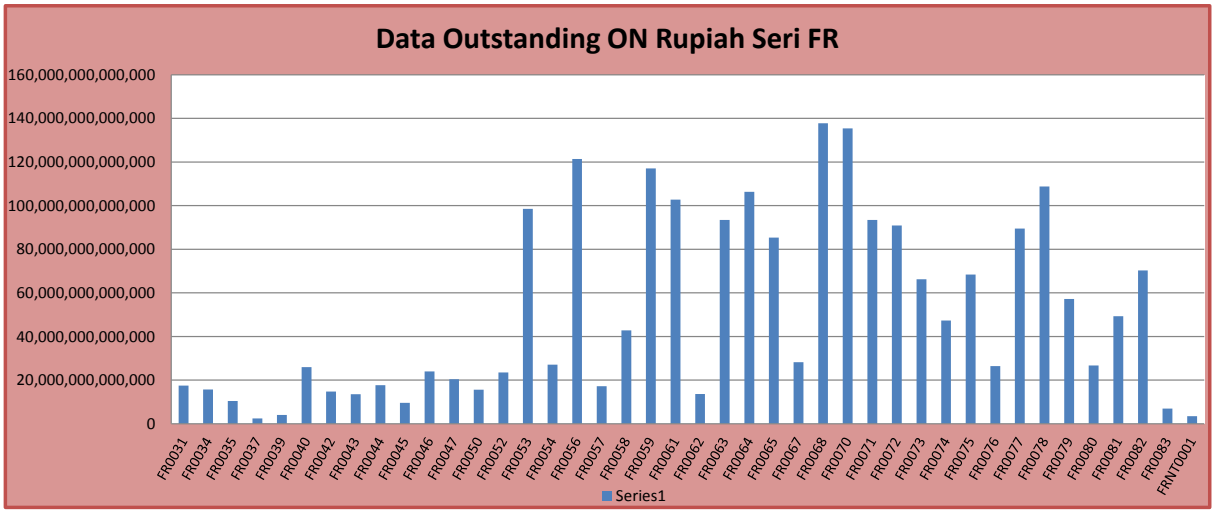
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir Tahun 2019, terdapat 42 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,625% sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2048. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel 16 berikut.

Tabel 16. *Outstanding* SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2019

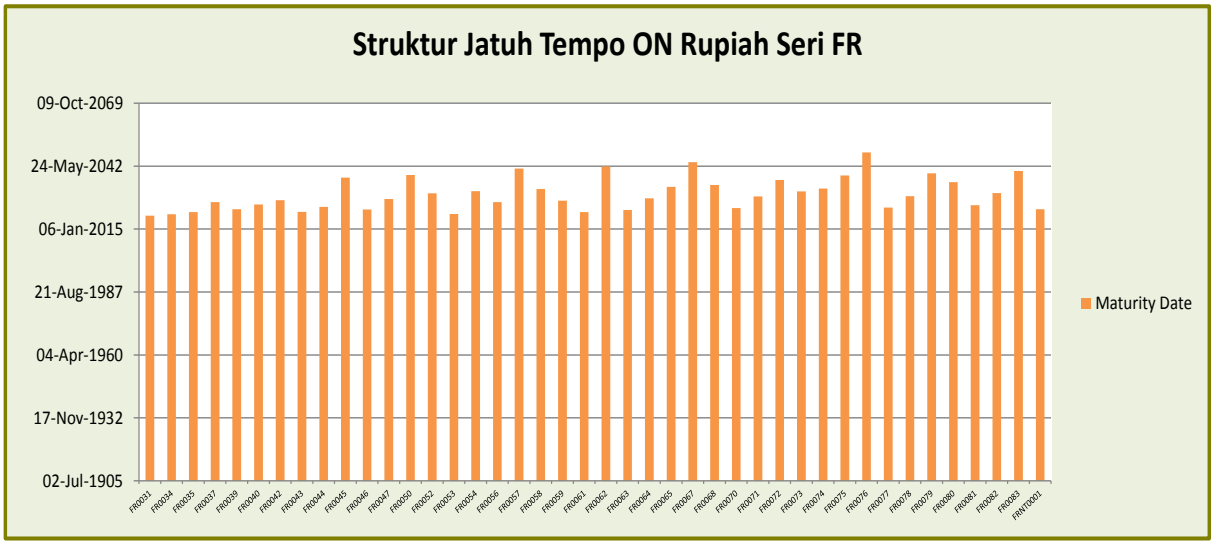
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	FR0031	16-Jun-2005	15-Nov-2020	11.00000%	IDR	17,503,000,000,000
2	FR0034	26-Jan-2006	15-Jun-2021	12.80000%	IDR	15,729,400,000,000
3	FR0035	16-Feb-2006	15-Jun-2022	12.90000%	IDR	10,442,750,000,000
4	FR0037	18-May-2006	15-Sep-2026	12.00000%	IDR	2,450,000,000,000
5	FR0039	24-Aug-2006	15-Aug-2023	11.75000%	IDR	4,061,000,000,000
6	FR0040	21-Sep-2006	15-Sep-2025	11.00000%	IDR	26,002,090,000,000
7	FR0042	25-Jan-2007	15-Jul-2027	10.25000%	IDR	14,774,100,000,000
8	FR0043	22-Feb-2007	15-Jul-2022	10.25000%	IDR	13,542,000,000,000
9	FR0044	19-Apr-2007	15-Sep-2024	10.00000%	IDR	17,701,000,000,000
10	FR0045	24-May-2007	15-May-2037	9.75000%	IDR	9,624,304,000,000
11	FR0046	19-Jul-2007	15-Jul-2023	9.50000%	IDR	24,037,000,000,000
12	FR0047	30-Aug-2007	15-Feb-2028	10.00000%	IDR	20,385,000,000,000
13	FR0050	24-Jan-2008	15-Jul-2038	10.50000%	IDR	15,661,000,000,000
14	FR0052	20-Aug-2009	15-Aug-2030	10.50000%	IDR	23,500,000,000,000
15	FR0053	08-Jul-2010	15-Jul-2021	8.25000%	IDR	98,537,793,000,000
16	FR0054	22-Jul-2010	15-Jul-2031	9.50000%	IDR	27,096,000,000,000
17	FR0056	23-Sep-2010	15-Sep-2026	8.37500%	IDR	121,414,000,000,000
18	FR0057	21-Apr-2011	15-May-2041	9.50000%	IDR	17,236,573,000,000
19	FR0058	21-Jul-2011	15-Jun-2032	8.25000%	IDR	42,798,000,000,000
20	FR0059	15-Sep-2011	15-May-2027	7.00000%	IDR	117,080,000,000,000
21	FR0061	06-Oct-2011	15-May-2022	7.00000%	IDR	102,729,000,000,000
22	FR0062	09-Feb-2012	15-Apr-2042	6.37500%	IDR	13,692,000,000,000
23	FR0063	13-Aug-2012	15-May-2023	5.62500%	IDR	93,418,000,000,000
24	FR0064	13-Aug-2012	15-May-2028	6.12500%	IDR	106,295,000,000,000
25	FR0065	30-Aug-2012	15-May-2033	6.62500%	IDR	85,343,000,000,000
26	FR0067	18-Jul-2013	15-Feb-2044	8.75000%	IDR	28,188,284,000,000
27	FR0068	01-Aug-2013	15-Mar-2034	8.37500%	IDR	137,758,000,000,000
28	FR0070	29-Aug-2013	15-Mar-2024	8.37500%	IDR	135,439,421,000,000
29	FR0071	12-Sep-2013	15-Mar-2029	9.00000%	IDR	93,390,682,000,000
30	FR0072	09-Jul-2015	15-May-2036	8.25000%	IDR	90,910,000,000,000
31	FR0073	06-Aug-2015	15-May-2031	8.75000%	IDR	66,217,000,000,000
32	FR0074	10-Nov-2016	15-Aug-2032	7.50000%	IDR	47,331,140,000,000
33	FR0075	10-Aug-2017	15-May-2038	7.50000%	IDR	68,420,860,000,000
34	FR0076	22-Sep-2017	15-May-2048	7.37500%	IDR	26,400,000,000,000
35	FR0077	27-Sep-2018	15-May-2024	8.12500%	IDR	89,495,000,000,000
36	FR0078	27-Sep-2018	15-May-2029	8.25000%	IDR	108,775,000,000,000
37	FR0079	07-Jan-2019	15-Apr-2039	8.37500%	IDR	57,180,000,000,000
38	FR0080	04-Jul-2019	15-Jun-2035	7.50000%	IDR	26,700,000,000,000
39	FR0081	01-Aug-2019	15-Jun-2025	6.50000%	IDR	49,280,000,000,000
40	FR0082	01-Aug-2019	15-Sep-2030	7.00000%	IDR	70,307,000,000,000
41	FR0083	07-Nov-2019	15-Apr-2040	7.50000%	IDR	6,950,000,000,000
42	FRNT0001	29-Aug-2018	29-Aug-2023	8.00000%	IDR	3,500,000,000,000
Total					**IDR**	**2,147,294,397,000,000**

Grafik 1. Data *Outstanding* ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2019



Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR



b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2018 – 2021 yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 884/KMK.08/2017. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

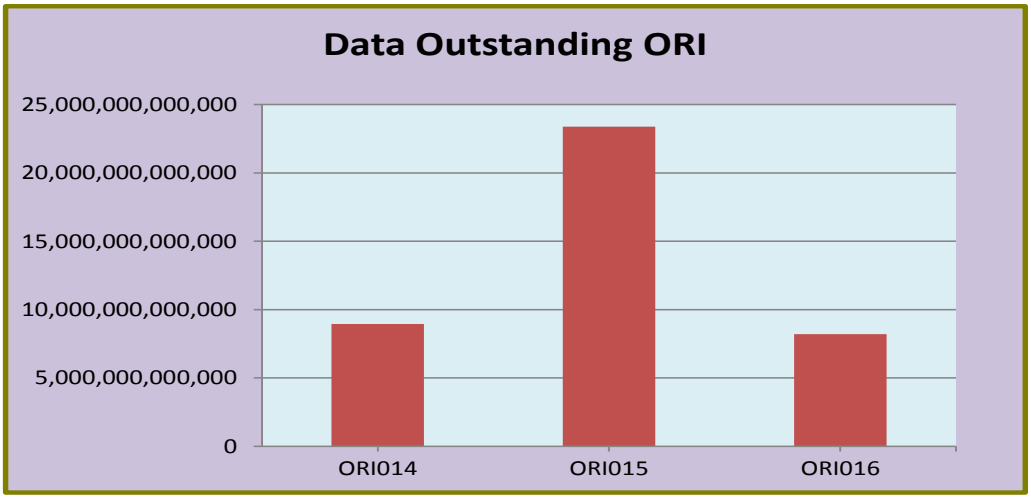
Selain itu. penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu. serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2019 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI016 dengan tingkat kupon 6.80% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp8.213.531.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2019 menunjukkan ada 3 (tiga) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 17 berikut.

Tabel 17. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2019

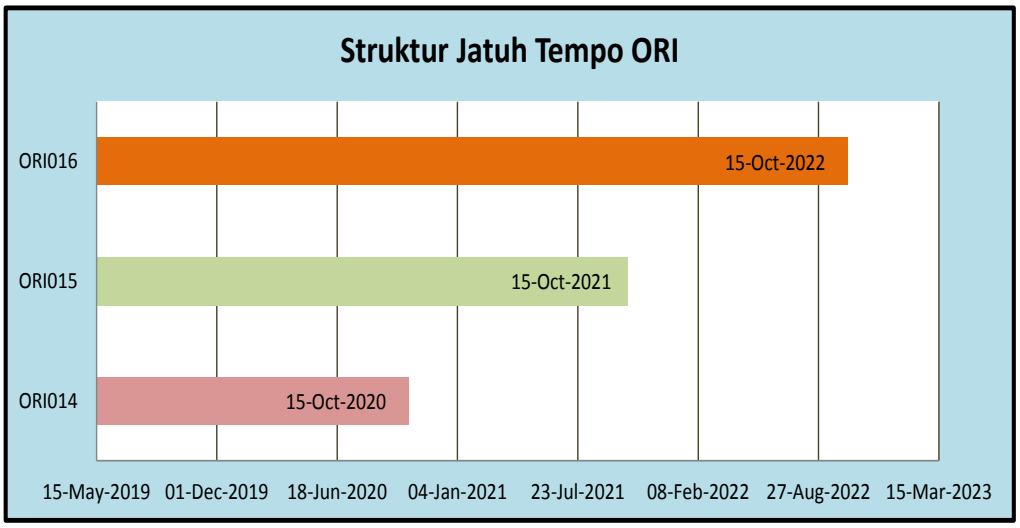
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	ORI014	25-Oct-2017	15-Oct-2020	5.85000%	IDR	8,948,660,000,000
2	ORI015	31-Oct-2018	15-Oct-2021	8.25000%	IDR	23,378,269,000,000
3	ORI016	30-Oct-2019	15-Oct-2022	6.80000%	IDR	8,213,531,000,000
Total					**IDR**	**40,540,460,000,000**

Grafik 3. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2019



Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2019



c. Obligasi Tanpa Bunga (*Zero Coupon* – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi Berbunga Mengambang *(Variable Rate Bonds – VR)*

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

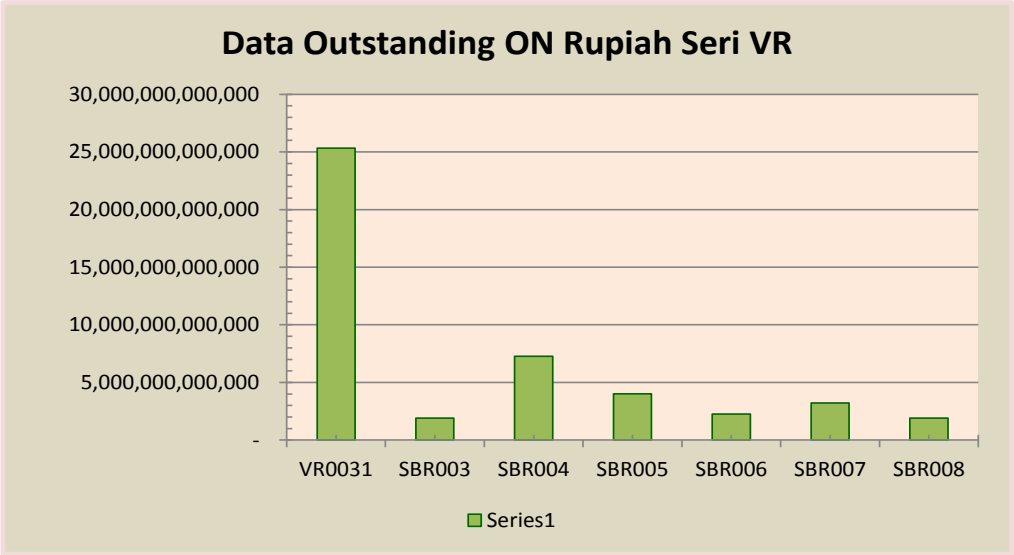
Sampai akhir Tahun 2019, terdapat 1 seri VR dan 6 seri SBR dengan *outstanding* berkisar dari 1.89 triliun sampai dengan 25,3 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tabel 18. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR)

per 31 Desember 2019

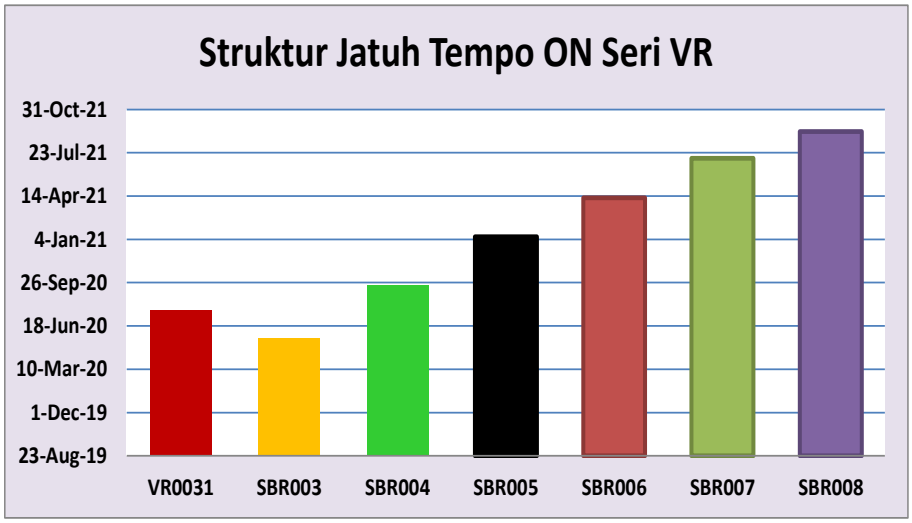
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	VR0031	20-Nov-2002	25-Jul-2020	5.46925%	IDR	25,322,354,000,000
2	SBR003	31-May-2018	20-May-2020	7.55000%	IDR	1,911,555,000,000
3	SBR004	19-Sep-2018	20-Sep-2020	7.55000%	IDR	7,260,564,000,000
4	SBR005	30-Jan-2019	10-Jan-2021	7.15000%	IDR	4,006,031,000,000
5	SBR006	24-Apr-2019	10-Apr-2021	6.95000%	IDR	2,259,225,000,000
6	SBR007	31-Jul-2019	10-Jul-2021	6.50000%	IDR	3,216,085,000,000
7	SBR008	25-Sep-2019	10-Sep-2021	6.20000%	IDR	1,895,451,000,000
Total					**IDR**	**18,637,356,000,000**

Grafik 5. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2019



Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2019



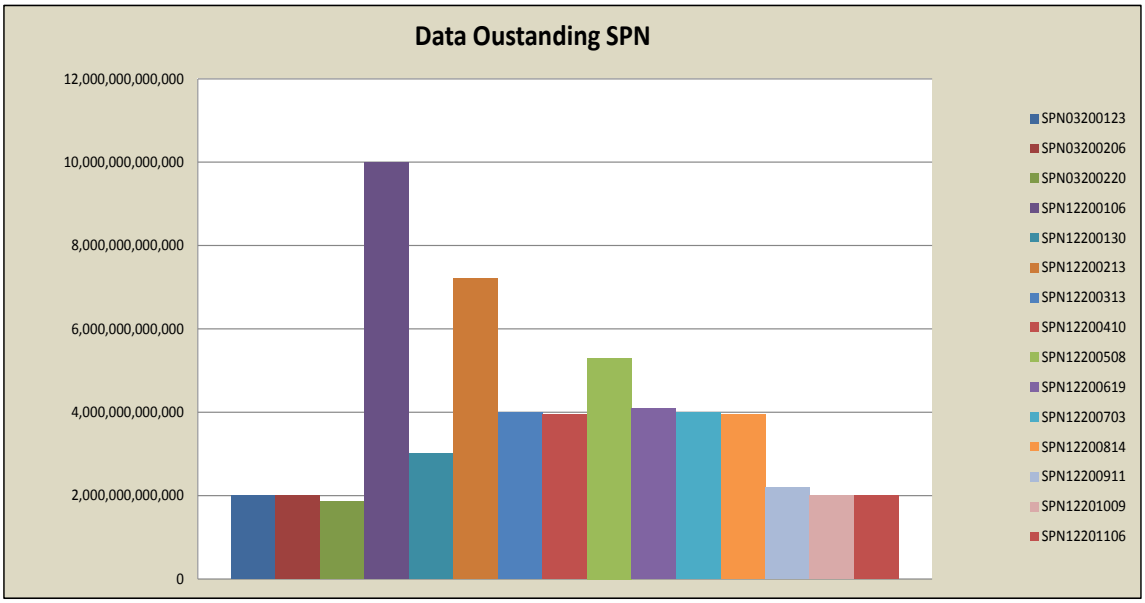
e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2019, terdapat 16 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 1 triliun dan 13,3 triliun yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

Tabel 19. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2019

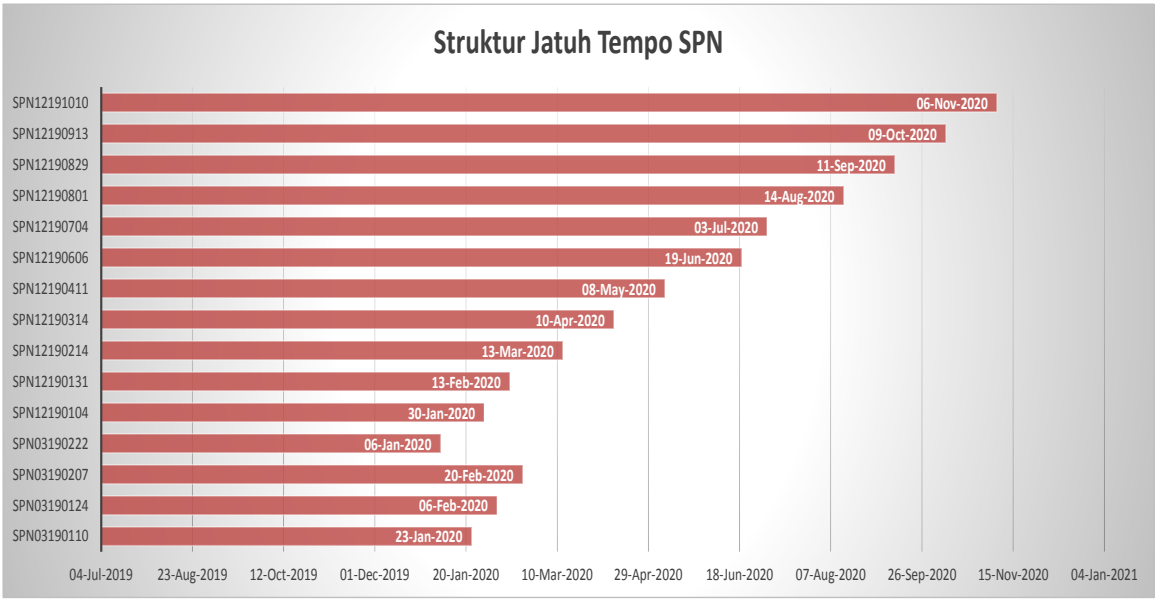
No	Series	Maturity Date	Outstanding	
1	SPN03200123	23-Jan-2020	IDR	2,000,000,000,000
2	SPN03200206	06-Feb-2020	IDR	2,000,000,000,000
3	SPN03200220	20-Feb-2020	IDR	1,850,000,000,000
4	SPN12200106	06-Jan-2020	IDR	10,000,000,000,000
5	SPN12200130	30-Jan-2020	IDR	3,000,000,000,000
6	SPN12200213	13-Feb-2020	IDR	7,200,000,000,000
7	SPN12200313	13-Mar-2020	IDR	4,000,000,000,000
8	SPN12200410	10-Apr-2020	IDR	3,950,000,000,000
9	SPN12200508	08-May-2020	IDR	5,300,000,000,000
10	SPN12200619	19-Jun-2020	IDR	4,100,000,000,000
11	SPN12200703	03-Jul-2020	IDR	4,000,000,000,000
12	SPN12200814	14-Aug-2020	IDR	3,950,000,000,000
13	SPN12200911	11-Sep-2020	IDR	2,200,000,000,000
14	SPN12201009	09-Oct-2020	IDR	2,000,000,000,000
15	SPN12201106	06-Nov-2020	IDR	2,000,000,000,000
Total			IDR	57,550,000,000,000

Grafik 7. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2019



Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut.

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2019



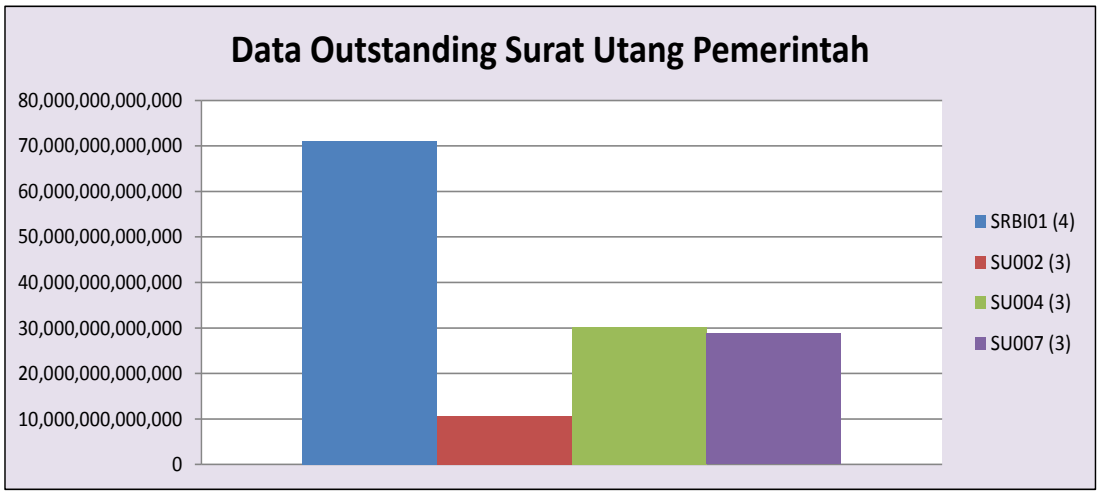
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data *outstanding* SUP disajikan pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2019

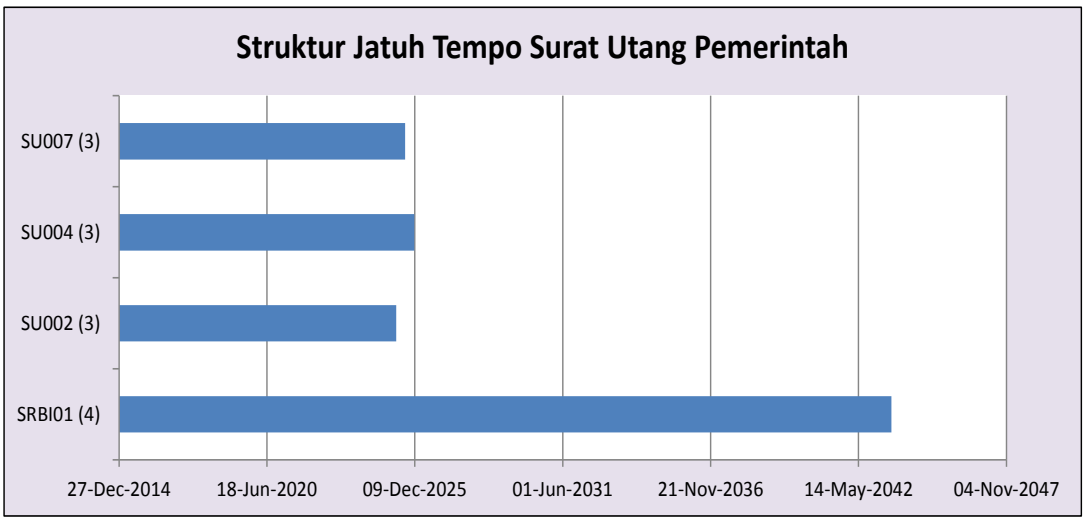
No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SRBI01 (4)	01-Aug-2043	0.10000%	IDR	71,064,446,334,124
2	SU002 (3)	01-Apr-2025	0.10000%	IDR	10,654,159,129,704
3	SU004 (3)	01-Dec-2025	0.10000%	IDR	30,163,323,048,704
4	SU007 (3)	01-Aug-2025	0.10000%	IDR	28,827,373,519,398
Total				**IDR**	**140,709,302,031,930**

Grafik 9. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2019



Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 10 berikut.

Grafik 10.Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2019



g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

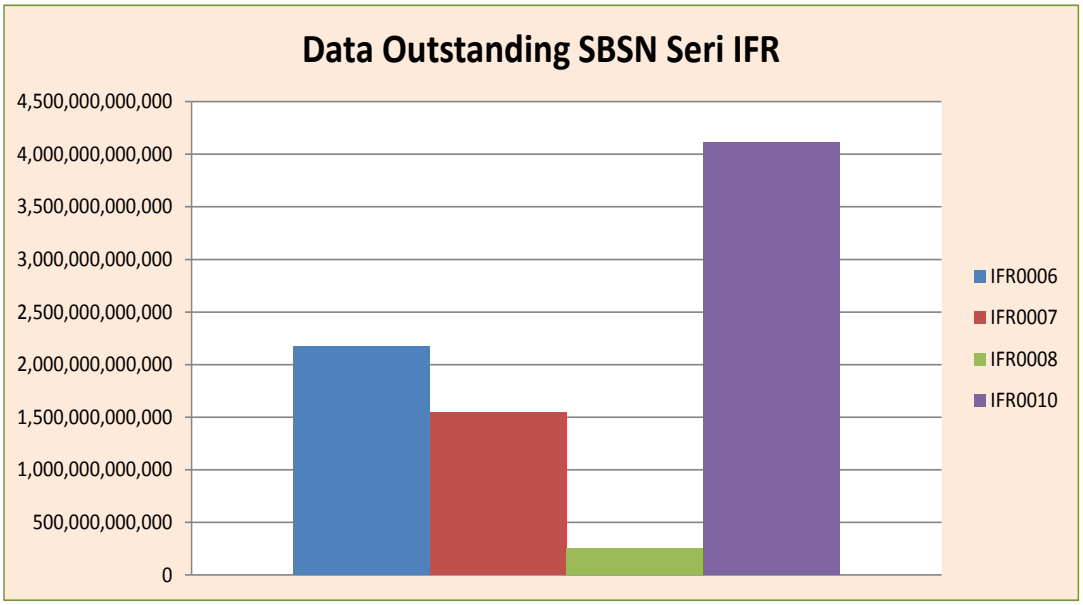
Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR *(Fixed Rate)* dibayarkan setiap enam bulan sekali *(semi-annually)*. SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir Tahun 2019 terdapat 4 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2020 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8.80% sampai dengan 10,25% yang disajikan dalam tabel 21 berikut.

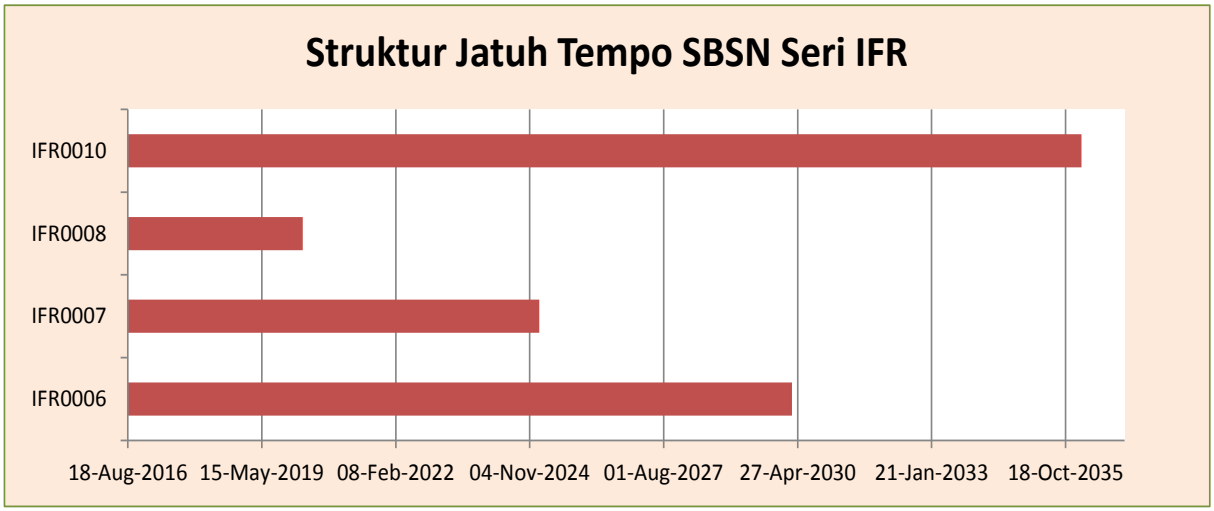
Tabel 21. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2019

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	IFR0006	15-Mar-2030	10.25000%	IDR	2,175,000,000,000
2	IFR0007	15-Jan-2025	10.25000%	IDR	1,547,000,000,000
3	IFR0008	15-Mar-2020	8.80000%	IDR	252,000,000,000
4	IFR0010	15-Feb-2036	10.00000%	IDR	4,110,000,000,000
Total				**IDR**	**8,084,000,000,000**

Grafik 11. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2019



Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2019



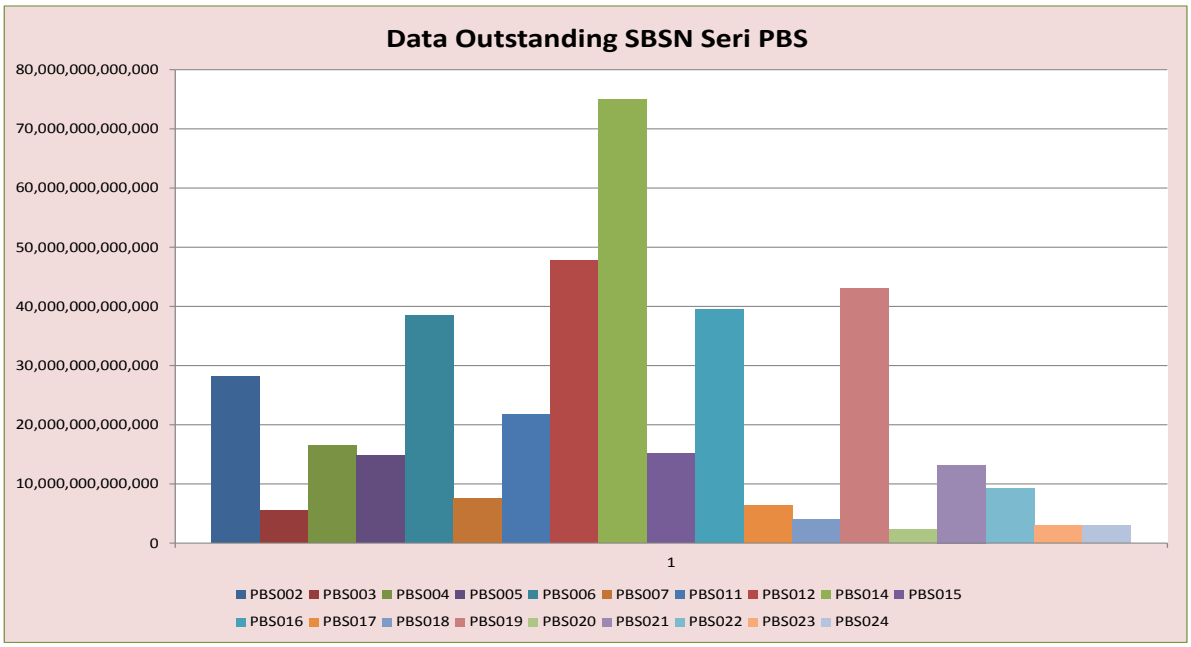
h. *Project Based Sukuk (PBS)*

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang mengunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir Tahun 2019 terdapat 22 seri PBS yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel 22 berikut.

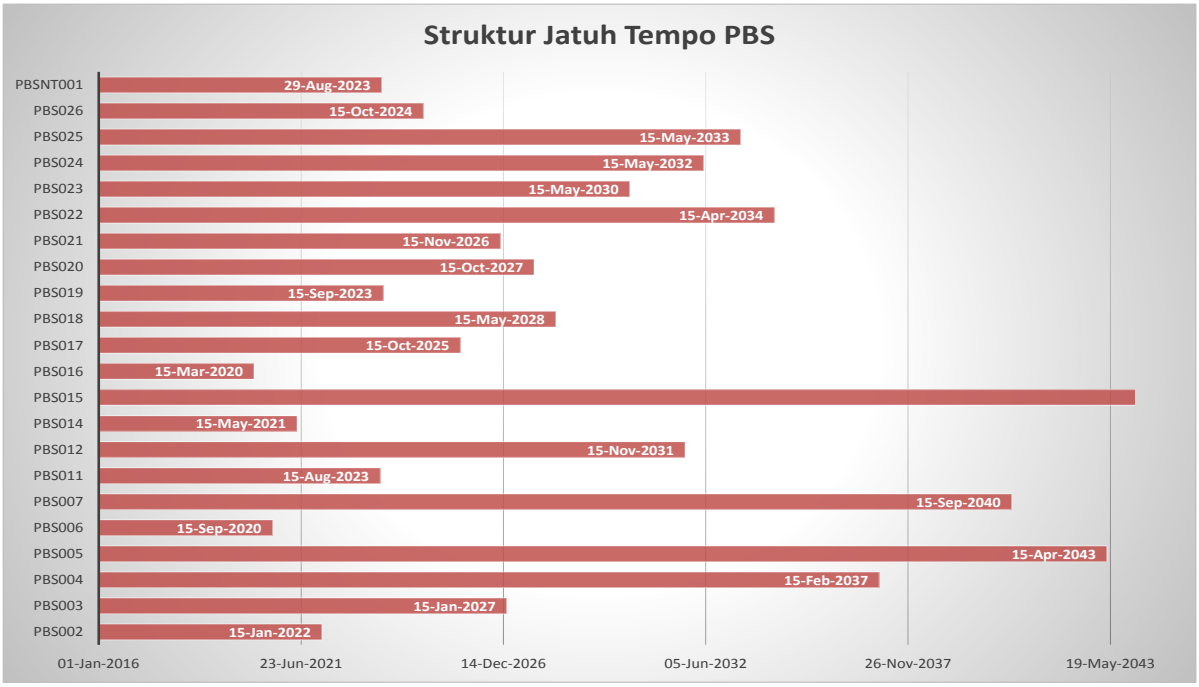
Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2019

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	PBS002	15-Jan-2022	5.45000%	IDR	28,110,857,000,000
2	PBS003	15-Jan-2027	6.00000%	IDR	5,536,000,000,000
3	PBS004	15-Feb-2037	6.10000%	IDR	16,497,857,000,000
4	PBS005	15-Apr-2043	6.75000%	IDR	14,834,000,000,000
5	PBS006	15-Sep-2020	8.25000%	IDR	38,508,000,000,000
6	PBS007	15-Sep-2040	9.00000%	IDR	7,525,000,000,000
7	PBS011	15-Aug-2023	8.75000%	IDR	21,750,000,000,000
8	PBS012	15-Nov-2031	8.87500%	IDR	47,680,694,000,000
9	PBS014	15-May-2021	6.50000%	IDR	75,007,857,000,000
10	PBS015	15-Jul-2047	8.00000%	IDR	15,193,000,000,000
11	PBS016	15-Mar-2020	6.25000%	IDR	39,525,000,000,000
12	PBS017	15-Oct-2025	6.12500%	IDR	6,375,000,000,000
13	PBS018	15-May-2028	7.62500%	IDR	4,000,000,000,000
14	PBS019	15-Sep-2023	8.25000%	IDR	43,040,000,000,000
15	PBS020	15-Oct-2027	9.00000%	IDR	2,250,000,000,000
16	PBS021	15-Nov-2026	8.50000%	IDR	13,185,000,000,000
17	PBS022	15-Apr-2034	8.62500%	IDR	9,180,000,000,000
18	PBS023	15-May-2030	8.12500%	IDR	3,000,000,000,000
19	PBS024	15-May-2032	8.37500%	IDR	3,000,000,000,000
20	PBS025	15-May-2033	8.37500%	IDR	6,000,000,000,000
21	PBS026	15-Oct-2024	6.62500%	IDR	12,100,000,000,000
22	PBSNT001	29-Aug-2023	8.00000%	IDR	1,500,000,000,000
Total				IDR	413,798,265,000,000

Grafik 13. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2019



Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2019



i. *Sukuk* Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN. diversifikasi investor dan instrumen. memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah. dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

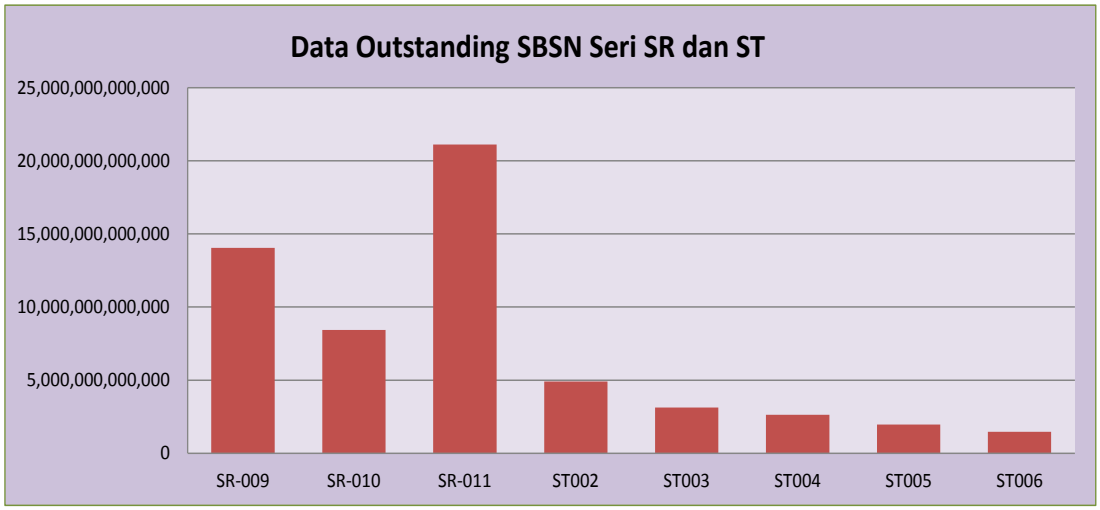
Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Tahun 2019, pemerintah menerbitkan SR011 dan 4 seri ST yakni ST003, ST004, ST005 dan ST006 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2019 menunjukkan ada 3 seri SR dan 5 seri ST dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2020 sampai dengan 2021 yang disajikan pada tabel 23.

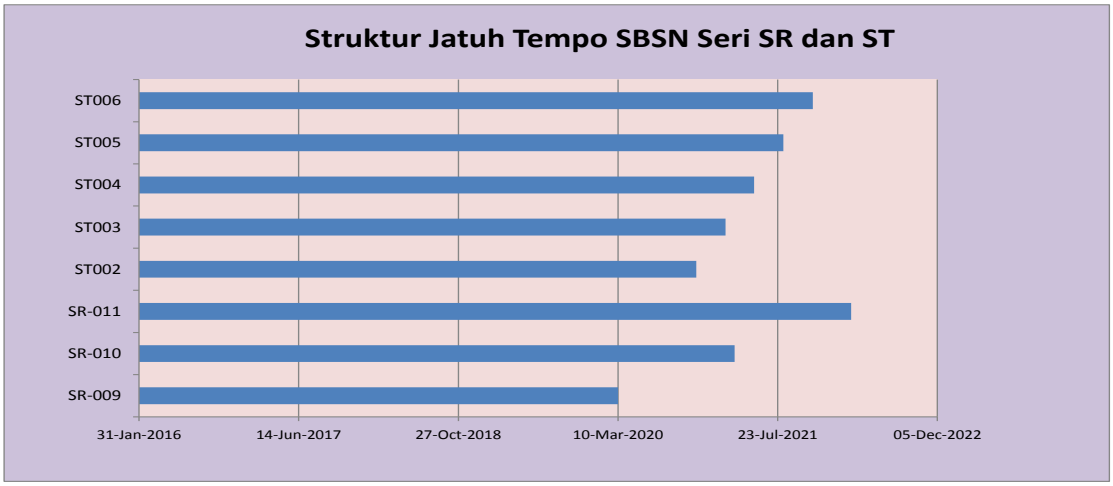
Tabel 23. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2019

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SR-009	10-Mar-2020	6.90000%	IDR	14,037,310,000,000
2	SR-010	10-Mar-2021	5.90000%	IDR	8,436,570,000,000
3	SR-011	10-Mar-2022	8.05000%	IDR	21,117,570,000,000
4	ST002	10-Nov-2020	7.55000%	IDR	4,907,011,000,000
5	ST003	10-Feb-2021	7.15000%	IDR	3,127,293,000,000
6	ST004	10-May-2021	6.95000%	IDR	2,633,790,000,000
7	ST005	10-Aug-2021	6.65000%	IDR	1,962,684,000,000
8	ST006	10-Nov-2021	1.75000%	IDR	1,459,880,000,000
Total				IDR	57,682,108,000,000

Grafik 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2019



Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2019



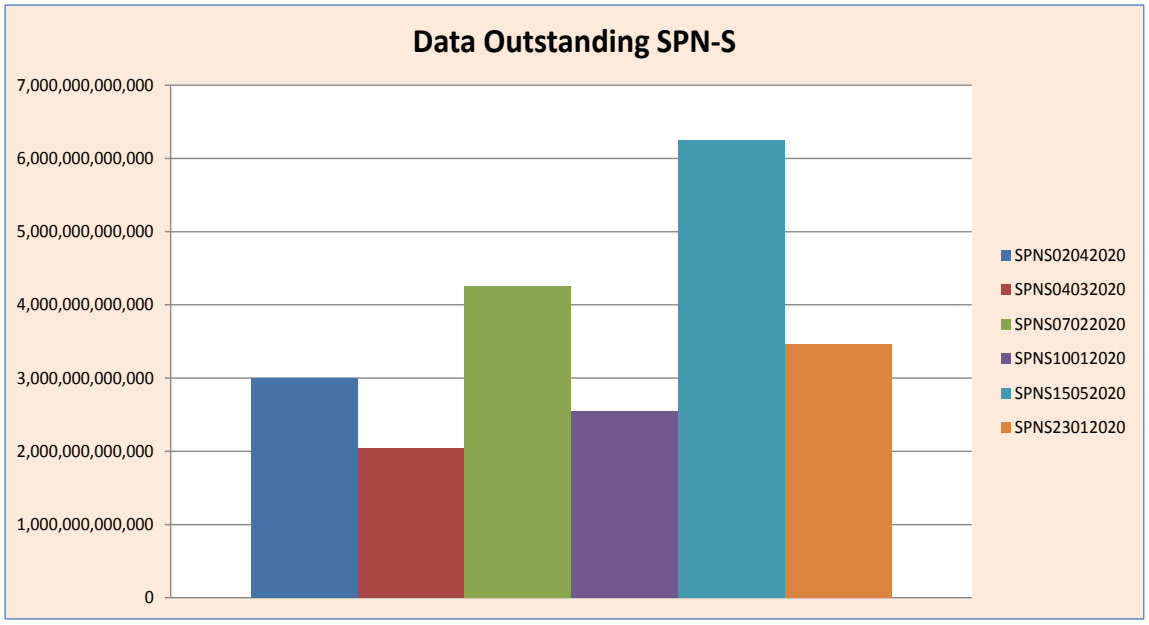
j. *Surat* Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2019, terdapat 6 seri SPN-S yang beredar dengan total *outstanding* sebesar Rp21.560.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada Tahun 2020.

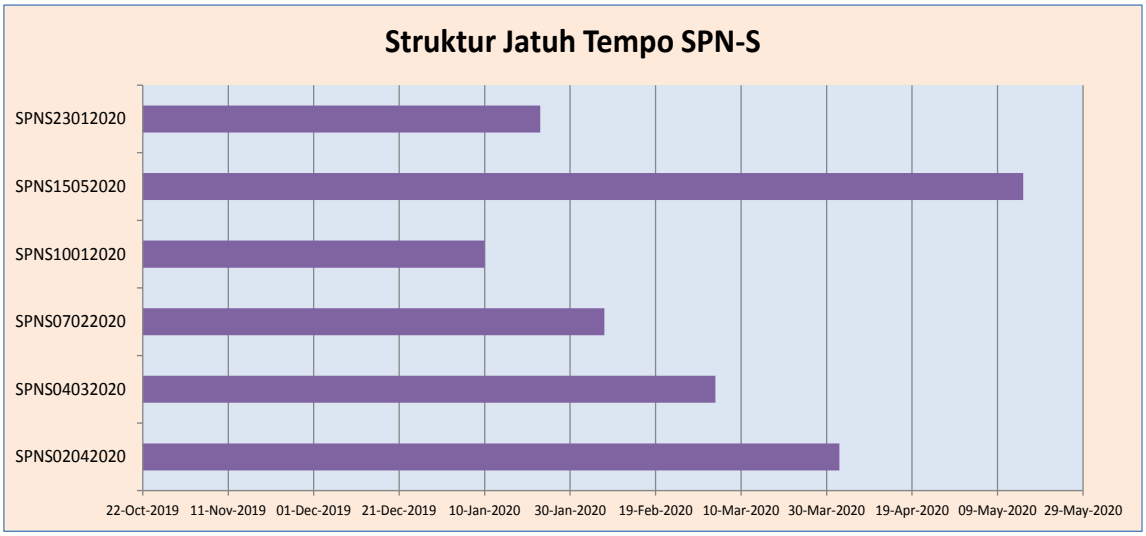
Tabel 24. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2019

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SPNS02042020	02-Apr-2020	-	IDR	3,000,000,000,000
2	SPNS04032020	04-Mar-2020	-	IDR	2,050,000,000,000
3	SPNS07022020	07-Feb-2020	-	IDR	4,250,000,000,000
4	SPNS10012020	10-Jan-2020	-	IDR	2,550,000,000,000
5	SPNS15052020	15-May-2020	-	IDR	6,250,000,000,000
6	SPNS23012020	23-Jan-2020	-	IDR	3,460,000,000,000
Total				**IDR**	**21,560,000,000,000**

Grafik 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2019



Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2019



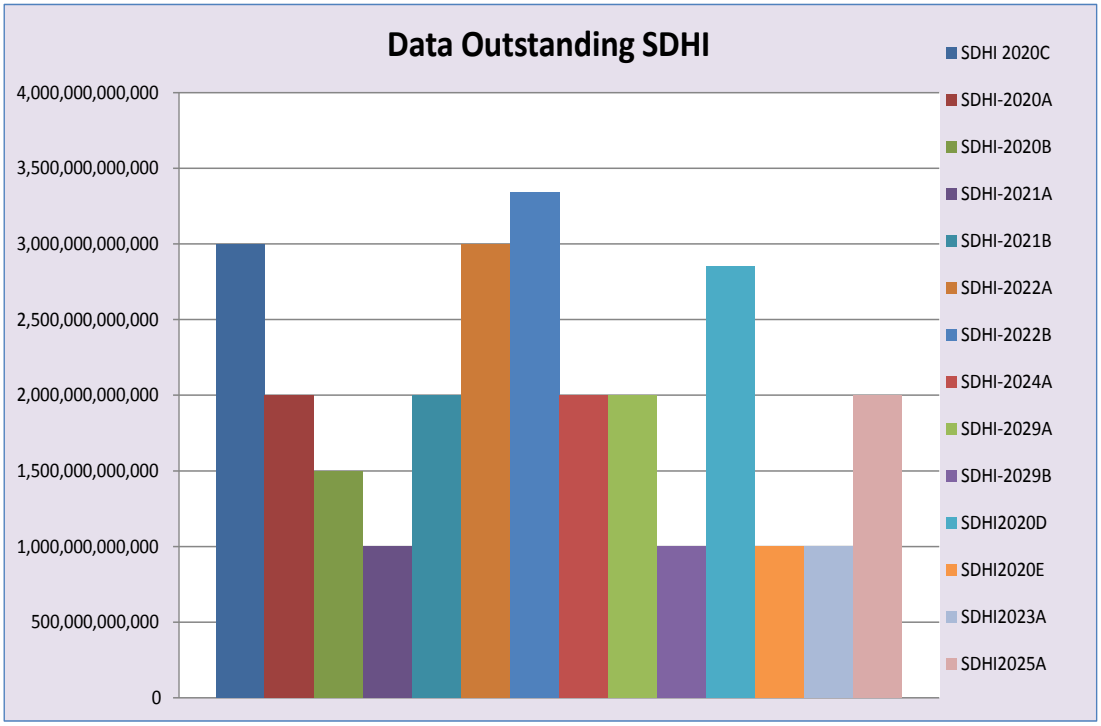
k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada akhir Tahun 2019, terdapat 14 seri SDHI dengan nilai *outstanding* Rp12.355.000.000.000,-.

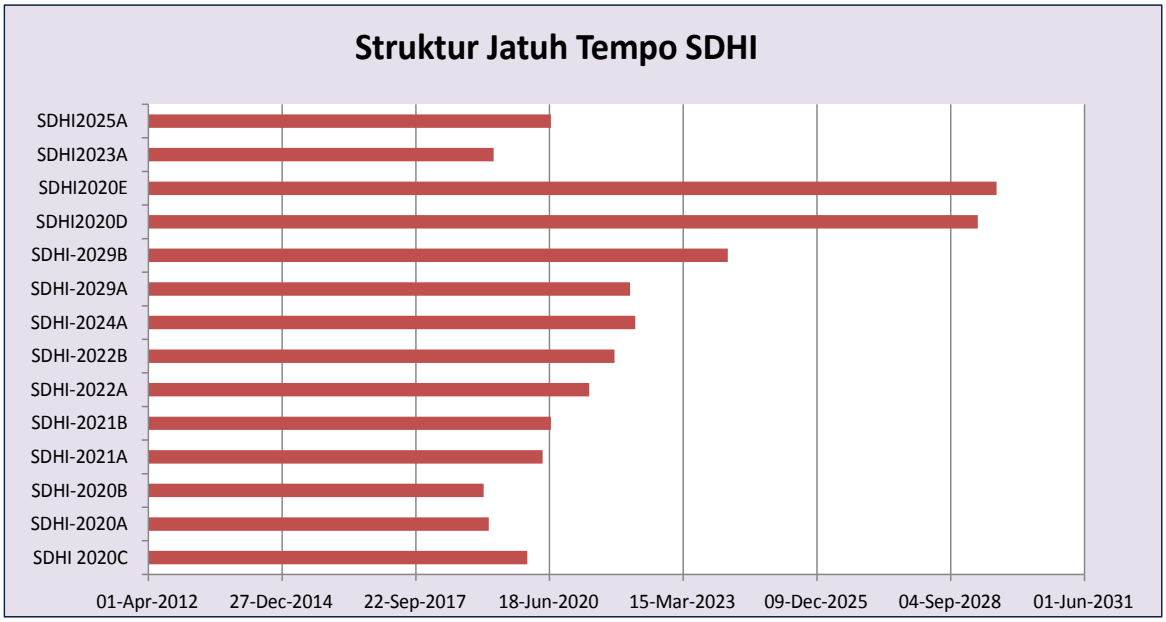
Tabel 25. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2019

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SDHI 2020C	03-Jan-2020	8.30000%	IDR	3,000,000,000,000
2	SDHI-2020A	27-Apr-2020	5.79000%	IDR	1,500,000,000,000
3	SDHI-2020B	28-Jun-2020	6.20000%	IDR	1,000,000,000,000
4	SDHI-2021A	11-Apr-2021	8.00000%	IDR	2,000,000,000,000
5	SDHI-2021B	17-Oct-2021	7.16000%	IDR	3,000,000,000,000
6	SDHI-2022A	21-Mar-2022	5.91000%	IDR	3,342,000,000,000
7	SDHI-2022B	11-Feb-2022	8.75000%	IDR	2,000,000,000,000
8	SDHI-2024A	11-Feb-2024	9.04000%	IDR	2,000,000,000,000
9	SDHI-2029A	25-Mar-2029	8.43000%	IDR	1,000,000,000,000
10	SDHI-2029B	13-Aug-2029	8.62000%	IDR	2,855,000,000,000
11	SDHI2020D	29-Jun-2020	8.20000%	IDR	1,000,000,000,000
12	SDHI2020E	21-Mar-2020	7.14000%	IDR	2,000,000,000,000
13	SDHI2023A	04-Nov-2023	8.82000%	IDR	1,500,000,000,000
14	SDHI2025A	08-Jul-2025	8.30000%	IDR	2,000,000,000,000
Total				IDR	12,355,000,000,000

Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2019



Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2019



II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun,

dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2019, terdapat 71 seri SBN valas dengan 44 seri memiliki denominasi USD (termasuk SBN domestik yang berdenominasi valas), 18 seri dengan denominasi JP¥ dan 9 Seri berdenominasi EURO. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 26 berikut.

Tabel 26. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2019

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
1	RI0035	12-Oct-2035	8.50000%	USD	1,600,000,000
2	RI0037	17-Feb-2037	6.62500%	USD	1,500,000,000
3	RI0038	17-Jan-2038	7.75000%	USD	2,000,000,000
4	RI0122	08-Jan-2022	3.70000%	USD	750,000,000
5	RI0123	11-Jan-2023	2.95000%	USD	1,000,000,000
6	RI0124	15-Jan-2024	5.87500%	USD	2,000,000,000
7	RI0125	15-Jan-2025	4.12500%	USD	2,000,000,000
8	RI0126	08-Jan-2026	4.75000%	USD	2,250,000,000
9	RI0127	08-Jan-2027	4.35000%	USD	1,250,000,000
10	RI0128	11-Jan-2028	3.50000%	USD	1,250,000,000
11	RI0142	17-Jan-2042	5.25000%	USD	2,250,000,000
12	RI0144	15-Jan-2044	6.75000%	USD	2,000,000,000
13	RI0145	15-Jan-2045	5.12500%	USD	2,000,000,000
14	RI0146	08-Jan-2046	5.95000%	USD	1,250,000,000
15	RI0147	08-Jan-2047	5.25000%	USD	1,500,000,000
16	RI0148	11-Jan-2048	4.35000%	USD	1,750,000,000
17	RI0224	11-Feb-2024	4.45000%	USD	750,000,000
18	RI0229	11-Feb-2029	4.75000%	USD	1,250,000,000
19	RI0249	11-Feb-2049	5.35000%	USD	1,000,000,000
20	RI0320	13-Mar-2020	5.87500%	USD	2,000,000,000
21	RI0422	25-Apr-2022	3.75000%	USD	2,000,000,000
22	RI0423	15-Apr-2023	3.37500%	USD	1,500,000,000
23	RI0428	24-Apr-2028	4.10000%	USD	1,000,000,000
24	RI0443	15-Apr-2043	4.62500%	USD	1,500,000,000
25	RI0521	05-May-2021	4.87500%	USD	2,500,000,000
26	RI0727	18-Jul-2027	3.85000%	USD	1,000,000,000
27	RI0747	18-Jul-2047	4.75000%	USD	1,000,000,000
28	RI0929	18-Sep-2029	3.40000%	USD	750,000,000
29	RI1023	17-Oct-2023	5.37500%	USD	1,000,000,000
30	RI1049	30-Oct-2049	3.70000%	USD	1,000,000,000
31	USDFR0002	24-Jun-2026	4.05000%	USD	200,000,000
	Total Fixed Coupon			**USD**	**44,800,000,000**
	*Total US Dollar Denominated *)*			**IDR**	**622,765,248,000,000**
Japan Yen Denominated					
Fixed Coupon					
32	RIJPY0521	31-May-2021	0.67000%	JPY	49,000,000,000
33	RIJPY0522	20-May-2022	0.54000%	JPY	75,700,000,000
34	RIJPY0523	31-May-2023	0.92000%	JPY	39,000,000,000
35	RIJPY0524	22-May-2024	0.83000%	JPY	80,200,000,000
36	RIJPY0525	30-May-2025	1.07000%	JPY	3,500,000,000
37	RIJPY0526	22-May-2026	0.96000%	JPY	4,500,000,000
38	RIJPY0528	31-May-2028	1.27000%	JPY	8,500,000,000
39	RIJPY0529	22-May-2029	1.17000%	JPY	7,600,000,000
40	RIJPY0534	22-May-2034	1.55000%	JPY	4,000,000,000
41	RIJPY0539	20-May-2039	1.79000%	JPY	5,000,000,000
42	RIJPY0620	08-Jun-2020	0.65000%	JPY	40,000,000,000
43	RIJPY0621	21-Jun-2021	1.16000%	JPY	38,000,000,000
44	RIJPY0622	08-Jun-2022	0.89000%	JPY	50,000,000,000
45	RIJPY0624	07-Jun-2024	1.04000%	JPY	10,000,000,000
46	RIJPY0820	13-Aug-2020	1.38000%	JPY	22,500,000,000
47	RIJPY0825	13-Aug-2025	0.91000%	JPY	55,000,000,000
48	RIJPY1120	12-Nov-2020	1.60000%	JPY	60,000,000,000
49	RIJPY1122	22-Nov-2022	1.13000%	JPY	60,000,000,000
	Total Fixed Coupon			**JPY**	**612,500,000,000**
	*Total Japan Yen Denominated *)*			**IDR**	**78,379,542,500,000**
Euro Denominated					
Fixed Coupon					
50	RIEUR0425	24-Apr-2025	1.75000%	EUR	1,000,000,000
51	RIEUR0623	14-Jun-2023	2.62500%	EUR	1,500,000,000
52	RIEUR0628	14-Jun-2028	3.75000%	EUR	1,500,000,000
53	RIEUR0721	08-Jul-2021	2.87500%	EUR	1,000,000,000
54	RIEUR0724	18-Jul-2024	2.15000%	EUR	1,000,000,000
55	RIEUR0725	30-Jul-2025	3.37500%	EUR	1,250,000,000
56	RIEUR0926	18-Sep-2026	1.45000%	EUR	750,000,000
57	RIEUR1031	30-Oct-2031	1.40000%	EUR	1,000,000,000
58	EURFRNT0001	26-Apr-2020	0.90000%	EUR	50,000,000
	Total Fixed Coupon			**EUR**	**9,050,000,000**
	*Total Euro Denominated *)*			**IDR**	**141,076,830,000,000**
	TOTAL GOVERNMENT DEBT SECURITIES (A)			**IDR**	**842,221,620,500,000**
B. GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
59	SNI0229	20-Feb-2029	4.45000%	USD	1,250,000,000
60	SNI0322	29-Mar-2022	3.40000%	USD	1,000,000,000
61	SNI0323	01-Mar-2023	3.75000%	USD	1,250,000,000
62	SNI0327	29-Mar-2027	4.15000%	USD	2,000,000,000
63	SNI0328	01-Mar-2028	4.40000%	USD	1,750,000,000
64	SNI0824	20-Aug-2024	3.90000%	USD	750,000,000
65	SNI21	29-Mar-2021	3.40000%	USD	750,000,000
66	SNI22	21-Nov-2022	3.30000%	USD	1,000,000,000
67	SNI24	10-Sep-2024	4.35000%	USD	1,500,000,000
68	SNI25	28-May-2025	4.32500%	USD	2,000,000,000
69	SNI26	29-Mar-2026	4.55000%	USD	1,750,000,000
70	USDPBS001	15-Nov-2021	4.05000%	USD	100,000,000
71	USDPBS002	11-Jan-2022	4.00000%	USD	100,000,000
	Total Fixed Coupon			**USD**	**15,200,000,000**
	*Total US Dollar Denominated *)*			**IDR**	**211,295,352,000,000**
	TOTAL GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES (B)			**IDR**	**211,295,352,000,000**
GRAND TOTAL (A + B)				**IDR**	**1,053,516,972,500,000**

Notes:

1) Assumed exchange rate for conversion (IDR/USD) is **13,901.01**
   Assumed exchange rate for conversion (IDR/JPY) is **127.9666**
   Assumed exchange rate for conversion (IDR/EUR) is **15,588.60**
2) Non-tradable Government Debt Securities are held by Bank Indonesia.
3) These bonds were issued for guarantee program financing.
4) This bond was issued to replace SU-001 and SU-003. Its effective date is August 1, 2003.

III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2019

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 25.

Tabel 27. Mutasi Principle *Outstanding* SBN Tahun 2019

Saldo awal Th 2019 *(Original Currency)*	Mutasi 2019		Saldo Akhir tahun 2019 *(Original Currency)*	Saldo Akhir 2019 (Rupiah)
	Penerimaan	Pembayaran		
a	b	c	d	e
IDR 2,601,633,840,762,320.00	IDR 761,658,134,000,000.00	IDR 402,005,177,730,386.00	IDR 2,961,286,797,031,930.00	2,961,286,797,031,930.00
USD 56,650,000,000.00	USD 6,850,000,000.00	USD 3,500,000,000.00	USD 60,000,000,000.00	834,060,600,000,000.00
JPY 532,500,000,000.00	JPY 177,000,000,000.00	JPY 97,000,000,000.00	JPY 612,500,000,000.00	78,379,542,500,000.00
EUR 7,300,000,000.00	EUR 1,750,000,000.00	0.00	EUR 9,050,000,000.00	141,076,830,000,000.00
Jumlah				**4,014,803,769,531,930.00**

Keterangan :

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2018 USD = 14.481,00 JPY = 131,12 EUR = 16,559.75

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2019 USD = 13.901,01 JPY = 127,97 EUR = 15.588,60

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.



Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat